Energi Tanpa Henti,
Terus Tangguh
Menatap Masa Depan

Unstoppable Energy,
Resiliently Facing the Future



Laporan Tahunan | Annual Report
2024

Metode Penyusunan dan Tentang Laporan Tahunan

Preparation Method and About the Annual Report

Laporan Tahunan 2024 PT Bukit Asam Tbk disusun berdasarkan pada Anggaran Dasar Perusahaan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/ SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam rangka menerapkan praktik terbaik prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik GCG, penyampaian laporan ini juga mengacu pada pedoman praktik tata kelola yang berlaku di lingkup nasional, yaitu Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) pada tahun 2021.

Laporan Tahunan ini terdiri dari beberapa bab, meliputi: Ikhtisar Kinerja, Laporan Manajemen, Profil Perusahaan, Analisis dan Pembahasan Manajemen, Tata Kelola Perusahaan, serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Penyebutan satuan mata uang "Rupiah", "Rp", atau "IDR" merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan "Dollar AS" atau "USD" merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Penyebutan kata "PTBA", "Bukit Asam", "Perusahaan", dan "Perseroan" didefinisikan sebagai PT Bukit Asam Tbk yang menjalankan bisnis tambang batu bara dan lainnya.

Laporan Tahunan disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di portal resmi PT Bukit Asam Tbk https://www.ptba.co.id.

PT Bukit Asam Tbk 2024 Annual Report was issued based on the Company's Articles of Association; Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/ MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of StateOwned Enterprises, Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Public Companies; and Financial Services Authority Circular No. 16/ SEOJK.04/2021 regarding the form and content of the Annual Report of Public Companies.

In order to apply the best practices of Good Corporate Governance (GCG) principles, the submission of this report also refers to governance practice guidelines that apply at the national scope, namely the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) issued by the Committee National Governance Policy (KNKG) in 2021.

This Annual Report consists of several chapters, including: Performance Highlights, Management Report, Company Profile, Management Discussion and Analysis, Corporate Governance, as well as Social and Environmental Responsibility.

The mention of currency unit "Rupiah", "Rp", or "IDR" refers to the official currency of the Republic of Indonesia, while "US Dollar" or "USD" refers to the official currency of the United States. All financial information is presented in Rupiah in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Mention of the word "PTBA", "Bukit Asam, "Company", and "Companies" is defined as PT Bukit Asam Tbk, which engaged in coal mining business and other businesses.

This Annual Report is presented in two languages, namely Indonesian and English, using an easy-to-read font type and size with good-quality printing. This Annual Report can be accessed and downloaded on the official website of PT Bukit Asam Tbk https://www.ptba.co.id.

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimers

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan berdasarkan asumsi yang dibuat oleh manajemen PTBA, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan- pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang PTBA serta lingkungan bisnis dimana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Pernyataan yang terdapat di Laporan Tahunan ini bukan menjadi jaminan bahwa kinerja di masa yang akan datang akan persis sama, karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kendali Perusahaan.

This Annual Report contains of financial statements, operating results, projections, plans, strategies, policies, and objectives of the Company. These are considered forwardlooking statements based on assumptions made by PTBA management, excluding historical matters. These statements involve prospective risks, uncertainties, and may cause actual developments in materially different from those reported.

The prospective statements in this Annual Report are based on assumptions about the current and future conditions of PTBA and the business environment in which the Company operates. These statements do not guarantee that future performance will mirror the projections, as they may be impacted by factors beyond the Company's control.

Penjelasan Tema
Theme Explanation



Energi Tanpa Henti, Terus Tangguh Menatap Masa Depan

Unstoppable Energy, Resiliently Facing the Future

Sejalan dengan transformasi yang dijalankan, PTBA terus beradaptasi dan berinovasi serta melakukan berbagai terobosan baru untuk mencapai visi menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. PTBA juga mengukuhkan komitmen untuk menghadirkan energi tanpa henti untuk mendukung ketahanan energi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu wujud komitmen PTBA adalah memastikan pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya ketenagalistrikan, yang termasuk ke dalam pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO) batu bara yang ditetapkan pemerintah.

PTBA juga Berupaya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong hilirisasi batu bara. Kerja sama dengan berbagai pihak dijalin untuk mendorong peningkatan nilai tambah batu bara. Salah satunya melalui kolaborasi dengan Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN), Perusahaan tercatat sebagai yang pertama di dunia yang mengkonversikan batu bara menjadi *Artificial Graphite* dan *Anoda Sheet* sebagai bahan baku baterai *li-ion.* Selain itu, bersama UPN Veteran Yogyakarta, Perusahaan juga mengembangkan biomassa dari kaliandra merah menjadi *wood pellet* yang dapat digunakan sebagai campuran bahan bakar PLTU. Melalui berbagai kolaborasi serta penelitian dan pengembangan tersebut diharapkan tercipta inovasi serta peluang diversifikasi yang mempertimbangkan skala keekonomian, sehingga hilirisasi batu bara dapat terwujud.

PTBA mengembangkan bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT), salah satunya dengan membangun PLTS. Saat ini, Perusahaan telah memiliki beberapa PLTS, melalui salah satu anak perusahaannya, PT Bukit Energi Investama, antara lain PLTS Jalan Tol Bali Mandara, PLTS di Bandara Soekarno Hatta, dan beberapa PLTS yang ditunjukkan untuk membantu sektor pertanian. Pengembangan PLTS juga menjadi bagian dari komitmen Perusahaan untuk menghadirkan energi tanpa henti.

In line with the transformation carried out, PTBA continues to adapt and innovate and make various breakthroughs to achieve the vision of becoming a world-class energy company that cares about the environment. PTBA also emphasizes its commitment to providing non-stop energy to support national energy security and national economic growth.

The manifestation of PTBA's commitment is to ensure the supply of coal for domestic needs, especially electricity, including the fulfillment of the Domestic Market Obligation (DMO) for coal set by the government.

PTBA also seeks to support the government policies in encouraging coal downstreaming. Cooperation with various parties is established to encourage increased added value of coal. Through collaboration with the National Research & Innovation Agency (BRIN), the Company is recorded as the first in the world to convert coal into artificial graphite and Anode Sheet as raw materials for li-ion batteries. In addition, together with UPN Veteran Yogyakarta, the Company is also developing biomass from red calliandra into wood pellets as a mixture of PLTU fuel. These various collaborations and research and development are expected to bring innovations and diversification opportunities while considering economic scale, in order to realize coal downstreaming.

PTBA is developing a New Renewable Energy business, one of which is by building Solar Panel Power Plant (SPPP). Currently, the Company has several SPPP, through one of its subsidiaries, PT Bukit Energi Investama, including the Bali Mandara Toll Road SPPP, SPPP at Soekarno Hatta Airport, and several SPPP intended to help the agricultural sector. The development of SPPP is also part of the Company's commitment to providing non-stop energy.

Kesinambungan Tema
Theme Continuity

2023



Energi Bersih untuk Masa Depan yang Tangguh
Clean Energy for a Resilient Future

Bagi Perusahaan, pengembangan bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mewujudkan visi dan misi Perusahaan. PTBA juga menargetkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan menjadi perusahaan berbasis bisnis energi pada tahun 2030, dengan target pendapatan dari sektor energi sebesar 30%. Untuk itu, Perusahaan telah menjalin kerja sama dengan mitra strategis untuk meningkatkan daya saing dan menurunkan risiko investasi.

For the Company, the development of New Renewable Energy (NRE) business is part of a long-term strategy to realize the Company's vision and mission. PTBA also targets sustainable business growth and will become an energy business-based company by 2030, with a revenue target from the energy sector of 30%. To that end, the Company has teamed up with strategic partners to increase competitiveness and reduce investment risk.

2022



Memaksimalkan Inovasi untuk Ketahanan Energi Nasional
Maximizing Innovation for National Energy Security

Sebagai anak perusahaan BUMN, PTBA berperan penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Pasokan batu bara PTBA mayoritas ditunjukkan kepada pasar domestik, khususnya kepada pembangkit listrik, guna memenuhi kebutuhan energi nasional. Tidak hanya di sektor batu bara saja, sejalan dengan transformasi bisnis PTBA, Perusahaan juga membidik kesempatan bisnis baru, yakni memasuki bisnis energi baru dan terbarukan. Sampai dengan saat ini, PTBA telah berhasil mengembangkan 2 (dua) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Masuknya PTBA ke bisnis energi baru dan terbarukan juga menandakan peran penting PTBA dalam mendukung ketahanan energi nasional.

As SOE subsidiary, PTBA plays an important role in supporting national energy security. The majority of PTBA's coal supply is intended for domestic market, particularly for power plants to meet national energy needs. Not only in the coal sector, in line with PTBA's business transformation, the Company is also targeting new business opportunities by entering the new and renewable energy business. To date, PTBA has succeeded in developing 2 (two) Solar Panel Power Plant (SPPP). Bukit Asam's entry into the new and renewable energy business also signifies Bukit Asam's important role in supporting national energy security.

2021



Ketahanan dan Keberlanjutan
Resilience and Sustainability

Di tengah kondisi yang sangat menantang sebagai imbas dari pandemi COVID-19, Perusahaan berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja yang sangat baik. Konsistensi dalam mengembangkan *operations excellence* menjadi faktor yang sangat penting dalam mengantarkan Perusahaan mewujudkan pencapaian tersebut. Upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar dapat memenuhi kebutuhan pasar, serta inovasi dan efisiensi terus dilakukan. Sejalan dengan itu, Perusahaan juga terus melanjutkan proyek-proyek hilirisasi batu bara yang akan menjadi masa depan Perusahaan.

Amidst a truly challenging condition as an impact of COVID-19 pandemic the Company managed to post good performance growth. Consistency in developing operations excellence became a crucial factor in helping the Company accomplish such a feat. Efforts to optimize existing resources to meet market requirements and innovation as well as effciency are continuosly implemented. In line with it, the Company also continues on with coal downstreaming projects that should be the future of the Company.

Daftar Isi
Table of Contents

2 Metode Penyusunan dan Tentang Laporan Tahunan
Preparation Method and About the Annual Report
3 Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimers
4 Penjelasan Tema
Theme Explanation
5 Kesinambungan Tema
Theme Continuity
6 Daftar Isi
Table of Contents
8 Ekosistem Bisnis PTBA
PTBA Business Ecosystem
10 Pencapaian Terbaik
Best Achievements
16 Jejak Langkah
Milestones

Ikhtisar Kinerja
Performance Highlight

20 Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Highlights
26 Ikhtisar Operasional
Operational Highlights
28 Ikhtisar Saham
Shares Highlights
30 Penghentian Sementara Perdagangan Saham dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham
Information on Suspension and/or Delisting
30 Aksi Korporasi
Corporate Action
31 Dividen Saham
Share Dividends
32 Informasi Tentang Obligasi, Sukuk, Atau Obligasi Konversi
Information on Bonds, Sharia Bonds, or Convertible Bonds
32 Informasi Sumber Pendanaan Lainnya
Information on Other Funding
33 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certification
39 Sertifikasi yang Masih Berlaku pada Tahun 2024
2024 Valid Certification
41 Peristiwa Penting
Important Highlights

Laporan Manajemen
Management Report

50 Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners
68 Laporan Direksi
Report of the Board of Directors
84 Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Bukit Asam Tbk
Statement of Members of Board of Commissioners and Board of Directors on Responsibility for 2024 Annual Report of PT Bukit Asam Tbk

Profil Perusahaan
Company Profile

88 Identitas dan Informasi Umum Perusahaan
Company Identity and General Information
90 Riwayat Singkat Perusahaan
Company Brief History
93 Logo dan Moto Perusahaan
Company's Logo and Motto
94 Visi dan Misi Perusahaan
Company Vision and Mission
95 Hierarki Tata Nilai Bukit Asam
Bukit Asam Hierarchy of Values
99 Bidang Usaha
Line of Business
107 Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi
Business Network and Operational Area
111 Keanggotaan Dalam Asosiasi
Membership in Associations
112 Struktur Organisasi di Bawah Direksi
Organizational Structure Under the Board of Directors
114 Struktur Organisasi di Bawah Dewan Komisaris
Organizational Structure Under the Board of Commissioners
116 Direksi
Board of Directors
120 Profil Direksi
Board of Directors Profile
126 Dewan Komisaris
Board of Commissioners
128 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile
134 Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Setelah Tahun Buku Berakhir
Changes in the Composition of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners after the Fiscal Year Ended
135 Profil Pejabat Eksekutif
Executive Management Profile
137 Sumber Daya Manusia
Human Capital
146 Demografi Karyawan
Employess Demographice
152 Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Structure and Composition
160 Informasi Pemegang Saham Utama/PengendaliHingga Pemilik Akhir
Information on Major/Controlling Shareholders to Ultimate-end Owner
164 Daftar Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Ventura Bersama
List of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures
168 Struktur Grup
Group Structure
170 Alamat Kantor Pusat, Cabang, Perwakilan, Entitas Anak, Entitas Ventura Bersama, dan Entitas Asosiasi
Addresses of Head Office, Branches, Representatives, Subsidiaries, Joint Ventures, and Associates
174 Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham
Chronology of Share Issuance and/or Listing
176 Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities Issuance and/or Listing
176 Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Public Accountant and Public Accountant Firm
177 Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
Supporting Institutions and/or Professionals
182 Informasi pada Situs Web Perusahaan
Information on the Company Website
186 Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Pejabat Eksekutif
Education and/or Training of Board of Commisioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Executive

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

200 Tinjauan Perekonomian dan Industri
Economic and Industrial Overview
204 Kebijakan Strategis Perusahaan
Company Strategic Policy
212 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operational Overview Per Business Segment
221 Tinjauan Keuangan
Financial Overview
242 Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang
Ability To Pay Debt and Receivable Collectibility Rate
246 Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal
Capital Structure and Management Policy on Capital Structure
248 Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments for Capital Goods Investment
249 Realisasi Investasi Barang Modal
Realization of Capital Goods Investment

249 Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts that Occurred After the Accountant's Report Date

250 Perbandingan antara Target dan Realisasi serta Proyeksi Untuk Satu Tahun ke Depan
Comparison between Targets and Realizations and Projections for the Next One Year

253 Kebijakan dan Pembagian Dividen
Dividend Policy and Distribution

255 Kontribusi kepada Pemerintah
Contribution to Government

256 Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)
Employee and/or Management Stock Option Plan (ESOP/MSOP)

256 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of the Use of Proceeds from Public Offering

257 Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/ Modal
Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger/ Consolidation, Acquisition, Debt/ Capital Restructuring

258 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi
Information on Material Transactions Containing Conflicts Of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties/Related Parties

269 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perusahaan
Changes in Legislation that Have Significant Impact on the Company

270 Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan
Changes in Accounting Policies and Its Impact on the Company

271 Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information

273 Prospek Usaha dan Strategi ke Depan
Business Prospects and Future Strategies

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

280 Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Commitment Implementation of Good Corporate Governance

288 Struktur Tata Kelola
Governance Structure

291 Peningkatan Kualitas Penerapan GCG Secara Berkelanjutan
Sustainable Improvement of the Quality of GCG Implementation

300 Monitoring Penerapan GCG
GCG Implementation Monitoring

319 Peningkatan Kualitas Implementasi GCG
Improving the Quality of GCG Implementation

320 Peta Jalan Tata Kelola
GCG Roadmap

323 Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham
Shareholders and General Meeting of Shareholders

351 Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

394 Direksi
Board of Directors

426 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
Performance Appraisal of the Board of Commissioners and the Board of Directors

450 Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
Nomination and Remuneration for the Board of Directors and Commissioners

464 Hubungan Afiliasi antara Direksi dan Dewan Komisaris
Affiliations among the Board of Directors and Board of Commissioners

465 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
The Board of Commissioners and The Board of Directors Composition Diversity

469 Organ Pendukung Dewan Komisaris
Supporting Organs of the Board of Commissioners

474 Komite di Bawah Dewan Komisaris
Committee Under the Board of Commissioners

536 Unit Pendukung Direksi
Board of Directors Supporting Unit

551 Satuan Kerja *Internal Audit*
Internal Audit Work Unit

570 Satuan Kerja *Corporate Management System & Performance*
Corporate Management System & Performance Work Unit

580 Akuntan Publik
Public Accountant

587 Manajemen Risiko
Risk Management

616 Perkara Hukum
Lawsuit

621 Kebijakan Pengungkapan Informasi
Information Disclosure Policy

622 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Company Information and Data Access

623 Kode Etik
Code of Conducts

627 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

636 Kebijakan *Insider Trading*
Insider Trading Policy

637 Kebijakan Antikorupsi
Anti-Corruption Policy

639 Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement Policy

643 Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control

647 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
State Officials Wealth Report

648 Benturan Kepentingan
Conflict of Interest

649 Penyediaan Dana untuk Kegiatan Politik
Provision of Funds for Political Activities

649 Pemenuhan Hak terhadap Kreditor
Fulfillment of Rights Against Creditors

650 Transparansi Praktik *Bad Governance*
Transparency of Bad Governance Practices

652 Laporan Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Report

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Corporate Social Responsibility

656 Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan
Sustainable Performance Highlights

661 Inisiatif Eksternal Terkait *Sustainability*
External Initiatives related to Sustainability

662 Informasi Lebih Lanjut
Further Information

Referensi POJK, SEOJK, dan Kriteria ARA, dan ACGS
Reference of POJK, SEOJK, ARA, and ACGS

666 Referensi SEOJK Nomor 16/ SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 Reference: Annual Report of Issuer or Public Company

682 Referensi Kriteria Annual Report Award (ARA)
Annual Report Award (ARA) Criteria Reference

699 Indeks Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI)
General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) Index

729 Indeks Asean Corporate Governace Scorecard (ACGS)
Asean Corporate Governance Scorecard Index (ACGS)

Laporan Keuangan Konsolidasian
Consolidated Financial Statement

733 Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024
Consolidated Financial Statement for Financial Year 2024

Ekosistem Bisnis PTBA
PTBA Business Ecosystem

Pertambangan dan Jasa Pertambangan
Mining and Mining Services



BukitAsam
Banko PT Bukit Asam Banko
INTERNASIONAL PRIMA COAL
ITBS

Logistik
Logistics



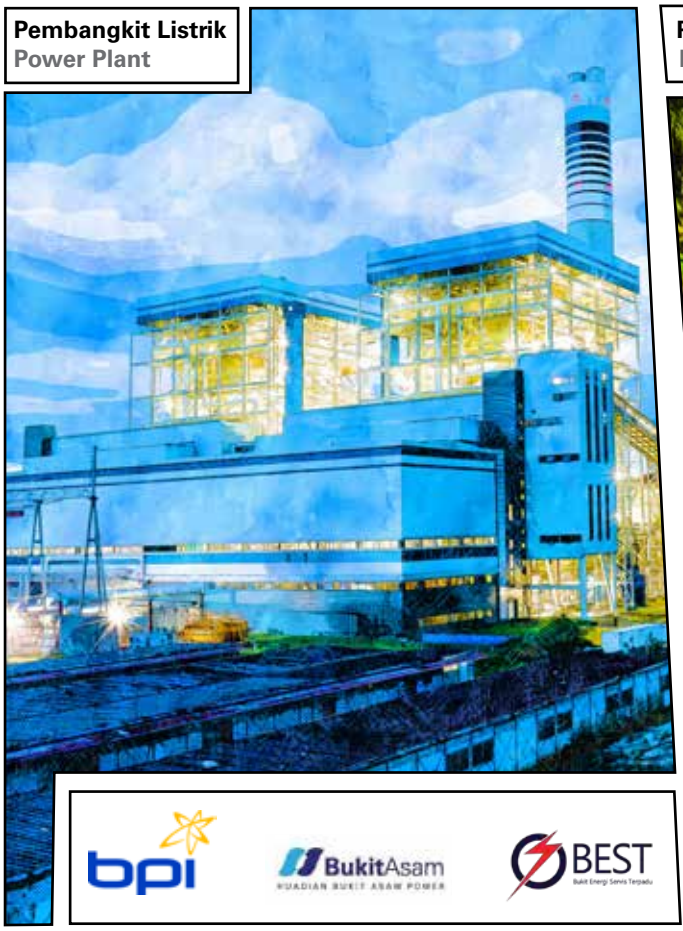
bukit prima bahari
PELABUHAN
BUKITASAM TRANSPACIFIC RAILWAYS
PT. PENAJAM INTERNASIONAL TERMINAL

Perdagangan Batu Bara
Coal Trading



bap

Pembangkit Listrik
Power Plant



bpi
BukitAsam
BEST

Perkebunan
Plantation



BSP

Investasi
Investment



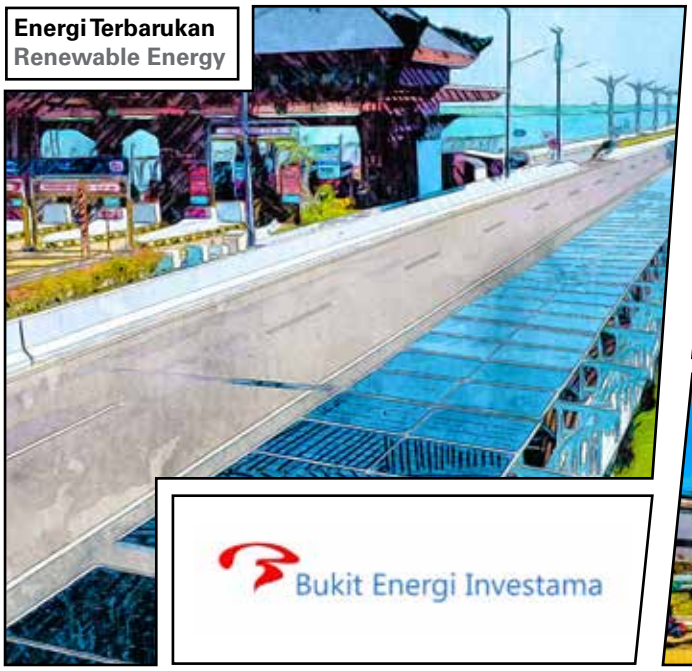
BMI

Lainnya
Others



BA Medika
Sinergi

Energi Terbarukan
Renewable Energy



Bukit Energi Investama

Gas



BukitAsamMetanaOmbilin

Pencapaian Terbaik
Best Achievements



Kinerja Operasional
Operational Performance

Produksi dan Pembelian Batu Bara
Coal Production and Purchases

43,28 Juta ton Million Tons

↑ 3% dari tahun 2023
3% from 2023

Angkutan Batu Bara
Coal Transportation

38,17 Juta ton Million Tons

↑ 18% dari tahun 2023
18% from 2023

Penjualan Batu Bara
Coal Sales

42,89 Juta ton Million Tons

↑ 16% dari tahun 2023
16% from 2023

Nisbah Kupas
Stripping Ratio

6,23 Kali Times

≈ Relatif sama dengan tahun 2023
Relatively the same as in 2023



Kinerja Keuangan
Financial Performance

Pendapatan
Revenue

Rp42,76 Triliun Trillion

11% dari tahun 2023
11% from 2023

Laba Bersih
Net Profit

Rp5,10 Triliun Trillion

16% dari tahun 2023
16% from 2023

Total Aset
Total Assets

Rp41,79 Triliun Trillion

8% dari tahun 2023
8% from 2023

Total Ekuitas
Total Equity

Rp22,64 Triliun Trillion

5% dari tahun 2023
5% from 2023

Pengembangan Usaha
Busines Development

Coalite to Artificial Graphite & Anode Sheet

Soft Launching projek konservasi batu bara menjadi *Artificial Graphite & Anode Sheet* pada tanggal 15 Juli 2024 di Tanjung Enim

Soft Launching of coal conservation project into Artificial Graphite and Anode Sheet on July 15, 2024, in Tanjung Enim



Wood Pellet

PTBA mengembangkan biomassa dari tanaman Kaliandra Merah dengan peluncuran *Pilot Plant* (Pabrik Percontohan) *Wood Pellet* di Tanjung Enim pada 24 Oktober 2024.

PTBA develops biomass from Red Kaliandra plants with the launch of the Wood Pellet Pilot Plant in Tanjung Enim on October 24, 2024.



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Annual Report Award

Juara II Annual Report Award Atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada kategori Go Publik Non-Keuangan.

2nd Place at the Annual Report Award on 2023 Annual Report in the Non-Financial Go Public category



Corporate Governance Perception Index (CGPI)

PTBA meraih predikat The Most Trusted Company dengan nilai 91,04 yang diselenggarakan oleh *The Institute for Corporate Governance* (IICG) oleh Majalah SWA

PTBA won The Most Trusted Company predicate with a score of 91.04 held by The Institute for Corporate Governance (IICG) by SWA Magazine



Sertifikasi ISO 50001:2018 (Sistem Manajemen Energi)

ISO 50001:2018 Certification (Energy Management System)

Sertifikasi ini diberikan karena PTBA telah memenuhi standar dalam mengelola penggunaan energi dan mengukur kinerja energi secara berkelanjutan sebagai bukti komitmen kuat Perusahaan dalam mendukung pencapaian target *Net Zero Emission* pada 2060.

This certification was given to PTBA for meeting the standards in managing energy use and measuring energy performance sustainably as evidence of the Company's strong commitment to supporting the achievement of the Net Zero Emission target by 2060.



Teknologi Informasi
Information Technology



PTBA terima dua penghargaan bergengsi pada ajang Top Digital Award Tahun 2024
PTBA won two prestigious awards at the 2024 Top Digital Awards

Penghargaan tersebut untuk kategori Top Digital Implementation-Level 5 Star dan Top Leader on Digital Implementation.

PTBA won awards for Top Digital Implementation-Level 5 Star and Top Leader on Digital Implementation.



Hak paten Corporate Information System and Enterprise Application (CISEA)
Corporate Information System and Enterprise Application (CISEA) patent

PTBA menerima sertifikat hak paten atas aplikasi CISEA (Corporate Information System and Enterprise Application) pada tanggal 15 Agustus 2024 di Jakarta. CISEA adalah *in-house super app* yang dikembangkan secara mandiri oleh PTBA untuk digitalisasi pertambangan.

PTBA received a patent certificate for the CISEA (Corporate Information System and Enterprise Application) application on August 15, 2024, in Jakarta. CISEA is an in-house super app independently developed by PTBA for mining digitalization.

Sumber Daya Manusia
Human Capital

Tema Strategis Transformasi Budaya PTBA 2024-2028
PTBA Strategic Theme of Cultural Transformation 2024-2028

PTBA BER AKSI

- **Akuntabel** Accountable
- **Keberlanjutan** Sustainability
- **Sinergi** Synergy
- **Inovasi** Innovation

Penguatan PTBA melalui "AKSI" yang merupakan pengejawantahan dari *core value* BUMN "AKHLAK" dan *Key Behaviour* MIND ID.

PTBA strengthening its culture through "AKSI" which is the embodiment of SOE's core value "AKHLAK" and Key Behavior MIND ID.

Peningkatan Jumlah Pegawai Perempuan
Increase in the Number of Female Employees



331 **orang** people

↑ 11% dari tahun 2023
11% from 2023

Peningkatan jumlah pegawai perempuan menunjukan komitmen PTBA untuk menguatkan kesetaraan gender di lingkungan perusahaan

The increase in the number of female employees shows PTBA's commitment to strengthening gender equality in the company environment.

Asia Sustainability Reporting Rating (ASSRAT)





PTBA kembali meraih predikat Platinum sebagai predikat tertinggi atas rating Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2023. Penghargaan ini merupakan Penghargaan ini diberikan oleh *National Center for Corporate Rating* (NCCR) selama dua tahun berturut-turut.

PTBA secured another Platinum predicate as the highest predicate for the 2023 Fiscal Year Sustainability Report rating. This award is given by the National Center for Corporate Rating (NCCR) for two consecutive years.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
Social and Environmental Responsibility (CSR)

Penyaluran Bantuan TJSL
Distribution of CSR Assistance

Rp65,98 Milliar / Billion

Pendanaan Unit Usaha Mikro
Micro Business Funding

Rp4,70 Milliar / Billion

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
Company Performance Rating Assessment Program (PROPER)



PTBA mendapatkan 2 (dua) PROPER Emas untuk unit Pertambang Tanjung Enim dan Pelabuhan Tarahan. Selain itu, PTBA juga, mendapatkan 1 (satu) PROPER Hijau untuk Unit Dermaga Kertapati. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kinerja lingkungan perusahaan.

PTBA received 2 (two) Gold PROPERs for the Tanjung Enim Mining and Tarahan Port units. In addition, PTBA also received 1 (one) Green PROPER for the Kertapati Barging Port Unit. This award was given by the Ministry of Environment and Forestry for the company's environmental performance.

Jejak Langkah
Milestones

1876
Tambang batu bara di Ombilin, Sumatra Barat, mulai beroperasi.

The coal mining in Ombilin, West Sumatra, started the operations.

1919
Pada zaman penjajahan Belanda, tambang terbuka di Air Laya, Tanjung Enim, Sumatera Selatan, mulai beroperasi.

In the Dutch colonial era, the open pit mine at Air Laya, Tanjung Enim, South Sumatra, started to operate.

1950
Menjadi Perusahaan Negara (PN) dengan nama PN Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA).

Becoming a State Enterprise (PN) under the name PN Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA).

1981
PN Tambang Batubara Bukit Asam berubah menjadi Perseroan dan namanya berganti menjadi PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) dan 2 Maret 1981 menjadi tanggal resmi berdirinya PTBA.

PN Tambang Batu Bara Bukit Asam changed to a Limited Liability Company and changed its name to PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero). March 2, 1981, marked the official date of PTBA's establishment.

1990
Perusahaan Batu Bara lainnya yang dimiliki oleh negara, yaitu Perusahaan Umum Tambang Batu Bara bergabung dengan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero). Sejak saat itulah, perusahaan ini menjadi perusahaan batu bara satu-satunya yang dimiliki negara.

Other state-owned coal enterprises, namely Perusahaan Umum Tambang Batu Bara merged with PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero). Since then, the merged companies became the only state-owned coal company.

2002
PTBA tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Jakarta dengan 25% sahamnya dimiliki publik. Harga saham pertama tercatat pada Rp575/lembar saham dengan kode saham PTBA.

PTBA is listed as a public company on the Jakarta Stock Exchange with 25% of its shares owned by the public. The first share price was recorded at Rp575/share with the ticker code PTBA.

2011
Harga saham PTBA mencapai harga tertinggi Rp27.000 per lembar saham.

PTBA's share price reached the highest price of Rp27,000 per share.

2013
Perubahan visi PTBA menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan.

Changes in PTBA's vision to become a world-class energy company that cares about the environment.



2015
Menteri ESDM Republik Indonesia, Sudirman Said meresmikan pengoperasian PLTU Banjarsari 2x110 MW nett serta melakukan groundbreaking PLTU Banko Tengah 2x620 MW di Tanjung Agung. PTBA meresmikan dermaga Batu Bara dan pelabuhan curah terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas pelabuhan sebesar 25 juta ton dan kapasitas sandar 210.000 DWT yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan di Tarahan, Bandar Lampung. PTBA melakukan akuisisi atas empat perusahaan:

- PT Satria Bahana Sarana
- PT Tabalong Prima Resources
- PT Mitra Hasrat Bersama
- PT Bumi Sawindo Permai

The Indonesian Minister of Energy and Mineral Resources, Sudirman Said, inaugurated the operation of 2x110 MW Banjarsari power plant and conducted the groundbreaking of 2x620 MW Banko Tengah power plant in Tanjung Agung. PTBA also inaugurated the largest coal Barging Port and bulk port in Southeast Asia with a port capacity of 25 million tons and a berthing capacity of 210,000 DWT, carried out by the Minister of Transportation, Ignatius Jonan, in Tarahan, Bandar Lampung. PTBA acquired four companies:

- PT Satria Bahana Sarana
- PT Tabalong Prima Resources
- PT Mitra Hasrat Bersama
- PT Bumi Sawindo Permai

2017

Melakukan aksi pemecahan nilai saham (stock split) dengan perbandingan 1:5. Perubahan status dari Persero menjadi Non-Persero, yaitu PT Tambang Batu bara Bukit Asam (Persero) Tbk menjadi PT Bukit Asam Tbk. Perubahan ini dilakukan seiring dengan bergabungnya Perusahaan ke dalam *Holding* BUMN Pertambangan, yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

Conducted a stock split with a stock value ratio of 1:5. Changes in the status of the Company from Persero to Non-Persero, thus changing its name from PT Tambang Batabara Bukit Asam (Persero) Tbk to PT Bukit Asam Tbk. This change was in line with the joining of PT Bukit Asam Tbk into the SOE Mining Holding, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

2018

PTBA melakukan *Financial Closed* dengan China *Export* Import Bank terkait dengan pinjaman untuk pembangunan PLTU Mulut Tambang Sumsel 8.

PTBA conducted a Financial Closed with the China Export Import Bank related to a loan for the construction of the Sumsel 8 Mine Mouth coal-fired power plant.

2019

- 2 April, 8 Mei, dan 4 Desember Perusahaan berhasil mengalihkan sejumlah 649.987.500 lembar saham treasuri dan mendapatkan dana sejumlah Rp2,15 triliun.
- Pada tanggal 29 Oktober, PTBA menerima Sertifikat Warisan Budaya Dunia Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto dari UNESCO.

- On April 2, May 8, and December 4, the Company managed to transfer a total of 649,987,500 treasury shares and obtain Rp2.15 trillion in funds.
- On October 29, PTBA received the World Cultural Heritage Certificate for Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto from UNESCO.



2020

PTBA Terapkan Manajemen Anti Suap ISO 37001:2016 dan menjadi BUMN pertama di sektornya yang menerapkan ISO 37001:2016.

PTBA applied ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management and became the first SOEs in its sector to apply ISO 37001:2016.

2021

PTBA berhasil mengalihkan sejumlah 303.148.100 lembar saham treasuri dan memperoleh dana sebesar Rp691,18 miliar (di luar biaya pengalihan).

PTBA managed to transfer a total of 303,148,100 treasury shares and obtained Rp691.18 billion in funds (excluding transfer fees).

2022

- Peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Jalan Tol Bali-Mandara sebagai wujud kolaborasi dan sinergi BUMN dalam mendukung Presidensi G20 Indonesia.
- PTBA mencetak laba bersih sebesar Rp12,57 triliun, laba tertinggi yang pernah diraih Perusahaan.

- The inauguration of Solar Power Plant (SPPP) on Bali-Mandara Toll Road as a form of SOE collaboration and synergy in supporting Indonesia's G20 Presidency.
- PTBA recorded a net profit of Rp12.57 trillion, the highest profit ever achieved by the Company.

2023

- Proyek PLTU Sumsel-8 yang dijalankan oleh PT Huadian Bukit Asam Power ("PT HBAP") yang merupakan entitas *joint venture company* PTBA bersama China Huadian Hongkong Company Ltd berhasil beroperasi komersial pada 7 Oktober 2023.
- PT IPC entitas anak perusahaan PTBA melakukan pembatalan atas rencana akuisisi pada PT Tabalong Prima Recourses dan PT Mitra Hasrat Bersama.

- CFPP Mine Mouth Sumsel-8, operated by PT Huadian Bukit Asam Power ("PT HBAP"), a joint venture between PTBA and China Huadian Hongkong Company Ltd, successfully commenced commercial operations on October 7, 2023.
- PT IPC, a subsidiary of PTBA, canceled its planned acquisition of PT Tabalong Prima Recourses and PT Mitra Hasrat Bersama.

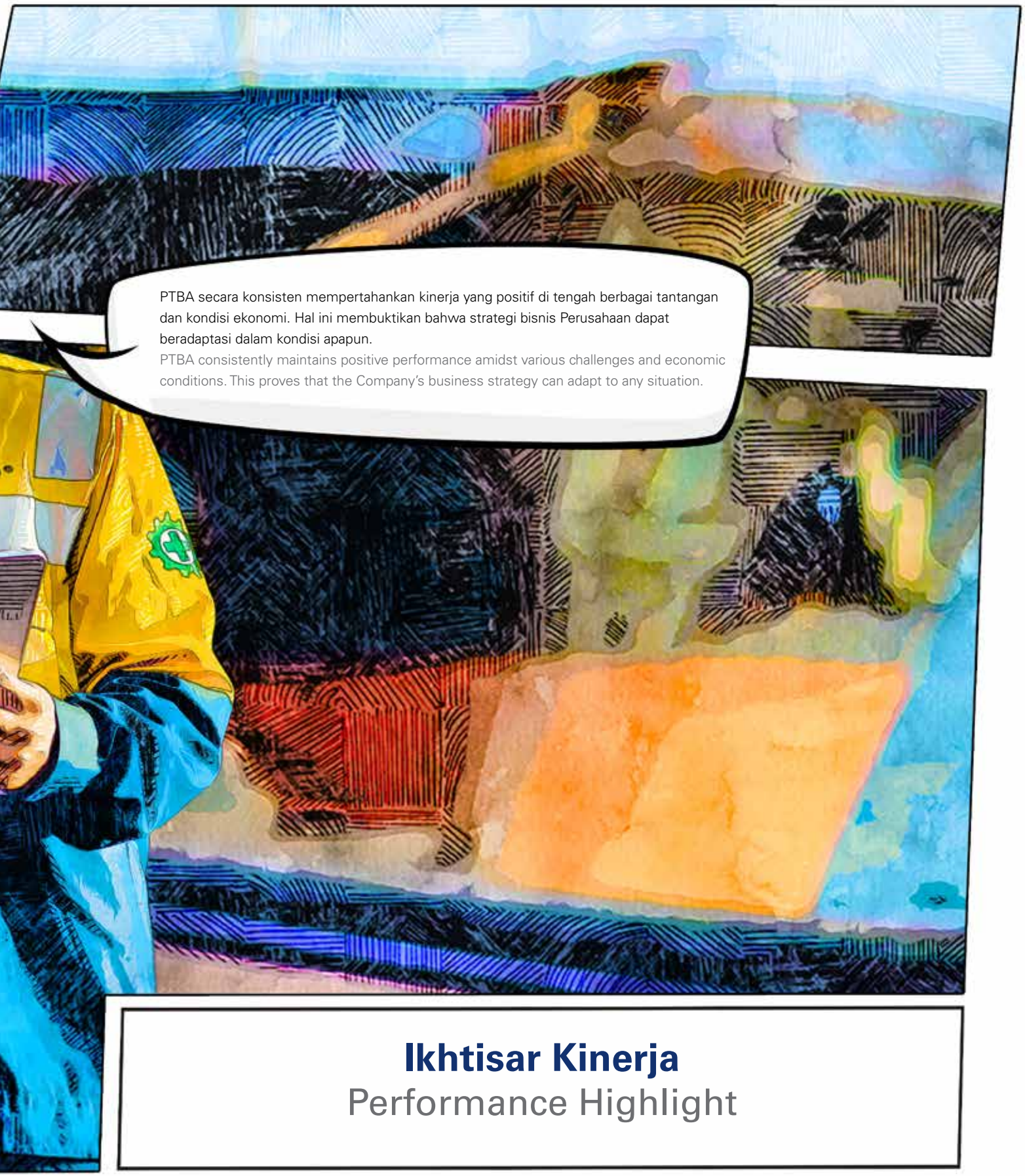
2024

- PTBA berhasil mengalihkan saham treasuri sejumlah 27.147.900 lembar saham dengan harga Rp2.950 per lembar sahamnya pada tanggal 28 Maret 2024.
- PTBA menutup entitas anak perusahaan yaitu PT Bukit Asam Metana Ombilin (BAMO) pada tanggal 17 April 2024.

- PTBA successfully transferred treasury shares amounting to 27,147,900 shares at a price of Rp2,950 per share on March 28, 2024.
- PTBA closed its subsidiary, PT Bukit Asam Metana Ombilin (BAMO) on April 17, 2024.

BukitAsam





Ikhtisar Kinerja
Performance Highlight

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Highlights

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham
In million Rupiah, except for basic and diluted earnings per share

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
ASET **ASSETS**					
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	4.132.858	4.138.867	7.030.343	4.394.195	4.340.947
Piutang Usaha, Neto Trade Receivables, Net	5.030.071	3.797.292	3.509.912	3.099.840	1.578.867
Aset Keuangan yang Dinilai pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain Financial Assets at Fair Value through Other Comprehensive Income	425.767	875.330	783.070	341.821	301.257
Persediaan Inventories	4.869.337	5.499.614	3.837.187	1.207.585	805.436
Deposito Berjangka Jatuh Tempo di atas 3 Bulan dan Kurang dari 1 Tahun Time Deposits with more than 3 months and less than 1 year	242.355	541.818	8.929.196	9.010.987	1.130.354
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	533.126	295.435	342.440	157.072	207.495
Jumlah Aset Lancar **Total Current Assets**	**15.233.514**	**15.148.356**	**24.432.148**	**18.211.500**	**8.364.356**
Piutang Usaha, Neto Trade Receivables, Net	-	188.271	232.678	413.836	406.750
Piutang Lainnya dari Pihak Berelasi Other Receivables from Related Parties	29.005	18.683	29.407	15.500	109.264
Investasi pada Entitas Asosiasi Investments in Associates	71.655	-	25.314	23.297	23.015
Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Ventures	8.610.010	7.263.276	6.519.097	5.174.429	3.926.147
Properti Penambangan Mining Properties	3.412.097	3.271.657	2.873.707	2.099.454	1.830.667
Aset Tetap Fixed Assets	8.735.714	8.566.210	8.410.051	8.321.231	7.863.615
Tanaman Produktif Bearer Plants	65.063	72.820	52.679	48.070	59.501
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	3.408.306	2.554.351	1.496.343	675.200	600.670
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	1.258.806	1.208.683	917.323	768.833	542.644
Goodwill	102.077	102.077	102.077	102.077	102.077
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-current Assets	859.329	370.805	268.383	270.276	228.049
Jumlah Aset Tidak Lancar **Total Non-current Assets**	**26.552.062**	**23.616.833**	**20.927.059**	**17.912.203**	**15.692.399**
Jumlah Aset **Total Assets**	**41.785.576**	**38.765.189**	**45.359.207**	**36.123.703**	**24.056.755**

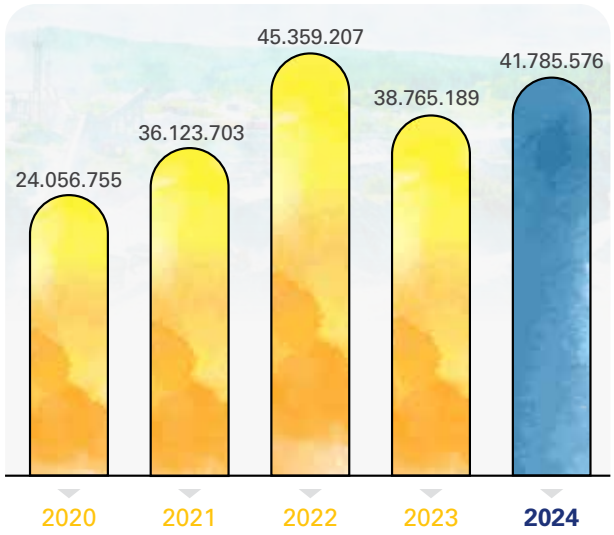
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham
In million Rupiah, except for basic and diluted earnings per share

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Liabilitas dan Ekuitas **Liabilities and Equity**					
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek **Total Current Liabilities**	11.974.820	9.968.101	10.701.780	7.500.647	3.872.457
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang **Total Non-current Liabilities**	7.166.944	7.233.892	5.741.381	4.369.332	3.245.102
Jumlah Liabilitas **Total Liabilities**	19.141.764	17.201.993	16.443.161	11.869.979	7.117.559
Jumlah Ekuitas **Total Equity**	22.643.812	21.563.196	28.916.046	24.253.724	16.939.196
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas **Total Liabilities and Equity**	41.785.576	38.765.189	45.359.207	36.123.703	24.056.755

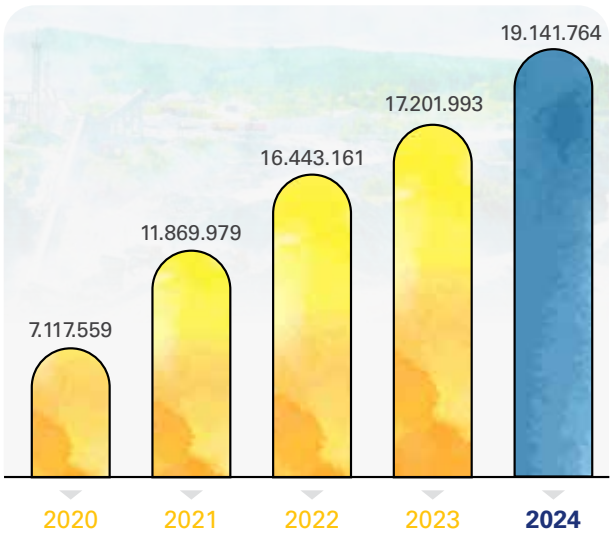
Jumlah Aset
Total Assets

dalam Juta Rupiah | in Million Rupiah



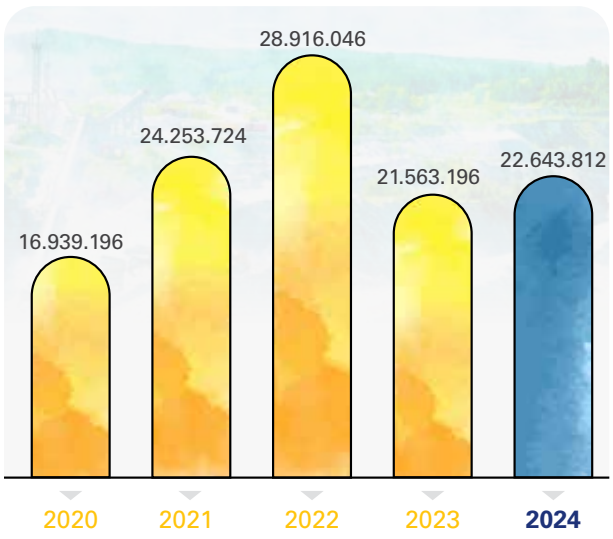
Jumlah Liabilitas
Total Liabilities

dalam Juta Rupiah | in Million Rupiah



Jumlah Ekuitas
Total Equity

dalam Juta Rupiah | in Million Rupiah



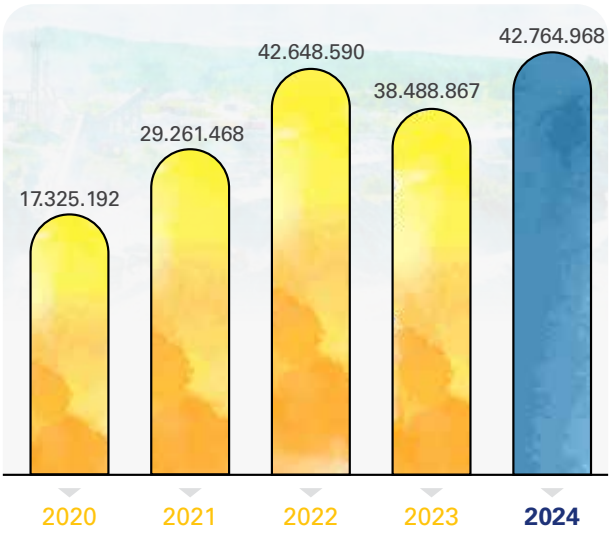
LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Dalam jutaan Rupiah, kecuali laba per saham dasar dan dilusian | In million Rupiah, except for basic and diluted earnings per share

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Pendapatan **Revenue**	**42.764.968**	**38.488.867**	**42.648.590**	**29.261.468**	**17.325.192**
Pendapatan Batu Bara Revenue from Coal Sales	42.084.008	37.972.033	42.099.316	28.873.738	17.072.791
Pendapatan dari Aktivitas Lainnya Revenue from other Activities	680.960	516.834	549.274	387.730	252.401
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(34.562.758)	(29.331.562)	(24.682.304)	(15.777.245)	(12.758.932)
Laba Bruto **Gross Profit**	**8.202.210**	**9.157.305**	**17.966.286**	**13.484.223**	**4.566.260**
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(2.078.188)	(1.936.635)	(2.390.336)	(2.579.462)	(1.439.913)
Beban Penjualan dan Pemasaran Selling and Marketing Expenses	(789.017)	(656.362)	(953.120)	(1.014.269)	(692.320)
Penghasilan Lainnya, Neto Other Income, Nett	317.413	638.401	522.591	68.533	86.398
Laba Usaha **Operating Profit**	**5.652.418**	**7.202.709**	**15.145.421**	**9.959.025**	**2.520.425**
Penghasilan Keuangan Finance Income	250.183	584.339	428.033	256.856	362.503
Biaya Keuangan Finance Costs	(283.690)	(204.038)	(200.203)	(158.426)	(132.515)
Bagian atas Laba Neto Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share in Net Profit of Associates and Joint Ventures	640.335	571.303	829.063	301.220	481.272
Laba Sebelum Pajak Penghasilan **Profit before Income Tax**	**6.259.246**	**8.154.313**	**16.202.314**	**10.358.675**	**3.231.685**
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(1.119.823)	(1.861.792)	(3.422.887)	(2.321.787)	(823.758)
Laba Tahun Berjalan **Profit for the Year**	**5.139.423**	**6.292.521**	**12.779.427**	**8.036.888**	**2.407.927**
Penghasilan/(Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Income/(Loss) for the Year	467.158	(808.804)	(13.061)	(460.949)	(158.397)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan **Total Comprehensive Income for the Year**	**5.606.581**	**5.483.717**	**12.766.366**	**7.575.939**	**2.249.530**
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: **Profit for the Year Attributable to:**					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	5.103.720	6.105.856	12.567.582	7.909.113	2.386.819
Kepentingan Non-pengendali Non-controlling Interests	35.703	186.665	211.845	127.775	21.108
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: **Total Other Comprehensive Income for the Year Attributable to:**					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	5.570.878	5.297.052	12.554.521	7.448.164	2.228.422
Kepentingan Non-pengendali Non-controlling Interests	35.703	186.665	211.845	127.775	21.108
Laba per Saham Dasar dan Dilusian (Nilai Penuh) **Earnings per Share - Basic and Diluted (Full Amount)**	**444**	**532**	**1.094**	**702**	**213**

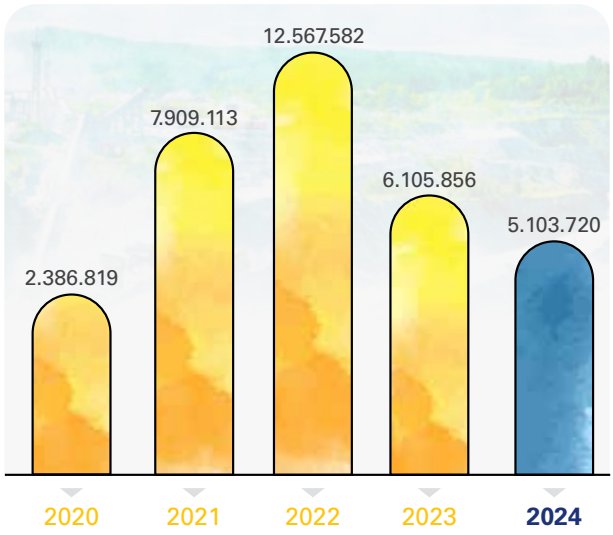
Pendapatan
Revenue

dalam Juta Rupiah | in Million Rupiah



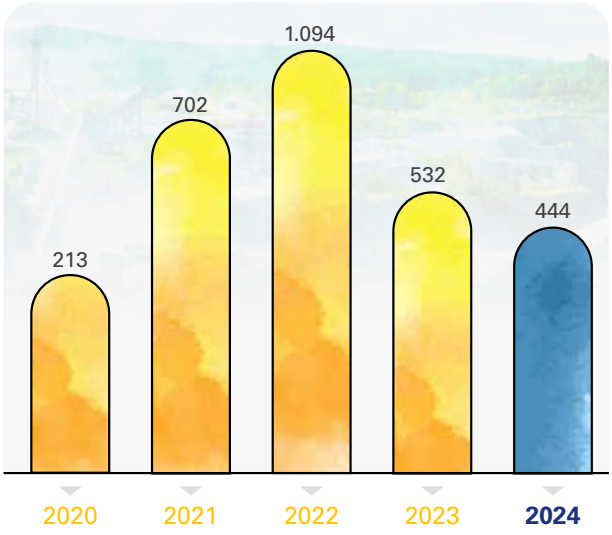
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity

dalam Juta Rupiah | in Million Rupiah



Laba per Saham Dasar dan Dilusian
Earnings per Share - Basic and Diluted

(Rp/Lembar | Rp/Share)



LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOW

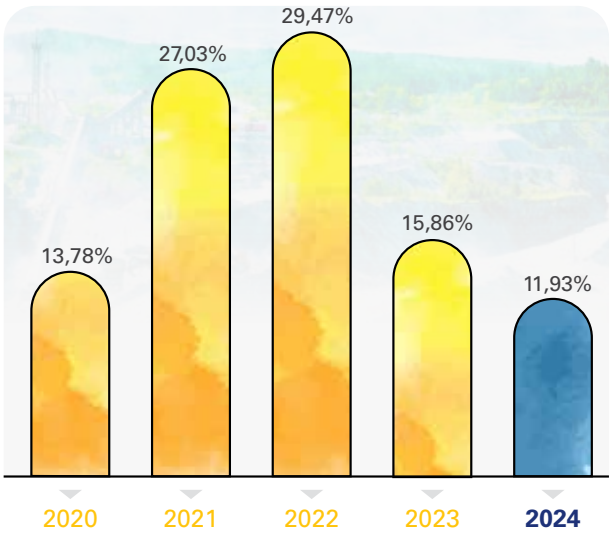
Dalam jutaan Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	5.049.190	3.104.707	12.527.439	10.795.075	3.513.628
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	(944.274)	7.257.889	(1.294.274)	(9.838.749)	113.585
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	(4.139.428)	(13.244.158)	(8.668.614)	(911.583)	(4.083.158)
(Penurunan)/Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Net (Decrease)/Increase in Cash and Cash Equivalents	**(34.512)**	**(2.881.562)**	**2.564.551**	**44.743**	**(455.945)**
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	**4.138.867**	**7.030.343**	**4.394.195**	**4.340.947**	**4.756.801**
Efek Perubahan Kurs pada Kas dan Setara Kas Effects of Changes in Exchange Rate on Cash and Cash Equivalents	28.503	(9.914)	71.597	8.505	40.091
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	**4.132.858**	**4.138.867**	**7.030.343**	**4.394.195**	**4.340.947**

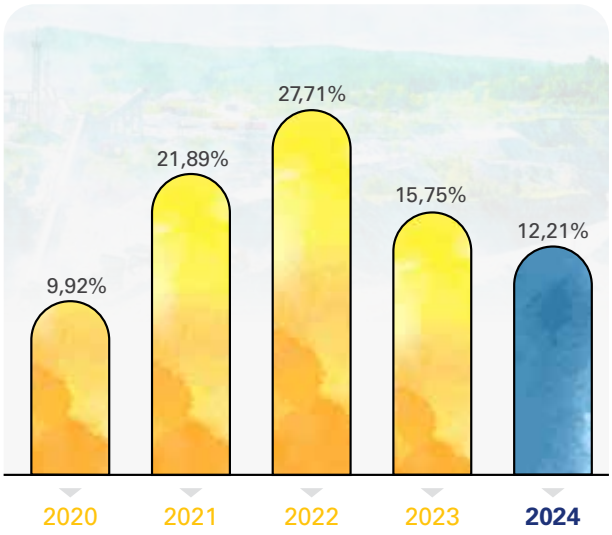
RASIO KEUANGAN DAN RASIO PENTING LAINNYA
FINANCIAL RATIOS AND OTHER IMPORTANT RATIOS

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023	2022	2021	2020
Laba Usaha terhadap Pendapatan Usaha Operating Profit Margin	%	13,22	18,71	35,51	34,03	14,55
Laba Bersih terhadap Pendapatan Usaha Net Profit Margin	%	11,93	15,86	29,47	27,03	13,78
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset Return on Asset	%	12,21	15,75	27,71	21,89	9,92
Laba Bersih terhadap Ekuitas Return on Equity	%	22,54	28,32	43,46	32,61	14,09
Kas dan Setara Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek Quick Ratio	%	34,51	41,52	65,69	58,58	112,10
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek Current Ratio	%	127,21	151,97	228,30	242,80	216,00
Jumlah Liabilitas terhadap Total Aset Debt to Asset Ratio	%	45,81	44,37	36,25	32,86	29,59
Jumlah Liabilitas terhadap Total Ekuitas Debt to Equity Ratio	%	84,53	79,77	56,87	48,94	42,02
Tingkat Kolektibilitas Piutang Collectability Rate	Hari Day	43	38	32	44	42
Produktivitas Pegawai Tetap terhadap Produksi Batu Bara Permanent Employees Productivity on Coal Production	Ton/Pegawai Ton/Employee	25.707,39	26.746,94	23.224,94	16.441,21	12.076,99
Produktivitas Pegawai Tetap terhadap Laba Bersih Permanent Employees Productivity on Net Profit	Rp Juta/ Pegawai Rp million/ Employee	3.039,74	3.911,50	7.859,65	4.329,02	1.160,34
Produktivitas Pegawai Tetap terhadap Pendapatan Permanent Employees Productivity to Revenue	Rp Juta/ Pegawai Rp million/ Employee	25.470,50	24.656,55	26.672,04	16.016,13	8.422,55

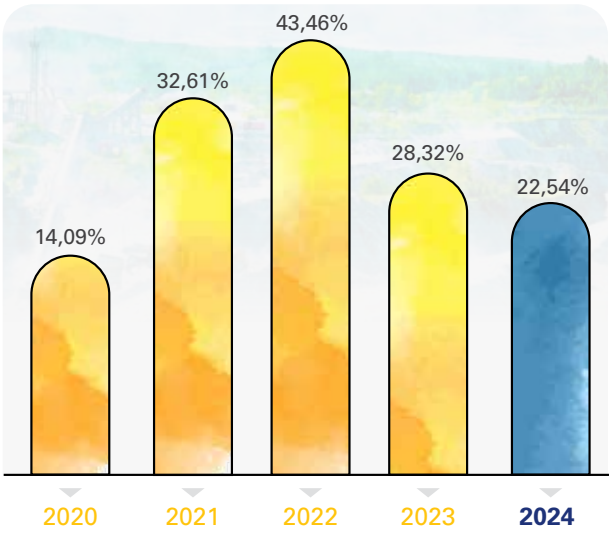
Laba Bersih terhadap Pendapatan Usaha
Net Profit Margin



Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Aset
Return on Asset



Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas
Return on Equity



BELANJA MODAL
CAPITAL EXPENDITURES

Dalam jutaan Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Jumlah Belanja Modal Total Capital Expenditures	2.348.332	2.015.289	831.747	1.840.414	1.327.496

Ikhtisar Operasional
Operational Highlights

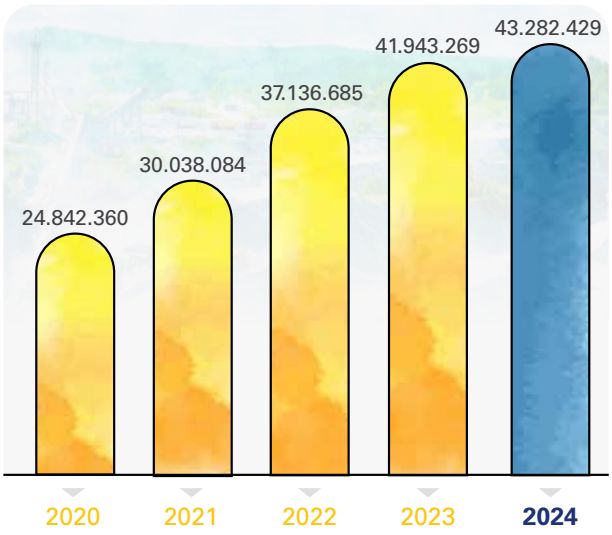
Kinerja Operasional
Operational Performance

Dalam Ton | In Ton

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Produksi dan Pembelian Batu Bara **Coal Production and Purchases**					
Produksi Batu Bara **Coal Production**					
Unit Pertambangan Tanjung Enim Tanjung Enim Mining Unit					
Tambang Air Laya Air Laya Mine	5.378.533	5.398.027	7.318.743	5.461.197	5.270.842
Muara Tiga Besar	11.163.893	9.806.196	9.448.761	11.241.213	7.253.285
Banko Barat West Banko	6.112.005	7.993.487	7.264.830	12.562.456	11.710.244
Banko Tengah Central Banko	19.344.766	17.692.007	12.232.416	-	-
Jumlah Produksi Unit Pertambangan Tanjung Enim **Total Production of Tanjung Enim Mining Unit**	**41.999.197**	**40.889.717**	**36.264.750**	**29.264.866**	**24.234.371**
Unit Pertambangan Peranap Peranap Mining Unit	163.514	4.175	-	-	7.451
PT Internasional Prima Coal	1.000.000	858.088	871.935	773.218	600.538
Jumlah Produksi Batu Bara Total Coal Production	**43.162.711**	**41.751.980**	**37.136.685**	**30.038.084**	**24.842.360**
Pembelian Batu Bara **Coal Purchases**					
PT Bukit Asam Prima	119.718	191.289	-	-	-
Jumlah Pembelian Batu Bara Total Coal Purchases	**119.718**	**191.289**	**-**	**-**	**-**
Jumlah Produksi dan Pembelian Total Production and Purchases	**43.282.429**	**41.943.269**	**37.136.685**	**30.038.084**	**24.842.360**
Angkutan Batu Bara **Coal Transport**					
Tanjung Enim ke Tarahan Tanjung Enim to Tarahan	27.464.918	25.426.945	23.409.125	20.053.105	18.226.112
Tanjung Enim ke Kertapati Tanjung Enim to Kertapati	7.966.608	6.992.232	5.402.048	5.365.858	5.571.504
Tanjung Enim ke Pelabuhan Lainnya Tanjung Enim to Other Ports	2.738.767	-	-	-	-
Jumlah Volume Angkutan Batu Bara Total Volume of Coal Transport	**38.170.293**	**32.419.177**	**28.811.173**	**25.418.964**	**23.797.616**
Penjualan Batu Bara **Coal Sales**					
Domestik Domestic	22.635.452	21.403.957	19.172.313	16.111.899	14.135.858
Ekspor Export	20.255.525	15.569.604	12.481.321	12.258.020	11.989.018
Jumlah Penjualan Batu Bara Total Coal Sales	**42.890.977**	**36.973.561**	**31.653.634**	**28.369.919**	**26.124.876**

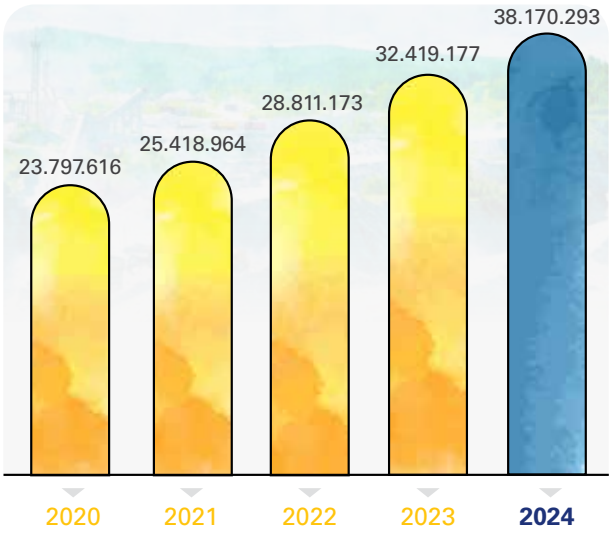
Jumlah Produksi dan Pembelian Batu Bara
Total Coal Production and Purchases

dalam ton | in ton



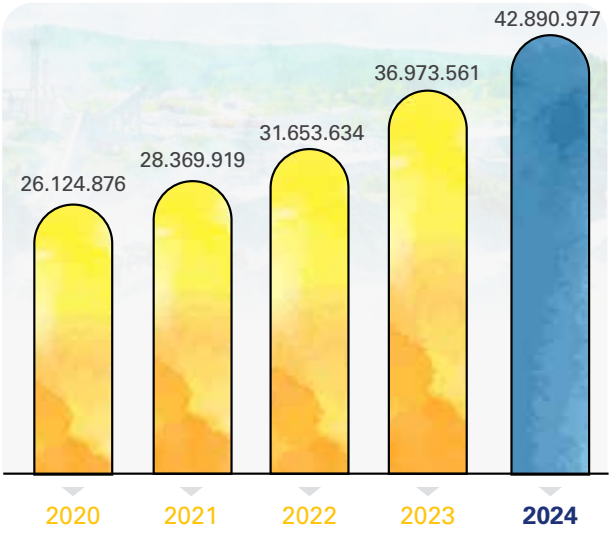
Jumlah Volume Angkutan Batu Bara
Total Volume of Coal Transport

dalam ton | in ton



Jumlah Penjualan Batu Bara
Total Coal Sales

dalam ton | in ton



Kinerja Organisasi
Organizational Performance

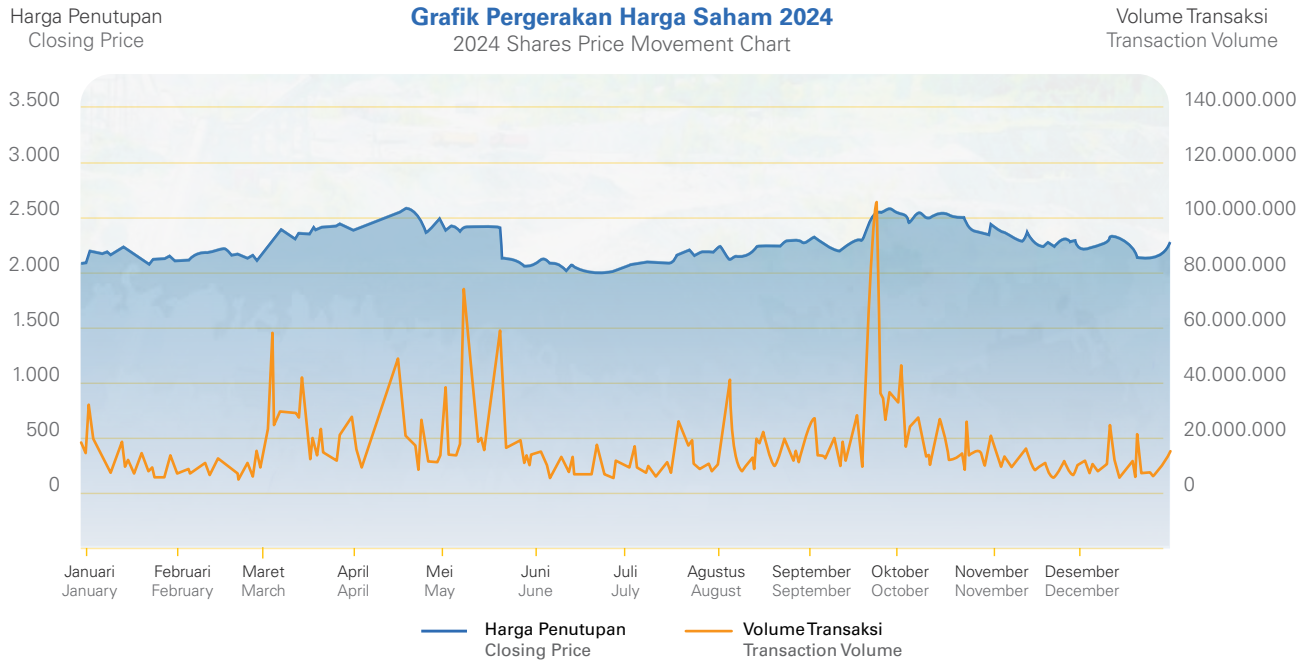
Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023*	2022	2021	2020
Penilaian Penerapan GCG Assessment of GCG Implementation	Skor Score	79,06**	-	97,30	97,62	96,10
Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Soundness Level	Peringkat Ranking	idAA	idAA	AA	AA	AA

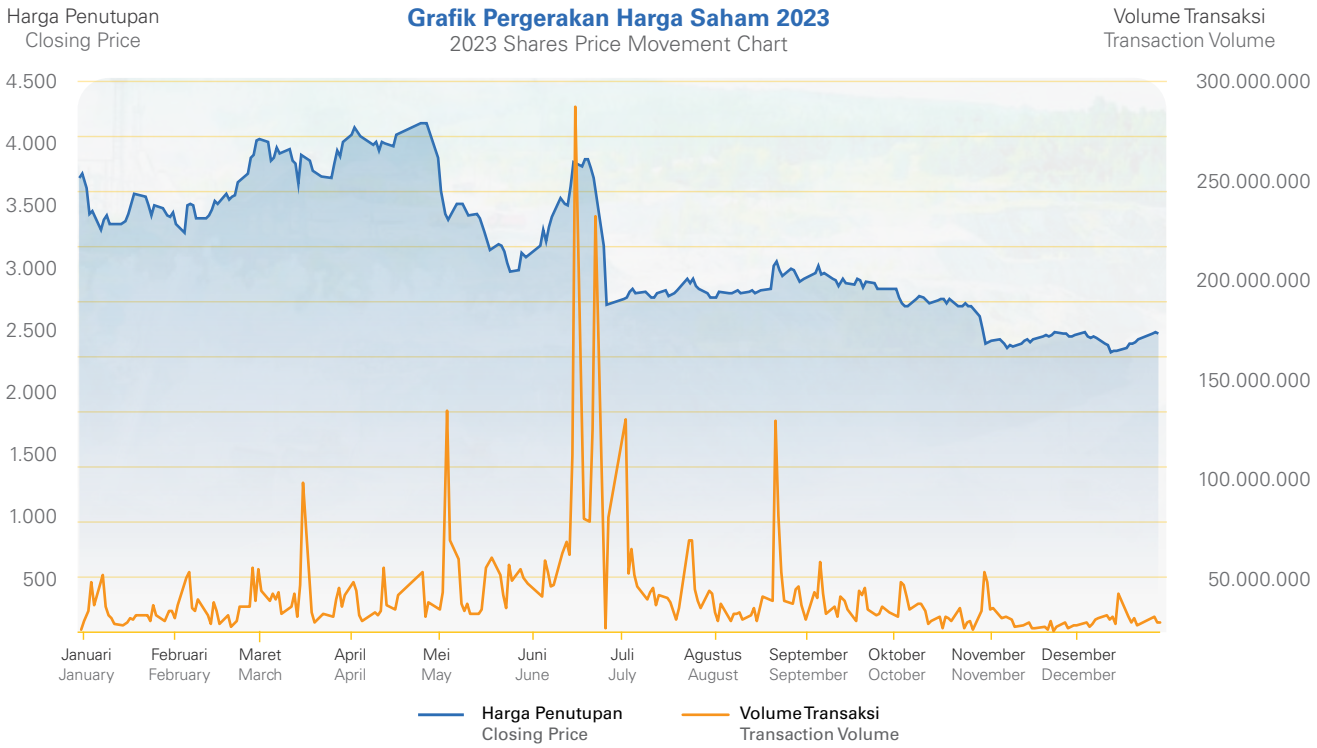
Catatan | Notes:
*Parameter assesmen GCG di Lingkungan BUMN tahun 2023 dicabut, sehingga tidak dilakukan penilaian GCG.
*Pada tahun 2023, penilaian dilakukan oleh PT Pefindo berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023.
**Pada tahun 2024, penilaian GCG dilakukan dengan mengacu parameter ACGS.
*GCG assessment parameters in SOEs in 2023 were revoked. Thus, no GCG assessment was carried out.
*In 2023, the assessment was carried out by PT Pefindo based on the provisions of the Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/03/2023
**In 2024, GCG assessment is conducted with reference to ACGS parameters.

Ikhtisar Saham
Shares Highlights

Periode Period	Jumlah Saham Beredar (lembar saham) Number of Shares Outstanding (Shares)	Harga Saham Pembukaan (Lembar Saham) Opening Share Price (Share)		Harga Saham Tertinggi (Lembar Saham) Highest Share Price (Share)		Harga Saham Terendah (Lembar Saham) Lowest Share Price (Share)		Harga Saham Penutupan (Lembar Saham) Closing Share Price (Share)		Volume Perdagangan (Lembar Saham) Trade Volume (Share)	Kapitalisasi Pasar (Rp Triliun) Market Capitalization (Rp Trillion)
		Rp	Tanggal Date	Rp	Tanggal Date	Rp	Tanggal Date	Rp	Tanggal Date		
2024											
Triwulan I 1st Quarter	11.487.209.345	2.440	02/01/24	2.990	28/03/24	2.440	02/01/24	2.970	28/03/24	911.497.104	34,12
Triwulan II 2nd Quarter	11.514.357.250	2.970	01/04/24	3.160	17/04/24	2.380	21/06/24	2.450	28/06/24	1.043.596.600	28,21
Triwulan III 3rd Quarter	11.514.357.250	2.460	01/07/24	3.180	30/09/24	2.450	01/07/24	3.080	30/09/24	1.274.198.800	35,46
Triwulan IV 4th Quarter	11.514.357.250	3.080	01/10/24	3.140	07/10/24 & 15/10/24	2.570	19/12/24	2.750	30/12/24	871.697.700	31,66
2023											
Triwulan I 1st Quarter	11.487.209.350	3.690	02/01/2023	4.020	03/03/2023	3.240	10/01/2023	3.990	31/03/2023	1.060.250.700	45,83
Triwulan II 2nd Quarter	11.487.209.350	4.000	03/04/2023	4.200	28/04/2023	2.680	27/06/2023	2.680	27/06/2023	2.202.105.224	30,79
Triwulan III 3rd Quarter	11.487.209.350	2.670	03/07/2023	3.070	23/08/2023	2.660	03/07/2023	2.800	29/09/2023	887.404.300	32,16
Triwulan IV 4th Quarter	11.487.209.350	2.810	02/10/2023	2.830	2/10/2023	2.300	14/12/2023	2.440	29/12/2023	676.585.800	28,03

Grafik Pergerakan Harga Saham 2024
2024 Shares Price Movement Chart





Informasi Saham Perusahaan
The Company's Share Information

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Harga Saham Pembukaan (Rp/Lembar Saham) Company Share Price (Rp/Share)	2.440	3.690	2.660	2.810	2.640
Harga Saham Tertinggi (Rp/Lembar Saham) Highest Price Share (Rp/Share)	3.180	4.200	4.630	3.040	3.170
Harga Saham Terendah (Rp/Lembar Saham) Lowest Share Price (Rp/Share)	2.380	2.300	2.600	2.000	1.485
Harga Saham Penutupan (Rp/Lembar Saham) Closing Share Price (Rp/Share)	2.750	2.440	3.690	2.710	2.810
Price to Book Value (x)	1,42	1,79	1,47	1,40	1,86
Price to Earnings Ratio (x)	6,19	4,60	3,37	5,10	13,19
Jumlah Saham Beredar (Lembar Saham) Number of Outstanding Shares (Shares)	**11.514.357.250**	**11.487.209.350**	**11.487.209.350**	**11.487.209.350**	**11.184.061.250**

Penghentian Sementara Perdagangan Saham dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham

Information on Suspension and/or Delisting

Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan tidak pernah menerima sanksi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek, dimana perusahaan mencatatkan dan memperdagangkan sahamnya, baik penghentian sementara perdagangan saham dan/atau penghapusan pencatatan saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait dampak dari penghentian sementara perdagangan saham dan/atau penghapusan pencatatan saham yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Until the end of 2024, the Company has never received sanctions that could affect stock trading activities on the Stock Exchange, where the Company registers and trades its shares, both suspension and/or delisting shares. Thus, there is no information related to the impact of suspension and/ or delisting of shares that can be presented in this Annual Report.

Aksi Korporasi

Corporate Action

Pengalihan Saham Treasuri

Pada 28 Maret 2024, Perusahaan melaksanakan pengalihan sisa saham treasuri hasil pembelian kembali (*buyback*) pada tanggal 2 September 2015 s.d. 1 Desember 2015 sebesar 27.147.900 lembar saham. Ada pun jumlah saham PTBA yang beredar berubah dari yang sebelumnya sebanyak 11.487.209.345 lembar saham menjadi sebanyak 11.514.357.250 lembar saham. Dengan demikian rincian aksi korporasi adalah sebagai berikut:

Transfer of Treasury Shares

On March 28, 2024, the Company carried out the transfer of the remaining treasury shares from the buyback on September 2, 2015 to December 1, 2015 amounting to 27,147,900 shares. The number of PTBA shares in circulation changed from the previous 11,487,209,345 shares to 11,514,357,250 shares. Thus, the details of the corporate action are as follows:

Tanggal Pengalihan Transfer Date	**Pembeli** Buyer	**Jumlah Saham Yang Dialihkan** Number of Shares Transfered	**Harga Penjualan** Selling Price	**Dana Yang Diperoleh** Funds Obtained
28 Maret 2024 March 28, 2024	PT BNI Sekuritas, beralamat di Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, Indonesia ("BNIS"). PT BNI Sekuritas addressed at Sudirman Plaza, Indofood Tower Floor 16, Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta, 12910, Indonesia ("BNIS").	27.147.900 lembar saham 27.147.900 shares	Harga penjualan yaitu Rp2.950/saham, yang merupakan harga penutupan sehari sebelum tanggal transaksi, dimana harga tersebut tidak lebih rendah dari Rp2.578/ saham (harga rata-rata penutupan selama 90 hari terakhir sebelum tanggal penjualan). The selling price is Rp2,950/share, which is the closing price the day before the transaction date, where the price is not lower than Rp2,578/ share (the average closing price for the last 90 days before the selling date).	Dana yang diperoleh dari hasil pengalihan saham treasuri pada tanggal 28 Maret 2024 yang belum dikurangi dengan biaya *placement* dan pajak yang dikenakan oleh Bursa Efek ("*Placement Fee*") yaitu sejumlah Rp80.086.305.000. The funds obtained from the transfer of treasury shares on March 28, 2024, which have not been reduced by placement fees and taxes imposed by the Stock Exchange ("Placement Fee") amounted to Rp80,086,305,000.

Penutupan PT Bukit Asam Metana Ombilin ("PT BAMO")

Pada tanggal 17 April 2024, berdasarkan Akta Nomor 02 yang dibuat oleh Achmad Untung Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi yang telah diterima perubahan data perseroannya oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 17 April 2024, PT BAMO dinyatakan ditutup dan dilikuidasi. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), penutupan dilakukan dengan proses likuidasi. Dalam proses likuidasi PT BAMO telah ditunjuk likuidator PT BAMO sebagai berikut:

1. Saptanto Sarwo Basuki;
2. Eclund Valery Silaban, S.H., M.H.Li., M.M;
3. Bryan R.L. Tambunan, S.H.

Penutupan dilakukan sehubungan dengan rencana restrukturisasi/perampingan grup PTBA dalam rangka bertransformasi menjadi perusahaan yang *agile*. PT BAMO sendiri bergerak di bidang penambangan gas metana batu bara yang merupakan entitas anak yang dimiliki oleh PTBA secara langsung sebesar 99,99%. Sejak didirikan pada tahun 2007 sampai dengan saat ini PT BAMO belum beroperasi secara komersial. Penutupan tersebut tidak memiliki dampak terhadap PTBA secara kelangsungan, dan keuangan secara konsolidasian PTBA.

Closure of PT Bukit Asam Metana Ombilin ("PT BAMO")

On April 17, 2024, based on Deed Number 02 made by Achmad Untung Wibowo, S.H., M.Kn., Notary in Bekasi whose company data changes have been accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on April 17, 2024, PT BAMO was declared closed and liquidated. In accordance with the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT"), the closure is carried out through a liquidation process. In the liquidation process of PT BAMO, the following liquidators have been appointed as PT BAMO:

1. Saptanto Sarwo Basuki;
2. Eclund Valery Silaban, S.H., M.H.Li., M.M;
3. Bryan R.L. Tambunan, S.H.

The closure was carried out in regard to the restructuring/ streamlining plan of the PTBA group to transform into an agile company. PT BAMO engaged in coalbed methane gas mining which is a subsidiary entity owned directly by PTBA of 99.99%. Since its establishment in 2007 until now PT BAMO has not operated commercially. The closure has no impact on PTBA in terms of continuity and PTBA's consolidated finances.

Dividen Saham
Share Dividends

Uraian Description	Tahun Buku Fiscal Year	
	2023	2022
Jumlah Dividen yang Dibagikan (Rp) Distributed Dividend (Rp)	4.579.392.004.320	12.567.581.927.964
Rasio Pembayaran Dividen (%) Dividend Payout Ratio (%)	75,00	100,00
Nilai Dividen per Lembar Saham (Rp) Dividend Value per Share (Rp)	397,71	1.094,05
Jumlah Saham yang Berhak atas Dividen (lembar) Number of Shares Entitled to Dividends (shares)	11.514.357.250	11.487.209.350
Tanggal Pengumuman Announcement Date	8 Mei 2024 May 8, 2024	15 Juni 2023 June 15, 2023
Tanggal Pembayaran Payment Date	7 Juni 2024 June 7, 2023	14 Juli 2023 June 14, 2023

Informasi Tentang Obligasi, Sukuk, Atau Obligasi Konversi

Information on Bonds, Sharia Bonds, or Convertible Bonds

Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan tidak menerbitkan obligasi, sukuk, obligasi konversi, maupun efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk.

Until the end of 2024, the Company did not issue bonds, sukuk, convertible bonds, or other securities. Thus, there is no information related to the outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest/yield rates, maturity dates, and bond/sukuk ratings.

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Information on Other Funding

Sampai dengan 31 Desember 2024, tidak ada sumber pendanaan lainnya kepada Perusahaan.

As of December 31, 2024, the Company has no other sources of funding.



Penghargaan Dan Sertifikasi
Awards and Certifications



Penghargaan yang Diperoleh Perusahaan di Tahun 2024

Awards in 2024

Tanggal Date	Penghargaan Award	Pencapaian Achievement	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location
17 Januari 2024 January 17, 2024	Indonesia Green Awards (IGA) 2024	Kategori Rekayasa Teknologi Dalam Menghemat Energi/Penggunaan Energi Terbarukan Engineering Technology Category In Saving Energy/Using Renewable Energy	La Tofi School of Social Responsibility	Jakarta
17 Januari 2024 January 17, 2024	Indonesia Green Awards (IGA) 2024	Mengembangkan Keanekaragaman Hayati Biodiversity Development	La Tofi School of Social Responsibility	Jakarta
28 Februari 2024 February 28, 2024	Sustainability Communications Award 2024	*The Most Sustainable Communication Company in the Energy & Mining Sector*	Nusantara TV	Jakarta
4 Maret 2024 March 4, 2024	Indonesia Best Companies in HSE Implementation 2024	*Indonesia Best Companies in HSE Implementation 2024* - ***Predicate VERY GOOD***	SWA Media Group	Jakarta
7 Maret 2024 March 7, 2024	BUMN Corporate Communications & Sustainability Summit 2024	Penghargaan *Silver* di Bidang *Community Involvement & Development* (CID) Lingkungan Silver Award in the Community Involvement & Development (CID) Environment	Kementerian BUMN SOEs Ministry	Jakarta
8 Maret 2024 March 8, 2024	Zero Accident Award Provinsi Sumatera Selatan South Sumatra Province Zero Accident Award	Nihil Kecelakaan (*Zero Accident Award*) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - PT Bukit Asam Tbk Unit Pertambangan Tanjung Enim Zero Accident Award at South Sumatra Province Level 2024 - PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim Mining Unit	Kementerian Ketenagakerjaan RI Manpower Ministry of Republic of Indonesia	Palembang
8 Maret 2024 March 8, 2024	Zero Accident Award Provinsi Sumatera Selatan South Sumatra Province Zero Accident Award	Nihil Kecelakaan (*Zero Accident Award*) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - PT Bukit Asam Tbk Unit Dermaga Kertapati Zero Accident Award at South Sumatra Province Level 2024 - PT Bukit Asam Tbk Kertapati Barging Port Unit	Kementerian Ketenagakerjaan RI Manpower Ministry of Republic of Indonesia	Palembang

Tanggal Date	Penghargaan Award	Pencapaian Achievement	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location
8 Maret 2024 March 8, 2024	*Zero Accident Award* Provinsi Sumatera Selatan South Sumatra Province Zero Accident Award	Nihil Kecelakaan (*Zero Accident Award*) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - PT SBS Zero Accident Award at South Sumatra Province Level 2024 - PT SBS	Kementerian Ketenagakerjaan RI Manpower Ministry of Republic of Indonesia	Palembang
15 Maret 2024 March 15, 2024	Sertifikasi ISO 50001:2018 ISO Certification 50001:2018	Sertifikasi Sistem Manajemen Energi Energy Management System Certification	PT TÜV SÜD Indonesia	Jakarta
29 Mei 2024 May 29, 2024	Penghargaan Transparansi dan Penurunan Emisi Korporasi Terbaik 2024 Best Corporate Transparency and Emission Reduction Awards 2024	Transparansi Penurunan Emisi Korporasi Kategori Green Elite Corporate Emission Reduction Transparency Green Elite Category	Investor Trust	Jakarta
29 Mei 2024 May 29, 2024	Penghargaan Transparansi dan Penurunan Emisi Korporasi Terbaik 2024 Best Corporate Transparency and Emission Reduction Awards 2024	Transparansi Penurunan Emisi Korporasi Kategori *Platinum Plus* Platinum Plus Category Corporate Emission Reduction Transparency	Investor Trust	Jakarta
27 Juni 2024 June 27, 2024	Bisnis Indonesia *Social Responsibility* Awards (BISRA) 2024	Kategori *Gold* Gold Catagory	Investor Trust	Jakarta
29 Juni 2024 June 29, 2024	Bina Mitra UMKM Award 2024 2024 MSME Partner Development Award	Perusahaan Pembina (*Gold*) Foster Company (Gold)	CFCD Foundation	Jakarta
29 Juni 2024 June 29, 2024	Bina Mitra UMKM Award 2024 2024 MSME Partner Development Award	Program UKM dan IKM Binaan (*Gold*). Fostered UKM and IKM Program (Gold)	CFCD Foundation	Jakarta
10 Juli 2024 July 10, 2024	CNN Indonesia Award	*Outstanding Community Development Campaign*	CNN Indonesia	Palembang
11 Juli 2024 July 11, 2024	Kadin UMKM *Award* 2024 2024 MSME Kadin Award	Kategori Perusahaan Company Category	Kadin Indonesia	Palembang
11 Juli 2024 July 11, 2024	Kadin UMKM *Award* 2024 2024 MSME Kadin Award	Kategori UMKM Binaan - SIBA Rosella Fostered MSMEs Category – SIBA Rosella	Kadin Indonesia	Palembang
26 Juli 2024 July 26, 2024	Apresiasi Emiten 2024 2024 Emiten Appreciation	*Main Index*	Tempo & IDN Financials	Balikpapan
26 Juli 2024 July 26, 2024	Apresiasi Emiten 2024 2024 Emiten Appreciation	*High Dividend*	Tempo & IDN Financials	Balikpapan
26 Juli 2024 July 26, 2024	Apresiasi Emiten 2024 2024 Emiten Appreciation	*High Growth*	Tempo & IDN Financials	Balikpapan
26 Juli 2024 July 26, 2024	Apresiasi Emiten 2024 2024 Emiten Appreciation	*Big Market Cap*	Tempo & IDN Financials	Balikpapan
30 Juli 2024 July 30, 2024	TJSL & CSR *Award* 2024	Peringkat Bintang 5 (*Platinum*) Pilar Lingkungan 5 Star (Platinum) Environmenntal Pillar Rating	BUMN Track & Indonesia Shared Value Institute (ISVI)	Jakarta
30 Juli 2024 July 30, 2024	TJSL & CSR *Award* 2024	*VP Sustainability PTBA - Strong Commitment Senior Officer on Environment Program of CSR*	BUMN Track & Indonesia Shared Value Institute (ISVI)	Jakarta
8 Agustus 2024 August 8, 2024	The 12th Indonesia Marketing Festival 2024	Arsal Ismail - *Industry Marketing Champion* Sumsel 2024 sektor Resource dalam ajang Arsal Ismail - Industry Marketing Champion Sumsel 2024 sector Resource at The 12th Indonesia Marketing Festival 2024	MarkPlus	Palembang
23 Agustus 2024 August 23, 2024	Naker Fest 2024	Nihil Kecelakaan Kerja (*Zero Accident*) Sepanjang Tahun 2023 Zero Accident in 2023	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Manpower Ministry of Republic of Indonesia	Jakarta

Tanggal Date	Penghargaan Award	Pencapaian Achievement	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location
23 Agustus 2024 August 23, 2024	Naker Fest 2024	Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Tempat Kerja. HIV-AIDS Prevention and Control Program in the Workplace.	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Manpower Ministry of Republic of Indonesia	Jakarta
23 Agustus 2024 August 23, 2024	Indonesia Safety Excellence Award (ISEA) 2024	*Excellence in Safety Application Program*	Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals & First Indonesia Magazine	Bali
23 Agustus 2024 August 23, 2024	Indonesia Safety Excellence Award (ISEA) 2024	*Fire Safety Management of The Year*	Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals & First Indonesia Magazine	Bali
23 Agustus 2024 August 23, 2024	Indonesia Safety Excellence Award (ISEA) 2024	*Safety Innovation of The Year*	Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals & First Indonesia Magazine	Bali
23 Agustus 2024 August 23, 2024	Indonesia Safety Excellence Award (ISEA) 2024	*The Best Leadership in OSH Culture* untuk Suhedi, Direktur Operasi & Produksi PT Bukit Asam Tbk (PTBA) The Best Leadership in OSH Culture for Suhedi, Director of Operations & Production of PT Bukit Asam Tbk (PTBA)	Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals & First Indonesia Magazine	Bali
11 September 2024 September 11, 2024	TOP GRC Awards 2024	*TOP GRC Golden Trophy 2024*	Asosiasi GRC Indonesia, IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association), ICoPI (Institute Compliance Professional Indonesia), dan PaGi (Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia), serta didukung oleh beberapa perusahaan konsultan GCG dan Risk Management, dan Majalah Top Business Indonesian GRC Association, IRMAPA (Indonesian Risk Management Professional Association), ICoPI (Indonesian Compliance Professional Institute), and PaGi (Indonesian Governance Professional Association), and supported by several GCG and Risk Management consulting companies, and Top Business Magazine.	Jakarta
11 September 2024 September 11, 2024	TOP GRC Awards 2024	*TOP GRC Awards 2024 # 5 Stars*		Jakarta
11 September 2024 September 11, 2024	TOP GRC Awards 2024	*The High Performing Board of Commissioners on GRC 2024*		Jakarta
11 September 2024 September 11, 2024	TOP GRC Awards 2024	*The Most Committed GRC Leader* 2024 - Arsal Ismail, Direktur Utama, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) The Most Committed GRC Leader 2024 - Arsal Ismail, President Director, PT Bukit Asam Tbk (PTBA)		Jakarta
19 September 2024 September 19, 2024	ESG Award	Kategori *Health, Safety, Security and Environment* (HSSE) Health, Safety, Security and Environment (HSSE) category	Republika	Jakarta

Tanggal Date	Penghargaan Award	Pencapaian Achievement	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location
25 September 2024 September 25, 2024	Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (*Good Mining Practice*/GMP) Award for Achievement in Implementation of Good Mining Practice (GMP)	Penghargaan Prestasi Utama Pengelolaan Teknis Pertambangan Mineral dan Batu bara - PTBA Unit Pertambangan Tanjung Enim Achievement Award for Technical Management of Mineral and Coal Mining - PTBA Tanjung Enim Mining Unit	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM)	Jakarta
25 September 2024 September 25, 2024	Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (*Good Mining Practice*/GMP) Award for Achievement in Implementation of Good Mining Practice (GMP)	Penghargaan Prestasi Utama Pengelolaan Konservasi Mineral dan Batu bara - PTBA Unit Pertambangan Tanjung Enim Achievement Award for Mineral and Coal Conservation Management - PTBA Tanjung Enim Mining Unit	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM)	Jakarta
25 September 2024 September 25, 2024	Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (*Good Mining Practice*/GMP) Award for Achievement in Implementation of Good Mining Practice (GMP)	Penghargaan Prestasi Utama Pengelolaan Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu bara - PTBA Unit Pertambangan Tanjung Enim Achievement Award for Standardization Management and Mineral and Coal Mining Services Business - PTBA Tanjung Enim Mining Unit	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM)	Jakarta
25 September 2024 September 25, 2024	Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (*Good Mining Practice*/GMP) Award for Achievement in Implementation of Good Mining Practice (GMP)	Penghargaan Prestasi Pratama Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Mineral dan Batu bara - PTBA Unit Pertambangan Tanjung Enim Achievement Award for Environmental Management of Mineral and Coal Mining - PTBA Tanjung Enim Mining Unit	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM)	Jakarta
25 September 2024 September 25, 2024	Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (*Good Mining Practice*/GMP) Award for Achievement in Implementation of Good Mining Practice (GMP)	Penghargaan Prestasi Pratama Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Mineral dan Batu bara - PTBA Unit Pelabuhan Tarahan Achievement Award for Environmental Management of Mineral and Coal Mining - PTBA Tarahan Port Unit	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM)	Jakarta
2 Oktober 2024 October 2, 2024	Top BUMN *Awards* 2024	Top BUMN Awards 2024 kategori Perusahaan Terbuka - Sektor Non Keuangan Top BUMN Awards 2024 Public Company Category - Non-Financial Sector	Bisnis Indonesia Group	Jakarta
2 Oktober 2024 October 2024	Top BUMN *Awards* 2024	*The Most Admired* CEO on *Leading Data Driven Transformation with* Bukit Asam *Business Analytics* - Arsal Ismail	Bisnis Indonesia Group	Jakarta

Tanggal Date	**Penghargaan** Award	**Pencapaian** Achievement	**Penyelenggara** Organizer	**Lokasi** Location
2 Oktober 2024 October 2, 2024	Top BUMN *Awards* 2024	*The Best* CFO BUMN 2024 kategori *Excellent in Sustainability Transparency* - Farida Thamrin, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Bukit Asam Tbk (PTBA) The Best CFO BUMN 2024 in the Excellent in Sustainability Transparency category - Farida Thamrin, Director of Finance and Risk Management of PT Bukit Asam Tbk (PTBA)	Bisnis Indonesia Group	Jakarta
3 Oktober 2024 October 3, 2024	PELINDO *AWARD* 2024	Pelindo Award 2024 *Category - TUKS Owner* (*Customer who have provided maximum contribution to* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in 2024	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) – PELINDO	Jakarta
7 Oktober 2024 October 7, 2024	*Annual Report Award* (ARA) 2023	Juara 2 kategori Perusahaan *Go Publik Non* Keuangan dalam ajang yang diselenggarakan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (7/10/2024). 2nd place in the Non-Financial Public Company category held at the Indonesia Stock Exchange (BEI) Building, Jakarta, Monday, October 7, 2024.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance serta Ikatan Akuntan Indonesia. Financial Services Authority (OJK), Coordinating Ministry for Economic Affairs, Ministry of State-Owned Enterprises, Directorate General of Taxes, Ministry of Finance, Indonesia Stock Exchange, National Committee for Governance Policy, and Indonesian Institute of Accountants.	Jakarta
10 Oktober 2024 October 10, 2024	Penghargaan Subroto 2024 2024 Subroto Award	Penghargaan Subroto Bidang 2024 Bidang Kontribusi Kepada Masyarakat Subroto Award 2024 for Community Contribution	KESDM Energy and Mineral Resources Ministry	Jakarta
10 Oktober 2024 October 10, 2024	Penghargaan Subroto 2024 2024 Subroto Award	Penghargaan Subroto 2024 Bidang Kepatuhan Kewajiban terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Subroto Award 2024 for Compliance with Obligations for Non-Tax State Revenue	KESDM Energy and Mineral Resources Ministry	Jakarta
18 Oktober 2024 October 18, 2024	Global ESG *Award* 2024	Platinum award for *"Education and awareness program" category*	Global Awards 2030 Limited	Dubai, UEA
18 Oktober 2024 October 18, 2024	Global ESG *Award* 2024	Platinum Award for *"Renewable energy integration" category*	Global Awards 2030 Limited	Dubai, UEA
18 Oktober 2024 October 18, 2024	Global ESG *Award* 2024	Gold Award for *"Supporting Economically weaker" category*	Global Awards 2030 Limited	Dubai, UEA
18 Oktober 2024 October 18, 2024	Global ESG *Award* 2024	Gold award for *"Terrestrial biodiversity conservation" category*	Global Awards 2030 Limited	Dubai, UEA
25 Oktober 2024 October 18, 2024	Anugerah Prasetya Ahimsa Prasetya Ahimsa Award	Anugerah Prasetya Ahimsa - Unit Pelabuhan Tarahan Prasetya Ahimsa Award on Tarahan Port Unit	Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara KESDM Directorate General of Minerals and Coal of Energy and Mineral Resources Ministry	Bandung

Tanggal Date	Penghargaan Award	Pencapaian Achievement	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location
25 Oktober 2024 October 25, 2024	Anugerah Prasetya Ahimsa Prasetya Ahimsa Award	Anugerah Prasetya Ahimsa - Unit Dermaga Kertapati Prasetya Ahimsa Award on Kertapati Barging Port Unit	Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara KESDM Directorate General of Minerals and Coal of Energy and Mineral Resources Ministry	Bandung
30 Oktober 2024 October 30, 2024	TOP Human Capital *Award* 2024	*TOP Human Capital Awards 2024 # Star 5*	Top Business	Jakarta
30 Oktober 2024 October 30, 2024	TOP Human Capital *Award* 2024	The Most Committed Top Leader on Human Capital 2024 - Suherman, Direktur Sumber Daya Manusia PT Bukit Asam Tbk (PTBA). The Most Committed Top Leader on Human Capital 2024 - Suherman, Human Resources Director PT Bukit Asam Tbk (PTBA).	Top Business	Jakarta
14 November 2024 November 14, 2024	BUMN *Branding and Marketing Awards*	*The Best Empowering Brands, Building Nations: Optimizing BUMN's Potential Through Exceptional Talents & Advanced Technological Support*	DM ID - WIR Group	Jakarta
14 November 2024 November 14, 2024	BUMN *Branding and Marketing Awards*	*Platinum Winner kategori Empowering Brands, Building Nations: Optimizing BUMN's Potential Through Exceptional Talents & Advanced Technological Support Contributing to National Image and Economic Growth*	DM ID - WIR Group	Jakarta
14 November 2024 November 14, 2024	BUMN *Branding and Marketing Awards*	Gold Winner category Brand Strategy Excellence Brand Agility & Perception.	DM ID - WIR Group	Jakarta
20 November 2024 November 20, 2024	CNBC Indonesia *Communication Strategists Awards*	*Corporate Communication Strategist*	CNBC Indonesia	Jakarta
21 November 2024 November 21, 2024	ASSRAT 2024	Platinum Medal - *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT) 2024	National Center for Corporate Reporting (NCCR)	Jakarta
25 November 2024 November 25, 2024	*Corporate Governance Perception* Index *Award* 2024	*Indonesia The Most Trusted Company*	Majalah SWA bersama Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) SWA Magazine and Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG)	Jakarta
26 November 2024 November 26, 2024	Tamasya *Award* 2024	Penghargaan Kinerja Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Mineral dan Batu bara (*Tamasya Award*) Tahun 2024 kategori Badan Usaha Pertambangan Batu bara Skala Besar 2024 Mineral and Coal Community Development and Empowerment Performance Award (Tamasya Award) in the Large-Scale Coal Mining Business Entity category	Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara KESDM Directorate General of Minerals and Coal of Energy and Mineral Resources Ministry	Jakarta
5 Desember 2024 December 5, 2024	TOP Digital *Award* 2024	*Top Digital Implementation 2024 # Star 5*	Majalah IT Works IT Works Magazine	Jakarta
5 Desember 2024 December 5, 2024	TOP Digital *Award* 2024	Arsal Ismail - *Top Leader on Digital Implementation 2024*	Majalah IT Works IT Works Magazine	Jakarta
11 Desember 2024 December 11, 2024	CNBC Indonesia *Awards* 2024	Arsal Ismail - *Best CEO in Energy Company*	CNBC Indonesia	Jakarta
18 Desember 2024 December 18, 2024	Serelo CSR *Awards* 2024	*Trofi Gold* dan dinobatkan sebagai Perusahaan Terbaik Gold Trophy for the Best Company Category	Pemerintah Kabupaten Lahat Lahat Regency Government	Lahat

Sertifikasi yang Masih Berlaku pada Tahun 2024
2024 Valid Certification



No	Nama Sistem /Sertifikat Name of System/ Certification	Lingkup Sertifikasi Certification Coverage	Nomor Sertifikat Number of Certificate	Masa Berlaku Validity		Badan Sertifikasi/ Akreditasi Certification/ Accreditation Body	Keterangan Description
				Sejak Start	Sampai End		
1	ISO 9001:2015	PTBA	2018-2-2463	05/3/2024	05/03/2027	PT TÜV SÜD Indonesia	Sertifkat Ke-9 9th Certificate
2	ISO 14001:2015	PTBA	2018-0736	04/03/2024	04/03/2027		Sertifikat Ke-7 7th Certificate
3	ISO 45001:2018	PTBA	TUV 106 15 3893	03/04/2024	27/02/2027		Sertifikat Ke-3 3rd Certificate
4	SNI ISO/IEC 17025:2017	Lab. Penguji UPTE UPTE testing Lab	LP-073-IDN	22/03/2021	21/03/2026	Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Committee	Akreditasi ke-4 4th Certificate
5		Lab. Kalibrasi UPTE UPTE Calibration Lab	LK-068-IDN	22/03/2021	21/03/2026		Akreditasi ke-3 3rd Certificate
6		Lab. Mekanika Tanah UPTE UPTE Soil Mechanism Lab	LP-075-IDN	28/08/2022	21/03/2026		Akreditasi ke-5 5th Certificate
7		Lab. Penguji Pelabuhan Tarahan Tarahan Port Testing Lab	LP-070-IDN	20/03/2022	20/03/2027		Akreditasi ke-5 5th Certificate
8		Lab. Penguji Derti Derti Testing Lab	LP-093-IDN	04/10/2024	03/10/2029		Akreditasi ke-5 5th Certificate

No	Nama Sistem /Sertifikat Name of System/ Certification	Lingkup Sertifikasi Certification Coverage	Nomor Sertifikat Number of Certificate	Masa Berlaku Validity		Badan Sertifikasi/ Akreditasi Certification/ Accreditation Body	Keterangan Description
				Sejak Start	Sampai End		
9	SNI ISO/IEC 17043:2010	Lab Penguji UPTE UPTE Testing Lab	PUP-025-IDN	16/12/2020	15/12/2025	Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Committee	Akreditasi ke-1 1st Certificate
10	SMK3 PP No. 50/2012	Korporat dan UPTE Corporate and UPTE	REG.SMK3.2022.BKI. SK-350	13/05/2022	14/05/2025	Kementerian Ketenaga kerjaan Manpower Ministry	Sertifikat ke-4 4th Certificate
11		Pelabuhan Tarahan Tarahan Port	REG.SMK3.2022.BKI. SK-351				Sertifikat ke-4 4th Certificate
12		Dermaga Kertapati Kertapati Barging Port	REG.SMK3.2022.BKI. SK-349				Sertifikat ke-4 4th Certificate
13	ISPS Code	Dermaga Kertapati Kertapati Barging Port	02-0513-DV	01/09/2020	23/08/2025	Dirjen Perhubungan Laut Directorate General of Sea Transportation	Sertifikat ke-4 4th Certificate
14		Pelabuhan Tarahan Tarahan Port	02-0509-DN	30/04/2020	05/05/2025		Sertifikat ke-4 4th Certificate
15		Pelabuhan Teluk Bayur Teluk Bayur Port	002-0211-DN	18/09/2020	02/06/2025		Sertifikat ke-4 4th Certificate
16	SMP Perpol 07 Tahun 2019	Dermaga Kertapati Kertapati Barging Port	S/124/VI/PAM.1/2024	25/06/2024	24/06/2027	Mabes Polri National Police Headquarters	Sertifikat Ke-1 1st Certificate
17		Pelabuhan Tarahan Tarahan Port	S/125/VI/PAM.1/2024				Sertifikat Ke-1 1st Certificate
18		UPTE	S/336/XII/PAM.1/2024	9/12/2024	9/12/2027		Sertifikat Ke-1 1st Certificate
19	ISO 37001:2016	PTBA	03 13 F 23000408	20/06/2023	19/06/2026	PT TÜV SÜD Indonesia	Sertifikat Ke-1 1st Certificate
20	ISO 22301:2019	PTBA	BCMS 767223	03/08/2022	02/08/2025	PT BSI Indonesia	Sertifikat Ke-1 1st Certificate
21	ISO/IEC 27001:2013	PTBA	2023-4-0035	11/02/2023	25/10/2025	PT TÜV SÜD Indonesia	Sertifikat Ke-1 1st Certificate
22	ISO 50001:2018	UPTE	2024-5-0008	24/01/2024	07/01/2027	PT TÜV SÜD Indonesia	Sertifikat Ke-1 1st Certificate
23	ISO/IEC 20000-1 : 2018	PTBA	IT SMS-2025-0039	28/01/2025	27/01/2028	PT TÜV SÜD Indonesia	Sertifikat Ke-1 1st Certificate

Peristiwa Penting
Important Highlights

Januari 2024
January 2024



Bukit Asam (PTBA) Memacu Inovasi dan Pengembangan Usaha

PTBA Spurs for Innovation and Business Development

2 Maret 2024
March 2, 2024



Bukit Asam (PTBA) Gencar Bangun PLTS untuk Pertanian

PTBA Intensifies SPPP Construction for Agriculture

2 March 2024
March 2, 2024



HUT ke-43, Bukit Asam (PTBA) Merintis Masa Depan

PTBA's 43rd Anniversary, Pioneering the Future

8 March 2024
March 8, 2024



Didukung Kinerja Operasional, Bukit Asam (PTBA) Raih Laba Bersih Rp6,11 Triliun di 2023

Supported by Operational Performance, PTBA Achieves Rp6.11 Trillion Net Profit in 2023

14 Maret 2024
March 14, 2024



Sambut Bulan Ramadan, Bukit Asam (PTBA) Salurkan 10.000 Paket Sembako

PTBA Disburses 10,000 Staple Goods Packages in Ramadan

23-24 Maret 2024
March 23-24, 2024



Bukit Asam (PTBA) Manfaatkan Lahan Bekas Tambang untuk Pusat Persemaian hingga Kota Wisata

PTBA Optimizes Ex Mining Site for Nursery, Tourism

2 April 2024
April 2, 2024



Safari Ramadan BUMN 2024, Bukit Asam (PTBA) Siapkan 1.000 Paket Sembako Murah

PTBA Readies 1,000 Staple Goods Packages for Safari Ramadan

April 2024
April 2024



Bukit Asam (PTBA) Menuju Perusahaan Energi Kelas Dunia yang Peduli Lingkungan

PTBA Towards World Class Energy with Environment Consideration

2 Mei 2024
May 2, 2024



Produksi dan Penjualan Tumbuh, PTBA Raih Pendapatan Rp9,41 Triliun di Triwulan I 2024

Production and Sales Growth, PTBA Achieves Revenue of Rp9.41 Trillion in the Quarter 1 of 2024

8 Mei 2024
May 8, 2024



RUPS Tahun Buku 2023, Bukit Asam (PTBA) Bagikan Dividen Rp4,58 Triliun

GMS for fiscal year 2023, Bukit Asam (PTBA) Distribute Dividends of Rp4.58 Trillion

3 Juni 2024
June 3, 2024



Dukung Pariwisata Borobudur, Bukit Asam (PTBA) Rehabilitasi DAS di Bukit Menoreh

Supporting Borobudur Tourism, Bukit Asam (PTBA) Rehabilitates Watershed in Menoreh Hill

7 Juni 2024
June 7, 2024



Bukit Asam (PTBA) Bagikan Dividen Rp 4,58 Triliun Hari Ini

Bukit Asam (PTBA) Distributes Dividends of Rp 4.58 Trillion Today

12 - 13 Juni 2024
June 12 - 13, 2024



Hari Lingkungan Hidup, Bukit Asam (PTBA) Edukasi Pelajar Sekolah Dasar

Environment Day, Bukit Asam (PTBA) Educates Elementary School Students

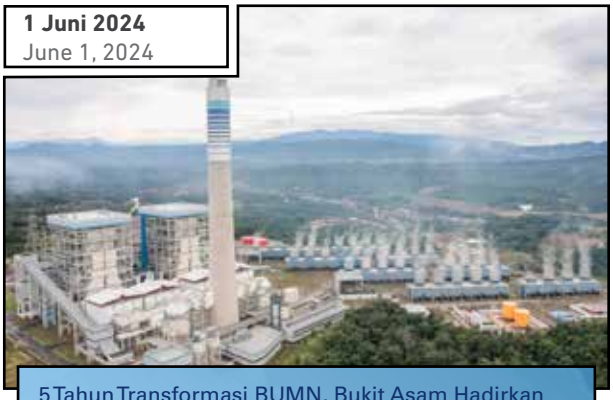
14 Juni 2024
June 14, 2024



Idul Adha 1445 H, Bukit Asam (PTBA) Salurkan 196 Sapi dan 65 Kambing Kurban

Eid al-Adha 1445 H, Bukit Asam (PTBA) Distributes 196 Cows and 65 Goats for Sacrifice

1 Juni 2024
June 1, 2024



5 Tahun Transformasi BUMN, Bukit Asam Hadirkan Energi Tanpa Henti untuk Negeri

5 Years of SOEs Transformation, Bukit Asam Presents Non-Stop Energy for the Country

15 Juni 2024
June 15, 2024



Pertama di Dunia, Bukit Asam dan BRIN Mulai Kembangkan Batu Bara untuk Bahan Baku Baterai Li-ion

World's First, Bukit Asam and BRIN Start to Developing Coal for Li-ion Battery Feedstock

1 Agustus 2024
August 1, 2024



Bukit Asam (PTBA) Raih Laba Bersih Rp2,03 Triliun di Semester I 2024

PTBA Secures Net Profit of Rp2.03 Trillion in Semester I 2024

13 Agustus 2024
August 13, 2024



Bukit Asam (PTBA) Terima Hak Paten untuk Aplikasi CISEA dan Lahan Basah Buatan Terapung

PTBA Receives Patent Rights for CISEA Application and Floating Artificial Wetlands

18 Agustus 2024
August 18, 2024



Kado HUT ke-79 RI untuk Petani, Bukit Asam (PTBA) Resmikan PLTS Irigasi di Tanjung Agung

Independence Day Gift for Farmers, PTBA Inaugurates Irrigation SPPP in Tanjung Agung

22-23 Agustus 2024
August 22-23, 2024



Cegah Abrasi, Bukit Asam (PTBA) Tanam Mangrove di Pantai Taluak

PTBA Plants Mangroves on Taluak Beach to Prevent Abrasion

1 Agustus 2024
August 1, 2024



Capai Rekor Penjualan di 6 Bulan Pertama, Bukit Asam (PTBA) Terus Perluas Pasar

Reaching Sales Record in the First 6 Months, PTBA Continues to Expand Market

10 September 2024
September 10, 2024



Kelompok Pembibitan Eco Agrotomation Binaan Bukit Asam Panen Perdana Melon Premium

Eco Agrotomation Nursery Group Fostered by Bukit Asam First Harvest of Premium Melons

12 September 2024
September 12, 2024



Dua Anak Usaha Bukit Asam (PTBA) Sinergi Perdagangan Karbon

Two Bukit Asam Subsidiaries Synergize in Carbon Trading

19 September 2024
September 19, 2024



Dukung Keberhasilan Rehabilitasi DAS, Bukit Asam (PTBA) Ikut Menandatangani Piagam Menoreh

Supporting the Success of Watershed Rehabilitation, Bukit Asam Took Part in the Menoreh Charter Signing

23 September 2024
September 23, 2024



Jaga Ekosistem Laut, Bukit Asam (PTBA) dan Para Ibu Desa Sidodadi Melakukan Restorasi Padang Lamun

PTBA and Sidodadi Village Carry Out Seagrass Restoration to Protect Marine Ecosystem

25 September 2024
September 25, 2024



Bukit Asam (PTBA) Sabet 5 Penghargaan Good Mining Practice dari Kementerian ESDM

Bukit Asam (PTBA) wins 5 Good Mining Practice Awards Mining Practice from the Ministry of Energy and Mineral Resources

30 September 2024
September 30, 2024



Dukung Pemenuhan Kebutuhan Listrik Nasional, Bank Mandiri Teken Kerjasama Strategis dengan PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP)

Supporting the Fulfillment of National Electricity Needs, Bank Mandiri Signs Strategic Cooperation with PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP)

30 September 2024
September 30, 2024



Sinergi Bukit Asam (PTBA) dan 3 Bank Himbara untuk Fasilitas Pemanfaatan DHE SDA

Synergy of PTBA and 3 SOEs Banks for DHE SDA Utilization Facilities

7 Oktober 2024
October 7, 2024



Bukit Asam (PTBA) Raih Penghargaan Annual Report Award 2023

PTBA Won 2023 Annual Report Award

10 Oktober 2024
October 10, 2024



Ciptakan Inovasi, Insan Bukit Asam Dianugerahi Dua Satyalancana dan Tiga Dharma Karya

Bukit Asam People Awarded Two Satyalancana and Three Dharma Karya Awards for Innovation

10 Oktober 2024
October 10, 2024



Kontribusi Optimal Bukit Asam (PTBA) Berbuah Dua Penghargaan Subroto 2024

PTBA Won Two Subroto Awards for Optimal Contribution

16 Oktober 2024
October 16, 2024



Tingkatkan Kemampuan Numerasi Anak, Bukit Asam Gelar Pelatihan Metode Gasing di Lampung

Bukit Asam Holds Gasing Method Training in Lampung to Improve Kids Numeral Skill

18 Oktober 2024
October 18, 2024



Bukit Asam (PTBA) Bawa Pulang Empat Penghargaan dari Global ESG Awards

PTBA Secures Four Awards from Global ESG Awards

24 Oktober 2024
October 24, 2024



Kembangkan Biomassa dari Kaliandra Merah, Bukit Asam (PTBA) Bangun Pilot Plant Wood Pellet

PTBA Builds Pilot Plant Wood Pellet to Develop Biomass from Red Kaliandra

25 Oktober 2024
October 25, 2024



Bukit Asam (PTBA) Terima Dua Anugerah Prasetya Ahimsa dari Kementerian ESDM

PTBA Won Two Prasetya Ahimsa Awards from ESDM Ministry

25 Oktober 2024
October 25, 2024



Tingkatkan Peran Perempuan di Industri Pertambangan, Srikandi Bukit Asam Jalin Sinergi dengan *Women in Mining and Energy*

Bukit Asam Establishes Synergy with Women in Mining and Energy to Increasing the Role of Women in the Mining Industry

30 Oktober 2024
October 30, 2024



Bukit Asam (PTBA) Cetak Laba Bersih Rp3,23 Triliun Hingga Triwulan III 2024

Bukit Asam (PTBA) Records Net Profit of Rp3.23 Trillion Until Q3 2024

6 November 2024
November 6, 2024



Bukit Asam (PTBA) Hadirkan Energi Surya untuk Para Petani di Desa Lugusari

Bukit Asam Brings Solar Energy to Farmers in Lugusari Village

November 2024
November 2024



Tekan Emisi, PLTU MT Sumsel-8 Menerapkan Teknologi Khusus

Mine Mouth Sumsel-8 CFPP Implements Special Technology to Reduce Emmissions

12 November 2024
November 12, 2024



Bukit Asam (PTBA) Bangun Berangau Park, Ruang Terbuka Hijau untuk Masyarakat Tanjung Enim

Bukit Asam Builds Berangau Park, Green Open Space for Tanjung Enim

21 November 2024
November 21, 2024



Bukit Asam (PTBA) Raih Platinum di Asia Sustainability Reporting Rating 2024

PTBA Won Platinum at 2024 Asia Sustainability Reporting Rating

12 Desember 2024
December 12, 2024



Peluncuran Prototype Asam Humat

The Launching of Humic Acid Prototype

BukitAsam



Manajemen PTBA telah menetapkan arah yang jelas dan dituangkan dalam bentuk strategi yang tepat untuk membawa Perusahaan meraih pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.
The management of PTBA has set a clear direction and formulated appropriate strategies to achieve sustainable business growth for the Company.



Laporan Manajemen
Management Report

Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners



Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif M.Sc.
Komisaris Utama | President Commissioner

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga PT Bukit Asam Tbk dapat melalui tahun 2024 yang penuh tantangan dan dinamika dengan meraih kinerja yang baik. Di tengah kondisi perekonomian yang masih mengalami ketidakpastian, PTBA tetap menegaskan komitmen untuk terus berkontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia. Semua gejolak ekonomi tersebut mendorong PTBA untuk beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan industri dan menyiapkan pondasi untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Seiring dengan langkah Perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan, izinkan saya mewakili Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tahunan PTBA Tahun Buku 2024 yang dapat memberikan gambaran mengenai berbagai upaya Perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Pandangan terhadap Kondisi Ekonomi dan Industri

Proses pemulihan ekonomi global terus berlangsung meskipun tantangan seperti inflasi tinggi, suku bunga global yang masih belum kembali ke level normal, serta ketidakpastian geopolitik masih membayangi. Berdasarkan laporan World Economic Outlook yang diterbitkan Dana Moneter Internasional (IMF) pada Januari 2025, ekonomi global diproyeksikan hanya tumbuh 3,2% di tahun 2024 yang berarti lebih lambat dari tahun sebelumnya sebesar 3,3%.

Ekonomi di dalam negeri juga demikian, kendati masih dapat tumbuh cukup solid, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh 5,03%, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 5,05%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh konsumsi domestik yang kuat, investasi infrastruktur, dan kenaikan ekspor non-migas.

Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Let us send the utmost praise and gratitude to the presence of God Almighty, since due to His grace and blessings, PTBA can manage to sail through the challenging 2024 with positive performance growth. In the midst of uncertainty in economic conditions, PTBA continues to affirm its commitment to make a real contribution to the Indonesian economy. All of these economic turmoils have encouraged PTBA to adapt quickly to face changes in the industry and prepare the foundations to achieve a better future.

Along with the Company's steps in facing various challenges, allow me on behalf of the Board of Commissioners to deliver the PTBA Annual Report for the 2024 Financial Year which provides an overview of the Company's efforts to bring added value for shareholders and other stakeholders.

Outlook on Economic and Industrial Conditions

The global economic recovery process continues amidst challenges such as high inflation, global interest rates that have not yet returned to normal levels, and geopolitical uncertainty still loom. Based on the World Economic Outlook report published by the International Monetary Fund (IMF) in January 2025, the global economy is projected to grow only 3.2% in 2024, which is slower than the previous year by 3.3%.

This condition is similar to the domestic economy, although it can still grow quite solidly. Indonesia's economic growth has slowed slightly compared to the previous year. Based on data from Statistics Indonesia (BPS), Indonesia's economy in 2024 grew 5.03%, slightly lower than 2023 at 5.05%. Indonesia's economic growth is supported by strong domestic consumption, infrastructure investment, and an increase in non-oil and gas exports.

Di tengah kondisi tersebut, industri batu bara masih menunjukkan kinerja yang baik kendati juga menghadapi sejumlah tantangan. Peningkatan perhatian pada energi terbarukan dan target dekarbonisasi negara-negara maju dapat memengaruhi permintaan batu bara jangka panjang, meskipun dalam jangka pendek batu bara tetap menjadi sumber energi yang signifikan. Adapun fluktuasi harga batu bara masih berlanjut akibat perubahan permintaan global, kebijakan impor negara-negara besar seperti Tiongkok dan India, serta gangguan rantai pasok global, meskipun dampaknya tidak sampai seperti di tahun 2023.

Di tingkat domestik, kebijakan Pemerintah, kaitannya dengan kebijakan bauran energi nasional yang mengupayakan keseimbangan antara kebutuhan energi fosil dan transisi ke energi bersih, menjadi faktor penting dalam industri batu bara. Kemudian dari sisi ekspor, permintaan batu bara Indonesia tetap tinggi, terutama dari negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara, seperti Tiongkok, India, Thailand, dan Vietnam. Meski demikian, industri batu bara tetap menjadi penyumbang devisa yang signifikan, khususnya dengan harga batu bara yang relatif stabil di pasar global sepanjang tahun 2024.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk memastikan Perusahaan dijalankan sesuai dengan visi, misi, dan rencana strategis yang telah disepakati oleh pemegang saham. Selain itu, Dewan Komisaris juga memastikan bahwa Perusahaan telah dikelola sesuai prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta memperhatikan aspek keberlanjutan.

Pengawasan terhadap Perumusan Strategi Perusahaan

Kendati tidak terlibat dalam kegiatan operasional Perusahaan secara langsung, Dewan Komisaris juga turut serta dalam merumuskan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Dewan Komisaris memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi sebelum RKAP tersebut dimintakan persetujuan kepada pemegang saham.

Dewan Komisaris menyampaikan berbagai pertimbangan, termasuk juga aspirasi dari pemegang saham agar dapat tercakup dalam rencana dan kebijakan strategis Perusahaan yang akan menjadi acuan dalam menjalankan program kerja Perusahaan pada tahun buku. Oleh karena itu, Dewan Komisaris bersama Komite di bawah Dewan Komisaris telah melakukan serangkaian pembahasan

In the midst of these conditions, the coal industry is still showing promising performance while facing several challenges. Increased attention to renewable energy and decarbonization targets in developed countries can affect long-term coal demand, although in the short-term coal remains a significant energy source. Meanwhile, coal price fluctuations continue to linger due to changes in global demand, import policies of major countries such as China and India, and disruptions to the global supply chain, although the impact is not as severe as in 2023.

At the domestic level, government policies, related to the national energy mix policy that seeks a balance between fossil fuel needs and the transition to clean energy, are important factors in the coal industry. Meanwhile, from the export side, demand for Indonesian coal remains high, especially from South and Southeast Asian countries, such as China, India, Thailand, and Vietnam. However, the coal industry remains a significant contributor to foreign exchange, especially with relatively stable coal prices in the global market throughout 2024.

Implementation of the Board of Commissioners' Duties

Throughout 2024, the Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities to supervise and provide advice to the Board of Directors to ensure the Company runs in accordance with the vision, mission, and strategic plan agreed upon by the shareholders. In addition, the Board of Commissioners also ensures that the Company is managed in accordance with the principles of Good Corporate Governance and pays attention to sustainability aspects.

Supervision of the Company's Strategy Formulation

Although not directly involved in the Company's operational activities, the Board of Commissioners also takes part in formulating the Company's strategic strategies and policies. In preparing the Company's Work Plan and Budget (CWPB), the Board of Commissioners provides input and recommendations to the Board of Directors before the CWPB is requested for approval from the shareholders.

The Board of Commissioners conveys various considerations, including aspirations from shareholders to be included in the Company's strategic plans and policies which will be used as a reference in implementing the Company's work program in the financial year. Therefore, the Board of Commissioners together with the Committee under the Board of Commissioners have conducted

dalam proses persiapan usulan RKAP. Pada akhirnya, Dewan Komisaris akan memberikan persetujuannya terhadap RKAP yang dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Pengawasan terhadap Implementasi Strategi Perusahaan

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan secara aktif memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi. Hal ini sesuai dengan fungsi Dewan Komisaris sebagai pengawas pengelolaan perusahaan oleh Direksi agar senantiasa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas upaya Perseroan dalam merealisasikan program hilirisasi pada tahun 2024. Langkah strategis ini menunjukkan komitmen PTBA untuk meningkatkan nilai tambah produk batu bara melalui diversifikasi bisnis yang inovatif dan berorientasi pada keberlanjutan serta tentunya mendukung tema strategis hilirisasi pemerintah.

Perseroan telah berhasil melaksanakan *soft launching* pabrik untuk *pilot project Coalite to Artificial Graphite* dan *Anode Sheet* bekerja sama dengan BRIN. Proyek ini telah mencapai keberhasilan pada skala laboratorium dan prototipe, menunjukkan bukti konkret langkah PTBA dalam memasuki ekosistem bisnis industri baterai kendaraan listrik (*EV battery*). Inisiatif ini menempatkan PTBA sebagai pelopor dalam transformasi bisnis batu bara menuju sektor energi terbarukan dan komponen penting untuk industri kendaraan listrik, sesuai dengan tren global.

Selain itu, *groundbreaking* Pabrik Asam Humat merupakan tonggak penting lain dalam hilirisasi batu bara kalori rendah. Produk asam humat memiliki manfaat besar, seperti memperbaiki struktur tanah, menyuburkan tanaman, dan menstabilkan pH tanah, sehingga berkontribusi pada sektor pertanian yang lebih produktif. Dalam pengembangannya, kolaborasi PTBA dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan pendekatan sinergis dengan institusi akademik untuk memanfaatkan penelitian dan teknologi terbaik.

Tahun 2024, Perusahaan memperkenalkan jargon "Energi Tanpa Henti". Dewan Komisaris menilai bahwa jargon "Energi Tanpa Henti" yang digaungkan PTBA merepresentasikan semangat Perusahaan untuk terus berinovasi, menjaga keberlanjutan bisnis, dan

discussions in a series of processes for preparing the CWPB proposal. Ultimately, the Board of Commissioners will give its approval to the CWPB which is carried out through a Decree of the Board of Commissioners.

Supervision of the Implementation of the Company's Strategy

During 2024, the Board of Commissioners has carried out supervision of the management of the company carried out by the Board of Directors and actively provided advice and input to the Board of Directors. This is in accordance with the function of the Board of Commissioners as a supervisor of the management of the company by the Board of Directors to always complies with the provisions of the Articles of Association and the Decision of the GMS, as well as applicable laws and regulations for the benefit of the company and in accordance with the intent and purpose of the company.

The Board of Commissioners appreciates the Company's efforts in realizing the downstream program in 2024. This strategic step demonstrates PTBA's commitment to increasing the added value of coal products through innovative and sustainability-oriented business diversification and of course supports the government's strategic downstream theme.

The Company has successfully carried out a soft launch of the factory for the Coalite to Artificial Graphite and Anode Sheet pilot project in collaboration with BRIN. This project has succeeded on a laboratory and prototype scale, showing concrete evidence of PTBA's steps in entering the electric vehicle battery (EV battery) industry business ecosystem. This initiative puts PTBA as a pioneer in the transformation of the coal business towards the renewable energy sector and an important component for the electric vehicle industry, in line with global trends.

In addition, the groundbreaking of the Humic Acid Plant is another important milestone in the downstreaming of low-calorie coal. Humic acid products have great benefits, such as improving soil structure, fertilizing plants, and stabilizing soil pH, thus contributing to a more productive agricultural sector. In its development, PTBA's collaboration with Universitas Gadjah Mada (UGM) shows a synergistic approach with academic institutions to utilize the best research and technology.

In 2024, the Company introduced the slogan "Energi Tanpa Henti" or 'Unstoppable Energy'. The Board of Commissioners assessed that the slogan echoed by PTBA represents the Company's spirit to innovate, maintain business sustainability, and contribute to

memberikan kontribusi ketahanan energi nasional, meskipun menghadapi berbagai tantangan pasar. Jargon ini dinilai selaras dengan visi dan misi PTBA, yaitu menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan.

Dewan Komisaris mengapresiasi implementasi jargon ini melalui langkah nyata, seperti pengembangan biomassa *wood pellet* dari budidaya kaliandra merah sebagai bahan *cofiring* pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), ekspansi ke pasar ekspor strategis, peningkatan efisiensi operasional, dan keberlanjutan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Semua inisiatif ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap visi jangka panjangnya, termasuk peningkatan kinerja operasional perusahaan, diversifikasi bisnis, dan pelibatan aktif masyarakat dalam rangka penciptaan ekonomi sirkuler.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai jargon "Energi Tanpa Henti" tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga menjadi cerminan dari strategi perusahaan yang terarah dan komitmen kuat terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan.

Mekanisme dan Frekuensi Pengawasan

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi melalui beberapa mekanisme, antara lain dengan memeriksa laporan bulanan dan melakukan pengawasan tambahan melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Direksi mengelola perusahaan sesuai dengan target dan strategi yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Dewan Komisaris menggunakan mekanisme secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi Perusahaan. Mekanisme secara langsung dilakukan melalui kunjungan ke tempat-tempat kegiatan Perusahaan, baik yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris maupun oleh anggota Komite di bawah Dewan Komisaris. Sedangkan mekanisme secara tidak langsung dilakukan melalui rapat dengan mengundang Direksi.

Selain itu, Dewan Komisaris terlibat secara aktif dalam memberikan arahan kepada Direksi melalui beberapa kegiatan utama. Kegiatan tersebut antara lain, rapat internal Dewan Komisaris dan rapat gabungan dengan mengundang Direksi sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan membahas kondisi dan prospek bisnis serta kebijakan pemerintah yang berdampak pada kinerja Perusahaan.

national energy security, despite facing various market challenges. This slogan is considered in line with PTBA's vision and mission, namely to become a world-class energy company that cares about the environment.

The Board of Commissioners appreciates the implementation of this slogan through concrete steps such as the development of biomass wood pellets from calliandra cultivation as cofiring materials at Coal Fired Power Plants (CFPP), expansion into strategic export markets, increasing operational efficiency, and the sustainability of social and environmental responsibility programs. All of these initiatives reflect the company's commitment to its long-term vision, including improving the company's operational performance, business diversification, and active community involvement in creating a circular economy.

Overall, the Board of Commissioners assessed that the slogan is not merely a slogan, but also a reflection of the company's focused strategy and strong commitment to sustainable growth.

Supervision Mechanism and Frequency

The Board of Commissioners supervises the Board of Directors through several mechanisms, including by examining monthly reports and conducting additional supervision through the Audit Committee, the Integrated Risk and Governance Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. This supervision aims to ensure the Board of Directors manages the company in accordance with the determined targets and strategies, and to identify areas requiring improvement.

The Board of Commissioners uses direct and indirect mechanisms to supervise the implementation of the Company's strategy. Direct mechanisms are carried out through visits to the Company's activities, both by members of the Board of Commissioners and by members of the Committee under the Board of Commissioners. Meanwhile, indirect mechanisms are carried out through meetings by inviting the Board of Directors.

In addition, the Board of Commissioners is actively involved in providing direction to the Board of Directors through several main activities. These activities include internal meetings of the board of commissioners and joint meetings by inviting the Board of Directors as a form of coordination in order to discuss the Board of Directors' periodic reports and discuss business conditions and prospects as well as government policies that impact the

Pada kesempatan tersebut, Dewan Komisaris memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam Risalah Rapat. Di sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris melakukan 14 (empat belas) kali rapat internal dan 12 (dua belas) kali rapat gabungan bersama dengan Direksi.

Dewan Komisaris memberikan arahan strategis dan memastikan bahwa Direksi mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif dan tepat sasaran. Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Direksi dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Mekanisme ini memastikan bahwa ada tata kelola yang baik dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan, yang penting untuk mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan dan keberlanjutan PTBA. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan hak dan wewenang Direksi dalam pengelolaan Perusahaan.

Saran dan Nasihat

Dewan Komisaris senantiasa memberikan saran dan nasihat kepada Direksi, sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Di sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah memberikan saran dan nasihat kepada Direksi berdasarkan pertimbangan masukan dari Komite yang merupakan organ pendukung Dewan Komisaris, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Bidang Keuangan
    a. Dewan Komisaris senantiasa mengingatkan manajemen untuk menyusun langkah mitigasi risiko yang cermat, sekaligus menyusun analisis *stress test* dan mengkaji *business continuity plan* secara komprehensif, agar dapat melampaui target.
    b. Dewan Komisaris menekankan pentingnya pengelolaan arus kas yang lebih selektif berdasarkan skala prioritas dan urgensi Perseroan oleh Direksi.
    c. Dewan Komisaris mengingatkan agar pelaksanaan investasi dilakukan sesuai dengan skala prioritas dan kondisi likuiditas perusahaan, serta didukung dengan kajian kelayakan yang memadai dan telah dipertimbangkan segala mitigasi risiko yang dibutuhkan.

Company's performance. On this occasion, the Board of Commissioners provided responses, notes and advice which were stated in the Minutes of Meeting. Throughout 2024, the Board of Commissioners held 14 (fourteen) internal meetings and 12 (twelve) joint meetings with the Board of Directors.

The Board of Commissioners provides strategic direction and ensures that the Board of Directors implements the policies effectively and on target. They also conduct regular evaluations of the Board of Directors' performance and provide constructive feedback. This mechanism ensures the implementation of good governance and transparency in the management of the company, which is important to maintain stakeholder trust and the sustainability of PTBA. In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners adheres to applicable laws and regulations while still considering the rights and authorities of the Board of Directors in managing the Company.

Suggestions and Advice

The Board of Commissioners always provides suggestions and advice to the Board of Directors, as part of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in supervising the management of the Company carried out by the Board of Directors. Throughout 2024, the Board of Commissioners has provided suggestions and advice to the Board of Directors based on consideration of input from the Committee which is a supporting organ of the Board of Commissioners, with the following description:

1. Financial Sector
    a. The Board of Commissioners always reminds management to prepare careful risk mitigation steps, as well as prepare stress test analysis and review business continuity plans comprehensively, in order to exceed targets.
    b. The Board of Commissioners emphasized the importance of more selective cash flow management based on the Company's priority scale and urgency by the Board of Directors.
    c. The Board of Commissioners reminds management that investment implementation must be carried out in accordance with the company's priority scale and liquidity conditions, and supported by adequate feasibility studies and all necessary risk mitigation has been considered.

2. Bidang Produksi
   a. Dewan Komisaris menghimbau agar pengelolaan *Stripping Ratio* (SR) dengan memperhatikan dinamika perubahan harga.
   b. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mengkaji opsi peningkatan produksi untuk mengantisipasi ke depan jika tambang tidak lagi menghasilkan batu bara.
   c. Dewan Komisaris mengingatkan Direksi untuk melakukan evaluasi langkah efisiensi HPP dengan menyusun langkah mitigasi risiko konkret dengan memperhatikan kontrak angkut, kontrak dengan *vendor Third Party Mining Cost*, serta upaya lainnya untuk mendukung penurunan tingkat HPP.

3. Bidang Angkutan
   a. Dewan Komisaris mengingatkan Direksi untuk menyusun *roadmap* Strategi *Unlocking Logistic* Bukit Asam dalam Rangka Monetisasi Cadangan Batu bara PTBA melalui pengembangan beberapa proyek angkutan.
   b. Direksi dapat mencari lokasi-lokasi tambang yang memiliki jarak angkut yang lebih pendek sehingga dapat mengurangi biaya angkut.
4. Bidang Pemasaran
   a. Dewan Komisaris mengingatkan Direksi untuk menyusun langkah mitigasi risiko dalam upaya pencapaian dan optimalisasi penjualan ekspor agar kinerja pendapatan bisa tercapai.
   b. Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk melakukan upaya-upaya percepatan penjualan batu bara, mengingat persediaan batu bara yang tinggi berisiko terjadinya swabakar dan dapat meningkatkan biaya penyimpanan,
   c. Dewan Komisaris mendukung upaya Direksi untuk peningkatan penjualan melalui *Free on Board Mother Vessel* (FOB MV).
   d. Sebagai upaya *check & balance*, SPI disarankan untuk melakukan pendampingan serta audit tematik atas pelaksanaan tata kelola penjualan pelabuhan lain (FOB MV) agar dapat memotret kelemahan pengendalian serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan dalam upaya peningkatan pelaksanaan tata kelola penjualan FOB MV tersebut.
   e. Direksi PTBA agar menyusun langkah mitigasi yang cermat dalam upaya menjaga realisasi pencapaian penjualan FOB MV sesuai target, dengan tetap mengedepankan azas tata kelola yang baik.
   f. Direksi diminta untuk menyusun langkah mitigasi risiko dalam upaya pencapaian dan optimalisasi penjualan, agar kinerja pendapatan bisa tercapai di atas target yang ditetapkan.

2. Production Sector
   a. The Board of Commissioners appeals for the management of the Stripping Ratio (SR) to take into account the dynamics of price changes.
   b. The Board of Commissioners asked the Board of Directors to review the option of increasing production to anticipate the future if the mine no longer produces coal.
   c. The Board of Commissioners reminded the Board of Directors to evaluate the efficiency steps of HPP by preparing concrete risk mitigation steps by paying attention to transportation contracts, contracts with Third Party Mining Cost vendors, and other efforts to support the reduction of the HPP level.
3. Transportation Sector
   a. The Board of Commissioners reminded the Board of Directors to prepare a roadmap for Bukit Asam's Unlocking Logistic Strategy in the Framework of Monetizing PTBA's Coal Reserves through the development of several transportation projects.
   b. The management can look for mining locations with shorter transport distances to reduce transport costs.
4. Marketing Sector
   a. The Board of Commissioners reminds the Board of Directors to prepare risk mitigation measures in an effort to achieve and optimize export, to achieve revenue performance.
   b. The Board of Commissioners encourages the Board of Directors to make efforts to accelerate coal sales, considering that high coal supplies are at risk of spontaneous combustion and can increase storage costs,
   c. The Board of Commissioners supports the Board of Directors' efforts to increase sales through Free on Board Mother Vessel (FOB MV).
   d. As an effort to check & balance, SPI is advised to provide assistance and thematic audits on the implementation of other port sales management (FOB MV) in order to capture control weaknesses and provide recommendations for improvements needed in an effort to improve the implementation of FOB MV sales management.
   e. The Board of Directors of PTBA must prepare careful mitigation steps in an effort to maintain the realization of FOB MV sales achievements according to the target, while still prioritizing the principles of good governance.
   f. The Board of Directors is asked to prepare risk mitigation steps in an effort to achieve and optimize sales, in order to achieve revenue performance above the determined target.

5. Bidang Tata Kelola Terintegrasi dan Pengelolaan Risiko
   a. Dalam menjalankan setiap kegiatan operasional perusahaan, Direksi diharapkan menerapkan pengendalian risiko sesuai dengan program manajemen risiko yang telah direncanakan, melaksanakan bisnis dengan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
   b. Dewan Komisaris mengingatkan Direksi agar melakukan integrasi proses manajemen risiko, baik di Induk dan Anak Perusahaan. Penerapan budaya risiko agar menjadi perhatian utama Direksi dan manajemen, agar proses pengambilan keputusan serta langkah mitigasi yang diambil dilakukan secara terukur dan tepat. Hal ini juga mendukung terciptanya *early warning system* yang optimal dalam upaya pencapaian sasaran perusahaan.

6. Bidang Teknologi Informasi
   a. Dewan Komisaris mengingatkan Direksi agar memastikan tersedianya *predictive maintenance system* di PTBA untuk mengawasi proses perawatan dan kondisi peralatan dan mesin produksi di PTBA.
   b. Dewan Komisaris mendorong agar praktik baik dari PTBA dalam penggunaan sistem digital untuk pemantauan dan pelaporan risiko terus dipertahankan. Ini termasuk penggunaan aplikasi yang memungkinkan pemantauan risiko secara real-time dan analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
7. Bidang Nominasi, Remunerasi, dan Sumber Daya Manusia
   a. Dalam setiap perubahan organisasi, Dewan Komisaris senantiasa mengingatkan agar: (1) memastikan manajemen menyediakan kelengkapan organisasi seperti prosedur internal organisasi yang baru, tugas pokok dan fungsi sekaligus penilaian kinerja baik secara direktorat sampai pada tingkat individu pegawai, (2) melakukan sosialisasi kepada pegawai dan help desk jika dibutuhkan untuk memastikan proses perubahan struktur organisasi dapat berjalan dengan baik dan terkendali, (3) memastikan dalam penempatan struktur yang baru, setiap pegawai menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta (4) mengevaluasi struktur organisasi secara rutin agar senantiasa kompatibel terhadap bisnis proses Perseroan sekaligus kompetitif terhadap pesaing.

5. Integrated Governance and Risk Management
   a. In carrying out every operational activity of the company, the Board of Directors is expected to implement risk control in accordance with the planned risk management program, carry out business with a prudent principle and guided by applicable laws and regulations, and implement the principles of Good Corporate Governance (GCG).
   b. The Board of Commissioners reminds the Board of Directors to integrate the risk management process, both in the Parent Company and Subsidiaries. The implementation of risk culture should be the main concern of the Board of Directors and management, so the decision-making process and mitigation steps taken are carried out in a measured and precise manner. This also supports the creation of an optimal early warning system in efforts to achieve the company's goals.
6. Information Technology
   a. The Board of Commissioners reminds the Board of Directors to ensure the availability of a predictive maintenance system at PTBA to monitor the maintenance process and condition of production equipment and machines at PTBA.
   b. The Board of Commissioners encourages PTBA's good practices in using digital systems for risk monitoring and reporting to be maintained. This includes the use of applications that enable real-time risk monitoring and data analysis for better decision-making.

7. Nomination, Remuneration, and Human Resources
   a. In every organizational change, the Board of Commissioners always reminds to: (1) ensure that management provides organizational completeness such as new internal organizational procedures, main tasks, and functions as well as performance assessments both at the directorate level to the individual employee level, (2) conduct socialization to employees and the help desk if needed to ensure that the process of changing the organizational structure can run well and under control, (3) ensure that in the placement of the new structure, each employee upholds the principles of good governance, and (4) evaluate the organizational structure routinely to be always compatible with the Company's business processes and competitive with competitors.

b. Terdapat peningkatan pada beberapa aspek kinerja SDM, namun sejumlah tantangan utama seperti kecukupan SDM, produktivitas karyawan dan kecelakaan kerja masih perlu mendapat perhatian.

8. Bidang Pengembangan Usaha
   a. Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan perguruan tinggi di sekitar wilayah penambangan untuk mendukung riset dan pengembangan teknologi baru yang dapat diterapkan dalam komersial PTBA.
   b. Perlu memperhatikan perkembangan pengembangan transisi energi global. Untuk itu, sangat penting bagi PTBA untuk mengoptimalkan riset yang telah dijalankan dan memastikan hasil pengembangan riset dapat bermanfaat dari sisi kelayakan keekonomian.
9. Kinerja Anak Perusahaan
   a. Direksi agar menjalankan langkah-langkah rencana penyehatan kinerja keuangan beberapa anak perusahaan, dengan menyusun mitigasi risiko yang konkret disertai timeline penyelesaiannya.
   b. Dewan Komisaris mendukung agar manajemen melakukan upaya efisiensi beban pokok anak serta dukungan Satker Hukum & Regulasi Induk membantu penyelesaian permasalahan legal di anak perusahaan.
10. Program K3L dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
    a. Dewan Komisaris mendorong agar penyaluran dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dapat direalisasikan sesuai dengan peruntukannya dan agar diprioritaskan untuk di wilayah sekitar lokasi kegiatan usaha perusahaan.

    b. Terkait Program UMK, manajemen diminta untuk melakukan upaya penagihan secara konsisten dan masif, pendekatan dengan para debitur melalui *follow up* komunikasi secara intensif. Implementasi penagihan piutang dilakukan dengan aktif memberikan solusi atas kendala yang dialami para debitur. Selain itu, dalam melakukan penyelesaian piutang bermasalah tersebut, agar sesuai dengan *SOP* dan *timeline* yang telah ditentukan.
    c. Dewan Komisaris mendorong manajemen selalu mengupayakan secara maksimal, serta membantu memfasilitasi dan mendampingi UMK Binaan pada tahapan listing produk di platform PaDi UMKM guna meningkatkan volume transaksi.

    d. Berkenaan dengan pelaksanaan CSR & TJSL, Dewan Komisaris mengingatkan Direksi untuk memastikan bahwa setiap penyaluran yang diberikan Perseroan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, yang dapat diukur melalui indikator yang berbasis *output* dan *outcome*.

b. There have been improvements in several aspects of HC performance, but a number of key challenges such as HC adequacy, employee productivity and work accidents still need attention.

8. Business Development
   a. Approaching and coordinating with universities around the mining area to support research and development of new technologies that can be applied in PTBA's commercial.

   b. It is necessary to pay attention to the development of the global energy transition. Therefore, it is important for PTBA to optimize the on-going research and ensure the results of the research development can be beneficial in terms of economic feasibility.
9. Subsidiary Performance
   a. The Board of Directors must implement steps to improve the financial performance of several subsidiaries, by preparing concrete risk mitigation along with a timeline for completion.
   b. The Board of Commissioners supports management to make efforts to make subsidiaries' main burden efficiency and support from the Parent Legal Work Unit to help resolve legal issues in subsidiaries.
10. OHSE Program and Social and Environmental Responsibility
    a. The Board of Commissioners encourages the distribution and implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) to be realized in accordance with its designation and to be prioritized in the areas around the company's business activities.
    b. Regarding the MSE Program, management is asked to make consistent and massive collection efforts, approaching debtors through intensive communication follow-up. Implementation of receivables collection is carried out by actively providing solutions to the obstacles experienced by debtors. In addition, in resolving problematic receivables, it must be in accordance with the SOP and timeline that have been determined.

    c. The Board of Commissioners encourages management to always make maximum efforts, and to help facilitate and assist the Fostered SMEs at the product listing stage on the PaDi SMEs platform in order to increase transaction volume.
    d. Regarding the implementation of CSR & TJSL, the Board of Commissioners reminds the Board of Directors to ensure that every distribution provided by the Company provides benefits to the surrounding community, which can be measured through indicators based on output and outcome.

e. Dewan Komisaris mengingatkan Direksi agar memastikan masalah K3L menjadi perhatian dan perlu ditingkatkan pengawasannya agar tidak terjadi *fatality* di kemudian hari.

11. Bidang Pengelolaan Aset
    a. Dewan Komisaris mendorong perusahaan melakukan optimalisasi aset, termasuk menyusun strategi yang tepat atas aktivitas pascatambang, dengan memastikan kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan telah sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki perusahaan, sehingga hasilnya dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
    b. Direksi diminta untuk mengevaluasi setiap perjanjian Kerjasama pendayagunaan aset tetap yang belum dan/atau telah dilaksanakan, apabila dinilai bahwa kerjasama tersebut berpotensi untuk tidak memberikan keuntungan atau belum memberikan keuntungan yang optimal bagi PTBA dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
    c. Direksi diminta untuk terus melakukan pengamanan atas aset-aset milik perusahaan, diantaranya melalui sertifikasi kepemilikan dan/atau pengelolaan dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian atas Kinerja Direksi

Dewan Komisaris memberikan penghargaan kepada Direksi atas kemampuan mereka mengelola perusahaan di tengah tantangan pasar yang kompleks. Penilaian terhadap kinerja Direksi mencakup aspek ekonomi dan sosial, serta kemampuan berinovasi dalam model bisnis, kepemimpinan dalam teknologi, meningkatkan investasi, dan mengembangkan talenta. Meskipun terdapat penurunan dalam beberapa indikator keuangan, Direksi berhasil memperkuat stabilitas operasional, mengurangi dampak penurunan indeks harga batu bara, dan mengoptimalkan peluang di pasar yang masih memiliki pertumbuhan konsumsi batu bara yang tinggi, yang menjadi elemen krusial dalam memastikan keberlanjutan bisnis perusahaan.

Dalam mengevaluasi kinerja Direksi, Dewan Komisaris merujuk pada KPI yang disepakati dalam kontak Manajemen antara Kuasa Selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) PT Mineral Industri Indonesia/MIND ID dan Direksi PT Bukit Asam Tbk sebagai dasar pengawasan. Dewan Komisaris juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap setiap inisiatif strategis yang diambil oleh Direksi yang tertuang dalam RKAP untuk memastikan kesesuaian program dengan rencana perusahaan. Dewan Komisaris menegaskan bahwa, meskipun terdapat tantangan yang

e. The Board of Commissioners reminds the Board of Directors to ensure that OHS issues are a concern and need to be monitored more closely to avoid fatality in the future.

11. Asset Management Sector
    a. The Board of Commissioners encourages the company to optimize assets, including developing appropriate strategies for post-mining activities, by ensuring that the business activities carried out by the company are in accordance with the expertise and competencies possessed by the company, so the results can provide added value for the company.
    b. The Board of Directors is requested to evaluate each fixed asset utilization cooperation agreement that has not been and/or has been implemented if it is assessed that the cooperation has the potential to not provide benefits or has not provided optimal benefits for PTBA while still paying attention to applicable laws and regulations.
    c. The Board of Directors is requested to continue to secure the company's assets, including through certification of ownership and/or management by referring to applicable laws and regulations.

Board of Directors Performance Assessment

The Board of Commissioners lauded the Board of Directors for their ability to manage the company amidst complex market challenges. The assessment of the Board of Directors' performance includes economic and social aspects, as well as the ability to innovate in business models, leadership in technology, increase investment, and develop talent. Despite a decline in several financial indicators, the Board of Directors succeeded in strengthening operational stability, reducing the impact of the decline in the coal price index, and optimizing opportunities in markets that still have high coal consumption growth, which are crucial elements in ensuring the sustainability of the company's business.

In evaluating the performance of the Board of Directors, the Board of Commissioners refers to the KPIs agreed upon in the Management contact between the Attorney as the Series A Dwiwarna Shareholder of the is Perusahaan Perseroan (Persero) PT Mineral Industri Indonesia/MIND ID and the Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk as the basis for supervision. The Board of Commissioners also monitors and evaluates every strategic initiative taken by the Board of Directors as stated in the CWPB to ensure the program's suitability with the company's plan. The Board of Commissioners emphasized that, despite

dihadapi, upaya Direksi dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan dan menjaga keseimbangan keuangan layak mendapatkan apresiasi.

Penilaian ini dilakukan berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPI) Manajemen yang telah disepakati pada Kontrak Manajemen di awal tahun sebagai pedoman untuk mengukur keberhasilan Direksi dalam mencapai tujuan strategis perusahaan. KPI tersebut mencakup lima aspek utama, yaitu:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia,
2. Inovasi Model Bisnis,
3. Kepemimpinan Teknologi,
4. Peningkatan Investasi, dan
5. Pengembangan Talenta.

Aspek pertama, Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, memiliki bobot terbesar dalam penilaian karena mencakup target-target kinerja finansial dan operasional, termasuk pencapaian laba perusahaan, efisiensi operasional, serta kontribusi nyata perusahaan terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dalam aspek ini, Direksi dinilai berhasil mewujudkan kinerja yang solid melalui implementasi strategi operasional yang efektif serta kontribusi pada agenda pembangunan berkelanjutan.

Pada aspek Inovasi Model Bisnis, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi mampu menghadirkan terobosan baru yang tidak hanya memperkuat daya saing perusahaan tetapi juga membuka peluang bisnis baru yang relevan dengan perkembangan pasar. Hal ini termasuk diversifikasi usaha yang selaras dengan kebutuhan industri dan adaptasi terhadap perubahan dinamika global.

Dalam aspek Kepemimpinan Teknologi, Direksi dinilai berhasil mengintegrasikan teknologi canggih untuk mendukung proses bisnis inti, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat posisi perusahaan sebagai pelopor dalam sektor industrinya. Penggunaan teknologi juga menjadi katalis dalam menghadapi tantangan industri yang semakin kompleks.

Pada aspek Peningkatan Investasi, Direksi menunjukkan komitmen yang kuat dalam menarik investasi yang mendukung ekspansi bisnis dan memperkuat struktur permodalan perusahaan. Dewan Komisaris mengapresiasi pendekatan strategis yang diambil untuk memastikan investasi dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan risiko dan dampak jangka panjang.

Terakhir, pada aspek Pengembangan Talenta, Direksi dinilai berhasil menciptakan lingkungan kerja yang mendorong inovasi, kolaborasi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Program pengembangan karyawan

the challenges faced, the Board of Directors' efforts in improving the company's operational performance and maintaining financial balance deserve appreciation.

This assessment is based on the Management Key Performance Indicators (KPI) agreed upon in the Management Contract at the beginning of the year as a guideline to measure the Board of Directors' success in achieving the company's strategic goals. The KPIs cover five main aspects, namely:

1. Economic and Social Value for Indonesia,
2. Business Model Innovation,
3. Technology Leadership,
4. Investment Increase, and
5. Talent Development.

The first aspect, Economic and Social Value for Indonesia, has the largest weight in the assessment because it includes financial and operational performance targets, including the company's profit achievement, operational efficiency, and the company's real contribution to national economic development and community welfare. In this aspect, the Board of Directors is considered successful in realizing solid performance through the implementation of effective operational strategies and contributions to the sustainable development agenda.

In the Business Model Innovation aspect, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors is able to present new breakthroughs that not only strengthen the company's competitiveness but also open up new business opportunities that are relevant to market developments. This includes business diversification in accordance with industry needs and adaptation to changes in global dynamics.

In the Technology Leadership aspect, the Board of Directors is considered capable in integrating advanced technology to support core business processes, improve operational efficiency, and strengthen the company's position as a pioneer in its industrial sector. The use of technology is also a catalyst in facing increasingly complex industry challenges.

In the aspect of Increasing Investment, the Board of Directors shows a strong commitment to attracting investment that supports business expansion and strengthens the company's capital structure. The Board of Commissioners appreciates the strategic approach taken to ensure that investments are made optimally by considering long-term risks and impacts.

Meanwhile, in the Talent Development aspect, the Board of Directors is considered successful in creating a work environment that encourages innovation, collaboration, and improving human resource competency. A

yang terstruktur serta fokus pada mencetak talenta unggul menjadi salah satu kekuatan perusahaan dalam mempertahankan daya saing jangka panjang.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah memenuhi sebagian besar target yang ditetapkan dalam KPI dan menunjukkan kepemimpinan yang efektif dalam mengelola perusahaan di tengah tantangan industri dan ekonomi global. Namun, Dewan Komisaris juga mendorong Direksi untuk terus meningkatkan kinerja pada aspek-aspek tertentu, terutama dalam mengantisipasi perubahan pasar dan memperkuat keberlanjutan usaha perusahaan.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Prospek Usaha 2025

Dewan Komisaris memandang prospek usaha PTBA ke depan sebagai sesuatu yang menjanjikan, meskipun terdapat tantangan akibat penurunan permintaan di pasar batu bara global. Dalam situasi ini, Perusahaan harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik untuk mempertahankan daya saing di pasar. Selain itu, pendekatan *cost leadership* tetap menjadi elemen kunci untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah persaingan yang semakin ketat dan dinamis.

Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029 yang diluncurkan pada akhir tahun 2024, aspirasi PTBA untuk terus meningkatkan kinerja operasional terlihat sangat ambisius, dengan target produksi mencapai 75 juta ton. Target ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk memperkuat posisinya sebagai pemain utama di industri batu bara, melalui efisiensi operasional dan peningkatan produktivitas.

Selain fokus pada kinerja operasional, RJPP juga mencerminkan visi jangka panjang PTBA untuk meningkatkan kontribusi dari bisnis energi, khususnya dari bisnis pembangkit. Ini sejalan dengan aspirasi perusahaan dalam mentransformasikan dirinya menjadi perusahaan energi, sekaligus mendukung agenda ketahanan energi nasional. Inisiatif ini melibatkan pengembangan bisnis energi off grid di grup MIND ID dan energi baru dan terbarukan (EBT) di lahan pasca tambang. Selain itu, Perusahaan juga terus mengupayakan hilirisasi yang akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris optimis bahwa dengan strategi yang terukur, fokus pada efisiensi, dan inovasi berkelanjutan, PTBA mampu menghadapi tantangan industri dan meraih peluang di masa depan. Namun, Dewan Komisaris juga menekankan pentingnya menjaga fleksibilitas strategi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika pasar, serta meningkatkan kolaborasi dengan mitra strategis

structured employee development program that focuses on producing superior talent is one of the company's strengths in maintaining long-term competitiveness.

Overall, the Board of Commissioners assesses the Board of Directors has met most of the targets set in the KPI and demonstrated effective leadership in managing the company amidst global industrial and economic challenges. However, the Board of Commissioners also encourages the Board of Directors to continue improving performance in certain aspects, especially in anticipating market changes and strengthening the sustainability of the company's business.

Board of Commissioners' View on Business Prospects in 2025

The Board of Commissioners views PTBA's future business prospects as promising, despite challenges due to declining demand in the global coal market. In this situation, the Company must ensure the products produced are of the best quality to maintain competitiveness in the market. In addition, the cost leadership approach remains a key element in maintaining business sustainability amidst increasingly tight and dynamic competition.

Based on the Company's Long-Term Plan (RJPP) 2025-2029 launched at the end of 2024, PTBA's aspirations to continue improving operational performance are considered ambitious, with a production target of 75 million tons. This target shows the company's commitment to strengthening its position as a major player in the coal industry, through operational efficiency and increased productivity.

In addition to focusing on operational performance, the RJPP also reflects PTBA's long-term vision to increase contributions from the energy business, especially from the power plant business. This is in line with the company's aspirations to transform itself into an energy company, while supporting the national energy security agenda. This initiative involves the development of off-grid energy business in the MIND ID group and new and renewable energy (EBT) in post-mining land. In addition, the Company also continues to strive for downstreaming to bring added value for the company and stakeholders.

The Board of Commissioners is optimistic that a measurable strategy, focus on efficiency, and continuous innovation, can support the company to face industry challenges and seize opportunities in the future. However, the Board of Commissioners also emphasized the importance of maintaining strategic flexibility to adapt to market dynamics, as well as increasing collaboration

guna mempercepat pencapaian aspirasi perusahaan. Dengan langkah-langkah ini, PTBA diyakini akan mampu mempertahankan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnisnya, bahkan di tengah tekanan global.

Terkait RKAP tahun 2025 yang telah disusun oleh Direksi, salah satu target yang dicanangkan Perusahaan adalah target produksi dan penjualan yang menyentuh angka 50 juta ton, yang mencerminkan kenaikan sekitar 21% dari target tahun sebelumnya, menunjukkan ambisi Perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja operasionalnya. Dewan Komisaris memandang hal ini sebagai langkah positif untuk memperkuat posisi PTBA di industri, meskipun perlu diiringi dengan strategi yang cermat guna menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif.

Peningkatan belanja modal (CAPEX) juga dipandang sebagai langkah strategis untuk mendukung pengembangan usaha, terutama dalam meningkatkan kapasitas produksi dan angkutan. Namun, Dewan Komisaris menekankan pentingnya manajemen risiko yang ketat dalam pengelolaan utang yang digunakan untuk mendanai investasi ini agar tidak membebani kinerja keuangan perusahaan di masa depan. Transparansi dan efisiensi dalam alokasi CAPEX menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan setiap investasi memberikan hasil yang optimal.

Dewan Komisaris juga memberikan perhatian khusus terhadap perubahan bauran produk yang mulai menambah porsi GAR 4200, yang memiliki pasar sangat kompetitif. Hal ini akan menuntut perusahaan untuk meningkatkan resiliensi dan adaptabilitas, terutama dalam hal efisiensi biaya dan strategi pemasaran. Perusahaan perlu memastikan bahwa produk tetap kompetitif, baik dari sisi harga maupun kualitas, untuk mempertahankan dan memperluas pangsa pasar.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris optimis terhadap prospek RKAP 2025 yang ambisius, namun menekankan pentingnya pelaksanaan yang disiplin, pengelolaan risiko yang matang, dan fokus pada efisiensi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris juga siap mendukung Direksi dalam memastikan implementasi RKAP berjalan sesuai rencana, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan dan *Whistleblowing System*

Dewan Komisaris dan Direksi PTBA berdedikasi penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip dan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/ GCG) dalam semua kegiatan perusahaan. Tanggung

with strategic partners to accelerate the achievement of the company's aspirations. With these steps, PTBA is believed to be able to maintain its business growth and sustainability, even amidst global pressure.

Regarding the 2025 CWPB (Work Plan and Budget) prepared by the Board of Directors, one of the targets set by the Company is to achieve production and sales of 50 million tons, reflecting an increase of approximately 21% from the previous year's target. This demonstrates the Company's ambition to continuously enhance its operational performance. The Board of Commissioners views this as a positive step toward strengthening PTBA's position in the industry, although it must be accompanied by well-considered strategies to address the increasingly competitive market challenges.

Increasing capital expenditure (CAPEX) is also considered as a strategic step to support business development, especially in increasing production and transportation capacity. However, the Board of Commissioners emphasized the importance of strict risk management in managing debt used to fund this investment to avoid burden in the company's financial performance in the future. Transparency and efficiency in CAPEX allocation are important aspects to ensure that each investment provides optimal results.

The Board of Commissioners also pays special attention to changes in the product mix that are more focused on the GAR 4200, which has a very competitive market. This will require the company to increase resilience and adaptability, especially in terms of cost efficiency and marketing strategy. The company needs to ensure that products remain competitive, both in terms of price and quality, to maintain and expand market share.

Overall, the Board of Commissioners is optimistic about the prospects for the ambitious 2025 CWPB, but emphasizes the importance of disciplined implementation, mature risk management, and a focus on efficiency to achieve the targets that have been set. The Board of Commissioners is also ready to support the Board of Directors in ensuring the implementation of the CWPB runs according to plan, while still paying attention to the principles of prudence and sustainability.

Implementation of Corporate Governance and Whistleblowing System

The Board of Commissioners and Board of Directors of PTBA are dedicated to implementing the principles and practices of Good Corporate Governance (GCG) in all company activities. The Board of Commissioners'

jawab Dewan Komisaris meliputi tidak hanya hasil akhir tetapi juga pemantauan berkelanjutan atas proses untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. Mengikuti petunjuk dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris melalui komitenya, khususnya komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, secara teliti mengawasi dan meninjau kepatuhan operasional Perusahaan terhadap peraturan hukum dan praktik terbaik GCG, baik secara nasional maupun internasional.

Dewan Komisaris menyatakan penghargaan kepada Direksi dan jajarannya atas usaha mereka dalam meningkatkan praktik GCG di Bukit Asam. Implementasi GCG memainkan peran vital dalam mendorong manajemen perusahaan yang profesional, efisien, dan efektif, terutama mengingat risiko dan tantangan yang meningkat yang dihadapi perusahaan. Dewan Komisaris juga sangat mendukung inisiatif Perusahaan untuk terus mengukur penerapan GCG, mengacu pada ketentuan best practices yang berlaku seperti diantaranya *Corporate Governance Perception Index* (CGPI), ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dan, SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Hingga saat ini, implementasi GCG di perusahaan telah berlangsung dengan baik, dengan kerjasama yang efektif antara organ GCG di bawah Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga fungsi dan tanggung jawab masing-masing organ pendukung telah berjalan sesuai dengan kebijakan GCG Bukit Asam. Selain itu, dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 mengenai Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris percaya bahwa peraturan tersebut dapat meningkatkan implementasi tata kelola korporat menjadi lebih baik lagi ke depannya.

Sebagai bagian dari penerapan GCG, Perusahaan juga telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* (WBS) sebagai langkah untuk mencegah *fraud* di lingkungan Perusahaan. Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan WBS di PTBA pada tahun 2024 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pada tahun ini, sistem WBS anggota Holding, termasuk PTBA, memasuki masa transisi mulai bulan November 2024, yang mana saluran pengaduan pelanggaran untuk seluruh Grup MIND ID melalui saluran WBS OpenMIND yang dikelola oleh konsultan KPMG. Sistem ini memungkinkan pelaporan terhadap dugaan pelanggaran dilakukan secara transparan dan terpercaya, dengan tetap menjaga integritas proses serta perlindungan terhadap para pelapor.

responsibilities are ranging from monitoring the process to ensure compliance with applicable laws and procedures and also ensuring the end result. Following the instructions of the Shareholders, the Board of Commissioners through its committees, particularly the Integrated Risk and Governance Oversight Committee, closely monitors and reviews the Company's operational compliance with laws and GCG best practices, both nationally and internationally.

The Board of Commissioners expresses its appreciation to the Board of Directors and its staff for their efforts in improving GCG practices at Bukit Asam. The implementation of GCG plays a vital role in driving professional, efficient, and effective company management, especially considering the increasing risks and challenges faced by the company. The Board of Commissioners also strongly supports the Company's initiative to continuously measure the implementation of GCG, referring to the applicable best practices provisions, such as the Corporate Governance Perception Index (CGPI), ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) and, SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance.

Until now, the implementation of GCG in the company has been running well, with effective cooperation between the GCG organs under the Board of Commissioners and the Board of Directors, resulting a harmonious functions and responsibilities between each supporting organ in accordance with the Bukit Asam GCG policy. In addition, with the issuance of the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, the Board of Commissioners believes this regulation can improve the implementation of corporate governance in the future.

As part of the implementation of GCG, the Company also has a violation reporting system or whistleblowing system (WBS) as a step to prevent fraud in the Company's environment. The Board of Commissioners assesses that the implementation of WBS at PTBA in 2024 has been running well and in accordance with the principles of. This year, the WBS system of Holding members, including PTBA, entered a transition period starting in November 2024, where the violation complaint channel for the entire MIND ID Group is through the WBS OpenMIND channel managed by KPMG consultants. This system allows reporting of alleged violations to be carried out in a transparent and reliable manner, while maintaining the integrity of the process and protection of the whistleblowers.

Sebagai Dewan Pengawas, Dewan Komisaris menjalankan peran penting dalam memastikan WBS diterapkan secara konsisten sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris mengawasi agar setiap laporan yang masuk ditangani secara profesional, independen, dan tanpa konflik kepentingan. Selain itu, Dewan Komisaris berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor serta memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses investigasi, termasuk saksi dan pihak-pihak yang membantu proses tersebut.

Melalui pengawasan yang ketat, Dewan Komisaris memastikan bahwa sistem WBS tidak hanya menjadi alat pelaporan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penting untuk membangun budaya kepercayaan dan integritas di seluruh lingkungan perusahaan. Dengan demikian, WBS menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung upaya perusahaan untuk menjaga transparansi, mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan beretika.

Pandangan terhadap Penerapan ESG

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) oleh perusahaan sepanjang tahun 2024. Kami mengakui upaya perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG ke dalam strategi dan operasional bisnis, yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan serta tanggung jawab sosial. Langkah-langkah seperti pengurangan dampak lingkungan, penguatan hubungan dengan masyarakat lokal, dan peningkatan tata kelola perusahaan menjadi bukti nyata dari upaya tersebut. Hal tersebut tercermin dari pengakuan rating/skor ESG yang didapatkan Perusahaan dari pihak independen pada tahun 2024 ini, di antaranya rating BB dari MSCI, rating B dari CDP, dan skor 33,9 dari *Sustainalytics*. Kami memandang inisiatif dan pengakuan tersebut sebagai bukti dan bagian penting dalam mendukung transformasi PTBA menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi kontribusi Komite ESG yang telah dibentuk sejak tahun 2023 sebagai langkah strategis untuk meningkatkan fokus dan akuntabilitas dalam implementasi prinsip ESG. Komite ini telah berperan signifikan dalam menyusun roadmap dekarbonisasi untuk dimasukkan ke dalam rencana jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029, memantau inisiatif ESG, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keberlanjutan diintegrasikan ke dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kami menghargai kerja keras Komite ESG dalam mendorong perusahaan ke arah praktik yang lebih bertanggung jawab. Selain itu,

As the Supervisory Board, the Board of Commissioners plays an important role in ensuring the WBS implementation is in accordance with the guidelines. In carrying out its duties, the Board of Commissioners oversees that every report received is handled professionally, independently, and without conflict of interest. In addition, the Board of Commissioners is committed to maintaining the confidentiality of the whistleblower's identity and providing protection for all parties involved in the investigation process, including witnesses and parties assisting in the process.

Through strict supervision, the Board of Commissioners ensures that the WBS system is not only a reporting tool, but plays a role as an important mechanism for building a culture of trust and integrity throughout the company environment. Thus, WBS becomes one of the main pillars in supporting the company's efforts to maintain transparency, prevent inappropriate practices, and create a healthy and ethical work environment.

Perspective on ESG Implementation

The Board of Commissioners appreciates the company's implementation of the Environmental, Social, and Governance (ESG) principles throughout 2024. We acknowledge the company's efforts in integrating ESG principles into its business strategy and operations, which demonstrates a commitment to sustainability and social responsibility. Steps such as reducing environmental impacts, strengthening relationships with local communities, and improving corporate governance are concrete evidence of these efforts. This is reflected in the recognition of the ESG rating/score obtained by the Company from independent parties in 2024, including a BB rating from MSCI, a B rating from CDP, and a score of 33.9 from Sustainalytics. We view these initiatives and recognition as evidence and an important part in supporting PTBA's transformation into a world-class energy company that cares about the environment.

The Board of Commissioners also appreciates the contribution of the ESG Committee, formed in 2023, as a strategic step to increase focus and accountability in implementing ESG principles. This committee has played a significant role in preparing a decarbonization roadmap to be included in the Company's 2025-2029 Long-Term Plan (RJPP), monitoring ESG initiatives, and ensuring that sustainability principles are integrated into the company's decision-making. We appreciate the hard work of the ESG Committee in driving the company towards more responsible practices. In addition, we emphasize the importance of accelerating the implementation of

kami menekankan pentingnya percepatan implementasi road map dekarbonisasi sebagai bagian dari dukungan terhadap target *net zero emission* (NZE) Indonesia pada tahun 2060.

Untuk memperkuat penerapan ESG ke depan, Dewan Komisaris merekomendasikan agar perusahaan meningkatkan transparansi dan pelaporan terkait aspek ESG. Ini mencakup pengembangan indikator kinerja (KPI) ESG di seluruh Satuan Kerja yang lebih terukur serta komunikasi yang efektif tentang pencapaian dan tantangan ESG kepada para pemangku kepentingan. Kami juga mendorong perusahaan untuk terus menjalin kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemangku kepentingan lokal, lembaga pemerintah, dan organisasi lingkungan, guna memperoleh wawasan dan mendorong inisiatif yang inovatif serta berdampak. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan tidak hanya akan memperkuat komitmennya terhadap keberlanjutan, tetapi juga mampu memantapkan posisinya sebagai pemimpin dalam penerapan praktik ESG di sektor batu bara dan energi.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) organ penunjang, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Masing-masing komite tersebut dipimpin langsung oleh Dewan Komisaris melalui pembagian tugas sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komite.

Komite Audit memiliki fungsi utama untuk memantau serta mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit guna mendapatkan kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Kemudian Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan berjalan secara efektif, terintegrasi, dan sesuai dengan prinsip GCG. Terakhir dan tak kalah pentingnya, Komite Nominasi dan Remunerasi, yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terkait proses nominasi dan remunerasi bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta pejabat kunci perusahaan.

Dewan Komisaris mengapresiasi kontribusi penting dari berbagai komite dalam mendukung tugas pengawasan dan memberikan saran strategis. Komite-komite ini

the decarbonization road map as part of supporting Indonesia's net zero emission (NZE) target by 2060.

To strengthen the implementation of ESG in the future, the Board of Commissioners recommends that the company improve transparency and reporting related to ESG aspects. This includes the development of more measurable ESG performance indicators (KPIs) across all Work Units and effective communication of ESG achievements and challenges to stakeholders. We also encourage the company to continue to collaborate with relevant parties, including local stakeholders, government agencies, and environmental organizations, to gain insights and drive innovative and impactful initiatives. With these steps, the company will not only strengthen its commitment to sustainability but also able to establish its position as a leader in the implementation of ESG practices in the coal and energy sectors.

Performance Assessment of Committees Under the Board of Commissioners

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by 3 (three) supporting organs, namely the Audit Committee, the Integrated Risk and Governance Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. Each of these committees is led directly by the Board of Commissioners through the division of tasks as Chairperson and Vice Chairperson of the Committee.

The Audit Committee has the main function of monitoring and evaluating the planning and implementation of audits and monitoring the follow-up of audit results in order to obtain adequate internal control, including adequate financial reporting processes. Then the Integrated Risk and Governance Monitoring Committee assists the Board of Commissioners to ensure the implementation of risk management and corporate governance is running effectively, integrated, and in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). Lastly, the Nomination and Remuneration Committee, which assists the Board of Commissioners in carrying out supervisory duties related to the nomination and remuneration process for members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and key officials of the company.

The Board of Commissioners appreciates the major contributions of various committees in supporting the supervisory duties and providing strategic advice. These

telah menunjukkan kinerja yang solid dalam membantu Dewan Komisaris memahami dan menangani tantangan yang dihadapi perusahaan. Dewan Komisaris menilai kinerja komite berdasarkan keefektifan mereka dalam memberikan pandangan dan rekomendasi serta, seberapa baik mereka mengidentifikasi dan merespons isu-isu strategis yang berdampak kepada kinerja perusahaan. Dewan Komisaris memandang komite sebagai mitra penting dalam menjalankan pengawasan yang efektif dan menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara komite dan Dewan Komisaris untuk memastikan keberhasilan perusahaan.

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit melaksanakan rapat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi melakukan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali, dan Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali, dengan tingkat kehadiran anggota Komite yang sangat baik. Hasil pada rapat- rapat ini menjadi landasan bagi Dewan Komisaris untuk menilai kinerja dari masing-masing anggota dalam setiap komite. Dengan seluruh pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh seluruh anggota komite, izinkan Dewan Komisaris sekali lagi untuk menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Tahun 2024, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan tidak mengalami perubahan, yaitu dengan komposisi sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Irwandy Arif
Komisaris Independen	: Kurnia Toha
Komisaris Independen	: Rahmat Hidayat Pulungan
Komisaris Independen	: Andi Pahril Pawi
Komisaris	: E. Piterdono Hz.
Komisaris	: Carlo Brix Tewu

committees have demonstrated solid performance in assisting the Board of Commissioners to understand and address the challenges faced by the Company. The Board of Commissioners assesses the performance of the committees based on their effectiveness in providing insights and recommendations and their ability to identify and respond to strategic issues affecting the Company's performance. The Board of Commissioners acknowledges the committees as important partners in carrying out effective supervision and emphasizes the importance of close cooperation between the committees and the Board of Commissioners to ensure the success of the Company.

Throughout 2024, the Audit Committee held 33 (thirty-three) meetings, the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee held 15 (fifteen) meetings, and the Nomination and Remuneration Committee held 15 (fifteen) meetings, with a very good level of attendance by the Committee members. The results of these meetings serve as a basis for the Board of Commissioners to assess the performance of each member of each committee. With all the implementation of tasks that have been carried out by all members of the committee, allow the Board of Commissioners to once again express its appreciation and gratitude.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

In 2024, there was no change in the composition of the Company's Board of Commissioners, namely with the following composition:

President Commissioner	: Irwandy Arif
Independent Commissioner	: Kurnia Toha
Independent Commissioner	: Rahmat Hidayat Pulungan
Independent Commissioner	: Andi Pahril Pawi
Commissioner	: E. Piterdono Hz.
Commissioner	: Carlo Brix Tewu

Penutup dan Apresiasi

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Direksi serta jajaran manajemen yang telah mampu menghadapi tantangan dan telah memberikan kinerja dan usaha yang baik di tengah kondisi perekonomian yang masih menghadapi ketidakpastian. Kepada para pemangku kepentingan lainnya, kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik, sehingga manajemen bisa menjalankan kegiatan usaha dengan baik di tengah situasi yang penuh tantangan.

Kepada para pemegang saham dan regulator, Dewan Komisaris menyampaikan rasa hormat yang mendalam atas kepercayaan dan dukungan kepada pengurus Perusahaan dalam menjalankan perannya sesuai tugas pokok dan fungsinya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi perkembangan bisnis Perusahaan di masa yang akan datang.

Closing and Appreciation

On this occasion, the Board of Commissioners expresses its appreciation and gratitude to the Board of Directors and management who have faced challenges and have provided terrific performance and efforts amidst uncertain economic conditions. To other stakeholders, we also express our highest appreciation for the cooperation that has been established well, for the management to carry out proper business activities in the midst of in the midst of challenging situations.

To shareholders and regulators, the Board of Commissioners expresses its deep respect for the trust and support to the Company's management in carrying out its role according to its main duties and functions. Hopefully what we have conveyed will be useful for the development of the Company's business in the future.

Jakarta, 29 April 2025
Atas Nama Dewan Komisaris
On Behalf of the Board of Commissioners



Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif M.Sc.
Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Direksi
Report of the Board of Directors



Drs. Arsal Ismail, M.M., MSI
Direktur Utama | President Director

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmatNya yang tak terhingga kepada kita semua, di tengah perlambatan dan ketidakpastian kondisi perekonomian, PT Bukit Asam Tbk mampu menghadapi tantangan tersebut dan mencatatkan kinerja yang baik pada tahun 2024. Untuk mencapai kinerja yang baik tersebut, PTBA telah berhasil melakukan percepatan pertumbuhan kegiatan operasional dan keuangan melalui penerapan strategi yang fokus pada penguatan internal dan mengoptimalkan setiap potensi yang ada.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami melaporkan pengelolaan dan kinerja Perusahaan selama tahun buku 2024 beserta laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) dengan memberikan opini pada laporan konsolidasian disajikan secara "wajar" dalam semua hal yang material.

Kondisi Ekonomi dan Industri Batu Bara

Pada tahun 2024, kondisi ekonomi global menghadapi tantangan yang cukup kompleks, di antaranya ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi di beberapa negara maju, dan fluktuasi harga komoditas. Bank sentral utama, seperti *Federal Reserve* dan *European Central* Bank, cenderung mempertahankan kebijakan moneter yang ketat untuk mengendalikan inflasi yang masih tinggi, meskipun ada tanda-tanda perlambatan inflasi. Di sisi lain, ekonomi Tiongkok menunjukkan pemulihan yang moderat, meskipun masih dibayangi oleh lemahnya sektor properti dan permintaan global yang menurun. Sebagai gambaran, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) memproyeksikan *global GDP growth* di angka 3,2% dan inflasi di negara-negara OECD di angka 5,4% di tahun 2024.

Di Indonesia, perekonomian terus menunjukkan resiliensi, didukung oleh konsumsi domestik yang kuat dan stabilitas makroekonomi. Pemerintah fokus pada peningkatan investasi melalui reformasi struktural dan proyek infrastruktur strategis. Harga komoditas ekspor utama, seperti batu bara dan kelapa sawit, tetap menjadi faktor penting dalam neraca perdagangan Indonesia, meskipun volatilitas di pasar global tetap menjadi risiko.

Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Let us send the utmost praise and gratitude to the presence of God Almighty, since due to His grace and blessings, PTBA can manage to sail through the challenging 2024 with positive performance growth. To achieve this good performance, PTBA has succeeded in accelerating the growth of operational and financial activities through the implementation of strategies focusing on internal strengthening and optimizing every existing potential.

On this occasion, allow us to report on the management and performance of the Company during the 2024 financial year along with the financial statements that have been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) by providing an opinion on the consolidated report presented "fairly" in all material respects.

Economic Conditions and the Coal Industry

In 2024, the global economic conditions face quite complex challenges, including geopolitical uncertainty, economic slowdown in several developed countries, and fluctuations in commodity prices. Major central banks, such as the Federal Reserve and the European Central Bank, tend to maintain tight monetary policies to control high inflation, although there are signs of slowing inflation. On the other hand, the Chinese economy is showing a moderate recovery, although it is still overshadowed by the weak property sector and declining global demand. For illustration, the OECD projected global GDP growth at 3.2% and inflation in OECD countries at 5.4% in 2024.

In Indonesia, the economy continues to show resilience, supported by strong domestic consumption and macroeconomic stability. The government is focused on increasing investment through structural reforms and strategic infrastructure projects. The prices of key export commodities, such as coal and palm oil, remain important factors in Indonesia's trade balance, although volatility in global markets remains a risk. Bank Indonesia is expected

Bank Indonesia diperkirakan mempertahankan kebijakan suku bunga yang hati-hati untuk menjaga stabilitas rupiah sambil mendukung pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan berada di kisaran 5% dan mempertahankan inflasi di kisaran 2%.

to maintain a prudent interest rate policy to maintain rupiah stability while supporting economic growth projected to be in the range of 5% and maintaining inflation in the range of 2%.

Industri batu bara global pada tahun 2024 menghadapi tantangan dari ketatnya kebijakan moneter global, yang meningkatkan biaya pendanaan dan berpotensi menghambat investasi di sektor energi. Di sisi lain, pemulihan ekonomi Tiongkok yang moderat memberikan dampak signifikan, mengingat posisinya sebagai konsumen batu bara terbesar dunia.

The global coal industry in 2024 faces challenges from tighter global monetary policy, which increases funding costs and has the potential to hinder investment in the energy sector. On the other hand, China's moderate economic recovery has a significant impact, given its position as the world's largest coal consumer.

Fluktuasi harga komoditas yang dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik dan transisi energi global juga menciptakan volatilitas yang memengaruhi pendapatan produsen batu bara. Di Indonesia, meskipun tekanan dari pasar ekspor semakin besar akibat kebijakan iklim global, stabilitas ekonomi dan konsumsi domestik, memberikan peluang bagi ekspansi pasar ke negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara, khususnya untuk kebutuhan pembangkit listrik. Namun, ketergantungan pada harga komoditas global tetap menjadi risiko utama bagi keberlanjutan sektor ini.

Fluctuations in commodity prices influenced by geopolitical uncertainty and the global energy transition also lead to volatility affecting the income of coal producers. In Indonesia, despite the increasing pressure from export markets due to global climate policies, economic stability and domestic consumption, provide opportunities for market expansion to South and Southeast Asian countries, especially for power generation needs. However, dependence on global commodity prices remains a major risk to the sustainability of this sector.

Strategi dan Kebijakan Strategis Perusahaan

Company's Strategic Strategy and Policy

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan telah mengimplementasikan sejumlah strategi dan kebijakan strategis untuk mengatasi tantangan global dan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi peningkatan volume penjualan ekspor menjadi fokus utama sebagai respons atas pelemahan harga batu bara di pasar internasional. Langkah ini bertujuan untuk menjaga pendapatan Perusahaan, sekaligus memanfaatkan momentum penguatan kurs USD/IDR yang mendukung peningkatan nilai pendapatan dari ekspor. Dengan memperluas pasar dan volume ekspor, PTBA juga memperkuat daya saing di pasar global.

Throughout 2024, the Company has implemented several strategic strategies and policies to address global challenges and take advantage of existing opportunities. The strategy of increasing export sales volume is the main focus in response to the weakening coal prices in the international market. This step aims to maintain the Company's revenue, while taking advantage of the momentum of the strengthening USD/IDR exchange rate which supports an increase in revenue from export. By expanding the market and export volume, PTBA also strengthens its competitiveness in the global market.

Selain itu, untuk mempercepat monetisasi cadangan batu bara, PTBA mengembangkan kerja sama angkutan non-kereta api (non-KA) guna meningkatkan kapasitas pengangkutan batu bara dari tambang. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada infrastruktur kereta api yang terbatas serta memastikan pasokan dapat memenuhi permintaan pasar dengan lebih fleksibel. Strategi ini mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar yang cepat berubah.

In addition, to accelerate the monetization of coal reserves, PTBA is developing non-railway transportation cooperation to increase the capacity of coal transportation from the mine. This step aims to reduce dependence on limited railway infrastructure and ensure that supply can meet market demand more flexibly. This strategy supports the optimization of the company's resource utilization in facing rapidly changing market dynamics.

Salah satu inisiatif penting yang dijalankan Perusahaan tahun 2024 adalah dengan memperkenalkan jargon "Energi Tanpa Henti". Jargon tersebut menjadi semacam *campaign* untuk ditampilkan di dalam visual

One of the important initiatives carried out by the Company in 2024 is to introduce the "Energi Tanpa Henti" or 'Unstoppable Energy' slogan. This is included in a campaign promoted in the Company's visual content

konten Perusahaan yang dimulai pada tahun 2024. Maksud dari jargon itu sendiri adalah PTBA senantiasa selalu bersemangat memberikan energi positif yang menginspirasi kepada Masyarakat Indonesia. Energi untuk terus berkomitmen dalam melaksanakan kegiatan pertambangan yang berkelanjutan, pengembangan energi, dan keterlibatan masyarakat.

starting in 2024. The slogan aims to show PTBA's enthusiastic in providing positive energy that inspires the Indonesian people. Energy to continue to be committed to implementing sustainable mining activities, energy development, and community involvement.

Terkait implementasinya, dapat dilihat dari capaian Perusahaan di sepanjang tahun 2024. Dalam hal melaksanakan kegiatan pertambangan yang berkelanjutan, Perusahaan senantiasa meningkatkan kinerja operasional, mendukung pertumbuhan kebutuhan energi domestik (DMO), dan konsisten dalam upaya pelestarian lingkungan. Kemudian, atas komitmen pengembangan energi, kami tidak hanya fokus dalam pengembangan PLTU, tetapi sedikit demi sedikit mulai menambah portofolio bisnis kami di Energi bersih, diantaranya pembangunan PLTS bekerja sama dengan BUMN lain, seperti dengan Injourney, Jasa Marga, dan Semen Baturaja. Terakhir dan tak kalah pentingnya adalah komitmen kami dalam keterlibatan Masyarakat, kami secara konsisten memenuhi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diamanahkan Pemerintah, diantaranya melalui inisiatif ekonomi sirkuler yang juga memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* kami di Ring-1 perusahaan.

Regarding its implementation, the 2024 Company's Achievements in sustainable mining activities showed the Company continued to improve operational performance, supports the growth of domestic energy needs (DMO), and is consistent in environmental conservation efforts. Then, for the commitment to energy development, the Company is not only focused on developing CFPP, but starting to add clean energy in our business portfolio including the construction of SPPP in collaboration with other SOEs, such as Injourney, Jasa Marga, and Semen Baturaja. Lastly, we are also committed on community involvement by conducting Social and Environmental Responsibilities mandated by the Government, including through circular economy initiatives that also provide added value to our stakeholders in the company's Ring-1.

Di tahun 2024, Perusahaan juga melanjutkan komitmennya untuk menciptakan nilai tambah melalui program hilirisasi dengan *soft launching pilot project* dua inisiatif strategis, yaitu *Coalite to Artificial Graphite & Anode Sheet* dan *Coal to Humic Acid* (Asam Humat). Kedua program hilirisasi ini menunjukkan komitmen PTBA dalam mengoptimalkan potensi sumber daya secara berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, dan menjawab tantangan transisi energi global dengan produk-produk yang ramah lingkungan dan bernilai tambah tinggi.

In 2024, the Company also continues its commitment to create added value through downstream programs with the soft launch of pilot projects for two strategic initiatives, namely Coalite to Artificial Graphite & Anode Sheet and Coal to Humic Acid. These two downstream programs demonstrate PTBA's commitment to optimizing resource potential sustainably, supporting innovation-based economic growth, and responding to the challenges of the global energy transition with environmentally friendly and high-value-added products.

Program *Coalite to Artificial Graphite & Anode Sheet,* yang berlokasi di Tanjung Enim, bertujuan untuk konversi batu bara ke produk hilir bernilai tinggi yang digunakan dalam pembuatan baterai, sejalan dengan meningkatnya permintaan global untuk kendaraan listrik (EV). Adapun *artificial graphite* merupakan bahan utama untuk pembuatan anoda, yang nantinya menjadi elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi (kutub positif), salah satu komponen penting untuk baterai Li-ion. Kedua proyek ini tidak hanya mendukung diversifikasi bisnis PTBA, tetapi juga mendukung kebijakan nasional dalam mendorong transisi energi dan pengembangan ekosistem baterai di Indonesia.

The Coalite to Artificial Graphite & Anode Sheet program, located in Tanjung Enim, aims to convert coal into high-value downstream products used in battery manufacturing, in line with the increasing global demand for electric vehicles (EVs). Artificial graphite is the main material for making anodes, which will later become electrodes where oxidation reactions (positive poles) occur, one of the important components for Li-ion batteries. These two projects not only support PTBA's business diversification, but also support national policies in encouraging energy transition and the development of battery ecosystems in Indonesia.

Inisiatif *Coal to Humic Acid* (Asam Humat) fokus pada pemanfaatan batu bara berkalori rendah untuk menghasilkan asam humat. Proyek ini berlokasi di IUP

The Coal to Humic Acid initiative focuses on the utilization of low-calorie coal to produce humic acid. This project is located in our IUP in Peranap, Riau. Humic acid is a

kami di Peranap, Riau. Asam humat merupakan sebuah bahan yang digunakan secara luas di sektor pertanian sebagai pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah serta menstabilkan dan memperbaiki tanah. Proyek ini harapannya dapat mendukung sektor pertanian nasional, memperluas pemanfaatan batu bara, sekaligus memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan batu bara.

material widely used in the agricultural sector as an organic fertilizer to increase soil fertility and stabilize and improve the soil. This project is expected to support the national agricultural sector, expand the use of coal, while providing a more sustainable solution in coal management.

Di tahun 2024, PTBA juga mengambil langkah strategis untuk mensinergikan lini bisnis yang dimiliki guna memberikan kontribusi optimal bagi perusahaan secara keseluruhan. Salah satu langkah utamanya adalah dengan mengoptimalkan kinerja anak dan afiliasi Perusahaan (AAP), khususnya yang bergerak di sepanjang *value chain* utama bisnis pertambangan batu bara. Sinergi ini dilakukan melalui koordinasi yang erat dalam perencanaan dan operasional, sehingga setiap entitas mampu memberikan nilai tambah pada rantai pasok secara efisien.

In 2024, PTBA took strategic steps to synergize its business lines for optimal contribution to the company. One of the efforts is to optimize the performance of the Company's subsidiaries and affiliates (AAP), especially those operating along the main value chain of the coal mining business. This synergy is carried out through close coordination in planning and operations, so each entity can provide added value to the supply chain efficiently.

Selain itu, perusahaan juga berfokus pada peningkatan integrasi antara kegiatan hulu, seperti peningkatan kapasitas dan kapabilitas AAP kami yang bergerak di bidang jasa penambangan, PT SBS, untuk mendukung proses produksi. Adapun terkait pendukung kegiatan hilir, seperti logistik, transportasi, dan distribusi, Perusahaan mendukung pengembangan PT BPB dalam membeli *tugboat* yang diproyeksikan melayani proses *barging* di Kertapati (dan Kramasan) sampai ke *transhipment* di Tanjung Kampeh. Kedua pendekatan ini memastikan terciptanya efisiensi biaya, peningkatan produktivitas, dan kelancaran operasional di seluruh lini bisnis. Dengan strategi sinergi yang terukur, PTBA tidak hanya memperkuat daya saing, tetapi juga memastikan keberlanjutan bisnis dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berkembang.

In addition, the company also focuses on increasing integration between upstream activities, such as increasing the capacity and capabilities of our AAP engaged in mining services, PT SBS, to support the production process. Regarding downstream activity support, such as logistics, transportation, and distribution, the Company supports the development of PT BPB in purchasing tugboats that are projected to serve the barging process in Keratapati (and Kramasan) to transhipment in Tanjung Kampeh. These two approaches ensure cost efficiency, increased productivity, and smooth operations across all business lines. With a measurable synergy strategy, PTBA not only strengthens competitiveness, but also ensures business sustainability in the face of ever-evolving market dynamics.

PTBA juga berkomitmen terhadap optimalisasi operasi melalui digitalisasi dan pengelolaan tambang yang lebih efisien. Peninjauan kembali rencana tambang secara mendetail dilakukan setiap tahun untuk memastikan kegiatan operasional berjalan lebih efektif dan sesuai dengan dinamika pasar. Selain itu, pengurangan biaya operasional dijalankan melalui negosiasi strategis dengan mitra kunci, seperti PT KAI, untuk menekan biaya angkutan eksisting. Upaya ini bertujuan menjaga margin keuntungan perusahaan tetap sehat meskipun harga batu bara berfluktuasi.

PTBA is also committed to optimizing operations through digitalization and more efficient mine management. A detailed mine plan review is conducted annually to ensure that operational activities are more effective and in line with market dynamics. In addition, operational cost reductions are carried out through strategic negotiations with key partners, such as PT KAI, to reduce existing transportation costs. This effort aims to maintain the company's profit margins healthy even though coal prices fluctuate.

Melalui langkah-langkah ini, PTBA tidak hanya berupaya mempertahankan kinerja keuangan yang solid di tengah tantangan global, tetapi juga menciptakan peluang pertumbuhan berkelanjutan dengan meningkatkan efisiensi, diversifikasi, dan penguatan pasar.

Through these steps, PTBA did not only maintain solid financial performance amidst global challenges but also created sustainable growth opportunities by increasing efficiency, diversification, and strengthening the market.

Tantangan yang Dihadapi

Sepanjang tahun 2024, PTBA menghadapi sejumlah tantangan signifikan, termasuk fluktuasi harga batu bara yang dipengaruhi oleh dinamika pasar global dan transisi energi yang semakin intensif di negara-negara maju. Untuk mengatasi tantangan ini, PTBA mengadopsi strategi diversifikasi pasar ekspor serta memanfaatkan momentum penguatan kurs USD/IDR untuk menjaga pendapatan.

Kenaikan beban pokok pendapatan juga menjadi tantangan, terutama akibat inflasi global dan kenaikan harga bahan bakar. Sebagai langkah mitigasi, PTBA melakukan optimalisasi operasi dengan memanfaatkan digitalisasi, meninjau ulang rencana tambang secara tahunan, dan melakukan negosiasi strategis dengan mitra utama seperti PT KAI untuk menekan biaya logistik dan angkutan.

Selain itu, kendala operasional akibat cuaca ekstrem, seperti La Niña, memengaruhi aktivitas tambang dan pengangkutan. Untuk mengatasi ini, PTBA meningkatkan fleksibilitas operasional dengan mengadopsi beberapa skenario dalam rencana kontingensi, termasuk memantau kondisi cuaca secara intensif untuk meminimalkan gangguan terhadap rantai pasok.

Analisis Kinerja dan Pencapaian Target

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Perusahaan sepanjang tahun 2024, PTBA berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif dan secara umum berada di atas taget yang ditetapkan. Pencapaian tersebut tak lepas dari strategi yang tepat yang dijalankan Perusahaan yang ditunjang dengan penerapan *Good Mining Practice* serta optimasi pangsa pasar ekspor.

1. Produksi dan Pembelian Batu Bara
   Produksi dan pembelian batu bara mencapai 43,28 juta ton, meningkat sebesar 3,19% dibandingkan tahun 2023 dan melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan ketercapaian 104,69%. Pertumbuhan ini mencerminkan komitmen Perusahaan dalam mengoptimalkan kapasitas produksi guna memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat dan mempercepat monetisasi cadangan batu bara.

2. Angkutan
   Di sisi angkutan batu bara, PTBA berhasil mencatat volume pengangkutan sebesar 38,17 juta ton, yang mencerminkan pertumbuhan signifikan sebesar 17,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja ini juga melampaui target RKAP dengan ketercapaian

Challenges Faced

Throughout 2024, PTBA faces significant challenges, including fluctuations in coal prices influenced by global market dynamics and the increasingly intensive energy transition in developed countries. To overcome these challenges, PTBA has adopted a strategy of diversifying export markets and taking advantage of the momentum of the strengthening USD/IDR exchange rate to maintain revenue.

The increase in the cost of revenue is also a challenge, especially due to global inflation and rising fuel prices. As a mitigation measure, PTBA optimizes operations by utilizing digitalization, reviews mining plans annually, and conducts strategic negotiations with key partners such as PT KAI to reduce logistics and transportation costs.

In addition, operational constraints due to extreme weather, such as La Niña, affect mining and transportation activities. To address this, PTBA increases operational flexibility by adopting several scenarios in its contingency plan, including intensively monitoring weather conditions to minimize disruption to the supply chain.

Performance Analysis and Target Achievement

Amidst the various challenges faced by the Company throughout 2024, PTBA has succeeded in recording positive performance growth and is generally above the determined target. This achievement cannot be separated from the correct strategy implemented by the Company which is supported by the implementation of Good Mining Practice and optimization of export market share.

1. Production and Purchese Coal
   Coal production and purchese reached 43.28 million tons, an increase of 3.19% compared to 2023 and exceeded the target of the Company's Work Plan and Budget (CWPB) with an achievement of 104.69%. This growth reflects the Company's commitment to optimizing production capacity to meet increasing market demand and accelerate the monetization of coal reserves.

2. Transportation
   In terms of coal transportation, PTBA managed to record a transportation volume of 38.17 million tons, reflecting a significant growth of 17.74% compared to the previous year. This performance also exceeded the CWPB target with an achievement of 101.25%,

101,25%, didukung oleh efisiensi operasional dan optimalisasi kerja sama strategis dengan mitra transportasi, termasuk penjualan melalui moda angkutan non-kereta api sebesar 2,74 juta ton.

3. Penjualan
Pada aspek penjualan batu bara, PTBA mencatat volume penjualan sebesar 42,89 juta ton, tumbuh 16,00% dibandingkan tahun 2023. Pencapaian atas kinerja ini mendekati target RKAP dengan ketercapaian sebesar 99,48%. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi peningkatan penetrasi pasar ekspor serta pengelolaan portofolio pelanggan yang efektif. Hal tersebut tercermin dari bauran ekspor Perusahaan sebesar 47,23%, atau ekuivalen dengan 20,26 juta ton, yang merupakan *all-time high* selama Perseroan berdiri.

4. Pendapatan Usaha
Pendapatan usaha PTBA tahun 2024 tercatat sebesar Rp42,76 triliun, mengalami pertumbuhan 11,11% YoY dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp38,49 triliun. Namun, realisasi ini masih berada di bawah target RKAP 2024, dengan pencapaian 97,82% dari yang ditetapkan sebesar Rp43,72 triliun. Pertumbuhan pendapatan ini didukung oleh peningkatan volume penjualan batu bara serta strategi optimasi harga jual melalui peningkatan kinerja ekspor, meskipun terdapat tekanan dari volatilitas harga komoditas global.

5. Laba Bersih
Pada tahun 2024, laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp5,10 triliun. Angka ini mengalami penurunan 16,41% YoY dibandingkan realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp6,11 triliun. Selain itu, laba bersih tahun ini juga belum mencapai target RKAP 2024. Penurunan laba bersih ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk fluktuasi harga batu bara global dan peningkatan beban pokok pendapatan.

6. Aset
Total aset perusahaan mencapai Rp41,79 triliun, meningkat 7,79% YoY dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp38,77 triliun, serta melampaui target RKAP 2024 sebesar 9,70%. Kenaikan ini mencerminkan ekspansi aset yang berkelanjutan, didukung oleh penguatan bisnis utama dan diversifikasi usaha.
   a. Aset lancar PTBA tercatat sebesar Rp15,23 triliun, mengalami peningkatan 0,56% YoY dari Rp15,15 triliun pada tahun sebelumnya dan melampaui target RKAP 2024 sebesar 20,74%, yang menunjukkan likuiditas perusahaan tetap kuat.

supported by operational efficiency and optimization of strategic cooperation with transportation partners, including sales through non-rail transportation modes of 2.74 million tons.

3. Sales
In terms of coal sales, PTBA recorded a sales volume of 42.89 million tons, growing 16.00% compared to 2023. The achievement of this performance is close to the CWPB target with an achievement of 99.48%. This growth was driven by a strategy to increase export market penetration and effective management of customer portfolios. This is reflected in the Company's export mix of 47.23%, or equivalent to 20.26 million tons, which is an all-time high since the Company was founded.

4. Revenue
PTBA's operating revenue in 2024 was recorded at Rp42.76 trillion, experiencing a growth of 11.11% YoY compared to 2023 which reached Rp38.49 trillion. However, this realization is still below the 2024 CWPB target, with an achievement of 97.82% of the set amount of Rp43.72 trillion. This revenue growth was supported by an increase in coal sales volume and a strategy to optimize selling prices through increased export performance, despite pressure from global commodity price volatility.

5. Net Profit
In 2024, net profit attributable to owners of the parent entity was recorded at Rp5.10 trillion. This figure decreased by 16.41% YoY compared to the realization in 2023 which reached Rp6.11 trillion. In addition, this year's net profit has not yet reached the 2024 CWPB target. This decrease in net profit was caused by several factors, including fluctuations in global coal prices and an increase in the cost of revenue.

6. Assets
The company's total assets reached Rp41.79 trillion, an increase of 7.79% YoY compared to the realization in 2023 of Rp38.77 trillion, and exceeded the 2024 CWPB target by 9.70%. This increase reflects ongoing asset expansion, supported by strengthening the main business and business diversification.

   a. PTBA's current assets were recorded at Rp15.23 trillion, an increase of 0.56% YoY from Rp15.15 trillion in the previous year and exceeded the 2024 CWPB target by 20.74%, indicating that the company's liquidity remains strong.

b. Sementara itu, aset tidak lancar mencapai Rp 26,55 triliun, tumbuh 12,43% YoY dibandingkan dengan Rp23,62 triliun pada tahun 2023, dengan pencapaian 104,23% terhadap target RKAP. Pertumbuhan ini didorong oleh investasi berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi perusahaan.

7. Liabilitas
   Total liabilitas PTBA pada tahun 2024 mencapai Rp19,14 triliun, meningkat 11,28% YoY dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp17,20 triliun. Realisasi ini melampaui target RKAP 2024 sebesar 22,92%, yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp15,57 triliun.
   a. Liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan signifikan sebesar 20,13% YoY, mencapai Rp11,97 triliun dibandingkan Rp9,97 triliun di tahun 2023, serta 36,06% dari target RKAP.
   b. Liabilitas jangka panjang relatif stabil, dengan realisasi Rp7,17 triliun, sedikit menurun 0,93% YoY dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp7,23 triliun, tetapi naik 5,83% di atas RKAP 2024 sebesar Rp6,77 triliun.

8. Ekuitas
   PTBA mencatat ekuitas sebesar Rp22,64 triliun, mengalami pertumbuhan 5,01% YoY dibandingkan Rp21,56 triliun pada tahun 2023. Realisasi ini meningkat dari target RKAP 2024, dengan pencapaian 100,56% dari target yang ditetapkan sebesar Rp22,52 triliun. Peningkatan ekuitas ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang sehat dan strategi investasi yang efektif, meskipun terdapat tekanan dari beban operasional dan pengembangan bisnis.

Mekanisme dan Peran yang Dijalankan Direksi dalam Penyusunan Strategi Perusahaan

PTBA memiliki mekanisme yang terstruktur dalam penyusunan strategi dan kebijakan strategis untuk memastikan kesinambungan arah bisnis yang sesuai dengan tujuan perusahaan dan arahan pemegang saham. Penyusunan dimulai dengan merumuskan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 5 tahunan, yang merupakan tindak lanjut dari arahan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (Kementerian BUMN melalui MIND ID). RJPP ini menjadi dokumen strategis utama yang memberikan panduan bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis dan mencapai visi jangka panjangnya. Dalam proses penyusunan RJPP, Direksi memainkan peran penting sebagai perumus utama yang bertanggung jawab menerjemahkan arahan pemegang saham ke dalam strategi yang komprehensif dan terukur, dengan mempertimbangkan dinamika pasar, tren industri, serta peluang dan tantangan yang ada.

b. Meanwhile, non-current assets reached Rp25.55trillion, growing 12.43% YoY compared to Rp23.62 trillion in 2023, with an achievement of 104.23% of the CWPB target. This growth was driven by ongoing investment in the development of the company's infrastructure and technology.

7. Liabilities
   PTBA's total liabilities in 2024 reached Rp19.14 trillion, an increase of 11.28% YoY compared to 2023 which was recorded at Rp17.20 trillion. This realization exceeded the 2024 CWPB target of 22.92%, which was previously set at Rp15.57 trillion.
   a. Short-term liabilities increased significantly by 20.13% YoY, reaching Rp11.97 trillion compared to Rp9.97 trillion in 2023, and 36.06% of the CWPB target.
   b. Long-term liabilities were relatively stable, with a realization of Rp7.17 trillion, a slight decrease of 0.93% YoY compared to 2023 which was Rp7.23 trillion, but up 5.83% above the 2024 CWPB of Rp6.77 trillion.

8. Equity
   PTBA recorded equity of Rp22.64 trillion, experiencing a growth of 5.01% YoY compared to Rp21.56 trillion in 2023. This realization increased from the 2024 CWPB target, with an achievement of 100.56% of the target set at Rp22.52 trillion. This increase in equity reflects healthy financial management and an effective investment strategy, despite pressure from operational costs and business development.

Mechanism and Role of the Board of Directors in Formulating Corporate Strategy

PTBA has a structured mechanism in formulating strategic strategies and policies to ensure the continuity of business direction in accordance with the company's objectives and shareholders' direction. The formulation begins with formulating a 5-year Long-Term Company Plan (RJPP), which is a follow-up to the direction of the Dwiwarna Series A Shareholder (Ministry of SOEs through MIND ID). This RJPP is the main strategic document that provides guidance for the company in running its business and achieving its long-term vision. In the process of formulating the RJPP, the Board of Directors plays an important role as the main formulator responsible for translating shareholders' direction into a comprehensive and measurable strategy, taking into account market dynamics, industry trends, and existing opportunities and challenges.

Setiap tahunnya, RJPP tersebut kemudian diturunkan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yang berisi arahan strategis yang lebih rinci, termasuk target kinerja yang mengacu pada KPI Manajemen yang ditetapkan oleh pemegang saham mayoritas. Direksi berperan aktif dalam penyusunan RKAP dengan memastikan bahwa setiap target KPI diterjemahkan ke dalam strategi yang dapat diimplementasikan secara operasional. Direksi juga bertanggung jawab dalam menetapkan prioritas, alokasi sumber daya, serta menyelaraskan kebijakan strategis dengan program kerja di seluruh tingkat organisasi.

Sebagai bagian dari implementasi RKAP, arahan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam *Balanced Scorecard* di tingkat masing-masing Satuan Kerja, yang mencakup program-program kerja spesifik untuk mendukung pencapaian target perusahaan. Dalam hal ini, Direksi memastikan adanya koordinasi yang baik antar satuan kerja, pemantauan pelaksanaan program, serta evaluasi berkala untuk menjaga konsistensi antara rencana strategis dan realisasi di lapangan. Dengan mekanisme ini, PTBA dapat menjalankan bisnis secara terarah, responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal, dan selaras dengan visi pemegang saham.

Mekanisme yang Dijalankan Direksi dalam Monitoring Penerapan Strategi

Mekanisme monitoring yang dijalankan oleh Direksi untuk memastikan strategi dan kebijakan strategis perusahaan dapat berjalan dengan baik dilakukan melalui monitoring secara berkala ketercapaian *Balanced Scorecard* (BSC) di setiap Satuan Kerja dan *Regular Management Meeting* (RMM) setiap bulannya.

BSC ini disusun berdasarkan kombinasi *Key Performance Indicators* (KPI) kolegial Manajemen dan Program Kerja yang telah ditetapkan di setiap Satuan Kerja. Di dalam BSC ini tercermin target yang harus dicapai guna memastikan keselarasan strategi dengan implementasi proses bisnis di dalam Satuan Kerja. Sebagai bagian dari sistem kontrol dan evaluasi, audit internal atas pencapaian BSC dilakukan secara triwulanan (setiap 3 bulan sekali) untuk menilai efektivitas pelaksanaan strategi serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian lebih lanjut.

Dalam pelaksanaan audit internal tersebut, Perusahaan telah mengadopsi Sistem Pengendalian Internal berstandar internasional yang mencakup prinsip *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (*Best Practice*), yang melibatkan lima komponen utama, termasuk: a) lingkungan pengendalian, b) penilaian risiko, c) kegiatan pengendalian, d) informasi dan komunikasi, serta e) pemantauan. Berdasarkan

Every year, the RJPP is then translated into the Company's Work Plan and Budget (CWPB), which contains more detailed strategic directions, including performance targets that refer to the Management KPIs set by the majority shareholder. The Board of Directors plays an active role in the preparation of the CWPB by ensuring that each KPI target is translated into a strategy that can be implemented operationally. The Board of Directors is also responsible for setting priorities, allocating resources, and aligning strategic policies with work programs at all levels of the organization.

As part of the implementation of the CWPB, the strategic direction is then being elaborated into the Balanced Scorecard at the level of each Work Unit, which includes specific work programs to support the achievement of the company's targets. In this case, the Board of Directors ensures good coordination between work units, monitoring of program implementation, and periodic evaluations to maintain consistency between strategic plans and realization in the field. With this mechanism, PTBA can run its business in a focused manner, responsive to changes in the external environment, and in line with the vision of shareholders.

Mechanisms Implemented by the Board of Directors in Monitoring Strategy Implementation

The monitoring mechanism implemented by the Board of Directors aims to ensure the company's strategic strategies and policies can run well is carried out through regular monitoring of the achievement of the Balanced Scorecard (BSC) in each Work Unit and Regular Management Meeting (RMM) every month.

This BSC is compiled based on a combination of collegial Management Key Performance Indicators (KPIs) and Work Programs that have been set in each Work Unit. This BSC reflects the targets that must be achieved to ensure the alignment of strategy with the implementation of business processes in the Work Unit. As part of the control and evaluation system, internal audits of BSC achievement are conducted quarterly (every 3 months) to assess the effectiveness of strategy implementation and identify areas that require further improvement or adjustment.

In implementing the internal audit, the Company has adopted an international standard Internal Control System that includes the principles of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Best Practice), which involves five main components, including: a) control environment, b) risk assessment, c) control activities, d) information and communication, and e) monitoring. Based on the assessment conducted, the

penilaian yang dilakukan, Sistem Pengendalian Internal Perusahaan secara umum menunjukkan efektivitas yang tinggi dengan skor rata-rata 92.43% dari 40 satuan kerja.

Melalui kedua mekanisme tersebut, Direksi dapat melakukan evaluasi secara berkala, memastikan adanya tindakan korektif jika diperlukan, serta menjaga kesinambungan pelaksanaan strategi perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Prospek Usaha

Ekonomi global diprediksi masih akan menghadapi sejumlah tantangan di tahun 2025. IMF memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh 3,2% di tahun 2025 atau stagnan dari tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat sejumlah risiko yang belum dapat diatasi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Demikian juga halnya dengan ekonomi Indonesia. Pengaruh faktor global masih akan sangat kental, sehingga ekonomi Indonesia diproyeksikan belum akan mengalami pertumbuhan yang signifikan di tahun 2025. Karena itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% di tahun 2025.

DI tengah kondisi tersebut, industri batu bara di prediksi tetap memiliki potensi yang menjanjikan kendati harus selalu siap untuk mengantisipasi perubahan lanskap bisnis. Berdasarkan *Wood Mackenzie Global Coal Market Outlook* (Januari 2025), tren pasar batu bara global dalam 10 tahun ke depan menunjukkan adanya penurunan permintaan batu bara secara bertahap, terutama di Tiongkok akibat kebijakan transisi energi dan peningkatan produksi domestik. Namun, permintaan di kawasan Asia-Pasifik, khususnya India dan Asia Tenggara, diproyeksikan tetap kuat dalam jangka menengah.

PTBA memiliki prospek bisnis yang menjanjikan dengan tetap mempertahankan posisinya sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia, sekaligus mengembangkan strategi diversifikasi untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan.

Meskipun terdapat tekanan dari kebijakan transisi energi global, permintaan batu bara di India dan Asia Tenggara tetap bertahan, karena didukung oleh kebutuhan listrik yang terus meningkat dan masih terbatasnya substitusi energi terbarukan. Karena itu, India akan menjadi importir terbesar batu bara, menggantikan Tiongkok, dengan rata-rata pertumbuhan permintaan 3% per tahun hingga 2034. Demikian juga dengan Vietnam yang diperkirakan akan mengalami peningkatan konsumsi batu bara sebesar 3% per tahun.

Company's Internal Control System generally shows high effectiveness with an average score of 92.43% from 40 work units.

Through these two mechanisms, the Board of Directors can conduct periodic evaluations, ensure corrective actions if necessary, and maintain the continuity of the implementation of the company's strategy in accordance with the objectives that have been set.

Business Prospects

The global economy is predicted to face several challenges in 2025. The IMF projects that the global economy will grow by 3.2% in 2025 or stagnate from 2024. This is due to several unresolved risks with the potential to hamper economic growth.

In the Indonesian economy, the influence of global factors will still linger, resulting in economy growth projection at 5.2% in 2025. In the midst of these conditions, the coal industry is predicted to have promising potential along with anticipation in business landscape changes.

Amidst these conditions, the coal industry is predicted to still have promising potential even though it must always be ready to anticipate changes in the business landscape. Based on the Wood Mackenzie Global Coal Market Outlook (January 2025), the global coal market trend in the next 10 years shows a gradual decline in coal demand, especially in China due to energy transition policies and increased domestic production. However, demand in the Asia-Pacific region, especially India and Southeast Asia, is projected to remain strong in the medium term.

PTBA has promising business prospects by maintaining its position as one of the largest coal producers in Indonesia, while developing a diversification strategy to ensure sustainable growth.

Despite pressure from global energy transition policies, coal demand in India and Southeast Asia remains resilient, supported by increasing electricity needs and limited renewable energy substitution. Therefore, India will become the largest importer of coal, replacing China, with an average demand growth of 3% per year until 2034. Vietnam is also expected to experience an increase in coal consumption of 3% per year.

Selain itu, investasi global dalam pembangkit listrik berbasis batu bara diperkirakan mencapai USD 447 miliar pada periode 2024-2034, mencerminkan masih adanya kebutuhan akan batu bara sebagai sumber energi utama, terutama di negara berkembang.

In addition, global investment in coal-based power plants is estimated to reach USD 447 billion in the 2024-2034 period, reflecting the continued need for coal as a primary energy source, especially in developing countries.

Dari sisi harga, pasar batu bara global masih akan mengalami harga tinggi karena keterbatasan investasi di sektor pertambangan akibat tekanan ESG dan kesulitan perizinan di negara-negara eksportir utama seperti Australia, Kolombia, dan Kanada. Kendati persaingan akan semakin ketat, namun PTBA memiliki keunggulan dari segi biaya produksi dan kedekatan geografis dengan pasar utama seperti India dan Vietnam.

In terms of price, the global coal market will still experience high prices due to limited investment in the mining sector due to ESG pressures and licensing difficulties in major exporting countries such as Australia, Colombia, and Canada. Although competition will be increasingly tight, PTBA has advantages in terms of production costs and geographical proximity to major markets such as India and Vietnam.

Untuk itu, di tahun 2025, PTBA akan terus mengembangkan diversifikasi usaha di luar batu bara, termasuk proyek energi terbarukan, hilirisasi batu bara, dan bisnis berbasis ekonomi sirkular. Perusahaan juga akan terus melakukan pengembangan PLTS di beberapa lokasi operasional sebagai langkah awal untuk mendukung transisi energi.

To that end, in 2025, PTBA will continue to develop business diversification outside of coal, including renewable energy projects, coal downstreaming, and circular economy-based businesses. The company will also continue to SPPP in several operational locations as an initial step to support the energy transition.

Langkah penting lain yang akan dilakukan Perusahaan adalah dengan melakukan investasi dalam perdagangan karbon, sejalan dengan kebijakan nasional dan global dalam dekarbonisasi industri energi.

The Company will also invest in carbon trading, in line with national and global policies in decarbonizing the energy industry.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

PTBA menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor utama dalam mencapai target dan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia. Untuk itu, PTBA menerapkan *Human Capital Management System* (HCMS) yang terstruktur dan tepat guna dalam membangun SDM yang kompeten, inovatif, dan adaptif terhadap tantangan industri. Melalui pengelolaan SDM yang strategis, PTBA memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki kapabilitas dan kesiapan dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta menghadirkan energi bagi negeri.

Human Capital Development

PTBA puts Human Capital (HC) as the main factor in achieving the company's targets and vision to become a world-class energy company. To that end, PTBA implements a structured and appropriate Human Capital Management System (HCMS) to build competent, innovative, and adaptive HC to industry challenges. Through strategic HC management, PTBA ensures that every individual in the organization is capable and ready to support sustainable business growth and provide energy for the country.

Pada tahun 2024, PTBA fokus pada tiga program utama dalam pengelolaan SDM, yaitu:

1. Bukit Asam *Leadership Acceleration and Development Program* (BLADE)
   Program ini dirancang untuk mengembangkan kepemimpinan masa depan melalui peningkatan tiga kompetensi kunci: *Leadership Skill, Interpersonal Skill,* dan *Business & Management Skill*. Salah satu tahapan penting dalam *journey* BLADE adalah *Immersion* Program, di mana peserta mendapatkan wawasan bisnis melalui *Business Insight Initiatives, Industry Benchmark* dengan perusahaan multinasional, serta *Business Lecture* dari universitas ternama di luar negeri. Program ini bertujuan untuk menciptakan pemimpin yang memiliki perspektif global dan siap menghadapi dinamika industri energi.

In 2024, PTBA focused on three main programs in HC management, namely:

1. Bukit Asam Leadership Acceleration and Development Program (BLADE)
   This program is designed to develop future leadership by improving three key competencies: Leadership Skill, Interpersonal Skill, and Business & Management Skill. One of the important stages in the BLADE journey is the Immersion Program, where participants gain business insight through Business Insight Initiatives, Industry Benchmark with multinational companies, and Business Lectures from leading universities abroad. This program aims to create leaders with global perspective and are ready to face the dynamics of the energy industry.

2. Tugas Belajar
   PTBA memberikan kesempatan bagi pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang D3 dan S2 di Top 100 Universitas Dunia, baik melalui program perusahaan maupun secara mandiri. Untuk mendukung akses pendidikan tinggi, PTBA juga menjalin kerja sama dengan SBM ITB dalam program S2 bagi pegawai. Program ini merupakan implementasi dari nilai Kompeten dalam *Core Value* AKHLAK, yang bertujuan untuk membangun talenta yang unggul dan memiliki daya saing global.

3. *Career Development Journey*
   PTBA memastikan bahwa pengelolaan SDM terintegrasi dengan kebutuhan bisnis melalui penyelarasan dan pembaruan kompetensi berbasis bisnis. Program ini mencakup peninjauan dan pembaruan Kamus Kompetensi, *Development Matrix, Career Path,* dan *Assessment Guidelines,* yang berfungsi sebagai panduan utama dalam mengembangkan karier pegawai berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Dengan pendekatan ini, PTBA menyiapkan SDM yang berdaya saing tinggi dan mampu berkontribusi secara optimal dalam pertumbuhan perusahaan.

Melalui ketiga program ini, PTBA terus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan kompetensi dan kepemimpinan, memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi dalam pencapaian target perusahaan secara berkelanjutan.

Pengembangan Teknologi Informasi dan Digitalisasi

Dalam rangka memperkuat transformasi digital dan mendukung strategi bisnis yang berkelanjutan, PTBA telah menetapkan berbagai program strategis teknologi informasi (TI) pada tahun 2024. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat infrastruktur keamanan siber, serta memastikan tata kelola TI yang efektif guna memberikan manfaat optimal bagi perusahaan. Sebagai bagian dari komitmen dalam pengembangan TI, PTBA juga telah membentuk Komite Pengarah Strategi Teknologi Informasi dan Komite Pengarah Implementasi Teknologi Informasi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi PTBA No. 007/0100/2024. Komite ini bertugas untuk memastikan bahwa perencanaan dan implementasi TI sejalan dengan kebutuhan bisnis dan tren digitalisasi, baik di tingkat nasional maupun global, serta mematuhi prinsip tata kelola yang berlaku.

2. Study Assignments
   PTBA provides opportunities for employees to continue their education from Diploma to Master degree at the Top 100 World Universities, either through company programs or independently. To support access to higher education, PTBA also collaborates with SBM ITB in the Master degree program for employees. This program is an implementation of the Competent value in the AKHLAK Core Value, which aims to build superior talent and have global competitiveness.

3. Career Development Journey
   PTBA ensures that HR management is integrated with business needs through alignment and updating of business-based competencies. This program includes reviewing and updating the Competency Dictionary, Development Matrix, Career Path, and Assessment Guidelines, which serve as the main guide in developing employee careers based on the competencies required by the company. With this approach, PTBA prepares highly competitive HR and is able to contribute optimally to the company's growth.

Through these three programs, PTBA continues to strive to create a work environment that supports competency and leadership development, ensuring that every employee has the opportunity to develop and contribute to achieving the company's targets sustainably.

Information Technology Development and Digitalization

In order to strengthen digital transformation and support sustainable business strategies, PTBA has established various strategic information technology (IT) programs in 2024. These programs are designed to improve operational efficiency, strengthen cybersecurity infrastructure, and ensure effective IT governance in order to provide optimal benefits for the company. As part of its commitment to IT development, PTBA has also formed an Information Technology Strategy Steering Committee and an Information Technology Implementation Steering Committee, as stated in PTBA Board of Directors Decree No. 007/0100/2024. This committee is responsible to ensure IT planning and implementation in accordance with business needs and digitalization trends, both at the national and global levels, and comply with applicable governance principles.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PTBA telah menyusun sejumlah program strategis TI tahun 2024 yang terbagi dalam tiga kategori utama:

1. Pengembangan dan Layanan Aplikasi
   PTBA terus mengembangkan berbagai aplikasi guna meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan. Program dalam kategori ini meliputi:
   a. *Enhancement CISEA App Existing* – Peningkatan fitur pada aplikasi CISEA yang sudah ada untuk mendukung kebutuhan bisnis perusahaan.
   b. CISEA *New Apps Development* – Pengembangan aplikasi baru berbasis CISEA guna memperluas cakupan layanan digital perusahaan.
   c. APM *Implementation* – Implementasi *Application Performance Management* (APM) untuk memantau dan meningkatkan kinerja aplikasi perusahaan.
   d. CISEA *Facelift* – Pembaruan desain dan antarmuka CISEA untuk meningkatkan pengalaman pengguna.
   e. BATICS *Enhancement* – Pengembangan lebih lanjut pada sistem BATICS guna mendukung operasional TI perusahaan.

2. Penguatan Infrastruktur
   Untuk memastikan keandalan sistem dan keamanan data, PTBA juga berfokus pada peningkatan infrastruktur TI melalui program berikut:
   a. Implementasi *Core Switch Disaster Recovery Center* – Membangun sistem pemulihan bencana yang tangguh melalui penerapan *Core Switch Disaster Recovery.*
   b. *Implementasi Security Operations Cen*ter (SOC) – Mengembangkan Pusat Operasi Keamanan guna meningkatkan ketahanan terhadap ancaman siber.
   c. Replacement *Core Switch Data Center* – Pembaruan *Core Switch* pada Data Center untuk meningkatkan kecepatan dan stabilitas jaringan.
   d. Implementasi Multi-*Factors Authentication* (MFA) – Mengadopsi sistem autentikasi multi-faktor guna meningkatkan keamanan akses sistem perusahaan.
   e. *Endpoint Remote* Desktop – Penerapan solusi remote desktop endpoint untuk mempermudah akses aman ke sistem TI perusahaan.

3. Tata Kelola Teknologi Informasi
   Selain aspek teknis, PTBA juga menitikberatkan pada peningkatan tata kelola TI yang selaras dengan standar industri dan praktik terbaik melalui program berikut:
   a. Pelaksanaan IT *Awareness Webinar* – Mengadakan webinar untuk meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pentingnya keamanan dan efisiensi TI.

To achieve these goals, PTBA has prepared strategic IT programs in 2024 which are divided into three main categories:

1. Application Development and Services
   PTBA continues to develop various applications to improve operational efficiency and services. Programs in this category include:
   a. Enhancement of Existing CISEA App – Improving features on existing CISEA applications to support the company's business needs.
   b. CISEA New Apps Development – Development of new CISEA-based applications to expand the scope of the company's digital services.
   c. APM Implementation – Implementation of Application Performance Management (APM) to monitor and improve the performance of the company's applications.
   d. CISEA Facelift – Updates to the CISEA design and interface to improve user experience.
   e. BATICS Enhancement – Further development of the BATICS system to support the company's IT operations.

2. Infrastructure Strengthening
   To ensure system reliability and data security, PTBA also focuses on improving IT infrastructure through the following programs:
   a. Implementation of Core Switch Disaster Recovery Center – Building a robust disaster recovery system through the implementation of Core Switch Disaster Recovery.
   b. Implementation of Security Operations Center (SOC) – Developing a Security Operations Center to increase resilience to cyber threats.
   c. Replacement Core Switch Data Center – Updating the Core Switch in the Data Center to increase network speed and stability.
   d. Multi-Factors Authentication (MFA) Implementation – Adopting a multi-factor authentication system to enhance the security of access to the company's systems.
   e. Endpoint Remote Desktop – Implementing an endpoint remote desktop solution to facilitate secure access to the company's IT systems.

3. Information Technology Governance
   In addition to technical aspects, PTBA also focuses on improving IT governance in line with industry standards and best practices through the following programs:
   a. Implementation of IT Awareness Webinar – Conducting a webinar to increase employee awareness of the importance of IT security and efficiency.

b. *Update* Rencana Strategis TI – Melakukan pembaruan terhadap rencana strategis TI agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis.
c. IT *Maturity Assessment* – Melaksanakan penilaian tingkat kematangan TI guna mengidentifikasi peluang peningkatan dalam penerapan TI di perusahaan.
d. Sertifikasi ISO 20000-1 – Memastikan kepatuhan terhadap standar manajemen layanan TI internasional melalui sertifikasi ISO 20000-1.
e. Pelaksanaan IT *Culture Day* – Mengadakan kegiatan bertema TI untuk mendorong budaya digital dan inovasi di lingkungan perusahaan.

Dengan penerapan program-program strategis ini, PTBA memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi, tetapi juga pada penguatan tata kelola dan kesiapan SDM, sehingga TI dapat berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan dan daya saing perusahaan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Komitmen terhadap Aspek ESG

Pada tahun 2024, Perusahaan terus menunjukkan komitmennya dalam penerapan prinsip GCG dan ESG melalui berbagai inisiatif strategis.

Dalam aspek GCG, PTBA secara rutin melakukan sosialisasi melalui berbagai media seperti *e-mail*, spanduk, *banner, videotron*, dan *platform* CISEA-GCG untuk meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan juga melakukan *benchmarking* dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam bidang Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Audit Intern Terintegrasi, serta melaksanakan *kick off* Implementasi Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk anak dan afiliasi perusahaan.

PTBA juga turut berpartisipasi dalam ajang TOP GRC *Awards* 2024 dan memperoleh skor 91,04 dalam penilaian GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), menjadikannya perusahaan "Sangat Terpercaya" (*Most Trusted Company*) dengan nilai tertinggi di kelompok Perusahaan Non Keuangan (EMITEN, BUMN, BUMD). Perusahaan juga berkolaborasi dengan Tim Pengembangan Budaya SDM Operasional dalam penyelenggaraan webinar BA Ring Ring Vol. 40 yang membahas peran GRC dalam mitigasi risiko *fraud* dan peningkatan kepatuhan. Selain itu, seluruh pegawai telah melakukan penandatanganan *Code of Conduct* secara elektronik melalui aplikasi CISEA-GCG, dan PTBA menyelenggarakan Forum Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester II serta menyampaikan Laporan Penilaian Internal (*Self-Assessment*) Tata Kelola Terintegrasi ke MIND ID.

b. Update IT Strategic Plan – Updating the IT strategic plan to remain relevant to technological developments and business needs.
c. IT Maturity Assessment – Carrying out an assessment of the IT maturity level to identify opportunities for improvement in IT implementation in the company.
d. ISO 20000-1 Certification – Ensuring compliance with international IT service management standards through ISO 20000-1 certification.
e. Implementation of IT Culture Day – Conducting IT-themed activities to encourage digital culture and innovation in the company environment.

By implementing these strategic programs, PTBA ensures that digital transformation does not only focus on technology development, but also on strengthening governance and HR readiness, so the IT department can contribute optimally to the company's growth and competitiveness.

Implementation of Corporate Governance and Commitment to ESG Aspects

In 2024, the Company continues to demonstrate its commitment to implementing the principles of GCG and ESG through various strategic initiatives.

In terms of GCG, PTBA routinely conducts socialization through various media such as e-mail, banners, videotrons, and the CISEA-GCG platform to increase awareness of all stakeholders. The Company also conducts benchmarking with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk in the fields of Integrated Governance, Integrated Risk Management, and Integrated Internal Audit, as well as implementing the Kickoff for the Implementation of Integrated Governance and Integrated Risk Management for the company's subsidiaries and affiliates.

PTBA also participated in the TOP GRC Awards 2024 and received a score of 91.04 in the GCG assessment by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), making it a "Most Trusted Company" with the highest value in the Non-Financial Company group (ISSUES, SOEs, BUMD). The company also collaborated with the Operational HR Culture Development Team in organizing the BA Ring Ring Vol. 40 webinar which discussed the role of GRC in mitigating fraud risk and improving compliance. In addition, all employees have signed the Code of Conduct electronically through the CISEA-GCG application, and PTBA held the Semester II Integrated Governance Committee Forum and submitted the Integrated Governance Internal Assessment Report (Self-Assessment) to MIND ID.

Dalam aspek ESG, PTBA semakin memperkuat langkah-langkah keberlanjutannya dengan melakukan asesmen berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* untuk pertama kalinya dan memperoleh nilai B "Management Level" dalam laporan CDP, yang merupakan pencapaian tertinggi dibandingkan dengan para pesaing. Perusahaan juga memperoleh sertifikasi ISO 50001:2018 Sistem Manajemen Energi, serta menambah tiga PLTS Irigasi di wilayah Ring-1 untuk mendukung program Ekonomi Sirkuler. Dalam aspek lingkungan, PTBA menegaskan komitmennya terhadap perdagangan karbon melalui penandatanganan komitmen HBAP dan BPI, serta terus berupaya meningkatkan kelas UMKM di wilayah Ring-1 sebagai bagian dari inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan berbagai langkah ini, PTBA terus memperkuat perannya dalam mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Perubahan Komposisi Direksi

Tahun 2024, komposisi Direksi PTBA tidak mengalami perubahan, yaitu dengan komposisi sebagai berikut:

Direktur Utama	: Arsal Ismail
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Farida Thamrin
Direktur Operasi dan Produksi	: Suhedi
Direktur Pengembangan Usaha	: Rafli Yandra
Direktur Sumber Daya Manusia	: Suherman

Namun, sesuai dengan Keputusan RUPS PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BBRI") Tahun Buku 2024 tertanggal 24 Maret 2025, mengangkat Farida Thamrin (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko) PTBA sebagai Direktur Treasury and International Banking BBRI. Dimana sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PTBA dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa anggota Direksi PTBA dilarang untuk merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMN lain, maka terhitung sejak penutupan RUPST BBRI Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2025, Farida Thamrin tidak menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTBA. Dengan demikian, maka susunan Direksi PTBA setelah 24 Maret 2025 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Arsal Ismail
Direktur Operasi dan Produksi	: Suhedi
Direktur Pengembangan Usaha	: Rafli Yandra
Direktur Sumber Daya Manusia	: Suherman

In terms of ESG, PTBA has further strengthened its sustainability measures by conducting an assessment based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard for the first time and obtaining a B "Management Level" in the CDP report, which is the highest achievement compared to competitors. The company also obtained ISO 50001:2018 Energy Management System certification, and added three Irrigation SPPP in the Ring-1 area to support the Circular Economy program. In terms of the environment, PTBA confirmed its commitment to carbon trading by signing the HBAP and BPI commitments, and continues to strive to improve the class of MSMEs in the Ring-1 area as part of the economic empowerment initiative of the surrounding community. With these steps, PTBA continues to strengthen its role in encouraging sustainable and responsible business practices.

Changes in the Composition of the Board of Directors

In 2024, there was no change in the composition of the Board of Directors of PTBA with the following composition:

President Director	: Arsal Ismail
Director of Finance and Risk Management	: Farida Thamrin
Director of Operations and Production	: Suhedi
Director of Business Development	: Rafli Yandra
Director of Human Resources	: Suherman

On the other, pursuant to resolution of AGMS PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BBRI") for Financial Year of 2024 dated March 24, 2025, that appointment of Farida Thamrin (Director of Finance and Risk Management) of the PTBA as Director of Treasury and International Banking BBRI. Whereby pursuant to the provision of the Company's Articles of Association and Minister of SOE's Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on State-Owned Enterprise Organisation and Human Resources states that a member of Board of Director of the Company is prohibited to have the concurrent position, therefore as of the closing of AGMS of BBRI for Financial Year of 2024 that convened on March 24, 2025, Farida Thamrin has not served as Director of Finance and Risk Management of the PTBA. Therefore, the composition of Board of Directors PTBA after March 24, 2025 as follows:

President Director	: Arsal Ismail
Director of Operations and Production	: Suhedi
Director of Business Development	: Rafli Yandra
Director of Human Resources	: Suherman

Apresiasi dan Penutup

Tahun 2024 yang penuh tantangan telah berhasil dilalui Perusahaan dengan baik. Atas nama Direksi, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan yang telah bekerja dengan penuh dedikasi tinggi, sehingga memungkinkan Perusahaan meraih kinerja yang positif.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham yang telah memberikan arahan dan nasihat yang sangat berharga dan senantiasa membimbing langkah kami dalam menjalankan amanat untuk mengelola dan menghasilkan nilai-nilai terbaik. Kepada seluruh pemangku kepentingan dan mitra kerja, Perusahaan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja sama yang sudah terjalin dengan baik selama ini.

Ke depannya, sesuai dengan visi dan misi, PTBA akan terus memberikan memberikan kontribusi yang terbaik untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan nasional.

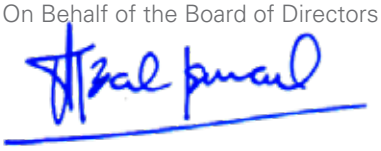
Appreciation and Closing

The Company has successfully navigated the year 2024, which was full of challenges. On behalf of the Board of Directors, we give the highest appreciation to all employees who have worked with great dedication, thus enabling the Company to achieve such good performance.

We also express our gratitude to the Board of Commissioners and Shareholders who have provided valuable direction and advice while guiding our steps in carrying out our mandate to manage and produce the best values. To all stakeholders and work partners, the Company expresses its appreciation and gratitude for the good cooperation that has been established so far.

In the future, in accordance with the vision and mission, PTBA will continue to provide the best contribution to encourage economic growth and national development.

Jakarta, 29 April 2025
Atas Nama Direksi
On Behalf of the Board of Directors



Drs. Arsal Ismail, M.M., MSI
Direktur Utama
President Director

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Bukit Asam Tbk

Statement of the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors Regarding the Responsibility for the 2024 Annual Report of PT Bukit Asam Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bukit Asam Tbk tahun buku 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2024 Annual Report of PT Bukit Asam Tbk has been fully disclosed, and we accept full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 29 April 2025

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Prof. DR. Ir. Irwandy Arif M.Sc.
Komisaris Utama
President Commissioner

Marsda TNI (Purn) Andi Pahril Pawi, S.Sos
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Ir. E. Piterdono HZ, S.E., M.M.
Komisaris
Commissioner

Can Dr. Rahmat Hidayat Pulungan, S.E., M.Pd.
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Irjen. Pol. (Purn) Drs. Carlo Brix Tewu
Komisaris
Commissioner

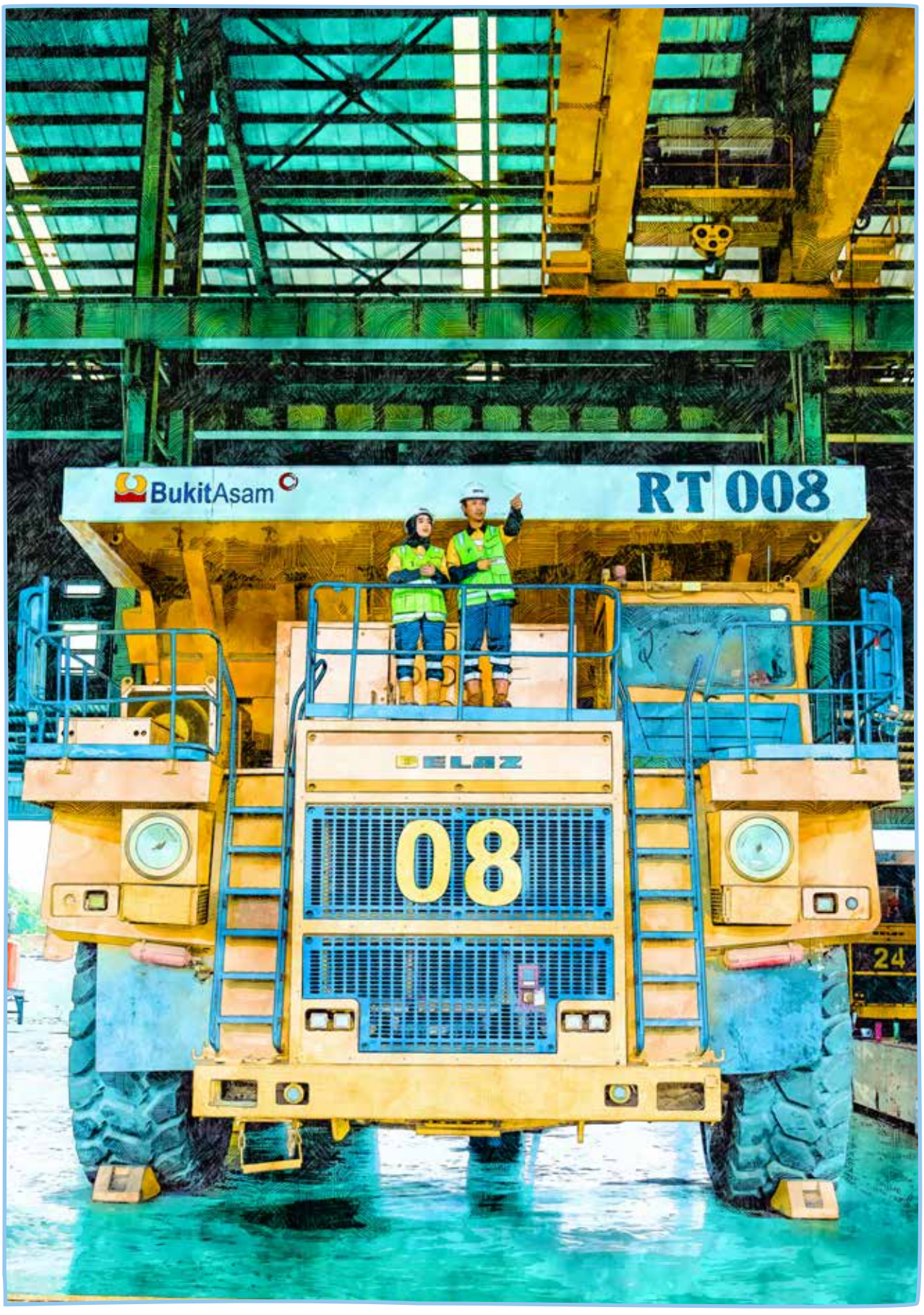
Direksi
Board of Directors

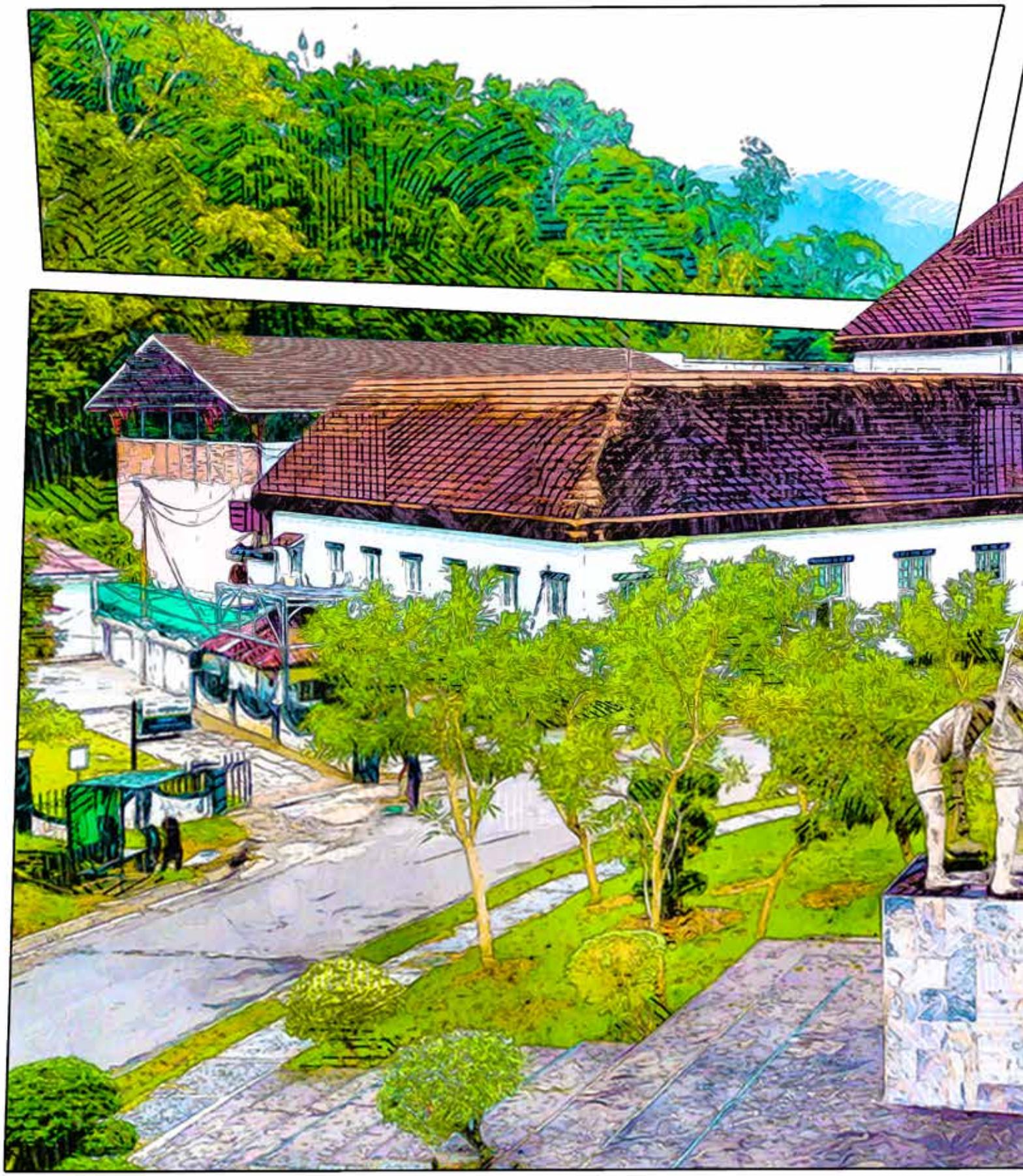
Drs. Arsal Ismail, M.M., MSI
Direktur Utama
President Director

Ir. Suhedi
Direktur Operasi dan Produksi
Operations and Production Director

Ir. Rafli Yandra, M.M., MBA.
Direktur Pengembangan Usaha
Business Development Director

Suherman, S.E., Ak., M.M.
Direktur Sumber Daya Manusia/Plt. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Human Resources Director/Act as Finance and Risk Management Director


BukitAsam
RT 008
08
24





PTBA berkomitmen untuk dapat menghadirkan energi tanpa henti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan berlandaskan pada visi dan misi Perusahaan.
PTBA is committed to providing uninterrupted energy to support national economic growth based on the Company's vision and mission.

Profil Perusahaan
Company Profile

Identitas dan Informasi Umum Perusahaan
Company Identity and General Information

Nama Perusahaan | Company Name
PT Bukit Asam Tbk

Tanggal Pendirian | Founding Date
2 Maret 1981
March 2, 1981

Dasar Hukum Pendirian | Legal Basis of Establishment
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang batu bara Bukit Asam, dengan Akta Notaris Mohamad Ali No. 1 tanggal 2 Maret 1981, yang telah diubah dengan Akta Notaris No. 5 tanggal 6 Maret 1984 dan No. 51 tanggal 29 Mei 1985 dari notaris yang sama.
Government Regulation No. 42 of 1980 concerning the Republic of Indonesia State Equity Participation for the Incorporation of Tambang Batu bara Bukit Asam State-Owned Enterprise, with the Notarial Deed of Mohammad Ali No. 1 dated March 2, 1981, which has been amended by the Notarial Deed No. 5, dated March 6, 1984 and No. 51, dated May 29, 1985, with the same notary..

Perubahan Nama | Name Changes
- 1919 – Tambang Air Laya
- 1950 – Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA)
- 1981 – PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)
- 2002 – PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
- 2017 – PT Bukit Asam Tbk

Kode Saham | Ticker Code
PTBA

Status Perusahaan | Company Status
Perusahaan Terbatas/Perusahaan Publik
Limited Liability Company/Public Company

Bidang Usaha | Line of Business
Tambang Batu Bara dan Lainnya
Coal Mining and Others

Produk dan Jasa | Products and Services
- Batu bara
- Lainnya, di antaranya briket, listrik, sawit, jasa kesehatan, kontraktor jasa penambangan, jasa kepelabuhan, dan jasa angkutan perairan untuk batu bara
- Coal
- Others, include briquettes, electricity, palm oil, health services, mining service contractors, port services, and water transportation services for coal.

Modal Dasar | Authorized Capital
Rp4.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Paid
Rp1.152.065.925.000

Kepemilikan Saham | Shareholders Composition
- Pemerintah Indonesia
  (0,00% - 5 lembar saham Seri A Dwiwarna)
- PT Mineral Industri Indonesia (Persero)
  (65,93% - 7.595.650.695 lembar saham seri B)
- PT Bukit Asam Tbk (Saham Treasuri)
  (0,05% - 6.032.000 lembar saham seri B)
- Masyarakat
  (34,02% - 3.918.706.550 lembar saham seri B)
- Indonesian Government
  (0.00% - 5 Series A Dwiwarna shares)
- PT Mineral Industri Indonesia (Persero)
  (65.93% - 7,595,650,695 Series B shares)
- PT Bukit Asam Tbk (Treasury Stocks)
  (0.05% - 6,032,000 Series B shares)
- Public (34.02% - 3,918,706,550 Series B shares)

Pencatatan Saham | Shares Listing
Tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 23 Desember 2002
Listed in Indonesia Stock Exchange on December 23, 2002

Jumlah Karyawan | Number of Employees
1.679 orang | people

Jaringan Kelompok Usaha
Business Group Network Composition
- 8 Entitas Anak melalui Kepemilikan Langsung
- 8 Entitas Anak melalui Kepemilikan Tak Langsung
- 1 Entitas Asosiasi
- 3 Entitas Ventura Bersam
- 8 Subsidiaries through Direct Ownership
- 8 Subsidiaries through Indirect Ownership
- 1 Associate
- 3 Joint Ventures

Pasar yang Dilayani
Market Served

Pasar yang dilayani perusahaan yaitu untuk kebutuhan domestik (Indonesia) dan kebutuhan ekspor ke negara-negara Asia dan non Asia seperti India, Korea Selatan, Tiongkok, Kamboja, Vietnam, Jepang, Bangladesh, Thailand, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Hongkong.

Markets served by the Company are for domestic needs (Indonesia) and export needs to Asia and non-Asian countries such as India, South Korea, China, Cambodia, Vietnam, Japan, Bangladesh, Thailand, Taiwan, Philippines, Malaysia, and Hong Kong.

Alamat Kantor Pusat dan Lokasi Operasi
Head Office Address and Operational Location

Kantor Pusat, Tanjung Enim | Tanjung Enim Head Office
Jl. Parigi No. 1 Tanjung Enim Muara Enim,
Sumatera Selatan Indonesia 31716
T (0734) 451 096, 452 352
F (0734) 451 095, 452 993

Kantor Perwakilan Jakarta | Jakarta Representative Office
Menara Kadin Indonesia, Lt. 15
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950
T (021) 525 4014
F (021) 525 4002

Unit Pertambangan Tanjung Enim | Tanjung Enim Mining Unit
Jl. Parigi No. 1 Tanjung Enim 31716,
Sumatera Selatan 31716
T (0734) 451 096, 452 352
F (0734) 451 095, 452 993

Unit Pertambangan Ombilin | Ombilin Mining Unit
Jl. Saringan Sawahlunto, Sumatera Barat
T (0754) 61 021
F (0754) 61 402

Unit Pelabuhan Tarahan | Tarahan Port Unit
Jl. Soekarno Hatta Km. 15
Tarahan, Bandar Lampung
T (0721) 31 545, 31 686
F (0721) 31 577

Unit Dermaga Kertapati | Kertapati Barging Port Unit
Jl. Stasiun Kereta Api Palembang, Sumatera Selatan
T (0711) 512 617
F (0711) 511-388

Pelabuhan Teluk Bayur | Teluk Bayur Port
Jl. Tanjung Periuk No. 1 Teluk Bayur, Sumatera Barat
T (0751) 62 522, 63 522, 31 996
F (0751) 63 533

Kontak Perusahaan | Company Contact

Telepon | Phone	: + 62 734 451 096, 452 352
Faksimile | Faximile	: +62 734 451 095, 452 993
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	: corsec@bukitasam.co.id
Hubungan Investor Investor Relations	: investor.relations@bukitasam.co.id

Media Sosial | Social Media

Facebook	: PT Bukit Asam Tbk
Twitter	: @BukitAsamPTBA
Instagram	: @bukitasamptba
YouTube	: PT Bukit Asam Tbk

Website | Website
www.ptba.co.id

Sistem Pengaduan | Whistleblower

Website	: OpenMind-wbs.com
Email	: OpenMIND@kpmg.co.id
Whatsapp	: 0811-1464-632 0811-646-343
Post Mail	: PT KPMG Siddharta
Attn	: KPMG EthicsLine (MIND ID) Menara Astra Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, Jakarta 10220

Riwayat Singkat Perusahaan
Company Brief History

PT Bukit Asam Tbk, selanjutnya disebut "Perusahaan" atau "PTBA", secara resmi berdiri pada 2 Maret 1981 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batu Bara Bukit Asam, kemudian dikukuhkan melalui Akta Notaris Mohamad Ali No. 1 tanggal 2 Maret 1981 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. YA 5/363/4 tanggal 7 Juni 1982. Perusahaan memiliki sejarah panjang seiring dengan sejarah penambangan batu bara di Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan, yang dimulai oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1919.

PT Bukit Asam Tbk, hereinafter referred to as "Company" or "PTBA" was officially established on March 2, 1981, based on Government Regulation No. 42 of 1980 concerning the Capital Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of the Bukit Asam Coal Mining Company (Persero) which then confirmed through Deed of Notary Mohamad Ali No. 1 dated March 2, 1981, and has obtained approval from the Minister of Justice in Decree No. YA 5/363/4 of June 7, 1982. The Company has a long history along with the history of coal mining in Tanjung Enim, Muara Enim, South Sumatra, which was started by the Dutch Colonial Government in 1919.



1918

Ahli penambangan Belanda, R. Everwijn, melakukan penelitian di wilayah Tanjung Enim dan menemukan cadangan antrasit yang cukup besar. Penambangan batu bara pertama dilakukan di Air Laya dengan sistem penambangan terbuka (*open pit mining*). Hasil penambangan digunakan untuk kepentingan Belanda dalam memenuhi permintaan Eropa. Pengangkutan batu bara dilakukan menggunakan kereta api yang disebut Babaranjang. Kereta api Babaranjang merupakan kereta api batu bara dengan rangkaian gerbong yang panjang. Sampai saat ini, Babaranjang masih digunakan untuk mengangkut batu bara.

A Dutch mining expert, R. Everwijn, conducted research in Tanjung Enim and found large reserves of anthracite. The first coal mining was carried out at Air Laya using an open pit mining system. Mining results were used for the Dutch interests in meeting demand from Europe. Coal was transported using a train called Babaranjang. The Babaranjang train is a coal train with a long series of carriages and is still used to transport coal.



1923

Penambangan batu bara di Air Laya mulai menggunakan metode penambangan bawah tanah (*underground mining*).

Coal mining in Air Laya began using an underground mining method.



1938

Hasil produksi batu bara mulai dimanfaatkan untuk kepentingan komersial.

The results of coal production began to be used for commercial purposes.



1942

Seluruh tambang batu bara di Tanjung Enim diambil alih oleh Pemerintah Jepang yang pada saat itu sedang menguasai Indonesia. Hasil penambangan digunakan sepenuhnya untuk mendukung mobilitas para tentara Jepang di Indonesia.

All of the coal mines in Tanjung Enim were taken over by the Japanese Government, which at this time had succeeded in ruling Indonesia. Mining profits were used to support the mobility of Japanese soldiers in Indonesia.



1950

Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Indonesia berusaha mengambil alih kembali seluruh aset dan wilayah operasional perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Karyawan di penambangan batu bara Air Laya menuntut perubahan status menjadi pertambangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia akhirnya mengesahkan penambangan batu bara Air Laya sebagai Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA).

After Indonesia's independence, the Indonesian Government tried to restore the entire assets and operational areas of companies that exploited Indonesia's natural wealth. Employees at the Air Laya coal mining demanded a change in the status of the mine to a national mine. The Government then legalized Air Laya coal mining as Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA).

PTBA 1981

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam. Sejak saat itu, nama perusahaan dikenal sebagai PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) disingkat PTBA. Perubahan status tersebut dikukuhkan melalui Akta Notaris Mohamad Ali No. 1 tanggal 2 Maret 1981 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. YA 5/363/4 tanggal 7 Juni 1982.

Based on Government Regulation No. 42 of 1980 concerning the Capital Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of Tambang Batu Bara Bukit Asam Company, since then, the Company's name has been known as PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) or PTBA. The change in status was confirmed by Mohamad Ali Notarial Deed No. 1 dated March 2, 1981, and has obtained approval from the Minister of Justice in Decree No. YA5/363/4 dated June 7, 1982.

1990

Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri batu bara di Indonesia, melalui PP No. 56 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Tambang Batu bara Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero), maka Pemerintah Indonesia membubarkan Perum Tambang Batu Bara dan melakukan penambahan penyertaan Modal Negara ke dalam saham Perusahaan. Dengan demikian, Bukit Asam menjadi perusahaan batu bara satu-satunya yang dimiliki negara.

In order to increase the development of the coal industry in Indonesia, through Government Regulation No. 56 of 1990 dated October 30, 1990, concerning the Dissolution of the General Coal Mining Company and the Addition of the Republic of Indonesia's State Equity Into the Company's Shares, the Indonesian Government dismissed the Public Coal Mining Company and made additional State Capital participation into the Company's shares. Thus, Bukit Asam became the only state-owned coal company in the country.

1993

Sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, pemerintah menugaskan Perusahaan untuk mengembangkan usaha briket batu bara.

In accordance with the national energy security development program, the government assigned the Company to develop a coal briquette business.

2002

Perusahaan melakukan penawaran saham perdana (*Initial Public Offering*) kepada masyarakat sebanyak 346.500.000 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham dan harga penawaran sebesar Rp450 per saham. Dengan demikian, sejak 23 Desember 2002, saham Perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan ticker saham "PTBA". Kemudian nama Perusahaan berubah menjadi PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.

The Company made an initial public offering of 346,500,000 shares with a nominal value of Rp500 per share and an offering price of Rp450 per share. Thus, since December 23, 2002, the Company's shares have been listed on the Indonesia Stock Exchange with ticker code "PTBA". The Company changed its name to PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.

2017

Perusahaan memasuki babak baru dengan resmi bergabung bersama PT Aneka Tambang Tbk dan PT Timah Tbk dalam Holding BUMN Pertambangan dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero sebagai induk holding. Bergabungnya Perusahaan ke dalam holding tersebut memberikan efek domino dalam kebijakan Perusahaan, di antaranya dengan perubahan nama dan status PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk menjadi PT Bukit Asam Tbk. Bergabungnya Perusahaan ke dalam Holding BUMN Pertambangan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha dan pendanaan, pengelolaan sumber daya alam mineral dan batu bara yang lebih efektif, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan meningkatkan kandungan lokal, serta efisiensi biaya dari sinergi yang dilakukan.

The Company entered a new chapter by officially joining PT Aneka Tambang Tbk and PT Timah Tbk in the SOE Mining Holding with PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) as the parent holding. The Company's incorporation into the holding also brought a domino effect on Company policy, including changing the name and status of PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk to PT Bukit Asam Tbk. The joining of the Company to the SOE Mining Holding was expected to increase business capacity and funding, more effective management of mineral and coal natural resources, increase added value through downstreaming and increasing local content, as well as cost efficiency from the synergies carried out.

2019

Sehubungan dengan bergabungnya PTBA dalam holding industri pertambangan yang dipimpin oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Perusahaan melakukan integrasi logo dengan induk perusahaan yang menunjukkan eksistensi dari identitas holding industri pertambangan.

Regarding PTBA's entrance in the Mining Industry Holding led by PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero), the Company integrated the logo with the parent company which shows the existence of the Mining Industry Holding identity.

2022

Pada bulan Desember 2022, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan. Selanjutnya, Menteri Keuangan juga telah menerbitkan Keputusan No. 516/KMK.06/2022 tentang Penetapan Nilai Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia akan mendirikan suatu Perusahaan Perseroan (Persero) sebagai perusahaan holding di Bidang Pertambangan ("Holding Pertambangan") dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pada tanggal efektif pendirian, Holding Pertambangan akan memiliki saham pada perusahaan (Anggota Holding) sebagai berikut:

1. secara langsung saham Seri B terbanyak pada PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Indonesia Asahan Aluminium; serta
2. secara langsung dan tidak langsung saham pada PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia PP Minerals dan MIND ID Trading, Pte. Ltd.

In December 2022, the Indonesian Government issued Government Regulation No. 45 of 2022 concerning Reduction of the Republic of Indonesia's State Equity Participation in the Limited Liability Company (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminum and Government Regulation No. 46 of 2022 concerning Capital Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of Limited Liability Company (Persero) in the Mining Sector. Furthermore, the Minister of Finance has also issued Decree No. 516/KMK.06/2022 concerning the Determination of the Value of the Republic of Indonesia's State Equity Participation for the Establishment of Limited Liability Company (Persero) in the Mining Sector. In regard to these regulations, the Indonesian Government established a Limited Liability Company (Persero) as a holding company in the Mining Sector by taking into account prevailing provisions. On the effective date of establishment, the Mining Holding will own shares in the company (Holding Member) as follows:

1. directly, Series B shares in PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, and PT Indonesia Asahan Aluminum; as well as
2. directly and indirectly, shares in PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia PP Minerals and MIND ID Trading, Pte. Ltd.

2023

Pada tanggal 21 Maret 2023, menindaklanjuti dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan dan Keputusan No. 516/KMK.06/2022 tentang Penetapan Nilai Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan, Negara Republik Indonesia mendirikan BUMN Induk Industri Pertambangan dengan nama PT Mineral Industri Indonesia (Persero) yang merupakan induk dari PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Indonesia Asahan Aluminium dan memiliki saham secara langsung pada PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia PP Minerals dan MIND ID Trading, Pte. Ltd

On March 21, 2023, following up on Government Regulation No. 46 of 2022 concerning State Capital Inclusion of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Mining Sector and Decree No. 516/KMK.06/2022 concerning the Determination of the Capital Investment Value of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Mining Sector, the Indonesian Government established an SOE Mining Holding with the name PT Mineral Industri Indonesia (Persero) which is the parent of PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, and PT Indonesia Asahan Aluminum and owns shares directly in PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia PP Minerals and MIND ID Trading, Pte. Ltd.

Informasi Perubahan Nama dan Status Badan Hukum Perusahaan
Information on Changes in Name and Legal Entity Status of the Company

No.	Nama Name	Alasan Perubahan Reason of Change	Tanggal Efektif Perubahan Date of Change
1	Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA)	Nasionalisasi Aset oleh Pemerintah Republik Indonesia atas tambang terbuka Air Laya, Tanjung Enim, yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda tahun 1919 dan mengesahkan pembentukan perusahaan. Asset Nationalization by the Indonesian Government for Air Laya open pit mining, Tanjung Enim, which was established by the Dutch Colonial Government in 1919.	1950
2	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	Berubah status menjadi Perseroan Terbatas, Perubahan status tersebut dimuat pada Akta Notaris Muhammad Ali, S.H., No. 1 tanggal 2 Maret 1981. Change of status into a Limited Liability Company, as amended in Notarial Deed of Muhammad Ali, S.H., No. 1 dated March 2, 1981.	2 Maret 1981 March 2, 1981
3	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Perusahaan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia, sehingga statusnya menjadi Perusahaan Terbuka dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk yang dimuat pada Akta Notaris Nila Noordjasman Seoyasa Besar, S.H., No. 18 tanggal 14 Oktober 2002. The Company listed its shares on the Indonesia Stock Exchange, and became a public company under the name PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk as published in Notarial Deed of Nila Noordjasman Seoyasa Besar, S.H., No. 18 dated October 14, 2002.	14 Oktober 2002 October 14, 2002
4	PT Bukit Asam Tbk	Perusahaan bergabung dengan Holding Industri Pertambangan dengan pemindahan saham seri B mayoritas yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sehingga status perusahaan menjadi Non-Persero dengan nama PT Bukit Asam Tbk. Perubahan ini dimuat pada Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 78 tanggal 29 November 2017. The Company joined the Mining Industry Holding by transferring the majority series B shares owned by the Indonesian Government to PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero). The Company's status changed into Non-Persero under the name PT Bukit Asam Tbk. This change was contained in Notarial Deed Fathiah Helmi, S.H., No. 78 dated November 29, 2017.	29 November 2017 November 29, 2017

Logo dan Moto Perusahaan
Company's Logo and Motto

Logo Perusahaan terdiri dari dua komponen yang menjadi satu kesatuan yang harus dirangkaikan dan tidak boleh ditampilkan secara terpisah. Komponen tersebut terdiri dari Logo Simbol dan Logo Nama. Penggunaan logo perusahaan ditentukan dengan Surat Keputusan Direksi No. 556/0100/2021 tentang Panduan Dasar Identitas PT Bukit Asam Tbk.

The Company's logo consists of two components that form as one unit that must be assembled and should not be displayed separately. These components consist of a symbol logo and a name logo. The use of the company logo is determined by the Decree of the Board of Directors No. 556/0100/2021 on the Basic Guide to the Identity of PT Bukit Asam Tbk.

Simbol logo Bukit Asam menggambarkan Bumi, Tanah, dan Matahari. Simbol ini berasal dari huruf "B" dan ditransformasikan secara abstrak menjadi simbol matahari yang terbit dari bumi (dalam hal ini Bukit Asam) yang mencerminkan awal dari masa depan yang cerah. Warna kuning mencerminkan matahari (energi), warna biru mencerminkan "*Corporate Image*" yang menunjukkan pengalaman dan jati diri yang tangguh, serta warna merah kecokelatan menunjukkan lingkungan yang subur.

The logo describes the Earth, Ground, and the Sun. It is derived from the letter 'B' abstractly transformed into a symbol of the sun rising from the Earth (in this case, Bukit Asam), representing the beginning of a bright future. Yellow means the Sun (energy), blue for "Corporate Image" represents strong experience and strong, and brownish red represents a fertile soil.

Kata Bukit Asam digunakan sebagai nama logo, dirangkaikan pada simbol logo sebelah kanan dengan bagian bawah huruf sejajar dengan simbol. Nama logo yang dirangkaikan dengan simbol logo merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

The logo name, which reads Bukit Asam, is combined with the logo symbol on the right side and the bottom letter parallel to the symbol. Both name and symbol are integral units.

Dalam rangka penyeragaman dengan Mining Industry Indonesia (MIND ID) dan anggota *holding* lainnya, Perusahaan melakukan penyesuaian dengan menambahkan konfigurasi MIND ID pada logo Bukit Asam. Lambang MIND ID yang diletakkan pada sisi kanan atas konfigurasi logo Bukit Asam memiliki makna bahwa pada sisi solid melambangkan kekayaan alam yang kita eksplorasi dan kita manfaatkan bagi semua dan sisi sinergi melambangkan komitmen seluruh anggota untuk bekerja sama mencapai tujuan demi Indonesia.

To match with Mining Industry Indonesia (MIND ID) and other Holding members, the Company added the MIND ID configuration to the logo. The MIND ID symbol is placed on the right side of the Bukit Asam logo. The solid part symbolizes the natural wealth we explore and use for all Indonesians, and the synergy part represents the commitment of all members to work together to achieve our goals for Indonesia.

Visi dan Misi Perusahaan
Company Vision and Mission



Visi Vision

Menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan

Becoming a world-class energy company that cares about the environment.



Misi Mission

Mengelola Sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder dan lingkungan.

Managing energy sources by developing corporate competencies and human excellence to provide maximum added value for stakeholders and the environment.

Review Visi dan Misi oleh Manajemen

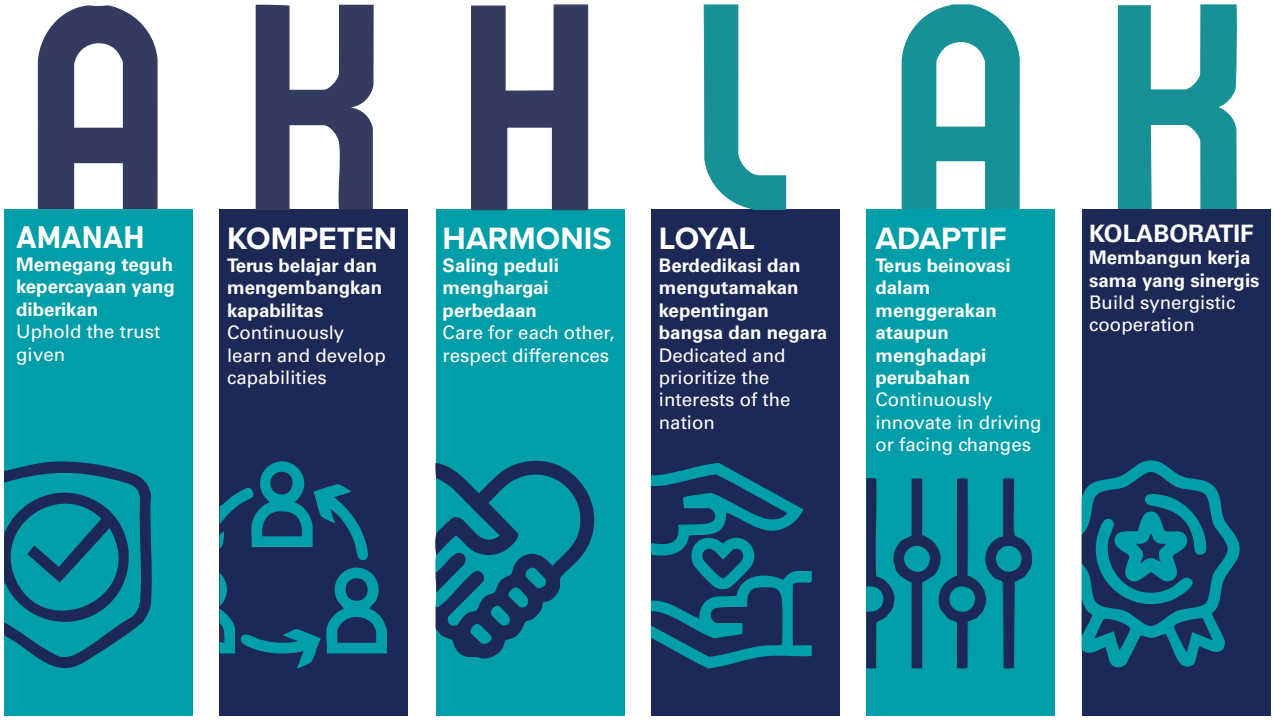
Visi dan Misi Perusahaan ditetapkan dan diberlakukan melalui kajian secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan lingkungan bisnis Perusahaan. Pernyataan terkait Visi dan Misi Perusahaan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 15/SK/PTBAKOM/XII/2013 dan No. 336/KEP/Int-0100/PW.01/2013 telah mendapatkan persetujuan bersama dari Dewan Komisaris dan Direksi. Hingga laporan tahunan ini diterbitkan, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan review dan menilai bahwa Visi dan Misi Perusahaan masih relevan dengan perkembangan dan kondisi lingkungan bisnis tahun 2025 serta arah dan tujuan bisnis Perusahaan.

Management Review on the Vision and Mission

The Company's Vision and Mission are determined and enforced through periodic reviews to ensure their relevance to the development of the Company's business environment. Statements related to the Vision and Mission as contained in the Decree of the Board of Directors No. 15/SK/PTBAKOM/ XII/2013 and No. 336/KEP/Int-0100/PW.01/2013 which have obtained joint approval from The Board of Commissioners and The Board of Directors. Prior to the publication of this annual report, the Board of Commissioners and the Board of Directors have reviewed and assessed that the Company's Vision and Mission are still relevant to the developments and conditions of the business environment in 2025 as well as the direction and objectives of the Company's business.

Hierarki Tata Nilai Bukit Asam

Bukit Asam Hierarchy of Values



Pada tanggal 14 Februari 2022, MIND ID mengeluarkan Surat Edaran No. SE-001/DIRHK/2022 Tentang Penetapan *Core Values* AKHLAK & *Key Behaviors* MIND ID sebagai Budaya Perusahaan. Surat Edaran tersebut menyeleraskan dan menetapkan Nilai-nilai Utama (*Core Values*) sumber daya manusia BUMN AKHLAK, yaitu Amanah; Kompeten; Harmonis; Loyal; Adaptif; dan Kolaboratif menjadi *Core Values* MIND ID.

Setiap Anggota MIND ID wajib menerapkan Nilai-Nilai Utama Sumber Daya Manusia BUMN, AKHLAK, beserta panduan perilakunya menjadi Budaya Perusahaan dan menjadi dasar pembentukan karakter sumber daya manusia di masing-masing perusahaan yang dituangkan dalam berbagai program Pengembangan budaya dan nilai perusahaan guna memastikan proses transformasi pembentukan budaya di seluruh lapisan insan MIND ID dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

On February 14 2022, MIND ID issued Circular Letter No. SE-001/DIRHK/2022 Concerning the Determination of Core Values AKHLAK & Key Behaviors MIND ID as Company Culture. This Circular Letter harmonizes and determines the Core Values of SOEs' AKHLAK namely: Trust; Competent, Harmonious; Loyal; Adaptive; and Collaborative as MIND ID's Core Values.

Each MIND ID Member is obliged to apply the Core Values of SOEs' Human Capital, AKHLAK, along with their behavioral guidelines as Corporate Culture and become the basis for forming the character of human capital in each company as outlined in various Development programs company culture and values. This step aims to ensure that the transformation process of culture formation at all levels of MIND ID people can continue sustainably.

PTBA terus berupaya menginternalisasi Tata Nilai Perusahaan sesuai dengan arahan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah menerapkan AKHLAK sebagai nilai-nilai utama, sekaligus pembentukan karakter di seluruh lingkungan BUMN. Dengan mentransformasi AKHLAK ke dalam Tata Nilai Perusahaan, diharapkan dapat menuntun segenap insan Perusahaan untuk lebih optimal dan berjalan lebih terarah di masa depan.

PTBA continues to internalize its Corporate Values in line with the directive from the Ministry of State-Owned Enterprises that has established AKHLAK as the core values and character building throughout the SOEs environment. By transforming AKHLAK into the Corporate Values, it is expected to guide all Company employees to be more optimal and focused in the future.

Panduan Perilaku "AKHLAK"
Code of Conduct "AKHLAK"

Nilai Inti Core Values	Kalimat Afirmatif Affirmative Statements	Kata Kunci Keywords	Panduan Perilaku Code of Conduct
Amanah Trust	Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan We uphold the trust given	1. Integritas 2. Tulus 3. Konsisten 4. Dapat Dipercaya 1. Integrity 2. Sincerity 3. Consistency 4. Trustworthy	1. Memenuhi janji dan komitmen 2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan 3. Berpegang teguh pada nilai moral dan etika 1. Fulfill promises and commitments 2. Responsible for tasks, decisions, and actions taken 3. Firmly uphold moral and ethical values
Kompeten Competent	Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas We continuosly learn and develop capabilities	1. Kinerja Terbaik 2. Sukses 3. Keberhasilan 4. *Learning Agility* Ahli di Bidangnya 1. Best performance 2. Success 3. Accomplishment 4. Learning Agility Expert in own field	1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah 2. Membantu orang lain belajar 3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik 1. Increasing self-competency to respond to ever-changing challenges 2. Helping others to learn 3. Completing tasks with highest quality
Harmonis Harmonius	Kami saling peduli dan menghargai perbedaan We care for each other and respect differences	1. Peduli 2. Perbedaan 1. Caring 2. Diversity	1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya 2. Suka menolong orang lain 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif 1. Respect everyone regardless of their background 2. Helpful 3. Build a conducive work environment
Loyal	Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara We dedicate and prioritize the interests of the nation	1. Komitmen 2. Dedikasi (rela berkorban) 3. Kontribusi 1. Commitment 2. Dedication (willing to sacrifice) 3. Contribution	1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara 2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar 3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika 1. Maintain the good reputation of fellow employees, leaders, SOEs, and the State 2. Willing to make sacrifices to achieve a greater goal 3. Obey the leaders as long as this does not conflict with law and ethics
Adaptif Adaptive	Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan We continuously innovate and are enthusiastic in driving or facing changes	1. Inovasi 2. Antusias terhadap perubahan 3. Proaktif 1. Innovation 2. Enthusiastic for change 3. Proactive	1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik 2. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi 3. Bertindak proaktif 1. Quickly adjust so as to improve 2. Continuously make improvements following technological developments 3. Act proactively
Kolaboratif Collaborative	Kami membangun kerja sama yang sinergis We build synergistic cooperation	1. Kesediaan bekerja sama 2. Sinergi untuk hasil yang lebih baik 1. Willingness to cooperate 2. Synergy for better results	1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama 1. Provide opportunities for various parties to contribute 2. Open-minded in team work to produce added value 3. Mobilize the use of various resources for common goals

The Noble Purpose of MIND ID

Mining Industry Indonesia sebagai Induk dari PTBA telah menetapkan *Noble Purpose* "*We Explore Natural Resources for Civilization, Prosperity, and a Brigther Future*".

The Noble Purpose of MIND ID

Mining Industry Indonesia as the Parent of PTBA has set the Noble Purpose "We Explore Natural Resources for Civilization, Prosperity, and a Brighter Future".

KEY BEHAVIORS OF MIND ID	
AGILE Tanggap terhadap Tantangan Baru Responsive towards New Challenges	Selalu terbuka, *flexible* dan mampu beradaptasi dengan tantangan baru. Tantangan menjadi alat untuk berinovasi, berpikir kreatif, dan maju. Always being open to, flexible with, and adaptive to new challenges. Challenges become a means of innovation, creative thinking, and going forward.
GOING EXTRA MILES Bekerja Melalui Target *Performing* *Performing Beyond Targets*	Semangat untuk bekerja cerdas dan mengupayakan hasil kerja nyata sesuai target atau bahkan melebihi target demi kepentingan Perusahaan. Striving to work smart and to give the real result of efforts, following the targets, or even exceeding the targets, for the best interests of the Company.
ACCOUNTABLE Bertindak dengan Penuh Tanggung Jawab Act Responsibly	Memastikan setiap tindakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ensuring that all actions taken are fully accountable and are in line with prevailing legislations and regulations.

Kerangka Transformasi Budaya PTBA

Sebagai pengejawantahan dari nilai-nilai AKHLAK BUMN dan *Key Behaviour* MIND ID, PTBA juga telah menyusun langkah strategis untuk transformasi budaya PTBA, sehingga insan PTBA memiliki visi budaya ke depan. Hal tersebut sebagaimana tergambarkan pada Kerangka Transformasi Budaya PTBA Tahun 2024-2028 yang dikemas dalam nilai "AKSI".

PTBA Cultural Transformation Framework

As a reflection of SOEs' AKHLAK values and MIND ID's Key Behavior, PTBA has developed strategic steps for cultural transformation. This aims to instill a cultural vision for the future among PTBA employees. The PTBA Cultural Transformation Framework for 2024-2028 is encapsulated in the "AKSI" value.

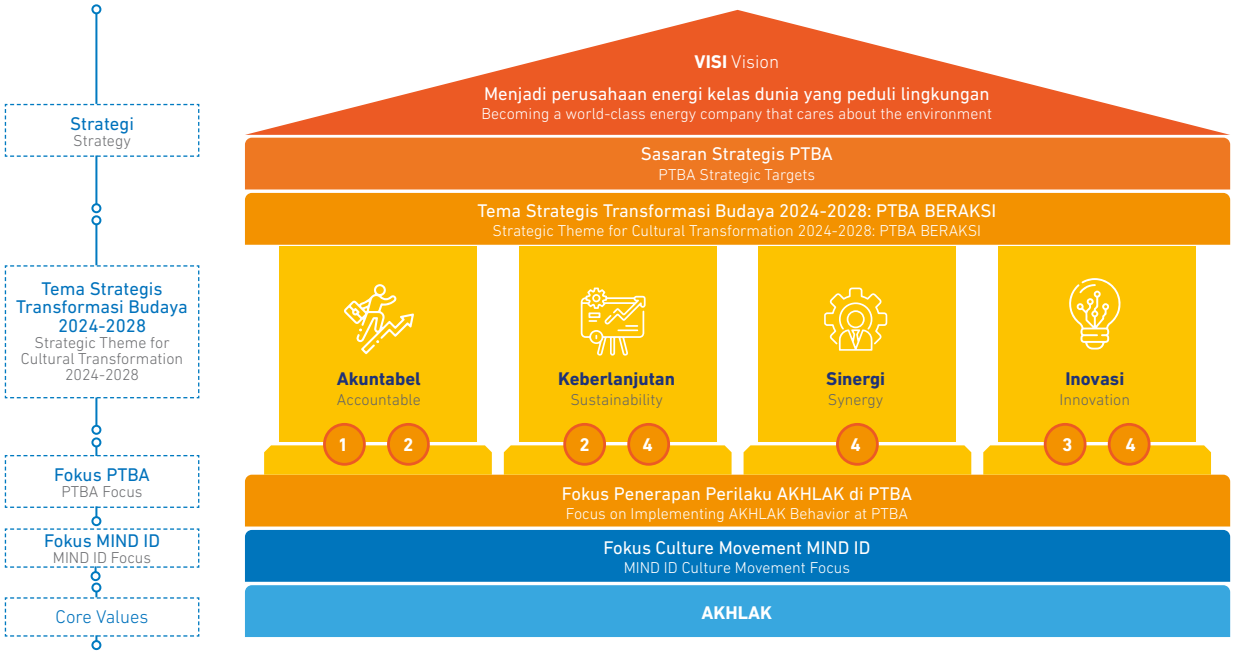


Fokus penerapan perilaku AKHLAK melalui tema strategis transformasi budaya 2024-2028 PTBA **berAKSI**:

1. Disiplin, bekerja tuntas, dan berani mengambil Keputusan dengan tetap memperhatikan tata kelola perusahaan.
2. Peduli dan bertanggung jawab pada keselamatan kerja, sosial dan lingkungan.
3. Antusias mempelajari hal-hal baru, terus meningkatkan kompetensi agar selalu relevan dengan perkembangan yang terjadi.
4. Proaktif dan cepat beradaptasi terhadap perubahan, berorientasi pada perbaikan dan pertumbukan bisnis yang berkelanjutan.
5. Terbuka dan menghargai perbedaan membangun kerja sama yang sinergis untuk mencapai tujuan perusahaan.

Focus on implementing AKHLAK behavior through the strategic theme of PTBA **berAKSI's** 2024-2028 cultural transformation:

1. Discipline, work thoroughly, and dare to make decisions while still paying attention to Corporate Governance.
2. Care and be responsible for work safety, social and the environment.
3. Enthusiastic about learning new things, continue to improve competence to always be relevant to developments that occur.
4. Proactive and quickly adapt to change, oriented towards improvement and sustainable business growth.
5. Open and respect differences in building synergistic cooperation to achieve company goals.



Sosialisasi dan Internalisasi Tata Nilai perusahaan

Perusahaan senantiasa melaksanakan program sosialisasi dan internalisasi nilai inti Perusahaan dalam rangka memberikan pengetahuan dan menanamkan serta meningkatkan pemahaman seluruh insan perusahaan mengenai nilai inti perusahaan. Agar budaya perusahaan dapat menyatu dengan perilaku insan perusahaan dalam kegiatan usaha sehari-hari, maka perusahaan melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya perusahaan dengan menjalankan sesuai dengan tahapan pada Panduan AKHLAK *Culture Journey* (SK Menteri BUMN No. SK-115/MBU/05/2022) dan membagi pendekatannya pada 3 elemen utama, yakni:

Socialization and Internalization of corporate Values

PTBA always conducts socialization and internalization programs for the corporate core values to provide knowledge and increase understanding of all company personnel regarding the core values. In order to integrate with the behavior of company personnel in daily business activities, the Corporate Culture socialization and internalization is done according to the stages in AKHLAK Culture Journey Guide (Minister of SOE Decree No. SK-115/MBU/05/2022). The approach is divided into 3 main elements, namely:



Kepemimpinan
Leadership

Perusahaan melibatkan para pemimpin baik *Formal Leaders*, manajemen dan pemimpin struktural dari satuan kerja dan tim maupun *Informal Leaders* atau agen-agen perubahan untuk menjadi *role model* dalam menjalankan *Key Behaviour* serta memastikan setiap pegawai memahami visi, misi, *Noble Purpose* dan nilai-nilai perusahaan.

The Company involves leaders, both Formal Leaders, management and structural leaders from work units and teams as well as Informal Leaders or agents of change to become role models in implementing Key Behavior and ensuring that every employee understands PTBA's vision, mission, Noble Purpose, and corporate values.



Sistem
System

Perusahaan memastikan sistem organisasi dan manajemen SDM yang digunakan dapat mendorong terwujudnya budaya perusahaan yang diharapkan. Oleh karenanya, dilakukan penyelarasan BSC-KPI pada pelaksanaan program di elemen ini.

The Company ensures that the organizational and human capital management systems used can encourage the realization of the expected corporate culture. Therefore, KPI alignment is conducted in the implementation of programs in this element.



Simbol
Symbol

Perusahaan menggunakan atribut fisik maupun digital untuk dapat menjadi pengingat insan perusahaan tentang budaya yang sedang dikembangkan.

The Company uses both physical and digital attributes to remind employees about the company culture that is being developed.

Bidang Usaha
Line of Business



Maksud dan Tujuan Perusahaan

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir mengalami perubahan dan disahkan melalui Akta Nomor 61 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.01.03-0090409 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.09-0138986 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan PT Bukit Asam Tbk. Maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk melakukan usaha di bidang pengembangan bahan galian, terutama pertambangan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Purpose and Objectives of the Company

According to Article 3 of the Company's Articles of Association which was last amended and ratified through Deed Number 61 dated June 15, 2023, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notary in Jakarta which notification has been received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Letter of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU.AH.01.03-0090409 dated July 12, 2023, Regarding Receipt of Notification of the Articles of Association of PT Bukit Asam Tbk and the Letter of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0138986 dated July 12, 2023, Regarding Receipt of Notification of Changes to Company Data of PT Bukit Asam Tbk. The purpose and objectives of the Company are to conduct business in the field of mining development, especially coal mining in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, as well as optimizing the utilization of the Company's resources to produce high-quality and highly competitive goods and/or services to obtain/pursue profits to increase the Company's value by implementing the principles of a Limited Liability Company.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar dan yang Dijalankan

Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan lingkup sebagai berikut:

Business Activities Based on the Articles of Association and Implemented

To implement the above-mentioned intent and objectives, the Company may carry out business activities with the following scope:

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar dan yang Dijalankan
Business Activities Conducted Based on the Articles of Association

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on the Articles of Association	Telah Dijalankan Implemented	Belum Dijalankan Not yet Implemented	Keterangan Description
Kegiatan Usaha Utama **Main Business Activities**			
a. Mengusahakan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan bahan galian terutama batu bara, antara lain: Engaged in mining, which includes general probing, exploration, exploitation, processing, refining, transportation, and mineral trading, especially coal; among others:			1. Kegiatan huruf a.1, 2, 4 dilakukan oleh PTBA sendiri. 2. Kegiatan huruf a.1 dilakukan juga oleh entitas anak PT Internasional Prima Coal 3. Kegiatan huruf a.3 dilakukan oleh entitas anak PT Satria Bahana Sarana 4. Kegiatan a.5 dilakukan oleh entitas anak PT BAME. 1. Activity in letter a.1, 2, 4 is conducted by PTBA. 2. Activity in letter a.1 is also conducted by a subsidiary, PT Internasional Prima Coal. 3. Activity in letter a.3 is run by a subsidiary, PT Satria Bahana Sarana. 4. Activity a.5 is conducted by subsidiary, PT BAME.
1. Pertambangan batu bara; Coal mining;	✓	-	
2. Penggalian batu hias dan batu bahan bangunan; Excavation of decorative stone and building material stone;	✓	-	
3. Pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya; Mining and other quarrying which are not included in others;	✓	-	
4. Pertambangan Lignit; Lignite Mining;	✓	-	
5. Pertambangan Gas Alam. Natural gas mining.	✓	-	
b. Mengusahakan pengelolaan lebih lanjut atas hasil produksi bahan-bahan galian terutama batu bara di atas, antara lain: Engaged in advanced processing of minerals, especially coal, among others:			Kegiatan dilakukan oleh PTBA sendiri melalui Pabrik Briket di Tanjung Enim dan Lampung This activity is run by PTBA through the Briquette Factories in Tanjung Enim and Lampung.
1. Industri briket batu bara; Coal briquette industry;	✓		
2. Industri Produk dari batu bara; Coal products industry;	-	✓	
3. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Basic organic chemical industry originating from petroleum, natural gas and coal.	-	✓	
c. Memperdagangkan hasil produksi sehubungan dengan usaha sub a dan sub b di atas baik hasil sendiri maupun hasil produksi pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri antara lain perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar. Trading production results in connection with sub a and sub b businesses, both self-produced and produced by other parties, and in national and international markets, among others wholesale trading of basic chemical materials and goods.	✓	-	Dijalankan oleh PTBA sendiri dan juga dilakukan oleh entitas anak PT Bukit Asam Prima Run by PTBA and is also conducted by a subsidiary, PT Bukit Asam Prima
d. Mengusahakan dan/atau mengoperasikan terminal (pelabuhan dan/atau dermaga) untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain, antara lain: Manage and/or operate terminals (ports and/or Barging Ports) both for own needs or other parties, among others:			Aktivitas No. 1 dan 2 telah dijalankan oleh Perusahaan sendiri dengan memiliki 3 (tiga) pelabuhan dan/atau dermaga batu bara yaitu 1. Dermaga Kertapati, Palembang, 2. Pelabuhan Tarahan Lampung, dan 3. Dermaga Teluk Bayur, Padang dan melalui entitas anak PT Bukit Prima Bahari dan PT Penajam Internasional Terminal. Activity No. 1 and 2 are run by PTBA by owning three coal ports and/ or Barging Ports, namely 1. Kertapati Barging Port, Palembang, 2. Tarahan Lampung Port, and 3. Teluk Bayur Barging Port, Padang and through subsidiaries, PT Bukit Prima Bahari and PT Penajam Internasional Terminal.
1. Aktivitas pelayanan pelabuhan laut; Sea port service activities;	✓	-	
2. Aktivitas pelayanan pelabuhan sungai dan danau. River and lake port service activities.	✓	-	

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar dan yang Dijalankan
Business Activities Conducted Based on the Articles of Association

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on the Articles of Association	Telah Dijalankan Implemented	Belum Dijalankan Not yet Implemented	Keterangan Description
c. Mengusahakan dan/atau mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap atau lainnya baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, antara lain: Manage and/or operate coal power plants or others, both for own needs and for other parties, among others:			Aktivitas e.1-8 dilakukan dengan: Pengusahaan dan/atau pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap atau lainnya, telah dijalankan oleh Perusahaan sendiri dengan mengoperasikan PLTU Tanjung Enim dengan kapasitas listrik sebesar 3x10 MW dan PLTU Tarahan dengan kapasitas 2x8 MW. Kegiatan usaha ini juga dijalankan oleh entitas ventura bersama, yaitu PT Bukit Pembangkit Innovative dengan kapasitas 2x110 MW nett dan PT Huadian Bukit Asam Power (PLTU Sumsel 8) dengan kapasitas 2x620 MW. Activity point e.1-8 is conducted by: concession and/or operation of steam power plants or others, is conducted by the Company by operating Tanjung Enim power plant with a capacity of 3x10 MW and Tarahan power plant with a capacity of 2x8 MW. This business activity is also carried out by a joint venture entity, namely PT Bukit Pembangkit Innovative with a capacity of 2x110 MW nett and PT Huadian Bukit Asam Power (Sumsel 8 CFPP) with a capacity of 2x620 MW.
1. Pembangkitan tenaga listrik; Power plant;	✓	-	
2. Transmisi tenaga listrik; Electricity power transmission;	✓	-	
3. Distribusi tenaga listrik; Eelectricity power distribution;	✓	-	
4. Penjualan tenaga listrik; Electricity power trade;	✓	-	
5. Pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha; Generation, transmission, distribution and sales of electricity in one business unit;	✓	-	
6. Pembangkit, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha; Generation, transmission, and sales of electricity in one business unit;	✓	-	
7. Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha; Distribution and Sales of Electricity in one business unit Business Unity;	✓	-	
h. Memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan pertambangan batu bara beserta hasil-hasil olahannya, antara lain: Providing consulting and engineering services related to coal mining and its processed products, among others:			Aktivitas huruf f. 1 sd 3 yaitu Aktivitas mencangkup aktivitas holding yang dilakukan oleh entitas anak PT Bukit Multi Investama dan juga melalui entitas anak PT Bukit Energi Investama serta PT Bukit Asam Prima Activity point f. 1 to 3, namely activities including holding activities are carried out by the subsidiary PT Bukit Multi Investama and also through subsidiary PT Bukit Energi Investama and PT Bukit Asam Prima.
1. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya; Other management consulting activities;	✓	-	
2. Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang berhubungan dengan itu; Engineering activities and technical consulting related;	✓	-	
3. Aktivitas konsultasi manajemen industri. Industrial management consulting activities.	✓	-	
Kegiatan Usaha Penunjang **Supporting Business Activities**			
a. Optimalisasi dan pemanfaatan sumber daya yang tidak terbatas pada Kegiatan optimalisasi dan pemanfaatan aset baik itu tanah, bangunan, atau bentuk aset lainnya. Optimization and utilization of resources, which are not limited to optimization and utilization of assets, be it land, buildings, or other forms of assets.s	✓	-	Optimasi dan pemanfaatan sumber daya sebagaimana telah dijelaskan, dijalankan oleh Perusahaan dengan melakukan aktivitas sewa menyewa, BOT dan skema lainnya untuk aset-aset yang tersebar di Provinsi Sumatra Selatan, Sumatra Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Optimization and utilization of resources as described, are conducted by the Company by carrying out leasing activities, BOT and other schemes for assets spread across the Provinces of South Sumatra, West Sumatra, DKI Jakarta, and East Java.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar dan yang Dijalankan
Business Activities Conducted Based on the Articles of Association

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on the Articles of Association	Telah Dijalankan Implemented	Belum Dijalankan Not yet Implemented	Keterangan Description
b. Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi yang tidak terbatas pada: Water management, waste water management, waste management and recycling, and remediation activities, which is not limited to:			Seluruh aktivitas dilakukan oleh PTBA sendiri dalam menjalankan kegiatan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan melalui PT Sinergi Mitra Lestari Indonesia (entitas asosiasi PTBA). All activities are run by PTBA in carrying out activities according to the 2020 Indonesia Standard Industrial Classification and through PT Nasional Hijau Lestari (PTBA associated entity).
1. Pengumpulan air limbah berbahaya; Collection of hazardous water waste;	✓	-	
2. Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya; Treatment and disposal of hazardous water waste;	✓	-	
3. Pengumpulan limbah berbahaya; Collection of hazardous waste;	✓	-	
4. Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya; Collection of waste and non-hazardous waste;	✓	-	
5. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) termasuk pengumpulan, pengangkutan, penimbunan, pengolahan, pembuangan, dan pemanfaatan limbah B3; Management of hazardous and toxic waste (B3) including collection, transportation, stockpiling, processing, disposal, and utilization of B3 waste;	✓	-	
6. *Treatment* dan pembuangan limbah berbahaya; Treatment and disposal of hazardous waste;	✓	-	
7. Pemulihan material barang bukan logam; Material recovery of non-metallic goods;	✓	-	
8. Penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum; Storage, purification, and distribution of drinking water;	✓	-	
9. Penampungan dan penyaluran air baku; Storage and distribution of raw water;	✓	-	
10. Pemulihan barang bukan logam; Non-metallic goods recovery;	✓	-	
11. Produksi kompos organik; Production of organic compost;	✓	-	
12. Aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya. Activities of remediation and management of waste and other waste.	✓	-	
c. *Real Estate* yang tidak terbatas pada: Real Estate which is not limited to:			Aktivitas c.2 dilakukan oleh entitas anak PT Bukit Multi Properti Activity c. 2 is run by a subsidiary, PT Bukit Multi Properti.
1. Kawasan Industri; Industrial Area;	-	✓	
2. *Real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa. Owned or rented Real Estate.	✓	-	
e. Informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada menjalankan penyiaran radio oleh swasta; Information and communication, which is not limited to radio broadcasting by private sector;	✓	-	Aktivitas ini dilakukan oleh PTBA sendiri untuk memenuhi ketentuan KBLI 2020. This activity is run by Bukit Asam to comply with the 2020 KBLI regulation.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar dan yang Dijalankan
Business Activities Conducted Based on the Articles of Association

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on the Articles of Association	Telah Dijalankan Implemented	Belum Dijalankan Not yet Implemented	Keterangan Description
f. Pengangkutan dan pergudangan yang tidak terbatas pada: Transportation and warehousing which is not limited to:			Aktivitas e.2 dan 3 dijalankan oleh PT Bukit Asam Prima Bahari dan PT Penajam Internasional Terminal. Untuk kegiatan usaha e.5 dan e.7 dijalankan oleh PT Bukit Asam Transpacific Railways (namun belum beroperasi). Activities e.2 and 3 are carried out by PT Bukit Asam Prima Bahari and PT Penajam Internasional Terminal. Business activities e.5 and e.7 are run by PT Bukit Asam Transpacific Railways (but not yet operational).
1. Angkutan bermotor untuk barang khusus; Motorized transportation for special goods;	-	✓	
2. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus; Domestic sea transportation for special goods;	✓	-	
3. Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus; River and lake transportation for special goods;	✓	-	
4. Aktivitas kebandarudaraan; Airport activity;	-	✓	
5. Angkutan jalan rel untuk barang; Railroad transportation for good;	✓	-	
6. Angkutan penyeberangan lainnya untuk barang termasuk penyeberangan antarnegara; Other ferry transportation for goods including interstate crossings;	✓	-	
7. Angkutan jalan rel lainnya. Other rail transportation.	✓	-	
f. Kesenian, hiburan, dan rekreasi yang tidak terbatas pada: Arts, entertainment, and recreation, which is not limited to:			Aktivitas ini dilakukan oleh PTBA sendiri untuk memenuhi ketentuan KBLI 2020. This activity is run by PTBA to fulfill the 2020 KBLI requirements
1. Perpustakaan dan arsip swasta; Private library and archive;	✓	-	
2. Museum yang dikelola swasta; Private-run museums;	✓	-	
3. Peninggalan sejarah yang dikelola Swasta. Private-run historical heritage.	✓	-	
g. Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang tidak terbatas pada: Professional, scientific and technical activities, which are not limited to:			Aktivitas g. 1 dilakukan oleh PTBA sendiri. Aktivitas g. 2 sd 4 dilakukan oleh PTBA sendiri melalui laboratorium PTBA. Activity g. 1 is run by PTBA. Activity g. 2 to 4 is ran by PTBA through its laboratory
1. Aktivitas Kantor Pusat; Head Office activities;	✓	-	
2. Jasa Pengujian Laboratorium; Laboratory Testing Services;	✓	-	
3. Jasa Kalibrasi/Metrologi; Calibration/Metrology Services;	✓	–	
4. Analisis dan uji teknis lainnya. Analysis and other technical tests.	✓		
h. Aktivitas kesehatan manusia dan sosial yang tidak terbatas pada: Human health and social activities which is not limited to:			Aktivitas ini telah dilakukan oleh entitas anak yaitu PT Bukit Asam Medika. This activity has been run by a subsidiary, PT Bukit Asam Medika.
1. Aktivitas klinik swasta; Private clinic activity;	✓	-	
2. Aktivitas praktik dokter. Doctor practice activity.	✓	-	
i. Konstruksi yang tidak terbatas pada konstruksi jalan rel; Construction, which is not limited to railroad construction;	-	✓	Aktivitas terkait konstruksi jalan rel saat ini masih dalam tahap pengembangan, belum dijalankan PTBA. Activities related to railroad construction are currently still in the development stage, not yet conducted by PTBA.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar dan yang Dijalankan
Business Activities Conducted Based on the Articles of Association

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on the Articles of Association	Telah Dijalankan Implemented	Belum Dijalankan Not yet Implemented	Keterangan Description
j. Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan yang tidak terbatas pada: Wholesale trading of building materials and equipment, which is not limited to:			Aktivitas perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan belum dijalankan oleh PTBA. PTBA has not yet conducted the wholesale trading activities for building materials and equipment
1. Perdagangan besar bahan berbahaya (B2); Wholesale trading of hazardous materials (B2);	-	✓	
2. Perdagangan besar bahan berbahaya dan beracun (B3); Wholesale trading of hazardous and toxic materials (B3);	-	✓	
3. Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (Scrap) Wholesale trading of used goods and unused remains (Scrap).	-	✓	

Proses Bisnis PTBA

Sebagai perusahaan energi yang berbasis batu bara, proses bisnis utama dari PTBA adalah proses penambangan batu bara. Proses bisnis utama tersebut dijabarkan berdasarkan alur proses dan *supply chain* sebagai berikut:

1. Penambangan dan Penjualan via Pelabuhan
   Proses ini dimulai dengan proses penambangan dengan mekanisme *open pit mining* yang dilanjutkan dengan proses pengiriman batu bara ke *stockpile* dengan menggunakan *dumptruck*. Selanjutnya, dari *stockpile* dilakukan pemuatan batu bara ke kereta api dengan menggunakan *Train Loading Station*. Batu bara yang telah dimuat dalam gerbong kereta api milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) selanjutnya dikirim ke pelabuhan milik PTBA untuk kemudian dilakukan *loading* ke kapal/*vessel* milik pembeli atau *trader*. Selain menggunakan kereta api, PTBA juga saat ini telah menggunakan moda transportasi lain (di luar kereta api) ke pelabuhan lain.

2. Penambangan dan Penjualan di Mulut Tambang untuk Kepentingan PLTU
   Sama seperti proses sebelumnya, proses penambangan dilakukan secara *open pit mining* yang selanjutnya batu bara yang dihasilkan dilakukan pengangkutan ke stockpile terdekat. Dari *stockpile* tersebut, batu bara dikirimkan dengan menggunakan *belt coveyor* ke PLTU Mulut Tambang.

PTBA Business Process

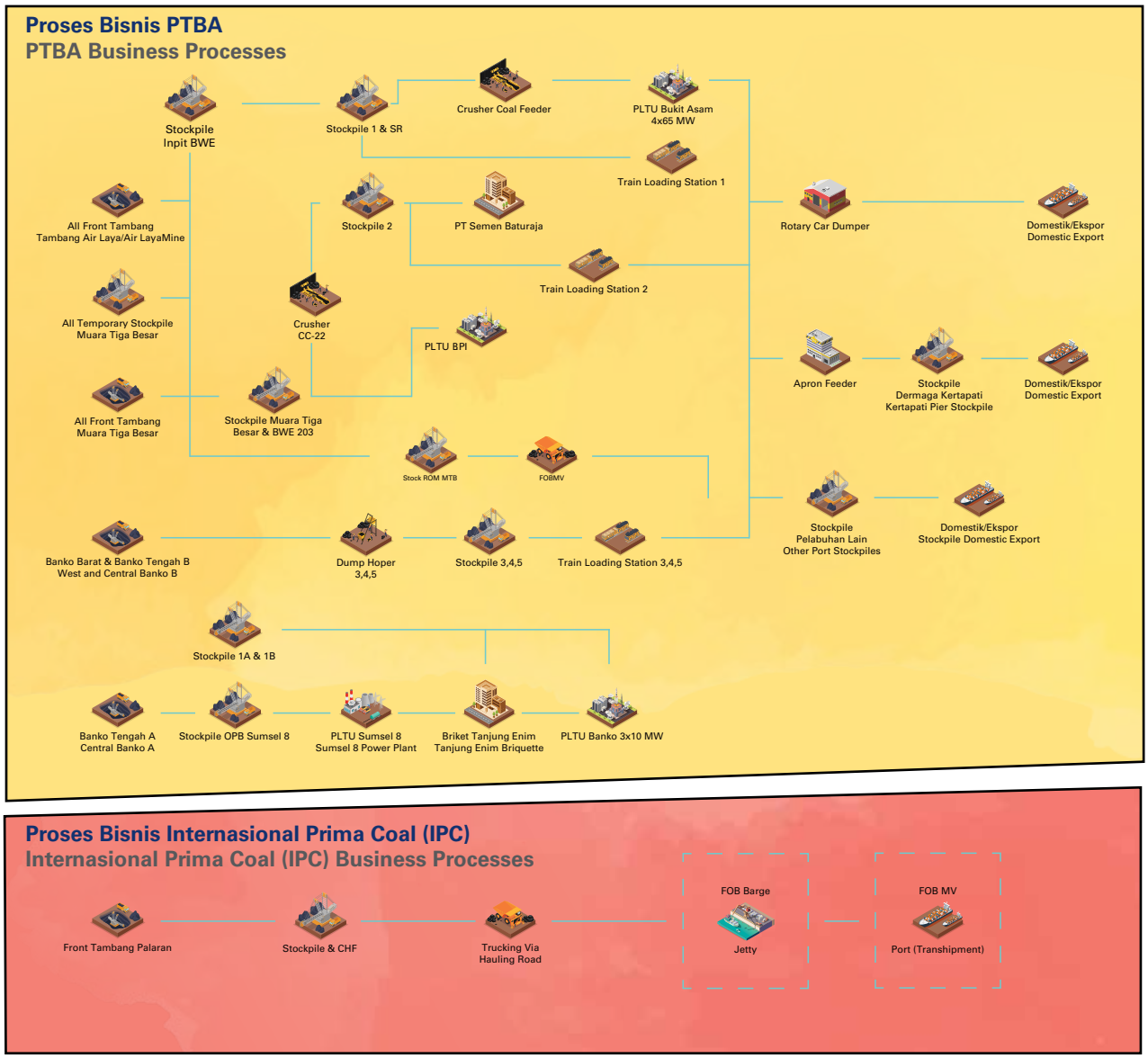
As a coal-based energy company, PTBA's main business process is the coal mining process. The main business processes are carried out based on the process flow and supply chain are as follows:

1. Mining and Sales via Port
   The process starts with open-pit mining, followed by transporting the coal to the stockpile using dump trucks. Subsequently, the coal is loaded onto the train at the Train Loading Station. The loaded train carriages, owned by PT Kereta Api Indonesia (Persero), then transport the coal to the port owned by PTBA for loading onto the buyer's or trader's ship/vessel. Besides using trains, PTBA is also using other modes of transportation (apart from trains) to other ports.

2. Mining and Sales at the Mine Mouth for CFPP Purposes
   Similar to the previous process, the mining is conducted through open-pit mining, and the coal extracted is then transported to the nearest stockpile. Subsequently, the coal is conveyed via a belt conveyor to the Mine Mouth CFPP.

3. Penambangan dan Penjualan Mulut Tambang untuk Kepentingan Industri Lain (*End User*)
   Proses dilakukan dengan penambangan yang dilakukan secara *open pit mining*, yang selanjutnya batu bara tersebut dikirimkan ke *stockpile*. Dari *stockpile*, batu bara akan jual kepada pihak *end user*. Pihak *end user* sendirilah dengan moda transportasi milik *end user* yang akan melakukan pengiriman batu bara dari tambang PTBA ke lokasi industri milik *end user*.

3. Mining and Mine Mouth Sales for Other Industrial Uses (End Users)
   The process involves open-pit mining, followed by the transportation of coal to a stockpile. The coal is then sold to end users who will transport it from the PTBA mine to their industrial location using their preferred mode of transportation.



Informasi Produk dan Jasa Layanan

Sesuai dengan Keputusan Direksi PTBA No. 050/0100/2022 tentang Merek Dagang (Brand) dan Spesifikasi batu bara PT Bukit Asam Tbk, Perusahaan memiliki beragam jenis produk batu bara sesuai dengan kadar kualitas sebagai berikut:

Information on Products and Services

In accordance with the Decree of the Board of Directors of PTBA No. 050/0100/2022 concerning Trademarks (Brands) and Coal Specifications of PT Bukit Asam Tbk, the Company has various types of coal products according to the quality levels as follows:

Parameter	Satuan Unit	Bukit Asam						IPC		
		BA-28	BA–42	BA–46	BA–48	BA–50	BA–61	GAR 4600	GAR 4700	GAR 4800
CV	Kcal/Kg.ar	2,800	4,200	4,500	4,800	5,000	6,100	4,600	4,700	4,800
TM	%, ar	53.00	33.00	31.00	30.00	28.00	16.00	31	28	27
IM	%, adb	16.00	15.00	15.00	14.00	13.00	6,00	15	15	15
Ash	%, adb	9.00	9.00	4.00	8.00	7.00	7,00	6	6	6
VM	%, adb	39.00	38.00	43.00	39.00	40.00	40,00	38	38	38
FC	%, adb	36.00	38.00	38.00	39.00	40.00	47,00	By Diff	By Diff	ByDiff
TS	%, adb	0.20	0.42	0.54	0.68	0.42	0.39	0.5	0.5	0.5
Ash Fushion Temperatures (oC)	Deformation	1,247	1,277	1,216	1,321	1,302	1,331	-	-	-
	Spherical	1,260	1,237	1,246	1,332	1,325	1,366	-	-	-
	Hemisphere	1,281	1,247	1,384	1,340	1,350	1,405	-	-	-
	Flow	1,303	1,257	1,413	1,373	1,392	1,445	-	-	-
Hardgrove Grindability Index		69	61	58	55	57	55	42	42	42



Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi
Business Network and Operational Area



Luas Area Pertambangan
Mining Land Area

65.632 Hektar
Hectare

Sumber Daya Batu Bara
Coal Resources

5,77 Miliar Ton
Billion Ton

Cadangan Batu Bara
Coal Reserves

2,93 Miliar Ton
Billion Ton

Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Number of Mining Exploration Permit

9 Izin Usaha
Permits

Jumlah Pelabuhan & Dermaga
Number of Port & Barging Port

3 Pelabuhan
Ports

Hingga akhir tahun 2024, jaringan bisnis PTBA terdiri atas 5 (lima) wilayah kelolaan pertambangan dan 3 (tiga) pelabuhan. Izin usaha pertambangan (IUP) produksi batu bara Perusahaan memiliki total area kelola seluas 65.632 Ha dengan rincian sebagai berikut:

By the end of 2024, PTBA's business network consists of 5 (five) mining managed areas and 3 (three) ports. The Company's coal production mining business permit (IUP) has a total management area of 65,632 Ha with the following details:

No.	Lokasi Location	Nama Izin Pertambangan Name of Mining Permit	Nomor Izin Pertambangan Mining Permit Number	Penerbit Izin Permit Issuer	Area (Ha)	Masa Berlaku Validity Period	
						Mulai Start	Berakhir End
1	Tanjung Enim, Sumatra Selatan South Sumatra	Tambang Air Laya Air Laya Mine	No. 94/1/IUP/ PMDN/2020 Jo.	Menteri Investasi/Kepala BKPM Investment Minister Investment Minister/Head of BKPM	7.621	01 Januari 2020 January 1, 2020	31 Desember 2030 December 31, 2030
			No. 159/1/IUP/ PMDN/2020	Menteri Investasi/Kepala BKPM Investment Minister Investment Minister/Head of BKPM			
		Muara Tiga Besar	No. 251/1/IUP/ PMDN/2019 jo	Menteri Investasi/Kepala BKPM Investment Minister Investment Minister/Head of BKPM	2.866	30 Agustus 2019 August 30, 2019	29 Agustus 2029 August 29, 2029
			No. 4802/A.8/ B.1/2019	Menteri Investasi/Kepala BKPM a BKPM Investment Minister Investment Minister/Head of BKPM			
		Banko Barat West Banko	No. 2402 K/30/ MEM/2011 jo.	Menteri Investasi/Kepala BKPM a BKPM Investment Minister Investment Minister/Head of BKPM	4.500	10 Oktober 2011 October 10, 2011	09 April 2027 April 9, 2027
			No. 2866 K/30/ MEM/2014 jo.	Menteri Investasi/Kepala BKPM a BKPM Investment Ministe Investment Minister/Head of BKPM			
			No. 1/1/IUP-PB/ PMDN/2019	Menteri Investasi/Kepala BKPM a BKPM Investment Minister Investment Minister/Head of BKPM			

No.	Lokasi Location	Nama Izin Pertambangan Name of Mining Permit	Nomor Izin Pertambangan Mining Permit Number	Penerbit Izin Permit Issuer	Area (Ha)	Masa Berlaku Validity Period	
						Mulai Start	Berakhir End
		Banko Tengah A Central Banko A	No. 307/1/IUP/PMDN/2019	Menteri Investasi/Kepala BKPM a BKPM Investment Minister Investment Minister/Head of BKPM	2.423	22 Agustus 2019 August 22, 2019	07 September 2035 September 7, 2035
		Banko Tengah B Central Banko B	No. 487/1/IUP/PMDN/2021	Menteri Investasi/Kepala BKPM a BKPM Investment Minister Investment Minister/Head of BKPM	22.937	08 Juni 2021 June 8, 2021	07 September 2035 September 7, 2035
2	Samarinda, Kalimantan Timur East Kalimantan	Bantuas Samarinda	No. 503/2253/IUPOP/BPPMDPTSP/XI/2016	Gubernur Kalimantan Timur East Kalimantan Governor	3.238	30 November 2016 November 30, 2016	30 November 2026 November 30, 2026
3	Indragiri Hulu, Riau	Peranap	No. 486/1/IUP/PMDN/2021	Menteri Investasi/Kepala BKPM a BKPM Investment Minister/Head of BKPM	18.230	08 Juni 2021 June 8, 2021	09 Juni 2035 June 9, 2035
4	Sawahlunto, Sumatra Barat	Ombilin	No. 99/I/IUP/PMDN/2019	Menteri Investasi/Kepala BKPM a BKPM Investment Minister/Head of BKPM	2.935	16 Februari 2019 February 16, 2019	16 Februari 2029 February 16, 2029
5	Muara Enim, Sumatra Selatan	Bukit Kendi	No. 305/KPTS/DISTAMBEN/2010	Gubernur Sumatra Selatan South Sumatra Governor	882	30 April 2010 April 30, 2010	25 Oktober 2025 October 25, 2025
Total Area (Ha)					**65.632**		

Adapun izin operasi pelabuhan yang dijalankan Perusahaan adalah sebagai berikut:

The port operation permits carried out by the Company are as follows:

No.	Nama Izin Name of Permit	Penerbit Izin Issued by	Lokasi Location	Nama Pelabuhan/ Dermaga Port/Barging Port Name	Masa Berlaku Validity	
					Mulai Start	Berakhir End
1	BX-424/PP008	Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Director General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation	Tarahan, Lampung	Pelabuhan Tarahan Tarahan Port	11 September 2017 September 11, 2017	11 September 2027 September 11, 2027
2	BX-423/PP008	Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Director General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation	Kertapati, Sumatra Selatan South Sumatra	Dermaga Kertapati Kertapati Barging Port	11 September 2017 September 11, 2017	11 September 2027 September 11, 2027
3	A.433/AL.308/DJPL	Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Director General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation	Teluk Bayur, Sumatra Barat West Sumatra	Dermaga Teluk Bayur Teluk Bayur Barging Port	13 Mei 2019 May 13, 2019	13 Mei 2029 May 13, 2029

Sumber Daya dan Cadangan
Resources and Reserves

Unit Lokasi Location	Izin Usaha Pertambangan Mining Permit	2024		2023	
		Sumber Daya (juta ton) Resources (million tons)	Cadangan (juta ton) Reserves (million tons)	Sumber Daya (juta ton) Resources (million tons)	Cadangan (juta ton) Reserves (million tons)
Tanjung Enim	Tambang Air Laya Air Laya Mine	685	377	690	382
	Muara Tiga Besar	303	157	314	168
	Banko Barat West Banko	499	237	507	245
	Banko Tengah A Central Banko A	372	361	375	364
	Banko Tengah B Central Banko B	3.113	1.521	3.127	1.535
Ombilin	Ombilin*	102	0	102	0
Peranap	Peranap	671	279	671	279
Bantuas (IPC)	Bantuas Samarinda	19	1	20	2
Bukit Kendi	Bukit Kendi	3	1	3	1
Jumlah Total		**5.766**	**2.933**	**5.809**	**2.976**

Keterangan: *tidak menggunakan Komite Cadangan Mineral Indonesia (KCMI)
Note: *does not use the Indonesian Mineral Reserves Committee (KCMI)

Kapasitas Pelabuhan dan Dermaga

Guna mendukung aktivitas operasional PTBA, khususnya untuk proses muat batu bara, PTBA memiliki 3 (tiga) Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dengan lokasi dan kapasitas sebagaimana informasi di bawah ini:

Port and Barging Port Capacity

To support PTBA operational activities, specifically for the coal loading process, PTBA has 3 (three) Designated Terminals for Own Interests with locations and capacities as follows:

Pelabuhan dan Dermaga Port and Barging Port	Stockpile (Ton)	2024		2023	
		Port Throughput (juta ton per tahun) (million tons per year)	Kapasitas Capacity (Barging Deadweight Tonnage)	Port Throughput (juta ton per tahun) (million tons per year)	Kapasitas Capacity (Barging Deadweight Tonnage)
Dermaga Teluk Bayur Teluk Bayur Bargin Port	60.000	2,5	40.000	2,5	40.000
Pelabuhan Tarahan Tarahan Port	1.000.000	27,5	210.000	25	210.000
Dermaga Kertapati Kertapati Barging Port	400.000	8	8.000	7	8.000

Keanggotaan Dalam Asosiasi
Membership in Associations

PTBA telah bergabung dengan asosiasi dan organisasi di tingkat Nasional dan Internasional, seperti:

PTBA has joined national and international associations and organizations, such as:

Internasional
International

Carbon Disclosure Project

United Nations Global Compact

Nasional
National

Asosiasi Pertambangan Indonesia
Indonesia Coal Mining Association

Indonesian Mining Association

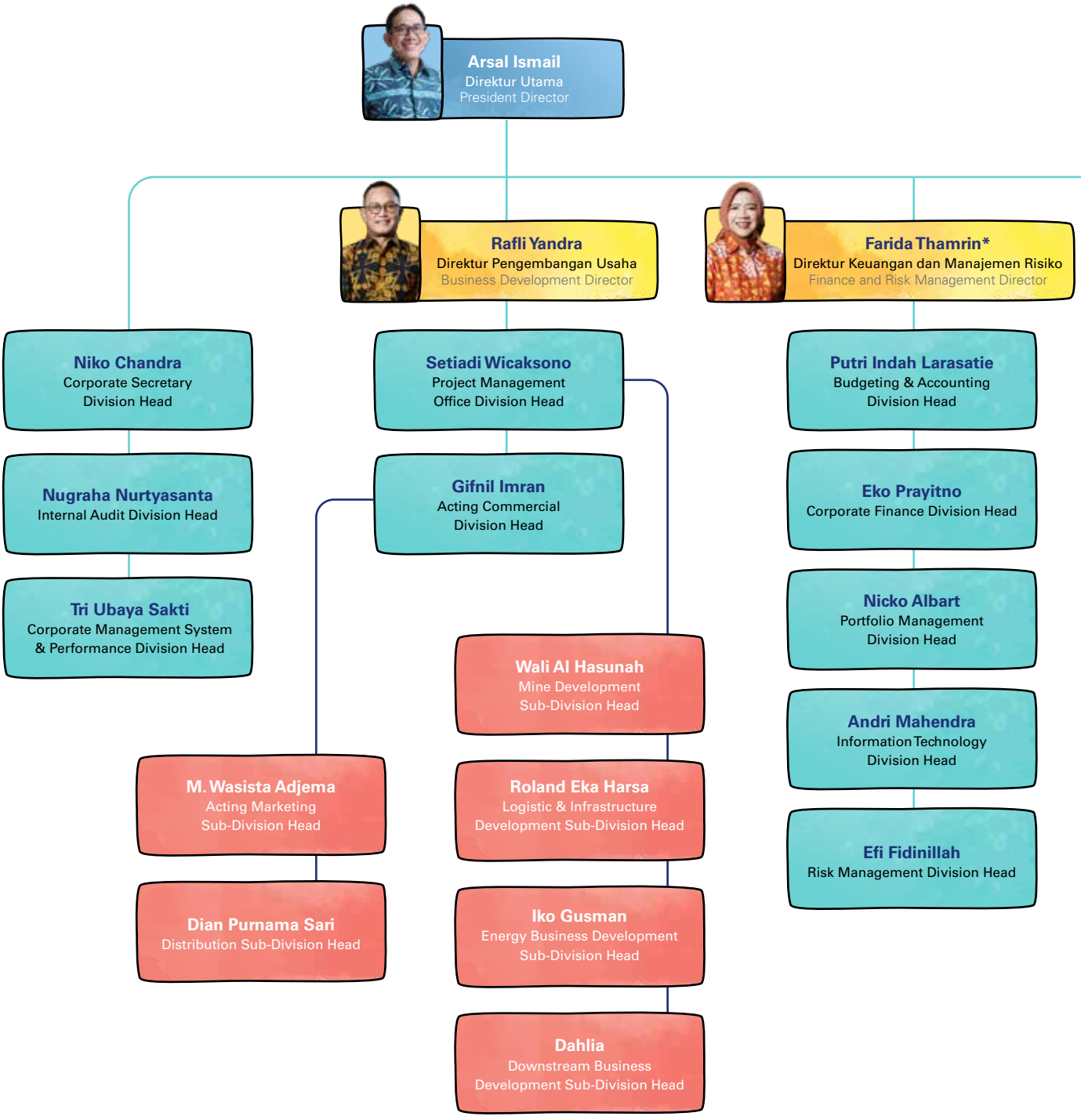
Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia
Association of Indonesian Mining Professionals

Indonesia Corporate Secretary Association

Asosiasi Emiten Indonesia
Indonesia Public Listed Companies Association

Struktur Organisasi di Bawah Direksi

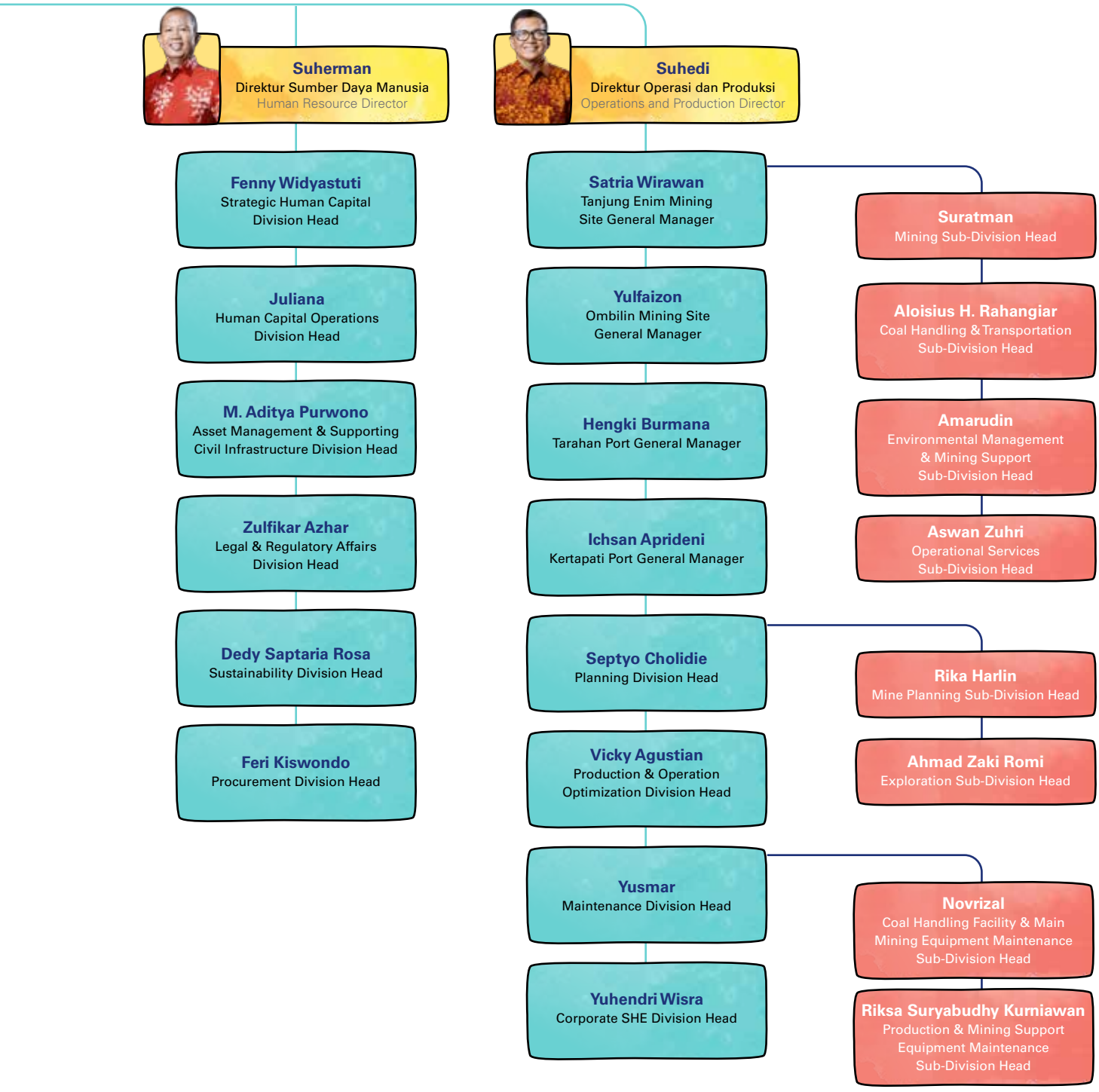
Organizational Structure Under the Board of Directors



Keterangan | Notes
*Tidak menjabat terhitung sejak tangggal 24 Maret 2025, mengingat yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur Treasury and International Banking PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
*Not in office as of March 24, 2025, considering that the person concerned was appointed as Director of Treasury and International Banking of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Perusahaan berupaya untuk menciptakan organisasi yang efektif yang dapat mendukung pencapaian tujuan dan target bisnis yang telah ditetapkan serta untuk mengantisipasi perkembangan bisnis ke depan. Untuk itu, Perusahaan telah menyusun struktur organisasi yang saling terikat dan mendukung antara satu bagian dengan bagian lainnya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 028E/0100/2025 tanggal 21 Maret 2025.

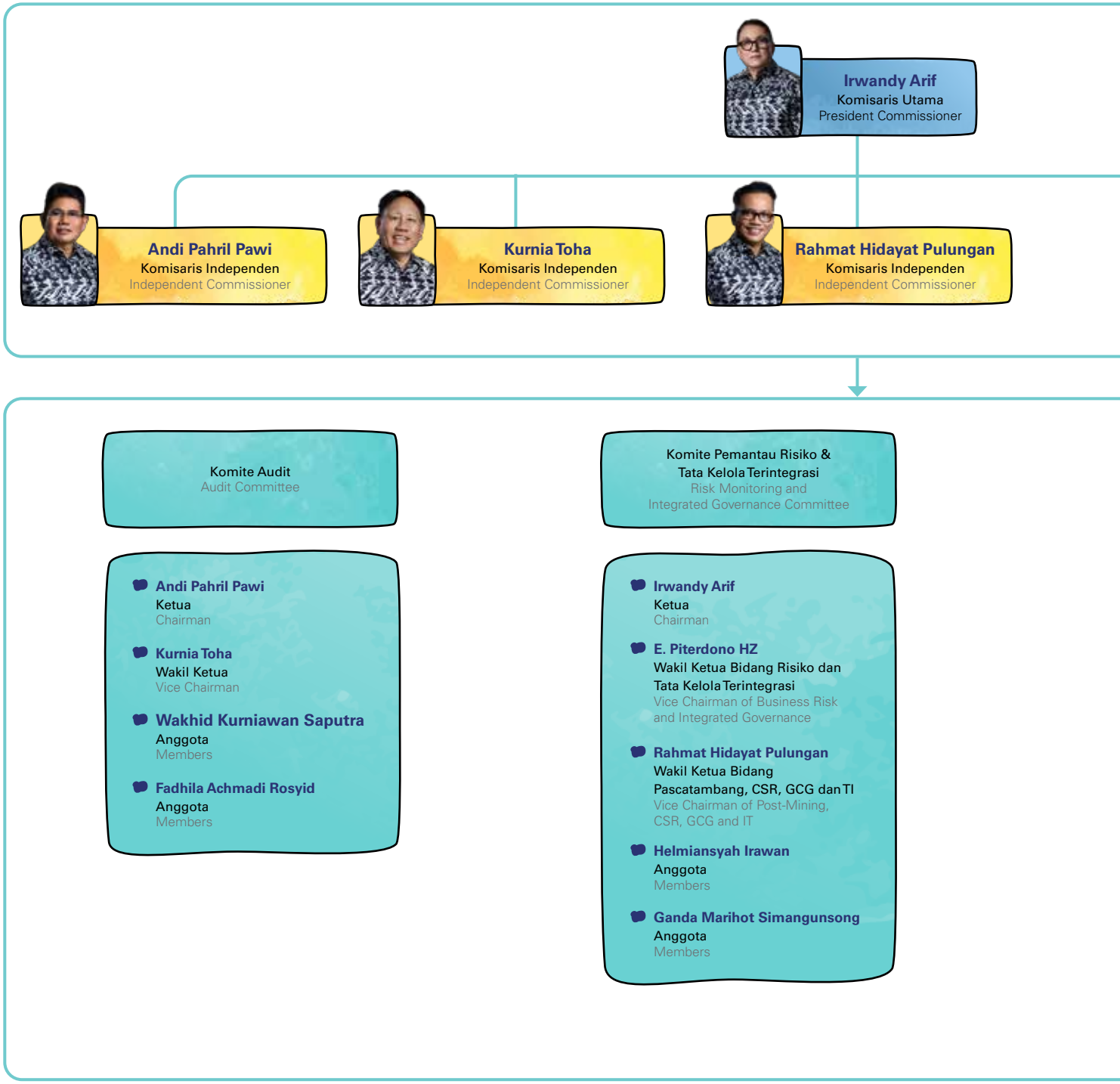
The Company strives to create an effective organization to support achieving the established business goals and targets and to anticipate future business developments. To that end, the Company has developed an organizational structure that is interconnected and supports one another which is determined based on Decree of Board of Directors No. 0028E/0100/2025 date March, 21 2025.



Struktur Organisasi di Bawah Dewan Komisaris

Organizational Structure Under the Board of Commissioners

Struktur organisasi di tingkat Dewan Komisaris PTBA dapat dlihat pada bagan sebagai berikut:
The organizational structure of the Board of Commissioners of PTBA can be seen in the following chart:





Carlo B. Tewu
Komisaris
Commissioner



E. Piterdono Hz.
Komisaris
Commissioner

Komite Nominasi & Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

- **Kurnia Toha**
  Ketua
  Chairman
- **Carlo B. Tewu**
  Wakil Ketua
  Vice Chairman
- **Nora Sri Hendriyeni**
  Anggota
  Members

Sekretariat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Secretariat

- **Nurul Almy**
  Sekretaris Dewan Komisaris
  Secretary of Board of Commissioners
- **Qanita Zara Shafira**
  Staf Sekretaris Dewan Komisaris
  Staff of Secretary of Board of Commissioners

Direksi
Board of Directors





1 **Drs. Arsal Ismail, M.M., MSI**
Direktur Utama
President Director

2 **Farida Thamrin, S.T.**
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Finance and Risk Management Director

3 **Ir. Suhedi**
Direktur Operasi dan Produksi
Operations and Production Director

4 **Ir. Rafli Yandra, M.M., MBA.**
Direktur Pengembangan Usaha
Business Development Director

5 **Suherman, S.E., Ak., M.M.**
Direktur Sumber Daya Manusia
Human Resources Director

DIREKSI SAMPAI DENGAN 24 MARET 2025
BOARD OF DIRECTORS UNTIL MARCH 5, 2025

Direksi
Board of Directors





1 **Drs. Arsal Ismail, M.M., MSI**
Direktur Utama
President Director

2 **Ir. Suhedi**
Direktur Operasi dan Produksi
Operations and Production Director

3 **Ir. Rafli Yandra, M.M., MBA.**
Direktur Pengembangan Usaha
Business Development Director

4 **Suherman, S.E., Ak., M.M.**
Direktur Sumber Daya Manusia
Human Resources Director

DIREKSI SETELAH 25 MARET 2025 - SEKARANG
BOARD OF DIRECTORS AFTER MARCH 25, 2025 - PRESENT

Profil Direksi
Board of Directors Profile



Drs. Arsal Ismail, M.M., MSI

Direktur Utama
President Director

Usia Age	60 tahun 60 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	S2, Administrasi dan Kebijakan Bisnis, Universitas Indonesia (2004) Master of Business Administration and Policy, University of Indonesia (2004)
Serifikasi Certification	*Certified GRC for Executive* dari LSP Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan Certified GRC for Executive from LSP Governace Risk and Complience
Riwayat Pekerjaan Work Experiencee	1. Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2020-2021) 2. President Director PT Nuansa Cipta Coal Investment (2016-2020) 3. President Director PT Muba Coal (2016-2020) 4. Direktur Marketing PT Bhumi Sriwijaya Perdana Coal (2015-2016) 1. Business Development Director of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2020-2021) 2. President Director of PT Nuansa Cipta Coal Investment (2016-2020) 3. President Director of PT Muba Coal (2016-2020) 4. Marketing Director of PT Bhumi Sriwijaya Perdana Coal (2015-2016)
Jabatan Lainnya Other Position	Ketua Pembina Yayasan Bukit Asam Head of the Advisory Board of the Bukit Asam Foundation
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Terbuka Lain Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan terbuka lainnya Does not hold any concurrent positions in other companies
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2021 tangga 23 Desember 2021 2021 Extraordinary GMS Resolution on December 23, 2021
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi ataupun pemegang saham pengendali. Has no affiliation with members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Memiliki saham PT Bukit Asam Tbk sebesar 304.900 lembar saham Owns 304,900 shares of PT Bukit Asam Tbk
Periode Jabatan Term of Office	23 Desember 2021 - Sekarang December 23, 2021 – Present



Ir. Suhedi

Direktur Operasi dan Produksi
Operations and Production Director

Usia Age	61 tahun 61 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Tanjung Enim
Riwayat Pendidikan Education Background	S1, Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (1990) Bachelor of Geology Engineering from Gadjah Mada University (1990)
Serifikasi Certification	*Certified GRC for Executive* dari LSP Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan Certified GRC for Executive from LSP Governace Risk and Complience
Riwayat Pekerjaan Work Experiencee	1. General Manajer Unit Pertambangan Tanjung Enim PT Bukit Asam Tbk (2016-2020) 2. Senior Manajer Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan PT Bukit Asam Tbk (2012-2016) 1. General Manager Tanjung Enim Mining Unit of PT Bukit Asam Tbk (2016-2020) 2. Senior Manager Land and Building Asset Management of PT Bukit Asam Tbk (2012-2016)
Jabatan Lainnya Other Position	Anggota Pembina Yayasan Bukit Asam Member of the Advisory Board of the Bukit Asam Foundation
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Terbuka Lain Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan terbuka lainnya Does not hold any concurrent positions in other companies
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 5 April 2021 2020 Annual General Meeting of Shareholders Resolution on April 5, 2021
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi ataupun pemegang saham pengendali. Has no affiliation with members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk
Periode Jabatan Term of Office	5 April 2021 – Sekarang April 5, 2021 – Present



Ir. Rafli Yandra, M.M., MBA.

Direktur Pengembangan Usaha
Business Development Director

Usia Age	55 tahun 55 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	1. Master of Business Administration, Georg Simon Ohm-Technische Hochschule Nurnberg, Jerman (2015) 2. S2, Manajemen di Universitas Sriwijaya (2012) 3. S1, Teknik Sipil di Universitas Andalas (1995) 1. Master of Business Administration, George Simon Ohm – Management Institut Nurnberg, Germany (2015) 2. Master in Management from Sriwijaya University (2012) 3. Bachelor in Civil Engineering at Andalas University (1995)
Serifikasi Certification	1. Sustainable Symphony – Echoes of Change (ERMA&CRMS – 2024) 2. GRC for Executive (BNSP - 2024) 3. GRC MIND ID Series (Mind ID - 2024) 4. CBDO Innovation School (BUMN - 2021) 5. Senior Leadership Development Program (Massachussetts Institute of Technology Boston - 2020) 6. Senior Leadership Development Program (Wharton School of Business – 2019) 7. Personal Mastery (BA EDP – 2019) 8. Coal Business and Supply Chain (Singapore – 2016) 9. Coal Utilization Fundamental Technology Development (Japan – 2012)
Riwayat Pekerjaan Work Experiencee	1. Vice President Penanganan dan Angkutan Batu bara PT Bukit Asam Tbk (2020-2021) 2. Direktur Utama PT Bukit Prima Bahari (2019-2020) 3. Vice President Pemasaran dan Penjualan Ekspor PT Bukit Asam Tbk (2017-2019) 1. Vice President of Coal Handling and Transportation of PT Bukit Asam Tbk (2020-2021) 2. President Director of PT Bukit Prima Bahari (2019-2020) 3. Vice President Marketing and Export Sales of PT Bukit Asam Tbk (2017-2019)
Jabatan Lainnya Other Position	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan Does not hold any concurrent positions both inside/outside the Company
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Terbuka Lain Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan terbuka lainnya Does not hold any concurrent positions in other companies
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 2021 Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution on December 23, 2021
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi ataupun pemegang saham pengendali. Has no affiliation with members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk
Periode Jabatan Term of Office	23 Desember 2021 – Sekarang December 23, 2021 – Present



Suherman, S.E., Ak., M.M.

Direktur Sumber Daya Manusia
Human Resources Director

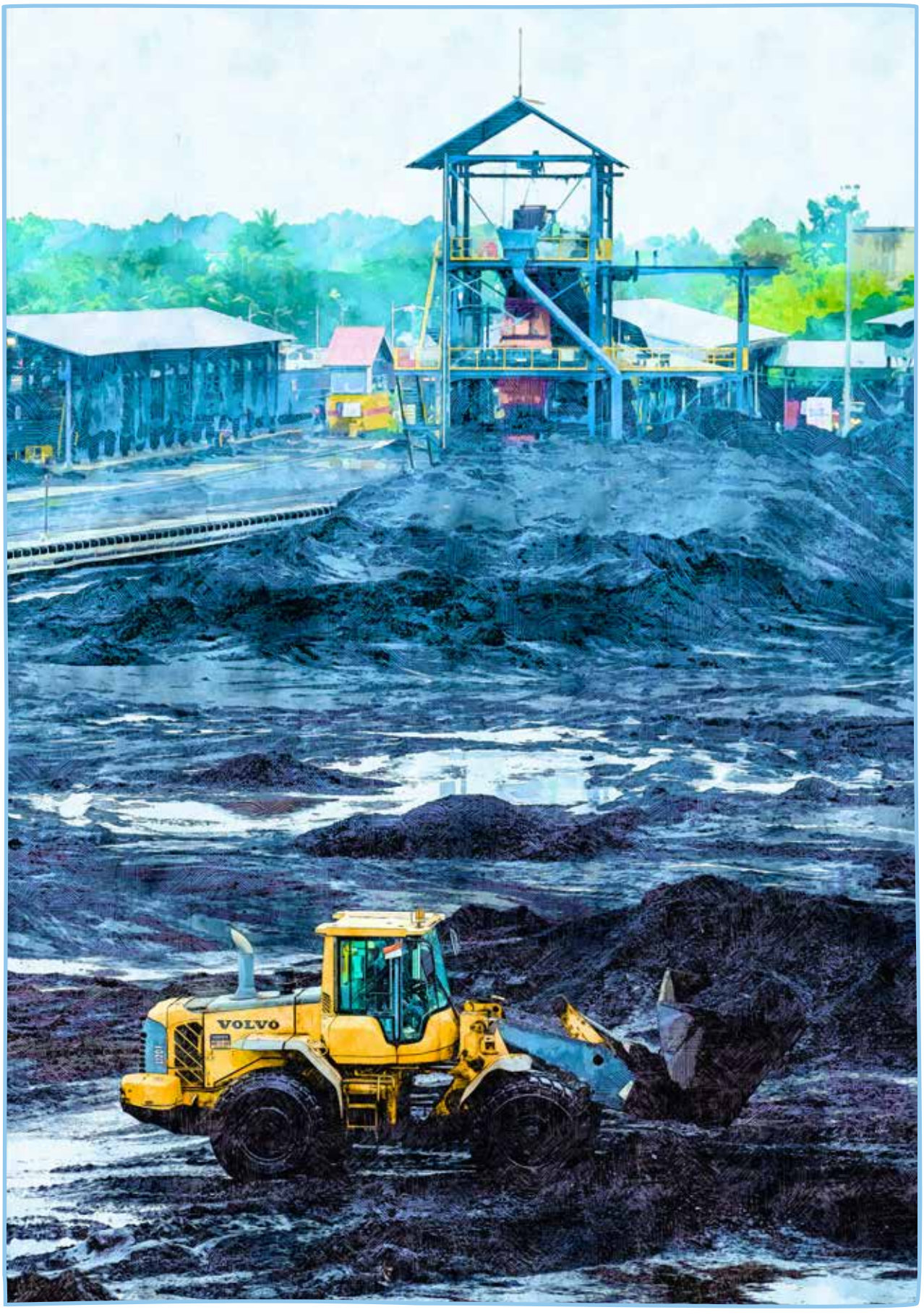
Usia Age	58 tahun 58 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	1. S2, Manajemen Universitas Sriwijaya (2007) 2. S1, Ekonomi Universitas Sriwijaya (1990) 1. Master in Management, Sriwijaya University (2007) 2. Bachelor in Economics, Sriwijaya University (1990)
Serifikasi Certification	*Certified GRC for Executive* dari LSP Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan Certified GRC for Executive from LSP Governace Risk and Complience
Riwayat Pekerjaan Work Experiencee	1. Direktur Utama PT Bukit Multi Investama (2020-2021) 2. Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk (2017-2020) 3. Senior Manajer Perbendaharaan dan Anggaran PT Bukit AsamTbk (2016-2017) 4. Senior Manajer Perbendaharaan dan Pendanaan PT Bukit Asam Tbk (2014-2016) 5. Senior Manajer Akuntansi dan Anggaran PT Bukit Asam Tbk (2009-2014) 1. President Director of PT Bukit Multi Investama (2020-2021) 2. Corporate Secretary of PT Bukit Asam Tbk (2017-2020) 3. Senior Manager of Treasury and Budget of PT Bukit Asam Tbk (2016-2017) 4. Senior Manager of Treasury and Funding of PT Bukit Asam Tbk (2014-2016) 5. Senior Manager of Accounting and Budgeting of PT Bukit Asam Tbk (2009-2014)
Jabatan Lainnya Other Position	Komisaris di PT Internasional Prima Coal Commissioner of PT Internasional Prima Coal
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Terbuka Lain Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan terbuka lainnya Does not hold any concurrent positions in other companies
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 2021 Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution on December 23, 2021
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi ataupun pemegang saham pengendali. Has no affiliation with members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk sebesar 100.000 lembar saham Owns 100,000 share in PT Bukit Asam Tbk
Periode Jabatan Term of Office	23 Desember 2021 – Sekarang December 23, 2021 – Present



Farida Thamrin, S.T.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Finance and Risk Management Director

Usia Age	52 tahun 52 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	S1, Teknik Sipil Universitas Indonesia (1996) Bachelor of Civil Engineering, University of Indonesia (1996)
Serifikasi Certification	*Certified GRC for Executive* dari LSP Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan Certified GRC for Executive from LSP Governace Risk and Complience
Riwayat Pekerjaan Work Experiencee	1. Group Head Corporate Solution PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-April 2021) 2. Group Head Treasury PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2019) 3. Group Head Market Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016)
Jabatan Lainnya Other Position	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan Does not hold any concurrent positions both inside/outside the Company
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Terbuka Lain Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan terbuka lainnya Does not hold any concurrent positions in other companies
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 5 April 2021 2020 Annual General Meeting of Shareholders Resolution on April 5, 2021
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi ataupun pemegang saham pengendali. Has no affiliation with members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk
Periode Jabatan Term of Office	5 April 2021 – 24 Maret 2025 April 5, 2021 – March 24, 2025


VOLVO

Dewan Komisaris
Board of Commissioners





1 **Prof. DR. Ir. Irwandy Arif M.Sc.**
Komisaris Utama
President Commissioner

2 **Marsda TNI (Purn) Andi Pahril Pawi, S.Sos**
Komisaris Independen
Independent Commissioner

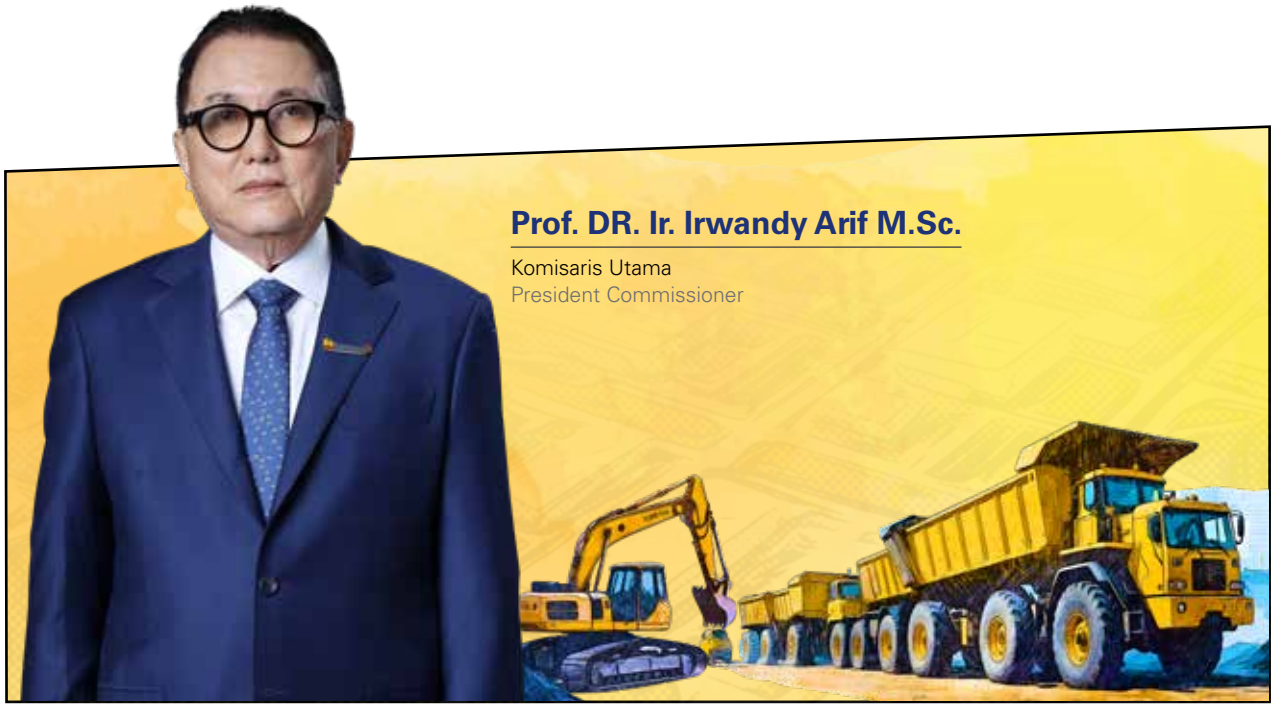
3 **Ir. E. Piterdono HZ, S.E., M.M.**
Komisaris
Commissioner

4 **Irjen. Pol. (Purn) Drs. Carlo Brix Tewu**
Komisaris
Commissioner

5 **Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.**
Komisaris Independen
Independent Commissioner

6 **Can Dr. Rahmat Hidayat Pulungan, S.E., M.Pd.**
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile



Prof. DR. Ir. Irwandy Arif M.Sc.

Komisaris Utama
President Commissioner

Usia Agew	73 tahun 73 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	1. S3, Ecole des Mines de Nancy, Perancis (1991) 2. S2, Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (1985) 3. S1, Teknik Pertambangan di Institut Teknologi Bandung (1976) 1. Doctoral Degree from Ecole des Mines de Nancy, France (1991) 2. Master of Industrial Engineering at Bandung Institute of Technology (1985) 3. Bachelor of Mining Engineering at Bandung Institute of Technology (1976)
Serifikasi Certification	*Certified GRC for Executive* dari LSP Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan Certified GRC for Executive from LSP Governace Risk and Complience
Riwayat Pekerjaan Work Experiencee	1. Komisaris PT Bukit Asam Tbk (2020-2023) 2. Komisaris Independen PT Vale Indonesia Tbk (2018) 3. Advisor Tambang Bawah Tanah PT Cibaliung Sumber Daya Mineral (2011) 4. Komisaris Independen PT Antam Tbk (2009) 1. Commissioner of PT Bukit Asam Tbk (2020-2023) 2. Independent Commissioner of PT Vale Indonesia Tbk (2018) 3. Underground Mining Advisor ofPT Cibaliung Sumber Daya Mineral (2011) 4. Independent Commissioner of PT Antam Tbk (2009)
Jabatan Lainnya Other Position	Staf Khusus Menteri Energi Sumber Daya Mineral (2020 - 2024) Special Staff to the Minister of Energy and Mineral Resources (2020 - 2024)
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Terbuka Lain Information on Concurrent Positions	Komisaris Independen PT Baramulti Suksessarana Tbk Independent Commissioner PT Baramulti Suksessarana Tbk
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	1. Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 tanggal 10 Juni 2020, pengangkatan sebagai Komisaris 2. Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 15 Juni 2023, alih tugas sebagai Komisaris Utama 1. 2019 Annual General Meeting of Shareholders Resolution on June 10, 2020 as Commissioner 2. 2022 Annual General Meeting of Shareholders Resolution on June 15, 2023 as President Commissioner
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi ataupun pemegang saham pengendali Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk
Periode Jabatan Term of Office	10 Juni 2020 – Sekarang June 10, 2020 – Present



Marsda TNI (Purn) Andi Pahril Pawi, S.Sos

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Usia Age	62 tahun 62 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	1. Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) (2008) 2. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) (1998) 3. Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (Sekkau) (1993) 4. Akademi Angkatan Udara (1985) 1. Army Forces Staff and Command School (2008) 2. Air Forces Staff and Command School (1998) 3. Air Force Unit Command School (1993) 4. Indonesian Air Force Academy (1985)
Serifikasi Certification	*Certified GRC for Executive* dari LSP Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan Certified GRC for Executive from LSP Governace Risk and Complience
Riwayat Pekerjaan Work Experiencee	1. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan BIN (2017-2020) 2. Kepala Biro Pengamanan Sekretariat Militer Presiden (2014-2017) 3. Kepala Biro Personel TNI dan Polri Sekretariat Militer Presiden (2012-2014) 1. Expert Staff for Defense and Security of BIN (2017-2020) 2. Head of Security Bureau of the Presidential Military Secretariat (2014-2017) 3. Head of the Indonesian Armed Forces and Police Personnel Bureau, Presidential Military Secretariat (2012-2014)
Jabatan Lainnya Other Position	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan Does not hold any concurrent positions both inside/outside the Company
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Terbuka Lain Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan terbuka lainnya Does not hold any concurrent positions in other companies
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 tanggal 10 Juni 2020 2019 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 10, 2020
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi ataupun pemegang saham pengendali Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk
Periode Jabatan Term of Office	10 Juni 2020 – Sekarang June 10, 2020 - Present



Ir. E. Piterdono HZ, S.E., M.M.

Komisaris
Commissioner

Usia Agew	65 tahun 65 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Bandar Lampung, Sumatra
Riwayat Pendidikan Education Background	1. S2, Magister Manajemen di Universitas Bandar Lampung (2001) 2. S1, Ekonomi Manajemen di Universitas Saburai Lampung (2001) 3. S1, Teknik Geologi di UPN Veteran Yogyakarta (1986) 1. Master of Management at the University of Bandar Lampung (2001) 2. Bachelor of Economy Management at the Saburai University Lampung (2001) 3. Bachelor of Geological Engineering at UPN Veteran Yogyakarta (1986)
Serifikasi Certification	*Certified GRC for Executive* dari LSP Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan Certified GRC for Executive from LSP Governace Risk and Complience
Riwayat Pekerjaan Work Experiencee	1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (2017-2020) 2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung (2014) 3. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung (2013) 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung (2012) 1. Head of Lampung Province Regional Revenue Agency (2017-2020) 2. Head of Lampung Province Mining and Energy Service (2014) 3. Head of Lampung Province Environmental Management Agency (2013) 4. Head of of Lampung Province Manpower and Transmigration Service (2012)
Jabatan Lainnya Other Position	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan Does not hold any concurrent positions both inside/outside the Company
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Terbuka Lain Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan terbuka lainnya Does not hold any concurrent positions in other companies
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 tanggal 10 Juni 2020 2019 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 10, 2020
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi ataupun pemegang saham pengendali Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk
Periode Jabatan Term of Office	10 Juni 2020 – Sekarang June 10, 2020 – Present



Irjen. Pol. (Purn) Drs. Carlo Brix Tewu

Komisaris
Commissioner

Usia Age	62 tahun 62 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	1. Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi Polri (2008) 2. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (2005) 3. Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (1998) 4. Akademi Kepolisian (1994) 1. Police Staff and High-Level Leadership School of National Police of the Republic of Indonesia (2008) 2. National Defense Institute of the Republic of Indonesia (2005) 3. Police Staff and Leadership School (1998) 4. Police Academy (1994)
Serifikasi Certification	*Certified GRC for Executive* dari LSP Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan Certified GRC for Executive from LSP Governace Risk and Complience
Riwayat Pekerjaan Work Experiencee	1. Tenaga Ahli Menteri BUMN Bidang Mediasi (2023-2024) 2. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN (2022-2023) 3. Deputi Bidang Koordinasi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (2016) 4. Pjs. Gubernur Sulawesi Barat (2016) 5. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri (2015) 1. Expert Staff of the Minister of SOEs in the Field of Mediation (2023-2024) 2. Deputy for Law and Legislation, Ministry of SOEs (2020-Present) 3. Deputy for Coordination of Security and Public Order at the Coordinating Ministry for Politics, Legal, and Security Affairs (2016) 4. West Sulawesi Acting Governor (2016) 5. Criminal Acts Director for Criminal Investigation of National Police of the Republic of Indonesia (2015)
Jabatan Lainnya Other Position	1. Tenaga Ahli Menteri BUMN Bidang Mediasi (2023-2024) 2. Anggota Dewan Pengawas Yayasan BUMN 3. Anggota Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia 1. Expert Staff of the Minister of State-Owned Enterprises for Mediation (2023-2024) 2. Member of the Supervisory Board of the State-Owned Enterprises Foundation 3. Member of the Bakti Sepak Bola Indonesia Foundation
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Terbuka Lain Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan terbuka lainnya Does not hold any concurrent positions in other companies
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 tanggal 10 Juni 2020 2019 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 10, 2020
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi ataupun pemegang saham pengendali Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk
Periode Jabatan Term of Office	10 Juni 2020 – Sekarang June 10, 2020 – Present



Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Usia Agew	63 tahun 63 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	1. S3, University of Washington School of Law pada tahun 2007 2. S2, University of Washington School of Law pada tahun 1998 3. S1, Hukum, Universitas Indonesia tahun 1987 1. Doctoral Degree from the University of Washington School of Law (2007) 2. Master Degree from the Washington School of Law (1998) 3. Bachelor of Law, University of Indonesia (1987)
Serifikasi Certification	*Certified GRC for Executive* dari LSP Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan Certified GRC for Executive from LSP Governace Risk and Complience
Riwayat Pekerjaan Work Experiencee	1. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI (2018-2020) 2. Kepala Pusat Hukum dan Humas Kementerian ATR/BPN (2016-2018) 1. Chairman of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) (2018-2020) 2. Head of Legal and Public Relations Center at the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (2016-2018)
Jabatan Lainnya Other Position	Profesor pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Professor at the Faculty of Law at University of Indonesia
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Terbuka Lain Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan terbuka lainnya Does not hold any concurrent positions in other companies
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 15 Juni 2023 2022 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 15, 2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi ataupun pemegang saham pengendali Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk
Periode Jabatan Term of Office	15 Juni 2023 – Sekarang June 15, 2023 – Present



Can Dr. Rahmat Hidayat Pulungan, S.E., M.Pd.

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Usia Age	46 tahun 46 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	1. S3, Universitas Negeri Jakarta (2020) 2. S2, Universitas Negeri Jakarta (2016) 3. S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute (2012) 4. S1, Fakultas Syariah IAIN Jakarta (2001) 1. Doctoral Degree at Jakarta State University (2020) 2. Master Degree at Jakarta State University (2016) 3. Bachelor Degree in Faculty of Economics and Business at Perbanas Institute (2012) 4. Bachelor Degree at Sharia Faculty of Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta (2001)
Serifikasi Certification	*Certified GRC for Executive* dari LSP Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan Certified GRC for Executive, from LSP Governace Risk and Complience
Riwayat Pekerjaan Work Experiencee	1. Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk (2021-2023) 2. Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017-2021) 3. Komisaris Utama PT Niaga Prima Jaya (2015-2019) 4. Komisaris PT Rekayasa Industri (2016-2017) 5. Komisaris PT Cipta Media Permasindo (2014-2017) 6. Komisaris PT Berdikari (Persero) (2013-2015) 7. Komisaris PT Niaga Permasindo (2011-2014) 1. Independent Commissioner at PT Kimia Farma Tbk (2021-2023) 2. Independent Commissioner at PT KAI (2017-2021) 3. President Commissioner at PT Niaga Prima Jaya (2015-2019) 4. Commissioner at PT Rekayasa Industri (2016-2017) 5. Commissioner at PT Cipta Media Permasindo (2014-2017) 6. Commissioner at PT Berdikari (Persero) (2013-2015) 7. Commissioner at PT Niaga Permasindo (2011-2014)
Jabatan Lainnya Other Position	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan Does not hold any concurrent positions both inside/outside the Company
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Terbuka Lain Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan terbuka lainnya Does not hold any concurrent positions in other companies
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 15 Juni 2023 2022 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 15, 2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi ataupun pemegang saham pengendali Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk
Periode Jabatan Term of Office	15 Juni 2023 – Sekarang June 15, 2023 – Present

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Setelah Tahun Buku Berakhir

Changes in the Composition of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners after the Fiscal Year Ended

Sampai dengan 31 Desember 2024, tidak ada perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Namun, sesuai dengan Keputusan RUPS PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BBRI") Tahun Buku 2024 tertanggal 24 Maret 2025, mengangkat Farida Thamrin (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTBA) sebagai Direktur Treasury dan International Banking BBRI. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PTBA dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa anggota Direksi PTBA dilarang untuk merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMN. Dengan demikian, terhitung sejak penutupan RUPST BBRI Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2025, Farida Thamrin tidak menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTBA. Dengan demikian, maka susunan Direksi PTBA setelah 24 Maret 2025 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Arsal Ismail
Direktur Operasi dan Produksi	: Suhedi
Direktur Pengembangan Usaha	: Rafli Yandra
Direktur Sumber Daya Manusia	: Suherman

As of December 31, 2024 there were no changes to the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners. Meanwhile, pursuant to resolution of AGMS PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BBRI") for Financial Year of 2024 dated March 24, 2025, that appointment of Farida Thamrin (Director of Finance and Risk Management of the PTBA) as Director of Treasury and International Banking BBRI. Based on the Company's Articles of Association and Minister of SOE's Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on State-Owned Enterprise Organisation and Human Resources states that a member of Board of Director of the Company is prohibited to have the concurrent position. Therefore, effective from the cosing of BBRI's AGMS for the 2024 Fiscal Year held on March 24th, 2025, Farida Thamrin on longer serves as Director of Finance and Risk Management of the PTBA. Thus, the composition of Board of Directors PTBA after March 24, 2025 as follows:

President Director	: Arsal Ismail
Director of Operations and Production	: Suhedi
Director of Business Development	: Rafli Yandra
Director of Human Resources	: Suherman



Profil Pejabat Eksekutif
Executive Management Profile



Satria Wirawan
Tanjung Enim Mining Site General Manager

Usia Age	45 Tahun 45 years old
Domisili Domicile	Tanjung Enim, Muara Enim
Riwayat Pendidikan Education Background	Teknik Elektro dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006 Electrical Engineering from Gadjah Mada University in 2006
Riwayat Pekerjaan Position History	1. Tanjung Enim Mining Site General Manager (2024-sekarang) 2. VP Pengadaan (2023-2024) 3. VP Teknologi Informasi (2019-2023) 1. Tanjung Enim Mining Site General Manager (2024-present) 2. VP of Procurement (2023-2024) 3. VP of Information Technology (2019-2023)
Tahun Bergabung Join Date	2009



Hengki Burmana
Tarahan Port General Manager

Usia Age	54 Tahun 54 years old
Domisili Domicile	Bandar Lampung, Lampung
Riwayat Pendidikan Education Background	D3 dari Universitas Negeri Padang pada tahun 2008 Diploma from Padang State University (2008)
Riwayat Pekerjaan Position History	1. Tarahan Port General Manager (2023-sekarang) 2. General Manajer Unit Dermaga Kertapati (2021-2023) 3. Manajer Penambangan Banko Barat (2020-2021) 1. Tarahan Port General Manager (2023-present) 2. General Manager of Kertapati Barging Port (2021-2023) 3. Banko Barat Mining Manager (2020-2021)
Tahun Bergabung Join Date	1999



Ichsan Aprideni
Kertapati Port General Manager

Usia Age	41 Tahun 41 years old
Domisili Domicile	Tanjung Enim, Muara Enim
Riwayat Pendidikan Education Background	1. S2, Universitas Sriwijaya tahun 2019 2. S1, Universitas Sriwijaya tahun 2007 1. Master Degree from Sriwijaya University (2019) 2. Bachelor Degree from Sriwijaya University (2017)
Riwayat Pekerjaan Position History	1. Kertapati Port General Manager (2023-sekarang) 2. Vice President Pengembangan Aset dan Infrastruktur Sipil Penunjang (2021-2023) 1. Kertapati Port General Manager (2023-Present) 2. Vice President for Asset Development and Supporting Civil Infrastructure (2021 – 2023)
Tahun Bergabung Join Date	2009



Septyo Cholidie
Planning Division Head

Usia Age	44 Tahun 44 years old
Domisili Domicile	Tanjung Enim, Muara Enim
Riwayat Pendidikan Education Background	1. S2, Universitas Airlangga pada tahun 2020 2. S1, Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005 1. Master Degree from Airlangga University (2020) 2. Bachelor Degree from Gadjah Mada University (2005)
Riwayat Pekerjaan Position History	1. Planning Division Head (2022-sekarang) 2. Senior Manajer Perencanaan (2020-2022) 3. Senior Manajer Penanganan dan Angkutan Batu Bara (2020) 1. Planning Division Head (2022-Present) 2. Senior Manager for Planning (2020-2022) 3. Senior Manager of Coal Handling and Transportation (2020)
Tahun Bergabung Join Date	2009



Gifnil Imran
Acting Commercial Division Head

Usia Age	52 Tahun 52 years old
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	S1, Universitas Andalas pada tahun (2011) Bachelor Degree from Andalas University (2011)
Riwayat Pekerjaan Position History	1. Acting Commercial Division Head (2025-sekarang) 2. Vice President Pemasaran (2022-2025) 3. Analis Pasar Madya (2021-2022) 1. Acting Commercial Division Head (2025-present) 2. Vice President Marketing (2022-2025) 3. Intermediate Market Analyst (2021-2022)
Tahun Bergabung Join Date	1992



Setiadi Wicaksono
Project Management Office Division Head

Usia Age	39 Tahun 39 years old
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	1. S2- MSc University of Glasgow 2018 2. S2- MBA Institut Teknlogi Bandung 2016 3. S1- Institut Teknologi Bandung 2003 1. Master Degree from University of Glasgow (2018) 2. Business Master Degree from Bandung Institute of Technology (2016) 3. Bachelor Degree from Bandung Institute of Technology (2003)
Riwayat Pekerjaan Position History	1. Project Management Office Division Head (2023-sekarang) 2. Vice President Project Pengembangan Hilirisasi (2022-2023) 3. Senior Manajer Strategi dan Pengembangan Korporat (2021-2022) 1. Project Management Office Division Head (PMO) (2023-present) 2. Vice President Project of Downstreaming Development (2022-2023) 3. Senior Manager of Corporate Strategy and Development (2021-2022)
Tahun Bergabung Join Date	2009

Sumber Daya Manusia
Human Capital



Pada ajang TOP *Human Capital Awards* 2024, PTBA berhasil meraih dua penghargaan, yaitu TOP Human Capital Awards 2024 # Star 5 dan T*he Most Committed Top Leader on Human Capital* 2024 atas nama Suherman, Direktur Sumber Daya Manusia PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

At the 2024 TOP Human Capital Awards, PTBA won two awards, namely the TOP Human Capital Awards 2024 # Star 5 and The Most Committed Top Leader on Human Capital 2024 for Suherman, Human Resources Director of PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Keberhasilan PTBA tersebut tak lepas dari komitmen Perusahaan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia. PTBA menyadari, industri pertambangan dan energi saat ini tidak luput dari arus perubahan zaman dan teknologi yang super cepat. Oleh karena itu, salah satu cara Perusahaan untuk menghadapi perubahan tersebut adalah melalui pengembangan SDM agar bisa terus adaptif dan inovatif.

PTBA's success cannot be separated from the Company's commitment to managing Human Resources. PTBA realizes that the mining and energy industry is currently inseparable from the fast-paced changes in the era and technology. Therefore, the Company should develop the HC development to be adaptive and innovative towards the changes.

Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (*Human Capital Management System*/HCMS) merupakan salah satu kunci keberhasilan PTBA dalam mengelola SDM. Perusahaan melaksanakan HCMS secara tepat dan terstruktur untuk mempersiapkan SDM yang kompeten dan inovatif dalam rangka menjawab tantangan perusahaan saat ini dan ke depan. Dengan SDM yang mumpuni, PTBA dapat senantiasa menghadirkan energi tanpa henti untuk negeri.

Human Resource Management System

The Human Capital Management System (HCMS) is one of the keys to PTBA's success in managing HR. The Company implements HCMS appropriately in a structured manner to prepare competent and innovative HC in order to answer the company's current and future challenges. With qualified HC, PTBA can always provide non-stop energy for the country.

PTBA telah melaksanakan HCMS dan *Human Capital Initiatives* demi mendukung pertumbuhan bisnis yang

PTBA has implemented HCMS and Human Capital Initiatives to support sustainable business growth. There

berkelanjutan. Terdapat tiga program utama HCMS atau HC Initiatives yang dijalankan Perusahaan, yaitu Bukit Asam *Leadership Acceleration and Development Program* (BLADE), Tugas Belajar dan *Career Development Journey*.

BLADE merupakan Program *Leadership Development* yang berfokus pada tiga kompetensi kunci untuk future leaders, antara lain *Leadership Skill, Interpersonal Skill* dan *Business & Management Skill*. Dalam salah satu tahapan journey BLADE, terdapat kegiatan Immersion Program yang terdiri dari *Business Insight Initiatives/ Industry Benchmark* dari *Multinational Company* dan *Business Lecture* dari universitas di negara tujuan.

Sementara Tugas Belajar merupakan program untuk mengikuti tugas belajar baik di jenjang pendidikan D3, dan S2 di Top 100 Universitas Dunia. Selain itu Perusahaan juga memfasilitasi pegawai untuk menempuh Pendidikan S2 secara mandiri, salah satunya dengan menjalin program kerja sama dengan SBM ITB. Program Tugas Belajar ditujukan untuk menunjang pencapaian visi PTBA menjadi menjadi perusahaan energi kelas dunia, dan sebagai wujud nyata implementasi budaya Kompeten pada *Core Value* AKHLAK.

Sedangkan *Career Development Journey* merupakan program yang dirancang untuk memastikan pengelolaan Human Capital yang terintegrasi dengan bisnis Perusahaan, PTBA melaksanakan penyelarasan dan pembaruan kompetensi sebagai fondasi utama dalam *Competency Based Human Capital* dengan peninjauan dan pembaruan Kamus Kompetensi, *Development Matrix, Career Path, dan Assessment Guidelines*.

Program Strategis Pengelolaan SDM Tahun 2024

SDM merupakan salah satu *enabler* dalam mendukung transformasi Perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan, sehingga SDM menjadi aspek yang harus diperhatikan agar dapat dipastikan kesiapannya untuk menjawab setiap tahapan perkembangan bisnis Perusahaan. Perusahaan perlu memastikan SDM dapat menguasai teknologi, *skill-set* dan *mindset* yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mengoperasikan bisnis terkait. Bukit Asam telah menyusun kebijakan strategi pengelolaan SDM sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Pengelolaan SDM 2023-2027 dengan sasaran yaitu:

1. Peremajaan *workforce* dengan memperhatikan persentase gender perempuan dan millenial dalam *nominated talent;*
2. Pengembangan talenta dengan optimalisasi program *Talent Mobility* yang diinisiasi oleh MIND ID untuk kepemimpinan PTBA yang berkelanjutan;

are three main HCMS or HC Initiatives programs run by the Company, namely the Bukit Asam Leadership Acceleration and Development Program (BLADE), Study Assignments, and Career Development Journey.

BLADE is a Leadership Development Program focusing on three key competencies for future leaders, namely Leadership Skills, Interpersonal Skills, and Business & Management Skills. In one of the stages of the BLADE journey, there are Immersion Program activities consisting of Business Insight Initiatives/Industry Benchmark from Multinational Companies and Business Lectures from universities in the destination country.

Meanwhile, Study Assignments are programs for employees to take study assignments at both Diploma and Master levels at the Top 100 World Universities. In addition, the Company also facilitates employees to take Master education independently, one of which is by establishing a cooperation program with SBM ITB. The Study Assignment Program is intended to support the achievement of PTBA's vision to become a world-class energy company, and as a real manifestation of the implementation of the Competent culture in the AKHLAK Core Value.

Meanwhile, Career Development Journey is a program designed to ensure Human Capital management integrated with the Company's business, PTBA carries out competency alignment and renewal as the main foundation in Competency Based Human Capital by reviewing and updating the Competency Dictionary, Development Matrix, Career Path, and Assessment Guidelines.

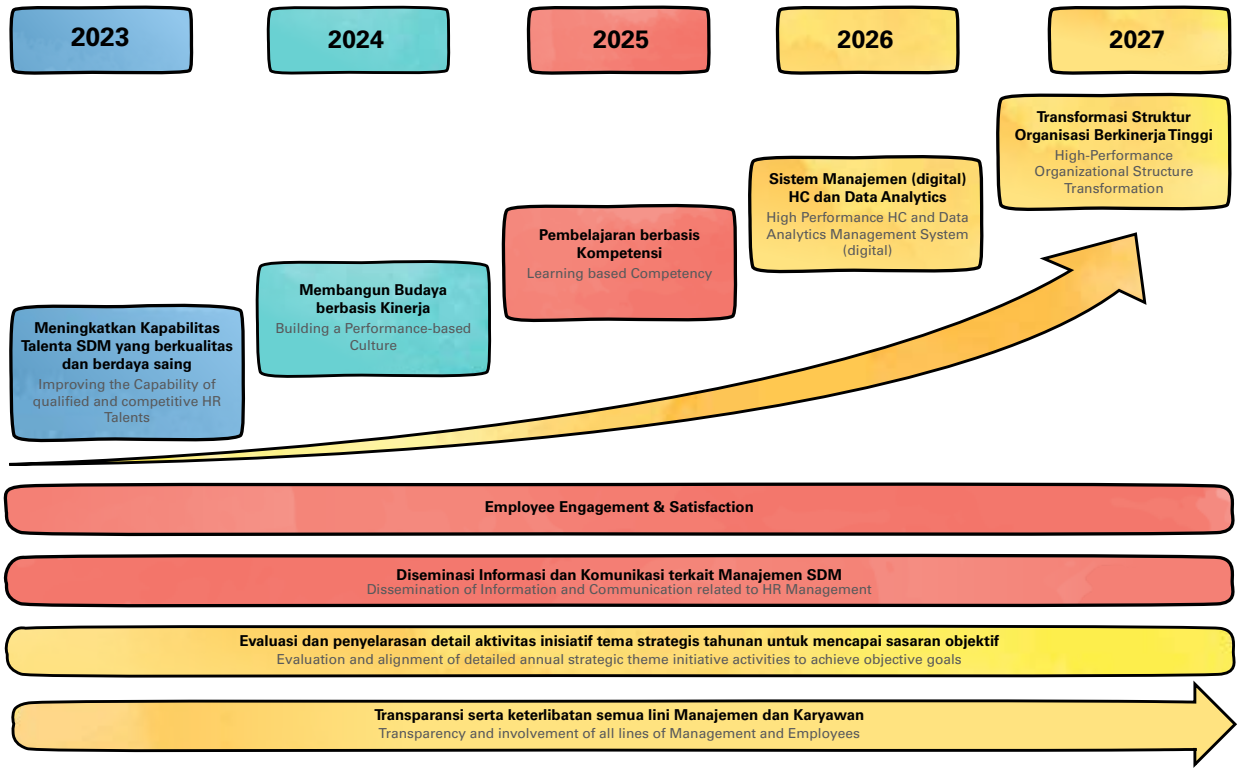
Strategic HC Management Program in 2024

HC is one of the enablers in supporting the Company's transformation in facing future business challenges. Therefore, HC's radiness must be ensured to answer every stage of the Company's business development. The company needs to ensure that HC can master the technology, skill-set, and mindset needed to develop and operate the related business. Bukit Asam has formulated a strategic HC management policy as stated in the 2023-2027 HC Management Strategic Plan with the following targets:

1. Workforce rejuvenation by considering the percentage of female and millennial gender in nominated talent;
2. Talent development by optimizing the Talent Mobility program initiated by MIND ID for sustainable PTBA leadership;

3. Pengembangan kapabilitas dan kompetensi pegawai melalui mekanisme strategis *Learning Organization Culture;*
4. Meningkatkan Kapabilitas Talenta SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
5. Membangun Budaya berbasis Kinerja;
6. Sistem manajemen (digital) HC dan *Workforce Planning* berbasis *Data Driven;*
7. Transformasi Struktur Organisasi Berkinerja Tinggi.

3. Development of employee capabilities and competencies through the strategic mechanism of Learning Organization Culture;
4. Increasing the Capability of Quality and Competitive HR Talents;
5. Building a Performance-Based Culture;
6. HC (digital) management system and Data Driven Workforce Planning;
7. Transformation of High-Performance Organizational Structure.



Tema Strategis Fungsi SDM PTBA 2023-2027 di atas disusun berdasarkan kebutuhan dan tantangan bisnis yang dianalisis melalui berbagai sumber seperti hasil wawancara *stakeholders*, survey HC, tren SDM dan *benchmarking*. Masing-masing tema strategis diturunkan menjadi inisiatif strategis serta aktivitas kunci pendukung implementasi Rencana Strategis Pengelolaan SDM.

Atas sasaran dan tema strategis tersebut di atas, terdapat beberapa inisiatif dan program yang telah dilaksanakan di tahun 2024 antara lain:

1. Penyusunan *Career Development Journey* dengan lingkup pekerjaan antara lain finalisasi kamu kompetensi, penyusunan *career journey* dan *career path* serta *development matrix;*
2. Penyelarasan Kebijakan SDM sesuai dengan MIND ID khususnya terkait dengan implementasi sistem Grading dan *Performance Based Culture;*
3. Pelaksanaan Rekrutmen *Fresh Graduate* dan *Professional Hire;*

The Strategic Themes of PTBA HR Function 2023-2027 above are compiled based on business needs and challenges analyzed through various sources such as stakeholder interview results, HC surveys, HC trends, and benchmarking. Each strategy is broken down into strategic initiatives and key activities supporting the implementation of the HC Management Strategic Plan.

Based on the strategic targets and themes above, there are several initiatives and programs implemented in 2024, namely:

1. Preparation of Career Development Journey with a scope of work including finalization of competency, preparation of career journey and career path and development matrix;
2. Alignment of HC Policy in accordance with MIND ID especially related to the implementation of the Grading system and Performance Based Culture;
3. Implementation of Fresh Graduate Recruitment and Professional Hire;

4. Pelaksanaan *Talent Mobility* MIND ID dan PTBA Group;
5. Program pengembangan Pegawai:
   a. Tugas Belajar S2 Luar Negeri;
   b. *Core Skill;*
   c. *Leadership Skill;*
   d. *Personal Attributes Skill;*
   e. *Technical Skill;*
   f. Sertifikasi.

Membangun Sumber Daya Andal yang Berkompetensi

Memiliki SDM yang handal merupakan tujuan utama PTBA. Keberadaan SDM yang handal diyakini dapat membantu Perusahaan untuk mewujudkan visi dan misinya serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Karena itu, PTBA telah merancang program pendidikan dan pengembangan pegawai yang komprehensif. Program tersebut tidak hanya berfokus pada kemampuan dan kompetensi pegawai, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lain seperti pemenuhan terhadap sistem manajemen, kebijakan, strategi, dan peraturan.

Program pendidikan dan pengembangan pegawai yang dikembangkan Perusahaan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Perusahaan juga memberikan kesempatan yang sama kepada semua pegawai, tanpa memandang jenis kelamin, ras, atau agama, untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi. Perusahaan juga mengembangkan kompetensi pegawai berdasarkan *development framework* yang meliputi:

1. *Core Skill*
   Pembekalan program Pengembangan untuk meningkatkan kemampuan, sikap, dan atribut yang menunjang efektifitas kerja dan wajib dimiliki pegawai untuk mendukung Visi, Misi, dan nilai-nilai Perusahaan yang meliputi QHSE *Executive*, QHSE *Integrated System Management Application,* Pra-POP, HSE *Basic*, HSE *Advanced*, *Coaching* Culture, dan penyelesaian Modul AKHLAK.
2. *Leadership Skill*
   a. Bukit Asam *Leadership Acceleration & Development Program* (BLADE)
      Program Pelatihan yang bertujuan untuk mempersiapkan dan membekali pegawai pada kemampuan dan karakteristik kepemimpinan yang sesuai dengan *kompetensi leadership* 1 tingkat di atas jabatan saat ini untuk menghadapi tantangan perusahaan kedepan, serta pengembangan karir pegawai.

4. Implementation of Talent Mobility MIND ID and PTBA Group;
5. Employee development programs:
   a. Overseas Masters Study Assignment;
   b. Core Skill;
   c. Leadership Skill;
   d. Personal Attributes Skill;
   e. Technical Skill;
   f. Certification.

Building Competent and Reliable Human Resources

Having reliable human resources is the main objective of PTBA. Reliable human resources is believed to be able to help the Company realize its vision and mission and contribute to national development. Therefore, PTBA has designed a comprehensive employee education and development program. The program does not only focus on employee capabilities and competencies, but also pays attention to other aspects such as compliance with management systems, policies, strategies, and regulations.

The employee education and development program developed by the Company has been adjusted to the Company's Work Plan and Budget (CWPB) and the Company's Long-Term Plan (CLTP).

The Company also provides equal opportunities to all employees, regardless of gender, race, or religion, to participate in training and competency development programs. The Company also develops employee competencies based on a development framework that includes:

1. Core Skill
   Provision of Development program to improve the ability, attitude, and attributes that support work effectiveness and must be possessed by employees to support the Company's Vision, Mission, and values which include QHSE Executive, QHSE Integrated System Management Application, Pra-POP, HSE Basic, HSE Advanced, Coaching Culture, and completion of the AKHLAK Module.
2. Leadership Skill
   a. Bukit Asam Leadership Acceleration & Development Program (BLADE)
      training program aimed to prepare and equip employees with leadership skills and characteristics in accordance with leadership competencies 1 level above their current position to face future company challenges, as well as employee career development.

b. *Regular Leadership Development Program* (RLDP)
Program Pelatihan yang bertujuan untuk mempersiapkan dan membekali pegawai agar dapat mengembangkan kompetensi kepemimpinan pada level jabatannya saat ini.

3. *Personal Attributes Skill*
Program Pelatihan yang dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, pembentukan karakter, serta meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antar pegawai PT Bukit Asam Tbk yang sesuai dengan *core value* BUMN.
4. *Technical Skill*
Program Pengembangan sebagai pembekalan kemampuan teknis umum maupun *critical* untuk meningkatkan kemampuan dan perilaku kunci yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan strategis perusahaan atau menghadapi tantangan utama perusahaan serta mendukung pencapaian kinerja atau target perusahaan, serta pengembangan kemampuan teknis spesifik untuk pembekalan Kompetensi yang dibutuhkan seseorang untuk melaksanakan pekerjaannya.
5. Sertifikasi
Sebagai upaya *compliance* terhadap regulasi dan penjaminan akan kredibilitas kerja yang dibutuhkan untuk mendapatkan pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi pada bidang tertentu, PTBA juga melaksanakan sertifikasi *mandatory* maupun sertifikasi kompetensi bagi pegawai yang memenuhi persyaratan.

Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tahun 2024

PTBA memiliki rencana pelatihan tahunan yang disusun berdasarkan IDP dan penyelarasan KPI Pemenuhan *Mandatory Training* dan Pemenuhan organ Pengelolaan risiko, yang disusun berdasarkan kebutuhan *mandatory* perusahaan, gap kompetensi, dan hasil penilaian pegawai.

Sepanjang tahun 2024, perusahaan telah menyelenggarakan sebanyak 430 Judul Pelatihan dan Pengembangan dengan rincian sebagai berikut:

b. Regular Leadership Development Program (RLDP)
A training program aimed to prepare and equip employees to develop leadership competencies at their current position level.

3. Personal Attributes Skill
A training program designed as an effort to increase productivity, character building, and improve cooperation and collaboration between PT Bukit Asam Tbk employees that are in line with SOEs core values.
4. Technical Skill
Development Program as a provision of general and critical technical skills to improve key skills and behaviors that are important to meet the company's strategic needs or face the company's main challenges and support the achievement of company performance or targets, as well as the development of specific technical skills for the provision of Competencies needed by employees to carry out their work.

5. Certification
As an effort to comply with regulations and guarantee the credibility of work needed to gain recognition and/or improve competence in certain fields, PTBA also carries out mandatory certification and competency certification for employees who meet the requirements.

Implementation of Employee Education and Training Programs in 2024

PTBA has an annual training plan prepared based on the IDP and alignment of the KPI for Fulfillment of Mandatory Training and Fulfillment of Risk Management organs, which is prepared based on the company's mandatory needs, competency gaps, and employee assessment results.

Throughout 2024, the company has held 430 Training and Development with the following details:

Pelatihan Traning	Jan Jan	Feb Feb	Mar Mar	Apr Apr	Mei May	Jun Jun	Jul Jul	Agt Agt	Sep Sep	Okt Oct	Nov Nov	Des Dec	Total
Jumlah Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan Number of Training and Development Programs	26	37	32	15	30	34	51	35	44	50	30	46	430

Adapun realisasi pemenuhan *Mandatory Training* dan Organ Pengelolaan Risiko di PT Bukit Asam Tbk sepanjang tahun 2024 sebagai berikut:

The realization of the fulfillment of Mandatory Training and Risk Management Organs at PT Bukit Asam Tbk throughout 2024 is as follows:

Pelatihan Traning	Jan Jan	Feb Feb	Mar Mar	Apr Apr	Mei May	Jun Jun	Jul Jul	Agt Agt	Sep Sep	Okt Oct	Nov Nov	Des Dec	Jumlah Peserta Total Attendee
Mandatory Training	-	42	135	26	146	184	37	118	1.222	350	-	-	2.260
Organ pengelolaan risiko Risk management organ	1	102	122	68	17	307	351	307	40	251	322	184	2.072

Selain itu, Perusahaan juga memiliki program beasiswa bagi pegawai dengan memberikan fasilitas dan kesempatan bagi para pegawai yang berminat dan dinyatakan lolos hasil seleksi untuk melanjutkan pendidikan dengan program studi sesuai kebutuhan Perusahaan.

In addition, the Company also held a scholarship program for employees by providing facilities and opportunities for employees passing the selection results to continue their education with study programs according to the Company's needs.

Pada tahun 2024, Perusahaan telah mengirimkan pegawai untuk melaksanakan program tugas belajar magister ke beberapa universitas terkemuka di luar negeri, di antaranya:

In 2024, the Company has sent employees to carry out master's study assignment programs to several leading universities abroad, including:

No.	Universitas University	Jurusan Pendidikan Department of Education	Waktu Pendidikan Study Period	Jumlah Peserta Total Participant
1	University of Michigan	MS Sustainable Systems	2 Tahun | Years	1 Orang | Person
2	University of Manchester	MSc Operation, Project and Supply Chain Management	1 Tahun | Years	1 Orang | Person
3	University of Manchester	MSc Operation, Project and Supply Chain Management	1 Tahun | Years	1 Orang | Person
4	Imperial College London	MSc Cleantech Innovation	1 Tahun | Years	1 Orang | Person

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan telah menyelenggarakan Uji Kompetensi (*Assessment*) Non-Teknis kepada pegawai sebanyak 363 orang dan Uji Kompetensi (*Assessment*) Teknis sebanyak 105 orang. Data tersebut digunakan sebagai salah satu pedoman dalam mengidentifikasi gap kompetensi pegawai. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Throughout 2024, the Company has conducted Non-Technical Competency Tests (Assessments) for 363 employees and Technical Competency Tests (Assessments) for 105 employees. The data is used as one of the guidelines in identifying employee competency gaps. The details are as follows:

Program	Objective	Jumlah Peserta Participants
Uji Kompetensi Non-Teknis Non-Technical Competency Test	Pelaksanaan uji kompetensi non teknis pegawai sesuai dengan hasil *asesmen expired* dan pengambilan data baru Implementation of non-technical employee competency tests in accordance with expired assessment results and new data collection	363
Uji Kompetensi Teknis Technical Competency Test	Pelaksanaan uji kompetensi teknis pegawai sesuai dengan kebutuhan perusahaan Implementation of employee technical competency tests according to company needs	105

Program pendidikan atau pelatihan yang telah dilaksanakan PTBA di sepanjang tahun 2024 telah mencakupi beberapa jenis pengembangan kompetensi, diantaranya:

The education or training programs implemented by PTBA throughout 2024 have covered several types of competency development, including:

Program	Sub-Program	Objective	Jumlah Peserta Participants
Tugas Belajar Study Assignment		Mempersiapkan pegawai agar memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menunjang peningkatan kinerja perusahaan yang sejalan dengan rencana jangka panjang Perusahaan Preparing employees to have the knowledge and skills to support improving company performance in line with the Company's long-term plans.	4
Leadership		Meningkatkan kompetensi kepemimpinan pegawai Increasing employees' leadership competence	161
Personal Attribute		Meningkatkan produktivitas, pembentukan karakter, serta kerja sama dan kolaborasi antar pegawai yang inline dengan core value BUMN Increasing productivity, character building, as well as cooperation and collaboration between employees that are in line with SOEs core values.	148
Sertifikasi Certification		Memenuhi persyaratan regulasi Fulfilling regulatory requirements	543
PROPER		Mempersiapkan tim evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup Preparing a performance evaluation team for those responsible for business and/or activities in the field of environmental management	26
Pra Pensiun Pre-Retirement		Pembekalan bagi pegawai yang mencapai masa pensiun untuk pengelolaan keuangan, usaha, dll Preparation for employees who reach retirement age for financial management, business, etc.	52
Core	Sistem Manajemen Management System	Pembekalan bagi pegawai terkait Sistem Manajemen yang berlaku di Bukit Asam Provision for employees regarding the Management System applicable at Bukit Asam	280
	HSE	Meningkatkan pemahaman dan awareness pegawai terkait kesehatan dan keselamatan kerja Improve employee understanding and awareness regarding occupational health and safety	1.268
	Culture	Internalisasi budaya AKHLAK dan AKSI sebagai values dari Bukit Asam Internalization of the culture of AKHLAK and AKSI as the values of Bukit Asam	111
Technical	*Finance for Non Finance*	Pelatihan yang dirancang khusus untuk pegawai non-keuangan dan non-akuntansi yang ingin memahami konsep dasar keuangan dan menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan strategis Training specifically designed for non-finance and non-accounting employees who want to understand basic financial concepts and use financial information for strategic decision making.	71
	Essential of HCM	Pelatihan yang didesain untuk memberikan pemahaman pegawai yang berlatar belakang HC dan non HC agar memiliki keterampilan dan pemahaman terkait kompenen fundamental HC, untuk selanjutnya dapat meningkatkan Pengelolaan SDM yang efektif dan efisien pada Satuan kerja masing-masing Training designed to provide understanding to employees with HC and non-HC backgrounds to have skills and understanding related to fundamental HC components and help them improve effective and efficient HR Management in their respective work units.	104
	English Proficiency	Meningkatkan kemampuan bahasa asing khususnya bahasa inggris Pegawai Improve foreign language skills, especially English, of employees	210
	Risk Management	Memberikan pemahaman tentang konsep, metode, dan praktik dalam mengelola Risiko di Lingkungan perusahaan Provides an understanding of the concepts, methods, and practices in managing risk in the corporate environment.	229
	Business Communication	Meningkatkan kemampuan komunikasi yang persuasive dan terstruktur, selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan bernegosiasi dengan stakeholder Improve persuasive and structured communication skills, as well as improve negotiation skills with stakeholders.	50

Program	Sub-Program	Objective	Jumlah Peserta Participants
	Business Acumen	Meningkatkan pemahaman bisnis, keterampilan analitis, pemikiran strategis, dan pengambilan keputusan peserta untuk mendukung pertumbuhan perusahaan melalui solusi terintegrasi dan kolaborasi lintas fungsi Improving participants' business understanding, analytical skills, strategic thinking and decision-making to support corporate growth through integrated solutions and cross-functional collaboration.	41
	Learning Acceleration Program for Executive (LEAP)	Pengembangan bagi Pegawai BOD – 1 yang tailored sesuai dengan kebutuhan para Leaders, namun program ini akan berfokus pada area pengembangan Kompetensi, Personal Traits dan Professional Qualifications. Development for BOD – 1 Employees that is tailored to the needs of Leaders, but this program will focus on the areas of Competency, Personal Traits, and Professional Qualifications development.	56
	Technical Specific	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai sesuai job specification pada jabatan tersebut Improve employee knowledge and skills according to job specifications for the position.	6.570

Biaya Pengembangan Kompetensi

Perusahaan memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya insani yang dimiliki. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dengan penyediaan anggaran investasi pada program pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2024, seluruh pegawai PTBA mendapatkan pelatihan dengan rata rata jumlah waktu sebanyak 55,93 Jam dengan investasi pengembangan tiap pegawai mencapai Rp18,9 Juta per orangnya. Hal tersebut mengalami kenaikan 22% dibandingkan tahun 2023, yaitu sebesar Rp15,6 Juta per orangnya.

Competency Development Costs

The Company is committed to continuously improving the capacity and quality of its human resources. One of the ways this commitment is realized is by providing an investment budget for sustainable employee competency development programs.

Throughout 2024, all PTBA employees received training with an average time of 55.93 hours with an investment in development for each employee reaching Rp18.9 million per person. This has increased by 22% compared to 2023, which was Rp15.6 million per person.

Pengembangan Kompetensi Competency Development	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Perbandingan Realisasi 2024 dan 2023 Comparison of Realization 2024 and 2023	
			Selisih (Rp) Difference	Presentase (%) Percentage
	31.823.805.383	23.476.859.054	8.346.946.329	36%

Hubungan Industrial

PTBA terus berkomitmen untuk membangun serta memelihara Hubungan Industrial yang sehat dan harmonis sebagai sebuah sistem hubungan kerja yang sehat dan konstruktif antara pegawai dan Perusahaan. Hubungan tersebut dilandasi pada asas saling menghormati untuk menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Hal tersebut dilakukan dengan komunikasi intensif dan keterlibatan antara PTBA dan pegawai dalam mencapai target Perusahaan yang telah dirancang.

PTBA menempatkan karyawan sebagai mitra strategis dalam rangka membangun dan memelihara hubungan kerja yang harmonis di lingkungan kerja melalui komunikasi

Industrial Relations

PTBA continues to be committed to building and maintaining healthy and harmonious Industrial Relations as a system of healthy and constructive working relations between employees and the Company. The relationship is based on the principle of mutual respect to create a balance between the fulfillment of rights and the implementation of obligations. This is carried out through intensive communication and involvement between PTBA and employees in achieving the Company's determined targets.

PTBA places employees as strategic partners in order to build and maintain harmonious working relations in the work environment through regular and continuous

yang teratur dan berkesinambungan. Perusahaan memiliki serikat pekerja untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki wadah untuk menyalurkan keinginan mereka. Saat ini, terdapat 1 (satu) organisasi serikat pekerja yang berada di lingkungan PTBA, yaitu Serikat Pegawai PTBA (SPBA) yang telah tercatat di instansi ketenagakerjaan dengan nomor Bukti Pencatatan No. 500.15.13.1/1346/ DISNAKERTRANS-4/2024 tanggal 30 Desember 2024.

Dalam rangka menjalin komunikasi yang baik antara Perusahaan dan pegawai, PTBA secara rutin mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak yang melibatkan serikat pekerja dan perwakilan dari Perusahaan. Untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan dinamis antara Perusahaan dan pegawai serta untuk menjamin keamanan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, PTBA telah menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang menjadi pedoman kerja sama antara pegawai dan Perusahaan. PKB ini juga membantu kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah/perselisihan di tempat kerja.

PKB terakhir yang dimiliki Perusahaan disahkan terakhir kali pada 12 April 2023 dan telah disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 4/ HI.00.01/00.0000.230509001/B/VI/2023 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT Bukit Asam Tbk dengan Serikat Kerja Pegawai Bukit Asam tanggal 05 Juni 2023.

Rencana Pengembangan SDM ke Depan

Peningkatan kualitas pelaksanaan Pengelolaan SDM secara berkelanjutan terus dilakukan. Pada tahun 2025, strategi dan program unggulan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Sistem Manajemen Talenta
   Pengembangan sistem dan aplikasi manajemen talenta yang terintegrasi secara end-to-end dalam rangka implementasi *Framework Succession Planning & Dual Career Path* sesuai sistem grading dan kompetensi MIND ID Group.

2. Penyelarasan Tata Kelola pengelolaan SDM dan penyelarasan kebijakan pengelolaan SDM secara berkelanjutan
   Untuk meningkatkan keselarasan baik antar entitas di MIND ID Group dan PTBA Group, Perusahaan akan melakukan penyelarasan kebijakan di antaranya *Performance Based Culture* dan *Talent Mobility* di lingkungan PTBA Group, serta *Career Management* dan *Competency Alignment* berdasarkan pedoman MIND ID.

communication. The company has a labor union to ensure that each employee has a forum to channel their desires. Currently, there is 1 (one) labor union organization within PTBA, namely the PTBA Employee Union which has been registered with the employment agency with the Registration Proof No. 500.15.13.1/1346/ DISNAKERTRANS-4/2024 dated December 30, 2024.

In order to establish good communication between the Company and employees, PTBA routinely holds meetings between the two parties involving the labor union and representatives from the Company. To create a harmonious and dynamic working relationship between the Company and employees and to ensure the security of the rights and obligations of both parties, PTBA has prepared a Joint Working Agreement (JWA) which serves as a guideline for cooperation between employees and the Company. This PKB also helps both parties to resolve problems/disputes in the workplace.

The latest JWA owned by the Company was last ratified on April 12, 2023, and has been approved by the Ministry of Manpower and Transmigration based on the Decree of the Director General of Industrial Relations and Social Security for Workers No. KEP. 4/ HI.00.01/00.0000.230509001/B/VI/2023 concerning the Joint Working Agreement between PT Bukit Asam Tbk and the Bukit Asam Employee Work Union dated June 5, 2023.

Future HR Development Plan

Sustainable improvement in the quality of HR Management implementation continues to be carried out. In 2025, the strategies and leading programs that will be implemented are as follows:

1. Talent Management System Development
   Development of an integrated end-to-end talent management system and application in order to implement the Succession Planning & Dual Career Path Framework according to the MIND ID Group grading and competency system.

2. Alignment of HR management governance and alignment of sustainable HR management policies

   To improve alignment between entities in the MIND ID Group and PTBA Group, the Company will align policies including Performance Based Culture and Talent Mobility within the PTBA Group, as well as Career Management and Competency Alignment based on MIND ID guidelines.

3. Kajian Evaluasi Organisasi
   Perusahaan akan melakukan penyempurnaan Struktur Organisasi Perusahaan yang terintegrasi, lean, agile dan produktif dalam mendukung optimalisasi bisnis eksisting, strategi dan rencana transformasi Perusahaan.

4. Program pengembangan *Energy Business and Sustainability*
   Perusahaan akan menyusun program pengembangan untuk bisnis energi dan *sustainability* dalam mendukung komitmen Perusahaan untuk melakukan transformasi bisnis berkelanjutan dengan menerapkan keselarasan antara aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

3. Organizational Evaluation Study
   The Company will refine the Company's integrated, lean, agile, and productive Organizational Structure in supporting the optimization of the Company's existing business, strategy, and transformation plan.

4. Energy Business and Sustainability development program
   The Company will prepare a development program for the energy and sustainability business in supporting the Company's commitment to carry out sustainable business transformation by implementing alignment between Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects.

Demografi Karyawan
Employee Demographics

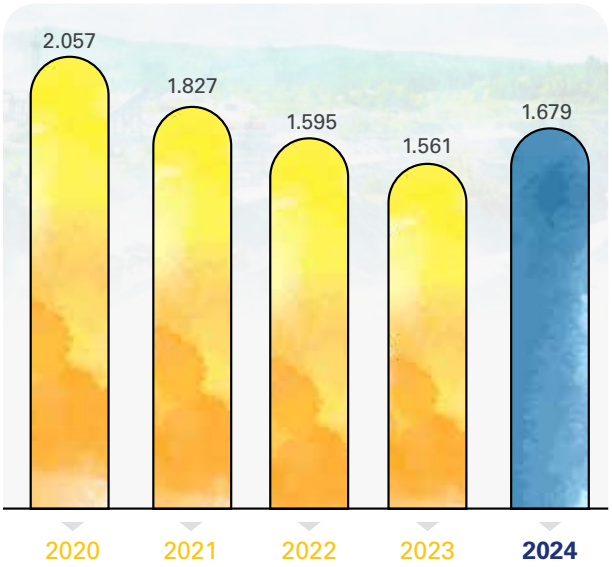
Sampai dengan 31 Desember 2024 jumlah pegawai Perusahaan mencapai 1.679 orang, mengalami peningkatan sebesar 7,56% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2023 yang sebanyak 1.561 orang. Peningkatan ini disebabkan oleh Penerimaan Pegawai baru.

As of December 31, 2024, the number of Company employees reached 1,679 people, an increase of 7.56% compared to the number of employees as of December 31, 2023, which was 1,561 people. This increase was due to the Recruitment of new employees.

Demografi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Employees Demographic Based on Gender

Jenis Kelamin Gender	2024		2023	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Laki-laki Male	1348	80,29	1.263	80,91
Perempuan Female	331	19,71	298	19,09
Total	**1.679**	**100%**	**1.561**	**100%**

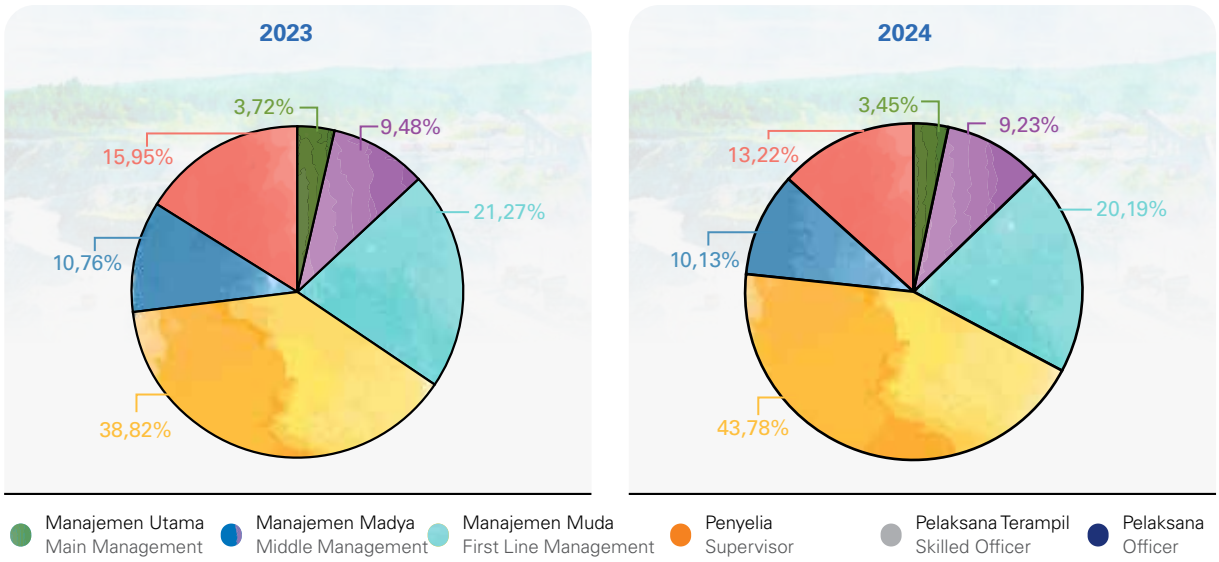
Jumlah Karyawan
Total Employees



Demografi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi
Employees Demographic Based on Organizational Level

Keterangan | Notes
L = Laki-laki | M = Male
P = Perempuan | F = Female

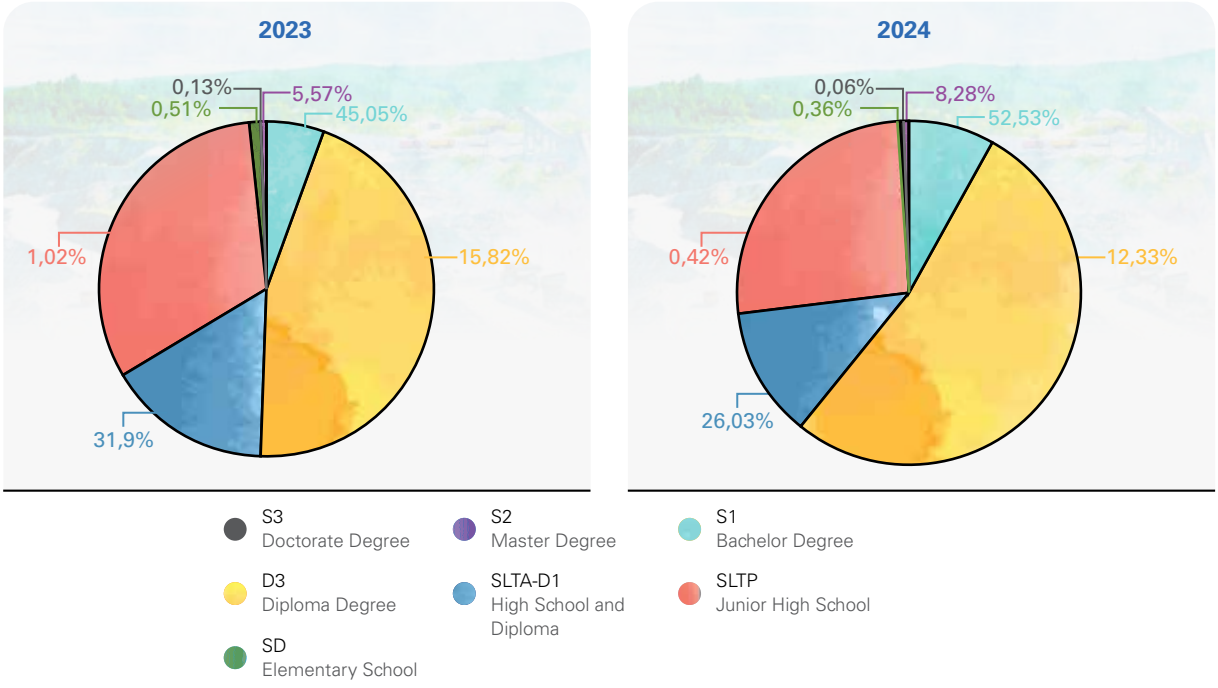
Level Organisasi Organizational Level	2024				2023			
	L M	P F	Jumlah Total	%	L M	P F	Jumlah Total	%
Manajemen Utama Main Management	49	9	58	3,45	49	9	58	3,72
Manajemen Madya Middle Management	134	21	155	9,23	128	20	148	9,48
Manajemen Muda First Line Management	279	60	339	20,19	276	56	332	21,27
Penyelia Supervisor	560	175	735	43,78	471	135	606	38,82
Pelaksana Terampil Skilled Officer	132	38	170	10,13	124	44	168	10,76
Pelaksana Officer	194	28	222	13,22	215	34	249	15,95
Jumlah Total	**1.348**	**331**	**1.679**	**100,00**	**1.263**	**298**	**1.561**	**100,00**



Demografi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Employees Demographic Based on Education Level

Keterangan | Notes
L = Laki-laki | M = Male
P = Perempuan | F = Female

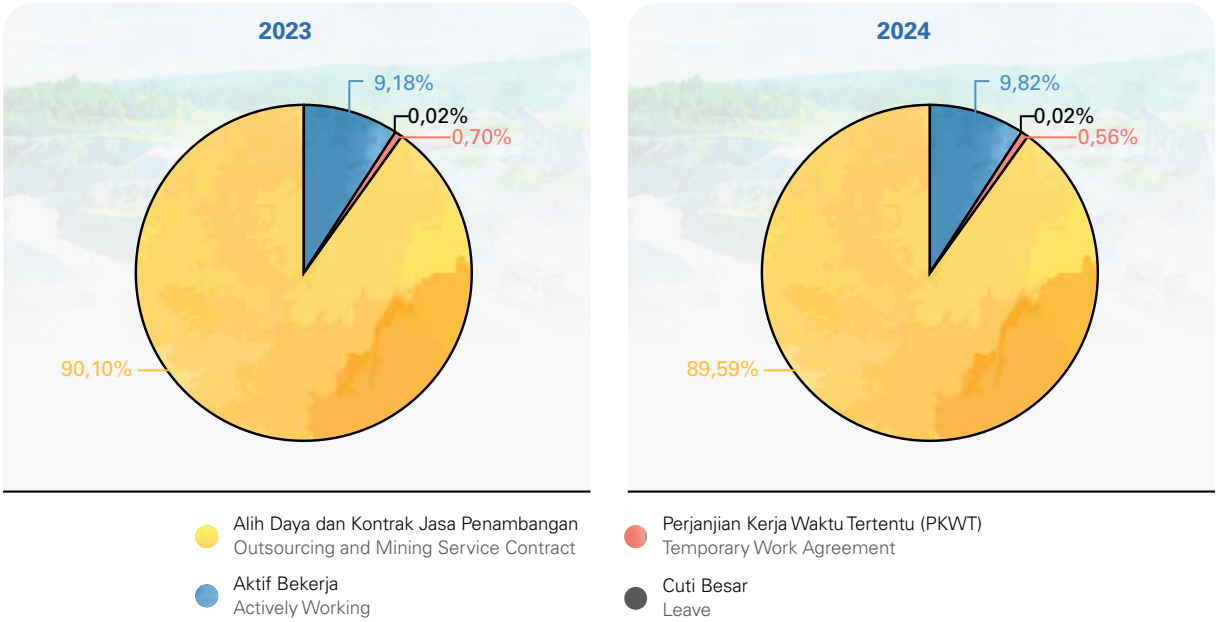
Tingkat Pendidikan Education Leve	2024				2023			
	L M	P F	Jumlah Total	%	L M	P F	Jumlah Total	%
Doktoral (S3) Doctorate Degree	1	-	1	0,06	2	-	2	0,13
Magister (S2) Master Degree	117	22	139	8,28	73	14	87	5,57
Sarjana (S1) Bachelor Degree	673	209	882	52,53	540	163	703	45,04
Ahli Madya (D2-D3) Diploma Degree	158	49	207	12,33	189	58	247	15,82
Sekolah Lanjutan Atas dan Diploma (SLTA-D1) High School and Diploma	387	50	437	26,03	436	62	498	31,90
Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) Junior High School	6	1	7	0,42	15	1	16	1,02
Sekolah Dasar (SD) Elementary School	6		6	0,36	8	-	8	0,51
Jumlah Total	**1.348**	**331**	**1.679**	**100,00**	**1.263**	**298**	**1.561**	**100,00**



Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian
Employees Demographic Based on Employment Status

Keterangan | Notes
L = Laki-laki | M = Male
P = Perempuan | F = Female

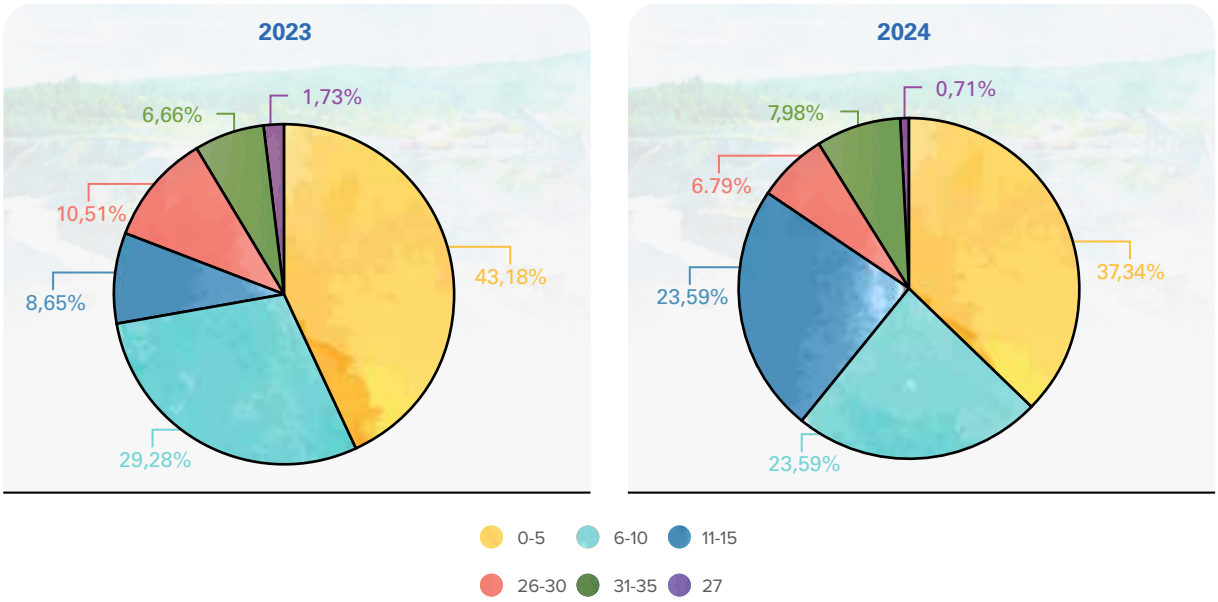
Status Kepegawaian Employment Status	2024				2023			
	L M	P F	Jumlah Total	%	L M	P F	Jumlah Total	%
Pegawai Tetap **Permanent Employee**								
Aktif Bekerja Actively Working	1.344	331	1.675	9,82	1.259	298	1.557	9,18
Cuti Besar Leave	4	-	4	0,02	4	-	4	0,02
Jumlah Total	**1.348**	**331**	**1.679**	**9,85**	**1.263**	**298**	**1.561**	**9,20**
Pegawai Tidak Tetap **Non-permanent Employee**								
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Temporary Work Agreement	76	20	96	0,56	99	19	118	0,70
Alih Daya dan Kontrak Jasa Penambangan Outsourcing and Mining Service Contract	14.763	586	15.349	89,59	14.703	577	15.280	90,10
Tenaga Kerja Asing Foreign Employee	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	**14.839**	**606**	**15.445**	**90,15**	**14.802**	**596**	**15.398**	**90,80**
Jumlah Keseluruhan Grand Total	**16.190**	**938**	**17.132**	**100,00**	**16.065**	**894**	**16.959**	**100,00**



Demografi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja
Employees Demographic Based on Working Period

Keterangan | Notes
L = Laki-laki | M = Male
P = Perempuan | F = Female

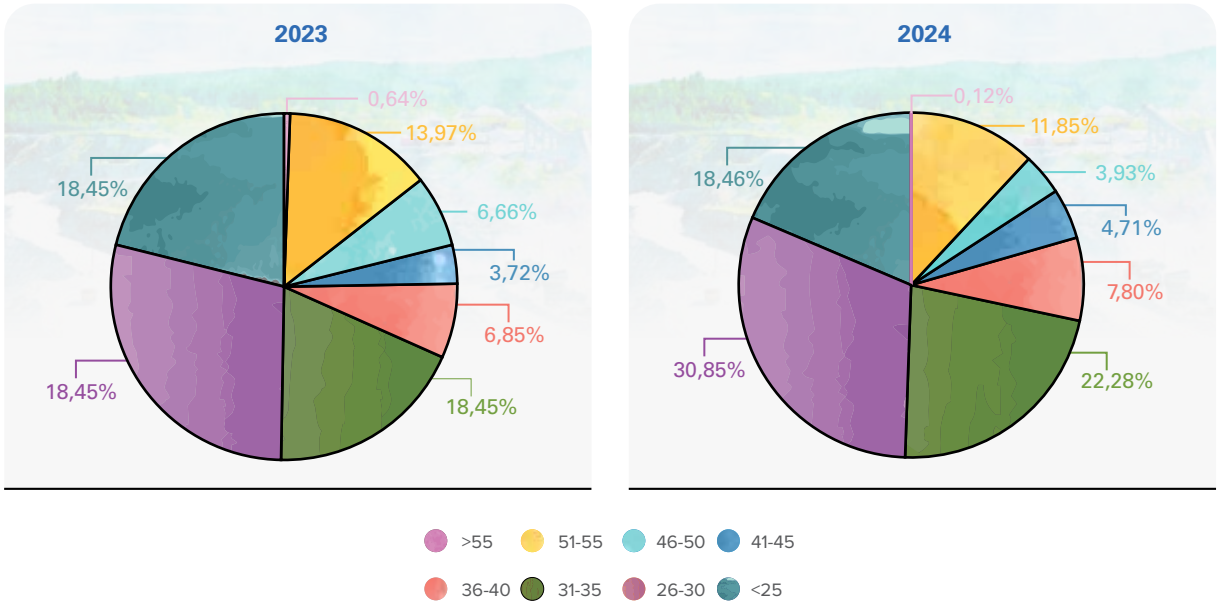
Masa Kerja Working Period	2024				2023			
	L M	P F	Jumlah Total	%	L M	P F	Jumlah Total	%
0-5	471	156	627	37,34	514	160	674	43,18
6-10	316	80	396	23,59	373	84	457	29,28
11-15	317	79	396	23,59	76	28	104	6,66
16-20	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	-	-	-	-	-	-	-	-
26-30	108	6	114	6,79	155	9	164	10,51
31-35	124	10	134	7,98	119	16	135	8,65
>35	12	-	12	0,71	26	1	27	1,73
Jumlah Total	**1.348**	**331**	**1.679**	**100,00**	**1.263**	**298**	**1.561**	**100,00**



Demografi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia
Employees Demographic Based on Age Groups

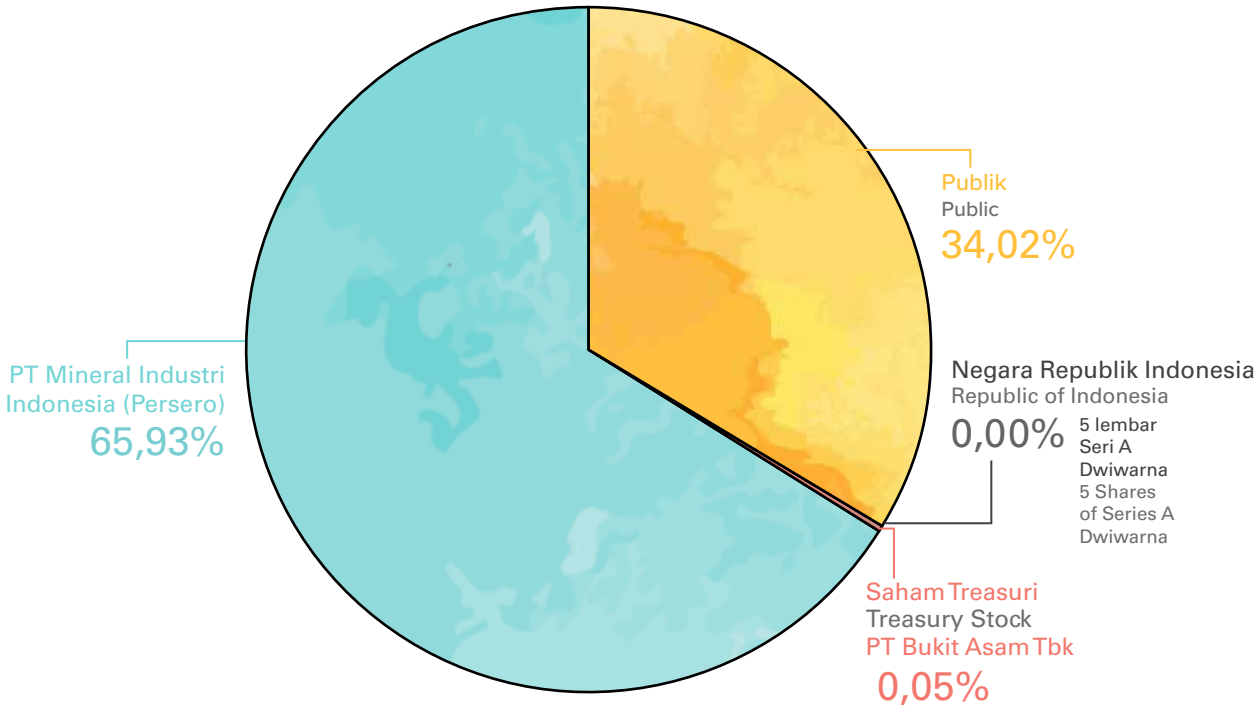
Keterangan | Notes
L = Laki-laki | M = Male
P = Perempuan | F = Female

Rentang Usia Age Groups	2024				2023			
	L M	P F	Jumlah Total	%	L M	P F	Jumlah Total	%
>55	2	-	2	0,12	7	3	10	0,64
51-55	184	15	199	11,85	197	21	218	13,97
46-50	66	-	66	3,93	103	1	104	6,66
41-45	67	12	79	4,71	49	9	58	3,72
36-40	94	37	131	7,80	77	30	107	6,85
31-35	315	59	374	22,28	235	53	288	18,45
26-30	373	145	518	30,85	325	123	448	28,70
<25	247	63	310	18,46	270	58	328	21,01
Jumlah Total	**1.348**	**331**	**1.679**	**100,00**	**1.263**	**298**	**1.561**	**100,00**



Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Structure and Composition

Struktur Pemegang Saham per 31 Desember 2024
Shareholder Structure as of December 31, 2024



Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition

Nama Pemegang Saham Name of Shareholders	31 Desember 2024 December 31, 2024		31 Desember 2023 December 31, 2023	
	Jumlah Saham Total Shares	Persentase % Percentage	Jumlah Saham Total Shares	Persentase % Percentage
Saham Seri A Dwiwarna **Series A Dwiwarna Shares**				
Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia	5	0,00	5	0,00
Saham Seri B **Series B Shares**				
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	7.595.650.695	65,93	7.595.650.695	65,93
Saham Treasuri PT Bukit Asam Tbk Treasury Stock of PT Bukit Asam Tbk	6.302.000	0,05	33.449.900	0,29
Publik Public	3.918.706.550	34,02	3.891.558.650	33,78
Jumlah Total	**11.520.659.250**	**100,00**	**11.520.659.250**	**100,00**

Jenis Saham Perusahaan

Perusahaan memiliki 2 (dua) klasifikasi saham yaitu saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, setiap klasifikasi saham tersebut memiliki 1 (satu) suara pada setiap klasifikasinya atau dikenal dengan istilah *one share one vote*.

1. **Saham Seri A Dwiwarna**
   Saham Seri A Dwiwarna dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PTBA, saham ini tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Saham Seri B**
   Saham Seri B dimiliki oleh PT Mineral Industri Indonesia (Persero) dan masyarakat.

Type of Company Shares

The Company has 2 (two) share classifications, namely Series A Dwiwarna shares and Series B shares. In accordance with the provisions of applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association, each share classification has 1 (one) vote for each classification or known as one share one vote.

1. **Series A Dwiwarna Shares**
   Series A Dwiwarna Shares are owned by the Republic of Indonesia and in accordance with the provisions of the PTBA Articles of Association, these shares cannot be transferred to anyone, unless otherwise specified in the applicable laws and regulations.
2. **Series B Shares**
   Series B Shares are owned by PT Mineral Industri Indonesia (Persero) and the public.

Hak dan Kewenangan Pemegang Saham
Rights and Authorities of Shareholders

Jenis Kepemilikan Saham Type of Shareholding	Hak dan Kewenangan Rights of Authorities
Saham Seri A Dwiwarna	Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya, yaitu: 1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS Perseroan termasuk mengenai hal-hal sebagai berikut: a. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan; b. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar; c. Persetujuan perubahan struktur kepemilikan saham; d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran serta pengambilalihan Perusahaan oleh perusahaan lain; 2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan; 3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS; 4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan; 5. Hak untuk menetapkan pedoman/kebijakan strategis pada Perusahaan dalam bidang sebagai berikut: a. Bidang akuntansi dan keuangan; b. Bidang pengembangan dan investasi; c. Bidang operasional dan pengendalian mutu; d. Bidang pemasaran dan komersial; e. Bidang informasi teknologi; f. Bidang pengadaan dan logistik; g. Bidang sumber daya manusia; h. Bidang tata kelola, manajemen risiko, dan pengawasan internal; i. Bidang hukum, kepatuhan, dan penanganan permasalahan hukum; j. Bidang kesehatan, keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial; k. Bidang penelitian dan inovasi terkait teknologi serta Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); l. Bidang pengkajian peraturan perundangan dan kebijakan; dan/atau m. Bidang lainnya. 6. Hak untuk melakukan pemeriksaan, memberi masukan, meminta informasi, memberikan persetujuan, melakukan penetapan, dan pemantauan pelaksanaan Kontrak Manajemen Direksi Perseroan, termasuk menetapkan indikator kinerja kunci (key performance indicator) yang dilampirkan di dalamnya, sebagai syarat pengangkatan Direksi Perusahaan; 7. Hak untuk mengusulkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan; 8. Hak untuk mengkoordinir, menyelenggarakan dan/atau mensinergikan fungsi untuk Perusahaan berdasarkan perjanjian dengan/kuasa dari Perusahaan pada bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada huruf c.5 Pasal ini; 9. Hak untuk melakukan sinergi pengawasan terhadap kegiatan operasional maupun strategis Perusahaan; 10. Hak melakukan pengendalian atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan atau kebijakan strategis dan operasional Perusahaan; 11. Hak untuk melakukan pemeriksaan, memberi masukan, meminta informasi, dan menyetujui Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, rencana kerja lainnya, beserta perubahannya yang disampaikan oleh Dewan Komisaris Perusahaan; dan 12. Hak lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini sebagai hak dan/atau kewenangan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Hak dan Kewenangan Pemegang Saham
Rights and Authorities of Shareholders

Jenis Kepemilikan Saham Type of Shareholding	Hak dan Kewenangan Rights of Authorities
Series A Dwiwarna Share	Series A Dwiwarna are shares that are specially owned by the Republic of Indonesia which grant the holder special rights namely: 1. The right to approve at the GMS regarding the following matters: a. Agreement of appointment and dismissal of members of Board of Directors and Board of Commissioners; b. Agreement to amendments to the Articles of Association; c. Agreement to changes in shareholding structure; d. Agreement on merger, consolidation, separation and dissolution as well as takeover of the Company by another company; 2. The right to nominate Candidates for Members of Board of Directors and Candidates for Members of Board of Commissioners; 3. The right to propose GMS agenda; 4. The right to request and access Company data and documents; 5. The right to determine the Company's strategic guidelines in the following fields; a. Accounting and Finance b. Development and Investment c. Operational and Quality Control d. Marketing and Commercial e. Technology Information f. Procurement and Logistic g. Human Capital h. Governance, risk management, and internal control i. Legal, compliance and handling of legal issues; j. Health, Occupational Safety, Environmental Management, and Social Responsibility; k. Research and innovation related to technology and Intellectual Property Rights (IPR); l. Review of legal regulations and policies; and/or m. Others 6. The right to review, approve, determine, and monitor the implementation of the Company's Board of Directors Management Contract, including determining the key performance indicators attached therein, as a condition for the appointment of the Company's Directors. 7. The right to propose changes to the Company's Articles of Association 8. The right to coordinate, organize and/or synergize functions for the Company based on an agreement with/ authorized by the Company in the fields as above; 9. The right to synergize supervision of the Company's operational and strategic activities 10. The right to control or monitor the implementation of the Company's strategic and operational activities or policies 11. The right to carry out inspections/reviews, provide input, request information, and approve the Company's Long Term Plan, Company Work Plan and Budget, other work plans, along with changes submitted by the Company's Board of Commissioners; And 12. Other rights regulated in these Articles of Association as the rights and/or authorities of Series A Dwiwarna Shareholders
Hak Umum Pemegang Saham (Saham Seri A dan B)	Di luar dari hak istimewa yang dimiliki oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tersebut, Pemegang Saham Seri A dan Pemegang Saham Seri B memiliki hak yang sama sepanjang tidak diatur lain oleh Anggaran Dasar, diantaranya sebagai berikut: 1. Menghadiri RUPS baik secara langsung maupun melalui perwakilan, menyampaikan pendapat dan/atau pengambilan keputusan. Masing-masing pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara dan mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki. 2. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dalam RUPS. 3. Menyetujui remunerasi Direksi dan Dewan Komisarsi Perusahaan dalam RUPS. 4. Menyetujui penetapan penggunaan laba termasuk untuk pembagian dividen pada RUPS. 5. Menyetui untuk penunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada RUPS. 6. Menerima informasi terkait Perusahaan yang akurat dan tepat waktu dengan prinsip kesetaraan informasi terhadap seluruh pemegang saham. 7. Menerima pembagian dividen dan pembagian keuntungan PTBA dalam bentuk lainnya sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya. 8. Menerima pembagian sisa hasil likudasi Perusahaan dalam hal terjadinya kepailitan. 9. Meminta diselenggarakannya RUPS oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, sepanjang dilakukan dengan itikad baik, atas dasar kepentingan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. 10. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan RUPS dengan ketentuan pemegang seri A dwiwarna atau 1 pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 jumlah saham beredar. 11. Memperoleh penjelasan lengkap dan Informasi yang akurat mengenai persyaratan prosedur penyelenggaraan RUPS. 12. Mengajukan gugatan terhadap Perusahaan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

Hak dan Kewenangan Pemegang Saham
Rights and Authorities of Shareholders

Jenis Kepemilikan Saham Type of Shareholding	Hak dan Kewenangan Rights of Authorities
General Rights of Shareholders (Series A and B Shares)	Apart from the privileges held by the Dwiwarna Series A Shareholders, Series A Shareholders and Series B Shareholders share the same rights as long as not regulated otherwise by the Articles of Association, including the following: 1. Attend the GMS either directly or through representatives, express opinions and/or make decisions. Each shareholder has the right to be treated equally and to vote according to the type, classification and number of shares owned. 2. Approve to appoint members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners at the GMS. 3. Approve the remuneration of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners at the GMS. 4. Approve the determination of the use of profits including for the distribution of dividends at the GMS. 5. Approve to appoint Public Accountants and Public Accounting Firms at the GMS. 6. Receive accurate and timely information related to the Company with the principle of equality of information for all shareholders. 7. Receive dividends and other forms of PTBA profit sharing in accordance with the proportion of its share ownership. 8. Receive the distribution of the remaining liquidation proceeds of the Company in the event of bankruptcy. 9. Request the holding of a GMS by one or more Shareholders who either individually or jointly represent 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights, as long as it is carried out in good faith, based on the interests of the Company and does not conflict with laws and regulations and the Company's articles of association. 10. Shareholders may propose meeting agendas no later than 7 days before the GMS invitation with the provision that the holder of the A series dwiwarna or 1 or more shareholders representing 1/20 of the total number of shares outstanding. 11. Obtain a complete explanation and accurate information regarding the requirements for the procedures for holding a GMS. 12. File a lawsuit against the Company with the district court if harmed by the Company's actions which are considered unfair and without reasonable grounds as a result of the decision of the GMS, the Board of Directors, and/or the Board of Commissioners.

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar (Per 31 Desember 2024)
Composition of the Top 20 Shareholders (Per December 31, 2024)

No	Pemegang Saham Shareholder	Status	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase (%) Percentage
1	PT Mineral Industri Indonesia (PERSERO)	Institusi Lokal Local Institution	7.595.650.695	65,93
2	PT Panin Sekuritas	Institusi Lokal Local Institution	230.176.700	2,00
3	DJS Ketenagakerjaan Program JHT	Institusi Lokal Local Institution	176.580.255	1,53
4	Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan South Sumatra Provincial Government	Pemerintah Daerah Regional Government	106.575.000	0,93
5	DJS Ketenagakerjaan Program JP	Institusi Lokal Local Institution	81.474.100	0,71
6	JPMCB NA RE - Vanguard Total Internationalstock Index Fund	Institusi Asing Foreign Institution	55.973.716	0,49
7	JPMCB NA RE - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	Institusi Asing Foreign Institution	53.847.644	0,47
8	BNYM RE Global X Superdividend ETF - 2039928079	Institusi Asing Foreign Institution	49.615.400	0,43
9	BNYM RE Acadian EM MKTS Small Cap EQ FDLLC	Institusi Asing Foreign Institution	46.614.356	0,40
10	PT Pamapersada Nusantara	Institusi Lokal Local Institution	45.000.000	0,39
11	SSB 2Q27 ISHARES Core MSCI Emerging Markets ETF - 2183966403	Institusi Asing Foreign Institution	41.302.100	0,36

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar (Per 31 Desember 2024)
Composition of the Top 20 Shareholders (Per December 31, 2024)

No	Pemegang Saham Shareholder	Status	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase (%) Percentage
12	GSCO LLC S/A Truffle Hound Global Value,LLC	Institusi Asing Foreign Institution	40.000.000	0,35
13	SSB 2Q1W ISHARES Emerging Markets Dividend ETF - 2183966401	Institusi Asing Foreign Institution	37.342.000	0,32
14	Citibank New York S/A Emerging Markets Core Equity Portfolio	Institusi Asing Foreign Institution	37.180.900	0,32
15	BNYM RE Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund	Institusi Asing Foreign Institution	37.097.200	0,32
16	PT. Taspen	Institusi Lokal Local Institution	35.484.000	0,31
17	SSB EGK9 ISHARES V Public Limited Company - 2183965108	Institusi Asing Foreign Institution	34.995.900	0,30
18	Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim Muara Enim Regency Government	Pemerintah Daerah Regional Government	34.730.000	0,30
19	JPMCB NA RE - Vanguard Fiduciary Trust Company Institutional	Institusi Asing Foreign Institution	29.192.700	0,25
20	PT. Mandiri Sekuritas - Jaminan Repo	Institusi Lokal Local Institution	28.766.600	0,25

Komposisi Pemegang Saham yang Memiliki >5% (Per 31 Desember 2024)
Composition of Shareholders with >5% Ownership (Per December 31, 2024)

Nama Pemegang Saham Composition of Shareholders with >5% Ownership (Per December 31, 2023)	31 Desember 2024 December 31, 2024		31 Desember 2023 December 31, 2023	
	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase % Percentage	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase % Percentage
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	7.595.650.695	65,93	7.595.650.695	65,93

Komposisi Pemegang Saham yang Memiliki <5% (Per 31 Desember 2024)
Composition of Shareholders with Ownership <5% (Per December 31, 2024)

No.	Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Percentage
1.	Institusi Asing dan Individu Asing Foreign Institution and Foreign Individual	1.195.661.085	10,38
2.	Institusi Lokal dan Individu Lokal Local Institution and Local Individual	2.723.045.695	23,64
3.	Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia	5	0,00

Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Klasifikasi (Per 31 Desember 2024)
Composition of Shareholders Based on Classification (Per December 31, 2024)

Nama Pemegang Saham Shareholder	31 Desember 2024 December 31, 2024		31 Desember 2023 December 31, 2023	
	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase % Percentage	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase % Percentage
Lokal **Local**				
Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia	5	0,00	5	0,00
Perorangan Indonesia Indonesian Individual	1.500.179.307	13,02	1.571.707.900	13,64
Pemerintah Daerah Regional Government	141.305.000	1,23	141.305.000	1,23
Koperasi Cooperative	509.500	0,00	510.800	0,00
Yayasan Foundation	8.840.300	0,08	10.379.900	0,09
Dana Pensiun Pension Fund	463.306.039	4,02	428.232.639	3,72
Asuransi Insurance	66.812.673	0,58	37.886.649	0,33
Bank Bank	6.000.000	0,05	6.176.500	0,05
Perseroan Terbatas Limited Liability Company	7.976.923.836	69,24	7.997.295.318	69,42
Reksadana Mutual Funds	161.121.505	1,40	109.513.719	0,95
Jumlah Kepemilikan Lokal Total Local Ownership	**10.324.998.165**	**89,62**	**10.303.008.430**	**89,43**
Asing **Foreign**				
Perorangan Asing Foreign Individual	4.540.500	0,04	13.491.207	0,12
Badan Usaha Asing Foreign Business Entity	1.191.120.585	10,34	1.204.159.613	10,45
Jumlah Kepemilikan Asing Total Foreign Ownership	**1.195.661.085**	**10,38**	**1.217.650.820**	**10,57**
Jumlah Total	**11.520.659.250**	**100,00**	**11.520.659.250**	**100,00**

Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi
Company Share Ownership by Board of Commissioners and Board of Directors

Nama dan Jabatan Name and Position	1 Januari – 31 Desember 2024 January 1 – December 31, 2024	
	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (Share)	Persentase (%) Percentage (%)
Dewan Komisaris **Board of Commissioners**		
Irwandy Arif Komisaris Utama | President Commissioner	0	0
Andi Pahril Pawi Komisaris Independen | Independent Commissioner	0	0
E. Piterdono HZ Komisaris | Commissioner	0	0
Carlo Brix Tewu Komisaris | Commissioner	0	0
Kurnia Toha Komisaris Independen | Independent Commissioner	0	0
Rahmat Hidayat Pulungan Komisaris Independen | Independent Commissioner	0	0
Direksi **Board of Directors**		
Arsal Ismail Direktur Utama | President Director	304.900	0,00
Farida Thamrin* Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	0	0
Suhedi Direktur Operasi dan Produksi Operation and Production Director	0	0
Rafli Yandra Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	0	0
Suherman Direktur Sumber Daya Manusia | Human Resources Director	100.000	0,00

*Catatan | Notes :
*Tidak menjabat terhitung sejak tangggal 24 Maret 2025, mengingat yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur Treasury and International Banking PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
* Not in office as of March 24, 2025, considering that the person concerned was appointed as Director of Treasury and International Banking of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Informasi Saham Free Float (Per 31 Desember 2024)
Free Float Stock Information (As of December 31, 2024)

	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase (%) Percentage (%)
Total Saham Warkat Total Warkat Shares	7.634.742.500	66,27
Total Saham Scripless Total Scripless Shares	3.885.916.750	33,73
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Deposited Capital	11.520.659.250	100,00
Jumlah Saham Free Float* Number of Free Float Shares*	3.773.996.650	32,76

Informasi Saham Free Float (Per 31 Desember 2024)
Free Float Stock Information (As of December 31, 2024)

	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase (%) Percentage (%)
Pemegang Saham < 5% **Shareholders < 5%**		
Masyarakat - Warkat – Scrip Public – Warkat - Scrip	144.305.000	1,25
Masyarakat - Non Warkat – Scripless Public – Non-Warkat – Scripless	3.773.996.650	32,76
Saham Treasuri Treasury Shares	6.302.000	0,05
Informasi Saham Free Float **Free Float Stock Information**		
Jumlah Saham Scripless Dimiliki oleh Pemegang Saham Kurang dari 5% Number of Scripless Shares Owned by Shareholders Less Than 5%	3.780.703.550	32,82
Jumlah Saham Scripless Dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris Kurang dari 5% Number of Scripless Shares Owned by Directors and Board of Commissioners Less Than 5%	404.900	0,00
Jumlah Saham Scripless Dimiliki oleh Afiliasi dari Pengendali Kurang dari 5% Number of Scripless Shares Owned by Affiliates of the Controller Less Than 5%	0	0
Jumlah Saham Treasuri Scripless Kurang dari 5% Number of Scripless Treasury Stock Less Than 5%	6.302.000	0,05
Jumlah Saham Portofolio Investasi dengan Penerima Manfaat Investor Publik yang Telah Disetujui Bursa untuk Diperhitungkan Sebagai Free Float Number of Investment Portfolio Shares with Public Investor Beneficiaries that have been Approved by the Exchange to be Considered as Free Float	0	0
Jumlah Saham Tercatat di Bursa Per Akhir Bulan Number of Shares Listed on the Exchange at the End of the Month	11.520.659.250	100,00
Jumlah Saham Free Float* Number of Free Float Shares*	3.773.996.650	32,76

*Catatan | Notes :
Berdasarkan keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.KEP-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 mengenai perubahan peraturan nomor I-A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat, diatur bahwa:

Saham free float diuraikan dalam lampiran I butir I.22 peraturan No.I-A adalah saham yang:
1. Dimiliki oleh pemegang saham kurang dari 5% (lima perseratus) dari seluruh saham tercatat,
2. Bukan dimiliki oleh pengendali dan afiliasi dari pengendali (berdasarkan Surat Edaran BEI No: SE-00010/BEI/07-2023),
3. Bukan dimiliki oleh anggota dewan komisaris atau anggota direksi, dan
4. Bukan saham yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan.

Selanjutnya diuraikan dalam lampiran I butir II.5 peraturan No.I-A saham yang dapat diperdagangkan di bursa termasuk saham Free Float adalah saham yang dalam bentuk tanpa warkat (scripless).
Jumlah saham dan persentase Free Float tersebut belum memperhitungkan "jumlah saham yang terafiliasi dari pengendali" dan "jumlah saham portofolio investasi dengan penerima manfaat investor publik yang telah disetujui bursa untuk diperhitungkan Sebagai Free Float" (jika ada).

Based on the decision of the Directors of PT Bursa Efek Indonesia No.KEP-00101/BEI/12-2021 dated December 21, 2021, concerning changes to regulation number I-A regarding the listing of shares and equity securities other than shares issued by listed companies, it is regulated that:

Free float shares are described in attachment I point I.22 of regulation No.I-A are shares that:
1. Owned by shareholders of less than 5% (five percent) of all registered shares,
2. Not owned by the controller and affiliates of the controller (based on BEI Circular Letter No: SE-00010/BEI/07-2023),
3. Not owned by members of the board of commissioners or members of the board of directors, and
4. Not shares that have been repurchased by the Company. It is further explained in attachment I point II.5 of regulation No. I-A that shares that can be traded on the stock exchange, including Free Float shares, are shares that are in scripless form.

The number of shares and Free Float percentage does not take into account "the number of shares affiliated with the controller" and "the number of investment portfolio shares with public investor beneficiaries that have been approved by the stock exchange to be counted as Free Float" (if any).

Informasi Pemegang Saham Utama/Pengendali Hingga Pemilik Akhir

Information on Major/Controlling Shareholders to Ultimate-end Owner

Pada tanggal 8 Desember 2022, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia atas PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Berdasarkan peraturan tersebut PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) telah mengembalikan kepemilikan saham PTBA sebanyak 7.490.437.495 lembar saham Seri B kepada Negara Republik Indonesia dalam rangka pengurangan penyertaan modal negara.

On December 8, 2022, the Indonesian Government issued Government Regulation Number 45 of 2022 concerning Reduction of the Republic of Indonesia's State Capital Participation in PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero). Based on this regulation, PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) has returned ownership of PTBA shares totaling 7,490,437,495 Series B shares to the Republic of Indonesia in order to reduce state capital participation.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah di atas, pada tanggal yang sama, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Pertambangan. Pada saat yang sama dengan berlakunya secara efektif pengurangan penyertaan modal negara tersebut, Negara Republik Indonesia mengalihkan 7.490.437.495 lembar saham Seri B yang dimiliki kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) sebagai bentuk penyertaan modal negara dalam rangka pendirian PT Mineral Industri Indonesia (Persero). Pengalihan dan pendirian tersebut berlaku efektif tertanggal 21 Maret 2023. PT Bukit Asam Tbk menjadi anak perusahaan atau perusahaan yang dikendalikan oleh PT Mineral Industri Indonesia (Persero) terhitung pada tanggal 21 Maret 2023 dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) berlaku sebagai induk atau pemegang saham utama PTBA.

Following up on the Government Regulation above, on the same date, the Government of the Republic of Indonesia also issued Government Regulation Number 46 of 2022 concerning the Establishment of Companies in the Mining Sector. At the same time as the reduction in state capital participation was effectively taking effect, the Republic of Indonesia transferred 7,490,437,495 Series B shares owned to PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as a form of state capital participation in the context of establishing PT Mineral Industri Indonesia (Persero). The transfer and establishment is effective on March 21, 2023. PT Bukit Asam Tbk becomes a subsidiary or company controlled by PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as of March 21, 2023 and PT Mineral Industri Indonesia (Persero) acts as the parent or main shareholder of PTBA.

Selanjutnya pada tanggal 6 April 2023, PT Indonesia Asahan Aluminium mengalihkan saham yang dibeli dari PTBA pada tahun 2019 (saham treasuri) kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) sebanyak 105.213.200 (0,91%), sehingga total kepemilikan saham PT Mineral Industri Indonesia (Persero) menjadi 7.595.650.695 atau 65,93%. Dengan demikian, maka sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Pemegang Saham Utama PTBA yaitu PT Mineral Industri Indonesia (Persero).

Furthermore, on April 6, 2023, PT Indonesia Asahan Aluminum transferred shares purchased from PTBA in 2019 (treasury shares) to PT Mineral Industri Indonesia (Persero) amounting to 105,213,200 (0.91%), bringing the total share ownership of PT Mineral Indonesian Industry (Persero) to 7,595,650,695 or 65.93%. Thus, until December 31, 2024, the main shareholder of PTBA is PT Mineral Industri Indonesia (Persero).

Pemegang Saham Utama Major Shareholder	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)
Kepemilikan Ownership	Negara Republik Indonesia 100,00% Republic of Indonesia 100,00%
Bidang Usaha Line of Business	Perusahaan Holding di bidang pertambangan Holding Company in Mining sector
Produk Products	Manajemen Portofolio Anak Perusahaan Subsidiary Portfolio Management

Alamat Address	Kantor Holding Industri Pertambangan, Jakarta Gedung Energy Lt. 16 SCBD Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190. P.O. BOX 6917 Jakarta Selatan, Indonesia Telp. (+6221) 29738750 Fax. (+6221) 27936331 e-mail : corsec@mind.id

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama / Komisaris Independen President Commissioner / Independent Commissioner	Fuad Bawazier
Komisaris Independen Independent Commissioner	Agung Setya Imam Effendi
Komisaris Independen Independent Commissioner	Nugroho Widyotomo
Komisaris Independen Independent Commissioner	Pamitra Wineka
Komisaris Commissioner	Astera Primanto Bhakti
Komisaris Commissioner	Grace Natalie
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Maroef Sjamsoeddin
Wakil Direktur Utama Vice President Director	Dany Amrul Ichdan
Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha Portfolio and Business Development Director	Dilo Seno Widagdo
Direktur Keuangan Finance Director Risk Management and HSSE Director	Akhmad Fazri
Direktur Manajemen Risiko dan HSSE Risk Management and HSSE Director	Nur Hidayat Udin

Selanjutnya, dengan telah diundangkannya beberapa peraturan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, utamanya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU No. 1/2025"); dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian Holding Operasional tanggal 21 Maret 2025 ("PP No. 15/2025");

Selanjutnya telah dilakukan perubahan pemegang saham pada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) ("MIND ID"), selaku pemegang saham Seri B Terbanyak PT Bukit Asam Tbk ("Perseroan"), dengan penjelasan ringkas sebagai berikut:

Furthere more, following the issuance of several regulations within State-Owned Companies, mainly:

1. Law Number 1 of 2025 onthe Third Amendment to Law Number 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprises ("Law No. 1/2025"); and
2. Government Regulation Number 15 of 2025 on the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia for the Establishment of an Operational Holding dated 21 March 2025 ("PP No. 15/2025");

There have been changes to the shareholding in PT Mineral Industri Indonesia (Persero) ("MIND ID"), the holder of the majority Series B shares in PT Bukit Asam Tbk (the "Company"), which is briefly described as follows:

Pemerintah Republik Indonesia telah mengalihkan 119.090.864 lembar saham seri B di Perusahaan Perseroan (Persero) PT Mineral Industri Indonesia ("MIND ID") kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia ("PT BKI") dalam rangka Pendirian Holding Operasional ("Pengalihan Saham Seri B MIND ID"); dan Pemerintah Republik Indonesia tetap memiliki 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna dengan hak istimewa di MIND ID sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1/2025; sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Mineral Industri Indonesia Nomor 96 tanggal 21 April 2025 ("Akta MIND ID No. 96/2025").

Selanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan PT BKI untuk memiliki peran selaku *Holding* Operasional (sesuai dengan pengaturan dalam UU No. 1/2025), yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui kepemilikan 1% Saham Seri A Dwiwarna oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 99% Saham Seri B oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ("BPI Danantara").

BPI Danantara adalah suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UU No. 1/2025 dan sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, yang memiliki tujuan antara lain untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi serta operasional Badan Usaha Milik Negara.

Sekalipun dengan perubahan kepemilikan saham tersebut di atas, Perseroan tetap dikendalikan secara tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan penjelasan selanjutnya terkait struktur kepemilikan saham sebagai berikut:

The Government of the Republic of Indonesia has transferred 119,090,864 series B shares in Perusahaan Perseroan (Persero) PT Mineral Industri Indonesia ("MIND ID") to Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia ("PT BKI") for the purpose of the Establishment of the Operational Holding ("Transfer of MIND ID Series B Shares"); and the Government of the Republic of Indonesia retains 1 (one) Series A Dwiwarna share with special rights in MIND ID, as referred to in Law No. 1/2025; as stated in the Deed of Shareholders' Decision on Amendments to the Articles of Association of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Mineral Industri Indonesia Number 96 dated 21 April 2025 ("Deed 96/2025").

Further, the Government of the Republic of Indonesia has appointed PT BKI to have the role as the Operational Holding (as referred to in Law No. 1/2025), which 100% (one hundred percent) of its shares are directly and indirectly owned by the Government of the Republic of Indonesia through the ownership of 1% Series A Dwiwarna Share by the Government of the Republic of Indonesia and 99% Series B Shares by Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ("BPI Danantara").

BPI Danantara is an entity established by the Government of the Republic of Indonesia based on Law No. 1/2025 and wholly owned by the Government of Indonesia, which is aimed to enhance and optimize the investments and operations of State-Owned Enterprises.

Despite of the change to the shares ownership mentioned above, the Company remains to be under the indirect control of the Government of Indonesia, which shareholding structure is elaborated further as follows:



Penerima Manfaat Utama PT Bukit Asam Tbk
Ultimate Beneficial Owner PT Bukit Asam Tbk



Daftar Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, Dan Ventura Bersama

List of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures

Perusahaan telah mengelompokkan direktorat pembinaan kepada anak perusahaan/afiliasi perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 156/0100/2024 tentang Tugas, Wewenang, dan Tanggung jawab Direksi PT Bukit Asam Tbk.

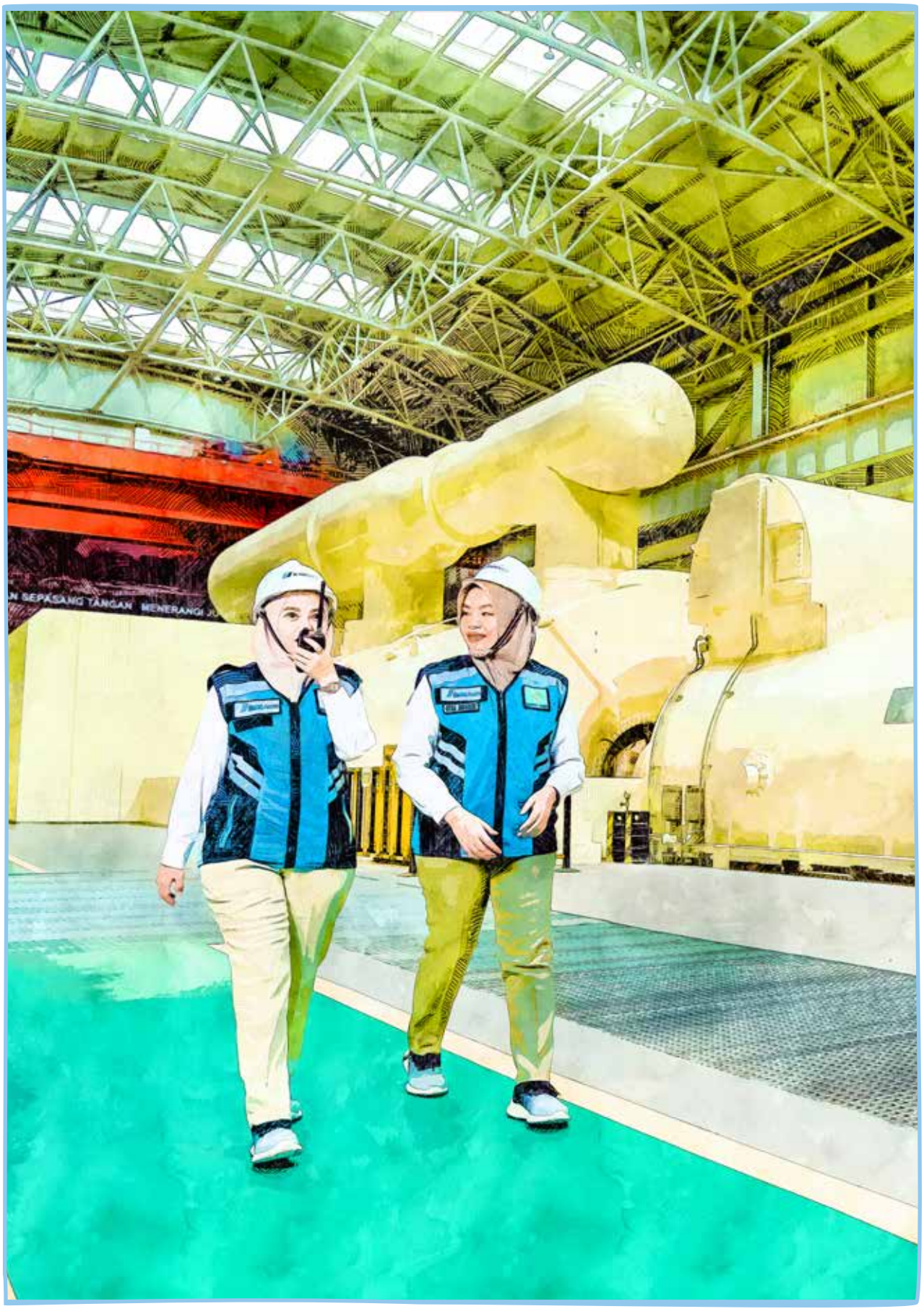
The Company has grouped the development directorate into subsidiaries/affiliated companies based on the Decree of Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 156/0100/2024 concerning the Duties, Authorities, and Responsibilities of the Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk.

Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Date of Establishment	Status Operasi Operational Status	Struktur Kepemilikan Saham Shareholding Structure		Total Aset (dalam Rp Juta) Total Assets (in Rp million)	
					Pemegang Saham Shareholders	%	2024	2023
ENTITAS ANAK LANGSUNG DIRECT SUBSIDIARIES								
PT Batubara Bukit Kendi	Penambangan Batu Bara Coal Mining	Tanjung Enim, Sumatra	1996	Tidak Aktif Inactive	PT Bukit Asam Tbk	99,39	55.010	54.320
					PT Delta Bentala Perintis	0,61		
PT Bukit Asam Prima	Penambangan Batu Bara Coal Mining	Jakarta	2007	Beroperasi Operating	PT Bukit Asam Tbk	99,99	749.894	778.712
					Yayasan Bukit Asam	0,01		
PT Internasional Prima Coal	Penambangan Batu Bara Coal Mining	Palaran, Kalimantan Timur East Kalimantan	2008	Beroperasi Operating	PT Bukit Asam Tbk	51,00	698.178	693.981
					PT Mega Raya Kusuma	49,00		
PT Bukit Asam Metana Ombilin**	Penambangan Gas Metana Batu Bara Coal Methane Gas Mining	Jakarta	2007	Belum Beroperasi Not Yet Operating	PT Bukit Asam Tbk	99,99	34	34
					Yayasan Bukit Asam	0,01		
PT Bukit Asam Metana Enim	Penambangan Gas Metana Batu Bara Coal Methane Gas Mining	Jakarta	2007	Belum Beroperasi Not Yet Operating	PT Bukit Asam Tbk	99,99	73	73
					Yayasan Bukit Asam	0,01		
PT Bukit Asam Banko	Penambangan Gas Metana Batu Bara Coal Methane Gas Mining	Tanjung Enim, Sumatra Selatan South Sumatra	2008	Belum Beroperasi Not Yet Operating	PT Bukit Asam Tbk	99,99	313	313
					PT Rajawali Asia Resources	0,01		
PT Bukit Multi Investama	Investasi Investment	Jakarta	2014	Beroperasi Operating	PT Bukit Asam Tbk	99,91	3.884.637	2.956.088
					Yayasan Bukit Asam	0,09		
PT Bukit Energi Investama	Investasi Investment	Jakarta	2015	Beroperasi Operating	PT Bukit Asam Tbk	99,60	254.991	242.442
					Yayasan Bukit Asam	0,40		

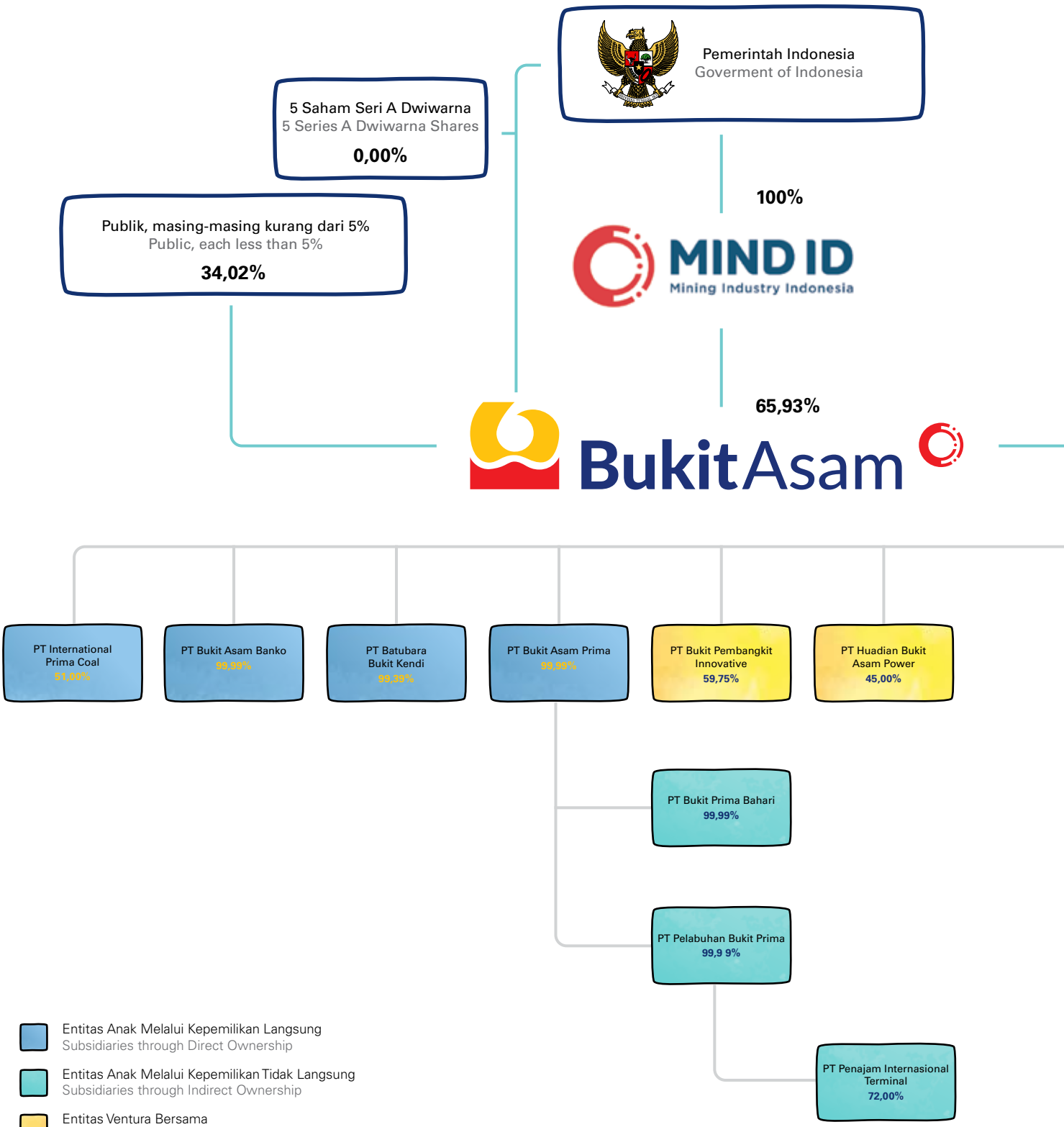
Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Date of Establishment	Status Operasi Operational Status	Struktur Kepemilikan Saham Shareholding Structure		Total Aset (dalam Rp Juta) Total Assets (in Rp million)	
					Pemegang Saham Shareholders	%	2024	2023
ENTITAS ANAK TIDAK LANGSUNG INDIRECT SUBSIDIARIES								
PT Bumi Sawindo Permai	Perkebunan Kelapa Sawit dan Olahan Kelapa Sawit Palm Oil Plantation and Processed Palm Oil	Tanjung Agung, Sumatra Selatan South Sumatra	1986 diakuisisi pada 2014 1986, was acquired in 2014	Beroperasi Operating	PT Bukit Asam Tbk	99,99	812.893	450.927
					PT Bukit Asam Kreatif	0,01		
PT Bukit Prima Bahari	Pelayaran Cruise	Jakarta	2014	Beroperasi Operating	PT Bukit Asam Tbk	99,99	461.094	386.888
					Koperasi Karyawan PT Bukit Asam Prima	0,01		
PT Pelabuhan Bukit Prima	Jasa Pelabuhan Port Services	Jakarta	2014	Beroperasi Operating	PT Bukit Asam Tbk	99,99	143.696	148.891
					Koperasi Karyawan PT Bukit Asam Prima	0,01		
PT Bukit Asam Medika	Rumah Sakit, Klinik, dan Poliklinik Hospital, Clinic, and Polyclinic	Tanjung Agung, Sumatra Selatan South Sumatra	2014	Beroperasi Operating	PT Bukit Multi Investama	97,50	107.029	67.533
					PT Dana Bara Medika	2,50		
PT Satria Bahana Sarana	Jasa Penambangan dan Sewa Mining and Rental Services	Tanjung Agung, Sumatra Selatan South Sumatra	Diakuisisi tahun 2015 Acquired in 2015	Beroperasi Operating	PT Bukit Multi Investama	95,00	2.025.547	1.838.306
					PT Bukit Asam Kreatif	5,00		
PT Penajam Internasional Terminal	Pengusahaan Pelabuhan Port Management	Jakarta	Diakuisisi tahun 2015 Acquired in 2015	Beroperasi Operating	PT Pelabuhan Bukit Primwa	72,00	37.575	25.190
					Tasmindo	8,00		
					PT Patralog	20,00		
PT Bukit Energi Service Terpadu	Perdagangan, Jasa, Perbengkelan, Pembangunan, Perindustrian, dan Pengangkutan Trading, Services, Workshop, Development, Industry and Transportation	Jakarta	2015	Beroperasi Operating	PT Bukit Energi Investama	99,62	173.853	158.012
					Yayasan Bukit Asam	0,38		
PT Bukit Multi Properti	Real Estate dan Konstruksi Real Estate and Construction	Jakarta	2019	Beroperasi Operating	PT Bukit Multi Investama	99,90	47.389	20.538
					Yayasan Bukit Asam	0,10		

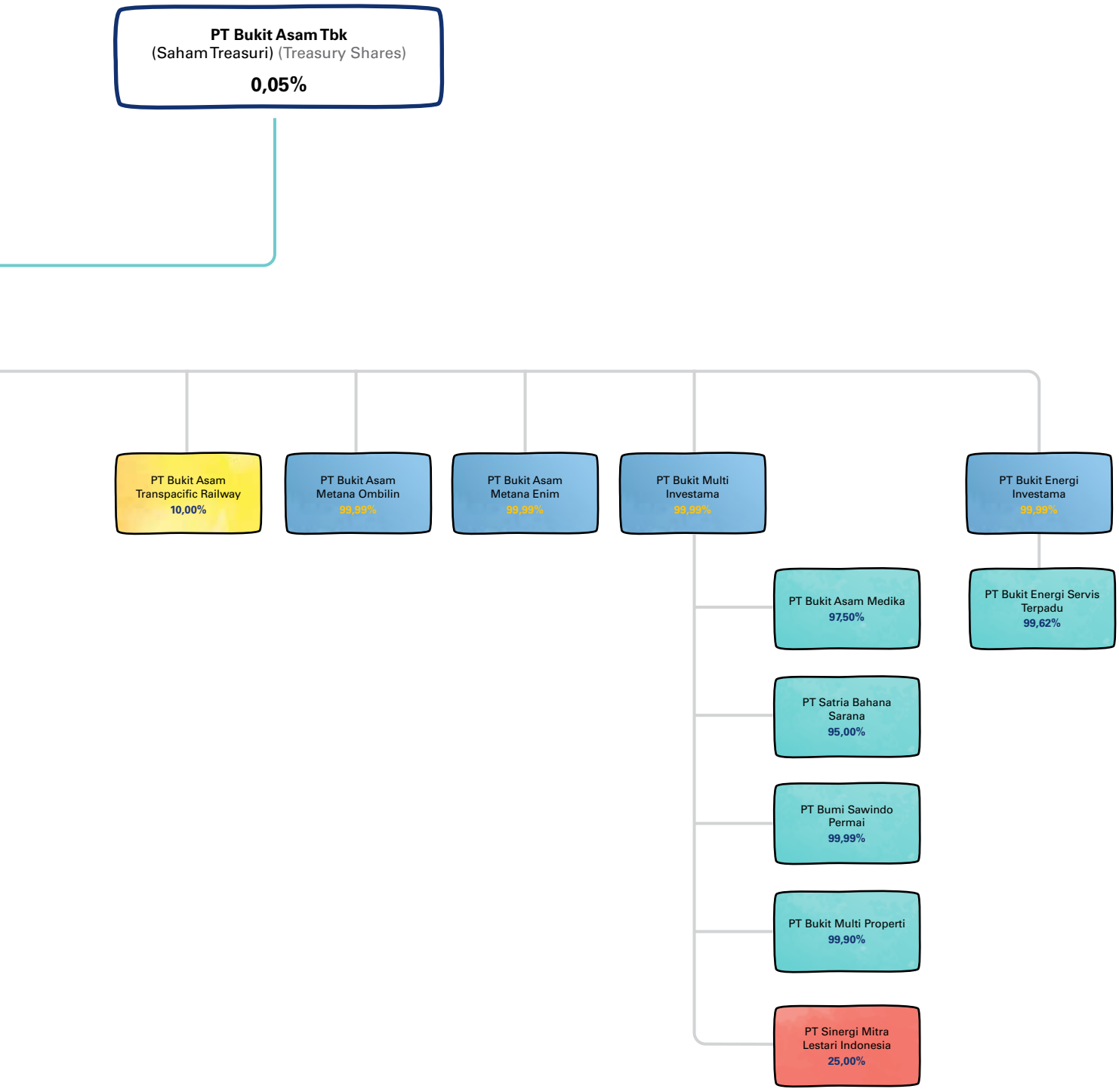
Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Date of Establishment	Status Operasi Operational Status	Struktur Kepemilikan Saham Shareholding Structure		Total Aset (dalam Rp Juta) Total Assets (in Rp million)	
					Pemegang Saham Shareholders	%	2024	2023
ENTITAS ASOSIASI ENTITY ASSOCIATION								
PT Sinergi Mitra Lestari Indonesia		Jakarta	Akuisisi tahun 2017 Acquired in 2017	Beroperasi Operating	PT Antam Resourcindo	25,00	468.518	64.604
					PT Bukit Multi Investama	25,00		
					PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	25,00		
					PT Timah Investasi Mineral)	25,00		
VENTURA BERSAMA JOINT VENTURE								
PT Bukit Pembangkit Innovative	Pembangkit Tenaga Listrik/ PLTU Electric Power Plant/ CFPP	Tanjung Enim, Sumatra Selatan South Sumatra	2006	Beroperasi Operating	PT Bukit Asam Tbk	59,75	5.390.309	5.314.354
					PT Pembangkitan Jawa Bali	29,15		
					PT Navigat Innovative Indonesia	11,10		
PT Huadian Bukit Asam Power	Pembangkit Tenaga Listrik/ PLTU Generation/ CFPP	Tanjung Enim, Sumatra Selatan South Sumatra	2011	Belum Beroperasi Not Yet Operating	PT Bukit Asam Tbk	45,00	37.096.385	34.049.583
					China Huadian Hongkong Ltd	55,00		
PT Bukit Asam Transpacific Railways	Transportasi Kereta Api Batu Bara Coal Railway Transportation	Jakarta	2008	Belum Beroperasi Not Yet Operating	PT Bukit Asam Tbk	10,00	112.621	112.685
					PT Rajawali Asia Resources	90,00		

*Total aset 31 Desember 2023 sudah diaudit dan total aset 31 Desember 2024 tidak diaudit
** Dalam proses likuidasi
*Total assets as of December 31, 2023 have been audited and total assets December 31, 2024 are unaudited
** In Liquidation process



Struktur Grup
Group Structure




PT Bukit Asam Tbk
(Saham Treasuri) (Treasury Shares)
0,05%
PT Bukit Asam Transpacific Railway
10,00%
PT Bukit Asam Metana Ombilin
99,99%
PT Bukit Asam Metana Enim
99,99%
PT Bukit Multi Investama
99,99%
PT Bukit Energi Investama
99,99%
PT Bukit Asam Medika
97,50%
PT Satria Bahana Sarana
95,00%
PT Bumi Sawindo Permai
99,99%
PT Bukit Multi Properti
99,90%
PT Sinergi Mitra Lestari Indonesia
25,00%
PT Bukit Energi Servis Terpadu
99,62%

Alamat Kantor Pusat, Cabang, Perwakilan, Entitas Anak, Entitas Ventura Bersama, dan Entitas Asosiasi

Addresses of Head Office, Branches, Representatives, Subsidiaries, Joint Ventures, and Associates

Kantor Pusat
Head Office

Jl. Parigi No. 1, Tanjung Enim
Sumatra Selatan, Indonesia 31716
Telepon : (0734) 451 096, 452 352
Phone
Fax : (0734) 451 095, 452 993
E-mail : corsec@ptba.co.id

Kantor Perwakilan Jakarta
Jakarta Representative Office

Menara Kadin Indonesia Lt. 15
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5,
Kav. 2-3 Jakarta, Indonesia 12950
Telepon : (021) 525 4014
Phone
Fax : (021) 525 4002

Pertambangan
Mining

Unit Pertambangan Tanjung Enim
Tanjung Enim Mining Unit
Jl. Parigi No. 1, Tanjung Enim 31716,
Sumatra Selatan
Telepon : (0734) 451 096, 452 352
Phone
Fax : (0734) 451 095, 452 993

Unit Pertambangan Ombilin
Ombilin Mining Unit
Jl. Saringan Sawahlunto,
Sumatra Barat
Telepon : (0754) 61 021
Phone
Fax : (0754) 61 402

Pelabuhan
Ports



Pelabuhan Tarahan
Tarahan Port
Jl. Soekarno Hatta Km.
15 Tarahan, Bandar Lampung
Telepon : (0721) 31 545, 31 686
Phone
Fax : (0721) 31 577

Dermaga Teluk Bayur
Teluk Bayur Barging Port
Jl. Tanjung Periuk No. 1
Teluk Bayur, Sumatra Barat
Telepon : (0751) 62 522, 63 522, 31 996
Phone
Fax : (0751) 63 533

Pelabuhan Kertapati
Kertapati Port
Jl. Stasiun Kereta Api Palembang,
Sumatra Selatan
Telepon : (0711) 512 617
Phone
Fax : (0711) 511-388

Pabrik Briket
Briquette Plant



Pabrik Briket Tanjung Enim
Tanjung Enim Briquette Plant
Jl. Tambang Banko Barat, Tanjung Enim,
Muara Enim Sumatra Selatan 31716
Telepon : (0734) 451 096, 452 352
Phone
Fax : (0734) 451 095, 452 993

Pabrik Briket Lampung
Lampung Briquette Plant
Jl. Raya Natar Km. 16
Natar Lampung Selatan
Telepon : (0721) 783 558
Phone
Fax : (0721) 774 266

Entitas Anak Langsung
Direct Subsidiaries



PT Batubara Bukit Kendi (BBK)
Jl. Jurang Parigi Dalam No. 5 Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan
Telepon : (0734) 453 038
Phone
Fax : (0734) 453 039

PT Bukit Asam Prima (BAP)
Menara Kadin Indonesia Lt. 26 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5794 4522
Phone

PT Bukit Asam Metana Ombilin (BAMO)
Menara Kadin Indonesia Lt. 15 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950
Telepon : (021) 525 4014
Phone
Fax : (021) 525 4002

PT Internasional Prima Coal (IPC)
Kantor Pusat
Head Office
Jl. Gunung Merapi No. 16 Kel. Jawa, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75122
Telepon : (0541) 736 401
Phone
Fax : (0541) 736 404

PT Bukit Asam Banko (BAB)
Jl. Parigi No. 1 Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan 31716
Telepon : (0734) 451 096
Phone
Fax : (0734) 451095

PT Bukit Multi Investama (BMI)
Menara Kadin Indonesia Lt. 9 Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950
Telepon : (021) 525 4014
Phone
Fax : (021) 525 4002

Kantor Perwakilan
Representative Office
Rajawali Place 27B Floor
Jl. HR Rasuna Said Kav . B/4 RT 003 RW 07 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan 12910
Telepon : (021) 5761669
Phone

PT Bukit Asam Metana Enim (BAME)
Menara Kadin Indonesia Lt. 15
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950
Telepon : (021) 525 4014
Phone
Fax : (021) 525 4002

PT Bukit Energi Investama (BEI)
Menara Kadin Indonesia Lt. 11 Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950
Telepon : (021) 525 4014
Phone
Fax : (021) 525 4002

Ventura Bersama
Joint Venture



PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI)
Surveyor Indonesia Lt. 17 Suite 1703, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta 12950
Telepon : (021) 5212 463
Phone
Fax : (021) 5210 725

PT Bukit Asam Transpacific Railways (BATR)
Rajawali Place, 30th Floor
Jl. HR Rasuna Said
Kav. B/4 Jakarta 12910

PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP)
DBS Bank Tower Lt. 23 Ciputra World 1, Jakarta Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940

Entitas Anak Tidak Langsung
Indirect Subsidiaries



PT Bukit Prima Bahari (BPB)
Menara Karya Lt. 19, Unit D Jl H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 1-2, Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi,
Jakarta Selatan
Telepon : (021) 576 1636
Phone

PT Pelabuhan Bukit Prima (PBP)
Gedung Terpadu Bukit Asam Coal Terminal (BACT) Lt. 4
Jl. Soekarno Hatta Km. 15 Tarahan Bandar Lampung
Telepon : (0721) 340 003
Phone

PT Penajam Internasional Terminal (PIT)
Gedung lt. 1 PT Bukit Asam Dermaga Kertapati
Jl. Stasiun Kereta Api, Palembang
wTelepon : (0711) 318 765
Phone

PT Bumi Sawindo Permai (BSP)
Jl Lintas Sumatera,
Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan 31355
Telepon : (0828) 8149 6102
Phone

PT Satria Bahana Sarana (SBS)
Jl. Jurang Parigi Dalam No. 05
Tanjung Enim Sumatra Selatan 31716
Telepon : (0734) 453 035
Phone
Fax : (0734) 453 039

PT Bukit Asam Medika (BAM)
Jl. Lingkar Tenis, Talang Jawa
Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan 31716
Telepon : 0823 7666 5703,
0821 7666 7373
Phone

RS Bukit Asam Medika
Jl. Raya Bukit Asam No. 118,
Tanjung Enim, Kec. Lawang Kidul,
Kab. Muara Enim Sumatera Selatan 31716
Hotline Emergency
0813 856 473 49
Customer Service
0812 781 521 00

PT Bukit Multi Properti (BMP)
Tempo Scan Tower Lt. 32 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan
Timur Jakarta Selatan 12950
Telepon : (0821) 2934 9300

Entitas Asosiasi
Associates



PT Sinergi Mitra Lestari Indonesia
Ged. Antam Office Park Tower B Lt. 5
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 1, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530
Telepon : (021) 296 333 18
Phone
Fax : (021) 296 333 19

Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham

Chronology of Share Issuance and/or Listing

Tanggal Pencatatan Listing Date	Aksi Korporasi Corporate Action	Nilai Nominal Saham Share Nominal Value	Harga Penawaran/ penerbitan Offering/ Issuance Price	Jumlah Saham yang Diterbitkan Number of Issued Shares	Komposisi Kepemilikan Saham Akhir Final Shares Ownership Composition
Pra Initial Public Offering (IPO)					**Pemerintah : 100%** **Government: 100%**
23 Desember 2002 December 23, 2002	Initial Public Offering (IPO) berbentuk Privatisasi di Bursa Efek Jakarta (sekarang BEI) Initial Public Offering in the form of privatization at the Jakarta Stock Exchange (now IDX)	500	450	346,5 juta saham Seri B milik Pemerintah dan 31,5 juta saham baru yang diterbitkan oleh Perusahaan. 346.5 million shares of Series B owned by Government and 31.5 million new shares issued by the Company	Pemerintah: 83,74% Publik: 16,26% Government: 83,74% Public: 16,26%
	Pada IPO ini, Perusahaan turut menerbitkan Waran Seri I yang diberikan kepada pemegang saham, kecuali Negara Republik Indonesia, dilaksanakan hingga 22 Desember 2005 In the IPO, the Company also issued Series I warrants granted to the shareholders, except The Republic of Indonesia, which can be exercised until December 22, 2005	500	450	173,25 juta 173.25 million	Pemerintah: 83,74% Publik: 16,26% Government: 83,74% Public: 16,26%
25 Juni 2004 June 25, 2004	Divestasi Lanjutan di mana Pemerintah menawarkan sahamnya sejumlah 286,9 juta tanpa adanya penerbitan saham baru Further divestment in which the Government offered 286.9 million of its shares without any issuance of new shares	500		286,9 Juta 286.9 million	Pemerintah: 70,1% Publik: 29,68% Government: 83,74% Public: 16,26%
23 Desember 2005 December 23, 2005	Masa Konversi Waran Seri I Berakhir End of Series I Warrants Conversion Period	-	-	-	Pemerintah: 65,02% Publik: 27,49% Government: 65,02% Public: 27,49%
31 Desember 2005 -31 Desember 2010 December 31, 2005 – December 31, 2010	Tidak ada aksi korporasi berupa penawaran saham maupun penerbitan saham baru There were no corporate actions, no share offerings and issuance of new shares	-	-	-	Pemerintah: 65,02% Publik: 34,98% Government: 65,02% Public: 27,49%
2012-2015	Pembelian Kembali Saham Perusahaan (2012, 2013, dan 2015) Company Shares Buyback (2012, 2013, and 2015)	-	-	980.283.500 (saham treasuri) 980.283.500 (treasury shares)	Pemerintah (termasuk Seri A Dwiwarna) 65,02% PT Bukit Asam Tbk 8,51% Publik: 26,47% Government (including Series A Dwiwarna): 65,02% PT Bukit Asam Tbk: 8,51% Public: 26,47%

Tanggal Pencatatan Listing Date	**Aksi Korporasi** Corporate Action	**Nilai Nominal Saham** Share Nominal Value	**Harga Penawaran/ penerbitan** Offering/ Issuance Price	**Jumlah Saham yang Diterbitkan** Number of Issued Shares	**Komposisi Kepemilikan Saham Akhir** Final Shares Ownership Composition
14 Desember 2017 December 14, 2017	Pemecahan Nilai Nominal dan Pengalihan Saham Seri B Pemerintah ke PT Inalum (Persero) Stock Split of Shares Nominal Value and Transfer of Government Series B Shares to PT Inalum (Persero)	100	-	11.520.659.250	Pemerintah: 5 saham Seri A PT Inalum (Persero): 65,02% Publik: 34,98% Government: 5 shares of Series A PT Inalum: 65,02% Public: 34,98%
2019	Pengalihan Saham Treasuri Perseroan Company's Treasury Shares Transfer	-	-	649.987.500 (saham treasuri) 649.987.500 (treasury shares)	Pemerintah: 5 Seri A Dwiwarna PT Bukit Asam Tbk: 2,87% Indonesia Asahan Aluminium (Persero): 65,93% Publik: 31,2% Government: 5 shares series A Dwiwarna PT Bukit Asam Tbk: 2,87% Inalum: 65,93% Public: 31,2%
2020	Pembelian Kembali Saham Shares Buyback	-	-	6.302.000 (saham treasuri) 6.302.000 (treasury)	Pemerintah: 5 Seri A Dwiwarna PT Bukit Asam Tbk: 2,92% PT Indonesia Asahan Aluminium : 65,93% Publik: 31,15% Government: 5 shares series A Dwiwarna PT Bukit Asam Tbk: 2,87% Inalum: 65,93% Public: 31,2%
2021	Pengalihan Saham Treasuri Perseroan Company's Treasury Shares Transfer	-	-	303.148.100 (saham treasuri) 303.148.000 (treasury shares)	Pemerintah: 5 Seri A Dwiwarna PT Bukit Asam Tbk: 0,29% PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero): 65,93% Publik: 33,78% Government: 5 Series A Dwiwarna PT Bukit Asam Tbk: 0.29% PT Inalum (Persero): 65.93% Public: 33.78%
2024	Pengalihan Saham Treasuri Perseroan Company's Treasury Shares Transfer	-	-	27.147.900 (saham treasuri) 27.147.900 (treasury shares)	Pemerintah: 5 Seri A Dwiwarna PT Bukit Asam Tbk: 0,05% PT Mineral Industri Indonesia (Persero): 65,93% Publik: 34,02% Government: 5 Series A Dwiwarna PT Bukit Asam Tbk: 0.05% PT Mineral Industri Indonesia (Persero): 65,93% Public: 34,02%

Kronologis Penerbitan Dan/Atau Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Other Securities Issuance and/or Listing

Hingga 31 Desember 2024, PTBA tidak menerbitkan efek seperti obligasi, sukuk, obligasi konversi atau efek lainnya di bursa efek, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Dengan demikian, tidak terdapat laporan kronologis pencatatan efek yang dapat disampaikan pada laporan ini.

Until December 31, 2024, PTBA did not issue securities such as bonds, sharia bonds, convertible bonds, or other securities on the stock exchange, both in Indonesia and abroad. Thus, there is no chronological report of securities listing submitted in this report.

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Public Accountant and Public Accountant Firm

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia)

Nama Akuntan Publik | Public Accountant
Dewi Novita Sari, S.E.,CPA.

Alamat | Address
Plaza Asia, Level 10, Jl. Jenderal Sudirman No.59, RT.5/RW.3,
Senayan, Jakarta, South Jakarta City, Jakarta 12190
Situs Web : www.rsm.global/indonesia

Jasa yang Diberikan | Service Provided
1. General Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Kelompok Usaha PTBA.
2. Audit Laporan Keuangan Bukit Asam Induk (tanpa laporan auditor tersendiri).
3. Prosedur Assurans berdasarkan Standar Perikatan Assurans (SPA) 3000 atas Laporan Pencapaian KPI Manajemen & Tingkat Kesehatan Perusahaan.
4. General Audit Laporan Keuangan TJSL.
5. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern berdasarkan PSA-62.
1. General Audit of PTBA Business Group Consolidated Financial Statements.
2. Audit of Parent PTBA Financial Statements (without a separate auditor's report)
3. Assurance procedure based on Assurance Engagement Standards 3000 on Management KPI Achievement Reports & Company Soundness Level.
4. General Audit of CSR Financial Statements.
5. Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control based on PSA-62

Periode Penugasan | Assignment Period
Tahun Buku 2024
2024 Financial Year

Biaya | Fee
Rp4.932.000.000

Lembaga Dan/Atau Profesi Penunjang
Supporting Institutions and/or Professionals

Bursa Perdagangan Saham dan Efek
Stock and Securities Trading Exchanges

PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange

Alamat | Address
Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190,
Indonesia Call Center: 0800-100-9000
Email: callcenter@idx.co.id
Situs Web | Website: www.idx.co.id

Jasa yang Diberikan | Service Provided
Perantara perdagangan efek Perusahaan
Company securities trading intermediary

Periode Penugasan | Assignment Period
Sejak IPO - sekarang
Since IPO - present

Biaya | Fee
Rp277.500.000,- (termasuk PPN)
Rp277.500.000,- (including VAT)

Kustodian
Custodian

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange

Alamat | Address
Indonesian Stock Exchange Building, 1st Tower,
Floor 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Indonesia Telp.:
(021) 5152855
Fax : (021) 52991199
Situs Web : helpdesk@ksei.co.id www.ksei.co.id

Jasa yang Diberikan | Service Provided
Pengelolaan administrasi efek
Securities administration management

Periode Penugasan | Assignment Period
Sejak IPO - sekarang
Since IPO – present

Biaya | Fee
Rp10.000.000,-

Pemeringkat Efek
Securities Rating

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Alamat | Address
Equity Tower Lt. 30 Sudirman Central Business District, Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Jasa yang Diberikan | Service Provided
Jasa Pemeringkatan Perusahaan (*Corporate Rating*)
Corporate Rating

Periode Penugasan | Assignment Period
Tahun Buku 2024
2024 Fiscal Year 2024 Fiscal Year

Biaya | Fee
Rp175.000.000,- (tidak termasuk pajak)
Rp175.000.000,- (exclude taxs)

Biro Administrasi Efek
Share Registrar

PT Datindo Entrycom

Alamat | Address
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220 Telp. : (021) 3508077
Fax. : (021) 3508078
Situs Web : www.datindo.com
Email : corporatesecretary@datindo.com

Jasa yang Diberikan | Service Provided
Jasa yang Diberikan : Melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek antara lain mengelola pencatatan kepemilikan Saham Emiten dalam Daftar Pemegang Saham PT Bukit Asam Tbk
Carry out registration of Securities ownership and distribution of rights related to Securities, including managing the registration of Issuer Share ownership in the Register of Shareholders of PT Bukit Asam Tbk

Periode Penugasan | Assignment Period
Sejak Emiten melakukan penawaran umum perdana saham yakni pada Tahun 2002 berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Akta No. 51 Tanggal 31 Oktober 2002 dibuat di hadapan Notaris Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H., M.KN, di Jakarta s.d sekarang
Since the Issuer made an initial public offering of shares in 2002, based on the Share Administration Management Agreement, Deed No. 51 dated October 31, 2002, made before Notary Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H., M.KN, in Jakarta until now

Biaya | Fee
Rp44.440.000,- (termasuk PPN)
Rp44.440.000,- (including VAT)

Konsultan Hukum
Legal Consultant

Hardiansyah & Partners

Alamat | Address
Jalan Pramuka IV Pasar II Muara Enim Sumatera Selatan

Jasa yang Diberikan | Service Provided
1. Memberikan pendapat hukum (legal opinion);
2. Mendampingi Direksi, Karyawan dan Pensiunan PTBA apabila ada permasalahan hukum dari penegak hukum sehubungan dengan pelaksanaan tugas perusahaan;
3. Membuat somasi ataupun jawaban somasi atas nama PTBA;
4. Melakukan komunikasi, koordinasi, maupun konsolidasi dengan stakeholder, organisasi masyarakat, maupun instansi yang membidangi penegakan hukum dan pengawasan;
5. Konsultasi secara lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh PTBA;
6. Melakukan penanganan perkara baik di dalam dan di luar pengadilan apabila diperlukan oleh perseroan.

1. Providing legal opinions;
2. Accompanying the Board of Directors, Employees and Pensioners of PTBA on legal problems from law enforcement in relation to the implementation of the company's duties;
3. Making summonses or responses to summonses on behalf of PTBA;
4. Communicating, coordinating, or consolidating with stakeholders, community organizations, or agencies in charge of law enforcement and supervision;
5. Consulting verbally or in writing delivered by PTBA;
6. Handling cases both inside and outside the court if required by the company.

Periode Penugasan | Assignment Period
01 April 2024 sd 31 Maret 2025 (12 bulan)
April 1, 2024-March 31, 2025 (12 months)

Biaya | Fee
Nilai Pekerjaan: | Work Fee
Rp. 345.000.000,-
Success Fee Rp. 75.000.000,-

Ian Iskandar & Partner

Alamat | Address
Grand Slipi Tower Lantai 42 GH Jl S Parman Kav 2-3 Jakarta Barat

Jasa yang Diberikan | Service Provided
1. Melakukan pembicaraan mediasi, negosiasi, dan perdamaian dengan Pihak Kementerian Hukum dan HAM RI dan Pihak terkait lainnya;
2. Mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri atau Gugatan Sengketa TUN hingga kasasi Mahkamah Agung RI;
3. Memberikan laporan hasil penanganan perkara (progress report) perkara.

1. Conduct mediation, negotiation, and peace talks with the Indonesian Ministry of Law and Human Rights and other related parties;
2. File a civil lawsuit at the District Court or a State Administrative Dispute Lawsuit up to the cassation of the Indonesian Supreme Court;
3. Provide a report on the results of handling the case (progress report).

Periode Penugasan | Assignment Period
12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
12 (twelve) months from the signing of the Cooperation Agreement.

Biaya | Fee
Rp500.000.000,-

ABMS Law Office

Alamat | Address
World Capital Tower, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1 Lantai 17, unit 12, Kuningan, East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12950

Jasa yang Diberikan | Service Provided
1. Melakukan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan terkait dengan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Fajar Firmansyah dengan nomor Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 152/G/2022/PTUN-PLG tanggal 26 April 2024 atau Putusan Kasasi Nomor 281K/TUN/2023 tanggal 4 Oktober 2024;
2. Memberikan konsultasi hukum baik secara lisan maupun tertulis sehubungan dengan penyelesaian Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh Perusahaan.

1. Resolving the problems faced by the Company related to the Judicial Review filed by Fajar Firmansyah with the Deed of Judicial Review Application Number 152/G/2022/PTUN-PLG dated April 26, 2024 or Cassation Decision Number 281K/TUN/2023 dated October 4, 2024;
2. Providing legal consultations both verbally and in writing in connection with the resolution of Legal Problems faced by the Company.

Periode Penugasan | Assignment Period
17 Mei 2024 sampai dengan keluarnya Putusan Peninjauan Kembali.
May 17, 2024, until the issuance of the Review Decision.

Biaya | Fee
Rp. 4.500.000.000,-

Soesilo Aribowo dan Rekan

Alamat | Address
Grha DeKA Jalan TB. Simatupang Kav. 8, Kebagusan, Jakarta Selatan

Jasa yang Diberikan | Service Provided
1. Membuat, menandatangani, dan mengajukan Kontra Memori Kasasi dan/atau Tambahan Kontra Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang atas memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Melengkapi, membuat, menandatangani, mengirimkan, menyerahkan dan/atau menerima serta memenuhi segala persyaratan formal apapun, terutama dalam bentuk surat, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan pelaksanaannya, termasuk dalam hal menyerahkan catatan, berkas, pendapat hukum, affidavit, amicus curiae, serta dokumen yang dianggap perlu berkaitan sebagaimana maksud di atas;
3. Membuat, menandatangani, dan mengirimkan segala bentuk permohonan, permohonan pembukaan blokir seluruh aset, akta, dan surat lainnya yang penting dan berguna bagi Pemberi Kuasa;
4. Meminta putusan dan penetapan-penetapan, menerima dan/atau menolak putusan/penetapan seluruhnya atau sebagian, menerima, mengambil, meminta salinan putusan dan/atau penetapan;
5. Melakukan tindakan hukum lain yang berguna bagi kepentingan hukum para Termohon Kasasi.

1. Create, sign, and submit a Counter Cassation Memorandum and/or Additional Counter Cassation Memorandum to the Supreme Court of the Republic of Indonesia through the Corruption Crime Court at the Class IA Special District Court of Palembang for the cassation memorandum submitted by the Public Prosecutor;
2. Complete, create, sign, send, submit and/or receive and fulfill all formal requirements, especially in the form of letters, in accordance with the Criminal Procedure Code (KUHAP) and its implementing provisions, including in terms of submitting notes, files, legal opinions, affidavits, amicus curiae, and documents deemed necessary related to the above intent;
3. Create, sign, and send all forms of applications, requests to unblock all assets, deeds, and other letters that are important and useful for the Grantor of Power of Attorney;
4. Request decisions and decisions, accept and/or reject decisions/decisions in whole or in part, receive, take, request copies of decisions and/or decisions;
5. Take other legal actions that are useful for the legal interests of the Respondents of the Cassation.

Periode Penugasan | Assignment Period
12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
12 (twelve) months from the signing of the Cooperation Agreement.

Biaya | Fee
Rp7.000.000.000,-

ABMS Law Office

Alamat | Address
World Capital Tower, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1 Lantai 17, unit 12, Kuningan, East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12950

Jasa yang Diberikan | Service Provided
Pekerjaan Jasa Konsultan Hukum Retainer, sebagai berikut :
1. Memberikan konsultasi hukum baik secara lisan maupun tertulis sehubungan dengan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perusahaan.
2. Membuat dan memberikan tanggapan terhadap somasi/surat peringatan kepada atau dari pihak lain.
3. Memberikan bantuan hukum berupa penanganan dan penyelesaian kasus-kasus hukum litigasi baik di Pengadilan maupun Arbitrase dengan maksimal penanganan perkara dalam 1 (satu) tahun adalah 3 (tiga) perkara untuk satu tingkat pengadilan.

Legal Consultant Services Retainer Work, as follows:
1. Providing legal consultation both verbally and in writing in regard to the resolution of legal problems faced by the Company.
2. Making and providing responses to summonses/warning letters to or from other parties.
3. Providing legal assistance in the form of handling and resolving litigation legal cases both in Court and Arbitration with a maximum of 3 (three) cases handled in 1 (one) year for one level of court

Periode Penugasan | Assignment Period
12 Bulan sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2025.
12 months since April 1, 2024 – March 31, 2025

Biaya | Fee
Nilai Pekerjaan: | Work Fee
Rp1.500.000.000,-

Hendrik & Siregar Djojonegoro (WHSD) Law Office

Alamat | Address
Prosperity Tower 16th Floor Unit E, District 8 SCBD Lot.28 Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta, 12190.

Jasa yang Diberikan | Service Provided
Pekerjaan Jasa Konsultan Hukum meliputi Proyek PLTU Sumsel 8 ("Proyek") dan Proyek Loan Refinancing PT HBAP, sebagai berikut :
1. Memberikan advis hukum yang diperlukan sehubungan dengan Proyek
2. Memberikan Kajian hukum yang diperlukan sehubungan dengan Proyek
3. Mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan poin 1 dan 2 ayat ini.
4. Mempersiapkan, melakukan review dan/atau revisi atas dokumentasi hukum yang diperlukan terkait dengan Proyek
5. Mendampingi dalam pertemuan dengan pihak lain sepanjang terkait dengan aspek hukum atas dasar permintaan Pihak Pertama
6. Melakukan review dan finalisasi atas draft loan financing agreement, shareholders support agreement dan dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan dengan PTBA selaku pemegang saham dalam PT HBAP ("Dokumen Transaksi")
7. Memberikan advis hukum yang diperlukan sehubungan dengan Dokumen Transaksi
8. Mendampingi dalam proses negosiasi Dokumen Transaksi

Legal Consultant Services work includes the Sumsel 8 PLTU Project ("Project") and the PT HBAP Loan Refinancing Project, as follows:
1. Provide legal advice required in connection with the Project
2. Provide legal studies required in connection with the Project
3. Study documents related to numbers 1 and 2 of this paragraph.
4. Prepare, review and/or revise legal documentation required in connection with the Project
5. Accompany in meetings with other parties srelated to legal aspects based on the request of the First Party
6. Review and finalize the draft loan financing agreement, shareholders support agreement and other documents related to PTBA as a shareholder in PT HBAP ("Transaction Document")
7. Provide legal advice required in connection with the Transaction Document
8. Accompany in the negotiation process of the Transaction Document

Periode Penugasan | Assignment Period
12 (Dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2025.
12 Months since February 28, 2024-February 27, 2025

Biaya | Fee
Nilai Pekerjaan: | Work Fee
Rp3.000.000.000,-

Notaris
Notary

Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Alamat | Address
Jl. Madrasah Kompleks Taman Gandaria Kav. 11A, Kelurahan Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan 12420 Telp. (021) 29125500 Fax. (021) 29125600

Jasa yang Diberikan | Service Provided
Pembuatan akta-akta perusahaan dan pembuatan akta-akta terkait aksi korporasi dan RUPS.
Preparing company deeds and those related to corporate actions and GMS

Periode Penugasan | Assignment Period
RUPS Tahun Buku 2023
2023 Fiscal Year

Biaya | Fee
Rp38.850.000,-

Kantor Notaris & PPAT Agus Riyanto, S.H., M.Kn

Alamat | Address
Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II PS. II, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Jasa yang Diberikan | Service Provided
1. Memberikan pendapat dan arahan yang sistematis dan komprehensif terkait dengan proses pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah pada aset milik PTBA yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim;
2. Menjaga dan menjalin hubungan baik untuk dan atas nama PTBA dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan proses sertifikasi hak atas tanah;
3. Melakukan review dan kompilasi data serta dokumen persyaratan yang digunakan dalam proses pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah;
4. Melakukan pembuatan surat, dokumen pendukung serta dokumen hukum yang tidak terbatas pada akta Notaris & PPAT sebagai pemenuhan persyaratan dan melakukan legalisir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi hak atas tanah milik PTBA;
5. Melakukan koordinasi dengan secara aktif dengan PTBA serta verifikasi berkas secara menyeluruh dan memastikan kejelasan bebas bersengketa atas lahan-lahan yang disertifikatkan;
6. Mewakili PTBA dalam proses sertifikasi hak atas tanah dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
7. Menjaga kerahasiaan seluruh data, dokumen dan informasi yang berasal dari PTBA

1. Provide systematic and comprehensive opinions and directions related to the process of implementing land rights certification on PTBA assets located in Muara Enim Regency;
2. Maintain and establish good relations for and on behalf of PTBA by coordinating with related agencies in implementing the land rights certification process;
3. Review and compile data and required documents used in the process of implementing land rights certification;
4. Prepare letters, supporting documents and legal documents not limited to Notary & PPAT deeds as fulfillment of requirements and legalize required documents needed in the process of certifying land rights owned by PTBA;
5. Actively coordinate with PTBA and verify files thoroughly and ensure clarity and freedom from disputes over certified lands;
6. Represent PTBA in the land rights certification process by considering applicable regulations and provisions; and
7. Maintain the confidentiality of all data, documents, and information originating from PTBA

Periode Penugasan | Assignment Period
01 Oktober 2024 – 31 Maret 2025
October 1, 2024-March 31, 2025

Biaya | Fee
Rp415.200.000,-

Kantor Notaris & PPAT Aflora Vetri, S.H., M.Kn

Alamat | Address
Jalan Khatib Sulaiman, Desa Santur, Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat

Jasa yang Diberikan | Service Provided
1. Memberikan pendapat dan arahan yang sistematis dan komprehensif terkait dengan proses pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah pada aset milik PTBA yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim;
2. Menjaga dan menjalin hubungan baik untuk dan atas nama PTBA dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan proses sertifikasi hak atas tanah;
3. Melakukan review dan kompilasi data serta dokumen persyaratan yang digunakan dalam proses pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah;
4. Melakukan pembuatan surat, dokumen pendukug serta dokumen hukum yang tidak terbatas pada akta Notaris & PPAT sebagai pemenuhan persyaratan dan melakukan legalisir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi hak atas tanah milik PTBA;
5. Melakukan koordinasi dengan secara aktif dengan PTBA serta verifikasi berkas secara menyelurh dan memastikan kejelasan bebas bersengketa atas lahan-lahan yang disertifikatkan;
6. Mewakili PTBA dalam proses sertifikasi hak atas tanah dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
7. Menjaga kerahasiaan seluruh data, dokumen dan informasi yang berasal dari PTBA

1. Provide systematic and comprehensive opinions and directions related to the process of implementing land rights certification on PTBA assets located in Muara Enim Regency;
2. Maintain and establish good relations for and on behalf of PTBA by coordinating with related agencies in the implementation of the land rights certification process;
3. Review and compile data and required documents used in the process of implementing land rights certification;
4. Prepare letters, supporting documents, and legal documents not limited to Notary & PPAT deeds as fulfillment of requirements and legalize required documents needed in the process of certifying land rights owned by PTBA;
5. Actively coordinate with PTBA and verify files thoroughly and ensure clarity and freedom from disputes over certified lands;
6. Represent PTBA in the land rights certification process by paying attention to applicable regulations and provisions; and
7. Maintain the confidentiality of all data, documents and information originating from PTBA

Periode Penugasan | Assignment Period
12 Agustus 2024 – 31 Desember 2025
August 12, 2024-December 31, 2025

Biaya | Fee
Rp728.000.000,-

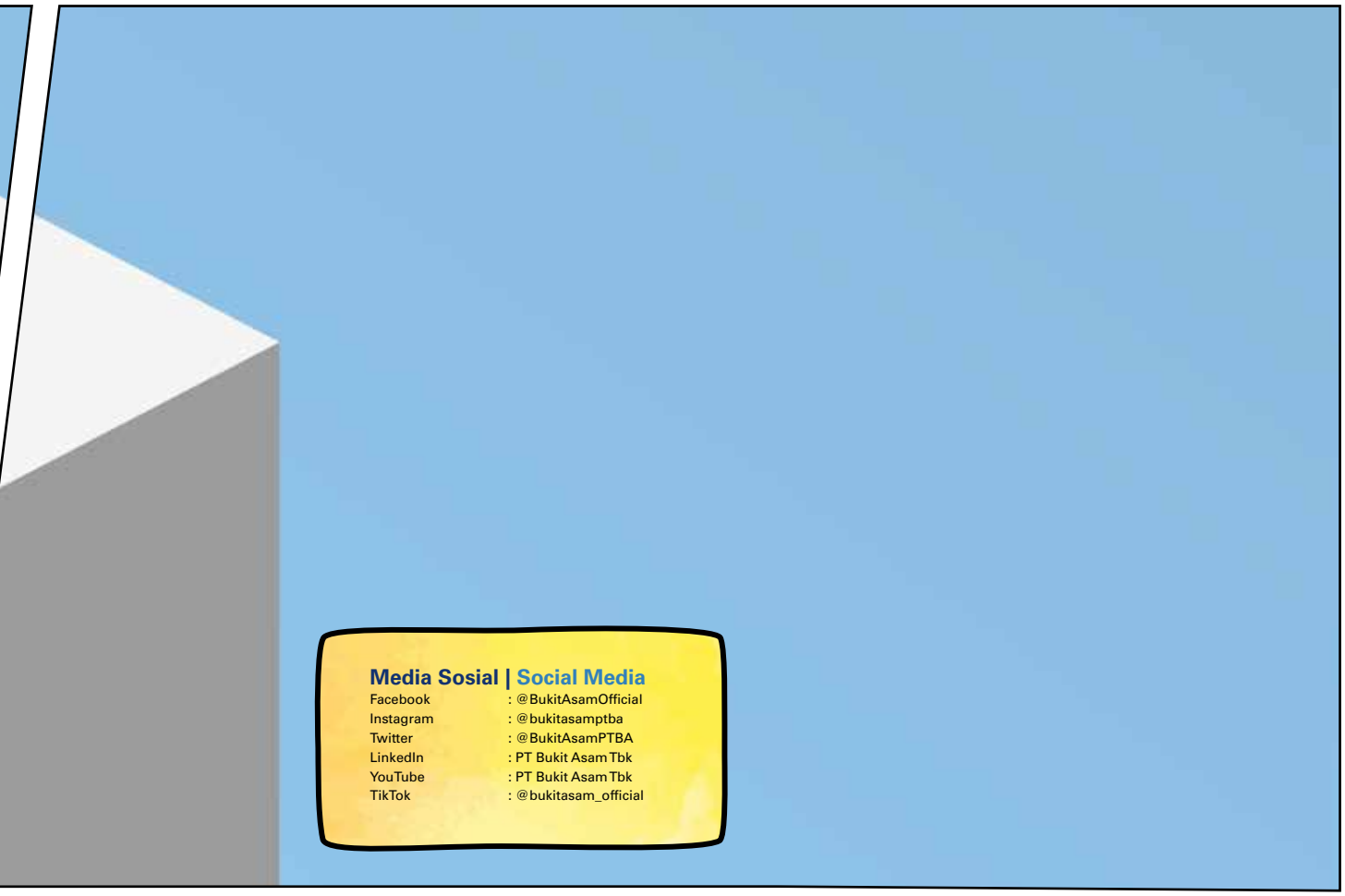
Informasi Pada Situs Web Perusahaan

Information on the Company Website



PTBA memiliki situs web resmi sebagai salah satu sarana dalam memenuhi keterbukaan terhadap publik yang menyajikan informasi secara komunikatif dan ter-update dengan alamat www.ptba.co.id. Situs web ini merupakan portal resmi Perusahaan yang dapat diakses secara terbuka, kapan saja, dan di mana saja, serta mudah dan sederhana, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif, akurat dan aktual tentang Perusahaan kepada khalayak luas. Situs web resmi Perusahaan yang disajikan dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, juga telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.4/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, yang mewajibkan menyampaikan informasi mengenai, antara lain:

PTBA has an official website as a means to meet public transparency, by presenting information in a communicative and updated manner at the address www. ptba.co.id. This website is the Company's official portal that can be accessed openly with easy and simple navigation to provide comprehensive, accurate, and up-to-date information about the Company to a wider audience. The official website is presented in two languages, Indonesian and English, and is already in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.4/2015 concerning Issuer or Public Company Websites, which requires providing information regarding, among others:



1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan; dan
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Semua informasi yang disajikan dalam *website* Perusahaan senantiasa diperbaharui secara berkala untuk memberikan informasi terbaru bagi segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum. Perusahaan juga memiliki akun media sosial sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan, di antaranya Facebook, Instagram, X, LinkedIn, TikTok, dan Youtube.

1. General Information of Issuers or Public Companies;
2. Information for Investors;
3. Corporate Governance Information; and
4. Corporate Social Responsibility Information.

All information presented on the Company website is regularly updated to provide the latest information for all stakeholders and general public. The Company also manages social media accounts as part of information disclosure and communication to all stakeholders, including Facebook, Instagram, X, LinkedIn, TikTok, and Youtube.



Tentang Kami
About Us

- Profil Perusahaan
- Organisasi
- Sambutan Dirut
- Penghargaan
- Company Profile
- Organization
- Greetings from the President Director
- Awards



Bisnis Kami
Our Business

- Batu Bara
- Pengembangan Bisnis
- Coal
- Business Development



Tata Kelola
Governance

- Tata Kelola
- Audit Internal
- Komite di Bawah Dewan Komisaris
- Sekretaris Perusahaan
- Manajemen Risiko
- Sistem Manajemen Perusahaan
- Sistem Pelaporan Pelanggaran
- Profesi Penunjang
- Kode Etik Perusahaan
- Kebijakan Gratifikasi
- Mekanisme Pengaduan
- Pengelolaan Benturan Kepentingan
- Governance
- Internal Audit
- Committees under the Board of Commissioners
- Corporate Secretary
- Risk Management
- Enterprise Management System
- Violation Reporting System
- Supporting Profession
- Company Code of Ethics
- Gratuity Policy
- Complaint Mechanism
- Management of Conflicts of Interest



ESG

- ESG 2023
- Kinerja Lingkungan
- Kinerja Sosial
- Kinerja Ekonomi & Tata Kelola
- Environmental Performance
- Social Performance
- Economic Performance & Governance



Laporan
Report

- Laporan Audit Keuangan
- Laporan Keuangan Triwulan
- Ikhtisar Keuangan
- Laporan Tahunan
- Laporan Keberlanjutan
- Laporan TJSL/ PKBL
- Presentasi Perusahaan
- Financial Audit Report
- Quarterly Financial Report
- Financial Overview
- Annual Report
- Sustainability Report
- TJSL/PKBL Report
- Company Presentation



Berita
News

- Berita
- Berita CSR & Lingkungan
- Siaran Pers
- Pengumuman
- Konferensi Pers
- Majalah
- News
- CSR & Environment News
- Pers Release
- Announcement
- Press Conference
- Magazine



Hubungan Investor
Investor Relations

- Informasi Saham
- Keterbukaan Informasi
- Dividen
- Daftar Pemegang Saham
- Rapat Umum Pemegang Saham
- Stock Information
- Disclosure of Information
- Dividend
- List of Shareholders
- General Meeting of Shareholders



SDM
HR

- Karir
- Bukit Asam *Learning Center*
- Bukit Asam *Assessment Center*
- Career
- Bukit Asam Learning Center
- Bukit Asam Assessment Center

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Pejabat Eksekutif

Education and/or Training of Board of Commisioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Executive

Berikut informasi tentang program peningkatan kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan dan Pejabat Eksekutif, di sepanjang tahun 2024.

The following is information about the competency improvement program for the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit, throughout 2024.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Dewan Komisaris Board of Commissioner				
Prof. DR. Ir. Irwandy Arif M.Sc. Komisaris Utama President Commissioner	Pelatihan Training	Ethical Foundations : Understanding the Significance of Whistleblowing bersama KPMG	2 Februari 2024 February 2, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Fraud Management : Mitigating Fraud Risk in Corporate Environment	15 Maret 2024 March 15, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	30 April 2024 April 30, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Risk Mitigation in Procurement	21 Juni 2024 June 21, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Integrated Corporate Governance in Legal Aspect	12 Juli 2024 July 12, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	A Comprehensive Guide to Indonesia PDP Law Implementation for the Mining Industry	9 Agustus 2024 August 9, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pelatihan Penyusunan Rencana Darurat Tahap Kedua Second Phase Emergency Planning Training	14 Agustus 2024 August 14, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pencegahan Korupsi dan Kaitannya dengan GRC Corruption Prevention and Its Relation to GRC	10 Oktober 2024 October 10, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Project Made Simple with Risk Management	11 November 2024 November 11, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pelatihan dan Uji Sertifikasi GRC tingkat Utama (GRCE) GRC Primary Level Certification (GRCE) Training and Test	25 November 2024 November 25, 2024	Strategic Development Group
	Pelatihan Training	Membangun Budaya Risk Awareness di Tempat Kerja Building a Risk Awareness Culture in the Workplace	11 Desember 2024 December 11, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Workshop Eksekutif: ESG and Risk Management for Sustainable Growth	13 Desember 2024 December 13, 2024	PTBA

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Marsda TNI (Purn) Andi Pahril Pawi, S.Sos/ Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan Training	Ethical Foundations : Understanding the Significance of Whistleblowing with KPMG	2 Februari 2024 February 2, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Fraud Management : Mitigating Fraud Risk in Corporate Environment	15 Maret 2024 March 15, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	30 April 2024 April 30, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Risk Mitigation in Procurement	21 Juni 2024 June 21, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pelatihan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan) Tahap Pertama First Phase of Contingency Plan Preparation Training	3 Juli 2024 July 3, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Integrated Corporate Governance in Legal Aspect	12 Juli 2024 July 12, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	A Comprehensive Guide to Indonesia PDP Law Implementation for the Mining Industry	9 Agustus 2024 August 9, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pencegahan Korupsi dan Kaitannya dengan GRC Corruption Prevention and Its Relation to GRC	10 Oktober 2024 October 10, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Project Made Simple with Risk Management	11 November 2024 November 11, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pelatihan dan Uji Sertifikasi GRC tingkat Utama (GRCE) GRC Primary Level Certification (GRCE) Training and Test	25 November 2024 November 25, 2024	Strategic Development Group
	Pelatihan Training	SPI : Organ Pengelola Risiko : Tantangan & realita dalam mencapai kinerja optimal Perusahaan SPI: Risk Management Organ: Challenges and realities in achieving optimal company performance	28-29 November 2024 November 28-29, 2024	FKSPI
	Pelatihan Training	Membangun Budaya Risk Awareness di Tempat Kerja Building a Risk Awareness Culture in the Workplace	11 Desember 2024 December 11, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Workshop Eksekutif: ESG and Risk Management for Sustainable Growth	13 Desember 2024 December 13, 2024	PTBA
Ir. E. Piterdono Hz, S.E., M.M. Komisaris Commissioner	Pelatihan Training	Ethical Foundations : Understanding the Significance of Whistleblowing with KPMG	2 Februari 2024 February 2, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Fraud Management : Mitigating Fraud Risk in Corporate Environment	15 Maret 2024 March 15, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	30 April 2024 April 30, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Risk Mitigation in Procurement	21 Juni 2024 June 21, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pelatihan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan) Tahap Pertama First Phase of Contingency Plan Preparation Training	3 Juli 2024 July 3, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	A Comprehensive Guide to Indonesia PDP Law Implementation for the Mining Industry	9 Agustus 2024 August 9, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pelatihan Penyusunan Rencana Darurat Tahap Kedua Second Phase Emergency Planning Training	14 Agustus 2024 August 14, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pencegahan Korupsi dan Kaitannya dengan GRC Corruption Prevention and Its Relation to GRC	10 Oktober 2024 October 10, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Project Made Simple with Risk Management	11 November 2024 November 11, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pelatihan dan Uji Sertifikasi GRC tingkat Utama (GRCE) GRC Primary Level Certification (GRCE) Training and Test	25 November 2024 November 25, 2024	Strategic Development Group
	Pelatihan Training	Membangun Budaya Risk Awareness di Tempat Kerja Building a Risk Awareness Culture in the Workplace	11 Desember 2024 December 11, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Workshop Eksekutif: ESG and Risk Management for Sustainable Growth	13 Desember 2024 December 13, 2024	PTBA

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Irjen. Pol. (Purn) Drs. Carlo Brix Tewu/ Komisaris Commissioner	Pelatihan Training	Fraud Management : Mitigating Fraud Risk in Corporate Environment	15 Maret 2024 March 15, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	30 April 2024 April 30, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Risk Mitigation in Procurement	21 Juni 2024 June 21, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	A Comprehensive Guide to Indonesia PDP Law Implementation for the Mining Industry	9 Agustus 2024 August 9, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Project Made Simple with Risk Management	11 November 2024 November 11, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pelatihan dan Uji Sertifikasi GRC tingkat Utama (GRCE) GRC Primary Level Certification (GRCE) Training and Test	25 November 2024 November 25, 2024	Strategic Development Group
	Pelatihan Training	Risk Beyond ERMA: International Conference on ERM : Sustainable Symphony - Echoes of Change	5-6 Desember 2024 December 5-6, 2024	CRMS
	Pelatihan Training	Membangun Budaya Risk Awareness di Tempat Kerja Building a Risk Awareness Culture in the Workplace	11 Desember 2024 December 11, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Workshop Eksekutif: ESG and Risk Management for Sustainable Growth	13 Desember 2024 December 13, 2024	PTBA
Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D./ Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan Training	Ethical Foundations : Understanding the Significance of Whistleblowing with KPMG	2 Februari 2024 February 2, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Fraud Management : Mitigating Fraud Risk in Corporate Environment	15 Maret 2024 March 15, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	30 April 2024 April 30, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Risk Mitigation in Procurement	21 Juni 2024 June 21, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pelatihan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan) Tahap Pertama First Phase of Contingency Plan Preparation Training	3 Juli 2024 July 3, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	A Comprehensive Guide to Indonesia PDP Law Implementation for the Mining Industry	9 Agustus 2024 August 9, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Project Made Simple with Risk Management	11 November 2024 November 11, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pelatihan dan Uji Sertifikasi GRC tingkat Utama (GRCE) GRC Primary Level Certification (GRCE) Training and Test	25 November 2024 November 25, 2024	Strategic Development Group
	Pelatihan Training	SPI : Organ Pengelola Risiko : Tantangan & realita dalam mencapai kinerja optimal Perusahaan SPI: Risk Management Organ: Challenges and realities in achieving optimal Company performance	28-29 November 2024 November 28-29, 2024	FKSPI
	Pelatihan Training	Membangun Budaya Risk Awareness di Tempat Kerja Building a Risk Awareness Culture in the Workplace	11 Desember 2024 December 11, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Workshop Eksekutif: ESG and Risk Management for Sustainable Growth	13 Desember 2024 December 13, 2024	PTBA

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Can Dr. Rahmat Hidayat Pulungan, S.E., M.Pd./ Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan Training	Ethical Foundations : Understanding the Significance of Whistleblowing with KPMG	2 Februari 2024 February 2, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Fraud Management : Mitigating Fraud Risk in Corporate Environment	15 Maret 2024 March 15, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	30 April 2024 April 30, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Risk Mitigation in Procurement	21 Juni 2024 June 21, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pelatihan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan) Tahap Pertama First Phase of Contingency Plan Preparation Training	3 Juli 2024 July 3, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	A Comprehensive Guide to Indonesia PDP Law Implementation for the Mining Industry	9 Agustus 2024 August 9, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pencegahan Korupsi dan Kaitannya dengan GRC Corruption Prevention and Its Relation to GRC	10 Oktober 2024 October 10, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Project Made Simple with Risk Management	11 November 2024 November 11, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pelatihan dan Uji Sertifikasi GRC tingkat Utama (GRCE) GRC Primary Level Certification (GRCE) Training and Test	25 November 2024 November 25, 2024	Strategic Development Group
	Pelatihan Training	Membangun Budaya Risk Awareness di Tempat Kerja Building a Risk Awareness Culture in the Workplace	11 Desember 2024 December 11, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Workshop Eksekutif: ESG and Risk Management for Sustainable Growth	13 Desember 2024 December 13, 2024	PTBA
Direksi Board of Directors				
Drs. Arsal Ismail, M.M., MSI/ Direktur Utama President Director	Workshop	Workshop Kementerian BUMN - Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainability	19 Januari 2024 January 19, 2024	KBUMN SOEs Ministry
	Pelatihan Training	MIND ID 4th GRC Series - Ethical Foundations: Understanding the Significance of Whistleblowing bersama KPMG	2 Februari 2024 February 2, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 5th GRC Series - Fraud Management	15 Maret 2024 March 15, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 6th GRC Series - Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	30 April 2024 April 30, 2024	MIND ID
	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi Layanan Pengamanan Pembagunan Strategis Socialization of Strategic Development Security Services	28 Mei 2024 May 28, 2024	Kejaksaan RI - Kejaksaan Agung Attorney General's Office of Republic of Indonesia
	Dialog Dialogue	CNBC Indonesia MINDialogue, Topik: Critical Minerals in Geopolitical Perspective	20 Juni 2024 June 20, 2024	CNBC Indonesia
	Pelatihan Training	MIND ID 7th GRC Series - Risk Mitigation in Procurement	21 Juni 2024 June 21, 2024	MIND ID
	Workshop	Kick Off Implementasi Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi Kick Off Implementation of Integrated Governance and Integrated Risk Management	24 Juni 2024 June 24, 2024	PT Bukit Asam Tbk
	Pelatihan Training	MIND ID 8th GRC Series - Integrated Corporate Governance in Legal Aspect	12 Juli 2024 July 12, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 9th GRC Series: A Comprehensive Guide to Indonesia PDP ("Perlindungan Data Pribadi") Law Implementation for the Mining Industry MIND ID 9th GRC Series: A Comprehensive Guide to Indonesia PDP ("Personal Data Protection") Law Implementation for the Mining Industry	9 Agustus 2024 August 9, 2024	MIND ID

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
	Pelatihan Training	Pelatihan dan Sertifikasi Governance, Risk and Compliance for Executive (GRCE) Governance, Risk and Compliance for Executives (GRCE) Training and Certification	4 Oktober 2024 October 4, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 10th GRC Series: Pencegahan Korupsi dalam Kaitannya dengan Governance Risk & Compliance MIND ID 10th GRC Series: Corruption Prevention in Relation to Governance Risk & Compliance	10 Oktober 2024 October 10, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 11th GRC Series: Task Management vs Project Management: How to Do Things Effectively & Manage the Risk	11 November 2024 November 11, 2024	MIND ID
	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi Kementerian BUMN tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (Internal Control Over Financial Reporting) Ministry of SOEs' Socialization of Technical Instructions for Internal Control Over Financial Reporting	18 November 2024 November 18, 2024	KBUMN SOEs Ministry
	Workshop	Workshop Penyusunan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Grup MIND ID secara Terintegrasi Tahun 2025 Workshop on Preparation of Integrated Annual Audit Work Program (PKAT) of MIND ID Group in 2025	21 November 2024 November 21, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 12th GRC Series: Membangun Budaya Risk-Awareness di Tempat Kerja MIND ID 12th GRC Series: Building a Risk-Awareness Culture in the Workplace	11 Desember 2024 December 11, 2024	MIND ID
	Workshop	Workshop Eksekutif Manajemen Risiko Risk Management Executive Workshop	13 Desember 2024 December 13, 2024	PT Bukit Asam Tbk
Ir. Suhedi / Direktur Operasi dan Produksi Operations and Production Director	Pelatihan Training	MIND ID 4th GRC Series: Ethical Foundations: Understanding the Significance of Whistleblowing with KPMG	2 Februari 2024 February 2, 2024	MIND ID & KPMG
	Pelatihan Training	MIND ID 5th GRC Series: Fraud Management	15 Maret 2024 March 15, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 6th GRC Series: Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	30/04/2024 April 30, 2024	MIND ID & EY
	Pelatihan Training	MIND ID 7th GRC Series: Risk Mitigation in Procurement	21 Juni 2024 June 21, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 8th GRC Series: Integrated Corporate Governance in Legal Aspect	9 Agustus 2024 August 9, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 9th GRC Series: A Comprehensivce Guide to Indonesia PDP ("Perlindungan Data Pribadi") Law Implementation for the Mining Industry MIND ID 9th GRC Series: A Comprehensive Guide to Indonesia PDP ("Personal Data Protection") Law Implementation for the Mining Industry	4 Oktober 2024 October 4, 2024	MIND ID & Deloitte
	Pelatihan Training	Pelatihan dan Sertifikasi Governance, Risk and Compliance for Executive (GRCE) untuk Anggota MIND ID Governance, Risk and Compliance for Executive (GRCE) Training and Certification for MIND ID Members	10 Oktober 2024 October 10, 2024	MIND ID & Strategic Governance Group
	Pelatihan Training	MIND ID 10th GRC Series: Pencegahan Korupsi dalam Kaitannya dengan Governance Risk & Compliance MIND ID 10th GRC Series: Corruption Prevention in Relation to Governance Risk & Compliance	11 November 2024 November 11, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 11th GRC Series: Task Management vs Project Management: How to Do Things Effectively & Manage the Risk	04 Desember 2024 December 4, 2024	MIND ID
	Seminar	Indonesian Mining Summit 2024	05 Desember 2024 December 5, 2024	Indonesia Mining Association (IMA)
	Pelatihan Training	Risk Beyond ERMA International Conference on ERM : Sustainable Symphony - Echoes of Change	11 Desember 2024 December 11, 2024	Center for Risk Management & Sustainability (CRMS Indonesia)
	Pelatihan Training	MIND ID 12th GRC Series : Membangun Budaya Risk-Awareness di Tempat Kerja MIND ID 12th GRC Series: Building a Risk-Awareness Culture in the Workplace	11 Desember 2024 December 11, 2024	MIND ID

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Suherman, S.E., Ak., M.M. / Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	Pelatihan Training	MIND ID 4th GRC Series: Ethical Foundations: Understanding the Significance of Whistleblowing with KPMG	02 Februari 2024 February 2, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 5th GRC Series : Fraud Management	15 Maret 2024 March 15, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID GRC Series #6 : Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	15 Maret 2024 March 15, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 7th GRC Series: Risk Mitigation in Procurement	21 Juni 2024 June 21, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 8th GRC Series: Integrated Corporate Governance in Legal Aspect	12 Juli 2024 July 12, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 9th GRC Series: A Comprehensive Guide to Indonesia PDP ("Perlindungan Data Pribadi") Law Implementation for the Mining Industry MIND ID 9th GRC Series: A Comprehensive Guide to Indonesia PDP ("Personal Data Protection") Law Implementation for the Mining Industry	09 Agustus 2024 August 9, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pelatihan dan Sertifikasi Governance, Risk and Compliance for Executive (GRCE) untuk Anggota MIND ID Governance, Risk and Compliance for Executive (GRCE) Training and Certification for MIND ID Members	10 Oktober 2024 October 10, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 10th GRC Series: Pencegahan Korupsi dalam Kaitannya dengan Governance Risk & Compliance MIND ID 10th GRC Series: Corruption Prevention in Relation to Governance Risk & Compliance	11 November 2024 November 11, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 11th GRC Series: Task Management vs Project Management: How to Do Things Effectively & Manage the Risk	04 Desember 2024 December 4, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 12th GRC Series: Membangun Budaya Risk-Awareness di Tempat Kerja MIND ID 12th GRC Series: Building a Risk-Awareness Culture in the Workplace	11 Desember 2024 December 11, 2024	MIND ID
Ir. Rafly Yandra, M.M., MBA./ Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	Pelatihan Training	MIND ID 4th GRC Series: Ethical Foundations: Understanding the Significance of Whistleblowing with KPMG	02 Februari 2024 February 2, 2024	MIND ID
	Workshop	Sharing Session ICOFR Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	22 Februari 2024 February 22, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 5th GRC Series: Fraud Management	15 Maret 2024 March 15, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 6th GRC Series: Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	15 Maret 2024 March 15, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 7th GRC Series: Risk Mitigation in Procurement	21 Juni 2024 June 21, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 8th GRC Series: Integrated Corporate Governance in Legal Aspect	12 Juli 2024 July 12, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 9th GRC Series: A Comprehensive Guide to Indonesia PDP ("Perlindungan Data Pribadi") Law Implementation for the Mining Industry MIND ID 9th GRC Series: A Comprehensive Guide to Indonesia PDP ("Personal Data Protection") Law Implementation for the Mining Industry	09 Agustus 2024 August 9, 2024	MIND ID

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
	Pelatihan Training	MIND ID 10th GRC Series: Pencegahan Korupsi dalam Kaitannya dengan Governance Risk & Compliance MIND ID 10th GRC Series: Corruption Prevention in Relation to Governance Risk & Compliance	10 Oktober 2024 October 10, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 11th GRC Series: Task Management VS Project Management: How to Do Things Effectively & Manage the Risk	04 November 2024 November 4, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 12th GRC Series: Membangun Budaya Risk-Awareness di Tempat Kerja MIND ID 12th GRC Series: Building a Risk-Awareness Culture in the Workplace	11 Desember 2024 December 11, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	GRC for Executive: A Comprehensive Review of Integrated Governance, Risk, and Compliance.	25 November 2024 November 25, 2024	BNSP
	Konferensi Conference	Risk Beyond ERMA International Conference on ERM Risk Beyond ERMA International Conference on ERM	11 Desember 2024 December 11, 2024	ERMA dan CRMS
Farida Thamrin, S.T. / Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Seminar	Workshop KBUMN "Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainability	19 Januari 2024 January 19, 2024	KBUMN SOEs Ministry
	Webinar	Sharing Session ICOFR	22 Februari 2024 February 22, 2024	MIND ID
	Webinar	Mandiri Investment Forum 2024	05 Maret 2024 March 5, 2024	MIF
	Seminar	Workshop Manajemen Risiko Anak & Afiliansi Perusahaan PTBA PTBA Subsidiries and Company Affiliate Risk Management Workshop	18 Maret 2024 March 18, 2024	Manajemen Risiko Risk Management
	Seminar	Board Forum & Synergy Summit PTBA Group	25 - 26 Maret 2024 March 25-26, 2024	Afiliasi Anak Perusahaan Subsidiaries Affiliation
	Webinar	GRC Series: Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	30 April 2024 April 30, 2024	MIND ID
	Webinar	KPMG : Beyond compliance: Leveraging AI in managing third-party risks	08 Mei 2024 May 8, 2024	KPMG
	Webinar	MIND ID 6th GRC Series: Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	21 Juni 2024 June 21, 2024	MIND ID
	Webinar	MIND ID 9th GRC Series: A Comprehensivce Guide to Indonesia PDP ("Perlindungan Data Pribadi") Law Implementation for the Mining Industry MIND ID 9th GRC Series: A Comprehensive Guide to Indonesia PDP ("Personal Data Protection") Law Implementation for the Mining Industry	09 Agustus 2024 August 9, 2024	MIND ID
	Seminar	Pelatihan dan Sertifikasi Governance, Risk and Compliance for Executive (GRCE) untuk Anggota MIND ID Governance, Risk and Compliance for Executive (GRCE) Training and Certification for MIND ID Members	04 Oktober 2024 October 4, 2024	MIND ID
	Webinar	MIND ID 9th GRC Series: A Comprehensivce Guide to Indonesia PDP ("Perlindungan Data Pribadi") Law Implementation for the Mining Industry MIND ID 9th GRC Series: A Comprehensive Guide to Indonesia PDP ("Personal Data Protection") Law Implementation for the Mining Industry	10 Oktober 2024 October 10, 2024	MIND ID
	Training	Executive Training Course Strategic Finance: IMD	26 Oktober 2024 October 26, 2024	Institude Of Managenet Development Swiss
	Webinar	MIND ID 11th GRC Series Task Management vs Project Management How to Do Things Effectively & Manage the Risk	11 November 2024 November 11, 2024	MIND ID

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
	Webinar	MIND ID 12th GRC Series: Membangun Budaya Risk-Awareness di Tempat Kerja MIND ID 12th GRC Series: Building a Risk-Awareness Culture in the Workplace	11 Desember 2024 December 11, 2024	MIND ID
Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of Board of Commissioners				
Nurul Almy Firdausi, S.E., M.M.	Pelatihan Training	Ethical Foundations : Understanding the Significance of Whistleblowing with KPMG	2 Februari 2024 February 2, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Fraud Management : Mitigating Fraud Risk in Corporate Environment	15 Maret 2024 March 15, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	30 April 2024 April 30, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Risk Mitigation in Procurement	21 Juni 2024 June 21, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	A Comprehensive Guide to Indonesia PDP Law Implementation for the Mining Industry	9 Agustus 2024 August 9, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Workshop Eksekutif: ESG and Risk Management for Sustainable Growth	13 Desember 2024 December 13, 2024	PTBA
Komite Audit Audit Committee				
Wakhid Kurniawan Saputra, SE, M.Ak, CPA	Pelatihan Training	Fraud Management : Mitigating Fraud Risk in Corporate Environment	15 Maret 2024 March 15, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	30 April 2024 April 30, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pencegahan Korupsi dan Kaitannya dengan GRC Corruption Prevention and Its Relation to GRC	10 Oktober 2024 October 10, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Project Made Simple with Risk Management	11 November 2024 November 11, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pelatihan dan Uji Sertifikasi GRC tingkat Utama (GRCE) GRC Primary Level Certification (GRCE) Training and Test	25 November 2024 November 25, 2024	Strategic Development Group
	Pelatihan Training	SPI : Organ Pengelola Risiko : Tantangan & realita dalam mencapai kinerja optimal Perusahaan SPI: Risk Management Organ: Challenges and realities in achieving optimal Company performance	28-29 November 2024 November 28-29, 2024	FKSPI
	Pelatihan Training	Workshop Eksekutif: ESG and Risk Management for Sustainable Growth	13 Desember 2024 December 13, 2024	PTBA
Dr. Eng. Ir. Fadhila Achmadi Rosyid, S.T., M.T.	Pelatihan Training	Ethical Foundations : Understanding the Significance of Whistleblowing with KPMG	2 Februari 2024 February 2, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	30 April 2024 April 30, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Risk Mitigation in Procurement	21 Juni 2024 June 21, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pelatihan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan) Tahap Pertama First Phase of Contingency Plan Preparation Training	3 Juli 2024 July 3, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Integrated Corporate Governance in Legal Aspect	12 Juli 2024 July 12, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	A Comprehensive Guide to Indonesia PDP Law Implementation for the Mining Industry	9 Agustus 2024 August 9, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Project Made Simple with Risk Management	11 November 2024 November 11, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pelatihan dan Uji Sertifikasi GRC tingkat Utama (GRCE) GRC Primary Level Certification (GRCE) Training and Test	25 November 2024 November 25, 2024	Strategic Development Group
	Pelatihan Training	SPI : Organ Pengelola Risiko : Tantangan & realita dalam mencapai kinerja optimal Perusahaan SPI: Risk Management Organ: Challenges and realities in achieving optimal Company performance	28-29 November 2024 November 28-29, 2024	FKSPI
	Pelatihan Training	Workshop Eksekutif: ESG and Risk Management for Sustainable Growth	13 Desember 2024 December 13, 2024	PTBA
Dodi Masykur, SE., Ak., CPA., QIA., CPI., CA	-	-	-	-

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Integrated Risk Monitoring and Governance Committee				
Helmiansyah Irawan., SE., Ak., M.Ak., CA., CPA., ASEAN CPI., CIIB., ANZIIF (Snr. Assc) CIP., CACP.	Pelatihan Training	Ethical Foundations : Understanding the Significance of Whistleblowing bersama KPMG	2 Februari 2024 February 2, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	30 April 2024 April 30, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Risk Mitigation in Procurement	21 Juni 2024 June 21, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pelatihan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan) Tahap Pertama First Phase of Contingency Plan Preparation Training	3 Juli 2024 July 3, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO) Group MIND ID MIND ID Group Certified Risk Management Officer (CRMO) certification	9 – 12 Juli 2024 July 9-12, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	A Comprehensive Guide to Indonesia PDP Law Implementation for the Mining Industry	9 Agustus 2024 August 9, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pelatihan Penyusunan Rencana Darurat Tahap Kedua Second Phase Emergency Planning Training	14 Agustus 2024 August 14, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pencegahan Korupsi dan Kaitannya dengan GRC Corruption Prevention and Its Relation to GRC	10 Oktober 2024 October 10, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Project Made Simple with Risk Management	11 November 2024 November 11, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	SPI : Organ Pengelola Risiko : Tantangan & realita dalam mencapai kinerja optimal Perusahaan SPI: Risk Management Organ: Challenges and realities in achieving optimal Company performance	28-29 November 2024 November 28-29, 2024	FKSPI
	Pelatihan Training	Membangun Budaya Risk Awareness di Tempat Kerja Building a Risk Awareness Culture in the Workplace	11 Desember 2024 December 11, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Workshop Eksekutif: ESG and Risk Management for Sustainable Growth	13 Desember 2024 December 13, 2024	PTBA
Dr. Eng. Ganda Marihot Simangunsong, ST, MT	Pelatihan Training	Ethical Foundations : Understanding the Significance of Whistleblowing with KPMG	2 Februari 2024 February 2, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Fraud Management : Mitigating Fraud Risk in Corporate Environment	15 Maret 2024 March 15, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	30 April 2024 April 30, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Risk Mitigation in Procurement	21 Juni 2024 June 21, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pelatihan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan) Tahap Pertama First Phase of Contingency Plan Preparation Training	3 Juli 2024 July 3, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Integrated Corporate Governance in Legal Aspect	12 Juli 2024 July 12, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	A Comprehensive Guide to Indonesia PDP Law Implementation for the Mining Industry	9 Agustus 2024 August 9, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pelatihan Penyusunan Rencana Darurat Tahap Kedua Second Phase Emergency Planning Training	14 Agustus 2024 August 14, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO) Group MIND ID	27-30 Agustus 2024 August 27-30, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pencegahan Korupsi dan Kaitannya dengan GRC Corruption Prevention and Its Relation to GRC	10 Oktober 2024 October 10, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Workshop Eksekutif: ESG and Risk Management for Sustainable Growth	13 Desember 2024 December 13, 2024	PTBA

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Komite Nominasi & Remunerasi Nomination and Remuneration Committee				
Nora Sri Hendriyeni, Ph.D., CA., CSRA., CSP., CACP	Pelatihan Training	Risk Mitigation in Procurement	21 Juni 2024 June 21, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	A Comprehensive Guide to Indonesia PDP Law Implementation for the Mining Industry	9 Agustus 2024 August 9, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Workshop Eksekutif: ESG and Risk Management for Sustainable Growth	13 Desember 2024 December 13, 2024	PTBA
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary				
Niko Chandra, S.T., M.M.	Pelatihan Training	MIND ID GRC Series #4: Ethical Foundations: Understanding the Significance of Whistleblowing	2 Februari 2024 February 2, 2024	MIND ID - KPMG
	Pelatihan Training	MIND ID GRC Series #5: Fraud Management	15 Maret 2024 March 15, 2024	MIND ID - KPMG
	Pelatihan Training	MIND ID GRC Series #6: Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	30 April 2024 April 30, 2024	MIND ID - KPMG
	Pelatihan Training	MIND ID GRC Series #7: Risk Mitigation In Procurement	21 Juni 2024 June 21, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Briefing Pre Onboarding Program Leadership BOD-1 "Top Gun" Kementerian BUMN	7 Juni 2024 June 7, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Global Leadership Development Program (TOP-GUN) Kick Off - Leadership Camp	1 sd 11 Juli 2024 July 1-11, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Workshop Penyusunan RKAP Berbasis Risiko Tahun 2024 Workshop on Preparing Risk-Based CWPB for 2024	19 Juli 2024 July 19, 2024	PT Bukit Asam Tbk
	Pelatihan Training	MIND ID GRC Series #8 : Integrated Corporate Governance in Legal Aspects	12 Juli 2024 July 12, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Global Leadership Development Program - Global Immersion	18-24 Agustus 2024 August 18-24, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pelatihan Executive Potential Program - Batch 2 Executive Potential Program Training - Batch 2	26 Agustus 2024 August 26, 2024	Hunain
	Pelatihan Training	MIND ID 9th GRC Series: A Comprehensive Guide to Indonesia PDP Law Implementation	9 Agustus 2024 August 9, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Executive Briefing QHSE Integrated Management System	30 September 2024 September 30, 2024	PT Sinergi Solusi Indonesia
	Pelatihan Training	Penugasan Kegiatan MIND ID 10th GRC Series : Pencegahan Korupsi dan Kaitannya dengan GRC MIND ID 10th GRC Series Activity Assignment: Corruption Prevention and Its Relation to GRC	10 Oktober 2024 October 10, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Sosialisasi dan Pelatihan WBS Terintegrasi Grup MIND ID MIND ID Group Integrated WBS Socialization and Training	11 Oktober 2024 October 11, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Graduation Day Program Top Gun	22 November 2024 November 22, 2024	Kementerian BUMN SOEs Ministry
	Pelatihan Training	LMS MIND ID : RESPECFUL WORKPLACE POLICY	30 November 2024 November 30, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID GRC Series 11 : Project Made Simple with Risk Management	11 November 2024 November 11, 204	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 12th GRC Series: Membangun Budaya Risk-Awareness di Tempat Kerja MIND ID 12th GRC Series: Building a Risk-Awareness Culture in the Workplace	11 Desember 2024 December 11, 2024	MIND ID

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Internal Audit/Satuan Pengawasan Intern (SPI)				
Nugraha Nurtyasanta, SH., M.Hum	Pelatihan Training	MIND ID 4th GRC Series : Ethical Foundations : Understanding the Significance of Whistleblowing with KPMG	2 Februari 2024 February 2, 2024	MIND ID - KPMG
	Sertifikasi Certification	Pelatihan dan Sertifikasi Professional Internal Audit (PIA) Khusus Kepala SPI Training and Certification of Professional Internal Audit (PIA) Specifically for Head of SPI	22 – 25 Februari 2024 February 22-25, 2024	Asosiasi Auditor Internal (AAI)
	Pelatihan Training	Training Bersama Internal Audit Grup MIND ID mengenai "Peran Internal Audit dalam Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) dan Risk Maturity Index (RMI)" Joint Training with MIND ID Group Internal Audit on "The Role of Internal Audit in Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) and Risk Maturity Index (RMI)"	19 – 20 Maret 2024 March 19-20, 2024	MIND ID - PT Deloitte Konsultan Indonesia
	Pelatihan Training	MIND ID GRC Series #5 : Fraud Management	15 Maret 2024 March 15, 2024	MIND ID - KPMG
	Pelatihan Training	Training of Global GRC Benchmarking Series 7-2024 : Benelux "Governance, Risk, and Compliance: Overseas Program"	3 – 11 Mei 2024 May 3-11, 2024	Centrois
	Pelatihan Training	MIND ID GRC Series #6 : Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	30 April 2024 April 30, 2024	MIND ID - KPMG
	Pelatihan Training	MIND ID GRC SERIES #7 : Risk Mitigation in Procurement	21 Juni 2024 June 21, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Integrated Governance, Risk, and Compliance (GRC) : Peran SPI dalam Menjaga Kepatuhan dan Mengelola Risiko Bisnis Perusahaan Integrated Governance, Risk, and Compliance (GRC): The Role of SPI in Maintaining Compliance and Managing Company Business Risks	16 – 17 Juli 2024 July 16-17, 2024	Asosiasi Auditor Internal
	Pelatihan Training	MIND ID GRC Series #8 : Integrated Corporate Governance in Legal Aspects	12 Juli 2024 July 12, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 9th GRC Series: A Comprehensive Guide to Indonesia PDP Law Implementation	9 Agustus 2024 August 9, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Executive Briefing QHSE Integrated Management System	30 September 2024 September 30, 2024	PT Sinergi Solusi Indonesia
	Pelatihan Training	Pelatihan Masa Persiapan Pensiun (Pra Pensiun) - Batch 5 Pre-Retirement Preparation Training (Pre-Retirement) - Batch 5	24 – 26 September 2024 Septembr 24-26, 2024	PT Khawatama Learning Center
	Pelatihan Training	Penugasan Kegiatan MIND ID 10th GRC Series : Pencegahan Korupsi dan Kaitannya dengan GRC MIND ID 10th GRC Series Activity Assignment: Corruption Prevention and Its Relation to GRC	10 Oktober 2024 October 10, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	LMS MIND ID : Respectful Workplace Policy	30 November 2024 November 30, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 12th GRC Series: Membangun Budaya Risk-Awareness di Tempat Kerja MIND ID 12th GRC Series: Building a Risk-Awareness Culture in the Workplace	11 Desember 2024 December 11, 2024	MIND ID

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Manajemen Risiko Risk Management				
Efi Fidinilah, S.T.	Pelatihan Training	Kegiatan MIND ID 4th GRC Series : Ethical Foundations : Understanding the Significance of Whistleblowing with KPMG	2 Februari 2024 February 2, 2024	MIND ID - KPMG
	Pelatihan Training	Webinar Manajemen Risiko "Empowering Risk Management: Strategic and Culture Approach"	22 Maret 2024 March 22, 2024	KPMG
	Pelatihan Training	MIND ID GRC Series #5 : Fraud Management	15 Maret 2024 March 15, 2024	MIND ID - KPMG
	Pelatihan Training	BA RING-RING Vol.33 - Menuju Masa Depan Berkelanjutan: Peran ESG dalam Startegi Bisnis Perusahaan BA RING-RING Vol.33 - Towards a Sustainable Future: The Role of ESG in Corporate Business Strategy	22 Mei 2024 May 22, 2024	INSPIGO
	Pelatihan Training	MIND ID GRC Series #6 : Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	30 April 2024 Aprirl 30, 2024	MIND ID - KPMG
	Pelatihan Training	MIND ID GRC SERIES #7 : Risk Mitigation in Procurement	21 Juni 2024 June 21, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Master Class Training: Risk Governance (with QCRO Certifications)	15 – 17 Juli 2024 July 15-17, 2024	CRMS
	Pelatihan Training	Workshop Penyusunan RKAP Berbasis Risiko Tahun 2024 Workshop on Preparing Risk-Based CWPB for 2024	19 Juli 2024 July 19, 2024	PT Bukit Asam Tbk
	Pelatihan Training	Pelatihan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan) Tahap Pertama First Phase of Contingency Plan Preparation Training	3 Juli 2024 July 3, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID GRC Series #8 : Integrated Corporate Governance in Legal Aspects	12 Juli 2024 July 12, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID 9th GRC Series: A Comprehensive Guide to Indonesia PDP Law Implementation	9 Agustus 2024 August 9, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Executive Briefing QHSE Integrated Management System	30 September 2024 September 30, 2024	PT Sinergi Solusi Indonesia
	Pelatihan Training	Penugasan Kegiatan MIND ID 10th GRC Series : Pencegahan Korupsi dan Kaitannya dengan GRC MIND ID 10th GRC Series Activity Assignment: Corruption Prevention and Its Relation to GRC	10 Oktober 2024 October 10, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Sosialisasi dan Pelatihan WBS Terintegrasi Grup MIND ID MIND ID Group Integrated WBS Socialization and Training	11 Oktober 2024 October 11, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	Pelatihan Refreshment Certified Risk Management Professional (CRMP) Certified Risk Management Professional (CRMP) Refreshment Training	4 – 7 November 2024 November 4-7, 2024	PT RAP Indonesia
	Pelatihan Training	LMS MIND ID : Respectful Workplace Policy	30 November 2024 November 30, 2024	MIND ID
	Pelatihan Training	MIND ID GRC Series 11 : Project Made Simple with Risk Management	11 November 2024 November 11, 2024	MIND ID


Melalui penerapan strategi yang tepat, Perusahaan dapat meraih pertumbuhan kinerja yang baik dan meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan nasional.
By implementing the right strategies, the Company can achieve good performance growth and increase its contribution to national development.



Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tinjauan Perekonomian dan Industri
Economic and Industrial Overview



Analisis Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Ekonomi global tahun 2024 masih belum dapat lepas dari sejumlah persoalan yang sudah terjadi sejak tahun sebelumnya. Bahkan, dalam beberapa hal kondisinya menjadi semakin buruk. Ketegangan geopolitik di Eropa, Timur Tengah, dan Asia Timur semakin memanas pada tahun 2024. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian global, khususnya terhadap rantai pasok dan rantai perdagangan global.

Tantangan ekonomi global menjadi semakin berat dengan berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. Kondisi ini telah membuat ekonomi Tiongkok mengalami perlambatan sehingga berdampak pada perekonomian negara-negara yang memiliki hubungan dagang dengan Tiongkok, termasuk Indonesia.

Selain itu, kendati tingkat inflasi global telah mengalami moderasi, namun belum serta merta menurunkan suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 2 tahun terakhir.

Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat suku bunga yang masih berada di bawah target di berbagai bank sentral di dunia, sehingga banyak negara tetap mempertahankan kebijakan moneter yang ketat. Dengan suku bunga yang tinggi, pertumbuhan ekonomi cenderung melambat.

Berbagai tantangan tersebut membuat ekonomi global menghadapi ketidakpastian sepanjang tahun 2024. Hal ini membuat sebagian besar negara berkembang sulit

Analysis of Global and National Economic Conditions

The global economy in 2024 is still inseparable from problems since the previous year. In fact, in some cases the conditions are getting worse. Geopolitical tensions in Europe, the Middle East, and East Asia were heating up in 2024. This condition impacted the global economy, especially on the supply chain and global trade chain.

The global economic challenges are worsened with the ongoing trade war between the United States, Europe, and China. This condition has caused the Chinese economy to slow down, which has affected the economies of countries that have trade relations with China, including Indonesia.

Although the global inflation rate has moderated, it has not immediately lowered interest rates which have soared quite high in the last 2 years.

This can be seen from the interest rate level which is still below the target in various central banks in the world, resulting in many countries continue to maintain tight monetary policies. With high interest rates, economic growth tends to slow down.

These challenges forced the global economy face uncertainty throughout 2024. This condition is worsening the efforts of most developing countries to escape the

keluar dari *middle income trap*, karena juga dihadapkan pada menuanya masyarakat produktif sebelum mampu menjadi kaya atau berpendapatan tinggi.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi global juga tercermin dari Indeks PMI Manufaktur yang telah berada di bawah 50 di hampir semua negara. Ini menunjukan tren perlambatan ekonomi terjadi di semua negara.

Bank Sentral AS, The Fed, sejatinya telah memberikan respon yang positif untuk mendongkrak perekonomian global dengan mengambil kebijakan untuk menurunkan tingkat suku bunga menjadi 4,50%-4,75%. Namun, hal tersebut belum memberikan dampak yang besar, selain karena penurunan suku bunga yang relatif kecil, juga karena baru dilakukan menjelang akhir tahun.

Dengan kondisi tersebut, Dana Moneter Internasional (IMF), dalam laporan World Economy Outlook yang terbit pada Oktober 2024, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tetap lemah dengan proyeksi pertumbuhan PDB dunia sekitar 3,2%. Di negara-negara maju, pertumbuhan diperkirakan meningkat sedikit dari 1,6% pada tahun 2023 menjadi 1,7% pada tahun 2024. Sebaliknya, di negara-negara berkembang, pertumbuhan diproyeksikan melambat dari 4,3% pada tahun 2023 menjadi 4,2% pada tahun 2024.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh cukup solid. Indonesia masih dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% kendati masih berada di bawah target pemerintah sebesar 5,2%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh 5,03% pada 2024, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,05%.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya disebabkan masih tingginya ketidakpastian dan berbagai tantangan global yang masih membayangi, seperti fragmentasi geoekonomi dan ketegangan geopolitik.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi terjadi di seluruh wilayah, meski ada pelambatan di beberapa wilayah seperti Sumatera, Sulawesi, dan Maluku-Papua. Wilayah Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan wilayah lainnya.

Kinerja ekspor yang cukup baik juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepanjang 2024, nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar USD 264,70 miliar, meningkat 2,29% dari tahun sebelumnya USD 258,77 miliar. Namun demikian, ekspor migas sedikit mengalami penurunan menjadi USD 15,88 miliar. Dengan

middle-income trap since they are also faced with the aging of their productive population before they are able to have high incomes.

The slowdown in global economic growth is also reflected in the Manufacturing PMI Index which has been below 50 in almost all countries. This shows that the trend of economic slowdown is occurring in all countries.

The US Central Bank, The Fed, has actually given a positive response to boost the global economy by taking a policy to lower interest rates to 4.50% -4.75%. However, this has not had a major impact, apart from the relatively small interest rate cut, it was also done towards the end of the year.

With these conditions, the International Monetary Fund (IMF), in its World Economy Outlook report published in October 2024, projected global economic growth to remain weak, with a projected world GDP growth of around 3.2%. In developed countries, growth is expected to increase slightly from 1.6% in 2023 to 1.7% in 2024. Conversely, in developing countries, growth is projected to slow from 4.3% in 2023 to 4.2% in 2024.

Amidst global economic uncertainty, the Indonesian economy was still able to grow quite solidly. Indonesia managed to maintain economic growth above 5%, even though it is still below the government's target of 5.2%. Based on data from Statistics Indonesia (BPS), the Indonesian economy grew 5,03% in 2024, slightly lower than the previous year of 5.05%.

The slowing economic growth is caused by the high uncertainty and various global challenges that still looming, such as geoeconomic fragmentation and geopolitical tensions.

Spatially, economic growth occurred throughout the region, although there was a slowdown in several regions such as Sumatra, Sulawesi, and Maluku-Papua. The regions of Java, Kalimantan, Bali, and Nusa Tenggara showed stronger growth compared to other regions.

The fairly good export performance also drives Indonesia's economic growth. Throughout 2024, Indonesia's export value was recorded at USD 264.70 billion, an increase of 2.29% from the previous year of USD 258.77 billion, however, oil and gas exports decreased slightly to USD 15.88 billion. With this achievement, Indonesia's Trade

pencapaian tersebut, Neraca Perdagangan Indonesia tetap menunjukkan performa positif dengan kembali mencatatkan surplus sebesar USD 31,04 miliar pada 2024. Capaian tersebut memperpanjang tren surplus neraca perdagangan Indonesia menjadi 55 bulan secara berturut-turut sejak Mei 2020.

Balance continues to show positive performance by again recording a surplus of USD 31.04 billion in 2024. This achievement extends Indonesia's trade balance surplus trend to 55 consecutive months since May 2020.

Pencapaian-pencapaian tersebut tidak diimbangi oleh indeks PMI manufaktur Indonesia mengalami tren penurunan sejak April 2024 dan berada di bawah 50 selama periode Juli hingga November 2024. Indeks PMI manufaktur Indonesia baru kembali naik pada Desember 2024 menjadi 51,2. Angka ini menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur Indonesia baru mengalami kebangkitan pada akhir tahun 2024. Hal ini salah satunya disebabkan pelaku usaha sangat berhati-hati dalam melakukan ekspansi di tahun politik, di mana hampir sepanjang tahun 2024 Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi dengan agenda utama pergantian pemimpin nasional.

However, Indonesia's manufacturing PMI index has experienced a downward trend since April 2024 and was below 50 during the period from July to November 2024. Indonesia's manufacturing PMI index only increased in December 2024 to 51.2. This figure shows that Indonesia's manufacturing activity only experienced a revival at the end of 2024. This is partly caused by careful decision taken by business owners to expand their business in a political year, where the country held a democratic party to choose a new leader.

Ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh stabil di tahun 2025 pada kisaran 5,0%-5,2%. Bank Dunia, dalam *World Bank East Asia and The Pacific Economic Update* yang dirilis pada Oktober 2024, memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1% pada 2025. Bank Dunia menunjukkan keyakinan terhadap kekuatan ekonomi Indonesia di tengah tantangan yang dihadapi negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

The Indonesian economy is projected to grow steadily in 2025 in the range of 5.0% -5.2%. The World Bank through its World Bank East Asia and The Pacific Economic Update released in October 2024 estimated that Indonesia's economy would up by 5.1% in 2025. The World Bank expressed confidence in Indonesia's economic strength amidst the challenges faced by countries in the East Asia and Pacific region.

Analisis Industri Batu Bara

Coal Industry Analysis

Permintaan batu bara global pada tahun 2024 diperkirakan tetap stabil dibandingkan dengan tahun 2023. Menurut Badan Energi Internasional (IEA), konsumsi batu bara global mencapai 8,77 miliar ton pada tahun 2024, dan diproyeksikan akan bertahan di level tersebut hingga tahun 2027.

Global coal demand in 2024 was expected to remain stable compared to 2023. According to the International Energy Agency (IEA), global coal consumption reached 8.77 billion tons in 2024 and is projected to remain at that level until 2027.

Meskipun permintaan global stabil, harga batu bara mengalami tekanan. Sepanjang tahun 2024, harga batu bara global mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Bank Dunia, rata-rata harga batu bara pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai US$125 per ton, turun 27,7% dibandingkan tahun 2023, dan menjadi yang terendah sejak 2021.

Despite stable global demand, coal prices are under pressure. Throughout 2024, global coal prices fluctuated with a downward trend compared to the previous year. According to the World Bank, the average coal price in 2024 is projected to reach USD 125 per ton, down 27.7% compared to 2023, and the lowest since 2021.

Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia menunjukkan bahwa Harga Batu Bara Acuan (HBA) tertinggi pada tahun 2024 tercatat pada Oktober, yaitu sebesar US$131 per ton, sementara titik terendahnya pada Maret 2024 sebesar US$109 per ton.

Data from the Indonesian Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) shows that the highest Reference Coal Price (HBA) in 2024 was recorded in October, at USD 131 per ton, while the lowest point was in March 2024 at USD 109 per ton.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan harga batu bara antara lain peningkatan produksi dari negara-negara produsen utama seperti Tiongkok dan India, serta

Factors influencing the decline in coal prices include increased production from major producing countries such as China and India, as well as the shift to renewable

peralihan ke energi baru terbarukan di berbagai negara. Selain itu, kondisi geopolitik dan perang di beberapa wilayah turut mempengaruhi permintaan dan distribusi batu bara global.

energy in various countries. In addition, geopolitical conditions and wars in several regions also affect global coal demand and distribution.

Meskipun demikian, harga batu bara sempat mengalami kenaikan pada September 2024, mencapai US$125,15 per ton, didorong oleh rencana stimulus pemerintah Tiongkok yang meningkatkan permintaan.

However, coal prices experienced an increase in September 2024, reaching USD 125.15 per ton, driven by the Chinese government's stimulus plan which increased the demand.

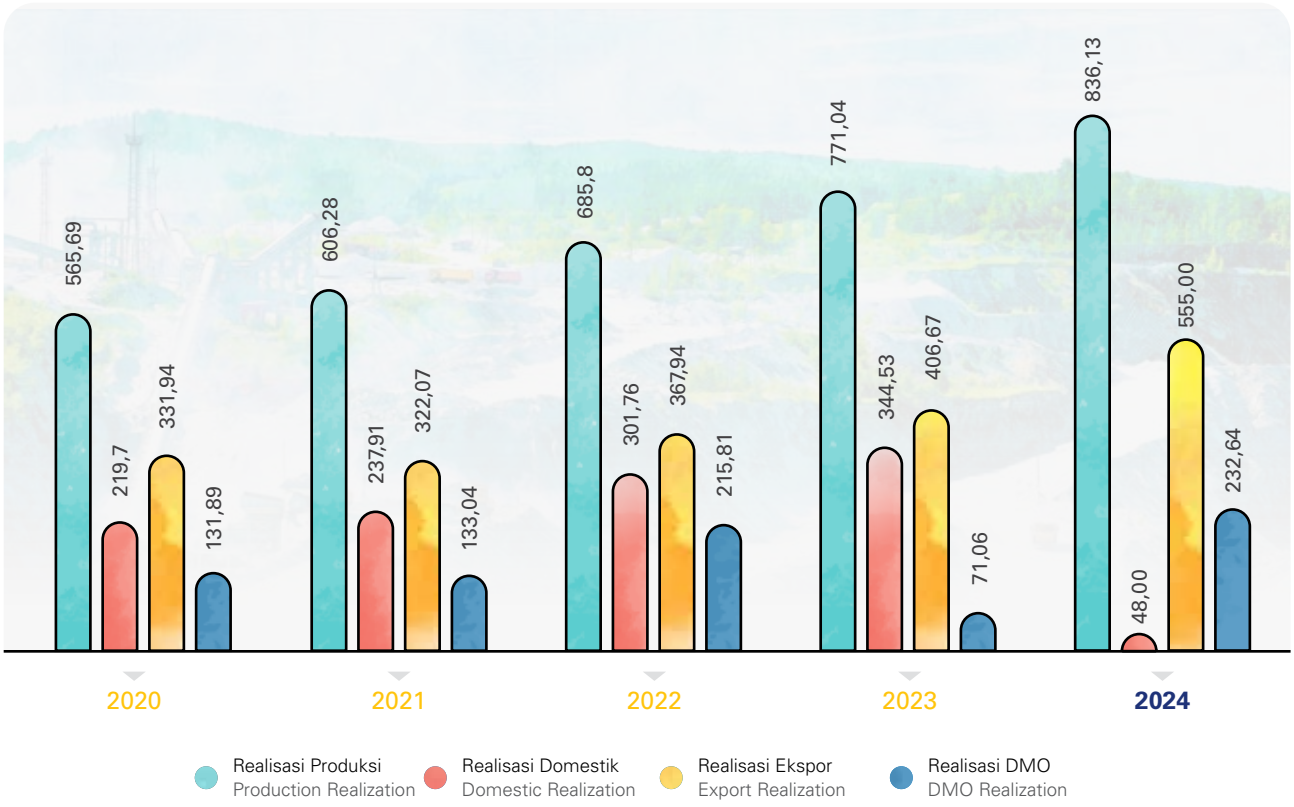
Secara keseluruhan, tren harga batu bara dunia pada tahun 2024 menunjukkan volatilitas dengan kecenderungan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan geopolitik.

Overall, the global coal price trend in 2024 shows volatility with a downward trend compared to the previous year, influenced by various economic and geopolitical factors.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa hingga 31 Desember 2024, realisasi produksi batu bara mencapai 834,10 (MODI ESDM) juta ton, meningkat 8,20% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi ini dipengaruhi oleh permintaan yang tinggi, baik dari pasar domestik maupun internasional.

The ESDM Ministry noted that as of December 31, 2024, coal production realization reached 834,10 (MODI ESDM) million tons, an increase of 8,20% compared to the previous year. This increase in production was influenced by high demand, both from domestic and international markets.

Realisasi Produksi Batu Bara Nasional Sepanjang Tahun 2024
National Coal Mining Production Realization in 2024



Kebijakan Strategis Perusahaan
Company Strategic Policy



Strategi dan Kebijakan Strategis Perusahaan

Sebagai salah satu perusahaan batu bara dengan sumber daya dan cadangan batu bara yang berlimpah, perusahaan saat ini masih berfokus untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.

Seperti yang diketahui, isu-isu keberlanjutan juga tengah menjadi perhatian besar yang tentu saja menjadi bagian penting yang harus diintegrasikan dalam strategi bisnis Perusahaan.

Selain itu, sebagai Perusahaan Publik, kami senantiasa harus memastikan keberlangsungan bisnis Perusahaan untuk memaksimalkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Kebijakan strategis perusahaan yang selaras dengan visi perusahaan tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), yang kemudian diturunkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahunnya. Perusahaan saat ini telah memperbarui kerangka strategi bisnis yang terdiri dari 4 (empat) pilar bisnis, yaitu: (1) Tambang, (2) Logistik, Infrastruktur dan *Trading*, (3) Energi, Utilitas dan *Downstream*, dan (4) *Green Business*.

Adapun di tahun 2024, beberapa aktivitas dalam kerangka 4 (empat) pilar tersebut antara lain:

Company Strategic Strategy and Policy

As one of the coal companies with abundant coal resources and reserves, the Company is currently focused on continuing the utilization of its resources while still paying attention to sustainability aspects.

As is known, sustainability issues are also a major concern and an important part that must be integrated into the Company's business strategy.

In addition, as a Public Company, we must always ensure the continuity of the Company's business to maximize added value for stakeholders.

The Company's strategic policy that is in line with the Company's vision is stated in the Company's Long-Term Plan (CLTP) which is then translated into the Company's Work Plan and Budget (CWPB) every year. The Company has currently updated its business strategy framework consisting of 4 (four) business pillars, namely: (1) Mining, (2) Logistics, Infrastructure and Trading, (3) Energy, Utilities and Downstream, and (4) Green Business.

In 2024, several activities within the framework of the 4 (four) pillars include:

1. Pilar Tambang

Di bidang tambang, Perusahaan terus berupaya melakukan penjagaan atas cadangan eksisting dan penguasaan cadangan melalui pemetaan atas potensi-potensi tambang yang ekonomis. Selain itu, Perusahaan juga terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan cadangan batu bara yang ada, hal ini terbukti dengan *tren* produksi batu bara yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Perusahaan juga mendorong peningkatan produksi entitas anak perusahaan, yaitu PT Internasional Prima Coal yang beroperasi di Kalimantan Timur. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan produksi oleh PT IPC dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara operasional, Perusahaan juga terus melakukan *cost leadership*, salah satunya dengan digitalisasi di *end-to-end* proses bisnis melalui melalui aplikasi CISEA, aplikasi yang dikembangkan secara mandiri oleh internal perusahaan. Selain itu, keberhasilan dalam melakukan optimasi penambangan yang ditunjukkan dengan keberhasilan mempertahankan tingkat nisbah kupas di angka 6,23 x (kali) dan juga lebih rendah dari target 6,44 x (kali).

2. Pilar Logistik, Infrastruktur, dan *Trading*

Posisi tambang batu bara Bukit Asam yang berada di tengah pulau Sumatra mengharuskan adanya transportasi batu bara dari tambang ke area pelabuhan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas angkutan batu bara merupakan salah satu prioritas utama bagi Perusahaan. Di tahun 2024, untuk mendukung pengembangan peningkatan kapasitas angkutan batu bara relasi TE-Kramasan yang merupakan bentuk sinergi dengan PT Kereta Api Indonesia, PTBA melakukan upaya seperti percepatan pembangunan sarana prasarana *Train Loading Station* (TLS) dan *Coal Handling Facility* (CHF) 6 dan 7 di Tanjung Enim dengan kapasitas total 20 juta ton per tahun yang diharapkan akan beroperasi pada Q2-2026.

Selain itu, optimasi kapasitas angkut kereta api eksisting juga terus ditingkatkan, salah satunya dengan penambahan gerbong dalam setiap rangkaian kereta sehingga pada tahun ini dapat terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dari segi jumlah angkutan. Tidak hanya optimasi angkutan melalui mode kereta api, tetapi perusahaan juga telah berhasil meningkatkan kapasitas angkutan batu bara dengan menggunakan jalur *trucking* khusus batu bara.

1. Mining Pillar

In the mining sector, the Company continues striving to maintain existing reserves and control reserves through mapping of economic mining potentials. In addition, the Company also continues to optimize the utilization of existing coal reserves, as shown by the trend of coal production which continues to increase each year.

The Company also encourages increased production of its subsidiary, namely PT Internasional Prima Coal which operates in East Kalimantan. This is shown by the increase in production by PT IPC from the previous year.

Operationally, the Company also continues to carry out cost leadership, one of which is by digitizing the end-to-end business process through the CISEA application, an application independently developed by the company internally. In addition, the success in optimizing mining is indicated by the success in maintaining the strip ratio at 6.23 x (times) and also lower than the target of 6.44 x (times).

2. Logistics, Infrastructure, and Trading Pillars

The location of the Bukit Asam coal mine in the middle of Sumatra Island requires coal transportation from the mine to the port area. Therefore, increasing coal transportation capacity is one of the Company's top priorities. In 2024, to support the development and capacity enhancement of coal transportation for the TE-Kramasan route as part of the synergy with PT Kereta Api Indonesia, PTBA undertook efforts such as accelerating the construction of Train Loading Station (TLS) and Coal Handling Facility (CHF) 6 and 7 in Tanjung Enim, with a total capacity of 20 million tons per year, which are expected to be operational by Q2-2026.

In addition, optimization of existing train transportation capacity is also continuously improved, including by adding carriages in each train to bring significant increase in terms of the number of transportation. Besides optimization of transportation through train mode, the company has also succeeded in increasing coal transportation capacity using special coal trucking lanes.

3. Pilar Energi, Utilitas dan *Downstream*

Perusahaan terus berusaha melakukan diversifikasi portofolio bisnis di antaranya dengan menjajaki pengembangan bisnis energi, utilitas, dan hilirisasi batu bara. Di bisnis energi, meskipun perusahaan masih mengembangkan bisnis pembangkit berbasis batu bara dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan, di saat yang bersamaan juga agresif menjajaki pengembangan bisnis energi baru dan terbarukan.

Sampai dengan saat ini Perusahaan telah mengoperasikan 3 (tiga) PLTU Mulut Tambang dan 1 (satu) PLTU di Pelabuhan, yaitu PLTU Banjarsari dengan kapasitas 2x110 MW, PLTU Sumsel 8 dengan kapasitas 2x660 MW, PLTU Tanjung Enim dengan kapasitas 3x10 MW dan PLTU Tarahan dengan kapasitas 2x8 MW. Pengoperasian PLTU Tanjung Enim dan PLTU Tarahan hanya diperuntukkan untuk kebutuhan operasional perusahaan, sedangkan 2 PLTU lainnya telah dioperasikan untuk kebutuhan komersil.

Perusahaan juga tetap melanjutkan program hilirisasi batu bara sebagai bagian dari mandat strategis negara dengan tetap mengutamakan keekonomian dari setiap proyek. Perusahaan terus menjajaki kerja sama dengan pemilik teknologi maupun peneliti untuk mengembangkan produk-produk turunan batu bara yang potensial untuk dikomersialisasi dalam jangka panjang. Beberapa inisiatif yang dilakukan salah satunya adalah kerja sama Perusahaan dengan Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN). Pada tanggal 15 Juli 2024, Perusahaan telah mengadakan *soft launching pilot project* konservasi batu bara menjadi *Artificial Graphite* dan *Anoda Sheet* untuk bahan baku baterai Lithium-ion (Li-ion) di Kawasan Industri Tanjung Enim - BACBIE. Selain itu, produk hilirisasi batu bara lainnya yang juga sedang dikembangkan PTBA adalah asam humat. Penelitian dan pengembangan batu bara kalori rendah menjadi asam humat dilakukan PTBA bersama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM). Peluncuran *Protoype* (purwarupa) asam humat telah dilakukan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Peranap, Indragiri Hulu, Riau, pada 12 Desember 2024. *Prototype* tersebut selanjutnya akan dikembangkan untuk menuju *pilot project*.

3. Energy, Utilities and Downstream Pillars

The Company continues to diversify its business portfolio, including exploring the development of energy, utilities and coal downstream businesses. In the energy business, the company is still developing a coal-based power plant business with more environmentally friendly technology and at the same time also aggressively exploring the development of new and renewable energy businesses.

As of now, the Company has operated 3 (three) Mine-Mouth Power Plants and 1 (one) Port-Based Power Plant, namely: Banjarsari Power Plant with a capacity of 2x110 MW, Sumsel 8 Power Plant with a capacity of 2x660 MW, Tanjung Enim Power Plant with a capacity of 3x10 MW, and Tarahan Power Plant with a capacity of 2x8 MW. The operation of Banko PLTU and Tarahan PLTU is only intended for the company's operational needs while the other 2 PLTUs have been operated for commercial needs.

The Company also continues the coal downstream program as part of the country's strategic mandate while prioritizing the economics of each project. The Company then continued to explore cooperation with technology owners and researchers to develop coal derivative products with potential commercialization in the long term. One of the initiatives carried out is the Company's collaboration with the National Research & Innovation Agency (BRIN) on July 15, 2024, by launching a coal conservation pilot project into Artificial Graphite and Anode Sheet for raw materials for Lithium-ion (Li-ion) batteries in the Tanjung Enim Industrial Area - BACBIE. In addition, PTBA also developed coal downstream product in the form of humid acid. Research and development of low-calorie coal into humic acid is carried out by PTBA together with Gadjah Mada University (UGM). The launch of the Humic Acid Prototype has been carried out in the Peranap Mining Business Permit (IUP) area, Indragiri Hulu, Riau, on December 12, 2024. The prototype will then be developed towards a pilot project.

4. Pilar *Green Business*

Menanggapi isu keberlanjutan yang semakin marak diperbincangkan, Perusahaan terus berupaya untuk memperluas portoflio ke bisnis hijau. Sampai dengan tahun 2024 ini, Perusahaan terus mengembangkan melalui anak perusahaannya, PT Bukit Energi Investama (PT BEI) terus mengempangkan proyek energi baru terbarukan. PT BEI telah membangun PLTS di Bandara Soekarno-Hatta bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II (Persero), yang sudah beroperasi penuh sejak Oktober 2020. PLTS tersebut berkapasitas maksimal 241 kilowatt-peak (kWp) dan terpasang di Gedung Airport Operation Control Center (AOCC). Tak hanya dengan Angkasa Pura II, PTBA bekerja sama dengan Jasa Marga Group untuk pengembangan PLTS di jalan-jalan tol. PLTS berkapasitas 400 kWp di Jalan Tol Bali-Mandara telah selesai dibangun dan diresmikan pada 21 September 2022. Perusahaan pun bekerja sama dengan PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) dalam pembangunan PLTS berkapasitas 23,07 kWp yang mencapai tahap COD pada Juni 2023. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2024, PT BEI juga telah meresmikan PLTS dengan kapasitas 61,05 kWP di area Saka Hotel, Jakarta Selatan bekerja sama dengan PT Bukit Multi Properti yang juga merupakan salah satu anak perusahaan Bukit Asam.

Kemudian, Pada tanggal 24 Oktober 2024, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melakukan peluncuran *Pilot Plant* (pabrik percontohan) *Wood Pellet* dari Kaliandra Merah di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Pengembangan Wood Pellet salah satunya dapat digunakan sebagai, bahan bakar campuran batu bara (*cofiring*) di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program budidaya Kaliandra Merah untuk biomassa yang telah dimulai PTBA pada tahun 2023. Saat ini kapasitas produksi yang mampu dihasilkan dari *Pilot Plant* sebanyak 200 kg per jam. Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan emisi karbon di sektor pertambangan melalui pencampuran biomassa dan batu bara. Pembangunan *Pilot Plant* yang fokus pada inovasi energi terbarukan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara PTBA dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta.

4. Green Business Pillar

In response to the growing discourse around sustainability, the Company continues to strive to expand its portfolio into green businesses. As of 2024, the Company, through its subsidiary PT Bukit Energi Investama (PT BEI), has been actively developing renewable energy projects. PT BEI has built a Solar Power Plant (PLTS) at Soekarno-Hatta International Airport in collaboration with PT Angkasa Pura II (Persero), which has been fully operational since October 2020. The PLTS has a maximum capacity of 241 kilowatt-peak (kWp) and is installed at the Airport Operation Control Center (AOCC) building. In addition to its partnership with Angkasa Pura II, PTBA has also collaborated with the Jasa Marga Group to develop PLTS installations along toll roads. A 400 kWp PLTS on the Bali-Mandara Toll Road has been completed and was inaugurated on September 21, 2022. Furthermore, the Company partnered with PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) to construct a 23.07 kWp PLTS, which reached its Commercial Operation Date (COD) in June 2023. Most recently, on December 12, 2024, PT BEI also inaugurated a 61.05 kWp PLTS at the Saka Hotel area in South Jakarta, in collaboration with PT Bukit Multi Properti, another subsidiary of Bukit Asam.

Meanwhile, on October 24, 2024, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) launched the Pilot Plant of Wood Pellet from Red Kaliandra in Tanjung Enim, South Sumatra. The development of wood pellets can be utilized as a co-firing fuel mixed with coal in Steam Power Plants (SPPP). This activity is a continuation of the Red Kaliandra cultivation program for biomass that PTBA started in 2023. Currently, the production capacity from the Pilot Plant is 200 kg per hour. This step is expected to contribute to reducing carbon emissions in the mining sector through mixing biomass and coal. The construction of the Pilot Plant which focuses on renewable energy innovation is the result of collaboration between PTBA and the National Development University (UPN) Veteran Yogyakarta.

Aspek Pemasaran
Marketing Aspect



Strategi Pemasaran

Sejalan dengan komitmen Perusahaan untuk menyediakan energi tanpa henti untuk mendukung ketahanan energi nasional, tahun 2024 Perusahaan kembali menerima penugasan dari pemerintah untuk memenuhi pasokan domestik, khususnya untuk industri kelistrikan dan non-kelistrikan seperti semen dan pupuk. Karena itu, salah satu fokus Perusahaan di tahun 2024 adalah menjaga keandalan pasokan penjualan ke pasar domestik.

Selain itu, PTBA juga terus meningkatkan penjualan ekspor ke sejumlah negara yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi, baik pasar eksisting maupun pasar-pasar baru, terutama di wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur. Untuk mendukung peningkatan penjualan ekspor, Perusahaan juga mengoptimalisasi angkutan batu bara melalui pelabuhan lain selain Dermaga Kertapati dan Pelabuhan Tarahan.

Pangsa Pasar

Dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan cadangan terbesar yang dimilikinya, PTBA merupakan salah satu pemain utama di industri tambang batu bara di tanah air. Produk batu bara Perusahaan dipasarkan di pasar domestik dan ekspor. PTBA juga memiliki kewajiban untuk memenuhi aturan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, atau dikenal sebagai *domestic market obligation* (DMO).

Marketing Strategy

In line with the Company's commitment to provide non-stop energy to support national economic growth, in 2024 the Company was assigned by the government to meet domestic supply, especially for the electricity and non-electricity industries such as cement and fertilizer. Therefore, one of the Company in 2024 aims to maintain the reliability of sales supply to the domestic market.

PTBA also continues to increase export sales to several countries with prospective growth, both existing markets and new markets, especially in the Southeast Asia and East Asia. To support increased export sales, the Company also optimizes coal transportation through other ports besides Kertapati Barging Port and Tarahan Port.

Market Share

With a Mining Business License (IUP) and its largest reserves, PTBA is one of the main players in the coal mining industry in the country. The Company's coal production is marketed in the domestic and export. PTBA also has an obligation to fulfill the rules for fulfilling domestic needs, or known as the domestic market obligation (DMO).

Pada tahun 2024, pangsa pasar PTBA meliputi pemenuhan domestik maupun pasar ekspor, berikut detailnya:

In 2024, PTBA's market share includes fulfilling both domestic and export markets, here are the details:

Pangsa Pasar PTBA Berdasarkan Volume Penjualan Batu Bara
PTBA Market Share Based on Coal Sales Volume

Uraian Description	2024		2023	
	Volume (ton)	Komposisi (%) Composition	Volume (ton)	Komposisi (%) Composition
Domestik Domestic	22.635.452	52,77	21.403.957	57,89
Ekspor Export	20.255.525	47,23	15.569.604	42,11
Jumlah Total	**42.890.977**	**100,00**	**36.973.561**	**100,00**

Pangsa Pasar PTBA Berdasarkan Sebaran Wilayah Penjualan

Kendati mengusung komitmen untuk mendukung ketahanan energi nasional, namun Perusahaan juga terus berupaya untuk meningkatkan penjualan ekspor. Sepanjang tahun 2024, PTBA berhasil melakukan peningkatan porsi penjualan ekspor dari tahun 2023 sebesar 42%, tumbuh menjadi 47% pada tahun 2024. Distribusi batu bara PTBA untuk pasar ekspor telah menjangkau beberapa negara di kawasan Asia, antara lain India, Korea Selatan, Tiongkok, Vietnam, Thailand, Taiwan, Jepang, Filipina, Malaysia, Hongkong, Kamboja, dan Bangladesh.

Sebaran pangsa pasar batu bara PTBA sepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini.

PTBA Market Share Based on Sales Area Distribution

Despite its commitment to support national energy security, the Company also continues to increase export sales. Throughout 2024, PTBA succeeded in increasing its export sales portion from 2023 by 42%, growing to 47% in 2024. PTBA's coal distribution for the export market has reached several countries in the Asian region, including India, South Korea, China, Vietnam, Thailand, Taiwan, Japan, the Philippines, Malaysia, Hong Kong, Cambodia, and Bangladesh.

The distribution of PTBA's coal market share throughout 2024 can be seen in the following illustration.




Indonesia
52,77%
Malaysia
2,07%
China
3,38%
Vietnam
7,08%
Phillipines
1,08%
Japan
0,67%

Total Penjualan
Total Sales

42,89
juta ton
million tons

53% Domestik
Domestic

47% Ekspor
Exsport



Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operational Overview Per Business Segment



Sesuai Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk melakukan usaha di bidang pengembangan bahan-bahan galian, terutama pertambangan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aktivitas terkait yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan perdagangan, pengelolaan fasilitas dermaga khusus batu bara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain dan memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan industri pertambangan batu bara beserta hasil olahannya, bidang pengembangan perkebunan, dan bidang pelayanan kesehatan.

In accordance with Article 3 (three) of the Company's latest Articles of Association, the Company's purpose is to conduct business in the field of development of mining materials, especially coal mining in accordance with the provisions of applicable laws and regulations and related activities that include general investigation activities, exploration, exploitation, processing, transportation and trade, management of special coal dock facilities for its own needs or those of other parties, operation of steam power plants for its own needs or those of other parties and providing consulting, and engineering services in fields related to the coal mining industry and its processed products, plantation development, and health services.

Pembahasan tinjauan operasi per segmen usaha pada Laporan Tahunan ini disajikan sesuai dengan pembagian segmen yang tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan, sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 tentang Segmen Operasi. Perusahaan membagi segmen operasinya berdasarkan produk yang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Segmen Batu Bara
   Meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan, pemeliharaan fasilitas dermaga khusus batu bara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain.

The discussion of the review of operations per business segment in this Annual Report is presented in accordance with the division of segments listed in the Company's Consolidated Financial Statements, in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 108 on Operating Segments. The Company divides its operating segments based on products which are divided into two, namely:

1. Coal Segment
   Includes general investigation activities, exploration, exploitation, processing, refining, transportation and trading, maintenance of special coal dock facilities for both its own needs and those of other parties, and operation of steam power plants for both its own needs and those of other parties.

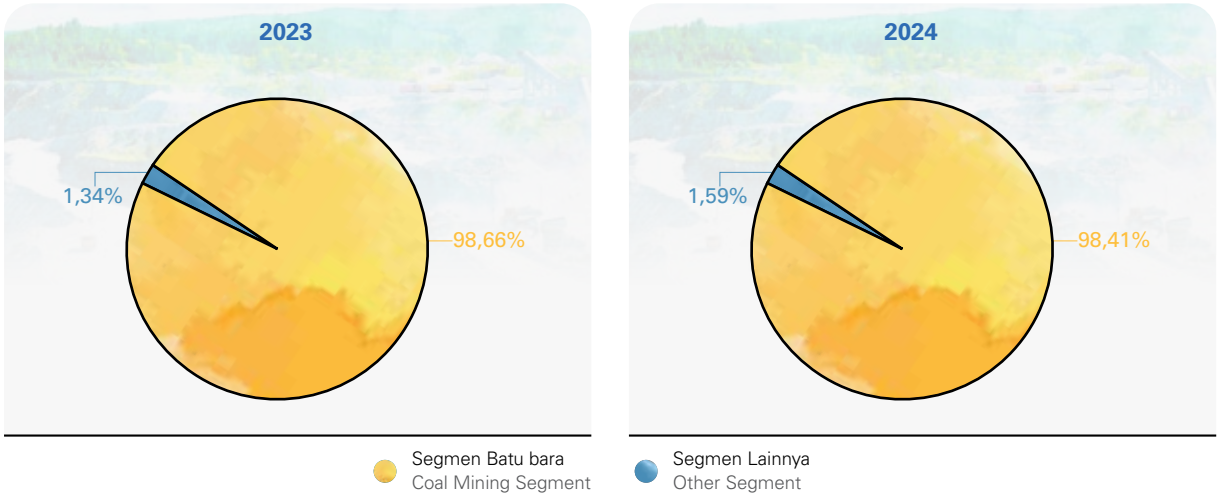
2. Segmen Lainnya
   Meliputi jasa kontraktor, pengolahan briket, perkebunan sawit, pengolahan sawit, dan jasa kesehatan.

Segmen batu bara masih menjadi kontributor utama bagi pendapatan Perusahaan. Di tahun 2024 dari total pendapatan usaha sebesar Rp42,76 triliun, segmen batu bara membukukan pendapatan sebesar Rp42,08 triliun, naik 10,83% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp37,97 triliun. Segmen batu bara memberikan kontribusi sebesar 98,41% terhadap total pendapatan Perusahaan. Sedangkan segmen lainnya memberikan kontribusi sebesar 1,59% terhadap pendapatan Perusahaan.

2. Other Segments
   Includes contractor services, briquette processing, palm oil plantations, palm oil processing, and health services.

Segmen batu bara masih menjadi kontributor utama bagi pendapatan Perusahaan. Di tahun 2024 dari total pendapatan usaha sebesar Rp42,76 triliun, segmen batu bara membukukan pendapatan sebesar Rp42,08 triliun, naik 10,83% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp37,97 triliun. Segmen batu bara memberikan kontribusi sebesar 98,41% terhadap total pendapatan Perusahaan. Sedangkan segmen lainnya memberikan kontribusi sebesar 1,59% terhadap pendapatan Perusahaan.

Segmen Usaha PTBA
PTBA Business Segment



Segmen Batu Bara

PTBA merupakan salah satu pemain terbesar di industri batu bara nasional. Perusahaan memiliki IUP batu bara seluas 65.632 Hektar (Ha) yang tersebar di beberapa lokasi di Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Riau. Selain itu, Perusahaan juga memiliki pertambangan batu bara yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, yang dioperasikan oleh entitas anak Perusahaan, yakni PT Internasional Prima Coal. Cadangan batu bara yang dimiliki Perusahaan juga tercatat sebagai salah satu yang besar di tanah air.

Dengan pengalaman panjang yang dimilikinya, PTBA dapat melakukan sejumlah inovasi, termasuk dalam pengembangan model bisnis pertambangan batu bara yang terintegrasi. Selain menjalankan kegiatan usaha penambangan batu bara, Perusahaan juga memiliki pelabuhan atau dermaga yang berada di Teluk Bayur, Padang; Kertapati, Palembang; dan Tarahan, Lampung.

Coal Segment

PTBA is one of the largest players in the national coal industry. The Company has a coal IUP covering an area of 65,632 hectares (Ha) spread across several locations in the provinces of South Sumatra, West Sumatra, and Riau. In addition, the Company also has a coal mine located in East Kalimantan Province, which is operated by the Company's subsidiary, namely PT Internasional Prima Coal. The Company's coal reserves are also recorded as one of the largest in the country.

With its experience, PTBA can carry out a number of innovations, including in developing an integrated coal mining business model. Besides carrying out coal mining business activities, the Company also has ports or barging pots located in Teluk Bayur, Padang; Kertapati, Palembang; and Tarahan, Lampung.

Sesuai dengan Keputusan Direksi PTBA No. 050/0100/2022 tentang Merek Dagang (Brand) dan Spesifikasi batu bara PT Bukit Asam Tbk, Perusahaan memiliki beragam jenis produk batu bara sesuai dengan kadar kualitas sebagai berikut:

In accordance with the Decree of the Board of Directors of PTBA No. 050/0100/2022 concerning Trademarks (Brands) and Coal Specifications of PT Bukit Asam Tbk, the Company has various types of coal products according to the quality levels as follows:

Parameter	Satuan Unit	Bukit Asam						IPC		
		BA-28	BA–42	BA–46	BA–48	BA–50	BA–61	GAR 4600	GAR 4700	GAR 4800
CV	Kcal/Kg.ar	2,800	4,200	4,500	4,800	5,000	6,100	4,600	4,700	4,800
TM	%, ar	53.00	33.00	31.00	30.00	28.00	16.00	31	28	27
IM	%, adb	16.00	15.00	15.00	14.00	13.00	6,00	15	15	15
Ash	%, adb	9.00	9.00	4.00	8.00	7.00	7,00	6	6	6
VM	%, adb	39.00	38.00	43.00	39.00	40.00	40,00	38	38	38
FC	%, adb	36.00	38.00	38.00	39.00	40.00	47,00	By Diff	By Diff	ByDiff
TS	%, adb	0.20	0.42	0.54	0.68	0.42	0.39	0.5	0.5	0.5
Ash Fushion Temperatures (oC)	Deformation	1,247	1,277	1,216	1,321	1,302	1,331	-	-	-
	Spherical	1,260	1,237	1,246	1,332	1,325	1,366	-	-	-
	Hemisphere	1,281	1,247	1,384	1,340	1,350	1,405	-	-	-
	Flow	1,303	1,257	1,413	1,373	1,392	1,445	-	-	-
Hardgrove Grindability Index		69	61	58	55	57	55	42	42	42

Tantangan dan Strategi Segmen Batu Bara

Sepanjang tahun 2024, PTBA menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam segmen batu bara yang berdampak langsung pada performa keuangan perusahaan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pelemahan indeks harga batu bara, yang mencakup *Newcastle* Index, Harga Batu Bara Acuan (HBA), dan *Indonesia Coal Index* (ICI). Fluktuasi harga batu bara masih berlanjut akibat perubahan permintaan global, kebijakan impor negara-negara besar seperti Tiongkok dan India, serta gangguan rantai pasok global, meskipun dampaknya tidak sampai seperti di tahun 2023. Penurunan indeks harga ini berakibat pada menurunnya harga rata-rata penjualan batu bara, yang selanjutnya berujung pada penurunan pendapatan perusahaan. Selain itu, terdapat kenaikan total biaya yang didorong oleh beberapa faktor di antaranya peningkatan volume produksi, angkutan, dan penjualan. Pelemahan indeks harga batu bara dan kenaikan biaya tersebut tentunya mempengaruhi margin keuntungan PTBA. Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan strategi yang efektif, termasuk efisiensi operasional, diversifikasi pendapatan, dan inovasi dalam pengembangan produk. Perusahaan aktif memantau dinamika pasar dan secara proaktif menyesuaikan strategi bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan potensi pertumbuhan di masa mendatang.

Coal Segment Challenges and Strategy

Throughout 2024, PTBA faced a number of significant challenges in the coal segment that had a direct impact on the Company's financial performance. One of the main challenges was the weakening of the coal price index, which includes the Newcastle Index, the Reference Coal Price (HBA), and the Indonesia Coal Index (ICI). Coal price fluctuations continued due to changes in global demand, import policies of major countries such as China and India, and disruptions to the global supply chain, although the impact was not as severe as in 2023. The decline in this price index resulted in a decline in the average selling price of coal, which in led to a decline in the Company's revenue. In addition, there was an increase in total costs driven by several factors including increased production volume, transportation, and sales. The weakening of the coal price index and the increase in costs certainly affected PTBA's profit margin. The Company is committed to implementing effective strategies, including operational efficiency, revenue diversification, and innovation in product development. The Company also actively monitors market dynamics and proactively adjusts business strategies to reduce negative impacts and improve future growth potential.

Produktivitas Segmen Batu Bara

Tahun 2024, total produksi dan pembelian batu bara Perusahaan tercatat sebesar 43,28 juta ton, meningkat 1,34 juta ton atau 3,19% dari tahun sebelumnya yang sebesar 41,94 juta ton. Produksi batu bara tersebut berasal dari unit pertambangan Perusahaan yang berada di beberapa lokasi, yakni Unit Pertambangan Tanjung Enim (UPTE) yang berlokasi di area Tambang Air Laya, Muara Tiga Besar (MTB), Banko Barat, dan Banko Tengah, serta area Peranap (Riau). Selain itu, produksi batu bara PTBA juga berasal dari 1 (satu) unit pertambangan yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, yang dioperasikan oleh entitas anak Perusahaan, yakni PT Internasional Prima Coal.

Peningkatan produksi batu bara di tahun 2024 disebabkan oleh adanya peningkatan permintaan baik di dalam maupun luar negeri.

Berikut adalah total produksi batu bara yang berhasil dibukukan Perusahaan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

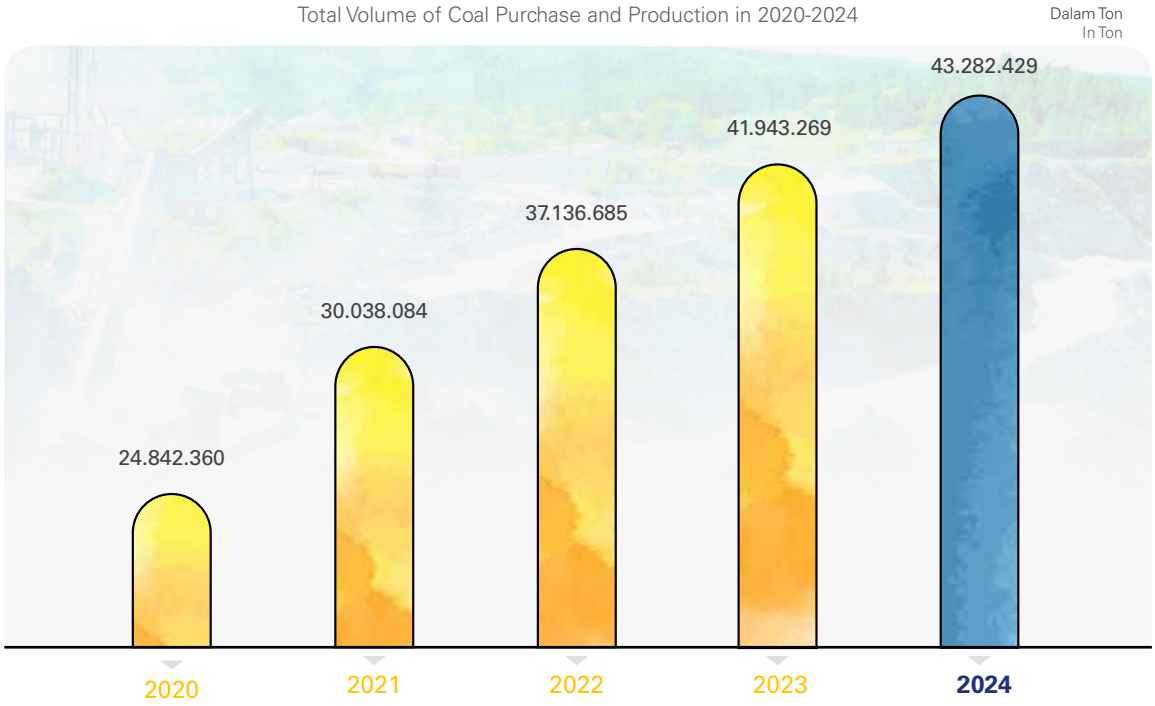
Coal Segment Productivity

In 2024, the Company's total coal production and procurement reached 43.28 million tons, marking an increase of 1.34 million tons or 3.19% from 41.94 million tons in the previous year. This coal production was sourced from the Company's mining units located in several areas, including the Tanjung Enim Mining Unit (UPTE), which encompasses the Air Laya, Muara Tiga Besar (MTB), Banko Barat, and Banko Tengah mines, as well as the Peranap area in Riau. In addition, PTBA's coal output was also derived from a mining unit situated in East Kalimantan Province, operated by the Company's subsidiary, PT Internasional Prima Coal.

The increase in coal production in 2024 is due to increased demand both domestically and abroad.

The following is the total coal production that the company has recorded in the last 5 (five) years.

Total Volume Produksi dan Pembelian Batu Bara 2020-2024
Total Volume of Coal Purchase and Production in 2020-2024



Seiring dengan meningkatnya total produksi dan pembelian batu bara, volume angkutan batu bara juga mengalami peningkatan. Di tahun 2024, total volume angkutan batu bara tercatat mencapai 38,17 juta ton, meningkat 17,74%, dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 32,42 juta ton.

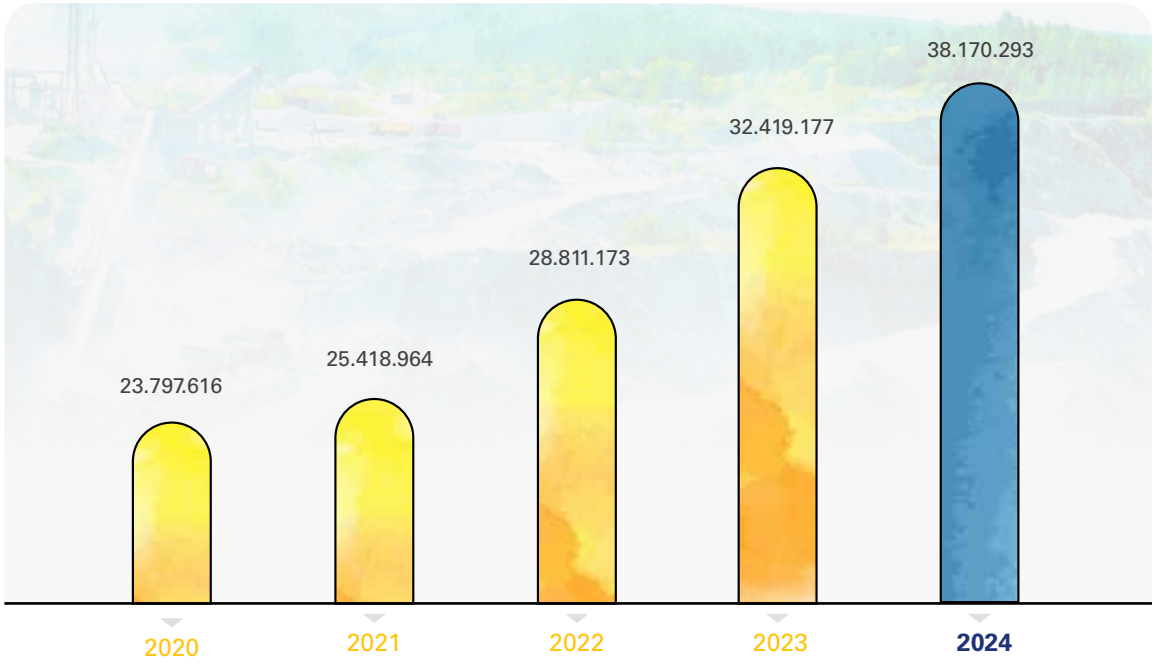
Along with the increase in total coal production and purchases, the volume of coal transportation has also increased. In 2024, the total volume of coal transportation was recorded at 38.17 million tons, an increase of 17.74%, compared to 2023 which was 32.42 million tons.

Volume angkutan batu bara ke Tarahan tercatat mencapai 27,46 juta ton di tahun 2024, meningkat 8,02% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 25,43 juta ton. Sementara volume angkutan batu bara ke Kertapati, tercatat mencapai 7,97 juta ton di tahun 2024, meningkat 13,94% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 6,99 juta ton. Pada Tahun 2024, terdapat juga realisasi angkutan batu bara menggunakan jalur *trucking* khusus batu bara ke pelabuhan lain sebesar 2,74 juta ton. Berikut adalah total volume angkutan batu bara ke Tarahan, Kertapati, dan Pelabuhan Lain dalam 5 (lima) tahun terakhir.

The volume of coal transportation to Tarahan reached 27.46 million tons in 2024, an increase of 8.02% compared to 25.43 million tons in 2023. Meanwhile, the volume of coal transported to Kertapati reached 7.97 million tons in 2024, rising by 13.94% from 6.99 million tons in 2023. In 2024, there was also a realization of coal transportation via dedicated trucking routes to other ports amounting to 2.74 million tons. Below is the total volume of coal transported to Tarahan, Kertapati, and Other Ports over the past five years.

Total Volume Angkutan Batu Bara
Total Coal Transportation Volume

Dalam Ton
In Ton



Perusahaan bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, untuk mengangkut batu bara dari lokasi tambang ke lokasi pelabuhan dan dermaga milik Perusahaan yang berada di Kertapati, Palembang dan Tarahan, Lampung.

The Company partnered with the state-owned railway company, PT KAI, to transport coal from the mining location to the Company's ports and barging ports located in Kertapati, Palembang and Tarahan, Lampung.

Dari sisi volume penjualan batu bara, sepanjang tahun 2024, Perusahaan telah mencatatkan penjualan batu bara dengan total volume sebesar 42,89 juta ton, naik 16,00% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 36,97 juta ton. Peningkatan ini seiring dipengaruhi oleh kenaikan kapasitas volume angkutan batu bara.

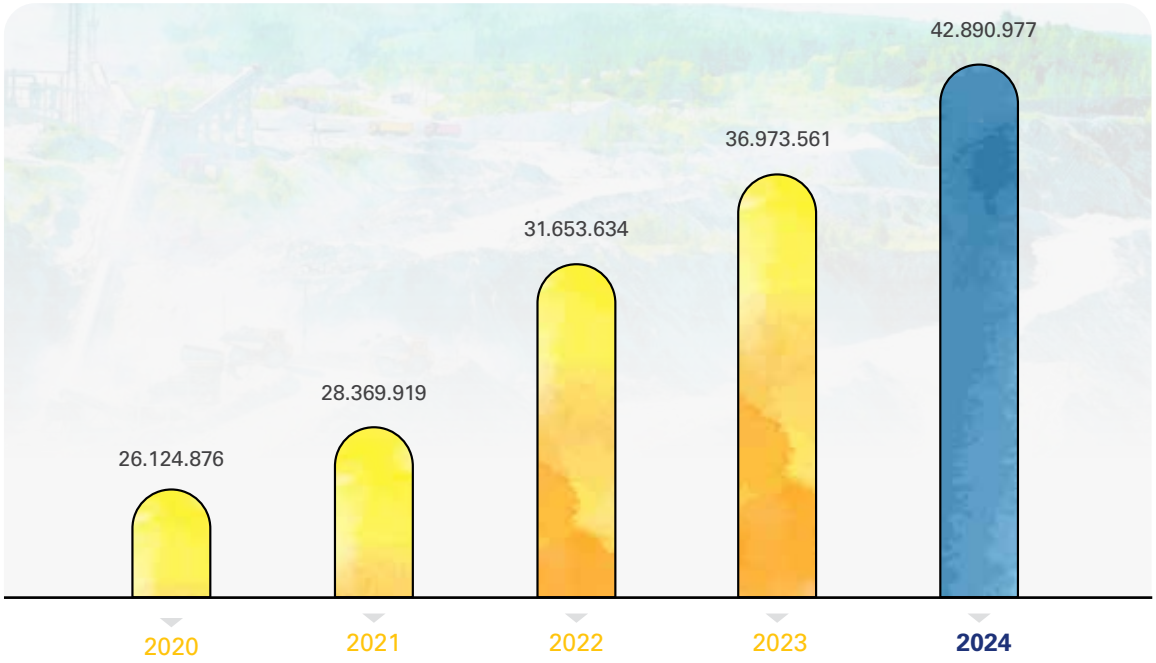
In terms of coal sales volume, throughout 2024, the Company has recorded coal sales with a total volume of 42.89 million tons, up 16.00% compared to 2023 which reached 36.97 million tons. This increase is in line with the influence of the increase in coal transportation volume capacity.

Berikut adalah total volume penjualan batu bara domestik dan ekspor dalam 5 (lima) tahun terakhir.

The following is the total volume of domestic and export coal sales in the last 5 (five) years.

Total Volume Penjualan Batu Bara
Total Coal Sales Volume

Dalam Ton
In Ton



Adapun dari total volume penjualan batu bara tahun 2024, penjualan domestik tercatat sebesar 22,63 juta ton, meningkat 5,75%, di tahun 2024, dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 21,40 juta ton. Sedangkan penjualan ekspor tercatat sebesar 20,26 juta ton, mengalami peningkatan 30,10% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 15,57 juta ton. Peningkatan ini seiring dengan upaya perusahaan untuk memaksimalkan pasar di dalam negeri serta peluang ekspor untuk mempertahankan kinerja yang baik.

As for the total coal sales volume in 2024, domestic sales were recorded at 22.63 million tons, an increase of 5.75% in 2024, compared to 2023 which reached 21.40 million tons. While export sales were recorded at 20.26 million tons, an increase of 30.10% compared to 2023 which reached 15.57 million tons. This increase was due to. This increase is in line with the company's efforts to maximize the domestic market and export opportunities to maintain good performance.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen

Pendapatan yang diperoleh Perusahaan dari segmen batu bara juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp42,08 triliun atau naik 10,83% dari tahun sebelumnya sebesar Rp37,97 triliun. Hal tersebut juga berdampak pada turunnya/naiknya laba tahun berjalan dari segmen batu bara menjadi sebesar Rp3,61 triliun, atau turun 33,26% dari tahun sebelumnya sebesar Rp5,41 triliun.

Segment Revenue and Profitability

The Company's revenue from the coal segment also decreased to Rp42.08 trillion or increase 10.83% from the previous year of Rp37.97 trillion. This also had an impact on the decrease/increase in profit for the year from the coal segment to Rp3.61 trillion, or decreased 33.26% from the previous year of Rp5.41 trillion.

Segmen Lainnya

Sesuai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan PTBA, Perusahaan memiliki segmen lainnya sebagai berikut:

1. Aktivitas *Holding*
   Segmen *holding* PTBA dijalankan oleh tiga perusahaan utama baik strategis *holding* ataupun operasional *holding*. Tiga Anak usaha tersebut yakni sebagai berikut:

Other Segments

According to the Notes to the Financial Statements of PTBA, the Company has other segments as follows:

1. Holding Activities
   PTBA's holding segment is run by three main companies, both strategic holding and operational holding. The three subsidiaries are as follows:

a. *Subholding* Pembangkit Tenaga Listrik dijalankan oleh PT Bukit Energi Investama (PT BEI). PT BEI melakukan pengelolaan atas anak usaha PT Bukit Energi Service Terpadu (PT BEST) yang bergerak di bidang Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M). Selain sebagai perusahaan *holding*, PT BEI juga tetap melakukan aktivitas operasional, khususnya energi baru dan terbarukan (EBT), seperti PLTS Jalan Tol Bali-Mandara bekerja sama dengan PT Jasa Marga (Persero) dan *Rooftop* PLTS di Bandara Soekarno Hatta bekerja sama dengan PT Angkasa Pura (Persero) II.

b. *Subholding* Kepelabuhanan dan Angkutan Perairan dijalankan oleh PT Bukit Asam Prima (PT BAP). PT BAP memiliki anak usaha sebagai berikut: (a) PT Bukit Prima Bahari (PT BPB) yang bergerak di bidang Transportasi Laut, (b) PT Pelabuhan Bukit Prima (PT PBP) yang bergerak di bidang Jasa Pemeliharaan Pelabuhan, dan (c) PT Penajam Internasional Terminal (PT PIT) yang bergerak di bidang Jasa Pemeliharaan Dermaga. Selain kegiatan usaha pengelolaan anak perusahaan, PT BAP sendiri juga melakukan kegiatan *trading* batu bara.

c. *Subholding* lainnya dijalankan oleh PT Bukit Multi Investama (PT BMI) yang melakukan pengelolaan atas anak usaha sebagai berikut: (a) PT Satria Bahana Sarana (PT SBS) yang bergerak di bidang kontraktor jasa penambangan, (b) PT Bukit Asam Medika (PT BAM) yang bergerak di bidang jasa kesehatan, (c) PT Bumi Sawindo Permai (PT BSP) yang bergerak di bidang perkebunan, dan (d) PT Bukit Multi Properti (PT BMP) yang bergerak di bidang pengelolaan aset dan properti.

2. Jasa Kontraktor Penambangan
Segmen ini dijalankan oleh afiliasi PTBA, yakni PT SBS, yang bergerak dibidang usaha jasa penambangan. Kegiatan usaha difokuskan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, utamanya untuk mendukung produksi batu bara PTBA.

3. Pembangkit Listrik
Aktivitas segmen pembangkit tenaga listrik dijalankan oleh Afiliasi PTBA, yakni PT Bukit Pembangkit Innovative (PT BPI) dan PT Huadian Bukit Asam Power (PT HBAP). PT BPI telah beroperasi komersial sejak tahun 2015 dengan kapasitas 2x110 MW berlokasi di Lahat, Sumatera Selatan. Sedangkan, PT HBAP telah beroperasi komersial pada 7 Oktober 2023 dengan kapasitas 2x660 MW dan menjadi PLTU mulut tambang terbesar di Asia Tenggara. Selain pembangkitan listrik, PTBA melalui PT Bukit Energi Service Terpadu (PT BEST) juga merambah bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M). PT BEST sendiri melakukan kegiatan O&M pada PLTU yang dimiliki oleh PTBA di Tanjung Enim, Sumatera Selatan dan Tarahan, Lampung, serta saat juga melakukan pengelolaan terhadap beberapa PLTU lainnya di pulau Sumatra.

a. The Power Plant Subholding is run by PT Bukit Energi Investama (PT BEI). PT BEI manages its subsidiary PT Bukit Energi Service Terpadu (PT BEST) which is engaged in Operation and Maintenance (O&M) Service. PT BEI also continues to carry out operational activities, especially new and renewable energy (EBT), such as the Bali-Mandara Toll Road SPPP in collaboration with PT Jasa Marga (Persero) and the Rooftop SPPP at Soekarno Hatta Airport in collaboration with PT Angkasa Pura (Persero) II.

b. The Port and Water Transportation Subholding is run by PT Bukit Asam Prima (PT BAP). PT BAP has the following subsidiaries: (a) PT Bukit Prima Bahari (PT BPB) engaging in Marine Transportation, (b) PT Pelabuhan Bukit Prima (PT PBP) engaging in Port Maintenance Services, and (c) PT Penajam Internasional Terminal (PT PIT) engaging in Dock Maintenance Services. In addition to the business activities of managing subsidiaries, PT BAP also carries out coal trading activities.

c. Other subholdings are run by PT Bukit Multi Investama (PT BMI) which manages the following subsidiaries: (a) PT Satria Bahana Sarana (PT SBS) operating as mining service contractors, (b) PT Bukit Asam Medika (PT BAM) operating in health services, (c) PT Bumi Sawindo Permai (PT BSP) operating in plantations, and (d) PT Bukit Multi Properti (PT BMP) operating in asset and property management.

2. Mining Contractor Services
This segment is run by PTBA's affiliate, namely PT SBS, which is engaged in the mining services business. Business activities are focused in Tanjung Enim, South Sumatra, mainly to support PTBA's coal production.

3. Power Generation
The power generation segment activities are run by PTBA's affiliates, namely PT Bukit Pembangkit Innovative (PT BPI) and PT Huadian Bukit Asam Power (PT HBAP). PT BPI has been operating commercially since 2015 with a capacity of 2x110 MW located in Lahat, South Sumatra. Meanwhile, PT HBAP has been operating commercially on October 7, 2023 with a capacity of 2x660 MW and is the largest mine-mouth PLTU in Southeast Asia. In addition to electricity generation, PTBA through PT Bukit Energi Service Terpadu (PT BEST) has also expanded into the Operation and Maintenance (O&M) Services business. PT BEST itself carries out O&M activities at the PLTU owned by PTBA in Tanjung Enim, South Sumatra and Tarahan, Lampung, and also manages several other PLTUs on the island of Sumatra.

4. Pengelolaan Briket
   Pengelolaan Briket dilakukan sendiri oleh PTBA melalui Unit Usaha Briket yang berlokasi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan dan Tarahan, Lampung.
5. Perkebunan dan Pengolahan Sawit
   Grup usaha PTBA juga memiliki segmen perkebunan kelapa sawit yang dimiliki secara langsung oleh afiliasi PTBA, yakni PT Bumi Sawindo Permai (PT BSP). PT BSP mengelola lahan sawit yang berlokasi di Tanjung Agung, Muara Enim, Sumatera Selatan.
6. Jasa Kesehatan
   Untuk menunjang kesehatan Pegawai PTBA pada khususnya dan mitra PTBA di Tanjung Enim, PTBA mendirikan PT Bukit Asam Medika (PT BAM), yang melakukan pengelolaan Rumah Sakit PTBA dan beberapa klinik di Tanjung Enim.
7. Jasa Kepelabuhanan dan Pengangkutan Perairan
   Usaha ini dijalankan oleh tiga afiliasi PTBA, yakni PT BPB, PT PBP dan PT PIT.

Tantangan dan Strategi Segmen Lainnya

PTBA memiliki sejumlah segmen bisnis lainnya di luar penambangan batu bara, yang masing-masing menghadapi tantangan dan peluangnya sendiri sepanjang tahun 2024. Oleh karena itu, selaras dengan strategi PTBA, anak dan afiliasi perusahaan juga turut serta melakukan optimasi di berbagai lini untuk meningkatkan efisiensi. Dalam segmen jasa kontraktor penambangan, melalui salah satu anak usahanya, yaitu PT Satria Bahana Sarana (PT SBS), terus dioptimalkan untuk memenuhi target produksi PTBA secara keseluruhan. Sepanjang tahun 2024, PT SBS berhasil meningkatkan kontribusinya hingga 5,18% terhadap pencapaian produksi batu bara PTBA dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, kontribusi PT SBS di tahun 2024 ini sebesar 18,84% dari total produksi PTBA, atau ekuivalen dengan 8,15 juta ton. Pertumbuhan ini menunjukkan peran penting PT SBS dalam mendukung pencapaian kinerja produksi PTBA.

Dalam segmen pembangkit listrik, PTBA mengalami beberapa tantangan. Sepanjang 2024, PT BPI menghadapi penurunan kinerja, terutama karena peningkatan jam rawatan di PLTU Banjarsari. Selain itu, PT HBAP, meskipun telah mulai beroperasi namun belum mencapai *full capacity* karena terkendala transmisi yang ada. Tantangan-tantangan ini memerlukan strategi untuk fokus pada peningkatan efisiensi operasional dan pengelolaan jadwal perawatan yang lebih baik untuk mengurangi *downtime*. Berbagai upaya seperti komunikasi dengan pihak terkait untuk percepatan terus dilakukan.

Segmen perkebunan melalui PT BSP menghadapi penurunan kinerja keuangan yang disebabkan oleh penurunan harga *Crude Palm Oil* (CPO), yang berdampak negatif terhadap harga rata-rata penjualan tandan buah

4. Briquette Management
   Briquette management is carried out by PTBA itself through the Briquette Business Unit located in Tanjung Enim, South Sumatra and Tarahan, Lampung.
5. Palm Oil Plantation and Processing
   The PTBA business group also has a palm oil plantation segment directly owned by PTBA's affiliate, namely PT Bumi Sawindo Permai (PT BSP). PT BSP manages palm oil land located in Tanjung Agung, Muara Enim, South Sumatra.
6. Health Services
   To support the health of PTBA employees in particular and PTBA partners in Tanjung Enim, PTBA established PT Bukit Asam Medika (PT BAM), which manages the PTBA Hospital and several clinics in Tanjung Enim.
7. Port and Water Transportation Services
   This business is run by three PTBA affiliates, namely PT BPB, PT PBP and PT PIT.

Other Segment Challenges and Strategies

PTBA has several other business segments outside of coal mining, where each of which faces its own challenges and opportunities throughout 2024. Therefore, in line with PTBA's strategy, the company's subsidiaries and affiliates are also participating in optimizing various lines to increase efficiency. In the mining contractor services segment, through one of its subsidiaries, PT Satria Bahana Sarana (PT SBS), continues to be optimized to meet PTBA's overall production target. Throughout 2024, PT SBS managed to increase its contribution by 5.18% to PTBA's coal production achievement compared to the previous year, with a contribution in 2024 of 18.84% of PTBA's total production, or equivalent to 8.15 million tons. This growth shows the important role of PT SBS in supporting PTBA's production performance achievement.

In the power generation segment, PTBA experienced several challenges. Throughout 2024, PT BPI faced a decline in performance, mainly due to increased maintenance hours at the Banjarsari PLTU. In addition, PT HBAP, although it has started operating, has not reached full capacity due to existing transmission constraints. These challenges required a strategy that focuses on improving operational efficiency and better management of maintenance schedules to reduce downtime. Various efforts such as communication with related parties for acceleration continue to be carried out.

The plantation segment through PT BSP faced a decline in financial performance due to the decline in the price of Crude Palm Oil (CPO), which had a negative impact on the average selling price of fresh fruit bunches

segar (TBS). Strategi untuk mengatasi tantangan ini melibatkan penjajakan diversifikasi produk perkebunan dan peningkatan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya produksi.

(FFB). The strategy to overcome this challenge involves exploring plantation product diversification and increasing operational efficiency to reduce production costs.

Dalam segmen jasa pengangkutan dan pelabuhan perairan, baik PT BPB, PT PBP, dan PT PIT mengalami peningkatan kinerja sejalan dengan peningkatan volume penjualan PTBA. PT BAP, sebagai induk dari ketiga perusahaan tersebut, turut berkontribusi dalam bisnis *trading* melalui pembelian batu bara *High CV* sebesar 0,12 juta ton di tahun 2024 ini. Strategi dalam segmen ini berfokus pada ekspansi dan peningkatan kapasitas infrastruktur pelabuhan untuk mendukung peningkatan volume penjualan batu bara dan diversifikasi portofolio tujuan layanan logistik.

In the transportation and water port services segment, both PT BPB, PT PBP, and PT PIT experienced improved performance in line with the increase in PTBA's sales volume. PT BAP, as the parent company of the three companies, also contributed to the trading business by purchasing 0.12 million tons of High CV coal in 2024. The strategy in this segment focuses on expanding and increasing the capacity of port infrastructure to support increasing coal sales volumes and diversifying the portfolio of logistics service destinations.

Terakhir, dari segi energi baru terbarukan, melalui anak perusahaannya PT Bukit energi Investama (PT BEI), perusahaan terus mengembangkan fokus perusahaan untuk memperluas portofolio energi bersih. Berbagai proyek-proyek baru terus berusaha untuk dikembangkan meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan, seperti izin dari PLN untuk masuk ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Lastly, in terms of new renewable energy, through its subsidiary PT Bukit Energi Investama (PT BEI), the Company continues to expand its clean energy portfolio. Various new projects continue to be developed despite facing various challenges, such as permits from PLN to enter the Electricity Supply Business Plan (ESBP).

Dengan pendekatan yang terintegrasi dan strategis terhadap segmen bisnis lainnya, PTBA berupaya mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan setiap peluang untuk pertumbuhan dan peningkatan kinerja di masa depan, khususnya dari kontribusi segmen bisnis lainnya.

With an integrated and strategic approach to other business segments, PTBA seeks to overcome existing challenges and take advantage of every opportunity for growth and improved performance in the future, especially from the contribution of other business segments.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Lainnya

Tahun 2024, Perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp0,68 triliun dari segmen lainnya, meningkat 31,76% dari tahun sebelumnya sebesar Rp0,52 triliun. Hal tersebut disebabkan peningkatan kinerja anak perusahaan. Sejalan dengan peningkatan pendapatan tersebut, laba tahun berjalan yang dibukukan segmen lainnya juga mengalami peningkatan menjadi Rp1,19 triliun, dari tahun sebelumnya sebesar Rp0,88 triliun.

Other Segment Revenue and Profitability

In 2024, the Company posted revenue of Rp0,68 trillion from other segments, increasing 31.76% from the previous year of Rp0.52 trillion. This was due to improved performance of subsidiaries. In line with the increase in revenue, the current year's profit recorded by other segments also increased to Rp1.19 billion, from the previous year of Rp0.88 billion.

Tinjauan Keuangan
Financial Overview



Standar Penyajian Informasi Keuangan dan Kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Dalam menyusun analisis dan pembahasan kinerja keuangan dalam Laporan Tahunan ini, Perusahaan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bukit Asam Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan memberikan opini pada laporan konsolidasian disajikan secara "wajar" dalam semua hal yang material.

Penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bukit Asam Tbk, disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Pembahasan kinerja keuangan Perusahaan disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasian dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini.

Financial Information Presentation Standards and Compliance with Financial Accounting Standards

In preparing the analysis and discussion of financial performance in this Annual Report, the Company refers to the Consolidated Financial Statements of PT Bukit Asam Tbk for the fiscal years ending December 31, 2024 and 2023, which were audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia), and received an unqualified opinion, stating that the consolidated financial statements were presented "fairly" in all material respects.

The presentation and disclosure of the Consolidated Financial Statements of PT Bukit Asam Tbk, are prepared in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, which include the Statement of Financial Accounting Standards and Interpretation of Financial Accounting Standards issued by the Financial Accounting Standards Board-Indonesian Institute of Accountants. The discussion of the Company's financial performance is presented by considering the explanation in the notes to the Consolidated Financial Statements from the external auditor as an integral part of this Annual Report.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
ASET ASSETS				
Aset Lancar Current Assets	15.233.514	15.148.356	85.158	0,56
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	26.552.062	23.616.833	2.935.229	12,43
Jumlah Aset Total Assets	**41.785.576**	**38.765.189**	**3.020.387**	**7,79**
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY				
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	11.974.820	9.968.101	2.006.719	20,13
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	7.166.944	7.233.892	(66.948)	(0,93)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**19.141.764**	**17.201.993**	**1.939.771**	**11,28**
Jumlah Ekuitas Total Equity	**22.643.812**	**21.563.196**	**1.080.616**	**5,01**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total of Liabilities and Equity	**41.785.576**	**38.765.189**	**3.020.387**	**7,79**

Posisi keuangan konsolidasian PTBA tahun 2024, secara umum menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan mencatat peningkatan aset sebesar 7,79%, peningkatan liabilitas sebesar 11,28%, dan peningkatan ekuitas sebesar 5,01%.

PTBA's consolidated financial position in 2024 is generally experienced an increase compared to the previous year. The company recorded an increase in assets of 7.79%, an increase n liabilities of 11.28%, and an increase in equity of 5.01%.

Aset

Assets

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Aset Lancar Current Assets	15.233.514	15.148.356	85.158	0,56
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	26.552.062	23.616.833	2.935.229	12,43
Jumlah Aset Total Assets	**41.785.576**	**38.765.189**	**3.020.387**	**7,79**

Total aset Perusahaan per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp41,79 triliun, mengalami peningkatan Rp3,02 triliun atau 7,79% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp38,77 triliun. Komposisi aset Perusahaan tahun 2024 masih relatif berimbang antara aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar Perusahaan tercatat sebesar Rp15,23 triliun atau setara dengan 36,46%, sedangkan aset tidak lancar tercatat sebesar Rp26,55 triliun atau 63,54% dari total aset.

The Company's total assets as of December 31, 2024 were recorded at Rp41.79 trillion, an increase of Rp3.02 trillion or 7.79% compared to 2023 which was Rp38.77 trillion. The composition of the Company's assets in 2024 is still relatively balanced between current assets and non-current assets. The Company's current assets were recorded at Rp15.23 trillion or equivalent to 36.46%, while non-current assets were recorded at Rp26.55 trillion or 63.54% of total assets.

Aset Lancar

Currrent Assets

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	4.132.858	4.138.867	(6.009)	(0,15)
Piutang Usaha, Neto Trade Receivables, Net	5.030.071	3.797.292	1.232.779	32,46
Aset Keuangan yang Dinilai pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain Financial Assets at Fair Value through Other Comprehensive Income	425.767	875.330	(449.563)	(51,36)
Persediaan Inventories	4.869.337	5.499.614	(630.277)	(11,46)
Deposito Berjangka Jatuh Tempo di atas 3 Bulan dan Kurang dari 1 Tahun Time Deposits with Maturities More Than 3 Months and Less Than 1 Years	242.355	541.818	(299.463)	(55,27)
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	533.126	295.435	237.691	80,45
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	**15.233.514**	**15.148.356**	**85.158**	**0,56**

Jumlah aset lancar Perusahaan tahun 2024 tercatat sebesar Rp15,23 triliun, mengalami peningkatan Rp85,16 miliar atau 0,56%, jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp15,15 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah piutang usaha.

The Company's current assets in 2024 were recorded at Rp15.23 trillion, an increase of Rp85.16 billion or 0.56%, compared to 2023 of Rp15.15 trillion. This increase was mainly due to increase in trade receivables.

Kas dan Setara Kas

Pada 31 Desember 2024, posisi kas dan setara kas Perusahaan tercatat sebesar Rp4,13 triliun, relatif sama dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,14 triliun.

Cash and Cash Equivalents

As of December 31, 2024, the Company's cash and cash equivalents position was recorded at Rp4.13 trillion, relatively the same as the same period in the previous year of Rp4.14 trillion.

Piutang Usaha, Neto

Jumlah piutang usaha neto Perusahaan pada akhir periode tahun 2024 tercatat sebesar Rp5,03 triliun, meningkat Rp1,23 triliun atau setara dengan 32,46% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,80 triliun. Hal ini seiring dengan meningkatnya pendapatan usaha.

Trade Receivable, Net

The Company's trade receivable net at the end of the 2024 period were recorded at Rp5.03 trillion, an increaseof Rp1.23 trillion or equivalent to 32.46% compared to the previous year of Rp3.80 trillion. This is in line with increasing business revenue.

Aset Keuangan yang Dinilai Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain

Jumlah aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain di tahun 2024 tercatat sebesar Rp0,43 triliun, mengalami penurunan Rp0,45 triliun atau 51,36%, dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp0,88 triliun. Hal ini disebabkan oleh adanya pelepasan aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Financial Assets at Fair Value through Other Comprehensive Income

The amount of financial Assets at Fair Value through Other Comprehensive Income in 2024 was recorded at Rp0.43 trillion, increasing by Rp0.45 trillion or 51.36%, compared to the previous year of Rp0.88 trillion. This is due to the release of Financial Assets assessed at fair value through other comprehensive income.

Persediaan

Nilai persediaan Perusahaan di tahun 2024, tercatat sebesar Rp4,87 triliun, menurun Rp0,63 triliun atau 11,46% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp5,50 triliun. Adanya penurunan volume persedian batu bara menyesuaikan permintaan pembeli, cuaca dan lain-lain.

Deposito Berjangka Jatuh Tempo di atas 3 Bulan dan Kurang dari 1 tahun

Jumlah deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun pada tahun 2024, tercatat sebesar Rp0,24 triliun, mengalami penurunan Rp0,30 triliun atau 55,27%, dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp0,54 triliun. Hal ini disebabkan oleh adanya pengeluaran kas untuk pembayaran dividen atas tahun buku 2023.

Aset Lancar Lainnya

Jumlah aset lancar lainnya tahun 2024 tercatat sebesar Rp0,53 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp0,24 triliun atau 80,45%, dari Rp0,30 triliun di tahun 2023.

Inventories

The Company's inventory value in 2024 was recorded at Rp4.87 trillion, a decrease of Rp0.63 trillion or 11.46% compared to the previous year's figure of Rp5.50 trillion. The decline was due to a reduction in coal inventory volume, in line with adjustments to buyer demand, weather conditions, and other factors.

Time Deposits with Maturities of More than 3 Months and Less than 1 Year

The amount of time deposits maturing above 3 months and less than 1 year in 2024, was recorded at Rp0.24 trillion, a decrease of Rp0.30 trillion or 55.27%, compared to the previous year of Rp0.54 trillion. This was due to cash expenditures for dividend payments for the 2023 financial year.

Other Current Assets

The amount of other current assets in 2024 was recorded at Rp0.53 trillion, experiencing a decrease of Rp0.24 trillion or 80.45%, from Rp0.30 trillion in 2023.

Aset Tidak Lancar / Non-current Assets

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Piutang Usaha, Neto Trade Receivables, Net	-	188.271	(188.271)	-
Piutang Lainnya dari Pihak Berelasi Other Receivables from Related Parties	29.005	18.683	10.322	55,25
Investasi pada Entitas Asosiasi Investments in Associates	71.655	-	71.655	-
Investasi pada Ventura Bersama Investments in Joint Ventures	8.610.010	7.263.276	1.346.734	18,54
Properti Pertambangan Mining Properties	3.412.097	3.271.657	140.440	4,29
Aset Tetap Fixed Assets	8.735.714	8.566.210	169.504	1,98
Tanaman Produktif Bearer Plants	65.063	72.820	(7.757)	(10,65)
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes				
• Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax	89.786	25.370	64.416	253,91
• Pajak Lain-lain Other Taxes	3.318.520	2.528.981	789.539	31,22
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	1.258.806	1.208.683	50.123	4,15
Goodwill	102.077	102.077	-	-
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-current Assets	859.329	370.805	488.524	131,75
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-current Assets	**26.552.062**	**23.616.833**	**2.935.229**	**12,43**

Jumlah aset tidak lancar Perusahaan tahun 2024, tercatat sebesar Rp26,55 triliun, meningkat Rp2,94 triliun atau 12,43% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp23,62 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya investasi pada ventura bersama dan pajak dibayar di muka.

The Company's total non-current assets in 2024 were recorded at Rp26.55 trillion, an increase of Rp2.94 trillion or 12.43 compared to 2023 of Rp23.62 trillion. This increase was mainly due to increased investments in joint ventures and prepaid taxes.

Piutang Usaha, Neto

Jumlah piutang usaha neto pada aset tidak lancar Perusahaan per 31 Desember 2024 tercatat nihil, atau turun dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp0,19 triliun.

Trade Receivables, Net

The total net trade receivables in the Company's non-current assets as of December 31, 2024 nil of compared to 2023 of Rp0.19 trillion.

Piutang Lainnya dari Pihak Berelasi

Jumlah piutang lainnya dari pihak berelasi Perusahaan di tahun 2024 tercatat sebesar Rp29,01 miliar, mengalami peningkatan Rp10,32 miliar atau 55,25% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp18,68 miliar.

Other Receivables from Related Parties

The total other receivables from the Company's related parties in 2024 were recorded at Rp29.01 billion, an increase of Rp10.32 billion or 55.25% compared to the previous year of Rp18.68 billion.

Investasi pada Ventura Bersama

Jumlah investasi pada ventura bersama tahun 2024 tercatat sebesar Rp8,61 triliun, mengalami peningkatan Rp1,35 triliun atau 18,54% dibanding tahun 2023 sebesar Rp7,26 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan serap laba PT Huadian Bukit Asam Power (PT HBAP).

Investment in Joint Ventures

The total investment in joint ventures in 2024 was recorded at Rp8.61 trillion, an increase of Rp1.35 trillion or 18.54% compared to 2023 of Rp7.26 trillion. The increase was due to the additional profit absorption of PT Huadian Bukit Asam Power (PT HBAP).

Properti Penambangan

Jumlah properti pertambangan di tahun 2024, sebesar Rp3,41 triliun, meningkat Rp0,14 triliun atau 4,29%, dibanding tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp3,27 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan *Asset Retirement Obiligation* (ARO) atas kewajiban reklamasi lingkungan dan rencana penutupan tambang.

Mining Properties

The amount of mining properties in 2024, amounting to Rp3.41 trillion, increased by Rp0.14 trillion or 4.29%, compared to 2023 which was recorded at Rp3.27 trillion. The increase was due to the addition of Asset Retirement Obligation (ARO) for environmental reclamation obligations and mine closure plans.

Aset Tetap

Jumlah aset tetap Perusahaan per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp8,74 triliun, mengalami peningkatan Rp0,17 triliun atau 1,98%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp8,57 triliun.

Fixed Assets

The Company's total fixed assets as of December 31, 2024 were recorded at Rp8.74 trillion, increased by Rp0.17 trillion or 1.98%, compared to the previous year of Rp8.57 trillion.

Tanaman Produktif

Tanaman produktif merupakan tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan yang digunakan dan diharapkan menghasilkan produk agrikultur untuk jangka waktu lebih dari satu tahun. Nilai tanaman produktif pada aset tidak lancar Perusahaan di tahun 2024 tercatat sebesar Rp65,06 miliar, mengalami menurun Rp7,76 miliar atau 10,65%, dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp72,82 miliar.

Bearer Plants

Bearer plants are immature plants and productive plants that are used and expected to produce agricultural products for a period of more than one year. The value of productive plants in the Company's non-current assets in 2024 was recorded at Rp65.06 milliar, decreased by Rp7.76 milliar or 10.65%, compared to the previous year of Rp72.82 milliar.

Pajak Dibayar di Muka

Jumlah pajak dibayar di muka Perusahaan tahun 2024 tercatat sebesar Rp3,41 triliun, meningkat Rp0,85 triliun atau 33,43%, dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,55 triliun. Pajak di bayar di muka Perusahaan terdiri dari pajak penghasilan badan sebesar Rp0,09 triliun dan pajak lain-lain sebesar Rp3,32 triliun.

Prepaid Taxes

The Company's prepaid taxes in 2024 were recorded at Rp3.41 trillion, an increase/decrease of Rp0.85 trillion or 33.43%, from the previous year of Rp2.55 trillion. The Company's prepaid taxes consist of corporate income tax of Rp0.09 trillion and other taxes of Rp3.32 trillion.

Aset Pajak Tangguhan

Di tahun 2024, Perusahaan mencatatkan aset pajak tangguhan sebesar Rp1,26 triliun, meningkat Rp0,05 triliun atau 4,15%, dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1,21 triliun.

Deferred Tax Assets

In 2024, the Company recorded deferred tax assets of Rp1.26 trillion, an increase of Rp0.05 trillion or 4.15%, compared to Rp1.21 trillion in 2023.

Goodwill

Goodwill merupakan saldo yang timbul karena akuisisi kepemilikan atas PT Satria Bahan Sarana (PT SBS), oleh PTBA melalui entitas anak Perusahaan, yakni PT Bukit Multi Investama (PT BMI), sebagai akibat dari pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas milik PT SBS pada tanggal akuisisi. Berdasarkan hasil pengujian penurunan nilai *goodwill*, tidak terdapat rugi penurunan nilai yang tercatat di tahun 2024 dan bernilai sama dengan tahun 2023 yakni sebesar Rp102,08 miliar.

Goodwill

Goodwill is a balance arising from the acquisition of ownership of PT Satria Bahan Sarana (PT SBS), by PTBA through the Company's subsidiary, namely PT Bukit Multi Investama (PT BMI), as a result of measuring the fair value of assets and liabilities owned by PT SBS on the acquisition date. Based on the results of the goodwill impairment test, there is no impairment loss recorded in 2024 and the value still the same as in 2023, which is Rp102.08 billion.

Aset Tidak Lancar Lainnya

Jumlah aset tidak lancar lainnya Perusahaan di tahun 2024, tercatat sebesar Rp0,86 triliun, mengalami peningkatan Rp0,49 triliun atau 131,75%, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp0,37 triliun. Hal ini di sebabkan oleh adanya uang muka dari pembangunan proyek perusahaan.

Other Non-Current Assets

The Company's other non-current assets in 2024 were recorded at Rp0.86 trillion, increasing by Rp0.49 trillion or 131.75%, compared to the previous year which was Rp0.37 trillion. This is due to the existence of an advance payment for the company's project development.

Liabilitas

Liabilities

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	11.974.820	9.968.101	2.006.719	20,13
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	7.166.944	7.233.892	(66.948)	(0,93)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**19.141.764**	**17.201.993**	**1.939.771**	**11,28**

Total liabilitas Perusahaan per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp19,14 triliun, meningkat Rp1,94 triliun atau 11,28% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp17,20 triliun. Komposisi liabilitas Perusahaan tahun 2024 utamanya berupa liabilitas jangka pendek yang pada tahun 2024

The Company's total liabilities as of December 31, 2024 were recorded at Rp19.14 trillion, an increase of Rp1.94 trillion or 11.28% compared to 2023 of Rp17.20 trillion. The composition of the Company's liabilities in 2024 is mainly in the form current liabilities which in 2024 amounted to

sebesar Rp11,97 triliun atau 62,56% dari total liabilitas. Sedangkan, liabilitas jangka panjang tahun 2024 tercatat sebesar Rp7,17 triliun atau 37,44% dari total liabilitas.

Rp11.97 trillion or 62.56% of total liabilities. Meanwhile, non-current liabilities in 2024 were recorded at Rp7.17 trillion or 37.44% of total liabilities.

Liabilitas Jangka Pendek

Current Liabilities

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Utang Usaha Trade Payable	2.920.012	2.082.188	837.824	40,24
Biaya yang Masih Harus Dibayar Accured Expenses	4.770.233	4.857.830	(87.597)	(1,80)
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Short-Term Employee Benefit Liabilities	665.730	852.007	(186.277)	(21,86)
Utang Pajak Taxes Payable				
• Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax	198.365	295.176	(96.811)	(32,80)
• Pajak Lain-lain Other Taxes	617.820	496.645	121.175	24,40
Pinjaman Bank Bank Borrowings	1.397.680	68.000	1.329.680	1.955,41
Bagian Jangka Pendek atas Liabilitas Jangka Panjang: Current Maturities of Long-Term Liabilities				
• Liabilitas Sewa Lease Liabilities	485.093	490.017	(4.924)	(1,00)
• Provisi Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang Provision for Environmental Reclamation and Mine Closure	384.692	329.190	55.502	16,86
• Liabilitas Imbalan Pascakerja Post-Employment Benefit Liabilities	238.754	228.521	10.233	4,48
Utang Jangka Pendek Lainnya Other Current Liabilities	296.441	268.527	27.914	10,40
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	**11.974.820**	**9.968.101**	**2.006.719**	**20,13**

Jumlah liabilitas jangka pendek Perusahaan tahun 2024 tercatat sebesar Rp11,97 triliun peningkatan Rp2,01 triliun atau 20,13% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9,97 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah pinjaman bank dari sebelumnya Rp68,00 miliar menjadi Rp1,40 triliun.

The Company's current liabilities in 2024 were recorded at Rp11.97 trillion an increase of Rp2.01 trillion or 20.13% compared to the previous year of Rp9.97 trillion. This increase was due to the increase in the amount of bank loans from the previous Rp68.00 billion to Rp1.40 trillion.

Utang Usaha

Jumlah utang usaha Perusahaan tahun 2024, tercatat sebesar Rp2,92 triliun mengalami peningkatan Rp0,84 triliun atau 40,24% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2,08 triliun.

Trade Payables

The Company's total trade payables in 2024 were recorded at Rp2.92 trillion a increase of Rp0.84 trillion or 40.24% compared to 2023 of Rp2.08 trillion.

Biaya yang Masih Harus Dibayar

Di tahun 2023, Perusahaan mencatatkan jumlah biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp4,77 triliun mengalami penurunan Rp0,09 triliun atau 1,80% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4,86 triliun.

Accrued Expenses

In 2023, the Company recorded an amount of accrued expenses of Rp4.77 trillion a increase of Rp0.09 trillion or 1.80% compared to the previous year of Rp4.86 trillion.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Tahun 2024, Perusahaan mencatatkan liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar Rp0,67 triliun mengalami penurunan Rp0,19 triliun atau 21,86% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,85 triliun.

Short-Term Employee Benefit Liabilities

In 2024, the Company recorded short-term employee benefit liabilities of Rp0.67 trillion a increase of Rp0.19trillion or 21.86% compared to the previous year of Rp0.85 trillion.

Utang Pajak

Jumlah utang pajak Perusahaan tahun 2024 adalah sebesar Rp0,82 triliun mengalami peningkatan Rp0,02 triliun atau 2,50% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp0,80 triliun. Utang pajak Perusahaan tahun 2024 terdiri dari pajak penghasilan badan sebesar Rp0,20 triliun dan pajak lain-lain sebesar Rp0,62 triliun.

Taxes Payable

The Company's taxes payable in 2024 is Rp0,82 trillion decreasing by Rp0.02 trillion or 2.50% compared to 2023 of Rp0.80 trillion. The Company's taxes payable in 2024 consists of corporate income tax of Rp0.20 trillion and other taxes of Rp0.62 trillion.

Pinjaman Bank

Jumlah pinjaman bank Perusahaan tahun 2024 tercatat sebesar Rp1,40 triliun mengalami peningkatan Rp1,33 triliun atau 1.955,41% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp0,07 triliun. Peningkatan pinjaman bank tersebut disebabkan untuk kebutuhan operasional perusahaan.

Bank Borrowings

The Company's Bank Borrowings in 2024 was recorded at Rp1.40 trillion decreasing by Rp1.33 trillion or 1.955,41% compared to 2023 of Rp0.07 trillion. The increase in bank loans was due to the company's operational needs.

Bagian Jangka Pendek dari Liabilitas Jangka Panjang

Bagian Jangka Pendek dari Liabilitas Jangka Panjang Perusahaan tahun 2024 sebesar Rp1,11 trilliun meningkat Rp0,06 trilliun atau 5,71% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1,05 trilliun. Bagian jangka pendek dari liabilitas jangka panjang Perusahaan tahun 2024 terdiri dari liabilitas sewa sebesar Rp0,49 triliun provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang sebesar Rp0,38 trilliun dan liabilitas imbalan pascakerja sebesar Rp0,24 trilliun.

Current Maturities of Long-Term Liabilities

The Current Maturities of Long-Term Liabilities of the Company's Liabilities in 2024 amounted to Rp1.11 trillion an increase of Rp0.06 trillion or 5.71% compared to Rp1.05 trillion in 2023. The current portion of the Company's non-current liabilities in 2024 consists of lease liabilities of Rp0.49 trillion environmental reclamation and mine closure provisions of Rp0.38 trillion, and post-employment benefit liabilities of Rp0.24 trillion.

Liabilitas Sewa

Perusahaan mencatatkan jumlah bagian jangka pendek dari liabilitas sewa di tahun 2024 sebesar Rp0,49 triliun yang mana relatif sama dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp0,49 triliun.

Lease Liabilities

The Company recorded the short-term portion of lease liabilities in 2024 at Rp0.49 trillion which is relatively the same compared to 2023 which was recorded at Rp0.49 trillion.

Provisi Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang

Perusahaan melakukan penyisihan atas biaya reklamasi lingkungan dan penutupan tambang yang berhubungan dengan reklamasi dan bagian biaya penutupan tambang pada saat berakhirnya masa tambang dan kegiatan reklamasi yang berjalan dari tahun ke tahun. Adapun nilai provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang pada liabilitas jangka pendek Perusahaan di tahun 2024 adalah sebesar Rp0,38 triliun mengalami peningkatan Rp0,06 triliun atau 16.86% dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp0,33 triliun.

Environmental Reclamation and Mine Closure Provision

The Company provides for environmental reclamation and mine closure costs related to reclamation and part of the mine closure costs at the end of the mining period and reclamation activities that are ongoing from year to year. The value of the environmental reclamation and mine closure provision in the Company's current liabilities, in 2024, is Rp0.38 trillion experiencing a increase of Rp0.06 trillion or 16.86% compared to the previous year which was recorded at Rp0.33 trillion.

Liabilitas Imbalan Pasca kerja

Perusahaan mencatatkan jumlah bagian jangka pendek dari liabilitas imbalan pascakerja di tahun 2024 sebesar Rp0,24 triliun yang mana mengalami peningkatan Rp0,01 triliun atau 4,48% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp0,23 triliun.

Post-Employment Benefit Liabilities

The Company recorded the amount of the Current Maturities of Post-Employment Benefit Liabilities in 2024 Rp0.24 trillion experiencing a increase of Rp0,01 trillion or 4,48% compared to 2023 which was recorded at Rp0.23 trillion.

Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah utang jangka pendek lainnya di tahun 2024 tercatat sebesar Rp0,30 triliun mengalami peningkatan Rp0,03 triliun atau 10,40% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp0,27 triliun.

Other Current Liabilities

The amount of other current liabilities in 2024 was recorded at Rp0.30 trillion experiencing a decrease of Rp0.03 trillion or 10.40% compared to 2023 of Rp0.27 trillion.

Liabilitas Jangka Panjang

Non-current Liabilities

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	368.260	743.665	(375.405)	(50,48)
Provisi Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang Provision for Environmental Reclamation and Mine Closure	1.741.891	1.787.690	(45.799)	(2,56)
Liabilitas Imbalan Pasca kerja Post-employment Benefit Liabilities	4.979.567	4.625.311	354.256	7,66
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities	77.226	77.226	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-current Liabilities	**7.166.944**	**7.233.892**	**(66.948)**	**(0,93)**

Jumlah liabilitas jangka panjang Perusahaan tahun 2024 tercatat sebesar Rp7,17 triliun, mengalami penurunan Rp0,07 triliun atau 0,93%, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7,23 triliun. Penurunan jumlah liabilitas jangka panjang tersebut terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas sewa.

The Company's total non-current liabilities in 2024 were recorded at Rp7.17 trillion, experiencing a increase of Rp0.07 trillion or 0.93%, compared to the previous year of Rp7.23 trillion. The decrease in the amount of non-current liabilities was mainly due to a decrease in lease liabilities.

Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa Perusahaan tahun 2024 sebesar Rp0,37 triliun, turun sebesar Rp0,38 triliun atau 50,48% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,74 triliun. Hal ini utamanya sesuai dengan jangka waktu kontrak sewa perusahaan.

Provisi Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang

Perusahaan melakukan penyisihan atas biaya reklamasi lingkungan dan penutupan tambang yang berhubungan dengan reklamasi dan bagian biaya penutupan tambang pada saat berakhirnya masa tambang dan kegiatan reklamasi yang berjalan dari tahun ke tahun. Di tahun 2024, nilai provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang pada liabilitas jangka panjang Perusahaan tercatat sebesar Rp1,74 triliun di tahun 2024, relatif sama dengan dibandingkan tahun sebelumnya.

Liabilitas Imbalan Pascakerja

Jumlah liabilitas imbalan pascakerja pada liabilitas jangka panjang Perusahaan tercatat sebesar Rp4,98 triliun di tahun 2024, mengalami peningkatan Rp0,35 triliun atau 7,66%, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4,63 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan adanya tambahan pencadangan kewajiban manfaat pensiun pegawai.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Di tahun 2024, jumlah liabilitas pajak tangguhan Perusahaan tercatat sebesar Rp0,08 triliun di tahun 2024, relatif sama dengan tahun sebelumnya sebesar Rp0,08 triliun.

Long-term Borrowings, Net of Current Maturities

The Company's lease liabilities in 2024 amounted to Rp0.37 trillion, down by Rp0.38 trillion or 50.48% compared to the previous year of Rp0.74 trillion. This is mainly in accordance with the term of the Company's lease contract.

Provision for Environmental Reclamation and Mine Closure

The Company allocated some of the environmental reclamation and mine closure costs related to reclamation and part of the mine closure costs at the end of the mining period and reclamation activities that are ongoing from year to year. In 2024, the value of environmental reclamation and mine closure provisions in the Company's non-current liabilities was recorded at Rp1.74 trillion in 2024, relatively the same as compared to the previous year.

Post-Employment Benefit Liabilities

The amount of post-employment benefit liabilities in the Company's non-current liabilities was recorded at Rp4.98 trillion in 2024, experiencing an increase of Rp0.35 trillion or 7.66%, compared to the previous year of Rp4.63 trillion. The increase was due to additional provisions for employee pension benefit obligations.

Deferred Tax Liabilities

In 2024, the amount of the Company's deferred tax liabilities was recorded at Rp0.08 trillion in 2024, from the previous year of Rp0.08 trillion.

Ekuitas

Equity

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Owners of the Parent Entity				
Modal Saham Share Capital	1.152.066	1.152.066	-	-
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	642.832	594.303	48.529	8,17
Saham Treasuri Treasury Stock	(12.521)	(43.257)	30.736	(71,05)
Penghasilan Komprehensif Lain: Other Comprehensive Income:				

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
• Cadangan Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan yang Dinilai pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain Reserve for Changes in Financial Assets at Fair Value through 0ther Comprehensive Income	3.701	19.194	(15.493)	(80,72)
• Selisih Penjabaran Kurs Laporan Keuangan Entitas Anak dan Ventura Bersama Currency Differences from Translation of Financial Statements of Subsidiaries and Joint Ventures	1.120.325	693.100	427.225	61,64
Saldo Laba Retained Earnings				
• Dicadangkan Appropriated	13.730.400	13.730.400	-	-
• Belum Dicadangkan Unappropriated	5.868.485	5.288.732	579.573	10,96
Jumlah Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk **Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity**	**22.505.288**	**21.434.538**	**1.070.750**	**5,00**
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interest	138.524	128.658	9.866	7,67
Jumlah Ekuitas Total Equity	**22.643.812**	**21.563.196**	**1.080.616**	**5,01**

Jumlah ekuitas Perusahaan per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp22,64 triliun, mengalami peningkatan Rp1,08 triliun atau 5,01%, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp21,56 triliun. Peningkatan ekuitas tersebut disebabkan oleh naiknya selisih penjabaran kurs laporan keuangan entitas anak dan ventura bersama dan saldo laba.

Sedangkan jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk di tahun 2024 tercatat sebesar Rp22,51 triliun, mengalami peningkatan Rp1,07 triliun atau 5,00%, dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebesar Rp21,43 triliun. Sementara ekuitas yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali di tahun 2024 adalah sebesar Rp0,14 triliun, mengalami peningkatan Rp0,01 triliun atau 7,67%, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp0,13 triliun.

The Company's total equity as of December 31, 2024, was recorded at Rp22.64 trillion, experiencing an increase of Rp1.08 trillion or 5.01%, compared to the previous year of Rp21.56 trillion. The increase in equity was due to an increase in the difference in the translation of the financial statements of subsidiaries and joint ventures and retained earnings.

Meanwhile, the amount of equity attributable to owners of the Parent Entity in 2024 was recorded at Rp22.51 trillion, experiencing a increase of Rp1.07 trillion or 5.00%, compared to the previous year, which was Rp21.43 trillion. Meanwhile, equity attributable to non-controlling interests in 2024 was Rp0.14 trillion, experiencing a increase of Rp0.01 trillion or 7.67%, compared to the previous year which was Rp0.13 trillion.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Pendapatan Revenue	42.764.968	38.488.867	4.276.101	11,11
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(34.562.758)	(29.331.562)	(5.231.196)	17,83

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Laba Bruto **Gross Profit**	**8.202.210**	**9.157.305**	**(955.095)**	**(10,43)**
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(2.078.188)	(1.936.635)	(141.553)	7,31
Beban Penjualan dan Pemasaran Selling and Marketing Expenses	(789.017)	(656.362)	(132.655)	20,21
Penghasilan Lainnya, Neto Other Income, Net	317.413	638.401	(320.988)	(50,28)
Laba Usaha **Operating Profit**	**5.652.418**	**7.202.709**	**(1.550.291)**	**(21,52)**
Penghasilan Keuangan Financial Income	250.183	584.339	(334.156)	(57,19)
Biaya Keuangan Financial Costs	(283.690)	(204.038)	79,652	39,04
Bagian atas Laba Neto Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share in Net Profit of Associates and Joint Ventures	640.335	571.303	69.032	12,08
Laba Sebelum Pajak Penghasilan **Profit Before Income Tax**	**6.259.246**	**8.154.313**	**(1.895.067)**	**(23,24)**
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(1.119.823)	(1.861.792)	741.969	(39,85
Laba Tahun Berjalan **Profit for the Year**	**5.139.423**	**6.292.521**	**(1.153.098)**	**(18,32)**
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Income (Loss) for the Year	467.158	(808.804)	1.275.962	(157,76)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan **Total Other Comprehensive Income for the Year**	**5.606.581**	**5.483.717**	**122.864**	**2,24**
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: **Profit (Loss) for the Year Attributable to:**				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	5.103.720	6.105.856	(1.002.136)	(16,41)
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	35.703	186.665	(150.962)	(80,87)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: **Total Other Comprehensive Income for the Year Attributable to:**				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	5.570.878	5.297.052	273.826	5,17
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interest	35.703	186.665	(150.962)	(80,87)
Laba per Saham Dasar dan Dilusian (Nilai Penuh) Earnings per Share - Basic and Diluted (Full Amount)	444	532	(88)	(16,54)

Pendapatan
Revenue

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Segmen Batu Bara Coal Segment	42.084.008	37.972.033	4.111.975	10,83
Segmen Lainnya Other Segment	680.960	516.834	164.126	31,76
Jumlah Pendapatan Total Revenue	**42.764.968**	**38.488.867**	**4.276.101**	**11,11**

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp42,76 triliun, mengalami peningkatan Rp4,28 triliun atau 11,11%, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp38,49 triliun. Peningkatan pendapatan tersebut seiring dengan peningkatan volume penjualan baik tujuan ekspor maupun domestik.

Throughout 2024, the Company recorded revenue of Rp42.76 trillion, an increase of Rp4.28 trillion or 11.11% compared to the previous year's revenue of Rp38.49 trillion. This increase in revenue was in line with the rise in sales volume, both for export and domestic markets.

Pendapatan Perusahaan tahun 2024 utamanya masih berasal dari segmen batu bara yang tercatat sebesar Rp42,08 triliun atau setara dengan 98,41% dari total pendapatan Perusahaan. Sedangkan segmen lainnya memberikan kontribusi sebesar Rp0,68 triliun atau setara dengan 1,59% dari total pendapatan.

The Company's revenue in 2024 is mainly dominated from the coal segment which is recorded at Rp42.08 trillion or equivalent to 98.41% of the Company's total revenue. While other segments contributed Rp0.68 trillion or equivalent to 1.59% of total revenue.

Beban Pokok Pendapatan

Cost of Revenue

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Biaya Produksi: **Production Costs:**				
Jasa Penambangan Mining Service	11.713.402	11.105.871	607.531	5,47
Jasa Angkutan Batu bara Coal transportation services	10.002.228	7.953.583	2.048.645	25,76
Bahan Bakar dan Pelumas Fuel and Lubricants	2.065.932	1.495.025	570.907	38,19
Penyusutan Depreciation	1.361.436	1.412.333	(50.897)	(3,60)
Gaji, Upah dan Imbalan Karyawan Salary, Wages, and Employee Benefits	982.572	1.025.230	(42.658)	(4,16)
Perlengkapan dan Suku Cadang Spare Parts and Materials	928.216	805.184	123.032	15,28
Jasa Pihak Ketiga Third Party Services	713.109	492.674	220.435	44,74
Sewa Alat Berat, Kendaraan dan Peralatan Rental of Heavy Equipment, Vehicles and Equipment	706.678	754.720	(48.042)	(6,37)
Pajak Bumi dan Bangunan Land and Building Taxes	292.764	461.063	(168.299)	(36,50)
Amortisasi Amortization	136.588	105.224	31.364	29,81
Listrik Electricity	33.613	87.301	(53.688)	(61,50)
Lainnya Others	723.341	574.826	148.515	25,84
Sub jumlah **Sub-total**	**29.659.879**	**26.273.034**	**3.386.845**	**12,89**
Royalti ke Pemerintah Royalties to the Government	4.077.822	4.449.820	(371.998)	(8,36)
Pembelian Batu bara Coal Purchasing	180.727	260.087	(79.360)	(30,51)
Persediaan Batu Bara dan Minyak Kelapa Sawit: **Coal and Palm Oil Inventories:**				
Awal Tahun Beginning of the Year	5.297.279	3.645.900	1.651.379	45,29

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Akhir Tahun End of the Year	(4.652.949)	(5.297.279)	644.330	(12,16)
Jumlah Total	**34.562.758**	**29.331.562**	**5.231.196**	**17,83**

Beban pokok pendapatan Perusahaan di tahun 2024 tercatat sebesar Rp34,56 triliun, meningkat Rp5,23 triliun atau 17,83% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp29,33 triliun. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan beban jasa penambangan yang pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp11,71 triliun dan beban jasa angkutan batu bara sebesar Rp10,00 triliun, seiring dengan peningkatan kinerja volume produksi batu bara dan volume angkutan batu bara.

The Company's cost of revenue in 2024 was recorded at Rp34.56 trillion, increasing by Rp5.23 trillion or 17.83% compared to the previous year of Rp29.33 trillion. The increase was mainly due to mining service costs which in 2024 were recorded at Rp11.71 trillion and coal transportation service costs of Rp10.00 trillion, in line with the increase in the performance of coal production volume and coal transportation volume.

Laba Bruto

Laba bruto Perusahaan tahun 2024 tercatat mengalami koreksi sebesar 10.43% menjadi Rp8,20 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp9,16 triliun.

Gross Profit

The Company's gross profit in 2024 was recorded to have experienced a correction of 10.43% to Rp8.20 trillion from the previous year of Rp9.16 trillion.

Beban Umum dan Administrasi

General and Administrative Expenses

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Gaji, Upah dan Imbalan Karyawan Salaries, Wages and Employee Benefits	743.910	836.734	(92.824)	(11,09)
Jasa Pihak Ketiga Third Party Services	398.285	321.153	77.132	24,02
Sumbangan Donation	172.919	191.093	(18.174)	(9,51)
Beban Kantor Office Expenses	134.887	87.756	47.131	53,71
Perjalanan Dinas Business Travel	105.779	102.595	3.184	3,10
Penyusutan Depreciation	103.971	119.753	(15.782)	(13,18)
Sewa Kendaraan dan Peralatan Rental of Vehicles and Equipment	54.940	39.805	15.135	38,02
Pelatihan Training	33.254	20.298	12.956	63,83
Retribusi Retribution	32.380	26.200	6.180	23,59
Perlengkapan dan Suku Cadang Spare Parts and Materials	29.096	21.115	7.981	37,80
Lainnya Others	268.767	170.133	98.634	57,97
Jumlah Total	**2.078.188**	**1.936.635**	**141.553**	**7,31**

Jumlah beban umum dan administrasi di tahun 2024 tercatat sebesar Rp2,08 triliun, mengalami peningkatan Rp0,14 triliun atau 7,31%, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,94 triliun. Hal ini disebabkan oleh kenaikan beban jasa pihak ketiga.

Beban umum dan administrasi berupa beban jasa pihak ketiga yang pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp0,40 triliun, meningkat 24,02% dari tahun sebelumnya sebesar Rp0,32 triliun.

The total general and administrative expenses in 2024 were recorded at Rp2.08 trillion, experiencing an increase of Rp0.14 trillion or 7.31%, compared to the previous year of Rp1.94 trillion. This is due to the increase in third party service fees.

General and administrative expenses in the form of third party service fees in 2024 were recorded at Rp0.40 trillion, an increase of 24.02% from the previous year of Rp0.32 trillion.

Beban Penjualan dan Pemasaran

Sales and Marketing Expenses

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Gaji, Upah dan Imbalan Karyawan Salaries, Wages and Employee Benefits	224.031	231.731	(7.700)	(3,32)
Penyusutan Depreciation	195.037	191.998	3.039	1,58
Jasa Pihak Ketiga Third Party Services	118.188	106.996	11.192	10,46
Perlengkapan dan Suku Cadang Spare Parts and Materials	87.220	68.390	18.830	27,53
Bahan Bakar dan Pelumas Fuel and Lubricants	30.196	36.059	(5.863)	(16,26)
Jasa Angkutan Transportation	25.895	66.581	(40.686)	(61,11)
Listrik Electricity	19.733	18.755	978	5,21
(Reversal) Domestic Market Obligation ("DMO") (Reversal) Domestic Market Obligation ("DMO")	-	(135.769)	135.769	-
Lainnya Others	88.717	71.621	17.096	23,87
Jumlah Total	**789.017**	**656.362**	**132.655**	**20,21**

Beban penjualan dan pemasaran Perusahaan tahun 2024 tercatat sebesar Rp0,79 triliun, mengalami peningkatan Rp0,13 triliun atau 20,21% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,66 triliun. Hal ini lebih dikarenakan pada tahun 2023 terdapat pemulihan Biaya *Domestic Market Obligation* (DMO) .

The Company's sales and marketing expenses in 2024 were recorded at Rp0.79 trillion, an increase of Rp0.13 trillion or 20.21% compared to the previous year of Rp0.66 trillion. This is caused by a recovery in Domestic Market Obligation (DMO) costs in 2023.

Penghasilan Lainnya, Neto

Other Income, Net

Jumlah penghasilan lainnya neto tahun 2024 tercatat sebesar Rp0,32 triliun, mengalami penurunan Rp0,32 triliun atau 50,28% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,64 triliun. Hal ini utamanya disebabkan karena pada tahun 2023 terdapat pemulihan provisi piutang lainnya dan restitusi pajak lainnya sedangkan pada tahun 2024 tidak ada.

Total other income – net in 2024 was recorded at Rp0.32 trillion, a decrease of Rp0.32 trillion or 50.28% compared to the previous year's figure of Rp0.64 trillion. This decline was primarily due to the recovery of other receivables provisions and other tax refunds recorded in 2023, which were not present in 2024.

Laba Usaha

Di tahun 2024, Perusahaan membukukan laba usaha sebesar Rp5,65 triliun, mengalami penurunan Rp1,55 triliun atau 21,52% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7,20 triliun.

Operating Profit

In 2024, the Company posted an operating profit of Rp5.65 trillion, a decrease of Rp1.55 trillion or 21.52% compared to the previous year of Rp7.20 trillion.

Penghasilan Keuangan

Financial Income

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Penghasilan Bunga dari Penempatan Kas di Bank dan Deposito Berjangka Interest Income from Placement of Cash in Banks and Time Deposits	209.225	531.161	(321.936)	(60,61)
Penghasilan Bunga dari Penempatan Obligasi Interest Income from Placement of Bond	40.958	53.178	(12.220)	(22,98)
Jumlah Total	**250.183**	**584.339**	**(334.156)**	**(57,19)**

Jumlah penghasilan keuangan Perusahaan tahun 2024 tercatat sebesar Rp0,25 triliun, mengalami penurunan Rp0,33 triliun atau 57,19% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,58 triliun. Hal ini disebabkan oleh menurunnya penghasilan bunga dari penempatan kas di bank dan deposito berjangka.

The Company's total financial income in 2024 was recorded at Rp0.25 trillion, experiencing a decrease of Rp0.33 trillion or 57.19% compared to the previous year of Rp0.58 trillion. This was caused by a decrease in interest income from cash placements in banks and time deposits.

Biaya Keuangan

Financial Cost

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Beban Akresi dari Provisi Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang Accretion Expenses from Provision for Environmental Reclamation and Mine Closure	109.401	88.074	21.327	24,21
Beban Bunga dari Liabilitas Sewa Interest Expenses from Lease Liabilities	89.861	115.938	(26.077)	(22,49)
Beban Bunga dari Pinjaman Bank Interest Expenses from Bank Borrowings	84.428	26	84.402	324.63
Jumlah Total	**283.690**	**204.038**	**79.652**	**39,04**

Tahun 2024 Perusahaan mencatat biaya keuangan sebesar Rp283,69 miliar, meningkat Rp79,65 miliar atau 39,04%, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp204,04 miliar.

In 2024, the Company recorded financial income of Rp283.69 billion, increasing by Rp79.65 billion or 39.04%, compared to the previous year of Rp204.04 billion.

Bagian atas Laba Neto Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Di tahun 2024, Perusahaan mencatatkan bagian atas Laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar Rp0,64 triliun, mengalami peningkatan Rp0,07 triliun atau 12,08% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,57

Share in Net Profit of Associates and Joint Ventures

In 2024, the Company recorded a Share in Net Profit of Associates and Joint Ventures of Rp0.64 trillion, increasing by Rp0.07 trillion or 12.08% compared to the previous year of Rp0.57 trillion. This because the Company

triliun. Hal ini disebabkan perusahaan membukukan bagian atas keuntungan neto entitas asosiasi dan ventura bersama yang diperoleh dari investasi pada ventura bersama PT BPI dan PT HBAP.

recorded a portion of the net profit of associates and joint ventures obtained from investments in joint ventures of PT BPI and PT HBAP.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba sebelum pajak penghasilan yang dibukukan Perusahaan tahun 2024 tercatat sebesar Rp6,26 triliun, mengalami penurunan Rp1,90 triliun atau 23,24% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8,15 triliun.

Profit Before Income Tax

The profit before income tax recorded by the Company in 2024 was Rp6.26 trillion, decreasing by Rp1.90 trillion or 23.24% compared to the previous year of Rp8.15 trillion.

Beban Pajak Penghasilan

Sejalan dengan menurunnya pendapatan Perusahaan, jumlah beban pajak penghasilan tahun 2024 juga mengalami penurunan menjadi Rp1,12 triliun atau turun 39,85% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,86 triliun. Hal ini seiring dengan pencapaian laba perusahaan.

Income Tax Expense

In line with the Company's declining income, the amount of income tax expense in 2024 also decreased to Rp1.12 trillion or increasing by 39.85% compared to the previous year of Rp1.86 trillion. This is in line with the company's profit realization

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan yang dibukukan Perusahaan tahun 2024 mencapai Rp5,14 triliun, turun Rp1,15 triliun atau 18,32% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6,29 triliun.

Profit for the Year

The Company's profit for the year in 2024 reached Rp5.14 trillion, down Rp1.15 trillion or 18.32% compared to the previous year of Rp6.29 trillion.

Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Di tahun 2024, Perusahaan mencatatkan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan sebesar Rp0,47 triliun, naik Rp1,28 triliun dari tahun sebelumnya sebesar kerugian Rp808,80 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja serta selisih penjabaran kurs laporan keuangan entitas anak dan ventura bersama.

Other Comprehensive Income (Loss) for the Year

In 2024, the Company recorded other comprehensive income for the current year of Rp0.47 trillion, up Rp1.28 billion from the previous year of Rp808.80 trillion. loss of Rp808.80 billion. This was influenced by an increase in the remeasurement of post-employment benefit liabilities and the difference in the description of the exchange rate of the financial statements of subsidiaries and joint ventures.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Berdasarkan akumulasi dari laba tahun berjalan dan kerugian komprehensif lain tahun berjalan, Perusahaan mencatatkan jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan sebesar Rp5,61 triliun, mengalami peningkatan Rp0,12 triliun atau 2,24% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,48 triliun.

Total Other Comprehensive Income for the Year

Based on the accumulation of profit for the current year and other comprehensive losses for the current year, the Company recorded other comprehensive income for the current year of Rp5.61 trillion, an increase of Rp0.12 trillion or 2.24% compared to the previous year of Rp5.48 trillion.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dan Kepentingan Non Pengendali

Di tahun 2024, jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp5,10 triliun, mengalami penurunan Rp1,00 triliun atau 16,41% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar

Profit (Loss) for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity and Non-Controlling Interests

In 2024, the amount of profit for the year attributable to owners of the parent entity was recorded at Rp5.10 trillion, an decrease of Rp1.00 trillion or 16.41% compared to the previous year of Rp6.11 trillion. The amount of profit

Rp6,11 triliun. Adapun jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali di tahun 2024, adalah sebesar Rp35,70 milliar, mengalami penurunan Rp150,96 miliar atau 80,87% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp186,67 milliar.

for the year attributable to non-controlling interests in 2024 was Rp35.70 milliar, an decrease of Rp150.96 billiar or 80.87% compared to the previous year of Rp186.67 billion.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dan Kepentingan Non Pengendali

Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ditahun 2024, tercatat sebesar Rp5,57 triliun, mengalami peningkatan Rp0,27 triliun atau 5,17% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,30 triliun. Sementara jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali di tahun 2024, adalah sebesar Rp35,70 milliar, mengalami penurunan Rp150,96 miliar atau 80,87% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp186,67 milliar.

Total Other Comprehensive Income for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity and Non-Controlling Interests

The amount of other comprehensive income for the year attributable to owners of the parent entity in 2024 was recorded at Rp5.57 trillion, an increase of Rp0.27 trillion or 5,17% compared to the previous year of Rp5.30 trillion. Meanwhile, the amount of other comprehensive income for the current year attributable to non-controlling interests in 2024 is Rp150.96 billiar or 80.87% compared to the previous year of Rp186.67 billion.

Laba per Saham Dasar dan Dilusian

Earnings per Share - Basic and Diluted

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp-juta) Net Profit Attributable to Owners of the Parent Entity (Rp-million)	5.103.720	6.105.856	(1.002.136)	(16,41)
Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham Biasa yang Beredar (Lembar) Weighted Average Number of Ordinary Shares Outstanding (Number of Shares)	11.507.459.013	11.487.209.350	20.249.663	0,18
Laba per Saham Dasar dan Dilusian (Nilai Penuh) Basic and Diluted Earnings (Loss) per Share (Full Amount)	444	532	(88)	(16,54)

Sejalan dengan turunnya laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2024, jumlah laba per saham dasar dan dilusian juga mengalami penurunan menjadi Rp444 dari tahun sebelumnya sebesar Rp532.

In line with the decline in net profit attributable to owners of the parent entity in 2024, the amount of basic and diluted earnings per share also decreased to Rp444 from the previous year of Rp532.

Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statement of Cash Flows

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	5.049.190	3.104.707	1.944.483	62,63
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investment Activities	(944.274)	7.257.889	(8.202.163)	(113,01)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	(4.139.428)	(13.244.158)	9.104.730	(68,75)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	**(34.512)**	**(2.881.562)**	**2.847.050**	**(98,80)**

Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statement of Cash Flows

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun **Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year**	**4.138.867**	**7.030.343**	**(2.891.476)**	**(41,13)**
Efek Perubahan Kurs pada Kas dan Setara Kas Effect of Changes in Exchange Rate on Cash and Cash Equivalents	28.503	(9.914)	38.417	(387,50)
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of the Year	**4.132.858**	**4.138.867**	**(6.009)**	**(0,15)**

Jumlah kas dan setara kas Perusahaan pada akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp4,13 triliun, relatif sama dengan posisi awal tahun sebesar Rp4,14 triliun.

The Company's cash and cash equivalents at the end of 2024 were recorded at Rp4.13 trillion, relatively the same with the position at the beginning of the year of Rp4.14 trillion.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Cash Flows from Operating Activities

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Penerimaan dari Pelanggan Cash Receipts from Customers	41.690.681	38.297.048	3.393.633	8,86
Pembayaran kepada Pemasok dan Karyawan Cash Paid to Suppliers and Employees	(31.511.369)	(28.936.511)	(2.574.858)	8,90
Pembayaran Royalti Payment of Royalties	(4.144.962)	(4.342.928)	197.966	(4,56)
Penerimaan Pengembalian Pajak Cash Receipts from Tax Restitution	257.057	134.914	122.143	90,53
Pembayaran Pajak Penghasilan Payments for Income Taxes	(1.389.802)	(2.521.878)	1.132.076	(44,89)
Penerimaan Bunga Receipts of Interest Income	321.874	590.051	(268.177)	(45,45)
Pembayaran Bunga Payment of Interest	(174.289)	(115.989)	(58.300)	50,26
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Flows Provided by Operating Activities	**5.049.190**	**3.104.707**	**1.944.483**	**62,63**

Arus kas bersih yang diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2024 tercatat sebesar Rp5,05 triliun, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,10 triliun.

Net cash flow obtained from/used for investment activities in 2024 was recorded at Rp5.05 trillion, experiencing a increase compared to the previous year which was Rp3.10 trillion.

Arus kas masuk utamanya berasal dari penerimaan dari pelanggan, yaitu sebesar Rp41,69 triliun, naik dari tahun 2023 seiring dengan peningkatan pendapatan usaha perusahaan. Sementara itu, arus kas keluar utamanya digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, yaitu sebesar Rp31,51 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kenaikan pembayaran jasa penambangan dan jasa angkutan batu bara seiring dengan peningkatan kinerja operasional perusahaan.

Cash inflows were primarily derived from customer receipts, amounting to Rp41.69 trillion, an increase from 2023 in line with the Company's rise in operating revenue. Meanwhile, cash outflows were mainly used for payments to suppliers, totaling Rp31.51 trillion, an increase from the previous year due to higher payments for mining services and coal transportation services, in line with the Company's improved operational performance.

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi

Cash Flows for Investing Activities

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Penambahan aset tetap dan tanaman produktif Addition of fixed assets and bearer plants	(1.231.886)	(937.246)	(294.640)	31,44
Penempatan deposito berjangka Placement of time deposits	(242.355)	(1.747.459)	1.505.104	(86,13)
Pencairan deposito berjangka Withdrawal of time deposits	541.818	10.134.836	(9.593.018)	(94,65)
Penempatan dana reklamasi dan penutupan tambang Placement of reclamation and mine closure fund	-	(72.311)	72.311	-
Penerimaan dari aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Placement of financial assets at fair value through other comprehensive income	441.250	-	441.250	-
Penempatan dari aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Cash Receipts of financial assets at fair value through other comprehensive income	-	(80.000)	80.000	-
Penempatan pada investasi entitas asosiasi Placement of investment in associates	(71.655)	-	(71.655)	-
Penerimaan dari pengembalian investasi pada entitas asosiasi Cash receipts from refund of investment in associates	-	198.665	(198.665)	-
Penerimaan dividen dari entitas ventura bersama Proceeds of dividends from join venture entities	134.646	9.240	125.406	1357,21
Pencairan jaminan reklamasi Withdrawal of cash guarantee	(48.274)	-	(48.274)	-
Penambahan investasi pada ventura bersama Addition of investment in joint ventures	(467.818)	(247.836)	(219.982)	88,76
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas investasi **Net cash flows (used in)/provided from investing activities**	**(944.274)**	**7.257.889**	**(8.202.163)**	**(113,01)**

Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan) untuk aktivitas investasi tahun 2024 tercatat sebesar Rp(0,94) triliun, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,26 triliun.

Arus kas masuk utamanya berasal dari pencairan deposito, yaitu sebesar Rp0,54 triliun untuk pembayaran dividen atas tahun buku 2023, sedangkan arus kas keluar utamanya digunakan untuk penambahan aset tetap dan tanaman produktif dan yaitu sebesar Rp1,23 triliun.

Net cash flow obtained from/used for investment activities in 2024 was recorded at Rp(0.94) trillion, experiencing a increase compared to the previous year which was Rp7.26 trillion.

The main cash inflow came from the disbursement of deposits, which amounted to Rp0.54 trillion for dividend payments for the 2023 financial year, while the main cash outflow was used for the addition of fixed assets and productive plants which amounted to Rp1.23 trillion.

Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Cash Flows for Financing Activities

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Pembayaran Dividen kepada Pemegang Saham Induk Payment of Dividends to Owners of the Parent Entity	(4.579.393)	(12.567.582)	7.988.189	(63,56)
Pembayaran Dividen kepada Kepentingan Non-Pengendali Payment of Dividends to Non-controling Interests	(25.837)	(268.985)	243.148	(90,39)
Penerimaan Pinjaman Bank Proceeds from bank borrowings	4.597.680	68.000	4.529.680	6661,29
Penerimaan Dari Penjualan Saham Treasuri Proceeds From Sales of Treasury Shares	79.265	-	79.265	-
Pembayaran Pinjaman Bank Payment of Bank Borrowings	(3.268.000)	(2.240)	(3.265.760)	145792,86
Penempatan Jaminan Pinjaman Bank Placement guarantee of bank borrowings	(150.632)	-	(150.632)	-
Pembayaran Liabilitas Sewa Payment of Lease Liabilities	(792.511)	(473.351)	(319.160)	67,43
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan **Net Cash Flows Used for Financing Activities**	**(4.139.428)**	**(13.244.158)**	**9.104.730**	**(68,75)**

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2024 tercatat sebesar Rp4,14 triliun, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp13,24 triliun.

Arus kas masuk utamanya berasal dari penerimaan atas pinjaman bank, yaitu sebesar Rp4,60 triliun, sedangkan arus kas keluar utamanya digunakan untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham induk, yaitu sebesar Rp4,58 triliun.

Net cash flow used for financing activities in 2024 was recorded at Rp4,14 trillion, decreasing compared to the previous year which was Rp13.24 trillion.

The main cash inflow came from receipts from bank loans, which was Rp4.60 trillion, while the main cash outflow was used for dividend payments to parent shareholders, which was Rp4.58 trillion.



Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Ability To Pay Debt and Receivable Collectibility Rate

Kemampuan Perusahaan dalam Membayar Utang

Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi hak-hak kreditur dengan melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunganya secara tepat waktu. Untuk itu, Perusahaan melakukan pengelolaan likuiditas dan melakukan pemantauan terhadap waktu jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga pinjaman.

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, diukur melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Di mana rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek, sementara rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Ability to Pay Debts

The Company is committed to fulfilling creditors' rights by making timely payments of principal and interest. To that end, the Company manages liquidity and monitors the maturity of principal and interest payments.

The Company's ability to meet all obligations, both short-term and long-term, is measured through the liquidity ratio and solvency ratio. Where the liquidity ratio is used to measure the Company's ability to pay off short-term obligations, while the solvency ratio is used to measure the Company's ability to meet all its obligations, both short-term and long-term.

Kemampuan Perusahaan dalam Membayar Utang Jangka Pendek

Dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo, Perusahaan menggunakan rasio likuiditas yang diukur menggunakan rasio lancar (*current ratio*) dan rasio kas (*cash ratio*). Di mana rasio lancar merupakan perbandingan antara aset lancar Perusahaan dengan liabilitas jangka pendek Perusahaan. Sementara itu, rasio kas dihitung berdasarkan perbandingan antara kas dan setara kas Perusahaan dengan liabilitas jangka pendek Perusahaan.

Adapun kemampuan Perusahaan dalam membayar utang jangka pendek, yang diukur berdasarkan rasio likuiditas dan perbandingannya dalam 2 (dua) tahun terakhir, adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

The Company's Ability to Pay Short-Term Debts

In meeting short-term obligations that will mature, the Company uses a liquidity ratio measured using the current ratio and cash ratio. Where the current ratio is a comparison between the Company's current assets and the Company's short-term liabilities. Meanwhile, the cash ratio is calculated based on the comparison between the Company's cash and cash equivalents and the Company's short-term liabilities.

The Company's ability to pay short-term debts as measured by the liquidity ratio and its comparison in the last 2 (two) years, is as described below:

Rasio Likuiditas / Liquidity Ratio

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Kas dan Setara Kas (Rp-juta) Cash and Cash Equivalent (Rp-million)	4.132.858	4.138.867	(6.009)	(0,15)
Aset Lancar (Rp-juta) Current Assets (Rp-million)	15.233.514	15.148.356	85.158	0,56
Liabilitas Jangka Pendek (Rp-juta) Current Liabilities (Rp-million)	11.974.820	9.968.101	2.006.719	20,13

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Rasio Likuiditas: Liquidity Ratio:				
• Rasio Lancar (%) Current Ratio	127,21	151,97	(24,76)	(16,29)
• Rasio Kas (%) Cash Ratio	34,51	41,52	(7,01)	(16,88)

Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar Perusahaan di tahun 2024, tercatat sebesar 127,21%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 151,97%. Sementara rasio kas Perusahaan di tahun 2024, tercatat sebesar 34,51%, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 41,52%. Perusahaan masih memiliki kemampuan yang sangat baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Based on the table above, the Company's current ratio in 2024 was recorded at 127.21%, an decrease compared to the previous year of 151.97%. Meanwhile, the Company's cash ratio in 2024 was recorded at 34.51%, an decrease compared to the previous year of 41.52%. The Company still has a good ability to meet its short-term obligations.

Kemampuan Perusahaan dalam Membayar Utang Jangka Pendek Maupun Jangka Panjang

PTBA menggunakan rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang, yang akan jatuh tempo. Rasio solvabilitas terdiri dari rasio liabilitas terhadap ekuitas atau *Debt to Equity Ratio* (DER), serta rasio liabilitas terhadap aset atau *Debt to Asset Ratio* (DAR).

Adapun kemampuan Perusahaan dalam membayar utang jangka pendek maupun utang jangka panjang yang diukur berdasarkan rasio solvabilitas dan perbandingannya dalam 2 (dua) tahun terakhir, adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

The Company's Ability to Pay Short-Term and Long-Term Debts

PTBA uses the solvency ratio to measure the Company's ability to meet short-term and long-term obligations that will mature. The solvency ratio consists of the ratio of liabilities to equity or Debt to Equity Ratio (DER), and the ratio of liabilities to assets or Debt to Asset Ratio (DAR).

The Company's ability to pay short-term and long-term debts as measured based on the solvency ratio and its comparison in the last 2 (two) years, is as described below:

Rasio Solvabilitas / Solvency Ratio

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Jumlah Aset (Rp-juta) Total Assets (Rp-million)	41.785.576	38.765.189	3.020.387	7,79
Jumlah Liabilitas (Rp-juta) Total Liabilities (Rp-million)	19.141.764	17.201.993	1.939.771	11,28
Jumlah Ekuitas (Rp-juta) Total Equity (Rp-million)	22.643.812	21.563.196	1.080.616	5,01
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio				
• DER (%)	84,53	79,77	4,76	5,97
• DAR (%)	45,81	44,37	1,43	3,23

Berdasarkan tabel di atas, rasio liabilitas terhadap ekuitas atau *Debt to Equity Ratio* (DER) di tahun 2024 tercatat sebesar 84,53%, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 79,77%. Sementara rasio liabilitas terhadap aset atau *Debt to Asset Ratio* (DAR) di tahun 2024, tercatat sebesar 45,81%, mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 44,37%. Perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

Based on the table above, the Debt to Equity Ratio (DER) in 2024 was recorded at 84.53%, an increase compared to the previous year's figure of 79.77%. Meanwhile, the Debt to Asset Ratio (DAR) in 2024 stood at 45.81%, also higher than the previous year's 44.37%. The company demonstrates a strong ability to meet its long-term obligations.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang merupakan kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutangnya, yang dapat diukur berdasarkan penghitungan periode penagihan (*collection period*). Periode penagihan ini dipengaruhi oleh jumlah piutang usaha Perusahaan dan jumlah pendapatan Perusahaan. Pada prinsipnya, Perusahaan senantiasa berupaya untuk terus menekan jumlah piutang usaha dan menjaga tingkat kolektabilitas piutangnya.

Receivables Collectability Rate

The level of receivables collectability is the Company's ability to collect its receivables, which can be measured based on the calculation of the collection period. This collection period is influenced by the amount of the Company's accounts receivable and the amount of the Company's revenue. In principle, the Company always strives to continue to reduce the amount of accounts receivable and maintain the level of collectability of its receivables.

Berikut tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan yang diukur berdasarkan periode pengumpulan tahun 2024 dibanding tahun 2023, sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini:

The following is the Company's level of receivables collectability measured based on the collection period in 2024 compared to 2023, as attached in the table below:

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Piutang Usaha, Neto (Rp-juta) Trade Receivables, Net (Rp-million)	5.030.071	3.985.563	1.044.508	26,21
Pendapatan (Rp-juta) Income (Rp-million)	42.764.968	38.488.867	4.276.101	11,11
Periode Pengumpulan Piutang (hari) Receivables Collection Period (days)	43	38	5	13.59

Berdasarkan tabel di atas, tingkat kolektibilitas piutang di tahun 2024 adalah 43 hari, dibandingkan tahun sebelumnya yakni 38 hari. Perusahaan berupaya untuk terus menekan jumlah piutang usaha. Hal tersebut dilakukan dengan menjaga jumlah hari periode penagihan. Adapun piutang usaha Perusahaan berdasarkan umur piutangnya dapat dilihat sebagaimana terlampir berikut ini:

Based on the table above, the level of receivables collectability in 2024 is 43 days, different from the previous year which was 38 days. The Company continues to reduce the amount of accounts receivable. This is done by maintaining the number of days of the collection period. The Company's accounts receivable based on the age of its receivables can be seen as attached below:

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Lancar Current	3.809.734	3.252.026	557.708	17,15
Jatuh Tempo 1-30 Hari Maturity of 1-30 Days	670.354	353.581	316.773	89,59
Jatuh Tempo 31-90 Hari Maturity of 31-90 Days	529.477	132.783	396.694	298,75
Jatuh Tempo Lebih dari 90 Hari Maturity of More Than 90 Days	169.285	398.951	(229.666)	(57,57)
Cadangan atas Penurunan Nilai Allowance for Impairment	(148.779)	(151.778)	2.999	(1,98)
Jumlah Piutang Usaha – Neto Total Trade Receivables – Net	**5.030.071**	**3.985.563**	**1.044.508**	**26,21**

Berdasarkan tabel di atas, jumlah piutang usaha lancar di tahun 2024 tercatat sebesar Rp3,81 triliun, mengalami peningkatan Rp0,56 triliun atau 17,15% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,25 triliun. Sementara itu, piutang usaha dengan jatuh tempo 1-30 hari tercatat sebesar Rp0,67 triliun di tahun 2024, mengalami peningkatan Rp0,32 triliun atau 89,59% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp0,35 triliun. Piutang usaha dengan jatuh tempo 31-90 hari tercatat sebesar Rp0,53 triliun di tahun 2024, mengalami peningkatan Rp0,40 triliun atau 298,75% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp0,13 triliun. Adapun piutang usaha dengan jatuh tempo lebih dari 90 hari tercatat sebesar Rp0,17 triliun di tahun 2024, mengalami penurunan Rp0,23 triliun atau 57,57% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp0,40 triliun. Hal ini menunjukkan sebagian besar piutang usaha Perusahaan tahun 2024 masuk kategori lancar atau di bawah 90 hari.

Based on the table above, the amount of current accounts receivable in 2024 was recorded at Rp3.81 trillion, experiencing a increase of Rp0.56 trillion or 17.15% compared to the previous year which was Rp3.25 trillion. Meanwhile, accounts receivable with a maturity of 1-30 days were recorded at Rp0.67 trillion in 2024, experiencing a increase of Rp0,32 trillion or 89,59% compared to the previous year which was Rp0.35 trillion. Accounts receivable with a maturity of 31-90 days were recorded at Rp0.53 trillion in 2024, experiencing a increase of Rp0.40 trillion or 298.75% compared to the previous year which was Rp0.13 trillion. Meanwhile, accounts receivable with a maturity of more than 90 days were recorded at Rp0.17 trillion in 2024, experiencing a decrease of Rp0.23 trillion or 57.57% compared to the previous year which was Rp0.40 trillion. This shows that most of the company's accounts receivable in 2024 are in the current category or under 90 days.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

Penyisihan penurunan nilai piutang usaha di tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,15 triliun dan Rp0,15 triliun, dimana Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan yang dibentuk cukup memadai untuk menutupi penurunan nilai dari piutang usaha Perusahaan.

Provision for impairment of accounts receivable in 2024 and 2023 is Rp0.15 trillion and Rp0.15 trillion, where Management believes that the reserves formed are sufficient to cover the impairment of the Company's accounts receivable.

Rincian Struktur Modal

Dalam menjalankan usahanya, PTBA telah menetapkan kebijakan struktur modal yang merupakan perimbangan antara liabilitas dan ekuitas, di mana kombinasi struktur modal yang optimal dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Adapun rincian struktur modal Perusahaan pada tahun 2023 dan 2024 disajikan sebagai berikut:

Capital Structure Details

In running its business, PTBA has established a capital structure policy which is a balance between liabilities and equity, where the optimal combination of capital structure can maximize the Company's value. The details of the Company's capital structure in 2023 and 2024 are presented as follows:

Rincian Struktur Modal Perusahaan dan Perubahannya

Details of the Company's Capital Structure and the Changes

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	11.974.820	9.968.101	2.006.719	20,13
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	7.166.944	7.233.892	(66.948)	(0,93)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**19.141.764**	**17.201.993**	**1.939.771**	**11,28**
Jumlah Ekuitas Total Equity	**22.643.812**	**21.563.196**	**1.080.616**	**5,01**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**41.785.576**	**38.765.189**	**3.020.387**	**7,79**

Di tahun 2024, terdapat perubahan pada struktur modal Perusahaan, di mana komposisi liabilitas jangka pendek terhadap total liabilitas dan ekuitas adalah sebesar 28,66%, mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 yang sebesar 25,71%. Sementara komposisi liabilitas jangka panjang terhadap total liabilitas dan ekuitas di tahun 2024 adalah sebesar 17,15%, mengalami penurunan dibanding tahun 2023 yang sebesar 18,66%. Adapun komposisi ekuitas terhadap total liabilitas dan ekuitas di tahun 2023 adalah sebesar 54,19%, mengalami penurunan dibanding tahun 2023 yang sebesar 55,63%.

In 2024, there was a change in the company's capital structure, where the composition of current liabilities to total liabilities and equity is 28.66%, increasing/decreasing compared to 2023 which was 25.71%. Meanwhile, the composition of non-current liabilities to total liabilities and equity in 2024 is 17.15%, decreasing compared to 2023 which was 18.66%. The composition of equity to total liabilities and equity in 2023 is 54.19%, increasing compared to 2023 which was 55.63%.

Berdasarkan komposisi-komposisi yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa Perusahaan memiliki struktur modal yang cukup baik, di mana ekuitas Perusahaan memiliki nilai yang lebih besar dibanding liabilitas jangka pendek dan jangka panjang Perusahaan.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Setiap tahun, Direksi dan Dewan Komisaris merencanakan, membahas, dan memantau kebutuhan permodalan dan utang perusahaan dengan didukung oleh analisis data. Manajemen telah menyusun dasar penetapan kebijakan atas struktur modal dan utang dengan beberapa pertimbangan yakni prediksi ekonomi, potensi pertumbuhan bisnis, *risk appetite,* hasil *stress test,* dan target rasio permodalan. Melalui upaya ini, PTBA akan mampu bertahan melewati siklus ekonomi, memanfaatkan pertumbuhan dan peluang strategis, memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang saham, dan menjalankan bisnis dalam koridor *risk appetite* dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kebijakan manajemen terhadap struktur modal diterapkan guna melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga dapat memberikan imbal hasil dan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Perusahaan juga senantiasa mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Dasar Penetapan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal dan Utang

Perusahaan dan kelompok usahanya dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru, atau menjual aset untuk mengurangi liabilitas, yang bertujuan untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur permodalannya.

Selain itu, Perusahaan dan kelompok usahanya senantiasa memantau modal berdasarkan rasio utang terhadap modal. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah utang dengan total modal. Utang merupakan jumlah liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, sementara modal terdiri dari seluruh komponen ekuitas sebagaimana jumlah dalam posisi keuangan konsolidasian. Perusahaan menetapkan kebijakan struktur permodalan yang optimal agar memaksimalkan nilai Perusahaan.

Adapun kebijakan struktur permodalan yang ditetapkan oleh PTBA berdasarkan Pedoman Keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Based on the compositions described above, it can be seen that the Company has a fairly good capital structure, where the Company's equity has a greater value than the Company's current and non-current liabilities.

Management Policy on Capital Structure

Every year, the Board of Directors and Board of Commissioners plan, discuss, and monitor the company's capital and debt needs supported by data analysis. Management has prepared a basis for determining policies on capital structure and debt with several considerations, namely economic predictions, business growth potential, risk appetite, stress testing results and capital ratio targets. Through these efforts, PTBA will be able to survive the economic cycle, take advantage of growth and strategic opportunities, maximize shareholder returns, and run the business within the risk appetite corridor and comply with applicable regulations. Management policy on capital structure is implemented to protect the Company's ability to maintain business continuity, in order to provide returns and benefits to shareholders and other stakeholders. In addition, the Company also continues to maintain an optimal capital structure to reduce capital costs.

Basis for Determining Management Policy on Capital Structure and Debt

The Company and its business groups can adjust the amount of dividends paid to shareholders, issue new shares, or sell assets to reduce liabilities, which aims to maintain or adjust its capital structure.

In addition, the Company and its business groups continue to monitor capital based on the debt to equity ratio. This ratio is calculated by dividing the amount of debt by the total capital. While debt is the amount of liabilities in the consolidated financial position statement, capital consists of all equity components as the amount in the consolidated financial position. The Company establishes an optimal capital structure policy in order to maximize the Company's value.

The capital structure policy set by PTBA based on the Company's Financial Guidelines is as follows:

1. Menentukan target struktur modal yang optimal agar dapat digunakan sebagai pedoman pemenuhan kebutuhan dana di masa yang akan datang serta meningkatkan nilai Perusahaan;
2. Mempertimbangkan keseimbangan antara risiko keuangan dan tingkat pengembalian dalam upaya meningkatkan nilai Perusahaan;
3. Mengevaluasi antara *financial leverage*, nilai Perusahaan, dan biaya modal;
4. Mengoptimalkan struktur modal Perusahaan, yaitu suatu kombinasi utang dan modal sendiri (ekuitas) yang dapat memaksimalkan nilai Perusahaan;
5. Melakukan analisis sensitivitas dan menelusuri bagaimana Perusahaan dapat menampilkan variasi sensitif atas perubahan asumsi-asumsi inti yang digunakan.

1. Determining the optimal capital structure target to be used as a guideline for meeting future funding needs and increasing the Company's value;
2. Considering the balance between financial risk and rate of return in an effort to increase the Company's value;
3. Evaluating between financial leverage, Company value, and cost of capital;
4. Optimizing the Company's capital structure, which is a combination of debt and equity that can maximize the Company's value;
5. Conducting a sensitivity analysis to explore the Company's ability to display sensitive variations to changes in the core assumptions used.

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitments for Capital Goods Investment

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa suatu transaksi dikategorikan sebagai transaksi material apabila nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka. Sepanjang tahun 2024, Perusahaan tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal.

Based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No.17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, Article 3 paragraph (1), states that a transaction is categorized as a material transaction if the transaction value is equal to 20% or more of the equity of a Public Company. Throughout 2024, the Company has no material commitments for capital goods investment.



Realisasi Investasi Barang Modal

Realization of Capital Goods Investment

Dalam mengembangkan kegiatan usaha, investasi merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan. PTBA menerapkan kecermatan dan kehati-hatian dalam melakukan investasi, hal ini sejalan dengan upaya transformasi Perusahaan menuju perusahaan energi kelas dunia. Investasi difokuskan pada investasi pengembangan dalam rangka mendukung proyek- proyek strategis yang dimiliki oleh Perusahaan.

Investment is one of the important tools in business activities development. PTBA applies precision and caution in making investments, this is in line with the development of the company towards a world-class energy company. Investment is focused on development investment in order to support strategic projects owned by the Company.

Jenis dan Tujuan Investasi Barang Modal

Investasi barang modal untuk tahun 2024 ditujukan untuk beberapa hal, seperti investasi rutin berupa peremajaan alat-alat berat yang dimiliki perusahaan dan juga pengembangan anak-anak perusahaan. Selain itu, mulai tahun 2024 hingga tahun depan, investasi barang modal akan lebih difokuskan untuk pengembangan kapasitas angkutan batu bara, dimana mulai akhir tahun 2024 telah mulai dilakukan pembangunan *Train Loading Station* (TLS) dan *Coal Handling Facility* (CHF) untuk mendukung proyek Tanjung Enim ke Keramasan.

Types and Objectives of Capital Goods Investment

Capital goods investment for 2024 is intended for several things such as routine investment in the form of rejuvenation of heavy equipment owned by the company and also the development of subsidiaries. In addition, from 2024 to next year, capital goods investment will be more focused on developing transport capacity where starting at the end of 2024 the construction of the Train Loading Station (TLS) and Coal Handling Facility (CHF) has begun to support the Tanjung Enim to Keramasan project.

Nilai Investasi Barang Modal

Pada tahun 2024, PTBA menganggarkan *Capital Expenditure* (CAPEX) sebesar Rp2,81 Triliun, dimana realisasi penggunaan CAPEX PTBA sebesar Rp2,35 Triliun atau tercapai 82,35% dari rencana.

Capital Goods Investment Value

In 2024, PTBA budgeted Capital Expenditure (CAPEX) of Rp2.81 Trillion, where the realization of PTBA's CAPEX usage was Rp2.35 Trillion or achieved 82.35% of the plan.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts that Occurred After the Accountant's Report Date

Tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi setelah diterbitkannya laporan keuangan *audited* tahun buku 2024.

There is no material information and facts that have occurred after the issuance of the audited financial statements for the fiscal year 2024.

Perbandingan antara Target dan Realisasi serta Proyeksi Untuk Satu Tahun ke Depan

Comparison between Targets and Realizations and Projections for the Next One Year

Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024

Pada tahun buku 2024, Perusahaan telah menetapkan sejumlah target yang hendak dicapai yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024. Perbandingan pencapaian beberapa target yang ditetapkan dengan realisasi tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

Comparison between Targets and Realizations in 2024

In the 2024 financial year, the Company has set a number of targets to be achieved which are stated in the 2024 Company Work Plan and Budget (CWPB). The comparison of the achievement of several targets set with the realization of the 2024 financial year is as follows:

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi
Comparison Tabel for Target and Operational Realization

Uraian Description	Satuan Unit	Target Target	Realisasi Realization	Ketercapaian Achievement
Operasional Operational				
Produksi dan Pembelian Production and Purchasing	Juta Ton Million Ton	41,34	43,28	104,69%
Angkutan Coal Transport	Juta Ton Million Ton	37,70	38,17	101,25%
Penjualan Sales	Juta Ton Million Ton	43,11	42,89	99,48%
Nisbah Kupas Stripping Ratio	Kali Times	6,44	6,23	96,74%
Keuangan Finance				
Pendapatan Revenue	Rp Triliun Rp Trillion	43,72	42,76	97,82%
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Profit for the year attributable to Owners of the Parent Entity	Rp Triliun Rp Trillion	5,53	5,10	92,28%
Struktur Modal* Capital Structure	%	69,16	84,53	122,24%

Catatan | Notes :
*Struktur Modal merupakan perbandingan antara liabiitas dan ekuitas
*Capital Structure is comparision between the liabilty and equity

Produksi dan Pembelian Batu Bara

Dalam RKAP 2024, Perusahaan menetapkan target produksi dan pembelian batu bara sebesar 41,34 juta ton. Hingga akhir tahun 2024, realisasi produksi dan pembelian Perusahaan adalah sebesar 43,28 juta ton atau 104,69% dari target RKAP 2024. Tercapainya target RKAP tersebut dalam rangka percapatan monetisasi cadangan batu bara Perusahaan.

Coal Production and Purchase

In the 2024 CWPB, the Company set a coal production and purchase target of 41.34 million tons. Until the end of 2024, the Company's production and purchase realization was 43.28 million tons or 104.69% of the 2024 CWPB target. The achievement of the CWPB target aims to accelerating the monetization of the Company's coal reserves.

Angkutan Batu Bara

Dalam RKAP 2024, Perusahaan menetapkan target angkutan batu bara sebesar 37,70 juta ton. Hingga akhir tahun 2024, realisasi angkutan batu bara Perusahaan adalah sebesar 38,17 juta ton atau 101,25% dari target RKAP 2024. Tercapainya target RKAP tersebut disebabkan oleh peningkatan angkutan batu bara non kereta api dan sinergi yang baik antara PTBA dan PT KAI dalam melakukan optimasi angkutan batu bara.

Coal Transportation

In the 2024 CWPB, the Company set a coal transportation target of 37.70 million tons. Until the end of 2024, the Company's coal transportation realization was 38.17 million tons or 101.25% of the 2024 CWPB target. The realization of the CWPB target was due to the increase in non-railway coal transportation and good synergy between PTBA and PT KAI in optimizing coal transportation.

Penjualan Batu Bara

Dalam RKAP 2024, Perusahaan menetapkan target penjualan sebesar 43,11 juta ton. Hingga akhir tahun 2024, realisasi penjualan Perusahaan adalah sebesar 42,89 juta ton atau 99,48% dari target RKAP 2024. Tidak tercapainya target RKAP tersebut disebabkan adanya penurunan indeks harga batu bara yang cukup dalam, sehingga beberapa rencana penjualan menggunakan angkutan selain kereta api belum optimal.

Coal Sales

In the 2024 CWPB, the Company set a sales target of 43.11 million tons. Until the end of 2024, the Company's sales realization was 42.89 million tons or 99.48% of the 2024 CWPB target. The failure to achieve the CWPB target was due to a fairly deep decline in the coal price index, so that several sales plans using transportation other than trains were not optimal.

Nisbah Kupas

Dalam RKAP 2024, Perusahaan menetapkan target nisbah kupas banyak 6,44 kali. Hingga akhir tahun 2024, realisasi nisbah kupas Perusahaan adalah sebanyak 6,23 kali atau 96,74% dari target RKAP 2024. Realisasi nisbah kupas masih dapat dikontrol oleh perusahaan.

Stripping Ratio

In the 2024 CWPB, the Company set a target of a stripping ratio of 6.44 times. Until the end of 2024, the realization of the Company's stripping ratio was 6.23 times or 96.74% of the 2024 CWPB target. The realization of the stripping ratio can still be controlled by the Company.

Pendapatan

Dalam RKAP 2024, Perusahaan menetapkan target pendapatan sebesar Rp43,72 triliun. Hingga akhir tahun 2024, realisasi pendapatan Perusahaan adalah sebesar Rp42,76 triliun atau 97,82% dari target RKAP 2024. Tidak tercapainya target RKAP tersebut disebabkan melemahnya indeks harga batu bara atau lebih rendah dari rencana.

Revenue

In the 2024 CWPB, the Company set a revenue target of Rp43.72 trillion. Until the end of 2024, the Company's revenue realization was Rp42.7 trillion or 97.82% of the 2024 CWPB target. The failure to achieve the CWPB target was due to the weakening of the coal price index or being lower than the origin plan.

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Dalam RKAP 2024, Perusahaan menetapkan target laba bersih sebesar Rp5,53 triliun. Hingga akhir tahun 2024, realisasi laba sebelum pajak Perusahaan adalah sebesar Rp6,26 triliun atau 84,44% dari target RKAP 2024. Tidak tercapainya target RKAP tersebut disebabkan belum terimplementasinya regulasi batu bara terkait Mitra Instansi Pengelola (MIP).

Profit for the year attributable to Owners of the Parent Entity

In the 2024 CWPB, the Company has set a net profit target of Rp5.53 trillion. Until the end of 2024, the realization of the Company's profit before tax was Rp6.26 trillion or 84.44% of the 2024 CWPB target. The failure to achieve the CWPB target was due to the non-implementation of coal regulations related to the Managing Agency Partners.

Struktur Modal

Dalam RKAP 2024, Perusahaan menetapkan target struktur modal sebesar 69,16%. Hingga akhir tahun 2024, realisasi struktur modal sebesar 84,53% atau sebesar

Capital Structure

In the 2024 CWPB, the Company has set a capital structure target of 69.16%. Until the end of 2024, the realization of the capital structure was 84.53% or 122.24% of the

122,24% dari target. Tidak tercapainya target RKAP tersebut disebabkan adanya pembayaran dividen pada tahun 2024 atas laba bersih PTBA tahun buku 2023.

target. The failure to achieve the CWPB target was due to the payment of dividends in 2024 on PTBA's net profit for the 2023 financial year.

Proyeksi Tahun 2025

2025 Projection

Memasuki tahun 2025, Perusahaan telah menetapkan sejumlah target yang dituangkan dalam RKAP 2025, yang disusun berdasarkan sejumlah asumsi dan dengan mempertimbangkan kinerja Perusahaan tahun 2024. Untuk produksi dan pembelian, PTBA menargetkan sebesar 50,05 juta ton di tahun 2025, meningkat dari target tahun sebelumnya sebesar 41,34 juta ton. Untuk angkutan batu bara, PTBA menargetkan sebesar 43,25 juta ton di tahun 2025, meningkat dari target tahun sebelumnya sebesar 37,70 juta ton. Dengan peningkatan target volume produksi tersebut, PTBA juga menetapkan target penjualan sebesar 50,09 juta ton di tahun 2025, meningkat dari target tahun sebelumnya sebesar 43,11 juta ton. Selain itu, PTBA menargetkan nisbah kupas di tahun 2025 sebesar 6,49 kali atau meningkat dari tahun 2024 sebesar 6,44 kali. Kenaikan nisbah kupas tersebut kaitannya dengan adanya perluasan sekuen tambang untuk persiapan peningkatan volume produksi atas rencana Proyek Pengembangan Angkutan Kereta Api Relasi Tanjung Enim-Kramasan yang ditargetkan beroperasi komersial pada Tahun 2025.

Entering 2025, the Company has set several targets outlined in the 2025 CWPB, which are prepared based on a number of assumptions and taking into account the Company's performance in 2024. For production and purchasing, PTBA is targeting 50.05 million tons in 2024, an increase from the previous year's target of 41.34 million tons. For coal transportation, PTBA is targeting 43.25 million tons in 2025, an increase from the previous year's target of 37.70 million tons. With the increase in the production volume target, PTBA has also set a sales target of 50.09 million tons in 2025, an increase from the previous year's target of 43.11 million tons. In addition, PTBA is targeting a strip ratio in 2025 of 6.49 times or an increase from 2024 of 6.44 times. The increase in the strip ratio is related to the expansion of the mining sequence in preparation for increasing production volume for the planned Tanjung Enim-Kramasan Railway Transportation Development Project which is targeted to operate commercially in of 2025.

Berdasarkan RKAP tahun 2025, secara keuangan, PTBA menetapkan target pendapatan usaha sebesar Rp46,15 triliun. Di samping itu, Perusahaan juga tetap berkomitmen untuk mempertahankan kinerja laba Perusahaan yang positif di tengah harga batu bara yang berfluktuasi. Untuk target struktur modal ditetapkan sebesar 105,50%. Target strukur modal tersebut pada dasarnya merupakan target perbandingan total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2025. Untuk Kebijakan dividen sendiri mengacu pada Prospektus Penawaran Umum Perdana (IPO) yang telah ditetapkan oleh Perusahaan pada tahun 2002. Adapun berdasarkan prospektus tersebut, Perusahaan telah menetapkan kebijakan dividen tunai minimal 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

Based on the 2025 CWPB, financially, PTBA has set a target for operating revenue of Rp46.15 trillion. In addition, the Company also remains committed to maintaining the company's positive profit performance amid fluctuating coal prices. The capital structure target is set at 105.50%. The capital structure target is a target comparison of total liabilities and equity in 2025. The dividend policy itself refers to the Initial Public Offering (IPO) Prospectus that was set by the Company in 2002. Based on the prospectus, the Company has set a cash dividend policy of at least 30% (thirty percent) of profit after tax, unless otherwise determined by the GMS.

Target-target keuangan yang telah ditetapkan tersebut di atas, dapat berubah dari waktu ke waktu, mengingat bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan sangat tergantung dengan harga indeks batu bara dunia, baik untuk indeks Newcastle dan Indeks Indonesian Coal Index (ICI), serta nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar.

The financial targets set above may change from time to time, considering that the business run by the Company is highly dependent on the world coal index price, both for the Newcastle Index and the Indonesian Coal Index (ICI), as well as the Rupiah exchange rate against the US Dollar.

Kebijakan dan Pembagian Dividen
Dividend Policy and Distribution

Kebijakan Pembagian Dividen

Mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan melakukan pembagian dividen berdasarkan keputusan RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa. Sebelum tahun buku keuangan berakhir, Perusahaan juga dapat membagikan dividen interim yang ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris, sepanjang diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan.

Dividen atas suatu saham harus dibayarkan kepada nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. Selain itu, pembayaran dividen juga harus memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan yang akan ditentukan atau atas wewenang RUPS, di mana keputusan untuk pembagian dividen diambil dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

Kebijakan pembagian dividen telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu dengan memperhatikan Prospektus Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*/IPO) yang dilakukan oleh Perusahaan pada tahun 2002. Dalam Prospektus tersebut, Perusahaan telah menetapkan kebijakan dividen tunai minimal 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

Pembagian Dividen dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir dan Riwayat Pembagian Dividen dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

Berdasarkan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 8 Mei 2024, Pemegang Saham menyetujui pembagian dividen sebesar Rp4,58 triliun dari laba bersih Perusahaan atau 75% dari total laba bersih perusahaan pada tahun buku 2023.

Dividend Distribution Policy

Referring to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company distributes dividends based on the decision of the Annual GMS or Extraordinary GMS. Before the financial year ends, the Company may also distribute interim dividends determined by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners, as long as permitted by the Company's Articles of Association.

Dividends on a share must be paid to the name registered in the Shareholders Register. In addition, dividend payments must also consider the provisions in the Company's Articles of Association which will be determined or by the authority of the GMS, where the decision to distribute dividends is taken without prejudice to the provisions of the Stock Exchange regulations where the shares are listed.

The dividend distribution policy is in accordance with the Company's Articles of Association, namely by considering the Initial Public Offering (IPO) Prospectus conducted by the Company in 2002. In the Prospectus, the Company has set a cash dividend policy of at least 30% (thirty percent) of profit after tax, unless otherwise determined by the GMS.

Dividend Distribution in the Last 2 (Two) Years and Dividend Distribution History in the Last 5 (five) Years

Based on the Annual GMS held on May 8, 2024, Shareholders approved the distribution of dividends of Rp4.58 trillion from the Company's net profit or 75% of the company's total net profit in the 2023 financial year.

Informasi Pembayaran Dividen
Dividend Payout Information

Uraian Description	Tahun Buku Fiscal Year	
	2023	2022
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp) Cash Dividend Payout (Rp)	4.579.392.004.320	12.567.581.927.964
Rasio Pembayaran Dividen (%) Dividend Payout Ratio (%)	75,00	100,00
Nilai Dividen per Lembar Saham (Rp) Dividend Value per Shares (Rp)	397,71	1.094,05
Jumlah Saham yang Berhak atas Dividen (Lembar) Number of Shares Entitled to Dividends (Shares)	11.514.357.250	11.487.209.350
Tanggal Pengumuman Announcement Date	8 Mei 2024 May 8, 2024	15 Juni 2023 June 15, 2023
Tanggal Pembayaran Payment Date	7 Juni 2024 June 7, 2024	14 Juli 2023 July 14, 2023

Adapun pembagian dan pembayaran dividen tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

The distribution and payment of dividends for 2020 to 2024 can be seen in the table below:

Tahun Pembagian Payout Year	Tahun Buku Dividen Dividend Fiscal Year	Tanggal Pengumuman Announcement Date	Tanggal Pembayaran Payment Date	Dividen Kas yang Dibagikan Cash Dividend Payout (Rp)	Dividen per Lembar Saham (Rp/ Lembar) Dividend per Share (Rp/ share)	Jumlah Saham yang Berhak atas Dividen (Lembar) Number of Shares Entitled to Dividends (shares)	Rasio Pembagian Deviden (%) Dividen Payout Ratio (%)
2024	2023	8 Mei 2024 May 8, 2024	7 Juni 2024 June 7, 2024	4.579.392.004.320	397,71	11.514.357.250	75
2023	2022	15 Juni 2023 June 15, 2023	14 Juli 2023 July 14, 2023	12.567.581.927.964	1.094,05	11.487.209.350	100
2022	2021	24 Mei 2022 May 24, 2022	24 Juni 2022 June 24, 2022	7.909.111.452.604	688,52	11.487.209.350	100
2021	2020	05 April 2021 April 5, 2021	07 Mei 2021 May 7, 2021	835.386.571.935	74,69	11.184.061.250	35
2020	2019	10 Juni 2020 June 10, 2020	10 Juli 2020 July 10, 2020	3.651.199.955.694	326,46	11.184.061.250	90

Kontribusi kepada Pemerintah
Contribution to Government

Sebagai bentuk kontribusi PTBA kepada negara, serta wujud kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku, Perusahaan telah melakukan pemenuhan kewajiban atas penerimaan negara pada tahun 2024. Kontribusi penerimaan negara yang diberikan oleh Perusahaan adalah dalam bentuk Pajak sebesar Rp2,26 triliun dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp7,18 triliun, atau senilai total Rp9,44 triliun. Adapun rinciannya sebagai berikut:

As a form of PTBA's contribution to the state, as well as a form of compliance with all applicable regulations, the Company has fulfilled its obligations for state revenue in 2024. The contribution of state revenue provided by the Company is in the form of Taxes amounting to Rp2.26 trillion and Non-Tax State Revenue amounting to Rp7.18 trillion, or a total of Rp9.44 trillion. The details are as follows:

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Deskripsi Description	2024	2023
Penerimaan Pajak **Tax Revenue**		
Pajak Penghasilan Income Tax	1.954.728	2.935.011
Pajak Bumi dan Bangunan Property Tax	274.513	418.778
Pajak Pertambahan Nilai Value-added Tax	7.222	7.189
Pajak Daerah Local Tax	21.877	13.973
Total Penerimaan Pajak Total Tax Revenue	**2.258.340**	**3.374.952**
Penerimaan Negara Bukan Pajak **Non-Tax State Revenue**		
Dividen (RI, MIND ID, Sumsel, Muara Enim) Dividends (RI, MIND ID, Sumsel, Muara Enim)	3.077.080	8.464.617
Royalti Batu Bara Coal Royalty	3.963.102	4.143.358
Iuran Tetap (Landrent) Fixed Contributions (Landrent)	3.691	3.515
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Land and Building Rights Acquisition Fee	653	4.569
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Borrow-to-Use Forest Area Permit	79.419	54.681
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Other Non-Tax Revenue	59.771	19.597
Total Penerimaan Negara Bukan Pajak **Total Non-Tax Revenue**	**7.183.716**	**12.690.337**
Total Penerimaan Negara Total State Revenue	**9.442.056**	**16.065.289**

Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Employee and/or Management Stock Option Plan (ESOP/MSOP)

Pada tahun 2024, PTBA tidak memiliki program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Perusahaan (*Employee Stock Ownership Program/Management Stock Ownership Program*).

In 2024, PTBA did not have an Employee Stock Ownership Program and/or Management Stock Ownership Program carried out by the Company. (Employee Stock Ownership Program/Management Stock Ownership Program).

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of the Use of Proceeds from Public Offering

Pada tahun 2024, Perusahaan tidak melakukan penawaran umum baik untuk efek yang bersifat ekuitas ataupun bersifat utang, sehingga tidak terdapat informasi yang disampaikan pada Laporan Tahunan ini terkait dengan penggunaan dana hasil penawaran umum.

In 2024, the Company did not conduct a public offering for either equity or debt securities, so there is no information presented in this Annual Report regarding the use of funds from the public offering.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger/Consolidation, Acquisition, Debt/Capital Restructuring

Dalam melaksanakan transaksi material (termasuk diantaranya investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan, akuisisi, restrukturisasi utang/modal) Perusahaan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Sesuai dengan ketentuan tersebut, wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi.
2. Mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi material kepada masyarakat.
3. Menyampaikan dokumen pendukung kepada OJK.
4. Terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS dalam hal:
   a. Transaksi material lebih dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perusahaan.
   b. Laporan Penilai menyatakan bahwa transaksi material yang akan dilakukan tidak wajar.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan transaksi material pada laporan tahunan.

Ketentuan penggunaan penilai dapat dikecualikan, dalam hal memenuhi persyaratan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahaan Kegitaan Usaha.

Selama tahun 2024, tidak terdapat investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan, akuisisi, restrukturisasi utang/modal yang bersifat material yang dilakukan oleh Perusahaan.

In carrying out material transactions (including investment, expansion, divestment, merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring) the Company refers to Financial Services Authority Regulation (FSA) Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities. In accordance with these provisions, it is mandatory to comply with the following:

1. Use an appraiser to determine the fair value of the material transaction object and/or the fairness of the transaction.
2. Announce the disclosure of information on each material transaction to the public.
3. Submit supporting documents to the FSA.
4. Prioritizing obtaining approval from the GMS in the event of:
   a. Material transactions are more than 50% (fifty percent) of the Company's equity.
   b. The Appraiser's report states the material transaction to be carried out is unreasonable.
5. Report the results of the implementation of material transactions in the annual report.

The provisions for using an appraiser can be exempted, if they meet the requirements of Article 11 of Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

During 2024, there were no material investments, expansions, divestments, mergers/consolidation, acquisitions, debt/capital restructurings undertaken by the Company.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

Information on Material Transactions Containing Conflicts Of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties/Related Parties

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, termasuk transaksi mengandung benturan kepentingan yang telah disetujui Pemegang Saham independen. Seluruh transaksi yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan syarat, kondisi, dan manfaat ekonomis, yang secara substansial sebanding dengan transaksi dengan pihak ketiga.

Throughout 2024, the Company did not conduct any transactions containing a conflict of interest, including transactions containing a conflict of interest that have been approved by independent Shareholders. All transactions conducted by the Company have been in accordance with the terms, conditions, and economic benefits, which are substantially comparable to transactions with third parties.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Transaction with Affiliated Parties

Kebijakan Transaksi Afiliasi

Affiliate Transaction Policy

PTBA dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/ POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020") serta Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 067/0100/2023 tentang Pedoman Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

PTBA and its Subsidiaries conduct transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 concerning "Related Party Disclosures" and Bapepam and LK Regulation No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012, concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies, Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions ("POJK No. 42/2020") and Decree of the Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 067/0100/2023 concerning Guidelines for Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Yang termasuk pihak berelasi adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):
   a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
      - Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
      - Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
      - Merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
   b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
      - Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya

In accordance with Bapepam and Financial Statement (FS) Regulation No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012, concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies, Related parties are persons or entities related to the entity preparing its financial statements (reporting entity). Related parties include the following:

1. Related parties are persons or entities related to the Group (reporting entity):
   a. A person or close family member has a relationship with the reporting entity if the person:
      - Has control or joint control over the reporting entity;
      - Has significant influence over the reporting entity; or
      - Is a key management personnel or the parent entity of the reporting entity.
   b. An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:
      - The entity and the reporting entity are members of the same business group

entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);

- Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1);
- Orang yang diidentifikasi dalam angka (1):
  a. memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan
  b. entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

2. Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

   Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/ POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:
   a. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
      - Suami atau istri;
      - Orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
      - Kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;

(meaning the parent entity, subsidiary entity, and subsequent subsidiary entity are related to other entities);

- One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
- Both entities are joint ventures of the same third party;
- One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that administers the plan, the sponsoring entity is also related to the reporting entity;
- The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1);
- The person identified in (1):
  a. has significant influence over the entity or the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); and
  b. the entity, or a member of a group of which the entity is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to a parent of the reporting entity.

2. Significant transactions conducted with related parties, whether or not conducted under the same conditions and requirements as third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

   In Article 1 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 42/ POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and the provisions of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market as last amended by Law 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, the definition of Affiliate is:
   a. Family relationships due to marriage up to the second degree, both horizontally and vertically, namely a person's relationship with:
      - Husband or wife;
      - Parents of husband or wife and husband or wife of child;
      - Grandparents of husband or wife and husband or wife of grandchild;

- Saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
- Suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.

b. Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   - Orang tua dan anak;
   - Kakek dan nenek serta cucu; atau
   - Saudara dari orang yang bersangkutan

c. Hubungan antara pihak dengan Karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;

d. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;

e. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;

f. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau

g. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Sedangkan pengertian Transaksi Afiliasi di dalam Pasal 1 ayat (3) dari POJK 42/2020 adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

Transaksi Afiliasi yang Memenuhi Batasan Material

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/ POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Meterial dan Perubahaan Kegiatan Usaha, serta Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 067/0100/2023

- Siblings of husband or wife and husband or wife of sibling concerned; or
- Husband or wife of sibling of person concerned.

b. Family relationships due to descent up to the second degree, both horizontally and vertically, namely a person's relationship with:
   - Parents and child;
   - Grandparents and grandchild; or
   - Siblings of person concerned

c. Relationship between a party with Employees, Directors, or Commissioners of the party;

d. Relationship between 2 (two) or more companies where there is 1 (one) or more members of the board of directors, management, board of commissioners, or supervisors in common;

e. Relationship between a company and a party, either directly or indirectly, in any way, controlling or being controlled by the company or party in determining the management and/or policies of the company or party in question;

f. Relationship between 2 (two) or more companies controlled, either directly or indirectly, in any way, in determining the management and/or policies of the company by the same party; or

g. Relationship between a company and its principal shareholders, namely parties who directly or indirectly own at least 20% (twenty percent) of the shares with voting rights of the company.

Meanwhile, the definition of Affiliate Transactions in Article 1 paragraph (3) of POJK 42/2020 is any activity and/or transaction carried out by a public company or controlled company with an Affiliate of a public company or an Affiliate of a member of the board of directors, member of the board of commissioners, major shareholder, or Controller, including any activity and/or transaction carried out by a public company or controlled company for the benefit of an Affiliate of a public company or an Affiliate of a member of the board of directors, member of the board of commissioners, major shareholder, or Controller.

Affiliate Transactions that Meet Material Limits

Based on the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions, Financial Services Authority Regulation No. 17/ POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, and Decree of the Board

tentang Pedoman Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, terhadap transaksi afiliasi/berelasi yang memenuhi batasan material, PTBA menerapkan ketentuan bahwa transkasi tersebut wajib mendapatkan persetujuan pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas (*disinterested shareholders*).

Dalam RUPS tersebut, suara setuju harus diberikan oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas yang tidak memiliki kepentingan.

Pernyataan Direksi mengenai Kewajaran Transaksi Afiliasi dan Berelasi

Direksi memastikan bahwa seluruh kegiatan transaksi tersebut telah melalui prosedur yang memadai dan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar. Sebelum melakukan transaksi material yang berkaitan dengan pihak berelasi atau transaksi yang berpotensi mengandung unsur benturan kepentingan pada Perusahaan, persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan wajib didasarkan pada rekomendasi/pertimbangan dari Komite Audit sebelum transaksi material dengan pihak berelasi dilaksanakan, hal ini tertuang pada Piagam Komite Audit PTBA. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/ POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 067/0100/2023 tentang Pedoman Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, transaksi tersebut wajib dilakukan publikasi kepada publik serta dilaporkan kepada OJK.

Pelaporan Transaksi Afiliasi Sebagaimana Diwajibkan dalam POJK No. 42/2020

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 42/2020, terdapat beberapa transaksi yang hanya cukup diwajibkan dilaporkan kepada OJK. Pelaporan kepada OJK tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020 wajib disampaikan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi afiliasi. Adapun rincian transaksi yang dilaporkan oleh Perusahaan kepada OJK sebagaimana persyaratan POJK tersebut adalah sebagai berikut:

of Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 067/0100/2023 concerning Guidelines for Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions, for affiliated/related transactions that meet material limits, PTBA applies the provision requiring transaction must obtain approval from independent shareholders or minority shareholders (disinterested shareholders).

In the GMS, the affirmative vote must be given by more than 50% (fifty percent) of independent shareholders or minority shareholders who have no interest.

Directors' Statement on the Fairness of Affiliated and Related Transactions

The Board of Directors ensures that all transaction activities have gone through adequate procedures and are in accordance with the arm's length principle. Before conducting material transactions related to related parties or transactions that have the potential to contain elements of conflict of interest in the Company, the approval of the Company's Board of Commissioners must be based on the recommendations/considerations of the Audit Committee before material transactions with related parties are carried out, as stated in the PTBA Audit Committee Charter. In addition, in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions and the Decree of the Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 067/0100/2023 concerning Guidelines for Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, these transactions must be published to the public and reported to the FSA.

Reporting of Affiliate Transactions as Required in POJK No. 42/2020

In accordance with the provisions of Article 6 paragraph (1) of POJK No. 42/2020, there are several transactions that are only required to be reported to the FSA. Reporting to the FSA in accordance with the provisions of Article 6 paragraph (2) of POJK No. 42/2020 must be submitted no later than the end of the 2nd (second) working day after the date of the affiliate transaction, the details of the transactions reported by the Company to the FSA as required by the POJK are as follows:

Tanggal Kejadian/Transaksi Transaction Date	**Jenis Transaksi Afiliasi** Type of Affiliated Transaction	**Pihak yang Bertransaksi** Parties Involved	**Sifat Hubungan Afiliasi** Nature of Affiliated Relations	**Nilai Transaksi** Transaction Value
Penambahan setoran modal dimuat pada Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Huadian Bukit Asam Power ("RUPS Sirkuler PT HBAP") yang berlaku efektif pada tanggal 26 Februari 2024 ("Tanggal Efektif"). The additional capital injection is contained in the Circular Decision of Shareholders of PT Huadian Bukit Asam Power ("Circular GMS of PT HBAP") which is effective on February 26, 2024 ("Effective Date").	Setoran Modal kepada entitas Joint Venture Company Capital Contribution to Joint Venture Company Entity	Para Pemegang Saham PT HBAP, yaitu PTBA bersama-sama CHDHK untuk penambahan setoran modal sebagai bentuk Cost Overrun. Shareholders of PT HBAP, namely PTBA together with CHDHK for additional capital deposits as a form of Cost Overrun.	PTBA dengan Entitas Joint Venture Company (HBAP) PTBA with Joint Ventures Company Entity (HBAP)	Tambahan setoran modal sebesar USD66.638.000 (enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dollar Amerika Serikat). Dengan porsi tambahan setoran modal dari pemegang saham sebagai berikut: 1. PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") dengan kepemilikan saham sebesar 45%, maka nilai tambahan setoran modal sebesar USD29.987.100 (dua puluh Sembilan juta Sembilan puluh depalan ratus tujuh ribu seratus dollar Amerika Serikat); 2. China Huadian Hongkong Company Ltd ("CHDHK") dengan kepemilikan saham sebesar 55%, maka nilai tambahan setoran modal sebesar USD36.650.900 (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus dollar Amerika Serikat). Additional capital contribution of USD66,638,000 (sixty-six million six hundred thirty-eight thousand US dollars). With the portion of additional capital contribution from shareholders as follows: 1. PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") with a share ownership of 45%, then the value of the additional capital contribution is USD 29,987,100 (twenty nine million ninety eight hundred seven thousand one hundred US dollars) 2. China Huadian Hongkong Company Ltd ("CHDHK") with a share ownership of 55%, then the value of the additional capital contribution is USD 36,650,900 (Thirty Six Million Six Hundred Fifty Thousand Nine Hundred US dollars).
Penambahan modal ditempatkan dan disetor dari PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") kepada PT Bukit Asam Prima ("PT BAP"), entitas anak perusahaan langsung PTBA didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT BAP No. 01 tahun 2024 yang dibuat oleh Agung Sri Wijayati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta"). Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Akta tersebut berlaku efektif sejak diterima persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI yakni pada tanggal 26 Februari 2024 ("Tanggal Efektif"). The increase in issued and paid-up capital from PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") to PT Bukit Asam Prima ("PT BAP"), a direct subsidiary of PTBA, is based on the Deed of Statement of Shareholders' Resolution of PT BAP No. 01 of 2024 made by Agung Sri Wijayati, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta ("Deed"). In accordance with the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT"), the Deed is effective since it received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, namely on February 26, 2024 ("Effective Date").	Setoran modal kepada entitas Anak Perusahaan Capital contribution to Subsidiary entities	Transaksi dilakukan antara PTBA selaku pemegang saham pada PT BAP berupa tambahan setoran modal. Atas setoran modal dimaksud, PT BAP akan melakukan setoran modal (Dengan nilai yang sama sebagaimana setoran modal PTBA kepada PT BAP) kepada PT Bukit Prima Bahari ("PT BPB"). The transaction was conducted between PTBA as a shareholder in PT BAP in the form of additional capital deposit. For the capital deposit in question, PT BAP will make a capital deposit (with the same value as PTBA's capital deposit to PT BAP) to PT Bukit Prima Bahari ("PT BPB").	PTBA dengan entitas Anak Perusahaan PTBA with Subsdiary Entities	Rp84.000.000.000,- (delapan puluh empat miliar Rupiah) yang semuanya diambil oleh PTBA. Rp84,000,000,000,- (eighty four billion) all of which was taken by PTBA.

Tanggal Kejadian/Transaksi Transaction Date	**Jenis Transaksi Afiliasi** Type of Affiliated Transaction	**Pihak yang Bertransaksi** Parties Involved	**Sifat Hubungan Afiliasi** Nature of Affiliated Relations	**Nilai Transaksi** Transaction Value
5 Juni 2024 June 5, 2024	Pinjaman Dengan Bank Terafiliasi Grup BUMN Loans with Affiliated Banks of SOEs Group	PTBA selaku penerima pinjaman (*borrower*) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku pemberi pinjaman (*lender*). PTBA as the loan recipient (borrower) and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the lender.	PTBA dengan Entitas Bank Terafiliasi di Grup BUMN PTBA with Affiliated Bank Entities in SOEs Group	Limit pinjaman sampai dengan Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah) Loan limit up to Rp2,500,000,000,000,- (two trillion five hundred billion rupiah)
9 Juli 2024 July 9, 2024	Pinjaman Dengan Bank Terafiliasi Grup BUMN Loans with Affiliated Banks of SOEs Group	PTBA selaku penerima pinjaman (*borrower*) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku pemberi pinjaman (*lender*). PTBA as the loan recipient (borrower) and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as the lender.	PTBA dengan Entitas Bank Terafiliasi di Grup BUMN PTBA with Affiliated Bank Entities in SOEs Group	Pinjaman dengan limit sampai dengan Rp1.950.000.000.000,- (Satu Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) Loans with a limit of up to Rp1,950,000,000,000,- (One Trillion Nine Hundred and Fifty Billion Rupiah)
30 September 2024 September 30, 2024	Pinjaman bank dari PT Mandiri (Persero) Tbk ("BMRI") kepada PT Huadian Bukit Asam Power ("PT HBAP"). Bank loan from PT Mandiri (Persero) Tbk ("BMRI") to PT Huadian Bukit Asam Power ("PT HBAP").	PT HBAP (*joint venture company* PT Bukit Asam Tbk/"PTBA") selaku penerima pinjaman (*borrower*) dangean BMRI selaku pemberi pinjaman (lender). PT HBAP (joint venture company PT Bukit Asam Tbk/"PTBA") as the loan recipient (borrower) with BMRI as the lender.	*Joint Venture Company* yang dimiliki oleh PTBA dengan Bank Terafiliasi di Grup BUMN Joint Venture Company owned by PTBA with Affiliated Banks in the SOEs Group	1. Fasilitas A sebesar USD1.220.750.000,- 2. Fasilitas B sebesar USD51.122.000,- 1. Facility A of USD 1,20,750,000,- 2. Facility B of USD 51,122,000,-

Tanggal Kejadian/Transaksi Transaction Date	**Jenis Transaksi Afiliasi** Type of Affiliated Transaction	**Pihak yang Bertransaksi** Parties Involved	**Sifat Hubungan Afiliasi** Nature of Affiliated Relations	**Nilai Transaksi** Transaction Value
6 November 2024 November 6, 2024	Pinjaman dengan mekanisme Pemanfaatan Dana Hasil Ekspor Sumber Daya Alam ("DHE SDA") PTBA dengan Bank PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)/"BBRI". Loan with the mechanism of Utilization of Natural Resource Export Proceeds ("DHE SDA") of PTBA with Bank PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)/"BBRI".	PTBA selaku penerima manfaat/pinjaman (*borrower*) dan BBRI selaku pemberi pinjaman (*lender*). PTBA as the beneficiary/ borrower and BBRI as the lender.	PTBA dengan Entitas Bank Terafiliasi di Grup BUMN PTBA with Affiliated Bank Entities in SOEs Group	Maksimal pinjaman sampai dengan Rp1.550.000.000.000 (satu triliun lima ratus lima puluh miliar rupiah) atau ekuivalen USD100.000.000 (seratus juta dolar amerika serikat) Maximum loan up to Rp1,550,000,000,000 (one trillion five hundred and fifty billion rupiah) or equivalent to Rp100,000,000 (one hundred million US dollars)
4 Desember 2024	Pemanfaatan lahan dan/atau penggantian aset perkebunan untuk kegiatan operasional penambangan PT Bukit Asam Tbk ("PTBA").	Transaksi dilakukan antara PTBA dengan PT BSP (entitas perusahaan terkendali di Grup PTBA) yang dimiliki secara tidak langsung oleh PTBA melalui kepemilikan pada PT Bukit Multi Investama ("PT BMI").	PTBA dengan Entitas Anak Perusahaan Tidak Langsung	Terdapat 2 (dua) perjanjian/perikatan, yaitu sebagai berikut: 1. Addendum atas Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian antara PTBA dan PT Bumi Sawindo Permai ("PT BSP") Nomor:T/101.J/0500/HK.03/XII/2024 dan Nomor:048/S.Pj/BSP.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 ("Amandemen") dengan nilai sebagai berikut : a. Kompensasi untuk penggantian atas aset perkebunan dan potensi pendapatan usaha yang hilang sebesar Rp625.992.840.000,- yang telah dibayar pada tanggal 16 Januari 2019. b. bpensasi untuk pemanfaatan objek tahap I dengan luasan lahan 1.662,9 ha dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Maret 2027 dengan nilai Rp295.172.976.182. c. Kompensasi untuk pemanfaatan objek tahap II dengan luasan 1.971,1 ha dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 23 November 2021 sampai dengan 23 November 2026 dengan nilai Rp269.175.989.746. 2. Perjanjian antara PTBA dan PT BSP Nomor:T/102.J/0500/HK.03/XII/2024 dan Nomor:049/S.Pj/BSP.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 ("Perjanjian"), dengan nilai sebagai berikut: a. Kompensasi untuk penggantian ganti rugi tanam tumbuh dan untuk kebutuhan biaya pengurusan dan operasional dibayar sekaligus untuk lahan seluas 1464,4 ha dengan nilai Rp122.835.000.000. b. Kompensasi untuk pemanfaatan lahan dengan luas 1464,4 ha untuk jangka waktu pemanfaatan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan nilai Rp260.100.674.484.

Tanggal Kejadian/Transaksi Transaction Date	**Jenis Transaksi Afiliasi** Type of Affiliated Transaction	**Pihak yang Bertransaksi** Parties Involved	**Sifat Hubungan Afiliasi** Nature of Affiliated Relations	**Nilai Transaksi** Transaction Value
December 4, 2024	Land use and/ or replacement of plantation assets for mining operational activities of PT Bukit Asam Tbk ("PTBA").	The transaction was conducted between PTBA and PT BSP (a controlled corporate entity in the PTBA Group) which is indirectly owned by PTBA through its ownership in PT Bukit Multi Investama ("PT BMI").	PTBA with Indirect Subsidiaries	There are 2 (two) agreements/bindings, namely: 1. Addendum to the Amendment and Restatement of the Agreement between PTBA and PT Bumi Sawindo Permai ("PT BSP") Number: T/101.J/0500/HK.03/XII/2024 and Number: 048/S.Pj/BSP.01/XII/2024 dated December 4, 2024 ("Amendment") with the following values: a. Compensation for replacement of plantation assets and potential lost business income of Rp625,992,840,000,- which has been paid on January 16, 2019. b. Compensation for the utilization of the phase I object with a land area of 1,662.9 ha with a period of 5 (five) years starting from January 1, 2023 to March 30, 2027 with a value of Rp295,172,976,182. c. Compensation for the utilization of phase II objects with an area of 1,971.1 ha for a period of 5 years starting from November 23, 2021, to November 23, 2026, with a value of Rp269,175,989,746. 2. Agreement between PTBA and PT BSP Number: T/102.J/0500/HK.03/XII/2024 and Number: 049/S.Pj/BSP.01/XII/2024 dated December 4, 2024 ("Agreement"), with the following values: a. Compensation for replacement of planting losses and for the needs of management and operational costs paid at once for land area of 1464.4 ha with a value of Rp122,835,000,000. b. Compensation for the use of land with an area of 1464.4 ha for a utilization period of 5 (five) years from January 21, 2022, to December 31, 2026, with a value of Rp260,100,674,484.



Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020, Perusahaan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, jika melakukan Transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

PTBA dan kelompok usahanya, telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi tertentu, sesuai dengan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Adapun berdasarkan Peraturan OJK No. VIII.G.7, entitas berelasi dengan Pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Furthermore, in accordance with the provisions of Article 8 paragraph (1) of POJK No. 42/2020, the Company is not required to comply with the provisions as referred to in Article 4 paragraph (1) of POJK No. 42/2020, if it carries out Affiliated Transactions which are business activities carried out in order to generate business income and are carried out routinely, repeatedly, and/or continuously.

PTBA and its business groups have carried out transactions with certain related parties, in accordance with PSAK No. 7, "Related Party Disclosures". Based on OJK Regulation No. VIII.G.7, entities related to the Government are entities that are controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the Government.

Nama Pihak Berelasi serta Sifat Hubungan dan Transaksi

Names of Related Parties and Nature of Relationships and Transactions

Pihak yang Berelasi Related Parties	**Sifat Hubungan** Nature of Relationship	**Sifat Transaksi** Nature of Transaction
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (BRI) Tbk	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Penempatan dana dan pinjaman bank Funds placement and bank borrowings
1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) (BNI) Tbk 2. PT Bank Mandiri (Persero) (Mandiri) Tbk 3. PT Bank Tabungan Negara (Persero) (BTN) Tbk 4. Bank Tabungan Negara - Unit Usaha Syariah (BTN - UUS) 5. PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk 6. PT Bank Raya Indonesia (Bank Raya) Tbk	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Penempatan dana Funds placement
PT Mandiri Tunas Finance (MTF)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Sewa pembiayaan Finance lease
PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Pengangkutan batu bara dan penempatan obligasi Coal transportation and bonds placement
1. PT PLN (Persero), 2. PT PLN Nusantara Power, 3. PT PLN Indonesia Power Bersama – sama disebut PLN Grup	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Penjualan batu bara, pemakaian listrik, penempatan obligasi, dan piutang lainnya Coal sales, electricity usage, bond placement and other receivables
Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Pengelolaan dana pensiun Pension fund management
PT Timah Tbk (TIMAH)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Penjualan batu bara dan penempatan MTN Coal sales and MTN placement
1. PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) 2. PT Indonesia Chemical Alumina 3. MIND ID Trading Pte.Ltd 4. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 5. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) 6. PT Semen Tonasa 7. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 8. PT Artha Daya Coalindo	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Penjualan batu bara Coal sales
1. PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) 2. PT Angkasa Pura II 3. PT Jasamarga Bali Tol	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Jasa perawatan PLTU Power Plant maintenance services
PT Dahana (Persero)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Pembelian bahan peledak Explosive material purchases

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia DPLK BNI (DPLK BNI)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	PPIP Defined contribution pension programme
1. PT Danareksa (Persero) (Danareksa) 2. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Penempatan Obligasi Bonds placement
PT Pertamina (Persero) (Pertamina)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Pembelian bahan bakar dan penempatan obligasi Fuel purchase and bonds placement
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Premi asuransi Insurance premiums
PT Tanjung Alam Jaya	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Pembelian batu bara Coal purchases
PT Dok dan Perkapalan Air Kantung (DAK)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Pembelian Aset Asset purchases
1. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 2. PT Krakatau Engineering 3. PT Adhi Karya (Persero) Tbk 4. PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Konstruksi proyek Project construction
1. PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) 2. PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI)	Entitas ventura bersama Joint ventures entity	Penjualan batu bara dan piutang lainnya Coal sales and other receivables
PT Bukit Asam Transpacific Railway (BATR)	Entitas ventura bersama Joint ventures entity	Piutang lainnya Other receivables
PT Sinergi Mitra Lestari Indonesia (SINERGI ID)	Entitas asosiasi Associates entity	Piutang lainnya Other receivables

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan PTBA dan kelompok usahanya terkait penetapan harga untuk transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

1. Penjualan batu bara ke pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan, yang pada umumnya menggunakan indeks internasional yang setara sebagai perbandingan dan disesuaikan dengan spesifikasi dari batu bara dan lokasi pengiriman.
2. Pengapalan dan pengangkutan batu bara oleh pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak pengangkutan yang disepakati bersama berdasarkan hasil negosiasi dengan memperhatikan unsur-unsur biaya yang ada ditambah dengan marjin tertentu.

Adapun rincian transaksi dan saldo kepada pihak berelasi pada tahun 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Realization of Related Party Transactions

The Company conducts transactions with related parties in accordance with applicable provisions. The policies of PTBA and its business groups regarding pricing for transactions with related parties are as follows:

1. Sales of coal to related parties are determined based on sales contracts, which generally use equivalent international indices as a comparison and are adjusted to the specifications of the coal and the delivery location.
2. Shipping and transportation of coal by related parties are determined based on transportation contracts agreed upon based on the results of negotiations by taking into account the existing cost elements plus a certain margin.

The details of transactions and balances with related parties in 2024 and 2023 are presented in the following table:

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2024 2024 Realization	Realisasi 2023 2023 Realization
Penjualan Batu bara dan Pendapatan dari Aktivitas Lainnya Coal Sales and Revenue from Other Activities	Rp-juta Rp-million	19.291.377	18.245.395
Persentase terhadap Jumlah Pendapatan Konsolidasian Percentage to Total Consolidated Revenue	%	45	47

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2024 2024 Realization	Realisasi 2023 2023 Realization
Pembelian Barang/Jasa Purchase of Goods/Services	Rp-juta Rp-million	11.781.886	10.200.168
Persentase terhadap Jumlah Beban Pokok Penjualan dan Beban Usaha Konsolidasian Percentage to Total Cost of Goods Sold and Consolidated Operating Expenses	%	31	35
Penghasilan Keuangan Financial Income	Rp-juta Rp-million	180.490	415.209
Persentase terhadap Jumlah Penghasilan Keuangan Konsolidasian Percentage to Total Consolidated Financial Income	%	72	71
Pembayaran Iuran Dana Pensiun Pension Fund Contribution Payment	Rp-juta Rp-million	85.147	260.404
Persentase terhadap Jumlah Beban Gaji Konsolidasian Percentage to Total Consolidated Salary Expenses	%	4	12
Biaya Keuangan Financial Costs	Rp-juta Rp-million	84.429	26
Persentase terhadap Jumlah Biaya Keuangan Konsolidasian Percentage to Total Consolidated Finance Costs	%	29,76	0,01
Jumlah Aset yang Terkait dengan Pihak Berelasi Total Assets Related to Related Parties	Rp-juta Rp-million	7.718.484	7.763.266
Persentase terhadap Jumlah Aset Konsolidasian Percentage of Consolidated Total Assets	%	18	20

Keterlibatan Organ Perseroan dalam Proses Reviu Transaksi Pihak Berelasi

Mekanisme reviu atas transaksi dengan pihak berelasi dilakukan melalui proses audit, baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Dalam proses audit tersebut, Perusahaan melibatkan Organ Perseroan di antaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan beberapa Divisi yang terkait.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Komite Audit, Dewan Komisaris berperan dalam memberikan arahan dan masukan kepada Direksi agar transaksi dengan pihak berelasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar.

Direksi memastikan seluruh transaksi dengan pihak berelasi di sepanjang tahun 2024, telah melalui prosedur yang memadai dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar. Informasi lebih rinci terkait transaksi pihak berelasi telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perusahaan pada Catatan 31.

Kebijakan Pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan

Mengingat perusahaan bukan merupakan institusi lembaga keuangan yang bersifat memberikan pembiayaan/pinjaman, maka dalam praktiknya Perusahaan melarang memberikan pinjaman kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

Involvement of Company Organs in the Related Party Transaction Review Process

The review mechanism for transactions with related parties is carried out through an audit process, both by internal auditors and external auditors. In the audit process, the Company involves Company Organs including the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, and several related Divisions.

Based on the results of the study conducted by the Audit Committee, the Board of Commissioners plays a role in providing direction and input to the Board of Directors so transactions with related parties can be carried out in accordance with the arm's-length principle.

The Board of Directors ensures that all transactions with related parties throughout 2024 have gone through adequate procedures and have been carried out in accordance with generally accepted business practices and meet the arm's-length principle. More detailed information regarding related party transactions has been disclosed in the Company's Financial Report in Note 31.

Loan Policy to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company

Considering that the company is not a financial institution that provides financing/loans, in practice the Company prohibits providing loans to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perusahaan

Changes in Legislation that Have Significant Impact on the Company

Di tahun 2024, terdapat 1 (satu) perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan terhadap Perusahaan. Adapun perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak tersebut adalah sebagai berikut:

In 2024, there are 1 (one) changes in legislation that have a significant impact on the Company. The changes in legislation that have an impact are as follows:

No	Peraturan dan Perundang-undangan Laws and Regulations	Penjelasan Explanation
1	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Peiaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu bara Regulation of The Government of The Republic of Indonesia Number 25 Of 2024 on Amendment To Regulation of The Government Number 96 of 2021 on The Implementation of Mineral And Coal-Mining Business Activities	Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara ("PP 25/2024") yang mulai berlaku efektif sejak 30 Mei 2024. Dalam regulasi ini terdapat perubahan nomenklatur dari "RKAB Tahunan 'menjadi "RKAB", maka PTBA perlu menyesuaikan istilah "RKAB Tahunan" menjadi "RKAB" saja sebagaimana diatur dalam PP 25/2024. Selain itu, saat ini PTBA selaku Anak Perusahaan BUMN mendapatkan kepastian hukum dalam hal akan melakukan perpanjangan IUP selama 10 tahun setiap kali perpanjangan agar PTBA dapat melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan berkelanjutan. Lebih lanjut terkait kegiatan pengembangan dan/pemanfataan PTBA dapat melibatkan badan usaha lain sepanjang kepemilikan saham PTBA selaku pemegang IUP paling sedikit 30% dan tidak dapat terdilusi agar dapat memperoleh Izin Operasi Produksi berkelanjutan. The Government of the Republic of Indonesia through Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 25 of 2024 concerning Amendments to Government Regulation Number 96 of 2021 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities ("PP 25/2024") which will come into effect on 30 May 2024. In this regulation there is a change in nomenclature from "Annual RKAB" to "RKAB", so PTBA needs to adjust the wording of "Annual RKAB" to just "RKAB" as regulated in PP 25/2024. Apart from that, currently PTBA as a SOEs subsidiary has legal certainty in terms of extending its IUP for 10 years each time so that PTBA can carry out sustainable mining production operations. Furthermore, regarding PTBA's development and/utilization activities, it can involve other business entities as long as PTBA's share ownership as the IUP holder is at least 30% and cannot be diluted in order to obtain a sustainable Production Operation Permit.

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan

Changes in Accounting Policies and Its Impact on the Company

Pada tahun 2024, tidak terdapat perubahan standar akuntansi yang memberikan dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan, sehingga tidak ada informasi yang diungkapkan pada Laporan Tahunan ini.

In 2024, there were no changes in accounting standards that had a material impact on the current year's consolidated financial statements, so no information was disclosed in this Annual Report.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, penilaian Tingkat Kesehatan adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai tingkat kesehatan PTBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian Tingkat Kesehatan di tahun 2023 dilakukan oleh perusahaan pemeringkat nasional, sedangkan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan *rating*. Untuk Tahun 2024 sendiri, PTBA telah menunjuk PT Pefindo untuk melakukan penilaian atas tingkat kesehatan PTBA. Adapun berdasarkan penilaian dari PT Pefindo, PTBA mendapatkan *rating* "$_{id}$AA" atau "Sehat". Tingkat kesehatan PTBA dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Corporate Rating

Based on the provisions of the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. The Soundness Level Assessment is an assessment carried out to assess the soundness level of PTBA in accordance with the provisions of laws and regulations. The Soundness Level Assessment in 2023 was carried out by a national rating company, while from 2019 to 2022 it was carried out by a Public Accounting Firm based on the rating. For 2024 itself, PTBA has appointed PT Pefindo to assess PTBA's soundness level. Based on the assessment by PT Pefindo, PTBA received a rating of "$_{id}$AA" or "Healthy". The soundness level of PTBA from 2020 to 2024 can be seen as follows:

	2024*	2023*	2022	2021	2020
Peringkat Rating	$_{id}$AA	$_{id}$AA	AA	AA	AA
Kategori Category	Sehat Healthy	Sehat Healthy	Sehat Healthy	Sehat Healthy	Sehat Healthy

*Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 untuk tingkat kesehatan tahun 2023 dan 2024 dilakukan oleh Lembaga pemeringkat yang ditunjuk oleh Perusahaan, yaitu PT Pefindo, sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya tingkat kesehatan dilakukan penilaiannya oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
*In accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/03/2023 for the health level in 2023 and 2024, it was carried out by the rating agency appointed by the Company, namely PT Pefindo, while for previous years the health level was assessed by the Public Accounting Firm.

Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information

Kelangsungan usaha Perusahaan ke depannya masih akan ditopang oleh bisnis di segmen batu bara serta proyek-proyek pengembangan usaha yang akan mendukung diversifikasi bisnis ke sektor lain, seperti energi dan hilirisasi batu bara. Di masa depan, ketergantungan perusahaan terhadap pendapatan yang berasal dari segmen batu bara diharapkan akan semakin menurun seiring dengan semakin meningkatnya pendapatan dari sektor energi dan hilirisasi batu bara.

The Company's business continuity in the future will still be supported by the coal segment business and business development projects that will support business diversification into other sectors, such as energy and coal downstreaming. In the future, the company's dependence on revenue from the coal segment is expected to decrease along with the increasing revenue from the energy sector and coal downstreaming.

Saat ini, memanfaatkan momentum masih signifikannya penggunaan batu bara sebagai sumber energi dalam bauran energi global hingga beberapa tahun ke depan, Perusahaan terus melakukan percepatan penyelesaian proyek-proyek peningkatan kapasitas angkutan untuk mendukung percepatan monetisasi cadangan batu bara yang saat ini masih sangat besar jumlahnya. Selain itu, proyek-proyek pengembangan usaha seperti pembangunan PLTU *off-grid* di lingkungan Grup MIND ID, pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan, serta proyek hilirisasi batu bara diupayakan untuk dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Perusahaan juga menaruh perhatian besar pada program-program penelitian dan pengembangan yang mendukung penggunaan teknologi baru yang memberikan nilai tambah di masa depan.

Currently, by taking advantage of the momentum of coal's continued significance as an energy source in the global energy mix for the next few years, the Company continues to accelerate the completion of transportation capacity increase projects to support the monetization of coal reserves which are currently still very large in number. In addition, business development projects such as the construction of mine-mouth PLTU, the development of new and renewable energy-based power plants, and coal downstreaming projects are being attempted to be completed on time. The Company also pays great attention to research and development programs that support the use of new technologies that provide added value in the future.

Seiring dengan telah dicanangkannya target pencapaian *Net Zero Emission* (NZE) oleh Pemerintah Indonesia di tahun 2060, Perusahaan juga berkomitmen untuk mengintegrasikan program-program dekarbonisasi di seluruh rantai nilai Perusahaan ke depannya. Hal ini merupakan bagian dari visi Perusahaan untuk menjadi Perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan.

In line with the target of achieving Net Zero Emission (NZE) by the Indonesian Government in 2060, the Company is also committed to integrating decarbonization programs throughout the Company's value chain in the future. This is part of the Company's vision to become a world-class energy company that cares about the environment.

Sebagai perusahaan pertambangan terintegrasi yang memiliki rantai pasok produk mulai dari hulu (*pit*) sampai dengan pelabuhan/dermaga (*port*), PTBA menyadari bahwa proses bisnisnya mempunyai potensi gangguan atau hambatan yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha Perusahaan.

As an integrated mining company that has a product supply chain from upstream (pit) to the port/pier (port), PTBA realizes that its business processes have the potential for disruption or obstacles that can disrupt the continuity of the Company's business.

Dalam menjalankan kegiatan proses bisnis Perusahaan, kondisi ideal tidak sepenuhnya dapat dijamin dan kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan proses bisnis merupakan suatu keharusan. Potensi gangguan berupa bencana karena faktor alam atau faktor manusia dapat diatasi dengan pola kerja dan rentang waktu yang terencana dan terukur. Untuk itu, Perusahaan menerapkan *Business Continuity Management System* (BCMS) sebagai mitigasi dalam mendukung ketahanan dalam operasional bisnis kritikal. Sehingga, apabila terjadi bencana atau gangguan, operasional masih tetap berjalan.

Dalam merencanakan strategi keberlangsungan bisnis, Perusahaan terlebih dahulu melakukan *Business Impact Analysis* (BIA) untuk mengetahui proses bisnis kritikal di setiap unit. Selain itu, dilakukan juga *Threat and Risk Assessment* (TRA) yang mungkin terjadi dan memberikan dampak katastropik sehingga proses bisnis terhenti dalam waktu yang lama.

Potensi bencana yang dapat berpengaruh signifikan terhadap proses bisnis kritikal Perusahaan berdasarkan BIA dan TRA antara lain sebagai berikut:
1. Kerusakan alat produksi dan penunjang utama.
2. Bencana alam (tanah longsor, banjir, gempa bumi, tsunami) yang mengganggu kegiatan operasional.
3. Kerusakan sarana dan/atau prasarana kereta api.
4. Pemogokan kerja karyawan/kontraktor yang mengganggu fungsi bisnis kritikal.
5. Kerusakan IT yang mengganggu proses operasional fungsi bisnis kritikal.

Keseriusan PTBA dalam menjamin kelangsungan bisnis dibuktikan dengan telah diperolehnya sertifikasi ISO 22301:2019 *Business Continuity Management System* (BCMS) yang diterbitkan oleh The British Standards Institution (BSI) dengan masa berlaku efektif mulai tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan 2 Agustus 2025. Sertifikasi diperoleh dengan telah dipenuhinya persyaratan-persyaratan ISO 22301:2019 dalam penerapan BCMS, termasuk dengan melakukan *drill*/ simulasi secara berkala atas skenario bencana yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis Perusahaan.

In carrying out the Company's business process activities, ideal conditions cannot be fully guaranteed and the ability to maintain the continuity of the business process is a must. The potential for disruption in the form of disasters due to natural factors or human factors can be overcome with a planned and measurable work pattern and time span. For this reason, the Company implements Business Continuity Management System (BCMS) as a mitigation to support resilience in critical business operations. That way, if a disaster or disruption occurs, operations will continue to run.

In planning a business continuity strategy, the Company first conducts a Business Impact Analysis (BIA) to determine the critical business processes in each unit. In addition, a Threat and Risk Assessment (TRA) is also carried out which may occur and have a catastrophic impact so that the business process stops for a long time.

Potential disasters with a significant impact on the Company's critical business processes based on BIA and TRA include the following:
1. Damage to production equipment and main supports.
2. Natural disasters (landslides, floods, earthquakes, tsunamis) that disrupt operational activities.
3. Damage to railway facilities and/or infrastructure.
4. Employee/contractor strikes that disrupt critical business functions.
5. IT damage that disrupts the operational process of critical business functions.

PTBA's seriousness in ensuring business continuity is proven by obtaining ISO 22301:2019 Business Continuity Management System (BCMS) certification issued by The British Standards Institution (BSI) with an effective validity period starting from August 3, 2022 to August 2, 2025. Certification was obtained by fulfilling the requirements of ISO 22301:2019 in the implementation of BCMS, including by conducting periodic drills/simulations for disaster scenarios that could disrupt the Company's business continuity.

Prospek Usaha dan Strategi ke Depan
Business Prospects and Future Strategies

Prospek Usaha

Bisnis Perusahaan saat ini masih didominasi oleh penjualan batu bara, sehingga prospek usaha ke depan masih akan sangat dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan fluktuasi harga batu bara, baik di pasar global maupun domestik. Di tahun 2024, permintaan global untuk batu bara *seaborne thermal* mencapai titik paling tinggi dalam sejarah. Indonesia masih menjadi negara eksportir batu bara *thermal* terbesar dengan produksi lebih dari 770 juta ton, yang juga merupakan angka produksi paling tinggi dalam sejarah Indonesia.

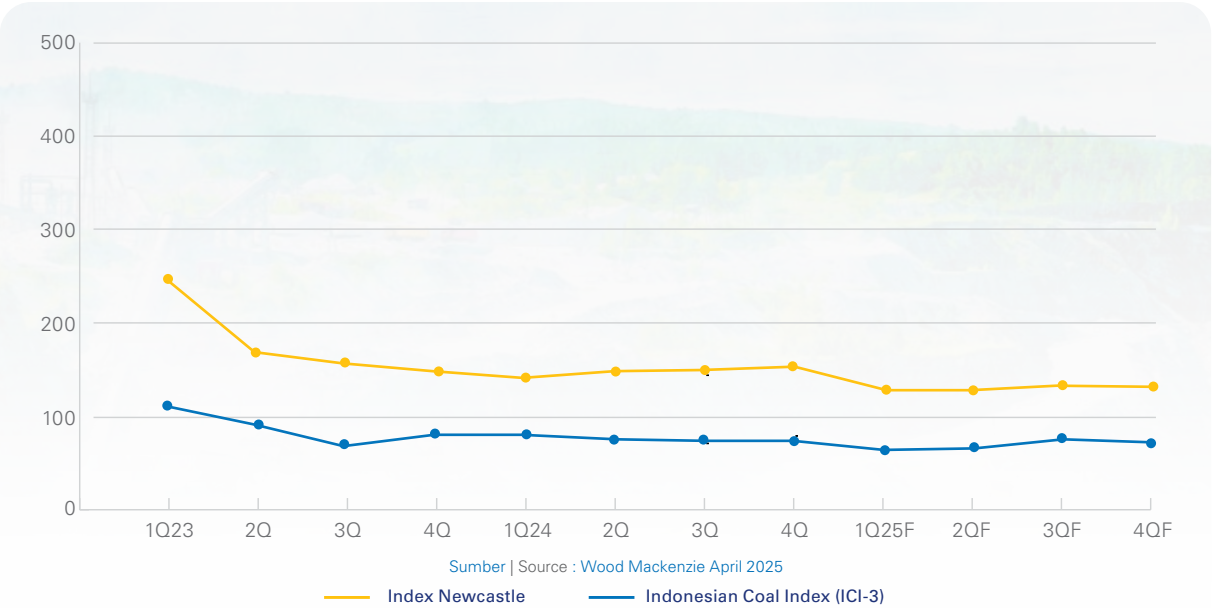
Pelemahan harga batu bara di awal tahun 2025 masih berlanjut dikarenakan lebih banyaknya pasokan dibandingkan permintaan batu bara global, seperti China dan India yang lebih mengutamakan penggunaan batu bara produksi dalam negerinya. Harga batu bara diproyeksi meningkat pada pertengahan tahun seiring naiknya permintaan atas kondisi di musim panas yang mendorong penggunaan listrik untuk pendingin ruangan.

Business Prospects

The Company's business is currently still dominated by coal sales, so future business prospects will still be greatly influenced by demand conditions and coal price fluctuations, both in the global and domestic markets. In 2024, global demand for seaborne thermal coal reached its highest point in history. Indonesia is still the largest thermal coal exporter with a production of more than 770 million tons, which is also the highest production figure in Indonesian history.

The decline in coal prices in early 2025 has continued due to a global oversupply compared to demand, with countries like China and India prioritizing the use of domestically produced coal. Coal prices are projected to increase in mid-year in line with rising demand during the summer season, which drives electricity usage for air conditioning.

Harga Batu bara 2023-2024 dan Proyeksi Harga Batu bara 2025
Coal Prices 2023-2024 and Coal Price Projections for 2025



Sumber | Source : Wood Mackenzie April 2025

Strategi ke Depan

Dalam rangka pemenuhan Mandat dari Negara kepada MIND ID untuk menjadi Perusahaan Kelas Dunia (Global Fortune 500), Perusahaan berkomitmen untuk melakukan diversifikasi pendapatan di luar bisnis penjualan batu bara. Komitmen ini merupakan aspek yang krusial dalam transformasi bisnis perusahaan dalam jangka panjang dan upaya meneguhkan visi perusahaan. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, PTBA memiliki 4 (empat) pilar bisnis utama yang akan menjadi kerangka pengembangan bisnis Perusahaan ke depan, yaitu:

Future Strategy

In order to fulfill the State Mandate to MIND ID to become a World Class Company (Global Fortune 500), the Company is committed to diversifying revenue outside the coal sales business. This commitment is a crucial aspect in the company's long-term business transformation and an effort to strengthen the company's vision. To realize this commitment, PTBA has 4 (four) main business pillars that will be the framework for the Company's future business development, namely:

Business Strategy Framework

Mandat, visi, pilar dan tema strategis untuk mendukung keberlanjutan bisnis Perusahaan
Mandate, vision, pillars, and strategic themes to support the company's business sustainability

Mandat MIND ID
MIND ID Mandate

Perusahaan Kelas Dunia
World Class Company | MIND ID Global Fortune 500

- Penguasaan Cadangan — Reserve Control
- Pengembangan Hilirisasi — Downstreaming Development
- Kepemimpinan Pasar — Market Leader

Visi PTBA
PTBA vision

"Menjadi Perusahaan Energi Kelas Dunia yang Peduli Lingkungan"
"Becoming a world-class energy company that cares about the environment"

Pilar 1 | Pillar 1 — Tambang / Mining

- Cadangan: Penjagaan atas cadangan eksisting dan penguasaan cadangan baru yang ekonomis
- Produksi: Peningkatan jumlah produksi
- Operasional: Dekarbonisasi, digitalisasi dan efisiensi biaya operasional
- Reserve: Maintaining existing reserves and controlling new economist reserves
- Production: Increased production capacity
- Operational: Decarbonization, digitalization, and operational cost efficiency

Pilar 2 | Pillar 2 — Logistik, Infrastruktur, dan Trading / Logistic, Infrastructure, and Trading

- Angkutan: Optimasi angkutan logistik hasil tambang
- Infrastruktur: Pengembangan infrastruktur yang mendukung bisnis perusahaan
- Trading: Penjualan produk hasil tambang dan turunannya serta diversifikasi segmen pasar
- Transportation: Optimizing transportation logistic on mining products
- Infrastructure: Infrastructure development to support the Company's business
- Trading: Sales of mining and its derivative products and market segment diversification

Pilar 3 | Pillar 3 — Downstream, Energi, dan Utilitas / Downstream, Energy, and Utilities

- Downstream: Penjajakan produk turunan batu bara yang ekonomis dan memberikan nilai tambah
- Komoditas Energi: Bisnis komoditas sumber energi alternatif
- Power: Pengembangan bisnis pembangkit listrik berbasis batu bara dengan teknologi bersih dan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan
- *Value Chain* dan Teknologi Energi: Pengembangan bisnis rantai nilai dan teknologi energi
- *Utility Services:* Penyediaan jasa utilitas untuk mendukung kebutuhan industri
- Downstream: Exploring economist coal derivative products and bring added-value
- Energy commodity: alternative energy-based business commodity
- Power: The development of coal power plant with clean energy and new renewable energy power plant
- Value Chain and Energy Technology: The development of value chain business and energy technology
- Utility Service: the provision of utility service to support the industrial needs

Pilar 4 | Pillar 4 — Green Business

- Bisnis Karbon: Bisnis berbasis manajemen karbon (*nature and technology-based*)
- Ekonomi Sirkular: Bisnis berbasis upaya ekstensi siklus hidup produk
- *Green Solutions*: Bisnis berbasis penyediaan jasa yang memberikan solusi ramah lingkungan
- Carbon Business: Carbon-based business (nature and technology-based)
- Circular Economy: business based on efforts on products' life cycle extension
- Green solutions: Business based on the service provision to bring environmentally friendly solution

I Inovasi dan Kemitraan / Partnership and Innovation

- Riset & Pengembangan: Research & Development: Memperkuat R&D untuk mendukung inovasi, pengembangan bisnis baru dan dekarbonisasi / Strengthening R&D to support innovation, new business development, and decarbonization
- Kemitraan | Partnership: Menjalin kemitraan strategis yang memberikan nilai tambah / Maintaining strategic partnerships for added-value

II Organisasi dan Kapabilitas / Organization and Capabilities

- Organisasi dan Sumber Daya Manusia — Organization and Human Capital: Penguatan struktur organisasi dan pengembangan SDM / Strengthening organization structure and HC development
- Tata Kelola — Governance: Penguatan tata kelola induk serta anak dan afiliasi Perusahaan / Strengthening governance in parent company, subsidiaries, and affiliations
- Anak dan Afiliasi Perusahaan — Subsidiaries and Affiliation: Penguatan peran dan optimalisasi kinerja anak dan afiliasi perusahaan / Strengthening subsidiaries and affiliation's role and optimizing their performance
- Kapital — Capital: Manajemen kas dan akses pembiayaan berkelanjutan / Cash management and access to sustainable financing

1. Tambang
   Pada pilar ini, strategi pengembangannya meliputi inisiatif strategis pada bidang cadangan, produksi, dan operasi. Dalam hal cadangan, Perusahaan berfokus kepada penjagaan atas cadangan eksisting dan penguasaan cadangan baru. Penjagaan atas cadangan eksisting ini dilakukan melalui pemantauan secara ketat batas-batas IUP eksisting serta melakukan perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) secara tepat waktu. Kemudian yang kaitannya dengan penguasaan cadangan baru, Perusahaan terbuka terhadap setiap opsi, baik melalui, akuisisi, lelang, ataupun penugasan dari Negara.

   Selanjutnya terkait strategi di bidang produksi, perusahaan akan secara bertahap meningkatkan produksi setiap tahunnya, dalam rangka mempercepat monetisasi cadangan batu bara. Selain itu, harapannya dengan peningkatan jumlah produksi ini, akan ada efisiensi pada satuan biaya operasional karena selaras dengan prinsip *economies of scale*. Tidak hanya itu, implementasi digitalisasi operasi dan penerapan teknologi memungkinkan pengurangan dampak lingkungan, meningkatkan keselamatan kerja, dan efisiensi biaya operasional yang lebih besar.
2. Logistik, Infrastruktur, dan *Trading*
   Pilar ini berhubungan dengan pengembangan di bidang logistik, infrastruktur, dan *trading*. Tujuan utama dari pilar ini adalah untuk mendukung *supply chain* yang berkelanjutan melalui keandalan operasi tambang dan distribusi batu bara ke pelabuhan, serta penambahan opsi tujuan penjualan batu bara. Hal ini termasuk *unlocking logistik,* pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan *trading* yang efektif. Dalam kaitannya dengan pengembangan logistik, Perusahaan terus berupaya menambah kapasitas angkutan kereta api dan mencari opsi moda transportasi lain untuk mengimbangi laju peningkatan produksi. Kemudian untuk infrastruktur, Perusahaan juga terus melakukan investasi investasi baru secara selektif yang tujuannya menjamin kelangsungan bisnis perusahaan. Terakhir dan yang tak kalah pentingnya, untuk pengembangan bisnis Trading di sini tidak hanya mencakup jual beli produk hasil tambang saja, tetapi juga mencari cara untuk diversifikasi sumber pasar, serta memastikan produk bisa sampai ke tangan konsumen dengan efisien dan aman.
3. *Downstream*, Energi, dan Utilitas
   Pilar ini mengacu pada pengolahan batu bara menjadi produk turunan yang lebih bernilai, pengembangan bisnis komoditas sumber energi alternatif, dan peningkatan efisiensi energi. Selain itu, pada pilar ini juga mencakup inovasi dalam teknologi energi terbarukan dan mengimplementasikan solusi yang lebih bersih dan efisien. Ini termasuk pengelolaan utilitas dan penyediaan jasa energi yang dapat

1. Mining
   In this pillar, the development strategy includes strategic initiatives in the fields of reserves, production, and operations. In terms of reserves, the Company focuses on maintaining existing reserves and controlling new reserves. Maintaining existing reserves is carried out through strict monitoring of existing boundaries and extending mining business permits in a timely manner. Then, in relation to controlling new reserves, the Company is open to every option, whether through acquisition, auction, or assignment from the State.

   Furthermore, regarding the strategy in the production sector, the company will gradually increase production each year, in order to accelerate the monetization of coal reserves. In addition, the increase in production is expected to increase efficiency in operational cost units, since it is in line with the principle of economies of scale. Moreover, the implementation of digitalization of operations and the application of technology allows for reduced environmental impacts and increased work safety for greater operational cost efficiency.
2. Logistics, Infrastructure, and Trading
   This pillar is related to development in the fields of logistics, infrastructure, and trading. The main objective of this pillar is to support a sustainable supply chain through reliable mining operations and coal distribution to ports, as well as additional coal sales destination options. This includes unlocking logistics, sustainable infrastructure development, and effective trading. In relation to logistics development, the Company continues to increase rail transport capacity and seek other transportation mode options to keep up with the rate of production increase. For infrastructure, the Company also continues to make selective new investments that aim to ensure the continuity of the company's business. Lastly the development of the Trading business does not only include buying and selling mining products, but also seeking ways to diversify market sources, and ensuring that products can reach consumers efficiently and safely.
3. Downstream, Energy, and Utilities
   This pillar refers to the processing of coal into more valuable derivative products, the development of alternative energy commodity businesses, and increasing energy efficiency. In addition, this pillar also includes innovation in renewable energy technology and implementing cleaner and more efficient solutions. This includes utility management and the provision of reliable and sustainable energy services

diandalkan dan berkelanjutan kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan pengembangan bisnis Downstream, perusahaan menjajaki potensi produk turunan batu bara yang ekonomis dan bernilai tambah, seperti DME, MEG, *Coal Carbonization* dan lain-lain. Kemudian terkait pengembangan komoditas energi, selain tetap mencari potensi peluang pembangkit berbasis batu bara, perusahaan terus melanjutkan ekspansi bisnisnya ke sektor energi baru dan terbarukan (EBT), serta menjelajahi peluang bisnis dalam rantai pasokan dan teknologi energi. Dalam pengembangan bisnis di bidang Energi ini, perusahaan menerapkan strategi pengembangan yang mencakup pertumbuhan organik dan aliansi strategis, baik di dalam maupun di luar negeri.

4. *Green Business*
   Pilar ini berfokus pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini melibatkan eksplorasi dan implementasi dari teknologi hijau serta inisiatif yang dapat mendukung ekonomi sirkular. Tujuan dari pilar ini adalah untuk menciptakan solusi yang mengurangi dampak lingkungan, termasuk pengurangan emisi dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Pilar ini juga mencakup pengembangan produk dan layanan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kontribusi terhadap penanganan perubahan iklim. Perwujudan inisiatif strategis dari pilar ini meliputi keterlibatan PTBA dalam bisnis karbon, baik sebagai pembeli atau penjual unit karbon. Kemudian bagaimana perusahaan dapat mengembangkan bisnis yang berbasis pengembangan siklus hidup produk yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis dan sosial di lingkungan perusahaan. Terakhir dan tak kalah pentingnya, perusahaan juga berniat untuk merambah ke bisnis *green solutions* melalui penyediaan teknologi pengelolaan limbah, reforestasi dan rehabilitasi lahan, serta teknologi pengawasan lingkungan. Pilar Tambang dan Pilar Logistik, Infrastruktur dan *Trading* akan menjadi penopang utama bisnis segmen batu bara milik Perusahaan, sedangkan Pilar *Downstream*, Energi dan Utilitas serta Pilar *Green Business* akan menjadi penopang pengembangan bisnis segmen lainnya.

Strategi Dekarbonisasi

Selaras dengan pengembangan bisnis, Perusahaan juga berkomitmen untuk melakukan dekarbonisasi di seluruh rantai nilai perusahaan sebagai bentuk dukungan pencapaian *Net Zero Emission* (NZE) sektor energi Indonesia di tahun 2060. Strategi dekarbonisasi yang dilakukan oleh Perusahaan bertumpu pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu Dekarbonisasi Operasional, Transisi ke Portofolio Lebih Bersih, dan *Emission Offsets*.

to the community. In relation to the development of the Downstream business, the company is exploring the potential for economical and value-added coal derivative products, such as DME, MEG, Coal Carbonization, and others. Then related to the development of energy commodities, in addition to continuing to look for potential opportunities for coal-based power plants, the company continues to expand its business into the new and renewable energy (EBT) sector, as well as exploring business opportunities in the supply chain and energy technology. In developing this Energy business, the company implements a development strategy that includes organic growth and strategic alliances, both domestically and abroad.

4. Green Business
   This pillar focuses on sustainable and environmentally friendly business growth. This involves the exploration and implementation of green technologies and initiatives that can support a circular economy. The purpose of this pillar is to create solutions that reduce environmental impacts, including reducing emissions and better waste management. This pillar also includes the development of products and services that support environmental sustainability and contribute to climate change management. The realization of strategic initiatives from this pillar includes PTBA's involvement in the carbon business, either as a buyer or seller of carbon units. Then related to the Company's ability to develop a business based on the development of the product life cycle produced by business and social activities in the company's environment. Lastly, the company also intends to expand into the green solutions business by providing waste management technology, reforestation and land rehabilitation, as well as environmental monitoring technology. The Mining Pillar and the Logistics, Infrastructure and Trading Pillar will be the main pillars of the Company's coal segment business, while the Downstream, Energy and Utilities Pillar and the Green Business Pillar will be the pillars of the development of other business segments.

Decarbonization Strategy

In line with business development, the Company is also committed to decarbonizing the entire company's value chain as a form of support for achieving Net Zero Emission (NZE) in the Indonesian energy sector by 2060. The Company's decarbonization strategy is based on 3 (three) main pillars, namely Operational Decarbonization, Transition to a Cleaner Portfolio, and Emission Offsets.



Perusahaan juga memiliki target penurunan emisi yang sifatnya *Business as Usual* (BAU) sampai dengan 2030 sebagai berikut:

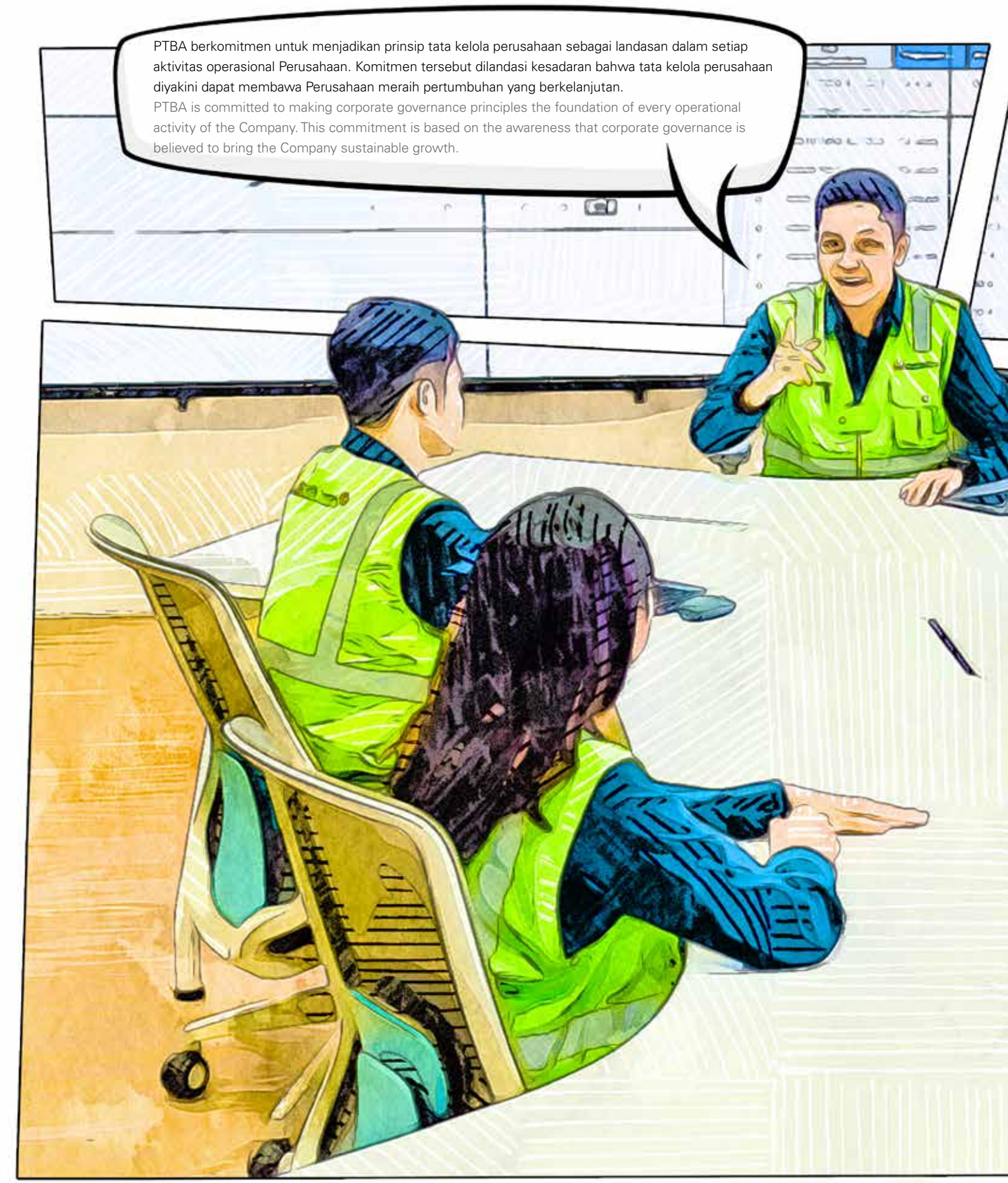
The company also has a Business as Usual (BAU) emission reduction target until 2030 as follows:

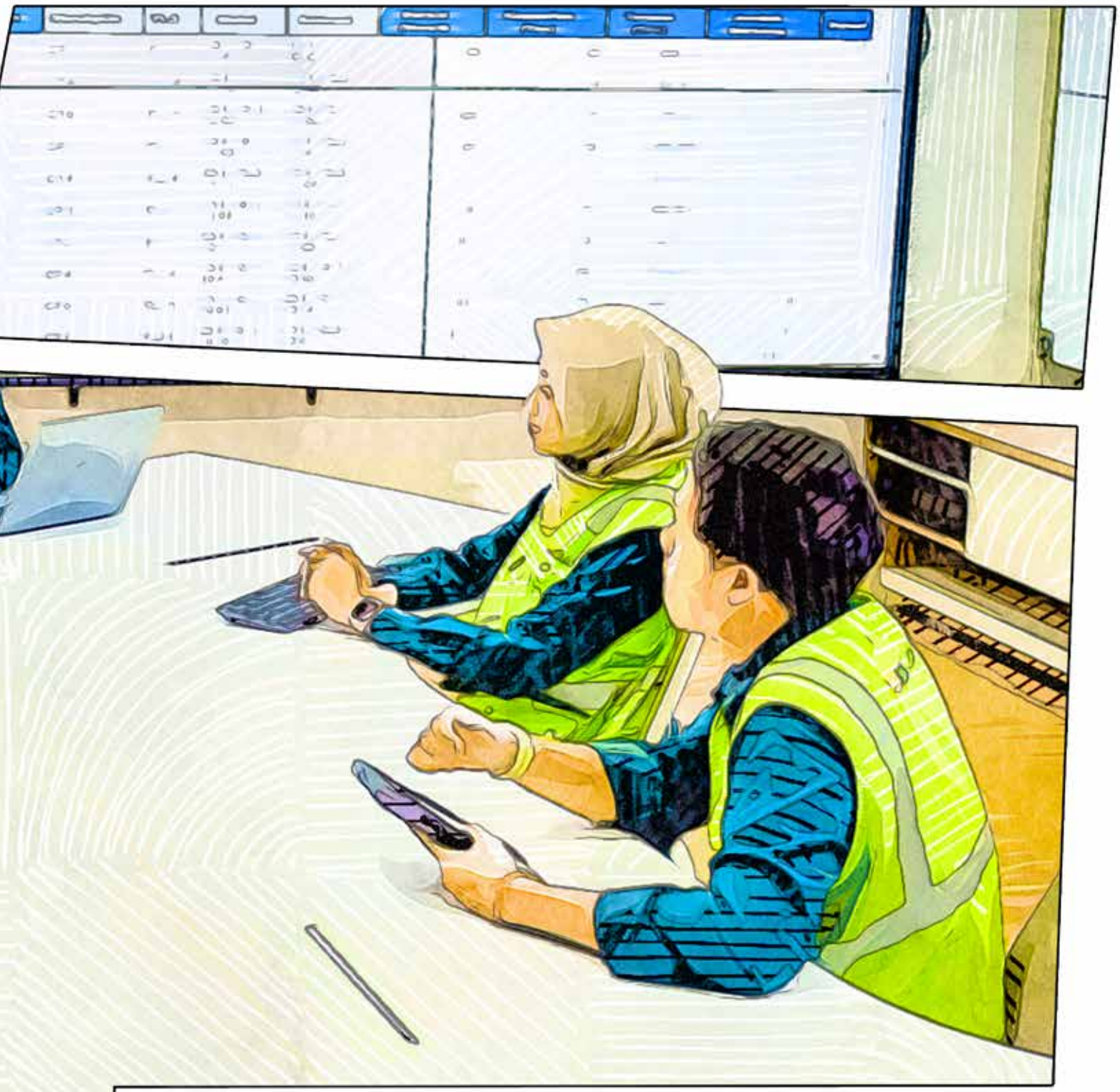
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2,25%	2,70%	4,60%	7,50%	11,20%	12,50%	>12,5-15,5%

Melalui tiga pilar ini, Perusahaan diharapkan, baik dalam operasional maupun pengembangan usahanya, akan lebih ramah terhadap lingkungan dan lebih berorientasi pada keberlanjutan serta dapat membantu berkontribusi terhadap target NDC Indonesia.

Through these three pillars, the Company is expected, both in its operations and business development, to be more environmentally friendly and more sustainability-oriented and can help contribute to Indonesia's NDC targets.




PTBA berkomitmen untuk menjadikan prinsip tata kelola perusahaan sebagai landasan dalam setiap aktivitas operasional Perusahaan. Komitmen tersebut dilandasi kesadaran bahwa tata kelola perusahaan diyakini dapat membawa Perusahaan meraih pertumbuhan yang berkelanjutan.
PTBA is committed to making corporate governance principles the foundation of every operational activity of the Company. This commitment is based on the awareness that corporate governance is believed to bring the Company sustainable growth.



Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Commitment Implementation of Good Corporate Governance



PTBA berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di Perusahaan secara konsisten, sejalan dengan keyakinan Perusahaan bahwa GCG merupakan kebutuhan dasar dan landasan dalam menjalankan kegiatan usaha Perusahaan. Penerapan GCG di Perusahaan mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan Perusahaan yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kinerja, memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PTBA is committed to implement the Good Corporate Governance (GCG) in the Company consistently, in line with the Company's belief that GCG is a basic need and foundation to carry out the Company's business activities. The implementation of GCG in the Company prioritizes ethics and integrity in the management which is aimed at encouraging increased performance, guaranteeing fulfilled rights for stakeholders, and increasing compliance with applicable laws and regulations.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PTBA mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan atau sumber lain dapat menjadi acuan, termasuk standar terbaik yang berkaitan dengan penerapan GCG. Acuan tersebut menjadi panduan dan pedoman bagi Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pada seluruh aspek pengelolaan Perusahaan, mulai dari hak dan kewajiban Pemegang Saham, petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, hingga hubungan Perusahaan dengan para Pemangku Kepentingan.

GCG Implementation Basis

The implementation of Good Corporate Governance in PTBA refers to applicable laws and regulations, as well as policies or other sources that can be used as a reference, including best practices related to GCG implementation. This reference serves as a guidance for the Company in carrying out activities in all aspects of Company management, starting from the rights and obligations of Shareholders, instructions for the work procedures of the Board of Commissioners and Directors in carrying out their duties and responsibilities, to the Company's relationship with Stakeholders.

Adapun yang menjadi dasar penerapan GCG di PTBA adalah, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia
   a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
   b. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025;
   c. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
   d. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
   e. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
   a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
   b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ POJK.04/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan;
   b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/ POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
   c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/ POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
   d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 08/ POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
   e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
   f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/ POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
   g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
   h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

Below are the basis of GCG implementation at PTBA:

1. Law of the Republic of Indonesia
   a. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets;
   b. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises as last amended by Law Number 1 of 2025;
   c. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
   d. Law No. 14 of 2008 concerning Disclosure of Public Information;
   e. Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering.
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs)
   a. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
   b. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises;
3. Financial Services Authority Regulations
   a. Financial Services Authority Regulation No. 21/ POJK.04/2014 concerning Implementation of Public Company Governance and Financial Services Authority Circular Letter No. 32/ SEOJK.04/2015 concerning Corporate Governance Guidelines;
   b. Financial Services Authority Regulation No. 34/ POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committees for Issuers or Public Companies;
   c. Financial Services Authority Regulation No. 35/ POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies;
   d. Financial Services Authority Regulation No. 08/ POJK.04/2015 concerning Issuer or Public Company Websites;
   e. Financial Services Authority Regulation No. 21/ POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines;
   f. Financial Services Authority Regulation No. 30/ POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of Use of Public Offering Proceeds;
   g. Financial Services Authority Regulation No. 31/ POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies;
   h. Financial Services Authority Circular No. 32/ SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines;

i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;

k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/ POJK.04/2016 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;

l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/ POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;

m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;

n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 58/ POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi secara Elektronik;

o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 75/ POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan;

p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/ POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik;

q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

r. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/ POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;

s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/ POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;

t. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/ POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;

u. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/ POJK.04/2020 tentang Pemeringatan Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk;

v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/ POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;

w. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka.

4. Peraturan Bursa Efek Indonesia Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

i. Financial Services Authority Regulation No. 55/ POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Work of the Audit Committee Implementation;

j. Financial Services Authority Regulation No. 56/ POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Preparing the Internal Audit Unit Charter;

k. Financial Services Authority Regulation No. 29/ POJK.04/2016 concerning the Obligation to Submit Annual Reports for Issuers and Public Companies.

l. Financial Services Authority Regulation No. 11/ POJK.04/2017 concerning Ownership Reports or Any Changes in Ownership of Public Company Shares.

m. Financial Services Authority Regulation No. 51/ POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies;

n. Financial Services Authority Regulation No. 58/POJK.04/2017 concerning Submission of Registration Statements or Submission of Corporate Actions Electronically;

o. Financial Services Authority Regulation No. 75/ POJK.04/2017 concerning the Responsibility of Directors for Financial Reports;

p. Financial Services Authority Regulation No. 7/ POJK.04/2018 concerning Submission of Reports through the Electronic Reporting System for Issuers or Public Companies;

q. Financial Services Authority Regulation No. 15/ POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies;

r. r. Financial Services Authority Regulation no. 16/ POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies;

s. Financial Services Authority Regulation No. 17/ POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities;

t. Financial Services Authority Regulation No. 42/ POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions;

u. Financial Services Authority Regulation No. 49/ POJK.04/2020 concerning Warning of Debt Securities and/or Sukuk;

v. Financial Services Authority Regulation No. 14/ POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports for Issuers or Public Companies;

w. Financial Services Authority Regulation No. 15/ POJK.04/2022 concerning Stock Split and Stock Reverse by Public Companies;

4. Indonesian Stock Exchange Regulations Indonesian Stock Exchange Regulation No. I-E concerning Obligations to Submit Information;

5. Pedoman yang Diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
6. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI), dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi tahun 2021.
7. Pedoman Komisaris Independen, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2004.
8. Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi tahun 2004.
9. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik diimplementasikan di Perusahaan melalui penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada seluruh aktivitas bisnis PTBA. Tujuan penerapan prinsip GCG di Perusahaan, sejalan dengan tujuan penerapan prinsip GCG sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan;
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan;
3. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan;
4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional; dan
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Prinsip Tata Kelola dan Pilar Governansi Korporat

Selain menerapkan prinsip Tata Kelola, PTBA juga menjadikan pilar Governansi Korporat dari Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) sebagai panduan perusahaan, sehingga atas penerapan keduanya menjadikan Perusahaan memenuhi prinsip Tata Kelola serta memenuhi kepentingan pemegang saham dengan tetap menjaga keseimbangan dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

5. Guidelines Published by the National Committee for Governance Policy.
6. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance, issued by the National Committee for Governance Policy in 2021.
7. Guidelines for Independent Commissioners, issued by the National Committee for Governance Policy, 2004.
8. Guidelines for Establishing an Effective Audit Committee, issued by the National Committee for Governance Policy in 2004.
9. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

Objectives of Implementing Corporate Governance

Good Corporate Governance is implemented in the Company through the application of Good Corporate Governance principles in all PTBA business activities. The GCG implementation at the Company is in line with the goal to implement GCG principles as contained in the Regulation of the State-Owned Enterprises Minister of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as follows:

1. Optimizing the Company's value to have strong competitiveness, both nationally and internationally, in an effort to maintain its existence and live sustainably to achieve the Company's target and objectives;
2. Encourage the management of the Company in a professional, efficient, and effective manner, as well as empowering the functions and increasing the independence of the Company Organ;
3. Encourage Company Organ to make decisions and carry out actions based on high moral values and compliance with statutory provisions, as well as awareness of the corporate social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability around the Company;
4. Increasing the Company's contribution to the national economy;
5. Improving a conducive climate for the development of national investment.

Principles of Corporate Governance and Pillars of Corporate Governance

Besides implementing the governance principle, PTBA also uses the Corporate Governance pillars of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance as company guidelines. Therefore, the implementation of both guidelines can help the company to fulfill the principles of Governance and fulfill the interests of Shareholders while maintaining balance with the needs of Stakeholders.

Prinsip GCG
GCG Principal

Prinsip GCG GCG Principal	Makna Description	Bukti Penerapan Implementation
Transparansi Transparency	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Disclosure in carrying out the decision-making process and disclosure in disclosing material and relevant information about the Company.	1. Keterbukaan dalam penyampaian kinerja perusahaan dalam bentuk Annual Report. 2. Keterbukaan dalam penyampaian kinerja lingkungan perusahaan dalam bentuk *Sustainability Report*, Laporan Pengelolaan Iklim (*Climate Change*) oleh Carbon Disclosure Project (CDP). 3. Keterbukaan dalam penyampaian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam bentuk Laporan TJSL. 1. Disclosure in delivering company performance in the Annual Report. 2. Disclosure in delivering the company's environmental performance in the Sustainability Report and the Climate Change Report by the Carbon Disclosure Project (CDP). 3. Transparency in delivering Corporate Social and Environmental Responsibility in the form of Social and Environmental Responsibility (CSR) Report.
Akuntabilitas Accountability	Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Clarity of functions, implementation, and accountability of the Company Organ to carry out effective company management.	Penetapan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja dalam SK Direksi Keputusan No. 051F/0100/2024 tanggal 30 April 2024 The determination of the main tasks and functions of each work unit in the Decree of the Board of Directors No. 051F/0100/2024 dated April 30, 2024.
Pertanggungjawaban Responsibility	Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Compliance in company management with the provisions of laws and regulations and healthy corporate principles.	Melaksanakan proses bisnis sesuai Tata laksana dan Tata Cara Kerja yang berpedoman terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Carrying out business processes in accordance with the Management and Work Procedures according to the applicable laws and regulations.
Independensi Independency	Keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. A situation where the Company is managed professionally without Conflicts of Interest and influence/pressure from any party that is not in line with the provisions of laws and regulations and healthy corporate principles.	1. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai PTBA. 2. Penandatanganan pernyataan independensi oleh Dewan Komisaris dan Direksi. 3. Pengisian Uji Kelayakan dalam proses pengadaan & rekrutmen Pegawai baru. 1. The signing of Pact of Integrity by all PTBA employees. 2. Signing of the independence statement by the Board of Commissioners and Directors 3. Completing the Due Diligence Test in the process of procuring & recruiting new employees.
Kesetaraan Equality	Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fairness and equality in fulfilling stakeholder rights based on agreements and applicable provisions.	1. Pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai baru. 2. Pemberian kesempatan yang sama dalam memperoleh jenjang karir. 3. Pegawai diberikan kesempatan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan SARA, jenis kelamin, dan kondisi fisik. 1. Providing equal opportunities in recruiting new employees. 2. Providing equal opportunities to obtain career paths. 3. Employees are given the opportunity to carry out their duties professionally without distinguishing between racism, gender, and physical condition.

Pilar Governansi Korporat
Pillars of Corporate Governance

Perilaku Beretika Ethical Behaviour	Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. In carrying out its activities, the company always prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, and builds and maintains moral values and trust consistently. The Company pays attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and equality. This step is managed independently to prevent intervention from each party.	1. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk Nomor: 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 dan Dokumen Nomor: 277/0100/2023 Tentang Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis PT Bukit Asam Tbk *(Code Of Conduct/COC)* dan penerapannya dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas COC seluruh Insan PTBA Pada Tahun 2024. 2. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan Bukit Asam Nomor Dokumen: BASMAP.01 No Revisi 1 Tahun 2024. 3. Pedoman Lingkungan Kerja Saling Menghargai di PTBA *(Respectful Workplace Policy)* pada tanggal 14 April 2022. 1. Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk Number: 07/SK/PTBA-DEKOM/2021 and Document Number: 408A/0100/2021 Concerning PT Bukit Asam Tbk's Code of Conduct and Business Ethics and its proven implementation with the signing of the COC Integrity Pact for all PTBA's employees in 2024. 2. Bukit Asam Anti-Bribery Management System Guidelines Document Number: BASMAP.01 No Revise 1 Year of 2024. 3. Guidelines for a Respectful Work Environment in PTBA (Respectful Workplace Policy) on April 14, 2022.
Transparansi Transparency	Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. The Company can be held accountable for its performance transparently and fairly. Therefore, the Company must be managed properly, measurably, and in line with corporate interests while still taking into account the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a necessary prerequisite for achieving sustainable performance.	1. Keterbukaan dalam penyampaian kinerja perusahaan dalam bentuk *Annual Report*. 2. Keterbukaan dalam penyampaian kinerja lingkungan perusahaan dalam bentuk *Sustainability Report*, Laporan Pengelolaan Iklim (*Climate Change*) oleh *Carbon Disclosure Project* (CDP). 3. Keterbukaan dalam penyampaian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL). 1. Disclosure in delivering the Company's performance in the Annual Report. 2. Disclosure in delivering the company's environmental performance in the Sustainability Report and Climate Change Report by the Carbon Disclosure Project (CDP). 3. Disclosure in delivering Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL).
Akuntabilitas Accountability	Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. To maintain objectivity in running the business, The Company provides material and relevant information in accessible and understandable manner for stakeholders' interest. PTBA takes the initiative to disclose not only issues required by statutory regulations, but also important matters as part of decision-making activities by shareholders, creditors, and other stakeholders.	Penetapan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja dalam Surat Keputusan Direksi No. 028E/0100/2025 tanggal 21 Maret 2025. Determination of the main tasks and functions of each work unit in the Decree of Board of Directors No. 0028E/0100/2025 date March, 21 2025.

Keberlanjutan Sustainability	Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. The Company complies with statutory regulations and is committed to carry out its responsibilities towards society and the environment as an effort to contribute to sustainable development by collaborating with all relevant stakeholders to improve their lives in line with business interests and the sustainable development agenda.	1. Pedoman TJSL No Dok. BACSRM.01. 2. Penetapan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja dalam TJSL dan ESG SK Direksi No. 134A/0100/2023 tanggal 30 Juni 2023 tentang Komite TJSL dan ESG PT Bukit Asam Tbk. 1. TJSL Guideline No. Dok. BACSRM.01. 2. The appointment of the main function and each work unit's function in TJSL and ESG on the Board of Directors Decree No.134A/0100/2023 dated June 30, 2023, on PTBA TJSL and ESG committee.

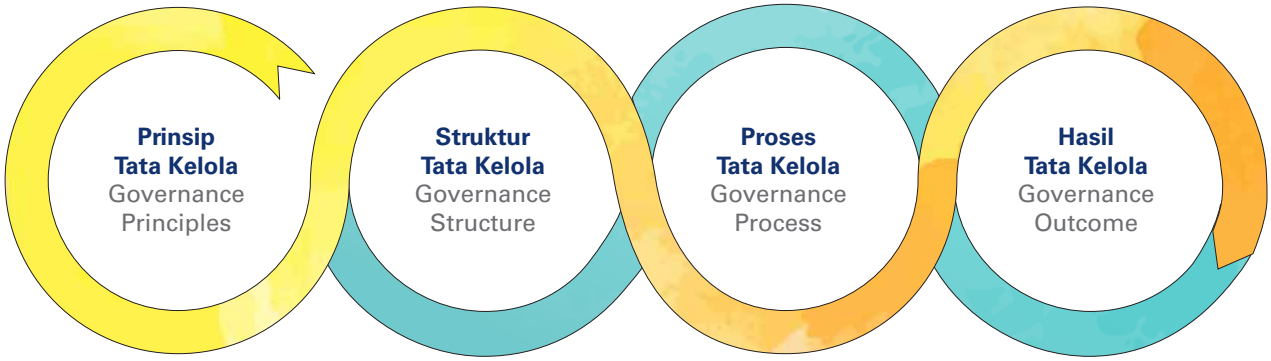
Kerangka Kerja Tata Kelola

Komitmen PTBA dalam konsistensi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara berkelanjutan diwujudkan melalui *Governance Framework* atau Kerangka Kerja Tata Kelola. *Governance Framework* menjadi pondasi kokoh yang dibangun untuk mendasari segala tindakan Perusahaan dan menjadi acuan Perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh Perusahaan sehingga terwujud implementasi GCG yang konsisten dan berkelanjutan.

Governance Framework

PTBA's commitment to consistently implement good corporate governance on an ongoing basis is realized through the Governance Framework. The Governance Framework is a solid foundation to underlie all the Company's actions and becomes the Company's reference in implementing GCG principles. This is also in line with the direction set by the Company to realize consistent and sustainable GCG practice.

Kerangka Kerja Tata Kelola PTBA
Governance Framework of PTBA



Kerangka Kerja Tata Kelola PTBA memuat 4 (empat) elemen pokok, yaitu:

1. Prinsip Tata Kelola, yaitu prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaan tata kelola di PTBA, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran;
2. Struktur Tata Kelola, yaitu organ tata kelola PTBA yang menjalankan mandat pelaksanaan tugas PTBA dan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan PTBA, yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi;

PTBA's Governance Framework contains four main elements, namely:

1. Governance Principles, the principles for the implementation of governance in PTBA, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness;
2. Governance Structure, the governance organ at PTBA which is responsible for the mandate of implementing PTBA's duties and the function of monitoring the management of PTBA, namely the GMS, Board of Commissioners, and Board of Directors;

3. Proses Tata Kelola, yaitu serangkaian standar dan prosedur yang digunakan oleh organ PTBA untuk memastikan penerapan dan penegakan Tata Kelola PTBA dilaksanakan secara terencana, konsisten, dan berkelanjutan;
4. Hasil Tata Kelola, yaitu wujud pencapaian penerapan Tata Kelola di PTBA yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai tambah Perusahaan dan keberlangsungan bisnis Perusahaan.

3. Governance Process, a series of standards and procedures used by PTBA to ensure that the implementation and enforcement of PTBA Governance is carried out in a planned, consistent, and sustainable manner;
4. Governance Outcome, achievement of the governance implementation in PTBA which has a positive impact to bring added value for the Company and the sustainability of the Company's business.



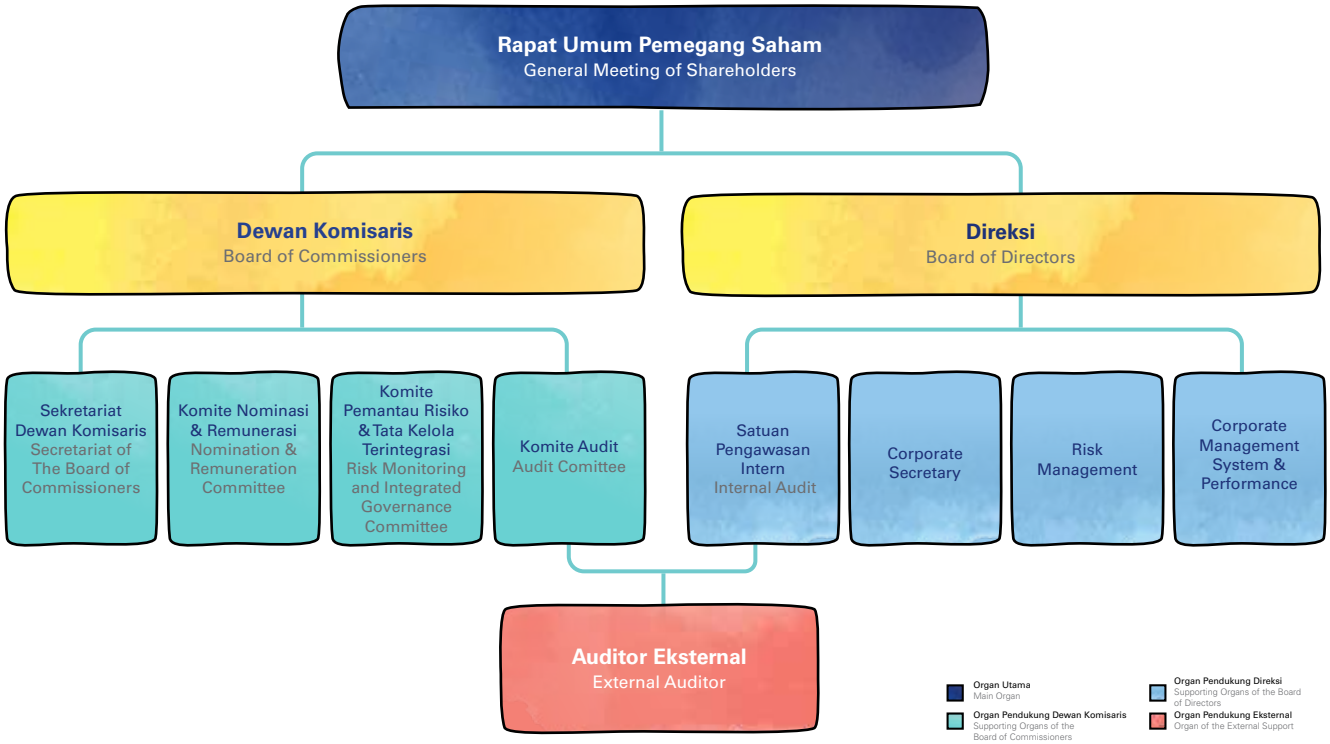
Struktur Tata Kelola
Governance Structure

Struktur Tata Kelola di Perusahaan merupakan Organ Perusahaan yang memiliki peran penting dalam implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 Bab I terkait Ketentuan Umum Pasal 1, Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Masing-masing Organ memiliki fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dalam kedudukan sebagai Organ Perusahaan.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
2. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

The Governance Structure in the Company is a Company body with an important role to implement Good Corporate Governance. In accordance with Law No. 40 of 2007 Chapter I regarding General Provisions Article 1, the Company organ consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors with their own function, authority, and responsibility.

1. The General Meeting of Shareholders (GMS) has the authority not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within limits specified in the Law and/or Articles of Association.
2. The Board of Commissioners is in charge of carrying out general and/ or specific supervision under the Articles of Association and providing advice to the Board of Directors.
3. The Board of Directors is authorized and entirely responsible for the Company's management for the benefit of the Company, following the purposes and objectives of the Company, and represents the Company, both inside and outside the court following the provisions of the Articles of Association.



Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi dapat membentuk organ pendukung, sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Serta mempertimbangkan Surat PT Mineral Industri Indonesia (Persero) No. 171/E/DIRMRHSSE/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 perihal Penetapan Kategori dan Klasifikasi Risiko PT Bukit Asam Tbk, Dewan Komisaris perlu membentuk Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Nominasi & Remunerasi.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, pada tanggal 15 Desember 2023 diterbitkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk, dengan detail organ pendukung sebagai berikut:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi
3. Komite Nominasi & Remunerasi

Selain itu, Dewan Komisaris dan komite-komite tersebut juga dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris, khususnya terkait hal-hal yang bersifat administratif.

Sedangkan organ pendukung yang dimiliki Direksi adalah:

1. Satuan Pengawasan Intern
2. Sekretaris Perusahaan
3. Satuan Kerja Manajemen Risiko
4. Satuan Kerja Sistem Manajemen dan Kinerja Perusahaan

Struktur Tata Kelola

Struktur Tata Kelola merupakan aspek penting dalam implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik, namun keberadaannya harus didukung dengan Struktur Tata Kelola agar proses implementasi dapat berjalan efektif dan terarah dalam mendukung pencapaian tujuan Perusahaan. Struktur Tata Kelola di PTBA diwujudkan dalam bentuk kebijakan maupun pedoman di Perusahaan yang berfungsi sebagai panduan bagi Insan PTBA dalam menjalankan kegiatan Perusahaan.

Melalui *Corporate Governance Policy*, PTBA menetapkan hierarki peraturan dan kebijakan dalam rangka mendukung penerapan GCG di Perusahaan. Adapun hierarki peraturan dan kebijakan yang dimaksud, sebagai berikut:

In carrying out their duties and responsibilities, the Board of Commissioners and Directors can form supporting organs, in line with the needs and applicable laws and regulations. Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises and considering PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Letter No.171/E/DIRMRHSSE/X/2023 October 9, 2023, regarding Determination of Risk Categories and Classifications of PT Bukit Asam Tbk, the Board of Commissioners must form a Risk Monitoring Committee & Integrated Governance, and Nomination & Remuneration Committee.

Thus, on December 15, 2023, the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk was issued No. 09/ SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 concerning the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk, with details of supporting body as follows:

1. Audit Committee
2. Integrated Risk Monitoring & Governance Committee
3. Nomination & Remuneration Committee

The Board of Commissioners and these committees are assisted by the Secretariat of the Board of Commissioners, especially on administrative matters.

Meanwhile, the supporting organ owned by the Board of Directors are:

1. Internal Audit
2. Corporate Secretary
3. Risk Management Work Unit
4. Management System and Corporate Performance Work Unit

Governance Structure

Governance Structure is an important aspect in the implementation of Good Corporate Governance. It must be supported by a Governance Structure to ensure the implementation process can run effectively and be directed in supporting the achievement of the Company's goals. The Governance Structure at PTBA is manifested in the form of policies and guidelines in the Company that function as a guide for PTBA Personnel in carrying out Company activities.

Through Corporate Governance Policy, PTBA established a hierarchy of regulations and policies to support the implementation of GCG in the Company. The hierarchy of regulations and policies in question is as follows:

Peraturan Regulation	Kebijakan Policy
1. Peraturan Perundang-Undangan; Statutory Regulations 2. Anggaran Dasar; Articles of Association 3. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; Decision of the General Meeting of Shareholders 4. Pedoman Strategis Tata Kelola MIND ID; Strategic Guidelines for MIND ID Governance 5. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi; Joint Decision of the Board of Commissioners and Directors 6. Keputusan Dewan Komisaris; Decision of the Board of Commissioners 7. Keputusan Direksi/Kebijakan Kepengurusan; Management Policies 8. Keputusan Anggota Direksi dalam Pelaksanaan Pembagian Tugas, Wewenang, dan Tanggung jawab; Decisions of Board of Directors Members in Implementing the Division of Duties, Authority, and Responsibilities 9. Surat Edaran Direksi; Circular Letter 10. Keputusan Kepala Satuan Kerja. Decision of the Head of Work Unit	1. *Corporate Governance Policy;* 2. *Code of Conduct;* 3. *Charter;* 4. Kebijakan Pelaksanaan; Management Policy 5. Kebijakan Manajemen/Pedoman; Management Policy/Guidance 6. Tata Laksana (TL); Standard Operating Procedure 7. Tata Cara Kerja (TCK). Work Instruction

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Dalam kedudukannya sebagai *subholding* dari BUMN, maka mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PTBA mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Guna memastikan penerapan prinsip GCG di Perusahaan berjalan dengan baik, maka diperlukan pengawasan. Pengawas tata kelola di PTBA dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Internal dan Eksternal, yang didasarkan pada Pemangku Kepentingan sebagaimana digambarkan pada bagan di bawah ini.

Corporate Governance Mechanism

As SOEs Sub-Holding, the Good Corporate Governance mechanism in PTBA refers to the Minister of SOEs Regulation No.PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities in State-Owned Enterprises. A supervision is also needed to ensure the proper implementation of GCG principles in the Company. Governance supervisors at PTBA are divided into two parts, namely Internal and External, which are based on Stakeholders as described in the chart below.

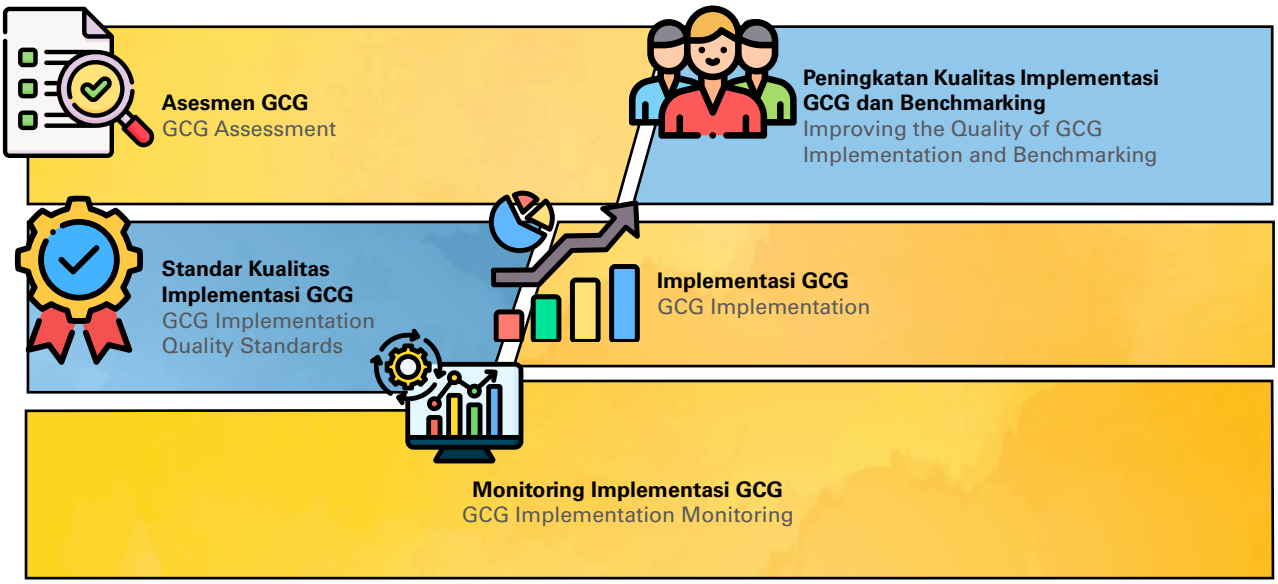


Peningkatan Kualitas Penerapan GCG Secara Berkelanjutan

Sustainable Improvement of the Quality of GCG Implementation

Upaya peningkatan kualitas penerapan GCG dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:

Efforts to improve the quality of GCG implementation is described in the following chart:



Siklus peningkatan kualitas implementasi penerapan GCG di PTBA meliputi:

1. Penetapan Standar Kualitas Penerapan;
2. Implementasi;
3. Monitoring;
4. Asesmen;
5. Peningkatan Kualitas Implementasi dan *Benchmarking*.

The quality improvement cycle for implementing GCG at PTBA includes:

1. Establishment of Implementation Quality Standards;
2. Implementation;
3. Monitoring;
4. Assessment;
5. Improvement of Implementation Quality Measurement and Benchmarking.

Penetapan Standar Kualitas Penerapan GCG

PTBA telah menetapkan standar implementasi GCG sebagai acuan dasar pemenuhan kualitas implementasi GCG. Standar tersebut memuat kriteria dari berbagai aspek yang berkaitan dengan implementasi GCG. Standar implementasi GCG di Perusahaan mengacu pada:

1. Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN;
2. Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan
3. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021, yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

Determination of Quality Standards for GCG Implementation

PTBA has set GCG implementation standards as a basic reference to meet the quality of GCG implementation. This standard contains criteria for various aspects related to GCG implementation. GCG implementation standards in the Company refer to:

1. Good Corporate Governance in SOEs;
2. Public Company Governance established by the Financial Services Authority;
3. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance 2021, published by the National Committee for Governance Policy (KNKG).

Rekam Jejak Perkembangan Penerapan GCG di PTBA

Setiap tahunnya Perusahaan menetapkan sasaran strategis berupa program-program yang harus direalisasikan sebagai bentuk pencapaian perkembangan penerapan GCG di Perusahaan. Program-program tersebut ditentukan dengan mengacu kepada Peta Jalan Tata Kelola yang ditetapkan oleh Perusahaan. Sejak pertama kali menyatakan komitmennya dalam penerapan GCG, PTBA selalu konsisten dalam meningkatkan kualitas penerapan GCG di Perusahaan. Konsistensi tersebut dapat dilihat pada bagan perkembangan penerapan GCG di PTBA sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2024.

Bagan perkembangan penerapan GCG di PTBA

2004
Melakukan pemetaan dan asesmen.

2005
1. Membuat kerangka kerja implementasi.
2. Melakukan *set up* infrastruktur GCG.
3. Membentuk satuan kerja Manajemen Risiko.

2006
1. Membentuk Komite Risiko di Komisaris.
2. Menandatangani komitmen penerapan praktik GCG.
3. Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 67,46 sebagai Perusahaan Cukup Terpercaya.

2007
Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 80,87 sebagai Perusahaan Terpercaya.

2008
Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 81,23 sebagai Perusahaan Terpercaya.

2009
1. Melakukan pengesahan revisi *Soft Structure* GCG (*GCG Code, Board Manual* dan *Code of Conduct*) pada bulan Desember 2009.
2. Melakukan sosialisasi internal terhadap *Soft Structure* GCG pada bulan Desember 2009.
3. Melakukan *assessment* GCG oleh pihak eksternal (Sodiq Purwoko & Rekan) dengan nilai 89,75 predikat Sangat Baik.
4. Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 82,27 sebagai Perusahaan Terpercaya.

Milestone of GCG Implementation at PTBA

Every year, the Company sets strategic targets in programs that must be realized as proof of the development of GCG implementation in the Company. These programs are determined by referring to the Governance Roadmap established by PTBA. Since the first time committing to implement GCG, PTBA has always been consistent in improving the quality of its GCG implementation. This consistency can be seen in the progress chart of GCG implementation in PTBA from 2004 to 2024.

Milestone of GCG Implementation in PTBA

2004
Conduct mapping and assessment.

2005
1. Create an implementation framework.
2. Set up GCG infrastructure.
3. Establish a Risk Management work unit.

2006
1. Establish a Risk Committee under the Board of Commissioners.
2. Sign a commitment to implement GCG practices.
3. Participate in GCG assessment by The Indonesian Institute for Corporate Governance with a score of 67.46 as a Fairly Trusted Company.

2007
Participate in GCG assessment by The Indonesian Institute for Corporate Governance with a score of 80.87 as a Trusted Company.

2008
Participate in GCG assessment by the Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 81.23 as a Trusted Company.

2009
1. Approved the revision of Soft Structure GCG (GCG Code, Board Manual, and Code of Conduct) in December 2009.
2. Conducted internal socialization of the Soft Structure GCG in December 2009.
3. Conducted GCG assessment by an external party (Sodiq Purwoko & Partners) with a score of 89.75 and Very Good predicate.
4. Participated in GCG assessment by The Indonesian Institute for Corporate Governance with a score of 82.27 as a Trusted Company.

2010

1. Melakukan pengesahan revisi ke-2 *Board Manual* pada bulan Desember 2010.
2. Melakukan Evaluasi (*review*) penerapan GCG oleh internal PTBA dengan nilai 86,48 predikat Sangat Baik.
3. Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 84,11 sebagai Perusahaan Terpercaya.

2011

1. Melakukan sosialisasi eksternal terhadap *Soft Structure* GCG pada bulan Juni 2011.
2. Melakukan Evaluasi (*review*) penerapan GCG oleh internal PTBA dengan nilai 89,78 predikat Sangat Baik.
3. Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 84,33 sebagai Perusahaan Terpercaya.

2012

1. Melakukan pengesahan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) pada bulan Februari 2012.
2. Membentuk dan menunjuk Tim Pengelola SPP pada bulan Oktober 2012.
3. Menandatangani komitmen Manajemen terhadap implementasi SPP pada bulan November 2012.
4. Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 82,55 sebagai Perusahaan Terpercaya.

2013

1. Melakukan sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran pada bulan Februari-Maret 2013.
2. Melakukan revisi *Soft Structure* GCG pada bulan Desember 2013.
3. Melakukan Evaluasi (*review*) penerapan GCG oleh internal PTBA dengan nilai 91,61 predikat Sangat Baik.
4. Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 83,80 sebagai Perusahaan Terpercaya.

2014

1. Menindaklanjuti laporan *assessment* penerapan GCG di PTBA.
2. Melakukan sosialisasi *Soft Structure* GCG.
3. Menyusun Pedoman Gratifikasi.
4. Melakukan *assessment* GCG oleh pihak eksternal (PT Netriva) dengan nilai 91,60 predikat Sangat Baik.
5. Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 84,09 sebagai Perusahaan Terpercaya.

2015

1. Melakukan sosialisasi gratifikasi oleh SPI dan KPK pada bulan Agustus dan Oktober 2015.

2010

1. Approved the 2nd revision of Board Manual in December 2010.
2. Conducted internal GCG assessment at PTBA with a score of 86.48 and Very Good predicate
3. Participated in GCG assessment by the Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 84.11 as a Trusted Company

2011

1. Conducted external socialization on Soft Structure GCG in June 2011.
2. Conducted internal GCG assessment at PTBA with a score of 89.78 and Very Good predicate
3. Participated in GCG assessment by The Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 84.33 as a Trusted Company.

2012

1. Approved the Whistleblowing System Guidelines (SPP) in February 2012.
2. Formed and appointed Whistleblowing System Management Team in October 2012
3. Signed the Management Commitment to SPP implementation in November 2012
4. Participated in GCG assessment by the Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 82.55 as a Trusted Company.

2013

1. Socialized the SPP in February-March 2013.
2. Revised the Soft Structure GCG in December 2013.
3. Conducted internal GCG assessment at PTBA with a score of 91.61 and Very Good predicate.
4. Participated in GCG assessment by the Indonesian Institute for Corporate Governance with a score of 83.80 as a Trusted Company.

2014

1. Followed up PTBA GCG assessment report.
2. Conducted socialization of Soft Structure GCG.
3. Prepared Gratification Guidelines.
4. Conducted GCG assessment by an external party (PT Netriva) with a score of 91.60 and Very Good predicate.
5. Participated in GCG assessment by the Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 84.09 as a Trusted Company.

2015

1. Conducted socialization of gratification by Internal Audit and Indonesian Corruption Eradication Commission in August and October 2015.

2. Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) pada bulan Agustus-Oktober 2015 dan mendapat peringkat sebagai Perusahaan Sangat terpercaya.
3. Mengkaji *Soft Structure* GCG khususnya *Board Manual* dan ditetapkan dalam SK bersama Direksi dengan Dewan Komisaris No. 4/SK/PTBADEKOM/IX/2015 dan No. 159AJ/Kep/Int-0100/PW.01/2015 tanggal 1 September 2015.
4. Melakukan sosialisasi GCG untuk pemangku kepentingan internal (pegawai) tanggal 30 September 2015.
5. Penyusunan *Draft* Pedoman dan Prosedur Pengendalian Gratifikasi.
6. Mengikuti undangan dari Kementerian BUMN dalam kegiatan *monitoring* dan tindak lanjut *assessment* GCG BUMN 6 November 2015.
7. Melakukan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan *Code of Conduct* oleh seluruh pegawai yang masih aktif.
8. Sosialisasi GCG termasuk tentang peraturan Gratifikasi di PTBA kepada *Stakeholder* Eksternal dilakukan oleh Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan bersama Satuan Pengawasan Intern pada tanggal 21 Desember 2015.
9. Melakukan Evaluasi (*review*) penerapan GCG oleh internal PTBA dengan nilai 92,53 predikat Sangat Baik.
10. Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 85,25 sebagai Perusahaan "Sangat Terpercaya".

2. Participated in GCG Assessment by The Indonesia Institute for Corporate Governance in August-October 2015 and was ranked as a Highly Trusted Company.
3. Reviewed the Soft Structure of GCG, especially the Board Manual, and stipulated in a joint decree with Board of Directors and Board of Commissioners No. 4/SK/PTBADEKOM/IX/2015 and No. 159AJ/Kep/Int-0100/PW.01/2015 dated September 1, 2015.
4. Conducted GCG socialization for internal stakeholders (employees) on September 30, 2015.
5. Preparation of Draft Guidelines and Procedures for Gratification Control.
6. Attended the invitation from the Ministry of SOEs in the monitoring and follow-up activities of SOE GCG assessment, on November 6, 2015.
7. Signed the Code of Conduct Compliance Statement by all active employees.
8. Socialization of GCG, including the Gratification regulations at PTBA to External Stakeholders, carried out by the Corporate Management System and Internal Audit Work Unit on December 21, 2015.
9. Conducted an internal evaluation (review) of the implementation of GCG by PTBA with a score of 92.53 and Very Good predicate.
10. Participated in GCG assessment by the Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 85.25 as a "Most Trusted" Company.

2016

1. Pembangunan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
2. Sosialisasi GCG kepada pegawai dan Mitra Kerja.
3. Melakukan *assessment* GCG oleh pihak eksternal (PT Sinergi Daya Prima) dengan nilai 88,66 predikat Sangat Baik.
4. Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 85,55 dan peringkat sebagai Perusahaan "Sangat Tepercaya".

2016

1. Formed the Gratification Control Unit.
2. GCG socialization to employees and business partners.
3. Conducted GCG assessment by an external party (PT Sinergi Daya Prima) with a score of 88.66 and Very Good predicate.
4. Participated in GCG assessment by the Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 85.55 as a "Most Trusted" Company.

2017

1. Melakukan Sosialisasi GCG kepada pegawai dan mitra kerja di Tanjung Enim, Dermaga Kertapati, Pelabuhan Tarahan, dan Jakarta.
2. Melakukan revisi Panduan Berperilaku (*Code of Conduct*).
3. Menetapkan Pedoman dan Tata Laksana Pengendalian Gratifikasi.
4. Melakukan Evaluasi (*review*) penerapan GCG oleh pihak internal Bukit Asam dengan nilai 90,88 predikat Sangat Baik.

2017

1. Disseminated GCG to employees and partners at Tanjung Enim, Kertapati Barging Port, Tarahan Port, and Jakarta.
2. Revised the Code of Conduct.
3. Established Guidelines and Procedures for Gratification Control.
4. Conducted GCG assessment by Bukit Asam internal party with a score of 90.88 and Very Good predicate.

5. Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 85,56 sebagai Perusahaan "Sangat Tepercaya".

2018

1. Penandatanganan Panduan Berperilaku oleh Direksi dan Komisaris serta mendistribusikannya kepada seluruh pegawai.
2. Penandatanganan pernyataan Kepatuhan *Code of Conduct* (CoC) kepada seluruh Komisaris, Direksi, dan karyawan.
3. Sosialisasi GCG kepada seluruh pegawai melalui media elektronik *e-mail*, pemasangan spanduk, dan banner.
4. Melakukan *assessment* GCG oleh pihak eksternal (PT Sinergi Daya Prima) dengan nilai 91,12 predikat Sangat Baik.
5. Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 86,10 sebagai Perusahaan "Sangat Tepercaya".

2019

1. Penandatanganan pernyataan Benturan kepentingan oleh Komisaris dan Direksi.
2. Sosialisasi GCG kepada seluruh pegawai melalui media elektronik *e-mail*, pemasangan spanduk, dan banner.
3. Melakukan *Review Board Manual* dan *Corporate Governance Policy* (CGP).
4. Melakukan Proses Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO 37001:2016 dan Integrasi Panduan Tanggung Jawab Sosial berbasis ISO 26000:2010 dalam rangka Implementasi *Environment Social Governance Management System* (ESGM *System*).
5. Melakukan Evaluasi (*review*) penerapan GCG oleh pihak internal PTBA dengan nilai 97,50 predikat Sangat Baik.
6. Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 87,05 sebagai Perusahaan "Sangat Tepercaya".

2020

1. Penandatanganan pernyataan Independensi oleh Direksi.
2. Melakukan sosialisasi GCG secara rutin melalui media *e-mail*, spanduk dan *banner*.
3. Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi/ *review* secara mandiri (*Assessment* internal) implementasi GCG tahun 2019.
4. Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diawali dengan penandatanganan komitmen bersama penerapan ISO 37001:2016 oleh Direksi.

5. Participated in GCG assessment by the Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 85.56 as a "Most Trusted" Company

2018

1. The Code of Conduct signed by Board of Directors and Board of Commissioners and distributed to all employees.
2. The Code of Conduct (CoC) Compliance statement signed by all Board of Commissioners, Board of Directors, and employees.
3. Socialized GCG to all employees through electronic media such as e-mail and installation of banners.
4. Conducted GCG assessment by an external party (PT Sinergi Daya Prima) with a score of 91.12 and Very Good predicate.
5. Participated in GCG assessment by the Indonesian Institute for Corporate Governance with a score of 86.10 as a "Most Trusted" Company.

2019

1. The Conflict of Interest Statement signed by Board of Commissioners and Board of Directors.
2. GCG socialization to all employees through electronic media e-mail, installation of banners, and banners.
3. The Board Manual and Corporate Governance Policy (CGP) review.
4. Conducted the Process of Developing an Anti-Bribery Management System based on ISO 37001:2016 and Integration of Social Responsibility Guidelines based on ISO 26000:2010 to Implement the Environment Social Governance Management System (ESGM System).
5. Conducted GCG assessment by PTBA internal parties with a score of 97.50 and Very Good predicate.
6. Participated in GCG assessment by the Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 87.05 as a "Most Trusted" Company.

2020

1. Statement of Independence signed by Board of Directors.
2. Conducted regular socialization of GCG through e-mail, banners and banner.
3. Followed up the recommendations on the results of self-evaluation/review (internal assessment) on the implementation of GCG in 2019.
4. Development of an Anti-Bribery Management System began with the signing of a joint commitment to implementing ISO 37001:2016 by Board of Directors.

5. Melakukan integrasi Panduan Tanggung Jawab Sosial (CSR) berbasis ISO 26000:2010.
6. Penandatanganan *Corporate Governance Policy* dan *Board Manual*.
7. Melakukan penandatangan *Code of Conduct* oleh seluruh pegawai.
8. Penerimaan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 pada bulan Juli 2020.
9. Mengikuti TOP *Governance Risk Compliance* (GRC) *Performance Excellence Awards* tahun 2020.
10. Melakukan Assessment KPKU dengan pencapaian nilai 667,50 dengan peringkat *Emerging Industry Leader*.
11. Melakukan *Assessment* oleh pihak eksternal (PT Sinergi Daya Prima) dengan nilai 96,10 predikat Sangat Baik.
12. Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 88,05 sebagai Perusahaan "Sangat Terpercaya".

5. Performed an Integration of Social Responsibility Guidelines (CSR) based on ISO 26000:2010.
6. Corporate Governance Policy and Board Manual signing.
7. Code of Conduct signing by all employees.
8. Received the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Certificate in July 2020.
9. Participated in the TOP Governance Risk Compliance (GRC) Performance Excellence Awards in 2020.
10. Conducted KPKU assessment and achieve a score of 667.50 with the rank of Emerging Industry Leader.
11. Conducted an Assessment by external parties (PT Sinergi Daya Prima) with a score of 96.10 and Very Good predicate.
12. Participated in GCG assessment by the Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 88.05 as a "Most Trusted" Company.

2021

1. Penandatanganan pernyataan Independensi oleh Direksi.
2. Melakukan sosialisasi GCG secara rutin melalui media *e-mail*, spanduk, *banner*, *videotron*, dan *Forum Group Discussion* (FGD).
3. Melakukan *assessment* Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) PT Bukit Asam Tbk dengan pencapaian nilai 681,50 dengan memperoleh Predikat *Industry Leader*.
4. Melakukan penandatangan pernyataan Code of Conduct oleh seluruh pegawai.
5. Melakukan perbaikan dan penyesuaian memperhatikan peraturan Perundang-Undangan dan kondisi terkini yang relevan untuk disesuaikan pada Pedoman *Code of Conduct* PT Bukit Asam Tbk.
6. Pengesahaan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (Code of Conduct) PT Bukit Asam Tbk sesuai dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 07/SK/PTBADEKOM/2021 dan No. 408A/0100/2021 pada tanggal 15 September 2021.
7. Melakukan perbaikan dan penyesuaian memperhatikan peraturan Perundang-Undangan dan kondisi terkini yang relevan untuk disesuaikan pada Pedoman *Whistle Blowing System* PT Bukit Asam Tbk.
8. Pelaksanaan *Surveillance* Audit dalam rangka pengecekan dan mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 PT Bukit Asam Tbk.
9. Mengikuti ajang Internasional *Global Good Corporate Governance Awards* (3G Awards) yang diselenggarakan oleh Cambridge IFA.

2021

1. Statement of Independence signing by Board of Directors.
2. Conducted regular socialization of GCG through e-mail media, banners, Video Tron, and Forum Group Discussion (FGD).
3. Conducted the assessment of Superior Performance Assessment Criteria of PT Bukit Asam Tbk and achieve a score of 681.50 by obtaining the Industry Leader predicate.
4. Signing the Code of Conduct statement by all employee
5. Made improvements and adjustments taking into account the latest relevant laws and conditions to be adjusted to the Code of Conduct Guidelines for PT Bukit Asam Tbk.
6. Ratification of the Code of Conduct and Business Ethics (Code of Conduct) of PT Bukit Asam Tbk in accordance with the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 07/SK/PTBADEKOM/2021 and No. 408A/0100/2021 on September 15, 2021.
7. Made improvements and adjustments taking into account the relevant laws and regulations and current conditions to be adjusted to PT Bukit Asam Tbk Whistle Blowing System Guidelines.
8. Performed Surveillance Audit to check and maintain the certificate of Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016 PT Bukit Asam Tbk.
9. Participated in the International Global Good Corporate Governance Awards (3G Awards) organized by Cambridge IFA.

10. Melakukan evaluasi (*review*) terhadap penerapan GCG, yaitu tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya yang telah dinilai (*assessment*) oleh Pihak Eksternal yang meliputi evaluasi terhadap penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dengan perolehan nilai evaluasi (*review*) sebesar 97,62 dengan predikat "Sangat Baik".
11. Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 88,83 sebagai Perusahaan "Sangat Tepercaya".
12. Pembangunan Aplikasi CISEA-GCG.

2022

1. Penandatanganan pernyataan independensi oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Aplikasi CISEA-GCG sebagai media Internalisasi dan upaya untuk penguatan pemahaman atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
3. Melakukan sosialisasi GCG secara rutin melalui media *e-mail*, spanduk, *banner*, videotron, *Forum Group Discussion* (FGD) & CISEA GCG.
4. Pelatihan *Governance, Risk and Compliance* (GRC) Kelas Eksekutif dan Kelas Reguler bagi Pegawai Bukit Asam, termasuk yang ditugaskan sebagai Direksi di Anak dan Afiliasi Perusahaan.
5. Pendistribusian buku Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) PT Bukit Asam Tbk sesuai dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 07/SK/PTBADEKOM/2021 dan No. 408A/ 0100/2021 pada tanggal 15 September 2021.
6. Melakukan penandatangan *Code of Conduct* secara elektronik melalui Aplikasi CISEA-GCG oleh seluruh pegawai.
7. Pelaksanaan *Surveillance* Audit dalam rangka pengecekan dan mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 PT Bukit Asam Tbk.
8. Melakukan *Assessment* terkait implementasi GCG di Bukit Asam oleh pihak Eksternal (PT Sinergi Daya Prima) dengan nilai 97,30 predikat "Sangat Baik".
9. Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 89,09 sebagai Perusahaan "Sangat Tepercaya".
10. Melakukan pemutakhiran konten dan perbaikan *layout Dashboard* ESG pada *website* Bukit Asam.
11. Survey Pemahaman Pegawai terkait GCG melalui Aplikasi LMS MINS ID *Academy.*
12. Studi Banding Inspektorat Kementerian Keuangan Republik Indonesia ke PTBA dalam rangka pengelolaan GRC di Perusahaan pada tanggal 7-8 Desember 2022.

10. Conducted GCG implementation evaluation (review), namely follow-up to GCG implementation that has been carried out in the previous year, which has been assessed (Assessment) by an External Party that includes an evaluation of the assessment and follow-up on recommendations for improvement with the acquisition of a score of 97.62 and "Very Good" Company.
11. Participated in GCG assessment by the Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 88.83 as a "Most Trusted" Company.
12. Developed the CISEA-GCG application.

2022

1. Statement of Independence signing of by Board of Commissioners and Board Directors.
2. CISEA-GCG Application as a medium for internalization and efforts to strengthen understanding of the principles of good corporate governance.
3. Carried out routine GCG outreach through email media, banners, videotrons, Forum Group Discussion (FGD) & CISEA GCG.
4. Executive Class and Regular Class Governance, Risk and Compliance (GRC) Training for Bukit Asam Employees including those assigned as Board of Directors in Subsidiaries and Affiliated Companies.
5. Distribution of PT Bukit Asam Tbk Code of Conduct and Business Ethics in accordance with the Joint Decree of Board of Commissioners and Board Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 07/ SK/PTBA-DEKOM/2021 and No. 408A/ 0100/2021 on September 15, 2021.
6. Code of Conduct signing electronically through CISEA-GCG Application by all employees.
7. Implementation of Surveillance Audits to check and maintain the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System certificate for PT Bukit Asam Tbk.
8. Conducted GCG Assessment at Bukit Asam by an external party (PT Sinergi Daya Prima) with a score of 97.30 and "Very Good" Company.
9. Participated in GCG assessment by the Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 89.09 as a "Most Trusted" Company.
10. Updated the content and improving the layout of ESG Dashboard on Bukit Asam website.
11. Survey of Employee Understanding regarding GCG via the MINS ID Academy LMS Application.
12. Comparative Study by the Inspectorate of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia to PTBA regarding the management of GRC in the company on December 7-8, 2022.

2023

1. Penandatanganan pernyataan independensi oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Penandatangan COC Pegawai Baru dan *Professional Hire* melalui Aplikasi CISEA-GCG.
3. Melakukan sosialisasi GCG secara rutin melalui media *e-mail*, spanduk, *banner*, videotron, *Forum Group Discussion* (FGD) & CISEA GCG.
4. Pelatihan *Governance, Risk and Compliance* (GRC) untuk Pegawai PTBA dan AAP masing-masing sebanyak 6 Sesi dari Bulan Mei - Oktober 2023.
5. Pelaksanaan Audit Re-sertifikasi dalam rangka pengecekan dan mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 PT Bukit Asam Tbk.
6. Menindaklanjuti Hasil *Assessment* GCG Eksternal Tahun 2022.
7. Melakukan Evaluasi Mandiri terkait Penerapan GCG.
8. Memonitor Pencapaian Sasaran Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
9. Melakuan survei Pemahaman terkait Penerapan GCG Ke Seluruh Pegawai PTBA dengan nilai rata-rata > 90%
10. Penyelarasan dan Pembaharuan *Soft Structure* GCG (GCP, *Board Manual*, Pedoman COC, Pedoman SPP, Pedoman SMAP, dll) menyesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN.
11. Penyesuaian *Charter* Dewan Komisaris.
12. Pengesahan Keputusan Dewan Komisaris PTBA Nomor: 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris (Penambahan Fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai PERMEN BUMN 02 Tahun 2023 pada tanggal 15 Desember 2023.
13. Rapat Koordinasi Tata Kelola Terintegrasi MIND ID Group pada tanggal 14-15 Desember 2023.
14. Menerima Penghargaan dalam acara GRC & Performance Excellence Award pada tanggal 30 Agustus 2023.
15. Menerima penghargaan *Best State Owned Enterprises 2023 dan Top 50 Big Capitalization Public Listed Company*, dalam ajang *The 14th Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Corporate Governance Conference & Award* pada tanggal 18 September 2023.
16. Mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 berdasarkan hasil audit re-sertifikasi dari PT TÜV NORD Indonesia selaku Badan Sertifikasi Independen pada tanggal 14 November 2023.

2023

1. Signing of the independence statement by the Board of Commissioners and Directors.
2. Signing the COC for New Employees and Professional Hire via the CISEA-GCG Application.
3. Conducted regular GCG socialization via e-mail, banners, banners, videotron, Forum Group Discussion (FGD) & CISEA GCG.
4. Governance, Risk and Compliance (GRC) training for PTBA and AAP employees in 6 sessions each from May – October 2023.
5. Carried out a Re-certification Audit in order to check and maintain the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System certificate of PT Bukit Asam Tbk.
6. Followed up on the results of the 2022 External GCG Assessment.
7. Carried out an Independent Evaluation regarding the Implementation of GCG.
8. Monitoring the Achievement of Anti-Bribery Management System Goals.
9. Carrying out an Understanding Survey regarding the Implementation of GCG to all PTBA Employees with an average score of > 90%
10. Alignment and updating of the GCG Soft Structure (GCP, Board Manual, COC Guidelines, SPP Guidelines, SMAP Guidelines, etc.) in accordance with SOEs Ministerial Regulation.
11. Adjustment of the Board of Commissioners' Charter.
12. Ratification of the Decision of the Board of Commissioners of PTBA No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 regarding the Division of Duties of the Board of Commissioners (Addition of the Integrated Governance Committee Function in accordance with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. 02 of 2023) on December 15, 2023.
13. Integrated Governance Coordination Meeting of MIND ID Group on December 14-15, 2023.
14. Received an award at the GRC & Performance Excellence Award event on August 30, 2023.
15. Received the Best State-Owned Enterprises 2023 award and Top 50 Big Capitalization Public Listed Company, at the 14th Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Corporate Governance Conference & Award on September 18, 2023.
16. Maintained the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) certificate based on the results of a re-certification audit from PT TÜV NORD Indonesia as an Independent Certification Body on November 14, 2023.

17. Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 90,03 sebagai Perusahaan "Sangat Tepercaya (Most Trusted Company)" dan menjadi Perusahaan dengan nilai tertinggi dalam kelompok Perusahaan Non Keuangan (EMITEN, BUMN, BUMD).
18. Melakukan pemutakhiran konten terkait GCG pada *Dashboard* ESG *website* PTBA.

2024

1. Melakukan sosialisasi secara rutin melalui media e-mail, spanduk, *banner*, videotron & CISEA-GCG.
2. *Benchmark* Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi dan Audit Intern Terintegrasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3. *Kick off* implementasi Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi Anak Dan Afiliasi Perusahaan PT Bukit Asam Tbk.
4. Mengikuti Kegiatan *Corporate Rating* di bidang GRC *(Governance, Risk & Compliance*) TOP GRC Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business bekerjasama dengan IRMAPA *(Indonesian Risk Management Profesional Association*), ICoPI (Institute Compliance Profesional Indonesia*) dan PaGI* (Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia*).*
5. Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 91,04 sebagai Perusahaan "Sangat Terpercaya" *(Most Trusted Company)* dan menjadi perusahaan dengan nilai tertinggi dalam kelompok Perusahaan Non Keuangan (EMITEN, BUMN, BUMD).
6. Kolaborasi dengan Tim Pengembangan Budaya satuan kerja SDM Operasional terkait dengan penyelenggaraan Webinar dalam program BA Ring Ring Vol. 40 dengan tema meningkatkan Tata Kelola Perusahaan Yang Berkelanjutan: Peran GRC dalam Mitigasi Risiko *Fraud* dan Peningkatan Kepatuhan di PTBA Group.
7. Melakukan penandatangan *Code of Conduct* secara elektronik melalui Aplikasi CISEA-GCG oleh seluruh pegawai.
8. Forum Komite Tata Kelola Terintegrasi periode Semester II PTBA *Group* Tahun 2024.
9. Penyampaian Laporan Penilaian Internal Tata Kelola Terintegrasi ke MIND ID
10. Melakukan *assessment* dengan standard *ASEAN Corporate Governance Scorecard* untuk pertama kali.

17. Participated in the assessment of GCG implementation by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) with a score of 90.03 as The Most Trusted Company and became the Company with the highest score in the Non-Financial Company group (EMITEN, SOEs, BUMD).
18. Updated GCG-related content on the ESG Dashboard of the PTBA website.

2024

1. Conducting regular socialization through e-mail, banners, videotrons & CISEA-GCG media.
2. Benchmarking of Integrated Governance Implementation, Integrated Risk Management, and Integrated Internal Audit at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3. Kickoff for the implementation of Integrated Governance and Integrated Risk Management of Subsidiaries and Affiliates of PT Bukit Asam Tbk.
4. Participating in the Corporate Rating Activity in the field of GRC (Governance, Risk & Compliance) TOP GRC Awards 2024 organized by Top Business Magazine in collaboration with IRMAPA (Indonesian Risk Management Professional Association), ICoPI (Indonesian Compliance Professional Institute) and PaGI (Indonesian Governance Professional Association).
5. Participating in the assessment of GCG implementation by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) with a score of 91.04 as a "Most Trusted Company" and becoming the company with the highest value in the Non-Financial Company group (ISSUER, SOEs, BUMD).
6. Collaboration with the Human Resources Operational Work Unit Culture Development Team regarding the implementation of the Webinar in the BA Ring Ring Vol. 40 program with the theme of improving Sustainable Corporate Governance: The Role of GRC in Mitigating Fraud Risk and Improving Compliance at PTBA Group.
7. Electronic signing of the Code of Conduct through the CISEA-GCG Application by all employees.
8. Integrated Governance Committee Forum of PTBA Group on the second semester of 2024.
9. Submission of the Integrated Governance Internal Assessment Report (Self Assessment) to MIND ID
10. Conducting an assessment with the ASEAN Corporate Governance Scorecard standard for the first time.

Monitoring Penerapan GCG
GCG Implementation Monitoring



Penanggung Jawab Penerapan GCG

Implementasi GCG menjadi kewajiban bagi Seluruh Insan PTBA di mana Perusahaan menunjuk Direktur Utama sebagai penanggungjawab dalam penerapan dan pemantauan tata kelola perusaahan yang baik di PTBA yang dalam pelaksanaannya dikelola oleh Satuan Kerja Sistem Manajemen dan Kinerja Perusahaan, Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Manajemen Risiko dan Hukum & Regulasi. Penunjukan penanggungjawab implementasi GCG ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Direksi No. 080A/0100/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Penanggungjawab Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di PT Bukit Asam Tbk. Adapun tugas dan tanggungjawab selaku penanggungjawab implementasi GCG, adalah sebagai berikut:

1. Memastikan Perusahaan patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, peraturan internal perusahaan, dan berkomitmen terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian/ikatan yang disepakati dengan pihak eksternal;
2. Memastikan kepatuhan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk jajarannya terhadap pemenuhan tata kelola di bidang pasar modal, peraturan di bidang pasar modal, dan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Memastikan Perusahaan Patuh terhadap peraturan tentang persyaratan keterbukaan dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Unit in Charge of GCG Implementation

The implementation of GCG is obligatory for all PTBA employees where the Company appoints the President Director as the person responsible for implementing and monitoring good corporate governance at PTBA, which in its implementation is managed by the Corporate Management System and Company Performance, Corporate Secretary, Internal Audit, Risk Management, and Legal & Regulatory. The appointment of the person responsible for implementing GCG is determined based on Directors' Decree No. 080A/0100/2023 dated March 13, 2023, concerning Persons Responsible for Implementing Good Corporate Governance at PT Bukit Asam Tbk. The duties and responsibilities as the person responsible for implementing GCG are as follows:

1. Ensure the Company compliance with the provisions of applicable laws and regulations, internal company regulations, and is committed to the provisions in agreements/engagements agreed with external parties;
2. Ensure compliance by the Board of Directors and Board of Commissioners, including their staff, with compliance with governance in the capital market sector, regulations in the capital market sector, and the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs);
3. Ensure the Company compliance with regulations regarding transparency requirements by implementing GCG principles as regulated in applicable laws and regulations;

4. Mendukung pemantauan atas pelaksanaan pedoman tentang perilaku etika (*Code of Conduct*) yang memuat nilai, norma, dan etika berusaha guna memaksimalkan nilai dan pertumbuhan bisnis di Perusahaan;
5. Melakukan pemantauan pelaksanaan program Manajemen Risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG;
6. Melakukan pemantauan terhadap ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas adanya dugaan penyimpangan pada perusahaan, termasuk pencegahan dan pengendalian gratifikasi;
7. Menjaga dan mengevaluasi pelaksanaan, penerapan, dan pemantauan GCG di Perusahaan dengan melakukan pengukuran atas penerapan GCG yang dilakukan secara berkala dalam bentuk:
   a. Penilaian (*Assessment*), melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Perusahaan;
   b. Evaluasi (*Review*), yang dilaksanakan melalui program yang bertujuan mendeskrpisikan tindak lanjut pelaksanaan GCG di Perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah dilakukan penilaian (*Assessment*) yang dalam hal ini meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
8. Memastikan Perusahaan memiliki dan menjalankan sertifikasi/standar dalam rangka penerapan *best practice* GCG.

Sampai dengan akhir Desember 2024, Penanggungjawab Implementasi GCG PTBA telah melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Adapun tugas yang telah dilaksanakan di tahun 2024, sebagai berikut:

1. Memastikan Perusahaan patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dibuktikan dengan melakukan *aligment* dan *cascading* terhadap PER-02/MBU/2023 dan Pedoman Stategis serta Kebijakan Pelaksana MIND ID;
2. Memastikan kepatuhan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk jajarannya terhadap pemenuhan tata kelola di bidang pasar modal, peraturan di bidang pasar modal, dan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pemenuhan terhadap POJK yang terkait;
3. Memastikan Perusahaan Patuh terhadap peraturan tentang persyaratan keterbukaan dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibuktikan dengan Keterbukaan dalam penyampaian kinerja perusahaan dalam bentuk *Annual Report*, Keterbukaan dalam penyampaian kinerja lingkungan perusahaan dalam bentuk *Sustainability Report*, Laporan Pengelolaan Iklim (*Climate Change*) oleh *Carbon Disclosure Project* (CDP) dan Keterbukaan dalam penyampaian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL);

4. Support monitoring of the implementation of ethical behavior guidelines (Code of Conduct) which contain values, norms, and business ethics to maximize business value and growth in the Company;
5. Monitor the implementation of the corporate Risk Management program in an integrated manner which is part of the implementation of the GCG program;
6. Monitor the regulation on reporting mechanisms for suspected irregularities in the company, including prevention and control of gratification;

7. Maintain and evaluate the implementation, application, and monitoring of GCG in the Company by measuring the implementation of GCG periodically in the form of:
   a. Assessment, through the measurement of the implementation and application of good corporate governance in the company;
   b. Review, which is carried out through a program to describe the follow-up to the implementation of GCG in the Company in the following year after the assessment is carried out, which in this case includes evaluation of the results of the assessment and follow-up on recommendations for improvement.
8. Ensure that the Company has and implements certification/ standards in order to implement GCG best practices.

Until the end of December 2024, the person responsible for implementing GCG PTBA has carried out all his duties and responsibilities well. The tasks that have been carried out in 2024 are as follows:

1. Ensure that the Company complies with the provisions of applicable laws and regulations, as evidenced by carrying out alignment and cascading to PER-02/MBU/2023 and the Strategic Guidelines and Implementing Policies of MIND ID;
2. Ensure compliance by the Board of Directors and Board of Commissioners, including their staff, with compliance with governance in the capital market sector, regulations in the capital market sector, and the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) through compliance with the relevant POJK;
3. Ensure that the Company complies with regulations regarding transparency requirements by implementing GCG principles as regulated in applicable laws and regulations as evidenced by openness in submitting company performance in the form of an Annual Report, Disclosure in submitting company environmental performance in the form of a Sustainability Report, Climate Management Report (Climate Change) by the Carbon Disclosure Project (CDP) and Openness in delivering the Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR);

4. Mendukung pemantauan atas pelaksanaan pedoman tentang perilaku etika yang memuat nilai, norma, dan etika berusaha guna memaksimalkan nilai dan pertumbuhan bisnis di Perusahaan, yang dibuktikan dengan Penandatangan Pakta Integritas (*Code of Conduct*) dan dipantau melalui sidak etika kedisiplinan;
5. Melakukan pemantauan pelaksanaan program Manajemen Risiko korporasi secara terpadu dan di pantau secara berkala melalui pelaporan triwulanan pada *Enterprise Risk Management Aplication* (ERMA);
6. Melakukan pemantauan terhadap ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas adanya dugaan penyimpangan pada perusahaan, termasuk pencegahan dan pengendalian gratifikasi yang dilaporkan secara berkala;
7. Menjaga dan mengevaluasi pelaksanaan, penerapan, dan pemantauan GCG di Perusahaan secara berkala;
8. Memastikan Perusahaan memiliki dan menjalankan sertifikasi/standard dalam rangka penerapan *best practice* GCG, yang dibuktikan dengan diterimanya Sertifikat ISO 37001:2016 dari Badan Sertifikasi PT TÜV NORD hasil dari Audit Re-Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Pengukuran Kualitas Penerapan GCG

PTBA secara berkala melakukan penilaian kualitas implementasi GCG di Perusahaan sebagai wujud mekanisme *check & balance* untuk mengukur tingkat penerapan GCG.

Penilaian tersebut dilaksanakan dengan menggunakan jasa konsultan independen yang berkompeten dalam melakukan penilaian. Penilaian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan berupa gambaran yang komprehensif terkait sejauh mana prinsip-prinsip GCG telah diterapkan di Perusahaan. Selain itu, penilaian juga menghasilkan rekomendasi yang menjadi *area of improvement* dalam perbaikan terhadap penerapan GCG di Perusahaan.

Sebagai Anggota *Holding*, Perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pengukuran atas penerapan GCG berdasarkan parameter yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Namun, sehubungan dengan telah dicabutnya Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/SMBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-12/S.MBU/08/2023 pada tanggal 16 Agustus 2023, maka untuk periode penilaian tahun 2023, pengukuran terhadap penerapan GCG hanya

4. Support the monitoring of the implementation of guidelines on ethical behavior which contain values, norms, and business ethics to improve value and business growth in the Company as shown by the signing of the Integrity Pact (Code of Conduct) and monitored through disciplinary ethics inspections;
5. Monitor the implementation of the corporate Risk Management program in an integrated manner and monitor it regularly through quarterly reporting on the Enterprise Risk Management Application (ERMA);
6. Monitor the provisions governing the reporting mechanism for suspected irregularities in the company, including prevention and control of gratuities which are reported periodically;
7. Periodically maintain and evaluate the implementation, application, and monitoring of Good Corporate Governance (GCG) within the Company;
8. Ensure that the Company has and implements certification/standards in the context of implementing GCG best practices as evidenced by the receipt of the ISO 37001:2016 Certificate from the PT TÜV NORD Certification Body as a result of the Anti-Bribery Management System Re-Certification Audit.

GCG Implementation Quality Measurement

PTBA regularly assesses the quality of GCG implementation in the Company as a form of check & balance mechanism to measure the level of GCG implemented.

This assessment is carried out using services from the independent consultant who is competent in conducting assessments. The assessment carried out resulted in a conclusion in a comprehensive picture regarding the extent to which GCG principles have been implemented in the Company. Moreover, the assessment also produces recommendations to improve the implementation of GCG in the Company.

As a holding member, the Company has an obligation to measure the implementation of GCG based on the parameters set by the Ministry of SOEs. However, in connection with the revocation of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S-MBU/2012 dated June 6, 2012, concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, based on Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SK-12/S.MBU/08/2023 on August 16, 2023, then for the 2023 assessment period, measurement of GCG implementation only uses criteria and methodology

menggunakan kriteria dan metodologi yang mengacu kepada Internal yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Di samping melakukan penilaian penerapan GCG dengan menggunakan parameter yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN, setiap tahunnya Perseroan juga melakukan penilaian penerapan GCG dengan menggunakan parameter lain, yaitu:

1. *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dan Majalah SWA. PTBA meraih predikat Indonesia *Most Trusted Company* dan menjadi Perusahaan dengan nilai tertinggi dalam kelompok Perusahaan Non Keuangan (Emiten BUMN/ BUMD) dengan nilai 91,04.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
3. *Asean Corporate Governance Scorecard* (ACGS).
4. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI).

Penilaian (*Assessment*)/Evaluasi (*Review*) Penerapan GCG Berdasarkan Kriteria BUMN

Penilaian penerapan GCG berdasarkan kriteria BUMN yang terakhir dilaksanakan oleh PTBA, yaitu untuk periode penilaian tahun 2022, yang dilakukan pada tahun 2023.

Adapun parameter yang dipergunakan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, dengan Indikator penilaian meliputi:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan informasi dan transparansi;
6. Aspek lainnya.

Pihak yang Melakukan Penilaian (*Assessment*)/ Evaluasi (*Review*)

Pada periode penilaian tahun 2022, pihak independen yang melakukan penilaian adalah PT Sinergi Daya Prima.

that refers to internal measurement determined by the Company.

In addition to assessing the implementation of GCG using parameters set by the Ministry of SOEs, every year the Company also assesses the implementation of GCG using other parameters, namely:

1. Corporate Governance Perception Index (CGPI) conducted by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) and SWA Magazine. PTBA won the title of Indonesia Most Trusted Company and became the company with the highest value in the Non-Financial Company group (SOEs/BUMD Issuers) with a score of 91.04.
2. Financial Services Authority Regulation No. 21/ POJK.04/2015 concerning the Implementation of Guidelines for Public Company Governance and SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance.
3. Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS).
4. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance.

Assessment/Evaluation of GCG Implementation Based on SOEs Criteria

The assessment of GCG implementation is based on SOEs criteria which was last carried out by PTBA, namely for the 2022 assessment period, which was carried out in 2023.

The parameters used were based on the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/ Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, with assessment indicators including:

1. Commitment to implement Good Corporate Governance on an ongoing basis;
2. Shareholders and GMS/Capital Owners;
3. Board of Commissioners/Supervisory Board;
4. Board of Directors;
5. Information disclosure and transparency;
6. Other aspects.

Party Conducting Assessment/Evaluation (Review)

In the 2022 assessment period, the assessment was carried out by an independent party, PT Sinergi Daya Prima.

Hasil Penilaian (*Assessment*)/Evaluasi (*Review*)

Pada periode penilaian tahun 2022, Perusahaan memperoleh nilai sebesar 97,30 dari total nilai maksimal yaitu sebesar 100,00 dengan kualifikasi "SANGAT BAIK", dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

Results Assessment/Evaluation (Review)

In the 2022 assessment period, the Company obtained a score of 97.30 out of a maximum total score of 100.00 with the qualification "VERY GOOD", with details of the assessment results as follows:

No	Aspek Pengujian Assessment Aspect	Bobot Weight	Capaian Achievement
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation	7,00	6,63
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	9,00
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,00	34,23
4	Direksi Board of Directors	35,00	33,82
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	9,00	8,81
6	Aspek Lainnya Others	5,00	4,82
Skor Keseluruhan Total Score		**100,00**	**97,30**
Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Qualification			**Sangat Baik** Very Good

Perkembangan Hasil Penilaian (*Assessment*) dan Evaluasi (*Review*) terhadap Penerapan GCG

Perusahaan konsisten dalam komitmennya meningkatkan implementasi GCG di Perusahaan, yang dibuktikan melalui hasil penilaian penerapan GCG di PTBA oleh asesor independen, di mana Perusahaan konsisten memperoleh kualifikasi "Sangat Baik" dalam setiap penilaiannya. Kewajiban penilaian penerapan GCG dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun, sebagaimana kewajiban tersebut sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Goverance)* Pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan. Adapun hasil penilaian tersebut, sebagai berikut:

Development of Assessment and Evaluation Results on GCG Implementation

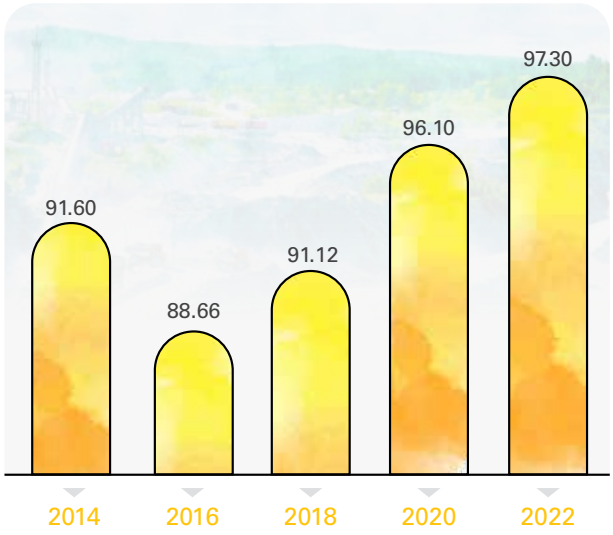
The Company is consistent in its commitment to improving GCG implementation in the Company, as evidenced by the results of the assessment of GCG implementation in PTBA by independent assessors, where the Company consistently obtains a "Very Good" qualification in each assessment. The obligation to assess GCG implementation is carried out periodically every 2 (two) years, as previously regulated in SOEs Ministerial Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as amended by PER-09/MBU/2012, which was later revoked and replaced by Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities. The results of the assessment are as follows:

Penilaian (Assessment) terhadap Penerapan GCG oleh Pihak Eksternal
Assessment of GCG Implementation by External Parties

Tahun Ukur *Assessment* Assessment Year	Skor *Assessment* GCG GCG Assessment Score	Kategori Category	Jenis Penilaian dan Pelaksana Assessment Type and Assessor
2022	97,30	"Sangat Baik" "Very Good"	Assessment GCG oleh PT Sinergi Daya Prima GCG Assessment by PT Sinergi Daya Prima
2020	96,10	"Sangat Baik" "Very Good"	Assessment GCG oleh PT Sinergi Daya Prima GCG Assessment by PT Sinergi Daya Prima

Penilaian (Assessment) terhadap Penerapan GCG oleh Pihak Eksternal
Assessment of GCG Implementation by External Parties

Tahun Ukur *Assessment* Assessment Year	Skor *Assessment* GCG GCG Assessment Score	Kategori Category	Jenis Penilaian dan Pelaksana Assessment Type and Assessor
2018	91,12	"Sangat Baik" "Very Good"	Assessment GCG oleh PT Sinergi Daya Prima GCG Assessment by PT Sinergi Daya Prima
2016	88,66	"Sangat Baik" "Very Good"	Assessment GCG oleh PT Sinergi Daya Prima GCG Assessment by PT Sinergi Daya Prima
2014	91,60	"Sangat Baik" "Very Good"	Assessment GCG oleh PT Netriva GCG Assessment by PT Netriva



Penilaian GCG Berdasarkan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI)

Dalam menjaga kepercayaan segenap pemangku kepentingan, PTBA terus mengikuti *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diadakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan implementasi GCG serta menjadi acuan bagi PTBA untuk melaksanakan penyempurnaan implementasi GCG ke depannya.

Metode Penilaian

Metode penilaian CGPI terdiri dari 4 (empat) tahapan penilaian yang meliputi *Self Assessment*, penilaian dokumen, penilaian makalah dan observasi.

1. *Self Assessment* adalah penilaian mandiri oleh perusahaan mengenai kualitas pelaksanaan GCG di lingkup internal perusahaan. Daftar responden terdiri dari 2 (dua) kalangan responden, yakni responden internal dan responden eksternal.
2. Kelengkapan Dokumen adalah pemenuhan persyaratan penilaian dengan menyerahkan berbagai dokumen yang telah dimiliki perusahaan dalam pelaksanaan GCG dan dokumen lainnya terkait dengan tema penilaian.

GCG Appraisal Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)

In maintaining stakeholders' trust, PTBA continues to participate in the Corporate Governance Perception Index (CGPI) held by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). This assessment aims to evaluate the implementation of GCG which is also a reference for PTBA to carry out improvements to GCG implementation in the future.

Assessment Method

The CGPI assessment method consists of four assessment stages, including self-assessment, document assessment, paper assessment, and observation.

1. Self Assessment is an internal assessment by the Company regarding the quality of GCG implemented in the Company's internal scope. The list of respondents consists of two respondents, namely internal and external respondents.
2. Completeness of Documents requires the submission of various documents regarding GCG implementation in the Company and other documents related to the theme of assessment.

3. Penyusunan Makalah disusun oleh perusahaan yang menjelaskan serangkaian proses dan program implementasi GCG di perusahaan dan upaya manajemen terkait dengan tema penilaian.

4. Observasi adalah tahapan akhir penilaian berupa peninjauan langsung oleh tim penilaian CGPI untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan serangkaian program pelaksanaan GCG dan upaya manajemen terkait dengan tema penilaian.

Aspek Penilaian CGPI

Aspek penilaian CGPI terdiri dari:

1. Aspek Struktur Tata Kelola
   Penilaian aspek struktur tata kelola menggambarkan penilaian kelengkapan struktur dan infrastruktur tata kelola korporasi serta penguatan *platform* bisnis dalam rangka menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata kelola. Aspek struktur tata kelola secara rinci terdiri dari 5 (lima) indikator, yaitu:
   a. Indikator Pemegang Saham;
   b. Indikator Dewan Komisaris;
   c. Indikator Direksi;
   d. Indikator Penanggung Jawab Manajemen Fungsional;
   e. Indikator Pemangku Kepentingan Kunci Lainnya.

2. Aspek Proses Tata Kelola
   Penilaian aspek proses tata kelola menggambarkan penilaian terhadap efektivitas sistem dan mekanisme tata kelola korporasi serta penguatan *platform* bisnis dalam rangka menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata kelola.

   Aspek proses tata kelola secara rinci terdiri dari 8 (delapan) indikator, yaitu:
   a. Indikator Tata Kelola Pemenuhan Hak Pemegang Saham dan RUPS;
   b. Indikator Tata Kelola Dewan Komisaris dan Direksi;
   c. Indikator Tata Kelola Perilaku Keorganisasian;
   d. Indikator Tata Kelola Pengawasan Internal dan Eksternal;
   e. Indikator Tata Kelola Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi;
   f. Indikator Tata Kelola Pengelolaan Risiko dan Kepatuhan;
   g. Indikator Tata Kelola Ekosistem Bisnis;
   h. Indikator Tata Kelola Sumber Daya.

3. Papers Preparation is prepared by the Company which describes a series of processes and programs for GCG implementation in the Company and the management's efforts related to the theme of assessment.
4. Observation is the final stage of assessment in the form of a direct review by the CGPI assessment team to ensure that the series of GCG program implementation and management efforts is related to the theme of assessment.

CGPI Assessment Aspects

CGPI assessment aspects consist of:

1. Governance Structure Aspect
   The governance structure aspect assessment describes an assessment of the completeness of corporate governance structure, infrastructure, and strengthening the business platform to create value for stakeholders to realize sustainable corporate growth by governance principles. In detail, governance structure aspect consists of five indicators, namely:
   a. Shareholder Indicators;
   b. Board of Commissioners Indicators;
   c. Board of Directors Indicators;
   d. Unit in Charge for Functional Management Indicators;
   e. Other Key Stakeholder Indicators.

2. Governance Process Aspect
   The governance process aspect is an assessment on the effectiveness of corporate governance systems and mechanisms, and strengthening business platforms to bring value for stakeholders to realize sustainable corporate growth by governance principles.

   In detail, the Governance process aspect consists of eight indicators, namely:
   a. Fulfillment of Shareholders' Rights and GMS Governance Indicators;
   b. Board of Commissioners and Board of Directors Governance Indicators;
   c. Organizational Behavior Governance Indicators;
   d. Internal and External Monitoring Governance Indicators;
   e. Information Disclosure and Transparency Governance Indicators;
   f. Risk Management and Compliance Governance Indicators;
   g. Business Ecosystem Governance Indicators;
   h. Resource Governance Indicators.

3. Aspek Hasil Tata Kelola
   Penilaian aspek hasil tata kelola menggambarkan penilaian terhadap kualitas luaran, hasil, dampak dan manfaat dari tata kelola perusahaan serta penguatan *platform* bisnis dalam rangka menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata kelola.

   Aspek hasil tata kelola secara rinci terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:
   a. Indikator Kinerja Bisnis
   b. Indikator Kinerja Keuangan
   c. Indikator Kinerja Ekosistem Bisnis

3. Governance Outcome Aspects
   The governance outcome aspect assessment describes the quality of outputs, results, impacts, and benefits of corporate governance and strengthening business platforms to bring value for stakeholders to realize sustainable corporate growth by governance principles.

   In detail, Governance outcome aspect consists of three indicators, namely:
   a. Business Performance Indicators
   b. Financial Performance Indicators
   c. Business Ecosystem Performance Indicators

Hasil penilaian CGPI berupa rentang skor yang dicapai oleh perusahaan peserta dengan kategorisasi atas tingkat kualitas implementasi GCG yang menggunakan istilah "Terpercaya" dengan tingkatan sebagai berikut:

The results of CGPI assessment are in the form of a range of scores achieved by participating companies with the categorization of quality level of GCG implementation using the term "Trusted" with the following levels:

Rentang Nilai Score Range	**Predikat** Predicate
55,00 - 69,99	"Cukup Terpercaya" "Fair Trusted"
70,00 - 84,99	"Terpercaya" "Trusted"
85,00 - 100,00	"Sangat Terpercaya" "Most Trusted"

Perkembangan CGPI

Perusahaan terus berupaya untuk memaksimalkan penerapan GCG di Perusahaan. Di tahun 2024, PTBA meraih skor 91,04 dengan kategori "Sangat Terpercaya".

Adapun perkembangan hasil CGPI yang dicapai Perusahaan adalah sebagai berikut:

CGPI Development

The Company strives to maximize the implementation of GCG in the Company. In 2024, PTBA received a score of 91,04 in the "Most Trusted" category.

The progress of CGPI results achieved by the Company are as follows:

Tahun Year	**Assessment GCG – CGPI** GCG-CGPI Assessment	**Kategori** Category
2024	91,04	"Sangat Terpercaya" "Most Trusted"
2023	90,03	"Sangat Terpercaya" "Most Trusted"
2022	89,09	"Sangat Terpercaya" "Most Trusted"
2021	88,83	"Sangat Terpercaya" "Most Trusted"
2020	88,05	"Sangat Terpercaya" "Most Trusted"
2019	87,05	"Sangat Terpercaya" "Most Trusted"
2018	86,10	"Sangat Terpercaya" "Most Trusted"
2017	85,56	"Sangat Terpercaya" "Most Trusted"
2016	85,55	"Sangat Terpercaya" "Most Trusted"
2015	85,25	"Sangat Terpercaya" "Most Trusted"

Tahun Year	Assessment GCG – CGPI GCG-CGPI Assessment	Kategori Category
2014	84,09	"Terpercaya" "Trusted"
2013	83,30	"Terpercaya" "Trusted"
2012	82,55	"Terpercaya" "Trusted"
2011	84,33	"Terpercaya" "Trusted"
2010	84,11	"Terpercaya" "Trusted"
2009	82,27	"Terpercaya" "Trusted"
2008	81,23	"Terpercaya" "Trusted"
2007	80,87	"Terpercaya" "Trusted"
2006	67,46	"Cukup Terpercaya" "Fair Trusted"

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, terdapat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi tata kelola yang disampaikan oleh OJK. PTBA menerapkan aspek, prinsip, dan rekomendasi tersebut berdasarkan pendekatan "*comply or explain*" sebagai berikut:

Implementation of Aspects and Principles of Good Corporate Governance in Accordance with Financial Services Authority

In line with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines and SEOJK No. 32/ SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance, there are five aspects, eight principles, and 25 recommendations of governance submitted by OJK. PTBA implements these aspects, principles, and recommendations based on the "comply or explain" approach as follows:

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendations	Penjelasan Penerapan di PTBA Implementation in PTBA	Status Status
I	**Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin hak-hak Pemegang Saham.** **Aspect 1: The relationship between the Public Company and the Shareholders in guaranteeing the rights of the Shareholders.**			
	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS Principle 1 Increasing the Value of the GMS	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. A Public Company has a technical method or procedure for voting both openly and privately that prioritizes independence and the interests of shareholders.	Perusahaan telah memiliki tata tertib untuk pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2023 yang mengatur tata cara voting dan penunjukan pihak independen untuk melakukan perhitungan suara yaitu PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek) dan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The Company has rules of procedure for the implementation of the 2023 Fiscal Year GMS which regulate the voting procedures and the appointment of an independent party to conduct vote counting, namely PT Datindo Entrycom (Securities Administration Bureau) and Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.	Terpenuhi Fulfilled

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendations	Penjelasan Penerapan di PTBA Implementation in PTBA	Status Status
		2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of a Public Company are present at the Annual GMS.	Pada RUPS Tahun Buku 2023 di tanggal 8 Mei 2024, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir pada RUPS. At the 2023 Fiscal Year GMS on May 8, 2024, all members of the Board of Directors and Board of Commissioners were present at the GMS.	Terpenuhi Fulfilled
		3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. The summary of the minutes of the GMS is available on the Public Company Website for at least 1 (one) year.	Situs web perusahaan telah mengungkapkan ringkasan risalah RUPS lebih dari 1 (satu) tahun yaitu mulai tahun 2017 sampai dengan 2024. The company website has disclosed a summary of the minutes of the GMS for more than 1 (one) year, namely from 2017 to 2024.	Terpenuhi Fulfilled
	Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Principle 2 Improving the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.	4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. The Public Company has a communication policy with shareholders or investors.	Perusahaan telah memiliki kebijakan mengenai komunikasi Perusahaan dengan pemegang saham perusahaan sebagaimana kebijakan berikut: 1. Tata Laksana Pelayanan Informasi Investor; 2. Tata Laksana Keterbukaan Informasi; 3. Kebijakan GCG terkait dengan Transaksi Orang Dalam (Insider Trading); 4. *Corporate Governance Policy;* 5. *Code of Conduct.* The Company has policies regarding the Company's communication with the Company's shareholders as follows: 1. Implementation of Investor Information Services; 2. Implementation of Information Disclosure; 3. GCG Policy related to Insider Trading; 4. Corporate Governance Policy; 5. Code of Conduct.	Terpenuhi Fulfilled
		5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. The Public Company discloses the Public Company's communication policy with shareholders or investors on the Website.	Perusahaan telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor pada situs web perusahaan. The company has disclosed its communication policy with shareholders or investors on the company's website.	Terpenuhi Fulfilled
II	**Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris** **Aspect 2: Functions and Roles of the Board of Commissioners**			
	Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Principle 3 Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners	1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. The number of members of the Board of Commissioners' determination considering the conditions of the Public Company.	Penentuan jumlah Dewan Komisaris Perusahaan mempertimbangkan kondisi perusahaan. Penentuan Dewan Komisaris mengacu kepada Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, per 31 Desember 2024, Perusahaan memiliki 6 anggota Dewan Komisaris. The determination of the number of the Company's Board of Commissioners considers the company's condition. The determination of the Board of Commissioners refers to the Articles of Association and applicable laws and regulations, as of December 31, 2024, the Company has 6 members of the Board of Commissioners.	Terpenuhi Fulfilled
		2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of the members of the Board of Commissioners considers the diversity of expertise, knowledge, and experience required.	Penentuan Dewan Komisaris Perusahaan telah memper timbangkan faktor keberagamaan yaitu diantaranya keahlian, pengetahuan dan pengalaman. Hal ini telah mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar, Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The determination of the Company's Board of Commissioners has considered religious factors, including expertise, knowledge and experience. This has referred to the provisions of the Articles of Association, the Board of Commissioners' Work Guidelines and the provisions of applicable laws and regulations.	Terpenuhi Fulfilled

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendations	Penjelasan Penerapan di PTBA Implementation in PTBA	Status Status
	Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4 Improving the Quality of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.	3. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners	Dewan Komisaris telah melakukan penilaian menggunakan pendekatan kinerja Dewan Komisaris secara Kolektif Kolegial. The Board of Commissioners has conducted an assessment using the Collective Collegial approach to the Board of Commissioners' performance.	Terpenuhi Fulfilled
		4. Kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed through the Public Company Annual Report.	Dewan Komisaris telah mengungkapkan kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris sebagaimana dimuat pada Laporan Tahunan ini. The Board of Commissioners has disclosed the Board of Commissioners' performance assessment policy as stated in this Annual Report.	Terpenuhi Fulfilled
		5. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy regarding the member's resignation if involved in financial crimes.	Dewan Komisaris memiliki kebijakan pengunduran diri dalam hal terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana dimuat pada Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a resignation policy in the event of involvement in financial crimes as stated in the Articles of Association and Work Guidelines of the Board of Commissioners.	Terpenuhi Fulfilled
		6. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function shall formulate a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors.	Dewan Komisaris telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Kebijakan Suksesi anggota Direksi dijalankan dengan mengedepankan pada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. The Board of Commissioners has a Nomination and Remuneration Committee. The Board of Directors' Succession Policy is implemented by prioritizing POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Articles of Association and applicable laws and regulations.	Terpenuhi Fulfilled
III	**Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi** **Aspect 3: Functions and Roles of the Board of Directors**			
	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principle 5 Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors.	1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. Determination of the number of members of the Board of Directors considers the condition of the Public Company and the effectiveness in making decisions.	Penentuan jumlah Direksi Perusahaan mempertimbangkan kondisi perusahaan. Penentuan Direksi mengacu kepada Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, per 31 Desember 2024, Perusahaan memiliki 5 anggota Direksi. The determination of the number of the Company's Directors considers the company's condition. The determination of the Board of Directors refers to the Articles of Association and applicable laws and regulations, as of December 31, 2024, the Company has 5 members of the Board of Directors.	Terpenuhi Fulfilled
		2. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of the members of the Board of Directors considers the diversity of expertise, knowledge, and experience required.	Penentuan Direksi Perusahaan telah mempertimbangkan faktor keberagamaan yaitu diantaranya keahlian, pengetahuan dan pengalaman. Hal ini telah mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar, Pedoman Kerja Direksi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The determination of the Company's Board of Directors has considered religious factors, including expertise, knowledge, and experience. This has referred to the provisions of the Articles of Association, the Board of Directors' Work Guidelines and the provisions of applicable laws and regulations.	Terpenuhi Fulfilled
		3. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have the expertise and/or knowledge in accounting.	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perusahaan yang diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 05 April 2021 dan menjabat sampai dengan sekarang memiliki kemampuan di bidang keuangan dan akuntansi. The Finance and Corporate Risk Management Director who was appointed at the Annual GMS for the 2020 Financial Year on April 5, 2021 and has served until now has skills in the fields of finance and accounting.	Terpenuhi Fulfilled

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendations	Penjelasan Penerapan di PTBA Implementation in PTBA	Status Status
	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6 Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.	4. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self- assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.	Direksi telah memiliki kebijakan *self assessment* untuk mengukur *Key Performance Indicator* masing-masing anggota Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to measure the Key Performance Indicators of each member of the Board of Directors.	Terpenuhi Fulfilled
		5. Kebijakan penilaian sendir untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed through the public Company's annual report.	Kebijakan penilaian dari Direksi diungkapkan pada Laporan Tahunan sebagaimana pada bab tata kelola. The Board of Directors' assessment policy is disclosed in the Annual Report as in the governance chapter.	Terpenuhi Fulfilled
		6. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy regarding the member's resignation if they are involved in financial crimes.	Direksi memiliki kebijakan pengunduran diri dalam hal terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana dimuat pada Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Direksi. The Board of Directors has a resignation policy in the event of involvement in financial crimes as stated in the Articles of Association and the Board of Directors' Work Guidelines.	Terpenuhi Fulfilled
IV	**Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan** **Aspect 4: Stakeholder Participation**			
	Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7 Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation.	1. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. The Public Company has the policy to prevent insider trading.	Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait dengan transaksi orang dalam sebagaimana keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.250G/0100/2023 dan No.15/ SK/PTBA-DEKOM/ XII/2023 tentang Pedoman Kebijakan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*). The Company has a policy related to insider transactions as stipulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No. 250G/0100/2023 and No. 15/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 concerning the Insider Trading Policy Guidelines.	Terpenuhi Fulfilled
		2. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti-fraud*. The Public Company has an anti-corruption and anti-fraud policy.	PTBA telah memiliki beberapa pedoman yang berkaitan dengan anti korupsi dan anti *fraud* yang dimuat pada: 1. *Code of Conduct;* 2. Pedoman Pengendalian Gratifikasi; 3. Pedoman Sistem Anti Penyuapan. PTBA has several guidelines related to anti-corruption and anti-fraud which are contained in: 1. Code of Conduct; 2. Gratification Control Guidelines; 3. Anti-Bribery System Guidelines.	Terpenuhi Fulfilled
		4. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. The Public Company has a policy regarding the selection and capacity building of suppliers or vendors.	Perusahaan telah memiliki kebijakan seleksi dan peningkatan pemasok sebagaimana dimuat pada Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Bukit Asam Tbk No. 143/0100/2024. The Company has a supplier selection and improvement policy as stated in the Procurement Guidelines for Goods and Services of PT Bukit Asam Tbk No. 143/0100/2024.	Terpenuhi Fulfilled
		5. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. The Public Company has a policy regarding the fulfillment of creditors' rights.	Perusahaan telah mengatur hubungan dengan mitra kerja Perusahaan dalam *Code of Conduct* yang menjamin pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kontrak yang ada dengan Perusahaan. The Company has regulated relations with the Company's business partners in a Code of Conduct that guarantees the fulfillment of rights and obligations in accordance with existing contracts with the Company.	Terpenuhi Fulfilled
		6. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. Public Company has a whistleblowing system policy.	Perusahaan telah memiliki kebijakan *Whistleblowing* (WBS) dan untuk sistem pelaporan terkait WBS telah terintegrasi dalam media perusahaan melalui situs web perusahaan. The company has a Whistleblowing Policy (WBS) and the reporting system related to WBS has been integrated into the company media via the company website.	Terpenuhi Fulfilled

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendations	Penjelasan Penerapan di PTBA Implementation in PTBA	Status Status
		7. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. The Public Company has a policy of providing long-term incentives to the Board of Directors and employees.	Bahwa berdasarkan Keputusan RUPS Tahun Buku 2023 yang mendelegasikan kewenangan penetapan gaji dan tunjangan Direksi kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna telah menetapkan asuransi purna jabatan kepada Direksi Perusahaan. Dan untuk karyawan telah diberikan berbagai insentif jangka panjang yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama dan Keputusan Direksi terkait. Based on the Resolution of the 2023 Financial Year GMS which delegates the authority to determine the salaries and allowances of the Board of Directors to the Board of Commissioners by first obtaining the approval of PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the attorney of the Series A Dwiwarna Shareholder has determined post-employment insurance for the Company's Directors. And for employees, various long-term incentives have been given based on the Joint Work Agreement and related Board of Directors' Decisions.	Terpenuhi Fulfilled
V	**Aspek 5: Keterbukaan Informasi** **Aspect 5: Information Disclosure**			
	Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Principle 8 Improving the Implementation of Information Disclosure.	1. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. The Public Company utilizes information technology more broadly than the Website as a medium for information disclosure.	Perusahaan telah memanfaatkan teknologi informasi untuk keterbukaan informasi di antaranya situs web perusahaan, e-mail, Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube. The Company have utilized information technology for information disclosure including company websites, e-mail, Twitter, Facebook, Instagram, and YouTube.	Terpenuhi Fulfilled
		2. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Public Company's Annual Report discloses the ultimate beneficial owner in the Public Company's share ownership at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the ultimate beneficial owner in the Public Company's share ownership through the significant and controlling shareholders.	Dalam Laporan Tahunan Perusahaan dan website Perusahaan telah diungkapkan keterbukaan terkait informasi struktur pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5% dan pemegang saham utama Perusahaan. In the Company's Annual Report and the Company's website, transparency has been disclosed regarding information on the shareholder structure with ownership above 5% and the Company's major shareholders.	Terpenuhi Fulfilled

Penilaian GCG Berdasarkan *Asean Corporate Governance Scorecard* (ACGS)

Dalam rangka meningkatkan standar dan praktik tata kelola, Perseroan melakukan penilaian terhadap implementasi GCG dengan menggunakan standar *Asean Corporate Governance Scorecard* (ACGS). ACGS merupakan salah satu inisiatif dari Forum Pasar Modal ASEAN (*ASEAN Capital Market Forum*/ACMF) dalam rangka integrasi pasar modal negara-negara anggota Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN). Negara-negara yang berpartisipasi dalam ACGS ini adalah Indonesia, Singapore, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Inisiatif ini dilakukan guna mendorong perusahaan-perusahaan terbuka di

GCG Appraisal Based on Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)

In order to improve governance standards and practices, the Company conducted an assessment of GCG implementation using the Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) standard. ACGS is one of the initiatives of the ASEAN Capital Market Forum (ACMF) in order to integrate the capital markets of the member countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). The countries participating in ACGS are Indonesia, Singapore, Thailand, Malaysia, the Philippines, and Vietnam. This initiative was carried out to encourage public companies in ASEAN to strive to strengthen the

ASEAN untuk berupaya memperkuat kerangka peraturan perundang-undangan berkenaan dengan praktik GCG, serta memperkuat sistem *Corporate Governance* dengan mengadopsi prinsip-prinsip GCG menurut ACGS.

Pada tahun 2024, PTBA telah melaksanakan penilaian implementasi GCG dengan menggunakan standar ACGS, yang dilakukan oleh RSM Indonesia. Penilaian didasarkan pada informasi publik , terutama pada laporan tahunan tahun serta *website* Perseroan.

Penilaian ACGS memiliki memiliki 4 (empat) aspek yang dikelompokkan dalam 2 (dua) Level sebagai berikut:
1. Level 1 (standar minimum yang diharapkan):
   a. *Rights and Equitable Treatment of Shareholders*
   b. *Sustainability and Resilience*
   c. *Disclosure & Transparency*
   d. *Responsibilities of the Board*
2. Level 2 (melebihi standar minimum):
   a. Bonus
   b. Penalti

Hasil Penilaian

Pada tahun 2024, PTBA melakukan penilaian GCG berdasarkan parameter ACGS untuk pertama kalinya.

Berdasarkan laporan penilaian dengan menggunakan standar ACGS yang dikeluarkan oleh RSM Indonesia, total skor Perseroan berdasarkan parameter ACGS di tahun 2024 adalah sebesar 79,06% dengan rincian skor sebagai berikut:

regulatory framework regarding GCG practices, as well as to strengthen the Corporate Governance system by adopting GCG principles according to ACGS.

In 2024, PTBA conducted an assessment of GCG implementation using the ACGS standard, which was carried out by RSM Indonesia. The assessment is based on public information, especially in the annual report and the Company's website.

The ACGS assessment has 4 (four) aspects grouped into 2 (two) Levels as follows:
1. Level 1 (the minimum standard expected):
   a. Rights and Equitable Treatment of Shareholders
   b. Sustainability and Resilience
   c. Disclosure & Transparency
   d. Responsibilities of the Board
2. Level 2, (exceeding the minimum standard):
   a. Bonuses
   b. Penalties

Assessment Results

In 2024, PTBA conducted a GCG assessment based on ACGS parameters for the first time.

Based on the assessment report using the ACGS standard issued by RSM Indonesia, the Company's total score based on the ACGS parameters in 2024 was 79,06% with the following score details:

Aspek ACGS ACGS Aspect	**Jumlah Kriteria** Number of Criteria	**Praktik Pengungkapan** Disclosure Practice			
		N/A	**Diterapkan** Applied	**Belum Diterapkan** Not yet Applied	**% Diterapkan** Applied
Level 1 – Standar Minimum Yang Diharapkan Expected Minimum Standard					
Bagian A – Hak dan Perlakuan Setara untuk Pemegang Saham Part A – Rights and Equitable Treatment of Shareholders	30	2	22	6	78,57%
Bagian B – Keberlanjutan dan Ketahanan Part B – Sustainability and Resilience	22	0	18	4	81,82%
Bagian C – Keterbukaan dan Transparasi Part C – Disclosure and Transparency	34	0	30	4	88,24%
Bagian D – Tanggung Jawab Dewan Part D – Responsibility of the Board	63	0	51	12	80,95%
Level 2 – Melebihi Standar Minimum Exceeding Minimum Standard					
Bagian - Bonus Part – Bonus	18	0	6	12	33,33%
Bagian - Penalti Part – Penalty	26	0	24	2	92,30%
Jumlah Total	**193**	**2**	**151**	**40**	**79,06%**

Rekomendasi Berdasarkan Hasil Penilaian

Penilaian yang telah dilakukan menghasilkan beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti sebagai bentuk *improvement* guna meningkatkan implementasi *Corporate Governance* di Perseroan. Rekomendasi tersebut sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Recommendation Based on Assessment Result

The assessment that has been conducted, resulted in several recommendations that must be followed up as a form of improvement of the Company in order to improve the implementation of Corporate Governance in the Company. The recommendations are as explained in the following table.

No	Kriteria Criteria	Rekomendasi Recommendation
TINGKAT 1 **LEVEL 1**		
Bagian A – Hak dan Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham Part A – Rights and Equitable Treatment of Shareholders		
1	A.2.1 Apakah pemegang saham memiliki kesempatan, dibuktikan dengan agenda rapat, untuk menyetujui remunerasi (biaya, tunjangan, manfaat dalam bentuk barang dan tunjangan lainnya) atau kenaikan remunerasi untuk Direktur non-eksekutif/Komisaris? A.2.1 Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda item, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive Directors/Commissioners?	Memastikan Perusahaan untuk memberikan hak kepada seluruh Pemegang Saham untuk dapat menyetujui remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Ensure the Company grants the right to all Shareholders to approve the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners.
2	A.2.2 Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham nonpengendali untuk mencalonkan kandidat untuk dewan Direksi/ Komisaris? A.2.2 Does the company provide noncontrolling shareholders a right to nominate candidates for board of Directors/Commissioners?	Memastikan Perusahaan untuk memberikan hak kepada Pemegang Saham Minoritas, dengan batasan tertentu, untuk dapat menominasikan calon Direksi dan/atau Dewan Komisaris Ensure the Company grants the right to Minority Shareholders, with certain limitations, to nominate candidates for the Board of Directors and/or Board of Commissioners
3	A.6.4 Apakah auditor yang akan diangkat/diangkat kembali telah diidentifikasi dengan jelas? A.6.4 Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified?	Memastikan Perusahaan mengungkapkan pada Pemanggilan RUPS terkait profil Kantor Akuntan Publik yang akan ditetapkan pada RUPS. Ensure the Company discloses the profile of the Public Accounting Firm to be determined at the GMS in the Invitation to the GMS.
4	A.7.1 Apakah Direktur/Komisaris diharuskan melaporkan transaksi mereka dalam saham perusahaan dalam waktu 3 hari kerja? A.7.1 Are the Directors/Commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days?	Memastikan bahwa penulisan atas pengungkapan informasi pada Piagam Direksi telah sesuai. Ensure the writing of the disclosure of information in the Board of Directors Charter is in accordance.
5	A.8.3 Apakah perusahaan memiliki kebijakan tentang pinjaman kepada Direktur dan komisaris yang melarang praktik ini atau memastikan bahwa pinjaman tersebut dilakukan secara wajar dan pada tingkat pasar? A.8.3 Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates?	Memastikan Perusahaan mengungkapkan kebijakan mengenai pinjaman yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang dilakukan secara wajar dan pada harga pasar. Ensure the Company discloses policies regarding loans provided to the Board of Directors and Board of Commissioners are carried out fairly and at market prices.
6	A.9.2 Dalam kasus transaksi pihak terkait yang memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan dibuat oleh pemegang saham yang tidak berkepentingan? A.9.2 In case of related party transactions requiring shareholders' approval, is the decision made by disinterested shareholders?	Memastikan Perusahaan mengungkapkan kebijakan mengenai persetujuan/ voting dari Pemegang Saham terkait transaksi pihak berelasi.
Bagian B – Keberlanjutan dan Ketahanan Part B – Sustainability and Resilience		
1	B.1.6 Apakah perusahaan mengonfirmasi bahwa Laporan/Pelaporan Keberlanjutannya ditinjau dan/atau disetujui oleh Dewan atau Komite Dewan? B.1.6 Does the company confirm that its Sustainability Report / Reporting is reviewed and /or approved by the Board or Board Committee?	Memastikan Perusahaan mengungkapkan praktik terkait proses reviu Laporan Keberlanjutan secara internal oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris. Ensure the Company discloses policies regarding approval/voting from Shareholders regarding related party transactions.
2	B.2.2 Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik tentang masalah keberlanjutan yang penting bagi bisnis perusahaan? B.2.2 Does the company engage external stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?	Memastikan Perusahaan mengidentifikasi pemangku kepentingan eksternal ataupun internal dengan jelas dan mengungkapkan informasi mengenai keterlibatan pemangku kepentingan Ensure the Company discloses practices related to the internal review process of the Sustainability Report by the Board of Directors and Board of Commissioners or the Board of Commissioners Committee.

No	Kriteria Criteria	Rekomendasi Recommendation
3	B.3.1 Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa dewan meninjau setiap tahun mengenai struktur modal dan utang perusahaan sesuai dengan tujuan strategisnya dan selera risiko terkait? B.3.1 Does the company disclose that the board reviews on an annual basis that the company's capital and debt structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite?	Memastikan Perusahaan mengungkapkan informasi bahwa pada tahun berjalan Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan peninjauan kesesuaian struktur modal dan utang Perusahaan dengan tujuan strategis dan selera risiko dari Perusahaan. Ensure the Company discloses information that in the current year the Board of Commissioners and Board of Directors have reviewed the Company's capital and debt structure in accordance with the Company's strategic objectives and risk appetite.
4	B.4.6 Bagaimana hak-hak kreditor dilindungi? B.4.6 How creditors' rights are safeguarded?	Memastikan Perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik terkait upaya Perusahaan dalam melindungi hak-hak kreditur. Ensure the Company discloses policies and practices related to the Company's efforts to protect creditors' rights.
Bagian C – Pengungkapan & Transparansi Part C – Disclosure & Transparency		
1	C.2.5 Rincian biografi (setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman relevan, dan jabatan Direktur lain dari perusahaan yang terdaftar) dari semua Direktur/Komisaris C.2.5 Biographical details (at least age, academic qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of all Directors/Commissioners	Memastikan Perusahaan mengungkapkan informasi terdapat atau tidaknya rangkap jabatan dari Dewan Komisaris dan Direksi pada Perusahaan terbuka lainnya pada profil Dewan Komisaris dan Direksi yang masih menjabat. Apabila ada, maka perlu disebutkan masing-masing nama Perusahaan terbuka lainnya. Apabila tidak ada, maka juga perlu diungkapkan. Ensure the Company discloses information on whether the Board of Commissioners and Board of Directors hold concurrent positions in other public companies in the profiles of the Board of Commissioners and Board of Directors who are still in office. If there are any, then the names of the other public companies must be mentioned. If not, then this must also be disclosed.
2	C.3.1 Apakah ada pengungkapan struktur biaya untuk Direktur/Komisaris non-eksekutif? C.3.1 Is there disclosure of the fee structure for non-executive Directors/Commissioners?	Memastikan Perusahaan mengungkapkan informasi terkait struktur remunerasi untuk Dewan Komisaris seperti remunerasi atas rangkap jabatan menjadi ketua komite, anggota komite, tingkat kehadiran dan lain sebagainya. Ensure the Company discloses information related to the remuneration structure for the Board of Commissioners, such as remuneration for concurrent positions as committee chair, committee member, attendance level, and others.
3	C.3.3 Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan dalam bentuk barang dan honorarium lainnya) (yaitu penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang serta ukuran kinerja) untuk Direktur eksekutif dan CEO? C.3.3 Does the company disclose its remuneration (fees, allowances, benefit- in-kind and other emoluments) policy/practices (i.e. the use of short term and long term incentives and performance measures) for its executive Directors and CEO?	Memastikan Perusahaan mengungkapkan remunerasi jangka panjang dan jangka panjang, serta ukuran kinerja yang diberikan kepada Direksi dan Direktur Utama. Ensure the Company discloses long-term and long-term remuneration, as well as performance measures given to the Board of Directors and President Director.
4	C.4.2 Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan, sifat, dan nilai untuk setiap RPT material? C.4.2 Does the company disclose the name, relationship, nature and value for each material RPTs?	Memastikan Perusahaan mengungkapkan nilai untuk setiap Transaksi Pihak Berelasi (RPT) material. Ensure the Company discloses the value of each material Related Party Transaction (RPT).
Bagian D - Tanggung Jawab Dewan Direksi Part D - Responsibility of the Board		
1	D.2.6 Apakah perusahaan telah menetapkan batas lima kursi dewan yang dapat dipegang oleh seorang Direktur/Komisaris independen/non-eksekutif secara bersamaan? D.2.6 Has the company set a limit of five board seats that an individual independent/ non-executive Director/Commissioner may hold simultaneously?	Memastikan Perusahaan untuk tidak mengungkapkan pengecualian bagi Dewan Komisaris untuk dapat merangkap jabatan sebagai Direktur pada BUMN sebagai Pemegang Saham seri B terbanyak. Ensure the Company does not disclose exceptions for the Board of Commissioners to be able to hold concurrent positions as Directors in SOEs as the Holder of the most Series B Shares.
2	D.2.12 Apakah kehadiran rapat Komite Nominasi diungkapkan dan jika ya, apakah Komite Nominasi bertemu setidaknya dua kali selama tahun tersebut? D.2.12 Is the meeting attendance of the Nominating Committee disclosed and if so, did the Nominating Committee meet at least twice during the year?	Memastikan Perusahaan mengungkapkan agenda dan tingkat kehadiran Komite yang membahas terkait nominasi. Ensure the Company discloses the agenda and attendance level of the Committee discussing nominations.
3	D.2.17 Apakah kehadiran rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika ya, apakah Komite Remunerasi bertemu setidaknya dua kali selama tahun tersebut? D.2.17 Is the meeting attendance of the Remuneration Committee disclosed and, if so, did the Remuneration Committee meet at least twice during the year?	Memastikan Perusahaan mengungkapkan agenda dan tingkat kehadiran Komite yang membahas terkait remunerasi. Ensure the Company discloses the agenda and attendance level of the Committee discussing remuneration.

No	Kriteria Criteria	Rekomendasi Recommendation
4	D.3.4 Apakah perusahaan mensyaratkan kuorum minimal setidaknya 2/3 (dua per tiga) untuk keputusan dewan? D.3.4 Does the company require a minimum quorum of at least 2/3 (two thirds) for board decisions?	Memastikan Perusahaan menetapkan kuorum minimal kehadiran setidaknya 2/3 (dua per tiga) untuk keputusan Direksi dan Dewan Komisaris. Ensure the Company sets a minimum quorum of at least 2/3 (two thirds) for decisions of the Board of Directors and Board of Commissioners.
5	D.3.6 Apakah dokumen rapat dewan direksi/komisaris diberikan kepada dewan setidaknya lima hari kerja sebelum rapat dewan? D.3.6 Are board papers for board of directors/ commissioners meetings provided to the board at least five business days in advance of the board meeting?	Memastikan Perusahaan mengungkapkan ketentuan dan menyampaikan bahan rapat untuk rapat Direksi dan Dewan Komisaris minimal 5 (lima) hari kerja sebelum rapat Direksi atau Dewan Komisaris berlangsung. Ensure the Company discloses the provisions and submits meeting materials for the Board of Directors and Board of Commissioners meetings at least 5 (five) working days before the Board of Directors or Board of Commissioners meeting takes place.
6	D.3.10 Apakah perusahaan menjelaskan proses yang diikuti dalam menunjuk Direktur/Komisaris baru? D.3.10 Did the company describe the process followed in appointing new Directors/Commissioners?	Memastikan Perusahaan mengungkapkan proses yang digunakan dalam penunjukan Direktur baru yang di dalamnya memuat tata cara pencarian calon Direktur baru dan penilaian kesesuaian calon Direktur dilakukan. Ensure the Company discloses the process used in appointing new Directors, which includes the recruitment procedures for new Director candidates and assessing the suitability of Director candidates.
7	D.3.11 Apakah semua Direktur/Komisaris dapat dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan tercatat di negara-negara yang undang-undangnya menetapkan masa jabatan masing-masing 5 tahun? D.3.11 Are all Directors/Commissioners subject to re-election every 3 years; or 5 years for listed companies in countries whose legislation prescribes a term of 5 years each? Masa jabatan lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011 The five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	Memastikan Perusahaan mengungkapkan informasi bahwa pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Ensuring that the Company discloses information, that the appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners occurs every 3 (three) years.
8	D.3.16 Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan dari Komite Audit? D.3.16 Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee?	Memastikan Perusahaan mengungkapkan informasi terkait tanggung jawab Komite Audit dalam memberikan rekomendasi atas pengangkatan dan pemberhentian Auditor Internal. Ensure the Company discloses information related to the Audit Committee's responsibilities in providing recommendations on the appointment and dismissal of Internal Auditors.
9	D.3.18 Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan mengungkapkan bahwa dewan direksi/komisaris telah melakukan peninjauan terhadap pengendalian material perusahaan (termasuk pengendalian operasional, keuangan, dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko? D.3.18 Does the Annual Report/Annual CG Report disclose that the board of directors/commissioners has conducted a review of the company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems?	Memastikan Perusahaan mengungkapkan informasi bahwa Direksi/ Dewan Komisaris melakukan peninjauan terhadap pengendalian material Perusahaan (termasuk pengendalian operasional, keuangan dan kepatuhan) serta sistem manajemen risiko pada tahun 2023. Ensure the Company discloses information regarding the Board of Directors/Board of Commissioners conducted a review of the Company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management system in 2023.
10	D.4.2 Apakah ketua merupakan Direktur/Komisaris independen? D.4.2 Is the chairman an independent Director/Commissioner?	Memastikan Perusahaan memiliki Komisaris Utama yang independen. Ensure the Company has an independent President Commissioner.
11	D.4.5 Jika Ketua tidak independen, apakah Dewan telah menunjuk seorang Direktur Utama/Senior Independen dan apakah perannya telah ditetapkan? D.4.5 If the Chairman is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director and has his/her role been defined?	Memastikan Perusahaan menunjuk Komisaris Independen Senior dan menentukan perannya (apabila Komisaris Utama Perusahaan bukan merupakan Komisaris Independen). Ensure the Company appoints a Senior Independent Commissioner and determines his/her role (if the Company's President Commissioner is not an Independent Commissioner).

No	Kriteria Criteria	Rekomendasi Recommendation
12	D.5.4 Apakah dewan direksi/komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap CEO/Managing Director/Presiden? D.5.4 Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President?	Memastikan Perusahaan mengungkapkan informasi bahwa penilaian kinerja tahunan terhadap Direktur Utama telah dilaksanakan pada periode tahun buku. Ensure the Company appoints a Senior Independent Commissioner and determines his/her role (if the Company's President Commissioner is not an Independent Commissioner).
TINGKAT 2 LEVEL 2		
Bonus		
1	(B)A.2.1 Apakah perusahaan merilis pemberitahuan Rapat Umum Tahunan (dengan agenda terperinci dan surat edaran penjelasan), sebagaimana diumumkan kepada Bursa, setidaknya 28 hari sebelum tanggal rapat? (B)A.2.1 Does the company release its notice of AGM (with detailed agendas and explanatory circulars), as announced to the Exchange, at least 28 days before the date of the meeting?	Memastikan Perusahaan mempublikasikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan setidaknya 28 hari sebelum RUPST. Ensure the Company publishes the Notice of the Annual General Meeting of Shareholders at least 28 days before the AGM.
2	(B)B.1.1 Apakah perusahaan mengungkapkan cara mengelola risiko dan peluang terkait iklim? (B)B.1.1 Does the company disclose how it manages climate-related risks and opportunities?	Memastikan Perusahaan mengungkapkan informasi terkait pengelolaan risiko dalam proses tata kelola, strategi, metrik, dan target dalam Laporan Keberlanjutan Perusahaan. Ensure the Company discloses information related to risk management in the governance process, strategies, metrics, and targets in the Company's Sustainability Report.
3	(B)B.1.3 Apakah perusahaan mengungkapkan saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana perusahaan menanggapi masalah ESG dari pemangku kepentingan? (B)B.1.3 Does the company disclose the engagement channel with stakeholder groups and how the company responds to stakeholders' ESG concern?	Memastikan Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai bagaimana respon Perusahaan dalam menanggapi kekhawatiran ESG dari para pemangku kepentingan. Ensure the Company discloses information related to risk management in the governance process, strategies, metrics, and targets in the Company's Sustainability Report.
4	(B)B.1.5 Apakah perusahaan mengungkapkan pengawasan dewan direksi/komisaris terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan? (B)B.1.5 Does the company disclose board of directors/commissioners' oversight of sustainability-related risks and opportunities?	Memastikan Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai proses, keaktifan Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan bagaimana Direksi dan Dewan Komisaris mengawasi kemajuan tujuan dan target terkait keberlanjutan. Ensure the Company discloses information regarding the process, the activeness of the Board of Directors and Board of Commissioners in conducting supervision, and on the Board of Directors and Board of Commissioners monitoring the progress of sustainability-related goals and targets.
5	(B)B.1.6 Apakah perusahaan mengungkapkan hubungan antara remunerasi Direktur eksekutif dan manajemen senior serta kinerja keberlanjutan untuk tahun sebelumnya? (B)B.1.6 Does the company disclose the linkage between executive Directors and senior management remuneration and sustainability performance for the previous year?	Memastikan Perusahaan mengungkapkan keterkaitan yang lebih rinci antara kriteria kinerja dalam kebijakan remunerasi Direksi dengan kinerja keberlanjutan Perusahaan pada tahun sebelumnya. Ensure the Company discloses a more detailed link between the performance criteria in the Board of Directors' remuneration policy and the Company's sustainability performance in the previous year.
6	(B)C.1.1 Apakah laporan/pernyataan keuangan tahunan yang telah diaudit dirilis dalam waktu 60 hari sejak akhir tahun keuangan? (B)C.1.1 Are the audited annual financial report /statement released within 60 days from the financial year end?	Memastikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan dirilis dalam waktu 60 hari sejak akhir tahun buku. Ensure the Company's Annual Financial Report is released within 60 days of the end of the fiscal year.
7	(B)D.1.1 Apakah Perusahaan memiliki setidaknya 1 (satu) Komisaris Independen wanita. (B)D.1.1 Does the company have at least one female independent director/commissioner?	Memastikan Perusahaan memiliki setidaknya 1 (satu) Komisaris Independen wanita. Ensure the Company has at least 1 (one) female Independent Commissioner.
8	(B)D.1.2 Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan mengungkapkan tujuan yang terukur untuk menerapkan keberagaman dewan direksi dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuannya? (B)D.1.2 Does the company have a policy and disclose measurable objectives for implementing its board diversity and report on progress in achieving its objectives?	Memastikan Perusahaan mengungkapkan kebijakan, target yang dapat diukur dan progres dalam mencapai target tersebut dalam hal keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris. Ensure the Company discloses policies, measurable targets and progress in achieving these targets in terms of diversity of the Board of Directors and Board of Commissioners.
9	(B)D.2.1 Apakah Komite Nominasi terdiri sepenuhnya dari Direktur/ Komisaris independen? (B)D.2.1 Is the Nominating Committee comprise entirely of independent Directors/Commissioners?	Memastikan Perusahaan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang seluruh anggotanya adalah Komisaris Independen atau pihak eksternal yang memenuhi kriteria independen. Ensure the Company has a Nomination and Remuneration Committee whose members are all Independent Commissioners or external parties who meet the criteria for independence.

No	Kriteria Criteria	Rekomendasi Recommendation
10	(B)D.2.2 Apakah Komite Nominasi melakukan proses identifikasi kualitas Direktur yang sesuai dengan arahan strategis perusahaan? (B)D.2.2 Does the Nominating Committee undertake the process of identifying the quality of directors aligned with the company's strategic directions?	Memastikan Perusahaan mengungkapkan informasi terkait praktik yang telah dilakukan oleh Komite Nominasi dalam melakukan proses identifikasi kualitas Direksi, yang meliputi proses mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan persyaratan, serta mengidentifikasi dan mengevaluasi kesesuaian kandidat. Ensure the Company discloses information related to the practices carried out by the Nomination Committee in conducting the process of identifying the quality of the Board of Directors, which includes the process of identifying needs, determining requirements, and identifying and evaluating the suitability of candidates.
11	(B)D.3.1 Apakah perusahaan menggunakan firma perekrutan profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya (seperti basis data Direktur yang dibuat oleh Direktur atau badan pemegang saham) saat mencari kandidat untuk dewan Direksi/Komisaris? (B)D.3.1 Does the company use professional search firms or other external sources of candidates (such as Director databases set up by Director or shareholder bodies) when searching for candidates to the board of Directors/Commissioners?	Memastikan Perusahaan menggunakan professional search firms atau external sources lainnya dalam mencari kandidat untuk Direksi/ Dewan Komisaris. Ensure the Company uses professional recruiting firms or other external sources in seeking candidates for the Board of Directors/ Board of Commissioners.
12	(B)D4.1 Apakah Direktur/Komisaris non-eksekutif independen membentuk lebih dari 50% dewan Direksi/Komisaris untuk perusahaan dengan ketua independen? (B)D4.1 Do independent non-executive Directors/Commissioners make up more than 50% of the board of Directors/Commissioners for a company with independent chairman?	Memastikan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan lebih dari 50% Komisaris Independen dan memiliki Komisaris Utama yang Independen. Ensure the composition of the Company's Board of Commissioners is more than 50% Independent Commissioners and has an Independent President Commissioner.
Penalti Penalty		
1	(P)A.3.2 Apakah Ketua Dewan dan Ketua semua Komite Dewan dan CEO tidak hadir dalam Rapat Umum terakhir? (P)A.3.2 Was the Chairman of the Board and the Chairmen of all Board Committees and the CEO absent from the most recent General Meeting?	Memastikan Perusahaan mengungkapkan informasi kehadiran Ketua dari semua Komite Dewan dalam Berita Acara RUPS. Ensure the Company discloses information on the attendance of the Chairperson of all Board Committees in the Minutes of the GMS.
2	(P)D.4.2 Apakah Direktur/Komisaris non-eksekutif independen menerima opsi, saham kinerja, atau bonus? (P)D.4.2 Do independent non-executive Directors/ Commissioners receive options, performance shares or bonuses?	Memastikan anggota Dewan Komisaris tidak menerima bonus. Ensure members of the Board of Commissioners do not receive bonuses.

Peningkatan Kualitas Implementasi GCG

Improving the Quality of GCG Implementation

Inisiatif Strategis Penguatan Penerapan GCG

Perusahaan menyadari bahwa peningkatan kualitas penerapan GCG yang efektif secara berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu, Perusahaan senantiasa melakukan monitoring pelaporan pemenuhan GCG secara berkala, melakukan reviu atas penerapan GCG, serta memfasilitasi penilaian (*assessment*) implementasi GCG yang dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen untuk memastikan sejauh mana kualitas penerapan praktik GCG yang disertai dengan transformasi yang dilakukan.

Tujuan dilakukannya kegiatan monitoring agar Perusahaan dapat melengkapi seluruh *soft structure* yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan praktik terbaik penerapan GCG, serta melakukan kajian bagi penyempurnaan yang sudah ada demi meningkatkan penerapan GCG.

Adapun inisiatif strategis penguatan GCG di Bukit Asam di sepanjang tahun 2024, antara lain:

1. Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 91,04 sebagai Perusahaan "Sangat Terpercaya" (*Most Trusted Company*) dan menjadi perusahaan dengan nilai tertinggi dalam kelompok Perusahaan Non Keuangan (Emiten, BUMN, BUMD).
2. Kolaborasi dengan Tim Pengembangan Budaya satuan kerja SDM Operasional terkait dengan penyelenggaraan Webinar dalam program BA Ring Ring Vol. 40 dengan tema meningkatkan Tata Kelola Perusahaan Yang Berkelanjutan: Peran GRC dalam Mitigasi Risiko *Fraud* dan Peningkatan Kepatuhan di Grup PTBA.
3. Melakukan penandatangan *Code of Conduct* secara elektronik melalui Aplikasi CISEA-GCG oleh seluruh pegawai.
4. Melakukan *assessment* dengan standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* untuk pertama kali

Strategic Initiative to Strengthen GCG Implementation

The Company realizes that improving the quality of effective GCG implementation in a sustainable manner is important. Therefore, Bukit Asam constantly monitors reports on GCG compliance on a regular basis, reviews GCG implementation, and facilitates GCG assessment conducted by independent assessors to ensure the quality of GCG implementation accompanied by transformations.

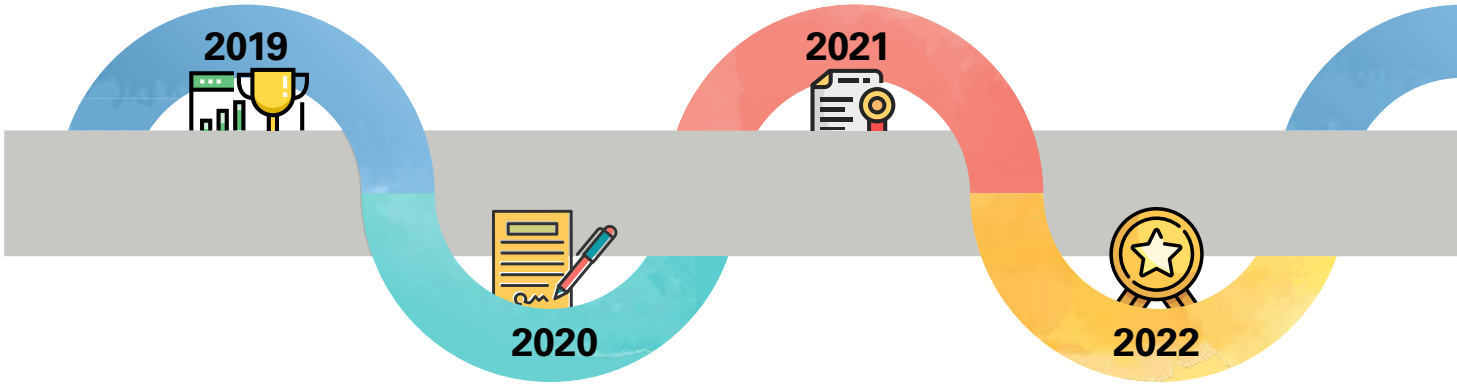
The purpose of conducting monitoring activities is to help the Company completing all soft structures in accordance with sapplicable regulations and best practices for implementing GCG, as well as conducting studies for existing improvements in order to improve GCG implementation.

Strategic initiatives to strengthen GCG at Bukit Asam throughout 2024 include:

1. Participating in the GCG implementation assessment by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) with a score of 91.04 as a "Most Trusted Company" and becoming the company with the highest value in the Non-Financial Company group (Issuers, SOEs, BUMD).
2. Collaborating with the Human Resources Operational Work Unit Culture Development Team regarding the implementation of the Webinar in the BA Ring Ring Vol. 40 program with the theme of improving Sustainable Corporate Governance: The Role of GRC in Mitigating Fraud Risk and Improving Compliance at PTBA Group.
3. Signing the Code of Conduct electronically through the CISEA-GCG Application by all employees.
4. Conducting an assessment with the ASEAN Corporate Governance Scorecard standard for the first time

Peta Jalan Tata Kelola
GCG Roadmap

1. Evaluasi penerapan GCG oleh Pihak Independen (PT Sinergi Daya Prima).
2. Penghargaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan Predikat *Most Trusted Company.*
3. Penyempurnaan *Board Manual* dan *Corporate Governance Policy.*
4. Evaluasi mandiri penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG)
1. *Evaluation of GCG implementation by Independent Parties (PT Sinergi Daya Prima).*
2. *Corporate Governance Perception Index Award (CGPI) with the Predicate of Most Trusted Company.*
3. *Refinement on Manual Board and Corporate Governance Policy.*
4. *Independent evaluation of the implementation of Good Corporate Governance (GCG)*



1. Penyusunan Pedoman Interaksi PTBA Holding dengan Perusahaan terkendali dan Perusahaan Afiliasi.
2. Penghargaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan Predikat *Most Trusted Company.*
3. Pembaharuan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran / *Whistleblowing System* (WBS).
4. *Certified* ISO 37001:2016.
5. Penandatangan pernyataan kepatuhan *Code of Conduct* oleh seluruh pegawai.
6. Evaluasi penerapan GCG oleh Pihak Independen (PT Sinergi Daya Prima).
7. Pemenuhan Parameter ESG berkolaborasi dengan *Carbon Disclosure Project* (CDP).
1. Preparation of PTBA Holding Interaction Guidelines with Controlled Companies and Affiliated Companies.
2. Corporate Governance Perception Index Award (CGPI) with the Predicate of Most Trusted Company.
3. Renewal of Violation Reporting System Guidelines/ Whistleblowing System (WBS).
4. ISO 37001:2016 Certified
5. The signing of the Code of Conduct compliance statement by all employees.
6. Evaluation of GCG implementation by Independent Parties (PT Sinergi Daya Prima).
7. ESG Parameter Fulfillment in collaboration with Carbon Disclosure Project (CDP).

1. Implementasi Pedoman Interaksi PTBA Holding dengan Perusahaan terkendali dan Perusahaan Afiliasi.
2. Penghargaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan Predikat *Most Trusted Company.*
3. Resertifikasi ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001.
4. Pelatihan *Governance Risk Compliance* PTBA Group Perwakilan Fungsi GRC di Grup Bukit Asam
5. Penyempurnaan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*).
6. Laporan Keterbukaan Pengelolaan perubahan iklim (CDP – *Climate Change*) dengan predikat C (*Awareness Level*).
7. Evaluasi mandiri penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
1. *Implementation of PTBA Holding Interaction Guidelines with Controlled Companies and Affiliated Companies*
2. *Corporate Governance Perception Index Award (CGPI) with the Predicate of Most Trusted Company.*
3. *ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 recertification.*
4. *PTBA Group Governance Risk Compliance Training – GRC Function Representative at PTBA Group.*
5. *Refinement on the Code of Conduct and Business Ethics (Code of Conduct).*
6. *Climate Change Management Disclosure Report (CDP – Climate Change) with the predicate C (Awareness Level).*
7. *Independent evaluation of the implementation of Good Corporate Governance (GCG).*

1. Penghargaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan Predikat *Most Trusted Company.*
2. Pembangunan *IT Security System* (ISO 27001).
3. *Launching* Aplikasi Cisea GCG.
4. Pelatihan *Governance Risk Compliance* PTBA Group Executive (BOD-1) dan Regular (GRC Officer) Class.
5. Evaluasi penerapan GCG oleh Pihak Independen (PT Sinergi Daya Prima).
6. Laporan Keterbukaan Pengelolaan perubahan iklim (CDP – *Climate Change*) dengan predikat C (*Awareness Level*).
1. Corporate Governance Perception Index Award (CGPI) with the Predicate of Most Trusted Company.
2. Development of IT Security System (ISO 27001).
3. Launching of Cisea GCG Application.
4. PTBA Group Governance Risk Compliance Training – Executive (BOD-1) and Regular (GRC Officer) Class.
5. Evaluation of GCG implementation by Independent Parties (PT Sinergi Daya Prima).
6. Climate Change Management Disclosure Report (CDP – Climate Change) with the predicate C (Awareness Level)

1. Penghargaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan Predikat *Most Trusted Company.*
2. Resertifikasi ISO 9001, ISO 1400, dan ISO 45001.
3. Evaluasi penerapan GCG oleh Pihak Independen.
4. Pelatihan *Governance Risk Compliance* PTBA Group.

1. *Corporate Governance Perception Index Award (CGPI) with the Predicate of Most Trusted Company.*
2. *ISO 9001, ISO 1400, and ISO 45001 recertification.*
3. *Evaluation of GCG implementation by Independent Parties.*
4. *PTBA Group Governance Risk Compliance Training*

2024

2023

1. Penghargaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan Predikat *Most Trusted Company.*
2. Sertifikasi IT *Security System* (ISO 27001).
3. Resertifikasi ISO 37001:2016.
4. Pelatihan *Governance Risk Compliance* PTBA Group.

1. Corporate Governance Perception Index Award (CGPI) with the Predicate of Most Trusted Company.
2. IT Security System Certification (ISO 27001).
3. ISO 37001:2016 recertification.
4. PTBA Group Governance Risk Compliance Training.

2025

1. Workshop GRC untuk seluruh Anak Afilisasi Perusahaan secara berkala.
2. Melaksanakan GCG Culture Survey ke seluruh pegawai PT Bukit Asam Tbk
3. Melakukan assessment dengan standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard*
4. Penghargaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan Predikat *Most Trusted Company.*

1. GRC Workshop for all Company Affiliates periodically.
2. Implementing GCG Culture Survey to all employees of PT Bukit Asam Tbk
3. Conducting assessment with ASEAN Corporate Governance Scorecard standard
4. Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award with Most Trusted Company Predicate.

Sosialisasi dan Internalisasi Prinsip-Prinsip GCG

PTBA secara berkala melaksanakan sosialisasi dan internalisasi prinsip-prinsip GCG secara berkesinambungan dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan GCG di lingkungan PTBA. Sosialisasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Sistem Manajemen dan Kinerja Perusahaan serta Satuan Kerja Manajemen Risiko, bekerja sama dengan unit kerja terkait lain, dan diaudit oleh satuan kerja Satuan Pengawasan Intern. Kegiatan sosialisasi dilakukan terhadap pihak internal maupun eksternal Perusahaan dengan fokus yang berbeda. Sosialisasi terhadap pihak internal menitikberatkan pada peningkatan pemahaman GCG dan mendorong timbulnya kesadaran serta kebutuhan untuk menerapkan GCG secara konsisten. Sedangkan, sosialisasi kepada pihak eksternal difokuskan untuk memberikan pemahaman terkait penerapan tata kelola di PTBA.

Sosialisasi dilakukan melalui metode tatap muka, seperti forum dan rapat-rapat internal, dan juga melalui saluran komunikasi internal seperti internet, *website* dan media sosial, dengan materi yang disosialisasikan berupa *Corporate Governance Policy* (CGP) PTBA, yang terdiri dari:

1. Corporate *Governance Policy* PTBA;
2. Pedoman Kerja Direksi;
3. Pedoman Kerja Dewan Komisaris;
4. Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (COC);
5. Pedoman Interaksi PTBA Holding Dengan Perusahaan Terkendali dan Perusahaan Afiliasi;
6. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System* (WBS);
7. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
8. Kebijakan Anti Gratifikasi.

Socialization and Internalization of GCG Principles

PTBA periodically organizes the socialization and internalization of GCG principles to provide an in-depth understanding of GCG implementation within PTBA. Bukit Asam carries out the stages of socialization and internalization of GCG principles on an ongoing basis. The socialization is carried out by the Corporate Management System and Risk Management Work Unit in collaboration with other related work units and GCG by Internal Audit Work Unit. Socialization activities are carried out to internal and external parties of the Company with different focus. Socialization to internal parties is focused on understanding GCG and raising awareness and the need to apply GCG consistently. Meanwhile, socialization to external parties aims to provide better understanding Understanding regarding the implementation of governance in PTBA.

The socialization is carried out through face-to-face method, such as internal forums and meetings, and internal communication channels such as intranet, website, and social media in the form of Corporate Governance Policy (CGP) PTBA consisted of:

1. PTBA's Corporate Governance Policy;
2. Board of Directors Work Guidelines;
3. Board of Commissioners Work Guidelines;
4. Code of Conduct (CoC);
5. PTBA Holding Interaction Guidelines with Controlled Companies and Affiliated Companies;
6. Guidelines for Violation Reporting System/ Whistleblowing System;
7. Guidelines for Anti-Bribery Management System;
8. Anti Gratification Policy.

Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham

Shareholders and General Meeting of Shareholders



Pemegang Saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perusahaan, sesuai Anggaran Dasar Perusahaan.

Jenis dan Hak Pemegang Saham

Perusahaan memiliki 2 (dua) klasifikasi saham, yaitu saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, setiap klasifikasi saham tersebut memiliki 1 (satu) suara pada setiap klasifikasinya atau dikenal dengan istilah *one share one vote*.

Saham Seri A Dwiwarna dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PTBA, saham ini tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saham Seri A Dwiwarna

Saham Seri A Dwiwarna merupakan saham dengan hak-hak istimewa/tertentu yang berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS Perseroan termasuk mengenai hal-hal sebagai berikut:
   a. persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Shareholders is an individual or legal entities who legally own Company shares, in accordance with the Company's Articles of Association.

Types and Rights of Shareholders

The Company has 2 (two) share classifications, namely Series A Dwiwarna shares and Series B shares. In accordance with the provisions of applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association, each share classification has 1 (one) vote for each classification or known as one share one vote.

Series A Dwiwarna shares are owned by the Republic of Indonesia and in accordance with the provisions of PTBA's Articles of Association, these shares cannot be transferred to anyone, unless otherwise specified in applicable laws and regulations.

Series A Dwiwarna Share

Series A Dwiwarna Shares are shares with special/certain rights based on the Company's Articles of Association, namely:

1. The right to approve in the GMS regarding the following matters:
   a. Approval of the appointment and dismissal of members of Board of Directors and Board of Commissioners;

b. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini;
c. Persetujuan perubahan struktur kepemilikan saham;
d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran, serta pengambilalihan Perseroan oleh perusahaan lain.

2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Perseroan;
3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;
4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan;
5. Hak untuk menetapkan pedoman/kebijakan strategis pada Perseroan dalam bidang sebagai berikut:
   a. Bidang akuntansi dan keuangan;
   b. Bidang pengembangan dan investasi;
   c. Bidang operasional dan pengendalian mutu;
   d. Bidang pemasaran dan komersial;
   e. Bidang informasi teknologi;
   f. Bidang pengadaan dan logistik;
   g. Bidang sumber daya manusia;
   h. Bidang tata kelola, manajemen risiko, dan pengawasan internal;
   i. Bidang hukum, kepatuhan, dan penanganan permasalahan hukum;
   j. Bidang kesehatan, keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial;
   k. Bidang penelitian dan inovasi terkait teknologi serta Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
   l. Bidang pengkajian peraturan perundangan dan kebijakan; dan/atau
   m. Bidang lainnya.
6. Hak untuk melakukan pemeriksaan/reviu, memberi masukan, meminta informasi, memberikan persetujuan, melakukan penetapan dan pemantauan pelaksanaan Kontrak Manajemen Direksi Perseroan, termasuk menetapkan indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang dilampirkan di dalamnya, sebagai syarat pengangkatan Direksi Perusahaan;
7. Hak untuk mengusulkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan;
8. Hak untuk mengoordinir, menyelenggarakan dan/atau mensinergikan fungsi untuk Perusahaan berdasarkan perjanjian dengan/kuasa dari Perusahaan pada bidang-bidang sebagaimana di atas;
9. Hak untuk melakukan sinergi pengawasan terhadap kegiatan operasional maupun strategis Perusahaan;
10. Hak melakukan pengendalian atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan atau kebijakan strategis dan operasional Perusahaan;
11. Hak untuk melakukan pemeriksaan/reviu memberi masukan, meminta informasi, dan menyetujui Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, rencana kerja lainnya, beserta perubahannya yang disampaikan oleh Dewan Komisaris Perusahaan; dan

b. Approval of amendments to the Articles of Association;
c. Approval of changes to the Shares Ownership structure;
d. Agreements regarding the merger, consolidation, separation, dissolution, and the Company's takeover by another Company.

2. The right to propose candidates for members of Board of Directors and Board of Commissioners;
3. The right to propose GMS agenda items
4. The right to request and access Company data and documents
5. The right to determine the Company's strategic guidelines in the following sectors:
   a. Accounting and Finance;
   b. Development and Investment;
   c. Operational and Quality Control;
   d. Marketing and Commercial;
   e. Information Technology;
   f. Procurement and Logistics;
   g. Human Capital;
   h. Risk Management and Internal Control;
   i. Legal, Compliance, and Legal Dispute;
   j. Health, Occupational Safety, Management, and Social Responsibility; Environmental
   k. Research and innovation related to technology and Intellectual Property Rights (IPR);
   l. Review of legal regulations and policies; and/or
   m. Other fields.
6. The right to carry out inspections/reviews, provide input, request information, give approval, determine, and monitor the implementation of the Management Contract for the Company's Directors, including determining the key performance indicators attached therein, as a condition for the appointment of the Company's Directors;
7. The right to propose changes to the Company's Articles of Association;
8. The right to coordinate, organize and/or synergize functions for the Company based on an agreement with/authorized by the Company in the fields as above;
9. The right to synergize supervision of the Company's operational and strategic activities;
10. The right to control or monitor the implementation of the Company's strategic and operational activities or policies;
11. The right to carry out inspections/reviews, provide input, request information, and approve the Company's Long Term Plan, Company Work Plan and Budget, other work plans, along with amendments submitted by the Company's Board of Commissioners; and

12. Hak lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini sebagai hak dan/atau kewenangan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Pelaksanaan terhadap hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat dikuasakan kepada pemegang saham Seri B dengan kepemilikan sebagian besar saham Perusahaan (selanjutnya disebut Pemegang Saham Seri B Terbanyak) dalam hal ini PT Mineral Industri Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Menteri BUMN No. SKK-19/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023.

Selain memiliki saham seri A, terdapat juga saham Seri B di Perusahaan. Di luar dari hak istimewa yang dimiliki oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tersebut, Pemegang Saham Seri A dan Pemegang Saham Seri B memiliki hak yang sama sepanjang tidak diatur lain oleh Anggaran Dasar, di antaranya sebagai berikut:

1. Menghadiri RUPS baik secara langsung maupun melalui perwakilan, menyampaikan pendapat dan/atau pengambilan keputusan. Masing-masing pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara dan mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki.
2. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dalam RUPS.
3. Menyetujui remunerasi Direksi dan Dewan Komisarsi Perusahaan dalam RUPS.
4. Menyetujui penetapan penggunaan laba termasuk untuk pembagian dividen pada RUPS.
5. Menyetui untuk penunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada RUPS.
6. Menerima informasi terkait Perusahaan yang akurat dan tepat waktu dengan prinsip kesetaraan informasi terhadap seluruh pemegang saham.
7. Menerima pembagian dividen dan pembagian keuntungan PTBA dalam bentuk lainnya sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya.
8. Menerima pembagian sisa hasil likudasi Perusahaan dalam hal terjadinya kepailitan.
9. Meminta diselenggarakannya RUPS oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, sepanjang dilakukan dengan itikad baik, atas dasar kepentingan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
10. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan RUPS dengan ketentuan pemegang seri A dwiwarna atau 1 pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 jumlah saham beredar.
11. Memperoleh penjelasan lengkap dan Informasi yang akurat mengenai persyaratan prosedur penyelenggaraan RUPS.

12. Other rights are regulated in these Articles of Association as the rights and/or authorities of Series A Dwiwarna Shareholders.

The implementation of the special rights of Series A Dwiwarna Shareholders can be authorized to Series B shareholders with ownership of the majority of the Company's shares (hereinafter referred to as the Most Series B Shareholders) in this case PT Mineral Industri Indonesia (Persero) based on the Power of Attorney of the Minister of SOEs No. SKK-19 / MBU/03/2023 dated March 21, 2023.

Besides holding Series A shares, there are also Series B shares in the Company. Apart from the privileges held by the Dwiwarna Series A Shareholders, Series A Shareholders and Series B Shareholders share the same rights as long as they are not regulated otherwise by the Articles of Association, including the following:

1. Attend the GMS either directly or through representatives, express opinions and/or make decisions. Each shareholder has the right to be treated equally and to vote according to the type, classification and number of shares owned.
2. Approve to appoint members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners at the GMS.
3. Approve the remuneration of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners at the GMS.
4. Approve the determination of the use of profits including for the distribution of dividends at the GMS.
5. Approve to appoint Public Accountants and Public Accounting Firms at the GMS.
6. Receive accurate and timely information related to the Company with the principle of equality of information for all shareholders.
7. Receive dividends and other forms of PTBA profit sharing in accordance with the proportion of its share ownership.
8. Receive the distribution of the remaining liquidation proceeds of the Company in the event of bankruptcy.
9. Request the holding of a GMS by one or more Shareholders who either individually or jointly represent 1/10 (one-tenth) or more of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights, as long as it is carried out in good faith, based on the interests of the Company and does not conflict with laws and regulations and the Company's articles of association.
10. Shareholders may propose meeting agendas no later than 7 days before the GMS invitation with the provision that the holder of the A series dwiwarna or 1 or more shareholders representing 1/20 of the total number of shares outstanding.
11. Obtain a complete explanation and accurate information regarding the requirements for the procedures for holding a GMS.

12. Mengajukan gugatan terhadap Perusahaan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

Perlakuan yang Sama Terhadap Pemegang Saham

PTBA menjunjung tinggi kesetaraan perlakuan terhadap seluruh Pemegang Saham yang tercermin dari:

1. Hak suara dihitung berdasarkan jumlah kepemilikan saham, dengan hak mengajukan RUPS bagi pemegang saham minimal 10%.
2. Penyediaan akses informasi yang sama melalui kanal Hubungan Investor antara lain melalui interaksi langsung pada acara *Public Expose, Non-Deal Roadshow, Press Conference, atau 1-on-1 Meeting, Conference Call,* dan email, serta dokumen yang tersedia pada website Perusahaan, Hubungan Investor, dan Bursa Efek Indonesia meliputi Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Audited, dan *Highlights* Kinerja Keuangan Perusahaan, dan sebagainya.
3. Pemegang Saham memiliki kesetaraan untuk mendapatkan keterbukaan informasi dari Perseroan, di antaranya informasi kinerja Perseroan, laporan keuangan, dan pelaksanaan RUPS.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

Pemegang Saham sebagai Pemilik Modal memiliki tanggung jawab atas Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Pemegang Saham harus memperhatikan juga kelangsungan hidup Perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, Pemegang Saham Pengendali, harus memperhatikan kepentingan Pemegang Saham Minoritas dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*), serta mengungkapkan Pemegang Saham Pengendali sebenarnya (*ultimate shareholders*) dalam hal terjadi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan sepanjang diperintahkan oleh lembaga/badan otoritas yang berwenang. Dalam hal Pemegang Saham menjadi Pemegang Saham Pengendali pada beberapa perusahaan, maka perlu diupayakan agar terdapat akuntabilitas dan hubungan antara Perusahaan dapat dijalankan secara transparan.

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Perusahaan telah menetapkan kebijakan untuk mengatur hubungan pemegang saham dengan Perusahaan, diantaranya adalah Tata Laksana Pelaksanaan RUPS, Tata

12. File a lawsuit against the Company with the district court if harmed by the Company's actions which are considered unfair and without reasonable grounds as a result of the decision of the GMS, the Board of Directors, and/or the Board of Commissioners.

Equal Treatment of Shareholders

PTBA upholds equal treatment of all Shareholders as reflected in:

1. Voting rights are calculated based on the number of shares owned, with the right to propose a GMS for shareholders of at least 10%.
2. Provision of equal access to information through Investor Relations channels, including direct interaction at Public Expose events, Non-Deal Roadshows, Press Conferences, or 1-on-1 Meetings, Conference Calls, and emails, as well as documents available on the Company's website, Investor Relations, and the Indonesia Stock Exchange including Annual Reports, Audited Financial Reports, and Highlights of the Company's Financial Performance, and others.
3. Shareholders have equal access to obtain information transparency from the Company, including information on the Company's performance, financial reports, and GMS implementation.

Shareholder Responsibilities

Shareholders as Capital Owners have responsibility in the Company in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. In carrying out their responsibilities, Shareholders must pay attention to the Company's continuity.

In its practice, Controlling Shareholders must consider the interests of Minority Shareholders and Stakeholders, as well as disclose the ultimate shareholders in a violation of laws and regulations as long as it is ordered by the competent authority institution/body. In the case of Shareholders becoming Controlling Shareholders in several companies, efforts should be made to ensure accountability and transparent relationship between the Companies.

Shareholders Relation Policy

The Company has established policies to regulate shareholder relations with the Company, including the Procedures of GMS Holding, Information Disclosure

Laksana Keterbukaan Informasi, Pedoman Pengelolaan *Website*, dan Pedoman Komunikasi. Seluruh kebijakan tersebut berada di bawah pengendalian Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan, sebagaimana salah satu tugas dari Sekretaris Perusahaan sesuai dengan ketentuan POJK No. 35/POJK.04/2014.

Akses Informasi Kepada Pemegang Saham

Dalam rangka memberikan informasi yang memadai kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) khususnya pemegang saham, Perusahaan telah menyediakan berbagai media komunikasi yang dapat diakses oleh pemegang saham Perusahaan melalui kanal sebagai berikut:

1. www.ptba.co.id
2. corsec@bukitasam.co.id
3. investor.relations@bukitasam.co.id

Di samping itu, Perusahaan juga telah membentuk Divisi Hubungan Investor yang akan menunjang dan bertanggungjawab sebagai *liaison officer* antara Perusahaan dengan pemegang saham Perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu wadah Perusahaan dalam menjalin komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi dengan para pemegang saham dan memegang wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusan penting perusahaan. RUPS juga bertindak sebagai sarana untuk mendapatkan informasi, memberikan pengesahan, dan pendapat terkait aktivitas pengelolaan Perusahaan sepanjang tahun buku serta rencana pengelolaan Perusahaan untuk tahun berikutnya.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dasar Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS Perusahaan mengacu kepada:
1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15 Tahun 2020");
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No.16 Tahun 2020");
5. Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk;
6. *Corporate Governance Policy*.

Procedures, Website Management Guidelines, and Communication Guidelines. All of these policies are under the control of Corporate Secretary Work Unit, as one of the Corporate Secretary duties in accordance with POJK No. 35/POJK.04/2014

Access to Information to Shareholders

In order to provide adequate information to all stakeholders, especially shareholders, the Company provided various communication media channel that can be accessed by the Company's shareholders through the following channels:

1. www.ptba.co.id
2. corsec@bukitasam.co.id
3. investor.relations@bukitasam.co.id

Moreover, PTBA has established an Investor Relations Division to support and be responsible as a liaison officer between the Company and the Company's shareholders.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is one of the Company's forums to establish communication between the Board of Commissioners and Directors with shareholders and holds the highest authority in making important company decisions. The GMS also acts as a means to obtain information; provide approval and opinions regarding the Company's management activities throughout the financial year, and acts as the Company's management plans for the following year.

General Meeting of Shareholders (GMS)

Basis for holding GMS

Organizing the Company's GMS should refer to:
1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
3. Financial Services Authority Regulation no. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15 of 2020");
4. Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK No.16 of 2020");
5. Articles of Association of PT Bukit Asam Tbk;
6. Corporate Governance Policy.

Jenis RUPS

Dalam penyelenggaraannya RUPS terbagi atas dua jenis, yakni RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPS LB). RUPST diselenggarakan minimal sekali dalam setahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau waktu lain yang ditentukan oleh OJK berdasarkan ketentuan POJK No. 15 Tahun 2020. Sementara (RUPSLB) dapat diselenggarakan di luar waktu RUPST.

1. RUPS Tahunan Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS Tahunan memiliki kewenangan sebagai berikut:
   a. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk didalamnya penyampaian Laporan pengurusan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris, termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, Laporan pertanggungjawaban program *Corporate Social Responsibility*;
   b. Penetapan gaji dan honorarium, dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
   c. Penetapan tantiem/insentif kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang baru lampau;
   d. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan keuangan Perusahaan pada tahun buku berjalan;
   e. Usulan penetapan penggunaan Laba Bersih Perusahaan (jika Perusahaan mempunyai Laba Positif);
   f. Mata acara lain yang membutuhkan persetujuan RUPS berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
2. RUPS Luar Biasa Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS Luar Biasa dapat dilaksanakan untuk memutuskan:
   a. Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi sebelum masa tugasnya berakhir, baik karena pengunduran diri dan/atau sebab-sebab lainnya;
   b. Adanya rencana transaksi material dan/atau benturan kepentingan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. Rencana korporasi lain yang bersifat material, seperti pembelian kembali saham Perusahaan yang beredar, *stock split*, dan *right issue* yang didasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS perusahaan mengacu pada ketentuan POJK No. 15 Tahun 2020, POJK No. 16 Tahun

Type of GMS

In its implementation, the GMS is divided into two types, namely the Annual GMS (AGMS) and the Extraordinary GMS (EGMS). The AGMS is held at least once a year no later than 6 (six) months after the financial year ends or other time determined by the OJK based on the provisions of POJK No. 15 of 2020. Meanwhile, EGMS can be held outside the AGMS agenda.

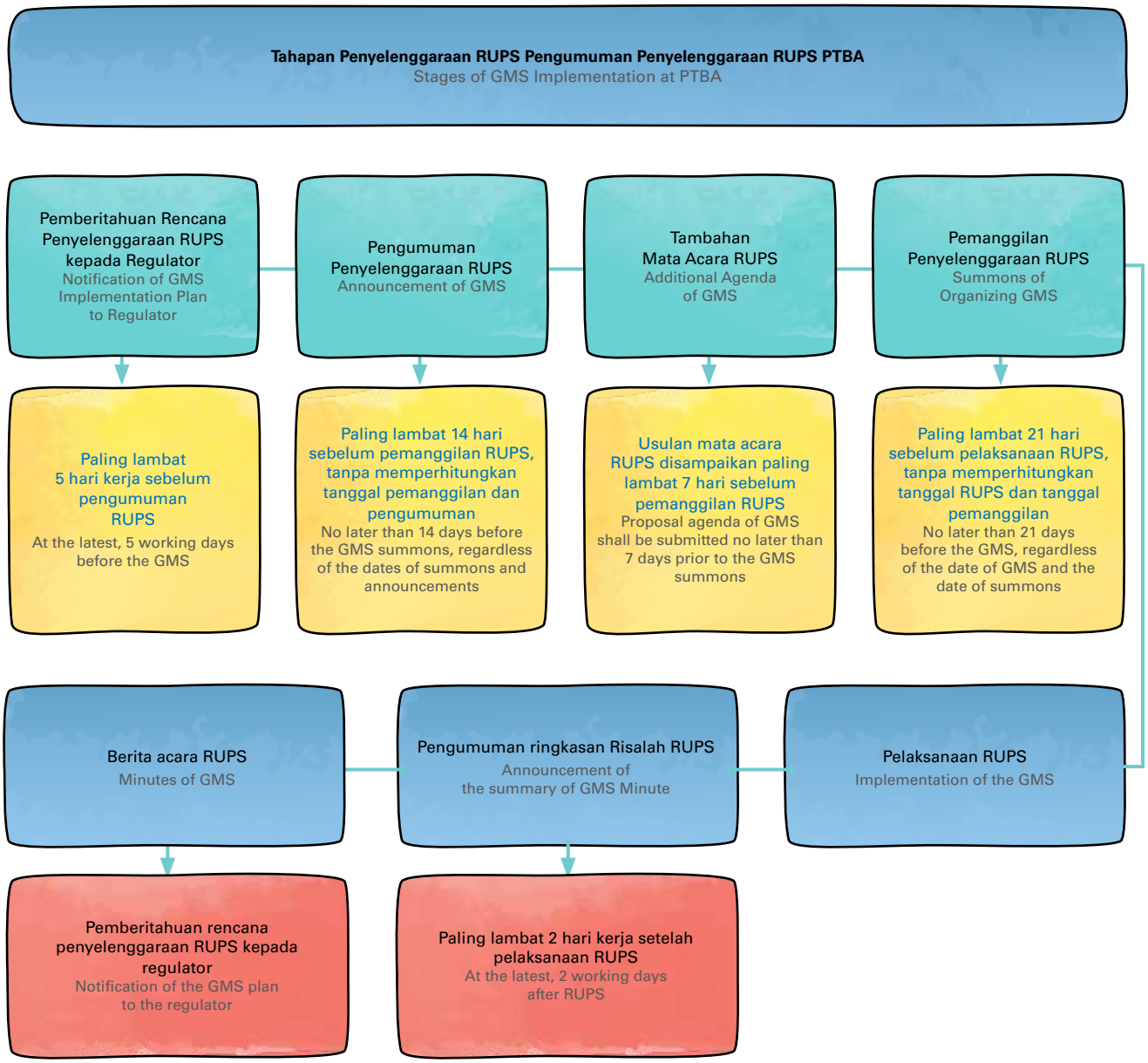
1. Annual GMS Pursuant to the Company's Articles of Association, the Annual GMS has the following authorities:
   a. Ratification of the Annual Report, including the submission of reports on the management of Board of Directors and the supervision of Board of Commissioners, including the ratification of the Company's Annual Financial Statements, and the Corporate Social Responsibility program accountability report;
   b. Determination of salary and honorarium, and other facilities for Board of Directors and Board of Commissioners;
   c. Determination of performance bonuses/ incentives for Board of Directors and Board of Commissioners for the last fiscal year;
   d. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the current fiscal year;
   e. Proposal to determine the use of the Company's Net Profit (if the Company has Positive Profit);
   f. Other agendas that require GMS approval based on the Articles of Association and regulations under applicable laws and regulations.
2. Extraordinary GMS Based on the Company's Articles of Association, an Extraordinary GMS can be held to decide:
   a. Replacement of Board of Commissioners and Board of Directors before their term ends, either due to resignation and/or other reasons;
   b. There are plans for material transactions and/or conflicts of interest as stipulated in applicable laws and regulations;
   c. Other corporate plans that are material in nature, such as buying back the Company's outstanding shares, stock splits, and rights issues, which are based on the Articles of Association and applicable regulations in the capital market sector.

Stages of GMS Implementation

The implementation of the company's GMS refers to the provisions of POJK No. 15 of 2020, POJK No. 16 of 2020,

2020, dan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Adapun tahapan penyelenggaraan RUPS secara umum adalah sebagai berikut:

and provisions of the Company's Articles of Association. The general stages of implementing a GMS are as follows: The following is a description of stages above:



Berikut uraian dari penjelasan tahapan di atas:

1. Pemberitahuan RUPS kepada OJK
   Pemberitahuan RUPS kepada OJK dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, tanpa memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS, termasuk pengungkapan Mata Acara RUPS secara jelas dan rinci.
2. Pegumuman RUPS
   Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan pengumuman Pengumuman RUPS, pengumuman

The following is a description of the explanation of the stages above:

1. Notification of the GMS to the OJK
   Notification of the GMS to the OJK is made no later than 5 (five) working days before the announcement of the GMS, without taking into account the date of the GMS announcement, including disclosure of the GMS Agenda clearly and in detail.
2. Announcement of the GMS
   The announcement of the GMS is made no later than 14 (fourteen) days before the summons of the GMS, without considering the date of the summons and announcement of the GMS Announcement, the GMS

RUPS disampaikan pada situs web bursa efek, situs web perusahaan dan eASY. KSEI. Dalam pengumuman RUPS dimuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:

a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
d. Tanggal pemanggilan RUPS.

3. Usulan Mata Acara RUPS oleh Pemegang Saham
Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan pemegang saham seri A Dwiwarna. Usulan mata acara rapat harus:
   a. Dilakukan dengan itikad baik;
   b. Mempertimbangkan kepentingan Perusahaan;
   c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
   d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS;
   e. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
4. Pemanggilan RUPS
Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 hari sebelum pelaksanaan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pelaksanaan RUPS dan tanggal pemanggilan yang disampaikan melalui situs web bursa efek, situs web perusahaan dan eASY.KSEI. Pemanggilan RUPS sebagaimana harus memuat informasi diantaranya sebagai berikut:
   a. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
   b. Waktu penyelenggaraan RUPS;
   c. Tempat penyelenggaraan RUPS;
   d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
   e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
   f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan;
   g. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
5. Pelaksanaan RUPS.
6. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS
Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS melalui situs web bursa efek, situs web perusahaan dan eASY.KSEI, namun demikian Perusahaan berupaya

announcement is submitted on the stock exchange website, the company's website and eASY. KSEI. The announcement of the GMS contains at least the following:

a. Provisions on shareholders who are entitled to attend the GMS;
b. Provisions on shareholders who are entitled to propose meeting agenda items;
c. Date of the GMS; and
d. Date of the GMS summons.

3. Proposal of GMS Agenda by Shareholders
Shareholders may propose meeting agenda items in writing to the GMS organizer, no later than 7 (seven) days before the GMS invitation. Shareholders who may propose meeting agenda items as referred to in paragraph (1) are 1 (one) or more shareholders representing 1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares with voting rights and holders of Dwiwarna Series A shares. The proposed meeting agenda items must:

a. Be made in good faith;
b. Take into account the interests of the Company;
c. Be an agenda item that requires a GMS decision;
d. Include the reasons and materials for the proposed GMS agenda items;
e. Not conflict with the provisions of laws and regulations and the articles of association.

4. GMS Invitation
The GMS Invitation shall be made no later than 21 days before the GMS is held, excluding the GMS date and the date of the invitation delivered through the stock exchange website, the company website and eASY.KSEI. The GMS Invitation must contain information including the following:

a. The date of the GMS;
b. He time of the GMS;
c. The place where the GMS is held;
d. Provisions on shareholders who are entitled to attend the GMS;
e. The agenda of the meeting including an explanation of each agenda item;
f. Information stating that materials related to the agenda items are available to shareholders from the date of the GMS invitation until the GMS is held;
g. Information that shareholders can grant power of attorney through e-GMS.

5. Implementation of the GMS.
6. Submission of Summary of GMS Minutes
Submission of Summary of GMS Minutes no later than 2 (two) working days after the GMS is held via the stock exchange website, the company website and eASY.KSEI, however the Company strives to comply

untuk memenuhi ketentuan dari ACGS untuk menyampaikan ringkasan risalah RUPS paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS.

7. Penyampaian Risalah RUPS
   Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pelaksanaan RUPS.

with the provisions of ACGS to submit a summary of the GMS minutes no later than 1 (one) working day after the GMS is held.

7. Submission of GMS Minutes
   Submission of GMS Minutes to OJK no later than 30 (thirty) calendar days after the GMS is held.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan telah melaksanakan RUPS sebanyak 1 (satu) kali, yakni RUPS Tahunan untuk tahun buku 2023 pada tanggal 8 Mei 2024 yang dilaksanakan secara tatap muka (fisik). Pelaksanaan RUPST telah sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

GMS in 2024

Throughout 2024, the Company has held 1 (one) GMS, namely the Annual GMS for the 2023 financial year on May 8, 2024, which was held face-to-face (physically). The implementation of the GMS was in accordance with the mechanism stated in POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies and the provisions of the Company's Articles of Association.

Proses Penyelenggaraan RUPST Tanggal 8 Mei 2024
Process of Annual GMS on May 8, 2024

Kegiatan Activity	Tanggal Date	Keterangan Information
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator AGMS notification to regulator	22 Maret 2024 March 22, 2024	Pemberitahuan telah disampaikan oleh perusahaan kepada OJK pada tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan surat Nomor:T/072.J/0100/KS.03/III/2024 Perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bukit Asam Tbk ("Perseroan") Tahun Buku 2023. The notification was submitted by the company to the OJK on March 22, 2024 based on letter Number: T/072.J/0100/KS.03/III/2024 Regarding Notification of the Plan for the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of PT Bukit Asam Tbk ("Company") for the 2023 Financial Year.
Pengumuman RUPST AGMS announcement	1 April 2024 April 1, 2024	1. Pengumuman telah disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku, yakni 14 hari sebelum tanggal pemanggilan tanpa memperhitungkan tanggal pemaggilan dan tanggal pengumuman. 2. Untuk pengumuman sendiri, perusahaan telah menyampaikan Pengumuman RUPS Tahun Buku 2023 berdasarkan Surat Perusahaan No. B/246/111000/KS.03/IV/2024 Perihal Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2023 melalui media sebagai berikut: a. Situs web Perusahaan; b. Situs web Bursa Efek Indonesia; c. Situs web KSEI pada halaman eASY.KSEI. 3. Bukti iklan terkait pengumuman telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 1 April 2024 berdasarkan Surat Perusahaan Nomor:B/247/111000/KS.03/IV/2024 perihal Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2023. 1. The announcement has been submitted in accordance with applicable provisions, namely 14 days before the date of the summons without taking into account the date of the summons and the date of the announcement. 2. For the announcement itself, the company has submitted the Announcement of the GMS for the 2023 Financial Year based on Company Letter No. B/246/111000/KS.03/IV/2024 Regarding the Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bukit Asam Tbk for the 2023 Financial Year through the following media: a. Company website; b. Indonesia Stock Exchange website; c. KSEI website on the eASY.KSEI page. 3. Proof of advertisement related to the announcement has been submitted to the OJK on April 1, 2024 based on Company Letter Number: B/247/111000/KS.03/IV/2024 regarding Proof of Advertisement for the Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bukit Asam Tbk for the 2023 Financial Year.

Proses Penyelenggaraan RUPST Tanggal 8 Mei 2024
Process of Annual GMS on May 8, 2024

Kegiatan Activity	Tanggal Date	Keterangan Information
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST Recording Date of List of Shareholders entitled to attend the AGMS	5 April 2024 April 5, 2024	*Recording Date* Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST yaitu 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pemangilan RUPST. Recording Date for the List of Shareholders entitled to attend the GMS is 1 (one) trading day before the GMS summons date.
Pemanggilan dan informasi penjelasan mata acara RUPST Summon and explanation of AGMS agenda items	16 April 2024 April 16, 2024	1. Pemanggilan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni 21 hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal RUPS dan tanggal pemanggilan. 2. Untuk pemanggilan sendiri perusahaan telah menyampaikan pemanggilan berdasarkan Surat Perusahaan No. B/270/111000/KS.03/IV/2024 Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2022 yang disampaikan melalui media sebagai berikut: a. Situs web Perusahaan; b. Situs web Bursa Efek Indonesia; c. Situs web KSEI pada halaman eASY.KSEI. 3. Bukti Iklan Pemanggilan telah disampaikan oleh Perusahaan kepada OJK pada tanggal 16 April 2024, berdasarkan Surat No. B/271/111000/KS.03/IV/2024 Perihal Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2023. 1. The summons has been made in accordance with applicable provisions, namely 21 days before the date of the GMS, excluding the date of the GMS and the date of the summons. 2. For the summons itself, the company has submitted a summons based on Company Letter No. B/270/111000/KS.03/IV/2024 Regarding the Summons of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bukit Asam Tbk for the 2022 Fiscal Year which was submitted through the following media: a. Company website; b. Indonesia Stock Exchange website; c. KSEI website on the eASY.KSEI page. 3. Proof of the Summons Advertisement has been submitted by the Company to the OJK on April 16, 2024, based on Letter No. B/271/111000/KS.03/IV/2024 Regarding Proof of the Summons Advertisement for the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bukit Asam Tbk for the 2023 Fiscal Year.
Pelaksanaan RUPST AGMS holding	8 Mei 2024 May 8, 2024	RUPST diselenggarakan di Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1, Jakarta Pusat DKI Jakarta, 10710 pada pukul 13.38-15.02 WIB The AGMS was held at the Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1, Central Jakarta DKI Jakarta, 10710 at 13.38-15.02 WIB

Kewajiban pelaporan di atas dilakukan oleh Perseroan menggunakan sistem pelaporan elektronik PT Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

The reporting obligations are carried out by the Company using the electronic reporting system of the Indonesian Stock Exchange and the Financial Services Authority.

Keterangan Description	RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 The 2024 Financial Year GMS
Pimpinan Rapat Chairman of Annual GMS	Irwandy Arif, Komisaris Utama | President Director
Kuorum Kehadiran Quorum of Attendance	Para pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir mewakili sejumlah 9.315.870.052 saham termasuk 5 (lima) saham Seri A Dwiwarna atau sebesar 80.9065574% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan sebesar 6.302.000 lembar saham atau 0,05%. The Company's shareholders with valid voting rights who were present represented a total of 9,315,870,052 shares including 5 (five) Series A Dwiwarna shares or 80,9065574% of all shares that have been placed and fully paid in the Company after being reduced by shares that have been bought back by the Company amounting to 6,302,000 shares or 0.05%.

<table>
<tr><th>Keterangan
Description</th><th colspan="4">RUPS Tahunan Tahun Buku 2024
The 2024 Financial Year GMS</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">RUPS dihadiri oleh seluruh anggota Direksi (termasuk Direktur Utama) dan Dewan Komisaris Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:
The GMS was attended by all members of the Board of Directors (including the President Director) and the Board of Commissioners of the Company with the following details:</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris
Board of Commissioners and Board of Directors' Attendance</td><td colspan="2">Dewan Komisaris
Board of Commissioners</td><td colspan="2">Direksi
Board of Directors</td></tr>
<tr><td>Nama
Name</td><td>Jabatan
Position</td><td>Nama
Name</td><td>Jabatan
Position</td></tr>
<tr><td>Irwandy Arif</td><td>Komisaris Utama
President Commissioner</td><td>Arsal Ismail</td><td>Direktur Utama
President Director</td></tr>
<tr><td>Andi Pahril Pawi</td><td>Komisaris Independen
Independent Commissioner</td><td>Farida Thamrin</td><td>Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Finance and Risk Management Director</td></tr>
<tr><td>Kurnia Toha</td><td>Komisaris Independen
Independent Commissioner</td><td>Suhedi</td><td>Direktur Operasi dan Produksi
Operations and Production Director</td></tr>
<tr><td>Rahmat Hidayat Pulungan</td><td>Komisaris Independen
Independent Commissioner</td><td>Rafli Yandra</td><td>Direktur Pengembangan Usaha
Business Development Director</td></tr>
<tr><td>Carlo B. Tewu</td><td>Komisaris
Commissioner</td><td>Suherman</td><td>Direktur Sumber Daya Manusia
Human Resources Director</td></tr>
<tr><td>E. Piterdono H.Z</td><td>Komisaris
Commissioner</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Selain itu, RUPS juga dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi serta Komite Nominasi dan Remunerasi.
Additionally, the GMS was also attended by all members of the Audit Committee, Risk and Integrated Governance Monitoring Committee, as well as the Nomination and Remuneration Committee.</td></tr>
<tr><td>Mekanisme Pengambilan Keputusan
Voting Mechanism</td><td colspan="4">Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat melalui pemungutan suara.
Decisions are taken by consensus through voting.</td></tr>
</table>

Tanya Jawab

Sesuai dengan ketentuan tata tertib RUPS yang telah disampaikan pada website Perusahaan, prosedur tanya jawab diatur sebagai berikut:

1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan Mata Acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.
2. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tentang Mata Acara Rapat.
3. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat, namun demikian, guna efektivitas, maka sesi diskusi dibatasi sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap mata acara Rapat.
4. Apabila tidak terdapat pertayaan dan/atau pendapat, sesi tanya jawab akan ditutup dan dilanjutkan kepada pengambilan keputusan.
5. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan oleh Pemegang Saham secara tertulis.

Questions and Answers

In accordance with the provisions of the GMS rules of submitted procedure on the Company's website, the Q&A procedure is regulated as follows:

1. The Meeting Chair will provide an opportunity for Shareholders or their proxies to submit questions and/or opinions regarding the Meeting Agenda before a decision is made.
2. Only Shareholders or their authorized proxies are entitled to submit questions and/or express opinions regarding the Meeting Agenda.
3. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions in each discussion session per Meeting agenda, however, for the sake of effectiveness, the discussion session is limited to 1 (one) time for each Meeting agenda.
4. If there are no questions and/or opinions, the Q&A session will be closed and continued to decision making.
5. Questions and/or opinions are submitted by Shareholders in writing.

6. Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan selanjutnya petugas akan menyerahkan lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan harus diserahkan kepada petugas dan Notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya.
7. Pertanyaan atau pendapat yang disampaikan secara lisan tidak akan ditanggapi.
8. Pimpinan Rapat mempunyai kewenangan menetapkan giliran bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tersebut.
9. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat untuk dapat dijawab oleh Pimpinan Rapat, tanpa mengurangi hak Pimpinan Rapat menolak menjawab apabila menurut Pimpinan Rapat Ditunjuk pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dianggap tidak berkaitan atau berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah dibahas sebelumnya.
10. Pimpinan Rapat akan membacakan dan menjawab pertanyaan/menanggapi pendapat satu per satu. Bilamana diperlukan Pimpinan Rapat dapat mempersilahkan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif Perseroan atau Profesi Penunjang Rapat untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat.
11. Pimpinan Rapat memulai sesi penyampaian usulan keputusan dan pengambilan keputusan setelah pertanyaan atau pendapat ditanggapi.
12. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama [status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*'] adalah "*Discussion started for agenda item* no. [ ]".
13. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/, pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan corsec@bukitasam.co.id dengan ditembuskan pada DM@datindo.com dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.

6. Shareholders or their proxies who wish to submit questions and/or express their opinions are asked to raise their hands and then the officer will hand over a question sheet to be filled in with the name of the Shareholder, the number of shares represented and their questions or opinions. The question sheet must be submitted to the officer and the Notary will examine the validity or authority of the questioner.
7. Questions or opinions submitted verbally will not be responded to.
8. The Chairperson of the Meeting has the authority to determine the turn for Shareholders or their proxies who wish to ask questions and/or express their opinions.
9. The Chairperson of the Meeting will read out questions and/or opinions related to the Meeting Agenda to be answered by the Chairperson of the Meeting, without prejudice to the right of the Chairperson of the Meeting to refuse to answer if according to the Appointed Chairperson of the Meeting the questions and/or opinions submitted are considered unrelated or unrelated to the Meeting Agenda being discussed or previously discussed.
10. The Chairperson of the Meeting will read out and answer questions/respond to opinions one by one. If necessary, the Chairperson of the Meeting may invite members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, executive officers of the Company or Supporting Professionals of the Meeting to answer or respond to questions and/or opinions.
11. The Chairperson of the Meeting begins the session for submitting decision proposals and decision making after the questions or opinions have been responded to.
12. Shareholders of the Company or Shareholders' proxies who attend electronically can only submit questions and/or opinions via the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Questions and/or opinions can be submitted as long as [the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column] is "Discussion started for agenda item no. [ ]".
13. In the event that Shareholders cannot access the KSEI System (eASY.KSEI) at the link https://akses.ksei.co.id/, shareholders can submit questions regarding the agenda via email to the Company corsec@bukitasam.co.id with a copy to DM@datindo.com and the questions will be submitted at the Meeting and recorded in the Minutes of the Meeting prepared by the Notary, and the answers to the questions will be submitted via Shareholder email no later than 3 (three) working days after the Meeting.

PTBA telah menjawab seluruh pertanyaan dari pemegang saham sepanjang revelan dengan mata acara RUPS. Seluruh pertanyaan dan jawaban pada RUPS tersebut direcord oleh Perusahaan serta dipublikasikan pada website Perusahaan pada ringkasan risalah RUPS dan Berita Acara RUPS.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Pemungutan Suara

Sesuai dengan tata tertib yang disampaikan pada website Perusahaan, mekanisme Pengambilan Keputusan dan Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat melalui pemungutan suara.
2. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, POJK No.15/2020 dan UUPT sebagaimana tersebut pada angka 8 di atas untuk mata acara kesatu, kedua, ketiga, keempat, harus disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Khusus untuk mata acara kelima, selain disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah saham, agenda tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna atau wakilnya.
3. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan dari pemegang saham selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
4. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-*Meeting* Hall, sub menu *Live Broadcasting*.
5. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perusahaan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit; Selama proses elektronik pemungutan suara secara berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no. (T) has started'* pada kolom '*General Meeting Flow Text'*. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status tertentu pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom *'General Meeting Flow Text'* berubah menjadi *"Voting for agenda item no. ( ) has ended'*, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

PTBA has answered all questions from shareholders as long as they are relevant to the agenda of the GMS. All questions and answers at the GMS are recorded by the Company and published on the Company's website in the summary of the GMS minutes and the GMS Minutes.

Decision Making and Voting Mechanisms

In accordance with the Rules of Procedure posted on the Company's website, the decision-making and voting mechanisms are as follows:

Decision-making

1. Decisions are taken by deliberation to reach a consensus through voting.
2. In accordance with the provisions of the Articles of Association, POJK No. 15/2020, and the Company Law as mentioned in item 8 above, for the first, second, third, and fourth agenda items, approval must be obtained from shareholders representing more than ½ (one-half) of the total number of shares with valid voting rights. Specifically, for the fifth agenda item, in addition to being approved by shareholders representing more than ½ (one-half) of the total shares, the agenda must also be approved by the Series A Dwiwarna shareholders or their representatives.
3. Voting is carried out after all questions from shareholders have been answered and/or the question-and-answer session has ended.
4. The electronic voting process takes place in the eASY. KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu.
5. Shareholders who attend or are represented by their proxies but have not cast a vote on the meeting agenda, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote choices during the voting period through the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic voting period for each item on the meeting agenda begins, the system will automatically run the voting time by counting backwards for a maximum of 5 (five) minutes; During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no. (T) has started" will be displayed in the column "General Meeting Flow Text". If the shareholders or their proxies do not vote for the agenda items of the Meeting until the certain status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no. ( ) has ended', then it will be deemed to have voted Abstain for the relevant Meeting agenda item.

6. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.
7. Pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat.
8. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat melakukan akses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https:// akses.ksei. co.id/ dapat menyampaikan suaranya melalui pemberian kuasa dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perusahaan www.ptba.co.id untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam rapat.
9. Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) akan diperhitungan mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, diminta untuk menyampaikan kartu suara yang telah diisi, Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

Seluruh ketentuan mengenai mekanisme pemungutan suara di dalam RUPS telah dipublikasikan pada website PTBA pada saat pemanggilan RUPS.

Pihak Independen Penghitung Suara

Guna menjamin independensi, Perusahaan telah menunjuk pihak independen, yaitu Biro Administrasi Efek Perusahaan PT Datindo Entrycom dan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn untuk membantu melakukan perhitungan suara pada rapat.

Ketentuan Profil Pengurus yang Akan Diangkat Pada RUPS

PTBA merupakan Anak Perusahaan BUMN yang telah melakukan ratifikasi atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 di tanggal 15 Juni 2023. Berdasarkan ketentuan tersebut, daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Keputusan RUPST Tanggal 8 Mei 2024 dan Tindak Lanjutnya

Seluruh keputusan telah dimuat dalam Akta No. 45 yang dibuat oleh dan hadapan notaris, Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

6. Voting time during the electronic voting process is the standard time specified in the eASY.KSEI application.
7. Electronic direct voting per agenda item is a maximum of 5 (five) minutes per meeting agenda item.
8. Shareholders who are unable to access the KSEI System (eASY.KSEI) via the https://access.ksei. co.id/ link, can cast their votes by granting a power of attorney. They can download the power of attorney contained on the Company's website www.ptba.co.id to provide power of attorney and vote at the Meeting.
9. Shareholders who abstain (did not cast a vote) will be included in the the most voted cast at the Meeting.
10. Shareholders who are physically present are asked to submit a ballot card that has been filled in, the Chairman of Meeting will ask the Notary to announce the voting results.

All provisions regarding the voting mechanism in the GMS have been published on the PTBA website at the time of the GMS invitation.

Vote Counter Independent Party

In order to guarantee independence, the Company has appointed independent parties, namely the Share Registrar PT Datindo Entrycom and Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., to assist in calculating the votes at the meeting.

Provisions on the Profile of the Management to be Appointed at the GMS

PTBA is a SOEs Subsidiary that has ratified the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 concerning SOEs Human Organs and Resources at the Annual GMS for the 2022 Fiscal Year on June 15, 2023. Based on these provisions, the curriculum vitae of prospective members of the Board of Directors and Board of Commissioners who will be proposed to be appointed at the GMS are available and announced at the time of the GMS before the decision is made regarding the appointment of the person concerned as a member of the Board of Directors and Board of Commissioners.

AGMS Decision on May 8, 2024 and the Follow-ups

All decisions have been stated in Deed No. 45 made by and before a notary, Jose Dima, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

Berikut disampaikan hasil keputusan RUPST untuk Tahun Buku 2023 dan realisasi atau tindak lanjut atas hasil keputusan RUPS.

The following is the results of the AGMS decisions for the 2023 Financial Year and the realization or follow-up to the results of the AGMS decisions.

Mata Acara Rapat Kesatu **First Agenda Item Meeting**	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Tasks Report, and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Financial Year, as well as granting full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for their management actions of the Company and the Board of Commissioners for their supervisory actions of the Company that have been carried out during the 2023 Financial Year.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat **Number of Shareholders Asking/ Giving Opinions**	Terdapat 5 (lima) pertanyaan/pendapat dari Pemegang Saham There are 5 (five) questions/opinions from Shareholders
Ringkasan Pertanyaan dan Jawaban **Summary of Questions and Answers**	Terdapat 5 (lima) pertanyaan/pendapat dari pemegang saham yang hadir di platform online yang disediakan oleh KSEI. Namun berdasarkan evaluasi oleh Notaris hanya 2 (dua) yang relevan untuk dibahas pada mata acara ini. Selain itu, terdapat 2 (dua) pertanyaan masuk dari pemegang saham yang hadir secara fisik. Sehingga secara total terdapat 4 (empat) pertanyaan/pendapat yang dibahas. Adapun inti pertanyaan/pendapat dan tanggapan/jawaban manajemen sebagai berikut: **Pertanyaan Kesatu** Pertanyaan disampaikan oleh Bapak Yusuf Almusana yang hadir Rapat secara online pada platform yang disediakan KSEI sebagai berikut: Untuk CAPEX apakah Perseroan akan menggunakan utang? Ataukah CAPEX lebih diprioritaskan dari laba internal? **Tanggapan/Jawaban** Secara prinsip perusahaan akan mengoptimalkan laba internal dan pendanaan eksternal, sehingga diharapkan dapat memberikan tingkat pengembalian yang optimal bagi Perseroan secara berkelanjutan. CAPEX di tahun 2024 sebesar Rp2,4 Triliun utamanya diperuntukan bagi pembiayaan proyek pengembangan usaha Perseroan. **Pertanyaan Kedua** Pertanyaan disampaikan oleh Bapak Alfonsus Benny Wijaya Sujatmiko yang hadir Rapat secara online pada platform yang disediakan KSEI sebagai berikut: Hemat anggaran untuk sebesar mungkin meningkatkan EPS (earning per share). Komisaris dan Direksi harus menilai Personel dengan kinerja serta agar biaya pensiun ditabung pada saham Perseroan. **Tanggapan/Jawaban** Sesuai dengan jawaban Perseroan sebelumnya, anggaran ke depannya akan difokuskan pada proyek Perseroan. Untuk manfaat pensiun dilakukan mengacu pada ketentuan internal kepensiunan di Perseroan dan Undang-Undang Tenaga Kerja yang berlaku. **Pertanyaan Ketiga** Pertanyaan disampaikan oleh Bapak Andri yang hadir pada fisik sebagai berikut: Mohon penjelasan kenapa pendapatan menurun sedangkan beban pokok pendapatan meningkat dari 57% menjadi 76%? **Tanggapan/Jawaban** Penyebab turunnya pendapatan utamanya disebabkan oleh penurunan harga batu bara di tahun 2023 yang cukup signifikan dari tahun 2022. Peningkatan beban pokok pendapatan disebabkan oleh kenaikan pembayaran royalti batu bara, mengingat terdapat kebijakan baru. Selain itu ada peningkatan biaya angkutan (bahan bakar) dan biaya lainnya. **Pertanyaan Keempat** Pertanyaan/pendapat disampaikan oleh Bapak Beni Seoegipto yang hadir pada fisik terdapat 2 (dua) pertanyaan dan 1 (satu) pendapat. Berdasarkan data Biro Administrasi Perseroan, pihak yang bersangkutan tidak tercatat pada recording date. Namun setelah pertimbangan diskusi internal dan tertib Rapat Perseroan tetap menanggapi hal tersebut. Hanya terdapat 2 (dua) pertanyaan relevan dan 1 (satu) pendapat tidak relevan pada mata acara Rapat. Adapun pertanyaan sebagai berikut: 1. Mohon penjelasan kenaikan COGS di CLK 27a, jasa penambangan naik dari Rp9,57 Triliun menjadi Rp11,1 Triliun, jasa angkutan kereta api dari Rp6,6 Triliun menjadi Rp7,95 Triliun, sedangkan revenue turun Rp42,6 Triliun menjadi Rp38,29 Triliun? 2. Apa yang telah dilakukan oleh Perseroan untuk menjadi ESG Company dimana porsi coal di bawah 20%? **Tanggapan/Jawaban** 1. Untuk pertanyaan dari Bapak Beni Seoegipto, mengingat hampir serupa dengan Bapak Andri, maka jawaban merujuk pada tanggapan dari manajemen sebelumnya. 2. Untuk rencana ESG ke depan, Perseroan mendukung program Net Zero Emission dengan melakukan dekarbonisasi dalam proses penambangan, reboisasi lahan bekas tambang, dan mengembangkan rencana bisnis energi baru dan terbarukan.

There were 5 (five) questions/opinions from shareholders present on the online platform provided by KSEI. However, based on the evaluation by the Notary, only 2 (two) were relevant to be discussed in this agenda item. In addition, there were 2 (two) questions submitted from shareholders who were present physically. In total, there were 4 (four) questions/opinions discussed. The essence of the questions/opinions and management responses/answers are as follows:

First Question
The question was submitted by Mr. Yusuf Almusana who attended the Meeting virtually on the platform provided by KSEI as follows:

Will the Company use debt for CAPEX? Or is CAPEX prioritized over internal profit?

Response/Answer
In principle, the company will optimize internal profit and external funding, it is expected to provide an optimal rate of return for the Company on an ongoing basis.
CAPEX in 2024 amounting to Rp2.4 trillion is mainly allocated for financing the Company's business development projects.

Second Question
The question was submitted by Mr. Alfonsus Benny Wijaya Sujatmiko who attended the Meeting virtually on the platform provided by KSEI as follows:

The Company should save the budget to increase EPS (earnings per share) as much as possible. The Board of Commissioners and the Board of Directors must assess personnel based on their performance. Therefore, pension costs can be saved in the Company's shares.

Response / Answer
In accordance with the Company's previous answer, the future budget will be focused on the Company's projects. Pension benefits are carried out referring to the internal provisions of retirement in the Company and the applicable Labor Law.

Third Question
The question was submitted by Mr. Andri who was present physically as follows:
Please explain why revenue decreased while the cost of revenue increased from 57% to 76%?

Response / Answer
The cause of the decline in revenue was mainly due to the decline in coal prices in 2023 which was quite significant from 2022. The increase in the cost of revenue was due to an increase in coal royalty payments, considering the new policy. In addition, there was an increase in transportation costs (fuel) and other costs.

Fourth Question
Questions/opinions were submitted by Mr. Beni Seoegipto who was physically present, there were 2 (two) questions and 1 (one) opinion. Based on data from the Company's Administration Bureau, the relevant party was not recorded on the recording date. However, after considering internal discussions and the orderly meeting, the Company still responded to this matter. There were only 2 (two) relevant questions and 1 (one) irrelevant opinion on the agenda of the Meeting. The questions are as follows:

1. Please explain the increase in COGS in CLK 27a, mining services increased from Rp9.57 trillion to Rp11.1 trillion, railway transportation services from Rp6.6 trillion to Rp7.95 trillion, while revenue decreased by Rp42.6 trillion to Rp38.29 trillion?
2. What has the Company done to become an ESG Company where the portion of coal is below 20%?

Response/Answer
1. Questions from Mr. Beni Seoegipto are considered similar to Mr. Andri, the answer refers to the response from the previous management.
2. For future ESG plans, the Company supports the Net Zero Emission program by decarbonizing the mining process, reforesting ex-mining land, and developing new and renewable energy business plans.

Pengambilan Keputusan
Resolution-making

Dengan Pemungutan Suara
By Voting

Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
9.281.357.233 atau or 99,6295266%	25.554.019 atau or 0,2743063%	8.958.800 atau or 0,0961671%

Keputusan Rapat **Resolutions**	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Mengesahkan: a. Laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sesuai dengan laporannya Nomor: 00223/2.1025/AU.1/02/0243-2/1/11/2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan opini "wajar dalam semua hal yang material". b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sesuai laporannya Nomor: 00377/2.1025/AU.2/11/0243-2/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan opini "wajar dalam semua hal yang material". 3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas Tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. 1. Approve the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the 2023 Financial Year ending on December 31, 2023. 2. Ratify: a. The Company's financial statements for the 2023 Financial Year ending on December 31, 2023 which have been audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) in accordance with its report Number: 00223/2.1025/AU.1/02/0243-2/1/11/2024 dated February 29, 2024 with the opinion "fair in all material respects". b. Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program for the 2023 Financial Year ending on December 31, 2023, which has been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) according to its report Number: 00377/2.1025/AU.2/11/0243-2/1/III/2024 dated March 26, 2024 with the opinion "fair in all material respects". 3. With the approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Task Report, and the ratification of the Company's Financial Report and the Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK), all for the 2023 Financial Year ending on December 31, 2023, the General Meeting of Shareholders (GMS) grants full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management of the Company and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions for the Company that have been carried out during the 2023 Financial Year ending on December 31, 2023, as long as such actions do not constitute a criminal act and/or violate the provisions of applicable laws and legal procedures, and are reflected in the Company's report books.
Tindak Lanjut/Realisasi **Follow-up/Realization**	Laporan Tahunan Tahun Buku 2023, Laporan Keuangan Tahunan Audited Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan PUMK Tahun Buku 2023 telah disahkan pada RUPS Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2023 pada tanggal 8 Mei 2024 dan telah dimuat pada Berita Acara RUPS Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2023 sebagaimana dimuat pada Akta Notaris Nomor 45 Tahun 2024 dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. The Annual Report for the 2023 Financial Year, the Audited Annual Financial Report for the 2023 Financial Year and the PUMK Financial Report for the 2023 Financial Year have been ratified at the Annual GMS of PT Bukit Asam Tbk for the 2023 Financial Year on May 8, 2024, and have been included in the Minutes of the Annual GMS of PT Bukit Asam Tbk for the 2023 Financial Year as stated in Notarial Deed Number 45 of 2024 made by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta.

Mata Acara Rapat Kedua **Second Agenda Item Meeting**	Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023. Approval of the use of the Company's Net Profit for the 2023 Financial Year.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat **Number of Shareholders Asking/Giving Opinions**	Tidak ada pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang saham. No questions asked by shareholders.
Ringkasan Pertanyaan dan Jawaban **Summary of Questions and Answers**	Tidak Ada None

Pengambilan Keputusan
Resolution-making

Dengan Pemungutan Suara By Voting		
Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
9.270.258.369 atau or 99,5103873%	20.334.500 atau or 0,2182781%	25.277.183 atau or 0,2713346 %

Keputusan Rapat **Resolutions**	1. Menetapkan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023 sebesar Rp6.105.856.005.760 (enam triliun seratus lima miliar delapan ratus lima puluh enam juta lima ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah) sebagai berikut: a. Dividen sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari laba bersih tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp4.579.392.004.320 (empat triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ribu tiga ratus dua puluh Rupiah); b. Sisanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp1.526.464.001.440 (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh empat juta seribu empat ratus empat puluh Rupiah) dicatat sebagai saldo laba ditahan. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen sesai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan pembayaran dividen harus telah diterima oleh para pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS mengenai dividen diputuskan. 1. Determine the use of current year profit attributable to owners of the parent entity for the 2023 financial year amounting to Rp6,105,856,005,760 (six trillion one hundred five billion eight hundred fifty six million five thousand seven hundred sixty Rupiah) as follows: a. Dividends of 75% (seventy five percent) of the 2023 net profit, which is Rp4,579,392,004,320 (four trillion five hundred seventy nine billion three hundred ninety two million four thousand three hundred twenty Rupiah); b. The remaining 25% (twenty five percent) of the 2023 net profit, which is Rp1,526,464,001,440 (one trillion five hundred twenty six billion four hundred sixty four million one thousand four hundred and forty Rupiah) is recorded as retained earnings. 2. Grant authority and power to the Company's Board of Directors with the right of substitution to further regulate the procedures for dividend distribution in accordance with applicable laws and regulations, with the provision that dividend payments must have been received by the shareholders within a maximum period of 30 (thirty) days from the date of the GMS decision regarding dividends.
Tindak Lanjut/Realisasi **Follow-up/Realization**	Dividen Tahun Buku PTBA Tahun Buku 2022, telah dibayarkan kepada pemegang saham pada tanggal 7 Juni 2024. PTBA Fiscal Year Dividends for Fiscal Year 2022, have been distributed to shareholders on June 7, 2024.

Mata Acara Rapat Ketiga **Third Agenda Item Meeting**	Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Determination of Remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for 2024 and bonuses for 2023 Financial Year for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat **Number of Shareholders Asking/Giving Opinions**	Terdapat 1 (satu) pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan telah ditanggapi oleh manajemen. There is 1 (one) opinion submitted by shareholders and has been responded to by management.
Ringkasan Pertanyaan dan Jawaban **Summary of Questions and Answers**	Terdapat 1 (satu) pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan telah ditanggapi oleh manajemen. Adapun pertanyaan dan jawaban pada intinya sebagai berikut: **Pendapat** Opini disampaikan oleh Bapak Deny Fancius yang hadir Rapat secara online pada platform yang disediakan KSEI sebagai berikut: Agar disesuaikan kondisi keuangan manajemen dengan penetapan remunerasi, pastikan gaji yang ada mampu memberikan dampak positif dan maksimal bagi kinerja para anggota Dewan. **Tanggapan/Jawaban** Akan menjadi menjadi pertimbangan ke depannya, dan dalam penentuan remunerasi memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/3/2023 yang telah diratifikasi oleh RUPS Perseroan, dan kebijakan yang berlaku di Grup MIND ID selaku kuasa pemegang saham seri A Dwiwarna. There is 1 (one) opinion submitted by the shareholder and has been responded to by management. The questions and answers are essentially as follows: **Opinion** The opinion was submitted by Mr. Deny Fancius who attended the Meeting virtually on the platform provided by KSEI as follows: In order to adjust the management's financial condition with the determination of remuneration, ensure that the existing salary is able to provide a positive and maximum impact on the performance of the Board members. **Response/Answer** It will be a consideration in the future, and in determining remuneration, it will pay attention to the provisions of the Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/3/2023 which has been ratified by the Company's GMS, and the policies applicable in the MIND ID Group as the attorney for the Dwiwarna A series shareholder.
Pengambilan Keputusan **Resolution-making**	Dengan Pemungutan Suara By Voting

Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
9.113.829.605 atau | or 97,8312230%	25.344.059 atau | or 0,2720525%	176.696.388 atau | or 1,8967245%

Keputusan Rapat **Resolutions**	1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris: a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi: a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode 2024 - 2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024. 1. Granting authority and power to PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the Company's Most Series B Shareholder after first consulting with the Dwiwarna Series A Shareholder to determine for the Members of the Board of Commissioners: a. Bonus/Performance Incentive/Special Incentive for the 2023 Financial Year and/or Long-Term Incentive for the 2024-2026 Period, in accordance with applicable provisions; and b. Honorarium, allowances, and facilities for the 2024 financial year. 2. Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners by first obtaining written approval from PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the Company's Most Series B Shareholder after consulting with the Dwiwarna Series A Shareholder to determine for the Members of the Board of Directors: a. Bonus/Performance Incentive/Special Incentive for the 2023 Financial Year and/or Long-Term Incentive for the 2024-2026 Period, in accordance with applicable provisions; and b. Salary, allowances, and facilities for the 2024 financial year.
Tindak Lanjut/Realisasi **Follow-up/Realization**	Telah ditetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 yang didasarkan pada Surat Dewan Komisaris No. 64/DEKOM/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 Perihal Penetapan Tantiem Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") serta Pembayaran Tahap I Tantiem Tahun Buku 2022 yang Ditangguhkan dan Surat Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. 371/E.DIRPPU/IX/2024 tanggal 19 September 2024 Perihal Penetapan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Penghasilan Tahun 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk ("PTBA"). The remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 Financial Year and the Bonus for the 2023 Financial Year have been determined based on the Letter of the Board of Commissioners No. 64/DEKOM/X/2024 dated October 8, 2024 concerning the Determination of Bonus for the 2024 Financial Year for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") and the Postponed Phase I Payment of Bonus for the 2022 Financial Year and the Letter of the Director of Portfolio and Business Development of PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the Attorney of the Series A Dwiwarna Shareholder No. 371/E.DIRPPU/IX/2024 dated September 19, 2024 concerning the Determination of Bonus for the 2023 Financial Year and Income for the 2024 Financial Year for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk ("PTBA").

Mata Acara Rapat Ke Empat **Fourth Agenda Item Meeting**	Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024. Appointment of Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2024 Financial Year.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat **Number of Shareholders Asking/Giving Opinions**	Tidak ada pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang saham. No questions were raised by shareholders.		
Ringkasan Pertanyaan dan Jawaban **Summary of Questions and Answers**	Tidak Ada None		
Pengambilan Keputusan **Resolution-making**	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	9.132.294.924 atau | or 98,0294366%	20.262.800 atau | or 0,2175084%	163.312.328 atau | or 1,7530550%

Keputusan Rapat **Resolutions**	1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan: a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, serta laporan lainnya dari Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dipilih, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan/ atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, serta laporan lainnya dari Perseroan, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut. 2. Dewan Komisaris Perseroan agar terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan sebelum meminta persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana pada angka 1 di atas. 1. Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners by first obtaining written approval from the Series A Dwiwarna Shareholder to carry out: a. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Financial Year and/or other periods in the 2024 Financial Year, the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the 2024 Financial Year, and other reports from the Company for the purposes and interests of the Company; and b. Determination of audit fees and other requirements for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, and appointment of a Replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the selected Public Accountant and/or Public Accounting Firm, for whatever reason, is unable to complete the provision of audit services for the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Financial Year and/or other periods in the 2024 Financial Year, the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the 2024 Financial Year, and other reports from the Company, including determining the audit fees and other requirements for the Replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm. 2. The Company's Board of Commissioners must first obtain a recommendation from the Company's Most Series B Shareholder before requesting approval from the Series A Dwiwarna Shareholder as referred to in point 1 above.
Tindak Lanjut/Realisasi **Follow-up/Realization**	Sebagai tindak lanjut Keputusan RUPS, Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 18 Desember 2025, telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dan Akuntan Publik Dewi Novita Sari, dengan tanggal perjanjian/engagement letter tertanggal 26 Februari 2025. Perseroan telah melaporkan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik ke OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan pada tanggal 3 Maret 2025. As a follow-up to the General Meeting of Shareholders (GMS) resolution, on December 18, 2025, the Company's Board of Commissioners appointed the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) and Public Accountant Dewi Novita Sari, with the engagement letter dated February 26, 2025. The Company has reported the appointment of the Public Accounting Firm and Public Accountant to the Financial Services Authority (OJK) under the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm Services in Financial Services Activities, on March 3, 2025.

Mata Acara Rapat Kelima **Fifth Agenda Item Meetin**	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Changes to the Company's Management Composition.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/Memberikan Pendapat **Number of Shareholders Asking/Giving Opinions**	1 (satu) pemegang saham menyampaikan opini melalui aplikasi eASY.KSEI. 1 (one) shareholder submits an opinion via the eASY.KSEI application.
Keterangan **Note**	Merujuk kepada Surat PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor: 157/E.DIRUT/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang ditujukan kepada Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2024 Hal Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT Bukit Asam Tbk (Perseroan) yang didasarkan pada Surat Menteri BUMN Nomor: SR-264/MBU/05/2024 tanggal 7 Mei 2024, Perihal Perubahan Usulan Pengurus Anak Perusahaan PT Mineral Industri Indonesia (Persero), maka PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyampaikan tidak terdapat usulan perubahan pengurus pada Perseroan. Oleh karena tidak terdapat usulan perubahan pengurus pada Perseroan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan pada Mata Acara ke-5 (kelima) (Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan) dan selanjutnya agar Direksi Perseroan menyatakan seluruh keputusan RUPS Tahunan Tahun 2024 (Tahun Buku 2023) dalam akta notaris dan pelaporan terkait data Perseroan. Referring to the Letter of PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Number:157/E.DIRUT/V/2024 dated May 8, 2024, addressed to the Chairman of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2024 Regarding the Proposed Changes to the Management of PT Bukit Asam Tbk (the Company) which is based on the Letter of the Minister of SOEs Number: SR-264/MBU/05/2024 dated May 7, 2024, Regarding the Proposed Changes to the Management of the Subsidiary of PT Mineral Industri Indonesia (Persero), then PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the Attorney of the Series A Dwiwarna Shareholder conveys there are no proposed changes to the management of the Company. Since there is no proposed change in management of the Company, no decision was taken on the 5th (fifth) Agenda (Approval of Changes to the Company's Management Composition) and further so the Company's Board of Directors declares all decisions of the 2024 Annual GMS (Fiscal Year 2023) in a notarial deed and reporting related to the Company's data.

Pengambilan Keputusan **Resolution-making**	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	-	-	-
Keputusan Rapat **Resolutions**	Keterangan: Merujuk kepada Surat PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor: 157/E.DIRUT/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang ditujukan kepada Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2024 Hal Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT Bukit Asam Tok (Perseroan) yang didasarkan pada Surat Menteri BUMN Nomor: SR-264/MBU/05/2024 tanggal 7 Mei 2024, Perihal Perubahan Usulan Pengurus Anak Perusahaan PT Mineral Industri Indonesia (Persero), maka PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyampaikan tidak terdapat usulan perubahan pengurus pada Perseroan. Oleh karena tidak terdapat usulan perubahan pengurus pada Perseroan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan pada Mata Acara ke-5 (kelima) (Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan) dan selanjutnya agar Direksi Perseroan menyatakan seluruh keputusan RUPS Tahunan Tahun 2024 (Tahun Buku 2023) dalam akta notaris dan pelaporan terkait data Perseroan. Description: Referring to the Letter of PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Number: 157/E.DIRUT/V/2024 dated May 8, 2024 addressed to the Chairman of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2024 Regarding the Proposed Changes to the Management of PT Bukit Asam Tok (the Company) which is based on the Letter of the Minister of SOEs Number: SR-264/MBU/05/2024 dated May 7, 2024, Regarding the Proposed Changes to the Management of the Subsidiary of PT Mineral Industri Indonesia (Persero), then PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the Attorney of the Series A Dwiwarna Shareholder conveys no proposed change in the management of the Company. Since there is no proposal for changes to the Company's management, no decision will be taken on Agenda Item 5 (fifth) (Approval of Changes to the Company's Management Composition) and furthermore, the Company's Board of Directors must state all decisions of the 2024 Annual GMS (Fiscal Year 2023) in a notarial deed and reporting related to the Company's data.		
Tindak Lanjut/Realisasi **Follow-up/Realization**	Mengingat tidak ada keputusan maka tidak ditindaklanjuti, namun untuk hal-hal yang dibicarakan/diskusikan selama rapat termuat pada pada Akta Notaris Nomor 45 Tahun 2024 dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Considering there was no decision, it was not followed up, however, the matters discussed during the meeting were contained in Notarial Deed Number 45 of 2024 made by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta.		

RUPS Tahun 2023

Pada tahun 2023 PTBA menyenggarakan RUPS sebanyak 1 (satu) kali, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2023, Seluruh keputusan RUPS Tahunan tersebut telah direalisasikan pada tahun 2023. Agenda, keputusan dan realisasi dari keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 adalah sebagai berikut:

GMS in 2023

Throughout 2023, the Company has held 1 (one) GMS, namely the Annual GMS for 2022 Fiscal Year on June 15, 2023, physically and virtually. The implementation of AGMS is in accordance with the mechanism stated in POJK No. 15/POJK.04/2020 regarding Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and the provisions of the Company's Articles of Association.

Mata Acara Rapat Kesatu **First Agenda Item Meeting**	Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan, persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perusahaan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Report and Ratification of the Annual Financial Report and Implementation of the Company's Social and Environmental Responsibility Program for the fiscal year ending December 31, 2022, as well as the granting of full settlement and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions that have been carried out during 2022 Fiscal Year.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat **Number of Shareholders Asking/Giving Opinions**	Tidak Ada None
Ringkasan Pertanyaan dan Jawaban **Summary of Questions and Answers**	Tidak Ada None

Pengambilan Keputusan **Resolution-making**	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	9.633.203.203 atau 99,60% 9,633,203,203 or 99.60%	29.328.338 atau 0,30% 29,328,338 or 0.30%	9.792.384 atau 0,10% 9,792,384 or 0.10%
Keputusan Rapat **Resolutions**	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sesuai dengan laporannya No. 00220/2.1025/AU.1/02/0243-1/1/11/2023 tanggal 28 Februari 2023 dengan opini "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan perusahaan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perusahaan. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecii untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sesuai laporannya No. 00524/2.1025/AU.2/11/0243-1/1/111/2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan opini "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perusahaan. 1. Approve the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the 2022 Financial Year and the Social and Environmental Responsibility Program Implementation Report as well as ratify the Company's Consolidated Financial Report for the 2022 Financial Year ending on December 31, 2022, which has been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC Indonesia) in accordance with its report No. 00220/2.1025/AU.1/02/0243-1/1/11/2023 dated February 28, 2023, with an opinion of "fair in all material respects", and provide full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Directors and Board of Commissioners of the Company for actions in the management and supervision of the company that have been carried out in the Financial Year ending on December 31, 2022, as long as these actions do not constitute criminal acts and are reflected in the report books company. 2. Ratify the Financial Report on the Implementation of the Micro and Small Business Funding Program for the 2022 Financial Year ending on December 31, 2022, which is part of the Social and Environmental Responsibility Report as audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) according to its report No. 00524/2.1025/ AU.2/11/0243-1/1/111/2023 dated March 31, 2023, with the opinion "fair in all material respects", as well as providing full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the actions in managing and supervising the Micro and Small Business Funding Program which have been carried out in the Financial Year ending on December 31, 2022, as long as these actions do not constitute criminal acts and are reflected in the report books Company.		
Tindak Lanjut/Realisasi **Follow-up/Realization**	Laporan Tahunan Tahun Buku 2022, Laporan Keuangan Tahunan Audited Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan PUMK Tahun Buku 2022 telah disahkan pada RUPS Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2022 pada tanggal 15 Juni 2023 dan telah dimuat pada Berita Acara RUPS Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2022 sebagaimana dimuat pada Akta Notaris Nomor 60 Tahun 2023 dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. The Annual Report for the 2022 Financial Year, the Audited Annual Financial Report for the 2022 Financial Year, and the PUMK Financial Report for the 2022 Financial Year have been ratified at the Annual GMS of PT Bukit Asam Tbk for the 2022 Financial Year on June 15, 2023, and set forth in the Meeting Minutes which has been contained in Deed No. 60 of 2023, made by and before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta.		

Mata Acara Rapat Kedua **Second Agenda Item Meeting**	Penetapan penggunaan laba bersih, pembagian dividen untuk Tahun Buku 2022. Determination of the use of net income, including the distribution of dividends for 2022 Fiscal Year.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat **Number of Shareholders Asking/ Giving Opinions**	Terdapat satu pertanyaan dari pemegang saham, namun mengingat pertanyaan tidak relevan dengan mata acara Rapat, maka sesuai dengan tata tertib Rapat tidak ditanggapi oleh Perusahaan. One shareholder asked a question but considering that the question was not relevant to the agenda of the Meeting, in accordance with the Meeting's rules and regulations, the Company did not respond to it.
Ringkasan Pertanyaan dan Jawaban **Summary of Questions and Answers**	Tidak Ada None

Pengambilan Keputusan **Resolution-making**	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	9.648.355.925 atau 99,75% 9,648,355,925 or 99.75%	22.616.300 atau 0,24% 22,616,300 or 0.24%	1.351.700 atau 0,01% 1,351,700 or 0.01%
Keputusan Rapat **Resolutions**	1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2022 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perusahaan sebesar Rp12.567.581.927.964 (Dua Belas Triliun Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Delapan Puiuh Satu Juta Sembiian Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembiian Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), sebagai dividen seluruhnya. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang beriaku pada bursa efek di tempat saham Perusahaan dicatatkan. 1. Approved the determination of the use of net profit for the 2022 Fiscal Year attributable to the owner of the Company's parent entity amounting to Rp12,567,581,927,964 (Twelve Trillion Five Hundred Sixty Seven Billion Five Hundred Eight Hundred Million Nine Hundred Twenty Seven Thousand Nine Hundred Sixty Four Rupiah), as full dividends. 2. Grant authority and power to the Board of Directors with the right of substitution to further regulate the procedures for distributing dividends and to announce them by taking into account the regulations applicable to the stock exchange where the Company's shares are listed.		
Tindak Lanjut/Realisasi **Follow-up/Realization**	Dividen Tahun Buku PTBA Tahun Buku 2022, telah dibayarkan kepada pemegang saham pada tanggal 14 Juli 2023 Dividends have been distributed to all shareholders of the Company on July 14, 2023.		

Mata Acara Rapat Ketiga **Third Agenda Item Meeting**	Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2022 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2023. Determination of bonuses for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for 2022 Fiscal Year and salary/ honorarium along with facilities and allowances for 2023 Fiscal Year.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat **Number of Shareholders Asking/Giving Opinions**	Tidak Ada None		
Ringkasan Pertanyaan dan Jawaban **Summary of Questions and Answers**	Tidak Ada None		
Pengambilan Keputusan **Resolution-making**	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	9.470.564.465 atau 97,91%	30.015.459 atau 0,31%	171.744.001 atau 1,78%
Keputusan Rapat **Resolutions**	1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besaran tantiem untuk Tahun Buku 2022 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk Tahun 2023. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak seteiah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi Perusahaan untuk Tahun 2023. 1. Granted authority and power to PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the largest Series B Shareholder by first consulting with Series A Dwiwarna Shareholders to determine the amount of the bonus for the 2022 Financial Year as well as determine the honorarium, allowances, facilities, and other incentives for members Company's Board of Commissioners in 2023. 2. Granted authority and power to the Company's Board of Commissioners by first obtaining written approval from PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the largest Series B Shareholder after consulting with Dwiwarna Series A Shareholders to determine the amount of the bonus for the 2022 Fiscal Year as well as determining salaries and allowances, facilities, and other incentives for the Company's Directors in 2023.		

Tindak Lanjut/Realisasi **Follow-up/Realization**	Telah ditetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022 yang didasarkan pada Surat Dewan Komisaris No. 57/DEKOM/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Perihal Penetapan Perhitungan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 dan Gaji/Honorarium Berikut Tunjangan dan Fasilitas Tahun Buku 2023 PT Bukit Asam Tbk serta Surat Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Mineral Industri Indonesi (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. 271/E.DIRPPU/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 Perihal Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Gaji/Honorarium dan Penghasilan Tahun 2023 bagi Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk ("PTBA"). The remuneration of the Directors and Board of Commissioners for the 2023 Financial Year and the bonus for the 2022 Financial Year has been determined based on the Letter of the Board of Commissioners No. 57/DEKOM/VIII/2023 dated August 14, 2023, concerning Determination of the Bonus Calculation for the Directors and Board of Commissioners for the 2022 Financial Year and Salaries/ Honorarium and Benefits and Facilities for the 2023 Fiscal Year of PT Bukit Asam Tbk and Letter from the Director of Portfolio and Business Development of PT Mineral Industri Indonesi (Persero) as Proxy for Series A Dwiwarna Shareholder No. 271/E.DIRPPU/VIII/2023 dated August 11, 2023, Regarding Determination of Bonus on the 2022 Fiscal Year and Salary/Honorarium and Revenue in 2023 for Directors and Members of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk ("PTBA").
Mata Acara Rapat Keempat **Fourth Agenda Item Meeting**	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Pubiik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecii Tahun Buku 2023. Approval for the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements and the Financial Statements of Partnership and Community Development Program for 2023 Fiscal Year.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat **Number of Shareholders Asking/ Giving Opinions**	Tidak Ada None
Ringkasan Pertanyaan dan Jawaban **Summary of Questions and Answers**	Tidak Ada None
Pengambilan Keputusan **Resolution-making**	Dengan Pemungutan Suara By Voting

Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
9.485.861.068 atau | or 98,07%	22.112.000 atau | or 0,23%	164.350.857 atau | or 1,70%

Keputusan Rapat
Resolutions

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana Rintis & Rekan anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC Indonesia) antara lain untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023, serta Laporan lain yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk dilakukan audit, termasuk Laporan Pencapaian Key Performance Indicators Direksi secara kolektif dan individual serta Laporan PSA 62 Perusahaan untuk Tahun Buku 2023.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk:
   a. Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perusahaan;
   b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabilas Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan
   c. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti.

1. Appoint Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana Rintis & Rekan, a member of the global network PricewaterhouseCoopers (PwC Indonesia), among others, to carry out a General Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Financial Year and other periods in the 2023 Financial Year, to carry out a general audit of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the 2023 Financial Year, and other Reports required by applicable laws and regulations to be audited, including the Board of Directors' Key Performance Indicators Achievement Report collectively and individually and the Company's PSA 62 Report for the 2023 Financial Year.
2. Delegating authority to the Board of Commissioners by first obtaining approval from the majority Series B Shareholder to:
   a. Appoint a Public Accountant at the Public Accounting Firm that has been determined in this Meeting, since the appointment of a public accountant needs to be adjusted to the evaluation results, and as long as the appointment is made subject to the Public Accountant criteria set out in the Company's policy;
   b. Appoint a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm if the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm cannot continue or carry out duties for any reason based on capital market provisions and regulations; and
   c. Determine the conditions, requirements for appointment and honorarium of the replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

Tindak Lanjut/Realisasi **Follow-up/Realization**	Telah ditunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana Rintis & Rekan anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC Indonesia) pada RUPST PTBA Tahun Buku 2022 tanggal 15 Juni 2023 dan Dewan Komisaris PTBA telah menunjuk Akuntan Publik Yusron, S.E., Ak, CPA dan telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat No. T/225/111000/KS.03/VI/2023 tanggal 20 Juli 2023 Perihal Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada PT Bukit Asam Tbk. The Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana Rintis & Partners, members of the global network PricewaterhouseCoopers (PwC Indonesia) have been appointed at the PTBA AGMS for the 2022 Fiscal Year on June 15, 2023, and the PTBA Board of Commissioners has appointed Public Accountant Yusron, S.E., Ak, CPA which has been reported to OJK based on Letter No. T/225/111000/KS.03/VI/2023 dated July 20, 2023, concerning Report on the Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the Context of an Audit of Annual Historical Financial Information at PT Bukit Asam Tbk.
Mata Acara Rapat Kelima **Fifth Agenda Item Meeting**	Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Approval of amendment to the Company's Articles of Association
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat **Number of Shareholders Asking/ Giving Opinions**	Tidak Ada None
Ringkasan Pertanyaan dan Jawaban **Summary of Questions and Answers**	Tidak Ada None

Pengambilan Keputusan **Resolution-making**	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	8.580.010.770 atau | or 88,71%	30.159.159 atau | or 0,31%	1.062.153.991 atau | or 10,98%

Keputusan Rapat **Resolutions**	1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, antara lain: b. Dalam rangka penyesuaian/ penambahan hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (yang dapat dikuasakan) di Perusahaan sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2022 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022; serta c. Penyesuaian terhadap ketentuan peraturan di lingkup Badan Usaha Milik Negara; 2. sesuai dengan usulan dari PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku kuasa pemegang saham seri A Dwiwarna, sebagaimana usulan yang telah disampaikan kepada pemegang saham Perusahaan. a. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) keputusan tersebut di atas, termasuk pernyataan kembali susunan pemegang saham Perusahaan yaitu sebagai berikut: b. Negara Republik Indonesia memiliki sebanyak 5 (lima) lembar saham Seri A Dwiwarna; c. PT Mineral Industri Indonesia (Persero) memiliki sebanyak 7.595.650.695 (Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima) lembar saham Seri B; d. Perusahaan memiliki sebanyak 33.449.900 (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus) lembar saham Seri B; dan 3. Masyarakat memiliki sebanyak 3.891.558.650 (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh) lembar saham Seri B. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada, melakukan penyempurnaan atas perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana diperlukan dengan berkoordinasi dengan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku penerima kuasa khusus dari pemegang saham Seri A Dwiwarna, untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris serta menyatakan susunan pemegang saham terakhir, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. 1. Approved changes to the Company's Articles of Association, including: a. In order to adjust/add to the rights of Series A Dwiwarna Shareholders (which can be authorized) in the Company in connection with the issuance of Government Regulation Number 45 of 2022 jo. Government Regulation Number 46 of 2022; as well as b. Adjustments to regulatory provisions within the scope of State-Owned Enterprises; in accordance with the proposal from PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the attorney for the Series A Dwiwarna shareholder, as the proposal has been submitted to the Company's shareholders. 2. Approved to re-arrange all provisions in the Articles of Association in connection with the amendment provisions as referred to in number 1 (one) of the decision above, including a restatement of the composition of the Company's shareholders, namely as follows: a. The Republic of Indonesia owns 5 (five) Series A Dwiwarna shares; b. PT Mineral Industri Indonesia (Persero) owns 7,595,650,695 (Seven Billion Five Hundred Ninety Five Million Six Hundred Fifty Thousand Six Hundred Ninety Five) Series B shares; c. The Company owns 33,449,900 (Thirty Three Million Four Hundred Forty Nine Thousand Nine Hundred) Series B shares; And d. The public owns 3,891,558,650 (Three Billion Eight Hundred Ninety One Million Five Hundred Fifty Eight Thousand Six Hundred and Fifty) Series B shares. 3. Granted power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions related to the decisions on the agenda of this Meeting, including but not limited to, making improvements to changes to the Company's Articles of Association as necessary in coordination with PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as recipient of special power of attorney from the Series A Dwiwarna shareholder, to prepare and restate all changes to the Articles of Association in a Notarial Deed as well as state the final composition of shareholders, and submit to the authorized agency to obtain approval and/or a sign of acceptance of the changes to the Articles of Association, and do everything that is deemed necessary and useful for these purposes with nothing being excluded, including making additions and/or changes to the Articles of Association if this is required by the competent authority.
Tindak Lanjut/Realisasi **Follow-up/Realization**	Anggaran Dasar PTBA telah dimuat pada Akta Nomor 61 Tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.01.03-0090409 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.09-0138986 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan PT Bukit Asam Tbk;" PTBA's Articles of Association have been contained in Deed Number 61 dated June 15, 2023, made by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn Notary in Jakarta. The notification has been received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Letter of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU.AH.01.03-0090409 dated July 12, 2023, Concerning Receipt of Notification of the Articles of Association of PT Bukit Asam Tbk and Letter of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0138986 dated July 12, 2023, Concerning Receipt of Notification of Changes to Company Data of PT Bukit Asam Tbk;"

Mata Acara Rapat Keenam **Sixth Agenda Item Meeting**	Pengukuhan (ratifikasi) atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Repubiik Indonesia (Permen BUMN) berikut: 1. Permen BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosiai dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara: 2. Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Keloia dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan 3. Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Ratification of the following Regulations of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia (SOEs Decree): 1. SOEs Ministerial Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises: 2. SOEs Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and 3. SOEs Ministerial Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat **Number of Shareholders Asking/ Giving Opinions**	Tidak Ada None
Ringkasan Pertanyaan dan Jawaban **Summary of Questions and Answers**	Tidak Ada None
Pengambilan Keputusan **Resolution-making**	Dengan Pemungutan Suara By Voting

Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
9.647.080.625 atau | or 99,74%	23.100.600 atau | or 0,24%	2.142.700 atau | or 0,02%

Keputusan Rapat **Resolutions**	Mengukuhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Miiik Negara, sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosiai dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; 2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Keloia dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan 3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari. Officiating the Implementation of the Agency Ministerial Regulation State-Owned Enterprises, as follows: 1. Minister of SOEs Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises; 2. Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and 3. Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises; Following are the changes in the future.
Tindak Lanjut/Realisasi **Follow-up/Realization**	1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; 2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan 3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; Telah disahkan untuk diratifikasi pada RUPS PTBA Tahun Buku 2022 tanggal 15 Juni 2023, yang dimuat pada Akta Notaris Nomor 60 Tahun 2023 dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. 1. Minister of SOEs Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises; 2. Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and 3. Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises; Has been approved for ratification at the PTBA GMS for Fiscal Year 2022 on June 15, 2023, which was contained in Notarial Deed Number 60 of 2023 made by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta.

Mata Acara Rapat Ketujuh **Seventh Agenda Item Meeting**	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan Approval of Changes in the Composition of the Company's Management.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat **Number of Shareholders Asking/ Giving Opinions**	Tidak Ada None

Ringkasan Pertanyaan dan Jawaban **Summary of Questions and Answers**	Tidak Ada None
Pengambilan Keputusan **Resolution-making**	Dengan Pemungutan Suara By Voting

Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
8.438.150.954 atau | or 87,24%	29.492.459 atau | or 0,31%	1.204.680.512 atau | or 12,45%

Keputusan Rapat
Resolutions

1. Mengukuhkan pengakhiran masa jabatan anggota- anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:
   a. Sdr. Agus Suhartono sebagai Komisaris Utama/Independen terhitung sejak tanggal 11 April 2023; dan
   b. Sdri. Devi Pradnya Paramita sebagai Komisaris terhitung sejak tanggal 21 Maret 2023.
2. Mengalihkan penugasan Sdr. Irwandy Arif, dari semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama PT Bukit Asam Tbk, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebagai berikut:
   a. Sdr. Kurnia Toha sebagai Komisaris Independen; dan;
   b. Sdr. Rahmat Hidayat Pulungan sebagai Komisaris Independen.
3. Dengan adanya pengakhiran masa jabatan, pengalihan penugasan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 di atas, maka susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut:

1. Confirmed the termination of the terms of office of the members of the Board of Commissioners as follows:
   a. Agus Suhartono as President/Independent Commissioner as of April 11, 2023; And
   b. Devi Pradnya Paramita as Commissioner as of March 21, 2023.
2. Assignment transfer of Irwandy Arif, from being Commissioner to become President Commissioner of PT Bukit Asam Tbk, with the term of office continuing the remaining term of office in accordance with the GMS decision regarding the appointment of the person concerned.
3. Appointed members of the Company's Board of Commissioners as follows:
   a. Kurnia Toha as Independent Commissioner; And;
   b. Rahmat Hidayat Pulungan as Independent Commissioner.
3. With the termination of the term of office, transfer of assignments and appointment of members of the Company's Board of Commissioners as referred to in numbers 1, 2 and 3 above, the composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company will be as follows:

Direksi
Board of Directors
1. Direktur Utama | President Director: Sdr. Arsal Ismail
2. Direktur Operasi dan Produksi | Operations and Production Director: Sdr. Suhedi
3. Direktur Pengembangan Usaha | Business Development Director: Sdr. Rafli Yandra
4. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | Finance and Risk Management Director: Sdri. Farida Thamrin
5. Direktur Sumber Daya Manusia | Human Resources Director: Sdr. Suherman

Dewan Komisaris
Board of Commissioners
1. Komisaris Utama | President Commissioner: Sdr. Irwandy Arif
2. Komisaris Independen | Independent Commissioner: Sdr. Kurnia Toha
3. Komisaris Independen | Independent Commissioner: Sdr. Rahmat Hidayat Pulungan
4. Komisaris Independen | Independent Commissioner: Sdr. Andi Pahril Pawi
5. Komisaris | Commissioner: Sdr. E. Piterdono HZ
6. Komisaris | Commissioner: Sdr. Carlo Brix Tewu

1. Bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan untuk menyatakan segala sesuatu yang diputuskan rapat dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

1. Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors appointed as referred to in number 4 above who are still serving in other positions which are prohibited under the Laws and Regulations from holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, the person concerned must resign or dismissed from his position.
2. Granted power of attorney with the right of substitution to the Company's Directors to declare everything decided at the meeting in the form of a Notarial deed and appear before a Notary or authorized official, and make necessary adjustments or corrections if required by the authorized party for the purposes of implementing the contents of the meeting's decisions.

Tindak Lanjut/Realisasi **Follow-up/Realization**	Perubahan Pengurus PTBA yang telah disetujui oleh RUPS PTBA Tahun Buku 2022 tanggal 15 Juni 2023, dan telah dimuat pada Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimuat pada Akta Nomor 62 Tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria SH., M.Kn Notaris di Jakarta yang penerimaan pemberitahuannya sebagaimana Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.01.09.0130619 Tanggal 22 Juni 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan PT Bukit Asam Tbk. Changes in the Management of PTBA which have been approved by the PTBA GMS for the 2022 Fiscal Year dated June 15, 2023, and have been included in the Statement of Decisions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders contained in Deed Number 62 dated June 15, 2023, made by Jose Dima Satria SH., M.Kn Notary in Jakarta whose receipt of notification is in accordance with the Letter of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU.AH.01.09.0130619 Dated June 22, 2023, Regarding Receipt of Notification of Changes to Company Data PT Bukit Asam Tbk.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan. Selain melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris juga berkewajiban memantau dan memastikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

The Board of Commissioners is a corporate organ that performs the function of supervision and provides advice to the Board of Directors in managing the Company's operations. In addition to performing its supervisory function, the Board of Commissioners is also responsible for monitoring and ensuring that good corporate governance has been effectively and sustainably implemented.

Pedoman Kerja/Piagam Dewan Komisaris

Sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh MIND ID selaku holding PTBA, di tahun 2024, PTBA melakukan penyelarasan kebijakan internal PTBA. Salah satu yang menjadi penyelarasan yaitu perubahan Panduan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Panduan Kerja Dewan Komisaris yang sebelumnya menjadi satu dengan Panduan Kerja Direksi, di tahun 2024 panduan tersebut dipisahkan menjadi suatu kebijakan sendiri menjadi Pedoman Kerja Dewan Komisaris.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris telah disahkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 16/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris (*Charter to Board of Commissioners*) PT Bukit Asam Tbk. Secara garis besar, Pedoman Kerja Dewan Komisaris PTBA mencakup:

1. Ketentuan Umum;
2. Keanggotaan Dewan Komisaris;
3. Program Pengenalan, Remunerasi, dan Pelatihan Dewan Komisaris;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Tugas dan Kewajiban;
6. Wewenang, Pembagian Tugas, dan Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan;
7. Rapat Dewan Komisaris;
8. Hubungan Kerja Dewan Komisaris dengan Direksi;
9. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris;
10. Evaluasi Kinerja Direksi; dan
11. Organ Pendukung Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners Work Guidelines/ Charter

In line with the policies set by MIND ID as PTBA's holding company, in 2024, PTBA aligned the Company's internal policies. One of the areas of alignment is the change to the Board of Directors' Work Guide for the Board of Commissioners. The Board of Commissioners' Work Guide, which was previously integrated with the Board of Directors' Work Guide, was separated into its own policy in 2024 and become the Board of Commissioners' Work Guide.

The Board of Commissioners' Work Guidelines have been approved by the Board of Commissioners based on Board of Commissioners Decree No. 16/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 concerning PT Bukit Asam Tbk's Charter to Board of Commissioners Work Guidelines. In general, the PTBA Board of Commissioners' Work Guidelines include:

1. General Provisions;
2. Membership of the Board of Commissioners;
3. Introduction, Remuneration and Training Program for Board of Commissioners;
4. Work Plan and Budget of the Board of Commissioners;
5. Duties and Obligations;
6. Authority, Division of Duties and Principles of Decision Making;
7. The Board of Commissioners meetings;
8. Working relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors;
9. Performance Evaluation of the Board of Commissioners;
10. Performance Evaluation of the Board of Directors; and;
11. Supporting Organs for the Board of Commissioners.

Masa Jabatan

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS

Term of Office

Members of the Board of Commissioners are appointed for a period starting from the date determined by the GMS that appointed them and ends at the closing of the

Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
2. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan, apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
   a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
   b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
   c. Terlibat dalam Tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara;
   d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatuhan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
   e. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
   f. Mengundurkan diri.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat pula diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perusahaan.

Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya kepada Perusahaan.
2. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
3. Perusahaan melalui Sekretaris Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
   a. Diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar.
   b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

5th Annual GMS after the date of appointment, with the requirement of not exceeding the 5 (five) years period by considering capital market laws and regulations, but without prejudice to the right of GMS to dismiss members of the Board of Commissioners before their term of office ends. After the term of office ends, members of the Board of Commissioners can be reappointed by the GMS for one term of office.

Dismissal of Members of The Board of Commissioners

1. Members of the Company's Board of Commissioners may be dismissed at any time based on the GMS Resolution by conveying the reasons.
2. Members of the Board of Commissioners may be dismissed if based on the facts, the members of the Board of Commissioners concerned:
   a. Unable to carry out their duties properly;
   b. Violate the provisions of Articles of Association and laws and regulations;
   c. Engage in actions that are detrimental to the Company and/or the state;
   d. Take actions that violate ethics and/or compliance that should be respected as a member of the Board of Commissioners;
   e. Is declared guilty by a court decision that has permanent legal force;
   f. Resign.
3. The GMS may also dismiss members of the Board of Commissioners based on other reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of the Company.

Resignation of Members of the Board of Commissioners

1. A member of the Board of Commissioners has the right to resign from his/her position before the end of his/her term of office by giving written notification of his/her intention to the Company.
2. The Company is required to hold a GMS to decide on the application for resignation of members of the Board of Commissioners within no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation letter.
3. The Company, through the Corporate Secretary, is required to disclose information to the public and submit it to OJK no later than 2 (two) working days after:
   a. The application for resignation of members of the Board of Commissioners is accepted as stipulated in the Articles of Association.
   b. The results of GMS as referred to in the Company's Articles of Association.

4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
6. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua), maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

Susunan, Jumlah, dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris pada Tahun 2024

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris, jumlah anggota Dewan Komisaris disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan, yakni sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

Anggota Dewan Komisaris di PTBA berjumlah 6 (enam) orang, dan tidak mengalami perubahan secara jumlah untuk tahun 2024. Jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mengatur bahwa:

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.

4. Before the resignation becomes effective, the member of the Board of Commissioners concerned is still obliged to complete his/her duties and responsibilities following the Articles of Association and prevailing laws and regulations.
5. The resigning member of the Board of Commissioners can still be held accountable as a member of the Board of Commissioners from the appointment in question until the resignation approval date at the GMS.
6. The discharge of responsibility of member of the Board of Commissioners who resigns is given after the Annual GMS releases him/her.
7. If a member of the Board of Commissioners resigns and the number of members of the Board of Commissioners becomes less than 2 (two), then the resignation is valid if the GMS has confirmed it and a new member of the Board of Commissioners has been appointed, thus meeting the minimum requirements for the number of members of the Board of Commissioners.

Structure, Number, and Composition of Members of the Board of Commissioners in 2024

Based on the Company's Articles of Association and Charter of Board of Commissioners, the number of members of the Board of Commissioners is adjusted to the needs of the Company, namely consisting of at least 2 (two) persons, one of whom is appointed as President Commissioner.

The number of members of the Board of Commissioners in PTBA are 6 people, with no change in 2024. The current number of members of the Board of Commissioners has complied with the provisions of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies which regulates that:

1. The Board of Commissioners consists of at least 2 (two) members of the Board of Commissioners.
2. In the event that the Board of Commissioners consists of more than 2 (two) members of the Board of Commissioners, the number of Independent Commissioners must be at least 30% of the total number of members of the Board of Commissioners.
3. 1 (one) member of the Board of Commissioners is appointed as President Commissioner.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2024
Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Ketetapan Legal Basis	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan 15 Juni 2023 Annual GMS Resolution on June 15, 2023	2023 - 2025	Pertama First Term
	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan 10 Juni 2020 Annual GMS Resolution on June 10, 2020	2020 – 2025	
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan 10 Juni 2020 Annual GMS Resolution on June 10, 2020	2020 – 2025	Pertama First Term
E. Piterdono HZ	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan 10 Juni 2020 Annual GMS Resolution on June 10, 2020	2020 – 2025	Pertama First Term
Carlo Brix Tewu	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan 10 Juni 2020 Annual GMS Resolution on June 10, 2020	2020 – 2025	Pertama First Term
Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan 15 Juni 2023 Annual GMS Resolution on June 15, 2023	2023 – 2028	Pertama First Term
Rahmat Hidayat Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan 15 Juni 2023 Annual GMS Resolution on June 15, 2023	2023 – 2028	Pertama First Term

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan, Kontrak Manajemen Direksi, dan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Dewan Komisaris harus:
1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta mengimplementasikan prinsip-prinsip profesional, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;

2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is responsible to supervise management policies, the implementation of management in general regarding the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors, and providing advice to the Board of Directors including the implementation of the Company's Long Term Plan, the Company's Annual Work Plan and Budget, Directors' Management Contracts and Budget provisions, and the Company's principles, as well as applicable laws and regulations in accordance with the Company's aims and objectives.

In implementing their duties, members of the Board of Commissioners must:
1. Comply with the Articles of Association and laws and regulations and implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.
2. Possess good faith, full of prudence, and responsible in carrying out supervisory duties and providing advice to the Board of Directors for the benefit of the Company and following the purposes and objectives of the Company.

3. Memantau dan memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada Perusahaan telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Selain tugas di atas, Dewan Komisaris memiliki beberapa tugas pengawasan khusus berkaitan dengan bidang-bidang di bawah ini:

1. Terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja
   a. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, bertugas memberikan pendapat dan persetujuan RKAP serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi.

   b. Persetujuan Rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris paling lambat dilakukan pada 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun RKAP yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Persetujuan Dewan Komisaris atas Rancangan RKAP dapat ditetapkan setelah mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya.
2. Terkait dengan Nominasi Anggota Direksi Perusahaan

   a. Dewan Komisaris dapat dibantu oleh komite yang membidangi nominasi dan remunerasi menyusun kriteria seleksi, prosedur nominasi, serta penilaian bagi calon Anggota Direksi Perusahaan;

   b. Dewan Komisaris mengusulkan calon Anggota Direksi Perusahaan dari hasil proses nominasi oleh Dewan Komisaris yang dapat dibantu oleh komite yang membidangi nominasi dan remunerasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya untuk dilakukan seleksi lebih lanjut tanpa membatasi calon lain yang diusulkan sebelum ditetapkan dalam RUPS.

3. Terkait dengan Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan
   a. Dewan Komisaris menerima usulan calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang diusulkan oleh Direksi, untuk kemudian memberikan persetujuan tertulis sebagaimana tercantum pada Anggaran Dasar Perusahaan dan *Threshold* Dewan Komisaris.

   b. Menyampaikan permohonan persetujuan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan dan penjelasan atau dokumen lengkap dari Direksi Perusahaan.

3. Monitor and ensure that the principles of Good Corporate Governance has been implemented effectively and sustainably.

In addition, the Board of Commissioners also has several special supervisory duties relating to the areas below:

1. Related to Strategy and Work Plans
   a. The Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee and Risk Monitoring Committee, must provide opinions and approval for the CWPB and other work plans prepared by the Board of Directors.
   b. Approval of the WP&B Draft by the Board of Commissioners must be carried out no later than 30 (thirty) days after the current fiscal year (the relevant CWPB year) or within the time specified in the applicable laws and regulations.

   c. The Board of Commissioners' approval of the WP&B Draft can be determined after obtaining approval from the Series A Dwiwarna Shareholders or their proxies.
2. Related to the Nomination of Members of the Company's Board of Directors
   a. The Board of Commissioners can be assisted by the committee in charge of nomination and remuneration in preparing selection criteria, nomination procedures, and assessments for prospective members of the Company's Board of Directors;
   b. The Board of Commissioners proposes candidates for members of the Company's Board of Directors from the results of the nomination process by the Board of Commissioners who can be assisted by the committee in charge of nomination and remuneration to Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies for further selection without limiting other candidates proposed before being determined at the GMS.
3. Related to the Nomination of Members of the Board of Commissioners and Directors of Subsidiaries
   a. The Board of Commissioners accepts proposals for candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners in Subsidiaries proposed by the Board of Directors, and then gives written approval as stated in the Company's Articles of Association and the Threshold for the Board of Commissioners.
   b. Submit a request for approval to Series A Dwiwarna shareholders or their proxies no later than 15 (fifteen) days from the date of receipt of the request and explanation or complete documents from the Company's Directors.

c. Memperoleh persetujuan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dan penjelasan atau dokumen secara lengkap dari Dewan Komisaris, kecuali dinyatakan lain oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya.
d. Menyampaikan persetujuan tertulis Dewan Komisaris kepada Direksi paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya persetujuan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya.
e. Ketentuan mengenai syarat Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan (persyaratan formal, materiil, dan lainnya) tidak berlaku dalam hal Calon Anggota Dewan Komisaris berasal dari anggota Direksi Perusahaan.

4. Terkait dengan Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
   a. Dewan Komisaris menyusun KPI dengan kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan sesuai dengan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Dewan Komisaris. Kebijakan tersebut meliputi KPI Dewan Komisaris kolegial dan KPI Dewan Komisaris individu. KPI Dewan Komisaris individu dilihat melalui pencapaian KPI Komite Penunjang Pendukung Dewan Komisaris mengingat Dewan Komisaris merupakan anggota dari Komite Penunjang Pendukung Dewan Komisaris.
   b. KPI Dewan Komisaris disampaikan bersamaan dengan Rencana Kerja Dewan Komisaris untuk dimuat dalam RKAP.
   c. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komite, dan setiap individu Komisaris.
   d. Evaluasi tahunan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS.
   e. Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan dengan sistem *self-assessment*, yang apabila diperlukan dapat menggunakan pihak independen secara berkala minimal sekali dalam masa jabatan, untuk memfasilitasi evaluasi kinerja Dewan Komisaris yang objektif dan jujur.

5. Terkait dengan Pengendalian Intern
   Sehubungan dengan pelaksanaan Pengendalian Intern di Perusahaan, Dewan Komisaris dan dapat dibantu oleh Komite Audit memiliki tugas untuk:

c. Obtain approval from Series A Dwiwarna shareholders or their proxies no later than 30 (thirty) days from the date of receipt of the application and complete explanation or documents from the Board of Commissioners, unless otherwise stated by the Series A Dwiwarna Shareholders/ their Proxies.
d. Submit written approval from the Board of Commissioners to the Board of Directors no later than 15 (fifteen) days from the date of receipt of approval from Series A Dwiwarna shareholders or their proxies.
e. Provisions regarding the requirements for members of the Board of Commissioners of a Subsidiary (formal, material, and other requirements) do not apply if the prospective members of the Board of Commissioners come from members of the Company's Board of Directors.

4. Related to the Performance Evaluation of the Board of Commissioners and Directors
   a. The Board of Commissioners prepares KPIs with assessment criteria that are specific, measurable, achievable, and in accordance with the duties and obligations of the Board of Commissioners based on policies determined by the Board of Commissioners which include collective Board of Commissioners KPIs and individual Board of Commissioners KPIs. The KPI of the individual Board of Commissioners is reviewed through the KPI achievements of the Board of Commissioners Supporting Support Committee considering that the Board of Commissioners is a member of the Board of Commissioners Supporting Support Committee.
   b. The Board of Commissioners' KPI is submitted simultaneously with the Board of Commissioners' Work Plan to be included in the WP&B.
   c. The Board of Commissioners is required to conduct an objective annual evaluation to determine the effectiveness of the Board, committees and each individual Commissioner.
   d. The annual evaluation is submitted by the Board of Commissioners to the GMS.
   e. The Board of Commissioners carries out annual performance assessments using a self-assessment system, and if necessary, can use independent parties periodically at least once during their term of office, to facilitate an objective and honest performance evaluation of the Board of Commissioners.

5. Related to Internal Control In regard with the implementation of Internal Control in the Company, the Board of Commissioners, and may be assisted by the Audit Committee, have the task of:

a. Memastikan bahwa Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki SPI yang menjalankan fungsi Audit Intern;
b. Memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian kepala SPI yang diusulkan oleh Direksi;
c. Memastikan SPI memiliki akses terhadap informasi dan/atau data mengenai Perusahaan yang perlu untuk melaksanakan tugasnya;
d. Memberikan persetujuan atas piagam Audit Intern (*internal audit charter*) yang diusulkan oleh Direksi dengan memperhatikan usulan dari SPI;
e. Mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SPI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
f. Menunjuk pengendali mutu dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SPI (*quality assurance review*) paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun;
g. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;
h. Memastikan Satuan Pengawasan Intern, Akuntan Publik, dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;
i. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, audit Badan Pengawasan Keuangan (BPK), audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan/atau hasil lembaga pengawasan otoritas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
j. Memastikan kebijakan sistem pengendalian intern Perusahaan dan pelaksanaannya selaras dengan Pedoman Strategis dan/atau Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya.

6. Terkait dengan Manajemen Risiko
Sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko, Dewan Komisaris dan dapat dibantu oleh Komite Pemantau Risiko memiliki tugas untuk:
a. Melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan serta strategi manajemen risiko.
b. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a.
c. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas kebijakan manajemen risiko Perusahaan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

a. Ensure that the Company and the Company's Subsidiaries have an Internal Supervisory Unit that carries out the Internal Audit function;
b. Provide approval for the appointment and dismissal of the head of Internal Audit as proposed by the Board of Directors;
c. Ensure that Internal Audit has access to information and/or data regarding the Company that is necessary to carry out its duties;
d. Give approval to the Internal Audit Charter proposed by the Board of Directors by considering the proposal from Internal Audit;
e. Review the effectiveness and efficiency of the Internal Audit based on information obtained from Internal Audit at least once every 1 (one) year;
f. Appoint a quality controller from an external party to review Internal Audit performance (quality assurance review) at least once every 3 (three) years;
g. Carry out supervision and provide advice on the implementation of other Internal Audit functions in accordance with the provisions of laws and regulations, the articles of association, and/or GMS decisions;
h. Ensure the Internal Audit, Public Accountant, and Audit Committee have access to information regarding the Company necessary to carry out their duties;
i. Ensure that the Board of Directors has followed up on the findings of internal audits, external audits, audits of the State Audit Board (BPK), audits of the Government's Development Finance Comptroller (BPKP), and/or the results of other authority supervisory institutions in accordance with the provisions of statutory regulations; and
j. Ensure the Company's internal control system policies and their implementation are in line with the Strategic Guidelines and/or Implementing Policies determined by the Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies.

6. Related to Risk Management
In regard to the implementation of risk management, the Board of Commissioners, and may be assisted by the Risk Monitoring Committee, are responsible to:
a. Evaluate and approve policies and risk management strategies.
b. Evaluate the responsibility of the Board of Directors for the implementation in risk management policies and strategies as referred to in letter a.
c. Supervise and provide advice to the Board of Directors on the Company's risk management policies and their implementation in accordance with the provisions of statutory regulations, articles of association and/or GMS decisions.

d. Memastikan penerapan manajemen risiko telah dilakukan secara menyeluruh di Perusahaan, dan berperan aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.

e. Memastikan kebijakan manajemen risiko Perusahaan dan pelaksanaannya selaras dengan Pedoman Strategis/Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya.
f. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap manajemen risiko, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dan dapat berkoordinasi dengan fungsi Direksi yang bertanggungjawab atas manajemen risiko.

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi tata kelola terintegrasi, Dewan Komisaris memiliki tugas untuk:

a. Melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
b. Mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anak Perusahaan, agar selaras dengan kebijakan Manajemen Risiko Induk Perusahaan;
c. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Perusahaan, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Perusahaan atas pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;

d. Mengevaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan untuk penyempurnaan;
e. Mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anak Perusahaan agar selaras dengan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Induk dan Anak Perusahaan; dan
f. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, Pedoman Strategis/Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya, dan/atau keputusan RUPS.

7. Terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik
   a. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Dewan Komisaris.
   b. Memantau dan memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
8. Terkait dengan Sistem Teknologi dan Informasi Sehubungan dengan Sistem Teknologi dan Informasi Perusahaan, Dewan Komisaris dan dapat dibantu Komite Pemantau Risiko memiliki tugas untuk:

d. Ensure that the implementation of risk management is carried out thoroughly in the Company, and play an active role in supervising the implementation of risk management carried out by the Board of Directors.
e. Ensure that the Company's risk management policies and their implementation are in line with the Strategic Guidelines/Implementing Policies established by the Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies.
f. In carrying out supervision over risk management, the Board of Commissioners is assisted by the Risk Monitoring Committee and can coordinate with the Board of Directors who are responsible for risk management.

In regard to the implementation of integrated governance functions, the Board of Commissioners is responsible to:
a. Evaluate and approve Integrated Governance policies;
b. Supervise the implementation of Integrated Governance in Subsidiaries to be in line with the Parent Company's Risk Management policies;
c. Supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Company's Director and provide direction or advice to the Company's Directors regarding the implementation of Integrated Governance policies;
d. Evaluate the Integrated Governance policies and directing improvements;
e. Supervise the implementation of Integrated Governance in Subsidiaries to be in line with the Integrated Governance policies of the Parent and Subsidiaries; and;
f. Carry out supervision and provide advice on the implementation of other Integrated Governance functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and Strategic Guidelines/Implementing Policies determined by the Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies and/ or GMS decisions.

7. Related to Good Corporate Governance
   a. Have a binding work guidelines and rules for each member of the Board of Commissioners.
   b. Monitor and ensure the implementation of Good Corporate Governance in effective and sustainable manners.
8. Related to Technology and Information Systems In regard to the Company's Technology and Information Systems, the Board of Commissioners, and with the assistance of the Risk Monitoring Committee, is responsible to:

a. Mengevaluasi atas sistem teknologi dan informasi yang digunakan oleh Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada penerapannya, aplikasi yang digunakan, dan memberikan saran serta pendapat atas sistem teknologi dan informasi yang diterapkan oleh Perseroan.
b. Memastikan kebijakan sistem teknologi informasi Perusahaan dan pelaksanaannya selaras dengan Pedoman Strategis dan/atau Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya.

9. Terkait dengan Sumber Daya Manusia
Sehubungan dengan Sumber Daya Manusia, Dewan Komisaris dan dapat dibantu oleh komite yang membidangi nominasi dan remunerasi memiliki tugas untuk:
a. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nominasi, remunerasi, dan pengembangan SDM;
b. Melakukan evaluasi atas penerapan manajemen sumber daya manusia di Perusahaan, meliputi sistem rekrutmen dan seleksi, sistem karir, sistem pelatihan dan pengembangan, sistem penilaian kinerja dan penggajian (remunerasi), serta sistem pensiun;
c. Menggali informasi pengembangan SDM Perusahaan melalui Direksi; dan
d. Memastikan kebijakan sumber daya manusia Perusahaan dan pelaksanaannya selaras dengan Pedoman Strategis dan/atau Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya.

10. Terkait dengan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Sehubungan dengan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, Dewan Komisaris dan dapat dibantu dengan Komite Audit berkewajiban untuk:
a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan infomasi lainnya antara lain:
   - Memastikan adanya prosedur reviu yang memadai atas laporan keuangan maupun proyeksi dan informasi keuangan lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan;
   - Memastikan laporan keuangan disusun dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum;
   - Memastikan laporan-laporan disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan instansi terkait dengan benar dan tepat waktu.
b. Memastikan agar auditor eksternal segera menginformasikan semua temuan dan masalah signifikan yang ditemukan selama pelaksanaan audit untuk ditindaklanjuti oleh Direksi.

a. Evaluate the technology and information systems used by the Company including but not limited to their implementation, applications used, and provide suggestions and opinions on the technology and information systems implemented by the Company.
b. Ensure the Company's information technology system policies and their implementation are in line with the Strategic Guidelines and/or Implementing Policies established by the Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies.

9. Related to Human Capital
The Board of Commissioners, and may be assisted by the committee in charge of nomination and remuneration, is responsible to:

a. Review the Company's level of compliance with laws and regulations relating to nomination, remuneration and HC development;

b. Evaluate the implementation of human resource management in the Company including the recruitment system, career system, training and development system, performance assessment and salary (remuneration) system, as well as the retirement system;
c. Explore information on the Company's HC development through the Board of Directors;
d. Ensure the Company's human resource policies and their implementation are in line with the Strategic Guidelines and/or Implementing Policies established by the Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies.

10. Related to Accounting and Preparation of Financial Reports
The Board of Commissioners, and may be assisted by the Audit Committee, are obliged to:

a. Review financial information issued by the Company such as financial reports, projections and other information, including:
   - Ensuring adequate review procedures for financial reports and projections and other financial information published by the Company;

   - Ensuring that financial reports are prepared in compliance with generally accepted accounting principles;
   - Ensure that reports are submitted to Series A Dwiwarna Shareholders, Proxies of Series A Dwiwarna Shareholders and related agencies correctly and on time.
b. Ensure the external auditor immediately informs all significant findings and problems discovered by the external auditor during the audit for follow-up by the Board of Directors.

c. Memberikan rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik untuk diusulkan kepada RUPS serta rekomendasi atas pemutusan hubungan kerja dengan Akuntan Publik.
d. Mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan Akuntan Publik;
e. Setelah kantor akuntan publik selesai menjalankan pekerjaannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelahnya, Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada Deputi melalui sistem informasi manajemen Kementerian BUMN beberapa informasi sebagai berikut:
   - Nama kantor akuntan publik dan partner yang menandatangani opini laporan keuangan audit;
   - Ruang lingkup pekerjaan/penugasan kantor akuntan publik;
   - Imbal jasa audit;
   - Imbal jasa non-audit;
   - Evaluasi pelaksanaan pekerjaan kantor akuntan publik, termasuk evaluasi proses pemilihan kantor akuntan publik, evaluasi kecukupan ruang lingkup pekerjaan/penugasan kantor akuntan publik, dan evaluasi rekomendasi audit secara keseluruhan; dan
   - Informasi lainnya.
f. Memastikan kebijakan akuntansi dan keuangan Perusahaan dan pelaksanaannya selaras dengan Pedoman Strategis dan/atau Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya.

11. Terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa
Sehubungan dengan proses pengadaan barang dan jasa Perusahaan, Dewan Komisaris dan dibantu oleh Komite Audit memiliki tugas untuk:

a. Memberikan persetujuan atas penentuan pengadaan barang dan jasa yang bersifat substansial (non rutin) yang disampaikan Direksi.
b. Memperoleh laporan dari Direksi terkait proses dan hasil pengadaan barang dan jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin).
c. Memastikan kebijakan pengadaan barang dan jasa Perusahaan serta pelaksanaannya selaras dengan Pedoman Strategis dan/atau Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya.

12. Terkait dengan Kebijakan Mutu dan Pelayanan
Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan mutu dan pelayanan, Dewan Komisaris dan dapat dibantu oleh Komite Audit memiliki tugas untuk:
a. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya;

c. Provide recommendations for the appointment of a Public Accountant to be proposed to the GMS as well as recommendations for terminating employment relations with the Public Accountant.
d. Supervise and evaluate the work of Public Accountants;
e. After the public accounting firm has finished carrying out its work, no later than 1 (one) month later, the Board of Commissioners is obliged to convey to the Deputy through the management information system of the Ministry of SOEs the following information:
   - The name of the public accounting firm and partner who signed the audit financial report opinion;
   - Scope of work/assignment of the public accounting firm;
   - Fee for audit services;
   - Non-audit service fees;
   - Evaluation of the implementation of the work of the public accounting firm, including evaluation of the public accounting firm selection process, evaluation of the adequacy of the scope of work/assignment of the public accounting firm, and evaluation of overall audit recommendations; and
   - Other information.
f. Ensure the Company's accounting and financial policies and their implementation are in line with the Strategic Guidelines and/or Implementing Policies established by the Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies.

11. Related to the Procurement of Goods and Services
In relation to the Company's goods and services procurement process, the Board of Commissioners, and assisted by the Audit Committee, have responsibilities to:
a. Provide approval to determine procurement of substantial (non-routine) goods and services submitted by the Board of Directors.
b. Obtain reports from the Board of Directors regarding the process and results of procurement of certain substantial (non routine) goods and services.
c. Ensure that the Company's goods and services procurement policy and its implementation are in line with the Strategic Guidelines and/or Implementing Policies determined by the Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies.

12. Related to Quality and Service Policy In regard to the implementation of quality and service policies, the Board of Commissioners and may be assisted by the Audit Committee have the task to:
a. Supervise and provide advice to the Board of Directors on quality and service policies and the implementation;

b. Memastikan kebijakan mutu dan pelayanan Perusahaan serta pelaksanaannya selaras dengan Pedoman Strategis dan/atau Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya.

13. Terkait dengan Pengelolaan Anak Perusahaan dan Afiliasi Perusahaan
    a. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan.
    b. Menerima laporan dari Direksi atas pengangkatan anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang telah ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan.
    c. Mendapatkan laporan dari Direksi terkait realisasi *Capital Expenditure* dari Anak Perusahaan yang telah disetujui Perusahaan dalam RUPS Anak Perusahaan yang nilainya diatas *threshold* Dewan Komisaris.

14. Terkait dengan Kepatuhan terhadap Perjanjian dengan Pihak Ketiga
    Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Komite Audit berkewajiban melakukan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Direksi terhadap perjanjian dengan pihak ketiga khususnya yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris diantaranya pelaksanaan dari perjanjian dan pemenuhan hak-hak pihak ketiga atas perjanjian.

15. Terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
    Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan.

16. Terkait Pelaporan dan Keterbukaan Informasi
    a. Pelaporan
        - Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
        - Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap Direksi selama tahun buku yang baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan yang disusun oleh Direksi.
        - Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
        - Memperoleh laporan penghapusbukuan piutang macet dari Direksi.
        - Menerima laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

b. bEnsure that the Company's quality and service policies and their implementation are in line with the Strategic Guidelines and/or Implementing Policies determined by the Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies.

13. Related to the Management of Subsidiaries and Company Affiliates
    a. Carry out supervision of Subsidiary management policies.
    b. Receive reports from the Board of Directors regarding the appointment of members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the Subsidiary as determined in the GMS of the Subsidiary concerned.
    c. Receive reports from the Board of Directors regarding the realization of Capital Expenditure from Subsidiaries that have been approved by the Company at the Subsidiary's GMS which value is above the threshold for the Board of Commissioners.

14. Related to Compliance with Agreements with Third Parties
    The Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, is obliged to supervise and monitor the Board of Directors' compliance with agreements with third parties, especially those that require approval from the Board of Commissioners, including the implementation of agreements and fulfillment of third party rights to agreements.

15. Related to Social and Environmental Responsibility
    Supervise the implementation of the Company's Social and Environmental Responsibility Program.

16. Related to Reporting and Information Disclosure
    a. Reporting
        - Report to the Company regarding family's share ownership in the Company and other companies, including any changes.
        - Prepare an annual report on the implementation of supervision and provision of advice to the Board of Directors during the previous financial year as an inseparable part of the annual report prepared by the Board of Directors.
        - Submit a report on the supervisory tasks that have been carried out during the previous financial year to the GMS.
        - Obtain a bad debt write-off report from the Board of Directors.
        - Receive periodic reports according to the method and time in accordance with applicable regulations as well as other reports by considering statutory regulations, especially applicable regulations in the Capital Market sector.

- Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

b. Keterbukaan Informasi
- Memperoleh informasi dari Direksi secara teratur, tepat waktu sesuai dengan permintaan, dan secara komprehensif tentang semua informasi yang relevan dengan Perusahaan.
- Memperoleh akses informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu.
- Memberikan penjelasan mengenai informasi yang berkaitan dengan hal yang akan diputuskan RUPS.
- Memastikan bahwa dalam laporan tahunan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku yang meliputi rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi, serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan.

17. Terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Lainnya

Sehubungan dengan pelaksanaan Tugas dan Kewajiban lainnya, Dewan Komisaris dan dapat dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan/atau Komite lain, memiliki tugas untuk:

a. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan;
b. Menanggapi saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari pemangku kepentingan yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian dari Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Direksi tentang saran dan penyelesaian yang diperlukan;
c. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Anggota Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan, pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan Perusahaan dan hal-hal lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diungkapkan oleh Dewan Komisaris; dan

- Members of the Board of Commissioners are required to submit asset reports in accordance with statutory provisions.

b. Information Disclosure
- Obtain information from the Board of Directors regularly, on time according to requests and comprehensively on all information relevant to the Company.
- Have access to accurate, relevant, and timely information.
- Provide an explanation regarding information related to matters to be decided by the GMS.
- Ensure the annual report contains information regarding the identity, main job, position of the Board of Commissioners in other companies, including meetings held in one financial year which include internal meetings and joint meetings with the Board of Directors, as well as honorarium, facilities and/or allowances others received from the Company.

17. Related to the Implementation of Other Duties and Obligations

In regard to the implementation of other Duties and Obligations, the Board of Commissioners and may be assisted by the Audit Committee, Integrated Risk Monitoring and Governance Committee, Nomination and Remuneration Committee, and/or other Committees, is responsible to:

a. Supervise and provide advice to the Board of Directors regarding important matters of changes sin the business environment which are expected to have a major impact on the Company's business and performance;
b. Responding to suggestions, expectation, problems, and complaints from stakeholders which are submitted directly to the Board of Commissioners or submitted by the Board of Directors, to be followed up and submitted to the Board of Directors regarding the necessary suggestions and solutions;
c. Ensure the Company's Annual Report contains information regarding the identity, main jobs, positions of members of the Board of Commissioners in other companies, including meetings held in one financial year (internal meetings and joint meetings with the Board of Directors), as well as honorarium, facilities, and/or other benefits received from the Company, statements by Members of the Board of Commissioners regarding responsibility for the Company's Annual Report and other matters which based on statutory provisions must be disclosed by the Board of Commissioners; and

d. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Tugas Komisaris Utama

Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Kebijakan Internal Perusahaan, Tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama adalah sebagai *primus interpares* yakni mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris di samping tugas-tugas lainnya di antaranya:

1. Melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya;
2. Memberikan perintah tertulis untuk pemberian tugas khusus kepada anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris, yang menerangkan: Nama anggota Dewan Komisaris yang diberi tugas, sifat dan lingkup pekerjaan, tujuan dan sasaran pekerjaan, waktu penugasan, dan hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus tersebut;
3. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris;
4. Memimpin Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi;

5. Tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai dengan peraturan dan perundangan.

Kewajiban

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan;
2. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
4. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan dan/atau terdapat permasalahan yang bersifat darurat dan strategis;
5. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perusahaan, dengan ketentuan usulan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;

d. Carry out other obligations in the context of supervisory duties and providing advice, as long as they do not conflict with statutory regulations, the Articles of Association, and/or GMS resolutions.

Duties of the President Commissioner

In accordance with the provisions of the Articles of Association and Internal Company Policies, the duties and responsibilities of the President Commissioner, as the primus interpares, which coordinating the activities of the Board of Commissioners alongside other tasks, which include:

1. Carry out supervisory functions as carried out by other members of the Board of Commissioners;
2. Give written orders to assign special tasks to members of the Board of Commissioners in accordance with the decision of the Board of Commissioners meeting, which explains: the name of the member of the Board of Commissioners assigned the task, nature and scope of work, goals and objectives of the work, time of assignment, and administrative matters involved related to that specific task;
3. Summon the Board of Commissioners Meeting;
4. Chair a Board of Commissioners Meeting or a Board of Commissioners Meeting to which the Directors are invited;
5. Other duties and responsibilities in accordance with regulations and legislation.

Responsibilities

In carrying out its duties, the Board of Commissioners are also responsible to:

1. Provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company;
2. Provide opinion and approval of the Company's Annual Work Plan and Budget and other work plans prepared by the Board of Directors, in accordance with the Articles of Association;
3. Keep up with the development of the Company's activities, providing opinions and suggestions to the GMS regarding any issues considered important for the management of the Company;
4. Report to Series A Dwiwarna Shareholders/ Proxy of Series A Dwiwarna Shareholders regarding signs of a decline in the Company's performance, and/or urgent and strategic problems in the Company.

5. Propose to the GMS regarding the appointment of public accountant to conduct an audit of the Company's books, provided that the proposed appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm must take into account the recommendations of Audit Committee;

6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat, saran kepada RUPS mengenai laporan tahunan, apabila diminta;
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
9. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perseroan lain;
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
11. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarnaatau kuasanya dengan memperhatikan peraturan undangan, khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal;
12. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS serta kewajiban lainnya yang ditentukan dalam Piagam Dewan Komisaris.

Wewenang Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan *Charter* Dewan Komisaris, dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lainlain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris;
7. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

8. Membentuk Komite Audit, Komite yang membidangi Nominasi dan Remunerasi, Komite yang membidangi Risiko & Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite lainnya Komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;

6. Research and review the periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the annual reports;
7. Provide explanations, opinions, and suggestions to the GMS regarding the annual report, if requested;
8. Make the Board of Commissioners' meeting minutes and keep a copy;
9. Report to the Company regarding their and/or family's share ownership in the Company and other companies;
10. Provide a report on supervisory duties that have been carried out during the recent Fiscal Year to the GMS;

11. Provide an explanation regarding all matters asked or requested by Series A Dwiwarna Shareholders/Proxy of Series A Dwiwarna Shareholders by considering laws and regulations particularly applicable in the field of Capital Market;
12. Carry out other obligations in the context of supervisory and advisory duties as long as they do not conflict with laws and regulations, the Articles of Association and/or GMS Resolutions, as written in the Charter of the Board of Commissioners.

Authority of Board of Commissioners

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the Charter of the Board of Commissioners, in carrying out its duties, the Board of Commissioners has the authority to:

1. Access books, letters, and other documents, examine the cash for verification purposes and other securities, and examine the Company's assets;

2. Enter the yards, buildings, and offices used by the Company;
3. Request an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues related to the Company's management;
4. Acknowledge all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;
5. Request Directors and/or other officials under the Board of Directors under Board of Directors' consent to attend Board of Commissioners meeting;
6. Appoint and dismiss Secretary of the Board of Commissioners;
7. Temporarily dismiss members of the Board of Directors based on the provisions of Articles of Association;
8. Establish Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Monitoring Committee, and other Committees, if necessary, by considering the capabilities of the Company;

9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern;
12. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
13. Menelaah usulan honorarium dan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas) Dewan Komisaris dan Direksi bersama dengan komite yang membidangi nominasi dan remunerasi untuk selanjutnya mengusulkan hal tersebut kepada RUPS;
14. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

9. Use the service of experts for certain matters and within a certain period of time at the Company's expense, if necessary;
10. Take actions to manage the Company under certain conditions for a certain period following the provisions of Articles of Association;
11. Approve the appointment and dismissal of the Corporate Secretary and/or Head of the Internal Supervisory Unit;
12. Attend Board of Directors Meetings and provide views on matters discussed;
13. Reviewing the proposed honorarium and remuneration (salary, allowances, and facilities) of the Board of Commissioners and Directors with the committee in charge of nomination and remuneration to then propose this matter to the GMS;
14. Carry out other supervisory authority as long as it does not conflict with statutory regulations, the Articles of Association, and/or GMS Decisions.

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Dalam rangka mengefektifkan peran Dewan Komisaris, maka dilakukan pembagian tugas di antara Dewan Komisaris, sebagai berikut:

Division of Duties of the Board of Commissioners

For an effective role of the Board of Commissioners, tasks are divided among the Board of Commissioners, as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Description of Duties
Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner	Ketua Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi Chairman of the Integrated Risk & Governance Monitoring Committee
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee
E. Piterdono HZ	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi – Bidang Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi Deputy Chair of the Integrated Risk & Governance Monitoring Committee – Integrated Risk & Governance Monitoring Division
Carlo Brix Tewu	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua Komite Nominasi & Remunerasi Deputy Chairman of the Nomination & Remuneration Committee
Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner	1. Ketua Komite Nominasi & Remunerasi 2. Wakil Ketua Komite Audit 1. Chairman of the Nomination & Remuneration Committee 2. Deputy Chairman of the Audit Committee
Rahmat Hidayat Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi – Bidang Pasca Tambang, CSR, GCG dan IT Deputy Chairman of the Integrated Risk & Governance Monitoring Committee – Post-Mining, CSR, GCG and IT

Independensi Dewan Komisaris

Untuk menjamin independensi anggota Dewan Komisaris:

1. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda/ hubungan kekeluargaan yang timbul karena ikatan perkawinan, termasuk menantu atau ipar;

Independence of the Board of Commissioners

To guarantee the independence of members of the Board of Commissioners:

1. No blood family relation between members of the Board of Commissioners and between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors up to the third degree, whether straight or sideways or marital/familial relationships arising from marriage ties, including in-laws;

2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, dengan ketentuan penyampaian pelaporan tersebut:
   a. Dapat dikuasakan kepada pihak lain dengan surat kuasa tertulis;
   b. Wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham Perusahaan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dan melaporkan seluruh benturan kepentingan yang sedang dihadapi maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan, atau segala sesuatu yang dapat menghambat anggota Dewan Komisaris untuk bertindak independen kepada Perusahaan melalui Rapat Dewan Komisaris;
4. Anggota Dewan Komisaris yang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Saham Seri B terbanyak, tidak diperbolehkan ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menimbulkan benturan kepentingan.

Kebijakan Rangkap Jabatan

Kebijakan rangkap jabatan Dewan Komisaris dinyatakan dalam:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Anggaran Dasar Perusahaan.
3. *Charter* Dewan Komisaris.

Kebijakan rangkap jabatan Direksi Perusahaan, salah satunya mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan peraturan tersebut, anggota Direksi Perusahaan (sepanjang tidak diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perusahaan), dapat merangkap jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain;
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain.

Namun demikian, selain mengacu pada Peraturan OJK diatas, ketentuan rangkap jabatan Dewan Komisaris Perusahaan juga didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (29) Anggaran Dasar Perusahaan dan Charter Dewan Komisaris menyatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris dilarang untuk memangku jabatan rangkap sebagai berikut:

2. Members of the Board of Commissioners are required to report to OJK their ownership and any changes in their ownership of Company shares, either directly or indirectly, with the following reporting requirements:
   a. Can be authorized to other parties with a written power of attorney;
   b. Must be submitted to the OJK no later than 5 (five) days after ownership or change in ownership of Company shares occurs.
3. Members of the Board of Commissioners are required to disclose and report all conflicts of interest that are being faced or that have the potential to become conflicts of interest or anything that could hinder members of the Board of Commissioners from acting independently for the Company through Board of Commissioners Meetings;
4. Members of the Board of Commissioners who hold concurrent positions as members of the Board of Directors in State-Owned Enterprises as the largest Series B Shareholders, are not permitted to participate in decision making that creates a conflict of interest.

Concurrent Position Policy

The Board of Commissioners concurrent positions policy is stated in:
1. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies
2. Company Articles of Association.
3. Work Guidelines for the Board of Commissioners.

The policy of concurrent positions of the Company's Board of Directors, one of which refers to Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, based on the regulation, members of the Company's Board of Directors (as long as not further regulated in the Company's Articles of Association), may hold concurrent positions with the following provisions:
1. Members of the Board of Directors at a maximum of 2 (two) issuers or other public companies;
2. Members of the Board of Commissioners at a maximum of 2 (two) issuers or other public companies.

However, in addition to referring to the OJK Regulation above, the provisions on dual positions for the Company's Board of Commissioners are also based on the provisions of Article 14 paragraph (29) of the Company's Articles of Association and the Board of Commissioners Charter, which states that Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding dual positions as follows:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, kecuali Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Saham Seri B terbanyak (dengan ketentuan mengacu pada Undang-Undang BUMN terbaru, anggota Direksi BUMN holding/pemeng saham seri B terbanyak pada Perusahaan, dilarang untuk merangkap menjadi anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan).
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri,
3. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilarang untuk rangkap jabatan;
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Berdasarkan ketentuan terkait rangkap jabatan tersebut, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan tersebut. Berikut merupakan transparansi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan per 31 Desember 2024.

1. Members of the Board of Directors at State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, privately-owned enterprises, except for Members of the Board of Directors at State-Owned Enterprises as the Holder of the Most Series B Shares (with provisions referring to the latest SOEs Law, members of the Board of Directors of SOEs holding/holders of the Most Series B shares in the Company, are prohibited from concurrently serving as members of the Board of Commissioners at the Company).
2. Members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs, except based on special assignments from the Minister,
3. Political party administrators and/or candidates/members of the House of Representatives, Regional Representative Board, provincial Regional House of Representatives, and district/city Regional House of Representatives. and/or candidates for regional head/deputy regional head;
4. Other positions by statutory provisions are prohibited from holding concurrent positions;
5. Other positions that may give rise to a conflict of interest.

Based on the provisions on dual positions, all members of the Board of Commissioners have fulfilled these provisions. Below is data transparency of the dual positions of members of the Company's Board of Commissioners as of December 31, 2024.

Nama Name	PT Bukit Asam Tbk	Jabatan Rangkap Concurrent Position	
	Jabatan Position	Nama Perusahaan/Instansi Other Company/Institution	Jabatan Position
Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner	1. Kementerian ESDM 2. PT Baramulti Suksessarana Tbk 1. EDSM Ministry 2. PT Baramulti Suksessarana Tbk	1. Staf Khusus Menteri ESDM (2020 – 2024) 2. Komisaris Independen PT Baramulti Suksessarana Tbk 1. Special Staff to the EDSM Minister (2020-2024) 2. Independent Commissioner PT Baramulti Suksessarana Tbk
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak Ada None	Tidak Ada None
E. Piterdono HZ	Komisaris Commissioner	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Carlo Brix Tewu	Komisaris Commissioner	1. Kementrian BUMN 2. Yayasan BUMN 3. Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia 1. SOEs Ministry 2. SOEs Foundation 3. Bakti Sepak Bola Indonesia Foundation	1. Tenaga Ahli Menteri BUMN Bidang Mediasi (2023-2024) 2. Anggota Dewan Pengawas Yayasan BUMN 3. Anggota Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia 1. Expert Staff of the Minister of State-Owned Enterprises for Mediation (2023-2024) 2. Member of the Supervisory Board of the State-Owned Enterprises Foundation 3. Member of the Bakti Sepak Bola Indonesia Foundation
Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner	Profesor pada Fakultas Hukum UI Professor at the Faculty of Law, University of Indonesia	Profesor pada Fakultas Hukum UI Professor at the Faculty of Law, University of Indonesia
Rahmat Hidayat Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak Ada None	Tidak Ada None

Per 31 Desember 2024, terdapat 1 (satu) anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka, perusahaan tercatat dan/atau emiten lainnya yakni Komisaris Utama (Irwandy Arif) yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen PT Baramulti Suksessarana Tbk.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Informasi kepemilikan saham Dewan Komisaris pada PT Bukit Asam Tbk, dapat dilihat di bagian Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan Anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kriteria independensi sesuai ketentuan yang berlaku dan yang bersangkutan ditunjuk oleh RUPS sebagai Komisaris Independen. Dalam kedudukannya, Komisaris Independen tidak terafiliasi Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, sehingga bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Perusahaan, dan dapat bertindak secara objektif dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG. Setiap Perusahaan publik harus memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Komisaris Independen bertugas melakukan pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi serta melindungi kepentingan Pemegang Saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Pengangkatan Komisaris Independen diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik atau Regulasi Bursa Efek Indonesia No. IA sebagaimana diubah terakhir dengan Kep-00183/BEI/12-2018.

Selajalan dengan ketentuan ASEAN Corporate Governance Scorecard, apabila Komisaris Utama Perusahaan bukan merupakan Komisaris Independen, maka perlu dilakukan penunjukan Komisaris Independen senior untuk menjalankan perannnya. Dewan Komisaris telah menunjuk Andi Pahril Pawi (Komisaris Independen) untuk menjadi Ketua Komite Audit dan Kurnia Toha (Komisaris Independen) menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

As of December 31, 2024, there is 1 (one) member of the Company's Board of Commissioners who holds concurrent positions in public companies, listed companies and/or other issuers, namely the President Commissioner (Irwandy Arif) who holds concurrent positions as Independent Commissioner of PT Baramulti Suksessarana Tbk.

The Board of Commissioners Share Ownership

Information on the share ownership of the Board of Commissioners in PT Bukit Asam Tbk can be seen in the Company Share Ownership section by the Board of Commissioners and Directors in the Company Profile Chapter in this Annual Report book.

Independent Commissioner

An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who meets the independence criteria in accordance with applicable regulations. The person concerned is appointed by the GMS as an Independent Commissioner. In its position, the Independent Commissioner is not affiliated with the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and controlling shareholders. Therefore, the person concerned is free from business relationships or other relationships that could affect the ability to act independently or act solely in the interests of the Company, and can act objectively with guided by GCG principles. Every public company must have Independent Commissioners of at least 30% of the total members of the Board of Commissioners.

Independent Commissioners are responsible to supervise the Company's management carried out by the Board of Directors and protecting the interests of minority Shareholders and other stakeholders. The appointment of Independent Commissioners is regulated in OJK Regulation no. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies or Indonesia Stock Exchange Regulation No. IA as last amended by Kep-00183/BEI/12-2018..

In line with the provisions of the ASEAN Corporate Governance Scorecard, if the President Commissioner of the Company is not an Independent Commissioner, then it is necessary to appoint a senior Independent Commissioner to carry out his/her role. The Board of Commissioners has appointed Andi Pahril Pawi (Independent Commissioner) to be the Chairman of the Audit Committee and Kurnia Toha (Independent Commissioner) to be the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee.

Anggota Dewan Komisaris Independen Senior yang ditunjuk sebagaimana di atas, memiliki tugas dan tanggungjawab dalam hal sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai koordinator/pemimpin pada Dewan Komisaris Perusahaan untuk mata acara rapat Dewan Komisaris yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dengan pihak terafiliasi (afiliasi).
2. Bertindak sebagai penghubung kepada Dewan Komisaris Perusahaan apabila terjadi hal-hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan pemegang saham pengendali, khususnya pada forum tata kelola terintegrasi.
3. Bertindak sebagai saluran/sarana yang independen atas *whistleblowing*, sesuai dengan kriteria yang ditetukan dalam kebijakan *whistleblowing*.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Selain harus memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, untuk diangkat sebagai Komisaris Independen juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, yaitu:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama Perusahaan;
4. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung.

Komposisi Komisaris Independen

Pada tahun 2024 tidak terjadi perubahan komposisi Komisaris Independen sehingga susunan Komisaris Independen sebagai berikut:

1. Andi Pahril Pawi: Komisaris Independen
2. Kurnia Toha: Komisaris Independen
3. Rahmat Hidayat Pulungan: Komisaris Independen

Sampai dengan 31 Desember 2024, Komisaris Independen di PTBA berjumlah 3 (tiga) orang dari total 6 (enam) orang anggota Dewan Komisaris. Jumlah Komisaris Independen tersebut telah mencapai persentase sebesar 50% atau telah memenuhi ketentuan POJK yaitu sekurang-kurangnya 30%. Susunan Komisaris Independen PTBA adalah sebagai berikut:

The Senior Independent Commissioners appointed as above, have the following duties and responsibilities:

1. Act as coordinator/leader on the Company's Board of Commissioners for Board of Commissioners meeting agendas with the potential to have a conflict of interest with affiliated parties (affiliates).
2. Act as a liaison to the Company's Board of Commissioners if there are matters to be conveyed related to controlling shareholders, especially in the integrated governance forum.
3. Act as an independent channel/facility for whistleblowing, in accordance with the criteria determined in the whistleblowing policy.

Criteria for Determining Independent Commissioners

Apart from having to fulfill the requirements to be appointed as a member of the Board of Commissioners, in order to become an Independent Commissioner, the person concerned must fulfill the requirements as regulated in OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014, namely:

1. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period;
2. Does not own shares in the Company, either directly or indirectly;
3. Has no affiliation with the Commissioners, Directors and Major Shareholders of the Company;
4. Has no business relationship with the Company, either directly or indirectly.

Independent Commissioners Composition

In 2024, there were no changes in the composition of the Independent Commissioners so that the composition of the Independent Commissioners is as follows:

1. Andi Pahril Pawi: Independent Commissioner
2. Kurnia Toha: Independent Commissioner
3. Rahmat Hidayat Pulungan: Independent Commissioner

As of December 31, 2024, the Independent Commissioners at PTBA number 3 (three) people out of a total of 6 (six) members of the Board of Commissioners. The number of Independent Commissioners has reached a percentage of 50% or has met the POJK provisions, which is at least 30%. The composition of the Independent Commissioners of PTBA is as follows:

Komisaris Independen Independent Commissioner	Periode Jabatan Term of Office	Dasar Pengangkatan Legal Basis
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 10 Juni 2020 Resolution on Annual GMS on June 10, 2020
Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Juni 2023 Resolution on Annual GMS on June 15, 2023
Rahmat Hidayat Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Juni 2023 Resolution on Annual GMS on June 15, 2023

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Guna menjamin independensi Komisaris Independen, berikut disampaikan pengungkapan pemenuhan persyaratan komisaris independen Bukit Asam sepanjang tahun 2023 sesuai dengan persyaratan pada pasal 21 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Statement of Independence of Independent Commissioners

In order to guarantee the independence of Independent Commissioners, the following is a disclosure of the fulfillment of the requirements for Bukit Asam independent commissioners throughout 2023 in accordance with the requirements in article 21 paragraph (2) of Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Persyaratan Criteria	Nama Name		
	Andi Pahril Pawi	Kurnia Toha	Rahmat Hidayat Pulungan
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan tersebut. Does not own the Company's shares either directly or indirectly.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan tersebut. Has no affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Major Shareholders of the Company.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan tersebut. Has no business relationship with the Company, either directly or indirectly.	✓	✓	✓

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan

Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris atau diambil secara sirkuler dengan ketentuan semua Anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan semua Anggota Dewan Komisaris menyetujui usul yang diajukan dan keputusan yang diambil demikian memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris. Ketentuan terkait Rapat Dewan Komisaris mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta ketentuan sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Jadwal Rapat

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 dan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, serta mengadakan Rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Dewan Komisaris juga dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Komisaris atau Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Agenda Rapat

1. Proses Penetapan agenda rapat Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
   a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengajukan usulan agenda Rapat.
   b. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan agenda rapat Dewan Komisaris, maka usulan agenda rapat dikumpulkan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.
   c. Usulan agenda rapat yang telah dikumpulkan tersebut dilakukan pemilihan ulang oleh Dewan Komisaris dengan ketentuan, usulan agenda rapat yang akan diajukan pada rapat Dewan Komisaris merupakan agenda yang disetujui oleh (satu perdua) bagian jumlah suara.

Board of Commissioners Meeting

Policy

All Board of Commissioners' decisions taken at the meeting or in a circular manner with other Commissioners with writing notification. All members agree to the proposals submitted and the decisions to have the same force as decisions legally taken at a Board of Commissioners meeting. Provisions related to Board of Commissioners Meetings refer to applicable laws and regulations, including Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, as well as provisions as contained in the Company's Articles of Association.

Meeting Schedule

As regulated in Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014, Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 and the provisions contained in the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners is obliged to hold a meeting of the Board of Commissioners at least once a month as well as holding a joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors periodically at least once in one month. The Board of Commissioners may also hold a meeting at any time at the request of 1 (one) or several members of the Board of Commissioners or Directors by stating the issues to be discussed.

Meeting Agenda

1. The meeting agenda of the Board of Commissioners is determined based on the following provisions:
   a. Each member of the Board of Commissioners has the right to submit proposals for the Meeting agenda.
   b. If there is more than one proposed agenda for the meeting, then the proposed meeting agendas must be collected by the Board of Commissioners secretary.
   c. The proposed meeting agenda that has been collected is subject to re-election by the Board of Commissioners provided that the proposed meeting agenda to be submitted at the Board of Commissioners meeting is an agenda approved by ½ (half) of the total number of votes.

d. Anggota Dewan Komisaris, yang usulan agendanya ditetapkan sebagai agenda rapat Dewan Komisaris harus mempersiapkan materi yang memadai sesuai agenda yang diusulkannya.

2. Agenda Rapat Susulan
Dalam hal terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan segera berlangsung, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Usulan agenda rapat Dewan Komisaris tersebut harus dilengkapi dengan materi yang memadai.
   b. Agenda rapat susulan harus disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat. Untuk itu, anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir harus dihubungi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas agenda susulan tersebut.

   c. Apabila anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir tidak dapat dihubungi dalam waktu yang wajar, maka persetujuan agenda susulan tersebut diserahkan pada keputusan peserta rapat.

Ketentuan Panggilan Rapat

Sesuai dengan Pedoman Kerja Dewan Komisaris, untuk pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan sebagai berikut:

1. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
2. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris tersebut dapat didelegasikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris, kecuali diatur lain dalam Rapat Dewan Komisaris.

3. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis yang disampaikan kepada setiap Anggota Dewan Komisaris dengan melalui fisik (di antaranya pos tercatat) ataupun sarana elektronik (telex, faximile, surat elektronik (e-mail), telepon, handphone, smartphone dan sarana elektronik lainnya) dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan pada saat pemanggilan tersebut telah tersedia bahan-bahan rapat.
5. Dalam keadaan mendesak, penyampaian panggilan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan sewaktu-waktu atau lebih singkat dari keadaan biasa atau untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.

d. Members of the Board of Commissioners, whose proposed agenda is designated as the agenda for the Board of Commissioners meeting, must prepare adequate materials according to their proposed agenda.

2. Follow-up Meeting Agenda
If there is an additional proposal for a meeting, the following provisions apply:
   a. The additional proposed agenda for the Board of Commissioners meeting must be accompanied by adequate materials.
   b. The agenda for the follow-up meeting must be approved by all members of the Board of Commissioners, both those present at the meeting and those not present at the meeting. For this reason, members of the Board of Commissioners who are not present must be contacted to obtain approval or rejection of the follow-up agenda.
   c. If members of the Board of Commissioners who are absent cannot be contacted within a reasonable time, then approval of the follow-up agenda is left to the decision of the meeting participants.

Provisions on Meeting Invitations

In accordance with the Board of Commissioners Work Guidelines, the invitation to a Board of Commissioners Meeting is carried out as follows:

1. The invitation to a Board of Commissioners Meeting is carried out by the President Commissioner.
2. The invitation to a Board of Commissioners meeting can be delegated to the Secretary of the Board of Commissioners, unless otherwise stipulated in the Board of Commissioners Meeting.
3. The invitation to a Board of Commissioners meeting is carried out in writing and delivered to each Member of the Board of Commissioners through physical (including registered mail) or electronic means (telex, facsimile, electronic mail (e-mail), telephone, mobile phone, smartphone, and other electronic devices) while still paying attention to the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations.
4. The invitation to a Board of Commissioners meeting is delivered no later than 5 (five) working days before the meeting is held, without taking into account the date of the invitation and the date of the meeting, with the provision that at the time of the invitation the meeting materials are available.
5. In urgent circumstances, the delivery of the summons for a meeting of the Board of Commissioners may be done at any time or shorter than usual or for meetings that have been scheduled based on the decision of a previous Board of Commissioners Meeting.

6. Isi panggilan rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
7. Untuk rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan berdasarkan rapat Dewan Komisaris sebelumnya, maka tidak diperlukan panggilan kembali.

Kuorum Rapat

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota Dewan Komisaris.

Risalah Rapat

Setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan, termasuk jika ada perbedaan pendapat/*dissenting opinion* anggota Dewan Komisaris, juga harus memuat hal hal yang diputuskan. Risalah rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.

Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib didokumentasikan oleh Perusahaan.

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mendapatkan salinan risalah rapat, terlepas dari yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat tersebut. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, kepada yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

Rapat Gabungan

Selain rapat internal, Dewan Komisaris juga dapat melakukan rapat gabungan dengan mengundang Direksi sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan membahas kondisi dan prospek usaha serta kebijakan nasional yang berdampak pada kinerja Perusahaan dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam Risalah Rapat. Rapat gabungan dapat juga dilakukan atas usulan Direksi.

6. The contents of the summons for a meeting of the Board of Commissioners must include the agenda, date, time, and place of the meeting.
7. For meetings of the Board of Commissioners that have been scheduled based on a previous Board of Commissioners meeting, no recall is required.

Meeting Quorum

Board of Commissioners meetings are valid and have the right to make binding decisions if attended or represented by more than ½ (half) of the members of the Board of Commissioners.

Minutes of Meetings

At each meeting of the Board of Commissioners, minutes of the meeting must be prepared containing the matters discussed, including if there are differences of opinion/dissenting opinions of members of the Board of Commissioners, and must also contain the matters decided. The minutes of the meeting are signed by the chairman of the meeting and all members of the Board of Commissioners who were present at the meeting.

Minutes of meetings are drawn up and administered by the Secretary of the Board of Commissioners or other officials appointed by the chairman of the meeting. Minutes of meetings of the Board of Commissioners and meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors must be documented by the Company.

Every member of the Board of Commissioners has the right to receive a copy of the minutes of the meeting, regardless of whether the person concerned was present or not at the meeting. In the event that there is a member of the Board of Commissioners who does not sign the results of the meeting, the person concerned is obliged to state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.

Joint Meeting

Apart from internal meetings, the Board of Commissioners can also hold joint meetings by inviting the Board of Directors as a form of coordination in order to discuss the Board of Directors' periodic reports and discuss business conditions and prospects as well as national policies that have an impact on the Company's performance and provide responses, notes, and advice as outlined in the Minutes of Meeting. Joint meetings can also be held at the suggestion of the Board of Directors.

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 14 kali dan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 12 kali, dengan agenda sebagai berikut:

Implementation of the 2024 Board of Commissioners Meeting

Throughout 2024, the Board of Commissioners has held 14 internal meetings and 12 joint meetings with the Board of Directors, with the following agenda::

Tabel Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris
Table of Internal Meeting Agenda for the Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
1	11 Januari 2024 January 11, 2024	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk anak/cucu perusahaan bulan November sd Desember tahun 2023; 2. Pembahasan Progress Proyek Strategis sd Desember 2023; 3. Pembahasan Progres KPI sd Desember 2023; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA sd Desember 2023; 5. Pembahasan Surat Dir Portfolio dan Pengembangan Usaha MIND ID kepada Dewan Komisaris PTBA perihal Monitoring Pelaksanaan Kontrak Manejemen Tahunan yang Memuat KPI Direksi Perseroan Secara Kolegial Tahun 2023 dan Tindak Lanjut Paparan dan Arahan Direksi MIND ID (Selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna) sehubungan dengan pelaksanaan Monitoring & Evaluasi atas Kinerja PTBA sd Oktober 2024; 6. Pembahasan Surat Direktur Utama kepada Dewan Komisaris perihal Usulan Lembaga Jasa Pemeringkatan Perusahaan 7. Pembahasan surat Direktur Utama kepada Dewan Komisaris perihal Persetujuan *Selected Talent;* 8. Pembahasan Direktur Utama kepada Dewan Komisaris perihal Rencana Perpanjangan Kontrak Jasa Penambangan PT PAMA; 9. Lain-Lain 1. Discussion of Company Performance Including subsidiaries/subsidiaries from November to December 2023; 2. Discussion of Strategic Project Progress until December 2023; 3. Discussion of KPI Progress until December 2023; 4. Discussion of PTBA Monitoring and Evaluation Follow-up until December 2023; 5. Discussion of the Letter from the Director of Portfolio and Business Development of MIND ID to the Board of Commissioners of PTBA regarding Monitoring of the Implementation of the Annual Management Contract Containing the KPI of the Company's Board of Directors Collegially in 2023 and Follow-up to the Presentation and Direction of the Board of Directors of MIND ID (As the Attorney of the Series A Dwiwarna Shareholder) regarding the implementation of Monitoring & Evaluation of PTBA's Performance until October 2024; 6. Discussion of the President Director's Letter to the Board of Commissioners regarding the Proposal of the Company Rating Services Agency 7. Discussion of the President Director's letter to the Board of Commissioners regarding the Approval of Selected Talent; 8. Discussion of the President Director to the Board of Commissioners regarding the Extension Plan for PT PAMA's Mining Services Contract; 9. Others	1. Irwandy Arif 2. Andi Pahril Pawi 3. Kurnia Toha 4. Rahmat Hidayat Pulungan 5. Carlo B. Tewu 6. E. Piertdono HZ

Tabel Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris
Table of Internal Meeting Agenda for the Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
2	13 Februari 2024 February 13, 2024	Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/Cucu Perusahaan s.d. Januari tahun 2024; 1. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. Januari tahun 2024; 2. Pembahasan Progres KPI s.d. Januari 2024; 3. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. Januari 2024; 4. Pembahasan Terkait Keselamatan Kerja, Lingkungan dan CSR; 5. Pembahasan Permohonan Penyesuaian Remunerasi Anggota Komite risiko Usaha, Pasca Tambang dan Tata Kelola, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Audit. 6. Pembahasan atas Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi, yang akan habis masa jabatannya. 7. Revisi atas RKA Dekom Tahun 2024 (Penyesuaian atas Penataan Komite Dekom): a. KPI Individu Dewan Komisaris untuk Tahun 2024 b. Program Kerja Komite & KPI Komite untuk Tahun 2024 8. Lain-Lain. Discussion of Company Performance Including Subsidiaries/Sub-subsidiaries of Company until January 2024; 1. Discussion of Strategic Project Progress until January 2024; 2. Discussion of KPI Progress until January 2024; 3. Discussion of PTBA Monitoring and Evaluation Follow-up until January 2024; 4. Discussion Related to Occupational Safety, Environment and CSR; 5. Discussion on the Request for Adjustment of Remuneration for Members of the Business Risk, Post-Mining and Governance Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Audit Committee; 6. Discussion of Members of the Audit Committee and Members of the Integrated Risk & Governance Monitoring Committee, whose terms of office will expire. 7. Revision of the 2024 Board of Commissioners RKA (Adjustment to the Board of Commissioners Committee Arrangement): a. Individual KPI of the Board of Commissioners for 2024 b. Committee Work Program & Committee KPI for 2024 8. Others.	1. Irwandy Arif 2. Andi Pahril Pawi 3. Kurnia Toha 4. Rahmat Hidayat Pulungan 5. Carlo B. Tewu 6. E. Piertdono HZ
3	15 Maret 2024 March 15, 2024	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/Cucu Perusahaan s.d. Februari tahun 2024; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. Februari tahun 2024; 3. Pembahasan Progres KPI s.d. Februari 2024; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. Februari 2024; 5. Pembahasan Permohonan Persetujuan Rencana Pinjam Pakai dan Pengelolaan Aset dengan Pemkab Muara Enim; 6. Pembahasan Laporan Hasil Reviu BPKP Sumsel atas Aksi Korporasi Rencana Pengembangan Angkutan Batu bara PT Bukit Asam Tbk Relasi Tanjung Enim – Kramasan; 7. Pembahasan Permohonan Persetujuan Perubahan Organisasi PTBA 8. Lain-Lain 1. Discussion of Company Performance Including Subsidiaries/Sub-subsidiaries of Company until February 2024; 2. Discussion of Strategic Project Progress until February 2024; 3. Discussion of KPI Progress until February 2024; 4. PTBA Monev Follow-up Discussion until February 2024; 5. Discussion of the Application for Approval of the Asset Borrowing and Management Plan with the Muara Enim Regency Government; 6. Discussion of the Report on the Results of the BPKP South Sumatra Review of the Corporate Action of the Coal Transportation Development Plan of PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim - Kramasan Relations; 7. Discussion of the Application for Approval of PTBA Organizational Changes 8. Others	1. Irwandy Arif 2. Andi Pahril Pawi 3. Kurnia Toha 4. Rahmat Hidayat Pulungan 5. Carlo B. Tewu 6. E. Piertdono HZ

Tabel Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris
Table of Internal Meeting Agenda for the Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
4	19 April 2024 April 19, 2024	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/Cucu Perusahaan s.d. Maret tahun 2024; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. Maret tahun 2024; 3. Pembahasan Progres KPI s.d. Maret 2024; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. Maret 2024; 5. Pembahasan terkait Keselamatan kerja, Lingkungan, dan CSR s.d.Maret 2024; 6. Penunjukan Pimpinan RUPS Tahunan; 7. Keputusan Wilayah Tempat Kedudukan Dewan Komisaris sehubungan dengan Penerbitan SK Direksi PTBA Nomor: 027/0100/2024 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Direksi, Dewan Komisaris, Sekretariat Dewan Komisaris serta Anggota Komite PTBA; 8. Update atas Penelaahan Permohonan Persetujuan Rencana Pinjam Pakai dan Pengelolaan Aset dengan Pemkab Muara Enim; 9. Lain-Lain 1. Discussion of Company Performance Including Subsidiaries/Subsidiaries until March 2024; 2. Discussion of Strategic Project Progress until March 2024; 3. Discussion of KPI Progress until March 2024; 4. Discussion of PTBA Monitoring and Evaluation Follow-up until March 2024; 5. Discussion related to Occupational Safety, Environment, and CSR until March 2024; 6. Appointment of the Chairperson of the Annual GMS; 7. Decision on the Domicile of the Board of Commissioners in connection with the Issuance of PTBA Board of Directors Decree Number: 027/0100/2024 concerning the Regulations on Official Travel of the Board of Directors, Board of Commissioners, Secretariat of the Board of Commissioners and Members of the PTBA Committee; 8. Update on the Review of the Application for Approval of the Borrowing and Asset Management Plan with the Muara Enim Regency Government; 9. Others	1. Irwandy Arif 2. Andi Pahril Pawi 3. Kurnia Toha 4. Rahmat Hidayat Pulungan 5. Carlo B Tewu 6. E. Piertdono HZ
5	15 Mei 2024 May 15, 2024	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/Cucu Perusahaan s.d. April tahun 2024; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d April tahun 2024; 3. Pembahasan Progres KPI s.d. April 2024; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d April 2024; 5. Lain-Lain 1. Discussion of Company Performance Including Subsidiaries/Sub-subsidiaries until April 2024; 2. Discussion of Strategic Project Progress until April 2024; 3. Discussion of KPI Progress until April 2024; 4. Discussion of PTBA Monev Follow-up until April 2024; 5. Others	1. Irwandy Arif 2. Andi Pahril Pawi 3. Kurnia Toha 4. Rahmat Hidayat Pulungan 5. Carlo B Tewu 6. E. Piertdono HZ

Tabel Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris
Table of Internal Meeting Agenda for the Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
6	12 Juni 2024 June 12, 2024	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/Cucu Perusahaan s.d. Mei tahun 2024; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. Mei tahun 2024; 3. Pembahasan Progres KPI s.d. Mei 2024; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. Mei 2024; 5. Pembahasan Surat Tembusan dari Direksi PTBA kepada Dir MIND ID perihal Penawaran MTN Timah; 6. Pembahasan Surat Tembusan dari Direksi PTBA kepada Direksi PT BMI terkait Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Penggunaan Anggaran Investasi Contingency PT BMI; 7. Pembahasan surat MIND ID terkait Tindak Lanjut Paparan dan Arahan Direksi MIND ID sehubungan dengan Pelaksanaan Monitoring & Evaluation pada bulan Mei 2024 atas Kinerja Triwulan I Tahun 2024 PTBA; 8. Pembahasan surat MIND ID perihal Penyampaian Pembaharuan /Penyesuaian Pedoman Strategis dan Kebijakan Pelaksana MIND ID Tahap Kedua Tahun 2024 untuk diadopsi dalam Kebijakan/Pedoman Internal Anggota MIND ID; 9. Lain-Lain 1. Discussion of Company Performance Including Subsidiaries/Sub-subsidiaries until May 2024; 2. Discussion of Strategic Project Progress until May 2024; 3. Discussion of KPI Progress until May 2024; 4. Discussion of PTBA Monev Follow-up until May 2024; 5. Discussion of Copy Letter from PTBA Board of Directors to MIND ID Director regarding Timah MTN Offering; 6. Discussion of Copy Letter from PTBA Board of Directors to PT BMI Board of Directors regarding Response to Request for Approval of PT BMI Contingency Investment Budget Use; 7. Discussion of MIND ID letter regarding Follow-up to MIND ID Board of Directors' Presentation and Direction regarding Implementation of Monitoring & Evaluation in May 2024 regarding PTBA's First Quarter 2024 Performance; 8. Discussion of the MIND ID letter regarding the Submission of Updates/ Adjustments to the Strategic Guidelines and Implementing Policies of MIND ID Phase Two in 2024 to be adopted in the Internal Policies/Guidelines of MIND ID Members; 9. Others	1. Irwandy Arif 2. Andi Pahril Pawi 3. Kurnia Toha 4. Rahmat Hidayat Pulungan 5. Carlo B Tewu 6. E. Piertdono HZ
7	14 Juli 2024 July 14, 2024	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/Cucu Perusahaan s.d. Juni tahun 2024; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. Juni tahun 2024; 3. Pembahasan Progres KPI s.d. Juni 2024; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. Juni 2024; 5. Pembahasan terkait Keselamatan kerja, Lingkungan, dan CSR s.d. Juni 2024; 6. Pembahasan atas Progres Pengadaan Jasa Audit KAP untuk Tahun Buku 2024; 7. Pembahasan Permohonan Arahan Bentuk Tantiem Tahun Buku 2022 yang Ditangguhkan; 8. Persetujuan Penunjukan Perusahaan Sekuritas dan Bank Penglola Tantiem yang Ditangguhkan apabila dalam Bentuk Saham dan Tunai, serta Pembayaran Tahap I Tantiem Tahun Buku 2022 yang Ditangguhkan; 9. Lain-Lain 1. Discussion of Company Performance Including Subsidiaries/Subsidiaries until June 2024; 2. Discussion of Strategic Project Progress until June 2024; 3. Discussion of KPI Progress until June 2024; 4. Discussion of PTBA Monitoring and Evaluation Follow-up until June 2024; 5. Discussion related to Occupational Safety, Environment, and CSR until June 2024; 6. Discussion of KAP Audit Service Procurement Progress for Fiscal Year 2024; 7. Discussion of the Request for Directions for the Form of Bonus for the 2022 Fiscal Year which was Postponed; 8. Approval of the Appointment of Securities Companies and Managing Banks for Deferred Tantiem if in the Form of Shares and Cash, and Payment of Phase I of Deferred Tantiem for the 2022 Fiscal Year; 9. Others	1. Irwandy Arif 2. Andi Pahril Pawi 3. Kurnia Toha 4. Rahmat Hidayat Pulungan 5. Carlo B Tewu 6. E. Piertdono HZ

Tabel Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris
Table of Internal Meeting Agenda for the Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
8	14 Agustus 2024 August 14, 2024	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/Cucu Perusahaan s.d. Juli tahun 2024; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. Juli tahun 2024; 3. Pembahasan Progres KPI s.d. Juli 2024; 4. Pembahasan Konfirmasi atas Penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Kohong Telakon 5. Lain-lain. 1. Discussion of Company Performance Including Subsidiaries/Sub-subsidiaries until July 2024; 2. Discussion of Strategic Project Progress until July 2024; 3. Discussion of KPI Progress until July 2024; 4. Discussion of Confirmation of the Offer of Special Mining Business License Area (WIUPK) for Kohong Telakon Block 5. Others.	1. Irwandy Arif 2. Andi Pahril Pawi 3. Kurnia Toha 4. Rahmat Hidayat Pulungan 5. Carlo B Tewu 6. E. Piertdono HZ
9	13 September 2024 September 13, 2024	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu perusahaan bulan Agustus tahun 2024; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. Agustus tahun 2024; 3. Pembahasan Progres KPI s.d. Agustus 2024; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. Agustus 2024 5. Pembahasan Permohonan Persetujuan Pinjaman Bank dengan Pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE-SDA) 6. Pembahasan Permohonan Konsultasi Penghasilan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Afiliasi Perusahaan PTBA; 7. Lain-lain. 1. Discussion of Company Performance Including Subsidiaries/Subsidiaries in August 2024; 2. Discussion of Strategic Project Progress until August 2024; 3. Discussion of KPI Progress until August 2024; 4. Discussion of PTBA Monitoring and Evaluation Follow-up until August 2024 5. Discussion of Application for Approval of Bank Loan with Utilization of Foreign Exchange from Natural Resource Exports (DHE-SDA) 6. Discussion of the Request for Consultation on the Income of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries and Affiliated Companies of PTBA; 7. Others.	1. Irwandy Arif 2. Andi Pahril Pawi 3. Kurnia Toha 4. Rahmat Hidayat Pulungan 5. Carlo B Tewu 6. E. Piertdono HZ
10	15 Oktober 2024 October 15, 2024	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/Cucu Perusahaan s.d. September tahun 2024; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d September tahun 2024; 3. Pembahasan Progres KPI s.d. September 2024; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. September 2024; 5. Pembahasan terkait Keselamatan kerja, Lingkungan, dan CSR s.d. September 2024; 6. Pembahasan atas Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris 2025; 7. Pembahasan Usulan Perwakilan Komisaris Anak Perusahaan sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi; 8. Pembahasan Pengangkatan Staf Sekretariat Dewan Komisaris; 9. Pembahasan Surat PTBA kepada OJK perihal Laporan Transaksi Afiliasi atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bank Mandiri dan HBAP 10. Lain-Lain 1. Discussion of Company Performance Including Subsidiaries/Subsidiaries until September 2024; 2. Discussion of Strategic Project Progress until September 2024; 3. Discussion of KPI Progress until September 2024; 4. Discussion of PTBA Monitoring and Evaluation Follow-up until September 2024; 5. Discussion related to Occupational Safety, Environment, and CSR until September 2024; 6. Discussion of the 2025 Board of Commissioners Work Plan and Budget; 7. Discussion of Proposal for Representative of Subsidiary Commissioners as Member of the Integrated Governance Committee; 8. Discussion of Appointment of Board of Commissioners Secretariat Staff; 9. Discussion of PTBA's Letter to OJK regarding Affiliated Transaction Report on Bank Mandiri Credit Facility Agreement and HBAP 10. Others	1. Irwandy Arif 2. Andi Pahril Pawi 3. Kurnia Toha 4. Rahmat Hidayat Pulungan 5. Carlo B Tewu 6. E. Piertdono HZ

Tabel Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris
Table of Internal Meeting Agenda for the Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
11	22 Oktober 2024 October 22, 2024	1. Verifikasi Keuangan Dewan Komisaris Tahun 2024 2. Penyusunan RKA Dewan Komisaris Tahun 2025 3. Lain-Lain 1. Financial Verification of the Board of Commissioners in 2024 2. Preparation of the Board of Commissioners' RKA in 2025 3. Others	1. Irwandy Arif 2. Andi Pahril Pawi 3. Kurnia Toha 4. Rahmat Hidayat P 5. Carlo B Tewu 6. E. Piertdono HZ
12	14 November 2024 November 14, 2024	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/Cucu Perusahaan s.d. Oktober tahun 2024; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. Oktober tahun 2024; 3. Pembahasan Progres KPI s.d. Oktober 2024; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. Oktober 2024; 5. Update Realisasi Anggaran Dewan Komisaris s.d. Oktober 2024; 6. Pembahasan Permohonan Persetujuan Penunjukan Pihak Independen atas Kaji Ulang *Quality Assurance Review* Fungsi SPI PTBA ("Eksternal QAR"); 7. Pembahasan Permohonan Izin Prinsip Penganggaran Pembayaran Klaim PT WIKA dalam Pekerjaan TLS 4 dan TLS 5; 8. Pembahasan Rencana Investasi PT Satria Bahana Sarana Tahun 2025; 9. Lain-Lain. 1. Discussion of Company Performance Including Subsidiaries/Subsidiaries until October 2024; 2. Discussion of Strategic Project Progress until October 2024; 3. Discussion of KPI Progress until October 2024; 4. Discussion of PTBA Monitoring and Evaluation Follow-up until October 2024; 5. Update on Board of Commissioners Budget Realization until October 2024; 6. Discussion of Request for Approval of Appointment of Independent Party for Quality Assurance Review of PTBA SPI Function ("External QAR"); 7. Discussion of Request for Principle Permit for Budgeting Payment of PT WIKA Claims in TLS 4 and TLS 5 Works; 8. Discussion of PT Satria Bahana Sarana's Investment Plan for 2025; 9. Others.	1. Irwandy Arif 2. Andi Pahril Pawi 3. Kurnia Toha 4. Rahmat Hidayat Pulungan 5. Carlo B Tewu 6. E. Piertdono HZ
13	12 Desember 2024 December 12, 2024	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/Cucu Perusahaan s.d. November tahun 2024; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. November tahun 2024; 3. Hasil Peta Resiko pada RJPP PTBA; 4. Pembahasan Progres KPI s.d. November 2024; 5. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. November 2024; 6. Update Realisasi Anggaran Dewan Komisaris s.d. November 2024; 7. Pembahasan Permohonan Izin Prinsip Penganggaran Pembayaran Klaim PT WIKA dalam Pekerjaan TLS 4 dan TLS 5; 8. Pembahasan Permohonan Izin Penghapusbukuan Piutang Bermasalah Program Pendanaan UMK Tahun 2024; 9. Pembahasan Permohonan Izin Penambahan Penyertaan Modal kepada PT BMI untuk PT SMLI; 10. Lain-Lain. 1. Discussion of Company Performance Including Subsidiaries/Subsidiaries until November 2024; 2. Discussion of Strategic Project Progress until November 2024; 3. Risk Map Results in PTBA RJPP; 4. Discussion of KPI Progress until November 2024; 5. Discussion of PTBA Monitoring and Evaluation Follow-up until November 2024; 6. Update on Board of Commissioners Budget Realization until November 2024; 7. Discussion of Application for Principle Permit for PT WIKA Claim Payment Budgeting in TLS 4 and TLS 5 Work; 8. Discussion of Application for Permit to Write Off Problematic Receivables for UMK Funding Program in 2024; 9. Discussion of Application for Permit to Increase Equity Participation to PT BMI for PT SMLI; 10. Others.	1. Irwandy Arif 2. Andi Pahril Pawi 3. Kurnia Toha 4. Rahmat Hidayat Pulungan 5. Carlo B Tewu 6. E. Piertdono HZ
14	16 Desember 2024 December 16, 2024	Konsolidasi Akhir Tahun 2024 2024 End of Year Consolidation	1. Irwandy Arif 2. Andi Pahril Pawi 3. Kurnia Toha 4. Rahmat Hidayat Pulungan 5. Carlo B Tewu 6. E. Piterdono HZ

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris Pada Rapat Dewan Komisaris
Frequency of Attendance of the Board of Commissioners at Internal Board of Commissioners Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Internal Meeting		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Presentase Kehadiran Attendance Percentage
Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner	14	14	100%
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	14	14	100%
E. Piterdono HZ	Komisaris Commissioner	14	14	100%
Carlo Brix Tewu	Komisaris Commissioner	14	14	100%
Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner	14	14	100%
Rahmat Hidayat Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner	14	14	100%

Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka;
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
3. Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk.

Sesuai dengan ketentuan di atas Rapat Gabugan Direksi dan Dewan Komisaris wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan. Adapun pada tahun 2024 telah dilakukan 12 (dua belas) kali rapat dengan uraian sebagai berikut:

Joint Meeting of Board of Directors and Board of Commissioners

Joint meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners are based on the following provisions:
1. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 of 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
3. Articles of Association of PT Bukit Asam Tbk.

In accordance with the provisions above, Joint Meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners must be held at least 1 (one) time in one month. In 2024, 12 (twelve) meetings were held with the following description:

Agenda Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
Agenda for Joint Meeting of Directors and Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
1	11 Januari 2024 January 11, 2024	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu perusahaan; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d Desember tahun 2023; bulan Desember Tahun 2023; 3. Pembahasan Progres KPI s.d. Desember 2023; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. Desember 2023; 5. Lain-lain. 1. Discussion on the Company's Performance, Including Subsidiaries/ Grandchildren; 2. Discussion on the Progress of Strategic Projects up to December 2023; 3. Discussion on the Progress of KPIs up to December 2023; 4. Discussion on the Follow-up of PTBA Monitoring and Evaluation up to December 2023; 5. Others.	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Rafli Yandra 4. Suhedi 5. Suherman 6. Irwandy Arif 7. Andi Pahril Pawi 8. Kurnia Toha 9. Rahmat Hidayat Pulungan 10. Carlo B Tewu 11. E. Piterdono HZ

Agenda Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
Agenda for Joint Meeting of Directors and Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
2	13 Februari 2024 February 13, 2024	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu perusahaan bulan Januari Tahun 2024; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. Januari tahun 2024; 3. Pembahasan Progres KPI s.d.. Januari 2024; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d.. Januari 2024; 5. Pembahasan terkait Keselamatan Kerja, Lingkungan, dan CSR 6. Lain-lain. 1. Discussion of Company Performance Including Subsidiaries/Subsidiaries in January 2024; 2. Discussion of Strategic Project Progress until January 2024; 3. Discussion of KPI Progress until January 2024; 4. Discussion of PTBA Monitoring and Evaluation Follow-up until January 2024; 5. Discussion related to Occupational Safety, Environment, and CSR 6. Others.	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Rafli Yandra 4. Suhedi 5. Suherman 6. Irwandy Arif 7. Andi Pahril Pawi 8. Kurnia Toha 9. Rahmat Hidayat Pulungan 10. Carlo B Tewu 11. E. Piterdono HZ
3	15 Maret 2024 March 15, 2024	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu perusahaan s.d. Februari Tahun 2024; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. Februari tahun 2024; 3. Pembahasan Progres KPI s.d.. Februari 2024 ; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d.. Februari 2024; 5. Lain-lain. 1. Discussion on the Company's Performance, Including Subsidiaries/ Grandchildren, up to February 2024; 2. Discussion on the Progress of Strategic Projects up to February 2024; 3. Discussion on the Progress of KPIs up to February 2024; 4. Discussion on the Follow-up of PTBA Monitoring and Evaluation up to February 2024; 5. Others.	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Rafli Yandra 4. Suhedi 5. Suherman 6. Irwandy Arif 7. Andi Pahril Pawi 8. Kurnia Toha 9. Rahmat Hidayat Pulungan 10. Carlo B Tewu 11. E. Piterdono HZ
4	19 April 24 April 19, 2024	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/Cucu Perusahaan s.d.. Maret tahun 2024; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. Maret tahun 2024; 3. Pembahasan Progres KPI s.d. Maret 2024; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. Maret 2024; 5. Pembahasan terkait Keselamatan kerja, Lingkungan, dan CSR s.d. Maret 2024; 6. Lain-lain. 1. Discussion of Company Performance Including Subsidiaries/Subsidiaries until March 2024; 2. Discussion of Strategic Project Progress until March 2024; 3. Discussion of KPI Progress until March 2024; 4. Discussion of PTBA Monitoring and Evaluation Follow-up until March 2024; 5. Discussion related to Occupational Safety, Environment, and CSR until March 2024; 6. Others.	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Rafli Yandra 4. Suhedi 5. Suherman 6. Irwandy Arif 7. Andi Pahril Pawi 8. Kurnia Toha 9. Rahmat Hidayat Pulungan 10. Carlo B Tewu 11. E. Piterdono HZ
5	15 Mei 2024 May 15, 2024	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu perusahaan s.d. April Tahun 2024; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. April tahun 2024; 3. Pembahasan Progres KPI s.d. April 2024 ; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. April 2024; 5. Lain-lain. 1. Discussion of Company Performance Including Subsidiaries/Subsidiaries until April 2024; 2. Discussion of Strategic Project Progress until April 2024; 3. Discussion of KPI Progress until April 2024; 4. Discussion of PTBA Monitoring and Evaluation Follow-up until April 2024; 5. Others.	1. Farida Thamrin 2. Suhedi 3. Suherman 4. Andi Pahril Pawi 5. Kurnia Toha 6. Rahmat Hidayat Pulungan 7. Carlo B Tewu 8. E. Piterdono HZ
6	12 Juni 2024 June 12, 2024	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu perusahaan bulan Mei Tahun 2024; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis Kinerja s.d. Mei 2024; 3. Progress KPI s.d. Mei 2024; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. Mei 2024; 5. Adopsi Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) di PT Bukit Asam Tbk; 6. Lain-lain 1. Discussion of Company Performance Including Subsidiaries/Subsidiaries in May 2024; 2. Discussion of Strategic Project Progress Performance Until May 2024; 3. KPI Progress Until May 2024; 4. Discussion of PTBA Monitoring and Evaluation Follow-up Until May 2024; 5. Adoption of Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) at PT Bukit Asam Tbk; 6. Others	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Rafli Yandra 4. Suhedi 5. Suherman 6. Irwandy Arif 7. Andi P Pawi 8. Kurnia Toha 9. Rahmat Hidayat Pulungan 10. Carlo B Tewu 11. E. Piterdono HZ

Agenda Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
Agenda for Joint Meeting of Directors and Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
7	14 Juli 2024 July 14, 2024	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu perusahaan s.d. Juni tahun 2024 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. Juni tahun 2024 3. Pembahasan Progres KPI s.d. Juni 2024 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. Juni 2024 5. Pembahasan Terkait Keselamatan Kerja, Lingkungan, dan CSR s.d. Juni 2024 6. Pembahasan atas Progress Pengadaan Jasa Audit KAP untuk Tahun Buku 2024 7. Lain-lain. 1. Discussion of Company Performance Including Subsidiaries/Subsidiaries until June 2024 2. Discussion of Strategic Project Progress until June 2024 3. Discussion of KPI Progress until June 2024 4. Discussion of PTBA Monitoring and Evaluation Follow-up until June 2024 5. Discussion Related to Occupational Safety, Environment, and CSR until June 2024 6. Discussion of KAP Audit Services Procurement Progress for Fiscal Year 2024 7. Others.	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Rafli Yandra 4. Suhedi 5. Suherman 6. Irwandy Arif 7. Andi P Pawi 8. Kurnia Toha 9. Rahmat Hidayat Pulungan 10. Carlo B Tewu 11. E. Piterdono HZ
8	14 Agustus 2024 August 14, 2024	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu perusahaan bulan Mei Tahun 2024; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis Kinerja S/D Mei 2024; 3. Progress KPI s.d. Mei 2024; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. Mei 2024; 5. Pembahasan Konfirmasi atas Penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Kohong Telakon; 6. Lain-Lain 1. Discussion of Company Performance Including Subsidiaries/Subsidiaries in May 2024; 2. Discussion of Strategic Project Progress Performance Until May 2024; 3. KPI Progress until May 2024; 4. Discussion of PTBA Monitoring and Evaluation Follow-up until May 2024; 5. Discussion of Confirmation of the Offer of the Special Mining Business License Area (WIUPK) for the Kohong Telakon Block; 6. Others	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Rafli Yandra 4. Suhedi 5. Suherman 6. Irwandy Arif 7. Andi P Pawi 8. Kurnia Toha 9. Rahmat Hidayat Pulungan 10. E. Piterdono HZ
9	13 September 2024 September 13, 2024	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu Perusahaan s.d. Agustus tahun 2024; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d Agustus tahun 2024; 3. Pembahasan Progres KPI s.d. Agustus 2024; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. Agustus 2024 5. Pembahasan Permohonan Persetujuan Pinjaman Bank dengan Pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA); 6. Lain-lain. 1. Discussion of Company Performance Including Subsidiaries/Subsidiaries until August 2024; 2. Discussion of Strategic Project Progress until August 2024; 3. Discussion of KPI Progress until August 2024; 4. Discussion of PTBA Monitoring and Evaluation Follow-up until August 2024 5. Discussion of Application for Bank Loan Approval with Utilization of Foreign Exchange from Natural Resource Exports (DHE SDA); 6. Others.	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Rafli Yandra 4. Suhedi 5. Suherman 6. Irwandy Arif 7. Andi Pahril Pawi 8. Kurnia Toha 9. Rahmat Hidayat Pulungan 10. Carlo B Tewu 11. E. Piterdono HZ
10	15 Oktober 2024 October 15, 2024	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu perusahaan bulan s.d. September tahun 2024 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d September tahun 2024 3. Pembahasan Progres KPI s.d. September 2024 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. September 2024 5. Pembahasan terkait Keselamatan Kerja, Lingkungan, dan CSR s.d. September 2024 6. Lain-lain. 1. Discussion of Company Performance Including Subsidiaries/Subsidiaries in September 2024 2. Discussion of Strategic Project Progress until September 2024 3. Discussion of KPI Progress until September 2024 4. Discussion of PTBA Monitoring and Evaluation Follow-up until September 2024 5. Discussion related to Occupational Safety, Environment, and CSR until September 2024 6. Others.	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Rafli Yandra 4. Suhedi 5. Suherman 6. Irwandy Arif 7. Andi Pahril Pawi 8. Kurnia Toha 9. Rahmat Hidayat Pulungan 10. Carlo B Tewu 11. E. Piterdono HZ

Agenda Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
Agenda for Joint Meeting of Directors and Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
11	15 November 2024 November 15, 2024	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu perusahaan s.d. Oktober Tahun 2024; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. Oktober tahun 2024; 3. Pembahasan Progres KPI s.d. Oktober 2024 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. Oktober 2024; 5. Lain-lain. 1. Discussion of Company Performance Including Subsidiaries/Subsidiaries until October 2024; 2. Discussion of Strategic Project Progress until October 2024; 3. Discussion of KPI Progress until October 2024 4. Discussion of PTBA Monitoring and Evaluation Follow-up until October 2024; 5. Others.	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Rafli Yandra 4. Suhedi 5. Suherman 6. Irwandy Arif 7. Andi P Pawi 8. Kurnia Toha 9. Rahmat Hidayat P 10. Carlo B Tewu 11. E. Piterdono HZ
12	13 Desember 2024 December 13, 2024	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu perusahaan bulan November tahun 2024 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. November 2024 3. Hasil Peta Risiko pada RJPP PTBA 4. Pembahasan Progress KPI PTBA s.d. November 2024 5. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. November 2024 6. Lain-lain. 1. Discussion of Company Performance Including Subsidiaries/subsidiaries in November 2024 2. Discussion of Strategic Project Progress until November 2024 3. Risk Map Results in PTBA's RJPP 4. Discussion of PTBA's KPI Progress until November 2024 5. Discussion of PTBA's Monitoring and Evaluation Follow-up until November 2024 6. Others.	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Rafli Yandra 4. Suhedi 5. Suherman 6. Irwandy Arif 7. Andi Pahril Pawi 8. Kurnia Toha 9. Rahmat Hidayat Pulungan 10. Carlo B Tewu 11. E. Piterdono HZ

Frekuensi Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
Frequency of Joint Meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisartis Joint Meetings of Directors and the Board of Commissioners		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Presentase Kehadiran Attendance Percentage
Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner	12	11	92%
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	100%
E. Piterdono HZ	Komisaris Commissioner	12	12	100%
Carlo Brix Tewu	Komisaris Commissioner	12	11	92%
Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	100%
Rahmat Hidayat Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	100%
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	12	11	92%
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Development Director	12	12	100%

Frekuensi Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
Frequency of Joint Meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisartis Joint Meetings of Directors and the Board of Commissioners		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Presentase Kehadiran Attendance Percentage
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operations and Production Director	12	12	100%
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Management Director	12	11	92%
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	12	12	100%

Program Pengenalan

Program Pengenalan merupakan kegiatan yang bersifat wajib untuk dilaksanakan apabila terdapat pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk pertama kalinya. Ketentuan ini tercantum dalam *Charter* Dewan Komisaris, dan bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan pemahaman terkait Perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Penyelenggaraan program pengenalan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah RUPS memutuskan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit bisnis Perusahaan dan pengkajian dokumen, atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan. Apabila dibutuhkan, dapat pula dilakukan program pengenalan atas anak dan afiliasi perusahaan.

Sehubungan dengan tidak terdapatnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru di tahun 2024, maka PTBA tidak melaksanakan program pengenalan Perusahan bagi Dewan Komisaris.

Introduction Program

The Company held an introduction program for newly appointed Board of Commissioners on their first term of office. This activity is mandatory as stated in the Board of Commissioners Charter, to introduce and provide understanding regarding the Company to newly appointed members of the Board of Commissioners. The introduction program is carried out no later than 90 (ninety) calendar days after the GMS decides on the appointment of new members of the Board of Commissioners. The Company's introduction program may be delivered in the form of presentations, meetings, visits to the Company's business units, and review of documents or other programs deemed appropriate to the Company where the program is implemented, and if necessary, an introduction program can also be carried out for subsidiaries and affiliated companies.

In connection with the absence of appointment of members of the Board of Commissioners in 2024, PTBA did not implement a Company introduction program for the Board of Commissioners.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Kebijakan

Guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, maka Anggota Dewan Komisaris harus secara teratur menerima program pelatihan, pengembangan pengetahuan, dan sertifikasi yang relevan, mandiri, dan berkelanjutan. Untuk memfasilitasi *update knowledge* tersebut, maka anggota Dewan Komisaris perlu diberikan pelatihan, *workshop*, seminar, *conference,* atau bentuk lainnya yang bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Dewan Komisaris.

Training and Competency Development

Policy

In order to support the implementation of supervisory duties and providing advice to the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners must regularly receive relevant, independent, and sustainable training, knowledge development, and certification programs. To facilitate the update of this knowledge, members of the Board of Commissioners need to receive training, workshops, seminars, conferences, or other forms that are useful in increasing the effectiveness of the Board of Commissioners' function.

Seluruh daftar pelatihan dan materi pelatihan dan pengembangan kompetensi anggota Direksi didokumentasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris, dan wajib tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

The entire list of training and training materials and competency development for members of the Board of Directors is documented by the Secretary of the Board of Commissioners, and must be available at any time if needed.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Tahun 2024

Program pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris Perusahaan sepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada Bab Profil.

Training and/or Competency Improvement in 2024

The training and competency improvement programs attended by the Company's Board of Commissioners throughout 2024 can be seen in the Profile Chapter.

Keputusan, Rekomendasi, dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah mengeluarkan berbagai keputusan, rekomendasi, dan persetujuan yang menunjang proses pengawasan Perusahaan sebanyak 117 dokumen sebagai berikut:

Decisions, Recommendations, and Implementation of Duties of the Board of Commissioners

Throughout 2024, the Board of Commissioners has issued various decisions, recommendations, and approvals that support the Company's supervision process totaling 117 documents as follows:

Tanggal Date	Perihal Issues	Ditujukan Kepada Intended to
5 Januari 2024 January 5, 2024	Permohonan Persetujuan atas Rancangan RKAP 2024 PT Bukit Asam Tbk Request for Approval of the Draft 2024 CWPB of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
Januari 2024 January, 2024	Usulan Lembaga Jasa Pemeringkatan Perusahaan Proposal of Corporate Rating Agency	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
11 Januari 2024 January 11, 2024	Permohonan Persetujuan atas Rencana Pemberian Setoran Modal PT Bukit Asam Tbk kepada PT Huadian Bukit Asam Power (PT HBAP) dalam rangka *Shareholder Support* atas *Cost Overrun* Proyek Sumsel-8 Request for Approval of the Plan to Provide Capital Deposits by PT Bukit Asam Tbk to PT Huadian Bukit Asam Power (PT HBAP) in the Framework of Shareholder Support for the Cost Overrun of the Sumsel-8 Project	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
11 Januari 2024 January 11, 2024	Penyampaian Laporan Progres Pengawasan atas Hasil Monev Triwulan III tahun Buku 2023 serta KPI per November 2023 PT Bukit Asam Tbk Submission of the Supervision Progress Report on the Results of Monitoring and Evaluation for the Third Quarter of the 2023 Financial Year and KPI as of November 2023 PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
11 Januari 2024 January 11, 2024	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan Desember 2023 dan s.d. Desember 2023 Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for December 2023 and until December 2023	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
11 Januari 2024 January 11, 2024	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis s.d. Desember tahun 2023 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Report until December 2023 PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
18 Januari 2024 January 18, 2024	Persetujuan Pengangkatan Komisaris PT Bukit Pembangkit Innovative ("BPI") Approval of Appointment of Commissioner of PT Bukit Pembangkit Innovative ("BPI")	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
18 Januari 2024 January 18, 2024	Persetujuan Pengangkatan Komisaris PT Bukit Energi Investama ("BEI") Approval of Appointment of Commissioner of PT Bukit Energi Investama ("BEI")	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
30 Januari 2024 January 30, 2024	Persetujuan Izin Cuti Leave Approval	Direktur Utama PTBA PTBA President Director
30 Januari 2024 January 30, 2024	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus PT Bukit Asam Prima ("PT BAP") Approval of Changes to the Management Composition of PT Bukit Asam Prima ("PT BAP")	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
5 Februari 2024 February 5, 2024	Penyampaian Laporan Progres Pengawasan atas Hasil Monev Triwulan III Tahun Buku 2023 serta KPI per Desember 2023 PT Bukit Asam Tbk Submission of the Supervision Progress Report on the Results of Monitoring and Evaluation for the Third Quarter of the 2023 Financial Year and KPI as of December 2023 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors

Tanggal Date	Perihal Issues	Ditujukan Kepada Intended to
7 Februari 2024 February 7, 2024	Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Pengangkatan Komisaris Utama PT Huadian Bukit Asam Power ("PT HBAP") Response to the Application for Approval of the Appointment of President Commissioner of PT Huadian Bukit Asam Power ("PT HBAP")	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
15 Februari 2024 February 15, 2024	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan Januari 2024 Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for January 2024	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 Februari 2024 February 15, 2024	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis s.d Januari 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Report until January 2024 PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
16 Februari 2024 February 16, 2024	Persetujuan Pemberian Setoran Modal PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") kepada PT Huadian Bukit Asam Power ("PT HBAP") Approval of Capital Deposit of PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") to PT Huadian Bukit Asam Power ("PT HBAP")	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
16 Februari 2024 February 16, 2024	Penyampaian Laporan Progres Pengawasan atas Hasil Monev Triwulan III Tahun Buku 2023 serta KPI per Januari 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of the Supervision Progress Report on the Results of Monitoring and Evaluation for the Third Quarter of the 2023 Financial Year and KPI as of January 2024 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
16 Februari 2024 February 16, 2024	Penyampaian *Selected Talent* PT Bukit Asam Tbk Submission of PT Bukit Asam Tbk Selected Talent	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
29 Februari 2024 February 29, 2024	Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Konsultan Remunerasi, Long-Term Incentive Incentive, dan Rencana Program Kepemilikan Saham Bagi Pegawai PT Bukit Asam Tbk. Response to the Request for Approval of Remuneration Consultant, Long Term Incentive, and Share Ownership Program Plan for PT Bukit Asam Tbk Employees.	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
4 Maret 2024 March 4, 2024	Permohonan Persetujuan Pengurus PT Bukit Multi Investama Application for Approval of the Management of PT Bukit Multi Investama	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 Maret 2024 March 15, 2024	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan Februari 2024 Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for February 2024	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 Maret 2024 March 15, 2024	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis s.d. Februari 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Report until February 2024 PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 Maret 2024 March 15, 2024	Penyampaian Laporan Progres Pengawasan atas Hasil Monev Triwulan IV Tahun Buku 2023 serta KPI per Februari 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of the Supervision Progress Report on the Results of Monitoring and Evaluation for Quarter IV of the 2023 Financial Year and KPI as of February 2024 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 Maret 2024 March 15, 2024	Permohonan Persetujuan Konsultan Remunerasi, Long-Term Incentive, dan Rencana Program Kepemilikan Saham Bagi Pegawai PT Bukit Asam Tbk Request for Approval of Remuneration Consultant, Long Term Incentive, and Stock Ownership Program Plan for PT Bukit Asam Tbk Employees	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
22 Maret 2024 March 22, 2024	Persetujuan Perubahan Organisasi PT Bukit Asam Tbk Approval of Organizational Changes PT Bukit Asam Tbk	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
1 April 2024 April 1, 2024	Penyampaian Aspirasi Kementerian BUMN terkait Perubahan Pengurus pada Anak Perusahaan PT Bukit Asam tbk Submission of the Aspirations of the Ministry of SOEs regarding Changes in Management at the Subsidiary of PT Bukit Asam Tbk	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
3 April 2024 April 3, 2024	Pedoman Barang dan/atau Jasa Tertentu PT Bukit Asam Tbk Guidelines for Certain Goods and/or Services PT Bukit Asam Tbk	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
5 April 2024 April 5, 2024	Persetujuan Cuti Bersama Anggota Direksi PTBA dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Joint Leave Approval for PTBA Board of Directors Members in the Context of Eid al-Fitr 1445 Hijriah	Direktur Utama PTBA PTBA President Director
19 April 2024 April 19, 2024	Surat Penunjukan Pimpinan RUPS Appointment Letter for GMS Chairman	-
19 April 2024 April 19, 2024	Laporan Tugas Pengawasan dan Tanggapan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk atas Kinerja Tahun Buku 2023 Report on Supervisory Duties and Responses of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk on the Performance of the 2023 Fiscal Year	1. Menteri BUMN selaku PS Seri A 2. Direksi MIND ID selaku Kuasa Khusus PS Seri A Dwiwarna dan Seri B 1. Minister of SOEs as PS Series A 2. Board of Directors of MIND ID as Special Power of Attorney for PS Series A Dwiwarna and Series B
22 April 2024 April 22, 2024	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan Maret 2024. Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for March 2024.	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
22 April 2024 April 22, 2024	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis s.d. Maret 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Report until March 2024 PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors

Tanggal Date	Perihal Issues	Ditujukan Kepada Intended to
22 April 2024 April 22, 2024	Penyampaian Laporan Progres Pengawasan atas Hasil Monev Triwulan IV Tahun Buku 2023 serta KPI per Maret 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of the Supervision Progress Report on the Results of Monitoring and Evaluation for Quarter IV of the 2023 Financial Year and KPI as of March 2024 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
29 April 2024 April 29, 2024	Usulan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023 Proposed Use of Net Profit for Fiscal Year 2023	Direktur Utama PTBA PTBA President Director
29 April 2024 April 29, 2024	Usulan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023 Proposed Use of Net Profit for Fiscal Year 2023	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
Mei 2024 May 2024	Penyampaian Usulan Penetapan Perhitungan Tantiem Tahun 2023 dan Gaji/Honorarium Tahun 2024 bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk Submission of Proposal for Determination of Calculation of Bonus for 2023 and Salary/ Honorarium for 2024 for Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk	1. Menteri BUMN selaku PS Seri A 2. Direksi MIND ID selaku Kuasa Khusus PS Seri A Dwiwarna dan Seri B 1. Minister of SOEs as PS Series A 2. Board of Directors of MIND ID as Special Power of Attorney for PS Series A Dwiwarna and Series B
3 Mei 2024 May 3, 2024	Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Evaluation Results of the Implementation of Audit Services for Annual Historical Financial Information by Public Accountants and/or Public Accounting Firms	Direktur Utama PTBA PTBA President Director
3 Mei 2024 May 3, 2024	Tanggapan atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2024 Response to the Appointment of Public Accounting Firm (KAP) to Audit PT Bukit Asam Tbk Financial Report for Fiscal Year 2024	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
Mei 2024 May 2024	Rencana Pinjam Pakai dan Pengelolaan Aset dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Borrowing and Asset Management Plan with Muara Enim Government	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
15 Mei 2024 May 15, 2024	Tindak Lanjut Keputusan Mata Acara Keempat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan terkait Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Follow-up to the Decision on the Fourth Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) regarding the Determination of Public Accounting Firm (KAP)	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
15 Mei 2024 May 15, 2024	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan April 2024. Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for April 2024.	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 Mei 2024 May 15, 2024	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis s.d. April 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Report until April 2024 PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
20 Mei 2024 May 20, 2024	Penyampaian Laporan Progres Pengawasan atas Hasil Monev Triwulan IV Tahun Buku 2023 serta KPI per April 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of the Supervision Progress Report on the Results of Monitoring and Evaluation for Quarter IV of the 2023 Financial Year and KPI as of April 2024 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
27 Mei 2024 May 27, 2024	Rencana Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Pembangunan Rumah Dokter. Build Operate Transfer (BGS) Cooperation Plan for the Construction of Doctor's House.	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
12 Juni 2024 June 12, 2024	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan Mei 2024. Submission of PT Bukit Asam Tbk's Performance Report for May 2024.	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
12 Juni 2024 June 12, 2024	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis s.d. Mei 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Report until May 2024 PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
19 Juni 2024 June 19, 2024	Persetujuan Pengangkatan Pengurus PT Bukit Multi Investama Approval of Appointment of Management PT Bukit Multi Investama	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
24 Juni 2024 June 24, 2024	Penyampaian Laporan Progres Pengawasan atas Hasil Monev Triwulan I Tahun Buku 2024 serta KPI per Mei 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of the Supervision Progress Report on the Results of the First Quarter Monitoring and Evaluation of the 2024 Financial Year and KPI as of May 2024 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
24 Juni 2024 June 24, 2024	Pedoman Kerja Sama PT Bukit Asam Tbk Cooperation Guidelines of PT Bukit Asam Tbk	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
28 Juni 2024 June 28, 2024	Usulan Perubahan Wakil Anggota Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan MIND ID Proposed Change of Deputy Member of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk as Member of the Integrated Governance and Social & Environmental Responsibility Committee MIND ID	Komisaris Utama MIND ID MIND President Commissioner

Tanggal Date	Perihal Issues	Ditujukan Kepada Intended to
5 Juli 2024 July 5, 2024	Tanggapan atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 PT Bukit Asam Tbk Response to the Appointment of Public Accounting Firm to Audit Financial Statements for Fiscal Year 2024 of PT Bukit Asam Tbk	Dewan Komisaris MIND ID MIND ID Board of Commissioner
12 Juli 2024 July 12, 2024	Persetujuan Cuti Ibadah Umroh Leave Approval for Umrah	Direktur Utama PTBA PTBA President Director
15 Juli 2024 July 15, 2024	Pengadaan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") Procurement of Public Accounting Firm ("KAP") for Audit of Financial Statements for Fiscal Year 2024 PT Bukit Asam Tbk ("PTBA")	Direktur Utama MIND ID MIND ID President Director
15 Juli 2024 July 15, 2024	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan Juni 2024. Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for June 2024.	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 Juli 2024 July 15, 2024	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis s.d Juni 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Report until June 2024 PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
23 Juli 2024 July 23, 2024	Penyampaian Laporan Progres Pengawasan atas Hasil Monev Triwulan II Tahun Buku 2024 serta KPI per Juni 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of the Supervision Progress Report on the Results of the Second Quarter Monitoring and Evaluation of the 2024 Financial Year and KPI as of June 2024 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
5 Agustus 2024 August 5, 2024	Revisi atas Usulan Remunerasi Tahun 2024 bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk, termasuk Tantiem Tahun Buku 2023 dan insentif jangka panjang Revision of the Proposed Remuneration for 2024 for Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk, including Tantiem for the 2023 Financial Year and Long Term Incentive	1. Menteri BUMN selaku PS Seri A; 2. Direksi MIND ID selaku Kuasa PS Seri A Dwiwarna dan PS Seri B Terbanyak 1. Minister of SOEs as PS Series A; 2. Board of Directors of MIND ID as the Authorized Person for PS Series A Dwiwarna and the most PS Series B
15 Agustus 2024 August 15, 2024	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan Juli 2024. Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for July 2024.	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 Agustus 2024 August 15, 2024	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis s.d. Juli 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Report until July 2024 PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
28 Agustus 2024 August 28, 2024	Informasi Masa Jabatan Staf Sekretariat Dewan Komisaris Information on the Term of Office of the Secretariat Staff of the Board of Commissioners	Sekretaris KBUMN SOEs Ministry Secretary
30 Agustus 2024 August 30, 2024	Penyampaian Laporan Progres Pengawasan atas Hasil Monev Triwulan II Tahun Buku 2024 serta KPI per Juli 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of the Supervision Progress Report on the Results of the Second Quarter Monitoring and Evaluation of the 2024 Financial Year and KPI as of July 2024 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
13 September 2024 September 13, 2024	Permohonan Persetujuan atas Mekanisme Pemblokiran Saldo Rekening Penempatan DHE-SDA sebagai Agunan Kredit Application for Approval of the Mechanism for Blocking the Balance of DHE-SDA Placement Accounts as Credit Collateral	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 September 2024 September 15, 2024	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan Agustus 2024 Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for August 2024	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 September 2024 September 15, 2024	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis s.d. Agustus 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Report until August 2024 PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
19 September 2024 September 19, 2024	Permohonan Konsultasi/Persetujuan Calon Pengurus (Direktur Utama dan Komisaris Utama) Afiliasi Terkendali dan Afiliasi Tidak Terkendali PT Bukit Asam Tbk Request for Consultation/Approval of Candidates for Management (President Director and President Commissioner) of Controlled Affiliates and Uncontrolled Affiliates of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
30 September 2024 September 30, 2024	Penyampaian Laporan Progres Pengawasan atas Hasil Monev Triwulan II Tahun Buku 2024 serta KPI per Agustus 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of the Supervision Progress Report on the Results of the Second Quarter Monitoring and Evaluation of the 2024 Financial Year and KPI as of August 2024 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
8 Oktober 2024 October 8, 2024	Penetapan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Penghasilan Tahun 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") serta Pembayaran Tahap I Tantiem Tahun Buku 2022 yang Ditangguhkan. Determination of Bonus for the 2023 Financial Year and Income for the 2024 Financial Year for the Directors and Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") and the Postponed Phase I Payment of Bonus for the 2022 Financial Year.	Direksi PTBA PTBA Board of Directors

Tanggal Date	Perihal Issues	Ditujukan Kepada Intended to
15 Oktober 2024 October 15, 2024	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan September 2024. Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for September 2024.	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 Oktober 2024 October 15, 2024	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis s.d September 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Report until September 2024 PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
22 Oktober 2024 October 22, 2024	Penyampaian Laporan Progres Pengawasan atas Hasil Monev Triwulan II Tahun Buku 2024 serta KPI per September 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of the Supervision Progress Report on the Results of the Second Quarter Monitoring and Evaluation of the 2024 Financial Year and KPI as of September 2024 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
5 November 2024 November 5, 2024	Penyampaian Aspirasi Kementerian BUMN terkait Perubahan Pengurus pada Anak Perusahaan PT Bukit Asam Tbk Submission of the Aspirations of the Ministry of SOEs regarding Changes in Management at PT Bukit Asam Tbk's Subsidiary	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
14 November 2024 November 14, 2024	Permohonan Persetujuan Penunjukan Pihak Independen atas Kaji Ulang Quality Assurance Review Fungsi SPI PTBA ("Eksternal QAR") Request for Approval of Appointment of Independent Party for Quality Assurance Review of PTBA SPI Function ("External QAR")	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
15 November 2024 November 15, 2024	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan Oktober 2024. Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for October 2024.	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 November 2024 November 15, 2024	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis s.d Oktober 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Report until October 2024 PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
20 November 2024 November 20, 2024	Penyampaian Laporan Progres Pengawasan atas Hasil Monev Bulan Oktober 2024 serta KPI sampai dengan September 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of the Monitoring Progress Report on the Results of Monitoring and Evaluation in October 2024 and KPI until September 2024 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
28 November 2024 November 28, 2024	Penyampaian Aspirasi Kementerian BUMN terkait Perubahan Pengurus pada Anak Perusahaa PT Bukit Asam Tbk Submission of Aspirations of the Ministry of SOEs regarding Changes in Management of Subsidiaries PT Bukit Asam Tbk	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
12 Desember 2024 December 12, 2024	Permohonan Izin Prinsip Penganggaran Pembayaran Klaim PT WIKA dalam Pekerjaan TLS 4 dan TLS 5 Application for Principle Permit for Budgeting of Claim Payments of PT WIKA in TLS 4 and TLS 5 Works	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
12 Desember 2024 December 12, 2024	Tambahan Setoran Modal kepada PT Bukit Multi Investama ("PT BMI") yang Ditujukan kepada PT Sinergi Mitra Lestari Indonesia ("PT SMLI") Additional Capital Deposit to PT Bukit Multi Investama ("PT BMI") Addressed to PT Sinergi Mitra Lestari Indonesia ("PT SMLI")	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
12 Desember 2024 December 12, 2024	Penghapusbukuan Piutang Bermasalah Program Pendanaan UMK Tahun 2024 Write-off of Problematic Receivables for 2024 MSME Funding Program	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
13 Desember 2024 December 13, 2024	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan November 2024. Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for November 2024.	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
13 Desember 2024 December 13, 2024	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis s.d November 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Report until November 2024 PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
13 Desember 2024 December 13, 2024	Penyampaian Laporan Progres Pengawasan atas Hasil Monev Bulan Oktober 2024 serta KPI sampai dengan November 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of the Monitoring Progress Report on the Results of Monitoring and Evaluation in October 2024 and KPI until November 2024 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
17 Desember 2024 December 17, 2024	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bukit Asam Tbk untuk Tahun Buku 2024 Appointment of Public Accounting Firm to conduct an Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Bukit Asam Tbk for the 2024 Financial Year	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
18 Desember 2024 December 18, 2024	Penunjukan Akuntan Publik atas Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bukit Asam Tbk untuk Tahun Buku 2024 Appointment of Public Accountant for Public Accounting Firm to conduct an Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Bukit Asam Tbk for the 2024 Financial Year	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
20 Desember 2024 December 20, 2024	Tahap Pertama Tanggapan dan Aspirasi Pemegang Saham terkait Susunan Pengurus pada Anak Perusahaan dan/atau Afilasi PT Bukit Asam Tbk First Stage of Response and Aspirations of Shareholders regarding the Composition of Management in Subsidiaries and/or Affiliates of PT Bukit Asam Tbk	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
24 Desember 2024 December 24, 2024	Persetujuan Cuti Tahunan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Bukit Asam Tbk Annual Leave Approval of Director of Finance and Risk Management of PT Bukit Asam Tbk	Direktur Utama PTBA PTBA President Director
30 Desember 2024 December 30, 2024	Permohonan Konsultansi/Persetujuan Calon Pengurus (Direktur Utama dan Direktur) Afiliasi Terkendali dan Afiliasi Tidak Terkendali PT Bukit Asam Tbk Request for Consultation/Approval of Candidates for Management (President Director and Director) of Controlled Affiliates and Uncontrolled Affiliates of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors

Tanggal Date	Perihal Issues	Ditujukan Kepada Intended to
5 Agustus 2024 August 5, 2024	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan Januari 2024 Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for January 2024	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 Agustus 2024 August 15, 2024	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis s.d Januari 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Report until January 2024 PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 Agustus 2024 August 15, 2024	Persetujuan Pemberian Setoran Modal PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") kepada PT Huadian Bukit Asam Power ("PT HBAP") Approval of Capital Deposit of PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") to PT Huadian Bukit Asam Power ("PT HBAP")	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
28 Agustus 2024 August 28, 2024	Penyampaian Laporan Progres Pengawasan atas Hasil Monev Triwulan III Tahun Buku 2023 serta KPI per Januari 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of the Supervision Progress Report on the Results of Monitoring and Evaluation for the Third Quarter of the 2023 Financial Year and KPI as of January 2024 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
30 Agustus 2024 August 30, 2024	Penyampaian Selected Talent PT Bukit Asam Tbk Submission of PT Bukit Asam Tbk Selected Talent	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
13 September 2024 September 13, 2024	Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Konsultan Remunerasi, Long Term Incentive, dan Rencana Program Kepemilikan Saham Bagi Pegawai PT Bukit Asam Tbk. Response to the Request for Approval of Remuneration Consultant, Long Term Incentive, and Share Ownership Program Plan for PT Bukit Asam Tbk Employees.	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
15 September 2024 September 15, 2024	Permohonan Persetujuan Pengurus PT Bukit Multi Investama Application for Approval of the Management of PT Bukit Multi Investama	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 September 2024 September 15, 2024	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan Februari 2024 Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for February 2024	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
19 September 2024 September 19, 2024	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis s.d Februari 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Report until February 2024 PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
30 September 2024 September 30, 2024	Penyampaian Laporan Progres Pengawasan atas Hasil Monev Triwulan IV Tahun Buku 2023 serta KPI per Februari 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of the Supervision Progress Report on the Results of Monitoring and Evaluation for Quarter IV of the 2023 Financial Year and KPI as of February 2024 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
8 Oktober 2024 Oktober 8, 2024	Permohonan Persetujuan Konsultan Remunerasi, Long Term Incentive, dan Rencana Program Kepemilikan Saham Bagi Pegawai PT Bukit Asam Tbk Request for Approval of Remuneration Consultant, Long Term Incentive, and Stock Ownership Program Plan for PT Bukit Asam Tbk Employees	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
15 Oktober 2024 October 15, 2024	Persetujuan Perubahan Organisasi PT Bukit Asam Tbk Approval of Organizational Changes PT Bukit Asam Tbk	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
15 Oktober 2024 October 15, 2024	Penyampaian Aspirasi Kementerian BUMN terkait Perubahan Pengurus pada Anak Perusahaan PT Bukit Asam tbk Submission of the Aspirations of the Ministry of SOEs regarding Changes in Management at the Subsidiary of PT Bukit Asam Tbk	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
22 Oktober 2024 October 22, 2024	Pedoman Barang dan/atau Jasa Tertentu PT Bukit Asam Tbk Guidelines for Certain Goods and/or Services PT Bukit Asam Tbk	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
5 November 2024 November 5, 2024	Persetujuan Cuti Bersama Anggota Direksi PTBA dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Joint Leave Approval for PTBA Board of Directors Members for Eid al-Fitr 1445 Hijriah	Direktur Utama PTBA PTBA President Director
14 November 2024 November 14, 2024	Surat Penunjukan Pimpinan RUPS Letter of Appointment for GMS Chairman	-
15 November 2024 November 15, 2024	Laporan Tugas Pengawasan dan Tanggapan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk atas Kinerja Tahun Buku 2023 Report on Supervisory Duties and Responses of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk on the Performance of the 2023 Fiscal Year	1. Menteri BUMN selaku PS Seri A 2. Direksi MIND ID selaku Kuasa Khusus PS Seri A Dwiwarna dan Seri B 1. Minister of SOEs as PS Series A 2. Board of Directors of MIND ID as Special Power of Attorney for PS Series A Dwiwarna and Series B
15 November 2024 November 15, 2024	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan Maret 2024. Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for March 2024.	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
20 November 2024 November 20, 2024	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis s.d Maret 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Report until March 2024 PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
28 November 2024 November 28, 2024	Penyampaian Laporan Progres Pengawasan atas Hasil Monev Triwulan IV Tahun Buku 2023 serta KPI per Maret 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of the Supervision Progress Report on the Results of Monitoring and Evaluation for Quarter IV of the 2023 Financial Year and KPI as of March 2024 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors

Tanggal Date	Perihal Issues	Ditujukan Kepada Intended to
12 Desember 2024 December 12, 2024	Usulan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023 Proposed Use of Net Profit for Fiscal Year 2023	Direktur Utama PTBA PTBA President Director
12 Desember 2024 December 12, 2024	Usulan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023 Proposed Use of Net Profit for Fiscal Year 2023	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
12 Desember 2024 December 12, 2024	Penyampaian Usulan Penetapan Perhitungan Tantiem Tahun 2023 dan Gaji/Honorarium Tahun 2024 bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk Submission of Proposal for Determination of Calculation of Bonus for 2023 and Salary/ Honorarium for 2024 for Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk	1. Menteri BUMN selaku PS Seri A 2. Direksi MIND ID selaku Kuasa Khusus PS Seri A Dwiwarna dan Seri B 1. Minister of SOEs as PS Series A 2. Board of Directors of MIND ID as Special Power of Attorney for PS Series A Dwiwarna and Series B
13 Desember 2024 December 13, 2024	Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Evaluation Results of the Implementation of Audit Services for Annual Historical Financial Information by Public Accountants and/or Public Accounting Firms	Direktur Utama PTBA PTBA President Director
13 Desember 2024 December 13, 2024	Tanggapan atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2024 Response to the Appointment of Public Accounting Firm (KAP) to Audit PT Bukit Asam Tbk Financial Report for Fiscal Year 2024	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
13 Desember 2024 December 13, 2024	Rencana Pinjam Pakai dan Pengelolaan Aset dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Borrowing and Asset Management Plan with Muara Enim Government	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
17 Desember 2024 December 17, 2024	Tindak Lanjut Keputusan Mata Acara Keempat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan terkait Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Follow-up to the Decision on the Fourth Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) regarding the Determination of Public Accounting Firm (KAP)	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
18 Desember 2024 December 18, 2024	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan April 2024. Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for April 2024.	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
20 Desember 2024 December 20, 2024	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis s.d April 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Report until April 2024 PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
24 Desember 2024 December 24, 2024	Penyampaian Laporan Progres Pengawasan atas Hasil Monev Triwulan IV Tahun Buku 2023 serta KPI per April 2024 PT Bukit Asam Tbk Submission of the Supervision Progress Report on the Results of Monitoring and Evaluation for Quarter IV of the 2023 Financial Year and KPI as of April 2024 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
30 Desember 2024 December 30, 2024	Rencana Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Pembangunan Rumah Dokter. Build Operate Transfer (BGS) Cooperation Plan for the Construction of Doctor's House.	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
31 Desember 2024 December 31, 2024	Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT Bukit Asam Tbk PT Bukit Asam Tbk Long-term Company Plans	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors

Keputusan Direksi yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar Pasal 12 ayat 7 dan Surat Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT Bukit Asam Tbk No. S-581/MBU/09/2018 tanggal 6 September 2018 perihal Persetujuan Usulan Batasan dan/atau Kriteria Kewenangan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk, diatur mengenai tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Selama tahun 2024, terdapat beberapa aksi korporasi yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Penetapan Lembaga Jasa Pemeringkatan Perusahaan

Directors' Decisions Requiring Approval from the Board of Commissioners

In accordance with Article 12 paragraph 7 of the Articles of Association and the Letter of the Minister of SOEs as the Holder of Series A Dwiwarna Shares of PT Bukit Asam Tbk No. S-581/MBU/09/2018 dated September 6, 2018 concerning the Approval of the Proposed Limitation and/or Criteria for the Authority of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk, it regulates the actions of the Board of Directors that require the approval of the Board of Commissioners.

In 2024, there were several corporate actions that had received the approval of the Board of Commissioners as follows:

1. Determination of the Company Rating Service Institution

2. Pemberian Setoran Modal PT Bukit Asam Tbk kepada PT Huadian Bukit Asam Power (PT HBAP) dalam rangka *shareholder support* atas *Cost Overrun* Proyek Sumsel-8
3. Perubahan Struktur Organisasi PT Bukit Asam Tbk

4. Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Pembangunan Rumah Dokter
5. Mekanisme Pemblokiran Saldo Rekening Penempatan DHE-SDA sebagai Agunan Krediit
6. Penetapan Pihak Independen atas Kaji Ulang *Quality Assurance Review* Fungsi SPT PTBA

7. Penganggaran Pembayaran Klaim PT WIKA dalam Pekerjaan TLS 4 dan TLS 5
8. Tambahan Setoran modal kepada PT BMI untuk PT SMLI.
9. Penghapusbukuan Piutang Bermasalah Program Pendanaan UMK Tahun 2024.
10. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2025-2029
11. Beberapa pengangkatan dan penggantian anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi PT Bukit Asam Tbk.

Penilaian Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris Prosedur Penilaian Kinerja

Setiap tahun, Komite menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan program kerja Komite selama satu tahun termasuk *Key Performance Indicator* (KPI) Komite. KPI merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai piagam Komite dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan dengan mengevaluasi rencana program kerja tahunan serta KPI dari masing-masing Komite yang telah disepakati bersama dengan Dewan Komisaris beserta realisasinya.

2. rovision of Capital Deposit of PT Bukit Asam Tbk to PT Huadian Bukit Asam Power (PT HBAP) in the framework of shareholder support for the Cost Overrun of the Sumsel-8 Project
3. Changes in the Organizational Structure of PT Bukit Asam Tbk
4. Build Operate Transfer (BGS) Cooperation for the Construction of Doctor's Houses
5. Blocking Mechanism for the Balance of the DHE-SDA Placement Account as Credit Collateral
6. Determination of Independent Party for the Review of the Quality Assurance Review of the PTBA SPT Function
7. Budgeting for Payment of PT WIKA Claims in the TLS 4 and TLS 5 Works
8. Additional Capital Deposit to PT BMI for PT SMLI.

9. Write-off of Problematic Receivables for the 2024 UMK Funding Program.
10. Long Term Plan of PT Bukit Asam Tbk

11. Several appointments and replacements of subsidiaries and/or affiliated companies of PT Bukit Asam Tbk.

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners Performance Appraisal Procedure

Every year, the Committee submits an Annual Work Plan containing the Committee's work program for one year including the Committee's Key Performance Indicators (KPIs). KPIs are a measure of the assessment of the success of implementing tasks in accordance with the Committee's charter and applicable laws and regulations. The performance assessment procedure of the Committees under the Board of Commissioners is carried out by evaluating the annual work program plan and KPIs of each Committee that have been agreed upon with the Board of Commissioners along with the realization.

Kriteria Penilaian

Penilaian dilakukan berdasarkan hasil perbandingan realisasi dengan target dikalikan dengan bobot. Apabila realisasi tercapai di atas 100%, maka nilai/skor yang diberikan dapat melebihi bobot maksimal. Apabila realisasi KPI tercapai di bawah 100%, maka nilai akan diberikan secara proporsional terhadap bobot. Berdasarkan jumlah skor, dapat ditentukan kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Skor 100% ≥ x > 95%, kriteria Sangat Baik.
2. Skor 95% ≥ x > 80%, kriteria Baik.
3. Skor 80% ≥ x > 65%, kriteria Cukup.
4. Skor 65% ≥ x > 50%, kriteria Kurang.
5. Skor ≤ 50%, kriteria Sangat Kurang.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan pencapaian Anggota Komite terhadap KPI yang telah ditetapkan sebelum masuk tahun anggaran. Untuk penilaian Komite di bawah Dewan Komisaris, dapat dilihat secara rinci pada bagian Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, serta Komite Nominasi dan Remunerasi dalam bab ini.

Appraisal Criteria

The appraisal is carried out based on the results of comparing realization with the target multiplied by the weight. If realization is achieved above 100%, then the value/score given can exceed the maximum weight. If KPI realization is achieved below 100%, then the value will be given proportionally to the weight. Based on the number of scores, the following assessment criteria can be determined:

1. Score 100% ≥ x > 95%, Very Good criteria.
2. Score 95% ≥ x > 80%, Good criteria.
3. Score 80% ≥ x > 65%, Average criteria.
4. Score 65% ≥ x > 50%, Poor criteria.
5. Score ≤ 50%, criteria Very Poor criteria.

Party Conducting Performance Appraisal

The Performance Appraisal of the Board of Commissioners Committee is conducted by the Board of Commissioners based on the achievement of Committee Members against the KPIs that have been set before entering the budget year. For the assessment of the Committee under the Board of Commissioners, it can be seen in detail in the Audit Committee, Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, and Nomination and Remuneration Committee in this chapter.



Direksi
Board of Directors

Direksi merupakan Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengangkatan Direksi dilakukan oleh RUPS, dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya. Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi sebesar-besarnya kepentingan Perusahaan, dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas Perusahaan.

Pedoman Kerja/Piagam Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi memiliki Pedoman Panduan Kerja Direksi (*Charter of Board Directors*), yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direksi. Panduan Kerja Direksi menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang di dalamnya memuat ketentuan yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, hal-hal yang ditetapkan dalam Rapat umum Pemegang Saham (RUPS), serta praktik-praktik terbaik GCG. Secara berkala, Panduan Kerja Direksi dievaluasi dan disempurnakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, dan kebutuhan Perusahaan.

Sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh MIND ID selaku holding PTBA, di tahun 2023, PTBA melakukan penyelarasan kebijakan internal PTBA. Salah satu yang menjadi penyelarasan yaitu perubahan Panduan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Panduan Kerja Direksi yang sebelumnya menjadi satu dengan Panduan Kerja Dewan Komisaris, di tahun 2023, panduan tersebut dipisahkan menjadi suatu kebijakan sendiri menjadi Pedoman Kerja Direksi. Pedoman Kerja Direksi telah disahkan oleh Dewan Direksi berdasarkan Keputusan Direksi No. 250H/0100/2023 tentang Pedoman Kerja Direksi (*Charter to Board of Directors*) PT Bukit Asam Tbk. Secara garis besar Pedoman Kerja Direksi PTBA mencakup:

1. Ketentuan Umum;
2. Keanggotaan Direksi;
3. Program Pengenalan, Remunerasi, dan Pelatihan;

The Board of Directors is a Company Organ that is authorized and fully responsible for managing the Company for the interests and objectives of the Company and represents the Company both inside and outside the court. The appointment of the Board of Directors is carried out by the GMS, from candidates proposed by the Series A Dwiwarna Shareholder or their proxies. The Board of Directors is obliged to manage the Company in accordance with its authority and responsibilities, as stipulated in the Articles of Association and provisions of laws and regulations, which are carried out in good faith and with full responsibility for the greatest interests of the Company, while still paying attention to the balance of interests of all parties related to the Company's activities.

Board of Directors' Work Guidelines/ Charter

In carrying out its duties and functions, the Board of Directors has a Charter of Board Directors, which is determined and signed by the Board of Directors. The Charter is a reference for the Directors to carry out their duties and functions, which contains provisions that refer to the principles of corporate law, applicable laws and regulations, the Articles of Association, others stipulated at the General Meeting of Shareholders (GMS), and at the GCG best practices. The Charter of Board Directors is periodically evaluated and refined by considering the provisions of applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, and the Company's needs.

In line with the policies set by MIND ID as PTBA's holding company, in 2023, PTBA aligned its internal policies. One of the areas of alignment is the change to the Board of Directors and Board of Commissioners Work Guide. The Directors' Work Guidelines were previously integrated with the Board of Commissioners' Work Guidelines, however, in 2023 these guidelines were separated into their own policy to become the Directors' Work Guidelines. It has been ratified by the Board of Directors based on the Board of Directors Decree No. 250H/0100/2023 concerning the Charter to Board of Directors of PTBA with guideline such as:

1. General Provisions;
2. Membership of the Board of Directors;
3. Introduction, Remuneration, and Training Program;

4. Tugas dan Kewajiban;
5. Wewenang, Pembagian Tugas, dan Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan;
6. Pelaksanaan Tugas Pengurusan Perusahaan;
7. Rapat Direksi;
8. Hubungan Antara Direksi dan Dewan Komisaris;
9. Evaluasi Kinerja Direksi;
10. Fungsi di bawah Direksi yang Wajib Dibentuk Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
11. Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Persetujuan Tindakan.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan Direksi terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, namun tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Ketentuan masa jabatan tersebut tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan para Anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Masa jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

1. Mengundurkan diri;
2. Meninggal dunia;
3. Masa jabatannya berakhir;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
5. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Anggota Direksi mengundurkan diri, maka:

1. Anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan, dengan tembusan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B terbanyak, Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;

4. Duties and Obligations;
5. Authority, Division of Duties, and Decision-Making Principles;
6. Implementation of Company Management Duties;
7. Board of Directors Meeting;
8. Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners;
9. Evaluation of Directors' Performance;
10. Functions under the Board of Directors which must be formed based on statutory provisions;
11. Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners for Approval of Actions.

Term of Office

The Board of Directors' term of office starts from the closing of the GMS or the date determined by the GMS appointing them and ends at the close of the 5th (fifth) Annual GMS after the date of appointment, provided that the term must not exceed 5 (five) years, but still considering the statutory regulations in the capital markets sector. These term of office provisions do not reduce the right of the GMS to dismiss members of the Board of Directors at any time before their term of office ends. Members of the Board of Directors can be reappointed by the GMS for one term of office.

Mechanism for Resignation and Dismissal of Directors

The term of office of a member of the Board of Directors ends if:

1. Resign;
2. Passed away;
3. The end of the term of office;
4. Dismissed based on GMS decision;
5. Declared bankrupt by the Commercial Court which has permanent legal force or placed under guardianship based on a Court decision; or
6. No longer meets the requirements as a member of the Board of Directors based on applicable laws and regulations.

In the event that a member of the Board of Directors resigns, then:

1. The member of the Board of Directors concerned must submit a written request for resignation regarding this intention to the Company, with a copy to the Series A Dwiwarna shareholder and the largest Series B shareholder, the Board of Commissioners, and other members of the Board of Directors at least 30 (thirty) days before the date of resignation;

2. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut, Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri Anggota Direksi;
3. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya efektif.
4. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
5. Pemberhentian sementara harus diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan Direksi, dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
6. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara, atau lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara;
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara;
8. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;
9. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara, diberi kesempatan untuk membela diri;
10. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila dinyatakan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS;
11. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau dinyatakan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS, maka Anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;

2. No later than 90 (ninety) days after receiving the letter of resignation, the Company is obliged to hold a GMS to decide on the request for resignation of the Member of the Board of Directors;
3. Members of the Board of Directors who resign can still be held accountable from the time of their appointment until the effective date of their resignation.
4. Members of the Board of Directors may at any time be temporarily dismissed by the Board of Commissioners by stating the reasons if they act contrary to the Articles of Association or there are indications of taking actions that are detrimental to the Company or neglecting their obligations or there are urgent reasons for the Company, considering the following provisions: Laporan Keuangan Financial Statements
5. The temporary dismissal must be notified in writing to the member of the Board of Directors concerned along with the reason, with a copy from the Board of Directors, no later than 2 (two) working days after the provision of the temporary dismissal;
6. Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed are not authorized to carry out management of the Company for the interests of the Company in accordance with the aims and objectives of the Company and represent the Company both inside and outside the court, which comes effective from the decision to temporarily dismiss them by the Board of Commissioners until a GMS decision confirming or canceling temporary dismissal, or the expiry of the period for holding the GMS to revoke or confirm the decision to temporarily dismiss,
7. Within a period of no later than 90 (ninety) days after the temporary dismissal, the Board of Commissioners must convene a GMS to revoke or confirm the decision on the temporary dismissal;
8. If the time period for holding the GMS has expired or the GMS is unable to make a decision, the temporary dismissal will be cancelled;
9. Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed are given the opportunity to defend themselves;
10. Temporary suspension cannot be extended or reestablished for the same reason, it it is exceeding the GMS period;
11. If the GMS cancels the temporary dismissal or it is declared that the period for holding the GMS has expired, then the relevant member of the Board of Directors is obliged to carry out his/her duties again;

12. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;
13. Apabila Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS;
14. Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat/publik dan menyampaikan kepada OJK mengenai keputusan pemberhentian sementara serta hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

12. If the GMS confirms the decision to temporarily dismissal, the member of the Board of Directors concerned will be permanently dismissed;
13. If the temporarily dismissed member of the Board of Directors does not attend the GMS after being summoned in writing, then the temporarily dismissed member of the Board of Directors is deemed not to have exercised his right to defend themselves at the GMS and has accepted the GMS decision;
14. The Company is obliged to disclose information to the public/public and submit to the OJK regarding the decision on temporary dismissal as well as the results of holding a GMS to revoke or strengthen the decision on temporary dismissal or information regarding the cancellation of the temporary dismissal by the Board of Commissioners due to the failure to hold the GMS until the expiry of the time period, no later than no later than 2 (two) working days after the event occurs.

Susunan, Jumlah, Komposisi, dan Dasar Pengangkatan Anggota Direksi di Sepanjang Tahun 2024

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Direksi, jumlah anggota Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan, yakni sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Susunan, jumlah, dan komposisi Direksi tahun 2024 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yakni berjumlah 5 (lima). Adapun susunan Direksi tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Position, Number, Composition, and Basis for Board of Directors Appointment in 2024

Based on the Articles of Association and the Board of Directors' Work Guidelines, the number of members of the Board of Directors is adjusted to the needs of the Company, namely consisting of at least 2 (two) people, of whom are appointed as President Director. The position, number, and composition of the Board of Directors in 2024 did not change from the previous year, namely 5 (five). The composition of the Board of Directors in 2024 is as follows:

Tabel Susunan Anggota Direksi Tahun 2024
Table of Directors Composition in 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Ketetapan Legal basis	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	Keputusan RUPS Luar Biasa 23 Desember 2021 Resolution of Extraordinary GMS on December 23, 2021	2021 – 2026	Pertama First
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Keputusan RUPS Tahunan 5 April 2021 Resolution of Annual GMS on April 5, 2021	2021 – 2026	Pertama First
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operations and Production Director	Keputusan RUPS Tahunan 5 April 2021 Resolution of Annual GMS on April 5, 2021	2021 – 2026	Pertama First
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	Keputusan RUPS Luar Biasa 23 Desember 2021 Resolution of Extraordinary GMS on December 23, 2021	2021 – 2026	Pertama First
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	Keputusan RUPS Luar Biasa 23 Desember 2021 Resolution of Extraordinary GMS on December 23, 2021	2021 – 2026	Pertama First

Tugas dan Tanggung Jawab

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS termasuk kewajiban menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Dalam pelaksanaan tugas Direksi, terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan.
2. Anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
3. Setiap Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Adapun tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi dalam melaksanakan fungsi pengurusan Perusahaan, diatur sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan di bidang badan Usaha Milik Negara dan Anggaran Dasar Perusahaan,

Duties and Responsibilities

The Board of Directors must carry out all actions related to and being responsible for the management of the Company for the interests of the Company in accordance with the aims and objectives of the Company, while still paying attention to and complying with the provisions and representing the Company both inside and outside the Court regarding all matters and all events with the limitations as stated in stipulated in statutory regulations, Articles of Association, and/or GMS decisions including the obligation to hold Annual GMS and other GMS as regulated in statutory regulations and Articles of Association.

In carrying out the duties of the Board of Directors, they must consider these principles:

1. The Board of Directors is obliged to devote full energy, thought, attention and dedication to the duties, obligations, and achievement of the Company's objectives.
2. Members of the Board of Directors must comply with the Company's Articles of Association and statutory regulations and must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, and fairness.
3. Each member of the Board of Directors is obliged to carry out their duties and responsibilities for the interests and business of the Company in good faith, with full responsibility and prudence, by complying with applicable laws.
4. Each member of the Board of Directors is fully and jointly responsible for losses to the Company caused by errors or negligence of members of the Board of Directors in carrying out their duties.
5. Members of the Board of Directors cannot be held responsible for the Company's losses if they can prove that the losses were not due to their fault or negligence, have carried out management in good faith, full responsibility, and prudence for the benefit and in accordance with the aims and objectives of the Company, and have no conflict of interest directly or indirectly for management actions that result in losses, and have taken action to prevent the occurrence or continuation of such losses.

The duties, responsibilities, and authority of the Board of Directors in carrying out the Company's management functions are regulated as follows:

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

In accordance with the provisions of the Regulations in the State-Owned Enterprises and the Company's Articles

dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya, serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris, dengan ketentuan persetujuan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
3. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi.
4. Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan, yang terdiri dari catatan (yaitu neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan), bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha Perusahaan.
5. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada akuntan publik untuk diaudit.
6. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
7. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
8. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi urusan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada triwulanan dan tahunan terkait pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
10. Memelihara dan menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah RUPS, risalah rapat Dewan Komisaris dan risalah rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan, dan dokumen Perseroan lainnya.
11. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan.

of Association, in carrying out their duties, the Board of Directors is obliged to:

1. Endeavor and guarantee the implementation of the Company's business and activities in accordance with its aims and objectives and business activities.
2. Prepare the Company's Long Term Plan, the Company's Annual Work Plan and Budget and other work plans, as well as amendments to be submitted to the Board of Commissioners and obtain approval from the Board of Commissioners, provided that the approval of the Board of Commissioners is determined after obtaining approval from the Series A Dwiwarna Shareholders.
3. Create a Shareholders List, Special List, minutes of GMS, and minutes of Directors' meetings.
4. Prepare an Annual Report, containing, among other things, Financial Reports, as a form of accountability for the management of the Company, as well as the Company's financial documents as intended in the Law on Company Documents, which consist of notes (annual balance sheets, annual profit and loss calculations, accounts, daily transaction journals, or any writing containing information regarding rights and obligations as well as matters relating to the Company's business activities), evidence of bookkeeping, and supporting financial administration data, which is proof of the existence of rights and obligations as well as the Company's business activities.
5. Prepare Financial Reports based on Financial Accounting Standards and submit them to public accountants for audit.
6. Submit the Annual Report after being reviewed by the Board of Commissioners no later than 5 (five) months after the Company's financial year ends to the GMS for approval and ratification.
7. Provide an explanation to the GMS regarding the Annual Report.
8. Submit the Balance Sheet and Profit and Loss Report approved by the GMS to the Minister in charge of legal affairs in accordance with the provisions of statutory regulations.
9. Prepare other reports required by statutory regulations, including but not limited to quarterly and annual reports related to the implementation of the Social and Environmental Responsibility Program.
10. Maintain and store at the Company's place of residence the Register of Shareholders, Special Register, minutes of the GMS, minutes of meetings of the Board of Commissioners and minutes of meetings of the Board of Directors, Annual Report, and financial documents of the Company, and other Company documents.
11. Organize and maintain the Company's bookkeeping and administration in accordance with the applicable regulations.

12. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/ Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan, khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
14. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
15. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, (yang dilakukan melalui atau dikoordinasikan oleh kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
16. Membentuk unit Sekretaris Perusahaan.
17. Membentuk unit SPI.
18. Membentuk unit Manajemen Risiko.
19. Membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi.
20. Memiliki fungsi tata kelola terintegrasi.
21. Membentuk Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
22. Kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23. Memenuhi dan melaksanakan tindakan-tindakan dalam rangka memenuhi hak-hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Perusahaan, dalam rangka hubungan dengan Dewan Komisaris, maka Direksi memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Direksi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pemeriksaan oleh SPI kepada Dewan Komisaris.
2. Direksi berkewajiban menyampaikan kepada Dewan Komisaris kajian risiko untuk setiap aksi korporasi yang dilakukan dan pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan.
3. Direksi berkewajiban menyampaikan kepada Dewan Komisaris pelaksanaan dan implementasi Tata Kelola Terintegrasi di Perseroan.
4. Direksi berkewajiban menyampaikan laporan atas sistem teknologi dan informasi yang digunakan oleh Perusahaan kepada Dewan Komisaris.

12. Prepare an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and internal control principles, especially the functions of management, recording, storage and supervision.
13. Provide periodic reports according to the method and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies by considering the provisions of laws and regulations, especially regulations in the market sector. Capital.
14. Prepare the Company's organizational structure complete with details and duties.
15. Provide explanations regarding all matters asked or requested by Members of the Board of Commissioners and/or Series A Dwiwarna Shareholders/Proxies of Series A Dwiwarna Shareholders, (which are carried out through or coordinated by the proxies of Series A Dwiwarna Shareholders) taking into account the laws and regulations, especially regulations in the Capital Market.
16. Establish a Corporate Secretary unit.
17. Establish an Internal Audit unit.
18. Establish a Risk Management unit.
19. Establish an Information Technology Steering Committee.
20. Has an integrated governance function.
21. Establish a Social and Environmental Responsibility Committee.
22. Other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and determined by the GMS based on statutory regulations.
23. Fulfill and carry out actions in order to fulfill the rights of Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies.

Besides the obligations as referred to in the Company's Articles of Association, in regard of relations with the Board of Commissioners, the Board of Directors has the following obligations:

1. Obliged to submit a report on the implementation of the inspection by Internal Audit to the Board of Commissioners.
2. Obliged to submit to the Board of Commissioners the risk assessment for every corporate action carried out and the implementation of risk management in the Company.
3. Obliged to report to the Board of Commissioners the implementation of Integrated Governance in the Company.
4. Obliged to submit reports on the technology and information systems used by the Company to the Board of Commissioners.

5. Direksi berkewajiban menyampaikan laporan atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Perusahaan.
6. Direksi selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan berkewajiban menyampaikan laporan kinerja Anak Perusahaan setiap 3 (tiga) bulan.
7. Direksi berkewajiban menyampaikan pelaksanaan perjanjian dan pemenuhan hak-hak pihak ketiga atas perjanjian.

Wewenang Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi Perusahaan memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perusahaan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang Anggota Direksi atau kepada seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk khusus untuk itu termasuk pegawai Perusahaan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain.
3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pegawai Perusahaan, termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawasan Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana dalam Anggaran Dasar dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.
7. Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perusahaan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan

5. Obliged to submit reports on the procurement of goods and services carried out by the Company.
6. The Board of Directors as Shareholders of Subsidiaries are obliged to submit Subsidiary performance reports every 3 (three) months.
7. The Board of Directors is obliged to convey the implementation of the agreement and fulfill the rights of third parties regarding the agreement.

Authority of the Board of Directors

In carrying out their duties, the Board of Directors have the following authorities:

1. Establish appropriate policies in the management of the Company.
2. Regulate the transfer of the powers of the Board of Directors to represent the Company inside and outside the court to one or several members of the Board of Directors or to a person or several people specially appointed for this purpose including Company employees either individually or jointly and/or other bodies.
3. Regulate provisions regarding Company employees including determining wages, pensions or old age security, and other income for Company employees based on applicable laws and regulations.
4. Appoint and dismiss Company employees based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations.
5. Appoint and dismiss the Corporate Secretary and/or Head of the Internal Audit Unit with approval from the Board of Commissioners.
6. Write off bad debts according to the provisions in the Articles of Association and report to the Board of Commissioners to be later reported in the Annual Report.
7. No further collection of receivables for interest, fines, fees, and other receivables beyond the principal amount carried out in the context of restructuring and/or settlement of receivables as well as other acts in the context of settlement of the Company's receivables with the obligation to report to the Board of Commissioners whose terms and reporting procedures are determined by the Board Commissioner.
8. Carrying out all actions and other actions regarding the management and ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, and representing the Company inside and outside the Court regarding all matters and all events, with restrictions as

pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

regulated in the regulations, Articles of Association, and/or GMS Decisions.

Pembagian Tugas Antar Direksi

Guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi, maka dilakukan pembagian tugas Direksi sesuai dengan fungsi masing-masing berdasarkan Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk No.156/0100/2024 tentang Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab Direksi PT Bukit Asam Tbk dan dengan uraian berikut:

Division of Duties Between Directors

In order to support the implementation of the duties of the Board of Directors, their duties are divided according to their respective functions based on the Decree of the Directors of PT Bukit Asam Tbk No. No.156/0100/2024 concerning the Duties, Authorities, with the following description:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Scope of work
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	1. Berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan untuk baik di dalam maupun di luar pengadilan. 2. Mengkoordinasikan anggota Direksi lainnya, agar seluruh kebijakan berjalan sesuai dengan visi, misi, sasaran strategis, dan kebijakan yang ditetapkan. 3. Menyelaraskan seluruh inisiatif internal perseroan dan memastikan terjadinya peningkatan kemampuan bersaing Perusahaan. 4. Mengarahkan, mengembangkan, dan menetapkan strategi pengelolaan Perusahaan secara menyeluruh sehingga menjamin terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). 5. Mengkoordinasikan dan membidangi tugas operasional di bidang pelaksanaan audit internal, kesekretariatan/sekretaris perusahaan, dan terkait sistem manajemen perusahaan serta kinerja. 6. Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, misi, strategi, dan kebijakan perusahaan yang ditetapkan. 7. Memastikan seluruh informasi yang terkait dengan satuan kerjanya selalu tersedia bila diperlukan oleh organ Perusahaan termasuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/kuasanya. 8. Memimpin personel di satuan kerjanya sesuai dengan ketentuan pedoman yang berlaku. 9. Menjalankan fungsi sebagai organ pengelola risiko sebagaimana dalam peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN atau PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/induk perusahaan. 10. Menyelenggarakan dan memimpin rapat Direksi secara periodik sesuai dengan ketetapan Direksi atau rapat-rapat lainnya apabila dipandang perlu sesuai dengan usulan Direksi atau organ Perusahaan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar yang berlaku. 11. Menandatangani segala dokumen, termasuk perikatan, perjanjian, kebijakan, dan/atau pedoman yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas di atas. 12. Melakukan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan yang berlaku. 1. Has the right and authority for and on behalf of the Board of Directors and represents the Company both inside and outside the court. 2. Coordinates other members of the Board of Directors, so that all policies are in accordance with the vision, mission, strategic objectives, and policies set. 3. Aligns all internal initiatives of the company and ensures an increase in the Company's competitiveness. 4. Directs, develops, and establishes the Company's overall management strategy to ensure the creation of good corporate governance. 5. Coordinates and oversees operational tasks in the field of internal audit implementation, secretariat/corporate secretary, and related to the company's management system and performance. 6. Directs and establishes strategies and policies in the field of work of his responsibility by taking into account the vision, mission, strategy, and policies of the company that have been set. 7. Ensures the availability of all information related to his work unit when needed by the Company's organs including the Series A Dwiwarna Shareholder/his attorney. 8. Leads personnel in his work unit in accordance with the provisions of applicable guidelines. 9. Carrying out the function as a risk management organ as stipulated in the regulations set by the Ministry of SOEs or PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the proxy of the Series A Dwiwarna Shareholder/parent company. 10. Organizing and leading periodic Board of Directors meetings in accordance with the provisions of the Board of Directors or other meetings if deemed necessary in accordance with the proposals of the Board of Directors or other Company organs based on the applicable Articles of Association. 11. Signing all documents, including agreements, agreements, policies and/or guidelines required in order to carry out the above tasks. 12. Carrying out other duties as stipulated in the applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Scope of work
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	1. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi tugas operasional di bidang anggaran, akuntansi, perpajakan, keuangan, pendanaan, manajemen risiko, teknologi dan informasi, pengelolaan dan pengawasan anak dan afiliasi perusahaan, serta tugas dan fungsi lain yang ditetapkan oleh Direksi di kemudian hari. 2. Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, misi, strategi, dan kebijakan Perusahaan yang ditetapkan. 3. Menyusun dan menetapkan rencana kerja, rencana pengembangan strategis dan pengelolaan sumber daya manusia di tim yang mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi tugas operasional di bidang anggaran, akuntansi, perpajakan, keuangan, pendanaan, manajemen risiko, teknologi dan informasi, pengelolaan dan pengawasan anak dan afiliasi perusahaan, serta tugas dan fungsi lain yang ditetapkan oleh Direksi di kemudian hari. 4. Memastikan seluruh informasi yang terkait dengan satuan kerjanya selalu tersedia bila diperlukan oleh organ Perusahaan termasuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/kuasanya. 5. Memimpin personel di satuan kerjanya sesuai dengan ketentuan pedoman yang berlaku. 6. Menjalankan fungsi sebagai organ pengelola risiko sebagaimana dalam peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN atau PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/induk perusahaan. 7. Menandatangani segala dokumen, termasuk perikatan, perjanjian, kebijakan dan/atau pedoman yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas di atas (termasuk untuk menandatangani dokumen/surat menyurat yang bersifat administratif kepada anak dan afiliasi perusahaan). 8. Menjalankan tugas fungsional dan pembinaan sebagai berikut: a. Melakukan pembinaan terhadap anak dan afiliasi perusahaan serta badan hukum terafiliasi perusahaan sebagai berikut: • PT Bukit Multi Investama; • Dana Pensiun Bukit Asam; • Yayasan Bukit Asam • anak dan afiliasi perusahaan serta badan hukum terafiliasi yang dibentuk, didirikan, atau berasal dari aksi korporasi yang kemudian ditetapkan di bawah pembinaannya. b. Melakukan harmonisasi peraturan induk perusahaan dengan anak dan afiliasi perusahaan sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023. 9. Melakukan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan yang berlaku. 10. Dengan ketentuan tugas dan wewenang sebagaimana angka 1 sampai 9 di atas, tetap memperhatikan hak dan kewenangan, serta tugas Direktur Utama yang diatur dalam Keputusan ini. 1. Plan, coordinate, direct, supervise, and evaluate operational tasks in the fields of budget, accounting, taxation, finance, funding, risk management, technology and information, management and supervision of subsidiaries and affiliates, as well as other tasks and functions determined by the Board of Directors in the future. 2. Direct and determine strategies and policies for the areas of work that are his responsibility by taking into account the vision, mission, strategy, and policies of the Company that have been determined. 3. Prepare and determine work plans, strategic development plans and human resource management in teams that coordinate, direct, supervise, and evaluate operational tasks in the fields of budget, accounting, taxation, finance, funding, risk management, technology and information, management and supervision of subsidiaries and affiliates, as well as other tasks and functions determined by the Board of Directors in the future. 4. Ensure the availability of all information related to her work unit when needed by the Company's organs including the Series A Dwiwarna Shareholder/his attorney. 5. Lead personnel in his work unit in accordance with the provisions of applicable guidelines. 6. Carrying out the function as a risk management organ as stipulated in the regulations stipulated by the Ministry of SOEs or PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the proxy of the Series A Dwiwarna Shareholder/parent company. 7. Signing all documents, including agreements, agreements, policies and/or guidelines required in order to carry out the above tasks (including signing administrative documents/correspondence to subsidiaries and affiliates of the company). 8. Carrying out functional and coaching duties as follows: a. Providing coaching to subsidiaries and affiliates of the company and affiliated legal entities of the company as follows: • PT Bukit Multi Investama; • Bukit Asam Pension Fund; • Bukit Asam Foundation • Subsidiaries and affiliates of the company and affiliated legal entities formed, established, or derived from corporate actions which are then determined under its guidance. b. Harmonizing the regulations of the parent company with subsidiaries and affiliates of the company in line with the Regulation of the Minister of SOEs PER-2/MBU/03/2023. 9. Perform other duties as stipulated in the applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association. 10. With the provisions of duties and authorities as in numbers 1 to 9 above, still paying attention to the rights and authorities, as well as the duties of the President Director as stipulated in this Decree.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Scope of work
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operation and Production Director	1. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi tugas operasional di bidang pertambangan (penambangan, penanganan dan angkutan batu bara, pengelolaan lingkungan dan penunjang tambang serta layanan operasi penambangan) dan kepelabuhan/ dermaga, optimasi operasi produksi, kesehatan dan keselamatan kerja, perencanaan (perencanaan tambang dan eksplorasi), dan perawatan, serta tugas dan fungsi lain yang ditetapkan oleh Direksi di kemudian hari. 2. Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, misi, strategi, dan kebijakan Perusahaan yang ditetapkan. 3. Menyusun dan menetapkan rencana kerja, rencana pengembangan strategis dan pengelolaan sumber daya manusia di tim yang mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi tugas operasional di bidang operasional pertambangan (penambangan, penanganan dan angkutan batu bara, pengelolaan lingkungan dan penunjang tambang serta layanan operasi penambangan) dan kepelabuhan/dermaga, optimasi operasi produksi, kesehatan dan keselamatan kerja, perencanaan (perencanaan tambang dan eksplorasi), dan perawatan, serta tugas dan fungsi lain yang ditetapkan oleh Direksi di kemudian hari. 4. Memastikan seluruh informasi yang terkait dengan satuan kerjanya selalu tersedia bila diperlukan oleh organ Perusahaan termasuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/kuasanya. 5. Memimpin personel di satuan kerjanya sesuai dengan ketentuan pedoman yang berlaku. 6. Menjalankan fungsi sebagai organ pengelola risiko sebagaimana dalam peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN atau PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/induk perusahaan. 7. Menandatangani segala dokumen, termasuk perikatan, perjanjian, kebijakan dan/atau pedoman yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas di atas. 8. Menjalankan tugas melakukan pembinaan terhadap anak dan afiliasi perusahaan serta badan hukum terafiliasi perusahaan sebagai berikut: a. PT Internasional Prima Coal; b. PT Satria Bahana Sarana; c. PT Bukit Pembangkit Innovative; d. PT Bukit Energi Investama; e. PT Bukit Energi Service Terpadu; f. PT Bumi Sawindo Permai; g. PT Sinergi Mitra Lestari Indonesia; h. anak dan afiliasi perusahaan serta badan hukum terafiliasi yang dibentuk, didirikan, atau berasal dari aksi korporasi yang kemudian ditetapkan di bawah pembinaannya. 9. Melakukan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perusahaan yang berlaku. 10. Dengan ketentuan tugas dan wewenang sebagaimana angka 1 sampai 9 di atas, tetap memperhatikan hak dan kewenangan, serta tugas Direktur Utama yang diatur dalam Keputusan ini. 1. Plan, coordinate, direct, supervise, and evaluate operational tasks in the mining sector (mining, coal handling and transportation, environmental management and mining support and mining operation services) and ports/docks, optimization of production operations, occupational health and safety, planning (mining and exploration planning), and maintenance, as well as other tasks and functions determined by the Board of Directors in the future. 2. Direct and determine strategies and policies for the areas of work that are his responsibility by taking into account the Company's vision, mission, strategy, and established policies. 3. Prepare and determine work plans, strategic development plans and human resource management in teams that coordinate, direct, supervise, and evaluate operational tasks in the mining operational sector (mining, coal handling and transportation, environmental management and mining support and mining operation services) and ports/docks, optimization of production operations, occupational health and safety, planning (mining and exploration planning), and maintenance, as well as other tasks and functions determined by the Board of Directors in the future. 4. Ensure the availability of all information related to its work unit when needed by the Company's organs including the Series A Dwiwarna Shareholder/proxy. 5. Lead personnel in its work unit in accordance with the provisions of applicable guidelines. 6. Carry out the function as a risk management organ as stipulated in the regulations stipulated by the Ministry of SOEs or PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the proxy of the Series A Dwiwarna Shareholder/parent company. 7. Sign all documents, including agreements, agreements, policies and/or guidelines required in order to carry out the above tasks. 8. Carry out the task of providing guidance to subsidiaries and affiliates of the company and affiliated legal entities of the company as follows: a. PT Internasional Prima Coal; b. PT Satria Bahana Sarana; c. PT Bukit Pembangkit Innovative; d. PT Bukit Energi Investama; e. PT Bukit Energi Service Terpadu; f. PT Bumi Sawindo Permai; g. PT Sinergi Mitra Lestari Indonesia; h. subsidiaries and affiliates of the company and affiliated legal entities formed, established, or derived from corporate actions that are then determined under its guidance. 9. Perform other duties as stipulated in the applicable laws and regulations and the Articles of Association of the company. 10. With the provisions of the duties and authorities as in numbers 1 to 9 above, still paying attention to the rights and authorities, as well as the duties of the President Director as stipulated in this Decree.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Scope of work
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	1. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi tugas operasional di bidang sumber daya manusia, pengelolaan aset dan infrastuktur penunjang, hukum dan regulasi, sustainability/corporate social responsibility, dan pengadaan, serta tugas dan fungsi lain yang ditetapkan oleh Direksi di kemudian hari. 2. Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, misi, strategi, dan kebijakan PTBA yang ditetapkan. 3. Menyusun dan menetapkan rencana kerja, rencana pengembangan strategis dan pengelolaan sumber daya manusia di tim yang mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi tugas operasional di bidang sumber daya manusia, pengelolaan aset dan infrastruktur penunjang, hukum dan regulasi, sustainability/corporate social responsibility, dan pengadaan, serta tugas dan fungsi lain yang ditetapkan oleh Direksi di kemudian hari. 4. Memastikan seluruh informasi yang terkait dengan satuan kerjanya selalu tersedia bila diperlukan oleh organ perusahaan termasuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/kuasanya. 5. Memimpin personel di satuan kerjanya sesuai dengan ketentuan pedoman yang berlaku. 6. Menjalankan fungsi sebagai organ pengelola risiko sebagaimana dalam peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN atau PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/induk perusahaan. 7. Menandatangani segala dokumen, termasuk perikatan, perjanjian, kebijakan dan/atau pedoman yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas di atas. 8. Menjalankan tugas bidang untuk melakukan pembinaan terhadap anak dan afiliasi perusahaan serta badan hukum terafiliasi perusahaan sebagai berikut: a. PT Bukit Asam Medika; b. PT Bukit Multi Properti; c. PT Batubara Bukit Kendi; d. anak dan afiliasi perusahaan serta badan hukum terafiliasi yang dibentuk, didirikan, atau berasal dari aksi korporasi yang kemudian ditetapkan di bawah pembinaannya. 9. Melakukan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan yang berlaku. Dengan ketentuan tugas dan wewenang sebagaimana angka 1 sampai 9 di atas, tetap memperhatikan hak dan kewenangan, serta tugas Direktur Utama yang diatur dalam Keputusan ini. 1. Plan, coordinate, direct, supervise, and evaluate operational tasks in the field of human resources, asset management and supporting infrastructure, law and regulation, sustainability/corporate social responsibility, and procurement, as well as other tasks and functions determined by the Board of Directors in the future. 2. Direct and determine strategies and policies in the field of tasks included in his responsibility by taking into account the vision, mission, strategy, and policies of PTBA that have been determined. 3. Prepare and determine work plans, strategic development plans and human resource management in teams that coordinate, direct, supervise, and evaluate operational tasks in the field of human resources, asset management and supporting infrastructure, law and regulation, sustainability/corporate social responsibility, and procurement, as well as other tasks and functions determined by the Board of Directors in the future. 4. Ensure the availability of all information related to his work unit when needed by the company's organs including the Series A Dwiwarna Shareholder/his attorney. 5. Lead personnel in his work unit in accordance with the provisions of applicable guidelines. 6. Carrying out the function as a risk management organ as stipulated in the regulations stipulated by the Ministry of SOEs or PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the proxy of the Series A Dwiwarna Shareholder/parent company. 7. Signing all documents, including agreements, agreements, policies and/or guidelines required in order to carry out the above tasks. 8. Carrying out field duties to provide guidance to subsidiaries and affiliates of the company and affiliated legal entities of the company as follows: a. PT Bukit Asam Medika; b. PT Bukit Multi Properti; c. PT Batubara Bukit Kendi; d. subsidiaries and affiliates of the company and affiliated legal entities formed, established, or derived from corporate actions which are then determined under its guidance. 9. Carrying out other duties as stipulated in the applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association. With the provisions of the duties and authorities as in numbers 1 to 9 above, still paying attention to the rights and authorities, as well as the duties of the President Director as stipulated in this Decree.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Scope of work
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	1. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi tugas operasional di bidang pengembangan usaha (project management office yang meliputi pengembangan tambang, pengembangan logistik dan infrastruktur, pengembangan energi, dan pengembangan hilirisasi) dan komersial (pemasaran dan distribusi) serta tugas dan fungsi lain yang ditetapkan oleh Direksi di kemudian hari. 2. Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, misi, strategi, dan kebijakan Perusahaan yang ditetapkan. 3. Menyusun dan menetapkan rencana kerja, rencana pengembangan strategis dan pengelolaan sumber daya manusia di tim yang mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi tugas operasional di bidang pengembangan usaha (project management office yang meliputi pengembangan tambang, pengembangan logistik dan infrastruktur, pengembangan energi, dan pengembangan hilirisasi) dan komersial (pemasaran dan distribusi) serta tugas dan fungsi lain yang ditetapkan oleh Direksi di kemudian hari. 4. Memastikan seluruh informasi yang terkait dengan satuan kerjanya selalu tersedia bila diperlukan oleh organ Perusahaan termasuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/kuasanya. 5. Memimpin personel di satuan kerjanya sesuai dengan ketentuan pedoman yang berlaku. 6. Menjalankan fungsi sebagai organ pengelola risiko sebagaimana dalam peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN atau PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/induk perusahaan. 7. Menandatangani segala dokumen, termasuk perikatan, perjanjian, kebijakan dan/atau pedoman yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas di atas. 8. Menjalankan tugas untuk melakukan pembinaan terhadap anak dan afiliasi perusahaan serta badan hukum terafiliasi perusahaan sebagai berikut: a. PT Bukit Asam Prima; b. PT Bukit Prima Bahari; c. PT Pelabuhan Bukit Prima; d. PT Penajam International Terminal; e. PT Huadian Bukit Asam Power; f. PT Bukit Asam Banko; g. PT Bukit Asam TransPacific Railways; h. PT Bukit Asam Metana Enim; i. PT Bukit Asam Metana Ombilin; 9. anak dan afiliasi perusahaan serta badan hukum terafiliasi yang dibentuk, didirikan, atau berasal dari aksi korporasi yang kemudian ditetapkan di bawah pembinaannya. Dengan ketentuan tugas dan wewenang sebagaimana angka 1 sampai 9 di atas, tetap memperhatikan hak dan kewenangan, serta tugas Direktur Utama yang diatur dalam Keputusan ini. 1. Plan, coordinate, direct, supervise, and evaluate operational tasks in the field of business development (project management office which includes mining development, logistics and infrastructure development, energy development, and downstream development) and commercial (marketing and distribution) as well as other tasks and functions determined by the Board of Directors in the future. 2. Direct and determine strategies and policies for the field of tasks that are his responsibility by taking into account the vision, mission, strategy, and policies of the Company that have been determined. 3. Prepare and determine work plans, strategic development plans and human resource management in the team that coordinates, directs, supervises, and evaluates operational tasks in the field of business development (project management office which includes mining development, logistics and infrastructure development, energy development, and downstream development) and commercial (marketing and distribution) as well as other tasks and functions determined by the Board of Directors in the future. 4. Ensure the availability of all information related to his work unit when needed by the Company's organs including the Series A Dwiwarna Shareholder/his attorney. 5. Leading personnel in his/her work unit in accordance with the provisions of applicable guidelines. 6. Carrying out the function as a risk management organ as stipulated in the regulations stipulated by the Ministry of SOEs or PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the proxy of the Series A Dwiwarna Shareholder/parent company. 7. Signing all documents, including agreements, agreements, policies and/or guidelines required in order to carry out the above tasks. 8. Carrying out duties to provide guidance to subsidiaries and affiliated companies and affiliated legal entities of the company as follows: a. PT Bukit Asam Prima; b. PT Bukit Prima Bahari; c. PT Pelabuhan Bukit Prima; d. PT Penajam International Terminal; e. PT Huadian Bukit Asam Power; f. PT Bukit Asam Banko; g. PT Bukit Asam TransPacific Railways; h. PT Bukit Asam Metana Enim; i. PT Bukit Asam Metana Ombilin; 9. subsidiaries and affiliates of the company and affiliated legal entities formed, established, or derived from corporate actions that are then determined under its guidance. With the provisions of the duties and authorities as in numbers 1 to 9 above, still paying attention to the rights and authorities, as well as the duties of the President Director as regulated in this Decree.

Keputusan Direksi yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasa, dan RUPS

Direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/ Kuasanya, atau RUPS, untuk perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-581/MBU/09/2018 tanggal 6 September 2018 perihal Persetujuan Usulan Batasan dan/atau Kriteria Kewenangan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk ("*Threshold*"), dan Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) No. SKK-19/MBU/03/2023 terkait kuasa pelaksanaan hak seri A Dwiwarna pada PT Bukit Asam Tbk beserta dengan perubahan-perubahannya yang meliputi pada aspek dan tingkat persetujuan sebagai berikut:

1. Level Persetujuan Berdasarkan *Threshold* Perseroan (RUPS, Dewan Komisaris & Seri A Dwiwarna, Dewan Komisaris, dan Direksi)

Board of Directors' Decisions Requiring Approval from the Board of Commissioners, Series A Dwiwarna Shareholders/Proxies, and the GMS

The Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners, Series A Dwiwarna Shareholders/ Proxies, or the GMS, for actions classified in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Letter from the Minister of State-Owned Enterprises No. S-581/ MBU/09/2018 dated September 6, 2018, regarding Approval of Proposed Limits and/or Criteria for the Authority of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk ("Threshold"), and Special Power of Attorney from the Minister of State-Owned Enterprises to PT Mineral Industri Indonesia (Persero) No. SKK-19/MBU/03/2023 regarding the power to implement Dwiwarna series A rights at PT Bukit Asam Tbk along with changes including the following aspects and levels of approval:

1. Approval Level Based on Company Threshold (GMS, Board of Commissioners & Series A Dwiwarna, Board of Commissioners, and Directors)

No	Tindakan Action	RUPS GMS	Dewan Komisaris & Seri A/ Kuasanya Board of Commissioner & Serie A/Proxies	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
1	Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perusahaan, kecuali yang dicatat sebagai persediaan Releasing/transferring and/or pledging Company assets, except those recorded as inventory	>50% total kekayaan bersih Perseroan audited terakhir >50% of the Company's total net assets from the last audit	≥100 Miliar* ≥100 Billion*	≥75 Miliar* ≥75 Billion*	<75 Miliar* <75 Billion*
2	Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk KSO, KSU, kerjasama lisensi, BGS, BSG, BGM, dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama Establish cooperation with business entities or other parties, in the form of KSO, KSU, licensing cooperation, BGS, BSG, BGM, and other agreements of the same nature		≥100 Miliar atau jangka waktu >10 tahun-20 tahun ≥100 Billion or in term >10 years-20 years	≥75 Miliar atau jangka waktu >5 tahun-10 tahun ≥75 Billion or in term>5 years-10 years	≥75 Miliar atau jangka waktu <5 tahun ≥75 Billion or in term of <5 years
3	Melakukan penyertaan, melepaskan penyertaan, serta perubahan struktur permodalan pada perusahaan lain Make an investment, release an investment, and changes in capital structure in other companies		≥75 Miliar ≥75 Billion	≥50 Miliar ≥50 Billion	<50 Miliar <50 Billion
4	Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan Establishing subsidiaries and/or joint ventures		≥75 Miliar ≥75 Billion	≥50 Miliar ≥50 Billion	<50 Miliar <50 Billion

No	Tindakan Action	RUPS GMS	Dewan Komisaris & Seri A/ Kuasanya Board of Commissioner & Serie A/Proxies	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
5	Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran Anak Perusahaan dan Joint Venture, termasuk penyertaan modal pada perusahaan lain melalui Anak Perusahaan Conducting mergers, consolidations, takeovers, separations, dissolution of Subsidiaries and Joint Ventures, including capital participation in other companies through Subsidiaries		≥75 Miliar ≥75 Billion	≥50 Miliar ≥50 Billion	<50 Miliar <50 Billion
6	Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg/avalist) Binding the Company as guarantor (borg/avalist)		≥300 Miliar ≥300 Billion	≥150 Miliar ≥150 Billion	<150 Miliar <150 Billion
7	Menerima pinjaman jangka panjang/menengah dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang bersifat Operasional Receive long/medium term loans and give operational medium/long term loans		≥1 Triliun ≥1 Trillion	≥750 Miliar ≥750 Billion	<750 Miliar <750 Billion
8	Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/ panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada Anak Perusahaan Give non-operational short/medium/ long term loans, except for loans to Subsidiaries		≥300 Miliar ≥300 Billion	≥150 Miliar ≥150 Billion	<150 Miliar <150 Billion
9	Menghapuskan piutang macet dan persediaan barang mati Erase bad debts and dead inventory		≥100 Miliar ≥100 Billion	≥75 Miliar ≥75 Billion	<75 Miliar <75 Billion
10	Mengusulkan wakil Perusahaan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Propose Company representatives to become candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners in Subsidiaries who make significant contributions to the Company and/ or have strategic value as determined by the Board of Commissioners.		Dirut dan Komut untuk seluruh Anak Perusahaan President Director and President Commissioner for all Subsidiaries		
			Seluruh Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan yang total Asetnya ≥50% dari aset induk dan/atau *revenue* anak ≥50% dari *revenue* induk (berdasarkan auditterakhir) All Directors and Commissioners of Subsidiaries whose total assets are ≥50% of all Directors and Commissioners of Subsidiaries whose total assets are ≥50% of parent assets and/or subsidiary revenue ≥50% of parent revenue (based on the last audit)	Seluruh Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan (Kecuali Direktur Utama dan Komisaris Utama) yang total Asetnya <50% dari aset induk dan/atau *revenue* anak <50% dari *revenue* induk (berdasarkan audit terakhir) All Directors and Commissioners of Subsidiaries (Except the President Director and President Commissioner) whose total assets are <50% of the parent's assets and/ or subsidiary revenue <50% of the parent's revenue (based on the last audit)	

*nilai yang tertera hanya berlaku jika nilai tersebut <50% kekayaan bersih perusahaan (Pasal 102 ayat (1) UU 40/2007).
*the value stated is only valid if the value is <50% of the company's net assets (Article 102 paragraph (1) Law 40/2007)

2. Level Persetujuan di Luar *Threshold*
   a. Tindakan-tindakan ini, merupakan tindakan Direksi Perusahaan yang tidak diatur dalam *Threshold*, namun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, SKK MIND, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk di bidang pasar modal), perlu mendapatkan persetujuan korporasi.
   b. Tindakan-tindakan sebagaimana huruf b.1) di atas di antaranya:
      - Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan;
      - Pengangkatan pemberhentian kepala/VP Satuan Pengawasan Intern (Internal Audit) yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan;
      - Persetujuan penetapan dan/atau perubahan *Charter* SPI;
      - Perubahan logo Perusahaan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan;
      - Penetapan/perubahan struktur organisasi satu tingkat di bawah Direksi Perusahaan, yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/ Kuasanya;
      - Persetujuan dan termasuk perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/ Kuasanya;
      - Persetujuan dan termasuk perubahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/ Kuasanya;
      - Persetujuan perubahan anggaran dasar Perusahaan di mana sebelum persetujuan RUPS perlu mendapatkan persetujuan pemegang saham seri A Dwiwarna/ kuasanya (apabila usulan berasal dari Direksi Perusahaan);
      - Persetujuan perubahan struktur kepemilikan saham pada Perusahaan yang perlu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham seri A Dwiwarna;
      - Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran serta pengambilalihan Perusahaan oleh perusahaan lain, di mana sebelum ditetapkan oleh RUPS wajib mendapatkan persetujuan pemegang saham seri A Dwiwarna;
      - Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam Perusahaan, yang mana berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan wajib

2. Approval Level Beyond Treshold
   a. These are actions of the Company's Board of Directors which are not regulated in the Threshold, but based on the provisions of the Company's Articles of Association, SKK MIND, and the provisions of applicable laws and regulations (including in the capital markets sector), that require corporate approval.
   b. Actions as stated in letter b.1) include:
      - Appointment and dismissal of the Corporate Secretary which requires approval from the Company's Board of Commissioners;
      - Appointment and dismissal of the head/VP of the Internal Audit Unit which requires approval from the Company's Board of Commissioners;
      - Approval of the determination and/or changes to the Internal Audit Charter;
      - Changes to the Company's logo that require approval from the Company's Board of Commissioners;
      - Determination/change to the organizational structure one level below the Company's Board of Directors, which requires approval from the Board of Commissioners and Series A Dwiwarna Shareholders/Proxies;
      - Approval and including changes to the Company's Work Plan and Budget which require approval from the Board of Commissioners and Series A Dwiwarna Shareholders/Proxies;
      - Approval and including changes to the Company's Long-Term Plan which require approval from the Board of Commissioners and Series A Dwiwarna Shareholders/Proxies;
      - Approval of changes to the Company's articles of association where prior to approval of the GMS it is necessary to obtain approval from the Dwiwarna series A shareholders/their proxies (if the proposal comes from the Company's Directors);
      - Approval of changes to the share ownership structure of the Company which requires approval from Dwiwarna series A shareholders;
      - Approval regarding the merger, consolidation, separation, dissolution, and takeover of the Company by another company, which before being determined by the GMS must obtain approval from the Dwiwarna series A shareholders;
      - Actions that have not been determined within the Company, which based on the provisions of the Company's Articles of Association are

mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan pemegang saham seri A/kuasanya;

- Tindakan untuk melepaskan hak atas izin usaha pertambangan operasi produksi atau hak atas izin usaha pertambangan dalam bentuk lain yang sah yang sudah memasuki tahap operasi produksi, yang di mana berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan pemegang saham seri A/kuasanya;

- Tindakan-tindakan transaksi yang bersifat material dengan mengacu level persetujuan sebagaimana a.1 s.d. a.9 di atas, kecuali berdasarkan peraturan di bidang pasar modal pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan (seperti pemegang saham utama/pengendali) tidak diperkenankan untuk memberikan persetujuan korporasi;
- Tindakan Direksi yang merupakan transaksi afiliasi di bidang pasar modal yang membutuhkan persetujuan Organ UUPT, dengan ketentuan setiap pihak-pihak yang memiliki potensi benturan kepentingan tidak diperkenankan untuk memberikan persetujuan dan/atau pengesahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Tindakan Direksi yang merupakan transaksi benturan kepentingan, yang berdasarkan ketentuan peraturan di bidang pasar modal, diisyaratkan mendapatkan persetujuan korporasi seperti dari pemegang saham independen atau pihak lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan;

- Tindakan Direksi yang masuk klasifikasi gabungan beberapa/semua transaksi material, transaksi afiliasi, dan/atau transaksi benturan kepentingan di bidang pasar modal yang diisyaratkan oleh peraturan di bidang pasar modal mendapatkan persetujuan korporasi;

- Tindakan Direksi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku wajib mendapatkan persetujuan organ Perusahaan.

Kebijakan Rangkap Jabatan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

required to obtain approval from the Board of Commissioners and series A shareholders/their proxies;
- Actions to release the right to a mining business permit for production operations or the right to a mining business permit in other legal forms that has entered the production operation stage, which based on the provisions of the Articles of Association requires approval from the Board of Commissioners and series A shareholders/their proxies;

- Material transaction actions refer to the level of approval as a.1 to a.9 points above, except that based on regulations in the capital market sector, parties who have a conflict of interest (such as the main/controlling shareholder) are not allowed to give corporate approval;

- Actions of the Board of Directors which constitute affiliated transactions in the capital markets sector which require approval from the Company Law (UUPT) Organs, provided that any parties who have a potential conflict of interest are not allowed to provide approval and/or ratification in accordance with the applicable provisions in the capital markets sector;
- Actions by the Board of Directors which constitute transactions which constitute a conflict of interest transaction, which, based on the provisions of regulations in the capital market sector, are required to obtain corporate approval such as from independent shareholders or other parties as required by the regulations;
- Directors' actions that are classified as a combination of several/all material transactions, affiliated transactions, and/or conflict of interest transactions in the capital markets sector as required by regulations in the capital markets sector obtain corporate approval;
- Directors' actions based on the provisions of other applicable laws and regulations must obtain approval from the Company's organs.

Concurrent Position Policy

Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;

2. Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Surat Edaran MIND ID No. SE-002/DIR/2020 tentang Petunjuk Pengusulan Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan di Lingkungan MIND ID;
4. Surat Wakil Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (Persero) No. 033/E.WADIRUT/IV/2023 tanggal 17 April 2023 Perihal Penyampaian Arahan Terkait Keberlakuan Peraturan Menteri BUMN PER-3/MBU/03/2023;

5. Pedoman Kerja Direksi.

Kebijakan rangkap jabatan Direksi Perusahaan, salah satunya mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan peraturan tersebut, anggota Direksi Perusahaan (sepanjang tidak diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perusahaan), dapat merangkap jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lainnya;
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lainnya;

3. Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik di mana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

Namun demikian, selain mengacu pada Peraturan OJK di atas, ketentuan rangkap jabatan Direksi Perusahaan juga didasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (28) Anggaran Dasar Perusahaan dan Pedoman Kerja Direksi, dimana seorang anggota Direksi Perusahaan dilarang untuk merangkap jabatan sebagai berikut:

1. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini:
    a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
    b. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
    c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
    d. Pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;

    e. Menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
    f. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau

2. Company Articles of Association;
3. MIND ID Circular Letter No. SE-002/DIR/2020 concerning Guidelines for Proposing Candidates for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Companies within MIND ID;
4. Letter of the Deputy President Director of PT Mineral Industri Indonesia (Persero) No. 033/E.WADIRUT/IV/2023 dated April 17, 2023, Concerning Submission of Directions Regarding the Applicability of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises PER-3/MBU/03/2023;
5. Board of Directors Work Guidelines

The Company's Board of Directors' concurrent position policy, one of which refers to Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, based on the regulation, members of the Company's Board of Directors (as long as it is not further regulated in the Company's Articles of Association), may hold dual positions with the following provisions:

1. Members of the Board of Directors at a maximum of 1 (one) issuer or other public company;
2. Members of the Board of Commissioners at a maximum of 3 (three) issuers or other public companies;
3. Members of the Committee at a maximum of 5 (five) committees in the issuer or public company where the person concerned serves as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners.

However, in addition to referring to the OJK Regulation above, the provisions on dual positions of the Company's Board of Directors are also based on the provisions of Article 11 paragraph (28) of the Company's Articles of Association and the Board of Directors' Work Guidelines, where a member of the Company's Board of Directors is prohibited from holding the following dual positions:

1. Members of the Board of Directors are prohibited from holding multiple positions as stated below:
    a. Member of the Board of Directors of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, Private-Owned Enterprises;
    b. Members of the Board of Commissioners and/or Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
    c. Other structural and functional positions in central and regional government agencies/institutions;
    d. Political party administrators, members of the DPR, DPD, provincial DPRD, and district/city DPRD and/or regional heads/deputy regional heads;
    e. Become a candidate/member of the DPR, DPD, provincial DPRD, and district/city DPRD or a candidate for regional head/deputy regional head;
    f. Other positions that may rise a conflict of interest; and/ or

g. Jabatan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap jabatan.

2. Rangkap jabatan di luar butir a di atas perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, dan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada huruf b, Anggota Direksi Perusahaan dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris pada badan usaha lain, kecuali:

   a. Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/ perusahaan terafiliasi Perusahaan, selain sebagai Komisaris Utama; dan
   b. Dewan Komisaris pada badan usaha lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan Perusahaan sepanjang memperoleh izin dari Menteri Badan Usaha Milik Negara.

g. Other positions in accordance with statutory provisions are prohibited from being held concurrently.

2. Multiple positions outside of point a above require approval from the Board of Commissioners, and can be carried out as long as they do not conflict with the Articles of Association and applicable laws.

3. Apart from holding concurrent positions as referred to in letter b, members of the Company's Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as Members of the Board of Commissioners in other business entities, except:
   a. Board of Commissioners in Subsidiaries/affiliated companies of the Company, other than as President Commissioner; and
   b. Board of Commissioners in other business entities to represent/fight for the Company's interests as long as they obtain permission from the Minister of State-Owned Enterprises.

Berikut merupakan transparansi rangkap jabatan anggota Direksi Perusahaan per 31 Desember 2023.

Below is transparency of the concurrent positions of members of the Company's Board of Directors as of December 31, 2024.

Nama Name	PT Bukit Asam Tbk Perusahaan /Intansi Lain Other Company/Institution		
	Jabatan Position	Perusahaan/ Badan Hukum Company/Insitution	Jabatan Position
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	Yayasan Bukit Asam Bukit Asam Foundation	Ketua Pembina Chairman of Advisory Board
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Development Director	Tidak ada None	Tidak ada None
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operations and Production Director	Yayasan Bukit Asam Bukit Asam Foundation	Pembina Advisor
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Management Director	Tidak ada None	Tidak ada None
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	Yayasan Bukit Asam Bukit Asam Foundation	Ketua Pengawas Chairman of Supervisors
		PT Internasional Coal	Komisaris Commissioner

Per tanggal 31 Desember 2024, seluruh anggota Direksi PT Bukit Asam Tbk tidak memiliki rangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan terbuka, perusahaan tercatat, dan/atau emiten lainnya.

As of December 31, 2024, all members of the Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk did not hold concurrent positions either as members of the Board of Directors or Board of Commissioners in public companies, listed companies, and/or other issuers.

Kepemilikan Saham Direksi

Informasi kepemilikan saham Direksi pada PT Bukit Asam Tbk dapat dilihat di bagian Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

The Board of Directors'

Shares Ownership Information on the share ownership of the Board of Directors at PT Bukit Asam Tbk can be seen in the Company Share Ownership section by the Board of Commissioners and Board of Directors in the Company Profile Chapter in this Annual Report book.

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi diselenggarakan oleh Direksi, dan segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi, baik yang dilakukan secara fisik maupun sirkuler dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan dan keputusan yang diambil demikian memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Hal-Hal yang Memerlukan Pengambilan Keputusan Melalui Rapat Direksi

Direksi menetapkan hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan melalui rapat Direksi sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan wewenang sesuai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, yaitu:
   a. Kewenangan yang memerlukan persetujuan Direksi;
   b. Kewenangan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
   c. Kewenangan yang memerlukan tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan persetujuan Pemegang Saham Seri A atau Kuasanya;.
   d. Kewenangan yang memerlukan persetujuan RUPS.
2. Tindakan terkait pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

3. Tindakan strategis lainnya, dengan batasan:
   a. Bersifat strategis/signifikan mempengaruhi operasional Perusahaan;
   b. Di luar rencana dalam RKAP;
   c. Bersifat mendesak, atau;
   d. Menyangkut pegawai dalam jabatan strategis.

Jadwal Rapat

1. Rapat Direksi diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila:
   a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi;
   b. Atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris.

Meeting Policy

Board of Directors meetings are held by the Board of Directors, and all Board of Directors decisions are taken at Board of Directors meetings, both physically and circularly, as long as all members of the Board of Directors have been notified in writing and all members of the Board of Directors have given their approval regarding the proposals submitted. Therefore, all decisions taken have the same force with decisions legally taken at the Board of Directors meeting.

Matters that Require Decision Making in Board of Directors Meetings

The Board of Directors determines matters that require decision making process through Board of Directors meetings as follows:

1. Actions related to the implementation of authority in accordance with the provisions of the Articles of Association, namely:
   a. Authority that requires approval from the Board of Directors;
   b. Authority that requires approval from the Board of Commissioners;
   c. Authority that requires a written response from the Board of Commissioners and approval from Series A Shareholders/Proxies;
   d. Authority that requires GMS approval.

2. Actions related to the procurement of goods and services in accordance with the provisions applicable to the Company.
3. Other strategic actions, with limitations:
   a. Strategically/significantly affecting the Company's operations;
   b. Outside the plan in the WP&B;
   c. Urgent, or;
   d. Concerning employees in strategic positions.

Meeting Schedule

1. Board of Directors meetings are held at least once every 1 (one) month.
2. The Board of Directors is obliged to hold regular meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners at least once every 4 (four) months.
3. Board of Directors meetings can be held at any time if:
   a. Deemed necessary by one or more members of the Board of Directors;
   b. Upon written request from the Board of Commissioners.

Agenda Rapat

1. Proses Penetapan Agenda Rapat
   Agenda rapat Direksi ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
   a. Setiap anggota Direksi berhak mengajukan usulan agenda rapat;
   b. Usulan agenda rapat dapat diajukan selain oleh Direksi, namun tetap harus mendapatkan persetujuan dari Direktur terkait;
   c. Usulan agenda rapat dikumpulkan oleh Sekretaris Perusahaan untuk diverifikasi kecukupan syarat-syaratnya untuk diajukan sebagai agenda rapat;
   d. Anggota Direksi, yang usulan agendanya ditetapkan sebagai agenda rapat harus mempersiapkan materi yang memadai sesuai agenda yang diusulkannya.

2. Agenda Rapat Susulan
   Dalam hal terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan segera berlangsung, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Usulan agenda rapat tersebut harus dilengkapi dengan materi yang memadai;
   b. Agenda rapat susulan harus disetujui oleh seluruh anggota Direksi, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat. Untuk itu, anggota Direksi yang tidak hadir harus dihubungi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas agenda susulan tersebut;

   c. Apabila anggota Direksi yang tidak hadir tidak dapat dihubungi dalam waktu yang wajar, maka persetujuan agenda susulan tersebut diserahkan pada keputusan peserta rapat.
3. Kuorum Rapat
   Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah. Ketentuan mengenai pemberian kuasa tertulis dalam rapat diatur sebagai berikut:

   a. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa.

   b. Seorang Direktur hanya dapat mewakili kehadiran seorang Direktur lainnya.
   c. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin rapat Direksi tersebut, mengenai apakah akan mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan

Meeting Agenda

1. Meeting Agenda Determination Process
   The Board of Directors' meeting agenda is determined based on the following provisions:
   a. Each member of the Board of Directors has the right to submit a proposal for the meeting agenda;
   b. Proposed meeting agendas can be submitted by other than the Board of Directors, but must be approved from the relevant Director;
   c. The proposed meeting agenda is collected by the Corporate Secretary to verify the adequacy of the requirements to be submitted as a meeting agenda;
   d. Members of the Board of Directors, whose proposed agenda is set as the meeting agenda, must prepare adequate material according to their proposed agenda.
2. Additional Meeting Agenda
   Additional meeting agenda prior to the meeting date must comply these following provisions:

   a. The proposed meeting agenda must be accompanied by adequate materials;
   b. The agenda for the follow-up meeting must be approved by all members of the Board of Directors, both those present at the meeting and those not present at the meeting. For this reason, members of the Board of Directors who are absent must be contacted to obtain approval or rejection of the follow-up agenda;
   c. If a member of the Board of Directors who is absent cannot be contacted within a reasonable time, then approval of the follow-up agenda is left to the decision of the meeting participants.
3. Meeting Quorum
   A Board of Directors meeting is valid and has the right to make binding decisions if it is attended by more than ½ (half) of the number of members of the Board of Directors or their authorized representatives. Provisions regarding the granting of written power of attorney at meetings are regulated as follows:
   a. A member of the Board of Directors may be represented at a Board of Directors meeting only by another member of the Board of Directors based on a power of attorney.
   b. A Director can only represent the presence of another Director.
   c. Members of the Board of Directors who are unable to attend the Board of Directors meeting can submit their opinion in writing and sign it and then submit it to the President Director or Deputy President Director or to other members of the Board of Directors who will chair the Board of Directors meeting, regarding whether they will support or not support the matters to be discussed

dibicarakan dan pendapat tersebut akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Direksi.

d. Kehadiran dalam rapat Direksi yang dilakukan melalui sarana elektronik.

Anggota Direksi dapat turut serta dalam rapat Direksi yang diadakan melalui melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat dan keturutsertaan tersebut menyatakan kehadiran yang bersangkutan dalam rapat Direksi tersebut.

Ketentuan Pemanggilan Rapat

Sesuai dengan Pedoman Kerja Direksi, ketentuan pemanggilan Rapat Direksi sebagai berikut:

1. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.
2. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faximili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. Pada saat pemanggilan bahan-bahan untuk rapat Direksi wajib sudah tersedia.
3. Pemanggilan seperti di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat Direksi sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.
4. Pemanggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain di wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.
5. Panggilan rapat dan penyelenggaraan rapat Direksi dapat didelegasikan kepada Sekretaris Perusahaan, kecuali diatur lain oleh Rapat Direksi.
6. Panggilan Rapat Direksi dapat dilakukan melalui sarana elektronik (SMS, *email, handphone, smartphone,* dan sarana elektronik lainnya) agar pemberitahuan mengenai agenda rapat dapat lebih cepat disampaikan, tanpa mengenyampingkan ketentuan Anggaran Dasar mengenai tata cara panggilan rapat secara tertulis.

and their opinions. These will be considered valid votes cast at the Board of Directors meeting.

d. Attendance at Board of Directors meetings conducted via electronic means.

Members of the Board of Directors can participate in Board of Directors meetings held via teleconference, video conference, or other electronic means that enable all Directors meeting participants to see and hear each other directly as well as participate in the meeting and participation indicates the person's presence at the Board of Directors meeting.

Provisions on Summons of Meetings

In accordance with the Board of Directors Work Guidelines, the provisions for summoning Board of Directors Meetings are as follows:

1. Summons of Board of Directors meetings are made by members of the Board of Directors who are entitled to represent the Board of Directors.
2. Summons of Board of Directors meetings are made in writing and delivered or handed over directly to each member of the Board of Directors with adequate receipt, or by registered mail or by courier service or by telex, facsimile or electronic mail (e-mail) no later than 5 (five) working days before the meeting is held, without taking into account the date of the summons and the date of the meeting, or in a shorter time if in urgent circumstances. At the time of the summons, materials for the Board of Directors meeting must be available.
3. Summons as above are not required for meetings that have been scheduled based on the decision of the previous Board of Directors meeting or if all members of the Board of Directors are present at the meeting.
4. Summons of meetings must include the agenda, date, time, and place of the meeting. Board of Directors meetings may be held at the Company's domicile or another place in the territory of the Republic of Indonesia or at the Company's place of business activities.
5. Meeting invitations and the organization of Board of Directors meetings may be delegated to the Corporate Secretary, unless otherwise regulated by the Board of Directors Meeting.
6. Meeting invitations of the Board of Directors may be made via electronic means (SMS, email, mobile phone, smartphone, and other electronic means) so notification regarding the meeting agenda can be delivered more quickly, without disregarding the provisions of the Articles of Association regarding the procedure for written meeting invitations.

Risalah Rapat

Setiap rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/ *dissenting opinion* anggota Direksi jika ada), dan hal-hal yang diputuskan. Satu salinan risalah rapat agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui.

Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi. Risalah rapat harus dibuat kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Setiap anggota Direksi berhak mendapatkan salinan risalah rapat, terlepas apakah Anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat tersebut. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, kepada yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

Minutes of Meetings

Each Board of Directors meeting must be written in the minutes of the meeting signed by the chairman of the Board of Directors meeting and all members of the Board of Directors present, containing the matters discussed (including statements of disapproval/dissenting opinions of members of the Board of Directors if any) and matters decided. A copy of the minutes of the meeting must be submitted to the Board of Commissioners.

Minutes of meetings are prepared and administered by the Corporate Secretary or other official appointed by the Board of Directors. Minutes of the meeting must be prepared and then signed by all members of the Board of Directors present and submitted to all members of the Board of Directors. Every member of the Board of Directors has the right to receive a copy of the minutes of the meeting, regardless of whether the member of the Board of Directors concerned was present or not at the meeting. If there is a member of the Board of Directors who does not sign the results of the meeting, the person concerned is obliged to state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.

Pelaksanaan Rapat Direksi Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Direksi telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 32 kali dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sebanyak 12 kali, dengan agenda sebagai berikut:

The 2024 Board of Directors Meeting

Throughout 2024, the Board of Directors has held 32 internal meetings and joint meetings with the Board of Commissioners12 times, with the following agenda:

Tabel Agenda Rapat Internal Direksi
Tabel of Board of Directors Internal Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
1	10 Januari 2024 January 10, 2024	1. Project SETRUM 2. Sewa Aset 10 Tahun 3. Program Pendanaan UMK PTBA 1. SETRUM Project 2. 10-Year Asset Lease 3. PTBA UMK Funding Program	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
2	18 Januari 2024 January 18, 2024	Pembahasan Draft KPI 2024 Discussion on 2024 KPI Draft	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
3	22 Januari 2024 January 22, 2024	1. *Update Financial Model Project* TLS 6-7 2. Pembahasan Draft KPI 2024 1. Financial Model Update Project TLS 6-7 2. Discussion on 2024 KPI Draft	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
4	25 Januari 2024 January 25, 2024	1. Tuntutan Hukum LSM Lestari Lahat 2. Lawsuit by Lestari Lahat NGO	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra

Tabel Agenda Rapat Internal Direksi
Tabel of Board of Directors Internal Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
5	16 Februari 2024 February 16, 2024	1. Restrukturisasi Organisasi 2. Proyek Pelabuhan Ratu 3. ICBT 1. Organizational Restructuring 2. Pelabuhan Ratu Project 3. ICBT	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
6	26 Februari 2024 February 26, 2024	1. Rencana Kerja Sama Pendayagunaan Aset Skema BGS 2. Penugasan Peserta *Management Trainee* ke KBUMN 1. BGS Scheme Asset Utilization Cooperation Plan 2. Assignment of Management Trainee Participants to KBUMN	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
7	28 Februari 2024 February 28, 2024	Rencana Penjualan HCV HCV Sales Plan	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
8	14 Maret 2024 March 14, 2024	1. Pengalihan Saham Treasuri Tahap V 2. Rencana Pengadaan CHF TLS 6-7 1. Transfer of Treasury Shares Phase V 2. Procurement Plan CHF TLS 6-7	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
9	27 Maret 2024 March 27, 2024	1. *Trial Shipment* FOB MV 2. Kompensasi Ganti Rugi PT EPM 1. Trial Shipment FOB MV 2. Compensation for Losses PT EPM	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
10	4 April 2024 April 4, 2024	1. BOD *Executive Remuneration & LTI Design* 2. Perubahan Manfaat Pensiun DPBA 3. Laporan Annual report Sustainability Report dan TJSL 1. BOD Executive Remuneration & LTI Design 2. Changes in DPBA Pension Benefits 3. Annual report Sustainability Report and TJSL	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
11	24 April 2024 April 24, 2024	1. BOD *Executive Remuneration* 2024 & Tantiem 2023 2. *Dividend Payout Ratio Simulation* 3. Rencana Perpanjangan PKWT Personel > 60 Tahun 4. Optimasi Tambang 2024 5. *Stress Test* Keuangan 1. BOD Executive Remuneration 2024 & Bonus 2023 2. Dividend Payout Ratio Simulation 3. Extension Plan for PKWT Personnel > 60 Years 4. Mining Optimization 2024 5. Financial Stress Test	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
12	2 Mei 2024 May 2, 2024	*Dividend Payout Ratio*	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
13	27 Mei 2024 May 27, 2024	Usulan *Trading* BAP BAP Trading Proposal	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
14	12 Juni 2024 June 12, 2024	1. Persetujuan Proyek SAP 2. Rencana Produksi & Jasa Penambangan Pit BTU 3. *Update Project* Setrum 1. SAP Project Approval 2. BTU Pit Mining Production & Services Plan 3. Setrum Project Update	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
15	21 Juni 2024 June 21, 2024	1. Pengisian BOD-1 (BOD only) 2. *Update* Tarif Team Kramasan 1. Filling BOD-1 (BOD only) 2. Update Kramasan Team Tariffs	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra

Tabel Agenda Rapat Internal Direksi
Tabel of Board of Directors Internal Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
16	1 Juli 2024 July 1, 2024	1. WBS (*Whistle Blower System*) 2. Persetujuan Nama Gedung 1. WBS (Whistle Blower System) 2. Approval of Building Name	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
17	2 Agustus 2024 August 2, 2024	1. Pembahasan Kualitas Penjualan Batu bara 2. Persetujuan Penjualan CV BA-42 3. *Update* Usulan Remunerasi Eksekutif 4. Persetujuan Lelang Aset Mobil LC 1. Discussion of Coal Sales Quality 2. Approval of Sales of CV BA-42 3. Update on Executive Remuneration Proposal 4. Approval of LC Car Asset Auction	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
18	14 Agustus 2024 August 14, 2024	PLTS Timah Industri	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
19	16 Agustus 2024 August 16, 2024	1. Remunerasi AAP 2. Rencana Produksi 2025 1. AAP Remuneration 2. 2025 Production Plan	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
20	17 Agustus 2024 August 17, 2024	*Update* Tim Perencanaan Pengeluaran Batu bara Melalui Pelabuhan Lain Coal Release Planning Team Update Through Other Ports	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
21	28 Agustus 2024 August 28, 2024	1. Persetujuan Pemanfaatan Dana DHE 2. Persetujuan Dokumen FID Proyek TE baru – Keramasan 1. Approval of DHE Fund Utilization 2. Approval of FID Document for New TE Project – Keramasan	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
22	30 Agustus 2024 August 30, 2024	Persetujuan perbaikan BSC PT BSP BSC PT BSP improvement approval	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
23	9 September 2024 September 9, 2024	Kronologis dan Tindak Lanjut Kebakaran TLS 01 Chronology and Follow-up of TLS 01 Fire	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
24	12 September 2024 September 12, 2024	Persetujuan RKAP 2025 Approval of 2025 CWPB	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
25	7 Oktober 2024 October 7, 2024	1. Penjualan Batu bara Peranap 2. Tindaklanjut *project* Coal to Anoda Sheet 3. Penyelesaian Piutang Bermasalah 1. Peranap Coal Sales 2. Follow-up on the Coal to Anoda Sheet project 3. Resolution of Problematic Receivables	4. Arsal Ismail 5. Farida Thamrin 6. Suhedi 7. Suherman 8. Rafli Yandra
26	14 Oktober 2024 October 14, 2024	Pembahasan RKAP 2025 CWPB 2025 Discussion	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
27	1 November 2024 November 1, 2024	1. Rencana Penyertaan Modal PT SMLI 2. Pengajuan Proposal Kerjasama JSC Jogmec 3. Renewal Kontrak FOB MV 1. PT SMLI Capital Participation Plan 2. Submission of JSC Jogmec Cooperation Proposal 3. FOB MV Contract Renewal	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman

Tabel Agenda Rapat Internal Direksi
Tabel of Board of Directors Internal Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
28	18 November 2024 November 18, 2024	1. Rencana Setoran Modal PT BMI (Investasi alat Berat PT SBS USTE) 2. Rencana Pengembangan Jalan Sambung PTBA - PT SLR 3. PT BMI Capital Deposit Plan (PT SBS USTE Heavy Equipment Investment) 4. PTBA - PT SLR Connecting Road Development Plan 3. PT BMI Capital Deposit Plan (PT SBS USTE Heavy Equipment Investment) 4. PTBA - PT SLR Connecting Road Development Plan	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
29	29 November 2024 November 29, 2024	RJPP Tahun 2025-2029 RJPP for 2025-2029	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
31	4 Desember 2024 December 4, 2024	Penyelarasan Sistem *Grading* PTBA Alignment of PTBA Grading System	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra
32	11 Desember 2024 December 11, 2024	1. Perpanjangan *Grace Period* PT BMI 2. *Cost Overrun* PLTU Sumsel 8 3. Persetujan Harga Jual Tahun 2025 4. Implementasi SAP 1. Extension of PT BMI Grace Period 2. Cost Overrun of PLTU Sumsel 8 3. Approval of Selling Price in 2025 4. Implementation of SAP	1. Arsal Ismail 2. Farida Thamrin 3. Suhedi 4. Suherman 5. Rafli Yandra

Tabel Kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Direksi
Board of Directors' Attendance on Internal Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Direksi Board of Directors' Internal Meeting		
		Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Presentase Kehadiran Attendance Rate
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	32	32	100%
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Development Director	32	32	100%
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operations and Production Director	32	32	100%
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Management Director	32	31	96%
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	32	32	100%

Rencana Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025

Dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Signifikan Badan Usaha Negara serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, diatur ketentuan mengenai pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi, yakni bahwa Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Meeting Plan for 2025

In the Company's Articles of Association and the Provisions of the Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Activities of State-Owned Enterprises and the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, provisions are regulated regarding the implementation of Board of Commissioners Meetings and Board of Directors Meetings, namely that Board of

dilaksanakan minimal sekali setiap 4 (empat) bulan, serta Rapat Direksi dilaksanakan minimal sekali setiap 1 (satu) bulan.

Untuk lebih meningkatkan koordinasi dan pengambilan keputusan yang lebih efektif, maka untuk tahun 2025, sesuai Program Kerja Dewan Komisaris, Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai pelaksanaan rapat. Rapat Dewan Komisaris tersebut direncanakan membahas antara lain Laporan Kinerja Perusahaan termasuk Anak dan Afiliasi, Pembahasan Proyek Strategis, Pembahasan KPI, dan Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA, serta hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Untuk Rapat Direksi di tahun 2025 direncanakan dilaksanakan minimal sekali setiap 1 (satu) bulan. Agenda rapat di antaranya membahas tentang laporan bulanan masing-masing Direktorat, hal hal berkaitan dengan kebijakan strategis Perusahaan, kinerja operasional, strategi perusahaan serta hal hal lain yang dianggap perlu sesuai tugas dan fungsi Direksi.

Untuk agenda baik Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Gabungan yang telah terjadwal sebagaimana di atas, maka bahan-bahan/materi terkait rapat wajib sudah tersedia paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat.

Program Pengenalan Perusahaan bagi Direksi Baru

Perusahaan menyelenggarakan kegiatan program pengenalan bagi Direksi yang baru diangkat untuk pertama kali. Kegiatan ini bersifat wajib sebagaimana tercantum dalam *Board Manual*, dan bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan pemahaman terkait Perusahaan kepada anggota Direksi yang baru diangkat. Penyelenggaraan program pengenalan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah RUPS memutuskan pengangkatan anggota Direksi yang baru. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit bisnis Perusahaan, dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan di mana program tersebut dilaksanakan. Apabila dibutuhkan, dapat pula dilakukan program pengenalan atas anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi. Adapun materi yang harus disampaikan pada program pengenalan mencakup:

Commissioners Meetings are held at least 1 (one) time in 1 (one) month, Board of Commissioners Meetings inviting the Board of Directors are held at least once every 4 (four) months, and Board of Directors Meetings are held at least once every 1 (one) month.

To further improve coordination and more effective decision-making, for 2025, in accordance with the Board of Commissioners Work Program, Internal Board of Commissioners Meetings and Board of Commissioners Meetings inviting the Board of Directors will be held in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association concerning the implementation of meetings. The Board of Commissioners Meeting is planned to discuss, among others, the Company's Performance Report including Subsidiaries and Affiliates, Strategic Project Discussion, KPI Discussion, and PTBA Monitoring and Evaluation Follow-up Discussion, as well as other matters deemed necessary in accordance with the duties and functions of the Board of Commissioners' supervision.

The Board of Directors Meeting in 2025 is planned to be held at least once every 1 (one) month. The meeting agenda includes discussing the monthly reports of each Directorate, matters relating to the Company's strategic policies, operational performance, corporate strategy and other matters deemed necessary in accordance with the duties and functions of the Board of Directors.

For the agenda of the Board of Directors Meeting, Board of Commissioners Meeting, and Joint Meeting scheduled as above, the materials/materials related to the meeting must be available no later than 5 (five) working days before the meeting date.

Company Induction Program for New Directors

The company conducts an induction program for newly appointed Directors. This activity is mandatory as stated in the Board Manual, and aims to introduce and provide understanding regarding the Company to newly appointed members of the Board of Directors. The introduction program is carried out no later than 90 (ninety) calendar days after the GMS decides on the appointment of new members of the Board of Directors. The Company's introduction program is carried out in the form of presentations, meetings, visits to the Company's business units, and review of documents or other programs. If necessary, an introduction program can also be carried out for subsidiaries and affiliated companies. The material that is mandatory to be presented in the introductory program includes:

1. Tata Kelola yang berlaku di PTBA sebagai anggota dari Grup MIND ID, termasuk mengenai pedoman dan/atau kebijakan yang melibatkan peran MIND ID selaku holding pertambangan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, Surat Kuasa Khusus (SKK) Kementerian BUMN, maupun kebijakan lain yang berlaku;
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) oleh Perusahaan;
3. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal, dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
5. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Pada tahun 2024, Perusahaan tidak menyelenggarakan Program Pengenalan bagi anggota Direksi, karena sepanjang tahun 2024 tidak terdapat pengangkatan anggota Direksi baru.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Kebijakan Guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi, maka Anggota Direksi harus secara teratur menerima program pelatihan, pengembangan pengetahuan, dan sertifikasi yang relevan, mandiri, dan berkelanjutan. Untuk memfasilitasi *update knowledge* tersebut, maka anggota Direksi perlu diberikan pelatihan, *workshop*, seminar, *conference* atau bentuk lainnya yang bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Direksi.

Seluruh daftar pelatihan dan materi pelatihan dan pengembangan kompetensi anggota Direksi didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan, dan wajib tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Program pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti oleh anggota Direksi sepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada Bab Profil.

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Sepanjang tahun 2024, Direksi Perusahaan telah melakukan tindakan atau membuat keputusan strategis utamanya terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Governance that applies to PTBA as a member of the MIND ID Group, including guidelines and/or policies involving MIND ID's role as a mining holding company, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Special Power of Attorney (SKK) of the Ministry of SOEs, and other policies applicable;
2. Implementation of the principles of good corporate governance by the Company;
3. An overview of the Company related to its objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
4. Information related to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
5. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors as well as permitted matters

In 2024, the Company did not conduct an Introduction Program for members of the Board of Directors, since there was no appointment of new members of the Board of Directors.

Competency Training and Development Policy

In order to support the effective implementation of the duties of the Board of Directors, members of the Board of Directors must regularly receive relevant, independent and sustainable training, knowledge development, and certification programs. To facilitate this update knowledge, they need to receive training, workshops, seminars, conferences, and other forms to increase their effectiveness in the Company.

The entire list of training and training materials and competency development for members of the Board of Directors are documented by the Corporate Secretary, and must be available at any time if needed.

Attended by members of the Board of Directors can be seen in the Profile Chapter.

Decisions and Implementation of Board of Directors' Duties

In 2024, PTBA Board of Directors has taken actions or made strategic decisions primarily related to the following matters:

1. Setoran modal kepada *Joint Venture Company* yakni PT Huadian Bukit Asam Power.
2. Pengalihan saham treasuri sebanyak 27.147.900 lembar saham.
3. Penutupan entitas anak perusahaan, yakni PT Bukit Asam Banko.
4. Pinjaman modal kerja kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
5. Pemanfaatan Dana Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sebagai fasilitas pembiayaan/kredit.
6. Peluncuran *Pilot Plant* (Pabrik Percontohan) *Wood Pellet* dari Kaliandra Merah.
7. Peluncuran Pilot Project *Coal to Artificial Graphite & Anoda Sheet*.

Komite di Bawah Direksi dan Penilaiannya

Dalam rangka mendukung kinerja Direksi PTBA, selain terdapat satuan kerja, Direksi PTBA pun membentuk beberapa komite, yakni:

1. Komite Lingkungan
   Komite lingkungan merupakan komite yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan PTBA. Komite lingkungan berada di lokasi kerja (i) Unit Pertambangan Tanjung Enim, (ii) Pelabuhan Tarahan, dan (iii) Dermaga Kertapati.

   Komite Lingkungan sendiri memiliki detail fungsi, yakni:
   a. Sistem manajemen lingkungan;
   b. Penilaian daur hidup dan dekarbonisasi;
   c. Efisiensi energi;
   d. Penurunan emisi;
   e. Efisiensi air dan penurunan beban air limbah;
   f. Pengurangan dan pemanfaatan limbah B3;
   g. Pengurangan dan pemanfaatan limbah non-B3;
   h. Perlindungan keanekaragaman hayati;
   i. Pembinaan masyarakat/inovasi sosial;
   j. Tanggap bencana;
   k. Kendali kerusakan lahan;
   l. Dokumen lingkungan dan dokumen SIMPEL.

   Evaluasi kinerja Komite Lingkungan yang dilakukan oleh Direksi PTBA, yakni dengan ketercapaian atas target penghargaan PROPER yang diterima oleh setiap unitnya.

2. Komite Investasi dan Lindung Nilai
   Komite ini memiliki tugas penting sebagai berikut:
   a. Melakukan analisis tingkat risiko dan pengembalian dari jenis-jenis investasi pada instrumen keuangan dan transaksi lindung nilai (*hedging*) atas nilai tukar valuta asing yang tersedia di pasar;

1. Capital deposit to Joint Venture Company, namely PT Huadian Bukit Asam Power.
2. Transfer of treasury shares of 27,147,900 shares.
3. Closing of subsidiary entity, namely PT Bukit Asam Banko.
4. Working capital loan to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
5. Utilization of Natural Resource Export Proceeds (DHE SDA) as a financing/credit facility.
6. Launch of Pilot Plant Wood Pellet from Red Kaliandra.
7. Launch of Pilot Project Coal to Artificial Graphite & Anoda Sheet.

Committees Under the Board of Directors and Their Assessment

In order to support the performance of the Bukit Asam Board of Directors, besides having work units, the Bukit Asam Board of Directors also formed several committees, namely:

1. Environmental Committee
   This committee is responsible for environmental management in the PTBA environment. Environmental committees are located at work locations (i) Tanjung Enim Mining Unit, (ii) Tarahan Port, and (iii) Kertapati Barging Port.

   The Environmental Committee itself has detailed functions, namely:
   a. Environmental management system
   b. Life cycle assessment (LCA) and decarbonization
   c. Energy efficiency
   d. Emissions reduction
   e. Water efficiency and reduced waste water load
   f. Reduction and utilization of B3 waste
   g. Reduction and utilization of non-B3 waste
   h. Protection of biodiversity
   i. Community development/social innovation
   j. Disaster response
   k. Control land damage
   l. Environmental documents and SIMPEL documents.

   Evaluation of the Environmental Committee's performance by the PTBA Board of Directors, namely by the achievement of the PROPER target. awards received by each unit.

2. Investment and Hedging Committee
   This committee has the following important duties:
   a. Analyze the level of risk and return of the types of investments in financial instruments and hedging transactions on foreign currency exchange rates available on the market;

b. Melakukan penilaian terhadap kelayakan dan reputasi institusi keuangan (*counterparty*) yang akan dijadikan mitra kerja;
c. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko mengenai:
   - Jenis-jenis investasi (portofolio) dan limit transaksi dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan pengembalian investasi pada instrumen keuangan dengan berpedoman pada kebijakan yang ada;
   - Usulan melakukan lindung nilai (*hedging*) berdasarkan analisis posisi valuta asing yang dimiliki perusahaan serta prediksi pergerakan nilai tukar/ *kurs*;
   - Pemilihan institusi keuangan (*counterparty*) untuk melakukan aktivitas transaksi investasi pada instrumen keuangan dan aktivitas lindung nilai atas nilai tukar valuta asing dengan berpedoman kepada kebijakan yang ada;
   - Setiap rekomendasi yang disampaikan kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko harus disertai dengan analisis yang lengkap mengenai tingkat risiko dan tingkat pengembalian/keuntungan, serta kelayakan dan reputasi institusi keuangan (*counterparty*) yang akan dijadikan mitra kerja.
d. Melakukan transaksi investasi pada instrumen keuangan dan lindung nilai atas nilai tukar valuta asing dengan institusi keuangan berdasarkan persetujuan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
e. Membukukan transaksi yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku; dan
f. Melaporkan secara berkala atau dalam keadaan terjadi perubahan parameter yang signifikan atas investasi yang telah dilakukan.

Evaluasi Komite dilakukan oleh Direktur pembina, dalam hal ini Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, utamanya atas keberhasilan dalam tugas-tugas komite.

3. *Talent Committee*
   Komite ini berperan dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk suksesi *talent* yang ada di PTBA. Adapun 3 (tiga) fungsi utama dari *Talent Committee*, yakni:
   a. Melakukan *review* dan pengelompokkan *talent* dalam kelas-kelas *talent* berdasarkan kriteria potensi dan kinerja *talent*, sesuai dengan jenjang jabatannya;
   b. Mengusulkan evaluasi dan rekomendasi program pengembangan *talent* terhadap *top talent* yang dinominasikan sebagai *successor* dalam *succession planning*;

b. Assess the suitability and reputation of the financial institution (counterparty) that will be partnered with;
c. Provide recommendations to the Director of Finance and Risk Management regarding:
   - Types of investment (portfolio) and transaction limits taking into account the level of risk and return on investment in financial instruments guided by existing policies;
   - Proposal to hedge based on analysis of the company's foreign exchange position and predictions of exchange rate movements;
   - Selection of financial institutions (counterparties) to carry out investment transaction activities in financial instruments and hedging activities on foreign exchange rates guided by existing policies;
   - Every recommendation submitted to the Director of Finance and Risk Management must be accompanied by a complete analysis regarding the level of risk and rate of return/ profit, as well as the suitability and reputation of the financial institution (counterparty) as a working partner.
d. Conduct investment transactions in financial instruments and hedge foreign exchange rates with f inancial institutions based on the approval of the Director of Finance and Risk Management;
e. Record transactions that have been carried out in accordance with applicable accounting principles; And
f. Report periodically or when significant changes occur in the parameters of investments that have been made.

Committee evaluation is carried out by the supervisory director, in this case the Director of Finance and Risk Management, primarily for the success in the committee's duties.

3. Talent Committee
   This committee plays a role to provide recommendations to the Board of Directors for the succession of talent at PTBA. There are 3 (three) main functions of the Talent Committee, namely:
   a. Review and group talent into talent classes based on talent potential and performance criteria, according to their position level;
   b. Propose evaluations and recommendations for talent development programs for top talents nominated as successors in succession planning;

c. Mengusulkan kepada Direksi PTBA daftar talent yang akan dinominasikan sebagai *selected talent*, daftar *talent* yang akan diangkat sebagai pengurus Anak/Afiliasi perusahaan dan daftar *talent* yang akan dipromosikan untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan penetapan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penilaian keberhasilan dari komite ini diukur dengan tersedianya talent PTBA sesuai dengan *succession* plan yang disusun.

4. Komite TJSL dan ESG
Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berdasarkan Keputusan Direksi PTBA No. 134A/0100/2023. Adapun tugas komite ini yaitu:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan, sasaran, *roadmap*, strategi, *action plan* terkait ESG;
b. Malakukan fungsi Komite TJSL BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023, antara lain namun tidak terbatas pada:
   - berkoordinasi dengan satuan kerja terkait/ lintas direktorat untuk menetapkan prioritas dan tujuan TJSL Perusahaan;
   - bersinergi dengan satuan kerja terkait/ lintas direktorat dalam implementasi TJSL perusahaan;
   - membantu Direksi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program TJSL Perusahaan;
   - Melaporkan pelaksanaan program TJSL Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Memastikan pemenuhan terhadap kriteria lembaga pemeringkat ESG, di antaranya *Morgan Stanley Capital International* (MSCI), *Sustainalytics*, dan *Carbon Disclosure Program* (CDP), *International Council on Mining & Metals* (ICMM), UN *Global Compact*, Task *Force on Climate-Related Financial Disclosure* (TCFD) meliputi:
   - Menyusun dokumen penilaian dan memastikan pemenuhan seluruh kriteria penilaian secara maksimal;
   - Memonitor pencapaian kinerja perusahaan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan serta melakukan pendampingan sesuai kriteria penilaian;
   - Melaporkan kinerja berkelanjutan sesuai ketentuan aspek berkelanjutan dalam laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan TJSL, dan laporan pemeringkat ESG, *website* perusahaan, dan laporan lain sesuai kebutuhan.

c. Propose to the Directors of PTBA a list of talents who will be nominated as selected talents, a list of talents who will be appointed as managers of the company's Subsidiaries/Affiliates and a list of talents who will be promoted to further obtain approval for the determination in accordance with applicable procedures. The success of this committee is measured by the availability of PTBA talent in accordance with the succession plan prepared.

4. CSR and ESG Committee
The Social and Environmental Responsibility (CSR) and Environmental, Social, and Governance (ESG) Committee based on the Decision of the Board of Directors of PTBA No. 134A/0100/2023. The tasks of this committee are as follows:
a. Develop and implement policies, targets, roadmaps, strategies, action plans related to ESG;
b. Perform the functions of the SOEs CSR Committee as regulated in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-1/MBU/03/2023, including but not limited to:
   - Coordinate with relevant work units/ crossdirectorates to establish priorities and goals for the Company's CSR;
   - Synergize with relevant work units/cross-directorates in the implementation of the Company's CSR;
   - Assist the Board of Directors in monitoring and evaluating the implementation of the Company's CSR programs;
   - Report on the implementation of the Company's CSR programs according to applicable regulations.
c. Ensure compliance with the criteria of ESG rating agencies, including Morgan Stanley Capital International (MSCI), Sustainalytics, and Carbon Disclosure Program (CDP), International Council on Mining & Metals (ICMM), UN Global Compact, Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) including:
   - Prepare assessment documents and ensure compliance with all assessment criteria to the maximum extent;
   - Monitor the achievement of company performance according to established deadlines and provide assistance according to assessment criteria;
   - Report sustainable performance in accordance with sustainable aspects in annual reports, sustainability reports, CSR reports, ESG rating reports, company websites, and other reports as needed.

d. Mendukung tercapainya pendanaan eksternal perusahaan berbasis keberlanjutan, antara lain namun tidak terbatas pada *sustainability financing, green financing*, dan lain-lain dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur internal perusahaan.

   Evaluasi Komite ini didasarkan pada pencapaian ESG yang dicapai oleh Perusahaan berdasarkan rating/penilaian yang diberikan oleh organisasi, lembaga, institusi nasional maupun internasional.

5. Komite Pengarah Strategi Teknologi Informasi dan Komite Pengarah Implementasi Teknologi Informasi

   Sesuai dengan kewajiban Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023, PTBA telah membentuk Komite Pengarah Strategi Teknologi Informasi dan Komite Pengarah Implementasi Teknologi Informasi sebagaimana tertuang pada Keputusan Direksi PTBA No. 007/0100/2024 yang merupakan pembaharuan dari Komite yang ditetapkan pada tahun 2021. Komite Pengarah Strategi Teknologi Informasi ini memiliki tujuan untuk memastikan rencana strategis teknologi informasi (TI) sesuai dengan kebutuhan bisnis dan digitaliasi PTBA dengan tetap mengacu pada perkembangan teknologi informasi baik domestik dan global. Sedangkan, untuk Komite Pengarah Implementasi TI memiliki tujuan untuk memastikan TI sesuai dengan rencana strategis TI yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan Tata Kelola yang berlaku, serta secara efektif dan efisien untuk memperoleh manfaat yang optimal. Penilaian komite ini didasarkan pada pencapaian atas kinerja/capaian TI sesuai dengan rencana strategis TI, sehingga dapat memberikan nilai tambah optimal bagi perusahaan. Untuk informasi lebih lanjut berkaitan dengan Teknologi Informasi, dapat dilihat pada Sub Bab Teknologi Informasi pada bab ini.

Selain komite-komite di atas, Direksi dibantu oleh organ pendukung, yaitu Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit (SPI). Kinerja Komite di bawah Direksi dinilai berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas, saran, dan rekomendasi yang diberikan oleh kedua organ tersebut. Direksi telah menilai bahwa Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tahun 2024 dengan baik.

Penilaian kinerja organ pendukung Direksi berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan dalam setiap satuan kerja yang merupakan *Key Performance Indicator* (KPI), termasuk untuk satuan kerja Sekretaris Perusahaan dan SPI. Penetapan KPI tersebut tertuang dalam *Balance Scorecard* yang dilakukan evaluasi secara berkala setiap tiga bulannya oleh audit internal Perusahaan.

d. Support the achievement of the company's external funding based on sustainability, including but not limited to sustainability financing, green financing, and others, while still considering applicable regulations and internal company procedures.

   Evaluation of this committee is based on the achievement of ESG attained by the Company according to ratings/ assessments provided by national and international organizations, institutions, and agencies.

5. Information Technology Steering Committee and Information Technology Implementation Steering Committee
   In accordance with the obligations of Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/03/2023, PTBA has established the Information Technology Steering Committee and Information Technology Implementation Steering Committee as stipulated in the Board of Directors' Decision of PTBA No. 007/0100/2024, which is a renewal of the Committee established in 2021. The Information Technology Steering Committee aims to ensure that the IT strategic plans align with the business needs and digitalization of PTBA while referring to both domestic and global IT developments. Meanwhile, the Information Technology Implementation Steering Committee aims to ensure that IT aligns with the established IT strategic plans and complies with applicable Governance provisions, effectively and efficiently obtaining optimal benefits. The assessment of these committees is based on the achievement of IT performance according to the IT strategic plans, thereby providing optimal added value to the company. For further information regarding Information Technology, please refer to the Information Technology subsection in this section.

In addition to the above committees, the Board of Directors is supported by supporting organs, namely the Corporate Secretary and Internal Audit. The performance of Committees under the Board of Directors is evaluated based on the realization of tasks, advice, and recommendations provided by both organs. The Board of Directors has assessed that the Corporate Secretary and Internal Audit have performed their duties and responsibilities well in 2024.

The performance assessment of supporting organs of the Board of Directors is based on the evaluation criteria established in each work unit, which are Key Performance Indicators (KPIs), including for the Corporate Secretary and Internal Audit Unit. The determination of KPIs is outlined in the Balance Scorecard, which undergoes quarterly periodic evaluation by the Company's internal audit.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Appraisal of the Board of Commissioners and the Board of Directors



Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Pelaksanaan Penilaian

Setiap tahunnya, Dewan Komisaris menetapkan Program Kerja tahunan Dewan Komisaris dan KPI sebagai sasaran capaian kinerja Dewan Komisaris. Capaian atas KPI menjadi objek penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama satu tahun. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil perbandingan realisasi dengan target dikalikan dengan bobot. Apabila realisasi tercapai di atas 100%, maka nilai/skor yang diberikan dapat melebihi bobot maksimal. Apabila realisasi KPI tercapai di bawah 100%, maka nilai akan diberikan secara proporsional terhadap bobot.

Berdasarkan jumlah skor, dapat ditentukan kriteria penilaian sebagai berikut:
1. Skor 100% ≥ x > 95%, kriteria Sangat Baik.
2. Skor 95% ≥ x > 80%, kriteria Baik.
3. Skor 80% ≥ x > 65%, kriteria Cukup.
4. Skor 65% ≥ x > 50%, kriteria Kurang.
5. Skor ≤ 50%, kriteria Sangat Kurang.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja tahunan Dewan Komisaris dilakukan dengan sistem *self-assessment,* terhadap capaian KPI Dewan Komisaris, dan atas hasil penilaiannya disampaikan kepada Pemegang Saham seri A atau kuasanya untuk

Performance Appraisal of the Board of Commissioners

Appraisal Procedures

Every year, the Board of Commissioners determines the annual Work Program of the Board of Commissioners and KPIs as performance targets for the Board of Commissioners. KPI Achievements becomes the object of assessment of the performance of the Board of Commissioners for one year. The assessment is carried out based on the results of a comparison of the realization with the target multiplied by the weight. If the realization is above 100%, the value/score given may exceed the maximum weight. If the KPI realization is below 100%, the value will be given proportional to the weight.

Based on the total score, the following assessment criteria can be determined:
1. Score 100% ≥ x > 95%, Very Good criteria.
2. Score 95% ≥ x > 80%, Good criteria.
3. Score 80% ≥ x > 65%, Average criteria.
4. Score 65% ≥ x > 50%, Poor criteria.
5. Score ≤ 50%, Very Poor criteria.

Appraiser

The annual performance appraisal of the Board of Commissioners is carried out using a self-assessment system, towards the KPI achievements of the Board of Commissioners, and the results of the assessment

diputuskan lebih lanjut melalui RUPS, dengan memberikan Keputusan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan termasuk Laporan Dewan Komisaris terkait tugas pengawasan Perusahaan untuk tahun buku sebelumnya.

Kriteria Penilaian *Key Performance Indicator* Dewan Komisaris Secara Kolegial

Penilaian kinerja Dewan Komisaris didasarkan pada pemenuhan KPI Dewan Komisaris untuk periode tahun penilaian secara kolegial. KPI Dewan Komisaris mencakup perspektif penilaian kinerja sebagai berikut:

1. Kontribusi pencapaian atas KPI Direksi;
2. Aspek pengawasan;
3. Aspek dinamis dan penguatan tata kelola yang terdiri dari sub indikator sebagai berikut:
   a. Kegiatan pengembangan (mengikuti FGD/ pelatihan/seminar/*workshop*).
   b. Penguatan tata kelola yang terdiri dari:
      - Menerapkan tata kelola Dewan Komisaris;
      - Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris;
      - Tingkat kehadiran rapat baik dan partisipasi pada rapat internal Dewan Komisaris dan rapat-rapat Komite Dewan Komisaris.

Hasil Penilaian KPI Dewan Komisaris Secara Kolegial

Perusahaan telah melakukan penilaian atas *Key Performance Indicator* terhadap Dewan Komisaris secara kolegial di tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

are submitted to Series A Shareholders or their proxies for further decisions through the GMS, by providing a decision to approve and ratify the Annual Report and Financial Reports including Board of Commissioners report regarding the Company's supervisory duties for the previous financial year.

Collegial Criteria for Key Performance Indicator Assessment of Board of Commissioners

The performance assessment of the Board of Commissioners is based on the fulfillment of the Board of Commissioners' KPI for the collegial assessment year period. The Board of Commissioners' KPI includes the following performance assessment perspectives:

1. Contribution to the achievement of the Board of Directors' KPI;
2. Supervisory aspects;
3. Dynamic aspects and strengthening of governance consisting of the following sub-indicators:
   a. Development activities (participating in FGD/ training/seminars/workshops).
   b. Strengthening governance consisting of:
      - Implementing the governance of the Board of Commissioners;
      - Preparing the work plan of the Board of Commissioners;
      - The level of attendance at meetings and participation in internal meetings of the Board of Commissioners and meetings of the Board of Commissioners Committee.

Collegial Assessment Results of Board of Commissioners KPI

The Company has conducted a collegial assessment of the key performance indicators of the Board of Commissioners in 2024, which can be seen in the table below.

No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Duties, Functions, and Responsibilities of the Board of Commissioners	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	%	Skor Score
1	Aspek Kontribusi Pencapaian KPI Korporat Aspects of Contribution to Corporate KPI Achievement			20				19,4
	Pencapaian KPI Korporat Corporate KPI Achievement	Realisasi Pencapaian KPI Korporat Realization of Corporate KPI Achievement	%	20	100%	97%	97%	19,4

No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Duties, Functions, and Responsibilities of the Board of Commissioners	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	%	Skor Score
2	Aspek Pengawasan dan Penasihatan Supervision and Advisory Aspects			60				63,1
	1. Memberikan persetujuan/ rekomendasi/ tanggapan atas aksi korporasi yang disampaikan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Provide approval/ recommendations/ responses to corporate actions submitted by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association.	Persetujuan/ rekomendasi/ tanggapan yang diberikan kepada Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan AD Approval/ recommendation/ response given to the Board of Directors in a timely manner in accordance with the provisions of the Articles of Association	Dok Doc	8	2	16	110%	8,8
	2. Memberikan nasihat atau saran kepada Direksi guna mengoptimalkan kinerja sesuai dengan rencana kerja, arahan RUPS dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Provide advice or suggestions to the Board of Directors to optimize performance in accordance with the work plan, GMS directives and improve the company's compliance with laws and regulations.	Nasihat atau saran yang diberikan kepada Direksi guna mengoptimalkan kinerja sesuai dengan rencana kerja, arahan RUPS dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Advice or suggestions given to the Board of Directors to optimize performance in accordance with the work plan, GMS directives and improve the company's compliance with laws and regulations.	Dok Doc	8	1	12	110%	8,8
	3. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan strategis perusahaan melalui kunjungan lapangan (site visit). Conducting supervision of the company's strategic activities through field visits (site visits).	Kunjungan lapangan (site visit) untuk memonitor kegiatan-kegiatan strategis perusahaan. Field visits (site visits) to monitor the company's strategic activities.	Dok Doc	7	3	8	110%	7,7
	4. Tanggapan terhadap RKAP dan/atau RJPP yang disiapkan oleh Direksi. Response to the CWPB and/or RJPP prepared by the Board of Directors.	Pembahasan RKAP yang telah disiapkan oleh Direksi. Discussion of the CWPB that has been prepared by the Board of Directors.	Dok Doc	8	1	1	100%	8
	5. Meneliti dan menelaah laporan berkala yang disiapkan oleh Direksi. Examine and review periodic reports prepared by the Board of Directors.	Jumlah surat evaluasi laporan berkala. Number of periodic report evaluation letters.	Surat Letter	7	12	12	100%	7

No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Duties, Functions, and Responsibilities of the Board of Commissioners	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	%	Skor Score
	6. Menyampaikan laporan Pengawasan Dewan Komisaris pada RUPS Tahunan Submitting the Board of Commissioners' Supervision report at the Annual GMS	Laporan pengawasan yang disampaikan pada RUPS Tahunan Supervisory report submitted at the Annual General Meeting of Shareholders	Dok Doc	7	1	1	100%	7
	7. Pengawasan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan dan pengendalian intern. Oversight of compliance with legislation and internal control.	Pembahasan upaya tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi Laporan Auditor Independen (LAI) atas kepatuhan terhadap perundang- undangan dan pengendalian intern. Discussion of follow-up efforts regarding the findings and recommendations of the Independent Auditor's Report (LAI) regarding compliance with legislation and internal control.	Risalah/ surat Minutes of Meeting/ letter	7	1	1	100%	7
	8. Mengusulkan KAP yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. Propose a KAP to audit the company's financial statements.	Pengusulan kepada RUPS/Menteri mengenai KAP yang mengaudit laporan keuangan. Proposal to the GMS/ Minister regarding the KAP that audits the financial statements.	Surat Letter	8	1	2	110%	8,8
3	Aspek Dinamis dan Penguatan Tata Kelola Dynamic Aspects and Strengthening of Governance			20				21,3
	1. Kegiatan Pengembangan Development Activities			6				
	Mengikuti FGD/ Pelatihan/ Seminar/ Workshop. Participate in FGD/Training/ Seminar/Workshop	Kegiatan FGD/ pelatihan/ Seminar/ Workshop yang diikuti oleh Dekom dan/ atau Organ. FGD/training/seminar/ workshop activities attended by Board of Commissioners and/or Organs.	Lap/ Sertifikat Report/ Certificate	6	2	10	110%	6,6
	2. Penguatan Tata Kelola Governance Strengthening			14				
	a. Menerapkan Tata Kelola Dewan Komisaris. Implementing Board of Commissioners Governance.	Skor GCG Dewan Komisaris. Board of Commissioners GCG Score	Skor Score	4	33	33	100%	4
	b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris 2024. Preparing the 2024 Board of Commissioners Work Plan and Budget.	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang telah ditandatangani Dekom. The Board of Commissioners' Annual Work Plan and Budget signed by Board of Commissioners.	Dok Score	3	1	1	100%	3

No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Duties, Functions, and Responsibilities of the Board of Commissioners	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	%	Skor Score
	3. Menghadiri rapat-rapat: Attending meetings:			7				
	a. Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Internal Meeting	Rata-rata persentase kehadiran Dekom. Board of Commissioners average meeting attendance	% Kehadiran Attendance	1	80	97	110%	1,1
	b. Rapat koordinasi/ gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Coordination meeting between Board of Commissioners and Directors	Rata-rata persentase kehadiran Dekom. Board of Commissioners average meeting attendance	% kehadiran Attendance	1	80	97	110%	1,1
	c. Pengesahan RKAP Approval of CWPB	Rata-rata persentase kehadiran Dekom. Board of Commissioners average meeting attendance	% kehadiran Attendance	1	80	100	110%	1,1
	d. RUPS Tahunan Annual GMS	Rata-rata persentase kehadiran Dekom. Board of Commissioners average meeting attendance	% kehadiran Attendance	1	80	100	110%	1,1
	e. Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting	Rata-rata persentase kehadiran Komite Audit pada rapat Komite. Average percentage of Audit Committee attendance at Committee meetings.	% kehadiran Attendance	1	80	100	110%	1,1
	f. Rapat Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi Integrated Risk Monitoring & Governance Committee Meeting	Rata-rata persentase kehadiran pada Komite Pemantau Risiko & TKTpada rapat Komite. Average percentage of attendance at the Risk Monitoring Committee & TKT at Committee meetings.	% kehadiran Attendance	1	80	100	110%	1,1
	g. Rapat Komite Nominasi & Remunerasi Nomination & Remuneration Committee Meeting	Rata-rata persentase kehadiran pada Komite Nominasi & Remunerasi ada rapat Komite. Average percentage of attendance at the Nomination & Remuneration Committee meetings.	% kehadiran Attendance	1	80	100	110%	1,1
	Jumlah Skor KPI 2024 Total 2024 KPI Score			**100**				**104,0**

Kriteria Penilaian Key Performance Indicator Dewan Komisaris Secara Individual

Selain melakukan penilaian secara kolegial atas kinerja Dewan Komisaris, Perusahaan juga melakukan penilaian atas KPI anggota Dewan Komisaris secara individual.

Individual Assessment Criteria for the Board of Commissioners' Key Performance Indicators

In addition to conducting a collegial assessment of the performance of the Board of Commissioners, the Company also conducts an assessment of the KPIs of the members of the Board of Commissioners individually.

Adapun indikator/parameter penilaian KPI anggota Dewan Komisaris secara individual sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap KPI Korporat;
2. Pencapaian KPI Dewan Komisaris secara kolegial (di mana dalam pencapaian KPI Kolegial Dewan Komisaris juga terdapat sub indikator terkait pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran dan partisipasi pada Rapat Dewan Komisaris dan rapat-rapat Komite Dewan Komisaris);
3. Pencapaian GCG;
4. Pengawasan dan pemberian nasihat anggota Dewan Komisaris sesuai bidang yang telah ditentukan pembagiannya oleh Dewan Komisaris.

Hasil Penilaian KPI Dewan Komisaris Secara Individual

Pada tahun 2024, Perusahaan telah melakukan penilaian masing-masing KPI anggota Dewan Komisaris secara individual yang dilakukan dengan mekanisme *Self-Assessment*, adapun pencapaian KPI masing-masing anggota Dewan Komisaris Perusahaan di tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut.

1. Irwandy Arif (Komisaris Utama)

The indicators/parameters for assessing the KPIs of the members of the Board of Commissioners individually are as follows:

1. Supervision of Corporate KPIs;
2. in the achievement of the Board of Commissioners Collegial KPI there are also sub-indicators related to the development of the competence of members of the Board of Commissioners and the level of attendance and participation in Board of Commissioners Meetings and Board of Commissioners Committee meetings;
3. GCG achievement;
4. Supervision and provision of advice to members of the Board of Commissioners according to the determined fields by the Board of Commissioners.

Individual Assessment Results of the Board of Commissioners' KPIs

In 2024, the Company has conducted an assessment of each KPI of the members of the Board of Commissioners individually which is carried out using a self-assessment mechanism, the achievement of the KPIs of each member of the Company's Board of Commissioners in 2024 can be seen as follows.

1. Irwandy Arif (President Commissioner)

Prespektif Perspective	Indikator Indicator	Satuan Unit	Polarois Polarity	Formula	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Skor Score
Kolegial Collegial	1. Pengawasan Tehadap KPI Korporat Supervision of Corporate KPIs	%	Maximize	Pencapaian Skor KPI Manajemen PTBA (kolegial) x 40% PTBA Management KPI Score Achievement (collegial) x 40%	40	100	96,75	96,75%	38.70
	2. Pencapaian KPI Dewan Komisaris KPI achievement of Board of Commissioners	%	*Maximize*	Pencapaian KPI Dekom (kolegial) x 40% Board of Commissioners KPI Achievement (collegial) x 40%	40	100	104.01	104.0%	41.60
	3. Pencapaian GCG GCG Achievement	%	*Maximize*	Skor GCG GCG Score	9	96.1	98.48	102.5%	9.22
Individu Individual	4. Koordinasi Pengawasan dan Pemberian Nasihat Bidang Coordination of Supervision and Provision of Department Advice				11	11	11		
	a. Kebijakan mutu & pelayanan Quality & service policy	Saran Suggestion	*Maximize*	Surat maupun kajian komite Letters and committee studies	1	1	1	100%	11.00
	b. Monitoring Temuan Finding Monitoring	Saran Suggestion	*Maximize*	Saran maupun kajian komite Letters and committee studies	1	1	1		

Prespektif Perspective	Indikator Indicator	Satuan Unit	Polarois Polarity	Formula	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Skor Score
	c. Akutansi dan Penyesuaian Laporan keuangan Accounting and Preparation of Financial Reports	Saran Suggestion	*Maximize*	Arahan baik lisan dalam RDD (bertuang dalam risalah rapat) Saran maupun kajian komite Oral directions in the RDD (contained in the minutes of the meeting) Suggestions and committee studies	1	1	1		
	d. Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Company Internal Control System	Saran Suggestion	*Maximize*	Saran maupun kajian komite Letters and committee studies	1	1	1		
	e. Pengelolaan Anak Perusahaan/ Perusahaan Management of Subsidiaries/ Company	Saran Suggestion	*Maximize*	Saran maupun kajian komite Letters and committee studies	1	1	1		
	f. Manajemen risiko Perusahaan & Pasca tambang Corporate & Post-mining risk management	Saran Suggestion	*Maximize*	Saran maupun kajian komite Letters and committee studies	1	1	1		
	g. Kebijakan perngembangan usaha Business development policy	Saran Suggestion	*Maximize*	Saran maupun kajian komite Letters and committee studies	1	1	1		
	h. Penerapan Good Corporate Governance Implementation of Good Corporate Governance	Saran Suggestion	*Maximize*	Saran maupun kajian komite Letters and committee studies	1	1	1		
	i. CSR	Saran Suggestion	*Maximize*	Saran maupun kajian komite Letters and committee studies	1	1	1		
	j. Kebijakan Nominasi, Remunerasi dan Nomination, Remuneration policy	Saran Suggestion	*Maximize*	Saran maupun kajian komite Letters and committee studies	1	1	1		
	k. Sistem Teknologi dan Informasi Technology and Information Systems	Saran Suggestion	*Maximize*	Saran maupun kajian komite Letters and committee studies	1	1	1		
SKOR Score						**100.00**		**100.53**	

2. Andi Pahril Pawi (Komisaris Independen) 2. Andi Pahril Pawi (Independent Commissioner)

Prespektif Perspective	**Indikator** Indicator	**Satuan** Unit	**Polarois** Polarity	**Formula**	**Bobot** Weight	**Target**	**Realisasi** Realization	**Pencapaian** Achievement	**Skor** Score
Kolegial Collegial	1. Pengawasan Terhadap KPI Korporat Supervision of Corporate KPIs	%	*Maximize*	Pencapaian Skor KPI Manajemen PTBA (kolegial) x 40% PTBA Management KPI Score Achievement (collegial) x 40%	40	100	96,75	96.75%	38.70
	2. Pencapaian KPI dewan komisaris Board of Commissioners KPI achievement	%	*Maximize*	Pencapaian KPI Dekom (kolegial) x 40% Board of Commissioners KPI Achievement (collegial) x 40%	40	100	104.01	104.0%	41.60
	3. Pencapaian GCG GCG Achievement	%	*Maximize*	Skor GCG GCG Score	9	96.1%	98.48	102.5%	9.22
Individu Individual	4. Koordinasi Pengawasan dan Pemberian nasihat bidang Coordination of Supervision and Provision of Advice in Department				11	3	3	100%	11.00
	a. Kebijakan mutu & pelayanan Quality and service policy	Saran Suggestion	*Maximize*	Surat maupun kajian komite Letters and committee studies	5	1	1		
	b. Monitoring temuan auditor intern/ekstern Monitoring internal/external auditor findings	Saran Suggestion	*Maximize*	Saran maupun kajian komite Letters and committee studies	5	1	1		
	c. Akuntansi dan Penyesuaian Laporan Keuangan Accounting and Financial Statement Adjustments	Saran Suggestion	*Maximize*	Saran maupun kajian komite Letters and committee studies	5	1	1		
Skor Score					**100.00**				**100.53**

3. Piterdono HZ (Komisaris) 3. Piterdono HZ (Commissioner)

Prespektif Perspective	Indikator Indicator	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Formula	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Skor Score
Kolegial Collegial	1. Pengawasan Terhadap KPI Korporat Supervision of Corporate KPIs	%	*Maximize*	Pencapaian Skor KPI Manajemen PTBA (kolegial) x 40% Management KPI Score Achievement (collegial) x 40%	40	100	96,75	96.75%	38.70
	2. Pencapaian KPI dewan komisaris Board of Commissioners KPI achievement	%	*Maximize*	Pencapaian KPI Dekom (kolegial) x 40% Board of Commissioners KPI Achievement (collegial) x 40%	40	100	104.01	104.0%	41.60
	3. Pencapaian GCG GCG Achievement	%	*Maximize*	Skor GCG GCG Score	9	96.1%	98.48	102.5%	9.22
Individu Individual	4. Koordinasi Pengawasan dan Pemberian nasihat bidang Coordination of Supervision and Provision of Advice in the Department				11	3	3	100%	11.00
	a. Sistem pengendalian internal Perusahaan Company's internal control system	Saran Suggestion	*Maximize*	Surat maupun kajian komite Letter and committee studies	5	1	1		
	b. Pengelolaan anak Perusahaan/ Perusahaan Management of subsidiaries/ company	Saran Suggestion	*Maximize*	Saran maupun kajian komite Letter and committee studies	5	1	1		
	c. Kebijakan nominasi, remunerasi dan pengembangan SDM Nomination, remuneration, and Human Capital development policies	Saran Suggestion	*Maximize*	Arahan baik lisan dalam RDD (tertuang dalam risalah rapat) surat maupun kajian komite Oral directions in the RDD (contained in the minutes of the meeting) Suggestions and committee studies	5	1	1		
Skor Score					**100.00**				**100.53**

4. Kurnia Toha (Komisaris Independen) 4. Kurnia Toha (Independent Commissioner)

Prespektif Perspective	Indikator Indicator	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Formula	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Skor Score
Kolegial Collegial	1. Pengawasan Terhadap KPI Korporat Supervision of Corporate KPIs	%	*Maximize*	Pencapaian Skor KPI Manajemen PTBA (kolegial) x 40% Management KPI Score Achievement (collegial) x 40%	40	100	96,75	96.75%	38.70
	2. Pencapaian KPI dewan komisaris Board of Commissioners KPI achievement	%	*Maximize*	Pencapaian KPI Dekom (kolegial) x 40% Board of Commissioners KPI Achievement (collegial) x 40%	40	100	104.01	104.0%	41.60
	3. Pencapaian GCG GCG Achievement	%	*Maximize*	Skor GCG GCG Score	9	96.1%	98.48	102.5%	9.22
Individu Individual	4. Koordinasi Pengawasan dan Pemberian nasihat bidang Coordination of Supervision and Provision of Advice in the Department				11	3	3	100%	11.00
	a. Sistem pengendalian internal Perusahaan Company's internal control system	Saran Suggestion	*Maximize*	Surat maupun kajian komite Letter and committee studies	5	1	1		
	b. Pengelolaan anak Perusahaan/ Perusahaan Management of subsidiaries/ company	Saran Suggestion	*Maximize*	Saran maupun kajian komite Letter and committee studies	5	1	1		
	c. Kebijakan nominasi, remunerasi dan pengembangan SDM Nomination, remuneration, and Human Capital development policies	Saran Suggestion	*Maximize*	Arahan baik lisan dalam RDD (tertuang dalam risalah rapat) surat maupun kajian komite Oral directions in the RDD (contained in the minutes of the meeting) Suggestions and committee studies	5	1	1		
Skor Score					**100.00**				**100.53**

5. Carlo B. Tewu (Komisaris)

5. Carlo B. Tewu (Commissioner)

Prespektif Perspective	Indikator Indicator	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Formula	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Skor Score
Kolegial Collegial	1. Pengawasan Terhadap KPI Korporat Supervision of Corporate KPIs	%	*Maximize*	Pencapaian Skor KPI Manajemen PTBA (kolegial) x 40% Management KPI Score Achievement (collegial) x 40%	40	100	96,75	96.75%	38.70
	2. Pencapaian KPI dewan komisaris Board of Commissioners KPI achievement	%	*Maximize*	Pencapaian KPI Dekom (kolegial) x 40% Board of Commissioners KPI Achievement (collegial) x 40%	40	100	104.01	104.0%	41.60
	3. Pencapaian GCG GCG achievement	%	*Maximize*	Skor GCG GCG Score	9	96.1%	98.48	102.5%	9.22
Individu Individual	4. Koordinasi Pengawasan dan Pemberian nasihat bidang Coordination of Supervision and Provision of Advice in the Department				11	3	3	100%	11.00
	a. Kebijakan mutu & pelayanan Quality & service policy	Saran Suggestion	*Maximize*	Surat maupun kajian komite Letter and committee studies	1	1	1		
	b. Penerapan good corporate governance Good corporate governance implementation	Saran Suggestion	*Maximize*	Saran maupun kajian komite Letter and committee studies	5	1	1		
	c. Kebijakan nominasi, remunerasi dan pengembangan SDM Nomination, remuneration, and Human Capital development policies	Saran Suggestion	*Maximize*	Arahan baik lisan dalam RDD (tertuang dalam risalah rapat) surat maupun kajian komite Oral directions in the RDD (contained in the minutes of the meeting) Suggestions and committee studies	5	1	1		
Skor Score					**100.00**				**100.53**

6. Rahmat Hidayat Pulungan (Komisaris Independen)

6. Rahmat Hidayat Pulungan (Independent Commissioner)

Prespektif Perspective	Indikator Indicator	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Formula	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Skor Score
Kolegial Collegial	1. Pengawasan Terhadap KPI Korporat Supervision of Corporate KPIs	%	*Maximize*	Pencapaian Skor KPI Manajemen PTBA (kolegial) x 40% Management KPI Score Achievement (collegial) x 40%	40	100	96,75	96.75%	38.70
	2. Pencapaian KPI dewan komisaris Board of Commissioners KPI achievement	%	*Maximize*	Pencapaian KPI Dekom (kolegial) x 40% Board of Commissioners KPI Achievement (collegial) x 40%	40	100	104.01	104.0%	41.60
	3. Pencapaian GCG GCG achievement	%	*Maximize*	Skor GCG GCG Score	9	96.1%	98.48	102.5%	9.22
Individu Individual	4. Koordinasi Pengawasan dan Pemberian nasihat bidang Coordination of Supervision and Provision of Advice in the Department				11	3	3	100%	11.00
	a. Penerapan Good Corporate Governance Good Corporate Governance implementation	Saran Suggestion	*Maximize*	Surat maupun kajian komite Letter and committee studies	5	1	1		
	b. CSR	Saran Suggestion	*Maximize*	Saran maupun kajian komite Letter and committee studies	5	1	1		
	c. Sistem Teknologi Informasi Information Technology System	Saran Suggestion	*Maximize*	Saran maupun kajian komite Letter and committee studies	5	1	1		
Skor Score					**100.00**				**100.53**

Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur Pelaksanaan Penilaian

Setiap tahunnya Direksi menandatangani Kontrak Manajemen dengan pemegang saham Seri A Dwiwarna/ Kuasanya (MIND ID), yang di dalamnya terdapat *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai penjabaran dari RKAP yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan MIND ID. KPI Direksi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kolegial dan individu, yang atas capaian keduanya menjadi objek penilaian atas kinerja Direksi selama satu tahun. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Akuntan Publik melakukan evaluasi kinerja Direksi kemudian disampaikan kepada RUPS dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/

The Board of Directors' Performance

Appraisal Appraisal Procedures

Every year, the Board of Directors signs a Management Contract with Series A Dwiwarna/Proxy (MIND ID) shareholders, which includes Key Performance Indicators (KPI) as an elaboration of the WP&B which has been approved by the Board of Commissioners and MIND ID. The KPI of the Board of Directors is divided into 2 (two), namely collegial and individual, the achievements of both of which become the object of assessment of the performance of the Board of Directors for one year. The Board of Commissioners, assisted by the Public Accountant, evaluates the performance of the Board of Directors and then submits it to the GMS and/or Series

Kuasanya melalui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan setiap tahun terhadap capaian KPI Direksi, baik kolegial maupun individu, yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Akuntan Publik.

Kriteria Penilaian

Penilaian Direksi mengacu pada *Key Performance Indicator* (KPI) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-306/MBU/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Pada Badan Usaha Milik Negara, yang bertujuan sebagai alat penilaian bagi Pemegang Saham atas kinerja Direksi sampai dengan akhir tahun.

Pada penilaian kinerja Direksi, terdapat 5 (lima) perspektif yang digunakan, adapun pada tahun 2024 pencapaian dibandingkan target yaitu:

A Dwiwarna Shareholders/Proxies through the Board of Commissioners' Supervisory Task Report.

Appraiser

The Directors' performance assessment is carried out every year on the KPI achievements of the Directors, both collegial and individual, which is carried out by the Board of Commissioners with the assistance of a Public Accountant.

Appraisal Criteria

The Board of Directors' assessment refers to the Key Performance Indicator (KPI) which is based on SOEs Ministerial Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-306/MBU/11/2023 concerning Technical Instructions for the Preparation of Key Performance Indicators in State-Owned Enterprises as an assessment tool for Shareholders regarding the performance of the Board of Directors until the end of the year.

In assessing the performance of the Board of Directors, there are 5 perspectives used, while in 2024 the achievements compared to targets are:



1. Nilai Ekonomi Sosial Untuk Indonesia
   Merupakan KPI untuk mengukur kinerja keuangan, operasional, dan sosial (termasuk peran perusahaan sebagai agen pembangunan), secara berkesinambungan, dengan mempertimbangkan tingkat risiko (*risk appetite*) perusahaan yang ditetapkan.
2. Inovasi Model Bisnis
   Merupakan variabel KPI untuk mengukur keberhasilan inovasi perusahaan antara lain:

1. Social Economic Value for Indonesia
   A KPI to measure financial, operational, and social performance (including the company's role as a development agent), on an ongoing basis, taking into account the company's risk appetite.

2. Business Model Innovation
   A KPI variable intended to measure the success of company innovation, including:

a. inovasi model bisnis inti;
b. restrukturisasi;
c. penciptaan ekosistem, mitra serta kolaborasi usaha mikro, kecil dan menengah dan/atau;
d. pengembangan konten lokal dan hilirisasi (*downstream*).

3. Kepemimpinan Teknologi
   Merupakan KPI variabel untuk mengukur, antara lain:
   a. keberhasilan dalam mengembangkan dan menginstitusionalkan kapabilitas teknologi/digital pada skala umum.
   b. penciptaan nilai dari kumpulan data (*big data*) dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan/atau
   c. dukungan Indonesia menjadi yang terdepan pada area teknologi strategis.
4. Peningkatan Investasi
   Merupakan KPI untuk mengukur antara lain:
   a. produktivitas dari aset berwujud (*tangible asset*) dan aset tidak berwujud (*intangible asset*).
   b. Keberhasilan menarik investasi luar dari pihak swasta, asing, dan investor sosial.
   c. efektivitas adopsi mekanisme kondisi pasar (*market based*).
   d. efektivitas implementasi kelincahan (*agile*) dalam birokrasi, dan kemudahan dalam melaksanakan bisnis dan /atau
   e. Progres investasi yang didanai oleh PMN.
5. Pengembangan Talenta
   Merupakan variabel KPI untuk mengukur seberapa baik perusahaan, antara lain:
   a. meningkatkan kemampuan dan melatih tenaga kerja terkait teknologi baru.
   b. meningkatkan tata kelola yang baik dalam penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris.
   c. membentuk wadah talenta perusahaan (*talent pool*) pada level menengah dan/atau.
   d. menerapkan lingkungan inklusif, dinamis, inovatif, dan berakhlak.

KPI Manajemen Berorientasi pada Indikator Environmental, Social and Governance (ESG)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-306/MBU/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Pada Badan Usaha Milik Negara, KPI manajemen wajib berorientasi pada faktor ESG dan *Commercial* (ESG-C). Aspek ESG-C sebagai upaya mendorong perusahaan membangun praktik bisnis dan tata kelola yang berkesinambungan sehingga memberikan dampak positif bagi ekonomi, lingkungan dan sosial. Adapun penjabaran faktor ESG-C dalam KPI Manajemen sebagai berikut:

a. core business model innovation;
b. restructuring;
c. creation of ecosystems, partners and collaboration of micro, small and medium enterprises and/or;
d. development of local content and downstream.

3. Technology Leadership
   A KPI variable to measure, among others:
   a. success in developing and institutionalizing technology/digital capabilities on a general scale.
   b. value creation from data sets (big data) and artificial intelligence and/or
   c. Indonesia's support to be at the forefront in strategic technology areas.
4. Investment Increase
   A KPI to measure, among others:
   a. productivity of tangible assets and intangible assets.
   b. Success in attracting external investment from the private sector, foreigners, and social investors.
   c. effectiveness of adopting market-based mechanisms.
   d. effectiveness of implementing agile in bureaucracy, and ease of doing business and/or
   e. Progress of investment funded by PMN.
5. Talent Development
   A KPI variable to measure how well the company, among others:
   a. improving capabilities and training the workforce related to new technology.
   b. improving good governance in the appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners.
   c. forming a company talent pool at the middle level and/or.
   d. implementing an inclusive, dynamic, innovative, and moral environment.

Management KPI Oriented to Environmental, Social and Governance (EGS) Indicators

In accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-306/MBU/11/2023 concerning Technical Instructions for the Preparation of Key Performance Indicators (KPI) in State-Owned Enterprises, management KPIs must be oriented to ESG and Commercial (ESG-C) factors. The ESG-C aspect is an effort to encourage companies to build sustainable business and governance practices that have a positive impact on the economy, environment and society. The description of the ESG-C factor in the Management KPI is as follows:

1. *Environmental* (E)
   Aspek lingkungan (*environmental*) merupakan aspek yang menilai kegiatan perusahaan maupun pemasok /mitra yang berdampak pada lingkungan fisik. Isu lingkungan dapat berupa: perubahan iklim, polusi udara, air, limbah, dan keanekaragaman hayati.
2. *Social* (S)
   Aspek sosial (*social*) merupakan aspek yang menilai kegiatan perusahaan yang berdampak pada aksi sosial, termasuk kepada karyawan baik langsung maupun tidak langsung, pelanggan, dan masyarakat sekitar. Isu aspek sosial dapat berupa regulasi ketenagakerjaan, investasi pada tenaga kerja, produk dan jasa yang disediakan, dampak kepada masyarakat, dan budaya organisasi serta inklusi keragaman.
3. *Governance* (G)
   Aspek tata kelola (*governance*) merupakan aspek yang menilai kualitas dan ketepatan waktu pengambilan keputusan, struktur tata kelola, dan distribusi tanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Isu aspek tata kelola berupa etika bisnis, alokasi sumber daya, struktur keterlibatan dalam tata kelola, dan advokasi serta posisi eksternal.
4. *Commercial* (C)
   Aspek komersial (*commercial*) merupakan aspek yang menilai kegiatan sebuah perusahaan yang berdampak pada bisnis, keuangan, operasional, pemasaran, dan kegiatan lainnya yang tidak berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Kriteria dan Pencapaian KPI Direksi Secara Kolegial Berdasarkan Perspektif

Sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-306/MBU/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Pada Badan Usaha Milik Negara, wajib ditentukan kriteria KPI Direksi secara kolegial. Pada tahun 2024, Perusahaan telah melakukan pengukuran atas KPI Direksi secara kolegial sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

1. Environmental (E)
   The environmental aspect is an aspect assessing the activities of the company or suppliers/partners that have an impact on the physical environment. Environmental issues can be: climate change, air pollution, water, waste, and biodiversity.
2. Social (S)
   The social aspect is an aspect assessing the company's activities that have an impact on social action, including employees, both directly and indirectly, customers, and the surrounding community. Social aspect issues can be in the form of employment regulations, investment in the workforce, products and services provided, impacts on society, and organizational culture and diversity inclusion.
3. Governance (G)
   The governance aspect is an aspect assessing the quality and timeliness of decision making, governance structure, and distribution of responsibility to stakeholders. Governance aspect issues include business ethics, resource allocation, governance involvement structure, and advocacy and external positions.
4. Commercial (C)
   The commercial aspect is an aspect assessing a company's activities that have an impact on business, finance, operations, marketing, and other activities that are not related to environmental, social, and governance aspects.

Criteria and Achievement of KPI of the Board of Directors Collegially Based on Perspective

In accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-306/MBU/11/2023 concerning Technical Instructions for the Preparation of Key Performance Indicators in State-Owned Enterprises, it is mandatory to determine the criteria for KPI of the Board of Directors collegially. In 2024, the Company has measured the KPI of the Board of Directors collegially as shown in the table below.

Pencapaian KPI Direksi Berdasarkan Perspektif

KPI Achievement of the Board of Directors by Perspective

No	KPI Unit KPI	Satuan Unit	Target FY Target	ESG/C	Score Weight (%)	Bobot Weight	FY 2024		
							REAL REAL	%	Bobot Weight
	A. Nilai Ekonomi Sosial Untuk Indonesia Social Economy Value for Indonesia								
	A.1 Finansial Financial								
1	Pemenuhan target rasio keuangan Fulfillment of financial ratio targets	%	100	C	100	13	99,5	99,5	12,94
	1. EBITDA	Rp Miliar Rp Billion	8.398	C	65	8,45	7.894	94,0	7,94
	2. ROIC ≥ WACC	%	6,42	C	15	1,95	15,07	110,0	2,15
	3. *Cash flow from operation*	Rp Miliar Rp Billion	4.190	C	15	1,95	5.049	110,0	2,15
	4. *Inventory Turnover*	Hari Days	56	C	5	0,65	51	108,2	0,70
2	Menjaga Kinerja Saham Perusahaan - Price to book value (P/B Ratio) Maintaining Company Stock Performance - Price to book value (P/B Ratio)	X	≥ 1	C	100	2	1,4	110,0	2,20
3	Serapan Investasi Non Rutin Non-routine Investment Absorption	Rp Miliar Rp Billion	1.891	C	100	5	1.406	92,9	4,65
4	Penurunan *Cash Cost* Batu bara Reduction in Coal Cash Cost	%	4	C	100	3	4,02	100,4	3,01
	A.2 Operasional Operational								
5	HSS Excellence	%	100	S	100	5	60,0	60,0	3,00
6	Meningkatkan dan mempertahankan peringkat PROPER EMAS dan HIJAU Improve and maintain GOLD and GREEN PROPER ratings	%	100	E,S	100	3	75,3	75,3	2,26
	1. Capaian PROPER EMAS GOLD PROPER Achievement	Jumlah Total	Mempertahankan: 2 Maintaining: 2 Meningkatkan: 1 Increasing : 1	E,S	80	2,4	Mempertahankan: 2 Maintaining: 2 Meningkatkan: 0 Maintaining: 0	66,7	1,60
	2. Capaian PROPER HIJAU GREEN PROPER Achievement	Jumlah Total	Mempertahankan: 1 Maintaining: 1	E,S	20	0,6	Mempertahankan : 2 Maintaining: 2	110,0	0,66
7	Penjualan Batu bara Total Total Coal Sales	Ton	43.113.700	C	100	10	42.890.977	99,5	9,95
8	Unlocking Logistic - FOB MV Pelabuhan & via KAI Slot SMBR Unlocking Logistic - FOB MV Port & via KAI Slot SMBR	%	100	C	100	9	70,3	70,3	6,33
	1. Penjualan FOB MV Pelabuhan FOB Sales of MV Port	Ton	4.000.000	C	90	8,1	2.657.649	66,4	5,38
	2. Via KAI Slot SMBR	Waktu Time	Oktober 2024 October 2024	C	10	0,9	Oct-24	105,3	0,95

No	KPI Unit KPI	Satuan Unit	Target FY Target	ESG/C	Score Weight (%)	Bobot Weight	FY 2024		
							REAL REAL	%	Bobot Weight
9	Re-estimasi sumberdaya dan cadangan IUP Re-estimation of IUP resources and reserves	Waktu Time	Desember 2024 December 2024	G	100	2	September 2024 September 2024	110,0	2,20
10	Penyelesaian perpanjangan IUP yang akan berakhir pada tahun 2026 (IPC) Completion of IUP extension with expiration in 2026 (IPC)	Waktu Time	Desember 2024 December 2024	G	100	2	Juli 2024 July 2024	110,0	2,20
11	Penyelesaian Program Kerja Procurement Tahun 2024 Completion of Procurement Work Program in 2024	%	100	C	100	4	107,83	107,8	4,3
	1. Lead Time Pengadaan Procurement Lead Time	%	90	C	10	0,4	100,0	110,0	0,44
	2. Implementasi Program Kerja Bersama FGD Implementation of FGD Joint Work Program	%	95	C	20	0,8	100,0	110,0	0,88
	3. *Contracted Purchase*	%	70	C	10	0,4	65,0	90,0	0,36
	4. Implementasi Perjanjian Turunan Implementation of Derivative Agreements	%	95	C	10	0,4	100,0	110,0	0,44
	5. *Cost Avoidance*	%	4	C	10	0,4	14,0	110,0	0,44
	6. *Cost Saving*	%	5	C	20	0,8	20,2	110,0	0,88
	7. Inventory Management	%	100	C	20	0,8	107,7	107,7	0,86
12	Penguatan penerapan Manajemen risiko Strengthening the implementation of risk management	%	100	C	100	4	103,5	103,5	4,14
	1. Rasio pemenuhan kualifikasi organ pengelola risiko Risk management organ qualification fulfillment ratio	%	90	C	10	0,4	100,0	110,0	0,44
	2. Implementasi roadmap perbaikan penerapan manajemen risiko Implementation of risk management improvement roadmap	%	100	C	90	3,6	102,8	102,8	3,70
13	Penyelesaian hasil Audit & Matriks Tindak Lanjut MONEV Completion of Audit Results & MONEV Follow-up Matrix	%	100	G	100	3	108,8	108,8	3,27
	1. Penyelesaian dan tindak lanjut hasil audit internal Completion and follow-up of internal audit results	%	85	G	40	1,2	104,1	110,0	1,32
	2. Penyelesaian dan tindak lanjut hasil audit ekternal Completion and follow-up of external audit result	%	80	G	40	1,2	94,7	110,0	1,32

No	KPI Unit KPI	Satuan Unit	Target FY Target	ESG/C	Score Weight (%)	Bobot Weight	FY 2024		
							REAL REAL	%	Bobot Weight
	3. Penyelesaian dan tindak lanjut Matriks Tindak Lanjut MONEV Completion and follow-up of the MONEV Follow-up Matrix	%	80	G	20	0,6	83,3	104,2	0,63
	A.3 Sosial Social								
14	Pengurangan emisi karbon terhadap total emisi BAU 2024 Carbon emission reduction to total BAU emissions 2024	%	2,25	E	100	2	7,7	110,0	2,20
	B. Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation								
15	Penurunan unscheduled downtime operasional (produksi) untuk meningkatkan produktivitas Reducing unscheduled operational (production) downtime to increase productivity	%	5,0	G,C	100	4	6,3	110,0	4,40
16	*Commercial Analysis* – Kajian Market Analysis dan *Market Competitve* serta *formula pricing* komoditas & mekanisme penjualan *shorterm* & *long term* Commercial Analysis - Review of Market Analysis and Market Competitve as well as commodity pricing formula & short term & long term sales mechanism.	%	100	C,G	100	3	110,0	110,0	3,30
	1. Kajian market analysis dan market competitive (sebagai kajian dalam rangka mempersiapkan SOP formulasi pricing komoditas & kontrak penjualan shorterm & longterm Market analysis and market competitive studies (as a study in order to prepare SOP for commodity pricing formulation & shorter & long-term sales contracts	Waktu Time	September 2024 September 2024	C,G	20	0,6	Mei 2024 May 2024	110,0	0,66
	2. SOP formulasi pricing komoditas SOP for commodity pricing formulation	Waktu Time	Desember 2024 December 2024	C,G	40	1,2	Mei 2024 May 2024	110,0	1,32
	3. SOP formulasi kontrak penjualan shorterm & longterm SOP for short term & long term sales contract formulation	Waktu Time	Desember 2024 December 2024	C,G	40	1,2	Mei 2024 May 2024	110,0	1,32

No	KPI Unit KPI	Satuan Unit	Target FY Target	ESG/C	Score Weight (%)	Bobot Weight	FY 2024		
							REAL REAL	%	Bobot Weight
17	Kontribusi EAT Anak & Cucu, *Joint Ventures & Associated companies* Contribution of EAT for Subsidiaries & Sub-subsidiaries, Joint Ventures & Associated companies	Rp Miliar Rp Billion	568	C	100	5	869,59	110,0	5,50
18	Implementasi Hasil Inovasi (PTBA): Pembuatan Anoda Sheet dan Semi Kokas dari Batu bara Implementation of Innovation Results (PTBA): Making Anode Sheet and Semi Coke from Coal	Waktu Time	Desember 2024 December 2024	E,C	100	2	November 2024 November 2024	110	2,20
	C. Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership								
19	Optimalisasi fungsi IT dalam peningkatan kualitas layanan IT dan penunjang kegiatan operasi Optimization of IT functions in improving the quality of IT services and supporting operational activities	%	100	G	100	3	100,2	100,2	3,01
	1. Sertifikasi ISO 20000 – 1 ISO 20000 – 1 Certification	Waktu Time	November 2024 November 2024	G	10	0,3	November 2024 November 2024	101,9	0,31
	2. Implementasi CoA Harmonisasi Implementation of Harmonized CoA	Waktu Time	November 2024 November 2024	G	30	0,9	100,0	100,0	0,90
	3. *Reliability Cybersecurity*	%	100	G	20	0,6	100,0	100,0	0,60
	4. *Assessment Lighthouse*	Waktu Time	November 2024 November 2024	G	25	0,75	November 2024 November 2024	100,0	0,75
	5. Penyusunan Leading & Lagging indicator Compiling Leading & Lagging indicators	Waktu Time	November 2024 November 2024	G	15	0,45	November 2024 November 2024	100,0	0,45
20	Menjaga Reputasi Perusahaan Maintaining Company Reputation	%	≤10	S,G	100	2	1,6	110,0	2,20
	D. Peningkatan Investasi Investment Enhancement								
21	Pekerjaan EPC CHF & TLS Proyek TE-Kramasan EPC Work CHF & TLS TE-Kramasan Project	%	13	C	100	5	100,0%	100%	5,00
	E. Pengembangan Talenta Talent Development								
22	Optimasi Pengelolaan *Talent Management* Talent Management Optimization	%	100	G,S	100	3	103,0	103,0	3,09
	1. Perempuan dalam nominated talent Women in nominated talent	%	15	G,S	15	0,45	25,0	110,0	0,50

No	KPI Unit KPI	Satuan Unit	Target FY Target	ESG/C	Score Weight (%)	Bobot Weight	FY 2024		
							REAL REAL	%	Bobot Weight
	2. Milenial (≤42 Tahun) dalam nominated talent Millennials (≤42 Years) in nominated talent	%	10	G,S	15	0,45	58,3	110,0	0,50
	3. Penyelesaian Kamus Kompetensi untuk mendukung implementasi skema grading baru dan indentifikasi talent** Completion of Competency Dictionary to support implementation of new grading scheme and talent identification**	%	100	G,S	40	1,2	100,0	100,0	1,20
	4. Implementasi SMKI untuk mendukungimplementasi skema grading baru dan indentifikasi talent** Implementation of SMKI to support the implementation of new grading schemes and talent identification**	%	100	G,S	30	0,9	100,0	100,0	0,90
23	Implementasi Roadmap penyehatan dana pension Implementation of the pension fund recovery roadmap	Waktu Time	Desember 2024 December 2024	G	100	2	Juni 2024 June 2024	110,0	2,20
24	Seluruh metrik produktivitas lebih baik dari tahun sebelumnya (maksimal P75 untuk EC/Revenue dan EC/Total Cost dan minimal P50 untuk EBITDA/FTE)* All productivity metrics are better than the previous year (maximum P75 for EC/Revenue and EC/Total Cost and minimum P50 for EBITDA/FTE)*	Indikator Indicator	3	G	100	4	80,5	80,5	3,22
	1. EC/Revenue	%	4,6	G	38	1,5	4,2	107,9	1,62
	2. EC/Total Cost	%	5,6	G	25	1	4,8	110,0	1,10
	3. EBITDA/FTE	%	12,7	G	38	1,5	4,2	33,4	0,50
Jumlah Total									**96,75**

Kriteria *Key Performance Indicator* Direksi Secara Individual dan Penilaiannya

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-306/MBU/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Pada Badan Usaha

Individual Key Performance Indicator Criteria for Board of Directors and Their Assessment

Furthermore, based on the provisions of the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-306/MBU/11/2023 concerning Technical Instructions for the Preparation of Key Performance Indicators (Key Performance Indicators) in State-Owned Enterprises, it

Milik Negara, wajib ditentukan kriteria KPI Direksi secara individual, adapun kriteria penilaian Direksi Perusahaan secara individual sebagai berikut:

1. Pencapaian atas KPI kolegial Direksi;
2. Pengukuran terhadap *total cost;*
3. Tingkat pencapaian volume produksi;
4. Terpenuhinya kuota *Domestic Market Obligation.*
5. Realisasi atas pencapaian *Good Corporate Governance* oleh pihak eksternal;
6. Pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggungjawab pada direktorat masing-masing.

Perusahaan telah melakukan pengukuran KPI anggota Direksi secara individual dan kolegial di tahun 2024.

Untuk KPI Direktur Utama diukur berdasarkan pencapaian KPI kolegial Direksi Perusahaan, sedangkan untuk KPI masing-masing anggota Direksi diukur berdasarkan aspek-aspek yang disepakati dalam kontrak manajemen. Adapun realiasi pencapain KPI Direksi secara individual adalah sebagai berikut:

is mandatory to determine the KPI criteria for the Board of Directors individually, the assessment criteria for the Company's Board of Directors individually are as follows:

1. Achievement of the Board of Directors' collegial KPI;
2. Measurement of total cost;
3. Level of production volume achievement;
4. Fulfillment of the Domestic Market Obligation quota.
5. Realization of the achievement of Good Corporate Governance by external parties;
6. Implementation of duties in accordance with the responsibilities of each directorate.

The Company has measured the KPI of the Board of Directors individually and collegially in 2024.

For the President Director's KPI, it is measured based on the achievement of the Company's Board of Directors' collegial KPI, while for each member of the Board of Directors' KPI, it is measured based on aspects agreed upon in the management contract. The realization of the Board of Directors' KPI achievement individually is as follows:

1. Direktur Pengembangan Usaha

1. Business Development Director

No	Kriteria Criteria	Unit Ukuran Measuring Unit	Target		Realisasi Realization		
			2024	Bobot Weight	2024	%	Bobot Weight
1	Pencapaian KPI Kolegial Collegial KPI Achievement	Skor Score	100%	40,00	96,75	96,75	38,70
2	RJPP 2020-2024 (Evaluasi Tahun Ke-4) RJPP 2020-2024 (4th Year Evaluation)	Waktu Time	Jul-24	5,00	Jun-24	108,61	5,43
3	R&D di bidang Energi Hijau R&D in Green Energy	Waktu Time	Dec-24	5,00	Sep-24	110,00	5,50
4	Penyelesaian Laporan Hasil Lab *Coal to Anoda Sheet* Completion of Coal to Anode Sheet Lab Result Report	Waktu Time	Jun-24	5,00	Mar-24	110,00	5,50
5	Tersedianya *Feasibility Study* Pengembangan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Berbasis Tenaga Surya Availability of Feasibility Study for Development of Solar Power-Based Renewable Energy Power Plants	Waktu Time	Sep-24	5,00	Aug-24	110,00	5,50
6	*Customer Satisfaction Index* (CSI)	*Rating*	3.5	5,00	3,76	107,43	5,37
7	Tindak Lanjut Kerjasama dengan Mitra Potensial Partnership Follow-up with potential partners	Jumlah Total	3	5,00	3,00	100,00	5,00
8	Jumlah komplain terkait material asing Number of complaints regarding foreign materials	Kali Times	4	5,00	0,00	110,00	5,50

No	Kriteria Criteria	Unit Ukuran Measuring Unit	Target		Realisasi Realization		
			2024	Bobot Weight	2024	%	Bobot Weight
9	Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kawasan Industri & Kawasan Ekonomi Khusus (Tanjung Enim - BACBIE) 2024 Report on Environmental Management and Monitoring of Industrial Areas & Special Economic Zones (Tanjung Enim - BACBIE) 2024	Waktu Time	Sep-24	5,00	Jul-24	110,00	5,50
10	*Total Cost* Total Cost	Rp Miliar Rp Billion	36,744	5,00	36.952	99,44	4,97
11	Volume Produksi Batu bara Coal Production Volume	Juta Ton Million Ton	41,34	5,00	43,28	104,69	5,23
12	Terpenuhinya kuota *Domestic Market Obligation* (DMO) Fulfillment of Domestic Market Obligation (DMO) quota	%	25,00	5,00	52,30	110,00	5,50
13	Pencapaian Skor *Good Corporate Governance* (GCG)	Skor GCG GCG Score	> 85.00	5,00	91,04	107,11	5,36
Jumlah Pencapaian KPI Individu Total Individual KPI Achievement				**100**			**103,06**

2. Direktur Operasi dan Produksi

2. Operations and Production Director

No	Kriteria Criteria	Unit Ukuran Measuring Unit	Target		Realisasi Realization		
			2024	Bobot Weight	2024	%	Bobot Weight
1	Pencapaian KPI Kolegial Collegial KPI Achievement	Skor Score	100%	40,00	96,75	96,75	38,70
2	Laporan Pelaksanaan Reklamasi PTBA Tahun 2023 PTBA Reclamation Implementation Report 2023	Waktu Time	Jan-24	5,00	Jan-24	101,94	5,10
3	Laporan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Semester II 2023 River Basin Rehabilitation Report Semester II 2023	Waktu Time	Jan-24	5,00	Jan-24	103,33	5,17
4	*Stripping Ratio*	Kali Times	6,4	5,00	6,23	110,00	5,50
5	Pembebasan Lahan Land acquisition	Hektar Hectare	175	5,00	243,64	110,00	5,50
6	Jumlah komplain terkait material asing Number of complaints regarding foreign materials	Kali Times	4	5,00	0,00	110,00	5,50
7	Volume Angkutan Batu bara Coal Transportation Volume	Juta Ton Million Ton	33,69	5,00	35,43	105,16	5,26
8	FOLU *Net Sink* (Inisiatif Dekarbonisasi) FOLU Net Sink (Decarbonization Initiative)	Jumlah batang Total stems	50.000	5,00	115.096	110,00	5,50
9	Kajian Optimasi Produksi, Pengembangan dan Keteknikan atau Keekonomian Production Optimization, Development, and Engineering or Economic Studies	Program	4	5,00	9,00	110,00	5,50
10	Jumlah Biaya Total Cost	Rp Miliar Rp Billion	36.744	5,00	36.952	99,44	4,97
11	Volume Produksi Batu bara Coal Production Volume	Juta Ton Million Tons	41,34	5,00	43,28	104,69	5,23

No	Kriteria Criteria	Unit Ukuran Measuring Unit	Target		Realisasi Realization		
			2024	Bobot Weight	2024	%	Bobot Weight
12	Terpenuhinya kuota *Domestic Market Obligation* (DMO) Fulfillment of Domestic Market Obligation (DMO) quota	%	25,00	5,00	52,30	110,00	5,50
13	Pencapaian Skor *Good Corporate Governance* (GCG) Achievement of Good Corporate Governance (GCG) Score	Skor GCG GCG Score	> 85,00	5,00	91,04	107,11	5,36
Total Pencapaian KPI Individu Total Individual KPI Achievement				**100**			**102,79**

3. Direktur Sumber Daya Manusia

3. Human Resources Director

No	Kriteria Criteria	Unit Ukuran Measuring Unit	Target		Realisasi Realization		
			2024	Bobot Weight	2024	%	Bobot Weight
1	Pencapaian KPI Kolegial Collegial KPI Achivement	Skor Score	100%	40,00	96,75	96,75	38,70
2	Pengembangan *Leadership* bagi *Talent* BOD-1, BOD-2 dan BOD-3 Leadership Development for BOD-1, BOD-2 and BOD-3 Talents	Orang People	20	5,00	34	110,00	5,50
3	*Culture Engagement Survey*	%	60	5,00	74,7	110,00	5,50
4	Evaluasi Kinerja Pegawai Semester II 2023 Employee Performance Evaluation Semester II 2023	Waktu Time	Jun-24	5,00	Jun-24	106,39	5,32
5	Kolaborasi antar BUMN maupun Pihak Lain dalam Pelaksanaan Program TJSL Collaboration between SOEs and Other Parties in TJSL Program Implementation	Jumlah Total	2	5,00	3	110,00	5,50
6	Realisasi TJSL TJSL Realization	Rp Miliar Rp Billion	65,98	5,00	65,98	100,00	5,00
7	Rata-rata Tingkat Komponen Dalam Negeri Average Domestic Component Level	%	50	5,00	79,00	110,00	5,50
8	Pelanggaran Terhadap Regulasi yang telah dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang *inkracht* Violation of Regulations That Have Been Proven by an Inkracht Court Decision	Pelanggaran Violation	0	5,00	0,00	110,00	5,50
9	Optimalisasi Pengelolaan Aset sesuai dengan Tatakelola (Pedoman Internal dan/ atau ISO 50001) Optimization of Asset Management in accordance with Governance (Internal Guidelines and/or ISO 50001)	Rp Miliar Rp Billion	7	5,00	10,17	110,00	5,50
10	Jumlah Biaya Total Cost	Rp Miliar Rp Billion	36.744	5,00	36.952	99,44	4,97
11	Volume Produksi Batu bara Coal Production Volume	Juta Ton Million Ton	41,34	5,00	43.28	104,69	5,23
12	Terpenuhinya kuota *Domestic Market Obligation* (DMO) Fulfillment of Domestic Market Obligation (DMO) quota	%	25,00	5,00	52,30	110,00	5,50
13	Pencapaian Skor *Good Corporate Governance* (GCG) Achievement of Good Corporate Governance (GCG) Score	Skor GCG GCG Score	> 85.00	5,00	91,04	107,11	5,36
Total Pencapaian KPI Individu Total Individual KPI Achievement				**100**			**103,08**

4. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

4. Finance and Risk Management Director

No	Kriteria Criteria	Unit Ukuran Measuring Unit	Target		Realisasi Realization		
			2024	Bobot Weight	2024	%	Bobot Weight
1	Pencapaian KPI Kolegial Collegial KPI Achievement	Skor Score	100%	40,00	96,75	96,75	38,70
2	Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2025 Company Work Budget Plan 2025	Waktu Time	Jan-25	5,00	Jan-25	100,00	5,00
3	Laporan Keuangan *Audited* PTBA Tahun Buku 2023 PTBA Audited Financial Report for Fiscal Year 2023	Waktu Time	Apr-24	5,00	Apr-24	110,00	5,50
4	Pelaksanaan *Corporate Rating* PTBA *Standalone* atas Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023 Implementation of PTBA Standalone Corporate Rating on Audited Financial Report 2023	Waktu Time	Jun-24	5,00	Mar-24	110,00	5,50
5	Penyusunan analisa & rekomendasi terkait isu-isu strategis pada AAP Preparation of analysis/recommendations related to strategic issues in AAP	Jumlah Total	4	5,00	7,00	110,00	5,50
6	Penyelesaian Laporan Keuangan *Audited* Anak Cucu Perusahaan yang Beroperasi Completion of Audited Financial Reports of Operating Subsidiaries	Waktu Time	Sep-24	5,00	May-24	110,00	5,50
7	Digitalisasi Proses Bisnis Perusahaan Digitalization of Company Business Processes	Aplikasi Application	2	5,00	5,00	110,00	5,50
8	Pengembangan dan adopsi pedoman strategis/kebijakan pelaksana MIND ID terkait Manajemen Risiko Development and adoption of MIND ID strategic guidelines/implementing policies related to Risk Management	Waktu Time	Jun-24	5,00	Mar-24	110,00	5,50
9	Pelaksanaan *IC Testing* di PTBA Implementation of IC Testing at PTBA	Waktu Time	Dec-24	5,00	Jul-24	110,00	5,50
10	Jumlah Biaya Total Cost	Rp Miliar Rp Billion	36.744	5,00	36.952	99,44	4,97
11	Volume Produksi Batu bara Coal Production Volume	Juta Ton Million Tons	41,34	5,00	43,28	104,69	5,23
12	Terpenuhinya kuota *Domestic Market Obligation* (DMO) Fulfillment of Domestic Market Obligation (DMO) quota	%	25,00	5,00	52,30	110,00	5,50
13	Pencapaian Skor *Good Corporate Governance* (GCG) Achievement of Good Corporate Governance (GCG) Score	Skor GCG GCG Score	> 85.00	5,00	91,04	107,11	5,36
Total Pencapaian KPI Individu Total Individual KPI Achievement				**100**			**103,26**

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration for the Board of Directors and Commissioners



Pengangkatan dan pemberhentian serta penetapan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan wewenang pemegang saham yang dilakukan melalui mekanisme RUPS.

Prosedur Nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan kewenangan pemegang saham. Sebagai anggota holding, prosedur pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PTBA mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Seluruh calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi PTBA harus memenuhi persyaratan formil, materil, serta persyaratan lainnya yang telah ditetapkan pada ketentuan tersebut, termasuk telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Penetapan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh pemegang saham melalui Keputusan RUPS.

Appointment and dismissal as well as determining the amount of remuneration for members of the Board of Directors and Commissioners are under the authority of Shareholders which is carried out through the GMS mechanism.

Procedure for Nomination of Members of the Board of Commissioners and Directors

The appointment of members of the Company's Board of Commissioners and Directors is within the authority of the Shareholders. As a holding member, the appointment procedures for the Board of Commissioners and Directors of PTBA refer to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

All prospective members of the Board of Commissioners and Directors of PTBA must meet formal and material requirements, as well as other requirements stipulated in these provisions; including passing the Fit and Proper Test. The appointment of the Board of Commissioners and Directors is carried out by Shareholders through a GMS Resolution.

Kriteria Dewan Komisaris

Persyaratan Umum dan Formal

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, orang yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dan;
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dan;
      - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan tahunan dan/atau Laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan;
6. Memenuhi persyaratan lain sebagaimana ketentuan nominasi di antaranya persyaratan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan pasar modal, peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Perusahaan dan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Persyaratan Materiil

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan, seseorang harus memenuhi syarat materiil yaitu:

Criteria for Board of Commissioners

General and Formal Requirements

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, persons who can be appointed as members of the Board of Commissioners are individuals who meet the requirements at the time of appointment and during their term of office as follows:

1. Have good morals and integrity;
2. Capable of carrying out legal actions;
3. Within 5 (five) years before appointment and during office must:
   a. Never declared bankruptcy;
   b. Never been a member of the Board of Directors and/ or Board of Commissioners who was found guilty of causing bankruptcy in a company;
   c. Never been convicted of committing a criminal act that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector and;
   d. Never been a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners while serving:
      - Never held an Annual GMS;
      - Their accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never given their accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS and;
      - Have ever led a company to obtain a permit agreement or registration from OJK does not fulfill the obligation to submit annual reports and/or financial reports to OJK.
4. Have a commitment to comply with statutory regulations;
5. Have knowledge and/or expertise in the field required by the Company;
6. Fulfill other requirements as stipulated in the nomination provisions, including the requirements in the Limited Liability Company Law, capital market regulations, and other laws and regulations applied to the Company and other laws related to the Company's business activities.

Material Requirements

To be appointed as a member of the Company's Board of Commissioners, a person must meet the following material requirements:

1. Integritas;
2. Dedikasi;
3. Memahami masalah-masalah Manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha di mana yang bersangkutan dicalonkan; dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Persyaratan Lain

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan, selain memenuhi syarat materiil dan formal, seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:

1. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah;
3. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan yang bersangkutan;
4. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan atau Dewan Komisaris selama 2 (dua) periode;
5. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris;
6. Sehat jasmani dan rohani, yang tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit;
7. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Kriteria Direksi

Persyaratan Umum dan Formal

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, orang yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sebagai berikut:

1. Integrity;
2. Dedication;
3. Understanding on company management issues related to one of the management functions;
4. Have adequate knowledge in the business field in which the person is nominated; andcan provide sufficient time to carry out his/her duties.

Other Requirements

To be appointed as a member of the Company's Board of Commissioners, in addition to meeting the material and formal requirements, a person must also meet the following other requirements:

1. Not a political party administrator, legislative candidate, and/or legislative member of the People's Representative Council, Regional Representative Council, Provincial People's Representative Council, and Regency/City Regional People's Representative Council;
2. Not a candidate for regional head/deputy head and/or regional head/deputy head, including acting regional head/deputy head;
3. Not currently holding a position that has the potential to cause a conflict of interest with the Company concerned;
4. Not serving as a member of the Company's Board of Commissioners or the Board of Commissioners for 2 (two) periods;
5. Not currently holding a position that based on laws and regulations is prohibited from being held concurrently with the position of a member of the Board of Commissioners;
6. Physically and mentally healthy, not suffering from an illness that may hinder the implementation of duties as a member of the Board of Commissioners, as evidenced by a health certificate from a hospital;
7. Have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and have fulfilled the obligation to pay taxes for the past 2 (two) years.

Criteria for Board of Directors

General and Formal Requirements

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, persons who can be appointed as members of the Board of Directors are individuals who meet the requirements at the time of appointment and during their term of office as follows:

Kriteria persyaratan calon anggota Direksi yang terdapat pada Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Direksi PTBA, yaitu:

1. Memiliki akhlak, moral, dan integritas baik;
2. Memiliki jiwa kepemimpinan dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan;
3. Cakap melakukan perbuatan hukum;
4. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dipailitkan;
   b. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
   d. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      - Pertanggungjawaban sebagai Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai Anggota Direksi dan/ atau Anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan/atau
      - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan tahunan dan/ atau laporan keuangan kepada OJK.
5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, serta tunduk pada ketentuan dalam Kontrak Manajemen yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan, Dewan Komisaris Perusahaan, dan perwakilan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan;
7. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan Materiil

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perusahaan, seseorang harus memenuhi syarat materiil yaitu:

1. Keahlian;
2. Integritas;
3. Kepemimpinan;

The criteria for members of the Board of Directors contained in the Articles of Association and Work Guidelines for the Board of Directors of PTBA are:

1. Have good morals and integrity;
2. Have a high leadership spirit and dedication to advance and develop the Company;
3. Capable of carrying out legal actions;
4. Within 5 (five) years before appointment and during office the concerned person must:
   a. Never been bankrupted;
   b. Never been a member of the Board of Directors and/ or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a bankruptcy in the company;
   c. Never been convicted of committing a criminal act that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector;
   d. Never been a Member of the Board of Directors and/ or Member of the Board of Commissioners during their term of office:
      - Never held an annual GMS;
      - Accountability as a Member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never performed accountability as a Member of the Board of Directors and/or Member of the Board of Commissioners to the GMS; and/or
      - Has ever caused a company that obtained a permit, approval or registration from the OJK to fail to fulfill its obligation to submit annual reports and/or financial reports to the OJK.
5. Is committed to comply with statutory regulations, and comply with the provisions in the Management Contract signed by the Company's Directors, the Company's Board of Commissioners, and representatives of the Series A Dwiwarna Shareholders;
6. Have knowledge and/or expertise in the field required by the Company;
7. Fulfill other requirements as stipulated in the Company's Articles of Association and other requirements determined by Series A Dwiwarna shareholders or their proxies as long as they do not conflict with applicable laws and regulations.

Material Requirements

To be appointed as a member of the Company's Board of Directors, a person must meet the following material requirements:

1. Expertise;
2. Integrity;
3. Leadership;

4. Pengalaman;
5. Jujur;
6. Perilaku yang baik; dan
7. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

Persyaratan Lain

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perusahaan, selain memenuhi syarat materiil dan formal, seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:

1. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah;
3. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
4. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada kementerian/lembaga, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya;
5. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
6. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
7. Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
8. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Mekanisme Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, prosedur nominasi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang untuk mengusulkan

4. Experience;
5. Honesty;
6. Good behavior; and
7. High dedication to advancing and developing the company.

Other Requirements

To be appointed as a member of the Company's Board of Directors, in addition to meeting the material and formal requirements, a person must also meet the following other requirements:

1. Not an administrator of a political party, a candidate for legislative member, and/or legislative member in the People's Representative Council, Regional Representative Council, Provincial People's Representative Council, and Regency/City People's Representative Council;
2. Not a candidate for regional head/deputy head and/or regional head/deputy head, including acting regional head/deputy head;
3. Not serving as a member of the Company's Board of Directors for 2 (two) terms;
4. Not currently serving as an official in a ministry/institution, member of the Board of Commissioners/Supervisory Board of another SOEs, member of the Board of Directors of another SOEs, member of the Board of Directors of a Subsidiary and/or other business entity;
5. Not currently holding a position that based on laws and regulations is prohibited from being held concurrently with the position of member of the Board of Directors;
6. Has dedication and provides full time to carry out his/her duties, as stated in a statement letter from the person concerned;
7. Physically and mentally healthy, namely not currently suffering from an illness that could hinder the implementation of duties as a member of the Board of Directors, as evidenced by a health certificate from a hospital; and
8. Has a Taxpayer Identification Number (NPWP) and has fulfilled the obligation to pay taxes for the past 2 (two) years.

Nomination Mechanism for Board of Directors and Commissioners

In accordance with the provisions and Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, the nomination procedure for candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

1. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee is authorized to propose candidates for members of the Board of

calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan.

2. Untuk calon anggota Direksi, proses nominasi yang dilakukan oleh untuk calon yang berasal dari internal Perusahaan, yaitu:
   a. Anggota Direksi Perusahaan yang akan berakhir masa jabatannya namun dapat diangkat kembali.
   b. Pegawai yang jabatannya 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
   c. Direksi atau pegawai 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Anak Perusahaan/perusahaan patungan yang berkontribusi signifikan dan/atau bernilai strategis bagi perusahaan.

4. Untuk calon anggota Dewan Komisaris, proses nominasinya berasal dari anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang akan berakhir masa jabatannya namun dapat diangkat kembali.
5. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pembahasan untuk melakukan validasi dan kalibrasi atas talenta terseleksi (*selected talent*), untuk menghasilkan daftar talenta ternominasi (*nominated talent*) yang dinominasikan dan selanjutnya menyampaikan kepada Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi mamastikan bahwa kandidat (*nominated talent*) memiliki kualitas yang sejalan dengan arahan strategis dari Perusahaan.
6. Dewan Komisaris Perusahaan menyampaikan nama calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris terseleksi yang akan diusulkan oleh kepada pemegang saham seri A Dwiwarna/PT Mineral Industri Indonesia (Persero) yang selanjutnya akan ditetapkan pengangkatannya pada RUPS Perusahaan.

7. Dalam penjaringan talenta eksternal, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat melakukan mekanisme di antaranya dengan melalui referensi dari pihak ketiga dan jika diperlukan oleh pencari bakat (*head hunter*) yang terdaftar/ditentukan oleh Kementerian BUMN, di antaranya PT Daya Dimensi Indonesia (PT DDI).
8. Dalam pemilihan calon Direksi Perusahaan, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Dewan Komisaris dapat mempertimbangkan hasil penilaian yang dilakukan oleh pihak independen.

9. Selain itu, dalam menyiapkan kandidat atau suksesor Direksi Perusahaan, dilakukan berbagai pengembangan talenta Perusahaan khususnya BOD-1, BOD-2 dan *Talent* Perempuan serta *Millennial Talent* untuk meningkatkan tingkat kesiapan serta dipersiapkan menjadi *Nominated Talent* Perusahaan, di antaranya melalui program yang tergabung pada MIND ID maupun yang dilakukan oleh PTBA seperti:
   a. Program TOP GUN KBUMN adalah program pelatihan kepemimpinan dan pemahaman strategis bagi *Top Talent* tingkat eksekutif BUMN, yang diproyeksikan untuk menduduki posisi strategis

Directors and/or Board of Commissioners of the Company.

2. For candidates for members of the Board of Directors, the nomination process is carried out by for candidates who come from within the Company, namely:
   a. Members of the Company's Board of Directors whose term of office will end but can be reappointed.
   b. Employees whose positions are 1 (one) level below the Board of Directors.
   c. cDirectors or employees 1 (one) level below the Board of Directors in Subsidiaries/joint ventures who contribute significantly and/or have strategic value to the company.
4. For candidates for members of the Board of Commissioners, the nomination process comes from members of the Company's Board of Commissioners whose term of office will end but can be reappointed.
5. The Nomination and Remuneration Committee conducts discussions to validate and calibrate selected talents, to produce a list of nominated talents who are nominated and then submit to the Board of Commissioners. The Nomination and Remuneration Committee ensures that candidates (nominated talents) have qualities in accordance to the Company's strategic direction.

6. The Company's Board of Commissioners submits the names of selected candidates for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who will be proposed by the shareholders of Series A Dwiwarna/PT Mineral Industri Indonesia (Persero) whose appointment will then be determined at the Company's GMS.
7. In recruiting external talent, the Nomination and Remuneration Committee can carry out mechanisms including through references from third parties and if necessary by head hunters registered/determined by the Ministry of State-Owned Enterprises, including PT Daya Dimensi Indonesia (PT DDI).
8. In selecting candidates for the Company's Board of Directors, the Nomination and Remuneration Committee and the Board of Commissioners can consider the results of assessments conducted by independent parties.
9. In addition, in preparing candidates or successors to the Company's Board of Directors, various Company talent developments are carried out, especially BOD-1, BOD-2, and Female Talent and Millennial Talent to increase the level of readiness and be prepared to become the Company's Nominated Talent, including through programs that are part of MIND ID as a holding such as:
   a. The TOP GUN KBUMN program is a leadership and strategic understanding training program for Top Talent at the SOEs/BUMN executive level, who are projected to occupy strategic positions in

di BUMN Grup. Program ini diselenggarakan oleh BUMN School of Excellence (BSE) bekerja sama dengan Institute of Management Development (IMD).

b. Senior Leader Development Program MIND ID (SLDP MIND ID) merupakan program pengembangan yang diinisiasi oleh MIND ID selaku induk holding, program SLDP bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas *leadership* untuk BOD-1 di MIND ID Grup. Program SLDP MIND ID juga berkolaborasi dengan institusi global terkemuka, sehingga para peserta bisa mendapatkan akses ke tren industri terbaru, *best practices,* serta *networking* dengan pemimpin bisnis lainnya.

c. MIND ID Xcellence Program merupakan program pengembangan yang dirancang untuk para BOD-1 agar dapat mengasah kompetensi teknikal sebagai seorang pemimpin. Program ini berfokus pada pengembangan kemampuan perencanaan dan pengelolaan proyek serta pemahaman terhadap tren bisnis komoditas.

d. PTBA *Directorship* diberikan untuk BOD-1 yang bertujuan memberikan peningkatan pengetahuan untuk menduduki posisi strategis di Anak dan Afiliasi PTBA. Program ini bertujuan untuk membekali BOD-1 dengan kompetensi yang terkait dengan ESG, manajemen risiko, pemahaman aspek keuangan dan pengambilan keputusan berbasis data.

e. Learning Acceleration Program for Executive (LEAP) bertujuan untuk mempersiapkan BOD-1 untuk dapat bersaing mengisi posisi strategis di Lingkungan BUMN Grup. Pelatihan ini fokus pada peningkatan kompetensi kepemimpinan BUMN. Selain itu juga untuk meningkatkan pengetahuan seputar global *business trend,* pengelolaan keuangan, Manajemen SDM, *Operational Excellence* dan *Digital Innovation* kemampuan tersebut diharapkan untuk dapat membantu BOD-1 menyukseskan transformasi bisnis perusahaan.

Berikut merupakan alur singkat nominasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan.

the SOEs Group. This program is organized by the BUMN School of Excellence (BSE) in collaboration with the Institute of Management Development (IMD).

b. The Senior Leader Development Program MIND ID (SLDP MIND ID) is a development program initiated by MIND ID as the parent holding, the SLDP program aims to improve leadership capabilities for BOD-1 in the MIND ID Group. The SLDP MIND ID program also collaborates with leading global institutions to accommodate participants gaining access to the latest industry trends, best practices, and networking with other business leaders.

c. The MIND ID Xcellence Program is a development program designed for BOD-1 to hone their technical competencies as a leader. This program focuses on developing project planning and management capabilities as well as understanding commodity business trends.

d. PTBA Directorship is given to BOD-1 which aims to provide knowledge enrichment to occupy strategic positions in PTBA's Subsidiaries and Affiliates. This program aims to equip BOD-1 with competencies related to ESG, risk management, understanding of financial aspects and data-based decision making.

e. Learning Acceleration Program for Executive (LEAP) aims to prepare BOD-1 to be able to compete to fill strategic positions in the SOEs Group Environment. This training focuses on improving SOEs leadership competencies. In addition, to improve knowledge about global business trends, financial management, HR Management, Operational Excellence and Digital Innovation, these capabilities are expected to help BOD-1 succeed in the company's business transformation.

The following is a brief flow of nominations for the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.



Calon Anggota Direksi/ Dewan Komisaris
Perspective member of Board of Directors and Commissioners
- Memenuhi Kriteria Direksi
- Memenuhi Dewan Komisaris
- Fullfilling Directors Criteria
- Fullfilling Commissioners criteria

Komisaris Nominasi dan Remunerasi
Nomination and remunation Commissioners
- Pembahasan
- Penilaian
- Discussion
- Assessment

Dewan Komisaris
Board of Commissioners
- Persetujuan
- Pengusulan
- Approval
- Proposal

RUPS
GMS

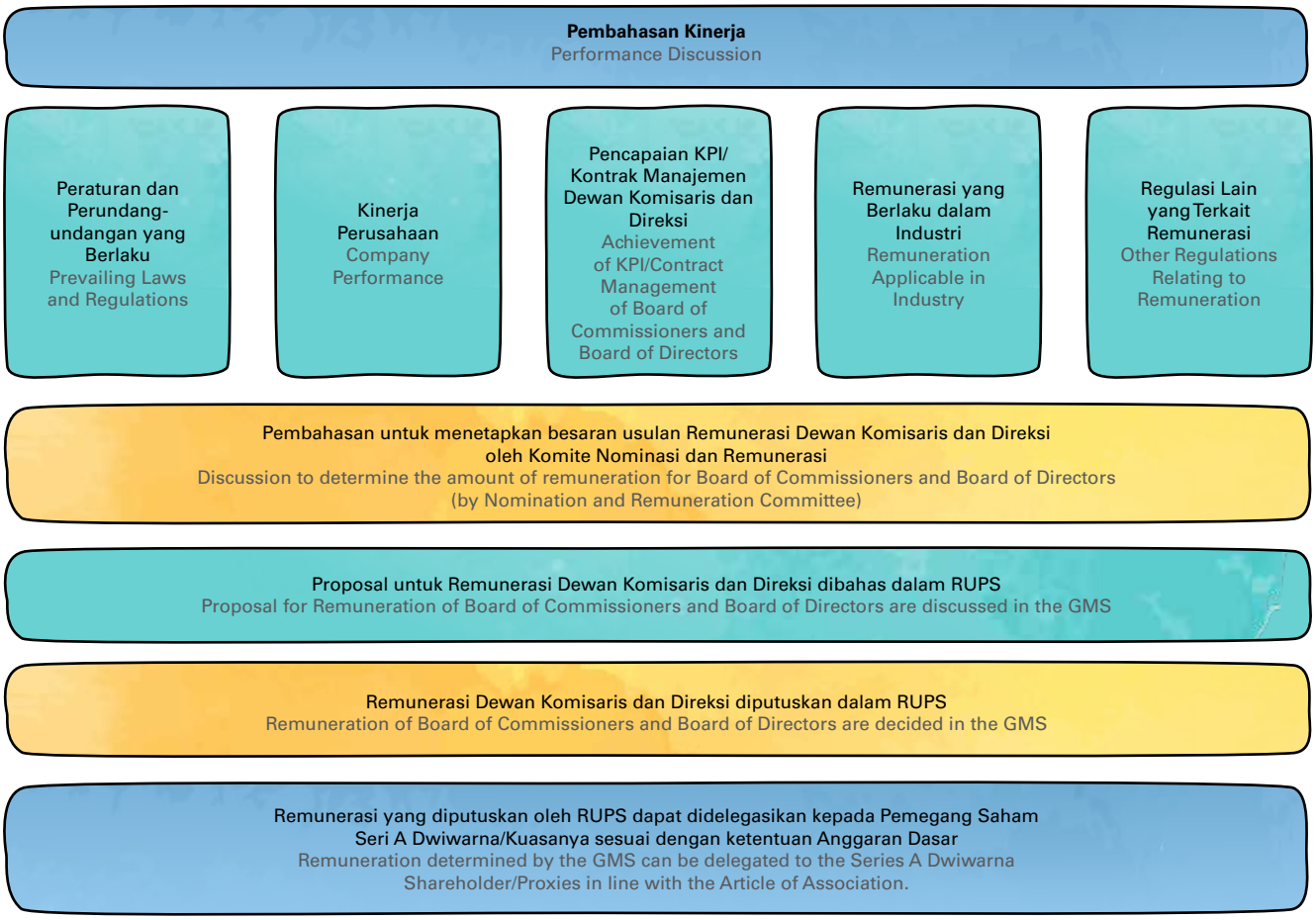
Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Prosedur Penetapan Remunerasi

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Terkait penetapannya, dilakukan dengan mengacu pada hasil RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pendalaman oleh Pemegang Saham. Keputusan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS Tahunan.

Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners Remuneration Determination Procedure

The procedure to determine the remuneration of the Board of Commissioners and Directors is based on Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on March 3, 2023, concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The determination refers to the results of the GMS by considering the results of studies carried out by the Board of Commissioners through in-depth research by Shareholders. Decisions on determining the remuneration of the Board of Commissioners and Directors are agreed upon the Annual GMS.

Bagan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Chart of Procedures for Determining Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors



Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Indicators to Determine the Remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors

The preparation of the structure, policies, and amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out by considering the following matters:

1. Kinerja Perusahaan;
2. Prestasi kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Remunerasi yang berlaku dalam industri sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan yang mempunyai jenis dan skala usaha yang sama dengan Perusahaan;
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-306/MBU/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) Pada Badan Usaha Milik Negara Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-306/MBU/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) Pada Badan Usaha Milik Negara. Dalam Peraturan tersebut diatur bahwa besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yang diterima dihubungkan dengan pencapaian pada aspek ekonomi, sosial, *governance* dan komersial.

Hasil kajian disampaikan oleh Dewan Komisaris sebagai bahan usulan penetapan remunerasi kepada Pemegang Saham, berdasarkan aturan remunerasi yang berlaku di Kementerian BUMN.

Indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2024, diberikan berdasarkan pencapaian kinerja Perusahaan pada tahun buku 2023 sebagaimana tertuang dalam Laporan Keuangan Audit serta penilaian KPI tahun 2023, yang merupakan bahan pertimbangan dalam menetapkan tantiem dan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Struktur Remunerasi

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 8 Mei 2024, pada mata acara ke-3 (ketiga) RUPS memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
   a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
   b. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024.

1. Company performance;
2. Work performance of the Board of Commissioners and Board of Directors;
3. Remuneration applicable in the industry in accordance with the business activities of the Company with the same type and scale of business as the Company;
4. The applicable laws and regulations include the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-306/MBU/11/2023 concerning Technical Instructions for the Preparation of Key Performance Indicators in State-Owned Enterprises Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-306/MBU/11/2023 concerning Technical Instructions for the Preparation of Key Performance Indicators in State-Owned Enterprises. The Regulation stipulates the amount of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners received is linked to achievements in economic, social, governance, and commercial aspects.

The results of the study are submitted by the Board of Commissioners as material for proposals to determine remuneration to Shareholders, based on the remuneration regulations at the SOEs Ministry.

Indicators for determining the remuneration of the Board of Commissioners and Directors for 2024 are given based on the Company's performance achievements in the 2023 financial year as stated in the Audit Financial Report and the 2023 KPI assessment, which as well as a consideration in determining bonuses and remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors.

Remuneration Structure

Based on the decision of the Annual GMS held on May 8, 2024, on the 3rd (third) agenda item of the GMS decided:

1. Granting authority and power to PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the Company's Most Series B Shareholder by first consulting with the Series A Dwiwarna Shareholder to determine for the Members of the Board of Commissioners:
   a. Bonus/Performance Incentive/Special Incentive for the 2023 Financial Year performance and/or Long-Term Incentive for the 2024-2026 Period, in accordance with applicable provisions; and
   b. Honorarium, allowances, and facilities for the 2024 financial year.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi:
   a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode 2024 - 2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
   b. Gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024.

   Selanjutnya berdasarkan Surat Dewan Komisaris PTBA No. 64/DEKOM/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 Perihal Penetapan Tantiem Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") serta Pembayaran Tahap I Tantiem Tahun Buku 2022 yang Ditangguhkan dan Surat Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. 371/E.DIRPPU/IX/2024 tanggal 19 September 2024 Perihal Penetapan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Penghasilan Tahun 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk ("PTBA"), maka susunan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PTBA adalah sebagai berikut:

2. Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners by first obtaining written approval from PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the Company's Most Series B Shareholder after consulting with the Series A Dwiwarna Shareholder to determine for the Members of the Board of Directors:
   a. Bonus/Performance Incentive/Special Incentive for the 2023 Financial Year and/or Long-Term Incentive for the 2024-2026 Period, in accordance with applicable provisions; and
   b. Salary, allowances, and facilities for the 2024 financial year.

   Furthermore, based on the Letter of the Board of Commissioners of PTBA No. 64/DEKOM/X/2024 dated October 8, 2024, Regarding the Determination of Tantiem for the 2024 Financial Year for the Directors and Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") and the Payment of Phase I of Tantiem for the 2022 Financial Year which was Deferred and the Letter of the Director of Portfolio and Business Development of PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the Attorney of the Series A Dwiwarna Shareholder No. 371/E.DIRPPU/IX/2024 dated September 19, 2024, Regarding the Determination of Bonus for the 2023 Financial Year and Income for 2024 for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk ("PTBA"), the remuneration structure for the Board of Directors and Board of Commissioners of PTBA is as follows:

No.	Jenis Penghasilan Type of Income	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors
	Honorarium dengan pengaturan: 1. Komisaris Utama sebesar 45% gaji Direktur Utama. 2. Komisaris sebesar 90% gaji/honorarium Komisaris Utama. Honorarium with arrangements: 1. President Commissioner: 45% of salary/honorarium of President Director. 2. Commissioner: 90% salary/honorarium of President Commissioner	Gaji dengan pengaturan: 1. Direktur Utama sebesar 100%. 2. Direktur lainnya sebesar 85% dari gaji/honorarium Presiden Direktur. Salary with arrangements: 1. President Director at 100%. 2. Directors at 85% of salary/honorarium president director
	Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali honorarium. Religious holiday allowance of 1 (one) time honorarium.	Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali gaji. Religious holiday allowance of 1 (one) time salary.
	Asuransi Purna Jabatan dengan premi sebesar maksimal 25% gaji/honorarium per tahun. Post-employment insurance with a maximum premium of 25% honorarium per year.	Asuransi Purna Jabatan dengan premi sebesar maksimal 25% gaji/honorarium per tahun. Post-employment insurance with a maximum premium of 25% salary/honorarium per year.
	Tidak Ada Tunjangan Perumahan No housing allowance	Tunjangan Perumahan Rp22.500.000 per bulan. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 apabila Direksi masih mendapatkan fasilitas rumah dinas dapat tetap mengunakan fasilitas tersebut paling lambat 31 Desember 2023. Housing Allowance of Rp22,500,000 per month. In accordance with SOEs Ministerial Regulation Number PER-03/MBU/03/2023, if the Directors still using official housing facilities, they can continue to use the facility no later than December 31, 2023.

No.	Jenis Penghasilan Type of Income	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors
	Tunjangan Transportasi 20%/honorarium per tahun Transportation Allowance: 20%/honorarium per month	Fasilitas kendaraan sebanyak 1 (satu) unit. dengan spesfikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 3.500 cc untuk kendaraan berbahan bakar minyak atau batas maksimal 100 kWh untuk kendaraan bermotor listrik berbasi baterai (battery electric vehicle). Vehicle facilities of 1 (one) unit with vehicle specifications and types regulated by the Board of Commissioners with a maximum limit of 3,500 cc for fuel-based vehicles or a maximum limit of 100 kWh for battery electric vehicles.
	Fasilitas kesehatan berupa asuransi kesehatan atau pengganti biaya pengobatan sesuai dengan pemakaian (at cost). Health facilities in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost).	Fasilitas kesehatan berupa asuransi kesehatan atau pengganti biaya pengobatan sesuai dengan pemakaian (at cost). Health facilities in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost).
	Pemberian fasilitas bantuan hukum sebesar pemakaian (at cost). Providing legal aid facilities in the amount of usage (at cost)	Pemberian fasilitas bantuan hukum sebesar pemakaian (at cost). Providing legal aid facilities in the amount of usage (at cost)
	Komposisi besarnya tantiem sesuai dengan keputusan RUPS yang didelegasikan kepada Dewan Komisaris. The composition of the amount of the bonus is according to the GMS resolution delegated to the Board of Commissioners.	Komposisi besarnya tantiem sesuai dengan keputusan RUPS yang didelegasikan kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) sebagai kuasa pemegang saham seri A Dwiwarna. The amount of the bonus composition is according to the resolution delegated to PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) as the proxy for Series A Dwiwarna shareholder.

Kebijakan Tantiem/Insentif Kinerja yang Ditangguhkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris

PTBA telah melakukan ratifikasi Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 di tanggal 15 Juni 2023, berdasarkan ketentuan peraturan tersebut terdapat mekanisme pembayaran tantiem/insentif kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditangguhkan yang berlaku juga bagi Direksi dan Dewan Komisaris PTBA.

Ketentuan Tantiem/Insentif Kinerja yang Ditangguhkan

1. PTBA menangguhkan pembayaran Tantiem dan Insentif Kinerja kepada Direksi dan Dewan Komisaris PTBA sebesar persentase tertentu yang ditentukan oleh Menteri/MIND ID, paling rendah 10% (sepuluh persen).
2. Jangka waktu penangguhan pembayaran yang ditangguhkan paling singkat 3 (tiga) tahun. Pembayaran Tantiem dan Insentif Kinerja yang ditangguhkan harus diberikan secara prorata sesuai dengan jangka waktu di atas.
3. PTBA dapat menunda pembayaran sebagian atau seluruh Tantiem dan Insentif Kinerja yang ditangguhkan (*malus*) atau menarik kembali Tantiem dan Insentif Kinerja tunai yang sudah dibayarkan

Deferred Bonus/Performance Incentive Policy for Directors and Board of Commissioners

PTBA has ratified the Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises at the Annual GMS for the 2022 Financial Year on June 15, 2023, based on the provisions of the regulation there is a mechanism for payment of deferred bonus/performance incentives for members of the Board of Directors and Board of Commissioners which also applies to the Board of Directors and Board of Commissioners of PTBA.

Provisions for Deferred Bonus/Performance Incentives

1. PTBA suspends the payment of Bonus and Performance Incentives to the Board of Directors and Board of Commissioners of PTBA by a certain percentage determined by the Minister/MIND ID, at least 10% (ten percent).
2. The period of suspension of the deferred payment is at least 3 (three) years. The payment of deferred Bonus and Performance Incentives must be given pro rata according to the period above.
3. PTBA may postpone payment of some or all of the deferred Bonus and Performance Incentives (malus) or withdraw the cash Bonus and Performance Incentives that have been paid (clawback) to the Board of

(*clawback*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh organ perusahaan.
4. Persetujuan penarikan kembali Tantiem dan Insentif Kinerja tunai yang sudah dibayarkan (
5.) dituangkan dalam suatu perjanjian antara pihak yang diberikan kuasa oleh Menteri BUMN (MIND ID) dengan anggota Direksi atau Dewan Komisaris PTBA.

Penyesuaian Pembayaran Tantiem/Insentif Kinerja yang Ditangguhkan

PTBA dapat melakukan penyesuaian tantiem/insentif kinerja yang ditangguhkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris PTBA dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:
1. Terbukti secara hukum terdapat penyalahgunaan jabatan dan/atau wewenang dan/atau melakukan tindak pidana oleh Penerima Tantiem/IK yang ditangguhkan, yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Perusahaan.
2. Restatement laporan keuangan Perusahaan yang menjadi dasar penetapan pemberian Tantiem/IK.
3. Peringkat risiko pada Triwulan terakhir sebelum waktu pelaksanaan Tantiem/IK yang ditangguhkan adalah peringkat 4 (*Moderate to High*) atau lebih buruk atau pengaturan lain yang diatur Kementerian BUMN.
4. RUPS Tahunan memutuskan menolak pertanggungjawaban Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang diputuskan dalam RUPS Tahunan.
5. Pertimbangan lain yang dipandang penting oleh RUPS.

Pada tahun 2024, sesuai dengan ketentuan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan MIND ID, 21% dari masing-masing tantiem anggota Direksi dan Dewan Komisaris PTBA ditangguhkan oleh Perusahaan.

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi

Besaran remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2024 sebagai berikut:

Directors and Board of Commissioners under certain conditions determined by the company's organs.

4. Approval of the withdrawal of cash Bonus and Performance Incentives that have been paid (clawback) is stated in an agreement between the party authorized by the Minister of SOEs (MIND ID) with members of the Board of Directors or Board of Commissioners of PTBA.

Adjustment of Payment of Deferred Bonus/ Performance Incentives

PTBA may make adjustments to the deferred bonus/ performance incentives to the Board of Directors and Board of Commissioners of PTBA in the event of the following conditions:
1. It is legally proven that there has been abuse of office and/or authority and/or a criminal act by the Recipient of the deferred Bonus /IK, which has resulted in losses for the Company.
2. Restatement of the Company's financial report which is the basis for determining the provision of Bonus /IK.
3. The risk rating in the last Quarter before the implementation of the suspended Bonus/IK is a rating of 4 (Moderate to High) or worse or other arrangements regulated by the Ministry of SOEs.
4. The Annual GMS decides to reject the accountability of the Board of Directors and/or Board of Commissioners for the Company's performance for the financial year decided in the Annual GMS.
5. Other considerations deemed important by the GMS.

In 2024, in accordance with the provisions stipulated by the Board of Commissioners and MIND ID, 21% of each bonus of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PTBA is suspended by the Company.

Nominal Amount/Component of Remuneration

The amount of remuneration received by the Board of Commissioners and Board of Directors in the 2024 is as follows:

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Honorarium	Tunjangan Incentive	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tantiem atas Tahun Buku 2023 2023 Fiscal Year Bonus	Jumlah Total
Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner	1.496.178.000	299.235.600	124.681.500	4.202.550.938	6.122.646.038
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	1.346.560.200	269.312.040	112.213.350	3.985.776.135	5.713.861.725
E. Piterdono HZ	Komisaris Commissioner	1.346.560.200	269.312.040	112.213.350	3.985.776.135	5.713.861.725

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Honorarium	Tunjangan Incentive	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tantiem atas Tahun Buku 2023 2023 Fiscal Year Bonus	Jumlah Total
Carlo Brix Tewu	Komisaris Commissioner	1.346.560.200	269.312.040	112.213.350	3.985.776.135	5.713.861.725
Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner	1.346.560.200	269.312.040	112.213.350	2.376.223.225	4.104.308.815
Rahmat Hidayat Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner	1.346.560.200	269.312.040	112.213.350	2.376.223.225	4.104.308.815
Agus Suhartono*	Komisaris Utama/ Independen President Commissioner/ Independent	-	-	-	1.559.374.014	1.559.374.014
Devi Pradnya Paramita*	Komisaris Commissioner	-	-	-	1.195.884.424	1.195.884.424

*Tantiem diberikan secara proporsional atas kinerja tahun buku 2023, mengingat yang bersangkutan masih menjabat pada tahun 2023
*Bonus is given proportionally based on performance in the 2023 financial year, considering that the person concerned was still in office in 2023.

Direksi
Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Gaji Salary	Tunjangan Incentive	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tantiem atas Tahun Buku 2023 2023 Fiscal Year Bonus	Jumlah Total
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	3.252.210.000	270.000.000	277.070.000	9.841.422.556	13.640.702.556
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Development Director	2.826.114.000	270.000.000	235.509.500	8.365.209.173	11.696.832.673
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operations and Production Director	2.826.114.000	270.000.000	235.509.500	8.365.209.173	11.696.832.673
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Management Director	2.826.114.000	270.000.000	235.509.500	8.365.209.173	11.696.832.673
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	2.826.114.000	270.000.000	235.509.500	8.365.209.173	11.696.832.673

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024
Total Remuneration for Board of Commissioners

Uraian Description	Jumlah (Rp)
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris The Amount of Remuneration for Board of Commissioners	34.228.107.281
Jumlah Remunerasi Direksi The Amount of Remuneration for Board of Directors	60.428.033.248

Informasi Mengenai Rasio Gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perusahaan
Information on the Salary Ratio of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees

Perihal Description	2024	2023	2022
Direktur Utama terhadap Direktur President Director to Directors	1:1	1 : 1	1 : 2
Komisaris Utama terhadap Anggota Dewan Komisaris President Commissioner to the Board of Commissioners	1:1	1 : 1	1 : 1
Direktur Utama terhadap Komisaris Utama President Director to President Commissioner	1:0,45	1 : 0,4	1 : 2
Direktur Utama terhadap Karyawan tertinggi President Director to the Highest Employee	1:0,155	1 : 0,231	1 : 0,968
Direktur Utama terhadap Karyawan terendah Full Year President Director to the Lowest Full Year Employee	1:0,004	1 : 0,01	1 : 0,028
Direktur Utama terhadap Karyawan terendah President Director to the Lowest Employee	1:0,001	1 : 0,001	1 : 0,002
Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah Full Year President Director to the Lowest Full Year Employee	1:0,03	1 : 0,042	1 : 0,029
Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah Highest Employee to the Lowest Employee	1:0,003	1 : 0,004	1 : 0,002
Karyawan Terendah Full Year terhadap UMP Lowest Full Year Employee to the Provincial Minimum Wage	1:1	1 : 0,271	1 : 0,348
Karyawan Terendah terhadap UMP Lowest Employee to the Provincial Minimum Wage	1:6	1 : 3	1 : 6

Yang dimaksud karyawan tertinggi pada tabel di atas adalah karyawan dengan jumlah penghasilan tertinggi selama satu tahun buku, sementara karyawan terendah full year adalah karyawan dengan penghasilan terendah selama satu tahun buku yang masa kerjanya selama 12 bulan, dan karyawan terendah adalah karyawan dengan penghasilan terendah selama satu tahun buku yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan.

The highest employee in the table above is the employee with the highest income during one fiscal year, while the lowest full year employee is the employee with the lowest income during one fiscal year whose work period is 12 months, and the lowest employee is the employee with the lowest income during one fiscal year whose work period is less than 12 months.

Hubungan Afiliasi antara Direksi dan Dewan Komisaris

Affiliations among the Board of Directors and Board of Commissioners

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dilarang untuk memiliki hubungan afiliasi antar anggota Dewan Komisaris, antar anggota Direksi, atau Direksi dengan Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya benturan kepentingan sehingga Dewan Komisaris maupun Direksi akan sanggup mengambil keputusan tanpa merugikan Perusahaan.

The Company's Board of Commissioners and the Board of Directors are prohibited from having affiliated relationships between members of the Board of Commissioners, between members of the Board of Directors, or between the Board of Directors and the Board of Commissioners, or with Shareholders as stipulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This aims to avoid conflicts of interest so that the Board of Commissioners and the Board of Directors will be able to make decisions without harming the Company.

Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Utama/Pengendali dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Family relationships of members of the Board of Commissioners with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors and Major/Controlling Shareholders can be seen in the table below:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Hubungan Afiliasi** Affiliation					
		Dewan Komisaris The Board of Commissioners		**Direksi** The Board of Directors		**Pemegang Saham Utama/ Pengendali** Main/Controlling Shareholder	
		Ya Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No
Dewan Komisaris The Board of Commissioners							
Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓
E. Piterdono HZ	Komisaris Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓
Carlo Brix Tewu	Komisaris Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓
Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓
Rahmat Hidayat Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	✓	-	✓	-	✓
Direksi The Board of Directors							
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	-	✓	-	✓	-	✓
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	-	✓	-	✓	-	✓
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operations and Production Director	-	✓	-	✓	-	✓
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	-	✓	-	✓	-	✓
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	-	✓	-	✓	-	✓

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

The Board of Commissioners and The Board of Directors Composition Diversity

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang menyatakan bahwa komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ maupun secara individu masing-masing. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dan pengurusan oleh Direksi.

Based on the recommendation from the Financial Services Authority as outlined in the Appendix to Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance, the composition of members of Board of Commissioners and Board of Directors is a combination of characteristics both in terms of organs and individually respectively. These characteristics can be reflected in the determination of expertise, knowledge, and experience required in carrying out supervisory and advisory duties by Board of Commissioners and management by Board of Directors.

Komposisi keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki oleh Perusahaan terdiri dari anggota yang memiliki latar belakang berbeda mulai dari pendidikan/ bidang keilmuan, kompetensi, keahlian, gender, usia dan pengalaman kerja. Keberagaman komposisi tersebut dianggap perlu oleh Perusahaan ketika proses pengambilan sebuah keputusan yang lebih objektif dan komprehensif dan dapat memberikan alternatif pemecahan masalah.

The composition of Board of Commissioners and Board of Directors owned by the Company consists of members who have different backgrounds ranging from education/ scientific fields, competencies, expertise, gender, age, and work experience. The Company's diversity of composition is needed to create a more objective and comprehensive decision-making process. It is also expected to provide alternative solutions.

Keberagaman komposisi yang dimiliki oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi PTBA yang menjabat di tahun 2024, disampaikan pada tabel berikut.

The following is the diversity of composition by each member of PTBA's Board of Commissioners and Board of Directors in 2024.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024
Tabel of Board of Commissioners and Board of Directors Diversity in 2024

No	Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Sex	Pendidikan Education	Pengalaman Experience
1	Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner	72	Pria Male	1. S3, Ecole des Mines de Nancy, Perancis (1991) 2. S2, Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (1985) 3. S1, Teknik Pertambangan di Institut Teknologi Bandung (1976) 1. Doctorate at the Ecoles des Mines de Nancy, France (1991) 2. Master of Industrial Engineering at Bandung Institute of Technology (1985) 3. Bachelor Degree in Mining at Bandung Institute of Technology (1976)	1. Komisaris Independen PT Vale Indonesia Tbk (2018) 2. Advisor Tambang Bawah Tanah PT Cibaliung Sumber Daya Mineral (2011) 3. Komisaris Independen PT Antam Tbk (2009) 4. Independent Commissioner at PT Vale Indonesia Tbk (2018) 1. Underground Mining Advisor at PT Cibaliung Sumber Daya Mineral (2011) 2. Independent Commissioner at PT Antam Tbk (2009) 3. Independent Commissioner at PT Vale Indonesia Tbk (2018)

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024
Tabel of Board of Commissioners and Board of Directors Diversity in 2024

No	Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Sex	Pendidikan Education	Pengalaman Experience
2	Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	61	Pria Male	1. Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) (2008) 2. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) (1998) 3. Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (Sekkau) (1993) 4. Indonesian Air Force Academy (1985) 1. Army Forces Staff and Command School (2008) 2. Air Forces Staff and Command School (1998) 3. Air Force Unit Command School (1993) 4. Indonesian Air Force Academy (1985)	1. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan BIN (2017-2020) 2. Expert Staff for Defense and Security of BIN (2017-2020) 3. Kepala Biro Pengamanan Sekretariat Militer Presiden (2014-2017) 1. Kepala Biro Personel TNI dan Polri Sekretariat Militer Presiden (2012-2014) 2. Head of Security Bureau of the Presidential Military Secretariat (2014-2017) 3. Head of the Indonesian Armed Forces and Police Personnel Bureau, Presidential Military Secretariat (2012-2014)
3	E. Piterdono HZ	Komisaris Commissioner	63	Pria Male	1. S2, Magister Manajemen di Universitas Bandar Lampung (2001) 2. S1, Ekonomi Manajemen di Universitas Saburai Lampung (2001) 3. S1, Teknik Geologi di UPN Veteran Yogyakarta (1986) 1. Master Degree of Bandar Lampung University (2001) 2. Bachelor Degree in Economy Management of Saburai Lampung University (2001) 3. Bachelor Degree in Geological Engineering of UPN Veteran Yogyakarta (1986)	1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (2017-2020) 2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi 3. Lampung (2014) 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung (2012) 1. Head of Lampung Province Regional Revenue Agency (2017-2020) 2. Head of Lampung Province Mining and Energy Service (2014) 3. Head of Lampung Province Manpower and Transmigration Service (2012)
4	Carlo Brix Tewu	Komisaris Commissioner	61	Pria Male	1. Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi Polri (2008) 2. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (2005) 3. Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (1998) 4. Akademi Kepolisian (1994) 1. Police Staff and High-Level Leadership School of National Police of the Republic of Indonesia (2008) 2. National Defense Institute of the Republic of Indonesia (2005) 3. Police Staff and Leadership School (1998) 4. Police Academy (1994)	1. Tenaga Ahli Menteri BUMN bidang Mediasi (2023-2024) 2. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN (2020-2023) 3. Deputi Bidang Koordinasi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (2016) 4. Pjs. Gubernur Sulawesi Barat (2016) 5. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri (2015) 1. Expert Staff of the Minister of SOEs in Mediation (2023-2024) 2. Deputy for Law and Legislation, Ministry of SOEs (2020-Present) 3. Deputy for Coordination of Security and Public Order at the Coordinating Ministry for Politics, Legal, and Security Affairs (2016) 4. West Sulawesi Acting Governor (2016) 5. Director of Criminal Acts for Criminal Investigation of National Police of the Republic of Indonesia (2015)

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024
Tabel of Board of Commissioners and Board of Directors Diversity in 2024

No	Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Sex	Pendidikan Education	Pengalaman Experience
5	Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner	62	Pria Male	1. S3, University of Washington School of Law (2007) 2. S2, University of Washington School of Law (1998) 3. S1, Hukum, Universitas Indonesia (1987) 1. Doctoral Degree from the University of Washington School of Law (2007) 2. Master Degree from the Washington School of Law (1998) 3. Bachelor Degree in Law from Universitas Indonesia (1987)	1. Kepala Pusat Hukum dan Humas Kementerian ATR/BPN (2016-2018) 2. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI (2018-2020) 1. Head of Law and Public Relations Department at the Agrarian and Spatial Planning Ministry (2016-2018) 2. Head of the Competition Supervisory Commission (KPPU) (2018-2020)
6	Rahmat Hidayat Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner	45	Pria Male	1. S3, Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2020. 2. S2, Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2016 3. S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute pada tahun 2012 4. S1, Fakultas Syariah IAIN Jakarta pada tahun 2001 1. Doctoral Degree at Jakarta State University (2020) 2. Master Degree at Jakarta State University (2016) 3. S1, Faculty of Economics and Business, Perbanas Institute in 2012 4. S1, Sharia Faculty at IAIN Jakarta in 2001	1. Komisaris PT Berdikari (2013-2015) 2. Komisaris PT Rekayasa Industri (2015-2017) 3. Komisaris Independen PT KAI (Persero) (2017-2021) 4. Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk (2021-2023) 1. Commissioner of PT Berdikari (2013-2015) 2. Commissioner of PT Rekayasa Industri (2015-2017) 3. Independent Commissioner of PT KAI (2017-2021) 4. Independent Commissioner of PT Kimia Farma Tbk (2021-2023)
7	Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	59	Pria Male	S2, Administrasi dan Kebijakan Bisnis, Universitas Indonesia (2004) Master of Business Administration and Policy, University of Indonesia (2004)	1. Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2020-2021) 2. President Director PT Nuansa Cipta Coal Investment (2016-2020) 3. President Director PT Muba Coal (2016-2020) 4. Direktur Marketing PT Bhumi Sriwijaya Perdana Coal (2015-2016) 1. Business Development Director of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2020-2021) 2. President Director of PT Nuansa Cipta Coal Investment (2016-2020) 3. President Director of PT Muba Coal (2016-2020) 4. Marketing Director of PT Bhumi Sriwijaya Perdana Coal (2015-2016)

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024
Tabel of Board of Commissioners and Board of Directors Diversity in 2024

No	Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Sex	Pendidikan Education	Pengalaman Experience
8	Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	51	Wanita Female	S1, Teknik Sipil Universitas Indonesia (1996) Bachelor of Civil Engineering, University of Indonesia (1996)	1. Group Head Corporate Solution PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-April 2021) 2. Group Head Treasury PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2019) 3. Group Head Market Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016)
9	Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operation and Production Director	60	Pria Male	S1, Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (1990) Bachelor of Geology Engineering from Gadjah Mada University (1990)	General Manajer Unit Pertambangan Tanjung Enim PT Bukit Asam Tbk (2016-2020) General Manager for Tanjung Enim Mining Unit of PT Bukit Asam Tbk (2016-2020)
10	Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	54	Pria Male	1. Master of Business Administration, George Simon Ohm – Management Institut Nurnberg, Jerman (2015) 2. S2, Manajemen di Universitas Sriwijaya (2012) 3. S1, Teknik Sipil di Universitas Andalas (1995) 1. Master of Business Administration, George Simon Ohm – Management Institut Nurnberg, Jerman (2015) 2. Master in Management of Sriwijaya University (2012) 3. Bachelor in Civil Engineering of Andalas University (1995)	1. Vice President Penanganan dan Angkutan Batu bara PT Bukit Asam Tbk (2020-2021) 2. Direktur Utama PT Bukit Prima Bahari (2019-2020) 3. Vice President Pemasaran dan Penjualan Ekspor PT Bukit Asam Tbk (2017-2019) 1. Vice President of Coal Handling and Transportation of PT Bukit Asam Tbk (2020-2021) 2. President Director of PT Bukit Prima Bahari (20192020) 3. Vice President Marketing and Export Sales of PT Bukit Asam Tbk (2017-2019)
11	Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	57	Pria Male	1. S2, Manajemen Universitas Sriwijaya (2007) 2. S1, Ekonomi Universitas Sriwijaya (1990) 1. Master in Management, Sriwijaya University (2007) 2. Bachelor in Economics, Sriwijaya University (1990)	1. Direktur Utama PT Bukit Multi Investama (2020-2021) 2. Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk (2017-2020) 3. Senior Manajer Perbendaharaan dan Anggaran PT Bukit Asam Tbk (2016-2017) 4. Senior Manajer Perbendaharaan dan Pendanaan PT Bukit Asam Tbk (2014-2016) 5. Senior Manajer Akuntansi dan Anggaran PT Bukit Asam Tbk (2009-2014) 1. President Director of PT Bukit Multi Investama (2020-2021) 2. Corporate Secretary of PT Bukit Asam Tbk (20172020) 3. Senior Manager of Treasury and Budget of PT Bukit Asam Tbk (2016-2017) 4. Senior Manager of Treasury and Funding of PT Bukit Asam Tbk (2014-2016) 5. Senior Manager of Accounting and Budgeting of PT Bukit Asam Tbk (2009-2014)

Organ Pendukung Dewan Komisaris
Supporting Organs of the Board of Commissioners

Guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung yang berada di bawahnya. Organ pendukung Dewan Komisaris PTBA, yaitu:
1. Sekretariat Dewan Komisaris;
2. Komite Audit;
3. Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi; dan
4. Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sekretariat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris membentuk Sekretariat Dewan Komisaris guna membantu kelancaran pekerjaan terkait kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris. Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Di samping tugas kesekretariatan, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat juga bertugas untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris harus memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan Dewan Komisaris tersimpan dengan baik di Perusahaan.

Kriteria

Sekretaris Dewan Komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Berasal dari luar Perusahaan;
2. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan Perusahaan;
3. Memiliki integritas yang baik;
4. Memahami fungsi kesekretariatan;
5. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

In order to support the effective implementation of supervisory duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by supporting organs, namely:

1. Secretariat of the Board of Commissioners;
2. Audit Committee;
3. Integrated Risk and Governance Monitoring Committee; and
4. Nomination and Remuneration Committee.

Secretariat of Board of Commissioners

The Board of Commissioners forms Secretariat of the Board of Commissioners to assist them in all activities related to their responsibilities. The Secretariat of the Board of Commissioners is led by a Secretary of the Board of Commissioners, who is appointed and dismissed by the Board of Commissioners. Besides secretarial duties, the Secretary of the Board of Commissioners as head of the Secretariat is also responsible to ensure that the Board of Commissioners complies with statutory regulations and applies the principles of good corporate governance in carrying out their duties. In the context of orderly administration and implementation of good corporate governance, the Secretariat of the Board of Commissioners must ensure that documents for carrying out the activities of the Board of Commissioners are stored properly in the Company.

Criteria

The Secretary to the Board of Commissioners must fulfill the following requirements:
1. Comes from outside the Company;
2. Understand the system of management, supervision, and development of the Company;
3. Have good integrity;
4. Understand secretarial functions;
5. Have the ability to communicate and coordinate well.

Term of Office

Based on the provisions of Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, the term of office of the Secretary of the Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners at 3 (three) years and can be reappointed for 2 (two) years, without reducing the rights of the Board Commissioner to dismiss the concerned person at any time.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profile of the Secretary of the Board of Commissioners



Nurul Almy Firdausi, S.E., M.M.

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

Masa Jabatan: 1 November 2023 - Sekarang
Term of Office: November 1, 2023 – present

Usia Age	39 Tahun 39 Years Old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Bogor
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 06/SK/PTBA-DEKOM/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 Board of Commissioners Decree No. 06/SK/PTBA-DEKOM/X/2023 on October 31, 2023.
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. S2, Manajemen Bisnis, Bina Nusantara Business School (2021) 2. S1, Ekonomi – Akuntansi, Universitas Indonesia (2009) 3. D3, Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2003) 1. Master of Business Management, Bina Nusantara Business School (2021) 2. Bachelor Degree in Economics – Accounting, University of Indonesia (2009) 3. Diploma of Accounting, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2003)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	1. Koordinator Bidang Jasa Pariwisata & Pendukung, Kementerian BUMN (2023 – sekarang) 2. Subkoordinator Bidang Jasa Pariwisata & Pendukung, Kementerian BUMN (2021-2023) 3. Sekretaris Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2018-2023) 4. Subkoordinator Bidang Usaha Logistik, Kawasan dan Pariwisata, Kementerian BUMN (2020-2021) 1. Coordinator of Tourism & Supporting Services, Ministry of SOEs (2023 – present) 2. Sub-coordinator of Tourism & Supporting Services, Ministry of SOEs (2021-2023) 3. Secretary of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2018-2023) 4. Sub-coordinator of Logistics, Regions and Tourism Business, Ministry of SOEs (2020-2021)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	PNS Kementerian BUMN Civil servants of the Ministry of SOEs
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or Shareholders.
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 17/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Penetapan Pedoman kerja Sekretariat Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk, berdasarkan hal tersebut tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan Sekretaris Dewan Komisaris sebagai berikut:

Duties and Responsibilities

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 17/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 dated December 31, 2023, regarding the Establishment of the Guidelines for the Secretariat of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk., the duties and responsibilities related to the Secretary of the Board of Commissioners are as follows:

Tugas Sekretariat Dewan Komisaris:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun RKA Dewan Komisaris;
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Sedangkan tugas yang menjadi tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris, yaitu:

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengkoordinasikan anggota komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan di Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Kebijakan dan Besaran Remunerasi

Penetapan remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 17/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Penetapan Pedoman kerja Sekretariat Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk, dan dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala setiap tahunnya berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas administrasi, termasuk mengkoordinasikan anggota

The Duties of the Secretariat of the Board of Commissioners include, among others:

1. Prepare meetings, including briefing sheets for the Board of Commissioners;
2. Prepare minutes of meetings of the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the company's Articles of Association;
3. Administering the Board of Commissioners documents, including incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
4. Prepare RKA for the Board of Commissioners;
5. Prepare draft reports for the Board of Commissioners;
6. Carry out other duties of the Board of Commissioners.

Meanwhile, the responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners are:

1. Ensuring the Board of Commissioners complies with statutory regulations and applies GCG principles;
2. Providing information required by the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
3. Coordinating committee members, if necessary in order to facilitate the duties of the Board of Commissioners;
4. As a liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.

Competency Development

The competency development of the Secretary of the Board of Commissioners can be seen in the Education and/or Training section in the Company Profile Chapter in this Annual Report book.

Remuneration Policy and Amount

The determination of the remuneration of the Secretary of the Board of Commissioners is regulated in the Decree of the Board of Commissioners No. 17/SK/PTBADEKOM/XII/2023 dated December 31, 2023, concerning the Determination of the Work Guidelines for the Secretariat of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk, and referring the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Performance Assessment of the Secretary of the Board of Commissioners

The performance assessment of the Secretary of the Board of Commissioners is carried out annually by the Board of Commissioners based on the realization of the implementation of the duties and responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners in carrying out

Komite dan sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Secara umum, di tahun 2024 Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, tercermin dari realisasi KPI Sekretaris Dewan Komisaris sebagaimana termuat dalam tabel berikut.

Perusahaan telah melakukan penilaian KPI Sekretaris Dewan Komisaris di tahun 2024 sebagai berikut.

administrative duties, including coordinating Committee members and as a liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.

In general, in 2024 the Secretary of the Board of Commissioners has carried out his duties and functions well, as reflected in the realization of the KPI of the Secretary of the Board of Commissioners as contained in the following table.

The Company has conducted an assessment of the KPI of the Secretary of the Board of Commissioners in 2024 as follows.

Tabel Realisasi KPI Sekretaris Dewan Komisaris
Table of KPI Realization of the Secretary of the Board of Commissione

No	Program Kerja Work Program	Uraian Description	Target	Bobot Weight	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Skor Score
Kegiatan Internal Dewan Komisaris **Internal activities of Board of Commissioners**				**20**			**21,6**
1	Menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris Conduct Board of Commissioners internal meetings	Terselenggaranya rapat internal Dekom setiap bulan The implementation of Board of Commissioners internal monthly meetings	12	12	14	110%	13,2
2	Menyelenggarakan program pengenalan dan/atau peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Organize a program to introduce and/or improve the competence of the Board of Commissioners and Supporting Organs	Keikutsertaan Dewan Komisaris dan/atau Organ Pendukung pada program pengenalan dan peningkatan kompetensi The participation of the Board of Commissioners and/or Supporting Organs in the introduction and competency improvement program	2	4	2	100%	4
3	Menyelenggarakan kunjungan kerja lapangan Conducting site visits	Terselenggarannya kunjungan lapangan ke Anak Perusahaan/Unit Usaha/Satker The implementation of site visits to subsidiaries/business units/ work units	3	4	8	110%	4,4
Kegiatan Dewan Komisaris dengan Direksi **Activities of Board of Commissioners and Board of Directors**				**36**			**36**
4	Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris – Direksi Conduct meetings between Board of Commissioners and Board of Directors	Terselenggaranya Rapat Dewan Komisaris – Direksi The implementation of meetings between Board of Commissioners and Board of Directors	12	18	12	100%	18
5	Menyusun RKA dan KPI Dewan Komisaris Preparing the RKA and KPI of the Board of Commissioners	Tersusunnya RKA dan KPI Dewan Komisaris The preparation of the RKA and KPI of the Board of Commissioners	1	18	1	100%	18
Kegiatan Dewan Komisaris dengan MIND ID **Activities between Board of Commissioners with MIND ID**				**33**			**33**
6	Menyusun laporan Kinerja Bulanan Compiling Monthly Performance Reports	Tersusunnya Laporan Kinerja Bulanan The availability of monthly performance reports	12	12	12	100%	12
7	Penyusunan laporan Progres Proyek Strategis Preparation of Strategic Project Progress Reports	Tersusunnya Laporan progres proyek strategis The availability of strategic project progress reports	12	12	12	100%	12

Tabel Realisasi KPI Sekretaris Dewan Komisaris
Table of KPI Realization of the Secretary of the Board of Commissione

No	Program Kerja Work Program	Uraian Description	Target	Bobot Weight	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Skor Score
8	Menyusun laporan progres KPI dan tindak lanjut monev Prepare KPI progress reports and follow-up monitoring and evaluation	Tersusunnya Laporan bulanan progres KPI dan tindak lanjut monev The availability of monthly reports for KPI progress and follow-up on monitoring and evaluation	12	9	12	100%	9
Kegiatan RUPS **GMS Activities**				**11**			**11**
9	Penyusunan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Preparation of Supervisory Tasks of the Board of Commissioners	Tersusunnya Laporan Tugas Pengawasan The availability of Supervisory Tasks Reports	1	11	1	100%	11
Jumlah Total				**100**			**101,6**

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Implementation of Duties in 2024

Throughout 2024, the Secretary of the Board of Commissioners has carried out his duties, which can be described as follows:

Tabel Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris
Table of Duties of the Board of Commissioners' Secretary

No	Program Kerja Work Program	Jumlah Pelaksanaan Realization	Satuan Unit
1	Menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris Conducting Board of Commissioners internal meetings	14	Rapat Meeting
2	Menyelenggarakan program pengenalan dan/atau peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Organizing a program to introduce and/or improve the competence of the Board of Commissioners and Supporting Organs	18	Pelatihan Training
3	Menyelenggarakan kunjungan kerja lapangan Organizing site visits	8	Kunjungan Visit
4	Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris – Direksi Organizing meetings between Board of Commissioners and Board of Directors	12	Rapat Meeting
5	Menyusun RKA dan KPI Dewan Komisaris Preparing the RKA and KPI of the Board of Commissioners	1	Laporan Report
6	Menyusun laporan Kinerja Bulanan Compiling Monthly Performance Reports	12	Surat Letter
7	Penyusunan laporan Progres Proyek Strategis Preparation of Strategic Project Progress Reports	12	Surat Letter
8	Menyusun laporan KPI Bulanan Prepare Monthly KPI reports	12	Surat Letter
9	Penyusunan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Preparation of Supervisory Tasks of the Board of Commissioners	1	Surat/Laporan Letter/Report

Komite di Bawah Dewan Komisaris
Committee Under the Board of Commissioners



Sejalan dengan ditetapkannya Nomor:PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("Peraturan Menteri BUMN No.2/2023") dan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko No. SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Di Lingkungan BUMN, MIND ID selaku induk dari PTBA telah menetapkan klasifikasi risiko PTBA berdasarkan Surat Direktur Manajemen Risiko dan HSSE No. 171/E.DIRMRHSSE/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 Perihal Penetapan Kategori dan Klasifikasi Risiko PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dimana, PTBA adalah anak perusahaan MIND ID dengan klasifikasi Sistemik A Individu. Atas penetapan tersebut, maka Komite di bawah Dewan Komisaris PTBA perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Kementerian BUMN yang terdiri dari (i) Komite Audit, (ii) Komite Pemantau Risiko merangkap Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan (iii) Komite Nominasi dan Remunerasi.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 15 Desember 2023 , Dewan Komisaris PTBA telah menetapkan susunan Komite di bawah Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:

In line with Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Significant State-Owned Enterprises Governance and Corporate Activities ("Minister of SOEs Regulation No. 2/2023") and Deputy Deputy for Finance and Risk Management Decision No. SK-3/DKU.MBU/05/2023 concerning Technical Instructions on the Composition and Qualifications of Risk Management Organ in SOE Environment, MIND ID as the Holding Company of PTBA has established the risk classification of PTBA based on the Letter of Risk Management and HSSE Director No. 171/E.DIRMRHSSE/X/2023 dated October 9, 2023, regarding the Determination of Risk Categories and Classifications of PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Based on MIND ID's determination, PTBA is classified as a MIND ID subsidiary with a Systemic A Individual classification. Following this determination, adjustments need to be made to the Committees under the PTBA Board of Commissioners in accordance with the regulations applicable in the Ministry of SOEs, which consist of (i) Audit Committee, (ii) Risk Monitoring Committee concurrently serving as the Integrated Governance Committee, and (iii) Nomination and Remuneration Committee.

Following up on this matter, during the Internal Board of Commissioners Meeting on December 15, 2023, the PTBA Board of Commissioners determined the composition of Committees under the Board of Commissioners as follows:

Komite Audit

Komite Audit merupakan salah satu organ pendukung Dewan Komisaris yang pembentukannya bersifat wajib berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas pengurusan Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

Komite Audit Perusahaan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang dijabarkan dalam Surat Edaran OJK No. 32/ SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, bahwa Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Dewan Komisaris (Dekom);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023, tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
10. Akta Notaris Jose Dima Satria, SH, M.Kn. No. 43 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk;

Audit Committee

Audit Committee is one of supporting organs of Board of Commissioners that was formed based on the Regulation of Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/2023. The Committee helps the Board of Commissioners in the supervisory function and gives advice to Board of Directors regarding the Company's management, in accordance with the applicable law.

Legal Basis

The Company's Audit Committee was formed based on statutory provisions, as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Republic of Indonesia Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dismissal of State-Owned Enterprises;
4. Financial Services Authority Regulation No. 33/ POJK.04/2014 dated December 8, 2014, concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
5. Financial Services Authority Regulation No. 55/ POJK.04/2015 dated December 23 ,2015, concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of the Audit Committee;
6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
8. Financial Services Authority Regulation No. 21/ POJK.04/2015 dated November 16, 2015, concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines as outlined in OJK Circular Letter No. 32/ SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015, concerning Public Company Governance Guidelines, that the Board of Commissioners can form a Board of Commissioners Committee (Dekom);
9. Financial Services Authority Regulation Number 9 of 2023 dated July 11, 2023, concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities;
10. Notarial Deed of Jose Dima Satria, SH, M.Kn. No. 43 dated June 10, 2020, concerning Amendments to the Articles of Association of PT Bukit Asam Tbk;

11. Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 18/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Penetapan Piagam Komite Audit.

Visi dan Misi Komite Audit

Visi

Menjadi mitra kerja yang independen dan profesional bagi Dewan Komisaris PTBA dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk menciptakan terlaksananya Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Misi

Mendorong dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal dan internal auditor, mendorong adanya peningkatan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan, guna meningkatkan nilai tambah perusahaan.

Pedoman Kerja/Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya, yang substansinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan tugas Komite Audit. Piagam Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan dievaluasi secara berkala memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan OJK dan peraturan terkait lainnya.

Pemutakhiran terhadap Piagam (*Charter*) Komite Audit dilakukan pada tahun 2023 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 18/SK/PTBA-KOM/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Piagam Komite Audit Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk.

Piagam Komite Audit memuat pengaturan mengenai kedudukan, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Komite Audit, serta batasan dan pengaturan tata hubungan kerja antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal.

Adapun muatan dalam Piagam Komite Audit, sebagai berikut:
1. Pendahuluan;
2. Organisasi;
3. Tugas, Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Kewenangan;
4. Rapat;
5. Penutup.

11. Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 18/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 dated December 31, 2023, regarding the Establishment of the Audit Committee Charter.

Vision and Mission of Audit Committee

Vision

Become an independent and professional partner for Board of Commissioners of PTBA to support the duties and functions of Board of Commissioners to realize the implementation of Good Corporate Governance.

Mission

To encourage and ensure the effectiveness of internal control system and the effectiveness of external and internal auditor's duties, promote increased business success and corporate accountability to increase the Company's added value.

Audit Committee Work Guidelines/Charter

The Audit Committee has a Charter as a guideline in carrying out its duties, which the substance is in accordance with applicable regulations relating to the duties of the Audit Committee. The Audit Committee Charter is determined by the Board of Commissioners and evaluated periodically to ensure the Company's compliance with OJK provisions and other related regulations.

The update to the Audit Committee Charter was carried out in the year 2023 and was stipulated through Board of Commissioners Decree No. 18/SK/PTBA-KOM/XII/2023 dated December 31, 2023, concerning Audit Committee Charter of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk.

The Audit Committee Charter contains regulations regarding the position, authority, duties, and responsibilities of the Audit Committee, as well as boundaries and regulations for working relations between the Audit Committee and the Board of Commissioners, Directors, Internal Auditors, and External Auditors.

The contents of the Audit Committee Charter are as follows:
1. Introduction;
2. Organization;
3. Duties, Obligations, Responsibilities, and Authorities;
4. Meetings;
5. Closing.

Kriteria Anggota Komite Audit

Persyaratan dan kualifikasi anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan kompetensi dan independensi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 55/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Kompetensi

Ketua dan anggota Komite Audit Perusahaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya (pengawasan dan pemeriksaan), mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif, dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas.
2. Wajib memahami Laporan Keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perseroan.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

Independensi

Ketua dan anggota Komite Audit harus memiliki independensi yang tidak terbatas diukur dengan:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang badan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
3. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
4. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.

Criteria for Audit Committee Members

The requirements and qualifications of the Company's Audit Committee members must meet the competency and independence requirements as stipulated in OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Work Implementation of Audit Committee and the State-Owned Enterprises Ministry Regulations No. Per-3/ MBU/03/2023 regarding Organs and Human Resources of the State-Owned Enterprises.

Competencies

The chairman and members of the Company's Audit Committee must meet the following requirements:

1. Must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with their field of work (supervision and audit), able to communicate well and effectively, can provide sufficient time to complete tasks.
2. Must understand the Financial Report, the company's business especially those related to the Company's service or business activities, the audit process, risk management, and laws and regulations in the Capital Market sector and other related laws and regulations.
3. Must comply with the Audit Committee's code of ethics as determined by the Company.
4. Willing to continuously improve competence through education and training.

Independence

The chairman and members of Audit Committee must have absolute independence as measured by:

1. Not an employee in a Public Accounting Firm, Legal Consultant Office, Public Appraisal Service Office or other party that provides assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or consulting services to the Company concerned in the last 6 (six) months.
2. Does not work or has the authority of a responsible body to plan, lead, control, or supervise the activities of the company in the last 6 (six) months except for Independent Commissioners.
3. Have no direct or indirect shares in the Company.
4. In the event that a member of the Audit Committee obtains shares in the Company either directly or indirectly as a result of a legal event, the shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months after the shares are obtained.

5. Tidak mempunyai hubungan afiliasi (hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping) dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan tersebut.
6. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan tersebut.
7. Tidak mempunyai kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris akan mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Perusahaan, sedangkan masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Susunan dan Komposisi Komite Audit

Susunan Komite Audit tahun 2024 per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

5. Does not have an affiliated relationship (blood and marriage relationship up to the third degree, either vertically or horizontally) with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's Major Shareholders.
6. Does not have a direct or indirect business relationship related to the Company's activities.
7. Does not have any personal interests/connections that may cause negative impacts and conflicts of interest to the Company.

Term of Office

The term of office of Audit Committee members who are also a member of Board of Commissioners will follow the term of office as Commissioner of the Company. While the term of office of members of Audit Committee who are not members of Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended for a 2 (two) year term of office, without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss at any time.

Structure and Composition of Audit Committee

The composition of the Audit Committee for 2024 as of December 31, 2024, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan dalam Komite	Keahlian Expertise	SK Pengangkatan Appointment Decree	Periode Jabatan Term of Office
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua/ Chairman	Manajemen Strategi Strategic Management	09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	2020 – berakhirnya jabatan sebagai Dewan Komisaris 2020 – end of position ad Board of Commissioners
Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner	Wakil Ketua/ Vice Chairman	Hukum Law	09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	2023 – berakhirnya jabatan sebagai Dewan Komisaris 2020 – end of position ad Board of Commissioners
Wakhid Kurniawan Saputra	Pihak Independen Independent Party	Anggota/ Member	Akuntansi Accounting	02/SK/PTBA-DEKOM/III/2021	2024 - 2027
Achmadi Rosyid	Pihak Independen Independent Party	Anggota/ Member	Teknik Pertambangan/ Ekonomi Mineral dan Batu bara Mining Engineering/ Economy Mining and Coal	05/SK/PTBA-DEKOM/VIII/2020	2020 – 2023
				04/SK/PTBA-DEKOM/IX/2023	2023 – 2025

Profil Komite Audit

Profile of the Audit Committee



Ketua Komite Audit
Chairman of Audit Committee

Marsda TNI (Purn) Andi Pahril Pawi, S.Sos

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Masa Jabatan: 10 Juni 2020 - Sekarang
Term of Office: June 10, 2020 - Present

Usia Age	62 tahun 62 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domiciled	Jakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	1. Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) (2008) 2. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) (1998) 3. Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (Sekkau) (1993) 4. Akademi Angkatan Udara (1985) 1. Army Forces Staff and Command School (2008) 2. Air Forces Staff and Command School (1998) 3. Air Force Unit Command School (1993) 4. Indonesian Air Force Academy (1985)
Riwayat Pekerjaan Work Experiencee	1. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan BIN (2017-2020) 2. Kepala Biro Pengamanan Sekretariat Militer Presiden (2014-2017) 3. Kepala Biro Personel TNI dan Polri Sekretariat Militer Presiden (2012-2014) 1. Expert Staff for Defense and Security of BIN (2017-2020) 2. Head of Security Bureau of the Presidential Military Secretariat (2014-2017) 3. Head of the Indonesian Armed Forces and Police Personnel Bureau, Presidential Military Secretariat (2012-2014)
Jabatan Lainnya Other Position	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan Does not hold any concurrent positions both inside/outside the Company
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Terbuka Lain Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan terbuka lainnya Does not hold any concurrent positions in other companies
Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Komisaris Legal Basis of Appointment Board of Commissioners	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 tanggal 10 Juni 2020 2019 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 10, 2020
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi ataupun pemegang saham pengendali. Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Wakil Ketua Komite Audit
Chairman of Audit Committee

Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Masa Jabatan: 15 Juni 2023 - Sekarang
Term of Office: June 15, 2023 - Present

Usia Age	63 tahun 63 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domiciled	Jakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	1. S3, University of Washington School of Law pada tahun 2007 2. S2, University of Washington School of Law pada tahun 1998 3. S1, Hukum, Universitas Indonesia tahun 1987 1. Doctoral Degree from the University of Washington School of Law (2007) 2. Master Degree from the Washington School of Law (1998) 3. Bachelor of Law, University of Indonesia (1987)
Serifikasi Certification	Certified GRC for Executive, dari LSP Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan Certified GRC for Executive, from LSP Governace Risk and Complience
Riwayat Pekerjaan Work Experiencee	1. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI (2018-2020) 2. Kepala Pusat Hukum dan Humas Kementerian ATR/BPN (2016-2018) 1. Chairman of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) (2018-2020) 2. Head of Legal and Public Relations Center at the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (2016-2018)
Jabatan Lainnya Other Position	Profesor pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Professor at the Faculty of Law at University of Indonesia
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Terbuka Lain Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan terbuka lainnya Does not hold any concurrent positions in other companies
Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Komisaris Legal Basis of Appointment Board of Commissioners	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 15 Juni 2023 2022 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 15, 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Decision of the Board of Commissioners PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi ataupun pemegang saham pengendali. Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Wakhid Kurniawan Saputra, SE, M.Ak, CPA

Pihak Independen
Independent Party

Masa Jabatan: 2024 - Sekarang
Term of Office: 2024 – Present

Usia Age	39 Tahun 39 Years Old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. S2 Universitas Indonesia – Magister Akuntansi 2. S1 Universitas Indonesia – Ekonomi Akuntansi 1. Master of in Accounting, University of Indonesia 2. Bachelor Degree in Economics – Accounting, University of Indonesia
Riwayat Pekerjaan Work Experience	1. Komite Audit PT Hutama Karya (2019-2024) 2. Managing Partner KAP Sahat, Handoko & Rekan (2010 – sekarang) 3. Auditor Konsultan Pajak Pratama Consulting (2007-2009) 1. Committee audit PT Hutama Karta 2019-2024 2. Managing Partner KAP Sehat Handoko & partner (2010-sekarang) 3. Tax consultant auditor Pratama Consulting (2007-2009)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Managing Partner KAP Sahat, Handoko & Rekan
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	SK Dewan Komisaris PTBA Nomor: 03/SK/PTBA-DEKOM/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 Decree of the Board of Commissioners of PTBA Number: 03/SK/PTBA-DEKOM/III/2024 dated March 4, 2024
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Does not hold any concurrent positions both inside/outside the Company
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Dr. Eng. Ir. Fadhila Achmadi Rosyid, S.T., M.T.

Pihak Independen
Independent Party

Masa Jabatan: 15 Juni 2023 - Sekarang
Term of Office: June 15, 2023 - Present

Usia Age	42 tahun 42 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Bandung
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. S3 Engineering bidang Ekonomi Mineral, Akita University, Jepang (2017) 2. S2 Teknik dalam bidang Ekonomi Mineral, Institut Teknologi Bandung (2007) 3. S1 Teknik Pertambangan, Institut Teknologi Bandung (2004) 1. Doctoral Degree on Mineral Economy of Akita University, Japan (2017) 2. Master Degree of Mineral Economy of Bandung Institute of Technology (2007) 3. Bachelor Degree of Mining Engineering of Bandung Insitute of Technology (2004)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	1. Dosen (Asisten Profesor) di Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung 2. Ketua Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung (2020-sekarang) 3. Peneliti pada Center of Research Excellence (CoRE) Ekonomi dan Manajemen Mineral dan Batu bara Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (2012-sekarang) 1. Lecturer (Professor Assistant) at Mining Engineering of Bandung Institute of Technology 2. Head of the Undergraduate Mining Engineering Study Program of Bandung Institute of Technology (2020-present) 3. Researcher at the Center of Research Excellence (CoRE) Economics and Management of Minerals and Coal, Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Bandung Institute of Technology (2012-present)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Dosen (Asisten Profesor) di Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung Lecturer (Professor Assistant) at Mining Engineering of Bandung Institute of Technology
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	1. Periode I: SK Dewan Komisaris No.05/SK/PTBA-DEKOM/VIII/2020 2. Periode II: SK Dewan Komisaris No. 04/SK/PTBA-DEKOM/IX/2023 1. Period I: Board of Commissioners Decree Number 05/SK/PTBA/DEKOM/VIII/2020 2. Period II: Board of Commissioners Decree Number 04/SK/PTBA-DEKOM/IX/2023
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk

Perubahan Komite Audit

Pada tahun 2024 terjadi perubahan anggota Komite Audit pada tanggal 9 Maret 2024, di mana Sdr. Dodi Masykur digantikan oleh Sdr. Wakhid Kurniawan Saputra. Atas perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat PTBA Nomor:B/194/111000/KS.03/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 Perihal Laporan Perubahan Susunan Komite Audit. adapun profil Komite dari yang bersangkutan sebagai berikut:

Audit Committee Changes

In 2024, there was a change in the Audit Committee members on March 9, 2024, where Mr. Dodi Masykur was replaced by Mr. Wakhid Kurniawan Saputra. The change is in accordance with the provisions of POJK No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Audit Committee's Work, it has been reported to the OJK based on PTBA Letter Number: B/194/111000/KS.03/III/2024 dated March 13, 2024, Regarding the Report on Changes in the Composition of the Audit Committee. The Committee profile of the person concerned is as follows:



Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Dodi Masykur, SE., Ak., CPA., QIA., CPI., CA

Pihak Independen
Independent Party

Masa Jabatan: 2021 - Sekarang
Term of Office: 2021 – Present

Usia Age	49 tahun 49 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	S1 Akuntansi, Universitas Andalas (1998) Bachelor Degree of Accountant from Andalas University (1998)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	1. Audit Partner di KAP Hertanto Grace Karunawan – The International Accounting Group (TIAG) (2016 – sekarang) 2. Komite Audit di PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2017-2017) 3. Internal Audit di PT Pertamina Patra Niaga (2012-2016) 4. IFRS & ICoFR Specialist di PT Pertamina Patra Niaga (2011-2012) 5. Komite Audit di PT Barata Indonesia (Persero) (2011-2012) 6. Nonresident Lecturer di Universitas Sahid (2011-2012) 7. Managing Director di DDM Consulting – Accounting, Assurance, Finance & Business Advisory Services (2009-2011) 8. Group Head Finance, Tax & Accounting di PT Energi Tata Persada / Catur Khita Persada Group Integrated Drilling and Project Management Services (2008-2009) 9. Audit Asisten Manajer di PricewaterhouseCoopers – KAP Haryanto Sahari & Rekan (2006-2008) 10. Audit Asisten Manajer di RSM Indonesia – KAP Aryanto Amir Jusuf & Mawar (2000-2006) 11. Auditor Akuntan Publik di KJA Sumatera Barat (1995-1997) 1. Audit Partner at KAP Hertanto Grace Karunawan – The International Accounting Group (TIAG) (2016 – present) 2. Audit Committee at PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2017-2017) 3. Internal Audit at PT Pertamina Patra Niaga (2012-2016) 4. IFRS & ICoFR Specialist at PT Pertamina Patra Niaga (2011-2012) 5. Audit Committee at PT Barata Indonesia (Persero) (2011-2012) 6. Nonresident Lecturer at Sahid University (2011-2012) 7. Managing Director at DDM Consulting – Accounting, Assurance, Finance & Business Advisory Services (2009-2011) 8. Group Head Finance, Tax & Accounting at PT Energi Tata Persada / Catur Khita Persada Group Integrated Drilling and Project Management Services (2008-2009) 9. Assistant Audit Manager at PricewaterhouseCoopers – KAP Haryanto Sahari & Rekan (2006-2008) 10. Assistant Audit Manager at RSM Indonesia – KAP Aryanto Amir Jusuf & Mawar (2000-2006) 11. Public Accountant Auditor at KJA West Sumatra (1995-1997)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Partner KAP Hertanto Grace Karunawan – The International Accounting Group (TIAG) Partner KAP Hertanto Grace Karunawan – The International Accounting Group (TIAG)
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	SK Dewan Komisaris No. 02/SK/PTBA-DEKOM/III/2021 Board of Commissioners Decree Number 02/SK/PTBA-DEKOM/III/2021
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of the Board of Directors, fellow members of the Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk

Independensi Anggota Komite Audit

Ketua dan Anggota Komite Audit merupakan pribadi profesional yang tidak memiliki hubungan dengan Perusahaan guna menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota

Independence of Audit Committee Members

The Chair and Members of the Audit Committee are professional individuals who have no relationship with the Company in order to maintain independence in carrying out their duties and responsibilities. Members

Komite Audit Perusahaan telah memenuhi persyaratan independensi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit, serta Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Pemenuhan independensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

of the Company's Audit Committee have fulfilled the independence requirements in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015, concerning the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee, as well as State-Owned Enterprises Ministry Regulation No. PER-3/ MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. Fulfillment of this independence can be seen in the following table.

Tabel Independensi Anggota Komite Audit
Independence Table of Member of Audit Committee

Kriteria Criteria	Andi Pahril Pawi	Kurnia Toha	Achmadi Rosyid	Wakhid Kurniawan Saputra*	Dodi Masykur**
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan, maupun Perusahaan Afiliasi Has no management relationship in the Company, Subsidiaries, or Affiliated Companies	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan Has no shareholding relationship in the Company	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Has no family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Audit Committee	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus Partai Politik, Pejabat, dan Pemerintah Not serving as an administrator of Political Parties, Officials, and Government	✓	✓	✓	✓	✓

*Menjabat sejak tanggal 9 Maret 2024
**Tidak menjabat terhitung sejak 9 Maret 2024
*Serving since March 9, 2024
**No longer serving since March 9, 2024

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Piagam Komite Audit PTBA, Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab berikut ini:

1. **Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi**
   a. Perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
   b. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
   c. Komite Audit juga wajib melakukan evaluasi kecukupan pengendalian intern di Perusahaan Anak.
   d. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan

Duties and Responsibilities

In accordance with the PTBA Audit Committee Charter, the Audit Committee acts independently in carrying out the following duties and responsibilities:

1. **Conducting Monitoring and Evaluation**
   a. Planning and implementing audits and monitoring the follow-up of audit results in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process.
   b. Providing recommendations regarding the improvement of the management control system and its implementation.
   c. The Audit Committee is also required to evaluate the adequacy of internal control in the Subsidiary Company.
   d. Conducting a review of financial information that will be issued by the Company to the public and/ or authorities, including financial reports and

keuangan, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.

e. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
f. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
g. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
i. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
j. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
k. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
l. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris bersangkutan lainnya.

2. Laporan Keuangan

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti Laporan Keuangan, Proyeksi dan Informasi Keuangan lainnya.
b. Melakukan penelaahan melalui diskusi dengan Manajemen, Internal Audit dan Akuntan Publik dan/atau KAP atas selama proses audit termasuk kesulitan yang dihadapi.
c. Memberikan pendapat Independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik/KAP dan/atau Tim Audit dari KAP atas jasa yang diberikannya.
d. Melakukan penelaahan atas Laporan Tahunan untuk meyakinkan kecukupan, konsistensi dan keakuratan informasi.

3. Pengendalian Internal

a. Mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Internal melalui diskusi dengan Manajemen, Internal Audit, dan Akuntan Publik atau Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan termasuk adanya kelemahan material, baik dalam rancangan maupun operasi, yang dapat mengganggu kemampuan Perseroan

other reports related to the Company's financial information.

e. Ensuring the availability of a satisfactory evaluation procedure for all information issued by the Company.
f. Conducting a review of compliance with laws and regulations related to the Company's activities.
g. Providing an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the Accountant regarding the services provided.
h. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independence, scope of assignment, and service fees.
i. Review the implementation of the audit by the internal auditor and supervise the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of the internal auditor.
j. Review complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes.
k. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of the Company.
l. Identify matters requiring the attention of the Board of Commissioners and other relevant duties of the Board of Commissioners.

2. Financial Reports

a. Review the financial information to be issued by the company to the public and/or authorities such as Financial Reports, Projections and other Financial Information.
b. Conducting review through discussions with Management, Internal Audit, and Public Accountants and/or Public Accountants during the audit process including the difficulties encountered.
c. Provide an Independent opinion in the event of a difference of opinion between Management and the Public Accountant/Public Accounting Firm and/or the Audit Team from the Public Accounting Firm for the services provided.
d. Review the Annual Report to ensure the adequacy, consistency, and accuracy of the information.

3. Internal Control

a. Reviewing the effectiveness and efficiency of the Internal Control System through discussions with Management, Internal Audit, and Public Accountants or Audit Team from Public Accounting Firm on the adequacy and effectiveness of internal control over financial reporting including any material weaknesses, both in design and operation, that may interfere with the Company's

dalam mencatat, memproses, mengikhtisarkan dan melaporkan informasi keuangan (ICoFR).

b. Melakukan penelaahan dan diskusi dengan Manajemen, Internal Audit dan Auditor Eksternal atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal perseroan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Auditor dan Auditor Eksternal yang menunjukan adanya kelemahan atas pengendalian internal.

c. Melakukan penelaahan dan pemantauan terhadap tindak lanjut Manajemen atas temuan dan rekomendasi dari Auditor Eksternal.

4. Internal Audit/Satuan Pengawas Internal

a. Melakukan penelaahan atas efektivitas Internal Audit Perseroan, yang di antaranya melalui:
   - Melakukan penelaahan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas persetujuan terkait penyusunan rencana kerja Internal Audit yang telah berlandaskan *Risk Based Audit,* ruang lingkup, dan anggaran Internal Audit.
   - Melakukan penelaahan atas pelaksanaan Rencana Kerja Internal Audit.
   - Melakukan penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit, termasuk hasil evaluasi atas pelaksanaan Manajemen Risiko.
   - Melakukan penelaahan dan pemantauan tindak lanjut Manajemen atas temuan dan rekomendasi Internal Audit.

b. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris untuk bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit.

c. Melakukan penelaahan terhadap setiap Laporan Internal Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit, termasuk Laporan mengenai penyimpangan/pelanggaran yang disampaikan ke Direksi.

d. Melakukan penelaahan terhadap Piagam Internal Audit untuk memberikan pendapat dan saran sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan atas Piagam Internal Audit yang akan ditetapkan oleh Direksi.

e. Melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan Internal Audit secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.

f. Mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Internal berdasarkan informasi yang diperoleh dari Internal Audit.

g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Internal Audit (*Quality*

ability to record, process, summarize and report financial information (ICoFR).

b. Conducting reviews and discussions with Management, Internal Audit and External Auditors on the adequacy and effectiveness of the Company's internal control based on the Internal Auditor and External Auditor's Audit Result Reports that indicate weaknesses in internal control.

c. Conducting reviews and monitoring of Management's follow-up on findings and recommendations from the External Auditor.

4. Internal Audit/Internal Supervisory Unit

a. Conducting a review of the effectiveness of the Company's Internal Audit, including through:
   - Conducting a review to provide recommendations to the Board of Commissioners for approval regarding the preparation of an Internal Audit work plan based on Risk Based Audit, scope, and Internal Audit budget.
   - Conducting a review of the implementation of the Internal Audit Work Plan.
   - Conducting a review of the Internal Audit Examination Result Report, including the evaluation results of the implementation of Risk Management.
   - Conducting a review and monitoring of Management's follow-up on Internal Audit findings and recommendations.

b. Providing opinions and suggestions to the Board of Commissioners for consideration in granting approval for the appointment and dismissal of the Head of Internal Audit.

c. Conducting a review of each Internal Audit Report submitted to the Board of Commissioners c.q. Audit Committee, including Reports on deviations/violations submitted to the Board of Directors.

d. Conducting a review of the Internal Audit Charter to provide opinions and suggestions as consideration for the Board of Commissioners in granting approval for the Internal Audit Charter to be determined by the Board of Directors.

e. Conducting a review and providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the provision of annual remuneration for Internal Audit as a whole and performance awards.

f. Reviewing the effectiveness and efficiency of the Internal Control System based on information obtained from Internal Audit.

g. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an independent quality controller from an external party to conduct a review of Internal Audit

Assurance Review) paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.

5. Auditor Independen (Eksternal)

a. Menyeleksi dan merekomendasikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memberikan jasa audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan dan laporan keuangan Program PUMK kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS Tahunan.

b. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, agar mengusulkan RUPS Tahunan dalam hal Akuntan Publik dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan dan laporan keuangan Program PUMK pada Periode Penugasan Profesional, agar penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP pengganti dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

c. Mengusulkan pemberhentian Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP apabila dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.

d. Menelaah calon Akuntan Publik, atau Tim Audit dari KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi. KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi ditunjuk dan ditetapkan oleh entitas anak yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasarnya tetapi harus dikonsultasikan dengan Komite Audit untuk menilai aspek independensi calon Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP dan supervisi audit yang dijalankan oleh Komite Audit.

e. Memberikan persetujuan terlebih dahulu (*pre-approval*) atas jasa non asurans yang akan ditugaskan kepada KAP. Pre-approval dari Komite Audit terhadap jasa non asurans yang ditugaskan kepada KAP dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP.

6. Kepatuhan Dan Manajemen Risiko

a. Memonitor efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan utamanya yang berkaitan dengan fraud yang terkait dengan pelaporan

performance (Quality Assurance Review) at least once every 3 (three) years.

5. Independent Auditor (External)

a. Selecting and recommending Public Accountants and/or Public Accounting Firm candidates to provide audit services for the Company's annual financial statements and the financial statements of the PUMK Program to the Board of Commissioners to be decided by the Annual GMS.

b. Recommend to the Board of Commissioners, to propose the Annual GMS in the event that the Public Accountant and/or Public Accounting Firm that has been decided by the Annual GMS as referred to in point (1) cannot complete the provision of audit services for the Company's annual financial statements and the financial statements of the PUMK Program in the Professional Assignment Period, so the appointment of a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm can be made by the Board of Commissioners by considering the recommendations of the Audit Committee.

c. Propose the dismissal of the Public Accountant, Public Accounting Firm or Audit Team from the Public Accounting Firm if in carrying out their duties the person concerned does not meet the applicable standards and provisions.

d. Review the candidate for Public Accountant, or Audit Team from the Public Accounting Firm for the consolidated subsidiary. The Public Accounting Firm for the consolidated subsidiary is appointed and determined by the relevant subsidiary in accordance with its articles of association but must be consulted with the Audit Committee to assess the independence aspect of the candidate for Public Accountant, Public Accounting Firm or Audit Team from the Public Accounting Firm and audit supervision carried out by the Audit Committee.

e. Provide prior approval (preapproval) for non-assurance services that will be assigned to the Public Accounting Firm. Pre-approval from the Audit Committee for non-assurance services assigned to Public Accounting Firm is carried out in accordance with applicable laws and regulations.

f. Conducting an evaluation of the implementation of the provision of audit services for the Company's annual financial statements by Public Accountants and/or Public Accounting Firm.

6. Compliance and Risk Management

a. Monitor the effectiveness of policies and implementation of risk management in accordance with laws and regulations, especially those related to fraud related to financial reporting

keuangan (*fraudulent financial reporting risk*) yang telah disiapkan dan dilaksanakan Direksi.

b. Memonitor ketaatan pada peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan operasi Perseroan.
c. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan dalam kegiatan Perseroan.
d. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas proses penunjukan perusahaan pemeringkat yang akan melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.

7. Pengaduan

a. Melakukan penelaahan dan pemantauan efektivitas Sistem Pelaporan Pengaduan Pelanggaran yang ditetapkan Perseroan.
b. Melakukan penelaahan atas laporan-laporan yang terkait dengan pencegahan, pendeteksian dan tindak lanjut penangan pengaduan, baik yang berasal dari (Whistleblowing System/WBS) Perseroan maupun dari sumber-sumber lainnya.

8. Integrasi Induk Dan Entitas Anak

a. Mengkaji efektivitas Sistem Pengendalian Internal Induk dan Terintegrasi.
b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan Induk maupun Entitas Anak.
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan audit intern Induk maupun Entitas Anak (termasuk rekomendasi atas rencana audit tahunan).
d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang mendukung efektivitas dan akurasi proses pelaporan keuangan dan kesesuaian antara kebijakan Audit Internal Induk dan Audit Internal Entitas Anak.
e. Melakukan koordinasi dengan Internal Audit dan KAP terhadap pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan Entitas Anak.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Berkaitan dengan Auditor Eksternal

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan penunjukan Auditor Eksternal, yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik (Auditor Eksternal) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbal jasa. Atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh KAP selaku Auditor Eksternal, Komite Audit melakukan penelaahan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal.

(fraudulent financial reporting risk) that have been prepared and implemented by the Board of Directors.
b. Monitor compliance with laws and regulations in the capital market sector and other laws and regulations related to the Company's operations.
c. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in the Company's activities.
d. Evaluate and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the process of appointing a rating company that will conduct a Company Health Level Assessment.

7. Complaints

a. Review and monitor the effectiveness of the Whistleblowing System established by the Company.
b. Review reports related to the prevention, detection and follow-up of complaint handling, both from the Company's (Whistleblowing System/WBS) and from other sources.

8. Integration of Parent and Subsidiary Entities

a. Reviewing the effectiveness of the Parent and Integrated Internal Control Systems.
b. Monitoring and evaluating the suitability of the implementation of the Parent and Subsidiary financial policies.
c. Monitoring and evaluating the suitability of the implementation of the Parent and Subsidiary internal audit policies (including recommendations on the annual audit plan).
d. Providing recommendations to the Board of Commissioners on matters that support the effectiveness and accuracy of the financial reporting process and the suitability between the Parent Internal Audit and Subsidiary Internal Audit policies.
e. Coordinating with Internal Audit and KAP regarding the implementation of general audits of the Subsidiary's financial statements.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee Relating to External Auditors

The Audit Committee has duties and responsibilities related to the appointment of External Auditors, namely providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Public Accountants (External Auditors) based on independence, scope of assignment, and remuneration. For the work carried out by KAP as External Auditor, the Audit Committee conducts a review to ensure the effectiveness of the implementation of the External Auditor's duties.

Apabila pelaksanaan pekerjaan Auditor Eksternal tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, maka Komite Audit dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberhentian Auditor Eksternal.

Wewenang

Sesuai dengan Pedoman Kerja Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, kewajiban, serta sumber daya lainnya pada Perseroan dan entitas anak yang dikonsolidasi berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, Unit Internal Audit, Manajemen Risiko, Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Menerima laporan-laporan berikut ini:
   a. Laporan Keuangan Tahunan, Draft dan Final serta Laporan Akuntan Publik;
   b. Laporan Keuangan Triwulanan, Draft dan Final serta Analytical Reviu atas Laporan Keuangan Triwulanan;
   c. Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit;
   d. Laporan Hasil Pemeriksaan Eksternal Audit;
   e. Laporan Pelaksanaan Rencana kerja Internal Audit Triwulanan;
   f. Laporan Pengaduan Pelanggaran mengenai proses akuntansi dan Laporan Keuangan;
   g. Laporan Ikhtisar Legal Issues dan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku yang signifikan;
   h. Laporan mengenai potensi dan/atau adanya benturan kepentingan;
   i. Keputusan peraturan perundangan yang memiliki relevansi untuk Komite Audit.
   j. Laporan Lainnya yang diperlukan Komite Audit.
11. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota yang paling senior apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir. Komite Audit dapat mengadakan rapat, baik dengan Auditor Internal maupun Auditor Eksternal sesuai kebutuhan. Komite Audit melalui Dewan Komisaris dapat meminta Direksi atau pegawai Perusahaan untuk

If the implementation of the External Auditor's work does not comply with applicable standards and provisions, the Audit Committee may provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the dismissal of the External Auditor.

Authority

In accordance with the Audit Committee Work Guidelines, it has the following authorities:

1. Full, free, and unlimited access to records or information about employees, funds, assets, liabilities, and other resources in the Company and consolidated subsidiaries related to the implementation of its duties.
2. Communicate directly with employees, including the Board of Directors, Internal Audit Unit, Risk Management, Public Accountants, KAP, or Audit Team from KAP regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.
3. Involve independent parties outside the Audit Committee members as needed to assist in the implementation of its duties (if necessary).
4. Receive the following reports:
   a. Annual Financial Report, Draft, and Final and Public Accountant Report;
   b. Quarterly Financial Report, Draft, and Final and Analytical Review of Quarterly Financial Report;
   c. Internal Audit Examination Result Report;
   d. External Audit Examination Result Report;
   e. Quarterly Internal Audit Work Plan Implementation Report;
   f. Report on Complaints of Violations regarding the accounting process and Financial Report;
   g. Summary Report of Legal Issues and significant non-compliance with applicable laws and regulations;
   h. Report on potential and/or existence of conflicts of interest;
   i. Relevant decisions on laws and regulations to the Audit Committee.
   j. Other reports required by the Audit Committee.
11. Carrying out other authorities granted by the Board of Commissioners.

Audit Committee Meeting

The Audit Committee holds regular meetings at least once every 1 (one) month. Audit Committee meetings are chaired by the Chair of the Audit Committee or the most senior member if the Chair of the Audit Committee is unable to attend. The Audit Committee can hold meetings with both Internal Auditors and External Auditors as needed. The Audit Committee through the Board of Commissioners can ask the Directors or Company

menghadiri rapat dan memberikan informasi yang diperlukan.

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 33 kali dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

employees to attend meetings and provide the necessary information.

Throughout 2024, the Audit Committee has held 33 meetings with the agenda and frequency of attendance as follows:

Tabel Kehadiran Komite Audit dalam Rapat Komite Audit Tahun 2024
Table of Audit Committee Attendance at 2024 Audit Committee Meetings

No	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Kehadiran (%) Attendance (%)
1.	Andi Pahril Pawi	Ketua Chairman	33	33	100
2.	Kurnia Toha	Wakil Ketua Vice Chairman	33	33	100
3.	Fadhila Achmadi Rosyid	Anggota Member	33	33	100
4.	Wakhid Kurniawan Saputra*	Anggota Member	27	27	100
5	Dodi Masykur**	Anggota Member	6	6	100

Keterangan | Note:
*Menjabat sejak tanggal 9 Maret 2024
**Tidak menjabat terhitung sejak 9 Maret 2024
*Served since March 9, 2024
**No longer serving since March 9, 2024

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Pengembangan kompetensi Komite Audit dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan di BAB Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Competency Development for Audit Committee

Competency development for Audit Committee can be seen in the Education and/or Training section in the Company Profile Chapter in this Annual Report book.

Sertifikasi Profesi yang Dimiliki oleh Komite Audit
Profession Certification Owned by Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi Profesi Institution Issuing Professional Certification
Andi Pahril Pawi	Ketua Chairman	Certified GRC for Executive Certified GRC for Executive	LSP Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan (TRK) LSP Governance, Risk, and Compliance (TRK)
Kurnia Toha	Wakil Ketua Vice Chairman	Certified GRC for Executive Certified GRC for Executive	LSP Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan (TRK) LSP Governance, Risk, and Compliance (TRK)
Achmadi Rosyid	Anggota Member	Certified GRC for Executive Certified GRC for Executive	LSP Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan (TRK) LSP Governance, Risk, and Compliance (TRK)
Wakhid Kurniawan Saputra*	Anggota Member	1. Certified Public Accountant (CPA) 2. Asean Chartered Professional Accountant (ACPA) 3. Certified Risk Management Officer (CRMO) 4. Akuntan Beregister (RNA) 4. Registered Accountant (RNA)	1. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 2. ASEAN Chartered Professional Accountants Coordinating Committee (ACPACC) 3. Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) 4. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Kementerian Keuangan RI 1. Indonesian Institute of Public Accountants (IAPI) 2. ASEAN Chartered Professional Accountants Coordinating Committee (ACPACC) 3. Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR) 4. Financial Profession Development Center – Ministry of Finance of the Republic of Indonesia

Sertifikasi Profesi yang Dimiliki oleh Komite Audit
Profession Certification Owned by Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi Profesi Institution Issuing Professional Certification
Dodi Masykur **	Anggota Member	-	-

Keterangan | Note:
*Menjabat sejak tanggal 9 Maret 2024
**Tidak menjabat terhitung sejak 9 Maret 2024
*Served since March 9, 2024
**No longer serving since March 9, 2024

Kebijakan dan Besaran Remunerasi bagi Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris memperoleh remunerasi berupa honorarium sebesar 20% dari gaji Direktur Utama.

Policy and Amount of Remuneration for the Audit Committee

Based on State-Owned Enterprises Minister Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on March 24, 2023, concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners receive remuneration in the form of an honorarium of 20% of the President Director's salary.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit

1. Kegiatan rutin Komite Audit Tahun 2024 meliputi:
   a. Rapat internal bulanan kegiatan Komite Audit;
   b. Rapat Pembahasan dengan Satuan Pengawas Intern;
   c. Rapat Pembahasan dengan manajemen satuan kerja;
   d. Rapat Pembahasan dengan Akuntan Publik;
   e. Rapat pembahasan dan reviu Draft Laporan Keuangan triwulanan;
   f. Penyusunan tanggapan atas Laporan Keuangan Konsolidasian triwulanan;
   g. Proses Pemilihan Kantor Akuntan Publik;
   h. Rapat lintas komite PT Bukit Asam Tbk (sesuai kebutuhan);
   i. Penyusunan laporan kegiatan Komite Audit;
   j. Reviu draft Laporan Tahunan (*Annual Report*) Perusahaan;
   k. Mendukung kelancaran tugas Dewan Komisaris (sesuai kebutuhan);
   l. Kunjungan kerja ke lapangan;
   m. *Self Assessment* dan Reviu untuk penyempurnaan Komite *Audit Charter* (bila diperlukan);
   n. Pelatihan dan pendidikan profesi berkelanjutan Komite Audit;
   o. Rapat Pembahasan RKAP 2024;
   p. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan keuangan historis tahunan oleh Kantor Akuntan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan;
   q. Program kerja Forum Komite Audit Holding Industri Pertambangan (sesuai kebutuhan);

Implementation of Audit Committee Duties

1. Routine activities of the Audit Committee in 2024 include:
   a. Monthly internal meetings of the Audit Committee activities;
   b. Discussion Meeting with the Internal Supervisory Unit;
   c. Discussion Meeting with work unit management;
   d. Discussion Meeting with Public Accountants;
   e. Discussion and review meeting of the quarterly Draft Financial Report;
   f. Preparation of responses to the quarterly Consolidated Financial Report;
   g. Public Accounting Firm Selection Process;
   h. Cross-committee meeting of PT Bukit Asam Tbk (as needed);
   i. Preparation of the Audit Committee activity report;
   j. Review of the draft of the Company's Annual Report;
   k. Supporting the smooth implementation of the Board of Commissioners' duties (as needed);
   l. Field work visits;
   m. Self Assessment and Review to improve the Audit Committee Charter (if needed);
   n. Continuous professional training and education for the Audit Committee;
   o. 2024 CWPB Discussion Meeting;
   p. Report on the results of the evaluation of the implementation of the annual historical financial audit by the Public Accounting Firm to the Financial Services Authority;
   q. Work program of the Mining Industry Holding Audit Committee Forum (as needed);

r. Program pengembangan Anggota Komite Audit Holding Industri Pertambangan (sesuai kebutuhan).

2. Kegiatan non rutin Komite Audit Tahun 2024 antara lain:
   a. Monitor LHPS dan KHP BPK Tahun 2023;
   b. Dewan pengawas WBS Mind ID;
   c. Implementasi GCG PTBA;
   d. Diagnostic ICoFR PTBA;
   e. Koordinasi IA MIND ID;
   f. Penyusunan telaah Dekom sesuai kebutuhan.

r. Development program for Members of the Mining Industry Holding Audit Committee (as needed).

2. Non-routine activities of the Audit Committee in 2024 include:
   a. Monitoring the 2023 BPK LHPS and KHP;
   b. WBS Mind ID Supervisory Board;
   c. Implementation of PTBA GCG;
   d. PTBA ICoFR Diagnostic;
   e. Coordination of IA MIND ID;
   f. Preparation of the Board of Commissioners review as needed.

Penilaian oleh Dewan Komisaris atas Kinerja Komite Audit

Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pemantauan dan evaluasi atas laporan kinerja Komite dalam mencapai target-target KPI masing-masing Komite.

Penilaian kinerja Komite Audit tahun 2024 dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah disusun. Setiap awal tahun, Komite menyerahkan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan program kerja Komite selama satu tahun, yang di dalamnya memuat *Key Performance Indicator* Komite. Terdapat 3 (tiga) perspektif pada KPI Komite Audit, yaitu:

1. Aspek Kajian dan Pemberian Rekomendasi;
2. Aspek Dinamis dan Penguatan Tata Kelola;
3. Rapat Komite;

Adapun realisasi atas KPI Komite Audit tahun 2024, sebagai berikut:

Perusahaan telah melakukan penilaian KPI Komite Nominasi dan Remunerasi baik secara kolegial dan individual di tahun 2024. adapun realisasi atas KPI Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2024, sebagai berikut:

Assessment by the Board of Commissioners of the Performance of the Audit Committee

The Audit Committee's performance assessment is carried out by the Board of Commissioners through monitoring and evaluation of the Committee's performance reports in achieving the KPI targets of each Committee.

The Audit Committee performance assessment in 2024 was carried out based on the realization and completion of the work program that has been prepared. At the beginning of each year, the Committee submits an Annual Work Plan containing the Committee's work program for one year, which includes the Committee's Key Performance Indicators. There are 3 (three) perspectives on the Audit Committee KPI, namely:
1. Aspects of Study and Recommendation;
2. Dynamic Aspects and Strengthening of Governance;
3. Committee Meetings;

The realization of the Audit Committee KPIs in 2024 is as follows:

The Company has conducted a KPI assessment of the Nomination and Remuneration Committee both collegially and individually in 2024. The realization of the Nomination and Remuneration Committee KPI in 2024 is as follows:

Tabel KPI Komite Audit Tahun 2024
KPI Table for Audit Committee in 2024

No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Komite Duties, Functions, and Responsibilities of Committee	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight	Target	Realisasi Realization
1	**Aspek Kajian dan Pemberian Rekomendasi** **Aspects of Study and Recommendations**			**60**		**60**
	A. Memberikan pendapat/ rekomendasi/tanggapan kepada Dewan Komisaris yang disertai dengan alasan yang jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Give opinions/recommendations/ responses to the Board of Commissioners accompanied by clear and timely reasons in accordance with the provisions of the Articles of Association	Pemberian pendapat/ rekomendasi/ tanggapan kepada Direksi yang disertai dengan alasan yang jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan anggaran dasar The provision of opinions/ recommendations/responses to the Board of Directors accompanied by clear and timely reasons in accordance with the provisions of the Articles of Association	Nota Dinas Official Memo	10	1	10

Tabel KPI Komite Audit Tahun 2024
KPI Table for Audit Committee in 2024

No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Komite Duties, Functions, and Responsibilities of Committee	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight	Target	Realisasi Realization
	B. Memberikan masukan/pendapat atas aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Give input/opinions on corporate actions submitted by the Board of Directors in a timely manner in accordance with the provisions of the Articles of Association	Pemberian masukan/pendapat atas aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar The provision of input/opinions on corporate actions submitted by the Board of Directors in a timely manner in accordance with the provisions of the Articles of Association	Nota Dinas Official Memo	10	1	10
	C. Memberikan telaahan/analisa atas kinerja operasi dan keuangan bulanan. Provide review/analysis of monthly operational and financial performance.	Pemberian masukan/pendapat dan saran atas kinerja operasi dan keuangan bulanan. The provision of input/opinions and suggestions on monthly operational and financial performance.	Nota dinas Official Memo	10	1	10
	D. Melakukan peninjauan melalui kunjungan lapangan (site visit) terhadap kegiatan-kegiatan strategis BUMN Conducting reviews through site visits of SOEs strategic activities	kunjungan lapangan (site visit) terhadap kegiatan-kegiatan strategis BUMN. site visits to SOEs strategic activities.	Laporan Kunjungan Site visit reports	10	2	10
	E. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP Providing opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the RJPP and CWPB	Pemberian pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP The provision of opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the RJPP and CWPB	Nota Dinas Official Memo	10	1	10
	F. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai laporan tahunan Providing opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the annual report	Pemberian tanggapan kepada Dewan Komisaris mengenai laporan tahunan The provision of opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the annual report	Nota Dinas Official Memo	10	1	10
	G. Mengusulkan KAP yang mengaudit laporan keuangan Perusahaan Propose a KAP to audit the company's financial statements	Pengusulan kepada RUPS/Menteri mengenai KAP yang mengaudit laporan keuangan Proposal to the GMS/Minister regarding the KAP that audits the financial statements	Surat Letter	10	1	10
	H. Pembahasan dengan KAP Discussion with KAP	Pembahasan hasil audit atas laporan keuangan Perusahaan Discussion of audit results on company financial statements	Risalah Minutes of meetings	10	3	10
2	**Aspek Dinamis dan Penguatan Tata Kelola** **Dynamic and GCG Strengthening Aspect**			**10**		**10**
	A. Kegiatan Pengembangan Development Activities			5		5
	B. Mengikuti Pelatihan/ Seminar/ Webinar untuk meningkatkan kompetensi Participating in training/seminar/ webinar to increase competency	Kegiatan Pelatihan/Seminar/ Webinar Training/Seminar/Webinar activities	Laporan/ Sertifikat Report/ Certificate	5	2	5
	C. Penguatan Tata Kelola GCG Strengthening			5		5
	D. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Prepare the Committee's Annual Work Plan and Budget	Penyampaian kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Submission to the Board of Commissioners regarding the Committee's annual Work Plan and Budget	Surat Letter	5	1	5

Tabel KPI Komite Audit Tahun 2024
KPI Table for Audit Committee in 2024

No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Komite Duties, Functions, and Responsibilities of Committee	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight	Target	Realisasi Realization
3	**Rapat Komite** **Committee Meetings**			**10**		**10**
	A. Kehadiran Rapat Internal Komite Attendance at Internal Committee Meetings	Rata-rata jumlah komite yang menghadiri rapat dalam setahun Average number of committees attending meetings in a year	%	10	80	10
	B. Risalah Rapat Minutes of Meeting	Tersusunnya risalah rapat Completed minutes of meetings	Dokumen risalah Minutes of Meetings document	10	6	10
Jumlah Total				**100**		**100**

Tabel KPI Individu Komite Audit Tahun 2024
Tabel for Individual KPI of Audit Committee in 2024

No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Komite Duties, Functions, and Responsibilities of Committee	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot % Weight	Target	Realisasi Realization
Andi Pahril Pawi						
1	**Aspek Kajian dan Pemberian Rekomendasi** **Aspects of Study and Recommendations**			**60**		**60**
	A. Memberikan pendapat/ rekomendasi/tanggapan kepada Dewan Komisaris yang disertai dengan alasan yang jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Give opinions/recommendations/ responses to the Board of Commissioners accompanied by clear and timely reasons in accordance with the provisions of the Articles of Association	Pemberian pendapat/ rekomendasi/ tanggapan kepada Direksi yang disertai dengan alasan yang jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan anggaran dasar The provision of opinions/ recommendations/responses to the Board of Directors accompanied by clear and timely reasons in accordance with the provisions of the Articles of Association	Nota Dinas Official Memo	10	1	10
	B. Memberikan masukan/pendapat atas aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Give input/opinions on corporate actions submitted by the Board of Directors in a timely manner in accordance with the provisions of the Articles of Association	Pemberian masukan/pendapat atas aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar The provision of input/opinions on corporate actions submitted by the Board of Directors in a timely manner in accordance with the provisions of the Articles of Association	Nota Dinas Official Memo	10	1	10
	C. Memberikan telaahan/analisa atas kinerja operasi dan keuangan bulanan Provide review/analysis of monthly operational and financial performance	Pemberian masukan/pendapat dan saran atas kinerja operasi dan keuangan bulanan Providing input/opinions and suggestions on monthly operational and financial performance	Nota dinas Official Memo	10	1	10
	D. Melakukan peninjauan melalui kunjungan lapangan (site visit) terhadap kegiatan-kegiatan strategis BUMN Conducting reviews through site visits of SOEs strategic activities	kunjungan lapangan (site visit) terhadap kegiatan-kegiatan strategis BUMN. site visits to SOEs strategic activities.	Laporan Kunjungan Site visit reports	10	2	10

Tabel KPI Individu Komite Audit Tahun 2024
Tabel for Individual KPI of Audit Committee in 2024

No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Komite Duties, Functions, and Responsibilities of Committee	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot % Weight	Target	Realisasi Realization
	E. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP Providing opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the RJPP and CWPB	Pemberian pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP The provision of opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the RJPP and CWPB	Nota Dinas Official Memo	10	1	10
	F. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai laporan tahunan Providing opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the annual report	Pemberian tanggapan kepada Dewan Komisaris mengenai laporan tahunan The provision of opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the annual report	Nota Dinas Official Memo	10	1	10
	G. Mengusulkan KAP yang mengaudit laporan keuangan Perusahaan Propose a KAP to audit the company's financial statements	Pengusulan kepada RUPS/Menteri mengenai KAP yang mengaudit laporan keuangan Proposal to the GMS/Minister regarding the KAP that audits the financial statements	Surat Letter	10	1	10
	H. Pembahasan dengan KAP Discussion with KAP	Pembahasan hasil audit atas laporan keuangan Perusahaan Discussion of audit results of the Company's financial statements	Risalah Minutes of Meetings	10	3	10
2	**Aspek Dinamis dan Penguatan Tata Kelola** **Dynamic and GCG Strengthening Aspect**			**10**		**10**
	A. Kegiatan Pengembangan Development Activities			5		5
	B. Mengikuti Pelatihan/ Seminar/ Webinar untuk meningkatkan kompetensi Attend training/seminars/webinars to improve competence	Kegiatan Pelatihan/Seminar/ Webinar Training/Seminar/Webinar activities	Laporan/ Sertifikat Report/ Certificate	5	2	5
	C. Penguatan Tata Kelola GCG Strengthening			5		5
	D. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Preparing the Committee's Annual Work Plan and Budget	Penyampaian kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Submission to the Board of Commissioners regarding the Committee's annual work plan and budget	Surat Letter	5	1	5
3	**Rapat Komite** **Committee Meetings**			**10**		**10**
	A. Kehadiran Rapat Internal Komite Attendance in Internal Committee meetings	Rata-rata jumlah komite yang menghadiri rapat dalam setahun Average number of committees attending meetings in a year	%	10	80	10
	B. Risalah Rapat Minutes of Meeting	Tersusunnya risalah rapat The availability of minutes of meetings	Dokumen risalah Minutes of Meetings document	10	6	10
Jumlah Total				**100**		**100**

No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Komite Duties, Functions, and Responsibilities	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight	Target	Realisasi Realization
Kurnia Toha						
1	**Aspek Kajian dan Pemberian Rekomendasi** **Aspects of Study and Recommendations**			**60**		**60**
	A. Memberikan pendapat/ rekomendasi/tanggapan kepada Dewan Komisaris yang disertai dengan alasan yang jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Give opinions/recommendations/ responses to the Board of Commissioners accompanied by clear and timely reasons in accordance with the provisions of the Articles of Association	Pemberian pendapat/rekomendasi/ tanggapan kepada Direksi yang disertai dengan alasan yang jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan anggaran dasar The provision of opinions/ recommendations/responses to the Board of Directors accompanied by clear and timely reasons in accordance with the provisions of the Articles of Association	Nota Dinas Official Memo	10	1	10
	B. Memberikan masukan/pendapat atas aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Give input/opinions on corporate actions submitted by the Board of Directors in a timely manner in accordance with the provisions of the Articles of Association	Pemberian masukan/pendapat atas aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar The provision of input/opinions on corporate actions submitted by the Board of Directors in a timely manner in accordance with the provisions of the Articles of Association	Nota Dinas Official Memo	10	1	10
	C. Memberikan telaahan/analisa atas kinerja operasi dan keuangan bulanan. Provide review/analysis of monthly operational and financial performance.	Pemberian masukan/pendapat dan saran atas kinerja operasi dan keuangan bulanan. The provision of review/analysis of monthly operational and financial performance.	Nota dinas Official Memo	10	1	10
	D. Melakukan peninjauan melalui kunjungan lapangan (site visit) terhadap kegiatan-kegiatan strategis BUMN Conducting reviews through site visits of SOEs strategic activities	kunjungan lapangan (site visit) terhadap kegiatan-kegiatan strategis BUMN. Site visits to SOEs strategic activities.	Laporan Kunjungan Site visit reports	10	2	10
	E. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP Providing opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the RJPP and CWPB	Pemberian pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP The provision of opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the RJPP and CWPB	Nota Dinas Official Memo	10	1	10
	F. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai laporan tahunan Providing opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the annual report	Pemberian tanggapan kepada Dewan Komisaris mengenai laporan tahunan The provision of opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the annual report	Nota Dinas Official Memo	10	1	10
	G. Mengusulkan KAP yang mengaudit laporan keuangan Perusahaan Propose a KAP to audit the company's financial statements	Pengusulan kepada RUPS/Menteri mengenai KAP yang mengaudit laporan keuangan Proposal to the GMS/Minister regarding the KAP that audits the financial statements	Surat Letter	10	1	10
	H. Pembahasan dengan KAP Discussion with KAP	Pembahasan hasil audit atas laporan keuangan Perusahaan Discussion of audit results on company financial statements	Risalah Minutes of Meetings	10	3	10

No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Komite Duties, Functions, and Responsibilities	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight	Target	Realisasi Realization
2	Aspek Dinamis dan Penguatan Tata Kelola Dynamic and GCG Strengthening Aspect			10		10
	A. Kegiatan Pengembangan Development Activities			5		5
	B. Mengikuti Pelatihan/ Seminar/ Webinar untuk meningkatkan kompetensi Participating in training/seminar/ webinar to increase competency	Kegiatan Pelatihan/Seminar/ Webinar Training/Seminar/Webinar activities	Laporan/ Sertifikat Report/ Certificate	5	2	5
	C. Penguatan Tata Kelola GCG Strengthening			5		5
	D. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Prepare the Committee's Annual Work Plan and Budget	Penyampaian kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Submission to the Board of Commissioners regarding the Committee's annual Work Plan and Budget	Surat Letter	5	1	5
3	Rapat Komite Committee Meetings			10		10
	A. Kehadiran Rapat Internal Komite Attendance at Internal Committee Meetings	Rata-rata jumlah komite yang menghadiri rapat dalam setahun Average number of committee members attending meetings in a year	%	10	80	10
	B. Risalah Rapat Minutes of Meeting	Tersusunnya risalah rapat Completed minutes of meetings	Dokumen risalah Minutes of Meetings document	10	6	10
Jumlah Total				**100**		**100**

No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Komite Duties, Functions, and Responsibilities of Committee	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight	Target	Realisasi Realization
Wakhid Kurniawan Saputra						
1	**Aspek Kajian dan Pemberian Rekomendasi** **Aspects of Study and Reccommendation**			**60**		**60**
	A. Memberikan pendapat/ rekomendasi/tanggapan kepada Dewan Komisaris yang disertai dengan alasan yang jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Give opinions/recommendations/ responses to the Board of Commissioners accompanied by clear and timely reasons in accordance with the provisions of the Articles of Association	Pemberian pendapat/ rekomendasi/ tanggapan kepada Direksi yang disertai dengan alasan yang jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan anggaran dasar The provision of opinions/ recommendations/responses to the Board of Commissioners accompanied by clear and timely reasons in accordance with the provisions of the Articles of Association	Nota Dinas Official Memo	10	1	10
	B. Memberikan masukan/pendapat atas aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Give input/opinions on corporate actions submitted by the Board of Directors in a timely manner in accordance with the provisions of the Articles of Association	Pemberian masukan/pendapat atas aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar The provision of input/opinions on corporate actions submitted by the Board of Directors in a timely manner in accordance with the provisions of the Articles of Association	Nota Dinas Official Memo	10	1	10

No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Komite Duties, Functions, and Responsibilities of Committee	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight	Target	Realisasi Realization
	C. Memberikan telaahan/analisa atas kinerja operasi dan keuangan bulanan. Provide review/analysis of monthly operational and financial performance.	Pemberian masukan/pendapat dan saran atas kinerja operasi dan keuangan bulanan. The provision of review/analysis of monthly operational and financial performance.	Nota dinas Official Memo	10	1	10
	D. Melakukan peninjauan melalui kunjungan lapangan (site visit) terhadap kegiatan-kegiatan strategis BUMN Conducting reviews through site visits of SOEs strategic activities	kunjungan lapangan (site visit) terhadap kegiatan-kegiatan strategis BUMN. Site visit to SOEs strategic activities.	Laporan Kunjungan Site visit reports	10	2	10
	E. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP Providing opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the RJPP and CWPB	Pemberian pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP The provision of opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the RJPP and CWPB	Nota Dinas Official Memo	10	1	10
	F. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai laporan tahunan Providing opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the annual report	Pemberian tanggapan kepada Dewan Komisaris mengenai laporan tahunan The provision of opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the annual report	Nota Dinas Official Memo	10	1	10
	G. Mengusulkan KAP yang mengaudit laporan keuangan Perusahaan Propose a KAP to audit the company's financial statements	Pengusulan kepada RUPS/Menteri mengenai KAP yang mengaudit laporan keuangan Proposal to the GMS/Minister regarding the KAP that audits the financial statements	Surat Letter	10	1	10
	H. Pembahasan dengan KAP Discussion with KAP	Pembahasan hasil audit atas laporan keuangan Perusahaan Discussion of audit results on company financial statements	Risalah Minutes of Meetings	10	3	10
2	**Aspek Dinamis dan Penguatan Tata Kelola** **Dynamic and GCG Strengthening Aspect**			**10**		**10**
	A. Kegiatan Pengembangan Development Activities			5		5
	B. Mengikuti Pelatihan/ Seminar/ Webinar untuk meningkatkan kompetensi Participating in training/seminar/ webinar to increase competency	Kegiatan Pelatihan/Seminar/ Webinar Training/Seminar/Webinar activities	Laporan/ Sertifikat Report/ Certificate	5	2	5
	C. Penguatan Tata Kelola GCG Strengthening			5		5
	D. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Prepare the Committee's Annual Work Plan and Budget	Penyampaian kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Submission to the Board of Commissioners regarding the Committee's annual Work Plan and Budget	Surat Letter	5	1	5
3	Rapat Komite Committee Meetings			10		10
	A. Kehadiran Rapat Internal Komite Attendance at Internal Committee meetings	Rata-rata jumlah komite yang menghadiri rapat dalam setahun Average number of committee members attending meetings in a year	%	10	80	10
	B. Risalah Rapat Minutes of meetings	Tersusunnya risalah rapat Completed Minutes of meetings	Dokumen risalah Minutes of meetings document	10	6	10
Jumlah Total				**100**		**100**

No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Komite Duties, Functions, and Responsibilities of Committee	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight	Target	Realisasi Realization
Fadhila Achmadi Rosyid						
1	**Aspek Kajian dan Pemberian Rekomendasi** **Aspect of Study and Reccommendations**			**60**		**60**
	A. Memberikan pendapat/ rekomendasi/tanggapan kepada Dewan Komisaris yang disertai dengan alasan yang jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Give opinions/recommendations/ responses to the Board of Commissioners accompanied by clear and timely reasons in accordance with the provisions of the Articles of Association	Pemberian pendapat/ rekomendasi/ tanggapan kepada Direksi yang disertai dengan alasan yang jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan anggaran dasar The provision of opinions/ recommendations/responses to the Board of Commissioners accompanied by clear and timely reasons in accordance with the provisions of the Articles of Association	Nota Dinas Official Memo	10	1	10
	B. Memberikan masukan/pendapat atas aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Give input/opinions on corporate actions submitted by the Board of Directors in a timely manner in accordance with the provisions of the Articles of Association	Pemberian masukan/pendapat atas aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar The provision of Give input/opinions on corporate actions submitted by the Board of Directors in a timely manner in accordance with the provisions of the Articles of Association	Nota Dinas Official Memo	10	1	10
	C. Memberikan telaahan/analisa atas kinerja operasi dan keuangan bulanan. Provide review/analysis of monthly operational and financial performance.	Pemberian masukan/pendapat dan saran atas kinerja operasi dan keuangan bulanan. The provision of review/analysis of monthly operational and financial performance.	Nota dinas Official Memo	10	1	10
	D. Melakukan peninjauan melalui kunjungan lapangan (site visit) terhadap kegiatan-kegiatan strategis BUMN Conducting reviews through site visits of SOEs strategic activities	kunjungan lapangan (site visit) terhadap kegiatan-kegiatan strategis BUMN. Site visit to SOEs strategic activities.	Laporan Kunjungan Site visit reports	10	2	10
	E. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP Providing opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the RJPP and CWPB	Pemberian pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP The provision of opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the RJPP and CWPB	Nota Dinas Official Memo	10	1	10
	F. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai laporan tahunan Providing opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the annual report	Pemberian tanggapan kepada Dewan Komisaris mengenai laporan tahunan The provision of feedback to the Board of Commissioners regarding the annual report	Nota Dinas Official Memo	10	1	10
	G. Mengusulkan KAP yang mengaudit laporan keuangan Perusahaan Propose a KAP to audit the company's financial statements	Pengusulan kepada RUPS/Menteri mengenai KAP yang mengaudit laporan keuangan Proposal to the GMS/Minister regarding the KAP that audits the financial statements	Surat Letter	10	1	10
	H. Pembahasan dengan KAP Discussion with KAP	Pembahasan hasil audit atas laporan keuangan Perusahaan Discussion of audit results of the Company's financial statements	Risalah Minutes of Meetings	10	3	10
2	**Aspek Dinamis dan Penguatan Tata Kelola** **Dynamic and GCG Strengthening Aspect**			**10**		**10**
	A. Kegiatan Pengembangan Development Activities			5		5

No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Komite Duties, Functions, and Responsibilities of Committee	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight	Target	Realisasi Realization
	B. Mengikuti Pelatihan/ Seminar/ Webinar untuk meningkatkan kompetensi Participating in training/seminar/ webinar to increase competency	Kegiatan Pelatihan/Seminar/ Webinar Training/Seminar/Webinar activities	Laporan/ Sertifikat Report/ Certificate	5	2	5
	C. Penguatan Tata Kelola GCG Strengthening			5		5
	D. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran T ahunan Komite Prepare the Committee's Annual Work Plan and Budget	Penyampaian kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Submission to the Board of Commissioners regarding the Committee's annual Work Plan and Budget	Surat Letter	5	1	5
3	**Rapat Komite** **Committee Meetings**			**10**		**10**
	A. Kehadiran Rapat Internal Komite Attendance in Internal Committee Meetings	Rata-rata jumlah komite yang menghadiri rapat dalam setahun Average number of committee members attending meetings in a year	%	10	80	10
	B. Risalah Rapat Minutes of Meetings	Tersusunnya risalah rapat Completed Minutes of Meetings	Dokumen risalah Minutes of Meetings document	10	6	10
Jumlah Total				**100**		**100**

Berdasarkan pemenuhan target atas KPI Komite Audit, Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di tahun 2024, sesuai dengan Piagam Komite, Rencana Kerja Tahunan dan capaian target KPI yang telah ditetapkan.

Based on the fulfillment of targets for the Audit Committee's KPIs, the Board of Commissioners assesses that the Audit Committee has properly carried out its. duties and responsibilities in 2024, in accordance with the Committee Charter, Annual Work Plan, and achievement of the KPI targets that have been set.

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/ MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/ MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
3. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor: SK-3/DKU. MBU/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan BUMN;
4. Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk.

Integrated Risk Monitoring and Governance Committee

Legal Basis

1. Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-02/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
2. Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-03/MBU/03/2023 dated March 20, 2023, concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
3. Decree of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of SOEs Number: SK-3/DKU.MBU/05/2023 dated May 26, 2023, concerning Technical Instructions for the Composition and Qualifications of Risk Management Organs in the SOE Environment;
4. Articles of Association of PT Bukit Asam Tbk.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi komite yang profesional dan independen agar tercipta sinergi antara Dewan Komisaris dan Direksi PTBA untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Perusahaan.

Misi

Memberikan masukan secara komprehensif dalam rangka:

1. Meminimalkan risiko Perusahaan yang mungkin terjadi dibidang pengembangan usaha, operasi produksi dan pemasaran;
2. Mendorong prinsip dan praktik tata kelola Perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* yang baik secara terintegrasi di Group PTBA.

Pedoman Kerja/Piagam Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Pedoman kerja atau Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 21/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Penetapan Piagam Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Pedoman ini disusun sebagai acuan tata laksana tugas Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.

Secara berkala Piagam (*Charter*) dievaluasi secara berkala untuk memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku. Adapun muatan dalam Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, sebagai berikut :

1. Organisasi;
2. Tugas, Fungsi, Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Kewenangan;
3. Rapat;
4. Pelaporan.

Kriteria Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Persyaratan dan kualifikasi anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Adapun atas persyaratan dan kualifikasinya, harus memenuhi persyaratan kompetensi dan independensi, antara lain:

Vision and Mission

Vision

To become a professional and independent committee in order to create synergy between the Board of Commissioners and the Board of Directors of PTBA to support the achievement of the Company's Vision and Mission.

Mission

Providing comprehensive input in order to:

1. Minimize the Company's risks that may occur in the fields of business development, production operations and marketing;
2. Encourage the principles and practices of good corporate governance in an integrated manner in the PTBA Group.

Integrated Risk Monitoring and Governance Committee Work Guidelines/ Charter

The work guidelines or Charter of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee are stipulated by the Board of Commissioners based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 21/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 dated December 31, 2023, concerning the Stipulation of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee Charter. These guidelines are prepared as a reference for the implementation of the duties of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee.

The Charter is periodically evaluated to ensure the Company's compliance with applicable provisions. The contents of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee Charter are as follows:

1. Organization;
2. Duties, Functions, Obligations, Responsibilities, and Authorities;
3. Meetings;
4. Reporting.

Membership Criteria of the Integrated Risk and Governance Monitoring Committee

The requirements and qualifications of members of the Integrated Risk and Governance Monitoring Committee are regulated in the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. As for the requirements and qualifications, they must meet the competency and independence requirements, including:

Kompetensi

1. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Sekurang-kurangnya salah satu anggota dari Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, harus memiliki latar belakang dan kompetensi dalam pendidikan atau memiliki keahlian dalam bidang keuangan, manajemen risiko, bisnis, dan/atau Tata Kelola Terintegrasi;
3. Seluruh anggota Komite Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip tentang tata kelola perusahaan yang baik;
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang lingkup industri/bisnis Grup PTBA dan atau mampu memahami kegiatan Grup PTBA secara tepat dalam kaitannya proses Tata Kelola Terintegrasi;
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan terutama yang terkait Badan Usaha Milik Negara dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi Grup MIND ID.

Independensi

1. Anggota Komite Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh pihak luar;
2. Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Utama PTBA;
3. Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha PTBA;
4. Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi bukan merupakan karyawan PTBA dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
5. Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi material perusahaan;
6. Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi yang bukan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap menjadi anggota Komite lain di lingkungan PTBA pada periode yang sama;

Competency

1. Equipped with adequate expertise, abilities, knowledge, and experience related to their duties and responsibilities;
2. At least one member of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee must have a background and competence in education or have expertise in finance, risk management, business, and/or Integrated Governance;
3. All members of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee have sufficient knowledge to understand the principles of good corporate governance;
4. Have knowledge and understanding of the scope of the PTBA Group's industry/business and/or be able to understand the PTBA Group's activities appropriately in relation to the Integrated Governance process;
5. Have adequate knowledge of laws and regulations, especially those related to State-Owned Enterprises and laws and regulations related to the operations of the MIND ID Group.

Independence

1. Members of the Integrated Risk and Governance Monitoring Committee must be independent and free from the influence of external parties;
2. Members of the Integrated Risk and Governance Monitoring Committee must not have family relationships by blood or marriage up to the second degree either vertically or horizontally with Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors, and/or Majority Shareholders of PTBA;
3. Members of the Integrated Risk and Governance Monitoring Committee must not have business relationships either directly or indirectly related to PTBA's business activities;
4. Members of the Integrated Risk and Governance Monitoring Committee must not be employees of PTBA in the last 1 (one) year before being appointed by the Board of Commissioners;
5. Members of the Integrated Risk and Governance Monitoring Committee must not have personal interests either directly or indirectly with material company information;
6. Members of the Integrated Risk and Governance Monitoring Committee who are not Members of the Board of Commissioners may not concurrently serve as members of other Committees within PTBA during the same period;

7. Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi tidak keberatan/bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi di atas kertas bermaterai;.

7. Members of the Integrated Risk and Governance Monitoring Committee have no objections/are willing to make and sign a written statement relating to the independence requirements on stamped paper.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris akan mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Perusahaan, sedangkan masa jabatan anggota Komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Term of Office

The term of office of members of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee who are also members of the Board of Commissioners will follow the term of office as Commissioners of the Company, while the term of office of members of the Committee who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended for a period of 2 (two) years, without reducing the right of the Board of Commissioners to dismiss at any time.

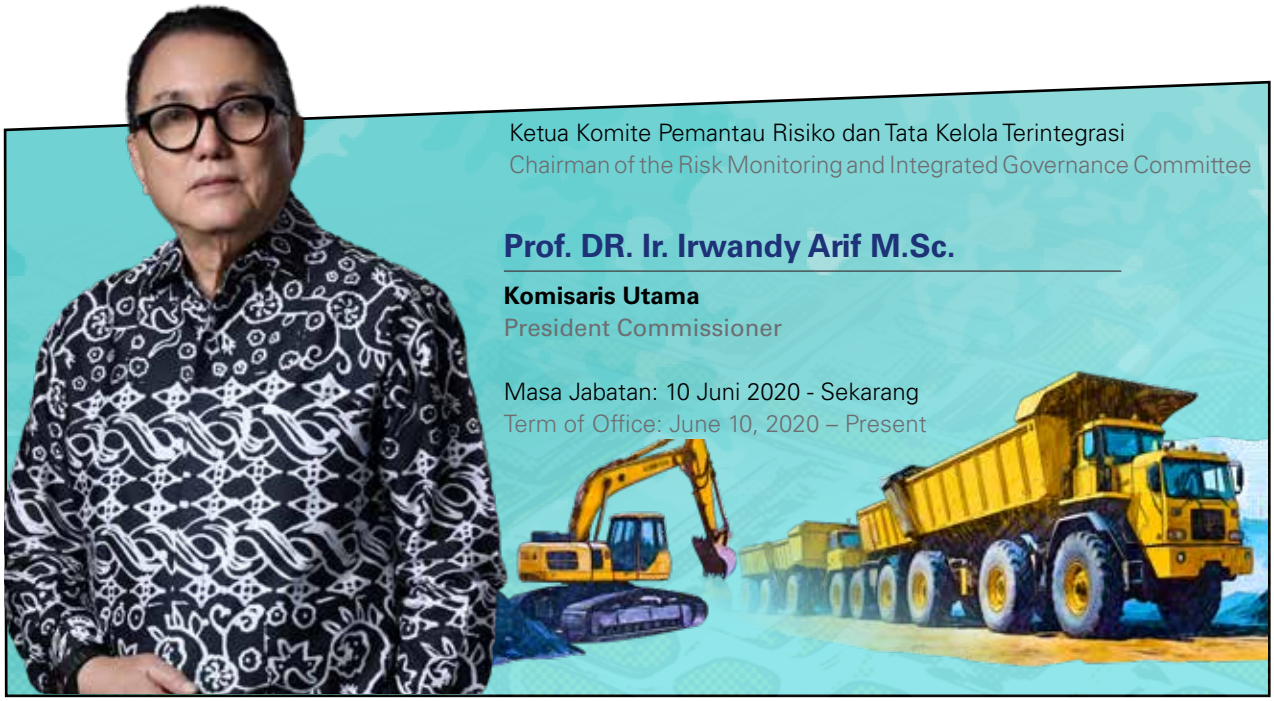
Susunan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Composition of the Integrated Risk and Governance Monitoring Committee

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan dalam Komite	Keahlian Expertise	Keputusan Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner	Ketua Chairman	Teknik Pertambangan Mining Engineering	09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	Pertama First
E. Piterdono HZ	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua Bidang Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Vice Chairman of Integrated Risk Monitoring & Governance Committee	Hukum Law	09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	Pertama First
Rahmat Hidayat Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Wakil Ketua Bidang Pasca Tambang, CSR, GCG dan IT Vice Chairman of Post-Mining, CSR, GCG, and IT	Ekonomi & SDM Economy & HRD	09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	Pertama First
Helmiansyah Irawan	Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	Audit, Investigasi Keuangan, Akuntansi, dan Manajemen Risiko Audit, Financial Investigator, Accounting and Risk Management	16/SK/PTBA-DEKOM/IX/2020 dan 05/SK/PTBA-DEKOM/X/2023	Kedua Second
Ganda Marihot Simangunsong	Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	Teknik Pertambangan dan Manajemen Risiko Mining Engineering and Risk Management	08/SK/PTBA-DEKOM/XI/2023	Pertama First

Profil Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Profile of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee



Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Chairman of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

Prof. DR. Ir. Irwandy Arif M.Sc.

Komisaris Utama
President Commissioner

Masa Jabatan: 10 Juni 2020 - Sekarang
Term of Office: June 10, 2020 – Present

Usia Age	72 tahun 72 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. S3, Ecole des Mines de Nancy, Perancis (1991) 2. S2, Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (1985) 3. S1, Teknik Pertambangan di Institut Teknologi Bandung (1976) 1. Doctoral Degree from Ecole des Mines de Nancy, France (1991) 2. Master of Industrial Engineering at Bandung Institute of Technology (1985) 3. Bachelor of Mining Engineering at Bandung Institute of Technology (1976
Riwayat Pekerjaan Work Experience	1. Komisaris PT Bukit Asam Tbk (2020-2023) 2. Komisaris Independen PT Vale Indonesia Tbk (2018) 3. Advisor Tambang Bawah Tanah PT Cibaliung Sumber Daya Mineral (2011) 4. Komisaris Independen PT Antam Tbk (2009) 1. Independent Commissioner of PT Vale Indonesia Tbk (2018) 2. Independent Commissioner PT Vale Indonesia Tbk (2018) 3. Underground Mining Advisor of PT Cibaliung Sumber Daya Mineral (2011) 4. Independent Commissioner of PT Antam Tbk (2009)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	1. Staf Khusus Menteri Energi Sumber Daya Mineral (2020 - 2024) 2. Komisaris Independen PT Baramulti Suksessarana Tbk 1. Special Staff to the Minister of Energy and Mineral Resources (2020 - 2024) 2. Independent Commissioner PT Baramulti Suksessarana Tbk
Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Komisaris Legal Basis of Appointment Board of Commissioners	1. Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 tanggal 10 Juni 2020, pengangkatan sebagai Komisaris; 2. Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 15 Juni 2023, alih tugas sebagai Komisaris Utama. 1. 2019 Annual General Meeting of Shareholders Resolution on June 10, 2020, appointed as Commissioner; 2. 2022 Annual General Meeting of Shareholders Resolution on June 15, 2023 as President Commissioner.
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of the Board of Directors, fellow members of the Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Bidang Risiko Usaha & TKT
Deputy Chairman of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee for Business Risk & TKT

Ir. E. Piterdono HZ, S.E., M.M.

Komisaris
Commisioner

Masa Jabatan: 10 Juni 2020 - Sekarang
Term of Office: June 10, 2020 – Present

Usia Age	65 tahun 65 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domiciled	Bandar Lampung, Sumatra
Riwayat Pendidikan Education Background	1. S2, Magister Manajemen di Universitas Bandar Lampung (2001) 2. S1, Ekonomi Manajemen di Universitas Saburai Lampung (2001) 3. S1, Teknik Geologi di UPN Veteran Yogyakarta (1986) 1. Master of Management at the University of Bandar Lampung (2001) 2. Bachelor of Economy Management at the Saburai University Lampung (2001) 3. Bachelor of Geological Engineering at UPN Veteran Yogyakarta (1986)
Riwayat Pekerjaan Work Experiencee	1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (2017-2020) 2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung (2014) 3. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung (2013) 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung (2012) 1. Head of Lampung Province Regional Revenue Agency (2017-2020) 2. Head of Lampung Province Mining and Energy Service (2014) 3. Head of Lampung Province Environmental Management Agency (2013) 4. Head of of Lampung Province Manpower and Transmigration Service (2012)
Jabatan Lainnya Other Position	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan Does not hold any concurrent positions both inside/outside the Company
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Terbuka Lain Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan terbuka lainnya Does not hold any concurrent positions in other companies
Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Komisaris Legal Basis of Appointment Board of Commissioners	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 tanggal 10 Juni 2020 2019 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 10, 2020
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi ataupun pemegang saham pengendali. Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Bidang GCG, CSR/PKBL dan IT
Deputy Chairman of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee for GCG, CSR/PKBL and IT

Can Dr. Rahmat Hidayat Pulungan, S.E., M.Pd.

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Masa Jabatan: 15 Juni 2023 - Sekarang
Term of Office: June 15, 2023 – Present

Usia Age	46 tahun 46 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domiciled	Jakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	1. S3, Universitas Negeri Jakarta (2020) 2. S2, Universitas Negeri Jakarta (2016) 3. S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute (2012) 4. S1, Fakultas Syariah IAIN Jakarta (2001) 1. Doctoral Degree at Jakarta State University (2020) 2. Master Degree at Jakarta State University (2016) 3. Bachelor Degree in Faculty of Economics and Business at Perbanas Institute (2012) 4. Bachelor Degree at Sharia Faculty of Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta (2001)
Riwayat Pekerjaan Work Experiencee	1. Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk (2021-2023) 2. Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017-2021) 3. Komisaris Utama PT Niaga Prima Jaya (2015-2019) 4. Komisaris PT Rekayasa Industri (2016-2017) 5. Komisaris PT Cipta Media Permasindo (2014-2017) 6. Komisaris PT Berdikari (Persero) (2013-2015) 7. Komisaris PT Niaga Permasindo (2011-2014) 1. Independent Commissioner at PT Kimia Farma Tbk (2021-2023) 2. Independent Commissioner at PT KAI (2017-2021) 3. President Commissioner at PT Niaga Prima Jaya (2015-2019) 4. Commissioner at PT Rekayasa Industri (2016-2017) 5. Commissioner at PT Cipta Media Permasindo (2014-2017) 6. Commissioner at PT Berdikari (Persero) (2013-2015) 7. Commissioner at PT Niaga Permasindo (2011-2014)
Jabatan Lainnya Other Position	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan Does not hold any concurrent positions both inside/outside the Company
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Terbuka Lain Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan terbuka lainnya Does not hold any concurrent positions in other companies
Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Komisaris Legal Basis of Appointment Board of Commissioners	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 15 Juni 2023 2022 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 15, 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Decision of the Board of Commissioners PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi ataupun pemegang saham pengendali. Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintergrasi
Member of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

Helmiansyah Irawan., SE., Ak., M.Ak., CA., CPA., ASEAN CPI., CIIB., ANZIIF (Snr. Assc) CIP., CACP.

Pihak Independen
Independent Party

Masa Jabatan: 2023 - Sekarang
Term of Office: 2023 – Present



Usia Age	36 tahun 36 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. S3, Ekonomi, Universitas Trisakti (masih menempuh pendidikan) 2. S2, Akuntansi Keuangan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI (2015) 3. S1, Ekonomi, Universitas Persada Indonesia Y.A.I (2008) 1. Doctoral Degree in Economy of Trisakti University (on-going) 2. Master Degree in Financial Accounting of YAI College of Economy (2015) 3. Bachelor Degree in Economy of YAI Persada University (2008)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	1. Auditor pada Kantor Akuntan Publik sejak tahun (2008 s/d sekarang) 2. Anggota Komite Audit PT Reasuransi Nasional Indonesia (2016-2020). 1. Auditor at Public Accountant Office (2008-present) 2. Member of Audit Committee of PT Reasuransi Nasional Indonesia (2016-2020)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Partner di KAP Antadaya, Helmiansyah, Yassirli - Member Firm of EURA Audit International Partner at Antadaya, Helmiansyah, Yassirli Public Accountant Office - Member Firm of EURA Audit International.
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	1. Pertama kali diangkat sebagai Anggota Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM Perusahaan sejak 30 September 2020. Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Bukit Asam No.16/SK/PTBADEKOM/IX/2020. 2. Selanjutnya diangkat untuk Periode Kedua sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Bukit Asam No.05/SK/PTBADEKOM/ X/2023 1. First appointed as Member of the Company's Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HRD Committee since September 30, 2020, based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk, Number 16/SK/PTBA-DEKOM/IX/2020 2. Subsequently appointed for the Second Period based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk Number 07/SK/PTBA-DEKOM/X/2023
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Member of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

Dr. Eng. Ganda Marihot Simangunsong, ST, MT

Pihak Independen
Independent Party

Masa Jabatan: 2023 - Sekarang
Term of Office: 2023 – Present

Usia Age	48 tahun 48 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. S3 Kyushu University Japan (2005) 2. S2 Rekayasa Pertambangan, Institut Teknologi Bandung (2002) 3. S1 Teknik Pertambangan, Institut Teknologi Bandung (1999) 1. Doctoral Degree from Kyushu University, Japan (2005) 2. Master Degree in Mining Engineering of Bandung Institute of Technology (2002) 3. Bachelor Degree in Mining Engineering of Bandung Institute of Technology (1999)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	1. Manajer Laboratorium Geomekanika & Peralatan Tambang (2015 s.d. sekarang) 2. Ketua Program Studi Teknik Pertambangan, Institut Teknologi Banding (2016-2020) 3. Manajer Laboratorium Perencanaan dan Valuasi Tambang (2012-2015) 4. Staf Pengajar, Lektor Kepala di Intitut Teknologi Bandung (2007 s.d. sekarang) 1. Geomechanics & Mining Equipment Laboratory Manager (2015-present) 2. Head of the Mining Engineering Study Program of Bandung Institute of Technology (2016-2020) 3. Mining Planning and Valuation Laboratory Manager (2012-2015) 4. Teaching Staff, Associate Professor at Bandung Institute of Technology (2007-present)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Staf Pengajar, Lektor Kepala di Intitut Teknologi Bandung dan Manajer Laboratorium Geomekanika & Peralatan Tambang Teaching Staff, Associate Professor at Bandung Institute of Technology and Geomechanics & Mining Equipment Laboratory Manager
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	Pertama kali diangkat sebagai Anggota Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM Perusahaan sejak 1 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/SK/PTBA-DEKOM/XI/2023. First appointed as Member of the Company's Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HRD Committee since December 1, 2023, based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk, Number 08/SK/PTBA-DEKOM/XI/2023
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi merupakan pribadi profesional yang tidak memiliki hubungan dengan Perusahaan guna menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan telah memenuhi persyaratan independensi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Piagam Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Pemenuhan independensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Integrated Risk and Governance Monitoring Committee

The Chairman and Members of the Integrated Risk and Governance Monitoring Committee are professional individuals who have no relationship with the Company in order to maintain independence in carrying out their duties and responsibilities. Members of the Company's Integrated Risk and Governance Monitoring Committee have met the independence requirements in accordance with the provisions in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The fulfillment of this independence can be seen in the following table:

Tabel Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Table of Independence of Members of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee

Aspek Independensi Independence Aspect	Irwandy Arif	E. Piterdono HZ	Rahmat Hidayat Pulungan	Helmiansyah Irawan	Ganda Marihot Simangunsong
Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Utama Perusahaan. Does not have any family relationship by blood or marriage up to the second degree either vertically or horizontally with Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors, and/or Major Shareholders of the Company.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan Does not have any business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities	✓	✓	✓	✓	✓
Bukan merupakan karyawan Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir Is not an employee of the Company in the last 1 (one) year	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi material Perusahaan Does not have any personal interest either directly or indirectly with the Company's material information	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak merangkap menjadi anggota Komite lain di lingkungan Perusahaan pada periode yang sama Does not serve concurrently as a member of another Committee within the Company in the same period	✓	✓	✓	✓	✓

Tugas dan Tanggung Jawab Bidang Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

1. Bidang Pemantau Risiko Usaha

a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsi komite pemantau risiko;
b. Melakukan komunikasi dengan kepala unit kerja dan pihak lain dalam Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan;
c. Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan Manajemen Risiko dan laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko baik Perseroan Induk maupun Anak Perusahaan dan perusahaan afiliasi;
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Perseroan dan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi;
e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko Perseroan Anak Perusahaan dan perusahaan afiliasi;
f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;
g. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya sesuai Piagam.

2. Bidang Tata Kelola Terintegrasi Usaha

a. Melakukan evaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Grup PTBA;
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan Grup PTBA terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pertambangan, pasar modal, dan peraturan lainnya yang terkait dengan usaha pertambangan, melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
d. Mempelajari laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan intern dan ekstern yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja yang memiliki fungsi Kepatuhan Terintegrasi dan auditor eksternal;
e. Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kepatuhan Grup PTBA terhadap peraturan intern dan ekstern;

Duties and Responsibilities of the Integrated Risk Monitoring and Governance Division

1. Business Risk Monitoring Division

a. Accessing all relevant information about the Company related to the duties and functions of the risk monitoring committee;
b. Communicating with the heads of work units and other parties in the Company to obtain information, clarification and request the necessary documents and reports;
c. Monitoring and reviewing the Risk Management report and other reports related to the implementation of Risk Management for both the Parent Company and Subsidiaries and affiliated companies;
d. Monitoring and evaluating the suitability of the implementation of the Company's and Subsidiaries' and Affiliated Companies' Risk Management policies and strategies;
e. Providing recommendations to the Board of Commissioners on matters that support the effectiveness of the implementation of Risk Management and the suitability between the Company's and Subsidiaries' and Affiliated Companies' Risk Management policies;
f. Monitoring and evaluating the implementation of other Risk Management functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS;
g. Carrying out other authorities, duties, and responsibilities related to its functions in accordance with the Charter.

2. Integrated Business Governance Sector

a. Evaluate the Integrated Governance policy;
b. Monitor and evaluate the compliance of the Integrated Governance policy of the PTBA Group;
c. Monitor and evaluate the compliance of the PTBA Group with the applicable laws and regulations in the field of State-Owned Enterprises (SOEs), mining, capital markets, and other regulations related to mining businesses, through coordination with the Integrated Compliance Work Unit;
d. Study periodic reports and audit report results related to compliance with internal and external regulations issued by the Work Unit with the function of Integrated Compliance and external auditors;
e. Conduct periodic meetings with the Integrated Compliance Work Unit to discuss matters related to the PTBA Group's compliance with internal and external regulations;

f. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi pada masing-masing perusahaan, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan otoritas atau instansi Pemerintah terkait mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.

3. Bidang Pasca Tambang, CSR, GCG dan IT

a. Bidang *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance*
- Memberikan pendapat independen dan profesional serta rekomendasi kepada Dewan Komisaris PTBA terhadap permasalahan yang berhubungan dengan CSR dan GCG;
- Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan CSR dan GCG;
- Membantu Dewan Komisaris terhadap implementasi perusahaan di dalam dukungan terhadap program pemerintah terkait CSR;
- Membantu Dewan Komisaris terhadap implementasi perusahaan di dalam menjaga komitmen dalam penerapan GCG;
- Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang penerapan program kemitraan, program bina lingkungan dan bina wilayah;
- Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terkait GCG dan mendukung di dalam implementasi serta pemutakhiran GCG Code Perusahaan;
- Menggali informasi mengenai pengembangan CSR melalui Direksi dan Manajemen PTBA;
- Melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui penerapan program CSR;
- Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan bidang CSR dan GCG.

b. Bidang Pasca Tambang dan IT
- Melakukan pemantauan atas permintaan Dewan Komisaris PTBA atas perkembangan situasi harga batu bara di pasar domestik maupun di pasar internasional untuk bahan evaluasi;
- Melakukan pemantauan periode pasca tambang apakah telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- Memberikan pikiran yang positif tentang adanya kesempatan dalam pengembangan usaha dari hasil-hasil penelitian untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris PTBA dan sebagai tindak lanjut langkah kebijakan Dewan Komisaris PTBA;

f. Monitor and evaluate the implementation of follow-up actions by the Company's Board of Directors and Subsidiaries on the findings of the Integrated Compliance Work Unit in each company, Public Accounting Firm, and the results of supervision by relevant authorities or government agencies regarding weaknesses in the system and implementation of the integrated compliance function.

3. Post-Mining, CSR, GCG, and IT Sector

a. Corporate Social Responsibility and Good Corporate Governance Sector
- Provide independent and professional opinions and recommendations to the PTBA Board of Commissioners on issues related to CSR and GCG;
- Review the Company's level of compliance with laws and regulations related to CSR and GCG;
- Assist the Board of Commissioners in implementing the company's support for government programs related to CSR;
- Assist the Board of Commissioners in implementing the company's commitment to implementing GCG;
- Evaluate and provide recommendations on the implementation of partnership programs, environmental development programs and regional development programs;
- Assist the Board of Commissioners in carrying out supervisory functions related to GCG and support the implementation and updating of the Company's GCG Code;
- Explore information on CSR development through the Board of Directors and Management of PTBA;
- Conduct field reviews to determine the implementation of CSR programs;
- Carry out other authorities, duties, and responsibilities related to the CSR and GCG sectors.

b. Post-Mining and IT Sector
- Monitoring at the request of the PTBA Board of Commissioners on the development of the coal price situation in the domestic market and in the international market for evaluation materials;
- Monitoring the post-mining period to check its implementation in accordance with procedures and laws and regulations;
- Providing positive inputs about the opportunities in business development from research results to be submitted to the PTBA Board of Commissioners and as a follow-up to the PTBA Board of Commissioners' policy steps;

- Mendukung rencana jangka panjang perusahaan serta pengembangan pemanfaatan lahan lokasi pasca tambang;
- Melakukan pemantauan atas perencanaan dan strategi teknologi perusahaan, termasuk mengevaluasi investasi dan pengeluaran teknologi yang signifikan;
- Memantau dan mengevaluasi tren teknologi yang ada dan yang akan datang yang dapat mempengaruhi rencana strategis perusahaan;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berkaitan Kegiatan Pasca Tambang dan kebijakan teknologi dan Informasi;

- Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya sesuai Piagam Komite.

- Supporting the company's long-term plan and the development of land use at post-mining locations;
- Monitoring the company's technology planning and strategy, including evaluating significant technology investments and expenditures;

- Monitoring and evaluating existing and future technology trends that may affect the company's strategic plan;
- Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding Post-Mining Activities and technology and Information policies;
- Carrying out other authorities, duties, and responsibilities related to its functions in accordance with the Committee Charter.

Pelaporan

Laporan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan tertulis, yang terdiri atas:

1. Laporan tiga bulanan pelaksanaan kegiatan Komite.
2. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas Komite.

Kedua laporan tersebut berisikan fakta di lapangan, analisis, kesimpulan, dan saran.

Reporting

The Integrated Risk Monitoring and Governance Committee's responsibility report is submitted to the Board of Commissioners in the form of a written report, consisting of:

1. Quarterly report on the implementation of the Committee's activities.
2. Report for each implementation of the Committee's tasks.

which include facts in the field, analysis, conclusions, and suggestions.

Pembagian Tugas Antar Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Division of Duties in Integrated Risk Monitoring and Governance Committees

No	Nama	Jabatan
1.	Irwandy Arif/Komisaris Utama	Ketua Chairman
2.	E.Piterdono H.Z/Komisaris	Wakil Ketua Bidang Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi Vice Chairman of Integrated Risk Monitoring & Governance Committee
3.	Rahmat Hidayat Pulungan/Komisaris Independen	Wakil Ketua Bidang Pasca Tambang, CSR, GCG dan IT Vice Chairman of Post-Mining, CSR, GCG, and IT
4.	Helmiansyah Irawan	Anggota Member
5.	Ganda Marihot Simangunsong	Anggota Member

Rapat Komite

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan yang dipimpin oleh Ketua Komite atau Anggota yang paling senior apabila Ketua berhalangan hadir.

Committee Meetings

The Integrated Risk and Governance Monitoring Committee must hold a meeting at least once a month, led by the Committee Chair or the most senior member if the Chair is unable to attend.

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat sebanyak 15 (Lima belas) kali dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Throughout 2024, the Integrated Risk and Governance Monitoring Committee has held a total of 15 (fifteen) meetings with the following agenda and frequency of attendance:

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Meeting Agenda Table of Integrated Risk Monitoring and Governance Committee

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	22 Maret 2024 March 22, 2024	Paparan Perkembangan Terkini Program CSR Tahun 2024 PT Bukit Asam., Tbk. Presentation of the Latest Developments in the 2024 CSR Program of PT Bukit Asam., Tbk.
2.	04 April 2024 April 04, 2024	Paparan Perkembangan Terkini Penerapan GCG PT Bukit Asam., Tbk. Presentation of the Latest Developments in the Implementation of GCG at PT Bukit Asam., Tbk
3.	12 Juni 2024 June 12, 2024	Paparan Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2024. Risk Management Exposure for the First Quarter of 2024.
4.	24 Juni 2024 June 24, 2024	Implementasi Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi. Implementation of Integrated Governance and Integrated Risk Management.
5.	09 Agustus 2024 August 09, 2024	Perkembangan Terkini Implementasi Informasi Teknologi PTBA Triwulan II Tahun 2024. Latest Developments in PTBA Information Technology Implementation in the Second Quarter of 2024.
6.	18 September 2024 September 18, 2024	Paparan Kinerja Anak Usaha PTBA Per 31 Agustus 2024. PTBA Subsidiary Performance Exposure as of August 31, 2024.
7.	26 September 2024 September 26, 2024	Rapat Internal KPR & TKT. Internal Meeting of KPR & TKT.
8.	03 Oktober 2024 October 03, 2024	Kunjungan Kerja Ke PT IPC. Site Visit to PT IPC.
9.	16 Oktober 2024 October 16, 2024	Rapat Koordinasi Komite Tata Kelola Terintegrasi PTBA. PTBA Integrated Governance Committee Coordination Meeting.
10.	22 Oktober 2024 October 22, 2024	Rapat Internal KPR & TKT Per 31 Oktober 2024. Internal Meeting KP ofR & TKT as of October 31, 2024.
11.	05 November 2024 November 05, 2024	Perkembangan Terkini Kegiatan Reklamasi, Pasca Tambang dan K3. Latest Developments in Reclamation, Post-Mining and K3 Activities.
12.	12 November 2024 November 12, 2024	Rapat Komite Bersama Dirkeu Membahas RKAP Tahun 2025. Joint Committee Meeting with Director of Finance Discusses 2025 CWPB.
13.	05 Desember 2024 December 05, 2024	Persetujuan Prinsip atas Substansi RJPP 2025-2029. Approval of the RJPP 2025-2029.
14.	09 Desember 2024 December 09, 2024	Pertemuan Lanjutan dengan Dirkeu Tekait RJPP 2025-2029. Follow-up Meeting with Director of Finance Regarding RJPP 2025-2029.
15.	16 Desember 2024 December 16, 2024	Reviu Kinerja Pencapaian Akhir Tahun 2024. 2024 Year-End Achievement Performance Review.

Tabel Kehadiran Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Attendance Table of Integrated Risk Monitoring and Governance Committee

No	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Kehadiran (%) Attendance (%)
1.	Irwandy Arif	Ketua Chairman	15	15	100
2.	E. Piterdono HZ	Wakil Ketua Bidang Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Vice Chairman of Integrated Risk Monitoring & Governance Committee	15	15	100
3.	Rahmat Hidayat Pulungan	Wakil Ketua Bidang Pasca Tambang, CSR, GCG dan IT Vice Chairman of Post-Mining, CSR, GCG, and IT	15	15	100
4.	Helmiansyah Irawan	Anggota Member	15	15	100
5.	Ganda Marihot Simangunsong	Anggota Member	15	15	100

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Pengembangan kompetensi Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan di Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Competency Development of the Integrated Risk and Governance Monitoring Committee

The competency development of the Integrated Risk and Governance Monitoring Committee can be seen in the Education and/or Training section in the Company Profile Chapter in this Annual Report book.

Sertifikasi Profesi yang Dimiliki oleh Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Professional Certification Held by the Integrated Risk and Governance Monitoring Committee

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi Profesi Institutions that Issue Professional Certification
Irwandy Arif	Ketua Chairman	Certified GRC for Executive	LSP Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan (TRK) LSP Governance, Risk, and Compliance (TRK)
E. Piterdono HZ	Wakil Ketua Bidang Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Vice Chairman of Integrated Risk Monitoring & Governance Committee	Certified GRC for Executive	LSP Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan (TRK) LSP Governance, Risk, and Compliance (TRK)
Rahmat Hidayat Pulungan	Wakil Ketua Bidang Pasca Tambang, CSR, GCG dan IT Vice Chairman of Post-Mining, CSR, GCG, and IT	Certified GRC for Executive	LSP Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan (TRK) LSP Governance, Risk, and Compliance (TRK)
Helmiansyah Irawan	Anggota Member	Insinyur Profesional Utama (iPU) Principal Professional Engineer (iPU)	Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Indonesian Engineers Association
		Insinyur APEC APEC Engineer	Persatuan Insinyur APEC APEC Engineers Association
		Sertifikasi Dosen Nasional Certified national lecturer	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Indonesian Engineers Association Ministry of Education, Culture, Research and Technology, Indonesia
Ganda Marihot Simangunsong	Anggota Member	-	-

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Di tahun 2024, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

1. **Program Kerja Risiko Usaha**
   a. Analisis dan Pembahasan Laporan Bulanan dengan Direktur Pengembangan Usaha (Proyek Strategis).
   Pembahasan dilakukan dengan melibatkan Direktur Pengembangan Usaha untuk mengevaluasi perkembangan proyek strategis PTBA yang meliputi:
   - PLTU Mulut Tambang Sumsel 8;
   - Proyek pengembangan kapasitas logistik batu bara Tanjung Enim-Keramasan;
   - Proyek Hilirisasi Batu bara (*Coal to Chemicals Plant*, dll);
   - Akuisisi tambang potensial;

Implementation of Duties of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee

In 2024, the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee had carried out its duties and responsibilities, as follows:

1. **Business Risk Work Program**
   a. Analysis and Discussion of Monthly Reports with the Director of Business Development (Strategic Projects).
   The discussion is carried out by involving the Director of Business Development to evaluate the development of PTBA's strategic projects which include:
   - Sumsel 8 Mine Mouth PLTU;
   - Tanjung Enim-Keramasan coal logistics capacity development project;
   - Coal Downstream Project (Coal to Chemicals Plant, etc.);
   - Acquisition of potential mines;

- Proyek lainnya apabila ada perkembangan terkini.
  Analisis dan pembahasan ini diperlukan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif atas proyek-proyek strategis dan mendapatkan kepastian bahwa proyek tersebut sesuai dengan jadwal/target yang ditetapkan, serta mitigasi terhadap risiko-risiko yang ada.

b. Rapat Pembahasan Triwulan Pengembangan Usaha
   Melakukan analisis, evaluasi dan pembahasan terhadap pengembangan usaha dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan ini dilakukan tidak hanya untuk proyek strategis, tetapi juga untuk proyek-proyek yang saat ini telah berjalan. Selain itu, dilakukan juga pembahasan terkait Proyek Satuan Kerja yang meliputi:
   - Strategi Korporat, Explorasi, Pengembangan dan R&D;
   - Pengembangan Bisnis;
   - Evaluasi Anak Perusahaan;
   - Pengendalian Pembangunan Proyek Perusahaan.
   - Terkait Kajian Investasi, dilakukan pengawasan terhadap realisasi investasi tahun 2024 dan pemberian masukan terhadap rencana Investasi pada RKAP 2025.

c. Rapat Pembahasan dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko
   Rapat dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi profil risiko usaha yang telah dibuat oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja/unit teknis pemilik risiko, termasuk mitigasi ancaman terhadap penurunan manfaat aset PTBA. Memonitor Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi: Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko operasional, finansial, dan strategis secara proaktif.

d. Rapat Pembahasan dengan Satuan Kerja Evaluasi Kinerja Anak Perusahaan
   Rapat pembahasan diharapkan menghasilkan kajian dan evaluasi terhadap Bukit Asam Prima (BAP) beserta anak-anak perusahaannya; Bukit Energi Investama dan anak perusahaannya (BEI); Bukit Multi Investama (BMI) dan anak perusahaannya, serta Internasional Prima Coal (IPC) dan anak perusahaannya. Tujuannya adalah memberi masukan kepada anak perusahaan agar dapat dilakukan *monitoring* dan mitigasi terhadap risiko yang kemungkinan terjadi sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

e. Kunjungan Lapangan ke Satuan/Unit Kerja PTBA dan Proyek Strategis Kunjungan lapangan pada tahun 2024 dilakukan ke Satuan/Unit Kerja PTBA dan Proyek Strategis diantaranya kami mengunjungi Pelabuhan Tarahan, PT Internasional

- Other projects if there are any recent developments.
  This analysis and discussion are needed to obtain comprehensive information on strategic projects and to ensure the project is in accordance with the schedule/target set, as well as mitigation of existing risks.

b. Quarterly Discussion Meeting on Business Development
   Conduct analysis, evaluation, and discussion of business development and investments made by the company. This activity is carried out not only for strategic projects, but also for currently running project. In addition, discussions were also held regarding the Work Unit Projects which include:
   - Corporate Strategy, Exploration, Development and R&D;
   - Business Development;
   - Subsidiary Evaluation;
   - Company Project Development Control.

   - Regarding Investment Studies, supervision was carried out on the realization of investments in 2024 and input was provided on the Investment plan in the 2025 CWPB.

c. Discussion Meeting with the Risk Management Work Unit
   The meeting was held to analyze and evaluate the business risk profile created by the Risk Management Work Unit and the Work Unit/ technical unit that owns the risk, including mitigating threats to the decline in the benefits of PTBA assets. Monitoring the Integrated Risk Management System: Identifying, assessing, and managing operational, financial, and strategic risks proactively.

d. Discussion Meeting with the Subsidiary Performance Evaluation Work Unit
   The discussion meeting is expected to produce a study and evaluation of Bukit Asam Prima (BAP) and its subsidiaries; Bukit Energi Investama and its subsidiaries (BEI); Bukit Multi Investama (BMI) and its subsidiaries, and Internasional Prima Coal (IPC) and its subsidiaries. The goal is to provide input to subsidiaries so monitoring and mitigation of possible risks can be carried out and achieve the planned targets.

e. Site Visits to PTBA Work Units/Units and Strategic Projects Field visits in 2024 were carried out to PTBA Work Units/Units and Strategic Projects, including visiting Tarahan Port, PT Internasional Prima Coal (IPC) and conducting continuous

Prima Coal (IPC) serta melakukan monitoring secara berkelanjutan pada anak usaha PTBA serta afiliasinya.

f. Analisis, Pembahasan dan Pemantauan K3, Reklamasi dan Pasca Tambang Kegiatan ini meliputi kajian dan pemantauan terhadap perlindungan dan menjamin keselamatan kerja karyawan serta mitigasi terjadinya kecelakaan kerja, kegiatan pengelolaan pasca tambang dan pengelolaan lingkungan termasuk reklamasi dan pasca tambang, serta isu yang dihadapi terkait peraturan perundangan, kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, Ijin Usaha Pertambangan (IUP), koordinasi lintas sektoral, tata ruang wilayah provinsi, tata ruang wilayah kabupaten/kota, pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi, mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

g. Pembahasan dan Mitigasi atas Asumsi dan Risiko RKAP 2024
Melakukan kajian dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Manajemen di bawah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko untuk mengantisipasi terjadinya perubahan asumsi yang telah ditetapkan akibat perubahan kondisi. Mitigasi risiko ini dilakukan agar target tetap bisa tercapai walaupun terjadi perubahan.

2. Bidang TJSL (CSR)

a. Evaluasi TJSL
Melakukan evaluasi terhadap kebijakan, strategi, dan tata kelola TJSL, Program Pendanaan UMK, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Komite juga mengawal program-program TJSL yang telah direncanakan dan dilaksanakan serta memberikan catatan dan evaluasi untuk perbaikan ke depan, terutama untuk pelaksanaan tahun 2024. Evaluasi dimaksudkan agar capaian sesuai dengan yang direncanakan.

b. Memonitor Program TJSL, Arahan Kementerian BUMN
Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan evaluasi program TJSL, Arahan Kementerian BUMN sesuai Peraturan Menteri serta untuk memperoleh gambaran perkembangan program yang dilaksanakan.

c. Rapat Pembahasan Dengan Satuan Kerja TJSL
Melakukan pembahasan setiap triwulan dengan Satuan Kerja TJSL untuk memberikan informasi secara komprehensif terkait hal yang sudah dievaluasi sebelumnya dan yang akan direncanakan.

3. Bidang Tata Kelola Terintegrasi

a. Program Tata Kelola Terintegrasi Terkini
Melakukan evaluasi Program Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan kondisi terkini, serta memperkuat tata kelola *Whistle Blowing System*

monitoring of PTBA subsidiaries and affiliates.

f. Analysis, Discussion and Monitoring of OHS, Reclamation and Post-Mining This activity includes review and monitoring of employee safety protection and mitigation of work accidents, post-mining management activities and environmental management including reclamation and post-mining, as well as issues faced related to laws and regulations, policies of the Central and Regional Governments, Mining Business Permits (IUP), cross-sectoral coordination, provincial spatial planning, district/city spatial planning, utilization of protected forest areas and production forests, forest area borrowing and use permit mechanisms, and empowerment of local communities.

g. Discussion and Mitigation of Assumptions and Risks of the 2024 CWPB
Conducting a review with the Risk Management and Management Work Unit under the Director of Finance and Risk Management to anticipate changes in the assumptions that have been set due to changes in conditions. This risk mitigation is carried out to ensuring target achievement amidst changes that occur.

2. CSR Aspect

a. CSR Evaluation
Conduct evaluation of CSR policies, strategies, and governance, UMK Funding Program, Social and Environmental Responsibility Program. The Committee also monitors CSR programs that have been planned and implemented and provides notes and evaluations for future improvements, especially for the implementation of 2024. The evaluation is intended to adjust the achievement is in accordance with the determined plan.

b. Monitoring CSR Programs, Directions of the Ministry of SOEs
Conduct monitoring of the implementation and evaluation of CSR programs, Directions of the Ministry of SOEs according to Minister Regulation and to obtain an overview of the development of the programs being implemented.

c. Discussion Meeting with CSR Work Unit
Conduct quarterly discussions with the TJSL Work Unit to provide comprehensive information regarding matters that have been previously evaluated and those to be planned.

3. Integrated Governance Field

a. Latest Integrated Governance Program
Conduct evaluation of the Integrated Governance Program in accordance with current conditions, and strengthen the governance of the Whistle

agar sesuai ketentuan yang berlaku. Memonitor kepatuhan regulasi seluruh operasi perusahaan mematuhi peraturan nasional dan internasional terkait lingkungan, keselamatan kerja, dan hak-hak masyarakat.

b. Rapat Pembahasan Dengan Anggota KPR & TKT
Melakukan rapat dengan seluruh anggota KPR & TKT baik yang berasal dari PTBA maupun dari anak usaha PTBA.

4. Rencana Program Lainnya

a. *Self-Assessment* dan Wawancara Dengan Tim GCG
Melakukan pemantauan aspek tata kelola dan turut serta memonitor penilaian kinerja GCG PTBA.

b. Penyempurnaan *Charter* Komite KPR & TKT

Mengevaluasi *Charter* yang ada dan melihat kesesuaiannya dengan kondisi saat ini jika diperlukan.

c. Rapat Pembahasan Informasi dan Teknologi (IT)
Rapat ini dilakukan guna mengoptimalkan fungsi dari penerapan IT terhadap proses bisnis di PTBA.

d. Pendidikan dan Pelatihan Profesi Berkelanjutan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi anggota KPR & TKT dengan penyertaan diklat/pendidikan/kursus yang sesuai dengan tugas dan fungsi bidang anggota komite, seperti kompetensi di bidang manajemen risiko, TJSL dan *human capital development*.

e. Rapat Lintas Komite
Rapat lintas komite ini dilakukan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi komite dalam memberikan masukan kepada Dewan Komisaris.

f. Pembahasan dan Penyusunan Laporan Kegiatan Komite
Pembahasan dan Penyusunan Laporan dilakukan dengan evaluasi program tahun berjalan dan juga rencana tahun yang akan datang.

Penilaian oleh Dewan Komisaris atas kinerja Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pemantauan dan evaluasi atas laporan kinerja Komite dalam mencapai target-target KPI masing-masing Komite.

Penilaian kinerja Komite Risiko Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2024, dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah

Blowing System to comply with applicable provisions. Monitor regulatory compliance of all company operations to comply with national and international regulations related to the environment, occupational safety, and community rights.

b. Discussion Meeting with KPR & TKT Members
Conduct a meeting with all KPR & TKT members both from PTBA and from PTBA subsidiaries.

4. Other Program Plans

a. Self-Assessment and Interview with the GCG Team
Conduct monitoring of governance aspects and participate in monitoring PTBA's GCG performance assessment.

b. Improvement of the KPR & TKT Committee Charter
Evaluate the existing Charter and see its suitability with current conditions if necessary.

c. Information and Technology (IT) Discussion Meeting
This meeting is held to optimize the function of IT implementation for business processes at PTBA.

d. Continuing Professional Education and Training
This program is intended to improve the competence of KPR & TKT members by including training/education/courses that are in accordance with the duties and functions of the committee members' fields, such as competence in the fields of risk management, CSR, and human capital development.

e. Cross-Committee Meeting
This cross-committee meeting is held to optimize the duties and functions of the committee in providing input to the Board of Commissioners.

f. Discussion and Preparation of Committee Activity Reports
Discussion and Preparation of Reports are carried out by evaluating the current year's program and also the plan for the coming year.

Assessment by the Board of Commissioners on the performance of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee

The assessment of the performance of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee is carried out by the Board of Commissioners through monitoring and evaluating the Committee's performance report in achieving the KPI targets of each Committee.

The assessment of the performance of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee in 2024 is carried out based on the realization and completion of the

disusun. Setiap awal tahun, Komite menyerahkan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan program kerja Komite selama satu tahun, yang di dalamnya memuat *Key Performance Indicator* Komite. Terdapat 3 (tiga) perspektif pada KPI Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

1. Aspek Kajian dan Pemberian Rekomendasi;
2. Aspek Dinamis dan Penguatan Tata Kelola;
3. Rapat Komite;

Perusahaan telah melakukan penilaian KPI Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi baik secara kolegial dan individual di tahun 2024. Adapun realisasi atas KPI Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2024, sebagai berikut:

work programs that have been prepared. At the beginning of each year, the Committee submits an Annual Work Plan containing the Committee's work program for one year, which includes the Committee's Key Performance Indicators. There are 3 (three) perspectives on the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee's KPI, namely:

1. Aspect of Review and Recommendation;
2. Dynamic Aspect and Strengthening of Governance;
3. Committee Meetings;

The Company has conducted an assessment of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee KPI both collegially and individually in 2024. The realization of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee KPI in 2024 is as follows:

Tabel KPI Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2024
Table of KPIs of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee in 2024

No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Komitmen Duties, Functions, and Commitment Responsibilities	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight	Target	Realisasi Realization	% Pencapaian Achievements	Skor Score
1	Aspek Kajian dan Pemberian Rekomendasi Study and Recommendation Aspects			60				
	Memberikan pendapat rekomendasi tanggapan kepada Dewan Komisaris yang disertai dengan alasan yang jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Provide recommendations and responses to the Board of Commissioners accompanied by clear and timely reasons in accordance with the provisions of the Articles of Association.	Pemberian Pendapat rekomendasi tanggapan kepada Direksi yang disertai dengan alasan yang jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Providing recommendations and responses to the Board of Directors accompanied by clear and timely reasons in accordance with the provisions of the articles of association.	Nota Dinas Official Memo	10	6	38	633	10
	Memberikan masukan/pendapat atas aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Provide input/opinions on corporate actions submitted by the Board of Directors in a timely manner in accordance with the provisions of the Articles of Association.	Pembelian masukan/ pendapat atas aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Purchase of input/opinions on corporate actions submitted by the Board of Directors in a timely manner in accordance with the provisions of the Articles of Association	Nota Dinas Official Memo	10	1	3	300	10

Tabel KPI Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2024
Table of KPIs of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee in 2024

No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Komitmen Duties, Functions, and Commitment Responsibilities	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight	Target	Realisasi Realization	% Pencapaian Achievements	Skor Score
	Memberikan pendapat dan saran berkualitas antara lain memuat aspek legal, aspek bisnis dan aspek risiko atas aksi korporasi beserta mitigasinya terhadap aksi korporasi yang diusulkan Direksi tahun berjalan Providing quality opinions and suggestions, including legal aspects, business aspects, and risk aspects of corporate actions and their mitigation for corporate actions proposed by the Board of Directors in the current year.	Pemberian pendapat dan saran berkualitas antara lain memuat aspek legal, aspek bisnis dan aspek risiko atas aksi beserta mitigasinya terhadap aksi korporasi yang diusulkan Direksi tahun berjalan Providing quality opinions and suggestions includes, among other things, legal aspects, business aspects and risk aspects of actions and their mitigation for corporate actions proposed by the Board of Directors in the current year.	Nota Dinas Official Memo	10	2	3	150	10
	Melakukan peninjauan melalui kunjungan lapangan (site visit) terhadap kegiatan-kegiatan strategi BUMN Conducting reviews through field visits (site visits) of SOEs strategic activities.	Kunjungan lapangan (site visit) terhadap kegiatan-kegiatan strategi BUMN Site visits to SOEs strategic activities	Laporan Kunjungan Visit Report	10	2	2	100	10
	Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP Provide opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the RJPP and CWPB	Pemberian pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP Providing opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the RJPP and CWPB	Nota Dinas Official Memo	10	1	2	200	10
	Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai laporan tahunan Provide opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the annual report	Pemberian tanggapan kepada Dewan Komisaris mengenai laporan tahunan Providing feedback to the Board of Commissioners regarding the annual report	Nota Dinas Official Memo	10	1	1	100	10
2	Aspek Dinamis dan Penguatan Tata Kelola Dynamic Aspects and Strengthening of Governance			20				
	Kegiatan Pengembangan Mengikuti Pelatihan/ Seminar/ Webinar/ untuk meningkatkan kompetensi Development Activities Participating in Training/Seminars/ Webinars/to improve competency	Kegiatan Pelatihan/ Seminar/ Webinar Training/Seminar/Webinar Activities	Laporan/ Sertifikat Report/ Certificate	10	1	6	600	10
	Penguatan Tata Kelola Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Governance Strengthening Preparing the Committee's Annual Work Plan and Budget	Penyampaian kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Submission to the Board of Commissioners regarding the Commitee's Annual Work Plan and Budget	Surat Letter	10	1	1	100	10

Tabel KPI Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2024
Table of KPIs of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee in 2024

No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Komitmen Duties, Functions, and Commitment Responsibilities	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight	Target	Realisasi Realization	% Pencapaian Achievements	Skor Score
3	Rapat Komite Committee Meeting			20				
	Kehadiran Rapat Internal Komite Attendance at Internal Committee Meetings	Rata-rata jumlah komite yang menghadiri rapat dalam setahun Average number of committees attending meetings in a year	%	10	70	70	100	10
	Risalah Rapat Minutes of Meeting	Tersusun risalah rapat The availability of minutes of meeting	Dokumen risalah Minutes document	10	6	15	250	10
	Jumlah Total			**100**				

Tabel KPI Individu Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2024 - Helmiansyah Irawan
KPI table of individual Risk Monitoring and Integrated Governance Committee in 2024

Perspektif Perspective	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	%	Skor Score
Kolegial Collegial	Pencapaian KPI Komite Committee KPI Achievement	%	40	100	106	106	40
	Pemberian Kajian dan Rekomendasi Provision of Studies and Recommendations	-	-	-	-	-	-
	Kebijakan mutu dan pelayanan Quality and service policy	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan Management of Subsidiaries/Joint Venture Companies	-	-	-	-	-	-
	Manajemen Risiko Perusahaan dan Paska Tambang Corporate Risk Management and Post-Mining	-	-	-	-	-	-
	Kebijakan Pengembangan Usaha Business Development Policy	-	-	-	-	-	-
1	Peneraapan Good Corporate Governance Perusahaan & Laporan Triwulan Implementation of Good Corporate Governance and Quarterly Reports	Rapat/ND Meeting	10	1	17	100	10,00
	CSR	Rapat/ND Meeting	20	2	7	100	20,00
	Kebijakan Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomination, Remuneration, and Human Resources Development Policy	-	-	-	-	-	-
	Menghadiri rapat internal Internal meeting attendance	%kehadiran %attendance	20	6	15	100	20,00
Jumlah Total			**100**				**100,00**

Berdasarkan pemenuhan target atas KPI Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di tahun 2024, sesuai dengan Piagam Komite, Rencana Kerja Tahunan dan capaian target KPI yang telah ditetapkan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan SDM BUMN;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi komite yang profesional dan independen agar tercipta sinergi antara Dewan Komisaris dan Direksi PTBA untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan.

Misi

Memberikan masukan secara komprehensif melalui:
1. Pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur dan kebijakan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Evaluasi dan tinjauan berkala dan saran atas struktur organisasi, sistem manajemen kinerja dan talenta perusahaan.

Pedoman Kerja/Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Pedoman kerja atau Piagam (*Charter*) Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 19/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Penetapan Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bukit Asam Tbk

Based on the fulfillment of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee KPI targets, the Board of Commissioners assesses that the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee has carried out its duties and responsibilities well in 2024, in accordance with the Committee Charter, Annual Work Plan, and achievement of the established KPI targets.

Nomination and Remuneration Committee

Nomination and Remuneration Committee

Legal Basis

1. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-02/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs;
2. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-03/MBU/03/2023 dated March 20, 2023, concerning SOE Organs and Human Resources;
3. Regulation of the Financial Services Authority Number 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee.

Vision and Mission

Vision

To become a professional and independent committee in order to create synergy between the Board of Commissioners and the Board of Directors of PTBA to support the achievement of the Company's vision and mission.

Mission

Providing comprehensive input through:
1. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the structure and policies for nomination and remuneration of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
2. Periodic evaluation and review and suggestions on the organizational structure, performance management system and company talent.

Nomination and Remuneration Committee Work Guidelines/Charter

The Nomination and Remuneration Committee work guidelines or Charter are stipulated by the Board of Commissioners based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 19/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 dated December 31, 2023 concerning the Establishment of the Charter of the Nomination and

Pedoman ini disusun sebagai acuan tata laksana tugas Komite Nominasi dan Remunerasi.

Secara berkala Piagam (*Charter*) dievaluasi secara berkala untuk memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku. Adapun muatan dalam Piagam (*Charter*) Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai berikut :

1. Pendahuluan;
2. Organisasi;
3. Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab
4. Persuratan;
5. Pelaporan.

Kriteria Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Persyaratan dan kualifikasi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Adapun atas persyaratan dan kualifikasinya, harus memenuhi persyaratan kompetensi dan independensi, antara lain:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang nominasi dan remunerasi;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dampak menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif;
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas;
5. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris (hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping), atau pemegang saham utama;
6. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
7. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite lain pada Perusahaan, kecuali diperkenankan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Independensi

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh pihak luar;

Remuneration Committee of PT Bukit Asam Tbk This Charter was prepared as a reference for the duties of the Nomination and Remuneration Committee.

The Charter is periodically evaluated to ensure the Company's compliance with applicable provisions. The contents of the Nomination and Remuneration Committee Charter are as follows:

1. Introduction;
2. Organization;
3. Duties, Authorities, and Responsibilities
4. Correspondence;
5. Reporting.

Nomination and Remuneration Committee Membership Criteria

The requirements and qualifications of members of the Nomination and Remuneration Committee are regulated in the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. As for the requirements and qualifications, they must meet the competency and independence requirements, including:

1. Have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of nomination and remuneration;
2. Have no personal interests/connections that have a negative impact and conflict of interest on the Company;
3. Able to communicate effectively;
4. Able to provide sufficient time to complete tasks;
5. Have no affiliation with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners (blood and marriage relationships up to the third degree either vertically or horizontally), or major shareholders;
6. Have experience related to Nomination and/or Remuneration; and
7. Do not hold concurrent positions as members of other Committees in the Company, unless permitted under applicable provisions.

Independence

1. Members of the Nomination and Remuneration Committee (NRC) must be independent and free from the influence of external parties;

2. Anggota KNR tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Utama PTBA;
3. Anggota KNR tidak boleh memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha PTBA;
4. Anggota KNR bukan merupakan karyawan PTBA dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
5. Anggota KNR tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi material perusahaan;
6. Anggota KNR yang bukan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap menjadi anggota Komite lain di lingkungan PTBA pada periode yang sama;
7. Anggota KNR tidak keberatan/bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi di atas kertas bermaterai.

2. Members of the NRC must not have blood or marriage relations up to the second degree either vertically or horizontally with Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors, and/or Majority Shareholders of PTBA;
3. Members of the NRC must not have business relations either directly or indirectly related to PTBA's business activities;
4. Members of the NRC should not become PTBA employees in the last 1 (one) year before being appointed by the Board of Commissioners;
5. Members of the NRC must not have personal interests either directly or indirectly with material company information;
6. Members of the NRC who are not Members of the Board of Commissioners may not concurrently serve as members of other Committees within PTBA during the same period;
7. Members of the NRC have no objections/are willing to make and sign a written statement relating to the independence requirements on stamped paper.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris akan mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Perusahaan, sedangkan masa jabatan anggota Komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Term of Office

The term of office of members of the Nomination and Remuneration Committee who are also members of the Board of Commissioners will follow the term of office as Commissioners of the Company, while the term of office of members of the Committee who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended for a period of 2 (two) years, without reducing the right of the Board of Commissioners to dismiss at any time.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi
Composition of the Nomination and Remuneration Committee

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan dalam Komite	Keahlian Expertise	Keputusan Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Chairman	Hukum Law	09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	Pertama First
Carlo Brix Tewu	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua Vice Chairman	Hukum Law	07/SK/PTBA-DEKOM/XII/2021 dan 09/SK/ PTBA-DEKOM/ XII/2023	Pertama First
Nora Sri Hendriyeni	Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	Akuntansi dan Manajemen Accounting and Management	18/SK/PTBA-DEKOM/XI/2020, 07/SK/PTBADEKOM/ XI/2023, dan 11/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	Kedua Second

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Profile of the Nomination and Remuneration Committee



Usia Age	63 tahun 63 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domiciled	Jakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	1. S3, University of Washington School of Law pada tahun 2007 2. S2, University of Washington School of Law pada tahun 1998 3. S1, Hukum, Universitas Indonesia tahun 1987 1. Doctoral Degree from the University of Washington School of Law (2007) 2. Master Degree from the Washington School of Law (1998) 3. Bachelor of Law, University of Indonesia (1987)
Riwayat Pekerjaan Work Experiencee	1. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI (2018-2020) 2. Kepala Pusat Hukum dan Humas Kementerian ATR/BPN (2016-2018) 1. Chairman of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) (2018-2020) 2. Head of Legal and Public Relations Center at the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (2016-2018)
Jabatan Lainnya Other Position	Profesor pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Professor at the Faculty of Law at University of Indonesia
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Terbuka Lain Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan terbuka lainnya Does not hold any concurrent positions in other companies
Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Komisaris Legal Basis of Appointment Board of Commissioners	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 15 Juni 2023 2022 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 15, 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi ataupun pemegang saham pengendali. Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Vice Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Irjen. Pol. (Purn) Drs. Carlo Brix Tewu

Komisaris
Commissioner

Masa Jabatan: 10 Juni 2020 - Sekarang
Term of Office: June 10, 2020 – Present

Usia Age	62 tahun 62 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domiciled	Jakarta
Riwayat Pendidikan Education Background	1. Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi Polri (2008) 2. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (2005) 3. Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (1998) 4. Akademi Kepolisian (1994) 1. Police Staff and High-Level Leadership School of National Police of the Republic of Indonesia (2008) 2. National Defense Institute of the Republic of Indonesia (2005) 3. Police Staff and Leadership School (1998) 4. Police Academy (1994)
Riwayat Pekerjaan Work Experiencee	1. Tenaga Ahli Menteri BUMN Bidang Mediasi (2023-2024) 2. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN (2022-2023) 3. Deputi Bidang Koordinasi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (2016) 4. Pjs. Gubernur Sulawesi Barat (2016) 5. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri (2015) 1. Expert Staff of the Minister of SOEs in the Field of Mediation (2023-2024) 2. Deputy for Law and Legislation, Ministry of SOEs (2020-Present) 3. Deputy for Coordination of Security and Public Order at the Coordinating Ministry for Politics, Legal, and Security Affairs (2016) 4. West Sulawesi Acting Governor (2016) 5. Criminal Acts Director for Criminal Investigation of National Police of the Republic of Indonesia (2015)
Jabatan Lainnya Other Position	1. Tenaga Ahli Menteri BUMN Bidang Mediasi (2023-2024) 2. Anggota Dewan Pengawas Yayasan BUMN 3. Anggota Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia 1. Expert Staff of the Minister of SOEs in the Field of Mediation (2023-2024) 2. Member of the Supervisory Board of the State-Owned Enterprises Foundation 3. Member of the Bakti Sepak Bola Indonesia Foundation
Rangkap Jabatan pada Perusahaan Terbuka Lain Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan terbuka lainnya Does not hold any concurrent positions in other companies
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 tanggal 10 Juni 2020 2019 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 10, 2020
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi ataupun pemegang saham pengendali. Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Nora Sri Hendriyeni, Ph.D., CA., CSRA., CSP., CACP

Pihak Independen
Independent Party

Masa Jabatan: 2023 - Sekarang
Term of Office: 2023 – Present

Usia Age	51 tahun 51 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. S3 Akuntansi, University of Central Lancashire, United Kingdom (2018) 2. S2 Manajemen, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1998) 3. S1 Akuntansi, Universitas Andalas (1996) 1. Doctoral Degree in Accounting of Central Lancashire University, United Kingdom (2018) 2. Master Degree in Management of Gadjah Mada University (1998) 3. Bachelor Degree in Accounting of Andalas University (1996)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	1. Executive Director of Institute of Certified Sustainability Practitioner (ICSP) (2024-present) 2. Dosen di Sekolah Tinggi Manajemen PPM (2008 - 2023) 3. Ketua Program Studi Akuntansi Bisnis (2009-2014) 4. Ketua Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen PPM 1. Executive Director of Institute of Certified Sustainability Practitioner (ICSP) (2024-present) 2. Lecturer at PPM College of Management (2008 - 2023) 3. Head of Business Accounting Study Program (2009-2014) 4. Head of Master of Management Study Program, PPM College of Management
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Direktur Eksekutif Institute of Certified Sustainability Practitioner (ICSP) (2024-sekarang) Executive Director of the Institute of Certified Sustainability Practitioner (ICSP) (2024-present)
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	1. Pertama kali diangkat sebagai Anggota Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan SDM Perusahaan sejak 2 November 2020 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk, No. 18/SK/PTBA-DEKOM/XI/2020 2. Periode Kedua berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No.07/SK/PTBA-DEKOM/VIII/2023 1. First appointed as Member of the Company's Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HRD Committee since November 2, 2020, based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk, Number 18/SK/PTBA-DEKOM/ XI/2020 2. Second Period based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No.07/SK/PTBA-DEKOM/VIII/2023
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pribadi profesional yang tidak memiliki hubungan dengan Perusahaan guna menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan telah memenuhi persyaratan independensi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2023 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Pemenuhan independensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Independence of Nomination and Remuneration Committee Members

The Chairman and Members of the Nomination and Remuneration Committee are professional individuals who have no relationship with the Company in order to maintain independence in carrying out their duties and responsibilities. Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Company have met the independence requirements in accordance with the provisions of OJK Regulation Number 34/POJK.04/2023 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, as well as the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The fulfillment of this independence can be seen in the following table.

Tabel Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Table of Independence of Nomination and Remuneration Committee Members

Aspek Independensi Independence Aspect	Kurnia Toha	Carlo Brix Tewu	Nora Sri Hendriyeni
Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Utama Perusahaan. Has no family relationship by blood or marriage up to the second degree either vertically or horizontally with Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors, and/or Major Shareholders of the Company.	✓	✓	✓
Tidak boleh memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Should not have any business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities.	✓	✓	✓
Bukan merupakan karyawan PTBA dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris. Not an employee of PTBA in the last 1 (one) year before being appointed by the Board of Commissioners.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi material perusahaan Have no personal interest either directly or indirectly with the Company's material information	✓	✓	✓

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk melakukan kegiatan dalam membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugasnya diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
   c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Melakukan tinjauan secara berkala atas sistem Manajemen Talenta Perusahaan serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaannya;

The Nomination and Remuneration Committee is tasked with carrying out activities to assist the Board of Commissioners in carrying out its duties, including the following:

1. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:
   a. Composition of positions for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
   b. Policies and criteria required in the Nomination process;
   c. Performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
2. Conducting periodic reviews of the Company's Talent Management system and supervision and evaluation of its implementation;

a. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian Talenta yang dilakukan oleh Direksi Perseroan;
b. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta Terseleksi (*selected talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta Ternominasi (*nominated talent*) yang dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS;
c. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebelum diajukan ke RUPS;

d. Melakukan evaluasi atas usulan KPI individu anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

e. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;

f. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota dewan Komisaris Perseroan;

g. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi karyawan yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris Perseroan; dan;
h. Melakukan evaluasi atas usulan direksi Perseroan mengenai struktur organisasi Perseroan;

i. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   - Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
   - Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; dan besaran Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
   - Besaran Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;

3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

   b. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas (poin a-k), Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

a. Conducting evaluations of the Talent classification system and procedures carried out by the Company's Board of Directors;
b. Conducting validation and calibration of Selected Talents, to produce a list of Nominated Talents nominated by the Board of Commissioners to the GMS;

c. Conducting evaluations of prospective Company representatives who will be proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of Subsidiaries, before being submitted to the GMS;
d. Conducting evaluations of the individual KPI proposals of members of the Company's Board of Directors and members of the Board of Commissioners based on benchmarks that have been prepared as evaluation materials;
e. Prepare proposals for individual performance evaluation systems for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners of the Company;
f. Prepare proposals for development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners of the Company;
g. Evaluate the remuneration policy for employees that require approval/response from the Board of Commissioners of the Company; and;
h. Evaluate the proposals of the Board of Directors of the Company regarding the organizational structure of the Company;
i. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
   - Remuneration Structure of the Board of Directors and Board of Commissioners;
   - Remuneration Policy of the Board of Directors and Board of Commissioners; and

   - Amount of Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners;

3. Assist the Board of Commissioners in assessing performance with the suitability of the Remuneration received by each member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners.
   a. Prepare the composition and process of Nomination of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
   b. In addition to the duties as referred to above (points a-k), the Board of Commissioners may assign other assignments to the Nomination and Remuneration Committee in accordance with laws and regulations.

Dalam melakukan tugas sebagaimana di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Bidang Nominasi

1. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Bidang Remunerasi

1. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dapat terdiri atas:
   a. Gaji;
   b. Honorarium;
   c. Insentif; dan/atau
   d. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
2. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

3. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

4. Dalam penyusunan sebagaimana angka 1) sampai dengan 3) di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi harus mempertimbangkan Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan sejenis dan skala usaha dari Perusahaan dalam industrinya.

Pelaporan

Laporan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan tertulis, yang terdiri atas:

In carrying out the duties as above, the Nomination and Remuneration Committee is obliged to carry out the following procedures:

Duties and Responsibilities of the Nomination Division

1. Prepare the composition and nomination process for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
2. Prepare the policies and criteria needed in the nomination process for candidates for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
3. Assist in the implementation of the evaluation of the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
4. Prepare a program for developing the capabilities of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
5. Review and propose candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS

Duties and Responsibilities of the Remuneration Division

1. Prepare the Remuneration structure for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners which may consist of:
   a. Salary;
   b. Honorarium;
   c. Incentives; and/or
   d. Fixed and/or variable allowances.
2. Prepare policies on Remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
3. Prepare the amount of Remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
4. In the preparation as per points 1) to 3) above, the Nomination and Remuneration Committee must consider the Remuneration applicable in the industry in accordance with the business activities of similar Companies and the business scale of the Company in its industry;

Reporting

The Nomination and Remuneration Committee's responsibility report is submitted to the Board of Commissioners in the form of a written report, consisting of:

1. Laporan tertulis mengenai aktivitasnya kepada Dewan Komisaris PTBA paling tidak sekali
2. Menyampaikan laporan hasil penelaahan dan kajian kepada Dewan Komisaris PTBA selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diselesaikannya laporan hasil penelaahan dan kajian yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi;
3. Pada akhir Triwulan IV, melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Komite dan melaporkan hasil evaluasi dimaksud secara tertulis kepada Dewan Komisaris PTBA;

Ketiga laporan tersebut berisikan fakta di lapangan, analisis, kesimpulan dan saran.

1. A written report on its activities to the PTBA Board of Commissioners at least once
2. Submitting a report on the results of the review and study to the PTBA Board of Commissioners no later than 2 (two) working days after the completion of the report on the results of the review and study conducted by the Nomination and Remuneration Committee;
3. At the end of Quarter IV, conducting an evaluation of the implementation of the Committee's activities and reporting the results of the evaluation in writing to the PTBA Board of Commissioners;

which includes facts on the field, analysis, conclusions, and suggestions

Pembagian Tugas Antar Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi terbagi atas bidang tugas sebagai berikut:

Division of Duties Between the Nomination and Remuneration Committee

In carrying out its duties, the Nomination and Remuneration Committee is divided into the following areas of duty:

No	Nama Name	Jabatan Position
1.	Kurnia Toha/Komisaris Independen | Independent Commissioner	Ketua Chairman
2.	Carlo B. Tewu/Komisaris | Commissioner	Wakil Ketua Vice Chairman
3.	Nora Sri Hendriyeni	Anggota Member

Rapat Komite

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mengadakan rapat sekurang- kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan yang dipimpin oleh Ketua Komite atau Anggota yang paling senior apabila Ketua berhalangan hadir.

Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah bertemu lebih dari 2 (dua) kali setahun membahas terkait dengan nominasi dan remunerasi serta agenda lainnya yakni tercatat 15 (lima belas) kali adapun pengungkapan terkait dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Committee Meetings

The Nomination and Remuneration Committee must conduct a meeting at least once a month, led by the Committee Chairman or the most senior Member if the Chairman is unable to attend.

Throughout 2024, the Nomination and Remuneration Committee has held as many as 2 (two) times a year discussing nominations and remuneration as well as other agendas, namely 15 (fifteen) times, including disclosures with the following agenda and frequency of attendance:

Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Table of Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	4 Januari 2024 January 4, 2024	Pembahasan Program kerja KNR 2024 Discussion of the 2024 KNR work program
2	7 Februari 2024 February 7, 2024	Rapat Koordinasi Capaian Program SDM PTBA Tahun 2023 dan Program Kerja SDM Tahun 2024 Coordination Meeting of PTBA HR Program Achievements in 2023 and HR Work Program in 2024
3	18 Maret 2024 March 18, 2024	Perubahan Struktur Organisasi PTBA Changes in PTBA Organizational Structure

Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Table of Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
4	24 April 2024 April 24, 2024	Kajian Long Term Incentive (LTI)-1* Long Term Incentive (LTI) Study-1*
5	28 Mei 2024 May 28, 2024	Evaluasi kinerja SDM AAP dan isu-isu SDM di Unit Pelabuhan Dermaga Kertapati Evaluation of AAP HR performance and HR issues at Kertapati Pier Port Unit
6	29 Mei 2024 May 29, 2024	Evaluasi kinerja SDM AAP dan isu-isu SDM di Unit Penambangan Tanjung Enim Evaluation of AAP HR performance and HR issues in Tanjung Enim Mining Unit
7	12 Juni 2024 June 12, 2024	Telaahan hasil monitoring dan evaluasi** Review of monitoring and evaluation results**
8	2 Agustus 2024 August 2, 2024	Kajian Remunerasi LTI – 2 dan Nominasi Pengurus AAP* LTI Remuneration Review – 2 and AAP Board Nomination*
9	22 Agustus 2024 August 22, 2024	Evaluasi kinerja SDM AAP dan isu-isu SDM di Internasional Prima Coal (IPC) Evaluation of AAP HR performance and HR issues at Internasional Prima Coal (IPC)
10	2 September 2024 September 2, 2024	Persiapan materi rapat koordinasi dengan SDM Stratejik dan Nominasi Pengurus AAP Preparation of materials for coordination meetings with Strategic HR and AAP Management Nominations
11	22 Oktober 2024 October 22, 2024	Evaluasi Hasil Implementasi SDM Stratejik 2024 dan Isu-isu SDM** Evaluation of the Results of the Implementation of Strategic HR 2024 and HR Issues**
12	5 Desember 2024 December 5, 2024	Pembahasan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Discussion of the Company's Long-Term Plan (CLTP)
13	10 Desember 2024 December 10, 2024	Evaluasi Internal KNR-Kinerja 2024 KNR Internal Evaluation-Performance 2024
14	16 Desember 2024 December 16, 2024	Evaluasi Kinerja Komite PTBA tahun 2024 PTBA Committee Performance Evaluation in 2024
15	18 Desember 2024 December 18, 2024	Evaluasi kinerja SDM AAP dan isu-isu SDM di Unit Pelabuhan Tarahan Evaluation of AAP HR performance and HR issues at Tarahan Port Unit

*Agenda membahas terkait dengan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.
** Agenda membahas terkait dengan Nominasi/Selected Talent.
*The agenda discusses the Remuneration of the Company's Directors and Board of Commissioners.
** The agenda discusses the Nomination/Selected Talent.

Tabel Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi
Table of Nomination and Remuneration Committee Attendance

No	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Kehadiran (%) Attendance (%)
1	Kurnia Toha	Ketua Chairman	15	15	100
2	Carlo Brix Tewu	Wakil Ketua Vice Chairman	15	14	93
3	Nora Sri Hendriyeni	Anggota Member	15	15	100

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Pengembangan kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan di Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Competency Development of the Nomination and Remuneration Committee

The competency development of the Nomination and Remuneration Committee can be seen in the Education and/or Training section in the Company Profile Chapter in this Annual Report book.

Sertifikasi Profesi yang Dimiliki oleh Komite Nominasi dan Remunerasi
Professional Certification by the Nomination and Remuneration Committee

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi Profesi Institutions that Issue Professional Certification
Kurnia Toha	Ketua Chairman	Certified GRC for Executive	LSP Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan (TRK) LSP Governance, Risk, and Compliance (TRK)
Carlo Brix Tewu	Wakil Ketua Vice Chairman	Certified GRC for Executive	LSP Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan (TRK) LSP Governance, Risk, and Compliance (TRK)
Nora Sri Hendriyeni	Anggota Member	Cert.IFR-Certified International Financial Report CA-Chartered Accountant CACP-Certified Audit Committee Professional CSRA-Certified Sustainability Assurance CSRS-Certified Sustainability Reporting Specialist CSP-Certified Sustainability Practitioner CRMO-Certified Risk Management Officer	ACCA London IAI-Ikatan Akuntan Indonesia Indonesian Accountant Association (IAI) IKAI-Ikatan Komite Audit Indonesia IKAI-Indonesian Audit Committee Association NCCR-National Center for Corporate Reporting NCCR NCCR LSPMR-Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko LSPMR-Risk Management Professional Certification Institute

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Di tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan penyiapan proses nominasi Direksi PTBA dan Anak Perusahaan dan Afiliasinya;
2. Pengajuan usulan besaran gaji Dewan Direksi dan Honorarium Dekom 2024 dan Tantiem 2023;
3. Kunjungan Kerja Lapangan;
4. Rapat pembahasan Program Kerja SDM Stratejik dengan Direktur SDM;
5. Evaluasi Struktur Organisasi;
6. Penyempurnaan Charter Komite Nominasi dan Remunerasi;
7. Rapat Lintas Komite;
8. Pendidikan dan Pelatihan Profesi Berkelanjutan
9. Pembahasan dan penyusunan laporan kegiatan Komite.

Penilaian oleh Dewan Komisaris atas kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pemantauan dan evaluasi atas laporan kinerja Komite dalam mencapai target-target KPI masing-masing Komite.

Implementation of Duties of the Nomination and Remuneration Committee

In 2024, the Nomination and Remuneration Committee carried out its duties and responsibilities as follows:

1. Implementation and preparation of the nomination process for the Board of Directors of PTBA and its Subsidiaries and Affiliates
2. Submission of proposals for the amount of the Board of Directors' salary and Honorarium for the 2024 Board of Commissioners and Tantiem for 2023
3. Site Visits
4. Meetings to discuss the Strategic HR Work Program with the HR Director
5. Evaluation of the Organizational Structure;
6. Improvement of the Nomination and Remuneration Committee Charter
7. Cross-Committee Meetings
8. Continuing Professional Education and Training
9. Discussion and preparation of the Committee's activity report

Assessment by the Board of Commissioners of the Performance of the Nomination and Remuneration Committee

The performance assessment of the Nomination and Remuneration Committee is carried out by the Board of Commissioners through monitoring and evaluation of the Committee's performance report in achieving the KPI targets of each Committee.

Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2024, dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah disusun. Setiap awal tahun, Komite menyerahkan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan program kerja Komite selama satu tahun, yang di dalamnya memuat *Key Performance Indicator* Komite. Terdapat 3 (tiga) perspektif pada KPI Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu:

1. Aspek Kajian dan Pemberian Rekomendasi
2. Aspek Dinamis dan Penguatan Tata Kelola;
3. Rapat Komite;

Adapun realisasi atas KPI Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2024, sebagai berikut:

The performance assessment of the Nomination and Remuneration Committee in 2024 is carried out based on the realization and completion of the work program that has been prepared. At the beginning of each year, the Committee submits an Annual Work Plan containing the Committee's work program for one year, which includes the Committee's Key Performance Indicators. There a 3 (three) perspectives on the Nomination and Remuneration Committee's KPI, namely:

1. Aspect of Study and Recommendation
2. Dynamic Aspect and Strengthening of Governance;
3. Committee Meeting;

The realization of the Nomination and Remuneration Committee KPI in 2024 is as follows:

Tabel KPI Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2024
Table of Nomination and Remuneration Committee KPI in 2024

No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Komite Duties, Functions, and Responsibilities of Committee	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Target	Realisasi Realization	% Pencapaian % Achievement	Skor Score
1	Aspek Kajian dan Pemberian Rekomendasi Aspects of Study and Recommendation			60				
	Memberikan pendapat/ rekomendasi ungkapan kepada Dewan Komisaris yang disertai dengan alasan yang jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Provide opinions/ recommendations to the Board of Commissioners accompanied by clear and timely reasons in accordance with the provisions of the Articles of Association.	Pemberian Pendapat rekomendasi/ tanggapan kepada Direksi yang disertai dengan alasan yang jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan anggaran dasar Providing recommendations/ responses to the Board of Directors accompanied by clear and in a timely manner in accordance with the provisions of the Articles of Association.	Nota Dinas Official Memo	10	3	7	233	10
	Memberikan masukan/pendapat atas aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Provide input/opinions on corporate actions submitted by the Board of Directors in a timely manner in accordance with the provisions of the Articles of Association.	Pemberian masukan/ pendapat atas aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Providing input/opinions on corporate actions submitted by the Board of Directors in a timely manner in accordance with the provisions of the Articles of Association	Nota Dinas Official Memo	10	1	0	0	10
	Memberikan pendapat dan saran berkualitas antara lain memuat aspek legal, aspek bisnis dan aspek risiko atau aksi korporasi beserta mitigasinya terhadap akso korporasi yang diusulkan Direksi tahun berjalan Providing quality opinions and suggestions, including legal aspects, business aspects and risk aspects or corporate actions along with their mitigation for corporate actions proposed by the Board of Directors for the current year.	Pemberian pendapat dan saran berkualitas antara lain memuat aspek legal, aspek bisnis dan aspek risiko atas aksi beserta mitigasinya terhadap aksi korporasi yang diusulkan Direksi tahun berjalan Providing quality opinions and suggestions includes, among other things, legal aspects, business aspects and risk aspects of actions and their mitigation for corporate actions proposed by the Board of Directors in the current year.	Nota Dinas Official Memo	10	1	1	100	10

Tabel KPI Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2024
Table of Nomination and Remuneration Committee KPI in 2024

No	Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Komite Duties, Functions, and Responsibilities of Committee	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Target	Realisasi Realization	% Pencapaian % Achievement	Skor Score
	Melakukan peninjauan melalui kunjungan lapangan (*site visit*) terhadap kegiatan-kegiatan strategi BUMN Conducting reviews through field visits (site visits) of SOEs strategic activities.	Kunjungan lapangan (*site visit*) terhadap kegiatan-kegiatan strategis BUMN Site visit to SOEs strategic activities	Laporan Kunjungan Visit Report	10	2	2	100	10
	Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP Providing opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the RJPP and CWPB	Pemberian pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP Providing opinions and suggestions to the Board of Commissioners regarding the RJPP and CWPB	Nota Dinas Official Memo	10	1	0	0	10
2	Aspek Dinamis dan Penguatan Tata Kelola Dynamic Aspects and Strengthening of Governance			20				
	Kegiatan Pengembangan Development Activities							
	Mengikuti pelatihan/ Seminar Join training/seminar	Kegiatan Pelatihan/ Seminar/ Webinar Training/Seminar/Webinar Activities	Laporan/ Sertifikat Report/ Certification	10	1	3	300	10
	Penguatan Tata Kelola Strengthening Governance							
	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Prepare the Committee's Annual Work Plan and Budget	Penyampaian kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Submission to the Board of Commissioners regarding the Committee's annual work plan and budget	Surat Letter	10	1	3	300	10
3	Rapat Komite Committee Meeting			20				
	Kehadiran Rapat Internal Komite - Attendance at Internal Committee Meetings	Rata-rata jumlah komite yang menghadiri rapat dalam setahun Average number of committees attending meetings in a year	%	10	70	70	100	10
	Risalah Rapat Minutes of Meeting	Tersusunnya risalah rapat The availability of minutes of meeting	Dokumentasi risalah Minutes Document	10	3	4	133	10
	Jumlah Total			**100**				

Berdasarkan pemenuhan target atas KPI Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di tahun 2024, sesuai dengan Piagam Komite, Rencana Kerja Tahunan dan capaian target KPI yang telah ditetapkan.

Based on the fulfillment of the Nomination and Remuneration Committee's KPI targets, the Board of Commissioners assesses that the Nomination and Remuneration Committee has carried out its duties and responsibilities well in 2024, in accordance with the Committee Charter, Annual Work Plan and the achievement of the KPI targets that have been set.

	Indikator Indicator	**Satuan** Unit	**Polaritas** Polarity	**Formula**	**Bobot** Weight	**Target**
1	Pemberian Kajian dan Rekomendasi Providing of Studies and Recommendations				80	
	• Pelaksanaan dan penyiapan proses nominasi Direksi PTBA dan AAP Implementation and preparation of the nomination process for the Board of Directors of PTBA and AAP	Dokumen Document	Maximize Maximize	Rekomendasi tertulis Written recommendation	10	3
	• Pengajuan usulan besaran gaji Dewan Direksi dan honorarium Dekom 2025 dan tantiem 2024 Submission of proposal for the amount of the Board of Directors' salary and honorarium for the Board of Commissioners in 2025 and bonuses in 2024	Dokumen Document	Maximize Maximize	Rekomendasi tertulis Written recommendation	10	1
	• Kunjungan kerja lapangan Site visit	Dokumen Document	Maximize Maximize	Laporan Kunjungan Visit report	10	2
	• Rapat pembahasan program kerja SDM statejik dengan Direktur SDM Meeting to discuss the strategic HR work program with the HR Director	Dokumen Document	Maximize Maximize	Risalah rapat Minutes of meeting	10	1
	• Evaluasi struktur organisasi Organizational structure evaluation	Dokumen Document	Maximize Maximize	Risalah rapat/ rekomendasi Minutes of meeting/recommendation	10	1
	• Penyempurnaan Charter Komite Nominasi dan Remurasi Improvement of the Nomination and Remuneration Committee Charter	Dokumen Document	Maximize Maximize	Revisi charter Charter revision	10	1
	• Rapat lintas komite Cross-committee meeting	Dokumen Document	Maximize Maximize	Risalah rapat Minutes of meeting	10	1
	• Pendidikan dan pelatihan profesi berkelanjutan Sustainable professional education and training	Dokumen Document	Maximize Maximize	Laporan Kegiatan KNR KNR report activity	10	1
	Menghadiri rapat internal Attending internal meeting	% kehadiran %attendance	Maximize Maximize	Risalah rapat Minutes of meeting	20	70
Jumlah Total					**100**	**100**

Unit Pendukung Direksi
Board of Directors Supporting Unit



Sekretaris Perusahaan

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.35/2014") dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") diwajibkan untuk membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan. Fungsi Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan yang menjalakan peran sangat esensial bagi perusahaan seperti (i) hubungan dengan pemegang saham (ii) hubungan dengan pemangku kepentingan termasuk media, (iii) menjamin kepatuhan perusahaan (khususnya Direksi, Dewan Komisaris, serta perangkat Organ Pendukung Dewan Komisaris) dan *good corporate governance*, khususnya untuk ketentuan-ketentuan di bidang pasar modal, (iv) arsip dan kesekretariatan khususnya terkait dengan dokumentasi rapat-rapat Direksi, Dewan Komisaris, rapat gabungan, dan RUPS dapat berjalan efektif dan efisien dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik

Corporate Secretary

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies ("POJK No.35/2014") and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Activities Significantly, the State-Owned Enterprise, PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") is required to establish the Corporate Secretary. The Function of the Corporate Secretary Work Unit will carry out very essential roles for the company such as (i) relations with shareholders (ii) relations with stakeholders including the media, (iii) ensuring company compliance (especially the Board of Directors, Board of Commissioners, and supporting organs of the Board of Commissioners) and good corporate governance, especially for provisions in the capital market sector, (iv) archives and secretariat, especially related to documentation of meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners, joint meetings and GMS to run effectively and efficiently by considering the provisions of laws and regulations and the principles of good corporate governance.

Appointment and Dismissal of the Corporate Secretary

In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Companies, Regulation of the Minister

Negara ("BUMN") No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Anggaran Dasar, dan Piagam Sekretaris Perusahaan PTBA, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perusahaan.
2. Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada OJK mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan.
3. Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan, Perusahaan wajib menunjuk penggantinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan Sekretaris Perusahaan.
4. Selama terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Sekretaris Perusahaan dirangkap oleh seorang anggota Direksi atau orang perseorangan yang ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan sementara tanpa memperhatikan persyaratan Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK.
5. Dalam situs web Perusahaan wajib diungkapkan informasi mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan kekosongan Sekretaris Perusahaan dengan disertai informasi pendukung.
6. Pelaporan kepada OJK atas informasi terkait dengan angka 1 dan angka 2 dan pemuatan informasi pada situs web Perusahaan sebagaimana angka 5 di atas, dilakukan oleh Perusahaan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya kondisi baik itu pengangkatan, pemberhentian, dan peristiwa kekosongan Sekretaris Perusahaan.

Persyaratan Sekretaris Perusahaan

Untuk dapat menjabat/diangkat sebagai pejabat Sekretaris Perusahaan dan selama menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan, diharuskan hapus memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan;
4. Memahami kegiatan usaha Perusahaan;
5. Dapat berkomunikasi dengan baik; dan
6. Berdomisili di Indonesia.

of State-Owned Enterprises ("SOEs") No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities State-Owned Enterprises, Articles of Association, and Charter of the Corporate Secretary of PTBA, the mechanism for appointing and dismissing the Corporate Secretary is carried out by considering the following matters:

1. The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors by first obtaining approval from the Company's Board of Commissioners.
2. The company is obliged to submit a report to the OJK regarding the appointment and dismissal of the Corporate Secretary.
3. In the event of a vacancy in the Corporate Secretary, the Company is obliged to appoint a replacement within a maximum period of 60 (sixty) days from the vacancy of the Corporate Secretary.
4. During the vacancy period in the Corporate Secretary as referred to in number 3, the Corporate Secretary is held concurrently by a member of the Board of Directors or an individual appointed as temporary Corporate Secretary without considering the requirements for the Corporate Secretary as regulated in OJK's regulations.
5. On the Company's website, information regarding the appointment, dismissal and vacancy of the Corporate Secretary must be disclosed, along with the supporting information.
6. Reporting to the OJK regarding information related to numbers 1 and 2 and disclosing of information on the Company's website as in number 5 above, is carried out by the Company no later than 2 (two) working days after conditions such as appointment, dismissal and vacancy on the Corporate Secretary.

Corporate Secretary Requirements

To be able to serve/be appointed as Corporate Secretary and while serving as Corporate Secretary, Corporate Secretary is required to fulfill the following requirements and qualifications:

1. It is prohibited to hold any position in other issuers or public companies.
2. Capable of carrying out legal actions;
3. Have knowledge and understanding in the fields of law, finance, and corporate governance;
4. Understand the Company's business activities;
5. Can communicate well; and
6. Domiciled in Indonesia.

Profil Pejabat Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Officer Profile



Niko Chandra, S.T., M.M.

Corporate Secretary Division Head

Masa Jabatan: 2023 - Sekarang
Term of Office: 2023 – Present

Usia Age	37 tahun 37 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Serpong, Tangerang
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis of First Appointment	Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk Nomor: 168/0100/2023 tentang Pengangkatan Pemegang Jabatan di Lingkungan PT Bukit Asam Tbk Decree of the Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk Number: 168/0100/2023 concerning the Appointment of Position Holders within PT Bukit Asam Tbk
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. S2 Manajemen – Sekolah Tinggi Manajemen PPM (2023) 2. S1 Teknik Kimia – Institut Teknologi Bandung (2008) 1. Master of Management – PPM School of Management (2023) 2. Bachelor in Chemical Engineering – Bandung Institute of Technology (2008)
Sertifikasi Certification	1. Qualified Chief Risk Officer (QCRO) dari LSP MKS, tangal 8 Maret 2021 2. Cultural Transformation Facilitator dari Senn Delaney, tangal 16 Desember 2020 1. Qualified Chief Risk Officer (QCRO) from LSP MKS dated March 8, 2021. 2. Cultural Transformation Facilitator from Senn Delaney, dated December 16, 2020.
Riwayat Pekerjaan Work Experience	1. Corporate Secretary Division Head PT Bukit Asam Tbk (Agustus 2023 – sekarang) 2. Ahli Bisnis PT Bukit Asam Tbk (Maret – Agustus 2023) 3. Kepala Divisi Institutional Relations PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Des 2021 – Maret 2023) 4. Kepala Divisi Mining and Mineral Industry Institute PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Jun – Des 2021) 5. VP Strategi dan Pengembangan Korporat PT Bukit Asam Tbk (Okt 2020 – Mei 2021) 6. VP Pengembangan Bisnis PT Bukit Asam Tbk (Jan – Okt 2020) 1. Corporate Secretary Division Head PT Bukit Asam Tbk (August 2023-present) 2. Business Expert PT Bukit Asam Tbk (March-August 2023) 3. Head of Institutional Relations Division PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Dec 2021 – March 2023) 4. Head of Mining and Mineral Industry Institute Division PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (June – December 2021) 5. VP Corporate Strategy and Development PT Bukit Asam Tbk (October 2020 – May 2021) 6. VP Business Development PT Bukit Asam Tbk (January – October 2020)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Komisaris PT Bukit Service Energi Terpadu Commissioner of PT Bukit Service Energi Terpadu
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Shareholders
Kepemilikan Saham Shares Ownership	Tidak ada None

Tugas Pokok Sekretaris Perusahaan

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Corporate Secretary Main Duties

1. Monitor developments in the Capital Market, especially applicable laws and regulations in the Capital Market sector.

2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan investor (*investor relation*) termasuk penatausahaan serta menyimpan dokumen Perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus serta risalah rapat Direksi maupun RUPS.
4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan masyarakat (*public relation*).
5. Membina dan mengendalikan kepatuhan hukum dan tata kelola Perusahaan dalam rangka memastikan terpenuhinya ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas pasar modal, SRO serta selalu berusaha memenuhi undang-undang dan ketentuan terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
6. Mengelola kesekretariatan Direksi untuk memberikan dukungan bagi Direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
7. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :

    a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan;
    b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
    c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
    d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
    e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
8. Membantu memfasilitasi dan menyiapkan program training dan pelatihan kepada anggota Direksi Perusahaan, sehingga anggota Direksi Perusahaan secara berkelanjutan mendapatkan pembaruan pengetahuan.

Fungsi Sekretaris Perusahaan

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran Sekretaris Perusahaan.
2. Membina dan memelihara kepatuhan Perusahaan pada hukum dan peraturan perundang-undangan, baik aspek hukum pasar modal, aspek hukum bidang usaha maupun perundang-undangan lain yang terkait.
3. Mengkoordinir dalam membangun, menjaga dan meningkatkan citra Perusahaan serta penyelenggaraan media/sarana komunikasi internal dan eksternal.
4. Melaksanakan pengelolaan informasi secara terpadu dan mengelola kewajiban pelaporan Perusahaan.
5. Mengkoordinir pelaksanaan pengendalian kegiatan kehumasan dan pembinaan kegiatan keprotokolan Perusahaan.

2. Provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners to comply with statutory provisions in the Capital Market sector.
3. Carrying out activities related to the investor relations function including administration and storing Company documents including but not limited to the Shareholder Register, Special Register and minutes of Directors' meetings, and GMS.
4. Carry out activities related to the function of public relations.
5. Fostering and controlling compliance with laws and regulations as well as corporate governance in order to ensure the fulfillment of the provisions set by the capital market authority, SRO, and perpetually exacting to fulfill the laws and related provisions set by the Government.
6. Managing the secretariat of the Board of Directors to provide support for the Board of Directors in carrying out their duties and functions.
7. Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance which includes:
    a. Disclosure of information for decisions including the availability of information on the Company's website;
    b. Submission of reports to OJK on time;
    c. Organizing and documenting the GMS;
    d. Organizing and documenting meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
    e. Implementation of an orientation program regarding decisions for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
8. Assist in facilitating and preparing training programs for members of the Company's Board of Directors, to accommodate members of the Company's Board of Directors continuously receive knowledge updates.

Corporate Secretary Functions

1. Prepare the Corporate Secretary's work plan and budget
2. Develop and maintain the Company's compliance with laws and regulations, including capital market legal aspects, business sector legal aspects, and other related laws.
3. Coordinate in building, maintaining, and improving the Company's image as well as organizing internal and external media/communication facilities.
4. Carry out integrated information management and manage the Company's reporting obligations.
5. Coordinate the implementation of control of public relations activities and development of Company protocol activities.

6. Pelaksanaan komunikasi informasi antara Perusahaan dengan *stakeholder*, khususnya Pemegang Saham, masyarakat dan media massa serta bertindak selaku wakil Perusahaan dan pejabat penghubung antara Perusahaan dengan regulator dan seluruh *stakeholder*.
7. Mengkoordinir penyelenggaraan pemeliharaan data Pemegang Saham dan melakukan pemutakhiran secara periodik.
8. Mengkoordinir penyiapan penyelenggaraan rapat Direksi dan/Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk pembuatan dan penyimpanan risalah rapat.
9. Pengelolaan kesekretariatan Direksi, serta kegiatan perkantoran Direksi.
10. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Wewenang Sekretaris Perusahaan

Wewenang Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Menyampaikan informasi-informasi kepada OJK, SRO, berkaitan dengan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menetapkan sistem dan prosedur persuratan maupun kearsipan dalam lingkungan Direksi dan Perusahaan.
3. Melihat catatan-catatan, risalah-risalah rapat Direksi, dokumen-dokumen Perusahaan maupun laporan-laporan dalam rangka kegiatan penyediaan informasi yang diperlukan oleh Direksi.
4. Meminta laporan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan Direksi.
5. Meminta data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan Direksi kepada pihak-pihak terkait di dalam maupun di luar Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Direksi.
6. Meminta data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan kepada unit-unit terkait untuk keperluan pelaksanaan tugas.
7. Mengingatkan serta meminta penjelasan dari unit-unit kerja/pihak terkait atas penyediaan bahan-bahan/ informasi/data yang dibutuhkan oleh Direksi.
8. Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar dan atau di dalam Perusahaan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan
9. Mengusulkan agenda rapat-rapat Direksi dengan pihak-pihak di dalam/luar Perusahaan.
10. Menghadiri rapat Direksi dengan pihak-pihak di dalam/ luar Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
11. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

6. Implement information communication between the Company and stakeholders, especially Shareholders, public, and the mass media as well as acting as the Company's representative and liaison officer between the Company and regulators and all stakeholders.
7. Coordinate the maintenance of Shareholder data and update it regularly.
8. Coordinate the preparation for meetings of the Board of Directors and/Board of Commissioners, General Meeting of Shareholders, including the preparation and storage of meeting minutes.
9. Manage the Directors' secretariat, as well as Directors' office activities.
10. As a liaison between the Company and shareholders, OJK and other stakeholders.

Company Secretary Authority

The authority of the Corporate Secretary is as follows:

1. Submit information to OJK and SRO regarding the duties of the Corporate Secretary in accordance with applicable regulations.
2. Establish systems and procedures for correspondence and archives within the Board of Directors and the Company.
3. Check notes, minutes of Board of Directors meetings, Company documents and reports in the context of activities to provide information required by the Board of Directors.
4. Request a progress report on the implementation of the Board of Directors' decisions.
5. Request data/information/explanations required by the Board of Directors from related parties inside and outside the Company for the purposes of carrying out the Board of Directors' duties.
6. Request data/information/explanations needed from related units for the purpose of carrying out tasks.
7. Remind and request explanations from work units/ related parties regarding the provision of materials/ information/ data required by the Board of Directors.
8. Represent the Board of Directors in dealing with external and internal parties in accordance with the assignments given and determined policies
9. Propose agendas for the Board of Directors meetings with parties inside/outside the Company.
10. Attend the Board of Directors meetings with external and internal parties in accordance with previously established policies.
11. Use secretarial facilities to carry out their duties.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Guna mendukung fungsi Sekretaris Perusahaan, Direksi Perusahaan menetapkan struktur organisasi Sekretaris Perusahaan yang memuat divisi dan fungsi sebagai berikut:

1. Departemen Hubungan Investor;
2. Departemen Jakarta Representative Office;
3. Departemen Hubungan Masyarakat & Administrasi Korporat;
4. Departemen Komunikasi Korporat dan Hubungan Pemerintah;
5. Departemen *Office of the Board;*
6. Unit Kepatuhan Pasar Modal.

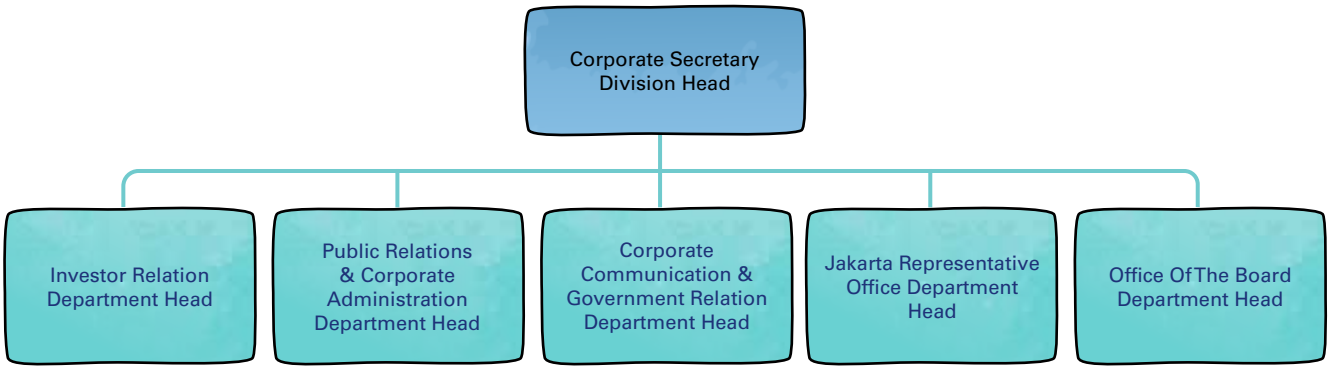
Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Keputusan Direksi No. 202A/0100/2023 pada tanggal 9 November 2023 tentang Struktur Organisasi Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan sebagaimana tergambarkan pada bagan di bawah ini.

Corporate Secretary Organizational Structure

In order to support the function of the Corporate Secretary, the Company's Board of Directors has established an organizational structure for the Corporate Secretary which contains the following divisions and functions:

1. Investor Relations Department;
2. Jakarta Representative Office Department;
3. Public Relations and Corporate Administration Department;
4. Corporate Communication and Government Relations Division;
5. Office of the Board Department;
6. Capital Market Compliance Function.

The Organizational Structure of the Corporate Secretary is in accordance with Directors' Decree No. 202A/0100/2023 dated November 9, 2023, concerning the Organizational Structure of the Corporate Secretary Work Unit as described in the chart below.



Pelaksanaan Tugas Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain:

1. Mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan satuan kerja Sekretaris Perusahaan.
2. Pengembangan kebijakan, strategi, standar dan prosedur, penyusunan program, implementasi program untuk penanganan *corporate action.*
3. Monitoring perkembangan pasar modal.
4. Membuat kebijakan dan rekomendasi sesuai dengan peraturan pasar modal.
5. Memberikan pelayanan informasi yang menyangkut hal hal yang perlu diketahui oleh Masyarakat atau pemegang saham mengenai emiten atau perusahaan publik.
6. Menjadi penghubung antara perusahaan publik dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masyarakat atau pemegang saham.

Implementation of Duties in 2024

Throughout 2024, the Corporate Secretary has carried out his duties and responsibilities in accordance with POJK No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies, including:

1. Directing and controlling all activities of the Corporate Secretary work unit.
2. Development of policies, strategies, standards and procedures, preparation of programs, implementation of programs for handling corporate actions.
3. Monitoring the development of the capital market.
4. Making policies and recommendations in accordance with capital market regulations.
5. Providing information services concerning matters that need to be known by the Public or shareholders regarding issuers or public companies.
6. Being a liaison between public companies and the Financial Services Authority (OJK) and the public or shareholders.

7. Membuat kajian berbagai laporan terbaru dari analis pasar modal.
8. Melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif atas kinerja perusahaan khususnya di bidang Keuangan.
9. Monitoring situasi dan proyeksi perekonomian (internasional, regional dan lokal, serta pasar modal berbagai negara).
10. Penanganan Administrasi Perusahaan.
11. Penanganan *corporate communication* dan *government* relation.
12. Penanganan hubungan investor dan kepatuhan pasar modal.
13. Menjadi representasi Perusahaan.
14. Mengelola Kantor Perwakilan Jakarta.
15. Penanganan hubungan masyarakat.
16. Publikasi kegiatan Perusahaan.
17. Penerbitan laporan perusahaan.
18. Menciptakan standar identitas perusahaan.
19. Memberikan dukungan strategis kepada Direksi sehingga citra Perusahaan meningkat, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan Hubungan Investor

Membina hubungan dengan Pemegang Saham merupakan salah satu hal penting bagi Perusahaan. PTBA selalu memberikan informasi terkini secara berkala kepada para pemegang saham, di luar penyampaian informasi yang dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham.

Sepanjang tahun 2024, aktivitas dan interaksi Investor Relations PTBA dengan investor, analis, dan pelaku pasar modal antara lain:

1. Analyst meeting sebanyak 4 (empat) kali.

Tanggal Date	Topik Topic	Lokasi Location	Keterangan Description
8 Maret 2024 March 8, 2024	Kinerja PTBA FY23 PTBA Performance in FY23	Jakarta	*Offline*
14 Mei 2024 May 14, 2024	Kinerja PTBA 1Q24 PTBA Performance in 1Q24	Jakarta	*Online*
2 Agustus 2024 August 2, 2024	Kinerja PTBA 1H24 PTBA Performance in 1H24	Jakarta	*Offline*
8 November 2024 November 8, 2024	Analyst Meeting Kinerja PTBA 9M24 Analyst Meeting of PTBA Performance 9M24	Jakarta	*Offline*

2. *One on One Meeting* dengan investor dan analis saham sebanyak 32 kali, baik secara daring maupun luring.
3. Diskusi dengan para pemegang saham, analis saham, dan komunitas pasar modal lainnya secara *offline* dalam forum yang diselenggarakan oleh sekuritas dan tidak langsung melalui telepon, *Whatsapp*, serta email di investor.relations@bukitasam.co.id. Adapun rincian diskusi dalam forum yang diikuti antara lain:

7. Making studies of various recent reports from capital market analysts.
8. Conducting qualitative and quantitative analysis of company performance, especially in the field of Finance.
9. Monitoring the economic situation and projections (international, regional and local, as well as capital markets in various countries).
10. Handling Company Administration.
11. Handling corporate communication and government relations.
12. Handling investor relations and capital market compliance.
13. Being a representative of the Company.
14. Managing the Jakarta Representative Office.
15. Handling public relations.
16. Publication of Company activities.
17. Publishing company reports.
18. Creating corporate identity standards.
19. Providing strategic support to the Board of Directors so the Company's image improves, and in accordance with applicable regulations.

Investor Relations Activities

Establishing relationships with Shareholders is one of the important issues for the Company. PTBA always provides the latest information periodically to shareholders, apart from the information conveyed at the General Meeting of Shareholders.

Throughout 2024, PTBA Investor Relations activities and interactions with investors, analysts, and capital market players include:

1. Analyst meeting for 4 (four) times
2. One on One Meeting with investors and stock analysts 32 times, both online and offline.
3. Discussions with shareholders, stock analysts, and other capital market communities offline in forums organized by securities and indirectly via telephone, Whatsapp, and email at investor.relations@bukitasam.co.id. The details of the discussions in the forums attended include:

Tanggal Date	Topik Topic	Lokasi Location	Keterangan Description
6 Maret 2024 March 6, 2024	Mandiri Investment Forum	Jakarta	*Offline*
30 Mei 2024 May 30, 2024	Panin Asset Management - Fund Manager Seminar	Bali	*Offline*
29 Juni 2024 June 29, 2024	Mirae Asset Sekuritas - Investor Network Day 3.0	Jakarta	*Offline*
8-9 Oktober 2024 October 8-9, 2024	BNI Investor Daily Summit	Jakarta	*Offline*

4. Public Expose Live tahun 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024 yang dilaksanakan secara daring melalui *video conference call* yang bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia. Pada kegiatan ini, manajemen perusahaan memaparkan secara terbuka kepada publik, baik itu para pemegang saham maupun calon pemegang saham, atas kinerja operasional dan keuangan, strategi pengembangan, maupun pencapaian Perusahaan sepanjang tahun 2024.

5. Site Visit ke unit-unit kerja Perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali dan *Office Visit* sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh para pemegang saham *existing*, calon pemegang saham potensial, analis sekuritas, dan publik sebagai berikut:

4. Public Expose Live in 2024 on August 27, 2024, which was held online via video conference call in collaboration with the Indonesia Stock Exchange. In this activity, the company's management openly presented to the public, both shareholders and prospective shareholders, regarding the Company's operational and financial performance, development strategies, and achievements throughout 2024.

5. Site Visits to the Company's work units 3 (three) times and Office Visits 1 (one) time, attended by existing shareholders, potential prospective shareholders, securities analysts, and the public as follows:

Tanggal Date	Topik Topic	Lokasi Location	Keterangan Description
10-12 Juni 2024 June 10-12, 2024	Site Visit PLTS Tol Bali Mandara	Bali	*Offline*
23-25 September 2024 September 23-25, 2024	Site Visit Unit Pelabuhan Tarahan Site Visit Tarahan Port Unit	Lampung	*Offline*
21-23 Oktober October 21-23	Site Visit Unit Pertambangan Tanjung Enim Site Visit Tanjung Enim Mining Unit	Tanjung Enim	*Offline*
24 Oktober 2024 October 24, 2024	Office Visit Kantor Perwakilan Jakarta Office Visit Jakarta Representative Office	Jakarta	*Offline*

Adapun prestasi yang telah diperoleh oleh Investor Relations PTBA sepanjang tahun 2024 antara lain:
1. Juara 2 dalam ajang Annual Report Award (ARA) Tahun 2024
2. Peringkat Platinum dalam ajang Asian Sustainability Reporting Rating (ASSRAT) 2024

The achievements obtained by PTBA Investor Relations throughout 2024 include:
1. 2nd place in the 2024 Annual Report Award (ARA)
2. Platinum ranking in the Asian Sustainability Reporting Rating ASSRAT 2024

Kegiatan Komunikasi Korporat & Hubungan Pemerintah

PTBA meyakini bahwa media massa memiliki peran yang penting bagi Perusahaan. Dengan demikian maka salah satu tujuan dari PTBA adalah untuk membangun citra positif dengan menjaga hubungan dengan media massa, melalui berbagai aktivitas yang disebar luaskan melalui *press release*. Pada tahun 2024, tercatat 149 *press release* yang telah disampaikan oleh Perusahaan. Adapun detail dari *press release* tersebut adalah sebagai berikut:

Corporate Communication & Government Relation Activities

PTBA believes that the mass media has an important role for the Company. Thus, one of PTBA's goals is to build a positive image by maintaining relations with the mass media, through various activities disseminated through press releases. In 2024, 149 press releases were published by the Company. The details of the press releases are as follows:

Press Release PT Bukit Asam Tbk Tahun 2024
PT Bukit Asam Tbk Press Release in 2024

Tanggal Date	Judul Title
2 Januari 2024 January 2, 2024	Tambah Kapasitas Angkutan Batu Bara, Bukit Asam (PTBA) Bangun Fasilitas Baru Increase Coal Transport Capacity, Bukit Asam (PTBA) Builds New Facilities
8 Januari 2024 January 8, 2024	PLTS Irigasi Bukit Asam (PTBA) Dukung Pertanian Berkelanjutan Bukit Asam Irrigation SPPP (PTBA) Supports Sustainable Agriculture
12 Januari 2024 January 12, 2024	Bukit Asam (PTBA) Memacu Inovasi dan Pengembangan Usaha Bukit Asam (PTBA) Spurs Innovation and Business Development
15 Januari 2024 January 15, 2024	Terima Lisensi BNSP, LSP Bukit Asam Bisa Jalankan Uji Kompetensi Mandiri Receives BNSP License, LSP Bukit Asam Conducts Independent Competency Test
16 Januari 2024 January 16, 2024	Tembus Target, Produksi Batu Bara Bukit Asam (PTBA) Capai 41,9 Juta Ton di 2023 Achieving Target, Bukit Asam (PTBA) Coal Production Reaches 41.9 Million Tons in 2023
18 Januari 2024 January 18, 2024	Kembangkan Keanekaragaman Hayati dan Energi Terbarukan, Bukit Asam Raih Indonesia Green Awards 2024 Developing Biodiversity and Renewable Energy, Bukit Asam Wins Indonesia Green Awards 2024
19 Januari 2024 January 19, 2024	Bukit Asam (PTBA) Beri Bantuan untuk Korban Banjir di Sumsel Bukit Asam (PTBA) Assists Victims of Floods in South Sumatra
23 Januari 2024 January 23, 2024	Berani Bermimpi Karena Beasiswa Bidiksiba dari Bukit Asam (PTBA) Dare to Dream from Bukit Asam Scholarship
29 Januari 2024 January 29, 2024	Bukit Asam (PTBA) Terus Perluas Bisnis Energi Baru Terbarukan Bukit Asam (PTBA) Continues to Expand New Renewable Energy Business
5 Februari 2024 February 5, 2024	Kiprah UMK Kopi Semende Binaan Bukit Asam (PTBA), Menggaung di Kancah Nasional The Role of Semende Coffee UMK Fostered by Bukit Asam (PTBA), Roaring at the National Stage
12 Februari 2024 February 12, 2024	Dukung Kemampuan Akademik Pelajar, Bukit Asam Hadirkan Lomba Cepat Tepat dan Speech Competition Supporting Students' Academic Abilities, Bukit Asam Presents Fast and Accurate Competition and Speech Competition
13 Februari 2024 February 13, 2024	Hari Lahan Basah Sedunia, Bukit Asam (PTBA) Ikut Aksi Tanam Mangrove World Wetlands Day, Bukit Asam (PTBA) Participates in Mangrove Planting Action
16 Februari 2024 February 16, 2024	Bukit Asam (PTBA) Serahkan Bantuan Mesin Pemusnah Sampah untuk Muara Enim Bukit Asam (PTBA) Hands Over Waste Destruction Machine Assistance to Muara Enim
20 Februari 2024 February 20, 2024	Didukung Digitalisasi, Aktivitas Pertambangan Bukit Asam (PTBA) Makin Efektif Supported by Digitalization, Bukit Asam (PTBA) Mining Activities Are Increasingly Effective
21 Februari 2024 February 21, 2024	Seleksi Program Bidiksiba dari Bukit Asam, 240 Peserta Lolos Tahap Administrasi Bidiksiba Program Selection from Bukit Asam, 240 Participants Pass Administrative Stage
26 Februari 2024 February 26, 2024	Jadi Tuan Rumah Sumatera Fire & Rescue Challenge, Bukit Asam Borong Penghargaan Hosting the Sumatra Fire & Rescue Challenge, Bukit Asam Wins Awards
5 Maret 2024 March 5, 2024	HUT ke-43, Bukit Asam (PTBA) Merintis Masa Depan 43rd Anniversary, Bukit Asam (PTBA) Pioneering the Future
7 Maret 2024 March 7, 2024	Bukit Asam (PTBA) Raih Apresiasi Perusahaan Terbaik di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bukit Asam (PTBA) Wins Best Company Appreciation in Occupational Safety and Health
8 Maret 2024 March 8, 2024	Didukung Kinerja Operasional, Bukit Asam (PTBA) Raih Laba Bersih Rp 6,1 Triliun di 2023 Supported by Operational Performance, Bukit Asam (PTBA) Achieves Net Profit of Rp6.1 Trillion in 2023
14 Maret 2024 March 14, 2024	Jalur KA Gunung Megang-Penanggiran Pulih, Pengiriman Batu Bara PTBA Berangsur Normal Gunung Megang-Penanggiran Railway Line Recovers, PTBA Coal Shipments Gradually Return to Normal
15 Maret 2024 March 15, 2024	Program Keberlanjutan Bukit Asam (PTBA) Raih Apresiasi di BCOMMS 2024 Bukit Asam Sustainability Program (PTBA) Wins Appreciation at BCOMMS 2024
18 Maret 2024 March 18, 2024	Sambut Bulan Ramadan, Bukit Asam (PTBA) Salurkan 10.000 Paket Sembako Ahead of Ramadan, Bukit Asam (PTBA) Disburses 10.000 Packages of Daily Staples
19 Maret 2024 March 19, 2024	Bukit Asam (PTBA) Raih Sertifikasi Sistem Manajemen Energi Bukit Asam (PTBA) Secures Energy Management System Certification
25 Maret 2024 March 25, 2024	Bukit Asam (PTBA) Bantu Warga Desa Bangkitkan Usaha Jamur Tiram Bukit Asam (PTBA) Assists Residents Improving Oyster Mushroom Business
27 Maret 2024 March 27, 2024	Berbagi Berkah Ramadan, Bukit Asam (PTBA) Salurkan Bantuan untuk 106 Masjid Bukit Asam (PTBA) Disburses Assistance for 106 Mosques in Ramadan
28 Maret 2024 March 28, 2024	Bukit Asam (PTBA) Manfaatkan Lahan Bekas Tambang untuk Pusat Persemaian hingga Kota Wisata Bukit Asam (PTBA) Uses Ex Mining Site for Nursery, Tourism
3 April 2024 April 3, 2024	Nihil Kecelakaan Kerja, Bukit Asam (PTBA) Raih Penghargaan K3 Tingkat Provinsi Zero Work Accident, Bukit Asam (PTBA) Secures OHS Award at Provincial Level
3 April 2024 April 3, 2024	Bukit Asam (PTBA) Beri Santunan Ramadan untuk 17 Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Bukit Asam (PTBA) Disburses Ramadan Assistance for 17 Orphanages and Islamic Boarding Schools

Press Release PT Bukit Asam Tbk Tahun 2024
PT Bukit Asam Tbk Press Release in 2024

Tanggal Date	Judul Title
4 April 2024 April 4, 2024	Safari Ramadan BUMN 2024, Bukit Asam (PTBA) Siapkan 1.000 Paket Sembako Murah Bukit Asam (PTBA) Readies 1.000 Daily Staples Packages for 2024 SOEs Ramadan Safari
5 April 2024 April 5, 2024	Mudik Asyik Bersama BUMN 2024, Bukit Asam (PTBA) Berangkatkan Ratusan Pemudik Bukit Asam (PTBA) Sends Off Thousands of Homecomers
18 April 2024 April 18, 2024	Bukit Asam (PTBA) Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung Bukit Asam (PTBA) Disburses Rp1 Billion Assistance to Mosques, Orphanages in Lampung
22 April 2024 April 22, 2024	Bukit Asam (PTBA) Komitmen Perkuat Kontribusi Pekerja Perempuan Bukit Asam (PTBA) Committed to Strengthen Female Workers Contribution
23 April 2024 April 23, 2024	Bukit Asam (PTBA) Menuju Perusahaan Energi Kelas Dunia yang Peduli Lingkungan Bukit Asam (PTBA) Towards World Class Energy Company That Cares on Environment
26 April 2024 April 26, 2024	Lewat Kerajinan Songket, Bukit Asam (PTBA) Berdayakan Para Ibu Rumah Tangga Bukit Asam (PTBA) Empowers Homemakers through Songket Weaving
30 April 2024 April 30, 2024	Produksi dan Penjualan Tumbuh, PTBA Raih Pendapatan Rp 9,4 Triliun di Triwulan I 2024 Production and Sales Grow, PTBA Earns Rp9.4 Trillion in Revenue in Q1 2024
3 Mei 2024 May 3, 2024	Bukit Asam (PTBA) Serahkan Bantuan Kendaraan untuk Lapas Kelas IIB Muara Enim Bukit Asam (PTBA) Hands Over Vehicle Assistance to Class IIB Muara Enim Prison
3 Mei 2024 May 3, 2024	Bukit Asam (PTBA) Maksimalkan Potensi Pasar Bukit Asam (PTBA) Utilizing Market Potential
7 Mei 2024 May 7, 2024	345 Putra-putri Daerah Raih Mimpi Berkat Beasiswa dari Bukit Asam Bukit Asam Disburses Assistance to 345 Students
8 Mei 2024 May 8, 2024	RUPS Tahun Buku 2023, Bukit Asam (PTBA) Bagikan Dividen Rp 4,6 Triliun 2023 Fiscal Year GMS, Bukit Asam (PTBA) Distributes Dividends of Rp 4.6 Trillion
13 Mei 2024 May 13, 2024	Bukit Asam (PTBA) Membangun Masa Depan Melalui Pendidikan Bukit Asam (PTBA) Builds the Future through Education
14 Mei 2024 May 14, 2024	Bukit Asam (PTBA) Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di OKU Bukit Asam (PTBA) Disburses Assistance for OKU Floods Victims
15 Mei 2024 May 15, 2024	Jaga Ketahanan Energi, Bukit Asam (PTBA) Optimalkan Produksi Maintaining Energy Security, Bukit Asam (PTBA) Optimizes Production
16 Mei 2024 May 16, 2024	Tim Voli Bukit Asam Jadi Kampiun Bupati Lahat Cup 2024 Bukit Asam Volley Team Wins 2024 Lahat Championship
20 Mei 2024 May 20, 2024	Peduli Bencana Sumbar, Bukit Asam (PTBA) Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang Bukit Asam (PTBA) Distributes Aid to Flash Flood Victims in West Sumatra
24 Mei 2024 May 24, 2024	Bukit Asam (PTBA) Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Lawang Kidul Bukit Asam (PTBA) Disburses Aid to Flood Victims in Lawang Kidul
27 Mei 2024 May 27, 2024	Dibina Bukit Asam, Usaha Percetakan dan Konveksi Asal Desa Lingga Tembus Pasar Nasional Fostered by Bukit Asam, Printing and Garment Business from Lingga Village Penetrates National Market
28 Mei 2024 May 28, 2024	Bantuan Kemanusiaan Disalurkan Bukit Asam (PTBA) untuk Korban Banjir di Ulak Pandan Bukit Asam (PTBA) Disburses Aid for Flood Victims in Ulak Pandan
28 Mei 2024 May 28, 2024	Jelang Idul Adha, Bukit Asam (PTBA) Gelar Pelatihan Penyembelihan Hewan Kurban Ahead of Eid al-Adha, Bukit Asam (PTBA) Holds Slaughtering Training
3 Juni 2024 June 3, 2024	Dukung Pariwisata Borobudur, Bukit Asam (PTBA) Rehabilitasi DAS di Bukit Menoreh Support Borobudur Tourism, Bukit Asam (PTBA) Rehabilitates Watershed in Menoreh Hill
5 Juni 2024 June 5, 2024	Tanam Mangrove, Masyarakat Desa Sidodadi Bersama Bukit Asam (PTBA) Menanam Kebaikan Planting Mangroves, Sidodadi Village Community Together with Bukit Asam (PTBA) Plants Goodness
6 Juni 2024 June 6, 2024	Rumah BUMN Goes To Campus, Bukit Asam Berbagi Tips Kewirausahaan dan Keberlanjutan SOEs House Goes To Campus, Bukit Asam Shares Entrepreneurship and Sustainability Tips
7 Juni 2024 June 7, 2024	Bukit Asam (PTBA) Bagikan Dividen Rp 4,58 Triliun Hari Ini Bukit Asam (PTBA) Distributes Dividends of Rp4.58 Trillion
11 Juni 2024 June 11, 2024	UMK Binaan Bukit Asam (PTBA) Turut Meriahkan Pekan Raya Lampung UMK Fostered by Bukit Asam (PTBA) Participates in the Lampung Fair
12 Juni 2024 June 12, 2024	Kuliah di Akademi Komunitas Industri Pertambangan Bukit Asam, Gratis Sampai Lulus! Free Study at the Bukit Asam Mining Industry Community Academy
14 Juni 2024 June 14, 2024	Hari Lingkungan Hidup, Bukit Asam (PTBA) Edukasi Pelajar Sekolah Dasar Environment Day, Bukit Asam (PTBA) Educates Elementary School Students
18 Juni 2024 June 18, 2024	Idul Adha 1445 H, Bukit Asam (PTBA) Salurkan 196 Sapi dan 65 Kambing Kurban Eid al-Adha 1445 H, Bukit Asam (PTBA) Distributes 196 Cows and 65 Goats for Sacrifice

Press Release PT Bukit Asam Tbk Tahun 2024
PT Bukit Asam Tbk Press Release in 2024

Tanggal Date	Judul Title
20 Juni 2024 June 20, 2024	Green Mining, Bukit Asam (PTBA) Tanam Pohon Bersama di Lahan Bekas Tambang Green Mining, Bukit Asam (PTBA) Plants Trees on Former Mining Land
20 Juni 2024 June 20, 2024	Kuliah Gratis di AKIPBA, Lulus Siap Kerja di Pertambangan Free Study at AKIPBA, Ready to Work at Mining
24 Juni 2024 June 24, 2024	Jaga Lingkungan, Bukit Asam (PTBA) Ajak Masyarakat Bersih-bersih Sungai Enim Bukit Asam (PTBA) Conducts Enim River Clean Up with Community
25 Juni 2024 June 25, 2024	Berdayakan Masyarakat Desa Embawang, Bukit Asam (PTBA) Dukung Budidaya Lebah Madu Empower Embawang Village Community, Bukit Asam (PTBA) Supports Honey Bee Cultivation
27 Juni 2024 June 27, 2024	Pertahankan Kinerja Positif, Bukit Asam (PTBA) Perkuat Efisiensi Maintains Positive Performance, Bukit Asam (PTBA) Strengthens Efficiency
28 Juni 2024 June 28, 2024	Inovasi Sosial Bukit Asam (PTBA) Berbuah Penghargaan BISRA 2024 Bukit Asam (PTBA) Social Innovation Wins 2024 BISRA Awards
1 Juli 2024 July 1, 2024	Konsisten Berdayakan Masyarakat, Bukit Asam (PTBA) Raih Bina Mitra UMKM Award Bukit Asam (PTBA) Wins UMKM Mitra Award for Community Empowerment
3 Juli 2024 July 3, 2024	5 Tahun Transformasi BUMN, Bukit Asam Hadirkan Energi Tanpa Henti untuk Negeri 5 Years of SOEs Transformation, Bukit Asam Presents Non-Stop Energy for the Country
5 Juli 2024 July 5, 2024	Bukit Asam (PTBA) Dukung Pemberdayaan Petani di Pagar Dewa Bukit Asam (PTBA) Supports Farmers Empowerment at Pagar Dewa
10 Juli 2024 July 10, 2024	Bukit Asam (PTBA) Gelar Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Muara Enim 2024, Ini Pemenangnya Bukit Asam (PTBA) Holds 2024 Muara Enim Environmental Ambassador Contest
12 Juli 2024 July 12, 2024	Bukit Asam (PTBA) Sabet Penghargaan Outstanding Community Development Campaign Bukit Asam (PTBA) Wins Outstanding Community Development Campaign Awards
15 Juli 2024 July 15, 2024	Pertama di Dunia, Bukit Asam dan BRIN Mulai Kembangkan Batu Bara untuk Bahan Baku Baterai Li-ion Bukit Asam and BRIN Begin Developing Coal for Li-ion Battery Raw Materials, to Become the First in the World
16 Juli 2024 July 16, 2024	Genjot Penjualan, Bukit Asam (PTBA) Terus Tingkatkan Kapasitas Angkutan Batu Bara Boosting Sales, Bukit Asam (PTBA) Continues to Increase Coal Transport Capacity
12 Juli 2024 July 12, 2024	Dukung Pengembangan UMKM, Bukit Asam (PTBA) Raih Penghargaan dari Kadin Sumsel Supporting MSME Development, Bukit Asam (PTBA) Wins Award from South Sumatra Chamber of Commerce and Industry
23 Juli 2024 July 23, 2024	Perluas Lapangan Kerja, Bukit Asam (PTBA) Dorong Budidaya Ikan Gabus di Desa Tanjung Agung Expanding Employment Opportunities, Bukit Asam (PTBA) Encourages Snakehead Fish Cultivation in Tanjung Agung Village
24 Juli 2024 July 24, 2024	Ciptakan Peluang Usaha, Bukit Asam (PTBA) Gelar Pelatihan Budidaya Maggot Creating Business Opportunities, Bukit Asam (PTBA) Holds Maggot Cultivation Training
25 Juli 2024 July 25, 2024	Tingkatkan Kapasitas Angkut, Afiliasi Bukit Asam (PTBA) Tambah Armada Kapal Increase Transport Capacity, Bukit Asam Affiliate (PTBA) Adds Ship Fleet
29 Juli 2024 July 29, 2024	Kinerja Positif, Bukit Asam (PTBA) Raih Penghargaan Tertinggi di Malam Apresiasi Emiten 2024 Positive Performance, Bukit Asam (PTBA) Wins Highest Award at 2024 Issuer Appreciation Night
29 Juli 2024 July 29, 2024	Bukit Asam (PTBA) Berangkatkan 22 Penerima Beasiswa Bidiksiba ke Perguruan Tinggi Bukit Asam (PTBA) Sends 22 Bidiksiba Scholarship Recipients to College
31 Juli 2024 July 31, 2024	Upaya Bukit Asam (PTBA) Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bukit Asam (PTBA) Efforts in Improving Community Welfare
1 Agustus 2024 August 1, 2024	Penjualan Tumbuh 15 Persen, Bukit Asam (PTBA) Raih Laba Bersih Rp 2,03 Triliun di Semester I 2024 Sales Grow 15 Percent, Bukit Asam (PTBA) Achieves Net Profit of Rp 2.03 Trillion in Semester I 2024
5 Agustus 2024 August 5, 2024	Dukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Bukit Asam (PTBA) Raih 2 Penghargaan Support Sustainable Development Goals, Bukit Asam (PTBA) Secures 2 Awards
7 Agustus 2024 August 7, 2024	Bukit Asam (PTBA) Kembangkan Program Eco Agrotomation Lewat Sentra Ilmu Bukit Asam (PTBA) Develops Eco Agrotomation Program Through Science Center
8 Agustus 2024 August 8, 2024	Dirut Bukit Asam (PTBA) Arsal Ismail Raih Penghargaan Industry Marketing Champion Sumsel Bukit Asam (PTBA) President Director Arsal Ismail Wins Industry Marketing Champion Award in South Sumatra
9 Agustus 2024 August 9, 2024	Inovasi Bukit Asam (PTBA) Kembangkan Lahan Basah Buatan untuk Pemulihan Lingkungan Bukit Asam Innovation (PTBA) Develops Artificial Wetlands for Environmental Restoration
12 Agustus 2024 August 12, 2024	Bukit Asam (PTBA) Gelar Pemeriksaan Mata Gratis untuk Pelajar SD Bukit Asam (PTBA) Holds Free Eye Check for Elementary Students
13 Agustus 2024 August 13, 2024	Bukit Asam (PTBA) Terima Hak Paten untuk Aplikasi CISEA dan Lahan Basah Buatan Terapung Bukit Asam (PTBA) Receives Patent Rights for CISEA Application and Floating Artificial Wetlands
15 Agustus 2024 August 15, 2024	Mitra Binaan Bukit Asam (PTBA) Peroleh Hak Cipta Motif Batik Kujur dan Songket Bukit Asam Foster Partners (PTBA) Obtain Copyright for Kujur and Songket Batik Patterns

Press Release PT Bukit Asam Tbk Tahun 2024
PT Bukit Asam Tbk Press Release in 2024

Tanggal Date	Judul Title
16 Agustus 2024 August 16, 2024	Sinergi Bukit Asam (PTBA) dan Pemkab Muara Enim Mencegah Stunting Bukit Asam (PTBA) Works with Muara Enim Government to Prevent Stunting
18 Agustus 2024 August 18, 2024	Kado HUT ke-79 RI untuk Petani, Bukit Asam (PTBA) Resmikan PLTS Irigasi di Tanjung Agung Bukit Asam (PTBA) Inaugurates Irrigation Solar Power Plant in Tanjung Agung
19 Agustus 2024 August 19, 2024	Akademi Komunitas Industri Pertambangan Bukit Asam Berjaya di Creative Youth Competition 2024 Bukit Asam Mining Industry Community Academy Wins at Creative Youth Competition 2024
20 Agustus 2024 August 20, 2024	Bukit Asam (PTBA) Bantu Anak Putus Sekolah Melalui Pendidikan Kesetaraan Bukit Asam (PTBA) Supports School Dropouts through Equal Education
26 Agustus 2024 August 26, 2024	Keselamatan Kerja Terjaga, Bukit Asam (PTBA) Raih Penghargaan di 2 Ajang Sekaligus Maintaining Occupational Safety, Bukit Asam (PTBA) Wins Awards at 2 Events at Once
26 Agustus 2024 August 26, 2024	Tingkatkan Pelayanan Publik, RS Bukit Asam Medika Tambah Kapasitas Genset Bukit Asam Medika Increases Genset Capacity
27 Agustus 2024 August 27, 2024	Capai Rekor Penjualan di 6 Bulan Pertama, Bukit Asam (PTBA) Terus Perluas Pasar Reaching Sales Record in First 6 Months, Bukit Asam (PTBA) Continues to Expand Market
29 Agustus 2024 August 29, 2024	Cegah Abrasi, Bukit Asam (PTBA) Tanam Mangrove di Pantai Taluak Bukit Asam (PTBA) Plants Mangrove at Taluak Beach to Prevent Abrasion
4 September 2024 September 4, 2024	Bukit Asam (PTBA) Dorong Transformasi Desa Seleman Lewat Budidaya Burung Puyuh Bukit Asam (PTBA) Encourages Transformation of Seleman Village Through Quail Cultivation
2 September 2024 September 2, 2024	Tingkatkan Keterampilan Masyarakat, Bukit Asam (PTBA) Gelar Pelatihan Operator dan Mekanik Improving Community Skills, Bukit Asam (PTBA) Holds Operator and Mechanic Training
9 September 2024 September 9, 2024	Ramah Lingkungan, Kerajinan Songket Binaan Bukit Asam (PTBA) Gunakan Pewarna Alami Becoming Environmentally Friendly, Bukit Asam (PTBA) Songket Crafts Use Natural Dyes
10 September 2024 September 10, 2024	Mitra Binaan Bukit Asam (PTBA) Ramaikan Puncak Hari UMKM Nasional 2024 Bukit Asam (PTBA) Fostered Partner Participates at 2024 National UMKM Day
11 September 2024 September 11, 2024	Kelompok Pembibitan Eco Agrotomation Binaan Bukit Asam Panen Perdana Melon Premium Eco Agrotomation Nursery Group Fostered by Bukit Asam First Harvest of Premium Melons
12 September 2024 September 12, 2024	Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Makin Baik, Bukit Asam (PTBA) Raih 4 Penghargaan TOP GRC Awards Integrated Corporate Governance Improves, Bukit Asam (PTBA) Wins 4 TOP GRC Awards
12 September 2024 September 12, 2024	Dua Anak Usaha Bukit Asam (PTBA) Sinergi Perdagangan Karbon Two Bukit Asam Subsidiaries (PTBA) Synergize Carbon Trading
19 September 2024 September 19, 2024	Dukung Keberhasilan Rehabilitasi DAS, Bukit Asam (PTBA) Ikut Menandatangani Piagam Menoreh Supporting the Success of Watershed Rehabilitation, Bukit Asam (PTBA) Also Signs the Menoreh Charter
20 September 2024 September 20, 2024	Bukit Asam (PTBA) dan KAI Logistik Teken Kerja Sama Jasa Bongkar Muat Batu Bara Bukit Asam (PTBA) and KAI Logistik Sign Cooperation on Coal Loading and Unloading Services
23 September 2024 September 23, 2024	Sinergi Bukit Asam dengan BPKP Sumsel dan Pemkab Tingkatkan Akuntabilitas Program CSR Bukit Asam Synergy with BPKP South Sumatra and District Government Increases Accountability of CSR Programs
24 September 2024 September 24, 2024	Bukit Asam (PTBA) Raih Penghargaan Anugerah ESG Republika 2024 Bukit Asam (PTBA) Wins 2024 Republika ESG Award
26 September 2024 September 26, 2024	Bukit Asam (PTBA) Sabet 5 Penghargaan Good Mining Practice dari Kementerian ESDM Bukit Asam (PTBA) Wins 5 Good Mining Practice Awards from ESDM Ministry
25 September 2024 September 25, 2024	Bukit Asam (PTBA) Unit Dermaga Kertapati Gelar Pengobatan Gratis dan Penanganan Stunting Bukit Asam (PTBA) Kertapati Barging Port Holds Free Medical Treatment and Stunting Handling
30 September 2024 September 30, 2024	Dukung Pemenuhan Kebutuhan Listrik Nasional, Bank Mandiri Teken Kerjasama Strategis dengan PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) Supporting the Fulfillment of National Electricity Needs, Bank Mandiri Signs Strategic Cooperation with PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP)
2 Oktober 2024 October 2, 2024	Sinergi Bukit Asam (PTBA) dan 3 Bank Himbara untuk Fasilitas Pemanfaatan DHE SDA Synergy of Bukit Asam (PTBA) and 3 Himbara Banks for DHE SDA Utilization Facilities
3 Oktober 2024 October 3, 2024	Bukit Asam (PTBA) Sukses Raih Tiga Penghargaan di Ajang Top BUMN Awards 2024 Bukit Asam (PTBA) Wins 3 Awards at 2024 TOP BUMN Awards

Press Release PT Bukit Asam Tbk Tahun 2024
PT Bukit Asam Tbk Press Release in 2024

Tanggal Date	Judul Title
4 Oktober 2024 October 4, 2024	Bukit Asam (PTBA) Serahkan Bantuan Kendaraan Damkar untuk Pemkot Sawahlunto Bukit Asam (PTBA) Hands Over Firefighter Assistance to Sawahlunto Government
7 Oktober 2024 October 7, 2024	Tingkatkan Kapabilitas SDM, Delegasi Bukit Asam (PTBA) Belajar Soal Inovasi Energi Terbarukan Improving HR Capabilities, Bukit Asam (PTBA) Delegation Learns Renewable Energy Innovation
8 Oktober 2024 October 8, 2024	Jaga Ekosistem Laut, Bukit Asam (PTBA) dan Para Ibu Desa Sidodadi Melakukan Restorasi Padang Lamun Protecting the Marine Ecosystem, Bukit Asam (PTBA) and Sidodadi Residents Carry Out Seagrass Restoration
9 Oktober 2024 October 9, 2024	Bukit Asam (PTBA) Raih Penghargaan Annual Report Award 2023 Bukit Asam (PTBA) Wins 2023 Annual Report Award
10 Oktober 2024 October 10, 2024	Ciptakan Inovasi, Insan Bukit Asam Dianugerahi Dua Satyalancana dan Tiga Dharma Karya Creating Innovation, Bukit Asam People Awarded Two Satyalancana and Three Dharma Karya
11 Oktober 2024 October 11, 2024	Kontribusi Optimal Bukit Asam (PTBA) Berbuah Dua Penghargaan Subroto 2024 Bukit Asam (PTBA)'s Optimal Contribution Brings 2 2024 Subroto Awards
14 Oktober 2024 October 14, 2024	Peduli Kesehatan Masyarakat, Bukit Asam (PTBA) Gelar Pengobatan Gratis Bukit Asam (PTBA) Conducts Free Health Check for Public
16 Oktober 2024 October 16, 2024	Tingkatkan Kemampuan Numerasi Anak, Bukit Asam Gelar Pelatihan Metode Gasing di Lampung Improve Children's Numeracy Skills, Bukit Asam Holds Gasing Method Training in Lampung
17 Oktober 2024 October 17, 2024	Bukit Asam (PTBA) dan Pemkot Sawahlunto Gelar Bazar Pangan Murah untuk Masyarakat Prasejahtera Bukit Asam (PTBA) and Sawahlunto City Government Hold Affordable Food Bazaar for Underprivileged Communities
23 Oktober 2024 October 23, 2024	Tingkatkan Kapasitas Bongkar Batu Bara Area Kertapati, Bukit Asam Sinergi dengan KAI dan Semen Baturaja Increase Coal Unloading Capacity in Kertapati Area, Bukit Asam Synergizes with KAI and Semen Baturaja
25 Oktober 2024 October 25, 2024	Bukit Asam (PTBA) Bawa Pulang Empat Penghargaan dari Global ESG Awards Bukit Asam (PTBA) Wins Four Global ESG Awards
28 Oktober 2024 October 28, 2024	Kembangkan Biomassa dari Kaliandra Merah, Bukit Asam (PTBA) Bangun Pilot Plant Wood Pellet Developing Biomass from Red Kaliandra, Bukit Asam (PTBA) Builds Pilot Plant Wood Pellet
30 Oktober 2024 October 30, 2024	Bukit Asam (PTBA) Terima Dua Anugerah Prasetya Ahimsa dari Kementerian ESDM Bukit Asam (PTBA) Receives 2 Prasetya Ahimsa Awards from ESDM Ministry
30 Oktober 2024 October 30, 2024	Pendapatan Naik 11 Persen, Bukit Asam (PTBA) Cetak Laba Bersih Rp 3,23 Triliun Hingga Triwulan III 2024 Revenue Up 11 Percent, Bukit Asam (PTBA) Posts Net Profit of Rp3.23 Trillion Until Q3 2024
31 Oktober 2024 October 31, 2024	Bukit Asam (PTBA) Sukses Raih Dua Penghargaan di Ajang TOP Human Capital Awards 2024 Bukit Asam (PTBA) Wins 2 Awards at TOP Human Capital Awards 2024
1 November 2024 November 1, 2024	Berkomitmen untuk Turut Mencerdaskan Bangsa, Bukit Asam (PTBA) Berikan Beasiswa untuk Putra-Putri TNI dan Polri Committed on Nation Education, Bukit Asam (PTBA) Grants Scholarship to Police, Military Kids
4 November 2024 November 4, 2024	Marching Band Bukit Asam Juara Umum Musi Soundsport Competition 2024 Bukit Asam Marching Band Wins Musi Soundsport Competition 2024
5 November 2024 November 5, 2024	Bukit Asam (PTBA) Beri Perlindungan Ketenagakerjaan untuk 500 Pekerja Rentan di Muara Enim Bukit Asam (PTBA) Provides Employment Protection for 500 Vulnerable Workers in Muara Enim
6 November 2024 November 6, 2024	Bukit Asam (PTBA) Hadirkan Energi Surya untuk Para Petani di Desa Lugusari Bukit Asam (PTBA) Brings Solar Energy to Farmers in Lugusari Village
11 November 2024 November 11, 2024	Tingkatkan Peran Perempuan di Industri Pertambangan, Srikandi Bukit Asam Jalin Sinergi dengan Women in Mining and Energy Increasing the Role of Women in the Mining Industry, Srikandi Bukit Asam Establishes Synergy with Women in Mining and Energy
12 November 2024 November 12, 2024	Tekan Emisi, PLTU MT Sumsel-8 Menerapkan Teknologi Khusus MT Sumsel-8 PLTU Implements Special Technology to Reduce Emissions
13 November 2024 November 13, 2024	Bukit Asam (PTBA) Bangun Berangau Park, Ruang Terbuka Hijau untuk Masyarakat Tanjung Enim Bukit Asam (PTBA) Builds Berangau Park, Green Open Space for Tanjung Enim Community
15 November 2024 November 15, 2024	Eyes Clinic Goes to School, Bukit Asam Beri Bantuan Kacamata untuk 25 Pelajar SD Eyes Clinic Goes to School, Bukit Asam Provides Glasses for 25 Elementary Students
18 November 2024 November 18, 2024	Bukit Asam (PTBA) Raih Tiga Penghargaan di Ajang BUMN Branding & Marketing Awards 2024 Bukit Asam (PTBA) Wins Three Awards at the 2024 BUMN Branding & Marketing Awards
21 November 2024 November 21, 2024	Berdayakan Masyarakat, Bukit Asam (PTBA) Sulap Lahan Tidak Produktif di Sukamoro Empowering the Community, Bukit Asam (PTBA) Transforms Unproductive Land in Sukamoro
25 November 2024 November 25, 2024	Bukit Asam (PTBA) Raih Platinum di Asia Sustainability Reporting Rating 2024 Bukit Asam (PTBA) Wins Platinum at Asia Sustainability Reporting Rating 2024
28 November 2024 November 28, 2024	Bersama Bukit Asam, Masyarakat Desa Sidodadi Selamatkan Ekosistem Pesisir Demi Masa Depan Sidodadi Village Community Saves Coastal Ecosystem with Bukit Asam for the Future
2 Desember 2024 December 2, 2024	Terus Berdayakan Masyarakat, Bukit Asam (PTBA) Dianugerahi Tamasya Award oleh Kementerian ESDM Bukit Asam (PTBA) Wins the Tamasya Award by the Ministry of Energy and Mineral Resources for Community Empowerment

Press Release PT Bukit Asam Tbk Tahun 2024
PT Bukit Asam Tbk Press Release in 2024

Tanggal Date	Judul Title
3 Desember 2024 December 3, 2024	Gandeng Perguruan Tinggi hingga Petani, Bukit Asam (PTBA) Kembangkan Inovasi Pertanian Berkelanjutan Collaborating with Universities and Farmers, Bukit Asam (PTBA) Develops Sustainable Agricultural Innovations
4 Desember 2024 December 4, 2024	10 Kali Berturut-turut, Bukit Asam (PTBA) Pertahankan Predikat Indonesia Most Trusted Company Bukit Asam (PTBA) Maintains Indonesia Most Trusted Company Title for 10 Consecutive Time
5 Desember 2024 December 5, 2024	DESA IMPIAN, Upaya Bukit Asam (PTBA) Wujudkan Mimpi Masyarakat Mandiri dan Lingkungan Lestari DESA IMPIAN, Bukit Asam (PTBA) Efforts to Realize Independent Community and Sustainable Environment
12 Desember 2024 December 12, 2024	Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Bukit Asam (PTBA) Gelar Pelatihan Pengolahan Madu hingga Penanganan Hama Improving Community Welfare, Bukit Asam (PTBA) Holds Training on Honey Processing and Pest Management
13 Desember 2024 December 13, 2024	Wujudkan Indonesia Maju, Bukit Asam (PTBA) Dukung Pemberantasan Buta Membaca dan Matematika Bukit Asam (PTBA) Supports Eradication of Illiteracy and Mathematics
17 Desember 2024 December 17, 2024	Kolaborasi dengan UGM, Bukit Asam (PTBA) Kembangkan Batu Bara Jadi Asam Humat Collaboration with UGM, Bukit Asam (PTBA) Develops Coal into Humic Acid
18 Desember 2024 December 18, 2024	Siaga Bencana, Bukit Asam (PTBA) Kirim Bantuan dan Tim Tanggap Darurat ke Sukabumi Disaster Alert, Bukit Asam (PTBA) Sends Aid and Emergency Response Team to Sukabumi
20 Desember 2024 December 20, 2024	Bukit Asam (PTBA) Dinobatkan Jadi Perusahaan Terbaik di Ajang Serelo CSR Award 2024 Bukit Asam (PTBA) Named the Best Company at the 2024 Serelo CSR Award
23 Desember 2024 December 23, 2024	Wujudkan Masyarakat Sejahtera, Bukit Asam (PTBA) Berdayakan Kaum Ibu Realizing a Prosperous Society, Bukit Asam (PTBA) Empowers Mothers
26 Desember 2024 December 26, 2024	Wujudkan Kota Wisata, Bukit Asam (PTBA) Bangun Botanical Garden di Lahan Bekas Tambang Realizing a Tourist City, Bukit Asam (PTBA) Builds a Botanical Garden on Former Mining Land

Press Conference (Media Briefing)

Dalam rangka menjaga hubungan baik dengan media massa, perusahaan terus berupaya untuk menyampaikan informasi-informasi terkini terhadap media dalam media *press conference/media briefing*. *Press conference/media briefing* sendiri dilakukan dengan pertemuan dua arah antara Perusahaan dengan media massa yang dilakukan baik secara fisik maupun virtual. Selama tahun 2024, Perusahaan telah menyelenggarakan 4 (empat) *press conference* sebagai berikut.

Press Conference (Media Briefing)

In order to maintain good relations with the mass media, the company continues to strive to convey the latest information to the media through media press conferences/media briefings. The press conference/media briefing itself is carried out with a two-way meeting between the Company and the mass media which is carried out both physically and virtually. During 2024, the Company has held 4 (four) press conferences as follows.

Nama Kegiatan Activity Name	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Lokasi Location	Jumlah Partisipan Media Total Media Participants
Press Conference Kinerja Tahun Buku 2023 Press Conference Performance Fiscal Year 2023	Jumat, 8 Maret 2024 Friday, March 8, 2024	Ritz Carlton Mega Kuningan, Ballroom 1, Lantai 2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung No. 1, Kav. 1, Mega Kuningan, Jakarta Ritz Carlton Mega Kuningan, Ballroom 1, 2nd Floor, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung No. 1, Kav. 1, Mega Kuningan, Jakarta	34 media
Press Conference Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2023 Press Conference Annual General Meeting of Shareholders (AGM) PT Bukit Asam Tbk Fiscal Year 2023	Rabu, 8 Mei 2024 Wednesday, May 8, 2024	Hybrid (Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta (offline) & Zoom) Hybrid (Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta (offline) & Zoom	71 media
IDX Public Expose 2024 IDX Public Expose 2024	Selasa, 27 Agustus 2024 Tuesday, August 27, 2024	Zoom Meeting	25 media
Press Conference Agreement Refinancing Existing Loan HBAP dengan BMRI Press Conference Agreement Refinancing Existing Loan HBAP with BMRI	Senin, 30 September 2024 Monday, September 30, 2024	Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta	13 media

Hubungan dengan Otoritas dan Self-Regulatory Organization (SRO)

Sebagaimana salah satu tugas dari Sekretaris Perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik salah satu tugas sekretaris perusahaan yakni berkaitan hubungan dengan OJK dan SRO, selama tahun 2024 surat, laporan, korespondensi sebanyak 73 kali yang memuat di antaranya laporan bulanan registrasi efek, laporan perubahan komite audit, dan keterbukaan informasi.

Relations with Authorities and Self-Regulatory Organizations (SROs)

As one of the duties of the Corporate Secretary in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 of 2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies, one of the duties of the corporate secretary is related to relations with the OJK and SRO. In 2024 there were 73 letters, reports, and correspondence including monthly securities registration reports, audit committee change reports, and information disclosure.

Pengembangan Kompetensi

Sebagai upaya pengembangan kompetensi, Sekretaris Perusahaan difasilitasi oleh Perusahaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pengembangan kompetensi mencakup program pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi, adapun pelatihan dan sertifikasi yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan di tahun 2024, dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Competency Development

As an effort to develop competency, the Corporate Secretary is supported by the Company to participate in education and training. Competency development includes education, training, and certification program. The training and certification taken by the Corporate Secretary in 2024 can be seen in the Company Profile chapter in this annual report.

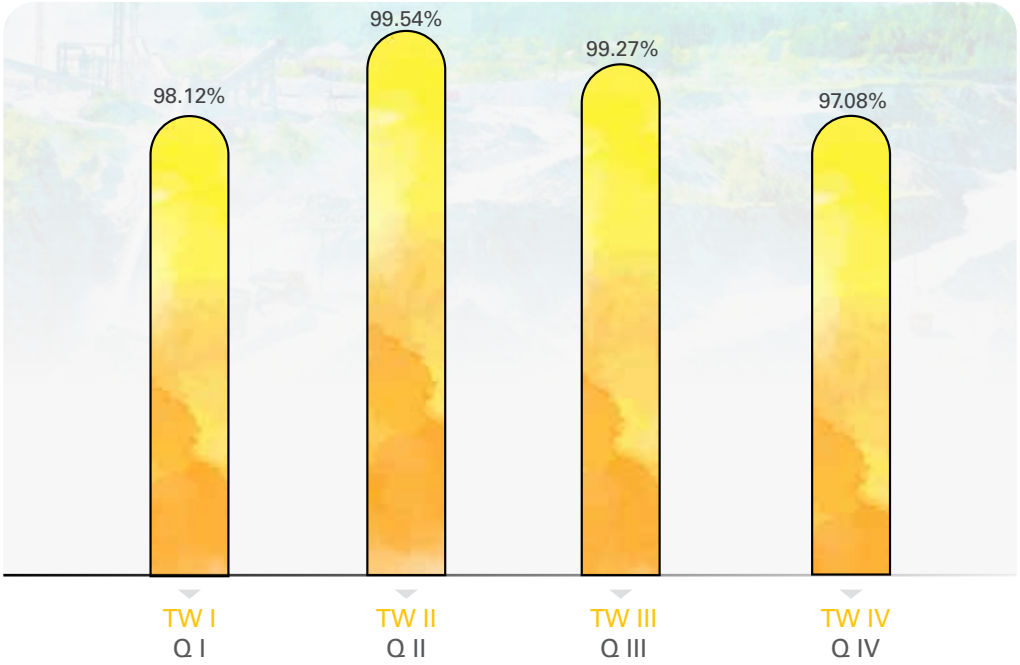
Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Satuan Kerja Corporate Secretary tahun 2024 dilakukan dengan melakukan evaluasi Key Performance *Indicator/Balance Score Card* secara triwulan. Berdasarkan hasil perhitungan, di tahun 2024 Satuan Kerja Corporate Secretary mendapatkan skor 98,12% pada Triwulan I, skor 99,54% pada Triwulan II, skor 99,27% pada Triwulan III, dan Triwulan IV mendapatkan skor 97,08%.

Performance Appraisal

The performance appraisal of the Corporate Secretary Work Unit in 2024 was carried out by evaluating the Key Performance Indicators/Balance Score Card on a quarterly basis. Based on the calculation results, in 2024 the Corporate Secretary Work Unit received a score of 98.12% in 1st Quarter, a score of 99.54% in 2nd Quarter, a score of 99.27% in 3rd Quarter, and in 4th Quarter a score of 97,08%.

Key Performance Indicator Satuan Kerja Corporate Secretary 2024
Corporate Secretary Work Unit Key Performance Indicators in 2024



Satuan Kerja *Internal Audit*
Internal Audit Work Unit



Internal Audit

Dalam menjalankan dan mengelola fungsi pengawasan guna mendorong prinsip *Governance, Risk, and Compliance* (GRC), Perusahaan memiliki Organisasi Satuan Kerja Internal Audit (SPI). Fungsi SPI diantara lain adalah untuk memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan pemberian saran (*advice*) perbaikan operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian risiko dan proses tata kelola Perusahaan, serta pemberian rekomendasi perbaikan sehingga dapat memberikan nilai.

SPI telah dilengkapi dengan panduan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas yakni Piagam (*Charter*) Satuan Pengawasan Intern PTBA yang ditandatangani bersama oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, Pedoman Pengawasan Intern berikut dengan turunya dan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang ditetapkan oleh Direktur Utama dan di-*review* oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Ruang lingkup Satuan Pengawasan Intern meliputi pengendalian internal, evaluasi efektivitas implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan evaluasi efektivitas Manajemen Risiko sesuai dengan peraturan dan standar internal audit yang berlaku.

Internal Audit Unit

In carrying out and managing the supervisory function to promote the principles of Governance, Risk, and Compliance (GRC), the Company has an Internal Audit Work Unit (SPI) Organization. As an internal audit, they're responsible for carrying out independent and objective assurance and consultation activities, with the aim of increasing the value and providing advice on improving the company's operational, through a systematic approach by evaluating and improving the effectiveness of risk management, risk control and the Company's governance process, as well as providing audit improvement recommendations.

SPI has been equipped with a guide that serves as a reference for carrying out tasks, namely the PTBA Internal Audit Unit Charter which was jointly signed by the President Director and President Commissioner, the Internal Audit Guidelines along with the following and the Annual Audit Work Program (PKAT) determined by the President Director and reviewed by the Board of Commissioners through the Audit Committee. The scope of the Internal Audit Unit includes internal control, evaluation of the effectiveness of the implementation of good corporate governance principles and evaluation of the effectiveness of Risk Management in accordance with applicable internal audit regulations and standards.

Untuk kelancaran tugas, Satuan Pengawasan Intern berkoordinasi dengan Komite Audit, Internal Audit Induk Perusahaan (IA MIND ID) dan menjadi mitra kerja dari auditor eksternal serta mempunyai hubungan dengan Satuan Pengawasan Intern entitas anak, entitas afiliasi dan yayasan milik Perusahaan dalam bentuk koordinasi pelaksanaan audit dan bantuan teknis.

Visi

Menjadi mitra bisnis strategis bagi direksi, komisaris, dan manajemen perusahaan yang profesional, independen dan terpercaya.

Misi

Ikut serta dalam meningkatkan dan melindungi nilai Perusahaan melalui aktivitas jasa *assurance* dan konsultasi dengan memberikan asuransi, advis dan wawasan yang berbasis risiko dan objektif.

Piagam SPI

Perusahaan memiliki Piagam/*Charter* SPI sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) PT Bukit Asam Tbk pada tanggal 29 Mei 2024, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Piagam ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan SPI, yakni pedoman kerja SPI yang berisi beberapa hal yaitu maksud, visi, misi, struktur hubungan kerja, fungsi dan tanggung jawab, wewenang, ruang lingkup, kebijakan, standar, kode etik, evaluasi dan penyempurnaan. Piagam SPI ditinjau secara periodik agar pelaksanaan audit internal senantiasa berada pada tingkat yang optimal.

Independensi

Sebagai auditor internal, SPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki kebebasan bertindak (independen) secara objektif, di mana:

1. Bersikap independen yaitu dapat melaksanakan tugas audit dengan bebas dan obyektif, baik secara organisasi maupun secara pribadi terhadap auditee dan organisasinya, serta independen dalam sikap dan penampilan. Dengan demikian Auditor Internal dapat memberikan pendapat yang tidak memihak, bebas dari pengaruh pihak lain serta tidak berprasangka dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil audit.
2. Bersikap jujur terhadap diri sendiri serta yakin bahwa hasil kerjanya dapat diandalkan dan dipercaya.

For the smooth operation of its duties, the Internal Audit Unit coordinates with the Audit Committee, the Parent Company's Internal Audit (IA MIND ID) and becomes a working partner of the external auditor and has relations with the Internal Audit Units of subsidiaries, affiliated entities and foundations owned by the Company in the form of coordinating the implementation of audits and technical assistance.

Vision

Become a Strategic Business Partner for Board of Directors, Commissioners, and the Company's management in a professional, independent, and trusted manner.

Mission

Participate in enhancing and protecting the corporate value through assurance and consulting service activities by providing risk-based and objective insurance, advice and insight.

Internal Audit Unit Charter

The Company has an SPI Charter as stipulated in the Internal Audit Charter of PT Bukit Asam Tbk on May 29, 2024, referring to the provisions of the Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, and Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter.

This charter regulates various objects related to Internal Audit, namely the purposes, vision, mission, work relationship structure, functions and responsibilities, authorities, scope, policies, standards, Code of Conduct, evaluation, and improvement. The Internal Audit Unit Charter is reviewed periodically to optimize the implementation of internal audit.

Independence

As an internal auditor, in carrying out its duties and functions, Internal Audit has the freedom to act (independently) objectively by:

1. Being independent means being able to carry out audit tasks freely and objectively, both organizationally and personally towards the auditee and its organization, and being independent in attitude and appearance. Thus, the Internal Auditor can provide an impartial opinion, free from the influence of other parties and without prejudice in the implementation and reporting of audit results.
2. Be honest with themselves and be confident in reliable and trustworthy work results.

3. Auditor Internal berkomitmen untuk tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal-hal lain yang patut diduga dapat disalahgunakan baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lain yang tidak berhak, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan, untuk menghindari keragu-raguan pelanggaran atas ketentuan ini akan mendapat sanksi sebagaimana diatur Kode Etik.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

Satuan Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh Division Head yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris (Dimana Dewan Komisaris dalam pengangkatan dan pemberhetian Internal Audit Division Head memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit). Internal Audit Division Head bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan berkoordinasi dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal dalam menjalankan tugasnya. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut atas hasil audit, maka Kepala SPI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama. Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala SPI diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepala SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

Fungsi dan Cakupan Kerja

Satuan Pengawasan Intern membantu Direktur Utama agar dapat mengamankan aset Perusahaan, berjalannya kegiatan usaha secara efisien dan efektif serta ditaatinya peraturan perusahaan dengan menjalankan 2 (dua) fungsi utama:

1. Fungsi *Strategic Partner,* yaitu dalam pemberian asuransi dan konsultasi yang independen dan sesuai dengan aturan perusahaan (*preventive action*);
2. Fungsi *Assurance* dan Konsultasi, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Direktur Utama pada seluruh tingkatan dan menyampaikan rekomendasi tindakan perbaikan kepada Direktur Utama (*corrective action*).

Selain itu, SPI juga berkoordinasi dengan Komite Audit dan menjadi mitra kerja dari auditor eksternal serta mempunyai hubungan koordinatif dengan SPI entitas anak, entitas afiliasi dan yayasan milik Perusahaan dalam bentuk koordinasi pelaksanaan audit dan bantuan teknis.

3. Internal Auditors are committed to not utilizing information obtained for personal interests or benefits or other things that are suspected of being misused either by themselves or by other unauthorized parties, unless required by laws and regulations or court decisions, to avoid doubt, violations of these provisions will be subject to sanctions as regulated in the Code of Ethics.

Appointment and Dismissal of Head of Internal Audit

Internal Audit Unit is led by a Division Head appointed and dismissed by Board of Directors with the approval of Board of Commissioners (Whereby the Board of Commissioners in appointing and dimssing the Internal Audit Division Head with due observance the recommendation of Audit Committee). Internal Audit Division Head reports directly to President Director and coordinates with Audit Committee and External Auditor in carrying out his/her duties. To support independence and ensure a smooth audit and the authority to monitor follow-up on audit results, Head of Internal Audit can communicate directly with Board of Commissioners and the Committees of Board of Commissioners to inform various matters related to the audit. The provision of such information must be reported to President Director. Every appointment, replacement, or dismissal of Head of Internal Audit is notified to the Financial Services Authority (OJK) and Head of Internal Audit is directly responsible to President Director.

Functions and Scope of Work

Internal Audit assists the President Director in securing the Company's assets, ensuring the business activities to run efficiently and effectively, and complying with Company regulations by carrying out 2 (two) main functions:

1. Strategic Partner function, providing independent assurance and consulting following Company regulations (preventive action);
2. Assurance and Consultancy Function, supervising the implementation of President Director's policies at all levels and submit recommendations for corrective actions to President Director (corrective action).

In addition, Internal Audit coordinates with Audit Committee, becomes a partner of external auditor, and has a coordinating relationship with Internal Audit's subsidiaries, affiliated entities, and foundations owned by the Company in the form of coordination of audit implementation and technical assistance.



Nugraha Nurtyasanta, S.H., M.Hum.

Internal Audit Division Head

Masa Jabatan: 2023 - Sekarang
Term of Office: 2023 – Present

Usia Age	55 Tahun 55 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Tanjung Enim
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Direksi PT Bukit Asam No.103/0100/2023 Tentang Pengangkatan Pemegang Jabatan di Lingkungan PT Bukit Asam Tbk Decree of Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 103/0100/2023 Concerning The Appointment of Position Holders within PT Bukit Asam Tbk
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. S2 Humaniora, Universitas Gadjah Mada (2003) 2. S1 Hukum, Universitas Gadjah Mada (1992) 1. Master Degree in Humanities, Gadjah Mada University (2003) 2. Bachelor Degree in Law, Gadjah Mada University (1992)
Sertifikasi Certification	1. Qualified Chief Risk Officer (QCRO) 2. Certified Internal Auditor Excevutive (CIAE) 3. Professional Internal Auditor (PIA)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	1. Internal Audit Division Head (2023 - sekarang) 2. VP Hukum dan Regulasi Tahun (2014 - 2023) 3. Manajer Hukum (2010 - 2014) 4. Spesialis Hukum (2004 - 2010) 5. Administrator Kontrak (1993 - 2004) 1. Internal Audit Division Head (2023 - present) 2. VP Law and Regulation (2014 - 2023) 3. Legal Manager (2010 - 2014) 4. Legal Specialist (2004 - 2010) 5. Contract Administrator (1993 - 2004)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak ada None
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak ada None

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Jangka Panjang (RAJP) dan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang berbasis risiko termasuk alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi Pengawasan Internal, yang disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris yang membidangi Komite Audit.
2. Memastikan pelaksanaan Pengawasan Internal sesuai dengan rencana.
3. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan.
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas keekonomian, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
5. Memberikan saran dan rekomendasi yang konstruktif untuk memastikan kecukupan serta peningkatan efisiensi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian, serta informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit/dievaluasi pada semua tingkat Manajemen.
6. Membuat dan menyampaikan laporan hasil audit/evaluasi kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas persetujuan Direktur Utama untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
8. Menyusun dan mengimplementasikan program quality assurance dan pengembangan serta mengevaluasi efisiensi dan efektifitas kegiatan fungsi Audit Internal dan mengidentifikasikan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan secara berkesinambungan/terus menerus untuk memastikan bahwa Divisi Internal Audit/SPI dalam melakukan perannya telah sesuai dengan Standar yang berlaku, Kode Etik, serta Piagam Audit Internal dalam rangka memberikan hasil audit yang berkualitas.
9. Memastikan Auditor Internal/SPI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Perusahaan.
10. Melakukan penyusunan dan pengkajian Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*/Charter SPI) secara periodik dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
11. Melakukan penilaian dan pemantauan sistem pengendalian informasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa informasi penting Perseroan terjamin keamanannya dan penyajian segala laporan dan kegiatan Perseroan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Duties and Responsibilities

Internal Audit's duties and responsibilities include:

1. Prepare and implement a Long-Term Audit Plan (RAJP) and a risk-based Annual Audit Work Program (PKAT) including budget allocation for the implementation of the Internal Supervision function, which is approved by the President Director and Commissioner in charge of the Audit Committee.
2. Ensure the implementation of Internal Supervision is in accordance with the plan.
3. Evaluate the effectiveness of the implementation of internal control, risk management, and the Company's governance process in accordance with laws and regulations and Company policies.
4. Conduct examinations and assessments of the economy, efficiency and effectiveness in the fields of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities.
5. Provide constructive suggestions and recommendations to ensure the adequacy and improvement of the efficiency of governance, risk management, and control, as well as objective information on audited/evaluated activities at all levels of Management.
6. Create and submit audit/evaluation report to the President Director and Board of Commissioners with the approval of the President Director to take corrective action in a timely manner.
7. Monitor, analyze, and report the implementation of follow-up audit results to the President Director and Board of Commissioners.
8. Prepare and implement quality assurance and development programs and evaluate the efficiency and effectiveness of Internal Audit function activities and identify improvements that need to be carried out continuously/continuously to ensure the Internal Audit Division/SPI in carrying out its role is in accordance with applicable Standards, Code of Ethics, and Internal Audit Charter in order to provide quality audit results.
9. Ensure that Internal Auditors/SPI participate in ongoing professional development and other training in accordance with the development of the Company's complexity and business activities.
10. Prepare and review the Internal Audit Charter (SPI Charter) periodically and submit it to the President Director and the Board of Commissioners.
11. Assess and monitor the information and communication control system to ensure the Company's important information is secure and all reports and activities of the Company comply with applicable laws and regulations.

12. Melaksanakan koordinasi dengan auditor eksternal.
13. Melaksanakan tugas khusus (termasuk pendampingan/*counterpart* Auditor Eksternal, konsultan) yang ditugaskan oleh Direktur Utama.
14. Melakukan Audit Tujuan Tertentu atau Audit Tematik atas permintaan Direktur Utama.
15. SPI PTBA sebagai SPI Perusahaan Induk dapat melakukan:
    a. Menentukan strategi pelaksanaan Audit Intern Anak Perusahaan;
    b. Merumuskan prinsip Audit Intern yang mencakup metodologi audit dan langkah pelaksanaan pengendalian mutu; dan
    c. Memantau pelaksanaan Audit Intern pada masing-masing anak perusahaan.
16. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal, kecuali diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan.
17. Menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
18. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas Pengawasan Internal :
    a. Terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada personel SPI mengingat penggunaan jasa ahli pihak eksternal bersifat sementara;
    b. Penggunaan jasa pihak eksternal tidak mempengaruhi independensi dan obyektivitas fungsi SPI; dan
    c. Pihak eksternal mematuhi Piagam Audit Internal Perusahaan.

Wewenang

Satuan Pengawasan Intern mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap dokumen, catatan, personal, dan aset Perusahaan di seluruh unit kerja perusahaan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas auditnya, termasuk mengakses informasi Perusahaan Terkendali dan/atau Perusahaan Afiliasi yang menundukkan diri pada ketentuan Audit Internal Perusahaan atau melalui forum RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memperoleh informasi dari Anak dan Afiliasi Perusahaan (PTBA Grup) berupa:
    a. Program Kerja Audit Tahunan dan progres pelaksanaannya;
    b. Hasil audit internal dan eksternal yang signifikan bagi pencapaian tujuan Perusahaan beserta tindak lanjutnya;

12. Coordinate with external auditors.
13. Carry out special tasks (including assistance/counterparts of External Auditors, consultants) assigned by the President Director.
14. Conduct Specific Purpose Audits or Thematic Audits as requested by the President Director.
15. PTBA's SPI as the Parent Company's SPI is able to:
    a. Determine the strategy for implementing Subsidiary Internal Audits;
    b. Formulate Internal Audit principles that include audit methodology and quality control implementation steps; and
    c. Monitor the implementation of Internal Audit in each subsidiary.
16. Maintain the confidentiality of information and/or data of the Company related to the implementation of the duties and responsibilities of Internal Audit, unless permitted by the provisions of laws and regulations and/or court decisions.
17. Maintain confidential information obtained while serving in accordance with the provisions of laws and regulations.
18. Ensure that in the event of the use of external party services for Internal Supervision activities:
    a. The transfer of knowledge between external parties to SPI personnel is carried out considering that the use of external expert services is temporary;
    b. The use of external party services does not affect the independence and objectivity of the SPI function; and
    c. External parties comply with the Company's Internal Audit Charter.

Authorities

Internal Audit has the following authorities as follow:

1. Full, free, and unlimited access to documents, records, personnel, and assets of the Company in all work units of the Company to obtain data and information related to the implementation of its audit duties, including accessing information from Controlled Companies and/or Affiliated Companies that are subject to the provisions of the Company's Internal Audit or through the GMS forum in accordance with applicable provisions.
2. Obtaining information from the Company's Subsidiaries and Affiliates (PTBA Group) in the form of:
    a. Annual Audit Work Program and progress of its implementation;
    b. Significant Internal and external audit results for achieving the Company's objectives and their follow-up;

c. Segala hal terkait isu strategis (*strategic issues*) yang mempengaruhi Perusahaan;
d. Program pengembangan dan *quality assurance* beserta realisasinya.

3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
4. Mengadakan rapat secara berkala maupun insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
5. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal.
6. Memberikan konsultasi dan keyakinan terkait hal yang bersifat strategis baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan operasional sesuai kompetensi Auditor Internal yaitu pengendalian internal dan tata kelola.
7. Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa *assurance* internal maupun eksternal lainnya dan jasa konsultasi lainnya apabila diperlukan sehingga cakupan audit dapat memadai dan mengurangi duplikasi pekerjaan.
8. Melakukan koordinasi dengan pihak luar terkait fungsi Audit Internal.
9. Menyusun, mengubah dan melaksanakan Piagam SPI termasuk menentukan prosedur dan lingkup audit.
10. Menilai kehandalan informasi yang dihasilkan oleh Unit Kerja dan efektifitas kebijakan, sistem dan prosedur pengendalian yang ada.
11. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem audit.
12. Menilai dan menganalisa aktivitas Perusahaan, namun tidak mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang di-reviu/ diaudit.
13. Mengalokasikan sumber daya auditor, menentukan auditee, menentukan sasaran audit, ruang lingkup dan jadwal audit, penerapan teknik audit yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit, mengklarifikasi dan membicarakan hasil audit, meminta tanggapan lisan/tertulis pada Auditee, memberikan saran dan rekomendasi.
14. Meminta bantuan dari unit kerja lain atau pihak Eksternal yang profesional dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu.
15. Mengusulkan staf SPI untuk promosi, rotasi, mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar dan kursus yang berkaitan dengan kelancaran tugas-tugas audit atau untuk memenuhi kompetensi Auditor Internal sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Perusahaan dengan tetap memperhatikan ketentuan dibidang Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
16. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.
17. Melakukan pemilihan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Audit Internal.

c. All matters related to strategic issues affecting the Company;
d. Development and quality assurance programs and their realization.

3. Communicating directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee.
4. Holding regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee.
5. Coordinate its activities with the activities of the External Auditor.
6. Provide consultation and assurance regarding strategic matters both during planning and during the implementation of operational activities in accordance with the Internal Auditor's competency, namely internal control and governance.
7. Coordinate with other internal and external assurance service providers and other consulting services if necessary for the audit coverage is adequate and reduces duplication of work.
8. Coordinate with external parties regarding the Internal Audit function.
9. Prepare, amend and implement the SPI Charter including determining audit procedures and scope.
10. Assess the reliability of information generated by the Work Unit and the effectiveness of existing policies, systems and control procedures.
11. Verify and test the reliability of the information obtained, in relation to the assessment of the effectiveness of the audit system.
12. Assess and analyze the Company's activities, but do not have the authority to implement and be responsible for the activities being reviewed/audited.
13. Allocating auditor resources, determining auditee, determining audit objectives, scope and audit schedule, implementing audit techniques deemed necessary to achieve audit objectives, clarifying and discussing audit results, requesting verbal/written responses from the Auditee, providing suggestions, and recommendations.
14. Requesting assistance from other work units or professional external parties in conducting audits if deemed necessary.
15. Proposing SPI staff for promotion, rotation, attending education, training, seminars, and courses related to the smooth running of audit tasks or to fulfill the competence of Internal Auditors in accordance with the development of the complexity and business activities of the Company while still paying attention to the provisions in the field of Human Resources determined by the Company.
16. Attending strategic meetings
17. Choosing competent human resources according to the needs in carrying out Internal Audit tasks.

18. Melakukan reviu/evaluasi dan mengajukan revisi terhadap PKAT tahun berjalan kepada Direktur Utama dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Perusahaan.

Pelaporan

Satuan Pengawasan Intern menyampaikan dan menyediakan laporan kepada Direksi melalui Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/ wakilnya meliputi:

1. Laporan Hasil Audit;
2. Rangkuman Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Audit internal dan eksternal;
3. Laporan Realisasi Kegiatan Audit; dan
4. Laporan Hasil Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan.

Struktur Organisasi Audit Internal dan Jumlah Pegawai

Struktur organisasi SPI ditetapkan sesuai Keputusan Direksi No. 297/0100/2022 tentang Struktur Organisasi Satuan Kerja Pengawasan Intern.

Di tahun 2024, jumlah karyawan yang berada pada unit Satuan Pengawasan Intern sebanyak 19 orang.

18. Conduct a review/evaluation and submit revisions to the current year's PKAT to the President Director by taking into account the interests and needs of the Company.

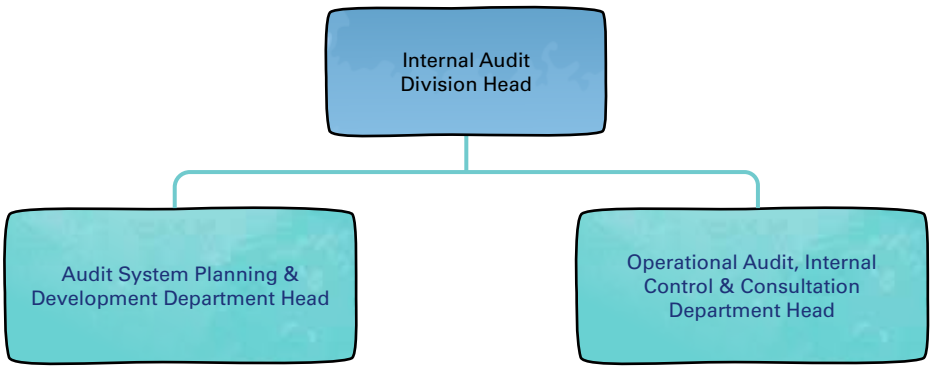
Reporting

Internal Audit submits and provides reports to Board of Directors through the President Director and Board of Commissioners through the Audit Committee, and the Series A Dwiwarna Shareholders/their representatives include:

1. Audit Result Report;
2. Summary of Follow-up Report on Internal and External Audit Results;
3. Report on the Realization of Audit Activities.
4. Report on the Results of Evaluation of the Company's Internal Control System.

Internal Audit Organizational Structure and Number of Employees

The organizational structure of Internal Audit is determined according to the Decree of Board of Directors No. 297/0100/2022 concerning the Organizational Structure of Internal Audit Work Unit.



In 2024, the number of employees who were members of Internal Audit Unit is 19 people.

Sertifikasi Profesi Audit Internal
Internal Audit Professional Certification

Level Sertifikasi Certification Level	Jumlah Karyawan Number of Employee
Qualified Internal Auditor (QIA)	6 Orang | People
Professional Internal Auditor (PIA)	4 Orang | People
Certified Internal Auditor (CIA)	1 Orang | People
Certified Internal Audit Leader (CIAL)	3 Orang | People
Certified Risk Management Professional (CRMP)	2 Orang | People
Certified Risk Management Officer (CRMO)	2 Orang | People
Qualified Risk Management Officer (QRMO)	2 Orang | People
Certified Legal Auditor (CLA)	1 Orang | People

Sertifikasi Profesi Audit Internal
Internal Audit Professional Certification

Level Sertifikasi Certification Level	Jumlah Karyawan Number of Employee
Certified Governance Professional (CGP)	1 Orang | People
Certified Internal Auditor Executive (CIAE)	4 Orang | People
ISO 37001:2016 (SMAP) Internal Auditor Based On ISO 19011	5 Orang | People
Cobit 2015	1 Orang | People
Qualified Chief Risk Officer (QCRO)	1 Orang | People
Qualified Risk Management Professional (QRMP)	1 Orang | People
Certified Competent Internal Auditor (CCIA)	1 Orang | People
Associate Certified Competent Internal Auditor (ACCIA)	1 Orang | People

Pengembangan Kompetensi Satuan Pengawasan Intern

Dalam meningkatkan kualitas personel SPI sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas Internal Audit, Perusahaan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi SPI dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai. Tentang daftar kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti Satuan Pengawasan Intern di sepanjang tahun 2024 dapat dilihat dalam bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Rapat Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern secara rutin melakukan Rapat Koordinasi Internal yang dihadiri seluruh pejabat struktural dan fungsional/auditor dan staf SPI lainnya minimal 1 (satu) bulan sekali membahas dan mengevaluasi progres kinerja yang sedang berjalan dan rencana kegiatan *assurance* dan konsultasi/pendampingan ke depan berdasarkan Rencana Audit tahunan dan Target kinerja tahun berjalan.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024

Di tahun 2024, SPI telah menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan kegiatan sebagai berikut:

1. **Audit Operasional**
   Kegiatan audit operasional dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SPI Tahun 2024 yang telah disahkan oleh Direktur Utama melalui Nota Dinas Nomor: 323J/T/0100/PW.02/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 untuk dilakukan audit sebanyak 11 Objek audit Operasional, 1 Objek audit Tematik dan 40 satuan kerja untuk evaluasi *internal control*, sebagai berikut :

Internal Audit Unit Competency Development

In order to improve the quality of Internal Audit personnel in accordance with the needs for carrying out Internal Audit duties, the Company facilitates development programs for Internal Audit to improve employee competencies. The list of competency development activities attended by Internal Audit Unit throughout 2023 can be seen in the Company Profile chapter of this annual report.

Internal Audit Unit Meeting

Internal Audit Unit routinely conducts Internal Coordination Meetings attended by all structural and functional officials/ auditors and other Internal Audit staffs at least once a month to discuss and evaluate ongoing performance progress and plans for future assurance and consulting/assistance activities based on the annual Audit Plan and performance targets of the current year.

Implementation of Duties in 2024

In 2024, SPI has carried out its duties and responsibilities with the following activities:

1. **Operational Audit**
   Operational audit activities are carried out in accordance with the 2024 SPI Annual Audit Work Program (PKAT) which has been approved by the President Director through Service Note Number: 323J/T/0100/PW.02/XII/2023 dated December 22, 2023, to conduct audits of 11 Operational Audit Objects, 1 Thematic Audit Object and 40 work units for internal control evaluation, as follows:

No	Objek Audit Audit Object	Jenis Audit Type of Audit	Waktu Audit Auditing Period	Keterangan Information
1	Unit Pelabuhan Tarahan Tarahan Port Unit	Audit Operasional Operational Audit	Triwulan I 2024 Q1 2024	006/LHA/SPI/11200/PW.02/II/2024
2	Unit Pelabuhan Kertapati Kertapati Port Unit	Audit Operasional Operational Audit	Triwulan I 2024 Q1 2024	003/LHA/SPI/11200/PW.02/II/2024
3	Penanganan dan Angkutan Batu bara Coal Handling and Transportation	Audit Operasional Operational Audit	Triwulan I 2024 Q1 2024	009/LHA/SPI/11200/PW.02/III/2024
4	Penambangan Mining	Audit Operasional Operational Audit	Triwulan II 2024 Q2 2024	015/LHA/SPI/11200/PW.02/VI/2024
5	Pengelolaan Lingkungan dan Penunjang Tambang Environmental Management and Mining Support	Audit Operasional Operational Audit	Triwulan II 2024 Q2 2024	012/LHA/SPI/11200/PW.02/V/2024
6	Perawatan (CHF & ATU, AP & PT) Maintenance (CHF & ATU, AP & PT)	Audit Operasional Operational Audit	Triwulan II 2024 Q2 2024	018/LHA/SPI/11200/PW.02/VI/2024
7	Layanan Operasional Operational Service	Audit Operasional Operational Audit	Triwulan III 2024 Q3 2024	029/LHA/SPI/11200/PW.02/ VIII/2024
8	Perencanaan (Tambang, Eksploitasi) Planning (Mining, Exploitation)	Audit Operasional Operational Audit	Triwulan III Q3 20242024	023/LHA/SPI/11200/PW.02/ VIII/2024
9	Sustainability	Audit Operasional Operational Audit	Triwulan III 2024 Q3 2024	026/LHA/SPI/11200/PW.02/ VIII/2024
10	Pengadaan Procurement	Audit Operasional Operational Audit	Triwulan IV 2024 Q4 2024	035/LHA/SPI/11200/PW.02/XI/2024
11	Pengelolaan Aset dan Infrastruktur Sipil Penunjang Asset Management and Supporting Civil Infrastructure	Audit Operasional Operational Audit	Triwulan IV 2024 Q4 2024	032/LHA/SPI/11200/PW.02/XI/2024
12	Teknologi Informasi (IT Audit) Information Technology (IT Audit)	Audit Tematik Thematic Audit	Triwulan IV 2024 Q4 2024	038/LHA/SPI/11200/PW.02/XI/2024

2. Advis

Satuan Pengawasan Intern telah mengeluarkan 12 Advis yang tujuannya untuk perbaikan kinerja satuan kerja. Adapun advis yang dimaksud sebagai berikut:

2. Advice

The Internal Audit Unit has issued 12 advices aimed at improving the performance of the work unit. The advice in question is as follows:

No	Tanggal Date	No. Nota Dinas Number of Official Memo	Ditujukan Kepada Referred to	Saran/advis Advice
1	9 Januari 2024 January 9, 2024	004/T/11200/PW.02/I/2023	VP Manajemen Risiko Risk Management VP	Advis Kategori Dampak pada Aplikasi ERMA di Cisea Advice on Impact Category of ERMA Application in Cisea
2	10 Januari 2024 January 10, 2024	006/T/11200/PW.02/I/2023	VP Sustainability	Advis dan Tanggapan Konsultansi atas Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-277/ MBU/10/2023 Advice and Consultation Response to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-277/ MBU/10/2023
3	4 April 2024 April 4, 2024	262/T/11200/PW.02/IV/2024	GM Pelabuhan Tarahan Tarahan Port GM	Advice Excess Power PLTU 2X8 MW Tarahan
4	29 April 2024 April 29, 2024	271/T/11200/PW.02/IV/2024	VP SMP & GCG	Advis Evaluasi dan Pemutakhiran Dokumen Kesisteman Advice on Evaluation and Updating of Systematic Documents
5	17 Mei 2024 May 17, 2024	282/T/11200/PW.02/V/2024	VP Pengembangan Logistik dan Infrastruktur VP of Logistic and Infrastructure Development	Advis Pengelolaan Organisasi Satuan Kerja Pengembangan Logistik dan Infrastruktur (PLI) Advice on Management of Logistics and Infrastructure Development Work Unit (PLI) Organization
6	1 Juli 2024 July 1, 2024	310/T/11200/PW.02/VII/2024	VP SDM Stratejik Strategic HR VP	Advice Sertifikasi Wajib Pengawas Operasional Advice on Mandatory Certification for Operational Supervisors
7	1 Juli 2024 July 1, 2024	312/T/11200/PW.02/VII/2024	VP Penambangan Mining VP	Advis Reminder Kepatuhan Penggunaan Anggaran dan Pengadaan Barang di Satker Penambangan Advice Reminder on Compliance with Budget Use and Procurement of Goods in Mining Work Units

No	Tanggal Date	No. Nota Dinas Number of Official Memo	Ditujukan Kepada Referred to	Saran/advis Advice
8	8 Oktober 2024 October 8, 2024	391/T/11200/PW.02/X/2024	VP Sustainability	Advis Reviu Dokumen tata Laksana (TL) dan Tata Cara Kerja (TCK) pada Satuan Kerja Sustainability Advice on Review of Implementation Documents (TL) and Work Procedures (TCK) at the Sustainability Work Unit
9	9 Oktober 2024 October 9, 2024	392/T/11200/PW.02/X/2024	VP Layanan operasi Operational Service VP	Advis Reviu Manajemen Risiko pada Enterprise Risk Management Application (ERMA) Satuan Kerja Layanan Operasi Risk Management Review Advice on Enterprise Risk Management Application (ERMA) Operational Service Work Unit
10	21 Oktober 2024 October 21, 2024	406/T/11200/PW.02/X/2024	VP Sustainability	Advis Sinkronisasi Program Sustainability untuk Mendukung Unit Pertambangan Tanjung Enim (UPTE) Advice on Synchronizing Sustainability Programs to Support Tanjung Enim Mining Unit (UPTE)
11	31 Oktober 2024 October 31, 2024	414/T/11200/PW.02/X/2024	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Advis Fungsi Humas dalam Mendukung Unit Pertambangan Tanjung Enim (UPTE) Advice on Public Relations Function in Supporting Tanjung Enim Mining Unit (UPTE)
12	29 November 2024 November 29, 2024	447/T/11200/PW.02/X/2024	VP SDM Strategis Strategic HR VP VP SDM Operasional Operational HR VP	Advis Pedoman Pengelolaan Alih Daya Outsourcing Management Guidelines Advice

3. Konsultasi

Konsultasi yang dilakukan oleh SPI pada tahun 2024 ada sebanyak 12 kegiatan yaitu:

3. Consultation

The consultations conducted by SPI in 2024 include as many as 12 activities activities, namely:

No	Tanggal Date	Satker Peminta Requesting Work Unit	Perihal About	Saran/Masukan Suggestion/Feedback
1	3 Januari 2024 January 3, 2024	Gudang Peltar Peltar Warehouse	Tim Inventarisasi Fisik Persediaan Barang Gudang Warehouse Goods Inventory Physical Inventory Team	1. Nilai persediaan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dikarenakan barang yang sudah di bon tapi masih ada di gudang 2. Agar tertib administrasi dapat dijalankan sesuai tata Kelola 1. The inventory value does not reflect the actual condition because the goods have been invoiced but are still in the warehouse 2. In order to make administration can be carried out according to governance
2	3 Januari 2024 January 3, 2024	Briket Peltar Peltar briquette	Tim Inventarisasi Fisik Persediaan Barang Gudang Warehouse Goods Inventory Physical Inventory Team	1. Nilai persediaan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dikarenakan terdapat selisih yang disebabkan karena pencatatan yang manual 2. Melakukan stock opname internal briket secara berkala, penyusunan dan penempatan barang yang baik untuk memudahkan perhitungan 1. The inventory value does not reflect the actual condition because there are differences caused by manual recording. 2. Conduct periodic internal stock opname of briquettes, good arrangement and placement of goods to facilitate calculations.

No	Tanggal Date	Satker Peminta Requesting Work Unit	Perihal About	Saran/Masukan Suggestion/Feedback
3	15 Januari 2024 January 15, 2024	Perawatan Mesin Machinery Maintenance	Usulan penghapusan Aktiva Tetap Non Produktif No Aset 14311 Crane Terex ATT 400/3 CN0021 Proposal for write-off of Non-Productive Fixed Assets Asset No. 14311 Crane Terex ATT 400/3 CN0021	1. Unit Crane Truck Terex ATT 400/3 CN0021 tahun perolehan 2003.berfungsi sebagai alat transport / memindahkan alat berat/ replace and install serta material handling 2. Terjadi terjadi kerusakan pada komponen besar yaitu engine,transmisi, brake & electrik Cabin yang memerlukan perbaikan overhaul komponen besar dan biaya perbaikan yang tinggi. 3. Membuat permohonan legal opinion terhadap usul penghapusbukuan aset dimaksud 1. Terex ATT 400/3 CN0021 Crane Truck Unit acquired in 2003. Functions as a means of transport / moving heavy equipment / replace and install and material handling 2. There was damage to large components, namely the engine, transmission, brake & electric cabin which required major component overhaul repairs and high repair costs. 3. Making a request for a legal opinion on the proposed write-off of the assets in question
4	15 Februari 2024 February 15, 2024	UPO PAISP	Permohonan pengecekan pendampingan bersama terhadap Nota Dinas Usulan penghapusbukuan aset dari VP PAISP yaitu penghapusan aset bangunan yang terdampak revitalisasi dan atau pengembangan Hotel Ombilin Heritage Request for joint assistance checking of the Service Note on the proposed write-off of assets from the VP PAISP, namely the write-off of building assets affected by the revitalization and/or development of the Ombilin Heritage Hotel.	Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik aset yang dilakukan sesuai dengan permohonan penghapusbukuan aset, maka permohonan tersebut dapat ditindaklanjuti untuk proses selanjutnya dengan tetap berpedoman pada TCK Penghapusan Aktiva Tetap yang berlaku di PTBA dan Permen BUMN no PER-2/MBU/03/2023 tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Based on the results of the physical inspection of assets carried out in accordance with the application for asset write-off, the application can be followed up for the next process while still referring to the TCK for Fixed Asset Write-off applicable at PTBA and BUMN Ministerial Regulation no. PER-2/MBU/03/2023 of 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
5	20 Februari 2024 February 20, 2024	PAB	Permohonan ijin Site visit dan Pembahasan Integrasi Aplikasi PT KAI – PTBA Application for Site Visit Permit and Discussion on PT KAI - PTBA Application Integration	Membuat Soft Structure yang melingkupi kendala – kendala operasional angkutan batu bara antara PTBA dan KAI termasuk kendala integrasi aplikasi Creating a Soft Structure encompassing operational constraints on coal transportation between PTBA and KAI, including application integration constraints.
6	3 Mei 2024 May 3, 2024	KP & K3L UPTE	Usulan Penghapusan Asset 2 Unit Ambulance Brand new Tahun 2016 Write-Off Proposal of Assets of 2 Brand New Ambulance Units in 2016	Membuat permohonan legal opinion terhadap usulan penghapusbukuan aset dimaksud Requesting for a legal opinion regarding the proposed write-off of the assets in question
7	17 Mei 2024 May 17, 2024	Adm Korporat dan Humas Corporate and Public Relations Administration	Pemusnahan Dokumen PT Bukit Asam Tbk Destroying PT Bukit Asam Tbk Documents	Kegiatan pemusnahan arsip dokumen perusahaan dapat secara reguler untuk terus dilaksanakan dan sebagai pertimbangan dalam pengendalian arsip perlu melakukan kajian revitalisasi gedung arsip yang digunakan. The activity of destroying company document archives can be carried out regularly and as a consideration in controlling archives, it is necessary to conduct a revitalization study of the archive building used.
8	12 Juli 2024	Layanan Umum General Service	Usulan Penghapusan Aset 6 (enam) Unit Kendaraan Operasional Write-Off Assets Proposal of 6 (six) Operational Vehicle Units	Membuat permohonan legal opinion terhadap usulan penghapusbukuan aset dimaksud Requesting for a legal opinion regarding the proposed write-off of the assets in question
9	12 Juli 2024 July 12, 2024	Layanan Umum General Service	Usulan Penghapusan Aset 1 (satu) Unit Kendaraan Operasional (Toyota Kijang) Write-Off Assets Proposal of 1 (one) Operational Vehicle Unit (Toyota Kijang)	Membuat permohonan legal opinion terhadap usulan penghapusbukuan aset dimaksud Requesting for a legal opinion regarding the proposed write-off of the assets in question

No	Tanggal Date	Satker Peminta Requesting Work Unit	Perihal About	Saran/Masukan Suggestion/Feedback
10	12 Juli 2024 July 12, 2024	Layanan Umum General Service	Usulan Penghapusan Aset 1 (satu) Unit Kendaraan Operasional (Double Cabin) Write-Off Assets Proposal of 1 (one) Operational Vehicle Unit (Double Cabin)	Membuat permohonan legal opinion terhadap usulan penghapusbukuan aset dimaksud Requesting for a legal opinion regarding the proposed write-off of the assets in question
11	19 November 2024 November 19, 2024	PAISP	Usulan Penghapusan Aset Bangunan Garasi Ambulance, Kantor Pemeliharaan, Pagar Halaman dan Gazebo di RS Bukit Asam Medika Write-Off Proposal for Ambulance Garage Building Assets, Maintenance Office, Yard Fence, and Gazebo at Bukit Asam Medika Hospital	Untuk ditindaklanjuti usulan penghapusbukuan ini dilengkapi dengan kajian risiko, legal dan compliance To follow up on this write-off proposal, it is accompanied by a risk, legal and compliance study.
12	20 November 2024 November 20, 2024	BALITAS	Usulan Penghapusan Aset mobil Crane Ommelift 2100 dan Mesin Molen Trindo TS 50 Write-Off Proposal Ommelift 2100 Mobile Crane Assets and Trindo TS 50 Mixer Machines	Untuk ditindaklanjuti usulan penghapusbukuan ini dilengkapi dengan kajian risiko, legal dan compliance To follow up on this write-off proposal, it is accompanied by a risk, legal and compliance study.

Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi Personel Audit Internal dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga standar kualitas hasil audit internal terbaik untuk bisnis Perusahaan. Pengembangan mencakup program pelatihan dan sertifikasi.

Program pelatihan disusun secara terstruktur dengan tujuan utama untuk membekali semua tenaga auditor dengan keahlian dan pengalaman yang memadai untuk pelaksanaan proses audit sesuai kebutuhan Perusahaan. Program pelatihan yang telah diikuti oleh Satuan Pengawasan Intern dapat dilihat pada Bab Profil dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Internal Audit tahun 2024 dilakukan dengan melakukan evaluasi K*ey Performance Indikator/ Balance Score Card* secara triwulan. Berdasarkan hasil perhitungan, di tahun 2024 Satuan Pengawasan Intern mendapatkan skor 98,63% pada Triwulan I, pada Triwulan II mendapatkan skor 99,24% pada Triwulan III mendapatkan skor 99,51%, sedangkan untuk Triwulan IV sebesar 97,06% dengan rata-rata sebesar 98,61%.

Competency Development

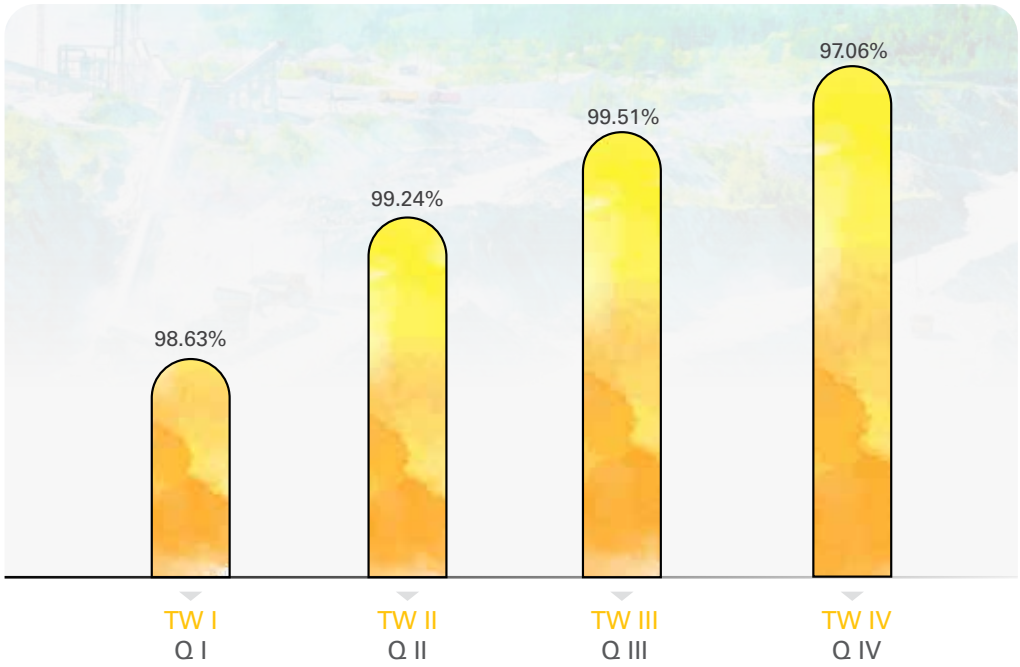
Competency development of Internal Audit personnel is carried out on an ongoing basis to maintain the best quality standards for internal audit results for the Company's business. Development includes training and certification programs.

The training program is tailored to equip all auditors with adequate skills and experience to carry out the audit process according to the Company's needs. The training programs attended by the Internal Audit Unit can be viewed in the Profile Section of this Annual Report.

Performance Assessment

The performance assessment of the Internal Audit Unit in 2024 is carried out by evaluating the Key Performance Indicators/Balance Score Card on a quarterly basis. Based on the calculation results, in 2024 the Internal Audit Unit received a score of 98.63% in 1st quarter, in 2nd quarter with a score of 99.24%, while for Quarter IV was recorded at 97.06% with an average of 98.61%.

Key Performance Indicator Satuan Pengawasan Intern 2024
Internal Audit Unit Key Performance Indicators in 2024



Satuan Kerja Manajemen Risiko

Risk Management Unit

Perusahaan memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang dipimpin oleh seorang Division Head yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi PTBA. Secara struktur, Satuan Kerja Manajemen Risiko berada di bawah Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko dibentuk dengan tujuan untuk membantu pengelolaan risiko-risiko di seluruh aktivitas perusahaan sehingga dapat menjamin kelangsungan bisnis dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, serta memberikan nilai tambah yang maksimal bagi pemangku kepentingan.

Pada tahun 2024 terdapat penambahan fungsi GCG di satuan kerja Manajemen Risiko sehingga satker ini juga membantu pengelolaan GCG Perusahaan dan kepatuhan terintegrasi sehingga risiko korporasi PTBA Group dapat terkendali dan dapat diminimalkan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Strategi Kerja Manajemen Risiko

Menyusun perencanaan yang solid merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan pengelolaan manajemen risiko di Perusahaan. Untuk itu, Satuan Kerja Manajemen Risiko memiliki strategi-strategi kerja sebagai berikut:

Risk Management Unit

Risk Management Unit

PTBA has a Risk Management Unit led by a Division Head appointed and dismissed by the Board of Directors of PTBA. This work unit is under the Directorate of Finance and Risk Management. The Risk Management Unit was formed to assist the risk management in all company activities to ensure business continuity and achievement of predetermined targets, as well as providing maximum added value for stakeholders.

In 2024, there was an additional GCG function in the Risk Management work unit. Thus, this work unit also helps manage the Company's GCG and integrated compliance so PTBA Group's corporate risks can be controlled and minimized and in accordance with applicable provisions.

Risk Management Work Strategy

Preparing a solid and efficient plan is one of the keys in improving risk management in the Company. Therefore, the Risk Management Unit has the following work strategies:

1. Mendemonstrasikan kepemimpinan dan komitmen dalam menerapkan manajemen risiko, di antaranya melalui penetapan kebijakan dan prosedur yang mengatur mengenai pendekatan-pendekatan penerapan manajemen risiko;
2. Memastikan kecukupan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan risiko, termasuk jumlah dan kompetensi pegawai, organisasi, metode dan *tools* pengelolaan risiko;
3. Menetapkan otoritas, kewajiban, dan wewenang pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di setiap level organisasi;
4. Mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan dan penetapan sasaran-sasaran perusahaan;
5. Mempertimbangkan konteks eksternal dan internal perusahaan dalam mendesain kerangka kerja manajemen risiko;
6. Menguatkan tanggung jawab pengelolaan risiko oleh setiap pemilik risiko;
7. Membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif untuk mendukung dan memfasilitasi penerapan risiko di seluruh lini perusahaan.

1. Demonstrate leadership and commitment in implementing risk management, including through the establishment of policies and procedures governing approaches to risk management implementation;
2. Ensure the adequacy of resources needed in risk management, including the number and competence of employees, organization, methods and tools of risk management;
3. Establish the authority, obligations, and authorities of the parties involved in risk management at every level of the organization;
4. Consider risk in every decision making and setting Company goals;
5. Consider the external and internal context of the Company in designing the risk management framework;
6. Strengthen risk management responsibilities by each risk owner;
7. Establish effective communication and consultation to support and facilitate the implementation of risk across all lines of the Company.

Struktur Organisasi Risk Management
Risk Management Organizational Structure



Profil Pejabat Manajemen Risiko

Profile of Risk Management Vice President



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/Usia Places, Date of Birth/Age	Cirebon, 31 Mei 1985 / 40 tahun Cirebon, May 31, 1985 / 40 years old
Domisili Domicile	Tanjung Enim
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis of First Appointment	Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk Nomor 103/100/2023 PT Bukit Asam Tbk Board of Directors Decree Number 103/100/2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	S1 Teknik Industri - Universitas Diponegoro Bachelor Degree in Industrial Engineering of Diponegoro University
Sertifikasi Certification	1. Qualified Chief Risk Officer (QRCO) 2. Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMAP) 3. DX Certified Strategy Execution Professional (DX CSEP)
Riwayat Pekerjaan Working Experience	1. Risk Management Division Head (Mei 2023 – sekarang) 2. AVP Risiko Bisnis dan Stratejik (Juni 2021– Mei 2023) 3. Manajer Risiko Portofolio dan Investasi Pengembangan (Juni 2019-Juni 2021) 4. Analis Risiko Keuangan dan Komersial (Agustus 2014-Juni 2019) 1. Risk Management Division Head (May 2023 – present) 2. AVP Business and Strategic Risk (June 2021– May 2023) 3. Portfolio Risk Manager and Development Investment (June 2019-June 2021) 4. Financial and Commercial Risk Analyst (August 2014-June 2019)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak ada None
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Shareholders
Kepemilikan Saham Shares Ownership	Tidak ada None

Komposisi Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Sertifikasi Profesi

Di tahun 2024, jumlah pegawai di Satuan Kerja Risk Management sebanyak 13 orang. Daftar sertifikasi yang dimiliki Satuan Kerja Risk Management adalah sebagai berikut:

Composition of the Risk Management Work Unit and Professional Certification

In 2024, the number of employees in the Risk Management Work Unit is 13 people. The list of certifications held by the Risk Management Work Unit is as follows:

Tabel Sertifikasi Manajemen Risiko
Certification Table of Risk Management

No	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
1	Efi Fidinilah	Risk Management Division Head	Qualified Chief Risk Officer (QRCO)
			Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMAP)
			DX Certified Strategy Execution Professional (DX CSEP)
2	Boni Susanto	Corporate Risk Department Head	Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)
			Certified Corporate Risk Manager (CCRM)
			Certified Governance Professional (CGP)
3	Aditya Kusuma Putra	Business & Strategic Risk Department Head	Certified Risk Management Professional (CRMP)
			Certified GRC Professional (CGRCP)
			Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMAP)
4	Nurida Sandy Karisa	Senior Business & Strategic Risk Specialist	Certified Risk Management Professional (CRMP)
			Certified GRC Professional (CGRCP)
			Qualified Risk Management Officer (QRMO)
5	Ayu Agustian	Senior Corporate Risk Specialist	Certified Risk Management Professional (CRMP)
			Certified GRC Professional (CGRCP)
			Certified Internal Auditor Professional (CIAP)
6	Safrun Robiallah	Corporate Risk Specialist	Certified Risk Management Professional (CRMP)
			Certified Corporate Risk Analyst (CCRA)
7	Zukrufa Awalia Rahma	Corporate Risk Specialist	Certified Risk Management Professional (CRMP)
			Business Continuity Management Certified Professional – BCMCP
			Certified Corporate Risk Analyst (CCRA)
8	Prilly Febi Pratiwi	Business & Strategic Risk Specialist	Certified Risk Management Professional (CRMP)
			Certified GRC Professional (CGRCP)
			Qualified Risk Management Officer (QRMO)
9	Ahmad Farhan Aristo	Business & Strategic Risk Staff	Certified Risk Management Officer (CRMO)
10	Aisyahna Nurul Mauliddina	Business & Strategic Risk Staff	Certified Risk Management Officer (CRMO)
11	M Yuda Pratama	Corporate Risk Staff	Certified Risk Management Officer (CRMO)

Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagai pelaksana fungsi Manajemen Risiko, Satuan Kerja Risk Management memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
2. Memantau profil Risiko, peta Risiko, realisasi perhitungan risiko inheren dan risiko residual, dan realisasi pelaksanaan perlakukan risiko dan biaya;
3. Melakukan *internal control testing dan stress testing;*
4. Mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen risiko;
5. Mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko;
6. Memberikan rekomendasi kepada lini pertama dan/atau komite pemantau risiko sesuai kewenangan yang dimiliki; dan

Duties and Responsibilities

As the executor of the Risk Management function, the Risk Management Work Unit has the following duties and responsibilities:

1. Monitoring the implementation of the Risk Management strategy that has been approved by the Board of Directors;
2. Monitoring the Risk profile, Risk map, realization of inherent risk and residual risk calculations, and realization of risk and cost treatment implementation;
3. Conducting internal control testing and stress testing;
4. Periodically reviewing the Risk Management process;
5. Evaluating the accuracy of the model and validity of the data used to measure risk;
6. Providing recommendations to the first line and/or risk monitoring committee according to the authority they have; and

7. Menyusun dan menyampaikan Laporan Manajemen Risiko kepada Direktur yang membidangi pengelolaan risiko dan Komite Pemantau Risiko secara berkala triwulan.

7. Compiling and submitting the Risk Management Report to the Director in charge of risk management and the Risk Monitoring Committee on a quarterly basis.

Pelaksanaan Tugas

Sepanjang tahun 2024, Satuan Kerja Risk Management telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

Implementation of Duties

Throughout 2024, the Risk Management Work Unit has carried out its duties and responsibilities as follows:

Risk Management Division Head	Mengorganisir dan mengkoordinir seluruh kegiatan satker manajemen risiko di lingkungan korporat PTBA dan PTBA Group yang meliputi: Perumusan dan pengembangan kebijakan serta prosedur Manajemen Risiko (pedoman, tata laksana, tata cara kerja dan formulir); Pengelolaan sistem manajemen risiko; Memfasilitasi penyusunan dokumen risiko (matriks risiko, proses bisnis, identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko): Pemasyarakatan sistem identifikasi eksposur risiko; Memfasilitasi pemetaan risiko; Pengembangan manajemen risiko berbasis IT; Pemantauan dan pengendalian risiko proses bisnis inti dan penunjang: Pembuatan profil risiko korporat dan profil risiko portofolio korporat; Melakukan evaluasi dan analisa risiko terhadap portofolio eksisting dan rencana pengembangan termasuk melakukan analisa risiko keuangan; Pendampingan penyusunan dan pemantauan Risk Based Budgeting (RBB) risk owner: serta membuat laporan Risk Management sehingga risiko Korporasi PTBA Group dapat terkendali dan dapat diminimalkan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Organizing and coordinating all risk management work unit activities in the corporate environment of PTBA and PTBA Group which include: Formulation and development of Risk Management policies and procedures (guidelines, procedures, work procedures and forms); Management of risk management systems; Facilitating the preparation of risk documents (risk matrix, business processes, risk identification, risk analysis and risk evaluation): Socialization of risk exposure identification systems; Facilitating risk mapping; Development of IT-based risk management; Monitoring and controlling core and supporting business process risks: Creation of corporate risk profiles and corporate portfolio risk profiles; Conducting risk evaluations and analyses of existing portfolios and development plans including conducting financial risk analyses; Assistance in the preparation and monitoring of Risk Based Budgeting (RBB) risk owners: and creating Risk Management reports to control and minimize PTBA Group Corporate Risks and in accordance with applicable regulations.
Corporate Risk Department Head	1. Menyediakan dan mensosialisasikan pedoman, prosedur dan *tools* terkait pengelolaan risiko korporat. 2. Melakukan pemantauan risiko dan mitigasi risiko korporat (*business as is*). 3. Memfasilitasi pengelolaan risiko Satuan Kerja dan AAP. 1. Provide and socialize guidelines, procedures and tools related to corporate risk management. 2. Conduct risk monitoring and Corporate risk mitigation (business as is). 3. Facilitate risk management of Work Units and AAP.
Business & Strategic Risk Department Head	1. Menyediakan dan mensosialisasikan pedoman, prosedur, tools terkait pengelolaan risiko bisnis & stratejik. 2. Memfasilitasi pengelolaan risiko proyek, aksi korporasi dan rencana/keputusan strategis perusahaan, termasuk memfasilitasi penyusunan kajian risiko. 1. Provide and socialize guidelines, procedures, tools related to business & strategic risk management. 2. Facilitate project risk management, corporate actions and strategic company plans/decisions, including facilitating the preparation of risk studies
GCG & Compliance Department Head	1. Menjamin kesesuaian dan kepatuhan kegiatan operasional perusahaan dengan peraturan-peraturan dan regulasi yang berlaku; 2. Melakukan pengawasan serta monitoring penerapan prinsip dan kegiatan *corporate governance, ethics* serta kepatuhan yang berlaku secara umum di Perusahaan. 1. Ensure the conformity and compliance of the company's operational activities with applicable rules and regulations; 2. upervise and monitor the implementation of corporate governance principles and activities, ethics and compliance that apply generally in the Company.

Pengembangan Kompetensi

Perusahaan senantiasa meningkatkan mutu dan kompetensi Satuan Kerja Risk Management. Adapun pelatihan dan sertifikasi yang diikuti oleh Personel Satuan Kerja Risk Management di tahun 2024 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Competency Development

The Company continuously improves the quality and competency of the Risk Management Work Unit. The training and certification attended by the Risk Management Work Unit personnel in 2024 can be seen in the Company Profile chapter in this annual report.

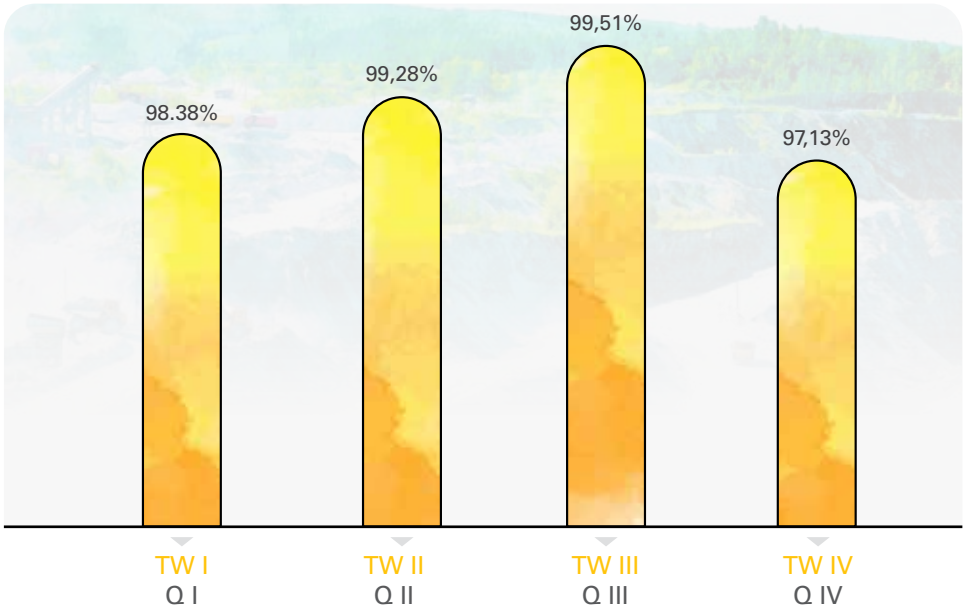
Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Satuan Kerja Risk Management tahun 2024 dilakukan dengan melakukan evaluasi *Key Performance Indicator/Balanced Scorecard* secara triwulan. Berdasarkan hasil audit kinerja satuan kerja di tahun 2024, pencapaian kinerja BSC Satuan Kerja Risk Management sebesar 98,38% pada Triwulan I; 99,28% pada Triwulan II; 99,51% pada Triwulan III dan pada Triwulan IV sebesar 97,13%.

Performance Assessment

The performance assessment of the Risk Management Work Unit in 2024 is carried out by evaluating the Key Performance Indicators/Balanced Scorecard on a quarterly basis. Based on the results of the work unit performance audit in 2024, the achievement of the Risk Management Work Unit's BSC performance was 98.38% in Quarter I; 99.28% in Quarter II; 99.51% in Quarter III and in Quarter IV of 97.13%.

Pencapaian Kinerja BSC Satuan Kerja Risk Management
BSC Performance Achievement of Risk Management Work Unit



Satuan Kerja Corporate Management System & Performance

Corporate Management System & Performance Work Unit

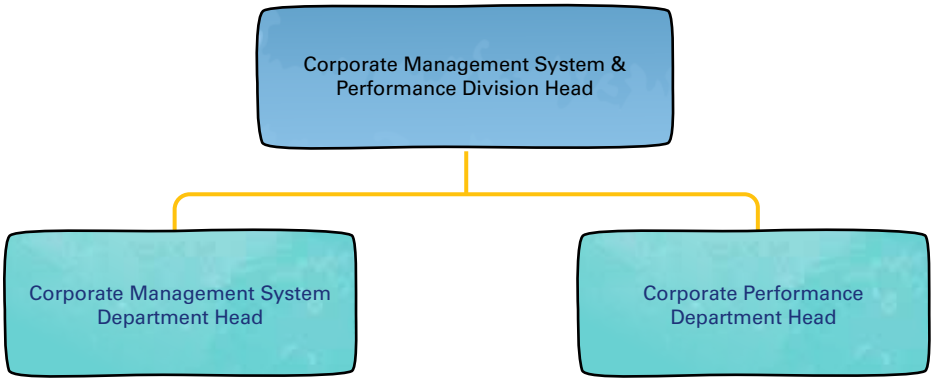


Dalam pengelolaan Perusahaan, Sistem Manajemen dan Kinerja Perusahaan menjadi pendukung penting yang berperan dalam mengelola dan mengendalikan sistem yang ada di Perusahaan termasuk melakukan *review* dan evaluasi terhadap sertifikasi dan sistem kinerja perusahaan.

In managing the Company, the Management System and Company Performance Work Unit is an important part part that plays a role in managing and controlling the existing systems in the Company, including conducting reviews and evaluations of certification and the company's performance system.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Corporate Management System & Performance

The Structure Organization of Management System and Corporate Performance



Profil Pejabat Sistem Manajemen dan Kinerja Perusahaan

Profile of Management System and Corporate Performance



Tri Ubaya Sakti

Corporate Management System & Performance Division Head

Masa Jabatan : 30 April 2024 - sekarang
Term of Office : April 30, 2024 – present

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Tanjung Enim
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis of Appointment	SK Direksi Bukit Asam : No.063/0100/2024 Tanggal 27 Mei 2024 Bukit Asam Board of Directors Decree : No.063/0100/2024 dated May 27, 2024
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. S2 Magister Terapan Teknik Politeknik Negeri Sriwijaya (2021) 2. S2 Master of Administration Business Hochschule Bremen, University of Applied Sciences Jerman (2015) 3. S1 Teknik Mesin Universitas Sriwijaya Palembang (1998) 1. Applied Master of Engineering Sriwijaya State Polytechnic (2021) 2. Master of Administration Business Hochschule Bremen, University of Applied Sciences Germany (2015) 3. Bachelor of Mechanical Engineering Sriwijaya University Palembang (1998)
Sertifikasi Certification	1. Qualified Certified Risk Officer (QCRO) 2. Lead Auditor ISO 9001:2018 3. Lead Auditor ISO 37001:2016 4. Auditor ISO 14001:2018 5. Auditor ISO 45001:2018 6. Auditor ISO 27001:2016 7. Auditor Sistem ISPS Code (Pelabuhan) | Port 8. Auditor ISO 22301:2019 9. Sertifikasi POP | POP Certification
Riwayat Pekerjaan Working Experience	1. Corporate Management System & Performance Division Head (2024-Sekarang) 2. VP Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG (2020-2024) 3. Manajer GCG dan Kinerja Perusahaan (2019-2020) 4. Manajer Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG (2017-2019) 5. Manajer Sistem Manajemen Perusahaan (2016-2017) 6. Spesialis Sistem Manajemen (2011-2016) 1. Corporate Management System & Performance Division Head (2024-Present) 2. VP of Management System and Corporate GCG (2020-2024) 3. Manager of GCG and Corporate Performance (2019-2020) 4. Manager of Management System and Corporate GCG (2017-2019) 5. Manager of Management System and Corporate GCG (2016-2017) 6. Management System Specialist (2011-2016)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak Ada None
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliated relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with controlling and major shareholders.
Kepemilikan Saham Shares Ownership	Tidak Ada None

Sistem Manajemen Bukit Asam (SMBA)

Dalam upaya mencapai tujuan Perusahaan, PTBA berkomitmen menciptakan Perusahaan yang efektif, efisien, dan diakui secara nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perusahaan membentuk Sistem Manajemen Bukit Asam (SMBA), yang mulai dijalankan di Perusahaan sejak tanggal 16 Juli 2010. Adapun pembentukan sistem manajemen ini memiliki manfaat dan tujuan, sebagai berikut:

1. Adanya acuan baku dalam mengelola mutu produk, lingkungan, K3, mutu laboratorium, pengamanan, keselamatan operasi pertambangan, energi, anti penyuapan, aset serta keamanan teknologi informasi di PTBA dalam memuaskan pelanggan;
2. Adanya pengakuan internasional terhadap produk dan proses yang dihasilkan PT Bukit Asam Tbk;
3. Menjamin pemenuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
4. Turut menjamin keberlangsungan/*sustainability* kegiatan operasi perusahaan;
5. Meningkatkan kepercayaan jajaran manajemen dan pegawai PTBA dalam memasok produk sesuai harapan pelanggan;
6. Menjamin terciptanya *added value dan continuous improvement*.

Hingga saat ini, Sistem Manajemen Bukit Asam (SMBA) dijalankan dengan mengacu dengan standar terbaru yang diakui nasional (*mandatory*) maupun internasional serta terintegrasi, di antaranya:

1. Sistem Manajemen Mutu (SM Mutu) (ISO 9001:2015), disertifikasi oleh PT TÜV SÜD Indonesia;
2. Sistem Manajemen Lingkungan (SM Lingkungan) (ISO 14001:2015), disertifikasi oleh PT TÜV SÜD Indonesia;
3. Sistem Manajemen K3 (SMK3) (ISO 45001:2018), disertifikasi oleh PT TÜV SÜD Indonesia;
4. Sistem Manajemen K3 (SMK3) (PP No. 50 Tahun 2012), disertifikasi oleh PT BKI;
5. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) (ISO 37001:2018), disertifikasi oleh PT TÜV NORD Indonesia tahun 2023;
6. Sistem Manajemen Mutu Laboratorium (SMM Lab) (ISO 17025:2017), diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional;
7. Sistem Manajemen Uji Profisiensi (ISO 17043:2010), diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional;
8. Sistem Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (ISPS Code), disertifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
9. Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) (Permen ESDM No. 26 Tahun 2018);
10. Sistem Manajemen Pengamanan (Perpol No. 7 Tahun 2019);

Bukit Asam Management System (SMBA)

In an effort to achieve the Company's goals, PTBA is committed to creating an effective, efficient, and nationally and internationally recognized Company. To realize this, the Company has formed the Bukit Asam Management System (SMBA), which has been implemented in the Company since July 16, 2010. The formation of this management system has the following benefits and objectives:

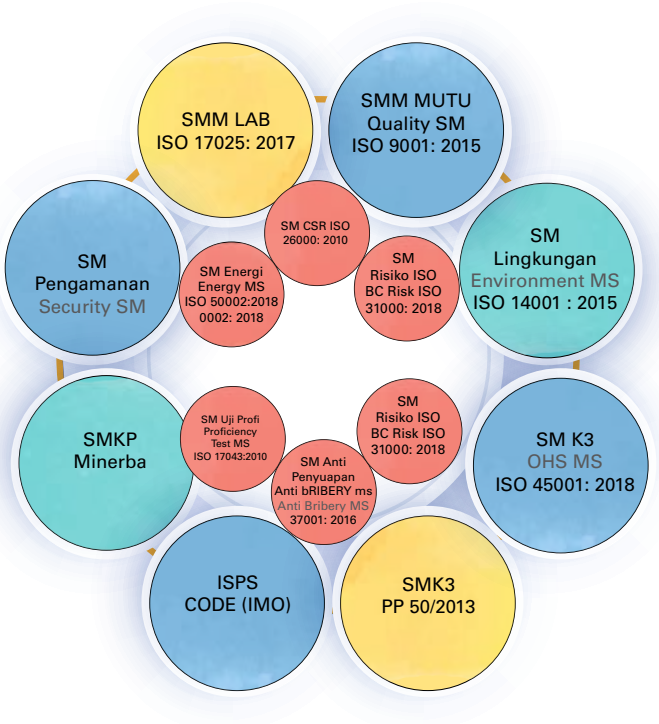
1. The existence of standard references in managing product quality, environment, K3, laboratory quality, security, mining operation safety, energy, anti-bribery, assets and information technology security at PTBA in satisfying customers;
2. The existence of international recognition of products and processes produced by PT Bukit Asam Tbk;
3. Ensure compliance with applicable laws and regulations;
4. Help ensure the sustainability of the company's operational activities;
5. Increase the trust of PTBA's management and employees in supplying products according to customer expectations;
6. Ensure the creation of added value and continuous improvement.

Currently, the Bukit Asam Management System (SMBA) is implemented by referring to the latest nationally (mandatory) and internationally recognized standards and is integrated, including:

1. Quality Management System (SM Mutu) (ISO 9001:2015), certified by PT TÜV SÜD Indonesia;
2. Environmental Management System (SM Lingkungan) (ISO 14001:2015), certified by PT TÜV SÜD Indonesia;
3. OHS Management System (SMK3) (ISO 45001:2018), certified by PT TÜV SÜD Indonesia;
4. OHS Management System (SMK3) (PP No. 50 of 2012), certified by PT BKI;
5. Anti-Bribery Management System (SMAP) (ISO 37001:2018), certified by PT TÜV NORD Indonesia in 2023;
6. Laboratory Quality Management System (Lab QMS) (ISO 17025:2017), accredited by the National Accreditation Committee;
7. Proficiency Test Management System (ISO 17043:2010), accredited by the National Accreditation Committee;
8. Ship and Port Facility Security Management System (ISPS Code), certified by the Director General of Sea Transportation;
9. Mining Safety Management System (SMKP) (ESDM Regulation No. 26 of 2018);
10. Security Management System (Police Regulation No. 7 of 2019);

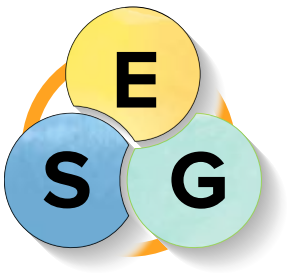
11. Sistem Manajemen Energi (ISO 50001:2018), sertifikasi oleh PT TÜV SÜD Indonesia;
12. Manajemen Risiko (ISO 31000:2018);
13. Manajemen CSR (ISO 26000:2010);
14. Sistem Manajemen Aset (ISO 55001:2018);
15. Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) (ISO 27001:2013) disertifikasi oleh PT TÜV SÜD Indonesia;
16. Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis (ISO 22301:2019), disertifikasi oleh PT British Standards Institution;
17. Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi (ISO 20000-I:2018), disertifikasi oleh PT TÜV SÜD Indonesia.

11. Energy Management System (ISO 50001:2018), certified by PT TÜV SÜD Indonesia;
12. Risk Management (ISO 31000:2018);
13. CSR Management (ISO 26000:2010);
14. Asset Management System (ISO 55001:2018);
15. Information Security Management System (ISMS) (ISO 27001:2013) certified by PT TÜV SÜD Indonesia;
16. Business Continuity Management System (ISO 22301:2019), certified by PT British Standards Institution;
17. Information Technology Service Management System (ISO 20000-I:2018), certified by PT TÜV SÜD Indonesia.



Pembangunan Sistem Manajemen (SM) Baru
- SM Layanan Teknologi Informasi ISO 20000-1:2018
- SM Manajemen Energi ISO 50001:2018

Establishment of New Management System (MS)
- MS of Information Technology Services ISO 20000-1:2018
- MS of Energy Management ISO 50001:2018



Pencapaian Sasaran Sistem Manajemen PTBA

Sejalan dengan Visi dan Misi Perusahaan, manajemen bertekad untuk mencapai kinerja setinggi-tingginya dalam pengelolaan mutu produk, lingkungan, K3, mutu laboratorium, pengamanan operasional dan pelabuhan, keselamatan operasi pertambangan, energi, anti penyuapan, aset, dan keamanan TI dan Layanan Teknologi Informasi, serta menjadikan hal-hal tersebut sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional perusahaan. PTBA menetapkan sasaran SMBA yang diturunkan menjadi *Key Performance Indicator* (KPI) satuan kerja, pengukuran atas KPI tersebut dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali melalui Audit Internal Sistem Manajemen Kinerja *Balanced Scorecard* (BSC).

Achievement of PTBA Management System Targets

In line with the Company's Vision and Mission, management is determined to achieve the highest performance in managing product quality, environment, K3, laboratory quality, operational and port security, mining operation safety, energy, anti-bribery, assets, and IT security and Information Technology Services, and to make these things the main priority in every operational activity of the company. PTBA sets SMBA targets which are translated into Key Performance Indicators (KPI) for work units, measurement of these KPIs is carried out periodically every 3 months through the Balanced Scorecard (BSC) Performance Management System Internal Audit.

Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen PTBA

Audit Sistem Manajemen PTBA dilaksanakan dengan mengacu pada Tata Laksana Audit. Berdasarkan pelaksanaannya, PTBA menetapkan pemantauan dan pengukuran kinerja mutu produk, lingkungan, K3, mutu laboratorium, pengamanan operasional dan pelabuhan, keselamatan operasi pertambangan, energi, anti penyuapan, aset, keamanan dan Layanan Teknologi Informasi secara berkala, melalui proses audit yang dilakukan internal maupun eksternal oleh lembaga sertifikasi. Pelaksanaan audit Sistem Manajemen PTBA dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan kesesuaiannya yang didasarkan pada persyaratan standar (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; PP RI No. 50/2012; SNI ISO/IEC 17025:2017; SNI ISO/IEC 17043:2010; Perpol No 07/2019; ISPS Code; PERMEN ESDM No.26/2018; ISO 50001:2018; ISO 37001:2016; ISO/IEC 27001:2018, ISO 22301:2019, dan ISO/IEC 20000-1:2018).

Untuk pelaksanaan Audit Internal dilaksanakan sebagai berikut:

1. Audit internal berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen K3 dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) secara terintegrasi.
2. Audit terhadap Sistem Manajemen lainnya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Sedangkan waktu pelaksanaan Audit eksternal dilaksanakan sebagai berikut:

1. Audit *surveillance* Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen K3 terintegrasi dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.

2. *Audit surveillance* terhadap Sistem Manajemen lainnya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Dalam hal terjadi penyimpangan yang menimbulkan keraguan pada kesesuaian kebijakan, prosedur dan standar laboratorium maka Manajemen dapat melakukan audit internal tambahan.

Penetapan jadwal audit mempertimbangkan status dan pentingnya proses/area yang diaudit, perubahan yang berpengaruh pada PTBA serta hasil audit sebelumnya.

Hasil audit ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang terkait sesuai dengan temuan audit, dan harus dilakukan verifikasi ulang untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan dan

Implementation of PTBA Management System Audit

PTBA Management System Audit is carried out with reference to the Audit Procedures. Based on its implementation, PTBA establishes monitoring and measurement of product quality performance, environment, K3, laboratory quality, operational and port security, mining operation safety, energy, anti-bribery, assets, security and Information Technology Services periodically, through an audit process carried out internally or externally by certification body. The implementation of the PTBA Management System audit is carried out in accordance with the established plan, with its conformity based on standard requirements (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; PP RI No. 50/2012; SNI ISO/IEC 17025:2017; SNI ISO/IEC 17043:2010; Perpol No 07/2019; ISPS Code; PERMEN ESDM No.26/2018; ISO 50001:2018; ISO 37001:2016; ISO/IEC 27001:2018, ISO 22301:2019, and ISO/IEC 20000-1:2018).

The implementation of Internal Audit is carried out as follows:

1. Internal audits related to the Quality Management System, Environmental Management System, and OHS Management System are carried out every 3 (three) months (quarterly) in an integrated manner.
2. Audits of other Management Systems are carried out once a year.

While then schedule for implementing External Audit is carried out as follows:

1. Surveillance audits of the Quality Management System, Environmental Management System, and integrated OHS Management System are carried out twice a year.
2. Surveillance audits of other Management Systems are carried out once a year.

In the event of deviations that raise doubts about the suitability of laboratory policies, procedures, and standards, Management can conduct additional internal audits.

The determination of the audit schedule takes into account the status and importance of the process/area being audited, changes that affect PTBA and the results of previous audits.

The audit results are followed up by the relevant work units in accordance with the audit findings, and must be re-verified to ensure that corrective and preventive actions

pencegahan telah sesuai dan berjalan dengan efektif. Audit internal dilakukan oleh auditor yang terlatih, mandiri, independen dan dilakukan lintas satuan kerja.

Komitmen Penerapan Sistem Manajemen PTBA

Perusahaan berkomitmen untuk selalu meningkatkan efektivitas Sistem Manajemen PTBA sehingga dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Perusahaan. Adapun langkah yang dilakukan oleh Perusahaan di antaranya:

1. Meningkatkan kompetensi dan jumlah auditor internal sesuai dengan ketentuan untuk menjamin keluaran dari kegiatan audit internal yang dilaksanakan lebih baik.
2. Perusahaan juga secara konsisten melaksanakan proses *benchmarking* terhadap *leading* dan *lagging* indikator penerapan sistem manajemen terhadap perusahaan sekelas yang menerapkan sistem sejenis.
3. Memenuhi sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan dan keamanan pegawai, menjadi kewajiban Perusahaan sekaligus untuk mencegah kerusakan dan kerugian.
4. Penerapan *good mining practice* serta pengelolaan energi yang efektif guna mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar melalui *community development*.
5. Melakukan perbaikan berkesinambungan dengan memperhatikan harapan dan keinginan dari pemangku kepentingan, perkembangan ilmu dan teknologi, serta pembangunan sistem manajemen pendukung ESG (*Environmental, Social, and Governance*) agar keberlanjutan usaha perusahaan dapat dipertahankan.

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Sistem Manajemen dan Kinerja Perusahaan

Sepanjang tahun 2024, Satuan Kerja Corporate Management System & Performance telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024, meliputi:

are appropriate and running effectively. Internal audits are carried out by trained, independent, and independent auditors and are carried out across work units.

Commitment to Implement PTBA Management System

The Company is committed to always improving the effectiveness of PTBA Management System to support the achievement of the Company's Vision and Mission. The steps taken by the Company include:

1. Increasing the competence and number of internal auditors in accordance with the provisions to ensure better output from internal audit activities.
2. The Company also consistently carries out the benchmarking process against leading and lagging indicators for the implementation of the management system for companies of the same class that implement similar systems.
3. Fulfilling supporting facilities and infrastructure to increase employee productivity, safety, and security, is the Company's obligation as well as to prevent damage and loss.
4. Implementing good mining practices and effective energy management to prevent environmental pollution and maintain harmonious relations with the surrounding community through community development.
5. Carrying out continuous improvement by considering the hopes and desires of stakeholders, developments in science and technology, and the development of ESG (Environmental, Social, and Governance) supporting management systems so that the sustainability of the company's business can be maintained.

Implementation of Duties of the Management System and Corporate Performance

Throughout 2024, Corporate Management System & Performance Work Unit has carried out its duties and responsibilities in accordance with the planning that has been prepared in the 2024 Work Plan and Budget, including:

No	Perihal About	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
Corporate Management System		
1	Audit Internal Sistem Manajemen Bukit Asam (SMBA) di antaranya: 1. Audit internal laboratorium SNI ISO/IEC 17043 ; 2. Audit internal ISO 55001 (Sistem Manajemen Aset) ; 3. Audit internal ISO 37001 (SM Anti Penyuapan) ; 4. Audit internal ISO 20000-1 (Sistem Manajemen Layanan berbasis TI) ; 5. Audit internal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018 ; 6. Audit internal ISO 50001 (SM Energi) ; 7. Audit internal ISPS code (di 1 dermaga dan 2 pelabuhan PTBA) ; 8. Audit internal ISO/IEC 27001 (Sistem Manajemen Keamanan TI) ; 9. Audit internal laboratorium SNI ISO/IEC 17025 (di 5 laboratorium PTBA) ; 10. Audit internal SM Pengamanan (SMP) ; 11. Audit internal ISO 22301 (Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis) ; 12. Audit internal SMK3 PP No. 50 Th 2012 ; Internal Audit of Bukit Asam Management System (SMBA) including: 1. Internal audit of SNI ISO/IEC 17043 laboratory; 2. Internal audit of ISO 55001 (Asset Management System); 3. Internal audit of ISO 37001 (Anti-Bribery SM); 4. Internal audit of ISO 20000-1 (IT-based Service Management System); 5. Internal audit of ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018; 6. Internal audit of ISO 50001 (Energy SM); 7. Internal audit of ISPS code (at 1 barging port and 2 ports of PTBA); 8. Internal audit of ISO/IEC 27001 (IT Security Management System); 9. Internal audit of SNI ISO/IEC 17025 laboratory (in 5 PTBA laboratories); 10. Internal audit of SM Security (SMP); 11. Internal audit of ISO 22301 (Business Continuity Management System); 12. Internal audit of SMK3 PP No. 50 Th 2012;	TW I-IV 2024 Q1-Q4 2024
2	Audit Eksternal Sistem Manajemen Bukit Asam (SMBA) di antaranya: 1. Surveillance audit ISO 50001:2018 ; 2. Surveillance audit ISO 22301:2019 ; 3. Surveillance ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ; ISO 45001:2018 ; 4. Surveillance ISO 27001:2013 ; 5. Surveillance ISO 37001:2016 ; 6. Surveillance audit SNI ISO/IEC 17025:2017 laboratorium penguji Derti ; 7. Surveillance audit SNI ISO/IEC 17025:2017 laboratorium kalibrasi UPTE ; 8. Surveillance audit SNI ISO/IEC 17025:2017 laboratorium mekanika tanah UPTE ; 9. Surveillance audit SNI ISO/IEC 17025:2017 laboratorium penguji UPTE ; 10. Surveillance audit SNI ISO/IEC 17043:2010 laboratorium penguji UPTE; 11. Surveillance audit resertifikasi SNI ISO/IEC 17025:2017 laboratorium penguji Derti External Audit of Bukit Asam Management System (SMBA) including: 1. Surveillance audit ISO 50001:2018; 2. Surveillance audit ISO 22301:2019; 3. Surveillance ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; 4. Surveillance ISO 27001:2013; 5. Surveillance ISO 37001:2016; 6. Surveillance audit SNI ISO/IEC 17025:2017 testing laboratory Derti; 7. Surveillance audit SNI ISO/IEC 17025:2017 calibration laboratory UPTE; 8. Surveillance audit SNI ISO/IEC 17025:2017 soil mechanics laboratory UPTE; 9. Surveillance audit SNI ISO/IEC 17025:2017 testing laboratory UPTE; 10. Surveillance audit SNI ISO/IEC 17043:2010 testing laboratory UPTE; 11. Surveillance audit recertification SNI ISO/IEC 17025:2017 testing laboratory Derti	TW I-IV 2024 Q1-Q4 2024

No	Perihal About	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
3	1. Melakukan audit sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan oleh auditor eksternal Mabes Polri 2. Melakukan audit sertifikasi Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi ISO/IEC 20000-1 oleh auditor eksternal Badan Sertifikasi 3. Pembangunan dan sertifikasi/verifikasi manajemen karbon 4. Pelatihan kesisteman bagi kendali dokumen 5. Rapat tinjauan manajemen sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 6. Konsinyering dan pelatihan auditor internal baru SMBA tahun 2024 7. Monitoring /Inspeksi tindaklanjut temuan audit SMBA 8. Penyusunan/revisi dokumen SMBA (Pedoman/TL/TCK) di seluruh Satuan Kerja (sesuai permintaan dan kebutuhan 1. Conduct certification audit of Security Management System by external auditor of National Police Headquarters 2. Conduct certification audit of Information Technology Service Management System ISO/IEC 20000-1 by external auditor of Certification Body 3. Development and certification/verification of carbon management 4. System training for document control 5. Management review meeting in accordance with established procedures 6. Consignment and training of new internal auditor of SMBA in 2024 7. Monitoring/Inspection of follow-up of SMBA audit findings 8. Preparation/revision of SMBA documents (Guidelines/TL/TCK) in all Work Units (according to request and needs)	TW I-IV 2024 Q1-Q4 2024
4	Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Internal: 1. Sertifikasi auditor internal ISPS code 2. Sertifikasi auditor ISO 20000-1 (SM. LTI) 3. Sertifikasi auditor ISO 37001 (SMAP) Internal Auditor Training and Certification: 1. ISPS code internal auditor certification 2. ISO 20000-1 auditor certification (SM. LTI) 3. ISO 37001 auditor certification (SMAP)	TW I-IV 2024 Q1-Q4 2024
Corporate Performance		
1	Penyusunan dan penetapan KPI Balanced Scorecard (BSC) Perusahaan, Satuan Kerja/Proyek dan Anak Afiliasi Perusahaan PT Bukit Asam Tbk Tahun 2024 melalui beberapa tahapan kegiatan diantaranya: 1. Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham (RJPP, RKAP, Kontrak Manajemen), dan Aspirasi BOD; 2. FGD dan Pembekalan Tim Penetapan KPI Balanced Scorecard (BSC) Perusahaan, Satuan Kerja/Proyek dan Anak Afiliasi Perusahaan; 3. Kick Off Meeting Tim Penetapan KPI Balanced Scorecard (BSC) Perusahaan, Satuan Kerja/Proyek dan Anak Afiliasi Perusahaan; 4. Workshop Penyusunan Dokumen KPI Balanced Scorecard (BSC) Perusahaan, Satuan Kerja/Proyek dan Anak Afiliasi Perusahaan; 5. Pembahasan KPI Balanced Scorecard (BSC) bersama Satuan Kerja/Proyek dan Anak Afiliasi Perusahaan; 6. Sirkuler Pengesahan KPI Balanced Scorecard (BSC) Perusahaan, Satuan Kerja/Proyek dan Anak Afiliasi Perusahaan oleh BOD. Preparation and determination of KPI Balanced Scorecard (BSC) of the Company, Work Units/Projects, and Affiliated Subsidiaries of PT Bukit Asam Tbk in 2024 through several stages of activities including: 1. Submission of Shareholder Aspirations (RJPP, CWPB, Management Contract), and BOD Aspirations; 2. FGD and Briefing of the KPI Determination Team Balanced Scorecard (BSC) of the Company, Work Units/Projects and Affiliated Subsidiaries; 3. Kick Off Meeting of the KPI Determination Team Balanced Scorecard (BSC) of the Company, Work Units/Projects and Affiliated Subsidiaries; 4. Workshop on Preparation of KPI Documents Balanced Scorecard (BSC) of the Company, Work Units/ Projects and Affiliated Subsidiaries; 5. Discussion of KPI Balanced Scorecard (BSC) with Work Units/Projects and Affiliated Subsidiaries; 6. Circular Approval of Balanced Scorecard (BSC) KPI of the Company, Work Unit/Project, and Company Affiliates by BOD.	TW I 2024 Q1 2024
2	Pembekalan untuk Auditor Internal dan BSC Officer Sistem Manajemen Kinerja Balanced Scorecard (BSC), melalui kegiatan Konsinyering Auditor Tahun 2024 dan Workshop kepada BSC Officer dalam rangka peningkatan pemahaman mekanisme Audit. Provision for Internal Auditors and BSC Officers of the Balanced Scorecard (BSC) Performance Management System, through the 2024 Auditor Consignment activities and Workshops for BSC Officers in order to improve understanding of the Audit mechanism.	TW II 2024 Q 2 2024
3	Audit Internal Sistem Manajemen Kinerja Balanced Scorecard (BSC) Perusahaan, Satuan Kerja/Proyek PT Bukit Asam Tbk Triwulan I dan II Tahun 2024 (37 Satuan Kerja). Internal Audit of the Company's Balanced Scorecard (BSC) Performance Management System, Work Units/Projects of PT Bukit Asam Tbk, Quarter 1 and 2 of 2024 (37 Work Units).	TW I-II 2024 Q1-Q2 2024

No	Perihal About	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
4	Audit Internal Sistem Manajemen Kinerja Balanced Scorecard (BSC) Anak Afiliasi Perusahaan PT Bukit Asam Tbk Tahun 2024 (Sesuai Permintaan Direktur AAP). Internal Audit of Balanced Scorecard (BSC) Performance Management System of Affiliated Subsidiaries of PT Bukit Asam Tbk in 2024 (As Requested by AAP Director).	TW I-IV 2024 Q1-Q4 2024
5	Penyusunan dan penetapan KPI Balanced Scorecard (BSC) Perusahaan, Satuan Kerja/Proyek dan Anak Afiliasi Perusahaan PT Bukit Asam Tbk Tengah Tahun 2024 sesuai perubahan organisasi melalui beberapa tahapan kegiatan di antaranya: 1. Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham (RJPP, RKAP, Kontrak Manajemen), dan Aspirasi BOD sesuai perubahan organisasi Tengah Tahun 2024; 2. *Kick Off Meeting* Tim Penetapan KPI Balanced Scorecard (BSC) Perusahaan, Satuan Kerja/Proyek Tengah Tahun 2024; 3. Pembahasan KPI Balanced Scorecard (BSC) bersama Satuan Kerja/Proyek Tengah Tahun 2024; 4. Sirkuler Pengesahan KPI Balanced Scorecard (BSC) Tengah Tahun 2024 Perusahaan, Satuan Kerja oleh BOD. Preparation and determination of KPI Balanced Scorecard (BSC) of the Company, Work Unit/Project and Affiliated Subsidiaries of PT Bukit Asam Tbk Mid-Year 2024 according to organizational changes through several stages of activities including: 1. Submission of Shareholder Aspirations (RJPP, CWPB, Management Contract), and BOD Aspirations according to organizational changes Mid-Year 2024; 2. Kick Off Meeting of the KPI Balanced Scorecard (BSC) Determination Team for the Company, Work Unit/Project Mid-Year 2024; 3. Discussion of KPI Balanced Scorecard (BSC) with Work Unit/Project Mid-Year 2024; 4. Circular Approval of KPI Balanced Scorecard (BSC) Mid-Year 2024 of the Company, Work Unit by BOD.	TW II-III 2024 Q2-Q3 2024
6	Audit Internal Sistem Manajemen Kinerja Balanced Scorecard (BSC) Perusahaan, Satuan Kerja/Proyek PT Bukit Asam Tbk Triwulan III dan IV Tahun 2024 (38 Satuan Kerja). Internal Audit of the Company's Balanced Scorecard (BSC) Performance Management System, Work Units/Projects of PT Bukit Asam Tbk, Quarter 3 and 4 of 2024 (38 Work Units).	TW III-IV 2024 Q3-Q4 2024
7	Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan melakukan penyusunan Laporan keterbukaan Informasi perubahan iklim dan penyampaian Feedback Score CDP 2023. Implementation of Good Corporate Governance by preparing a Climate Change Information Disclosure Report and submitting the 2023 CDP Feedback Score.	TW I- II 2024 Q1-Q2 2024
8	Workshop dan tindak lanjut hasil assessment GCG eksternal atas penilaian tahun 2022 sebagai penetapan rencana kerja berdasarkan rekomendasi assessment di tahun 2023 kepada satuan kerja terkait serta Melakukan evaluasi mandiri terkait implementasi GCG Tahun 2023 yang dilaporkan pada TW I 2024. Workshop and follow-up on the results of the external GCG assessment for the 2022 assessment as a determination of the work plan based on the assessment recommendations in 2023 to the relevant work units and conducting an independent evaluation related to the implementation of GCG in 2023 which was reported in Q1 2024.	TW I 2024 Q1 2024
9	Melakukan Pembuatan aplikasi E-BSC yang memiliki lingkup mulai dari Penyusunan KPI BSC Perusahaan, Satker/Unit hingga proses monitoring dan evaluasi melalui mekanisme Audit BSC yang didigitalisasi melalui Aplikasi CISEA dengan tahapan yang penyusunan Form analisis kebutuhan Pengembangan digitalisasi proses bisnis dan dilanjut dengan pembuatan Bussiness Requirement System. Created the E-BSC application with a scope ranging from the preparation of the Company's BSC KPI, Work Unit to the monitoring and evaluation process through the BSC Audit mechanism, digitized through the CISEA Application with stages that include the preparation of the Business Process Digitalization Development Needs Analysis Form and continued with the creation of the Business Requirement System.	TW I-IV 2024 Q1-Q4 2024
10	Pendampingan tim masa peralihan penilaian/evaluasi implementasi GCG oleh pihak eksternal (Corporate Governance Perception Index) sesuai perubahan Struktur Organisasi Tengah Tahun 2024 (Fungsi GCG pindah ke MR pada TW III 2024). Assistance to the transition team for the assessment/evaluation of GCG implementation by external parties (Corporate Governance Perception Index) in accordance with changes to the Mid-Year Organizational Structure in 2024 (GCG function will move to MR in Q3 2024).	TW I-II 2024 Q1-Q2 2024
11	Pemutakhiran dashboard dan konten ESG (Aspek CDP) pada website serta Mendukung kegiatan sustainability MIND ID khususnya dalam konteks GCG, dengan mempersiapkan program/system mengacu kepada 10 prinsip International Council On Mining And Metals (ICMM) guna meningkatkan citra dan kepercayaan stakeholders. Updating the ESG dashboard and content (CDP Aspect) on the website and supporting MIND ID sustainability activities, especially in the context of GCG, by preparing programs/systems referring to the 10 principles of the International Council On Mining And Metals (ICMM) to improve the image and trust of stakeholders.	TW I-II 2024 Q1-Q2 2024

Key Performance Indicator Corporate Management System & Performance 2024

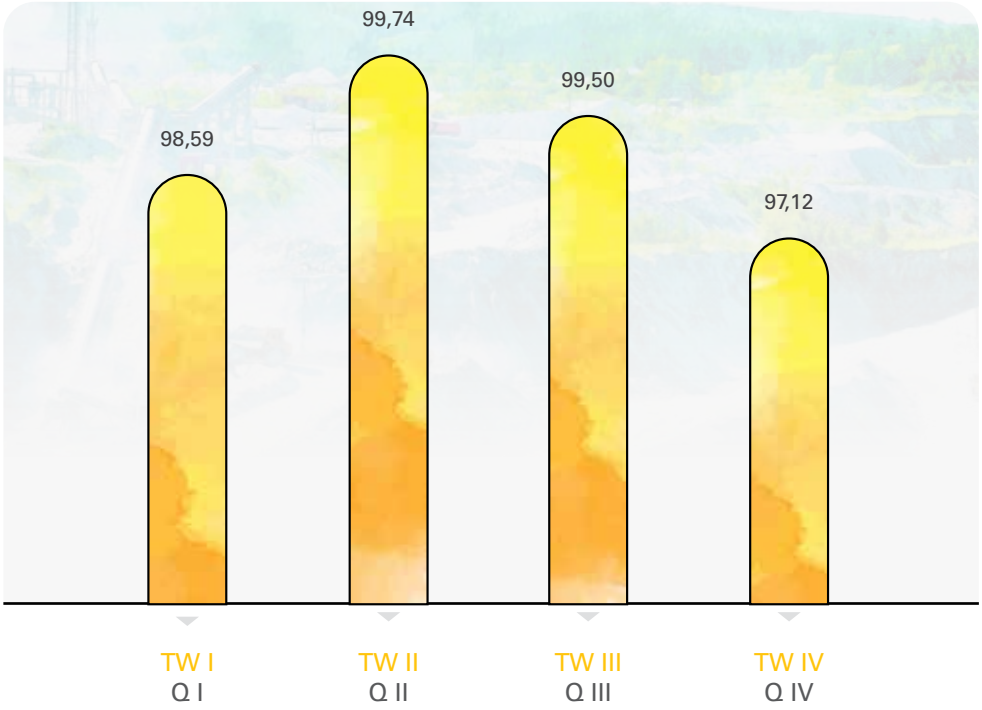
Penilaian kinerja Satuan Kerja Corporate Management System & Performance Tahun 2024 dilakukan dengan melakukan evaluasi *Key Performance Indicator* (KPI) *Balanced Scorecard* secara triwulan. Berdasarkan hasil perhitungan, di tahun 2024 Satuan Kerja Corporate Management System & Performance mendapatkan skor 98,59% pada Triwulan I, skor 99,74% pada Triwulan II, skor 99,50% pada Triwulan III, dan Triwulan IV mendapatkan skor 97,12%.

Key Performance Indicator Corporate Management System & Performance 2024

The performance assessment of the Corporate Management System & Performance Work Unit in 2024 was carried out by evaluating the Key Performance Indicators/Balance Score Card on a quarterly basis. Based on the calculation results, in 2024 the Management System and Corporate Performance Work Unit received a score of 98.59% in Quarter I, a score of 99.74% in Quarter II, a score of 99.50% in Quarter III, and Quarter IV received a score of 97.12%.

Key Performance Indicator (KPI) Satuan Kerja Corporate Management System & Performance Tahun 2024

Key Performance Indicator (KPI) of Corporate Management System & Performance Work Unit in 2024



Akuntan Publik
Public Accountant



Dalam menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan, Perusahaan menggunakan jasa dari Akuntan Publik. Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

Audit atas Laporan keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.

1. Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.

In expressing an opinion on the fairness, in all material respects, of the financial position, results of operations, changes in equity, and cash flows as contained in the Financial Statements, the Company uses the services of a Public Accountant. The Financial Statements are in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia.

External Audit Procedures and Audit Standards

The audit of the Company's financial statements is conducted in accordance with the Professional Standards of Public Accountants which include all audit procedures deemed necessary in accordance with the circumstances.

1. The audit includes testing and evaluating the internal control system, as well as examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the Financial Statements. The audit will also include an assessment of the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as an assessment of the overall presentation of the Financial Statements in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by the IAI.

2. Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam Laporan keuangan.
3. Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen.
4. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perusahaan untuk di *review* oleh badan atau otoritas terkait.
5. Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

Kebijakan Penunjukan Akuntan Publik

Penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik dilakukan melalui mekanisme RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris yang telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, auditor eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan setiap level pejabat Perusahaan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KAP yang ditunjuk oleh Perusahaan harus memenuhi syarat atau kriteria, sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik wajib terdaftar di OJK;
2. Mempunyai afiliasi dengan KAP Internasional yang memberikan *quality control procedures;*
3. Memiliki pengalaman melakukan general audit pada perusahaan yang terdaftar di OJK dan perusahaan sejenis (bergerak di bidang pertambangan);
4. Memiliki dan menugaskan tim auditor dengan kualifikasi Certified Public Accountant (CPA), ahli di bidang internal kontrol berbasis Committee of Sponsoring Organization (COSO) atau Certified Internal Audit (CIA);
5. Menugaskan Personel minimal sesuai dengan jumlah menurut Struktur Tim Audit, dengan jumlah hari penugasan masing-masing Personel minimal sama dengan Rencana Waktu Audit yang didukung dengan Daftar Hadir pada setiap penugasan;
6. Mampu menyelesaikan laporan audit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

2. As part of the audit process, the Public Accounting Firm (KAP) also conducts inquiries to management regarding management statements presented in the Financial Statements.
3. The audit contains an inherent risk that there are material errors and irregularities. If there are any, the KAP will report to management.
4. Management approves the KAP's audit working papers for the Company to be reviewed by the relevant agency or authority.
5. The audit is conducted based on the Professional Standards of Public Accountants issued by the Indonesian Institute of Public Accountants (IAPI). If there is financial assistance from the Indonesian Government, the audit will be carried out based on the State Financial Audit Standards (SPKN) issued by the Indonesian Financial Supervisory Agency (BPK).

Public Accountant Appointment Policy

The appointment of a public accounting firm and public accountant is carried out through the GMS mechanism by considering the proposal of the Board of Commissioners who have considered the recommendations of the Audit Committee in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Offices in Financial Services Activities. To ensure the independence and quality of the audit results, the appointed external auditor must not have a conflict of interest with any level of Company officials and must pay attention to the provisions of applicable laws and regulations. The KAP appointed by the Company must meet the following requirements or criteria:

1. Public Accounting Firms and Public Accountants must be registered with the OJK;
2. Have an affiliation with an International KAP that provides quality control procedures;
3. Have experience in conducting general audits of companies registered with the OJK and similar companies (engaged in mining);
4. Have and assign a team of auditors with Certified Public Accountant (CPA) qualifications, experts in the field of internal control based on the Committee of Sponsoring Organization (COSO) or Certified Internal Audit (CIA);
5. Assigning personnel at least according to the number according to the Audit Team Structure, with the number of days assigned to each personnel at least the same as the Audit Time Plan supported by the Attendance List for each assignment;
6. Able to complete the audit report according to the determined schedule.

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Mei 2024, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 didelegasikan penunjukannya kepada Dewan Komisaris, Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik berdasarkan Surat Dewan Komisaris PTBA Nomor: 90A/DEKOM/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024, untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2024 dan Periode lainnya dalam Tahun Buku 2024, serta audit umum atas laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024.

Based on the results of the Annual GMS decision on May 8, 2024, the appointment of the Public Accounting Firm and Public Accountant for the 2024 financial year was delegated to the Board of Commissioners, the Company appointed the Public Accounting Firm and Public Accountant based on the Letter of the Board of Commissioners of PTBA Number: 90A/DEKOM/XII/2024 dated December 15, 2024, to carry out a General Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Financial Year and other Periods in the 2024 Financial Year, as well as a general audit of the financial statements of the Micro and Small Business Funding Program for the 2024 Financial Year.

Adapun Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The Public Accounting Firms that audited the Company's Financial Statements for the last 5 years are as follows:

Tahun Year	**Kantor Akuntan Publik** Public Accounting Firm	**Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)** Accountant Name (Partner in Charge)	**Periode** Period	**Fee (Rp)**	**Izin KAP** PAF License
2024	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM)	Dewi Novita Sari, S.E.,CPA.	Pertama First	4.932.000.000	AP.1154
2023	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners	Yusron, S.E., Ak., CPA	Kelima Fifth	3.194.583.165	AP.0243
2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners	Yusron, S.E., Ak., CPA	Keempat Fourth	3.122.482.500	AP.0243
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners	Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA	Ketiga Third	3.465.711.562	AP.0241
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners	Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA	Kedua Second	2.960.306.250	AP.0241

Jasa Lain yang Diberikan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik

Di tahun 2024, terdapat jasa lain yang diberikan oleh RSM yakni penilaian parameter GCG berdasarkan kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), penyusunan gap analisis ACGS dan pendampingan penyesuaian kriteria ACGS bagi PTBA. Adapun nilai total pekerjaan sebesar Rp825.258.000.

Other Services Provided by Public Accounting Firms and Public Accountants

In 2024, there were no other services provided by Public Accounting Firms that audited the Company's Financial Statements, preparation of ACGS gap analysis and assistance in adjusting ACGS criteria for PTBA. The total value of the work is Rp825,258,000.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal diselenggarakan oleh Manajemen sebagai upaya dalam mengamankan investasi dan aset Perusahaan, melalui peningkatan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu, serta memenuhi efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Perusahaan.

Internal Control System

The Internal Control System is organized by Management as an effort to secure the Company's investments and assets, by increasing the Company's compliance with applicable laws and regulations, ensuring the availability of correct, complete, and timely financial reports and management reports, and meeting the efficiency and effectiveness of business activities in accordance with the Company's vision, mission, and objectives.

Perusahaan telah menetapkan Pedoman Penerapan Sistem Pengendalian Internal berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Bukit Asam, Tbk Nomor BAICM:00 tanggal 21 November 2022 tentang Pedoman Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIn). Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan oleh Perusahaan mengacu pada kerangka yang diakui secara Internasional (COSO-*Internal Control Framework*). Berdasarkan COSO-*Internal Control Framework* terdapat 5 (lima) komponen Pengendalian Internal, yaitu (1) Lingkungan pengendalian, (2) pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, (3) aktivitas pengendalian, (4) sistem informasi dan komunikasi, dan (5) *monitoring*.

The Company has established Guidelines for the Implementation of the Internal Control System based on the Decree of the President Director of PT Bukit Asam, Tbk Number BAICM:00 dated November 21, 2022, concerning Guidelines for the Implementation of the Internal Control System (SPIn). The Internal Control System organized by the Company refers to an internationally recognized framework (COSO-Internal Control Framework). Based on the COSO-Internal Control Framework, there are 5 (five) components of Internal Control, namely (1) Control environment, (2) assessment and management of business risks, (3) control activities, (4) information and communication systems, and (5) monitoring.

Sampai dengan akhir Desember tahun 2024, telah dilaksanakan Internal control sebanyak 40 satuan kerja. Pengendalian Internal telah dilakukan kepada Satuan Kerja di Perusahaan, dengan informasi sebagai berikut:

As of the end of December 2024, Internal control has been implemented in 40 work units. Internal Control has been carried out on Work Units in the Company, with the following information:

Triwulan I Quarter I	**Triwulan II** Quarter II	**Triwulan III** Quarter III	**Triwulan IV** Quarter IV
Unit Pertambangan Tanjung Enim (93,13) Tanjung Enim Mining Unit (93.13)	K3L Korporat (90,20) Corporate K3L (90.20)	Anggaran dan Akuntansi (91,70) Budgeting and Accounting (91.70)	Unit Dermaga Kertapati (95,86) Kertapati Barging Port Unit (95.86)
Penambangan (92,83) Mining (92.83)	Keuangan Korporat (90,69) Corporate Finance (90.69)	Hukum dan Regulasi (92,06) Law and Regulations (92.06)	Unit Pertambagan Ombilin (91,45) Ombilin Mining Unit (91.45)
Penanganan dan Angkutan batu bara (91,83) Coal Handling and Transportation (91.83)	Komersial (90,61) Commercial (90.61)	Layanan Operasi (91,31) Operational Services (91.31)	Pengembangan Hilirisasi (90,57) Downstreaming Development (90.57)
Pengelolaan Lingkungan dan Penunjang Tambang (94,72) Environmental Management and Mining Support (94.72)	Pemasaran (90,89) Marketing (90.89)	Manajemen Risiko (95,48) Risk Management (95.48)	Pengadaan (90,52) Procurement (90.52)
Perencanaan (95,86) Planning (95.86)	Distribusi (90,32) Distribution (90.32)	Pengembangan Aset, Infrastruktur dan Sarana Penunjang (91,31) Development of Assets, Infrastructure and Supporting Facilities (91.31)	Proyek Pembangunan Sarana Penunjang (90,14) Supporting Facilities Development Project (90.14)
Perencanaan Tambang (95,86) Mining Planning (95.86)	Manajemen Portofolio (93,23) Portfolio Mangement (93.23)	Project Management Office (90,56)	Pengembangan Energi (91,69) Energy Development (91.69)
Eksplorasi (95,86) Exploration (95.86)	Optimasi Operasi Produksi (92,11) Production Operational Optimization (92.11)	Sekretaris Perusahaan (92,44) Corporate Secretary (92.44)	Proyek Pengembangan Infrastruktur (90,72) Infrastructure Development Project (90.72)
Perawatan (92,58) Maintenance (92.58)	SDM Operasional (91,48) HR Operational (91.48)	Sistem Manajemen dan Kinerja Perusahaan (92,08) Management System and Corporate Performance	Unit Pelabuhan Tarahan (97,36) Tarahan Port Unit (97.36)
Perawatan CHF dan ATU (92,58) CHF and ATU Maintenance (92.58)	SDM Stratejik (92,82) Strategic HR (92.82)	Satuan Pengawasan Intern (92,50) Internal Audit Unit (92.50)	Pengembangan Logistik dan Infrastruktur (93,95) Logistic and Infrastructure Development (93.95)
Perawatan AP dan PT (92,58) AP and PT Maintenance (92.58)	Teknologi Informasi (91,28) Information Technology (91.28)	Sustainability (92,09)	Perencanaan Strategis dan Pengembangan Tambang (92,09) Strategic Planning and Mine Development (92.09)

Penjelasan Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern dengan Kerangka yang Diakui secara Internasional (COSO – Internal Control Framework)

Perusahaan telah menerapkan penerapan dan pengembangan Sistem Pengendalian Internal sesuai dengan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (*Best Practice*) yang meliputi 5 komponen, di antaranya adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dasar atau pondasi dari semua komponen pengendalian internal. Demi terwujudnya Sistem Pengendalian Internal yang efektif, Perusahaan bertolak dari Lingkungan Pengendalian yang positif yang dibentuk melalui:

1. Komitmen terhadap integritas dan nilai etika di Perusahaan;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Komitmen Dewan Komisaris;
4. Komitmen filosofi dan pola manajerial;
5. Struktur organisasi yang efektif;
6. Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang efektif dan bertanggung jawab; dan
7. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat dan efektif.

Sesuai dengan pemberlakukan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, untuk fungsi Internal Kontrol pada Tingkat Satuan Kerja dikoordinir dan dilakukan oleh Line ke 2 (dua) yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko, sementara untuk tingkat entitas/korporasi akan direviu dan evaluasi oleh SPI yang dilaksanakan secara tahunan.

Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan Perusahaan dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko yang menghambat pencapaian tujuan Perusahaan. Tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan didasarkan pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Perusahaan diwujudkan melalui:

Explanation of the Conformity of the Internal Control System with the Internationally Recognized Framework (COSO – Internal Control Framework)

The Company has implemented the application and development of the Internal Control System in accordance with the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Best Practice) which includes 5 components, including the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring.

Control Environment

The control environment is the basis or foundation of all internal control components. In order to realize an effective Internal Control System, the Company starts from a positive Control Environment which is formed through:

1. Commitment to integrity and ethical values in the Company;
2. Commitment to competence;
3. Commitment of the Board of Commissioners;
4. Commitment to philosophy and managerial patterns;
5. Effective organizational structure;
6. Effective and responsible Human Resource Management; and
7. Appropriate and effective delegation of authority and responsibility.

In accordance with the enactment of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER-2/MBU/03/2023 Concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, the Internal Control function at the Work Unit Level is coordinated and carried out by Line 2 (two), namely the Risk Management Work Unit, while for the entity/corporate level will be reviewed and evaluated by the SPI annually.

Control Activities

Control activities are the Company's actions in an effort to prevent and reduce risks that hinder the achievement of the Company's goals. Actions taken by the Company are based on established policies and procedures. The control activities carried out by the Company are realized through:

1. Menyusun Kebijakan, Pedoman dan Prosedur sesuai Ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan kegiatan operasi berdasarkan Kebijakan, SOP, Prosedur & Peraturan yang berlaku.
3. Mengembangkan teknologi digitalisasi dan melakukan pengendalian risiko secara berkala

Pemantauan Pengendalian Internal

Perusahaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian internal di Perusahaan secara berkala melalui:

1. Melakukan Sosialisasi terkait pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Internal dan Sosialisasi cara pengisian Form CSA (Control Self Assesment) dan bukti yang dibutuhkan oleh satuan kerja yang akan dilakukan evaluasi efektivitas dan kecukupan Sistem Pengendalian Internal.
2. Evaluasi efektivitas dan kecukupan Sistem Pengendalian Internal kepada 40 satuan kerja selama tahun 2024 yang di bagi 4 kali /triwulan (10 satuan kerja per triwulan)
3. Memberikan *feedback* kepada satuan kerja yang telah di lakukan evaluasi efektivitas dan kecukupannya untuk dapat ditindaklanjuti.

Tindakan sebagaimana disampaikan, dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal di Perusahaan telah berjalan dengan baik. Hasil monitoring dipergunakan oleh Perusahaan untuk memperbaiki kelemahan yang terdeteksi dan memperkuat sistem yang telah dibentuk.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern pada Tahun Buku

Dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal, Perusahaan melakukan penerapan berbasis internasional yang meliputi aspek Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (*Best Practice*) dari penilaian yang dilakukan rata-rata tingkat efektivitas pengendalian internal mendapatkan predikat sangat baik dengan rerata 92,43.

1. Preparing Policies, Guidelines and Procedures in accordance with applicable Provisions.
2. Carrying out operational activities based on applicable Policies, SOPs, Procedures & Regulations.
3. Developing digitalization technology and carrying out periodic risk control.

Internal Control Monitoring

The Company periodically monitors and evaluates internal control in the Company through:

1. Conducting socialization regarding the importance of implementing the Internal Control System and socializing to fill out the CSA (Control Self Assessment) Form and the evidence needed by the work unit that will be evaluated for the effectiveness and adequacy of the Internal Control System.
2. Evaluating the effectiveness and adequacy of the Internal Control System to 40 work units during 2024 which is divided into 4 times / quarter (10 work units per quarter)
3. Providing feedback to work units that have been evaluated for effectiveness and adequacy so that they can be followed up.

The actions as stated are taken to ensure the internal control system in the Company is running well. The monitoring results are used by the Company to improve detected weaknesses and strengthen the previously formed system.

Review of the Effectiveness of the Internal Control System in the Fiscal Year

In implementing the Internal Control System, the Company carries out an international-based application that includes aspects of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Best Practice) from the assessment carried out, the average level of effectiveness of internal control received very good predicate with an average of 92.43.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi selalu mengembangkan sistem pengendalian Internal di Perusahaan guna penerapannya dapat berfungsi secara efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal di Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam *Corporate Governance Policy* berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi.

Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal di Perusahaan telah cukup dan berfungsi efektif serta memadai dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi oleh Perusahaan. Hal tersebut tercermin melalui operasional Perusahaan yang berjalan secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian Risiko

Penilaian Risiko dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Proses penilaian risiko oleh Perusahaan dimulai dengan mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Perusahaan, untuk selanjutnya Perusahaan melakukan evaluasi untuk menentukan tindakan guna meminimalisir risiko yang dihadapi.

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi diperoleh dan dihasilkan oleh Perusahaan guna mendukung fungsi dari komponen pengendalian internal lainnya. Perusahaan mengelola setiap informasi dan komunikasi, melalui pembaharuan sistem informasi dan penyediaan sarana komunikasi yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tujuan untuk meminimalisir dan mencegah timbulnya permasalahan yang diakibatkan dari informasi yang tidak relevan dan berkualitas.

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the Internal Control System

The Board of Directors always develops the Internal control system in the Company to ensure the implementation can function effectively to secure the Company's investments and assets.

The Internal Control System in the Company is implemented in accordance with that stipulated in the Corporate Governance Policy based on the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The Board of Directors and the Board of Commissioners state that the Internal Control System in the Company is sufficient and functions effectively and adequately in managing the risks faced by the Company. This is reflected in the Company's operations which run effectively and efficiently, the reliability of financial reporting, the security of the Company's assets and compliance with laws and regulations.

Risk Assessment

Risk Assessment is carried out to identify and assess risks that may affect the achievement of objectives. The Company's risk assessment process begins with identifying risks with the possibility to affect the achievement of the Company's objectives, and then the Company conducts an evaluation to determine actions to minimize the risks faced.

Information and Communication

Information and Communication are obtained and produced by the Company to support the function of other internal control components. The Company manages all information and communication, through updating the information system and providing effective and accountable communication facilities, with the aim of minimizing and preventing problems resulting from irrelevant and unqualified information.

Manajemen Risiko
Risk Management



Dasar Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan strategi dan proses bisnis yang tepat untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang berhubungan dengan aktivitas Perusahaan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko maupun dampak yang ditimbulkan dari risiko, yang berpengaruh terhadap sasaran Perusahaan, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan mengacu pada Pedoman Manajemen Risiko dan prosedur turunannya yang disusun berdasarkan pada beberapa referensi yang relevan, di antaranya yaitu Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan dan Petunjuk Teknisnya.

Arsitektur Manajemen Risiko

Berdasarkan ISO 31000:2018, arsitektur manajemen risiko digambarkan sebagai berikut:

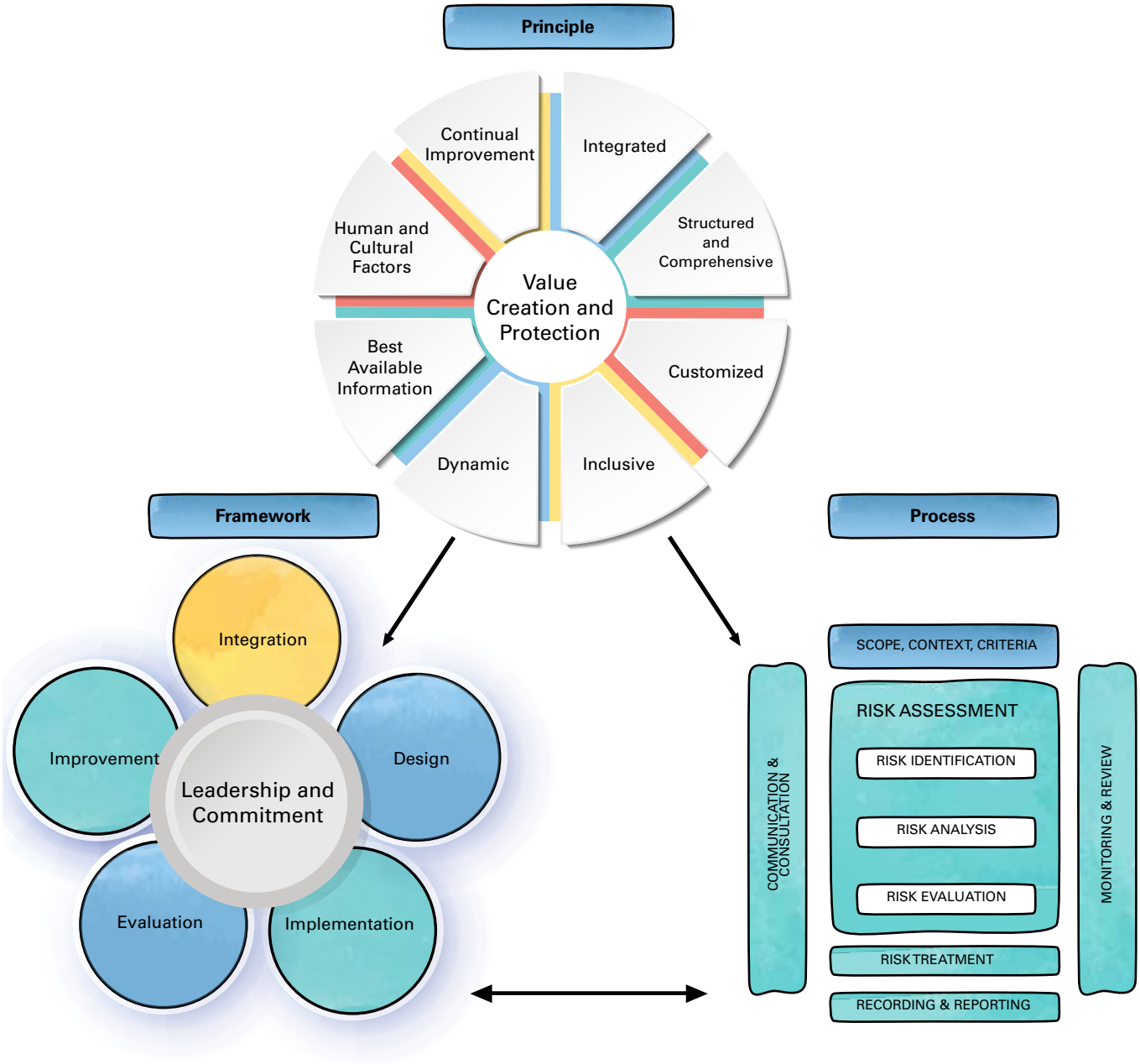
Basis for Implementing the Risk Management System

The Company is committed to implementing appropriate strategies and business processes to identify and manage risks related to the Company's activities. This aims to minimize the possibility of risks and the impacts caused by risks, which affect the Company's targets, to provide optimal benefits to shareholders and stakeholders.

The implementation of risk management in the Company refers to the Risk Management Guidelines and its derivative procedures which are prepared based on several relevant references, including the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities and its Technical Instructions.

Risk Management Architecture

Based on ISO 31000:2018, the risk management architecture is described as follows:



Tujuan Manajemen Risiko

Berdasarkan ISO 31000:2018 – Risk Management Guidelines, tujuan manajemen risiko yaitu menciptakan dan melindungi nilai. Tujuan ini diwujudkan dengan meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Adapun tujuan manajemen risiko yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
   Jika risiko-risiko yang dapat menghambat proses organisasi telah diases dengan baik, maka mitigasi untuk mengatasi risiko yang dapat mengganggu kelancaran proses organisasi dapat diantisipasi. Walaupun risiko tersebut terjadi, maka organisasi telah siap untuk menanganinya dengan baik.

Risk Management Objectives

Based on ISO 31000:2018 – Risk Management Guidelines, the objectives of risk management are to create and protect value. This objective is realized by improving performance, encouraging innovation, and supporting the achievement of goals. The objectives of risk management are as follows:

1. Increasing effectiveness and efficiency.
   If the risks that can hinder the organizational process have been properly assessed, then mitigation to address risks that can disrupt the smooth running of the organizational process can be anticipated. Even if the risk occurs, the organization is ready to handle it properly.

2. Lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran Perusahaan.
   Melalui penetapan lingkup, konteks, dan kriteria risiko yang jelas, termasuk penegasan bahwa risikorisiko yang dikelola merupakan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran, manajemen risiko akan dapat meningkatkan keyakinan atas pencapaian sasaran Perusahaan yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan reputasi perusahaan.
   Melalui komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, mereka mengetahui bahwa perusahaan mampu untuk menangani risiko-risiko yang dihadapi dengan baik. Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
4. Mengurangi kejutan-kejutan yang kurang menyenangkan.
   Melalui penerapan manajemen risiko yang baik, maka hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran perusahaan sekaligus langkah antisipasi yang perlu dilakukan.
5. Meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan menjadi semakin baik.
   Dalam penerapan manajemen risiko, perlu menemukenali para pemangku kepentingan dan harapan atau kebutuhannya. Melalui Komunikasi timbal balik yang intens dapat dicapai kesamaan persepsi untuk mencapai sasaran Perusahaan. Manajemen harus terintegrasi di dalam proses organisasi dan memerlukan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak, serta keterlibatan aktif dari semua anggota organisasi.

Pedoman Manajemen Risiko PTBA

Pedoman Manajemen Risiko PTBA disahkan oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko serta Direktur Utama pada tanggal 18 Maret 2024 dengan nomor dokumen BARMM.01 rev.4. Secara umum, Pedoman Manajemen Risiko memuat mengenai:

1. Kebijakan Manajemen Risiko;
2. Tata Kelola & Organisasi Manajemen Risiko;
3. Proses Manajemen Risiko;
4. Implementasi & Integrasi *Enterprise Risk Management*;
5. Penerapan Four Eyes Principle.

Penerapan dan Pengembangan Sistem Manajemen Risiko di Lingkup PTBA

Dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko di PTBA dan mengacu pada Petunjuk Teknis Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Kebijakan Pelaksana dan Pedoman Strategis MIND ID, Perusahaan telah menetapkan Pedoman, Tata Laksana (TL), dan Tata Cara Kerja (TCK) yang lengkap.

2. Providing more reasonable assurance of achieving the Company's goals.
   By establishing a clear scope, context, and risk criteria, including affirmation that the risks managed are risks that can affect the achievement of goals, risk management will be able to increase confidence in the achievement of the Company's goals that have been set.
3. Improving the company's reputation.
   Through good communication with stakeholders, they know that the company is able to handle the risks faced well. The stakeholders in question include internal and external stakeholders.
4. Reducing Unpleasant Surprises.
   Through the implementation of good risk management, things with significant impact on achieving company goals as well as anticipatory steps that need to be taken.
5. Improving relationships with stakeholders to be better.
   In the implementation of risk management, it is necessary to identify stakeholders and their expectations or needs. Through intense reciprocal communication, a common perception can be achieved to achieve the Company's goals. Management must be integrated into the organizational process and requires leadership and commitment from top management, as well as active involvement from all members of the organization.

PTBA Risk Management Guidelines

PTBA Risk Management Guidelines were approved by the Director of Finance and Risk Management and the President Director on March 18, 2024, with document number BARMM.01 rev.4. In general, the Risk Management Guidelines contain:

1. Risk Management Policy;
2. Risk Management Governance & Organization;
3. Risk Management Process;
4. Implementation & Integration of Enterprise Risk Management;
5. Implementation of the Four Eyes Principle.

Implementation and Development of Risk Management System in PTBA Scope

In supporting the implementation of risk management at PTBA and referring to the Technical Instructions of the Minister of SOEs Regulation Number PER-2/MBU/03 of 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, Implementing Policies and Strategic Guidelines of MIND ID, the Company has established complete Guidelines, Procedures (TL), and Work Procedures (TCK).

Perusahaan senantiasa memastikan kesesuaian prosedur manajemen risiko dengan proses bisnis terkini dengan melakukan pembaruan terhadap Pedoman, TL, dan TCK yang dijadikan sebagai acuan dalam penerapan manajemen risiko. Berikut merupakan informasi pengembangan implementasi Manajemen Risiko di PTBA.

The Company always ensures the suitability of risk management procedures with current business processes by updating the Guidelines, TL, and TCK which are used as references in implementing risk management. The following is information on the development of Risk Management implementation at PTBA.

Milestones Implementasi Manajemen Risiko PTBA

PTBA Risk Management Implementation Milestones

2007 - 2008	1. Pembangunan Manajemen Risiko (MR) PTBA Terintegrasi (Identifikasi Risiko berdasarkan Kategori Risiko) 2. Penetapan Pedoman, Kebijakan & Sasaran MR PTBA (Ke-1) (Acuan: AS/NZS 4360:2004)	1. Development of Integrated PTBA Risk Management (MR) (Risk Identification based on Risk Category) 2. Determination of MR PTBA Guidelines, Policies & Targets (1st) (Reference: AS/NZS 4360:2004)
2009	Pembuatan dan Pengesahan TL Manajamen Risiko Terintegrasi (2 Prosedur)	Creation and Ratification of Integrated Risk Management RTL (2 Procedures
2013	1. Pembangunan MR Berbasis IT (ERM Application) 2. Identifikasi Risiko berdasarkan kejadian (Risk Event) 3. Penilaian & Profil Risiko (Satker – Korporat: Bottom to Top)	1. IT-Based MR Development (ERM Application) 2. Risk identification based on events (Risk Event) 3. Risk Assessment & Profile (Work Unit – Corporate: Bottom to Top)
2014	Penetapan Pedoman, Kebijakan & Sasaran Manajemen Risiko PTBA (Ke-2) Acuan: ISO 31000:2009 Mixed COSO 2013 & AS/NZS 4360:2004.	Determination of PTBA Risk Management Guidelines, Policies & Targets (2nd) Reference: ISO 31000:2009 Mixed COSO 2013 & AS/NZS 4360:2004.
2015	1. Go Live Enterprise Risk Management Application (ERM Application). 2. Pembangunan Budaya Risiko (Risk Culture).	1. Go Live Enterprise Risk Management Application (ERM Application). 2. Risk Culture Development.
2016 – 2017	1. Monitoring & Evaluasi Penerapan MR Aplikasi ERM. 2. Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko Satker Baru & Anak Perusahaan. 3. Updating & Pengesahan TL MR (5 Prosedur). 4. Uji coba Risk-Based Internal Audit (RBIA).	1. Monitoring & Evaluation of the Implementation of MR ERM Applications. 2. Assistance in the Implementation of Risk Management for New Work Units & Subsidiaries. 3. Updating & Ratifying TL MR (5 Procedures). 4. Risk-Based Internal Audit (RBIA) trial.
2018	1. Penetapan Pedoman, Kebijakan & Sasaran MR PTBA (Ke-3) ISO 31000:2018. 2. Pembangunan Database Analisa Kuantitatif & Manajemen Insiden.	1. Establishment of MR PTBA Guidelines, Policies & Targets (3rd) ISO 31000:2018. 2. Building a Quantitative Analysis & Incident Management Database.
2019	3. Tersedianya database risiko kuantitatif untuk Risk-Based Audit. 4. Tersedianya Pedoman RKAP berbasis risiko PTBA dan Anak Perusahaan. 5. 50% Anak Perusahaan telah menerapkan Manajemen Risiko (telah memiliki Dokumen Pedoman dan Prosedur MR) 6. 70% Risk Officer telah mendapatkan Sertifikasi Manajemen Risiko.	1. Availability of a quantitative risk database for Risk-Based Audit. 2. Availability of risk-based CWPB guidelines for PTBA and Subsidiaries. 3. 50% of Subsidiaries have implemented Risk Management (equipped with MR Guidance and Procedure Documents) 4. 70% of Risk Officers have obtained Risk Management Certification.
2020	1. Hasil Risk Maturity Level Assessment oleh BPKP: 88,98 / 100,00. 2. Tersedianya dokumen Business Continuity Management System (BCMS). 3. Teridentifikasinya risiko terkait penyuapan di Satuan Kerja (ISO 37001:2016). 4. Penerapan RKAP berbasis risiko PTBA dan Anak Perusahaan. 5. Tersedianya Pedoman Manajemen Risiko di Anak Perusahaan.	1. Risk Maturity Level Assessment results by BPKP: 88.98 / 100.00. 2. Availability of Business Continuity Management System (BCMS) documents. 3. Identification of risks related to bribery in the Work Unit (ISO 37001:2016). 4. Implementation of risk-based CWPB for PTBA and Subsidiaries. 5. Availability of Risk Management Guidelines in Subsidiaries.

2021	1. Hasil asesmen Risk Maturity Index oleh Deloitte: 3,98/5,00. 2. Perubahan nomenklatur manajemen risiko. 3. Perubahan organisasi Satker Manajemen Risiko. 4. Enhancement Aplikasi ERM. 5. Tersedianya Laporan Profil Risiko Anak dan Afiliasi Perusahaan. 6. Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Risk Owner, Risk Officer, dan Personel Satker Manajemen Risiko. 7. Tersedianya Pembaruan Pedoman dan Prosedur Manajemen Risiko.	1. Risk Maturity Index assessment results by Deloitte: 3.98/5.00. 2. Changes in risk management nomenclature. 3. Changes in the organization of the Risk Management Work Unit. 4. ERM Application Enhancement. 5. Availability of Risk Profile Reports for Subsidiaries and Affiliates. 6. Implementation of training and certification for Risk Owners, Risk Officers and Risk Management Work Unit Personnel. 7. Availability of updated Risk Management Guidelines and Procedures.
2022	1. Hasil asesmen Risk Maturity Index oleh asesor internal dari MIND ID Group: 3,67 /5 (Established) Catatan: terdapat perbedaan parameter yang digunakan dibandingkan dengan penilaian tahun sebelumnya. 2. Go Live Enterprise Risk Management Application (ERMA), update/enhancement dari Aplikasi ERM. 3. Sertifikasi BCMS ISO 22301:2019. 4. Tersedianya Pedoman 4-Eyes Principles Pengambilan Keputusan. 5. Terlaksananya program-program peningkatan kompetensi dan budaya risiko, melalui pelatihan, sertifikasi, workshop, FGD, dan sosialisasi melalui berbagai media. 6. Tersedianya Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko di Anak & Afiliasi Perusahaan.	1. Risk Maturity Index assessment results by internal assessors from the MIND ID Group: 3.67/5 (Established) Note: there are differences in the parameters used compared to the previous year's assessment. 2. Go Live Enterprise Risk Management Application (ERMA), update/enhancement of the ERM Application. 3. BCMS ISO 22301:2019 certification. 4. Availability of 4-Eyes Principles Guidelines for Decision Making. 5. Implementation of competency and risk culture improvement programs, through training, certification, workshops, FGDs, and outreach through various media. 6. Availability of Risk Management Guidelines and Documents for Company Subsidiaries & Affiliates.
2023	1. Implementasi Four Eyes Principles dalam Pengambilan Keputusan 2. Terlaksananya program-program peningkatan kompetensi dan budaya 3. risiko, pelatihan, sertifikasi, workshop, FGD, dan sosialisasi melalui berbagai media. 4. Tersedianya Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko di Anak & Afiliasi Perusahaan. 5. Terlaksananya Risk Management Award untuk seluruh satuan kerja di PTBA Induk. 6. Enhancement Aplikasi ERMA.	1. Implementation of the Four Eyes Principles in Decision Making 2. Implementation of competency and risk culture improvement programs, 3. training, certification, workshops, FGDs, and outreach through various media. 4. Availability of Risk Management Guidelines and Documents for Company Subsidiaries & Affiliates. 5. Implementation of the Risk Management Award for all work units at Holding PTBA. 6. ERMA Application Enhancement.
2024	1. Hasil asesmen Risk Maturity untuk tahun buku 2023 oleh asesor eksternal (Deloitte): 3,0 dari skala 5. 2. Terlaksananya program pelatihan dan sertifikasi Organ Pengelola Risiko sesuai ketentuan Juknis Permen BUMN 02/2023. 3. Terlaksananya Risk Management Award untuk seluruh satuan kerja di PTBA Induk. 4. Tersedianya Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko di Anak & Afiliasi Perusahaan. 5. Enhancement Aplikasi ERMA.	1. Risk Maturity Assessment for the 2023 fiscal year, conducted by an external assessor (Deloitte), resulted in a score of 3.0 out of 5. 2. Successful implementation of training and certification programs for Risk Management Officers in accordance with the Technical Guidelines of the Ministry of SOEs Regulation No. 02/2023. 3. Implementation of the Risk Management Award for all work units at Holding PTBA. 4. Availability of Risk Management Guidelines and Documentation for subsidiaries and affiliated companies. 5. Enhancement of the Enterprise Risk Management Application (ERMA)

Pengelolaan Risiko di Lingkup PTBA

PTBA menetapkan struktur tata kelola manajemen risiko dengan mengadopsi "Three Lines Model" yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) dengan rincian masing-masing lini sebagai berikut:

1. Lini pertama sebagai Risk Owner atau Kepala Satuan Kerja/Pimpinan Proyek merupakan unit yang langsung mengidentifikasi risiko dan mengelola risiko dalam proses bisnis (melakukan penetapan lingkup, konteks, kriteria; asesmen risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko); perlakuan risiko; hingga monitoring pelaksanaan pengendalian risiko), termasuk mengidentifikasi pengendalian intern yang sesuai dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perusahaan, membangun dan melaksanakan pengendalian intern untuk mengurangi atau menghindari terjadinya risiko.

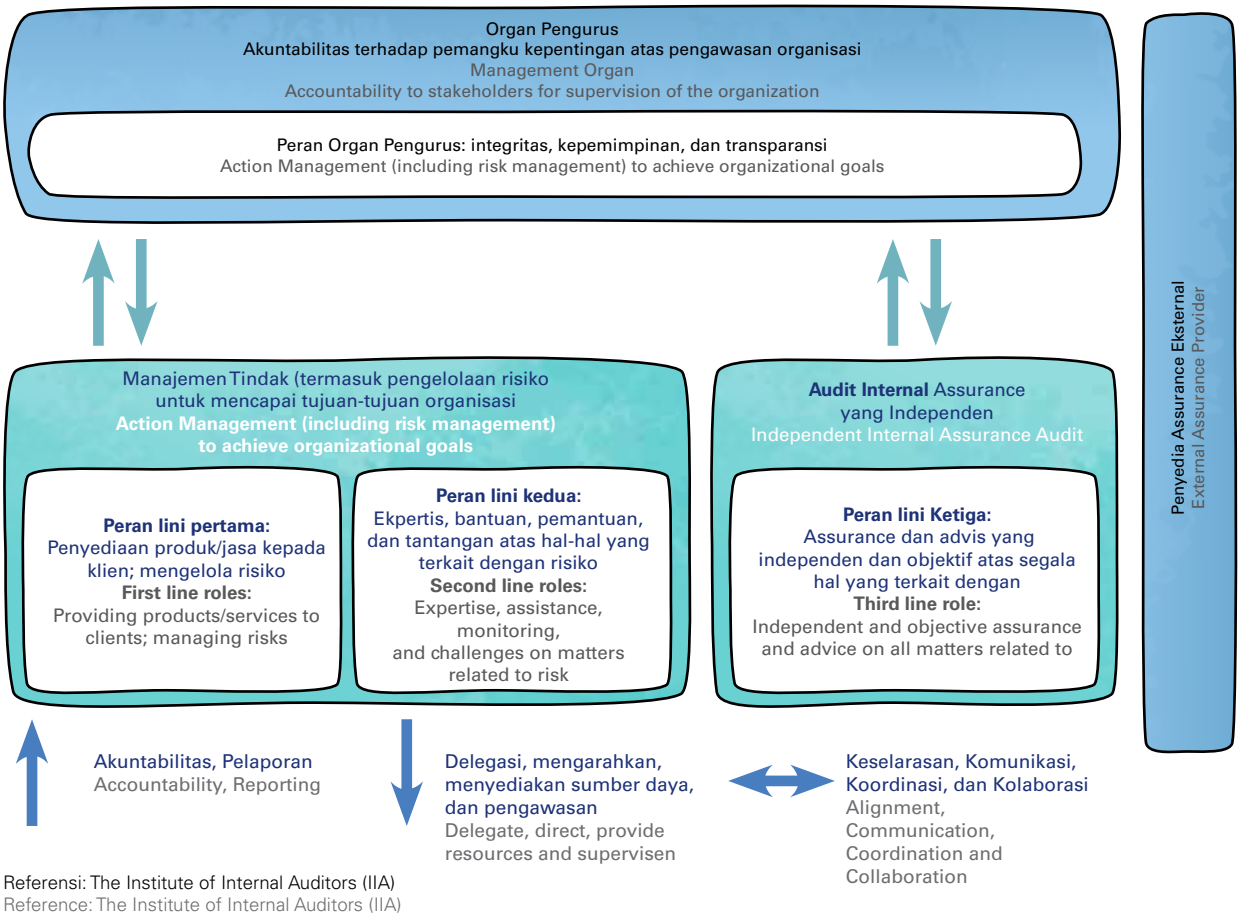
Risk Management in PTBA Scope

PTBA establishes a risk management governance structure by adopting the "Three Lines Model" developed by The Institute of Internal Auditors (IIA) with details of each line as follows:

1. The first line as Risk Owner or Head of Work Unit/ Project Leader is a unit that directly identifies risks and manages risks in the business process (determining scope, context, criteria; risk assessment (risk identification, risk analysis, risk evaluation); risk treatment; to monitoring the implementation of risk control), including identifying internal controls that are in accordance with the type and level of risk inherent in the Company's business activities, building and implementing internal controls to reduce or avoid risks.

2. Lini kedua sebagai fungsi Manajemen Risiko dan kepatuhan independen merupakan unit yang mengukur, memantau dan mengendalikan risiko secara agregat, mengembangkan metodologi dan kebijakan Manajemen Risiko perusahaan serta melakukan internal control testing atas pengendalian kunci yang terkait dengan risiko-risiko utama (Top Risk).
3. Lini ketiga sebagai fungsi Audit Intern atau *independent assurance* merupakan unit yang memberikan keyakinan yang memadai atas keefektifan penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian perusahaan.

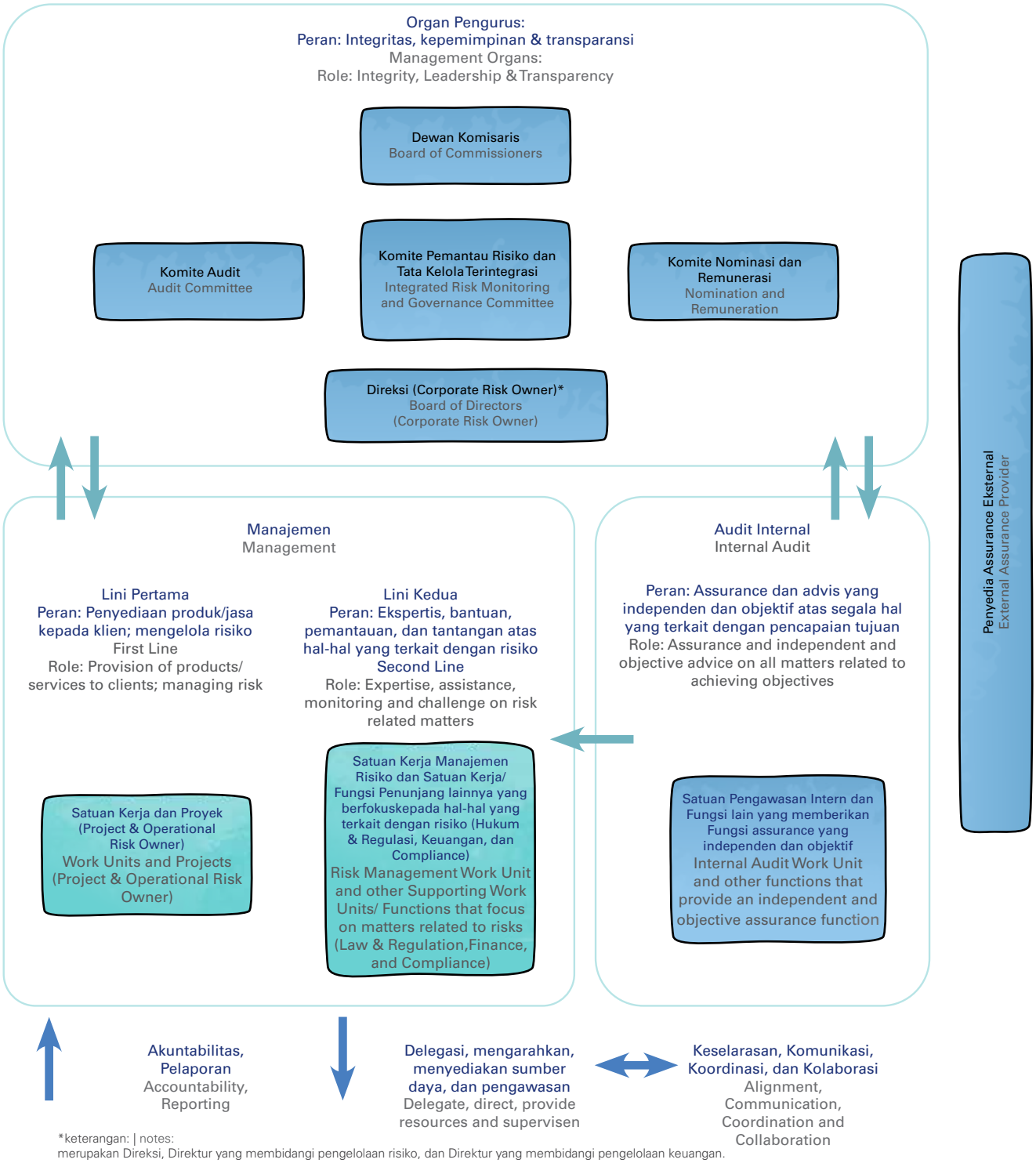
2. The second line as an independent Risk Management and compliance function is a unit that measures, monitors and controls risks in aggregate, develops the company's Risk Management methodology and policies and conducts internal control testing of key controls related to the main risks (Top Risk).
3. The third line as an Internal Audit function or independent assurance is a unit that provides adequate assurance on the effectiveness of the implementation of corporate governance, risk management, and control.



Referensi: The Institute of Internal Auditors (IIA)
Reference: The Institute of Internal Auditors (IIA)

PTBA telah menerapkan *three lines model* sebagaimana bagan di bawah ini:

PTBA has implemented the three lines model as shown in the chart below:



*keterangan: | notes:
merupakan Direksi, Direktur yang membidangi pengelolaan risiko, dan Direktur yang membidangi pengelolaan keuangan.
are the Board of Directors, the Director in charge of risk management, and the Director in charge of financial management.

Bagan three lines models PTBA di atas telah menunjukkan implementasi organ pengelola risiko sebagaimana diatur Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

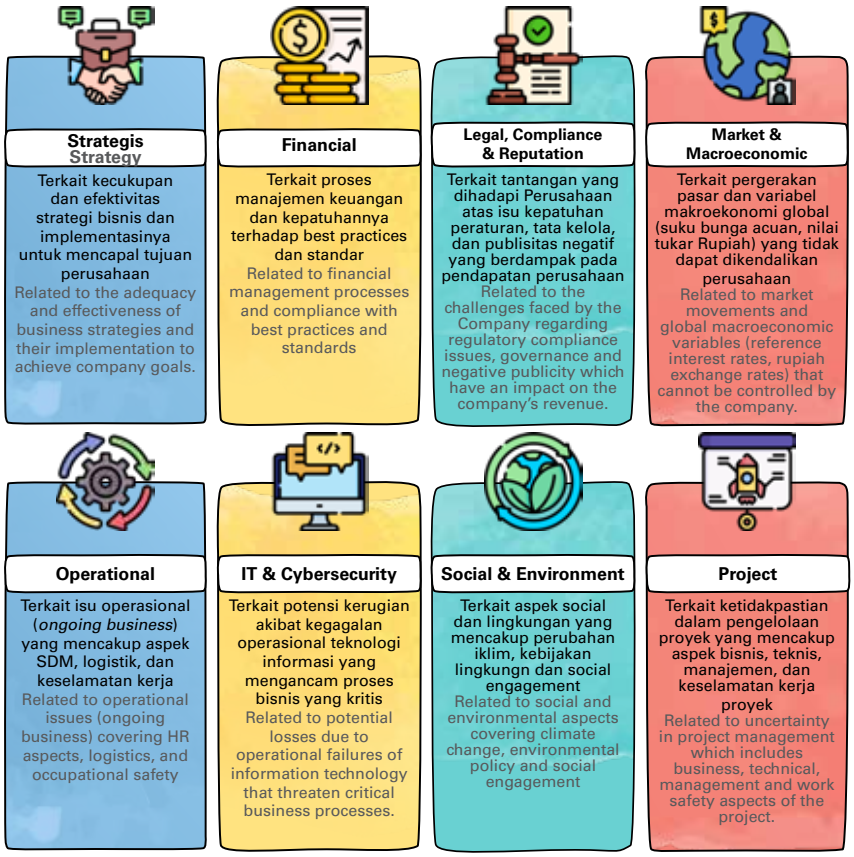
The three lines model chart of PTBA above has shown the implementation of risk management organs as regulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 of 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Risiko yang Dihadapi Perusahaan

Risiko-risiko Perusahaan dikelompokan dalam 8 taksonomi risiko sebagaimana berikut:

Risks Faced by the Company

The Company's risks are grouped into 8 risk taxonomies as follows:



Sepanjang tahun 2024, terdapat beberapa risiko utama yang dihadapi oleh Perusahaan. Berdasarkan Profil Risiko Perusahaan, risiko-risiko tersebut yaitu:

1. *Strategic Risk*
   Risiko-risiko yang termasuk dalam taksonomi ini terkait dengan kecukupan dan efektivitas strategi bisnis dan implementasinya untuk mencapai tujuan perusahaan. Pada tahun 2024, risiko yang menjadi fokus perusahaan adalah penjualan batu bara skema FOB-MV Pelabuhan lain (strategi *unlocking logistic*) tidak terealisasi sesuai rencana. Mitigasi risiko yang dilakukan Perusahaan diantaranya sebagai berikut:
   a. Mencari mitra strategis dan/atau *buyer* untuk volume penjualan yang saat ini belum terakomodir dalam kontrak eksisting.
   b. Memenuhi kebutuhan infrastruktur implementasi penjualan FOB MV termasuk pemenuhan struktur organisasi, infrastruktur fisik, dll.
2. *Financial Risk*
   Risiko-risiko yang termasuk dalam taksonomi ini terkait dengan proses manajemen keuangan dan kepatuhan terhadap *best practices* dan standar. Pada tahun 2024, risiko yang menjadi fokus perusahaan adalah realisasi biaya produksi di atas rencana (RKAP).

Throughout 2024, there are several major risks faced by the Company. Based on the Company's Risk Profile, these risks are:

1. Strategic Risk
   The risks included in this taxonomy are related to the adequacy and effectiveness of business strategies and their implementation to achieve the company's goals. In 2024, the company faced risk in the sale of coal under the FOB-MV scheme at other ports (logistic unlocking strategy) with realization under the determined target. The risk mitigation carried out by the Company includes the following:
   a. Finding unaccommodated strategic partners and/or buyers for sales volumes in existing contracts.
   b. Meeting the infrastructure needs for implementing FOB MV sales including fulfilling organizational structures, physical infrastructure, etc.
2. Financial Risk
   The risks included in this taxonomy are related to the financial management process and compliance and compliance with best practices and standards. In 2024, the company face challenges in the realization of

Mitigasi risiko yang dilakukan Perusahaan di antaranya sebagai berikut:

a. Melakukan analisa sensitivitas apabila terdapat peningkatan/potensi peningkatan biaya secara signifikan.
b. Menyusun dan menjalankan program-program *cost reduction* dan optimasi pendapatan.
c. Melakukan negosiasi bersama MIND ID grup untuk mendapatkan harga BBM yang paling optimal.
d. Melakukan optimasi jarak angkut melalui optimalisasi penggunaan BBM dan *tyre*.

3. *Legal, Compliance, & Reputation*
Risiko-risiko yang termasuk dalam taksonomi ini terkait tantangan yang dihadapi perusahaan atas isu kepatuhan, peraturan, tata kelola, dan publisitas negatif yang berdampak pada pendapatan perusahaan. Pada tahun 2024, risiko yang menjadi fokus perusahaan adalah izin untuk operasional dan pengembangan terlambat/tidak dapat diperpanjang atau tidak diperoleh. Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan Perusahaan di antaranya sebagai berikut:
a. Memenuhi persyaratan pengurusan izin yang dibutuhkan.
b. Bekerjasama dengan *best permit supporting consultant* untuk pengurusan izin
c. Melakukan eskalasi ke Kementerian terkait dan/atau MIND ID untuk meminta penguatan/dorongan pengurusan izin apabila dibutuhkan.
d. Memonitor masa berlaku & proses pengurusan izin sesuai prosedur.

4. *Market & Macroeconomic*
Risiko-risiko yang termasuk dalam taksonomi ini terkait dengan pergerakan pasar dan variabel makroekonomi global tidak dapat dikendalikan perusahaan. Pada tahun 2024, risiko yang menjadi fokus perusahaan adalah penurunan harga jual batu bara. Mitigasi risiko yang dilakukan Perusahaan diantaranya sebagai berikut:
a. Melakukan *review* terhadap strategi pemasaran dan menyesuaikannya dengan kondisi pasar.
b. Mendorong atau memonitor pemberlakukan MIP.
c. Melakukan negosiasi dengan PLN, KESDM, dan KBUMN apabila terdapat penugasan *domestic* yang dapat mengurangi pendapatan secara signifikan.
d. Hilirisasi batu bara sebagai natural *hedging* atas fluktuasi harga batu bara.
e. Melakukan analisa sensitivitas apabila terdapat penurunan indeks harga batu bara.

5. *Operational*
Risiko-risiko yang termasuk dalam taksonomi ini terkait dengan isu operasional (*ongoing business*) yang mencakup aspek SDM, logistik dan keselamatan kerja. Pada tahun 2024, risiko yang menjadi fokus

production costs above plan (CWPB). Risk mitigation carried out by the Company includes the following:

a. Conducting sensitivity analysis if there is a significant increase/potential increase in costs.
b. Preparing and implementing cost reduction and revenue optimization programs.
c. Negotiating with the MIND ID group to obtain the most optimal fuel price.
d. Optimizing transportation distances by optimizing fuel and tire usage.

3. Legal, Compliance, & Reputation
The risks included in this taxonomy relate to the challenges faced by the company regarding compliance issues, regulations, governance, and negative publicity that impact the company's revenue. In 2024, the Company focused on risks in permits for operations and development being late/not being able to be extended or not being obtained. Risk mitigation implemented by the Company includes the following:

a. Fulfilling the requirements for managing the required permits.
b. Cooperating with the best permit supporting consultant for managing permits
c. Escalating to the relevant Ministry and/or MIND ID to request strengthening/encouragement for managing permits if needed.
d. Monitor the validity period & permit processing process according to procedures.

4. Market & Macroeconomic
The risks included in this taxonomy are related to market movements and global macroeconomic variables that cannot be controlled by the company. In 2024, the Company focused on risks in declining coal selling prices. The risk mitigation carried out by the Company includes the following:

a. Reviewing marketing strategies and adjusting them to market conditions.
b. Encouraging or monitoring the implementation of MIP.
c. Negotiating with PLN, KESDM, and KBUMN for any domestic assignments that can significantly reduce income.
d. Coal downstreaming as a natural hedge against coal price fluctuations.
e. Conducting sensitivity analysis if there is a decline in the coal price index.

5. Operational
The risks included in this taxonomy are related to operational issues (ongoing business) which include aspects of HR, logistics and work safety. In 2024, the Company focused on risks include unmet sales

perusahaan di antaranya terkait volume penjualan tidak dapat dipenuhi sesuai rencana, kapasitas angkutan tidak dapat memenuhi target, kecelakaan kerja, ketersediaan lahan untuk operasional, dan ancaman aktivitas PETI di wilayah IUP. Mitigasi risiko yang dilakukan Perusahaan di antaranya sebagai berikut:

a. Melakukan penyesuaian strategi penjualan yang paling optimal.
b. Mendapatkan *customer* baru, baik domestik maupun ekspor.
c. Melakukan penjualan secara spot apabila terjadi pembatalan/pengurangan pengambilan batu bara oleh buyer.
d. Memonitor *update* regulasi terkait kebijakan penjualan batu bara dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
e. Mengoptimalkan *rehandling* untuk pemenuhan kebutuhan batu bara.
f. Mendorong KAI menyediakan sarana dan prasarana angkutan serta optimasi angkutan sesuai rencana.
g. Menjaga kehandalan peralatan di Tambang, Dermaga dan Pelabuhan.
h. Menerapkan *golden rules* dan sistem manajemen terkait keselamatan yaitu ISO 45001:2018, Sistem Manajemen K3, dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP).
i. Melakukan pembebasan lahan dengan pendampingan pihak ketiga dan/atau aparat setempat apabila diperlukan.
j. Melakukan observasi/razia PETI dengan pihak Kepolisian/ Aparat/Tripika.
k. Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar PETI dan para Penambang PETI agar tidak melakukan PETI di area IUP PTBA.

6. *IT & Cybersecurity*

Risiko-risiko yang termasuk dalam taksonomi ini terkait potensi kerugian akibat kegagalan operasional Teknologi Informasi yang mengancam proses bisnis kritis. Pada tahun 2024, risiko yang menjadi fokus perusahaan diantaranya serangan *cyber* yang mengganggu keamanan sistem dan data. Mitigasi risiko yang dilakukan Perusahaan di antaranya sebagai berikut:

a. Mengimplementasikan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO/IEC 27001:2013.
b. Melakukan *management red team and blue team security service*.
c. Melakukan *Vulnerability Assessment and Penetration Testing* (VAPT).
d. Pekerjaan *Security Operation Center* (SOC) bersinergi dengan MIND ID.
e. Melakukan *security monitoring* oleh konsultan
f. Menindaklanjuti hasil *Vulnerability* Assessment *and Penetration Testing* (VAPT).

volumes according to plan, transportation capacity cannot meet targets, work accidents, availability of land for operations, and threats of PETI activities in the IUP area. The risk mitigation carried out by the Company includes the following:

a. Making adjustments to the most optimal sales strategy.
b. Approacing new customers, both domestic and export.
c. Making spot sales if there is a cancellation/ reduction in coal intake by the buyer.
d. Monitoring regulatory updates related to coal sales policies and coordinating with related agencies.
e. Optimizing rehandling to meet coal needs.
f. Encouraging KAI to provide transportation facilities and infrastructure and optimizing transportation according to plan.
g. Maintaining the reliability of equipment in Mines, Docks and Ports.
h. Implementing golden rules and safety management systems, namely ISO 45001:2018, K3 Management System, and Mining Safety Management System (SMKP).
i. Conducting land acquisition with assistance from third parties and/or local authorities if necessary.
j. Conducting PETI observations/raids with the Police/Apparatus/Tripika.
k. Empowering communities around PETI and PETI Miners to prevent PETI activities in the PTBA IUP area.

6. IT & Cybersecurity

The risks included in this taxonomy are related to potential losses due to operational failures of Information Technology that threaten critical business processes. In 2024, the Company faced risks in cyber attacks that disrupt system and data security. Risk mitigation carried out by the Company include the following:

a. Implementing the Information Security Management System (SMKI) ISO/IEC 27001:2013.
b. Conducting red team and blue team security service management.
c. Conducting Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT).
d. The work of the Security Operation Center (SOC) is in synergy with MIND ID.
e. Conducting security monitoring by consultants
f. Following up on the results of the Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT).

g. Meningkatkan *awareness* pegawai untuk pencegahan serangan *cyber*.

7. *Social & Environment*
   Risiko-risiko yang termasuk dalam taksonomi ini terkait aspek sosial dan lingkungan yang mencakup perubahan iklim, kebijakan lingkungan dan *social engagement*. Pada tahun 2024, risiko yang menjadi fokus perusahaan di antaranya target penurunan emisi karbon tidak tercapai. Mitigasi risiko yang dilakukan Perusahaan di antaranya sebagai berikut:
   a. Melakukan program-program penurunan emisi seperti penggunaan elektrifikasi, penurunan jarak angkut, optimalisasi *conveyor*, dll.
   b. Melakukan uji emisi terhadap peralatan dan kendaraan perusahaan.
   c. Melakukan perawatan/perbaikan terhadap alat yang melebihi nilai batas atas emisi karbon.
   d. Memasukkan kriteria dan standar emisi gas buang dalam proses pengadaan peralatan yang beroperasi dengan bahan bakar fosil.
   e. Melakukan perawatan rutin pada peralatan.
8. *Project*
   Risiko-risiko yang termasuk dalam taksonomi ini terkait ketidakpastian dalam pengelolaan proyek yang mencakup aspek bisnis, teknis, Manajemen dan keselamatan kerja proyek. Mitigasi risiko yang dilakukan Perusahaan di antaranya sebagai berikut:
   a. Sinkronisasi progres proyek dengan mitra strategis.
   b. Melakukan percepatan penyiapan lahan proyek.
   c. Melakukan pengawasan dan evaluasi pekerjaan kontraktor EPC proyek CHF TLS secara rutin bersama konsultan MK.
   d. Melakukan pengurusan/pembaruan izin-izin yang dibutuhkan melalui koordinasi dengan instansi terkait dan pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan.

Indikator Risiko (KRI)

Key Risk Indicator (KRI) merupakan ukuran yang digunakan sebagai indikator oleh suatu organisasi. KRI akan menjadi sebuah pemberitahuan dini apabila terjadi suatu perubahan dari *risk exposures* untuk beberapa aspek pada sebuah perusahaan. Dalam hal ini, KRI dapat menjadi sebuah indikator dari kemungkinan munculnya suatu dampak atau kerugian di masa yang akan datang. Adapun manfaat adanya KRI di antaranya:

1. Menentukan *early warning signal*;
2. Memudahkan dalam perhitungan *likelihood* dan *impact* suatu risiko;
3. Memudahkan manajemen dalam membuat program preventif, detektif, dan korektif. Informasi yang didapatkan dari KRI memungkinkan *risk owner* untuk melakukan tindakan mitigasi lebih awal, sehingga dapat membantu mengurangi atau mencegah

g. Increasing employee awareness to prevent cyber attacks.

7. Social & Environment
   The risks included in this taxonomy are related to social and environmental aspects that include climate change, environmental policies, and social engagement. In 2024, the Company faced risks in unmet target of carbon emissions reduction. The risk mitigation carried out by the Company include the following:
   a. Carrying out emission reduction programs such as the use of electrification, reducing transport distances, optimizing conveyors, etc.
   b. Conducting emission tests on company equipment and vehicles.
   c. Carrying out maintenance/repairs on equipment that exceeds the upper limit of carbon emissions.
   d. Including criteria and standards for exhaust emissions in the procurement process for equipment that operates with fossil fuels.
   e. Perform routine maintenance on equipment.
8. Project
   The risks included in this taxonomy are related to uncertainty in project management that includes business, technical, management and project safety aspects. The risk mitigation carried out by the Company include the following:
   a. Synchronizing project progress with strategic partners.
   b. Accelerating project land preparation.
   c. Routinely supervising and evaluating the work of the EPC contractor for the CHF TLS project with MK consultants.
   d. Managing/renewing the required permits through coordination with relevant agencies and fulfilling the required requirements.

Risk Indicator (KRI)

Key Risk Indicator (KRI) is a measure used as an indicator by an organization. KRI will be an early notification for changes in risk exposures for several aspects of a company. In this case, KRI can be an indicator of the possibility of an impact or loss in the future. The benefits of KRI include:

1. Determining early warning signals;
2. Facilitating the calculation of the likelihood and impact of a risk;
3. Facilitating management in creating preventive, detective, and corrective programs. Information obtained from KRI allows risk owners to take early mitigation actions, to help reduce or prevent risks from occurring. If a KRI falls into the Red Flag category

terjadinya risiko. Apabila suatu KRI masuk pada kategori *Red Flag* atau berada pada batas kritis, maka hal ini mengindikasikan bahwa risiko dapat terjadi dengan kemungkinan yang tinggi.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko pada Tahun Buku 2024

Pada tahun 2024, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja dan dengan beberapa kegiatan penting, di antaranya:

1. Sertifikasi Kompetensi Pegawai Satker Manajemen Risiko
   Pada tahun buku 2024, telah dilakukan sertifikasi pegawai dalam rangka pengakuan kompetensi pegawai Satuan Kerja Manajemen Risiko dan pemenuhan kualifikasi organ pengelola risiko sesuai dengan Permen BUMN No. 2 Tahun 2023, di antaranya:
   a. Certified Risk Management Officer (CRMO);
   b. Certified Risk Management Professional (CRMP);
   c. Qualified Chief Risk Officer (QCRO);
   d. Certified GRC Professional (CGRCP);
   e. Certified Governance Professional (CGP);
   f. Certified Internal Audit Professional (CIAP).
2. Pembangunan Budaya Risiko
   Untuk meningkatkan budaya sadar risiko di lingkungan Perusahaan, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melakukan:
   a. *Executive Workshop* Manajemen Risiko untuk Dewan Komisaris dan Direksi;
   b. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko untuk *risk owner* (BOD-1);
   c. Pelatihan Manajemen Risiko untuk pegawai (BOD-4 fungsional);
   d. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko untuk *Risk Officer;*
   e. FGD Manajemen Risiko untuk *Risk Officer;*
   f. *Knowledge sharing*/sosialisasi manajemen risiko untuk Risk Officer satuan kerja.
   g. Pelatihan dan sertifikasi Manajemen Risiko untuk Anak dan Afiliasi Perusahaan (AAP)
   h. Webinar Manajemen Risiko untuk seluruh pegawai dengan pembicara eksternal.
   i. Penganugerahan Risk Management Awards sebagai apresiasi kepada *risk owner, risk officer,* dan satuan kerja dengan penerapan manajemen risiko terbaik selama Tahun 2024.
3. Pelaksanaan Asesmen Risk Maturity Index (RMI)

   Penilaian ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Permen BUMN No.2/2023, yang mewajibkan setiap BUMN untuk melakukan penilaian RMI setiap tahunnya, baik secara independen maupun internal. Pelaksanaan penilaian RMI pada tahun

or is at a critical limit, this indicates that the risk can occur with a high probability.

Brief Report on the Implementation of the Risk Management Work Unit's Duties in the 2024 Financial Year

In 2024, the Risk Management Work Unit has carried out activities in accordance with the work program and with several important activities, including:

1. Certification of Risk Management Work Unit Employee Competence
   In the 2024 financial year, employee certification has been carried out in order to recognize the competence of Risk Management Work Unit employees and fulfill the qualifications of risk management organs in accordance with BUMN Ministerial Regulation No. 2 of 2023, including:
   a. Certified Risk Management Officer (CRMO);
   b. Certified Risk Management Professional (CRMP);
   c. Qualified Chief Risk Officer (QCRO);
   d. Certified GRC Professional (CGRCP);
   e. Certified Governance Professional (CGP);
   f. Certified Internal Audit Professional (CIAP).
2. Development of Risk Culture
   To improve the risk awareness culture in the Company's environment, the Risk Management Work Unit has conducted:
   a. Risk Management Executive Workshop for the Board of Commissioners and Directors;
   b. Risk Management competency training and certification for risk owners (BOD-1);
   c. Risk Management training for employees (BOD-4 functional);
   d. Risk Management competency training and certification for Risk Officers;
   e. Risk Management FGD for Risk Officers;
   f. Knowledge sharing/socialization of risk management for work unit Risk Officers.
   g. Risk Management training and certification for Subsidiaries and Affiliated Companies (AAP)
   h. Risk Management Webinar for all employees with external speakers.
   i. Awarding of Risk Management Awards as an appreciation to risk owners, risk officers, and work units with the best risk management implementation during 2024.
3. Implementation of Risk Maturity Index (RMI) Assessment
   This assessment is carried out based on the provisions stipulated in SOEs Ministerial Regulation No.2/2023, which requires every SOE to conduct an RMI assessment every year, both independently and internally. The implementation of the RMI

2024 dilakukan untuk menilai tingkat kematangan manajemen risiko perusahaan selama tahun buku 2023 yang dilakukan oleh pihak ketiga. Penilaian RMI mencakup penilaian atas Aspek Dimensi dan Aspek Kinerja yang dilakukan melalui beberapa metode observasi, yaitu reviu dokumen, survei dan wawancara.

4. Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko Anak & Afiliasi Perusahaan
   Manajemen berkomitmen untuk menerapkan manajemen risiko sampai dengan Anak dan Afiliasi Perusahaan (AAP). Satuan kerja Manajemen risiko berfungsi sebagai fasilitator bagi AAP untuk pendampingan penyusunan pedoman dan dokumen manajemen risiko di AAP serta implementasinya. Pada tahun 2024 telah dilakukan pendampingan penyusunan pedoman dan dokumen manajemen risiko untuk 13 AAP PTBA.
5. Penyusunan RKAP 2025 Berbasis Risiko
   Tahun buku 2025 merupakan tahun ke-lima penyusunan RKAP berbasis risiko bagi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap program kerja yang dijalankan oleh satuan kerja merupakan mitigasi dari risiko untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.
6. Implementasi *Four Eyes Principles* dan Kajian Risiko Keputusan Strategis
   PTBA telah mengimplementasikan Prinsip *Four Eyes Principles* yang menyatakan bahwa untuk setiap pengambilan keputusan pada inisiatif pengembangan usaha, termasuk dan tidak terbatas pada aksi korporasi, investasi, proyek strategis, dan lainnya, harus melibatkan dan mempertimbangkan kajian dari dua fungsi, yakni fungsi bisnis dan fungsi risiko.

   Komitmen Manajemen dalam penerapan manajemen risiko secara komprehensif membuat seluruh pengambilan keputusan strategis harus dilengkapi kajian risiko. Selama tahun buku 2024, satuan kerja Manajemen Risiko telah menerbitkan kajian risiko di antaranya berupa Kajian Risiko, Memo Manajemen Risiko, verifikasi atas kajian risiko yang dibuat oleh satuan kerja maupun konsultan, dan nota dinas pendapat risiko.
7. *Internal Control Testing* dan *Stress Testing*
   Sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi, perusahaan telah melaksanakan Internal Control Testing guna memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi risiko di perusahaan.

   Selain itu, perusahaan juga telah melakukan *Stress Testing* untuk mengukur ketahanan keuangan dan operasional dalam menghadapi berbagai skenario risiko ekstrem yang mungkin terjadi.

assessment in 2024 was carried out to assess the level of maturity of the company's risk management during the 2023 financial year carried out by a third party. The RMI assessment includes an assessment of the Dimension Aspect and Performance Aspect carried out through several observation methods, namely document review, surveys and interviews.

4. Assistance in the Implementation of Risk Management for Subsidiaries & Company Affiliates
   Management is committed to implementing risk management up to Subsidiaries and Company Affiliates (AAP). The Risk Management work unit functions as a facilitator for AAP for assistance in the preparation of guidelines and risk management documents in AAP and their implementation. In 2024, assistance was provided in the preparation of guidelines and risk management documents for 13 PTBA AAPs.
5. Preparation of the 2025 Risk-Based CWPB
   The 2025 financial year is the fifth year of the preparation of the risk-based CWPB for the company. This shows that every work program carried out by the work unit is a mitigation of risk to achieve the company's goals and objectives.
6. Implementation of the Four Eyes Principles and Strategic Decision Risk Assessment
   PTBA has implemented the Four Eyes Principles which state that for every decision-making on business development initiatives, including and not limited to corporate actions, investments, strategic projects, and others, must involve and consider studies from two functions, namely the business function and the risk function.

   Management's commitment to implementing comprehensive risk management requires all strategic decision-making to be accompanied by a risk assessment. During the 2024 financial year, the Risk Management work unit has issued risk assessments including Risk Assessments, Risk Management Memos, verification of risk assessments made by work units and consultants, and risk opinion service notes.
7. Internal Control Testing and Stress Testing
   As part of efforts to strengthen governance and compliance with regulations, the company has implemented Internal Control Testing to ensure the effectiveness of the internal control system in identifying, preventing, and mitigating risks in the company.

   In addition, the company has also conducted Stress Testing to measure financial and operational resilience in facing various extreme risk scenarios that may occur.

8. *Diagnostic Internal Control of Financial Reporting* (ICoFR)
   Pada tahun 2024, perusahaan telah melakukan diagnostic ICoFR dengan dibantu oleh pihak ketiga. Kegiatan ini dilakukan untuk menentukan efektivitas implementasi ICoFR terutama terhadap prosedur pengendalian dan proses bisnis yang ada di Perusahaan, termasuk melakukan evaluasi prosedur dasar atas pengendalian yang dapat mencegah risiko salah saji pada laporan keuangan.
9. Pelaksanaan *Risk Culture Survey*
   Pada tahun 2024, telah dilaksanakan *Risk Culture Survey* (RCS)yang dilakukan oleh pihak ketiga. RCS mencakup 4 prinsip yaitu *organization, relationship, motivation, dan risk competence.*
10. Digitalisasi proses Manajemen Risiko
    Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penerapan manajemen risiko dalam perusahaan, telah dilakukan perbaikan berkelanjutan sepanjang tahun buku 2024 untuk aplikasi manajemen risiko ERMA bersama Satuan Kerja Teknologi Informasi.

Laporan tentang Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko di Tahun 2024

Untuk memastikan efektivitas atas penerapan manajemen risiko di Perusahaan, pada tahun 2024 dilakukan beberapa kegiatan di antaranya:

1. Evaluasi atas pelaporan pengendalian risiko dan penilaian risiko satuan kerja yang dilakukan melalui aplikasi ERMA. Pelaporan dilakukan oleh seluruh Satuan Kerja secara triwulanan. Evaluasi dilakukan secara berjenjang dari pemilik risiko hingga ke Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2. Pelaksanaan *Internal Control Testing* guna memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi risiko di perusahaan.
3. Audit Operasional berbasis risiko yang dilakukan oleh Satker SPI. Audit dilaksanakan salah satunya untuk melihat efektivitas dari pengendalian risiko yang dilaksanakan satuan kerja, dengan salah satu input dari proses audit yang dilakukan adalah risiko-risiko Satuan Kerja yang teregister di aplikasi ERMA.
4. Pelaporan kepada Direksi dan Komite Pemantau Risiko mengenai risiko-risiko yang dihadapi baik secara korporasi maupun risiko dari proyek-proyek Strategis Perusahaan, termasuk mitigasi-mitigasi risiko yang perlu dilaksanakan.
5. Audit ISO atau standar kesisteman lainnya, baik oleh auditor internal maupun eksternal. Dalam audit yang dilakukan, risiko menjadi salah satu aspek yang dinilai kesesuaiannya terhadap kriteria/standar audit yang digunakan.

8. Diagnostic Internal Control of Financial Reporting (ICoFR)
   In 2024, the company has conducted an ICoFR diagnostic assisted by a third party. This activity is carried out to determine the effectiveness of ICoFR implementation, especially on control procedures and business processes in the Company, including evaluating basic procedures for controls that can prevent the risk of misstatement in financial statements.
9. Implementation of Risk Culture Survey
   In 2024, a Risk Culture Survey (RCS) was conducted by a third party. RCS covers 4 principles, namely organization, relationship, motivation, and risk competence.
10. Digitalization of the Risk Management Process
    In order to improve the effectiveness and efficiency of the risk management implementation process in the company, continuous improvements have been made throughout the 2024 financial year for the ERMA risk management application together with the Information Technology Work Unit.

Report on the Evaluation of the Effectiveness of the Risk Management System in 2024

To ensure the effectiveness of the implementation of risk management in the Company, several activities had been carried out in 2024, including:

1. Evaluation of risk control reporting and risk assessment of work units carried out through the ERMA application. Reporting is carried out by all Work Units on a quarterly basis. Evaluation is carried out in stages from the risk owner to the Risk Management Work Unit.
2. Implementation of Internal Control Testing to ensure the effectiveness of the internal control system in identifying, preventing, and mitigating risks in the company.
3. Risk-based Operational Audit carried out by the SPI Work Unit. The audit is carried out, among other things, to see the effectiveness of risk control implemented by the work unit, with one of the inputs from the audit process carried out being the risks of the Work Unit registered in the ERMA application.
4. Reporting to the Board of Directors and the Risk Monitoring Committee regarding the risks faced both corporately and risks from the Company's Strategic projects, including risk mitigations that need to be implemented.
5. ISO audits or other system standards, both by internal and external auditors. In the audit conducted, risk is one of the aspects assessed for its conformity to the audit criteria/standards used.

6. Evaluasi implementasi manajemen risiko juga dilakukan melalui pelaksanaan audit *Balanced Scorecard* (BSC). Audit BSC dilaksanakan setiap triwulan untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, baik dalam tingkat korporat maupun satuan kerja.
7. Perusahaan juga melakukan evaluasi atas kejadian-kejadian merugikan dalam bentuk *loss event database*. Pengelolaan *loss event* dilakukan di antaranya sebagai evaluasi efektivitas pengendalian risiko yang telah dilakukan dan sebagai indikasi level risiko yang terkait dengan masing-masing kejadian.
8. Perusahaan melakukan penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) secara berkala untuk memastikan bahwa manajemen risiko diterapkan secara optimal, konsisten dan sejalan dengan standar terbaik serta regulasi yang berlaku. Pada tahun 2024 telah dilakukan penilaian RMI untuk tahun buku 2023 oleh pihak ketiga. Hasil dari asesmen ini membantu perusahaan dalam memperbaiki sistem pengendalian risiko, meningkatkan kepatuhan, serta mendukung pencapaian tujuan strategis.

6. Evaluation of risk management implementation is also carried out through the implementation of a Balanced Scorecard (BSC) audit. BSC audits are carried out every quarter to measure the achievement of predetermined targets, both at the corporate and work unit levels.
7. The Company also evaluates adverse events in the form of a loss event database. Loss event management is carried out, among other things, as an evaluation of the effectiveness of risk control that has been carried out and as an indication of the level of risk associated with each event.
8. The Company conducts periodic Risk Maturity Index (RMI) assessments to ensure that risk management is implemented optimally, consistently, and in line with the best standards and applicable regulations. In 2024, an RMI assessment for the 2023 financial year was carried out by a third party. The results of this assessment help the company improve its risk control system, increase compliance, and support the achievement of strategic goals.

Rencana Penerapan atau Pengembangan Sistem Manajemen Risiko Tahun 2025

Perusahaan telah menyusun rencana kerja atas pelaksanaan Manajemen Risiko untuk tahun 2025, sebagai berikut:

Risk Management System Implementation or Development Plan for 2025

The Company has prepared a work plan for the implementation of Risk Management for 2025, as follows:

Program Kerja Work Program
Budaya & Kapabilitas Risiko Risk Culture & Capabilities
• Pelatihan/workshop dan/atau sertifikasi kompetensi manajemen risiko untuk organ pengelola risiko. Training/workshops and/or risk management competency certification for risk management organs.
• Sosialisasi pelaksanaan internal control testing kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Socialization of the implementation of internal control testing to all interested parties.
• Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen risiko untuk Anak Afiliasi Perusahaan (AAP). Risk Management Training and Certification for Affiliated Subsidiaries (APA).
• Sosialisasi/Workshop terkait Rencana Darurat Socialization/Workshop related to Emergency Plan
• Pelatihan dan sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko untuk Risk Officer. Risk Management competency training and certification for Risk Officers.
• Pelatihan Manajemen Risiko untuk Pegawai JJ 4 Fungsional. Risk Management Training for JJ 4 Functional Employees.
• Pelatihan/workshop dan/atau sertifikasi kompetensi manajemen risiko untuk personel satuan kerja Manajemen Risiko. Training/workshops and/or risk management competency certification for Risk Management work unit personnel.
• Knowledge sharing untuk Risk Officer baru. Knowledge sharing for new Risk Officers.
• FGD Manajemen Risiko untuk Risk Officer. Risk Management FGD for Risk Officers.
• Webinar Manajemen Risiko dengan pembicara eksternal Risk Management Webinar with external speakers
• Pelaksanaan Risk Management Awards. Implementation of Risk Management Awards.
• Pelaksanaan Risk Culture Survey Implementation of Risk Culture Survey

Program Kerja Work Program
• Risk Awareness melalui email, banner, dan/atau media lainnya. Risk Awareness through email, banner, and/or other media.
• Workshop, training dan/atau sosialisasi Penyusunan Database risiko dan Data pendukung Profil Risiko lainnya untuk Anak Afiliasi Perusahaan (AAP). Workshop, training and/or socialization of the preparation of risk databases and other supporting data for risk profiles for affiliated subsidiaries (AAP).
• Sosialisasi dan pendampingan simulasi BCM/BCP di Unit Pertambangan Tanjung Enim dan Pelabuhan Tarahan. Socialization and assistance of BCM/BCP simulation at Tanjung Enim Mining Unit and Tarahan Port.
• FGD manajemen risiko MIND ID Group. Risk Management FGD of MIND ID Group.
• Penerapan / model kuantifikasi risiko. Application of risk modeling/risk quantification models.
Organisasi & Tata Kelola Risiko Organization & Risk Governance
• Pendampingan /fasilitasi penyusunan dokumen profil risiko korporat Anak Afiliasi Perusahaan. Assistance/facilitation in the preparation of corporate risk profile documents for the Company's Affiliated Subsidiaries.
• Pendampingan surveillance atau resertifikasi ISO 22301. ISO 22301 surveillance or re-certification assistance.
• Pendampingan pelaporan manajemen risiko di satuan kerja. Assistance in reporting risk management in work units.
• Pendampingan penyusunan RKAP berbasis risiko. Assistance in preparing risk-based CWPB.
• Monitoring pengendalian risiko operasional on site. On-site operational risk control monitoring.
• Rapat koordinasi dengan Direksi dan/atau Komisaris. Coordination meeting with Board of Directors and/or Board of Commissioners
• Rapat koordinasi dengan MIND ID. Coordination meeting with MIND ID.
• Rapat koordinasi dengan pihak terkait membahas dokumen rencana darurat Coordination meeting with related parties to discuss emergency plan documents
Kerangka Risiko & Kepatuhan Risk & Compliance Framework
• Pendampingan dan penyusunan kajian risiko untuk mendukung keputusan strategis manajemen. Assistance and preparation of risk assessments to support strategic management decisions.
• Penyusunan Strategi Risiko dan Profil Risiko (Top Risk) 2026 Preparation of Risk Strategy and Risk Profile (Top Risk) 2026
• Penyusunan dan updating dokumen rencana darurat PTBA. Preparation and updating of PTBA emergency plan documents.
• Pendampingan Pelaksanaan Asesmen Risk Maturity Index (RMI). Assistance in the Implementation of Risk Maturity Index (RMI) Assessments.
• Penyusunan dan updating Dokumen BCMS PTBA. Preparation and updating of PTBA BCMS Documents.
• Konsinyering dan penyusunan dokumen MR untuk menunjang profil risiko. Consignment and preparation of MR documents to support risk profiles.
• Penyelarasan Risk Library dengan MIND ID. Alignment of Risk Library with MIND ID.
Proses dan Kontrol Risiko Risk Process and Control
• Pendampingan dan penyusunan profil risiko proyek inisiatif strategis sesuai jadwal. Mentoring and preparation of risk profiles for strategic initiative projects on schedule.
• Monitoring pengendalian risiko setiap triwulan sesuai jadwal. Quarterly risk control monitoring according to schedule.
• Monitoring tindak lanjut rekomendasi pengendalian risiko strategis. Monitoring the follow-up of strategic risk control recommendations.
• Penyusunan profil risiko korporat sesuai jadwal. Preparation of corporate risk profiles on schedule.
• Internal control testing pada setiap Top Risk di Satuan kerja Terkait. Internal control testing at each Top Risk in the Related Work Unit.
• Penyusunan laporan hasil internal control testing (TOD dan TOE). Preparation of internal control testing results reports (TOD and TOE).

Program Kerja Work Program
• Penyusunan stress testing perusahaan pada skenario-skenario tertentu. Preparation of company stress testing on certain scenarios.
• Pembahasan Profil Risiko Korporat dengan Risk Owner dan Risk Officer setiap bulan. Monthly discussion of Corporate Risk Profile with Risk Owner and Risk Officer.
• Pembahasan Profil Risiko Project dengan Risk Owner dan Risk Officer setiap bulan. Monthly Discussion of Project Risk Profile with Risk Owner and Risk Officer.
• Penyusunan dan penyampaian Laporan Manajemen Risiko Insidentil ke MIND ID / KBUMN. Preparation and submission of Incidental Risk Management Report to MIND ID / KBUMN.
• Tindak lanjut atas temuan hasil surveillance dan/ atau resertifikasi ISO 22301 yang menjadi tanggung jawab dari Satker MR. Follow-up on the findings of surveillance results and/or ISO 22301 re-certification as the responsibility of the MR Work Unit.
• Penyusunan pelaporan pemantauan dan evaluasi manajemen risiko secara berkala. Preparation of periodic risk management monitoring and evaluation reports.
• Pelaksanaan RCSA () Implementation of RCSA (Risk Control Self Assessment)
• Implementasi penggunaan SIMR grup MIND ID dalam Proses Pemantauan dan Pelaporan Manajemen Risiko Implementation of the use of MIND ID group SIMR in the Risk Management Monitoring and Reporting Process
Model, Data, dan Teknologi Models, Data, and Technology
• Pengembangan ERMA untuk dashboard, KRI, loss event management dan kebutuhan lainnya. ERMA development for dashboard, KRI, loss event management and other needs.
• Maintenance aplikasi ERMA bekerja sama dengan satker TI. ERMA application maintenance in collaboration with IT work units.
• Evaluasi/ updating risk register satker dan korporat secara periodik. Periodically evaluate/update the work unit and corporate risk register.
GCG & Compliance
• Pembaharuan dokumen pedoman/kebijakan dan/atau prosedur manajemen risiko, GCG dan compliance sesuai tata kelola dan peraturan yang berlaku. Updates to risk management, GCG and compliance guidelines/policies and/or procedures documents in accordance with applicable governance and regulations.
• Implementasi dan monitoring pencapaian sasaran Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Implementation and monitoring of the achievement of the Anti-Bribery Management System (SMAP) targets.
• Penyusunan Laporan Tata Kelola Terintegrasi Preparation of Integrated Governance Report
• Pendampingan GCG pada Anak dan Afiliasi Perusahaan. GCG Assistance for Company's Subsidiaries and Affiliates.
• Penyiapan dokumen untuk keikutsertaan pada ajang penghargaan terkait GCG&Compliance. Preparation of documents for participation in award events related to GCG & Compliance.
• Pemenuhan kebutuhan data terkait tata kelola perusahaan dan manajemen risiko untuk penyusunan Laporan Keterbukaan Informasi Perubahan Iklim. Fulfillment of data needs related to corporate governance and risk management for the preparation of the Climate Change Information Disclosure Report.
• Pemenuhan aspek governance dan manajemen risiko dalam persiapan menjadi keanggotaan International Council On Mining And Metals (ICMM). Fulfillment of governance and risk management aspects in preparation for membership of the International Council On Mining And Metals (ICMM).
• Review Compliance Tata Kelola Perusahaan sesuai peraturan yang berlaku Corporate Governance Compliance Review according to applicable regulations
• Pelaksanaan GCG Culture Survey. Implementation of GCG Culture Survey.
• GCG Awareness melalui email, banner, dan/atau media lainnya. GCG Awareness through email, banner, and/or other media.
• Enhancement Aplikasi CISEA-GCG bersama satker TI. Enhancement of CISEA-GCG Application with IT work unit.
• Keikutsertaan dalam seminar/workshop GCG. Participation at GCG seminar/workshop.
• Workshop GRC untuk seluruh Anak Afilisasi Perusahaan secara berkala. Regular GRC Workshop for all Company Affiliates.
• Workshop dalam rangka menindaklanjuti hasil Assessment GCG. Workshop to follow up on the results of the GCG Assessment.
• Evaluasi dan Pemenuhan Organ Pengelola Risiko Evaluation and Fulfillment of Risk Management Organs

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Manajemen Risiko

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran Perusahaan yang telah ditetapkan, Manajemen berkomitmen dalam implementasi manajemen risiko di Perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi secara periodik melakukan pembahasan dengan Satuan Kerja Risk Management. Pembahasan yang dilakukan di antaranya mengenai perkembangan isu-isu internal dan eksternal Perusahaan, risiko-risiko utama (*top risk*) yang dihadapi Perusahaan, baik pada level korporasi maupun proyek-proyek strategis Perusahaan, beserta mitigasi-mitigasi yang perlu dilakukan, serta rencana dan realisasi program kerja Manajemen Risiko.

Pada tahun 2024, secara umum Manajemen menilai sistem manajemen risiko di PTBA telah diimplementasikan dengan baik. Hal tersebut di antaranya dibuktikan dengan diperolehnya berbagai penghargaan yang terkait dengan kematangan pengelolaan risiko di Perusahaan. Pada tahun 2024 telah dilakukan penilaian RMI untuk tahun buku 2023 oleh pihak ketiga dengan hasil skor RMI PTBA adalah 3.0 dari skala 5 yang mengindikasikan bahwa penerapan manajemen risiko di PTBA berada pada fase yang baik (*good practice phase*).

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners or Audit Committee on the Adequacy of Risk Management

In order to achieve the Company's predetermined targets, Management is committed to implementing risk management in the Company. The Board of Directors and Board of Commissioners through the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee periodically hold discussions with the Risk Management Work Unit. Discussions include developments in internal and external issues of the Company, the main risks (top risks) faced by the Company, both at the corporate level and the Company's strategic projects, along with needed mitigations as well as plans and realization of the Risk Management work program.

In 2024, Management generally considered the risk management system at PTBA has been implemented well. This is proven by the receipt of various awards related to the maturity of risk management in the Company. In 2024, an RMI assessment was carried out for the 2023 financial year by a third party with the PTBA RMI score of 3.0 on a scale of 5, indicating that the implementation of risk management at PTBA is in a good phase (good practice phase).

Teknologi Informasi

Teknologi Informasi (TI) merupakan salah satu aspek penting yang dibutuhkan Perusahaan dalam usaha pertambangan yang terus berkembang. TI yang efektif, kompeten dan tepat akan mampu mendorong pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan dalam Perusahaan menjadi semakin efektif dan efisien, juga dapat memperkuat posisi kompetitif dalam proses bisnis yang cepat berubah. Keberadaan TI di Perusahaan juga digunakan dalam mendukung digitalisasi proses bisnis perusahaan.

Perusahaan senantiasa melibatkan teknologi terkini untuk dapat menjangkau aset-aset vital, meningkatkan efisiensi dan produksi, serta menekan serendah mungkin dampak buruk aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dalam setiap prosesnya, sehingga memudahkan dan mempercepat proses bisnis, terutama yang berkaitan dengan analisis data dan pelaporan dalam skala korporat.

Information Technology

Information Technology (IT) is one of the important aspects needed by the Company in the ever-growing mining business. Effective, competent, and appropriate IT will be able to drive business management and decision-making in the Company to become more effective and efficient, and can also strengthen the competitive position in rapidly changing business processes. The existence of IT in the Company is also used to support the digitalization of the company's business processes.

The Company always involves the latest technology to be able to reach vital assets, increase efficiency and production, and minimize the negative impact of mining activities on the environment in every process, thus facilitating and accelerating business processes, especially those related to data analysis and reporting on a corporate scale.

Kebijakan Strategis Pengelolaan dan Pengembangan TI

Dalam mendukung penerapan TI di Perusahaan, Bukit Asam telah menyusun dan menetapkan kebijakan

Strategic IT Management and Development Policy

In supporting the implementation of IT in the Company, Bukit Asam has prepared and established a strategic IT

strategis pengelolaan TI dengan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER- 2/MBU/03/2023, yang antara lain berisikan:

1. Penyelarasan program kerja TI dengan kebutuhan satuan kerja dan anak perusahaan;
2. Pembentukan IT *Shared Services* Unit untuk melayani satuan kerja dan anak perusahaan;
3. Optimalisasi teknologi informasi yang ada saat ini dalam sisi integrasi, fungsionalitas, dan tata kelola;
4. Transformasi Digital Operational untuk mendukung Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dalam pengembangan Industri 4.0;
5. Melakukan *Continuous Improvement* sebagai usaha atau upaya berkelanjutan untuk peluang perbaikan.

Satuan Kerja Information Technology

Satuan Kerja Information Technology adalah unit kerja yang akan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengelolaan dan pengembangan TI di PTBA. Satuan kerja ini berada di Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko serta bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Satuan Kerja TI di PTBA memiliki peran untuk mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas serta meminimalisir risiko yang dihadapi perusahaan melalui simplifikasi, digitalisasi, integrasi, dan otomotisasi guna menciptakan nilai tambah di setiap aspek bisnis Perusahaan dan Anak/Afiliasi Perusahaan. Satuan Kerja Teknologi Informasi juga berperan sebagai mitra strategis serta mendukung transformasi pengembangan bisnis Perusahaan untuk menjadi Perusahaan Energi Kelas dunia yang Peduli Lingkungan.

management policy with reference to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023, which includes:

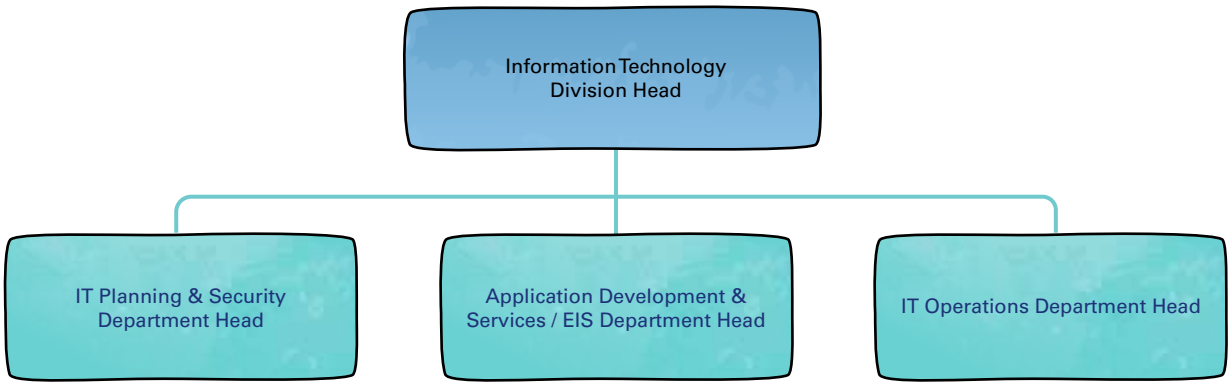
1. Alignment of IT work programs with the needs of work units and subsidiaries;
2. Establishment of an IT Shared Services Unit to serve work units and subsidiaries;
3. Optimization of existing information technology in terms of integration, functionality, and governance;
4. Digital Operational Transformation to support the Company's Long-Term Plan (CLTP) in the development of Industry 4.0;
5. Carrying out Continuous Improvement as an ongoing effort or effort for improvement opportunities.

Information Technology Work Unit

The Information Technology Work Unit is a work unit with the responsibility on all IT management and development activities at PTBA. This work unit is located in the Directorate of Finance and Risk Management and is responsible to the Director of Finance and Risk Management.

The IT Work Unit at PTBA is responsible to support increased productivity, efficiency, and effectiveness and minimize the risks faced by the company through simplification, digitalization, integration, and automation in order to create added value in every aspect of the Company's business and its Subsidiaries/Affiliates. The Information Technology Work Unit also plays a role as a strategic partner and supports the Company's business development transformation to become a World-Class Energy Company that Cares About the Environment.

Struktur Satuan Kerja Information Technology
Structure of Information Technology Work Unit



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di perusahaan, Satuan Kerja TI menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan

In carrying out its duties and functions in the company, the IT Work Unit implements Good Corporate Governance (GCG) as regulated in the Regulation of the Minister of SOEs Number PER02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate

Usaha Milik Negara dengan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujud dan terlaksananya secara konsisten budaya dan sikap kerja yang baik di Perusahaan yang berpedoman pada kaidah-kaidah Tata Kelola Korporasi yang baik (*Good Corporate Governance*) dan Tata Kelola TI yang baik (IT *Governance*).
2. Agar setiap praktik yang berhubungan dengan penggunaan/pemanfaatan Teknologi Informasi mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
3. Agar pelaksanaan Teknologi Informasi dilakukan secara efesien, efektif, transparan, adil, wajar, dan akuntabel untuk mendukung proses bisnis PT Bukit Asam Tbk.
4. Terwujudnya operasional Teknologi Informasi yang efesien dan efektif.
5. Menetapkan prosedur yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan Teknologi Informasi dengan cepat dan tepat.

Visi dan Misi

Visi

Teknologi informasi berperan sebagai mitra strategis dan mendukung transformasi pengembangan bisnis Perusahaan untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan.

Misi

1. Penyelarasan program kerja TI dengan kebutuhan Satuan Kerja
2. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi proses bisnis perusahaan melalui digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi operasional dan informasi.
3. Menetapkan fungsi IT *Shared Service* untuk melayani Satuan Kerja dan Anak Afiliasi Perusahaan (AAP)
4. Melakukan peningkatan dan optimalisasi Arsitektur Teknolgi Informasi berupa solusi bisnis (aplikasi/ digitalisasi), infrastruktur dan jaringan serta keamanan dan tata kelola.

Program Strategis Tahun 2024

Pengembangan dan Layanan Aplikasi
Application Service and Development

Strategi Strategy	Target
Enhancement CISEA App Existing	TW 4 Q4
CISEA New Apps Development	TW 4 Q4

Activities of State-Owned Enterprises with the following objectives:

1. The realization and consistent implementation of a good work culture and attitude in the Company guided by the principles of Good Corporate Governance and Good IT Governance.
2. Every practice related to the use/utilization of Information Technology follows the established procedures.
3. The implementation of Information Technology is carried out efficiently, effectively, transparently, fairly, reasonably, and accountably to support the business processes of PT Bukit Asam Tbk.
4. The realization of efficient and effective Information Technology operations.
5. Establishing the right procedures to resolve Information Technology problems quickly and accurately.

Vision and Mission

Vision

Information technology plays a role as a strategic partner and supports the transformation of the Company's business development to become a world-class energy company that cares about the environment.

Mission

1. Alignment of IT work programs with the needs of the Work Unit
2. Increase the effectiveness and efficiency of the company's business processes through digitalization by utilizing operational and information technology.
3. Establish the IT Shared Service function to serve the Work Unit and the Company's Affiliated Subsidiaries (AAP)
4. Improve and optimize the Information Technology Architecture in the form of business solutions (applications/digitalization), infrastructure and networks, as well as security and governance.

Strategic Program in 2024

Pengembangan dan Layanan Aplikasi
Application Service and Development

Strategi Strategy	Target
APM Implementation	TW 4 Q4
CiSEA Facelift	TW 4 Q4
BATICS Enhancement	TW 4 Q4

Infrastruktur
Infrastructure

Strategi Strategy	Target
Implementasi Core Switch Disaster Recovery Center Implementation Core Switch Disaster Recovery Center	TW 4 Q4
Implementasi Security Operations Center Implementation Security Operations Center	TW 3 Q3
Replacement Core Switch Data Center	TW 3 Q3
Implementasi Multi-Factors Authentication Implementation Multi-Factors Authentication	TW 4 Q4

Tata Kelola TI
IT Governance

Strategi Strategy	Target
Pelaksanaan IT Awareness Webinar Implementation of IT Awareness Webinar	TW 3 Q3
Update Rencana Strategis TI Update on IT Strategic Plans	TW 4 Q4
IT Maturity Assessment	TW 4 Q4
Sertifikasi ISO 20000-1 Certification ISO 20000-1	TW 4 Q4
Pelaksanaan IT Culture Day Implementation of IT Cultural Day	TW 4 Q4
Pelaksanaan IT Awareness Webinar Implementation of IT Awareness Webinar	TW 3 Q3

Tata Kelola Teknologi Informasi

PTBA berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) di Perusahaan secara konsisten. Melalui penerapan Tata Kelola diharapkan aktivitas TI di Perusahaan dapat berjalan maksimal dalam mendukung pencapaian Perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan operasional, permasalahan terkait TI juga menjadi salah satu risiko yang dihadapi oleh Perusahaan, di antaranya permasalahan berkaitan dengan penanganan gangguan (*disruption*), keamanan siber (*cyber security*), dan pemulihan bencana (*disaster recovery*). Adapun penanganan yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap permasalahan tersebut, sebagai berikut:

Information Technology Governance

PTBA is committed to implementing Information Technology (IT) Governance in the Company consistently. Through the implementation of Governance, it is expected that IT activities in the Company can run optimally in supporting the Company's achievements. In carrying out operational activities, IT-related problems are also faced by the Company, including problems related to handling disruptions, cyber security, and disaster recovery. The handling carried out by the Company for these problems is as follows:

1. Penanganan Gangguan (*Disruption*)
   Penanganan gangguan di PTBA menerapkan service desk untuk menyediakan bantuan terkait teknologi informasi bagi seluruh satuan kerja meliputi identifikasi masalah, pencatatan/*logging*, manajemen insiden/masalah, serta evaluasi dan *reporting*. Semua keluhan pengguna berkaitan dengan gangguan layanan TI akan dilaporkan melalui *service desk* untuk dicatat, dieskalasi ke masing-masing PIC/spesialis/administrator untuk ditindaklanjuti sesuai dengan SLA (*Service Level Agreement*) yang telah disepakati.

2. Keamanan Siber (*Cyber Security*)
   Untuk memastikan keamanan siber (*cyber security*) seluruh infrastruktur jaringan PTBA telah dilengkapi dengan teknologi yang canggih untuk mendeteksi serta mencegah terjadinya serangan siber dijaringan PTBA dan terpantau dalam teknologi SIEM (*Security Information and Event Management*), selain itu PTBA juga rutin melakukan *vulnerability assessment and penetration testing* untuk mencari potensi celah keamanan serta cara untuk mengatasi celah keamanan tersebut.
3. Pemulihan Bencana
   Untuk menunjang ketersediaan (*availability*) dan keberlangsungan (*continuity*) layanan TI, Satuan kerja TI telah mengimplementasikan IT *Disaster Recovery Plan* (DRP) yang merupakan bagian dari BCMS sebagai pedoman untuk dapat secara efektif menjaga keberlangsungan layanan TI penunjang proses bisnis kritikal pada kondisi bencana.

Terhadap permasalahan Risiko TI yang akan dihadapi, Perusahaan telah melakukan upaya penanganan dengan cara melakukan identifikasi terhadap risiko utama dan selanjutnya melakukan pengelolaan terhadap risiko yang telah diidentifikasi melalui tindakan-tindakan mitigasi guna menghilangkan atau meminimalisir risiko yang akan terjadi. Keseluruhan proses Tata Kelola TI termasuk penanganan atas permasalahan yang dihadapi, secara berkala dilaporkan kepada Direksi untuk dimonitor dan dievaluasi.

1. Disruption Handling
   Disruption handling at PTBA implements a service desk to provide assistance related to information technology for all work units including problem identification, recording/logging, incident/problem management, and evaluation and reporting. All user complaints related to IT service disruptions will be reported through the service desk to be recorded, escalated to each PIC/specialist/administrator to be followed up in accordance with the agreed SLA (Service Level Agreement).

2. Cyber Security
   To ensure cyber security, all PTBA network infrastructure has been equipped with sophisticated technology to detect and prevent cyber attacks on PTBA networks and is monitored in SIEM (Security Information and Event Management) technology, in addition, PTBA also routinely conducts vulnerability assessments and penetration testing to find potential security gaps and ways to overcome these security gaps.

3. Disaster Recovery
   To support the availability and continuity of IT services, the IT work unit has implemented the IT Disaster Recovery Plan (DRP) which is part of BCMS as a guideline to be able to effectively maintain the continuity of IT services supporting critical business processes in disaster conditions.

Regarding the threat of IT Risk problems, the Company has made efforts to handle them by identifying the main risks and then managing the identified risks through mitigation actions to eliminate or minimize the risks that will occur. The entire IT Governance process, including handling the problems faced, is periodically reported to the Board of Directors for monitoring and evaluation.

Corporate Information System and Enterprise Application (CISEA)



CISEA adalah singkatan dari *Corporate Information System and Enterprise Application* merupakan *Super-Apps* yang dikembangkan secara mandiri oleh PTBA yang digunakan untuk mendukung produktivitas dalam melakukan aktivitas proses bisnis yang terintegrasi dengan semua komponen penyusunnya seperti informasi seputar ke-SDM-an, *supply chain management*, finansial, hingga informasi seputar pegawai. Aplikasi ini mulai dibangun pada bulan Oktober 2019 dan resmi launching pada bulan Maret 2020.

Terdapat 5 Modul utama yang berisi banyak menu/aplikasi yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan hak akses masing-masing pegawai. Aplikasi CISEA tersedia dalam bentuk *web-application* juga dalam bentuk *mobile application* berbasis *Android* maupun iOS.

CISEA stands for Corporate Information System and Enterprise Application, a Super-App independently developed by PTBA to support productivity in carrying out integrated business process activities with all its components such as information about HR, supply chain management, finance, to information about employees. This application was built in October 2019 and officially launched in March 2020.

There are 5 main modules containing menus/applications to accommodate the needs and access rights of each employee. The CISEA application is available in the form of a web application as well as in the form of an Android or iOS-based mobile application.

1. Cisea-Executive Support
   Pada modul ini hanya terdapat satu modul aplikasi yaitu modul EIS (*Executive Information System*) yang menampilkan data Produksi, Angkutan, Penjualan, Keuangan dan SDM secara realtime untuk membantu para executive dalam pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.
2. Cisea-Human Capital
   Kategori Cisea terkait *human capital* memiliki sebanyak 23 modul aplikasi. Adapun beberapa modul utama pada kategori ini antara lain:
   a. Absensi: Modul yang digunakan oleh seluruh pegawai PTBA untuk absensi digital dengan penggunaan deteksi lokasi dan *upload* gambar sebagai *evidence*.
   b. SPBA (Serikat Pekerja Bukit Asam): modul yang digunakan untuk mengakses informasi seputar kegiatan serika pegawai serta berdiskusi.
   c. B-Pedia (Bukit Asam Pedia): modul yang dapat digunakan oleh seluruh pegawai PTBA untuk mengakses informasi dan pengetahuan seputar kesumberdayaan manusia dalam perusahaan berbentuk artikel serta ruang diskusi.
   d. MCU (*Medical Check Up*): modul yang digunakan oleh seluruh pegawai untuk digitalisasi pelaksanaan MCU bagi pegawai dan keluarga seperti penjadwalan dan akses hasil pemeriksaan.
3. Cisea-Supply Chain
   Kategori Cisea terkait rantai pasokan memiliki sebanyak 25 modul aplikasi. Adapun beberapa modul utama pada kategori ini antara lain:
   a. MAPO (*Map Operation*): modul yang digunakan untuk monitoring kondisi operasional aktivitas penambangan dan alat penunjang tambang secara real time melalui tampilan map.
   b. SHE (*Safety, Helath, and Environment*) News: modul untuk akses informasi terupdate seputaran K3 di PTBA.
   c. Angkutan KA: modul yang digunakan untuk reporting dan monitoring proses pengangkutan batu bara, mulai dari pengisian, pembongkaran, dan monitoring integrasi dengan kereta api batu bara KAI.
   d. EPA (*Equipment Performance Analysis*): modul yang digunakan untuk *reporting* dan *monitoring* performa seluruh jenis peralatan penambangan mencakup jam jalan, hambatan, dan ritase yang dilaporkan setiap *shift*.

1. Cisea-Executive Support
   There is only one application module, namely the EIS (Executive Information System) module which displays Production, Transportation, Sales, Finance and HR data in real time to help executives in making decisions quickly and accurately.

2. Cisea-Human Capital
   The Cisea category related to human capital has 23 application modules. Some of the main modules in this category include:
   a. Attendance: A module used by all PTBA employees for digital attendance using location detection and image upload as evidence.
   b. SPBA (Bukit Asam Workers Union): a module used to access information about employee union activities and discussions.
   c. B-Pedia (Bukit Asam Pedia): a module for all PTBA employees to access information and knowledge about human resources in the company in the form of articles and discussion rooms.
   d. MCU (Medical Check Up): a module used by all employees to digitize the implementation of MCU for employees and their families such as scheduling and accessing examination results.
3. Cisea-Supply Chain
   The Cisea category related to the supply chain has 25 application modules. Some of the main modules in this category include:
   a. MAPO (Map Operation): a module used to monitor the operational conditions of mining activities and mining support equipment in real time through a map display.
   b. SHE (Safety, Health, and Environment) News: a module to access the latest information about K3 at PTBA.
   c. Railway Transportation: a module used for reporting and monitoring the coal transportation process, starting from filling, unloading, and monitoring integration with KAI coal trains.
   d. EPA (Equipment Performance Analysis): a module used for reporting and monitoring the performance of all types of mining equipment including road hours, obstacles, and trips reported for each shift.

4. *Cisea-Finance & Accounting*
   Kategori Cisea terkait keuangan dan akuntasi memiliki sebanyak 7 modul aplikasi. Adapun beberapa modul utama pada kategori ini antara lain:
   a. *Budgeting*: modul yang digunakan oleh seluruh satuan kerja di PTBA untuk melakukan pengajuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) mencakup biaya umum dan biaya investasi.
   b. *Royalty*: modul untuk pengelolaan proses pembayaran royalti batu bara mencakup pengajuan draft pembayaran, perhitungan besaran royalti, penerbitan sertfikat, dan upload bukti pembayaran royalti.
5. Cisea-Corporate Services
   Kategori Cisea terkait *corporate services* memiliki sebanyak 21 modul aplikasi. Adapun beberapa modul utama pada kategori ini antara lain:
   a. SPEND: modul untuk mendukung proses bisnis pengadaan mencakup vendor management
   b. AMS (*Audit Management System*): modul manajemen sistem audit yang ada di PTBA mencakup perencanaan, pelaksanaan audit, pemeriksaan, dan laporan akhir.
   c. CISEA Care: modul yang dapat digunakan oleh seluruh ppegawai PTBA sebagai one-stop-services dalam pengajuan layanan umum, layanan Satuan Pengawasan Intern, layanan manajemen risiko, dan layanan optimasi operasi produksi.
   d. ERMA (*Enterprise Risk Management*): modul yang digunakan untuk melapor dan memonitor pengelolaan risiko oleh setiap satuan kerja di PTBA.
   e. GCG (*Good Corporate Governance*): modul untuk internalisasi prinsip-prinsip GCG kepada seluruh pegawai PTBA mencakup informasi sosialisasi dan capaian GCG serta *code of conduct* pegawai.

4. Cisea-Finance & Accounting
   The Cisea category related to finance and accounting has 7 application modules. Some of the main modules in this category include:
   a. Budgeting: a module used by all work units at PTBA to submit the Company's Work Budget Plan (CWPB) including general costs and investment costs.
   b. Royalty: a module for managing the coal royalty payment process including submitting payment drafts, calculating royalty amounts, issuing certificates, and uploading proof of royalty payments.
5. Cisea-Corporate Services
   The Cisea category related to corporate services has 21 application modules. Some of the main modules in this category include:
   a. SPEND: module to support procurement business processes including vendor management
   b. AMS (Audit Management System): audit system management module in PTBA including planning, audit implementation, inspection, and final report.
   c. CISEA Care: module for all PTBA employees as one-stop-services in submitting general services, internal audit unit services, risk management services, and production operation optimization services.
   d. ERMA (Enterprise Risk Management): module used to report and monitor risk management by each work unit in PTBA.
   e. GCG (Good Corporate Governance): module for internalizing GCG principles to all PTBA employees including information on GCG socialization and achievements as well as employee code of conduct.

Digitalisasi Proses Pertambangan Secara Berkesinambungan
Continuous Digitalization of Mining Processes

PERTAMBANGAN MINING



Peta Operasional
Map Operational (MAPO)

Memantau posisi peralatan pertambangan, konveyor, dan kinerja operator secara real time.
Monitoring the position of mining equipment, conveyor and operator performance in real time.



Lingkup Radar Stabilitas
Scope Stability Radar

Mendeteksi setiap perubahan atau pergerakan di permukaan lereng dari waktu ke waktu untuk memastikan keselamatan para penambang
Detect any changes or movement in the slope surface over time to ensure the safety of the miners



Sistem Operasi Tambang
Mine Operation System

Melacak perencanaan, proses dan operasi, termasuk prognosis, manajemen bahan bakar, jarak pengangkutan, dan keberangkatan kereta api
Tracking planning, processes and operations, including prognoses, fuel management, hauling distance, and train departure

TRANSPORT TRANSPORTASI



Supervisory Control & Data Acquisition (SCADA)
Supervisory Control & Data Acquisition (SCADA)

Mengendalikan peralatan utama seperti Belt Conveyor secara otomatis
Controlling key equipment such as Belt Conveyors automatically



Sistem Pelacakan Kargo
Cargo Tracking System

Pemantauan dan pengoptimalan jadwal kereta, perawatan rel, dan manajemen lokomotif secara real-time
Real-time monitoring and optimization of train scheduling, track maintenance and locomotive management



Stasiun Muat Kereta Otomatis
Automatic Train Loading Station (ATLS)

Mendeteksi dan memuat batu bara ke gerbong kereta secara efisien dan aman.
Detect and load coal into the train car efficiently and safety.

PORT PELABUHAN



Fasilitas Penanganan Batu Bara
Coal Handling Facility

Otomatisasi dan analisis data waktu nyata untuk mengoptimalkan penanganan, penyimpanan, dan pengangkutan batu bara.
Automation and real-time data analytics to optimize the handling, storage, and transportation of coal.



Pelacakan Kendaraan
Vessel Track

Memantau pergerakan dan lokasi kapal pengangkut batu bara secara real-time
Monitor the movement and location of coal-carrying vessels in real-time



Sistem Informasi Pelanggan
Customer Information System

Real time informasi tentang produk Ketersediaan, harga, dan informasi penting lainnya bagi pelanggan
Real-time updates on product Availability, pricing, and other important information for customer

PTBA mengadopsi teknologi terkini dan mengintegrasikan antara *operation technology* (OT) dengan information technology (IT) dalam satu *platform* yaitu CISEA. Pemanfaatan OT dalam menunjang operasional tambang dari hulu ke hilir terdiri dari modul MAPO (*Map Operational*), *Slope Stability Radar*, dan *Mine Operation System* pada proses penambangan batu bara, lalu dengan modul SCADA (*Supervisory Control & Data Acquisition*), *Cargo Tracking System*, dan *Automatic Loading Station* untuk transportasi angkutan, serta modul *Coal Handling Facility, Vessel Track,* dan *Customer Information System* untuk proses bisnis batu bara yang terdapat di dermaga dan pelabuhan PTBA.

Pengembangan Kompetensi SDM TI

Satuan Kerja Information Technology berkomitmen untuk senantiasa memberikan manfaat yang maksimal dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Perusahaan.

Untuk menunjang hal tersebut, Perusahaan juga turut meningkatkan kualitas SDM Satuan Kerja Teknologi Informasi dengan mengikutsertakan pada program pengembangan kompetensi. Di mana program tersebut berupa pelatihan yang bersifat teknis maupun untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait perkembangan teknologi terkini.

1. Adapun program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh SDM Satuan Kerja Teknologi Informasi IT Risk Awareness
2. Enterprise Architecture Tools Training
3. IT Security Awareness
4. IT Risk Management
5. *Endpoints Protection Training*
6. IT Service Level Management
7. Upskilling Culture Agent
8. Awareness SMLTI ISO 20000-1 : 2018
9. Training Internal Auditor ISO 20000-1 : 2018
10. Yellow Belt Certification Lean Six Sigma
11. Application Performance Monitoring Training
12. Sertifikasi Comptia A+

Investasi Pengelolaan dan Pengembangan TI

PTBA menyadari bahwa optimalisasi pemanfaatan TI dapat membawa Perusahaan mencapai akselerasi perkembangan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Maka dari itu, Perusahaan senantiasa melakukan investasi di bidang TI, sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan teknologi untuk menciptakan proses bisnis yang lebih efektif, efisien, dan produktif.

PTBA adopts the latest technology and integrates operation technology (OT) with information technology (IT) in one platform, namely CISEA. The use of OT in supporting mining operations from upstream to downstream consists of the MAPO (Map Operational) module, Slope Stability Radar, and Mine Operation System in the coal mining process, then with the SCADA (Supervisory Control & Data Acquisition) module, Cargo Tracking System, and Automatic Loading Station for transportation, as well as the Coal Handling Facility, Vessel Track, and Customer Information System modules for the coal business process at the PTBA dock and port.

IT HR Competency Development

The Information Technology Work Unit is committed to always providing maximum benefits in supporting the achievement of the Company's Vision and Mission.

To support this, the Company also improves the quality of Information Technology Work Unit HR by participating in competency development programs. Where the program is in the form of technical training or to increase knowledge and insight related to the latest technological developments.

1. The competency development program followed by Information Technology Work Unit HR IT Risk Awareness
2. Enterprise Architecture Tools Training
3. IT Security Awareness
4. IT Risk Management
5. Endpoints Protection Training
6. IT Service Level Management
7. Upskilling Culture Agent
8. Awareness SMLTI ISO 20000-1: 2018
9. Internal Auditor Training ISO 20000-1: 2018
10. Yellow Belt Certification Lean Six Sigma
11. Application Performance Monitoring Training
12. Comptia A+ Certification

IT Management and Development Investment

PTBA realizes that optimizing IT utilization can bring the Company to achieve sustainable business development and growth acceleration. Therefore, the Company continues to invest in IT, as a form of the Company's commitment to managing and developing technology to create more effective, efficient, and productive business processes.

Di tahun 2024, Perusahaan telah menganggarkan investasi di bidang TI sebesar Rp10.364.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp9.854.000.000,- atau mencapai 95% dari anggaran yang telah ditetapkan Perusahaan.

In 2024, the Company has budgeted an IT investment of Rp10,364,000,000,- with a realization of Rp9,854,000,000,- or reaching 95% of the budget set by the Company.

Realisasi Biaya Investasi Pengembangan TI Tahun 2024
Realization of IT Development Investment Costs in 2024

No	Uraian Description	Biaya Cost
1	Implementasi Core Switch untuk DRP	Rp6.380.000.000
2	Display Monitoring Informasi	Rp2.809.000.000
3	Interactive Monitor Meeting Room	Rp665.000.000

Pencapaian Tata Kelola TI di Tahun 2024

Salah satu bentuk keberhasilan Perusahaan dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan TI adalah dengan diperolehnya berbagai penghargaan di bidang TI. Di tahun 2024, Perusahaan berhasil memperoleh penghargaan di bidang TI, yakni sebagai berikut:

IT Governance Achievements in 2024

One form of the Company's success in managing and developing IT is by obtaining various awards in the IT field. In 2024, the Company succeeded in obtaining awards in the IT field, namely as follows:

No	Jenis Penghargaan Type of Award	Diberikan Oleh Awarded by	Tahun Year
1	Top Digital Implementation – Level 5 Star	Top Digital Awards	2024
2	Top Leader on Digital Implementation	Top Digital Awards	2024
3	Outstanding Digital Innovation	SWA Magazine	2024
4	Excellence Risk Assessment	Risk Management Award	2024
5	Pengakuan Hak Paten CISEA	KEMENKUMHAM RI	2024

Rencana Pengembangan TI ke Depan
Future IT Development Plans

	2023		2024	2025
PT BUKIT ASAM	Analytics	Implementation of BATIC through data integration from all PTBA Members	BATIC enhancement with What-If scenario and predictive analysis Intelligence	Integrating external information and self-learning autonomous operations through Artificial
	CISEA	CISEA Facelift Assessment	CISEA Facelift Implementation (Phase 1) CISEA Integration with SAP	CISEA Facelift Implementation (Phase 2) CISEA Integration with SAP
	ERP	SAP Assessment	SAP Implementation (Phase 1)	SAP Implementation (Phase 2)
	Operation Technology	Fleet Tracking Management System Mine Water Pump Automation System	Super Map Implementation	Autonomous Mine Operations
	Infrastructure	LTE Network (signal coverage) on Mining Area Assessment	LTE Network (signal coverage) on Mining Implementation	
	Digital Mining Strategy			
	IT & Data Governance / Enterprise Architecture / Development, Security, Operation (DevSecOp) / Private & Hybrid Cloud		Managed Cyber Security Services	IT Infrastructure Automation

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Pada tahun 2024, PTBA tidak memiliki kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja ataupun program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Perusahaan (*Employee Stock Ownership Program/Management Stock Ownership Program*). Namun demikian, perusahaan melakukan investasi sumber daya manusia dengan memberikan beasiswa tugas belajar kepada pegawai perusahaan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM PTBA. Pegawai yang telah menjalani tugas belajar wajib kembali bekerja kepada perusahaan sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam kontrak tugas belajar.

Performance-Based Long-Term Compensation Policy

In 2024, PTBA did not have a performance-based long-term compensation policy or Employee Stock Ownership Program and/or management implemented by the Company (Employee Stock Ownership Program/ Management Stock Ownership Program). However, the company invests in human resources by providing study assignment scholarships to company employees, this aims to improve the quality of PTBA's human resources. Employees who have undergone study assignments are required to return to work for the company in accordance with the provisions of the study assignment contract period.



Perkara Hukum
Lawsuit

Selama tahun 2024, terdapat beberapa perkara penting berkenaan dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perusahaan:

During 2024, there were several important cases regarding legal issues faced by the Company:

Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
State Administrative and Civil Cases

No	Perkara/Kasus Case	Keterangan Singkat Brief Description	Dampak Terhadap Perusahaan Impact on the Company	Konsultan Hukum Law Consultant	Langkah Solutif/ Mitigasi/Rencana Aksi Solution Steps/ Mitigation/ Action Plan
1	Perkara Perdata No. 15/ Pdt.G/LH/2023/PN.Lht Civil Case No. 15/Pdt.G/ LH/2023/PN.Lht	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara LSM Lestari sebagai Penggugat melawan PT Bukit Asam Tbk sebagai Tergugat I dan Kementerian ESDM RI sebagai Tergugat II. Gugatan terkait dengan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan, dengan dalil kerusakan lingkungan akibat tidak dilakukannya kegiatan reklamasi pada objek sengketa yang berada pada IUP MTB PTBA dengan total luas 13,65 Ha. Status saat ini telah ada Putusan Kasasi pada 28 November 2024, yang pada intinya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 19/PDT/2024PT PLG tanggal 3 April 2024 yang membatalkan Putusan Negeri Lahat Nomor 15/Pdt.G/ LH/2023/PN Lht. Unlawful Act Lawsuit between LSM Lestari as Plaintiff against PT Bukit Asam Tbk as Defendant I and the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia as Defendant II. The lawsuit is related to environmental damage due to mining activities, with the argument that environmental damage is due to the failure to carry out reclamation activities on the disputed object located in the PTBA MTB IUP with a total area of 13.65 Ha. The current status is the Cassation Decision on November 28, 2024, which in essence cancels the Palembang High Court Decision Number 19/PDT/2024PT PLG dated April 3, 2024, which cancels the Lahat District Decision Number 15/Pdt.G/LH/2023/PN Lht.	Berpotensi berdampak pada reputasi perusahaan dan adanya kerugian materiil Potential impact on company reputation and material losses	Konsultan Hukum Hardiandyah & Partner dan JPN Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Legal Consultant Hardiandyah & Partner and JPN South Sumatra High Prosecutor's Office.	PTBA sedang melakukan koordinasi dengan JPN Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk melakukan langkah-langkah terbaik untuk PTBA sebagai tindak lanjut atas adanya Putusan Kasasi dimaksud. PTBA is coordinating with the South Sumatra High Prosecutor's Office to take the best steps for PTBA as a follow-up to the Cassation Decision in question.

Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
State Administrative and Civil Cases

No	Perkara/Kasus Case	Keterangan Singkat Brief Description	Dampak Terhadap Perusahaan Impact on the Company	Konsultan Hukum Law Consultant	Langkah Solutif/ Mitigasi/Rencana Aksi Solution Steps/ Mitigation/ Action Plan
2	Perkara Perdata No. 36/ Pdt.G/2023/PN.Mre Civil Case No. 36/ Pdt.G/2023/PN.Mre	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara H. Nadjamudin Hanap bin Hanap sebagai Penggugat melawan PT Bukit Asam Tbk sebagai Tergugat I, Syamsul Komar sebagai Tergugat II, Surahman sebagai Turut Tergugat I, Erwani Binti Dinawi sebagai Turut Tergugat II, dan Suhardi S.H.,M.Kn sebagai Turut Tergugat III. Gugatan terkait klaim lahan milik PTBA yang dibebaskan melalui Syamsul Komar di Desa Penyandingan seluas 40.629,5 m2. Status saat ini sedang dalam Proses Kasasi. Unlawful Act Lawsuit between H. Nadjamudin Hanap bin Hanap as Plaintiff against PT Bukit Asam Tbk as Defendant I, Syamsul Komar as Defendant II, Surahman as Co-Defendant I, Erwani Binti Dinawi as Co-Defendant II, and Suhardi S.H., M.Kn as Co-Defendant III. The lawsuit is related to the claim of land owned by PTBA which was released through Syamsul Komar in Penyandingan Village covering an area of 40,629.5 m2. The current status is in the Cassation Process.	Dalam hal PTBA kalah, PTBA dapat kehilangan hak pemanfaatan atas lahan yang dimiliki. If PTBA loses, PTBA may lose its right to use the land it owns.	Konsultan Hukum Hardiansyah & Partner dan JPN Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Legal Consultant Hardiandyah & Partner and JPN South Sumatra High Prosecutor's Office.	PTBA dan JPN Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berkoordinasi dan melakukan monitoring secara berkala atas Proses Kasasi. PTBA and the South Sumatra High Prosecutor's Office coordinate and periodically monitor the Cassation Process.
3	Perkara TUN No. 152/G/2022/PTUN.PLG State Administrative Case No. 152/G/2022/ PTUN.PLG	Gugatan antara Fajar Firmansyah, SH., Mkn sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai Tergugat dan PT Bukit Asam Tbk sebagai Tergugat II Intervensi. Gugatan terkait pembatalan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 64 Tanggal 10 Juni 2021 surat ukur nomor 1134/ Perajen/2021 tanggal 10 Juni 2021 seluas 31.22 Ha atas nama PTBA yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Status saat ini telah terdapat Putusan Kembali dengan amar putusan menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat sehingga Perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) di mana PTBA merupakan pemilik yang sah atas Objek Perkara. Lawsuit between Fajar Firmansyah, SH., Mkn as Plaintiff against the Head of the Banyuasin Regency Land Office as Defendant and PT Bukit Asam Tbk as Defendant II Intervention. Lawsuit related to the cancellation of the Building Use Rights Certificate Number 64 dated June 10, 2021, measurement letter number 1134/Perajen/2021 dated June 10, 2021, covering an area of 31.22 Ha in the name of PTBA issued by the Banyuasin Regency Land Office. The current status is still in the process of Judicial Review (PK). The current status is the Reconsideration Decision with the verdict rejecting the Review filed by the Plaintiff so this case has permanent legal force (Inkracht) where PTBA is the legal owner of the Object of the Case.	Dalam hal PTBA kalah, PTBA dapat kehilangan hak penguasaannya dan pemanfaatan atas lahan yang dimiliki If PTBA loses, PTBA may lose its rights to control and use the land it owns.	ABMS Law Office	Closed

Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
State Administrative and Civil Cases

No	Perkara/Kasus Case	Keterangan Singkat Brief Description	Dampak Terhadap Perusahaan Impact on the Company	Konsultan Hukum Law Consultant	Langkah Solutif/ Mitigasi/Rencana Aksi Solution Steps/ Mitigation/ Action Plan
4	Perkara Perdata No. 27/ Pdt.G/2024/PN.Mre Civil Case No. 27/ Pdt.G/2024/PN.Mre	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Robert Aritonang sebagai Penggugat I, Polinawaty S sebagai Penggugat II melawan PT Bukit AsaM Tbk sebagai Tergugat I dan PT Bumi Sawindo Permai sebagai Tergugat II. Gugatan terkait klaim Lahan seluas 66,72 Ha di Desa Darmo, Lawang Kidul, Muara Enim. Status saat ini masih dalam Proses Persidangan Tingkat Pertama. Unlawful Act Lawsuit between Robert Aritonang as Plaintiff I, Polinawaty S as Plaintiff II against PT Bukit AsaM Tbk as Defendant I and PT Bumi Sawindo Permai as Defendant II. Lawsuit related to land claim of 66.72 Ha in Darmo Village, Lawang Kidul, Muara Enim. Current status is still in the First Level Trial Process.	Dalam hal PTBA kalah, PTBA dapat kehilangan hak pemanfaatan atas lahan yang dimiliki. If PTBA loses, PTBA may lose its right to use the land it owns.	JPN Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan JPN South Sumatra High Prosecutor's Office	1. Untuk saat ini, PTBA sedang melakukan koordinasi dengan JPN Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terkait dengan penyusunan Draft Jawaban. 2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja untuk mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan serta menyiapkan saksi-saksi yang akan dihadirkan untuk memperkuat fakta bahwa PTBA adalah pemilik lahan yang sah. 1. Currently, PTBA is coordinating with the South Sumatra High Prosecutor's Office regarding the preparation of the Draft Response. 2. Coordinating with the Work Unit to collect the necessary supporting documents and prepare witnesses to be presented to strengthen the fact that PTBA is the legitimate land owner.

Sengketa Perpajakan
Tax Dispute

No	Jenis Pajak Type of Tax	Kantor Pelayanan Pajak Tax Office	Tahun Year	Status	Pemohon Gugatan/ Banding/ Keberatan/PK Petitioner of Lawsuit/ Appeal/ Objection/ Judicial Review	Termohon Gugatan/ Banding/ Keberatan/ PK Respondent of Lawsuit/ Appeal/ Objection/ Judicial Review
1	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2007	Peninjauan Kembali Judicial Review	DJP	PTBA
2	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2011	Peninjauan Kembali Judicial Review	PTBA	DJP
3	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2012	Peninjauan Kembali Judicial Review	PTBA	DJP
4	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2012	Peninjauan Kembali Judicial Review	DJP	PTBA
5	PBB Land and Building Tax	Lahat	2012	Peninjauan Kembali Judicial Review	PTBA	DJP
6	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2015	Selesai Peninjauan Kembali Completed Review	DJP	PTBA
7	PBB Land and Building Tax	Lahat	2015	Selesai Peninjauan Kembali Completed Review	DJP	PTBA
8	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2019	Banding Appeal	PTBA	DJP
9	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2019	Banding Appeal	PTBA	DJP
10	PBB Land and Building Tax	Lahat	2019	Banding Appeal	PTBA	DJP
11	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2023	Keberatan Objection	PTBA	DJP
12	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2023	Keberatan Objection	PTBA	DJP
13	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2023	Keberatan Objection	PTBA	DJP
14	PBB Land and Building Tax	Lahat	2023	Keberatan Objection	PTBA	DJP
15	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2024	Selesai Keberatan Final Objection	PTBA	DJP
16	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2024	Selesai Keberatan Final Objection	PTBA	DJP
17	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2024	Selesai Keberatan Final Objection	PTBA	DJP
18	PBB Land and Building Tax	Lahat	2024	Selesai Keberatan Final Objection	PTBA	DJP
19	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2024	Selesai Keberatan Final Objection	PTBA	DJP
20	PPh 23 Income Tax 23	Prabumulih	2011	Peninjuan Kembali Judicial Review	PTBA	DJP
21	SKPLB PPh Badan Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB)	LTO 3	2016	Selesai Peninjuan Kembali Completed Review	DJP	PTBA
22	SKPKB PPh Badan Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB)	LTO 3	2017	Banding Appeal	PTBA	DJP
23	SKPKB PPh Badan Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB)	LTO 3	2020	Keberatan Objection	PTBA	DJP

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu terhitung sejak awal tahun 2022 sampai dengan akhir tahun 2024, Perusahaan tidak pernah memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi berkaitan dengan pajak maupun sengketa pajak.

Sanksi Administratif

Sepanjang tahun 2024, baik Perusahaan maupun anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak pernah mendapatkan sanksi administratif, termasuk sanksi administratif yang bersifat material yang dikenakan oleh regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting (*material event*). Perusahaan juga tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran atau belum mematuhi peraturan dan peraturan pencatatan selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan.

Ketidakpatuhan Terhadap Hukum, Aturan Dan Peraturan Berkaitan Dengan Pihak Berelasi

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Perusahaan tidak pernah melakukan pelanggaran berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan, dan peraturan berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material.

Pelanggaran Hukum Terkait Perburuhan, Ketenagakerjaan, Konsumen, Kepailitan, Komersial, Persaingan atau Lingkungan

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum apapun ataupun terlibat kasus yang berkaitan dengan masalah perburuhan, ketenagakerjaan, konsumen, kepailitan, komersial, persaingan ataupun lingkungan.

In the last 3 (three) years, namely from the beginning of 2022 to the end of 2024, the Company has never received a guilty verdict from the highest tax court regarding taxes or tax disputes.

Administrative Sanctions

Throughout 2024, neither the Company nor members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors have ever received any administrative sanctions, including material administrative sanctions imposed by regulators for not making announcements within the specified time period for important events (material events). The Company has also never been proven to have violated or not complied with the rules and regulations for the past year other than disclosure rules.

Non-Compliance with Laws, Rules and Regulations Relating to Related Parties

During the last 3 (three) years, the Company has never committed any violations related to non-compliance with laws, rules and regulations relating to significant or material related party transactions.

Violations of Labor, Employment, Consumer, Bankruptcy, Commercial, Competition or Environmental Laws

Throughout 2024, the Company has never committed any violations of the law or been involved in any cases related to labor, employment, consumer, bankruptcy, commercial, competition or environmental issues.

Kebijakan Pengungkapan Informasi
Information Disclosure Policy



Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berkewajiban untuk melaporkan kepemilikan atas saham Perusahaan, termasuk setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

Kewajiban pelaporan merupakan bagian dari Pengungkapan Informasi, yang pengaturannya secara internal Perusahaan diatur dalam Pedoman Kerja Direksi dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris.

Pelaksanaan atas kebijakan Pengungkapan Informasi diwujudkan melalui kepatuhan Perusahaan dalam melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan mengungkapkannya dalam Laporan Tahunan maupun *website* resmi Perusahaan. Pengungkapan informasi berkenaan dengan kepemilikan saham Perusahaan oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat di bagian Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are required to report ownership of the Company's shares, including any changes in ownership of the Company's shares, either directly or indirectly, to the Financial Services Authority (OJK). This obligation is regulated in Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.04/2017 concerning Ownership Reports or Any Changes in Ownership of Shares of Public Companies.

The reporting obligation is part of the Information Disclosure, the regulation of which is regulated internally by the Company in the Board of Directors Work Guidelines and the Board of Commissioners Work Guidelines.

The implementation of the Information Disclosure policy is realized through the Company's compliance in reporting ownership and any changes in ownership of the Company's shares by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, by disclosing it in the Annual Report or the Company's official website. Disclosure of information regarding ownership of the Company's shares by Members of the Board of Commissioners and Board of Directors can be seen in the Company's Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors section in the Company Profile Chapter in this Annual Report book.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access Company Information and Data

Komitmen penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik salah satunya diwujudkan oleh Bukit Asam melalui keterbukaan informasi. Perusahaan memberikan informasi untuk publik dan pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang pelaksanaannya di Perusahaan dikelola oleh Sekretaris Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keterbukaan informasi bagi publik dapat diakses melalui situs web Perusahaan pada alamat *website* www.ptba.co.id, dan atas informasi serta data perusahaan pada *website*, disediakan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sementara, penyediaan informasi bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan, dapat lebih lanjut diakses melalui beberapa cara, antara lain melalui:

Kantor

Alamat Kantor : Jl. Parigi No.1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan, Indonesia, 31716
Telepon : +62 734 451096, 452352
Fax : +62 734 451095, 452993
Email : corsec@bukitasam.co.id

Media Sosial

Facebook : PT Bukit Asam Tbk
X : @BukitAsamPTBA
Instagram : bukitasamptba
YouTube : PT Bukit Asam Tbk

Laporan-Laporan

Sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan agar mengetahui kondisi Perusahaan, terhadap laporan-laporan yang dibuat oleh Perusahaan, dipublikasikan pada website Perusahaan. Laporan Perusahaan yang dapat diakses melalui *website* antara lain, Laporan Audit Keuangan, Laporan Keuangan Triwulan, Ikhtisar Keuangan, Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan PKBL. Perusahaan juga menyampaikan Laporan Tahunan yang telah dibuat kepada regulator sebagai pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The commitment to implementing the principles of Good Corporate Governance is realized by Bukit Asam through information disclosure. The Company provides information to the public and shareholders as stipulated in Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, the implementation of which in the Company is managed by the Corporate Secretary in accordance with applicable provisions.

Public disclosure of information can be accessed through the Company's website at the website address www.ptba.co.id, and the company's information and data on the website are provided in two languages, namely Indonesian and English. Meanwhile, the provision of information for Shareholders and stakeholders can be further accessed through several ways, including:

Office

Office Address : Jl. Parigi No.1, Tanjung Enim, Muara Enim, South Sumatra, Indonesia, 31716
Telephone : +62 734 451096, 452352
Fax : +62 734 451095, 452993
Email : corsec@bukitasam.co.id

Social Media

Facebook : PT Bukit Asam Tbk
X : @BukitAsamPTBA
Instagram : bukitasamptba
YouTube : PT Bukit Asam Tbk

Reports

As a form of information disclosure to stakeholders to understand the condition of the Company, reports made by the Company are published on the Company's website. Company reports that can be accessed through the website include, Financial Audit Reports, Quarterly Financial Reports, Financial Summary, Annual Reports, Sustainability Reports, and PKBL Reports. The Company also submits the Annual Report that has been made to the regulator as a fulfillment of obligations based on applicable laws and regulations.

Siaran Pers

Perusahaan memanfaatkan media massa sebagai mitra untuk menyebarluaskan informasi tentang Perusahaan kepada masyarakat luas. Pada tahun 2024, PTBA telah menyampaikan sebanyak sebanyak 147 siaran pers.

Aktivitas Hubungan Investor

Perusahaan memberikan informasi melalui aktivitas yang berkaitan dengan Hubungan Investor. Penyediaan informasi ini merupakan penghubung Perusahaan dengan komunitas pasar modal dan pihak eksternal lain, sehingga para pemegang saham, calon investor, dan masyarakat luas mendapatkan informasi terkini mengenai Perusahaan.

Press Releases

The Company utilizes mass media as a partner to disseminate information about the Company to the wider community. In 2024, PTBA has published as many as 147 press releases.

Investor Relations Activities

The Company provides information through activities related to Investor Relations. The provision of this information connects the Company and the capital market community and other external parties, in order to accommodate shareholders, potential investors, and the wider community to get the latest information about the Company.

Kode Etik
Code of Conducts

Perusahaan memiliki pedoman Kode Etik yang mengatur nilai-nilai etis dan standar perilaku yang harus dipedomani oleh Insan PTBA. Pedoman Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 dan No. 277/0100/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Prilaku dan Etika Bisnis PT Bukit Asam Tbk (*Code of Conduct*). Pedoman memuat pengaturan 2 (dua) aspek mendasar dalam perilaku, yakni Etika Bisnis dan Etika Perilaku Individu sebagai standar perilaku bagi setiap Insan Perusahaan.

Pedoman Kode Etik diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis antara kepentingan operasi dan bisnis yang dilakukan Perusahaan dengan kepentingan dari setiap pemangku kepentingan yang berada dalam lingkaran operasi dan bisnis Perusahaan, maupun yang terkena dampak kegiatan operasi dan bisnis Perusahaan.

Pokok-Pokok Kode Etik

Etika Bisnis

Etika Bisnis Perusahaan memiliki aspek kritis terhadap jalannya operasional Perusahaan, mencakup:
1. Target yang harus dicapai oleh jajaran Manajemen dan pegawai;
2. Pengendalian internal Perusahaan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

The Company has a Code of Ethics guideline to regulate ethical values and standards of behavior that must be adhered to by PTBA Personnel. The Code of Ethics Guidelines are stipulated by Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 and No. 277/0100/2023 dated December 29, 2023 concerning the Guidelines for Business Conduct and Ethics of PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct). The guidelines contain regulations on 2 (two) fundamental aspects of behavior, namely Business Ethics and Individual Behavioral Ethics as standards of behavior for every Company Personnel.

The Code of Ethics Guidelines are expected to build a harmonious relationship between the interests of the Company's operations and businesses with the interests of each stakeholder within the Company's operational and business circles, as well as those affected by the Company's operational and business activities.

Code of Ethics Principles

Business Ethics

The Company's Business Ethics have critical aspects to the Company's operational processes, including:
1. Targets to be achieved by Management and employees;
2. Internal control of the Company;
3. Compliance with laws and regulations;

4. Pemberian donasi;
5. Pemberian dan penerimaan hadiah;
6. Lingkungan;
7. Ketenagakerjaan;
8. Etika hubungan dengan pemangku kepentingan;
9. Pemberian kesempatan yang sama untuk menjadi rekanan Perusahaan;
10. Hak atas kekayaan intelektual;
11. Transaksi afiliasi.

Etika Perilaku Individu

Etika perilaku yang harus dipenuhi oleh Insan Perusahaan, meliputi:
1. Integritas dan komitmen;
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Kerahasiaan informasi;
4. Benturan kepentingan;
5. Transaksi orang dalam;
6. Manajemen risiko;
7. Menjaga mutu, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja serta keamanan Perusahaan;
8. Citra Perusahaan;
9. Keterlibatan dalam aktivitas politik;
10. Pemberian dan penerimaan hadiah;
11. Perlindungan dan penggunaan aset Perusahaan secara efisien;
12. Pencatatan data, pelaporan, dan dokumentasi;
13. Perilaku etis terhadap sesama pegawai;
14. Penggunaan media sosial.

Tujuan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis

Tujuan pedoman Kode Etik Perusahaan terbagi atas 2 (dua) yaitu Makro dan Mikro, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Makro

Mengembangkan standar etika bisnis terbaik yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG di bidang energi berbasis batu bara sehingga mendorong terciptanya budaya Perusahaan maupun yang diharapkan, baik yang secara langsung meningkatkan nilai Perusahaan.

Mikro

1. Menjabarkan nilai-nilai Perusahaan sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh seluruh jajaran Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari.
2. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara Pelanggan, Mitra Kerja, jajaran Perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya dengan Perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip korporasi dan etika bisnis yang sehat.

4. Donation;
5. Giving and receiving gifts;
6. Environment;
7. Employment;
8. Stakeholder relationship ethics;
9. Providing equal opportunities to become partners of the Company;
10. Intellectual property rights;
11. Affiliate transactions.

Individual Behavioral Ethics

The behavioral ethics mandatory to be fulfilled by Company Personnel include:
1. Integrity and commitment;
2. Compliance with laws and regulations;
3. Confidentiality of information;
4. Conflict of interest;
5. Insider transactions;
6. Risk management;
7. Maintaining quality, environment, health and safety at work and Company security;
8. Company image;
9. Involvement in political activities;
10. Giving and receiving gifts;
11. Protection and efficient use of Company assets;
12. Data recording, reporting, and documentation;
13. Ethical behavior towards fellow employees;
14. Use of social media.

Objectives of the Code of Conduct and Business Ethics

The objectives of the Company's Code of Ethics guidelines are divided into 2 (two), namely Macro and Micro, which can be described as follows:

Macro

Developing the best business ethics standards that are in line with GCG principles in the coal-based energy sector to encourage the creation of a Company culture or the expectation both of which directly increase the Company's value.

Micro

1. Outlining the Company's values as the basis for ethics that must be followed by all levels of the Company in carrying out daily operational activities.
2. Developing harmonious, synergistic and mutually beneficial relationships between Customers, Work Partners, Company ranks and other stakeholders with the Company based on corporate principles and healthy business ethics.

Manfaat Penerapan Kode Etik

Manfaat yang diperoleh dari penerapan Kode Etik, sebagai berikut:

1. Perusahaan
   a. Mendorong kegiatan operasional Perusahaan agar lebih efisien dan efektif;
   b. Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para *stakeholders* dalam berhubungan dengan Perusahaan sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.
2. Pemegang Saham Menambah keyakinan bahwa Perusahaan dikelola secara amanah (*duty of loyalty*) dan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*duty of care*), efisien, transparan, akuntabel, dan adil untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.
3. Jajaran Perusahaan
   a. Memberikan pedoman kepada setiap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pegawai tentang perilaku yang diinginkan atau yang dilarang oleh Perusahaan.
   b. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika, dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pegawai secara menyeluruh.
4. Masyarakat dan Pihak lain yang Terkait Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Perusahaan, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan ekonomi sosial bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait.

Pengungkapan Kepatuhan bahwa Kode Etik Berlaku bagi Seluruh Level Organisasi

Pedoman Kode Etik berlaku bagi seluruh Insan Perusahaan pada semua level organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan Perusahaan, termasuk yang berada pada entitas anak. Pedoman Kode Etik wajib dibaca dan dipahami isinya, serta terhadap lembar pernyataan kepatuhan atas Pedoman Kode Etik, wajib untuk ditandatangani.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Sosialisasi kode etik Perusahaan diselenggarakan oleh Satuan Kerja Sistem Manajemen dan Kinerja Perusahaan dan, Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai penanggung jawab implementasi GCG, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Sumber Daya Manusia Operasional (SDMO).

Benefits of Implementing the Code of Ethics

The benefits obtained from implementing the Code of Ethics are as follows:

1. 1. Company
   a. Encourage the Company's operational activities to be more efficient and effective;
   b. Increase the Company's value by providing certainty and protection to stakeholders in their relationships with the Company, resulting in a good reputation, which ultimately results in long-term business success.
2. Shareholders Increase confidence that the Company is managed in a trustworthy manner (duty of loyalty) and based on the principle of prudence (duty of care), efficiency, transparency, accountability, and fairness to achieve the level of profitability expected by Shareholders while still considering the interests of the Company.
3. Company Ranks
   a. Provide guidelines to each member of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Employees regarding behavior that is desired or prohibited by the Company.
   b. Create a work environment that upholds the values of honesty, ethics, and openness to improve the performance and productivity of members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Employees as a whole.
4. Community and other related parties Create harmonious and mutually beneficial relationships with the Company, which will ultimately create social economic welfare for the community and other related parties.

Disclosure of Compliance that the Code of Ethics Applies to All Levels of the Organization

The Code of Ethics Guidelines apply to all Company Personnel at all levels of the organization, starting from the Board of Commissioners, Directors, Company Employees, including those in subsidiaries. The Code of Ethics Guidelines must be read and understood, and the statement sheet of compliance with the Code of Ethics Guidelines must be signed.

Socialization and Dissemination of the Code of Ethics

The socialization of the Company's code of ethics is organized by the Company's Management System and Performance Work Unit and the Risk Management Work Unit as the party responsible for GCG implementation, in coordination with the Operational Human Resources Work Unit (SDMO).

Sosialisasi kode etik atau *code of conduct* dilakukan setiap triwulan, yang dilaksanakan melalui *email* perusahaan maupun melalui aplikasi CISEA GSG. Selain itu, di tahun 2024 sosialisasi Kode Etik juga dilaksanakan dengan mendistribusikan buku Pedoman Kode Etik kepada seluruh pegawai PTBA. Seluruh pegawai PTBA telah melakukan pengisian pakta integritas COC melalui aplikasi CISEA GCG, dengan status 100% untuk periode penyampaian tahun 2024.

Upaya Penegakan Kode Etik dan Pengaduan Pelanggaran

Upaya penegakan Kode Etik di PTBA dilakukan melalui:

1. Pengisian Pakta Integritas;
2. Sosialisasi Pedoman Kode Etik dan Kebijakan lain yang terkait;
3. Penegakan dan implementasi secara efektif terhadap Kebijakan lain yang mendukung penerapan Kode Etik; dan
4. Tindak lanjut terhadap Laporan Pengaduan Pelanggaran.

Dalam mendukung penegakan Kode Etik, Perusahaan menyediakan sarana/media pelaporan pelanggaran terhadap Kode Etik. Adapun mekanisme pelaporan pelanggaran Kode Etik dapat dilakukan melalui:

1. Mekanisme pelaporan pelanggaran internal yang dikelola secara internal organisasi Perusahaan;
2. Mekanisme dan ketentuan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) yang telah dimiliki dan dikembangkan Perusahaan, yang memberikan kerahasiaan bagi pelapor.

Jenis Sanksi untuk Masing-Masing Jenis Pelanggaran yang Diatur dalam Kode Etik (Normatif)

Pelanggaran terhadap Kode Etik yang dilakukan oleh Insan PTBA akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama. Sedangkan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pelanggan dan mitra kerja, akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik beserta Sanksi yang Diberikan pada Tahun Buku

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat pelanggaran Kode Etik maupun penjatuhan sanksi atas pelanggaran Kode Etik di PTBA, hal ini menunjukan bahwa Insan PTBA memahami pentingnya berperilaku baik selaras dengan Kode Etik yang berlaku.

Socialization of the code of ethics or code of conduct is carried out every quarter, which is carried out via company email or through the CISEA GSG application. In addition, in 2024, socialization of the Code of Ethics was also carried out by distributing the Code of Ethics Guidelines book to all PTBA employees. All PTBA employees have filled out the COC integrity pact through the CISEA GCG application, with a status of 100% for the 2024 submission period.

Code of Ethics Enforcement Efforts and Violation Complaints

Efforts to enforce the Code of Ethics at PTBA are carried out through:

1. Completing the Integrity Pact;
2. Socialization of the Code of Ethics Guidelines and other related Policies;
3. Effective enforcement and implementation of other Policies that support the implementation of the Code of Ethics; and
4. Follow-up on Violation Complaint Reports.

In supporting the enforcement of the Code of Ethics, the Company provides facilities/media for reporting violations of the Code of Ethics. The mechanism for reporting violations of the Code of Ethics can be carried out through:

1. Internal violation reporting mechanisms managed internally by the Company's organization;
2. Mechanisms and provisions of the Violation Reporting System or Whistleblowing System (WBS) that has been owned and developed by the Company, which provides confidentiality for the whistleblower.

Types of Sanctions for Each Type of Violation Regulated in the Code of Ethics (Normative)

Violations of the Code of Ethics committed by PTBA Personnel will be given sanctions in accordance with the rules and regulations applicable in the Company based on the provisions of the Joint Work Agreement. Meanwhile, violations of the Code of Ethics committed by customers and work partners will be given in accordance with the provisions stated in the contract.

Number of Code of Ethics Violations and Sanctions Imposed in the Fiscal Year

Throughout 2024, there were no violations of the Code of Ethics or sanctions imposed for violations of the Code of Ethics at PTBA, this shows that PTBA personnel understand the importance of behaving well in line with the applicable Code of Ethics.

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

Dalam mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PTBA menyediakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau dikenal dengan *Whistleblowing System* (WBS). SPP merupakan sistem yang mengelola pengaduan pelanggaran, yang memungkinkan Insan Perusahaan atau siapapun untuk melaporkan indikasi penyimpangan yang terjadi di PTBA, dengan tetap mengutamakan perlindungan dan kerahasiaan identitas pelapor.

Perusahaan menetapkan SPP terbaru melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk Nomor: 05/SK/DEKOM-PTBA/VII/2024 dan Nomor: 080C/0100/2024 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran PT Bukit Asam Tbk (Whistleblowing System) Tanggal 30 Juni 2024 atas penyempurnaan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi No. 06/DEKOM/VIII/2020 dan No. 395/0100/2020 tanggal 31 Agustus 2020 mengenai Pengesahan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP). Pada sistem baru yang diterapkan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, pengelolaan WBS PTBA dilakukan oleh pihak independen. Adapun tujuan dari implementasi SPP di Perusahaan, yaitu:

1. Deteksi dini (peringatan dini) dari masalah yang mungkin disebabkan dari pelanggaran;
2. Mengurangi risiko yang dihadapi oleh Perusahaan, akibat dari pelanggaran dari segi keuangan, operasional, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi;
3. Memberikan masukan kepada Perusahaan untuk memiliki perspektif dan proses kerja kritis yang lebih luas yang memiliki kelemahan pengendalian internal dan merencanakan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Jenis Pelanggaran

Jenis-jenis pelanggaran yang tercakup dan dapat dilaporkan melalui SPP meliputi:

In supporting the implementation of Good Corporate Governance, PTBA provides a Violation Reporting System (SPP) or known as the Whistleblowing System (WBS). SPP is a system that manages complaints of violations, which allows Company Personnel or anyone to report indications of irregularities that occur at PTBA, while still prioritizing the protection and confidentiality of the reporter's identity.

The Company has established the latest SPP through a Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk Number: 05/SK/DEKOM-PTBA/VII/2024 and Number: 080C/0100/2024 concerning the Guidelines for the Violation Reporting System of PT Bukit Asam Tbk (Whistleblowing System) dated June 30, 2024, regarding the improvement of the Decree of the Board of Commissioners and Directors No. 06/DEKOM/VIII/2020 and No. 395/0100/2020 dated August 31, 2020, concerning the Ratification of the Violation Reporting System Guidelines (SPP). In the new system implemented, in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, the management of PTBA's WBS is carried out by an independent party. The objectives of implementing SPP in the Company are:

1. Early detection (early warning) of problems that may be caused by violations;
2. Reducing the risks faced by the Company, due to violations in terms of finance, operations, law, work safety, and reputation;
3. Providing input to the Company to have a broader perspective and critical work processes that have weaknesses in internal control and planning the necessary corrective actions.

Types of Violation

The types of violations covered and reportable through the SPP include:



Korupsi dan Penyuapan
Corruption and Bribery

Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

The act of enriching oneself or another person or a corporation that is detrimental to state finances or the state economy.



Kecurangan
(Fraud)

Kategori ini terdiri dari :
1. Pemalsuan, manipulasi, atau penghancuran laporan keuangan atau laporan lainnya;
2. Benturan kepentingan dan Gratifikasi
3. Lain-lain: Penyalahgunaan aset, pencurian asset perusahaan, dan/ atau pembiaran suatu pelanggaran;

This category consists of:
1. Falsification, manipulation, or destruction of financial reports or other reports;
2. Conflict of interest and Gratification
3. Others: Misappropriation of assets, theft of company assets, and/or condoning a violation;



Tindak Pidana Lainnya
Other Criminal Acts

Kategori ini terdiri dari :
1. Pemerasan
2. Pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman

This category consists of:
1. Extortion
2. Coercion by violence or threats



Pelanggaran dalam Lingkungan kerja
Violations in the Work Environment

Kategori ini terdiri dari:
1. Segala perbuatan yang menyebabkan situasi kerja tidak kondusif
2. Pelecehan seksual, perundungan (*bullying*) dan pencemaran nama baik
3. Diskriminasi gender dan SARA

This category consists of:
1. Any act that causes a non-conducive work situation
2. Sexual harassment, bullying and defamation
3. Discrimination on Gender and Ethnicity, Religion, Race, and Intergroup



Laporan lainnya
Other Reporting

Kategori ini terdiri dari :
1. Pelanggaran Kode etik perusahaan
2. Pelanggaran Kerahasiaan (kebocoran informasi)
3. Keberpihakan kepada salah satu pihak (*unfair*) dan bersikap tidak objektif dalam menjalankan keputusan Perusahaan
4. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

This category consists of:
1. Violation of the Company's Code of Ethics
2. Violation of Confidentiality (information leaks)
3. Bias towards one party (unfair) and being non-objective in implementing Company decisions
4. Environmental pollution and/or destruction

Saluran Pengaduan

Pelaporan Pelanggaran dapat disampaikan kepada Perusahaan melalui media yang telah disediakan, yaitu:
Website : http://www.ptba.co.id
Email : spp@bukitasam.co.id
Telepon : +62 21 527 4635

Di masa transisi mulai bulan November 2024 saluran pengaduan pelanggaran untuk seluruh Group MIND ID melalui saluran WBS OpenMIND yang dikelola oleh konsultan KPMG dengan jalur melalui:

Reporting Channel

Reporting of Violations can be submitted to the Company through the media provided, namely:
Website : http://www.ptba.co.id
Email : spp@bukitasam.co.id
Telephone : +62 21 527 4635

During the transition period starting in November 2024, the complaint channel for violations for the entire MIND ID Group is through the WBS OpenMIND channel managed by KPMG consultants via:

Website	OpenMind-wbs.com
Email	OpenMIND@kpmg.co.id
Whatsapp	0811-1464-632 / 0811-646-343
Postmail	PT KPMG Siddharta Advisory
Att	KPMG EthicsLine (MIND ID) Menara Astra Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, Jakarta 10220

Struktur Pengelola WBS dan Tugas Tanggung Jawab

WBS Management Structure and Duties and Responsibilities

Pihak Ketiga Independen: 1. Menerima laporan dari saluran pelaporan dan melakukan konfirmasi kepada pelapor 2. Melakukan analisis kecukupan awal 3. Menyampaikan laporan analisis awal, usulan, dan dokumen pendukung lainnya ke Tim Pengelola WBS 4. Melaporkan jumlah, kategori dan status pelaporan setiap bulan kepada Tim Pengelola WBS dalam bentuk ringkasan 5. Menjaga kerahasiaan dan memberikan perlindungan bagi pelapor 6. Menyampaikan status (termasuk hasil) laporan kepada pelapor Independent Third Party: 1. Receives reports from reporting channels and confirms with the reporter 2. Conducts initial adequacy analysis 3. Delivers initial analysis reports, proposals, and other supporting documents to the WBS Management Team 4. Reports the number, categories, and status of reports every month to the WBS Management Team in summary form 5. Maintains confidentiality and provides protection for the reporter 6. Delivers the status (including results) of the report to the reporter	Tim Pengelola WBS: 1. Menerima laporan analisis awal dan memutuskan tindak lanjut laporan 2. Melakukan konfirmasi tambahan kepada Pelapor melalui Pihak Ketiga Independen 3. Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi atas penerapan WBS 4. Menjaga kerahasiaan dan memberikan perlindungan bagi pelapor 5. Memantau status laporan secara berkala 6. Koordinasi aktif dengan Pihak Ketiga Independen mengenai status laporan, efektivitas penerimaan, dan pengelolaan WBS 7. Memantau efektivitas WBS dan melakukan perbaikan berkelanjutan WBS Management Team: 1. Receives initial analysis report and decides on follow-up action for the report 2. Conducts additional confirmation to the Reporter through an Independent Third Party 3. Conducts training and socialization on the implementation of WBS 4. Maintains confidentiality and provides protection for the reporter 5. Monitors report status periodically 6. Actively coordinates with Independent Third Parties regarding report status, effectiveness of receipt, and management of WBS 7. Monitors WBS effectiveness and makes continuous improvements
	Tim Investigasi: 1. Melaksanakan proses tindak lanjut secara objektif dan berintegritas 2. Menjaga kerahasiaan dan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak terkait Investigation Team: 1. Carry out the follow-up process objectively and with integrity 2. Maintain confidentiality and provide protection for related parties
	Dewan Pengawas: 1. Mengawasi dan memastikan WBS berjalan dengan sesuai 2. Menjaga kerahasiaan dan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang membantu proses investigasi, termasuk pelapor Supervisory Board: 1. Supervise and ensure WBS runs properly 2. Maintain confidentiality and provide protection for parties who assist in the investigation process, including the reporter

Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran

Mekanisme penyampaian pengaduan dan penanganan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk Nomor : 05/SK/DEKOM-PTBA/VII/2024 dan Nomor: 080C/0100/2024 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran PT Bukit Asam Tbk (*Whistleblowing System*) Tanggal 30 Juni 2024 merupakan penyempurnaan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No 06/DEKOM/VIII/2020 dan No 395/0100/2020 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistle blowing system)* PT Bukit Asam Tbk. Pedoman Pelaporan Pelanggaran mengatur hal-hal pokok mengenai mekanisme Pelaporan, meliputi:

1. Informasi dan cara Pelaporan Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui SPP/WBS;
2. Pengelolaan Pelaporan;
3. Perlindungan Pelapor;
4. Tindak lanjut atas Laporan termasuk aturan sanksi yang diterapkan.

Mechanism for Submitting Violation Reports

The mechanism for submitting complaints and handling complaints is carried out in accordance with the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk Number: 05/SK/DEKOM-PTBA/VII/2024 and Number: 080C/0100/2024 concerning the Guidelines for the Violation Reporting System of PT Bukit Asam Tbk (Whistleblowing System) dated June 30, 2024, which is an improvement on the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 06/DEKOM/VIII/2020 and No. 395/0100/2020 concerning the Guidelines for the Violation Reporting System (whistle blowing system) of PT Bukit Asam Tbk. The Violation Reporting Guidelines regulate the main matters regarding the Reporting mechanism, including:

1. Information and methods for Reporting Violations to be reported through SPP/WBS;
2. Reporting Management;
3. Protection of Whistleblowers;
4. Follow-up on Reports including the rules of sanctions applied.

Adapun mekanisme penyampaian laporan pelanggaran, sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis maupun lisan (sebagai informasi awal).
2. Laporan tertulis dapat disampaikan melalui surat elektronik (e-mail) dan laporan lisan dapat disampaikan melalui telepon.
3. Pelapor memberikan informasi mengenai data diri secara jelas, karena pelaporan anonim tidak akan ditindaklanjuti.
4. Pelapor harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi masalah yang diadukan, pihak yang terlibat, lokasi kejadian, waktu kejadian, bagaimana terjadinya, apakah ada bukti, apakah kasus ini pernah dilaporkan kepada institusi/pihak-pihak lain, dan apakah kasus ini pernah terjadi sebelumnya.

Sebaliknya, Perusahaan justru akan memberi sanksi bagi pelapor yang:

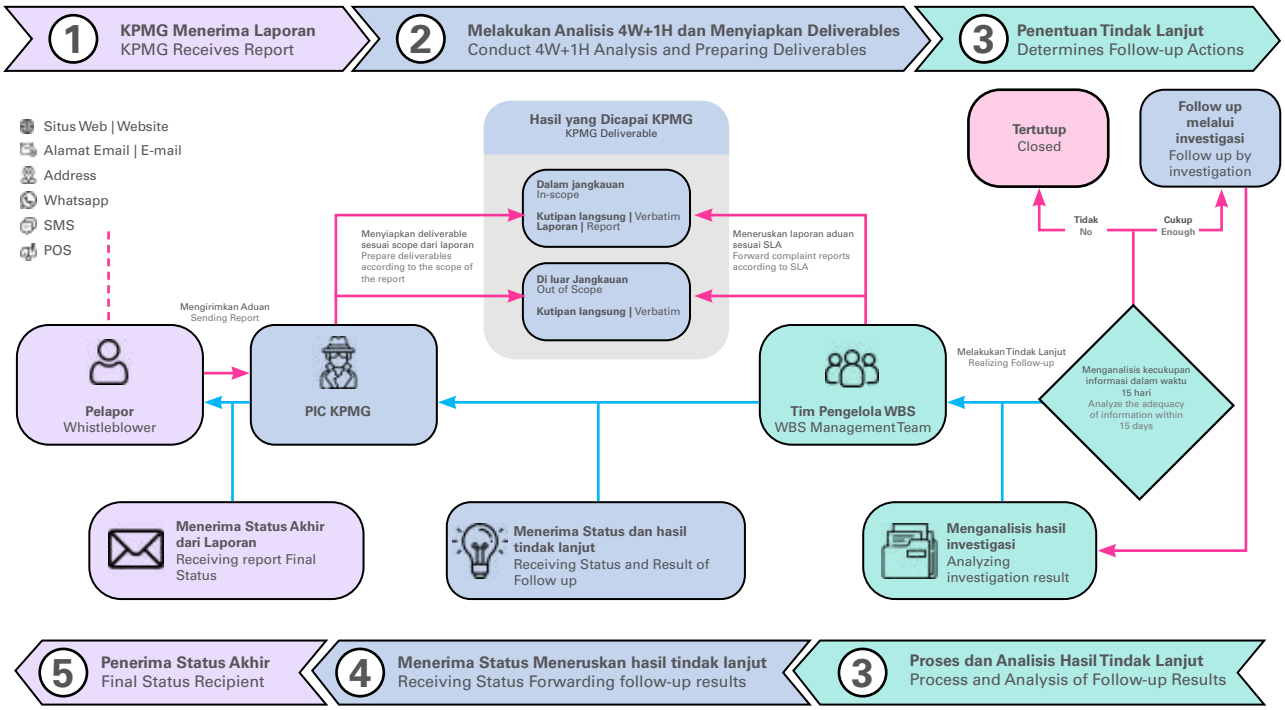
1. Membuka kerahasiaan komunikasi dan informasi yang timbul dalam proses penanganan Pelaporan.
2. Menyampaikan laporan yang tidak benar atau yang bersifat fitnah atau palsu. Sanksi tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan.

The mechanism for submitting violation reports is as follows:

1. The whistleblower submits a report in writing or verbally (as initial information).
2. Written reports can be submitted via electronic mail (e-mail) and verbal reports can be submitted by telephone.
3. The whistleblower provides clear information about personal data, because anonymous reporting will not be followed up.
4. The reporter must provide an initial indication that can be accounted for including the problem being reported, the parties involved, the location of the incident, the time of the incident, reason of incident, evidence, report to other institutions/parties, and recurrence of this incident.

On the other hand, the Company will actually sanction whistleblower who:

1. Reveal the confidentiality of communications and information arising in the process of handling the Report.
2. Submit reports that are incorrect or slanderous or false. These sanctions are carried out in accordance with applicable laws and regulations and/or the Company's Joint Working Agreement.



Sosialisasi SPP

Guna terwujud SPP yang efektif dan tepat sasaran, maka Perusahaan secara berkala melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan oleh Perusahaan kepada seluruh

SPP Socialization

In order to realize an effective and targeted SPP, the Company periodically carries out socialization. Socialization is carried out by the Company to all Company

Insan Perusahaan dan *Stakeholders*. Tahun 2024, Perusahaan telah melaksanakan sosialisasi 12 kali selama periode TW I s.d TW IV 2024 kepada Internal Perusahaan.

Personnel and Stakeholders. In 2024, the Company has carried out socialization 12 times during the period of Q1 to Q4 2024 to the Company's Internal.

No.	Penerima Sosialisasi Socialization Recipient	Jadwal Sosialisasi Socialization Schedule	Tempat Place	Agenda kegiatan Agenda
1.	Unit Dermaga Kertapati Palembang Kertapati Barging Port Unit Palembang	22 Januari 2024 January 22, 2024	Ruang kerja masing-masing dengan fasilitas zoom meeting Each workspace with zoom meeting facilities	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Unit Dermaga Kertapati di Palembang WBS socialization was carried out during the Opening of the Operational Audit of the Kertapati Barging Pier Unit in Palembang
2.	Unit Pelabuhan Tarahan Tarahan Port Unit	24 Januari 2024 January 24, 2024	Ruang kerja masing-masing dengan fasilitas zoom meeting Each workspace with zoom meeting facilities	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Unit Pelabuhan Tarahan di Lampung WBS socialization was carried out during the Opening of the Operational Audit of the Tarahan Port in Lampung
3.	Satuan Kerja PAB PAB Work Unit	29 Januari 2024 January 29, 2024	Ruang Rapat Satuan Kerja PAB PAB Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satuan Kerja PAB di Tanjung Enim WBS socialization was carried out during the Opening of the Operational Audit of the PAB Work Unit in Tanjung Enim
4.	Satuan Kerja PLPT PLPT Work Unit	24 April 2024 April 24, 2024	Ruang Rapat Satuan Kerja PLPT PLPT Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satuan Kerja PLPT di Tanjung Enim WBS socialization was carried out during the Opening of the Operational Audit of the PLPT Work Unit in Tanjung Enim
5.	Satuan Kerja Penambangan Mining Work Unit	29 April 2024 April 29, 2024	Ruang Rapat Satuan Kerja Penambangan Mining Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satuan Kerja Penambangan di Tanjung Enim WBS socialization was carried out during the Opening of the Operational Audit of Mining Work Unit in Tanjung Enim
6.	Satuan Kerja Perawatan Maintenance Work Unit	06 Mei 2024 May 6, 2024	Ruang Rapat Satuan Kerja Perawatan Maintenance Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satuan Kerja di Perawatan Tanjung Enim WBS socialization was carried out during the Opening of the Operational Audit of the Maintenance Work Unit in Tanjung Enim
7.	Satuan Kerja Perencanaan Planning Work Unit	22 Juli 2024 July 22, 2024	Ruang kerja masing-masing dengan fasilitas zoom meeting Each workspace with zoom meeting facilities	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satuan Kerja Perencanaan di Tanjung Enim WBS socialization was carried out during the Opening of the Operational Audit of the Planning Work Unit in Tanjung Enim
8.	Satuan Kerja Layanan Operasi Tanjung Enim Tanjung Enim Operational Service Work Unit	24 Juli 2024 July 24, 2024	Ruang Rapat Satuan Kerja Layanan Operasi TE Tanjung Enim Operational Service Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satuan Kerja Layanan Operasi di Tanjung Enim WBS socialization was carried out during the Opening of the Operational Audit of Tanjung Enim Operational Service Work Unit
9.	Satuan Kerja Sustainability Sustainability Work Unit	29 Juli 2024 July 29, 2024	Ruang Rapat Satuan Kerja Sustainability Sustainability Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat *Opening* Audit Operasional Satuan Kerja *Sustainability* di Tanjung Enim WBS socialization was delivered during the Opening Operational Audit of the Sustainability Work Unit in Tanjung Enim
10.	Satuan Kerja Pengadaan Procurement Work Unit	30 September 2024 September 30, 2024	Ruang Rapat Gedung Utama BA TE BA TE Main Building Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satuan Kerja Pengadaan di Tanjung Enim WBS socialization was carried out during the Opening of the Operational Audit of Procurement Work Unit in Tanjung Enim

No.	Penerima Sosialisasi Socialization Recipient	Jadwal Sosialisasi Socialization Schedule	Tempat Place	Agenda kegiatan Agenda
11.	Satuan Kerja PAISP PAISP Work Unit	01 Oktober 2024 October 1, 2024	Ruang Rapat Satuan Kerja PAISP PAISP Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satuan Kerja PAISP di Tanjung Enim WBS socialization was carried out during the Opening of the Operational Audit of PAISP Work Unit in Tanjung Enim
12.	Satuan Kerja Teknologi Informasi Information Technology Work Unit	03 Oktober 2024 October 3, 2024	Ruang kerja masing-masing dengan fasilitas zoom meeting Each workspace with zoom meeting facilities	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satuan Kerja Teknologi Informasi di Tanjung Enim WBS socialization was carried out during the Opening of the Operational Audit of Information Technology in Tanjung Enim

Perlindungan bagi Pelapor Pelanggaran

Dalam mengelola Laporan Pengaduan Pelanggaran yang masuk ke Perusahaan, PTBA memberikan perlindungan terhadap pelapor, berupa:

1. Menjamin kerahasiaan identitas pelapor (nama, alamat, nomor telepon, faksimile, email, unit kerja);
2. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau lembaga;
3. Perlindungan dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat/jabatan, pemecatan, gugatan hukum, harta benda hingga tindakan fisik;
4. Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku bagi pelapor, tetapi dapat diperluas sampai dengan anggota keluarga pelapor.

Penanganan Pengaduan

Setiap laporan yang masuk ke Perusahaan, akan ditelaah terlebih dahulu untuk diperoleh keputusan tindak lanjut atas laporan tersebut. Laporan Pengaduan Pelanggaran minimal memuat informasi sebagai berikut:

1. Jenis pelanggaran yang diadukan dan pihak yang terlibat;
2. Waktu dan tempat terjadinya pelanggaran;
3. Kronologi ringkas kejadiannya;
4. Disertai adanya bukti-bukti pelanggaran.

Laporan yang telah diterima dan ditelaah oleh Perusahaan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut:

1. Direktur Utama menerima dan menyampaikan setiap pengaduan pelanggaran kepada petugas SPP yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi data dan pengumpulan bukti awal yang cukup dan memadai serta mendokumentasikan laporan penerimaan pengaduan.
2. Direksi menetapkan tindak lanjut terhadap pengaduan yang telah diterima. Langkah-langkah tindak lanjut yang dapat ditempuh di antaranya:

Protection for Whistleblower

In managing Violation Complaint Reports received by the Company, PTBA provides protection for the whistleblower, in the form of:

1. Guaranteeing the confidentiality of their identity (name, address, telephone number, fax, email, work unit);
2. Protection against retaliation from the reported party or institution;
3. Protection from pressure, delays in promotion/position, dismissal, lawsuits, property and physical action;
4. This protection does not only apply to the whistleblower, but can be extended to their family members.

Complaint Handling

Every report received by the Company will be reviewed first to obtain a decision on follow-up action on the report. The Complaint Report of Violations must contain at least the following information:

1. Type of violation reported and the parties involved;
2. Time and place of the violation;
3. Brief chronology of the incident;
4. Accompanied by evidence of the violation.

Reports that have been received and reviewed by the Company are then followed up with the following stages:

1. The President Director receives and submits each complaint of violation to the SPP officer appointed to verify data and collect sufficient and adequate initial evidence and document the complaint receipt report.
2. The Board of Directors determines the follow-up action on the complaint received. The follow-up steps that can be taken include:

a. Investigasi oleh auditor internal, apabila substansi pengaduan dapat dilakukan investigasi oleh tim auditor internal.
b. Investigasi oleh investigator eksternal, apabila substansi pengaduan membutuhkan kompetensi/ pengetahuan/keahlian tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh tim auditor internal.

3. Tim investigasi melaksanakan kegiatan investigasi secara menyeluruh dan menyampaikan hasil investigasi pengaduan kepada Direksi untuk kemudian ditetapkan putusan terhadap pengaduan tersebut.

   Beberapa putusan yang dapat ditetapkan antara lain:
   a. Dihentikan dan dinyatakan selesai apabila hasil investigasi menyatakan bahwa pengaduan tersebut tidak benar atau tidak terbukti.
   b. Meneruskan hasil investigasi kepada forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (PKP) apabila hasil investigasi menyatakan bahwa pengaduan terbukti benar.
   c. Meneruskan kasus pelanggaran yang termasuk dalam kategori tindak pidana umum atau korupsi kepada penyidik untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, akan dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim dari Divisi Hukum guna memastikan bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan dalam kegiatan investigasi dinyatakan cukup untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

PTBA telah menunjuk KPMG sebagai Pihak Ketiga Independen untuk melakukan pengelolaan dan membantu WBS PTBA. Selain itu, perusahaan juga membentuk tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola, memverifikasi, dan memproses seluruh pengaduan laporan yang masuk. Tim SPP dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk Nomor: 113/0100/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Tim Pengelola WBS PT Bukit Asam Tbk (*Whistle Blowing System*). Sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Grup MIND ID, tim pengelola WBS terdiri dari unsur dari berbagai satuan kerja seperti Manajemen Risiko, Hukum, SDM, SPI, Sekretaris Perusahaan dan satuan kerja lainnya yang memadai. Adapun susunan tim pengelola adalah sebagai berikut:

a. Investigation by an internal auditor, if the substance of the complaint can be investigated by the internal auditor team.
b. Investigation by an external investigator, if the substance of the complaint requires certain competencies/knowledge/expertise that cannot be fulfilled by the internal auditor team.

3. The investigation team carries out comprehensive investigation activities and submits the results of the complaint investigation to the Board of Directors to then determine the decision on the complaint.

   Some decisions that can be determined include:
   a. Terminated and declared complete if the investigation results state that the complaint is not true or not proven.
   b. Forwarding the results of the investigation to the Violation Case Discussion Forum (PKP) if the investigation results state that the complaint is proven true.
   c. Forwarding violation cases that fall into the category of general crimes or corruption to investigators for further processing in accordance with applicable provisions and laws.

In this case, communication and coordination will be carried out with the team from the Legal Division to ensure that the evidence that has been collected in the investigation activities is declared sufficient to be submitted to the authorities.

Complaint Management Party

PTBA has appointed KPMG as an Independent Third Party to manage and assist PTBA's WBS. In addition, the company has also formed a Whistleblowing System Management (SPP) team that is specifically tasked with managing, verifying, and processing all incoming complaints. The SPP team was formed based on the Decree of the Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk Number: 113/0100/2024 dated August 30, 2024, concerning the PT Bukit Asam Tbk WBS Management Team (Whistle Blowing System). In accordance with the policies in force in the MIND ID Group, the WBS management team consists of elements from various work units such as Risk Management, Legal, HR, SPI, Corporate Secretary and other adequate work units. The composition of the management team is as follows:

Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran
WBS Mangement Team

No.	Susunan Anggota Composition	Jumlah Orang Number of People
1.	Ketua Chair	1
2.	Wakil Ketua Deputy Chair	1
3.	Sekretaris Secretary	1
4.	Anggota Member	12

Kode Etik Tim Pengelola SPP

Sebagaimana ketentuan Pedoman WBS PTBA, WBS dikelola secara internal oleh Tim Pengelola, untuk menjadi Tim Pengelola WBS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Petugas Perlindungan Pelapor
   Sebagai Petugas Perlindungan Pelapor, harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
   a. Dapat dipercaya;
   b. Mampu berkomunikasi dan berhubungan dengan baik serta dapat menyakinkan orang;
   c. Dapat berdiplomasi dengan baik dan cukup taktis, tanpa membuat marah lawan bicaranya dan;
   d. Mampu bersifat objektif dan tegas.
2. Petugas Investigasi
   Sebagai Petugas Investigasi, harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
   a. Dapat dipercaya;
   b. Mampu berkomunikasi dan berhubungan dengan baik serta dapat menyakinkan orang;
   c. Dapat berdiplomasi dengan baik dan cukup taktis, tanpa membuat marah lawan bicaranya dan;
   d. Mampu bersifat objektif dan tegas;
   e. Mempunyai integritas tinggi;
   f. Mempunyai kemampuan untuk melakukan investigasi;
   g. Kemampuan analisa yang tinggi;
   h. Kemampuan melakukan penilaian dengan baik (*sound of judgement*).

Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Diproses

Tahun 2024, terdapat 5 laporan dugaan pelanggaran yang masuk melalui SPP, baik yang disampaikan melalui email, surat, telepon, faksimile, ataupun *website* Perusahaan.

Code of Ethics of the SPP Management Team

As stipulated in the PTBA WBS Guidelines, WBS is managed internally by the Management Team, to become a WBS Management Team must meet the following requirements:

1. Whistleblower Protection Officer
   As a Whistleblower Protection Officer, must have the following requirements:
   a. Trustworthy;
   b. Able to communicate and relate well and can convince people;
   c. Able to be diplomatic and tactical enough, without angering the other person and;
   d. Able to be objective and firm.
2. Investigation Officer
   As an Investigation Officer, must have the following requirements:
   a. Trustworthy;
   b. Able to communicate and relate well and can convince people;
   c. Able to be diplomatic and tactical enough, without angering the other person and;
   d. Able to be objective and firm;
   e. Have high integrity;
   f. Have the ability to conduct investigations;
   g. High analytical skills;
   h. Ability to make good judgments (sound of judgment).

Number of Complaints Received and Processed

In 2024, there were 5 reports of alleged violations received through the SPP, either submitted via email, letter, telephone, fax, or the Company's website.

Pelaporan Reporting Media	**Jumlah Laporan yang Masuk** Number of Reports Received	**Status Laporan per 31 Desember 2024** Reports Status per December 31, 2024
Email Email	1	Sudah dilakukan klarifikasi dan ditindaklanjuti (status closed) Clarified and Followed-up (closed)
Surat Letter	-	-
Telepon Telephone	-	-
Faksimile Fax	-	-
Website Website	-	-
Saluran WBS OpenMIND oleh konsultan KPMG OpenMIND WBS Channel by KPMG consultant	4	2 (dua) laporan pengaduan sudah dilakukan klarifikasi dan ditindaklanjuti status (closed) dan 2 (dua) di luar scope (closed) 2 (two) complaint reports have been clarified and followed-up (closed) and 2 (two) are outside the scope (closed)
Jumlah Total	**5**	**3 (tiga) sudah ditindaklanjuti status (closed) dan 2 (dua) diluar scope status (closed)** 3 (three) have been followed-up (closed) and 2 (two) are outside the scope of (closed)

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Telah Selesai Diproses pada Tahun 2024

Berdasarkan laporan pengaduan pelanggaran yang masuk ke Perusahaan, sebanyak 5 (lima) pengaduan masuk sampai dengan akhir tahun 2024. Dengan rincian 3 (tiga) sudah ditindaklanjuti, 2 (dua) di luar *scope* (status closed).

Sanctions/Follow-up on Complaints Processed in 2024

Based on reports of complaints of violations received by the Company, as many as 5 (five) complaints were received until the end of 2024. With details of 3 (three) have been followed up, 2 (two) are outside the scope (status closed).

Kebijakan *Insider Trading*

Insider Trading Policy

Perusahaan menetapkan larangan penyalahgunaan jabatan dan pekerjaan Insan PTBA untuk mengungkapkan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan informasi investor. Informasi material adalah informasi yang belum dipublikasikan secara luas yang dapat mendorong seseorang untuk membeli, menjual, atau menahan saham Perusahaan.

The Company prohibits abuse of power by PTBA personnel to disclose material information that can influence investors' informed decisions. Material information is Information that has not been widely published that can affect someone to buy, sell, or hold the Company's shares.

Perusahaan memiliki kebijakan *insider trading* yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PTBA No.250/0100/2023 dan No.15/SK/PTBADEKOM/XII/2023 tentang Pedoman Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*).

The Company has an insider trading policy stipulated through Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors of PTBA No.250/0100/2023 and No.15/SK/PTBADEKOM/XII/2023 concerning Guidelines for Insider Transactions (Insider Trading).

Sesuai dengan kebijakan tersebut di atas, Charter Direksi dan Charter Dewan Komisaris, serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, perusahaan mewajibkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk melaporkan setiap transaksi pembelian dan/atau penjualan atas saham perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak kepemilikannya dan/atau transaksi untuk selanjutnya dilaporkan kepada kepada regulator di bidang pasar modal. Di tahun 2024, tidak terdapat aktivitas transaksi pembelian/penjualan saham perusahaan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris perusahaan.

In accordance with the above policies, the Board of Directors Charter and the Board of Commissioners Charter, as well as the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 4 of 2024 concerning Reports on Ownership or Any Changes in Ownership of Public Company Shares and Reports on Activities of Pledge of Public Company Shares, the Company requires members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to report every purchase and/or sale transaction of the company's shares no later than 3 (three) working days since its ownership and/or transaction to be further reported to the regulator in the capital market sector. In 2024, there were no share purchase/sale transaction activities carried out by members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners of the company.

Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy

Perusahaan telah menetapkan kebijakan tentang anti korupsi yang dimuat dalam *Corporate Governance Policy, Board Manual, Code of Conduct*, Pedoman *Whistleblowing System*, dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, yang secara substansi mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

The Company has established an anti-corruption policy contained in the Corporate Governance Policy, Board Manual, Code of Conduct, Whistleblowing System Guidelines, and Gratification Control Guidelines, which in substance refer to Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.

Program dan Prosedur Penanganan Anti Korupsi

Perusahaan memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan praktik bisnis yang anti korupsi, demi terwujudnya iklim bisnis yang sehat. Dalam mendukung praktik Anti Korupsi, Perusahaan menciptakan budaya anti korupsi di lingkungan internal Perusahaan, melalui Kebijakan anti korupsi yang didukung dengan penandatanganan Pakta Integritas sebagai wujud komitmen.

Perusahaan juga mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan Standar internasional *Anti-Bribery Management System* atau Manajemen Anti Suap ISO 37001:2016, sebagai wujud penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan upaya membangun perusahaan yang bersih dari praktik korupsi. Atas komitmen Perusahaan dalam menerapkan SMAP, Bukit Asam menjadi BUMN tambang pertama yang memperoleh ISO 370001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Prosedur penanganan anti korupsi di Perusahaan diwujudkan melalui pembentukan SDM yang bertanggungjawab terhadap pengawasan, untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai prosedur audit dan pendeteksian risiko penyimpangan, serta meningkatkan *awareness* insan capital dengan mengikutsertakan pada pendidikan dan pelatihan anti korupsi, khususnya pada unit-unit yang berpotensi untuk terpapar praktik korupsi, kecurangan, suap, gratifikasi dan sejenisnya.

Anti-Corruption Handling Program and Procedures

The Company has a strong commitment to implementing anti-corruption business practices, in order to realize a healthy business climate. In supporting anti-corruption practices, the Company creates an anti-corruption culture within the Company's internal environment, through an anti-corruption policy supported by the signing of an Integrity Pact as a form of commitment.

The Company also implements an Anti-Bribery Management System (SMAP) with the international Anti-Bribery Management System Standard or Anti-Bribery Management ISO 37001:2016, as a form of implementing good corporate governance and an effort to build a company that is free from corrupt practices. Due to the Company's commitment to implementing SMAP, Bukit Asam became the first SOEs mining to obtain ISO 370001:2016 Anti-Bribery Management System.

The anti-corruption handling procedure in the Company is realized through the formation of human resources who are responsible for supervision, to participate in education and training on audit procedures and detection of risks of deviations, and to increase awareness of human capital by participating in anti-corruption education and training, especially in units that have the potential to be exposed to corrupt practices, fraud, bribery, gratification and the like.
Anti-Corruption Training/Socialization

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi

Perusahaan memberikan pelatihan dan sosialisasi anti korupsi bagi Insan PTBA guna memberikan pemahaman dan pembekalan pengetahuan mengenai korupsi dan hal lain yang berkaitan dengan korupsi. Sepanjang tahun 2024 Perusahaan telah memberikan pelatihan dan sosialisasi anti korupsi (termasuk *anti-fraud* dan *anti bribery*) sebanyak 5 pelatihan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Anti-Corruption Training/Socialization

The Company provides anti-corruption training and socialization for PTBA Personnel to provide understanding and knowledge provision regarding corruption and other matters related to corruption. Throughout 2024, the Company has provided 5 anti-corruption training and socialization (including anti-fraud and anti-bribery) which can be seen in the table below.

Jenis Type	**Judul Pelatihan** Name of Training	**Tanggal** Date	**Jumlah Peserta** Number of Participants	**Penyelenggara** Organizer
Sertifikasi Certification	Pelatihan dan Sertifikasi Lead Auditor ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (PECB) ISO 37001 Lead Auditor Training and Certification Anti-Bribery Management System (PECB)	7 - 11 Oktober 2024 October 7 - 11, 2024	3	PT TÜV SUD Indonesia
Sertifikasi Certification	Pelatihan dan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 Training and Certification of Anti-Bribery Management System (SMAP) ISO 37001:2016	12 - 15 Agustus 2024 August 12 - 15, 2024	5	MIND ID
Pelatihan Training	Kegiatan MIND ID 4th GRC Series : Ethical Foundations : Understanding the Significance of Whistleblowing bersama KPMG MIND ID 4th GRC Series Activity: Ethical Foundations: Understanding the Significance of Whistleblowing with KPMG	2 Februari 2024 Ferbruary 2, 2024	87	MIND ID
Pelatihan Training	MIND ID GRC Series #5 : Fraud Management MIND ID GRC Series #5 : Fraud Management	15 Maret 2024 Maret 15, 2024	76	MIND ID
Pelatihan Training	MIND ID 10th GRC Series : Pencegahan Korupsi dan Kaitannya dengan GRC MIND ID 10th GRC Series: Corruption Prevention and Its Relation to GRC	10 Oktober 2024 Ocotber 10, 2024	220	MIND ID

Selain memberikan pelatihan kepada pegawai, PTBA juga tetap konsiten untuk menerapkan ISO-37001:2016 tentang SMAP. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya survey pemahaman yang ditujukan kepada seluruh pegawai PTBA di tahun 2024 atas penerapan SMAP tersebut. Alhasil, PTBA berhasil mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 berdasarkan hasil audit dari PT TÜV NORD Indonesia selaku Badan Sertifikasi Independen.

Besides providing training to employees, PTBA also remains consistent in implementing ISO-37001:2016 on SMAP. This is proven by conducting an understanding survey aimed at all PTBA employees in 2024 regarding the implementation of the SMAP. As a result, PTBA has succeeded in maintaining the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System certification based on the audit results from PT TÜV NORD Indonesia as an Independent Certification Body.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement Policy

PTBA memiliki kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang diperbaharui pada tahun 2024. Kebijakan tersebut tertuang pada Keputusan Direksi PTBA Nomor: 143/0100/2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. Kebijakan pengadaan PTBA ini mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan kebijakan yang ditetapkan oleh PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku holding dari PTBA.

Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa PTBA

1. Efisien, berarti kegiatan pengadaan harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah, dengan pengecualian untuk pengadaan strategis yang memiliki nilai signifikan dapat dilakukan pendekatan perhitungan semua biaya (*total cost of ownership*).
2. Efektif, berarti kegiatan pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Kompetitif, berarti kegiatan pengadaan harus terbuka bagi peserta kegiatan pengadaan yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara peserta kegiatan pengadaan yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Adil dan Wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon peserta kegiatan Pengadaan yang memenuhi syarat.
5. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
6. Terbuka, berarti kegiatan pengadaan dapat diikuti oleh semua peserta yang memenuhi syarat.
7. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) lainnya, yaitu Independensi dan Pertanggungjawaban.

Kode Etik Pengadaan

1. Menjalankan etika bisnis dalam kegiatan pengadaan sesuai standar etika PT Bukit Asam Tbk;

PTBA has a Goods and Services Procurement policy updated in 2024. The policy is stated in the Decree of the Board of Directors of PTBA Number: 143/0100/2024 concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services. This PTBA procurement policy refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and the policies set by PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the holding company of PTBA.

Basic Principles of Procurement of Goods and Services of PTBA

1. Efficient, procurement activities must be carried out to obtain optimal and best results in a short time by using funds and capabilities as optimally as possible in a reasonable manner and not only based on the lowest price, with the exception of strategic procurement that has significant value, an approach to calculating all costs (total cost of ownership) can be used.
2. Effective, procurement activities must be in accordance with the determined needs and provide the greatest possible benefits in accordance with the targets set.
3. Competitive, procurement activities must be open to procurement participants who meet the requirements and are carried out through healthy competition among procurement participants who are equal and meet certain requirements/criteria based on clear and transparent provisions and procedures.
4. Fair and Reasonable, all prospective Procurement participants who meet the requirements are treated equally.
5. Accountable, they must achieve their targets and be accountable to avoid potential misuse and deviation.
6. Open, procurement activities can be followed by all participants who meet the requirements.
7. Other Principles of Good Corporate Governance (GCG), namely Independence and Accountability.

Procurement Code of Ethics

1. Carrying out business ethics in procurement activities according to the ethical standards of PT Bukit Asam Tbk;

2. Bekerja secara tertib dengan mematuhi peraturan yang berlaku dalam pengadaan dengan penuh rasa tanggung jawab.
3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan, termasuk syarat teknis administrasi Pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia, sifatnya terbuka bagi Peserta Pengadaan yang berminat.
4. Menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku, dengan cara tidak saling mempengaruhi satu dengan yang lain baik langsung maupun tidak langsung.
5. Untuk menghindari terjadinya Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) di dalam pengadaan, maka:
   a. Pegawai/Direksi/Komisaris yang memiliki Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) dilarang memberikan persetujuan dan/atau meminta persetujuan;
   b. Seluruh Pegawai/Direksi/Komisaris dilarang menjadi Mitra Kerja secara langsung maupun tidak langsung, baik Mitra Kerja Penyedia Barang dan/atau Jasa bagi Perusahaan.
6. Menghindari terjadinya penentuan harga transfer atau transfer pricing yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
7. Dalam semua tindakan dan pengambilan keputusan dalam pengadaan tidak melebihi batas kewenangan yang ditetapkan.
8. Dilarang meminta, menerima, dan memberi imbalan/ hadiah dalam bentuk apapun kepada Penyedia termasuk meminta donasi atau bantuan dalam bentuk apapun.
9. Dalam pengelolaan Pengadaan, hanya menerima dan menggunakan dokumen-dokumen asli atau copy sesuai aslinya yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Seluruh Pegawai/ Direksi/ Dewan Komisaris dilarang menggunakan nama PT Bukit Asam Tbk atau menggunakan pengaruh dari transaksi antara PT Bukit Asam Tbk dan Penyedia
11. untuk mendapatkan Barang, Jasa ataupun manfaat lainnya untuk kepentingan pribadi kecuali apabila PT Bukit Asam Tbk dan Penyedia telah membuat kesepakatan mengenai ketentuan diskon yang dapat diberlakukan untuk pegawai PT Bukit Asam Tbk.

Pengadaan Berorientasi pada *Best Practice*

Sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PTBA, pengadaaan harus mengedepankan *best practices* sebagai berikut:

2. Working in an orderly manner by complying with applicable regulations in procurement with a full sense of responsibility.
3. Transparent, meaning all provisions and information regarding Procurement, including technical requirements for Procurement administration, evaluation procedures, evaluation results, determination of prospective Providers, are open to interested Procurement Participants.
4. Avoid monopolistic practices and unfair business competition as regulated in applicable laws and regulations, by not influencing each other either directly or indirectly.
5. To avoid Conflict of Interest in procurement, then:
   a. Employees/Directors/Commissioners who have Conflict of Interest are prohibited from giving approval and/or requesting approval;
   b. All Employees/Directors/Commissioners are prohibited from becoming Work Partners directly or indirectly, either as Work Partners of Goods and/or Services Providers for the Company.
6. Avoiding transfer pricing not in accordance with applicable laws and regulations.
7. In all actions and decision-making in procurement, do not exceed the established authority limits.
8. It is prohibited to request, receive, and give compensation/gifts in any form to the Provider, including asking for donations or assistance in any form.
9. In Procurement management, only accept and use original documents or copies of the originals that can be accounted for their authenticity in accordance with applicable laws and regulations.
10. All Employees/Directors/Board of Commissioners are prohibited from using the name of PT Bukit Asam Tbk or using influence from transactions between PT Bukit Asam Tbk and the Provider
11. To obtain Goods, Services or other benefits for personal gain unless PT Bukit Asam Tbk and the Provider have made an agreement regarding the discount provisions that can be applied to PT Bukit Asam Tbk employees.

Best Practice-Oriented Procurement

In accordance with the PTBA Goods and Services Procurement Guidelines, procurement must prioritize the following best practices:

1. Memberikan nilai tambah, berarti meningkatkan volume dan kualitas produk-produk Perusahaan dengan total biaya terendah.
2. Pengadaan haruslah tidak memuat persyaratan dan spesifikasi teknis yang mengarah kepada Penyedia tertentu.
3. Terbuka berarti Pengadaan haruslah bersifat terbuka dan diumumkan secara luas (dapat menggunakan sistem elektronik). Penyedia wajib memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat dan transparan.
4. Optimal, berarti mendapatkan hasil yang maksimal dan terbaik yang dapat dicapai dengan memanfaatkan potensi yang ada.
5. Berwawasan lingkungan, yaitu mendukung dan mengembangkan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan dan dampak lingkungan;
6. Mengutamakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L).
7. Pengadaan yang bersifat Strategis harus sudah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
8. Pengadaan wajib disetujui oleh Pejabat Pemegang Kewenangan sesuai limit yang ditentukan.

Metode dan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Sesuai dengan Pedoman Pegadaan Barang dan Jasa PTBA terdapat beberapa metode dan mekanisme pegadaan sebagai berikut:

1. **Pelelangan Terbuka**
   Pengadaan dengan cara diumumkan secara luas dan terbuka untuk umum melalui papan pengumuman, website PTBA, sistem e-Procurement, sistem e-Marketplace dan/atau media massa guna memberi kesempatan kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti proses pengadaan.
2. **Pemilihan Terbatas**
   Pengadaan yang dilakukan dengan mengundang secara tertulis dalam bentuk SPPH kepada Penyedia dengan bidang usaha yang sama dan telah terdaftar di Vendor Management System Perusahaan.
3. **Penunjukan Langsung**
   Cara pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia sepanjang memenuhi persyaratan dari ketentuan pengadaan yang berlaku di Perusahaan.

1. Providing added value, meaning increasing the volume and quality of the Company's products at the lowest total cost.
2. Procurement must not contain technical requirements and specifications that lead to certain Providers.
3. Open, meaning the Procurement must be open and widely announced (can use an electronic system). Providers are required to meet certain requirements/ criteria based on clear provisions and procedures and must be carried out through healthy and transparent competition.
4. Optimal, meaning getting the maximum and best results that can be achieved by utilizing existing potential.
5. Environmentally aware, namely supporting and developing activities by paying attention to environmental capabilities and impacts;
6. Prioritizing Occupational Safety, Health and Environment (OSHE).
7. Strategic procurement must have been budgeted in the Company's Work Plan and Budget (CWPB).
8. Procurement must be approved by the Authorized Officer according to the specified limit.

Methods and Mechanisms of Procurement of Goods and Services

In accordance with the Guidelines for Procurement of Goods and Services of PTBA, there are several methods and mechanisms of procurement as follows:

1. **Open Auction**
   Procurement is being announced widely and openly to the public through bulletin boards, the PTBA website, the e-Procurement system, the e-Marketplace system, and/or mass media in order to provide an opportunity for qualified providers to participate in the procurement process.
2. **Limited Selection**
   Procurement carried out by inviting in writing in the form of SPPH to Providers with the same business field and have been registered in the Company's Vendor Management System.
3. **Direct Appointment**
   The method of implementing procurement is carried out by directly appointing 1 (one) Provider as long as it meets the requirements of the procurement provisions applicable in the Company.

4. **Pengadaan Langsung**
   Cara pengadaan secara langsung dengan membeli barang yang terdapat di pasar atau toko, termasuk melalui toko elektronik atau jasa dengan risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang rendah.

Evaluasi Pengadaan yang Berlandaskan Aspek Ekonomi dan ESG

Dalam melakukan evaluasi calon vendor/pemasok PTBA mengedepankan beberapa aspek utama. Pertama memperhatikan aspek ekomomi dengan evaluasi penawaran harga yang dilakukan oleh calon vendor untuk mendapatkan harga yang terendah dengan tetap memperhatikan aspek kualitas produk atau jasa yang diberikan oleh vendor. Kedua, Perusahaan mengedepankan beberapa kriteria dalam pemilihan vendor dengan memperhatikan dan mempersyaratkan vendor memenuhi persayaratan aspek lingkugan, sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, tata kelola yang baik (*good corporate governance*), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akses Pengadaan Barang dan Jasa PTBA

Pengadaan barang dan jasa di Perusahaan menggunakan sistem bernama *Spend Management System* yang merupakan sistem pengadaan perusahaan yang terintegrasi, sehingga dapat menjamin praktik pengadaan yang bertanggung jawab. Spend PTBA dapat diakses oleh publik pada tautan *website* Perusahaan atau *link* https:// spend.bukitasam.co.id/ web/index.

4. **Direct Procurement**
   The method of direct procurement by purchasing goods available in the market or shop, including through electronic shops or services with low occupational safety and health risks.

Evaluation of Procurement Based on Economic and ESG Aspects

In conducting evaluations of prospective vendors/ suppliers, PTBA prioritizes several main aspects. First, by paying attention to the economic aspect by evaluating the price offers made by prospective vendors to get the lowest price while still paying attention to the quality aspects of the products or services provided by the vendor. Second, the Company prioritizes several criteria in selecting vendors by paying attention to and requiring vendors to meet the requirements of environmental, social, health, and safety aspects, good corporate governance, and applicable laws and regulations.

Access to Procurement of Goods and Services PTBA

Procurement of goods and services in the Company uses a system called Spend Management System which is an integrated company procurement system, to guarantee responsible procurement practices. Spend PTBA can be accessed by the public on the Company's website link or the link https://spend.bukitasam.co.id/ web/index.

Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control

Perusahaan melaksanakan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang merupakan standar etika Perusahaan dalam mengatur ketentuan pemberian dan penerimaan hadiah, pelaporan gratifikasi, pengawasan, dan sanksi. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 10/SK/PTBADEKOM/IX/2020 dan No. 400/0100/2020 tentang Penerapan Prinsip dan Praktik *Good Corporate Governance* untuk Kebijakan Anti Gratifikasi dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi BAAGM:03 Nomor Revisi 1 tahun 2024. Adapun substansi yang diatur dalam kebijakan tersebut mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern.
3. Peraturan Menteri BUMN No. 09/MBU/06/2021 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian BUMN.

Prinsip Umum Pemberian dan Penerimaan Hadiah

Insan PTBA dilarang menerima gratifikasi dan wajib melaporkan kepada KPK atas penerimaan yang dilakukan.

Pemberian maupun penerimaan diperkenankan selama masih dalam batas kewajaran serta memenuhi peraturan yang ditetapkan secara khusus oleh Perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan tidak dapat membenarkan pemberian maupun penerimaan hadiah dalam berbagai bentuk yang diberikan oleh jajaran Perusahaan ataupun pihak-pihak tertentu, dengan maksud memengaruhi keputusan jajaran Perusahaan atau untuk memberikan keuntungan bagi salah satu pihak di luar batas-batas kewajaran, baik secara hukum dan etika bisnis.

The Company implements and applies policies as the Company's ethical standards in regulating the provisions for giving and receiving gifts, reporting gratification, supervision, and sanctions. The Company's Gratification Control Policy is stipulated through Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 10/SK/PTBADEKOM/IX/2020 and No. 400/0100/2020 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Principles and Practices for Anti-Gratification Policy and Gratification Control Guidelines BAAGM:03 Revision Number 1 of 2024. The substance regulated in the policy refers to:

1. Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.
2. Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. SE-2/MBU/07/2019 dated July 29, 2019, concerning Clean Management of State-Owned Enterprises Through the Implementation of Prevention of Corruption, Collusion, and Nepotism and Handling of Conflicts of Interest and Strengthening of Internal Supervision.
3. Regulation of the Minister of SOEs No. 09/MBU/06/2021 concerning Reporting of Gratification within the Ministry of SOEs.

General Principles of Giving and Receiving Gifts

PTBA personnel are prohibited from accepting gratification and are required to report to the Corruption Eradication Committee (KPK) regarding the receipt.

Giving or receiving is permitted as long as it is within reasonable limits and complies with the regulations specifically set by the Company or applicable laws and regulations. The Company cannot justify giving or receiving gifts in various forms given by the Company's ranks or certain parties, with the intention of influencing the decisions of the Company's ranks or to provide benefits to one party beyond reasonable limits, both legally and in business ethics.

Maksud, Tujuan, dan Manfaat

Pengendalian Gratifikasi di lingkup Perusahaan dimaksudkan:

1. Sebagai Pedoman bagi karyawan PTBA untuk memahami, mencegah, dan menanggulangi gratifikasi di Perusahaan;
2. Sebagai Pedoman bagi karyawan PTBA dalam mengambil sikap yang tegas terhadap gratifikasi di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik;
3. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Memberikan arah dan acuan bagi karyawan PTBA mengenai pentingnya Kepatuhan melaporkan gratifikasi untuk perlindungan dirinya sendiri maupun keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap.

Purpose, Objectives, and Benefits

Controlling Gratification within the Company is intended:

1. As a Guideline for PTBA employees to understand, prevent, and overcome gratification in the Company;
2. As a Guideline for PTBA employees in taking a firm stance against gratification in the Company to realize good Company management;
3. Realizing Company management that is free from all forms of Corruption, Collusion, and Nepotism;
4. Providing direction and reference for PTBA employees regarding the importance of Compliance in reporting gratification to protect themselves and their families from the possibility of being charged with a criminal act of bribery.

Mekanisme Pengendalian Gratifikasi

Pemberian

1. Perusahaan melarang setiap individu jajaran Perusahaan untuk memberikan atau menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung hadiah, suap, dan sejenisnya kepada Penyelenggara negara, Mitra Kerja, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan, di mana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga dapat digunakan untuk memengaruhi atau menggerakkan pihak-pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Selain pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian atau hibah untuk kegiatan pembinaan usaha kecil, sumbangan untuk kegiatan sosial dan keagamaan, sumbangan kepada Pemerintah Daerah yang ditentukan berdasarkan *Memorandum of Understanding* (Mou) dimungkinkan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur hal tersebut.
3. Pemberian kepada pihak lain dalam rangka tanda terima kasih, bingkisan besar keagamaan, cinderamata, dan kenang-kenangan dapat diberikan dalam bentuk barang atau uang, dengan jumlah konfirmasi maksimal Rp3.000.000,00 per orang/perusahaan per tahun kecuali untuk kegiatan promosi dan *sponsorship*.
4. Pemberian kepada pihak lain dalam rangka untuk kelancaran operasional Perusahaan dalam jumlah tertentu dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas setelah mendapat persetujuan dari Direksi.
5. Pemberian kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan batasan sebagai berikut:

Gratification Control Mechanism

Giving

1. The Company prohibits every individual in the Company from giving or promising, either directly or indirectly, gifts, bribes, and the like to State Administrators, Work Partners, and other parties related to the Company, where the giving is known or reasonably suspected to be used to influence or move the parties to do or not do something in their position that is contrary to their obligations.
2. In addition to the giving as referred to in paragraph (1), giving or grants for small business development activities, donations for social and religious activities, donations to the Regional Government determined based on the Memorandum of Understanding (MoU) are allowed as long as they are in accordance with the provisions of the laws and regulations governing such matters.
3. Giving to other parties as a token of gratitude, large religious gifts, souvenirs, and mementos can be given in the form of goods or money, with a maximum confirmed amount of Rp3,000,000.00 per person/company per year except for promotional and sponsorship activities.
4. Giving to other parties in order to ensure the smooth operation of the Company in a certain amount may be carried out by prioritizing the principle of accountability after obtaining approval from the Board of Directors.
5. Giving to other parties as referred to in paragraph (3) and paragraph (4) is regulated with the following limitations:

a. Pemberian berupa barang wajib mencantumkan logo Perusahaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari barang tersebut.
b. Pemberian tidak dilakukan secara terus menerus terhadap satu pihak, maksimal 3 (tiga) kali/tahun.
c. Pemberian tersebut tidak dimaksudkan untuk menyuap dan/atau mempengaruhi pihak yang bersangkutan yang dapat menyebabkan citra negatif Perusahaan.

Penerimaan

1. Perusahaan melarang setiap individu jajaran Perusahaan untuk:
   a. Menerima hadiah, suap, dan sejenisnya dari pihak mana pun yang diketahui dan patut diduga bahwa hadiah, suap, dan sejenisnya tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
   b. Meminta hadiah, suap, dan sejenisnya dari pihak mana pun yang diketahui atau patut diduga digunakan untuk memengaruhi pengambilan keputusan baik keputusan sendiri maupun pejabat yang berwenang atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
   c. Memotong atau mengambil sebagian jumlah pembayaran kepada pihak ketiga sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
2. Setiap individu jajaran Perusahaan yang menerima hadiah, berapa pun nilainya dan dalam bentuk apa pun, wajib melaporkan kepada atasan langsung dengan menggunakan Formulir 1.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerimaan hadiah dari pihak mana pun dalam rangka promosi perusahaan, tanda terima kasih, bingkisan hari besar keagamaan, cinderamata dan kenang-kenangan yang dimaksudkan sebagai pemberian suap dan/atau bernilai kurang dari Rp3.000.000 per orang/perusahaan/tahun dapat diterima sebagai suatu Kepatutan dalam pergaulan sehari-hari dengan ketentuan:
   a. Mencantumkan logo/nama perusahaan pemberian yang merupakan bagian dari kegiatan promosi perusahaan pemberi.
   b. Pemberian tersebut tidak dilakukan secara terus menerus oleh pemberi yang sama kepada jajaran Perusahaan maksimal 3 (tiga) kali/tahun
   c. Setiap individu jajaran Perusahaan tidak melakukan pembicaraan atau memberikan informasi internal Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau citra negatif Perusahaan.
4. Apabila individu jajaran Perusahaan menerima hadiah yang nilainya tidak melebihi ketentuan sebagaimana

a. Giving in the form of goods must include the Company's logo which is an integral part of the goods.
b. Giving is not carried out continuously to one party, a maximum of 3 (three) times/year.
c. The giving is not intended to bribe and/or influence the relevant party which can cause a negative image of the Company.

Accepting Gifts

1. The Company prohibits every individual in the Company's ranks from:
   a. Accepting gifts, bribes, and the like from any party that is known and reasonably suspected that the gifts, bribes, and the like are given to motivate them to do or not do something in their position that is contrary to their obligations.
   b. Requesting gifts, bribes, and the like from any party that is known or suspected to be used to influence decision-making, either their own decisions or those of authorized officials or to mobilize them to do or not do something in their position that is contrary to their obligations.
   c. Cutting or taking part of the amount of payment to a third party as compensation for carrying out their duties and obligations.
2. Every individual in the Company who receives a gift, regardless of the value and in any form, is required to report to their immediate superior using Form 1.
3. Excluded from the provisions as referred to in paragraph (1), acceptance of gifts from any party in the context of company promotion, tokens of gratitude, religious holiday gifts, souvenirs and keepsakes intended as bribes and/or worth less than Rp3,000,000 per person/company/year can be accepted as an Appropriateness in daily interactions with the following provisions:
   a. Including the logo/name of the giving company which is part of the promotional activities of the giving company.
   b. The gift is not given continuously by the same giver to the Company's staff, maximum 3 (three) times/year
   c. Each individual in the Company's staff does not engage in discussions or provide internal Company information that may cause a conflict of interest or a negative image of the Company.
4. If an individual in the Company's staff receives a gift whose value does not exceed the provisions as

dimaksud pada ayat (3), maka penerima hadiah tersebut, dengan persetujuan pimpinannya, dapat menyimpan dan memanfaatkan hadiah tersebut.

5. Jika hadiah yang diterima dianggap sebagai hal yang tidak patut, maka kewajiban bagi penerima hadiah untuk mengembalikan kepada si pemberi dengan mengucapkan terima kasih dan penjelasan mengenai Kebijakan ini, dengan menggunakan Formulir 2.
6. Jika pemberi tidak diketahui alamatnya atau alamatnya berada di tempat yang jauh atau di luar negeri, maka cukup Formulir 2 saja yang dikirimkan sedangkan hadiahnya diberikan kepada lembaga sosial yang ditentukan oleh Perusahaan.

Sistem Pelaporan Gratifikasi

Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan melalui aplikasi e-Gratifikasi yang dapat di akses oleh seluruh pegawai PTBA melalui Aplikasi CISEA modul Gratifikasi https://cisea.bukitasam.co.id/ akan tetapi sampai saat ini Aplikasi e-Gratifikasi belum dapat diakses karena masih dalam proses *improvement*/pengembangan dan untuk pelaporan gratifikasi saat ini hanya dapat disampaikan secara manual (tertulis) dan/atau melalui alamat email: upg-ptba@bukitasam.co.id yang ditujukan ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Bukit Asam.

Sosialisasi Gratifikasi

Perusahaan melaksanakan sosialisasi gratifikasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran (*awareness*) Insan Perusahaan. Tahun 2024, Kegiatan sosialisasi gratifikasi dilaksanakan oleh SPI pada saat pembukaan audit operasional dan audit tujuan tertentu sebanyak 12 kali.

Sebagai bentuk komitmen PTBA terhadap pengendalian gratifikasi, selain kepada Insan PTBA, sosialisasi gratifikasi juga dilakukan oleh Perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui email Unit Pengendalian Gratifikasi (upg-ptba@bukitasam.co.id).

Jumlah Pengaduan

Sepanjang tahun 2024, tercatat tidak ada pengaduan atas penerimaan gratifikasi kepada KPK. Adapun rekapitulasi laporan gratifikasi tahun 2024, sebagai berikut:

referred to in paragraph (3), then the recipient of the gift, with the approval of his/her leader, may keep and use the gift.

5. If the gift received is considered inappropriate, then the recipient of the gift is obliged to return it to the giver by expressing gratitude and an explanation regarding this Policy, using Form 2.
6. If the giver's address is unknown or his/her address is in a faraway place or abroad, then only Form 2 is sent while the gift is given to a social institution determined by the Company.

Gratification Reporting System

Gratification reporting can be submitted through the e-Gratification application which can be accessed by all PTBA employees through the CISEA Application Gratification module https://cisea.bukitasam.co.id/ however, until now the e-Gratification Application cannot be accessed and is still in the process of improvement/development and for gratification reporting, it can only be submitted manually (in writing) and/or via email address: upg-ptba@bukitasam.co.id which is addressed to the Bukit Asam Gratification Control Unit (UPG).

Gratification Socialization

The Company carries out gratification socialization as an effort to increase awareness of Company Personnel. In 2024, gratification socialization activities were carried out by SPI at the opening of operational audits and specific purpose audits 12 times.

As a form of PTBA's commitment to controlling gratification, in addition to PTBA Personnel, gratification socialization is also carried out by the Company to all stakeholders via the Gratification Control Unit email (upg-ptba@bukitasam.co.id).

Number of Complaints

Throughout 2024, there were no complaints regarding the receipt of gratuities to the KPK. The recapitulation of gratuity reports in 2024 is as follows:

Periode Laporan Reporting Period	**Jumlah Laporan Masuk** Number of Reports Received	**Jumlah Tindak Lanjut** Number of Follow-up	**Status** Status
September	2	2	Closed
Jumlah Total	**2**	**2**	**Sudah ditindaklanjuti (Closed)**

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

State Officials Wealth Report

Salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan turut serta mendukung penyelenggaraan negara yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Wujud pelaksanaannya adalah dengan menerapkan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada para pejabat Bukit Asam yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Negara, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tertulis dalam formulir LHKPN, yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK. Dalam hal ini, KPK menjalankan upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Pelaksanaan LHKPN memiliki tujuan untuk menciptakan penyelenggara negara yang taat pada asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap penyelenggara negara dituntut untuk mengungkapkan secara jujur, benar, dan lengkap kekayaannya kepada KPK.

One form of the company's commitment in implementing good corporate governance is by participating in supporting the implementation of a state that is free from Corruption, Collusion, and Nepotism practices as stipulated in Law No. 28 of 1999 concerning State Officials Who Are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism. The form of implementation is by implementing the obligation to submit the State Officials' Wealth Report (LHKPN) to Bukit Asam officials who are designated as State Officials, in accordance with Corruption Eradication Commission (KPK) Regulation No. 7 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of State Officials' Wealth. LHKPN is a list of all State Officials' Wealth written in the LHKPN form, which is determined by the Corruption Eradication Commission (KPK) as regulated in the KPK Decree. In this case, the KPK carries out efforts to prevent corruption, including through registration and examination of LHKPN. The implementation of LHKPN aims to create state administrators who adhere to the general principles of state administrators who are free from corruption, collusion, and nepotism, as well as other reprehensible acts. Every state administrator is required to honestly, correctly, and completely disclose their wealth to the KPK.

Dasar Hukum

Dasar hukum penyampaian LHKPN di Bukit Asam, mengacu pada ketentuan berikut:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN);
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Menteri BUMN No. 10/ MBU/06/2021 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

Legal Basis

The legal basis for submitting LHKPN in Bukit Asam refers to the following provisions:

1. Law No. 28 of 1999 concerning State Administrators Who Are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism;
2. KPK Regulation No. 7 of 2016 concerning Procedures for Registration of Announcement and Examination of State Administrators' Wealth (LHKPN);
3. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission;
4. Regulation of the Minister of SOEs No. 10/ MBU/06/2021 concerning Reporting of State Administrators' Wealth within the Ministry of State-Owned Enterprises.
5. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/ MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;

Pelaksanaan LHKPN di Lingkup Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Direksi PTBA No. 021/Kep/Int-0100/OT.01/2017, pejabat PTBA yang wajib menyampaikan LHKPN yaitu:
1. Dewan Komisaris;
2. Dewan Direksi;
3. Pejabat pada kategori jabatan manajer utama atau fungsional utama; dan
4. Manajer madya atau fungsional madya.

Realisasi LHKPN Tahun 2024

Realisasi penyampaian LHKPN oleh Wajib Lapor LHKPN PTBA pada tahun 2024 mencapai 97,12%.

Implementation of LHKPN in the Company Scope

Based on the Decree of the Board of Directors of PTBA No. 021/Kep/Int-0100/OT.01/2017, PTBA officials who are required to submit LHKPN are:
1. Board of Commissioners;
2. Board of Directors;
3. Officials in the main manager or main functional position category; and
4. Middle manager or middle functional.

Realization of LHKPN in 2024

The realization of LHKPN submission by PTBA LHKPN Reporters in 2024 reached 97.12%.

Benturan Kepentingan
Conflict of Interest

Guna menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan, Perusahaan memiliki Pedoman Benturan Kepentingan yang disahkan berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 14/SK/PTBA-DEKOM/IX/2020 dan No. 404/0100/2020 tentang Penerapan Prinsip dan Praktik *Good Corporate Governance* untuk Kebijakan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) Perusahaan. Benturan Kepentingan merupakan situasi/kondisi yang memungkinkan Insan PTBA memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimiliki dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilakukan secara obyektif dan berimplikasi pada pencapaian kinerja dan citra Perusahaan dalam jangka panjang. Insan PTBA wajib menghindari segala bentuk potensi benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan, melalui pembebasan diri dari situasi tersebut dengan melaporkannya kepada pimpinan atau yang bertanggungjawab atas penanganan benturan kepentingan. Perusahaan menerapkan 2 (dua) prinsip utama yang harus diikuti seluruh jajaran Perusahaan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, yaitu:
1. Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk ke pentingan orang atau pihak lain yang terkait dengan Perusahaan;
2. Menghindari setiap aktivitas luar dinas yang dapat memengaruhi secara negatif terhadap independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan yang bertentangan dengan jabatan atau yang dapat merugikan Perusahaan.

In order to avoid potential conflicts of interest, the Company has Conflict of Interest Guidelines ratified based on Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 14/SK/PTBA-DEKOM/IX/2020 and No. 404/0100/2020 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Principles and Practices for the Company's Conflict of Interest Policy. Conflict of Interest is a situation/condition that allows PTBA Personnel to take advantage of their position and authority in the Company for personal, family, or group interests, so the mandated tasks cannot be carried out objectively and have implications for the achievement of the Company's performance and image in the long term. PTBA Personnel are required to avoid all forms of potential conflicts of interest that can harm the Company, by freeing themselves from such situations by reporting them to the leadership or those responsible for handling conflicts of interest. The Company applies 2 (two) mandatory main principles to be followed by all levels of the Company to prevent conflicts of interest, namely:

1. Not taking advantage of their position for personal interests or for the interests of other people or parties related to the Company;
2. Avoid any off-duty activities that may negatively influence independence and objectivity in decision-making that is contrary to the position or that may be detrimental to the Company.

Penyediaan Dana untuk Kegiatan Politik
Provision of Funds for Political Activities

Perusahaan mengakui hak setiap Pegawai untuk menyalurkan aspirasi politiknya, dan tidak memaksa atau membatasi hak individu untuk menyalurkan aspirasi politiknya sebatas diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun berkenaan dengan penyediaan dana oleh Perusahaan untuk kegiatan politik, sesuai dengan Kebijakan yang berlaku di PTBA, Perusahaan melarang penggunaan asset maupun memberikan dana atau sumbangan dalam bentuk apapun kepada partai politik ataupun kegiatan politik lainnya di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company recognizes the right of every Employee to channel their political aspirations, and does not force or limit the rights of individuals to channel their political aspirations to the extent permitted by applicable laws and regulations. However, regarding the provision of funds by the Company for political activities, in accordance with the Policy in force at PTBA, the Company prohibits the use of assets or providing funds or donations in any form to political parties or other political activities outside the provisions of applicable laws and regulations.

Pemenuhan Hak terhadap Kreditor
Fulfillment of Rights Against Creditors

Perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan pemenuhan terhadap hak-hak kreditur, hal tersebut dilakukan sebagai wujud penerapan tata kelola perusahan yang baik. Untuk menjamin hal tersebut, perusahaan telah menuangkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor:20/SK/PTBA-DEKOM/2024 dan Nomor:277/0100/2023 tentang Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis PT Bukit Asam Tbk *(Code of Conduct)*, terkait hubungan dengan kreditur di mana pada intinya, dalam berhubungan dengan kreditur untuk pinjaman dana untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah bagi perusahaan dilakukan dengan mengedepankan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon kreditur/investor termasuk penggunaan dana.
2. Memilih kreditur berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari *fraud*, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
3. Menerima pinjaman yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian mengedepankan prinsip kewajaran (*fairness*).
4. Senantiasa memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur.
5. Senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif dan adil, dalam pemilihan sumber pendanaan dari pinjaman.

The Company is committed to always fulfilling creditor rights, this is done as a form of implementing good corporate governance. To ensure this, the company has stated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors Number: 20/SK/PTBA-DEKOM/2024 and Number: 277/0100/2023 concerning the Guidelines for Business Conduct and Ethics of PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct), related to relations with creditors where in essence, in dealing with creditors for loans for business interests and increasing added value for the company, the following matters are prioritized:

1. Providing actual and prospective information for prospective creditors/investors including the use of funds.
2. Choosing creditors based on aspects of credibility and bona fides that can be accounted for and free from fraud, corruption, collusion, and nepotism (KKN).
3. Receiving loans that are bound by a valid agreement with an agreement clause that prioritizes the principle of fairness.
4. Always provide open information about the use of funds to increase creditor confidence.
5. Always prioritize the principles of prudence, selectivity, competitiveness, and fairness, in selecting sources of funding from loans.

Transparansi Praktik *Bad Governance*

Transparency of Bad Governance Practices

Perusahaan menyadari pentingnya menghilangkan praktik *Bad Governance* di Perusahaan, yang dapat mengganggu sistem tata kelola perusahaan yang telah diupayakan Perusahaan selama ini. Hal ini sejalan dengan komitmen Perusahaan yang konsisten menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada setiap aktivitas Perusahaan.

The Company realizes the importance of eliminating Bad Governance practices in the Company, which can disrupt the corporate governance system that the Company has been striving for so far. This is in line with the Company's commitment to consistently implement Good Corporate Governance in every activity of the Company.

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan tidak pernah/pernah mendapatkan laporan adanya aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan.

Report on Company Activities that Pollute the Environment

Throughout 2024, the Company has never/ever received reports of Company activities that pollute the environment.

Pengungkapan Perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh Perusahaan, Entitas Anak, Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat

Perusahaan mengungkapkan perkara penting yang berdampak material yang dihadapi oleh Perusahaan, Anak Perusahaan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat dalam Laporan Tahunan, yang dapat dilihat pada Bagian Perkara Hukum dalam Bab ini.

Disclosure of Important Cases Being Faced by the Company, Subsidiaries, Members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners in office

The Company discloses important cases with material impacts faced by the Company, Subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners in the Annual Report, which can be seen in the Lawsuit Section in this Chapter.

Pengungkapan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Perusahaan senantiasa patuh pada peraturan perundangundangan, termasuk dalam hal perpajakan. Setiap tahunnya, Perusahaan taat dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, baik berupa pajak penghasilan, pajak badan, ataupun pajak lainnya. Perusahaan tidak pernah memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi berkaitan dengan sengketa perpajakan, sebagaimana disampaikan pada Bagian Perkara Hukum berkenaan dengan sengketa perpajakan dalam Bab ini.

Disclosure of Compliance with Tax Obligations

The Company always complies with laws and regulations, including in terms of taxation. Every year, the Company complies in making tax payments and reporting, whether in the form of income tax, corporate tax, or other taxes. The Company has never received a guilty verdict from the highest tax court related to tax disputes, as stated in the Legal Cases Section regarding tax disputes in this Chapter.

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan tahunan dan laporan keuangan dipublikasikan oleh Perusahaan secara tepat waktu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan segala informasi, analisa, dan pembahasan kinerja pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan tahun 2023 dan tahun

Non-Conformity of Presentation of Annual Report and Financial Statements with Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (SAK)

The annual report and financial statements are published by the Company in a timely manner in accordance with applicable rules and regulations, and all information, analysis, and discussion of performance in this annual report refer to the Financial Statements for 2023 and

2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM).

Perusahaan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia.

Kasus terkait Buruh dan Karyawan

Perusahaan membina hubungan kerja yang baik dengan karyawan berlandaskan tata kelola perusahaan yang baik. Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat kasus hubungan industrial berkaitan dengan pegawai Bukit Asam, sebagaimana disampaikan pada Bagian Pelanggaran Hukum Terkait Perburuhan, Ketenagakerjaan, Konsumen, Kepailitan, Komersial, Persaingan atau Lingkungan dalam Bab ini. Hubungan kerja antara Perusahaan dengan pegawai berjalan baik dan tidak terdapat konflik.

Pengungkapan Segmen Operasi pada Laporan Keuangan Perusahaan telah menyajikan segmen operasi pada Laporan Keuangan *Audited* tahun 2024 sesuai dengan PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015). Di mana Perusahaan telah menyajikannya menurut pengelompokkan (segmen) jenis usaha antara lain bidang industri tambang batu bara dan berdasarkan lokasi geografis sebagai bentuk pelaporan segmen operasi, seperti yang telah disampaikan dalam Laporan Keuangan *Audited* tahun 2024 catatan.

Kesesuaian Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan Digital

Laporan Tahunan Perusahaan baik yang disampaikan kepada Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan, maupun Laporan Tahunan Digital yang telah diunggah pada situs web resmi Perusahaan, telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perusahaan, sehingga tidak terdapat perbedaan pada isi dan substansi.

2024 which have been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM).

The Company prepares and presents Financial Statements based on Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), including Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board ("DSAK") of the Indonesian Institute of Accountants.

Cases related to Labor and Employees

The Company maintains good working relationships with employees based on good corporate governance. Throughout 2024, there were no industrial relations cases related to Bukit Asam employees, as stated in the Section on Violations of Labor, Employment, Consumer, Bankruptcy, Commercial, Competition, or Environment Laws in this Chapter. The working relationship between the Company and employees is considered good with no conflicts.

Disclosure of Operating Segments in Financial Statements
The Company has presented operating segments in the 2024 Audited Financial Statements in accordance with PSAK No. 5 (2015 Adjustment). Where the Company has presented it according to the grouping (segment) of business types including the coal mining industry and based on geographical location as a form of reporting operating segments, as stated in the 2024 Audited Financial Statements notes.

Conformity of the Annual Report Book and the Digital Annual Report

The Company's Annual Report, both submitted to Shareholders, Stakeholders, and the Digital Annual Report that has been uploaded on the Company's official website, is in accordance with the Annual Report book printed and published by the Company. There is no difference in content and substance.

Laporan Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Report

Sejalan dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN No. 02/2023"), PTBA sebagai Anak Perusahaan BUMN senantiasa berkomitmen dalam menerapkan kewajiban Tata Kelola Terintegrasi (TKT) dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pada aktivitas dan proses pengambilan keputusan, dalam upaya memberikan nilai maksimal bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dalam penerapan TKT, PTBA berpedoman pada peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku, khususnya peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara, serta *best practices*. Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional, dan kewajaran secara terintegrasi dengan Anak dan Afiliasi Perusahaan.

PTBA sebagai Anak Perusahaan BUMN wajib menerapkan TKT dalam melaksanakan manajemen risiko, paling sedikit meliputi:

1. Penetapan dan pemantauan implementasi kebijakan pada tingkat PTBA yang diharmonisasikan dengan kebijakan fungsional pada anak perusahaan dan afiliasi PTBA, dengan ketentuan bahwa Direksi PTBA tetap tidak mengambil alih peranan dan tanggung jawab Direksi pada anak perusahaan dan afiliasi perusahaan.
2. Pelaksanaan tugas pembinaan untuk memastikan keselarasan dan sinergitas strategi PTBA dengan anak perusahaan dan afiliasi perusahaan.
3. Pemantauan risiko secara terstruktur dan terintegrasi antara PTBA dengan anak perusahaan dan afiliasi perusahaan;
4. Peran Dewan Komisaris PTBA dalam menjalankan fungsi TKT.

In line with the enactment of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Significant Corporates Governance and Activity Guidelines for State-Owned Enterprises ("Regulation of the Minister of SOEs No. 02/2023"), PTBA as a Subsidiary of SOE is always committed to implementing the Integrated Governance (IG) obligations in carrying out its business activities, including decision-making activities and processes, in an effort of providing maximum value for shareholders and stakeholders.

In implementing the IG, PTBA relies on tbe applicable laws and policies, particularly regulations stipulated by the Ministry of State-Owned Enterprises, as well as the best practices. Integrated Governance is a governance that applies the transparency, accountability, accountability, independence, professionalism and fairness principles in integrated manners with subsidiaries and affiliated companies.

PTBA as a as a Subsidiary of SOE is obliged to apply the IG in carrying out risk management, including at least:

1. Determination and monitoring of policy implementation at the PTBA level which is harmonized with functional policies in subsidiaries and affiliated companies, provided that the Board of Directors of PTBA does not take over the roles and responsibilities of the Board of Directors in subsidiaries and affiliated companies.
2. Implementation of coaching tasks to ensure the alignment and synergy of PTBA's strategies with those subsidiaries and affiliated companies.
3. Risk monitoring on structured and integrated basis between PTBA with subsidiaries and affiliated companies.
4. Role of the Board of Commissioners of PTBA in implementing the IG function.

Penetapan Kategori dan Klasifikasi Risiko PTBA

Bahwa sehubungan dengan berlakunya Permen BUMN No. 2/2023 yang diundangkan pada 3 Maret 2023, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 53, MIND ID telah menetapkan PTBA sebagai Anak Perusahaan BUMN dengan kategori Individu dan klasifikasi risiko Sistemik A berdasarkan Keputusan Direksi MIND ID Nomor RIS-005/DIR/2023 tanggal 15 Agustus 2023 jo. Surat Direktur Manajemen Risiko & HSSE MIND ID Nomor 171/E. DIRMRHSSE/X/2023 perihal Penetapan Kategori dan Klasifikasi Risiko PT Bukit Asam Tbk ("PTBA").

Laporan Tata Kelola Terintegrasi (TKT)

Laporan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan dengan metode self-assessment mengacu ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN, laporan ini disampaikan secara triwulanan kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku induk perusahaan PTBA.

Determination of Risk Categories And Classification For PTBA

That in relation to the enactment of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. 2/2023, promulgated on March 3, 2023, with reference to the provisions of Article 53, MIND ID has determined PTBA as a subsidiary of SOE with individual category and risk classification Systemic A pursuant to Decision of the Board of Directors of MIND ID Number RIS005/DIR/2023 dated August 15, 2023 jo. Letter from the Director of Risk Management & HSSE of MIND ID Number 171/E. DIRMRHSSE/X/2023 regarding Determination of Risk Categories and Classifications for PT Bukit Asam Tbk ("PTBA").

Integrated Governance (IG) Report

The Integrated Governance Report is conducted by self-assessment pursuant to the terms and requirements as enacted by Ministry of SOEs, this report is submitted quarterly to PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as PTBA's holding company.







Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Corporate Social Responsibility

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan
Sustainable Performance Highlights



PTBA berkomitmen untuk dapat memberikan dampak positif kepada pemangku kepentingan dari operasional yang dijalankannya. Karena itu, Perusahaan mendorong terciptanya praktik usaha yang berlandaskan pada nilai-nilai keberlanjutan dengan menjadikan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) sebagai landasan utama.

Perusahaan telah menerapkan *good mining practice* yang diyakini sebagai teknik pertambangan yang sesuai dengan konsep pertambangan berkelanjutan, sehingga kegiatan pertambangan dapat diwujudkan secara bertanggung jawab dan semakin mensejahterakan masyarakat. Selain itu, Perusahaan juga telah mengambil sejumlah inisiatif yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), salah satunya dengan menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, pelestarian terhadap lingkungan, dan pemberdayaan berbasis masyarakat.

Tidak hanya itu, sebagai bagian dari BUMN, PTBA juga menjalankan program TJSL sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

PTBA is committed to providing a positive impact to stakeholders from its operations. Therefore, the Company encourages the creation of business practices based on sustainable values by making environmental, social and governance (ESG) aspects the main foundation.

The Company has implemented good mining practices which are believed to be mining techniques that are in accordance with the concept of sustainable mining, in order to carry out mining activities responsibly and improve the welfare of the community. In addition, the Company has also taken a number of initiatives that directly contribute to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) targets, one of which is by implementing the Social and Environmental Responsibility (CSR) program which aims to create economic independence for the community, environmental preservation, and community-based empowerment.

Not only that, as part of SOEs, PTBA also executes the CSR program as mandated in the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-1/MBU/03/2023 of 2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises.

Aspek Ekonomi
Economic Aspect

Kuantitas Produk/Jasa yang Dijual
Quantity of Products/Services Sold



Kategori Produk
Product Category

2024
9 Produk Batu bara
9 Coal Products

2023
10 Produk Batu bara
10 Coal Products

2022
10 Produk Batu bara
10 Coal Products

Pendapatan
Revenue



Juta Rupiah
Million Rupiah

2024
42.764.968

2023
38.488.867

2022
42.648.590

Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity



Juta Rupiah
Million Rupiah

2024
5.103.720

2023
6.105.856

2022
12.567.582

Produk Ramah Lingkungan
Eco-Friendly Product



Unit Produk
Product Unit

2024
3 PLTS | SPPP
3 PLTS | SPPP

2023
2 PLTS
2 SPPP

2022
2 PLTS
2 SPPP

Pelibatan Pihak Lokal (Dalam Negeri)
Local Supplier Involvement (Domestic)



2024
374
Perusahaan/Mitra
Companies/Partners

2023
455

2022
421

Total Penerimaan Negara
Total State Revenue



Juta Rupiah
Million Rupiah

2024
9.442.056

2023
16.065.289

2022
15.698.629

Aspek Lingkungan
Environmental Aspect

Penggunaan BBM (Solar)
Fuel Consumption (Diesel)

Kiloliter I Gigajoule

2024: 359.663 | 13.913.202

2023: 338.550 | 13.096.478

2022: 265.415 | 10.267.367

Penggunaan Listrik
Electricity Consumption

kWh | Gigajoule

2024: 140.034.608 | 504.462

2023: 131.428.080 | 473.457

2022: 125.616.851 | 452.221

Jumlah Penggunaan Energi
Total Energy Usage

kWh | Gigajoule

2024: 14.417.818

2023: 13.570.094

2022: 10.720.399

Emisi Gas Rumah Kaca
Greenhouse Gas (GHG) Emission

ton CO2e

2024: 1.091.329

2023: 1.028.230

2022: 828.914

Hasil Absolut Penurunan Emisi
Absolute Emission Reduction Results

ton CO2e

2024: 305.523

2023: 323.296

2022: 182.792

Penggunaan Air
Water Usage

Megaliter

2024: 3.253,11

2023: 2.029,72

2022: 2.177,50

Pengurangan (Penambahan) Air Limbah Non-B3
Reduction (Addition) of Non-hazardous Waste Water

Megaliter

2024: (16.764)

2023: 11.064

2022: (90.085)

Pengurangan (Penambahan) Limbah Padat Non-B3
Reduction (Addition) of Non-hazardous Solid Waste

Ton | Tons

2024: 94,14

2023: (5,73)

2022: 2,78

Pengurangan (Penambahan) Limbah Padat dan Cair B3
Reduction (Addition) of Hazardous Solid and Liquid Waste

Ton | Tons

2024
(3,5)

2023
(1.221,82)

2022
(1.078,16)

Biaya Lingkungan
Environmental Costs



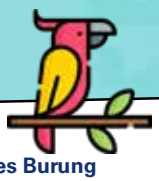
Juta Rupiah
Million Rupiah

2024
369.235

2023
253.759

2022
173.228

Pelestarian Keanekaragaman Hayati
Biodiversity Preservation



2024
121 Spesies Burung
121 Species of Birds

Spesies | Species



2024
23 Jenis Tanaman
23 Types of Plants

Spesies | Species



2024
14 Spesies Mamalia
14 Species of Mammals

Spesies | Species



2024
15 Spesies Herpetofauna
15 Species of Herpetofauna

Spesies | Species

2023

13 Spesies Mamalia | 13 Species of Mammals
122 Spesies Burung | 122 Species of Birds
12 Spesies Herpetofauna | 12 Species of Herpetofauna
22 Jenis Tanaman | 22 Types of Plants

2022

13 Spesies Mamalia | 13 Species of Mammals
90 Spesies Burung | 90 Species of Birds
2 Spesies Herpetofauna | 2 Species of Herpetofauna
21 Jenis Tanaman | 21 Types of Plants

Aspek Sosial
Social Aspect

Jumlah Total Pegawai
Total Number of Employee



Orang | Person

2024	2023	2022
1.679	1.561	1.599

Jumlah Pegawai Wanita
Number of Female Employee



Orang | Person

2024	2023	2022
331	298	292

Perputaran Pegawai
Employee Turnover



Orang | Person

2024	2023	2022
0,36	0,26	0,31

Penyakit Akibat Kerja
Occupational Disease



Kasus
Case

2024	2023	2022
0	0	0

Sumbangan
Donation



Juta Rupiah
Million Rupiah

2024	2023	2022
172.919	191.093	277.261

Pendanaan UMK
MSE Funding



Juta Rupiah
Million Rupiah

2024	2023	2022
4.700	31.564	8.500

Dana Bantuan untuk Kegiatan TJSL Lainnya
Other CSR Activities Funding



Juta Rupiah
Million Rupiah

2024	2023	2022
65.975	66.936	208.880

Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction



Skor dari skala 4
Score of Scale 4

2024	2023	2022
3,76	3,60	3,57

Inisiatif Eksternal Terkait *Sustainability*

External Initiatives related to Sustainability



Sertifikasi ISO 50001:2018

(Sistem Manajemen Energi)

PTBA berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 50001:2018 (Sistem Manajemen energi), hal ini menandakan komitmen kuat PTBA dalam mengelola energi secara efisien, meningkatkan kinerja energi secara berkelanjutan, serta mendukung upaya keberlanjutan dan pengurangan emisi karbon sesuai dengan standar internasional.

50001:2018 Certification

(Energy Management System)

PTBA has successfully maintained its ISO 50001:2018 certification (Energy Management System), which signifies PTBA's strong commitment to managing energy efficiently, improving energy performance sustainably, and supporting sustainability efforts and reducing carbon emissions in accordance with international standards.



Penghargaan PROPER

PTBA mendapatkan 2 PROPER Emas untuk unit Pertambang Tanjung Enim dan Pelabuhan Tarahan. Selain itu PTBA juga, mendapatkan 1 PROPER Hijau untuk Unit Dermaga Kertapati. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kinerja lingkungan perusahaan.

PROPER Awards

PTBA received 2 Gold PROPERs for the Tanjung Enim Mining and Tarahan Port units. In addition, PTBA also received 1 Green PROPER for the Kertapati Barging Port Unit. This award was given by the Ministry of Environment and Forestry for the company's environmental performance.



Global ESG Award

PTBA meraih 2 penghargaan Platinum dan 2 penghargaan Gold dalam ajang Global ESG Award, yang mencerminkan komitmen PTBA dalam melampaui kepatuhan regulasi (*beyond compliance*) serta mengimplementasikan prinsip ESG secara optimal, khususnya di bidang sosial dan lingkungan.

Global ESG Award

PTBA won 2 Platinum awards and 2 Gold awards in the Global ESG Award event, reflecting PTBA's commitment to going beyond regulatory compliance and implementing ESG principles optimally, especially in the social and environmental fields.

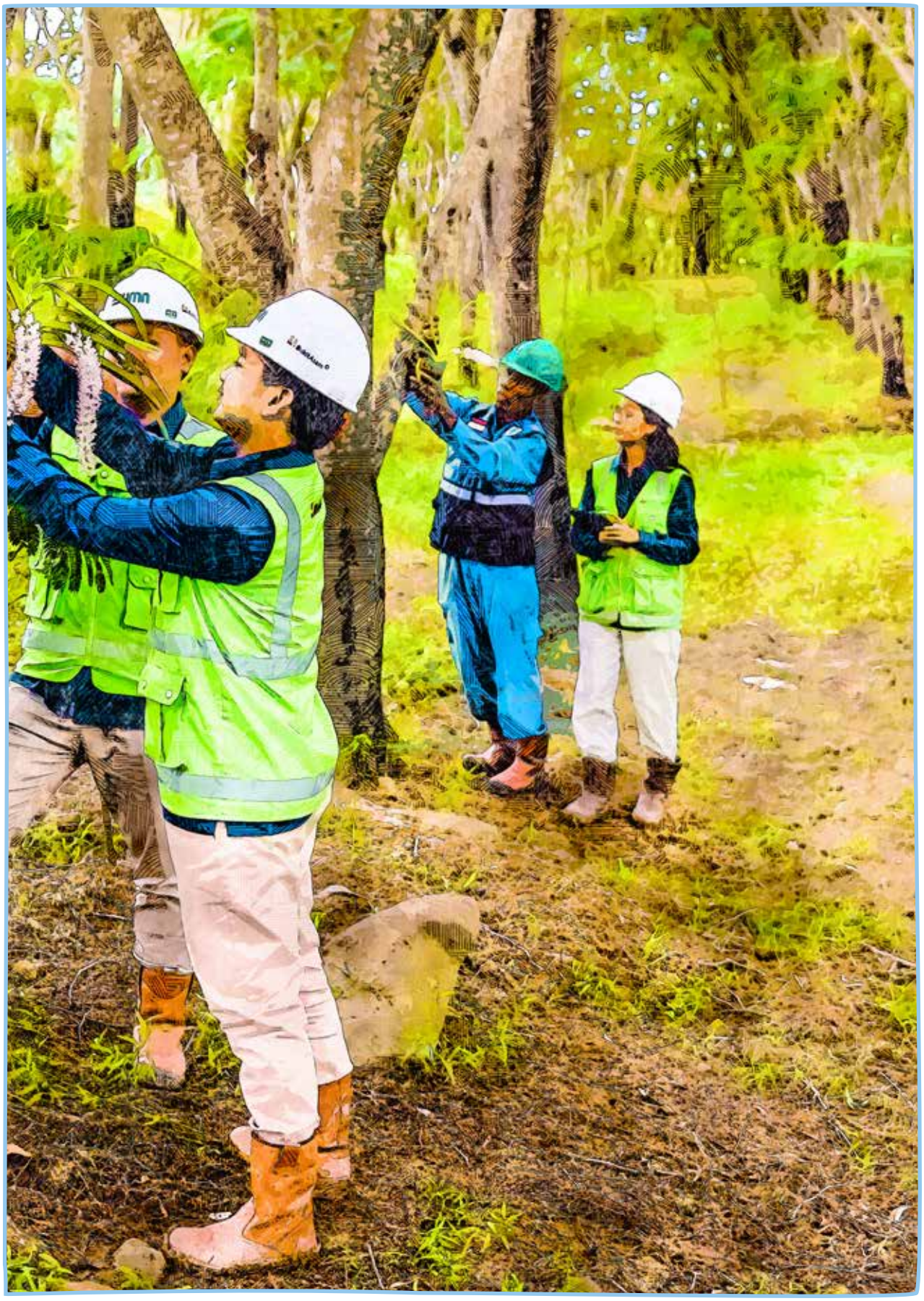
Carbon Disclosure Project
Perusahaan mempertahankan rating "B" untuk kategori climate change, yang merupakan rata-rata tertinggi dari capaian industri sejenis di kelasnya.

Carbon Disclosure Project
The company maintains a "B" rating for the climate change category, which is the highest average of similar industry achievements in its class.

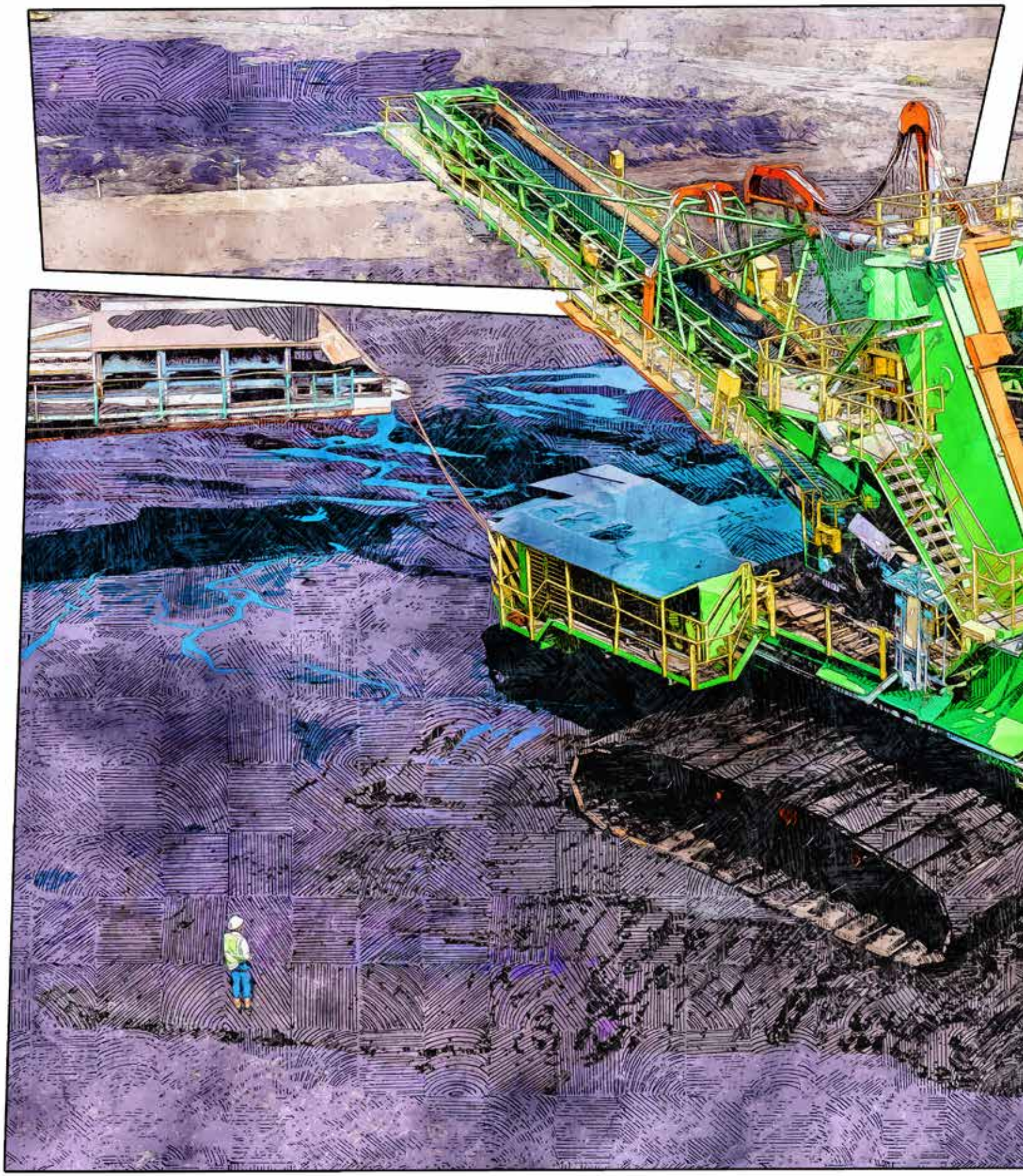
Informasi Lebih Lanjut
Further Information

Uraian lebih lengkap terkait program TJSL PTBA dan penerapan aspek ESG di lingkungan di Perusahaan dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan dan Laporan TJSL yang diterbitkan secara terpisah namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

A more complete description of PTBA's CSR program and the implementation of ESG aspects in the Company's environment can be seen in the Sustainability Report and CSR Report which are published separately but are an integral part of this Annual Report.



BukitAsam





Referensi POJK, SEOJK, dan Kriteria ARA, dan ACGS

Reference of POJK, SEOJK, ARA, and ACGS

Referensi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 Reference: Annual Report of Issuer or Public Company

No.	Uraian Description	Halaman Page
1.	**Ketentuan Umum** General Terms	
	a. Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai: 1. Ikhtisar data keuangan penting; 2. Informasi saham (jika ada); 3. Laporan Direksi; 4. Laporan Dewan Komisaris; 5. Profil Emiten atau Perusahaan Publik; 6. Analisis dan pembahasan manajemen; 7. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; 8. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; 9. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan 10. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan; a. The Annual Report shall at least include the following information: a. An overview of important financial data; b. Share information (if any); c. Board of Directors' report; d. Board of Commissioners' report; e. Issuer or Public Company profiles; f. Management discussion and analysis; g. Issuer or Public Company governance; h. Issuer or Public Company social and environmental responsibility; i. Audited annual financial statements; and j. A statement from the Board of Directors and the Board of Commissioners on their responsibility for the Annual Report;	✔
	b. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami/ Annual reports can present information in the form ofpictures, graphs, tables, and / or diagrams clearly statingthe title and / or description, which is easy to read and understand	
2.	**Uraian Isi Laporan Tahunan** Annual Report Contents Description	
A.	**Ikhtisar Data Keuangan Penting** **Summary of Important Financial Data**	
	Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Financial Highlights includes financial information presented in the form of comparison for 3 (three) financial years, or since starting a business if the Issuer's or the Public Company's business activities are less than 3 (three) years, and should at least include:	
	1. Pendapatan/penjualan; Revenue/sales;	22
	2. Laba bruto; Gross profit;	22
	3. Laba (rugi); Profit (loss);	22
	4. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; Total profit (loss) attributable to owners of the parent and non-controlling interests;	22
	5. Total laba (rugi) komprehensif; Total comprehensive profit (loss);	22
	6. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; Total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent and non- controlling interests;	22
	7. Laba (rugi) per saham; Profit (loss) per share;	22
	8. Jumlah aset; Total assets;	20
	9. Jumlah liabilitas; Total liabilities;	21

No.	Uraian Description	Halaman Page
	10. Jumlah ekuitas; Total equities;	21
	11. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; Profit (loss) to total assets ratio;	24
	12. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; Profit (loss) to equity ratio;	24
	13. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; Profit (loss) to revenue/sales ratio;	24
	14. Rasio lancar; Current ratio;	24
	15. Rasio liabilitas terhadap ekuitas; Liabilities to equity ratio;	24
	16. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan Liabilities to total assets ratio;	24
	17. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. Other information and financial ratios relevant to the Issuer or a Public Company and its industry type;	24
B.	**Informasi Saham** **Share Information**	
	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Share information for a Public Company shall at least contain: 1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: Shares issued for each quarter are presented in the form of comparison for the last 2 (two) years, to include at least: a. Jumlah saham yang beredar; Total outstanding shares; b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; Market capitalization based on the price on the Stock Exchange where the securities are listed; c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan The highest, lowest, and closing share price based on the Stock Exchange where the securities are listed; and d. Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. The volume of trading on the Stock Exchange where the securities are listed; Informasi dalam huruf b), huruf c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Information on the letter b), c), and d) is only disclosed if the shares are listed on the Stock Exchange;	28 28 28 28
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: In the event of a corporate action that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the shares' nominal value, conversion securities issuance, as well as capital additions and deductions, share information as referred to in number 1) shall be added with, at least, explanation regarding: a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi; Corporate action execution date; b. Rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; The ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares; c. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; The number of shares outstanding before and after the corporate action; d. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan The number of convertible securities exercised (if any); and e. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; Share price before and after the corporate action;	30 30 30 30 30
	3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan In the event of share trading temporary suspension (suspension) and/or shares delisting during the fiscal year, the shares' suspension and/or delisting reasons shall be explained; and	30
	4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut. If the share trading temporary suspension as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/ or cancellation of the share listing (delisting) shall be explained.	30

No.	Uraian Description	Halaman Page
C.	**Laporan Direksi** **Board of Directors Report**	
	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' Report shall, at the minimum, contain a brief description of: 1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: The Board of Directors' report shall, at the minimum, contain a brief description of:	
	a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; The strategy and strategic policy of the Issuer or Public Company;	70-72
	b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; The Board of Directors' role in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;	75-76
	c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; The process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;	76-77
	d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan Comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and	73-75
	e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; The constraints faced by the Issuer or Public Company;	73
	2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan Business prospects overview of the Issuer or Public Company; and	77-78
	3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. Governance implementation of the Issuer or Public Company.	81-82
D.	**Laporan Dewan Komisaris** **Board of Commissioner Report**	
	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners' Report shall, at the minimum, contain a brief description of: 1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; The Board of Directors' performance evaluation regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the strategies formulation and implementation for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;	52-61
	2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan View on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors;	61-62
	3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. View on the Issuer or Public Company's application of governance;	62-64
E.	**Profil Emiten atau Perusahaan Publik** **Profile of the Issuer or Public Company**	
	Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: Profile of the Issuer or Public Company contains, at the minimum, information of: 1. Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; The name of the Issuer or Public Company, including if there was any change of name, the reason for the change, and effective date of the name change during the fiscal year;	88
	2. Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: Access to Issuer or Public Company, including any branch offices or representative offices, which allows the public access to information on the Issuer or Public Company, including: a. Alamat; Address; b. Nomor telepon; Telephone number; c. Alamat surat elektronik; dan Electronic mail address; and d. Alamat situs web; Web site address;	 89 89 89 89
	3. Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; A brief history of Issuer or Public Company;	90-92
	4. Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan; The vision and mission of the Issuer or Public Company as well as the corporate culture or corporate values;	94-98
	5. Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; Business activities according to the last articles of association, the business activities carried out during the fiscal year, as well as the type of goods and/or services produced;	99-106

No.	Uraian Description	Halaman Page
	6. Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; The operational area of the Issuer or Public Company; Wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. The operational area is the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operating activities.	107-110
	7. Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; The organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at the minimum, the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;	112-115
	8. Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; A list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	111
	9. Profil Direksi, paling sedikit memuat: The profile of Directors, to at least include:	
	a. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; The name and position per the duties and responsibilities;	120-124
	b. Foto terbaru; A recent photograph;	120-124
	c. Usia; Age;	120-124
	d. Kewarganegaraan; Nationality;	120-124
	e. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; Educational and/or certification history;	120-124
	f. Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on: • Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; The legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned; • Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member, and other positions inside and outside the Issuer or Public Company. If a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and • Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. period of work experience both inside and outside the Issuer or Public Company.	120-124
	g. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including the names of affiliated parties. If the member has no affiliation relationship, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and	120-124
	h. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. If there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;	134

No.	Uraian Description	Halaman Page
	10. Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The profile of Board of Commissioners, to at least include:	
	a. Nama dan jabatan; The name and position;	128-133
	b. Foto terbaru; A recent photograph;	128-133
	c. Usia; Age;	128-133
	d. Kewarganegaraan; Nationality;	128-133
	e. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; Educational and/or certification history;	128-133
	f. Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on: • Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; The legal basis for appointment as a member of the Board of Commissioners of the Issuer or Public Company concerned; • Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; The legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned; • Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member, and other positions inside and outside the Issuer or Public Company. If a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed; and • Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Period of work experience both inside and outside the Issuer or Public Company.	128-133
	g. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including the names of affiliated parties. If the member has no affiliation relationship, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and	128-133
	h. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan Statement of independence of independent commissioners in the event that the independent commissioner has served for more than 2 (two) terms; and	128-133
	i. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. If there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;	134
	11. Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; In the event of changes in the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners' members that occurred after the fiscal year ends until the deadline for submission of the Annual Report, the composition to be included in the Annual Report is the latest and the previous composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners' members;	134
	12. Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	146-151

No.	Uraian Description	Halaman Page
	13. Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: Shareholders names and ownership percentage at the beginning and end of the fiscal year, which consists of information regarding: a. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; Shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company; b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares in the Issuer or Public Company. If all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and c. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; Community shareholder group, namely the group of shareholders whom each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company; Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. The above information can be presented in tabular form.	152 158 155-157
	14. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; The shares' indirect ownership percentage of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. If all members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.	158
	15. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: The number of shareholders and the percentage of ownership at the fiscal year-end based on the classification of: a. Kepemilikan institusi lokal; Local institutions ownership; b. Kepemilikan institusi asing; Foreign institutional ownership; c. Kepemilikan individu lokal; dan Local individual ownership; and d. Kepemilikan individu asing; Foreign individual ownership;	157
	16. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; Information regarding the major and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, to the individual owners, presented in the form of schematics or charts;	160-163
	17. Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; The name of the subsidiary, associate, joint venture company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.	164-173
	18. Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); A chronological listing of shares, number of shares, nominal value, and the offer price from the start of recording until the end of the financial year and the name of the Stock Exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	174-175
	19. Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18, yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); Other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);	176

No.	Uraian Description	Halaman Page
	20. Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: Information on the use of the services of a public accountant (AP) and a public accounting firm (KAP) and their networks/associations/allies include: a. Nama dan alamat; Name and address; b. Periode penugasan; Assignment period; c. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; Information on audit and/or non-audit services provided; d. Biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan Audit and/or non-audit fee for each assignment given during the fiscal year; and e. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan If AP and KAP and their networks/associations/allies, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/allies can be presented in tabular form.	176 176 176 176 176
	21. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP. Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.	177-181
F.	**Analisis dan Pembahasan Manajemen** **Management Discussion and Analysis**	
	Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management Discussion and Analysis shall include analysis and discussion of the financial statements and other important information with an emphasis on material changes that occurred during the fiscal year, to at least have: 1. Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: A review of operations per operating segment based on the Issuer or Public Company's type of industry, to name a few: a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; Production, including the process, capacity, and its development; b. Pendapatan/penjualan; dan Revenue / sales; and c. Profitabilitas; Profitability;	212-220 212-220 212-220
	2. Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: Comprehensive financial performance including a comparison of financial performance in the last 2 (two) years, an explanation of the cause of any changes and the impact of such changes, to name a few: a. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; Current assets, non-current assets, and total assets; b. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities; c. Ekuitas; Equity; d. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan Revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and e. Arus kas; Cash flow;	222-226 226-230 230-231 231-238 238-241
	3. Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; Ability to pay the debt by presenting the relevant ratios;	242-244
	4. Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; The collectibility level of the Issuer's or Public Company's receivables by presenting the relevant ratio calculations;	244-245
	5. Struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; Capital structure and management policies on capital structure accompanied by the basis for determining the policy;	246-248
	6. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: Discussion on material commitments for capital investments with explanations, to name a few: a. Tujuan dari ikatan tersebut; The purpose of such commitments; b. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; Sources of funds to meet such commitments; c. Mata uang yang menjadi denominasi; dan Currency-denominated; and d. Langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; Planned measures by the Issuer or Public Company to cover the risks of foreign currency positions;	248 248 248 248

No.	Uraian Description	Halaman Page
	7. Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: Discussion regarding capital goods investments realized in the last fiscal year, to name a few: a. Jenis investasi barang modal; Type of capital goods investments; b. Tujuan investasi barang modal; dan Capital goods investment objectives; and c. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; Value of capital goods investments realized;	 249 249 249
	8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); Material information and facts occurring after the date of the auditor's report (if any);	249
	9. Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; Business prospects of the Issuer or Public Company based on the condition of the industry, the general economy, and the international markets supporting quantitative data from trusted data sources;	273-277
	10. Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: Comparison between the targets/projections at the beginning of the year with the results achieved (realized), including: a. Pendapatan/penjualan; Revenue / sales; b. Laba (rugi); Profit (loss); c. Struktur modal (capital structure); atau Capital structure; or d. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; Other matters that are considered important for the Issuer or Public Company;	 250-251 250-251 250-251 250-251
	11. Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: Targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for one (1) year ahead, including: a. Pendapatan/penjualan; Revenues / sales; b. Laba (rugi); Profit (loss) c. Struktur modal (capital structure); Capital structure; d. Kebijakan dividen; atau Dividend policy; or e. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; Other matters that are considered important for the Issuer or Public Company;	 252 252 252 252 252
	12. Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; The Issuer or Public Company's marketing of goods and/or services, at least including the marketing strategy and market share;	208-211
	13. Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: Description of dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least: a. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; Dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income; b. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; Date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends; c. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan The amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and d. Jumlah dividen per tahun yang dibayar; The amount of dividends paid annually; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Disclosure of information can be presented in tabular form. If the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.	 254 254 254 254
	14. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: Realization of the use of proceeds from the public offering, provided that: a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan If, during the fiscal year, the Issuer must submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year; and b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; If there is a change in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change;	 256 256

No.	Uraian Description	Halaman Page
	15. Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: Material information (if any), among others regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the fiscal year, at least containing:	
	a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi; The date, value, and object of the transaction;	262-265
	b. Nama pihak yang melakukan transaksi; The name of the party conducting the transaction;	266-267
	c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada); The nature of the affiliation relationship (if any);	266-267
	d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; Explanation of the fairness of the transaction;	261
	e. Pemenuhan ketentuan terkait; dan Compliance with related provisions; and	258-268
	f. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: If there is an affiliation relationship, in addition to disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:	258-268
	• Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle); dan A statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out following generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle; and	261,268
	• Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle); The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out following generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle;	261,268
	g. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; For affiliated or material transactions, which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. If the affiliated or material transactions have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.	266-268
	h. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;	258-268
	i. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; If there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction; then this matter shall be disclosed;	258
	16. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan Changes in regulations and legislation that significantly impact the Issuer or Public Company and the impact on the financial statements (if any); and	269
	17. Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). Changes in accounting policies, reasons, and impact on the financial statements (if any);	270
G.	**Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik** **Corporate Governance of Issuer or Public Company**	
	Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The governance of the Issuer or Public Company shall, at the minimum, contain a brief description of: 1. RUPS, paling sedikit memuat: GMS, at the minimum, contains:	
	a. Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year include:	

No.	Uraian Description	Halaman Page
	• Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan The GMS' resolutions in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year are realized in the fiscal year; and	336-350
	• Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that has not been realized and the reasons for not realizing them;	336-350
	b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; If the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;	336
	2. Direksi, paling sedikit memuat: The Board of Directors, at the minimum, contains:	
	a. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. The duties and responsibilities of each member of the Board of Directors are described and can be presented in tabular form.	397-406
	b. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; A statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors;	394-395
	c. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Policies and implementation of the Board of Directors' meeting frequency, Board of Directors' meeting with the Board of Commissioners, and the Board of Directors member's attendance level in the meeting including attendance at the GMS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the Board of Directors member's level of attendance at the meeting of the Board of Directors, the meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or the GMS can be presented in tabular form.	413-419 333
	d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: Training and/or competency improvement of the Board of Directors members:	421 189-193
	• Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan Training and/or improving the competence of members of the Board of Directors policy, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and	420-421
	• Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);	189-193
	e. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: The Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain: • Prosedur penilaian kinerja; dan Performance appraisal procedures; and • Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan The criteria used, such as performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings; and	422-425
	f. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. If the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	
	3. Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The Board of Commissioners, at the minimum, contains:	
	a. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; Duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	354-365
	b. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; A statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners;	351

No.	Uraian Description	Halaman Page
	c. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Policies and implementation of the Board of Commissioners meeting frequency, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in such meetings including attendance at the GMS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the Board of Commissioners members' attendance level at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.	371-384 333
	d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:	
	• Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan Policy on training and/or improving the Board of Commissioners members' competence, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	384-385
	• Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);	186-189
	e. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: Performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at the minimum containing:	
	• Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; Procedures for implementing performance appraisals;	426 437-438
	• Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan The criteria used such as performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings; and	427, 430-431 438-439, 440, 445
	• Pihak yang melakukan penilaian; dan The party conducting the assessment; and	426-427 438
	f. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: The Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:	
	• Prosedur penilaian kinerja; dan Performance appraisal procedures; and	392
	• Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; The criteria used such as performance achievements during the fiscal year, competence, and attendance at meetings;	393
	4. Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:	
	a. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Nomination procedure, including a brief description of the policies and members nomination process of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners; and	450-456
	b. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:	
	• Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; Procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	457
	• Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan The remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus, and others; and	458-461
	• Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. The amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.	461-463

No.	Uraian Description	Halaman Page
	5. Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: The Sharia Supervisory Board, the Issuer or Public Company that runs the business activities based on Islamic principles as stated in the articles of association shall, at the minimum, include: a. Nama; Names; b. Dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; The legal basis for the appointment of the sharia supervisory board; c. Periode penugasan dewan pengawas syariah; The period of assignment of the sharia supervisory board; d. Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan Duties and responsibilities of the Shariah Supervisory Board; and e. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; Frequency and mode of administration advice and suggestions as well as monitoring compliance with Sharia Principles in the Capital Market of the Issuer or Public Company;	-
	6. Komite audit, paling sedikit memuat: The Audit Committee, including, at the minimum:	
	a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; Names and positions of the committee members;	479-483
	b. Usia; age;	479-483
	c. Kewarganegaraan; Nationality;	479-483
	d. Riwayat pendidikan; Education history;	479-483
	e. Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including:	
	• Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as a committee member;	479-483
	• Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan Concurrent positions as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or members of committees as well as other positions (if any); and	479-483
	• Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; Work experience both inside and outside the Issuer or Public Company;	479-483
	f. Periode dan masa jabatan anggota komite audit; Period and tenure of Audit Committee members;	478
	g. Pernyataan independensi komite audit; Statement of Audit Committee independence;	477-478 483-484
	h. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); Training and/or competency improvement that has been followed in the fiscal year (if any);	193 490-491
	i. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan Policy and implementation of Audit Committee meeting frequency and level of attendance of Audit Committee members at the meetings;	489-490
	j. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit; Implementation of Audit Committee activities in the fiscal year in the Audit Committee guidelines or charter;	491-492
	7. Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: The nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at the minimum, containing:	
	a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; names and positions of the committee members;	518-520
	b. Usia; Age;	524-526
	c. Kewarganegaraan; Nationality;	524-526
	d. Riwayat pendidikan; Education history;	524-526
	e. Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including:	
	• Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; Legal basis for appointment as a committee member;	524-526
	• Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan Concurrent positions as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or members of committees as well as other positions (if any); and	524-526

No.	Uraian Description	Halaman Page
	• Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; Work experience both inside and outside the Issuer or Public Company;	524-526
	f. Periode dan masa jabatan anggota komite; Period and tenure of committee members;	523
	g. Pernyataan independensi komite; Statement of committee independence;	522-523 527
	h. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); Training and/or competency improvement that has been followed in the financial year (if any);	195 531-532
	i. Uraian tugas dan tanggung jawab; Description of duties and responsibilities;	529-530
	j. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); Statement that it has established committee guidelines or charter;	521-522
	k. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; Policy and implementation of committee meeting frequency and level of attendance of committee members at the meetings;	530-531
	l. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan A brief description of the committee's activities in the fiscal year;	532
	m. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: If no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:	
	• Alasan tidak dibentuknya komite; dan Reasons for not forming the committee; and	-
	• Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; The party carrying out the nomination and remuneration function;	-
	8. Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: Other committees owned by Issuers or Public Companies to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and responsibilities of the Board of Commissioners, at the minimum, containing:	
	a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; Name and position in committee membership;	504-508
	b. Usia; Age;	504-508
	c. Kewarganegaraan; Nationality;	504-508
	d. Riwayat pendidikan; Educational history;	504-508
	e. Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on:	
	• Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; Legal basis for appointment as a committee member;	504-508
	• Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	504-508
	• Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; Work experience and period both inside and outside the Issuer or Public Company;	504-508
	f. Periode dan masa jabatan anggota komite; The period and term of office of the committee members;	503
	g. Pernyataan independensi komite; Statement of committee independence;	502-503 509
	h. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan Training and/or competency improvement that has been followed in the fiscal year (if any); and	194 514
	i. Uraian tugas dan tanggung jawab; Description of duties and responsibilities;	510-512
	j. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; A statement that the committee has had guidelines or charters;	501
	k. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan Policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members in those meetings; and	512-513
	l. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; A brief description of the committee's activities for the fiscal year;	514-517
	9. Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: Corporate Secretary, including, at the minimum:	

No.	Uraian Description	Halaman Page
	a. Nama; Name;	538
	b. Domisili; Domicile;	538
	c. Riwayat jabatan, meliputi: Position history, including:	
	• Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan Legal basis for appointment as Corporate Secretary; and	538
	• Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; Work experience both inside and outside the Issuer or Public Company;	538
	d. Riwayat pendidikan; Education history;	538
	e. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan Training and/or competence improvement followed during the fiscal year; and	195 550
	f. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; A brief description of the Corporate Secretary activities in the fiscal year;	541-550
	10. Unit audit internal, paling sedikit memuat: Internal Audit Unit, including, at the minimum:	
	a. Nama kepala unit audit internal; Name of the Internal Audit Unit head;	554
	b. Riwayat jabatan, meliputi: Position history, including:	
	• Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan The legal basis for the appointment as Internal Audit Unit head; and	554
	• Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; Work experience with its period both inside and outside of the Issuer or Public Company;	554
	c. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); Professional internal audit qualifications or certifications (if any);	554
	d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; Training and/or competency improvement to be followed during the fiscal year;	196, 559, 563
	e. Struktur dan kedudukan unit audit internal; Structure and positions within the Internal Audit Unit;	558
	f. Uraian tugas dan tanggung jawab; Duties and responsibilities description;	555-558
	g. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan Statement that it has established Internal Audit Unit guidelines or charter; and	552
	h. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; A brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the fiscal year, including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	559-563
	11. Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: Description of the internal control system applied by the Issuer or Public Company, at the minimum, including:	
	a. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; Financial and operational control and compliance with other laws and regulations; and	586
	b. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan Review of the internal control system effectiveness;	585
	c. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	586
	12. 1Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: Description of the risk management system applied by the Issuer or Public Company, at the minimum, including:	
	a. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; A general description of the Issuer or Public Company risk management system;	587-593
	b. Jenis risiko dan cara pengelolaannya; Risks types and their management; and	594-597
	c. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan Review of the Issuer or Public Company risk management system effectiveness;	600-601
	d. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the risk management system;	604
	13. Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: Legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors, and members of the Board of Commissioners (if any), at the minimum, contain:	

No.	Uraian Description	Halaman Page
	a. Pokok perkara/gugatan; Case / litigation description;	616-618
	b. Status penyelesaian perkara/gugatan; dan Case / litigation settlement status; and	616-618
	c. Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; Impact on the Issuer or Public Company condition;	616-618
	14. Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); Information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the fiscal year (if any)	620
	15. Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: Information regarding the Issuer or Public Company code of ethics, including:	
	a. Pokok-pokok kode etik; Code of ethics content;	623-624
	b. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan Form of code of ethics socialization and enforcement efforts; and	625-626
	c. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; Statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Issuer or Public Company	625
	16. Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); A brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP);	615
	Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:	
	a. Jumlah saham dan/atau opsi; Number of shares and/or options;	-
	b. Jangka waktu pelaksanaan; Implementation period;	-
	c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan Requirements for eligible employees and/or management; and	-
	d. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; Exercise price or determination of exercise price;	-
	17. Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: A brief description of the information disclosure policy regarding:	
	a. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and	158, 621
	b. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; Implementation of the said policy;	621
	18. Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: Description of the whistleblowing system in the Issuer or a Public Company (if any), including:	
	a. Cara penyampaian laporan pelanggaran; Violation report submission;	629-630
	b. Perlindungan bagi pelapor; Protection for whistle-blowers;	632
	c. Penanganan pengaduan; Complaint handling;	632-633
	d. Pihak yang mengelola pengaduan; dan The party managing the complaint;	633-634
	e. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: Complaint handling results, at the minimum:	
	• Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan Number of complaints received and processed during the fiscal year; and	634-635

No.	Uraian Description	Halaman Page
	• Tindak lanjut pengaduan; Complaint follow up; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. If the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, this matter must be disclosed.	635
	19. Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: A description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at the minimum containing:	
	a. Program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan Programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery, and/or gratuities in Issuers or Public Companies; and	637
	b. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; Anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. If the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy must be explained.	638
	20. Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: Implementation of Code of Corporate Governance guidelines by the Issuer that issues equity securities or the Public Company, including:	
	a. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau Statement regarding recommendations have been implemented; and/or	308-312
	b. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). Description of the recommendations that have not been implemented, the reasons, and the implementation alternatives (if any); Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	308-312
H.	**Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik (Lampiran SEOJK 16/2021)** **Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company (SEOJK 16/2021 Attachment)**	
	Bagian Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik disajikan dalam bentuk Laporan Keberlanjutan (Sustainability Reporting) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini. The Social and Environmental Responsibility section of the Issuer or Public Company is presented in the form of a Sustainability Report, which is an integral part of this Annual Report.	✓
I.	**Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit** **Audited Annual Financial Report**	
	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. The annual financial statements contained in the Annual Report are prepared following financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulate the periodic reports of securities companies if the Issuer is a securities company.	✓
J.	**Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan.** **Board of Directors and Board of Commissioners' Statement on Responsibility for The Annual Report**	
	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Board of Directors and Board of Commissioners' Affidavit on the responsibility for the Annual Report prepared following the format of the Board of Directors and Board of Commissioners' Statement on Responsibility for the Annual Report.	84

Referensi Kriteria Annual Report Award (ARA)

Annual Report Award (ARA) Criteria Reference

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
ANNUAL REPORT		
A.1.1	Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Contents of the Annual Report	
A.1.1.1	Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Audited Annual Financial Report	733-873
A.1.1.2	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan Statement letter from members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding responsibility for the Annual Report	84
A.1.2	Ikhtisar Data Keuangan Penting Overview of Important Financial Data	
A.1.2.0	Informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun Financial information presented in comparative form for 3 (three) financial years or since starting its business if the Company has carried out its business activities for less than 3 (three) years	
A.1.2.1	Rasio laba (rugi) terhadap jumlah asset Profit (loss) to total assets ratio	24
A.1.2.2	Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas Profit (loss) to equity ratio	24
A.1.2.3	Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan Profit (loss) to revenue/sales ratio	24
A.1.2.4	Rasio lancar Current ratio	24
A.1.2.5	Rasio liabilitas terhadap ekuitas Liabilities to equity ratio	24
A.1.2.6	Rasio liabilitas terhadap jumlah asset Liabilities to total assets ratio	24
A.1.2.7	Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Perusahaan dan jenis industrinya Other information and financial ratios relevant to the Company and its industry type	24
A.1.3	Informasi Saham (Jika Ada) Share Information (If Any)	
A.1.3.1	Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir. Shares issued for each quarter are presented in the form of comparison for the last 2 (two) years.	28
A.1.3.1.a	Jumlah saham yang beredar Total outstanding shares	28
A.1.3.1.b	Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan Market capitalization based on the price on the Stock Exchange where the securities are listed	28
A.1.3.1.c	Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan The highest, lowest, and closing share price based on the Stock Exchange where the securities are listed	28
A.1.3.1.d	Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan The volume of trading on the Stock Exchange where the securities are listed	28
A.1.3.2	Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal If of a corporate action that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the shares' nominal value, conversion securities issuance, as well as capital additions and deductions	30
A.1.3.3	Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut If share trading temporary suspension (suspension) and/or shares delisting during the fiscal year, the shares' suspension and/or delisting reasons shall be explained	30

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.3.4	Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut If the share trading temporary suspension as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/ or cancellation of the share listing (delisting) shall be explained	30
A.1.4	Laporan Direksi Board of Directors Report	
A.1.4.1	Kinerja Perusahaan The Company Performance	
A.1.4.1.a	Strategi dan kebijakan strategis Perusahaan The strategy and strategic policy of the Company	70-72
A.1.4.1.b	Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan The Board of Directors' role in formulating strategies and strategic policies of the Company	75-76
A.1.4.1.c	Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi The process carried out by the Board of Directors to ensure the strategy implementation	76-77
A.1.4.1.d	Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Perusahaan Comparison between the results achieved and those targeted by the Company	73-75
A.1.4.1.e	Kendala yang dihadapi The constraints faced by the Company	73
A.1.4.2	Gambaran tentang prospek usaha Perusahaan Business prospects overview of the Company	77-78
A.1.4.3	Penerapan governansi Perusahaan Governance implementation of the Company	81-82
A.1.5	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioner Report	
A.1.5.1	Penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan Perusahaan, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Perusahaan The Board of Directors' performance evaluation regarding the Company' management, including the supervision of the Board of Commissioners in the strategies formulation and implementation	59-61
A.1.5.2	Pandangan atas prospek usaha Perusahaan yang disusun oleh Direksi View on the business prospects of the Company prepared by the Board of Directors	61-62
A.1.5.3	Pandangan atas penerapan governansi Perusahaan View on the Company's application of governance	62-64
A.1.6	Profil Perusahaan Profile of the Company	
A.1.6.1	Akses terhadap Perusahaan termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Perusahaan Access to Issuer or Public Company, including any branch offices or representative offices, which allows the public access to information on the Company	89
A.1.6.1.a	Alamat Address	89
A.1.6.1.b	Nomor telepon Telephone number	89
A.1.6.1.c	Alamat surat elektronik Electronic mail address	89
A.1.6.1.d	Alamat situs web Website address	89
A.1.6.2	Riwayat singkat Perusahaan A brief history of the Company	90-92
A.1.6.3	Visi dan misi Perusahaan serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan The vision and mission of the Company as well as the corporate culture or corporate values	94-98
A.1.6.4	Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan Business activities according to the last articles of association, the business activities carried out during the fiscal year, as well as the type of goods and/or services produced	99-106
A.1.6.5	Wilayah operasional Perusahaan. wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan The operational area of the Company. The operational area is the area or area for the implementation of operational activities or the range of the Company's operating activities	107-110
A.1.6.6	Struktur organisasi Perusahaan dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan The organizational structure of the Company in the form of a chart, at the minimum, the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and the Board of Commissioners, accompanied by names and positions	112-115

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.6.7	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan A list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance	111
A.1.6.8	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk table Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form.	146-151
A.1.6.9	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: Information on the use of the services of a public accountant (AP) and a public accounting firm (KAP) and their networks/associations/allies include:	
A.1.6.9.a	Nama dan Alamat Name and Address	176
A.1.6.9.b	Periode Penugasan Assignment Period	176
A.1.6.9.c	Informasi Jasa Audit yang Diberikan Information on Audit and/or Non Audit Services Provided	176
A.1.6.9.d	Biaya jasa (fee) audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku Audit and/or non-audit fee for each assignment given during the fiscal year	176
A.1.6.9.e	Informasi jasa non audit yang diberikan Information on non-audit services provided	176
A.1.6.9.f	Biaya jasa (fee) non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku Audit and/or non-audit fee for each assignment given during the fiscal year	176
A.1.6.9.g	Catatan: dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut (atas poin A.1.6.9.e & f) Note: If AP and KAP and their networks/associations/allies, which are appointed do not provide nonaudit services, then the information is disclosed (at point A.1.6.9.e & f)	176
A.1.6.10	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP	177-181
A.1.7	Profil Direksi Profile of the Board of Directors	
A.1.7.1	Nama dan Jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab The name and position per the duties and responsibilities	120-124
A.1.7.2	Usia Age	120-124
A.1.7.3	Kewarganegaraan Nationality	120-124
A.1.7.4	Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi Educational and/or Certification History	120-124
A.1.7.5	Riwayat Jabatan, meliputi informasi: Position History, including information on:	120-124
A.1.7.5.a	Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Perusahaan yang bersangkutan The legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Company concerned	120-124
A.1.7.5.b	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Perusahaan. Concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member, and other positions inside and outside the Company.	120-124
A.1.7.5.c	Catatan: Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.7.5.b) Note: If a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, this will be disclosed (at point A.1.7.5.b)	120-124
A.1.7.5.d	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Period of work experience both inside and outside the Company	120-124
A.1.7.6	Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including vthe names of affiliated parties.	120-124
A.1.7.7	Catatan: Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Perusahaan mengungkapkan hal tersebut (atas poin A.1.7.6) Note: If a member of the Board of Directors does not have an affiliate relationship, the Company shall disclose this (at point A.1.7.6)	120-124

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.7.8	Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal perubahan komposisi anggota Direksi terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi yang terakhir dan sebelumnya Changes in the composition of members of the Board of Directors and reasons for the changes. If a change in the composition of members of the Board of Directors occurs after the financial year ends until the deadline for submitting the Annual Report, the composition listed in the Annual Report is the composition of the latest and previous members of the Board of Director	134
A.1.7.9	Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.7.8). If there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed; (at point A.1.7.8).	
A.1.8	Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners	
A.1.8.1	Nama dan Jabatan Name and Position	128-133
A.1.8.2	Usia Age	128-133
A.1.8.3	Kewarganegaraan Nationality	128-133
A.1.8.4	Riwayat Pendidikan dan/atau Sertifikasi Educational and/or Certification History	128-133
A.1.8.5	Riwayat Jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on:	128-133
A.1.8.5.a	Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris The legal basis for appointment as a member of the Board of Commissioners	128-133
A.1.8.5.b	Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Perusahaan yang bersangkutan The legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned	128-133
A.1.8.5.c	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member, and other positions inside and outside the Company	128-133
A.1.8.5.c1	Catatan: Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.8.5.c1). Note: If a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed (at point A.1.8.5.c1)	128-133
A.1.8.5.d	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Period of work experience both inside and outside the Company	128-133
A.1.8.6.a	Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including the names of affiliated parties	128-133
A.1.8.6.b	Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Perusahaan mengungkapkan hal tersebut (atas poin A.1.8.6.a). If the member has no affiliation relationship, the Company shall disclose this matter (at point A.1.8.6.a).	128-133
A.1.8.7	Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode Statement of independence of the independent commissioner if the independent commissioner has served more than 2 (two) terms	128-133
A.1.8.8.a	Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya Changes in the composition of members of the Board of Commissioners and reasons for the changes. If that a change in the composition of the members of the Board of Commissioners occurs after the financial year ends until the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the composition of the latest and previous members of the Board of Commissioners	134
A.1.8.8.b	Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.8.8.a) If there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this will be disclosed (at point A.1.8.8.a)	134
A.1.9	Informasi Pemegang Saham Shareholder Information	
A.1.9.1	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: Shareholders names and ownership percentage at the beginning and end of the fiscal year, which consists of information regarding:	152

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.9.1.a	Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Public Company	152
A.1.9.1.b1	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perusahaan Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares in the Company.	158
A.1.9.1.b2	Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris TIDAK memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.9.1.b.1). If all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed (at point A.1.9.1.b.1);	158
A.1.9.1.c	Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik Community shareholder group, namely the group of shareholders whom each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company	157
A.1.9.2.a	Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Perusahaan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris The shares' indirect ownership percentage of the Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year,including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners	158
A.1.9.2.b	Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris TIDAK memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham perusahaan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.9.2.a) If all members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed (at point A.1.9.2.a)	158
A.1.9.3	Klasifikasi kepemilikan yang dimiliki perusahaan Classification of ownership owned by the company	157
A.1.9.3.a	Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan berdasarkan klasifikasi The number of shareholders and the percentage based on the classification	157
A.1.9.4	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; Information regarding the major and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, to the individual owners, presented in the form of schematics or charts;	160-163
A.1.9.5	Apakah perusahaan memiliki pengendalian dan/atau pengendalian bersama atas: Whether the company has control and/or joint control over:	160-163
A.1.9.5.a	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Perusahaan memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut The name of the subsidiary, associate, joint venture company where the Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company; For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.	164-169
A.1.9.6	Apakah perusahaan pernah melakukan aksi korporasi berikut ini: Does the company ever carried out the following corporate actions:	174-175
A.1.9.6.a	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada) A chronological listing of shares, number of shares, nominal value, and the offer price from the start of recording until the end of the financial year and the name of the Stock Exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any)	174-175
A.1.9.7	Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud sebelumnya, yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada) Other securities listing information other than the securities as referred before, which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/ yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);	176
A.1.10	Analisa dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis	
A.1.10.1	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Perusahaan A review of operations per operating segment based on the Company's type of industry	212-220
A.1.10.1.a	Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya Production, including the process, capacity, and its development	212-220
A.1.10.1.b	Pendapatan/Penjualan Revenue/Sales	212-220

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.10.1.c	Profitabilitas Profitability	212-220
A.1.10.2	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut Comprehensive financial performance including a comparison of financial performance in the last 2 (two) years, an explanation of the cause of any changes and the impact	
A.1.10.2.a	Aset lancar, aset tidak lancar, dan total asset Current assets, non-current assets, and total assets	222-226
A.1.10.2.b	Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities	226-230
A.1.10.2.c	Ekuitas Equity	230-231
A.1.10.2.d	Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi), komprehensif; dan Revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and	231-238
A.1.10.2.e	Arus Kas Cash Flow	238-241
A.1.10.3	Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan Ability to pay the debt by presenting the relevant ratios	242-244
A.1.10.4	Tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan The collectibility level of the Company's receivables by presenting the relevant ratio calculations	244-245
A.1.10.5	Struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud Capital structure and management policies on capital structure accompanied by the basis for determining the policy	246-248
A.1.10.6	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan Discussion on material commitments for capital investments with explanations	
A.1.10.6.a	Tujuan dari ikatan tersebut The purpose of such commitments	248
A.1.10.6.b	Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut Sources of funds to meet such commitments	248
A.1.10.6.c	Mata uang yang menjadi denominasi Currency-denominated	248
A.1.10.6.d	Langkah yang direncanakan Perubahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait Planned measures by the Issuer or Public Company to cover the risks of foreign currency positions	248
A.1.10.7	Bahasan mengenai investasi barang modal yang yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir: Discussion regarding capital goods investments realized in the last fiscal year	
A.1.10.7a	Jenis investasi barang modal Type of capital goods investments	249
A.1.10.7b	Tujuan investasi barang modal Capital goods investment objectives	249
A.1.10.7c	Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan Value of capital goods investments realized	249
A.1.10.8	Prospek usaha dari Perusahaan dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya Business prospects of the Issuer or Public Company based on the condition of the industry, the general economy, and the international markets supporting quantitative data from trusted data sources	273-277
A.1.10.9	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi) Comparison between the targets/projections at the beginning of the year with the results achieved (realized)	
A.1.10.9.a	Pendapatan/penjualan Revenue/sales	251
A.1.10.9.b	Laba (rugi) Profit (loss)	251
A.1.10.9.c	Struktur modal (capital structure) Capital structure	251
A.1.10.9.d	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Perusahaan Other matters that are considered important for the Company	251
A.1.10.10	Target/proyeksi yang ingin dicapai Perusahaan untuk 1 (satu) tahun mendatang Targets/projections to be achieved by the Company for one (1) year ahead	
A.1.10.10.a	Pendapatan/penjualan Revenues/sales	252
A.1.10.10.b	Laba (rugi) Profit (loss)	252
A.1.10.10.c	Struktur modal (capital structure) Capital structure	252

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.10.10.d	Kebijakan dividen Dividend policy	253
A.1.10.10.e	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Perusahaan Other matters that are considered important for the Company	253
A.1.10.11	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Perusahaan, paling sedikit mengenai Strategi pemasaran dan Pangsa pasar The Company's marketing of goods and/or services, at least including the marketing strategy and market share;	208-211
A.1.10.12	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir Description of dividends for the last 2 (two) fiscal years	
A.1.10.12.a	Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; Dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income	253
A.1.10.12.b	Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas Date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends	254
A.1.10.12.c	Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas) The amount of dividends per share (cash and/or non-cash)	254
A.1.10.12.d	Jumlah dividen per tahun yang dibayar The amount of dividends paid annually	254
A.1.10.12.d1	Catatan: Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut Note: If the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed	
A.1.10.13	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: Realization of the use of proceeds from the public offering, provided that:	
A.1.10.13.a	Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku If, during the fiscal year, the Issuer must submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year	256
A.1.10.13.b	Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut If there is a change in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change	256
A.1.10.14	Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku Material information (if any), among others regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliatedtransactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the fiscal year	
A.1.10.14.	Apakah perusahaan mengalami transaksi berikut ini selama tahun buku? Does the Company experience the following transactions during the fiscal year?	
A.1.10.14.a	Tanggal, nilai, dan objek transaksi The date, value, and object of the transaction	262-265
A.1.10.14.b	Nama pihak yang melakukan transaksi The name of the party conducting the transaction	266-267
A.1.10.14.c	Sifat hubungan afiliasi (jika ada) The nature of the affiliation relationship (if any)	266-267
A.1.10.14.d	Penjelasan mengenai kewajaran transaksi Explanation of the fairness of the transaction	261
A.1.10.14.e	Pemenuhan ketentuan terkait Compliance with related provisions	261-267
A.1.10.14.f	Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Perusahaan juga mengungkapkan informasi: If there is an affiliation relationship, in addition to disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information	
A.1.10.14.f1	Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle) A statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out following generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle	261

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.10.14.f2	Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle) The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out following generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle	268
A.1.10.14.g	Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan For affiliated or material transactions, which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously	268
A.1.10.14.h	Catatan: Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut (atas point A.1.10.14.g) If the affiliated or material transactions have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added (at point A.1.10.14.g)	
A.1.10.14.i	Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi tersebut for disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added	260-261
A.1.10.14.j	Catatan: dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; (atas point A.1.10.14.i) Note: if there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction; then this matter shall be Disclosed (at point A.1.10.14.i)	258
A.1.10.15	Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada) Changes in regulations and legislation that significantly impact the Issuer or Public Company and the impact on the financial statements (if any)	269
A.1.11	Governansi Perusahaan 1 Corporate Governance 1	
A.1.11.1.a	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year	336-347
A.1.11.1.a1	Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku The GMS' resolutions in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year are realized in the fiscal year	336-347
A.1.11.1.a2	Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that has not been realized and the reasons for not realizing them	336-347
A.1.11.1.b	Dalam hal Perusahaan menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; If the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;	336
A.1.11.2	Pengungkapan terkait Direksi Disclosures related to the Board of Directors	394-425
A.1.11.2.a	Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors	398-406
A.1.11.2.b	Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi Statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors	394-395
A.1.11.2.c	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Policies and implementation of the Board of Directors' meeting frequency, Board of Directors' meeting with the Board of Commissioners, and the Board of Directors member's attendance level in the meeting including attendance at the GMS;	413-419 333
A.1.11.2.c1	Kebijakan terkait frekuensi rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris Policies regarding the frequency of Board of Directors meetings and meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners	413 380
A.1.11.2.c2	Frekuensi pelaksanaan rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris Frequency of holding Board of Directors meetings and meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners	416-419

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.11.2.c3	Informasi tingkat kehadiran direksi dalam rapat direksi, rapat direksi dekom, RUPS Information on the Board of Directors member's level of attendance at the meeting of the Board of Directors, the meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or the GMS	419 383-384 333
A.1.11.2.d	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi Training and/or competency improvement of the Board of Directors members	421 189-193
A.1.11.2.d1	Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada) Training and/or improving the competence of members of the Board of Directors policy, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any)	420-421
A.1.11.2.d2	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any)	189-193
A.1.11.2.e	Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku The Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year	422-425
A.1.11.2.e1	Prosedur penilaian kinerja Performance appraisal procedures	422-425
A.1.11.2.e2	Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat The criteria used, such as performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings	422-425
A.1.11.2.f	Catatan: Dalam hal Perusahaan tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas point A.1.11.2.e1 & e2) Note: If the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed (at point A.1.11.2.e1 & e2)	
A.1.11.3	Pengungkapan terkait Dewan Komisaris Disclosures related to the Board of Commissioners	351-393
A.1.11.3.a	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Duties and responsibilities of the Board of Commissioners	354-365
A.1.11.3.b	Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris A statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners	351
A.1.11.3.c	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Policies and implementation of the Board of Commissioners meeting frequency, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in such meetings including attendance at the GMS;	371-384 333
A.1.11.3.d	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners	384-385 186-189
A.1.11.3.d1	Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat Policy on training and/or improving the Board of Commissioners members' competence, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners	384-385
A.1.11.3.d2	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any)	186-189
A.1.11.3.e	Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners	426-449
A.1.11.3.e1	Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Procedures for implementing performance appraisals	426 437-438
A.1.11.3.e2	Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat The criteria used such as performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings	427, 430-431 438-439, 440, 445
A.1.11.3.e3	Pihak yang melakukan penilaian The party conducting the assessment	426-427 438
A.1.11.3.f	Penilaian Dewan komisaris terhadap kinerja Komite Dewan Komisaris terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku, meliputi: The Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year, include:	392-393
A.1.11.3.f1	Prosedur penilaian kinerja Performance appraisal procedures	392
A.1.11.3.f2	Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat The criteria used such as performance achievements during the fiscal year, competence, and attendance at meetings	393

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.11.4	Pengungkapan terkait Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Disclosures related to nomination and remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners	450-463
A.1.11.4.a	Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Nomination procedure, including a brief description of the policies and members nomination process of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners	450-456
A.1.11.4.b	Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:	
A.1.11.4.b1	Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	457
A.1.11.4.b2	Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya The remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus, and others	458-461
A.1.11.4.b3	Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris The amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners;	461-463
A.1.11.5	Pengungkapan terkait Dewan Pengawas Syariah, bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar Disclosures related to the Sharia Supervisory Board, for companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association	-
A.1.11.5.a	Nama Name	-
A.1.11.5.b	Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas Syariah The legal basis for the appointment of the Sharia Supervisory Board	-
A.1.11.5.c	Periode penugasan Dewan Pengawas Syariah The period of assignment of the Sharia Supervisory Board	-
A.1.11.5.d	Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Duties and responsibilities of the Shariah Supervisory Board	-
A.1.11.5.e	Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Perusahaan Frequency and mode of administration advice and suggestions as well as monitoring compliance with Sharia Principles in the capital market of the Company	-
A.1.12	Governansi Perusahaan 2 Corporate Governance 2	
A.1.11.6	Pengungkapan terkait Komite Audit Disclosures related to the Audit Committee	475-500
A.1.11.6.a	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Names and positions of the committee members	479-483
A.1.11.6.b	Usia Age	479-483
A.1.11.6.c	Kewarganegaraan Nationality	479-483
A.1.11.6.d	Riwayat Pendidikan Education History	479-483
A.1.11.6.e	Riwayat jabatan Position history	479-483
A.1.11.6.e1	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite Legal basis for appointment as a committee member	479-483
A.1.11.6.e2	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada) Concurrent positions as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or members of committees as well as other positions (if any)	479-483
A.1.11.6.e3	Catatan: Dalam hal tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas point A.1.11.6.e2) Note: If there are no concurrent positions, this will be disclosed (at point A.1.11.6.e2)	
A.1.11.6.e4	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience both inside and outside the Issuer or Public Company	479-483
A.1.11.6.f	Periode dan masa jabatan anggota komite audit Period and tenure of Audit Committee members	478
A.1.11.6.g	Pernyataan independensi komite audit Statement of Audit Committee independence	477-478 483-484
A.1.11.6.h	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency improvement that has been followed in the fiscal year (if any)	193 490-491

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.11.6.i	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut Policy and implementation of Audit Committee meeting frequency and level of attendance of Audit Committee members at the meetings	489-490
A.1.11.6.j	Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku Implementation of Audit Committee activities in the fiscal year	491-492
A.1.11.7a	Pengungkapan terkait Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan. Disclosures related to the Committee or the Company's nomination and remuneration functions	521-535
A.1.11.7a.a	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Names and positions of the committee members	518-520
A.1.11.7a.b	Usia Age	524-526
A.1.11.7a.c	Kewarganegaraan Nationality	524-526
A.1.11.7a.d	Riwayat Pendidikan Education history	524-526
A.1.11.7a.e	Riwayat jabatan Position history	524-526
A.1.11.7a.e1	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite Legal basis for appointment as a committee member	524-526
A.1.11.7a.e2	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada) Concurrent positions as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or members of committees as well as other positions (if any);	524-526
A.1.11.7a.e3	Catatan: Dalam hal tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; (A.1.11.7a.e2) Note: If there are no concurrent positions, this will be disclosed; (A.1.11.7a.e2)	
A.1.11.7a.e4	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience and period both inside and outside the Company	524-526
A.1.11.7a.f	Periode dan masa jabatan anggota komite The period and term of office of the committee members	523
A.1.11.7a.g	Pernyataan independensi komite Statement of committee independence	522-523 527
A.1.11.7a.h	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency improvement that has been followed in the fiscal year (if any);	195 531-532
A.1.11.7a.i	Uraian tugas dan tanggung jawab Description of duties and responsibilities	529-530
A.1.11.7a.j	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) A statement that the committee has had guidelines or charters	521-522
A.1.11.7a.k	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut Policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members in those meetings	530-531
A.1.11.7a.l	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku A brief description of the committee's activities for the fiscal year	532
A.1.11.7a.m	Catatan: Dalam hal tidak dibentuk komite: Note: If no nomination and remuneration committee is formed	
A.1.11.7a.m1	Alasan tidak dibentuknya komite Reasons for not forming the committee	-
A.1.11.7a.m2	Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi The party carrying out the nomination and remuneration function	-
A.1.11.7b	Pengungkapan terkait Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Disclosures related to the Committee or the Company's nomination and remuneration functions	521-535
A.1.11.7b.a	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Names and positions of the committee members	518-520
A.1.11.7b.b	Usia Age	524-526
A.1.11.7b.c	Kewarganegaraan Nationality	524-526
A.1.11.7b.d	Riwayat Pendidikan Education history	524-526
A.1.11.7b.e	Riwayat jabatan Position history	524-526
A.1.11.7b.e1	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite Legal basis for appointment as a committee member	524-526

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.11.7b.e2	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada) Concurrent positions as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or members of committees as well as other positions (if any)	524-526
A.1.11.7b.e3	Catatan: Dalam hal tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; (A.1.11.7a.e2) Note: If there are no concurrent positions, this will be disclosed; (A.1.11.7a.e2)	
A.1.11.7b.e4	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience both inside and outside the Public Company	524-526
A.1.11.7b.f	Periode dan masa jabatan anggota komite Period and tenure of committee members	523
A.1.11.7b.g	Pernyataan independensi komite Statement of committee independence	522-523 527
A.1.11.7b.h	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency improvement that has been followed in the financial year (if any)	195 531-532
A.1.11.7b.i	Uraian tugas dan tanggung jawab Description of duties and responsibilities	529-530
A.1.11.7b.j	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Statement that it has established committee guidelines or charter	521-522
A.1.11.7b.k	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut Policy and implementation of committee meeting frequency and level of attendance of committee members at the meetings	530-531
A.1.11.7b.l	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku A brief description of the committee's activities in the fiscal year	532
A.1.13	Governansi Perusahaan 3 Corporate Governance 3	
A.1.11.8a	Pengungkapan terkait Komite Manajemen Risiko Disclosures related to the Risk Management Committee	500-521
A.1.11.8a.a	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Name and position in committee membership	504-508
A.1.11.8a.b	Usia Age	504-508
A.1.11.8a.c	Kewarganegaraan Nationality	504-508
A.1.11.8a.d	Riwayat Pendidikan Educational history	504-508
A.1.11.8a.e	Riwayat jabatan Position history	504-508
A.1.11.8a.e1	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite Legal basis for appointment as a committee member	504-508
A.1.11.8a.e2	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada) Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any)	504-508
A.1.11.8a.e3	Catatan: Dalam hal tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas point A.1.11.8a. e2) Note: If there is no concurrent positions, this will be disclosed (at point A.1.11.8a.e2)	
A.1.11.8a.e4	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience and period both inside and outside the Company	504-508
A.1.11.8a.f	Periode dan masa jabatan anggota komite manajemen risiko The period and term of office of the risk management committee members	503
A.1.11.8a.g	Pernyataan independensi komite Statement of committee independence	502-503 509
A.1.11.8a.h	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency improvement that has been followed in the fiscal year (if any)	194 514
A.1.11.8a.i	Uraian tugas dan tanggung jawab Description of duties and responsibilities	510-512
A.1.11.8a.j	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Statement that it has guidelines or charter	501
A.1.11.8a.k	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut Policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members in those meetings	512-513
A.1.11.8a.l	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku A brief description of the committee's activities for the fiscal year	514-517

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.11.8b	Pengungkapan terkait Komite lain yang dimiliki Perusahaan dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris: Disclosure regarding other committees owned by the Company to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners:	-
A.1.11.8b.	Apakah perusahaan memiliki komite lain dalam mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris? Does the company have other committees to support the functions and duties of the Board of Directors and/or Board of Commissioners?	-
A.1.11.8b.a	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Names and positions of the committee members	-
A.1.11.8b.b	Usia Age	-
A.1.11.8b.c	Kewarganegaraan Nationality	-
A.1.11.8b.d	Riwayat Pendidikan Education history	-
A.1.11.8b.e	Riwayat jabatan Position history	-
A.1.11.8b.e1	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite Legal basis for appointment as a committee member	-
A.1.11.8b.e2	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada) Concurrent positions as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or members of committees as well as other positions (if any)	-
A.1.11.8b.e3	Catatan: Dalam hal tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut Note: If there are no concurrent positions, this will be disclosed	-
A.1.11.8b.e4	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience both inside and outside the Issuer or Public Company	-
A.1.11.8b.f	Periode dan masa jabatan anggota komite lain Period and tenure of other Committee members	-
A.1.11.8b.g	Pernyataan independensi komite Statement of Committee independence	-
A.1.11.8b.h	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or competency improvement that has been followed in the fiscal year (if any)	-
A.1.11.8b.i	Uraian tugas dan tanggung jawab Description of duties and responsibilities	-
A.1.11.8b.j	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Statement that it has established committee guidelines or charter	-
A.1.11.8b.k	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut Policy and implementation of committee meeting frequency and level of attendance of committee members at the meetings	-
A.1.11.8b.l	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku A brief description of the committee's activities in the fiscal year	-
A.1.11.9	Pengungkapan terkait Sekretaris perusahaan Disclosures regarding the company secretary	536-550
A.1.11.9.a	Nama Name	538
A.1.11.9.b	Domisili Domicile	538
A.1.11.9.c	Riwayat jabatan Position history	538
A.1.11.9.c1	Dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan Legal basis for appointment as Corporate Secretary	538
A.1.11.9.c2	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience both inside and outside the Public Company	538
A.1.11.9.d	Riwayat Pendidikan Education history	538
A.1.11.9.e	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku Training and/or competence improvement followed during the fiscal year	195 550
A.1.11.9.f	Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku A brief description of the Corporate Secretary activities in the fiscal year	541-550
A.1.14	Governansi Perusahaan 4 Corporate Governance 4	
A.1.11.10	Pengungkapan terkait Unit Audit Internal, paling sedikit memuat Disclosures related to the Internal Audit Unit contain at least	551-564

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.11.10.a	Nama kepala unit audit internal Name of the Internal Audit Unit head	554
A.1.11.10.b	Riwayat jabatan Position history	554
A.1.11.10.b1a	Dasar hukum penunjukan sebagai kepala Unit Audit Internal The legal basis for the appointment as Internal Audit Unit head	554
A.1.11.10.b1	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Work experience with its period both inside and outside of the Company	554
A.1.11.10.c	Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada) Professional internal audit qualifications or certifications (if any)	554
A.1.11.10.d	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku Training and/or competency improvement to be followed during the fiscal year	196 559,563
A.1.11.10.e	Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal Structure and positions within the Internal Audit Unit	558
A.1.11.10.f	Uraian tugas dan tanggung jawab Duties and responsibilities description	555-558
A.1.11.10.g	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal Statement that it has established Internal Audit Unit guidelines or charter	552
A.1.11.10.h	Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; A brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the fiscal year, including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	559-563
A.1.11.11	Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Perusahaan Description of the internal control system applied by the Company	582-586
A.1.11.11.a	Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya Financial and operational control, and compliance with other laws and regulations	586
A.1.11.11.b	Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal Review of the internal control system effectiveness	585
A.1.11.11.c	Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system	586
A.1.11.12	Uraian mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan Description of the risk management system implemented by the Company	587-604
A.1.11.12.a	Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Perusahaan A general description of the Company risk management system	587-593
A.1.11.12.b	Jenis risiko dan cara pengelolaannya Risks types and their management	594-597
A.1.11.12.c	Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Perusahaan Review of the Company risk management system effectiveness	600-601
A.1.11.12.d	Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the risk management system	604
A.1.11.14	Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku Information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the fiscal year (if any)	620
A.1.11.15	Informasi mengenai kode etik Perusahaan Information regarding the Company code of ethics	623-626
A.1.11.15.a	Pokok-pokok kode etik Code of ethics content	623-624
A.1.11.15.b	Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya Form of code of ethics socialization and enforcement efforts	625-626
A.1.11.15.c	Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan Statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company	625
A.1.11.16	Dalam hal terdapat pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: (atas point A.1.11.16) If there is compensation provided in the form of a share ownership program by management (management stock ownership program/MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must contain at least (at point A.1.11.16)	615

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.11.16.a	Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Perusahaan (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP) A brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP);	615
A.1.11.16.b	Apakah terdapat pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan dalam tahun buku? Is there long-term performance-based compensation provided to management and/or employees in the financial year?	615
A.1.11.16.c	Dalam hal terdapat pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:	
A.1.11.16.c1	Jumlah saham dan/atau opsi Number of shares and/or options	-
A.1.11.16.c2	Jangka waktu pelaksanaan Implementation period	-
A.1.11.16.c3	Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak Requirements for eligible employees and/or management	-
A.1.11.16.c4	Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan Exercise price or determination of exercise price	-
A.1.11.17	Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai A brief description of the information disclosure policy regarding	621
A.1.11.17.a	Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company	158, 621
A.1.11.17.b	Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud Implementation of the policy in question	621
A.1.11.18	Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Perusahaan: Description of the whistleblowing system in the Company	627-635
A.1.11.18.a	Cara penyampaian laporan pelanggaran Violation report submission	629-630
A.1.11.18.b	Perlindungan bagi pelapor Protection for whistleblowers	632
A.1.11.18.c	Penanganan pengaduan Complaint handling	632-633
A.1.11.18.d	Pihak yang mengelola pengaduan The party managing the complaint	633-634
A.1.11.18.e	Hasil dari penanganan pengaduan: Complaint handling results:	
A.1.11.18.e1	Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku Number of complaints received and processed during the fiscal year	634-635
A.1.11.18.e2	Tindak lanjut pengaduan Complaint follow up	635
A.1.11.18.e3	Catatan: Dalam hal Perusahaan tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. (atas point A.1.11.18) Note: If the Company does not have a whistleblowing system, this matter must be disclosed. (at point A.1.11.18)	
A.1.11.19	Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Perusahaan A description of the anti-corruption policy of the Company	637-638
A.1.11.19.a	Program dan prosedur yang dilakukan Programs and procedures implemented	637
A.1.11.19.b	Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Perusahaan Anti-corruption training/socialization to employees of the Company	638
A.1.11.19.c	Catatan: Dalam hal Perusahaan tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud (atas point A.1.11.19) Note: If the Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy must be explained (at point A.1.11.19)	
A.1.11.20.a	Penerapan atas pedoman governansi Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: Implementation of Code of Corporate Governance guidelines by the Issuer that issues equity securities or the Public Company, including:	

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
A.1.11.20a.a	Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan Statement regarding recommendations have been implemented	308-312
A.1.11.20a.b	Bukti/penjelasan yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan rekomendasi tersebut Evidence/explanation showing that the company has implemented these recommendations	308-312
A.1.11.20a.c	Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif Description of the recommendations that have not been implemented, the reasons, and the implementation alternatives	308-312
A.1.11.20b	Pengungkapan terkait penerapan atas pedoman governansi Perusahaan dengan pendekatan "comply or explain" atau "apply or explain", meliputi: Disclosures related to the implementation of the Company's governance guidelines using the "comply or explain" or "apply or explain" approach, include:	
A.1.11.20b.a	Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan Statement regarding recommendations have been implemented	715-745
A.1.11.20b.b	Bukti/penjelasan yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan rekomendasi tersebut Evidence/explanation showing that the company has implemented these recommendations	715-745
A.1.11.20b.c	Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif Description of the recommendations that have not been implemented, the reasons, and the implementation alternatives	715-745
B.A	Pertanyaan Bonus Bonus Question	
B.A.1	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris (PUGKI 1.3.2) Types of decisions that require approval from the Board of Commissioners (PUGKI 1.3.2)	391-392
B.A.2	Rincian tugas Komisaris Utama (PUGKI 1.3.13.1) Details of the duties of the President Commissioner (PUGKI 1.3.13.1)	363
B.A.3	Tanggung jawab Komite Audit dalam pemberian rekomendasi atas penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal (ASEAN CG ScoreCard E.2.24) Responsibility of the Audit Committee in providing recommendations for the appointment and dismissal of external auditors (ASEAN CG ScoreCard E.2.24)	488-489
B.A.4	Sertifikasi profesi (misalnya dalam bidang Risiko, Akuntansi, Perpajakan, IT, Hukum) yang dimiliki oleh (Kriteria tambahan ARA 2019) Professional certification (for example in the sector of Risk, Accounting, Taxation, IT, Law) held by (2019 ARA additional criteria)	
B.A.4.a	Komite Audit Audit Committee	490-491
B.A.4.b	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	532
B.A.4.c	Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	514
B.A.4.d	Komite Lainnya Other Committee	-
B.A.5	Deskripsi proses governansi terkait isu IT termasuk disruption (gangguan), cyber security (keamanan dunia maya), dan disaster recovery (pemulihan bencana) untuk memastikan semua risiko utama telah diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan pada Direksi (ASEAN CG Score Card B.E.5.1) Description of governance processes related to IT issues including disruption, cyber security, and disaster recovery to ensure all major risks have been identified, managed, and reported to the Board of Directors (ASEAN CG Score Card B.E.5.1)	607-608
B.A.6	Kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. (Aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh Direktur, Komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar) (PUKGI 7.2.3) Policy to prevent insider trading. (Clear rules regarding any trading in corporate shares carried out by Directors, Commissioners and insiders to ensure that anyone cannot profit directly or indirectly from information that is not/not yet available on the market) (PUKGI 7.2.3)	636
B.A.7	Kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan jangka panjang (ASEAN CG Score Card C.3.3) Reward/compensation policy that takes into account long-term company performance (ASEAN CG Score Card C.3.3)	615
B.A.8	Kebijakan untuk melakukan penelaahan dan persetujuan transaksi dengan pihak berelasi yang material/signifikan (ASEAN CG Score Card D.3.1) Policy for reviewing and approving transactions with material/significant related parties (ASEAN CG Score Card D.3.1)	
B.A.9	Kebijakan terkait perencanaan atas suksesi anggota Direksi dan manajemen kunci (ASEAN CG Score Card E.5.3) Policy related to planning for the succession of members of the Board of Directors and key management (ASEAN CG Score Card E.5.3)	450-456

Nomor Number	Pertanyaan ARA ARA Question	Halaman Page
B.A.10.a	Kerangka pelaporan berkelanjutan yang diakui secara internasional (contoh: GRI, Integrated Reporting, SASB) yang diadopsi oleh Perusahaan An internationally recognized sustainability reporting framework (e.g. GRI, Integrated Reporting, SASB) adopted by the Company	
B.B.0	Pertanyaan Tambahan Additional Questions	
B.B.1	Apakah korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan? Uraikan dengan singkat (PUGKI 6.2.4) Does the corporation publish an integrated annual report that puts historical performance into context and describes the corporation's risks, opportunities and future prospects, thereby helping shareholders and stakeholders understand the corporation's strategic objectives and its progress in creating sustainable value? Describe briefly (PUKGI 6.2.4)	√
	Penjelasan: Perseroan menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dalam buku terpisah namun masih menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan (terintegrasi). Informasi tersebut telah dijabarkan dalam laporan tahunan pada Bab Analisa dan Pembahasan Manajemen halaman 294-416 dan Laporan Keberlanjutan. Explanation: The Company publishes the annual report and sustainability report in separate books but they are still an inseparable (integrated) whole. The information has been described in the annual report in the Management Discussion and Analysis Chapter pages 294-416 and the Sustainability Report.	
B.B.2	Pengungkapan kerangka governansi, pengelolaan dan pengendalian aspek perpajakan di perusahaan (GRI) Disclosure of governance framework, management and control of tax aspects in companies (GRI)	655-662
	Penjelasan: Berkaitan dengan kerangka governansi, pengelolaan, dan pengendalian aspek perpajakan di Perseroan, termuat dalam Laporan Keberlanjutan. Explanation: Relating to the governance framework, management, and control of taxation aspects in the Company, contained in the Sustainability Report.	
B.B	Pertanyaan Penalti Penalty Question	
B.C.1	Tanggal penerbitan Laporan Keuangan Tahunan (ASEAN CG Score Card B.D.1.1 & Peraturan OJK) Date of publication of Annual Financial Report (ASEAN CG Score Card B.D.1.1 & OJK Regulations)	27 Maret 2025
	Penjelasan: Laporan Keuangan dirilis tanggal 4 Maret 2024, sesuai dengan Penyampaian Perseroan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia Explanation: Financial Statements released on March 4, 2024, in accordance with the Company's Submission to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange.	
B.C.2	Tanggal penerbitan Laporan Tahunan (ASEAN CG Score Card B.D.1.1 & Peraturan OJK) Annual Report publication date (ASEAN CG Score Card B.D.1.1 & OJK Regulations)	29 April 2025
B.C.3	Opini auditor independen atas laporan keuangan perusahaan Independent auditor's opinion on the company's financial statements	wajar
B.C.4	Apakah terjadi perdagangan orang dalam yang melibatkan Direksi/Komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir? (ASEAN CG Score Card P.B.1.1) Have there been insider trading involving Directors/Commissioners, management and employees in the last three years? (ASEAN CG Score Card P.B.1.1)	636
B.C.5	Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material dalam tiga tahun terakhir? (ASEAN CG Score Card P.B.2.1) Have there been any significant or material cases of non-compliance with laws, rules and regulations relating to related party transactions in the last three years? (ASEAN CG Score Card P.B.2.1)	620
B.C.6	Apakah telah terjadi pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ ketenagakerjaan/ konsumen/ kepailitan/ komersial/ persaingan atau lingkungan (P.C.1.1) Whether there has been a violation of any law relating to labor/employment/consumer/insolvency/ commercial/competition or environmental matters (P.C.1.1)	620
B.C.7	Apakah Perusahaan menghadapi sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting (material event)? (ASEAN CG Score Card P.C.2.1) Does the Company face sanctions from regulators for not making an announcement within the specified time period for a material event? (ASEAN CG Score Card P.C.2.1)	620
B.C.8	Apakah Perusahaan memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun selama tiga tahun terakhir Whether the Company obtained a guilty verdict from the highest tax court regarding any tax matters during the last three years	620
B.C.9	Apakah ada bukti bahwa Perusahaan tidak mematuhi aturan dan peraturan pencatatan apa pun selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan? (P.E.1.1) Is there any evidence that the Company has not complied with any listing rules and regulations during the past year other than disclosure rules? (P.E.1.1)	620

Indeks Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI)

General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) Index

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of Board of Directors and Board of Commissioners		
1.1	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi** Roles and Responsibilities of Board of Directors		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: 1. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; 2. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; 3. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta 4. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (corporate resilience) To achieve sustainable value creation, the Board of Directors carries out the leadership role and seeks to achieve the following governance outcomes: 1. competitive and focused on long-term performance; 2. ethical and responsible in conducting business; 3. contribute positively to society and the environment; as well as 4. ability to survive and grow (corporate resilience)	Diterapkan Applied	Direksi menjalankan peran kepemimpinannya, dan tanggung jawabnya atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan antara lain melalui pada Corporate Governance Policy dan Kote Etik PTBA. The Board of Directors carries out its leadership role and responsibility for the implementation of sustainable corporate governance, including through the Corporate Governance Policy and PTBA Code of Ethics.
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the corporate mission, vision, goals, objectives, strategies and annual and mid-term plans are consistent with long-term goals, by making effective use of innovation and technology.	Diterapkan Applied	Direksi memastikan visi misi tujuan sasaran strategi rencana tahunan dan jangka panjang dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors ensures the vision, mission, goals, strategic targets, annual and long-term plans by utilizing innovation and technology effectively.

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 3 & 4 **Recommendation 3 & 4**			
1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the corporate implements an appropriate and effective risk management and internal control system that is aligned with the corporate vision, mission, goals, objectives and strategies and complies with applicable law regulations and standards.	Diterapkan Applied	Direksi telah mengeluarkan Kebijakan, Pedoman, dan Prosedur terkait Manajemen Risiko dan sistem pengendalian internal. Direksi memastikan Manajemen risiko diterapkan pada setiap pengambilan keputusan strategis dan tahapan proyek-proyek strategis Perusahaan. Pada tahun 2024, telah disusun Pedoman Manajemen Risiko sebagaimana No. BARMM.01 rev.4 yang mengacu pada kebijakan yang berlaku di MIND ID dan peraturan di bidang BUMN. Perusahaan juga memiliki Piagam SPI sebagaimana disusun pada tahun 2017 dan perubahan terakhir Piagam SPI pada tanggal 29 Mei 2024, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. The Board of Directors has issued Policies, Guidelines, and Procedures related to Risk Management and internal control systems. The Board of Directors ensures that Risk Management is implemented in every strategic decision-making and stage of the Company's strategic projects. In 2024, a Risk Management Guideline has been prepared as No. BARMM.01 rev.4 which refers to the policies applicable in MIND ID and regulations in the SOEs sector. The Company also has an SPI Charter as prepared in 2017 and the last amendment to the SPI Charter on May 29, 2024, referring to the provisions of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter.

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of the corporate accounting and financial reporting system and the timely and accurate disclosure of all material information about the corporate.	Diterapkan Applied	Laporan Keuangan PTBA disampaikan secara tepat waktu dan akurat sesuai mekanisme dan tata cara yang berlaku di bidang pasar modal. PTBA's Financial Report is submitted in a timely and accurate manner in accordance with the mechanisms and procedures applicable in the capital market sector.
Rekomendasi 5 **Recommendation 5**			
1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared properly.	Diterapkan Applied	Laporan Keberlanjutan PTBA telah disusun sesuai dengan ketentuan regulasi tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik serta best practice yang berlaku secara internasional. PTBA's Sustainability Report has been prepared in accordance with regulatory provisions on the implementation of sustainable finance for financial services institutions, issuers, and public companies as well as internationally applicable best practices.
Rekomendasi 6 **Recommendation 6**			
1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors establish a framework for corporate information technology (IT) governance that is aligned with corporate business needs and priorities, drives business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports corporate goals and strategies.		PTBA telah menyusun dan menetapkan kebijakan strategis pengelolaan TI di lingkup Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; serta dibentuknya Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Prosedur TI yang disusun berdasarkan ISO 27001, ISO 20000 dan Framework COBIT/COSO-Internal Control. PTBA has prepared and established a strategic IT management policy within the scope of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; as well as the establishment of an Information Technology and IT Procedures Work Unit which is based on ISO 27001, ISO 20000 and the COBIT/COSO-Internal Control Framework.

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 7, 8 & 9 **Recommendation 7, 8 & 9**			
1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporates that carry out business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure the authority and availability of adequate supporting tools so that the Sharia Supervisory Board can carry out its role effectively.	Penjelasan Explanation	Perusahaan tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah The company does not carry out business activities based on sharia principles
1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors' Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among other things, the division of roles for the Directors individually which can be regulated in the Board of Directors Charter or by a decision letter of the Board of Directors.	Diterapkan Applied	Piagam Direksi PTBA selalu diupdate secara rutin dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang berlaku di lingkup BUMN dan/atau PT Mineral Industri Indonesia (Persero). The PTBA Board of Directors Charter is always updated routinely by taking into account the provisions of applicable laws and regulations and policies in force within the scope of SOEs and/or PT Mineral Industri Indonesia (Persero).
1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of a member of the Board of Directors if they are involved in a financial crime and are proven to have made a mistake.	Diterapkan Applied	Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan dituangkan dalam Corporate Governance Policy PTBA. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan atau pengunduran diri anggota Direksi mengacu pada Anggaran Dasar PTBA. The policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes and proven to have committed errors is stated in the PTBA Corporate Governance Policy. The procedures for the appointment, replacement, dismissal, change or resignation of members of the Board of Directors refer to the PTBA Articles of Association.

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
1.2	Penilaian Kinerja – Direksi dan Anggotanya Performance Appraisal – Board of Directors and Members		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual director.	Diterapkan Applied	PTBA memiliki kebijakan untuk melakukan penilaian Dewan Komisaris baik secara kolegial maupun individual, informasi lebih lanjut terkait dengan penilaian Dewan Komisaris tertuang pada BAB GCG Laporan Tahunan PTBA. PTBA has a policy to conduct assessments of the Board of Commissioners both collegially and individually, further information related to the assessment of the Board of Commissioners is contained in the GCG Chapter of the PTBA Annual Report.
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with the consideration of the Remuneration and Nomination Committee, is responsible for determining performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.		Dewan Komisaris mempertimbangkan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melakukan evaluasi atas penilaian kinerja Direktur Utama dan Direktur lainnya. The Board of Commissioners takes the Nomination and Remuneration Committee into account when evaluating the performance of the President Director and other Directors.

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
1.3	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners		
Rekomendasi 1, 2, 3, 4, 5 & 6 **Recommendation 1, 2, 3, 4, 5 & 6**			
1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the corporate mission, vision and strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, advise and approve the business plans and long-term financial plans and corporate short-term financial plans. The Board of Commissioners advise and monitor the Directors on their implementation management. The Board of Directors and Board of Commissioners are involved in decisions that are very important for the corporate, regulated in the articles of association of the corporate.	Diterapkan Applied	Dewan Komisaris melakukan review tahunan atas kesesuaian visi dan misi PTBA setiap tahun nya serta melakukan review atas RKAP dan RJPP secara rutin. Dewan Komisaris memberikan nasihat dan melakukan pemantauan atas tugas pengurusan Direksi diantaranya melalui rapat-rapat dengan Direksi atau nasihat secara tertulis. Dalam Anggaran Dasar PTBA telah ditetapkan beberapa tindakan Direksi yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk lebih lanjut dapat dilihat pada BAB GCG Laporan Tahunan PTBA. The Board of Commissioners conducts an annual review of the suitability of PTBA's vision and mission every year and routinely reviews the RKAP and RJPP. The Board of Commissioners provides advice and monitors the management duties of the Board of Directors, including through meetings with the Board of Directors or written advice. In the Articles of Association of PTBA, several actions of the Board of Directors have been determined that require the approval of the Board of Commissioner, for further information, can be seen in the GCG Chapter of the PTBA Annual Report.
1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan Types of decisions that require the approval of the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report	Diterapkan Applied	Pada BAB GCG PTBA telah diungkapkan jenis tindakan Direksi PTBA yang wajib membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris In the PTBA GCG Chapter, the types of actions of the PTBA Board of Directors that require the approval of the Board of Commissioners have been disclosed.

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/ atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. Considering the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee, the Board of Commissioners proposes to, and to be decided by, the GMS the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In proposing the above, the Board of Commissioners pays attention to diversity, non-discriminatory elements and provides equal opportunities regardless of ethnicity, religion, race, class and gender. The Board of Commissioners ensures that the process of nominating and selecting members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is formal and transparent.	Diterapkan Applied	Dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/kuasanya untuk ditetapkan dalam RUPS. Nominasi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris mempertimbangkan aspek keberagaman. With the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to the Series A Dwiwarna Shareholders/ their proxies to be determined in the GMS. The nomination of candidates for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners takes into account the diversity aspect.
1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the nomination function formulates a succession policy in the process of nominating members of the Board of Directors. The Board of Commissioners review the report on the implementation of the development and succession plan submitted by the President Director in every year.	Diterapkan Applied	Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) telah menetapkan Charter Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengatur salah satunya fungsi KNR yaitu nominasi untuk suksesi calon kandidat pengurus perusahaan. Dewan Komisaris pun melakukan peninjauan atas kinerja KNR. The Nomination and Remuneration Committee (NRC) has established the Nomination and Remuneration Committee Charter which regulates one of the functions of the NRC, namely nomination for the succession of candidate company management candidates. The Board of Commissioners also conducted a review of the performance of the NRC.
1.3.5	**Dewan Komisaris** mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. **Board of Commissioners** submit to the GMS, which may be preceded by a recommendation from the Committee that carries out the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners in line with sustainable corporate development and the long-term interests of the corporate and shareholders; periodically reviewing the remuneration system for the Board of Directors and the Board of Commissioners.	Diterapkan Applied	PTBA melalui Dewan Komisaris melakukan kaji ulang atas kebijakan remunerasi secara berkala dengan menyesuaikan pada ketentuan serta best practice yang berlaku. PTBA through the Board of Commissioners periodically reviews the remuneration policy by adjusting it to applicable provisions and best practices.

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners supervise the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary.	Diterapkan Applied	Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, melakukan peninjauan atas kebijakan governansi korporat, termasuk memberikan persetujuan apabila terdapat perubahan. The Board of Commissioners, through the Integrated Risk and Governance Monitoring Committee, reviews corporate governance policies, including providing approval if there are changes.
Rekomendasi 7 **Recommendation 7**			
1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs corporates to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with corporate goals, objectives and strategies and comply with laws and regulations, codes of conduct and applicable standards.	Diterapkan Applied	Dewan Komisaris secara berkala memantau perkembangan profil risiko, parameter risiko, dan penerapan manajemen risiko terintegrasi. Dewan Komisaris memantau perkembangan profil, parameter, dan batasan risiko-risiko strategis termasuk potensi peningkatan risiko konsentrasi yang disebabkan oleh perubahan lingkungan usaha. The Board of Commissioners periodically monitors the development of risk profiles, risk parameters, and the implementation of integrated risk management. The Board of Commissioners monitors the development of profiles, parameters, and limits of strategic risks including the potential for increased concentration risk caused by changes in the business environment.
Rekomendasi 8 Recommendation 8			
1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners supervises and direct the integrity of the corporate accounting and financial reporting system, as well as the independence of the internal and external audit functions.	Diterapkan Applied	Dewan Komisaris melalui Komite Audit, melakukan pembahasan dalam rangka kaji ulang kinerja audit internal, termasuk kemungkinan diperlukannya beberapa penyesuaian butir pengendalian internal. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, conducted discussions in order to review the performance of internal audits, including the possibility of the need for several adjustments to internal control items.

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 9,10,11 & 12 **Recommendation 9,10,11 & 12**			
1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews and approves the annual report and corporate sustainability report and ensures their integrity, and supervise the process of corporate disclosure and communication.	Diterapkan Applied	Dewan Komisaris PTBA memantau, mereview dan menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dan memastikan pengungkapan serta penyampaian sesuai dengan peraturan yang berlaku. The PTBA Board of Commissioners monitors, reviews and approves the Annual Report and Sustainability Report and ensures disclosure and submission in accordance with applicable regulations.
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. Board of Commissioners charter is periodically reviewed.	Diterapkan Applied	Dewan Komisaris PTBA melakukan peninjauan secara berkala atas Pedoman Kerja dengan kebijakan yang berlaku di lingkup BUMN dan/atau PT Mineral Industri Indonesia (Persero). The PTBA Board of Commissioners conducts periodic reviews of the Work Guidelines with the policies applicable within the scope of SOEs and/or PT Mineral Industri Indonesia (Persero).
1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of a member of the Board of Commissioners if they are involved in a financial crime and are proven to have made a mistake.	Diterapkan Applied	Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan dituangkan dalam Corporate Governance Policy PTBA. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar PTBA The policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and proven to have committed errors is stated in the PTBA Corporate Governance Policy. The procedures for the appointment, replacement, dismissal, change or resignation of members of the Board of Commissioners refer to the PTBA Articles of Association.
1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, objektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent commissioners are expected to be able to contribute to honest, objective, active and constructive discussions at meetings of the Board of Commissioners.	Diterapkan Applied	Komisaris Independen turut serta dan aktif dalam menyampaikan pandangan dan saran terkait kebijakan dan strategi melalui rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan. Independent Commissioners participate and are active in conveying views and suggestions regarding policies and strategies through Board of Commissioners meetings and Joint Meetings.

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 13 **Recommendation 13**			
1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner have a role as the coordinator of the Board of Commissioners and ensures the effectiveness. The President Commissioner encourage a culture of openness and constructive dialogue that allows a variety of views to be expressed, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring timely enough available to discuss all the agenda. In addition, there should also be an opportunity for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.	Diterapkan Applied	Komisaris Utama PTBA bertindak sebagai leader dan koordinator Dewan Komisaris, untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada BAB GCG Laporan Tahunan ini. The President Commissioner of PTBA acts as the leader and coordinator of the Board of Commissioners, for further information please see the GCG Chapter of this Annual Report.
Panduan Manual **Manual Guidance**			
1.3.13.1	Rincian tugas Komisaris Utama diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web korporasi. Details of the President Commissioner duties are disclosed in the annual report and corporate website.	Diterapkan Applied	PTBA telah mengungkapkan tugas Komisaris Utama pada Laporan Tahunan di BAB GCG. PTBA has disclosed the duties of the President Commissioner in the Annual Report in the GCG Chapter.
1.3.13.2	Komisaris Utama mengkoordinasi pembagian peran pengawasan di antara para anggota Dewan Komisaris, memimpin rapat Dewan Komisaris dan mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar Dewan Komisaris. Details of President Commissioner duties are disclosed in annual report and corporate website, the President Commissioner coordinates the division of oversight roles among members of the Board of Commissioners, chairs the meetings of the Board of Commissioners and represents the Board of Commissioners in dealings with parties outside the Board of Commissioners.	Diterapkan Applied	Komisaris Utama PTBA mengkoordinasi pembagian peran masing-masing anggota Dewan Komisaris di berbagai Komite dan memimpin serta mewakili Dewan Komisaris. The President Commissioner of PTBA coordinates the division of roles of each member of the Board of Commissioners in various Committees and leads and represents the Board of Commissioners.
1.3.13.3	Mantan Direktur Utama dan anggota Direksi yang terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris tidak dapat langsung ditetapkan sebagai Komisaris utama. Perlu ada masa jeda 2 (dua) tahun untuk dapat ditunjuk kembali sebagai Komisaris Utama. Jika Dewan Komisaris memutuskan bahwa mantan Direktur Utama/anggota Direksi perlu menjadi Komisaris utama, maka Dewan Komisaris memberikan alasan dan penjelasan dalam Laporan Tahunan. Former President Directors and members of the Board of Directors who are elected as members of the Board of Commissioners cannot be directly appointed as President Commissioners. There needs to be a gap period of 2 (two) years to be reappointed as President Commissioner. If the Board of Commissioners decides that a former President Director/member of the Board of Directors needs to become the President Commissioner, the Board of Commissioners will provide reasons and explanations in the Annual Report.	Diterapkan Applied	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, mantan Direksi dilarang langsung memangku jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris (terdapat cooling period). In accordance with the provisions of the Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023, former Directors are prohibited from immediately holding positions as members of the Board of Commissioners (with a cooling period).

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
1.4	Pembentukan Komite Committee Formation		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Corporate has committees under the Board of Commissioners consisting of at least: Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee and Risk Management Monitoring Committee.	Diterapkan Applied	Dewan Komisaris PTBA memiliki 3 (tiga) Komite yakni Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. The PTBA Board of Commissioners has 3 (three) Committees, namely the Audit Committee, the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, and the Nomination and Remuneration Committee.
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent and other committees formed by the Board of Commissioners are the majority of the independent parties, and all members of the committee are competent, committed, and have sufficient authority to carry out their roles effectively and independently.	Diterapkan Applied	Anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen. Ketua Komite Audit dijabat oleh seorang Komisaris Independen yaitu Andi Pahril Pawi dan bukan Presiden Komisaris. Seluruh anggota memiliki kompetensi, komitmen dan kewenangan yang memadai untuk menjalankan tugas tanggung jawab komite. Members of the Audit Committee are Independent Commissioners and Independent Parties. The Chairman of the Audit Committee is held by an Independent Commissioner, namely Andi Pahril Pawi and not the President Commissioner. All members have sufficient competence, commitment and authority to carry out the duties and responsibilities of the committee.
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan To ensure the monitoring of the duties implementation of Audit Committee is carried out objectively and independently, the President Commissioner may not be the chairman of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances which must be explained in the annual report	Diterapkan Applied	Bapak Irwandy Arif (Komisaris Utama), tidak sebagai Ketua Komite Audit. Mr. Irwandy Arif (President Commissioner), not the Chairman of the Audit Committee.
1.5	Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya Performance Appraisal - Board of Commissioners and Members		

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. The Board of Commissioners conducts an annual formal objective evaluation to determine the effectiveness of the Board, the Committees and each individual commissioner.	Diterapkan Applied	Dewan Komisaris serta Komite di bawah Dewan Komisaris dievaluasi baik secara kolegial ataupun individu. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada BAB GCG Laporan Tahunan ini. The Board of Commissioners and the Committees under the Board of Commissioners are evaluated both collegially and individually. For further information, please see the GCG Chapter of this Annual Report.
1.6	Benturan Kepentingan Conflict of Interest		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Board of Directors Members who have concurrent positions outside the corporate must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner notifies the Board of Commissioners and the chairman of the committee carrying out the nomination function, before accepting a new appointment as a director or commissioner of a publicly listed corporate, other directorships or other positions with significant time commitments.	Diterapkan Applied	Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PTBA, setiap rangkap jabatan anggota Direksi PTBA wajib disetujui pada Rapat Dewan Komisaris. In accordance with the provisions of the PTBA Articles of Association, every concurrent position of a member of the PTBA Board of Directors must be approved at a Board of Commissioners Meeting.
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages the potential of conflicts of interest for management, members of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners who have conflicts of interest do not participate in monitoring and making decisions on potential conflicts of interest involving Commissioners or Affiliation of the Commissioner concerned.	Diterapkan Applied	Dewan Komisaris melakukan pengelolaan potensi atas benturan kepentingan. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PTBA, Corporate Governance Policy dan Charter Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris yang memiliki potensi benturan kepentingan dilarang untuk mengambil keputusan. The Board of Commissioners manages potential conflicts of interest. In accordance with the provisions of the PTBA Articles of Association, Corporate Governance Policy and the Board of Commissioners Charter, members of the Board of Commissioners who have potential conflicts of interest are prohibited from making decisions.

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
1.7	Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Competency Improvement of Board of Directors and Board of Commissioners Members		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, characteristics and operations of the corporate, relevant laws and regulations and other applicable standards and obligations. The Board of Directors through the corporate secretary supports all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in updating and refreshing their skills and knowledge necessary to carry out their role on the Board.	Diterapkan Applied	Sesuai dengan ketentuan Corporate Governance Policy dan Charter Dewan Komisaris, serta Charter Direksi, Dewan Komisaris dan Direksi wajib selalu melakukan pengembangan kompetensi. Sekretaris Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan berperan untuk memfasilitasi program pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. In accordance with the provisions of the Corporate Governance Policy and the Charter of the Board of Commissioners, as well as the Charter of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Board of Directors are required to always carry out competency development. The Secretary of the Board of Commissioners and the Corporate Secretary play a role in facilitating the competency development program of members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors.
2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners		
2.1	Komposisi Direksi Board of Directors Composition		
Rekomendasi 1 & 2 **Recommendation 1 & 2**			
2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining candidates for directors, the Board of Commissioners through the Remuneration and Nomination Committee does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Remuneration and Nomination Committee can use independent sources to determine qualified candidates.	Diterapkan Applied	KNR dan/atau Dewan Komisaris dapat menggunakan pihak ketiga independen atau head hunter untuk mencari kandidat suksesi Direksi. The KNR and/or the Board of Commissioners may use an independent third party or head hunter to search for candidates for succession to the Board of Directors.
2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, abilities and expertise needed to properly fulfill the role of the Board of Directors and takes into account the fulfillment of the diversity of the Board of Directors.	Diterapkan Applied	KNR mempertimbangkan kriteria kompetensi, kemampuan dan keahlian serta keberagaman dalam seleksi calon anggota Direksi. KNR considers the criteria of competence, ability and expertise as well as diversity in the selection of candidates for members of the Board of Directors.

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The corporate policy regarding diversity among the Board of Directors and Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.	Diterapkan Applied	PTBA telah mengungkapkan kebijakan keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris pada BAB GCG Laporan Tahunan ini. PTBA has disclosed the diversity policy of the Board of Directors and Board of Commissioners in the GCG Chapter of this Annual Report.
Rekomendasi 4 Recommendation 4			
2.1.4.	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so as to produce the desired composition of the Board. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.	Diterapkan Applied	Kebijakan suksesi dan nominasi diungkapkan pada website dan/ atau Laporan Tahunan PTBA. Succession and nomination policies are disclosed on the PTBA website and/or Annual Report.
Rekomendasi 5 & 6 **Recommendation 5 & 6**			
2.1.5.	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee that performs the nomination function establishes nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' expertise matrix that has been approved by the Board of Commissioners and ensures that the candidate profile meets the requirements set out in the expertise matrix and nomination criteria.	Diterapkan Applied	KRN menjalankan fungsi nominasi berdasarkan prosedur dan kriteria yang dilakukan secara benar, konsisten, transparan antara lain dengan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan keahlian Dewan Komisaris KRN carries out the nomination function based on procedures and criteria that are carried out correctly, consistently and transparently, including by ensuring that the candidate's profile meets the expertise requirements of the Board of Commissioners.
2.1.6.	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners must be formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of abilities, skills, knowledge, experience, age, cultural background and gender needed to properly fulfill the role of the Board of Commissioners.	Diterapkan Applied	Komposisi Dewan Komisaris PTBA mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan sebagainya sebagaimana yang dibutuhkan untuk memenuhi peran Dewan Komisaris The composition of the PTBA Board of Commissioners reflects diversity in terms of ability, expertise, knowledge, experience, age, cultural background, and others as needed to fulfill the role of the Board of Commissioners.

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Panduan Manual **Manual Guidance**			
2.1.6.1.	Setidaknya ada satu Komisaris memiliki pengalaman sebelumnya pengalaman di sektor utama tempat korporasi beroperasi At least one Commissioner has previous experience in the main sector where the corporate operates.	Diterapkan Applied	PTBA memiliki beberapa Dewan Komisaris yang berpengalaman di bidang pertambangan batubara. Komisaris Utama PTBA merupakan professor di bidang pertambangan. PTBA has several Board of Commissioners who are experienced in coal mining. The President Commissioner of PTBA is a professor in mining.
2.1.6.2.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi korporasi. Determination of the number of Board of Commissioners members consider the condition of the corporate.	Diterapkan Applied	Penetapan jumlah Dewan Komisaris PTBA mempertimbangkan kondisi PTBA. Determination of the number of PTBA Board of Commissioners takes into account PTBA's conditions.
Rekomendasi 7 **Recommendation 7**			
2.1.7.	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran- peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to provide the independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles where there is a potential conflict of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with a limited term of office and disclosure of the term of membership of the Board of Commissioners and their independence. from a corporate point of view.	Diterapkan Applied	PTBA memiliki Komisaris Independen sesuai sebanyak 3 (tiga) orang di mana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan persyaratan dari ACGS. PTBA has 3 (three) Independent Commissioners, which is in accordance with the provisions of laws and regulations and the requirements of ACGS.
Rekomendasi 8 **Recommendation 8**			
2.1.8.	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and Board of Commissioners and to increase investor and stakeholder confidence, the Remuneration and Nomination Committee ensures that there is a formal, rigorous and transparent process for the appointment and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Terpenuhi Applied	Dewan Komisaris melalui KNR memiliki kebijakan suksesi yang dapat dilihat pada BAB GCG Laporan Tahunan ini. The Board of Commissioners through the KNR has a succession policy which can be seen in the GCG Chapter of this Annual Report.
2.2	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners		

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
2.2.1.	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The Board of Directors' remuneration must be proposed, through the Remuneration and Nomination Committee, by the Board of Commissioners to be decided by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors and the economic situation and corporate performance.	Diterapkan Applied	Sesuai denan Peraturan Menteri No. PER-2/ MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-306/ MBU/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) Pada Badan Usaha Milik Negara Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-306/ MBU/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) Pada Badan Usaha Milik Negara, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berorientasi pada aspek ekonomi, sosial, governance dan komersial. In accordance with Ministerial Regulation No. PER-2/ MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-306/MBU/11/2023 concerning Technical Instructions for the Preparation of Key Performance Indicators in State-Owned Enterprises Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-306/ MBU/11/2023 concerning Technical Instructions for the Preparation of Key Performance Indicators in State-Owned Enterprises, the remuneration of the Board of Commissioners and Directors is oriented towards economic, social, governance and commercial aspects.
Panduan Manual **Manual Guidance**			
2.2.1.1.	Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil, baik dalam struktur maupun besaran, dan ditentukan dalam konteks nilai-nilai korporasi, struktur penghargaan internal, dan mendorong kompetisi dengan tetap peka terhadap harapan pemangku kepentingan dan norma masyarakat. The remuneration policy is reasonable and fair, both in structure and size, and is determined in the context of corporate values, internal reward structures, and encourages competition while remaining sensitive to stakeholder expectations and societal norms.	Diterapkan Applied	Kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris berorientasi pada aspek ekonomi, sosial, governance dan komersial. The remuneration policy of the Board of Directors and Board of Commissioners is oriented towards economic, social, governance and commercial aspects.

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
2.2.1.2.	Korporasi memiliki kebijakan remunerasi anggota Direksi yang berbasis kinerja dan selaras dengan pencapaian kepentingan jangka panjang korporasi, seperti ukuran kinerja sebagai berikut: opsi kepemilikan saham, bonus yang ditangguhkan, provisi pengembalian sebagian atau seluruh bonus/insentif yang telah dibayar (clawback). The corporate has a remuneration policy for members of the Board of Directors that is performance-based and aligned with the achievement of the long-term interests of the corporate, such as performance measures as follows: share ownership options, deferred bonuses, provision for returning part or all of bonuses/incentives that have been paid (clawback).	Diterapkan Applied	PTBA memiliki kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang (Insentif Kinerja Jangka Panjang) sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian BUMN dan/atau MIND ID. PTBA has a remuneration policy for members of the Board of Directors and Board of Commissioners that is oriented towards long-term interests (Long-Term Performance Incentives) as determined by the Ministry of SOEs and/or MIND ID.
2.2.1.3.	Direksi tidak menerima fasilitas lain di luar fasilitas yang sudah diberikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham korporasi. The Board of Directors does not receive other facilities other than the facilities that have been provided based on the Corporate General Meeting of Shareholders.	Diterapkan Applied	Direksi PTBA dilarang untuk menerima fasilitas selain yang telah ditetapkan dalam RUPS. The PTBA Board of Directors is prohibited from accepting facilities other than those stipulated in the GMS.
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
2.2.2.	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and promotes long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners and the economic situation and corporate performance. In addition, the position of President Commissioner and chairman as well as the membership in committees must also be considered	Diterapkan Applied	Kebijakan Remunerasi PTBA yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN berorientasi pada aspek ekonomi, sosial, governance dan komersial. PTBA's Remuneration Policy set by the Ministry of SOEs is oriented towards economic, social, governance and commercial aspects.
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
2.2.3.	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that the remuneration package is determined based on the achievements, qualifications and competencies of the directors and commissioners with due regard to corporate operating performance, individual performance and market conditions, the Remuneration and Nomination Committee ensures that there are fair and transparent procedures for establishing remuneration policies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Diterapkan Applied	Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu salah pada (i) Kinerja Perusahaan; (ii) Prestasi kerja Dewan Komisaris dan Direksi; (iii)Remunerasi yang berlaku dalam industri sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan yang mempunyai jenis dan skala usaha yang sama dengan Perusahaan. Determination of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners refers to (i) Company Performance; (ii) Work performance of the Board of Commissioners and Board of Directors; (iii) Remuneration applicable in the industry in accordance with the business activities of the Company that has the same type and scale of business as the Company.

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
3.	Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris Working Relations between the Board of Directors and the Board of Commissioners		
3.1	Sifat Hubungan Kerja Working Relations Characteristic		
Rekomendasi 1, 2 & 3 **Recommendation 1,2 & 3**			
3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners and between members of the Board of Directors and members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information so that confidential information does not leak.	Diterapkan Applied	Dewan Komisaris dan Direksi melakukan rapat gabungan secara rutin setiap bulannya. The Board of Commissioners and Board of Directors hold monthly joint meetings regularly.
3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing- masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors cooperates with the Board of Commissioners in formulating the corporate mission, vision and strategy and regularly discusses their implementation.	Diterapkan Applied	Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama merumuskan visi, misi, serta strategi perusahaan, serta melakukan evaluasi secara berkala. The Board of Commissioners and the Board of Directors jointly formulate the company's vision, mission and strategy, and conduct periodic evaluations.
3.1.3	Corporate Secretary memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary has an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	Diterapkan Applied	Sekretaris Perusahaan PTBA berperan sebagai liaison officer bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham. PTBA's Corporate Secretary acts as a liaison officer for the Board of Directors and Board of Commissioners as well as shareholders.
3.2	Akses informasi Dewan Komsaris Access to information on the Board of Commissioners		

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai.Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it is properly informed. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay and in a comprehensive manner on all matters relevant to the corporate. The Board of Commissioners may at any time request the Board of Directors to provide additional information.	Diterapkan Applied	Sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Corporate Governance Policy, Direksi memastikan Dewan Komisaris serta organnya mendapatkan akses terhadap informasi dan/atau data perusahaan. In accordance with the provisions of the Articles of Association and Corporate Governance Policy, the Board of Directors ensures that the Board of Commissioners and its organs have access to company information and/or data.
3.3	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi Responsibilities of Board of Directors and Board of Commissioners for the Impact of Ownership Structures on Corporate		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar- pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. The impact of the ownership structure on the corporate. The Board of Directors and the Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the shareholding structure and relationships between corporate shareholders which may impact the management and operations of the corporate.	Diterapkan Applied	Dewan Komisaris dan Direksi memperhatikan struktur kepemilikan saham di perusahaan, apabila terjadinya kepemilikan saham oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris, akan dilaporkan kepada OJK sesuai peraturan di bidang pasar modal. The Board of Commissioners and Board of Directors pay attention to the share ownership structure in the company. If there is share ownership by the Board of Directors and/or Board of Commissioners, it will be reported to the OJK in accordance with regulations in the capital market sector.
4.	Perilaku Etis dan bertanggung jawab Ethical and responsible behavior		
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam This statement is stated in	Diterapkan Applied	Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani pernyataan penerapan Kode Etik. The Board of Directors and Board of Commissioners sign a statement on the implementation of the Code of Ethics.

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 1 & 2 **Recommendation 1 & 2**			
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: 1. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; 2. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; 3. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. 4. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; 5. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; 6. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; 7. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. 8. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. 9. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/ memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. 10. Menghormati perbedaan pendapat dan hak- hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. 11. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya. This statement is set forth in the Code of Business Conduct and Ethics which must clearly state the corporate expectation that each member of the Board of Directors and Board of Commissioners and employees will: 1. Act in the best interests of the corporate; 2. Act honestly and with a high standard of integrity; 3. Be independent and act on full information, in good faith, with due diligence and prudence. 4. Comply with laws and regulations that apply to corporates and their operations; 5. Avoiding actions that violate laws and regulations or unethical actions based on corporate ethics guidelines; 6. Not involved or participating in any activities that will cause a conflict of interest with the best interests of the corporate or which will have a negative impact on the reputation of the corporate; 7. Do not take advantage of property or information owned by the corporate, ownership of other assets or its customers for personal gain or which causes harm to the corporate and its customers. 8. Does not take advantage of his position or opportunities generated by his position for personal gain. 9. Avoiding the act of requesting or receiving from third parties payments, gratuities or other benefits for themselves or for other people that cause conflicts of interest/give benefits to third parties in violation of laws and regulations. 10. Respect differences of opinion and the rights of each member of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees. 11. Ensure the complete, fair, accurate, timely and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporate to regulators and in other public communications	Diterapkan Applied	Tertuang pada Pedoman Kode Etik PTBA tahun 2023. As stated in the 2023 PTBA Code of Ethics Guidelines.

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan (antifraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors establishes policies and practices on anti-money laundering and financing of terrorism, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, political involvement with reference to national or international standards regarding anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud or other related standards.	Diterapkan Applied	Tertuang pada Pedoman Kode Etik PTBA 2023. As stated in the 2023 PTBA Code of Ethics Guidelines.
4.2	Nilai-Nilai dan Budaya Organisasi Organizational Values and Culture		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilainilai korporasi Corporates articulate, grow and express corporate culture and values	Diterapkan Applied	PTBA senantiasa menumbuhkan nilai-nilai perusahaan kepada seluruh insan perusahaan baik itu AKHLAK BUMN, Key Behaviour MIND ID, dan Semangat AKSI PTBA. PTBA always fosters corporate values to all company personnel, including SOEs AKHLAK, MIND ID Key Behavior, and PTBA Semangat AKSI.
4.3	Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya Communication and Enforcement of Code of Ethics, Values and Culture		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. Code of conduct and corporate code of ethics are communicated effectively to the Board of Directors, Board of Commissioners and all employees, integrated into corporate strategy and operations including risk management system and remuneration structure, and enforced	Diterapkan Applied	PTBA selalu melakukan sosialisasi kode etik kepada seluruh insan PTBA. PTBA always socializes the code of ethics to all employees.
5.	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control and Compliance		
5.1	Pengendalian Internal dan Kepatuhan Internal Control and Compliance		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
5.1.1	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors periodically reviews on the design accuracy and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control and corporate compliance and reports the implementation and the results of the review are conveyed to the shareholders through the annual report of corporate.	Diterapkan Applied	Direksi PTBA selalu mereview berkala atas efektivitas operasional, GCG, pengelolaan risiko, dan pengendalian internal serta dituangkan pada Laporan Tahunan. The PTBA Board of Directors periodically reviews operational effectiveness, GCG, risk management, and internal control and includes this in the Annual Report.
5.2	Manajemen Risiko Risk Management		

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
5.2.1.	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are one unit, disclosed in a transparent manner, included in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as in discussions at the meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.	Diterapkan Applied	Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan melakukan pemantauan risiko PTBA. Selain itu, risiko tersebut secara berkala dibahas pada rapat-rapat perusahaan. The Board of Commissioners through the Risk Monitoring and Corporate Governance Committee monitors PTBA's risks. In addition, these risks are periodically discussed at company meetings.
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
5.2.2.	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Monitoring Committee assists the implementation of the duties of the Board of Commissioners by creating a transparent, focused and independent mechanism for oversight of corporate risk management.	Diterapkan Applied	PTBA memiliki Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi untuk memastikan penerapan manajemen risiko di PTBA. PTBA has an Integrated Risk Monitoring and Governance Committee to ensure the implementation of risk management in PTBA.
5.3.	Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Integration of Governance, Risk Management and Compliance		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors builds an integrated system of governance, risk management and compliance (GRC), by handling various uncertainties in an integrated manner with high integrity, to ensure that the corporate can achieve its goals	Diterapkan Applied	PTBA telah membangun sistem GRC secara terintegrasi melalui beberapa fungsi penting seperti Manajemen Risiko, Hukum dan Regulasi, Sekretaris Perusahaan serta Sistem Manajemen dan Kinerja Perusahaan. PTBA has developed an integrated GRC system through several important functions such as Risk Management, Legal and Regulation, Corporate Secretary and Corporate Management and Performance Systems.

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Panduan Manual **Manual Guidance**			
5.3.1.1	Direksi memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC yang meliputi sistem governansi, manajemen strategi, manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan sistem audit internal agar korporasi tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya. The Board of Directors ensures coordination and capacity building among the main GRC systems which include governance systems, strategic management, performance management, risk management, compliance management and internal audit systems so that the corporate stays on the right track in achieving its goals.	Diterapkan Applied	Satuan Kerja penanggungjawab GRC selalu melakukan koordinasi untuk memastikan penerapan GRC sesuai dengan standard yang berlaku. The GRC work unit always coordinates to ensure that GRC implementation complies with applicable standards.
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the division in charge of the compliance function does not concurrently carry out functions that have the potential to cause a conflict of interest	Diterapkan Applied	Satuan Kerja yang membidangi kepatuhan tidak merangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Work Unit in charge of compliance does not hold concurrent positions that could potentially give rise to a conflict of interest.
5.4.	Audit Internal Internal Audit		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners through the Audit Committee monitors and ensures that the internal audit function helps the corporate to achieve its goals by approaching an objective and disciplined to evaluate and improve the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.	Diterapkan Applied	Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah memastikan fungsi SPI berjalan secara efektif dan secara berlaka melakukan pembahasan dengan SPI perusahaan. The Board of Commissioners through the Audit Committee has ensured that the SPI function is running effectively and regularly holds discussions with the company's SPI.
6.	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency		
6.1	Kebijakan Pengungkapan Disclosure Policy		

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 1 & 2 **Recommendation 1 & 2**			
6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi The corporate has disclosure and transparency policies and procedures that ensure the disclosure of material information and safeguard sensitive information and corporate secrets.	Diterapkan Applied	PTBA memiliki kebijakan terkait dengan komunikasi dengan pemegang saham dan keterbukaan informasi. PTBA has policies related to communication with shareholders and disclosure of information.
6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. Shareholders' right to obtain regularly and timely material relevant information about the corporate must be fulfilled.	Diterapkan Applied	PTBA melalui Sekretaris Perusahaan memastikan para pemegang saham mendapat informasi secara teratur dan tepat waktu. PTBA through the Corporate Secretary ensures that shareholders receive information regularly and on time.
6.2	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Financial and Sustainability Reports		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The corporate discloses systems and procedures to ensure that interim financial reports that are not materially audited or reviewed by external auditors are accurate, complete, and provide investors with the right information to make the right investment decisions.	Diterapkan Applied	Laporan Keuangan triwulan dan/atau tahunan disampaikan oleh PTBA sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh peraturan di bidang pasar modal. Quarterly and/or annual financial reports are submitted by PTBA in accordance with the time stipulated by regulations in the capital market sector.

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. Audit Committee ensures the quality of financial report audits carried out by external auditors. This activity includes recommending the appointment, reappointment and, if necessary, the termination and remuneration of the external auditor.	Diterapkan Applied	Komite Audit setiap tahun melakukan pembahasan dengan auditor eksternal. Selain itu, sesuai dengan Charter Komite Audit PTBA, Komite Audit memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pengangkatan dan/atau pemberhentian KAP/AP. The Audit Committee annually holds discussions with external auditors. In addition, in accordance with the PTBA Audit Committee Charter, the Audit Committee has the authority to provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment and/or dismissal of KAP/AP.
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. Sustainability reports must be prepared and disclosed accurately and in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.	Diterapkan Applied	Laporan Keberlanjutan PTBA disusun sesuai dengan ketentuan POJK 51/POJK.03/2017 serta best practice secara internasional. PTBA's Sustainability Report is prepared in accordance with the provisions of POJK 51/POJK.03/2017 and international best practices.
Rekomendasi 4 **Recommendation 4**			
6.2.4	Perusahaan telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan Perseroan telah memaparkan tentang kinerja keberlanjutan Perseroan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola, yang disajikan dalam perbandingan selama 3 tahun, sehingga diharapkan membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The corporate has issued a Sustainability Report which is an integral part of the Annual Report. The Corporate's Sustainability Report has presented the Corporate's sustainability performance which includes economic, social, environmental and governance aspects, which are presented in a 3-year comparison, so that it is expected to help shareholders and stakeholders understand the strategic goals of the corporate and its progress in creating sustainable value.	Diterapkan Applied	Laporan Keuangan Tahunan PTBA Tahun Buku 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan PTBA Tahun Buku 2024. Laporan Keberlanjutan PTBA Tahun Buku 2024 telah mengungkapkan kinerja ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola, yang disajikan dalam perbandingan selama 3 tahun. PTBA Annual Financial Report for Fiscal Year 2024 is an inseparable part of PTBA Annual Report for Fiscal Year 2024. PTBA Sustainability Report for Fiscal Year 2024 has disclosed economic, social, environmental and governance performance, which is presented in a comparison for 3 years.
6.3	Diseminasi Informasi Information Dissemination		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Information dissemination channels should provide users with equitable, timely and relatively inexpensive access to relevant information.	Diterapkan Applied	PTBA telah menyediakan channel bagi para stakeholders PTBA yang diungkapkan pada website PTBA. PTBA has provided channels for PTBA stakeholders which are disclosed on the PTBA website.

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 2 & 3 **Recommendation 2 & 3**			
6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The Corporate ensures that an annual statement on the application of the General Guidelines for Corporate Governance in Indonesia, including an explanation of the application of each Recommendation and Guide is available on the website for a minimum period of five years.	Diterapkan Applied	Dalam laporan Tahunan PTBA dinyatakan bahwa PTBA mengacu/mengadopsi standard PUGKI 2021. In the PTBA Annual Report, it is stated that PTBA refers to/adopts the 2021 PUGKI standard.
6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus didiungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur cross listing, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan. For corporate listed on the capital market in jurisdictions other than the jurisdiction of origin, the applicable laws and regulations on corporate governance must be clearly disclosed. In the case of cross listing, the criteria and procedures for recognizing the listing requirements for the primary listing must be transparent and documented.	Penjelasan Explanation	PTBA tidak listing selain di Bursa Efek Indonesia. PTBA is not listed other than on the Indonesia Stock Exchange.
7.	Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Protection of the Rights of Shareholders		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor The corporate has a communication policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation	Diterapkan Applied	PTBA memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham dan keterbukaan informasi. PTBA has a policy of communication with shareholders and disclosure of information.
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. The corporate which is the parent entity ensures that its corporate governance policies apply to its subsidiaries and entities under common control corporate investment is significant.	Diterapkan Applied	PTBA memberlakukan kebijakan yang berlaku di PTBA kepada entitas anak dan entitas yang dikendalikan oleh PTBA. PTBA applies the policies applicable at PTBA to subsidiaries and entities controlled by PTBA.

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. The corporate has rules and procedures governing acquisitions, acquisitions and extraordinary transactions such as mergers and sales of substantial corporate assets to ensure transactions occur in a transparent and under reasonable conditions and protect the rights of all shareholders according to the class.	Diterapkan Applied	PTBA telah memiliki pedoman di bidang pengembangan usaha yang mengatur prosedur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial. PTBA has guidelines in the field of business development that regulate procedures for acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions such as mergers and sales of substantial corporate assets.
Panduan Manual **Manual Guidance**			
7.1.3.1	Korporasi secara jelas mengungkapkan aturan dan prosedur tersebut sehingga investor memahami hak-hak mereka dan hak untuk memperoleh kompensasi. Corporation clearly discloses these rules and procedures for investors to understand their rights and entitlement to compensation.	Diterapkan Applied	PTBA memiliki unit hubungan investor untuk memastikan informasi memadai kepada investor. Informasi terkait hal tersebut juga tersedia di website PTBA. PTBA has an investor relations unit to ensure adequate information to investors. Information related to this is also available on the PTBA website.
7.1.3.2	Taktik yang mencegah pengambilalihan, (anti- take-over devices) tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan Dewan Komisaris dari akuntabilitas. The anti-takeover devices should not be used to protect the management and Board of Commissioners from accountability.	Penjelasan Applied	Perusahaan tidak memiliki taktik untuk mencegah pengambialihan (anti-take-over devices) The company does not have any tactics to prevent takeovers (anti-takeover devices)
7.2	Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham Fair Treatment of Shareholders		

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan Semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, Pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memeroleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. The Corporate have rules and procedures that ensure All shareholders of the same series in one class of shares must be treated equally, Disclosure of such rules and procedures as well as disclosure of capital structure and arrangements that enable certain shareholders to acquire influence or control that is disproportionate to its shareholding.	Diterapkan Applied	PTBA memiliki aturan dan prosedur setara dan sesuai terkait jenis saham seperti kepemilikan Saham Seri B memiliki hak yang sama dengan hak yang dimiliki Saham Seri A, kecuali hak-hak istimewa atau hak-hak tertentu yang dimiliki Saham Seri A sebagaimana peraturan yang berlaku. PTBA has equivalent and appropriate rules and procedures related to types of shares, such as ownership of Series B Shares has the same rights as the rights held by Series A Shares, except for special rights or certain rights held by Series A Shares as per applicable regulations.
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. The corporate has rules and procedures that ensure related party transactions are approved and executed in such a way as to ensure that the conflict of interests have been properly managed, and protect the interests of the corporate and shareholders.	Diterapkan Applied	PTBA telah memiliki kebijakan terkait transaksi afiliasi sebagaimana Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 067/0100/2023 tentang Pedoman Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. PTBA has a policy regarding affiliated transactions as stated in the Decree of the Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 067/0100/2023 concerning Guidelines for Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/ belum tersedia di pasar. The corporate has and discloses the policies to prevent insider trading. The corporate has clear rules regarding any trading in corporate shares carried out by directors, commissioners and insiders to ensure that no one can benefit directly or indirectly from information that is not/not yet available in the market.	Diterapkan Applied	PTBA telah memiliki kebijakan terkait insider trading, kebijakan yang mencegah terjadinya insider trading tertuang dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PTBA No.250/0100/2023 dan No.15/ SK/PTBADEKOM/ XII/2023 tentang Pedoman Transaksi Orang Dalam (Insider Trading). PTBA has a policy related to insider trading, a policy that prevents insider trading is stated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PTBA No. 250/0100/2023 and No. 15/SK/PTBADEKOM/XII/2023 concerning Guidelines for Insider Transactions (Insider Trading).
7.3	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders		

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi The corporate calls for the GMS with the agenda and materials for the GMS as completely and as early as possible (no later than 28 days before the GMS) to provide sufficient time and material for shareholders to properly study the meeting agenda. Meeting invitations and all GMS information are disclosed through electronic means such as through the corporate website	Penjelasan Explanation	Pemanggilan RUPS PTBA mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 15/POJK.04/2020. The summoning to the PTBA GMS refers to the provisions of the Articles of Association and POJK No. 15/POJK.04/2020.
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The corporate has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively in GMS.	Diterapkan Applied	PTBA menyampaikan prosedur RUPS pada Tata Tertib RUPS yang dipublikasikan pada website PTBA. PTBA conveys the GMS procedures in the GMS Rules of Procedure published on the PTBA website.
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners	Diterapkan Applied	PTBA memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk berpartisipasi aktif termasuk penetapan Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS. PTBA provides an opportunity for all shareholders to actively participate, including the appointment of the Board of Commissioners and Directors in the GMS.
Rekomendasi 4 **Recommendation 4**			
7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The corporate ensures the transparency and accountability of the external auditor at the GMS.	Penjelasan Explanation	Pada tahun 2024, RUPS PTBA memutuskan mendelegasikan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris. In 2024, the PTBA GMS decided to delegate the appointment of AP and/or KAP to the Board of Commissioners.

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 5 **Recommendation 5**			
7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. Submission of voting results and a complete summary of the minutes of the GMS will be announced to the public on the following working day.	Diterapkan Applied	PTBA mempublikasikan ringkasan risalah RUPS 1 (satu) hari kerja setelah RUPS. PTBA publishes a summary of the minutes of the GMS 1 (one) working day after the GMS.
8.	Pemangku Kepentingan Lainnya Other Stakeholders		
8.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (stakeholder engagement) Key Stakeholder Engagement		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
8.1.1	Korporasi melalui Corporate Secretary melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The Corporate through the Corporate Secretary carry out regular, transparent and effective communications with key stakeholders and involve them to understand their hopes and grievances and the impact the corporate has on them.	Diterapkan Applied	Sekretaris Perusahaan aktif untuk mengkomunikasikan informasi terkait perusahaan kepada stakeholders perusahaan. The Corporate Secretary is active in communicating company-related information to company stakeholders.
8.2	Komitmen Keberlanjutan dalam Model Bisnis Sustainability Commitment in Business Models		
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners together with the Board of Directors are responsible, accountable and transparent for sustainability governance, including setting corporate sustainability strategies, priorities and targets. The Board of Directors and Board of Commissioners incorporate sustainability considerations when carrying out their roles, including among others developing and implementing corporate strategies, business plans, key action plans and risk management.	Diterapkan Applied	Dewan Komisaris dan Direksi PTBA selalu secara berkala melakukan evaluasi atas going concern perusahaan. The Board of Commissioners and Directors of PTBA always periodically evaluate the company's going concern.
8.3	Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan Protection of Stakeholders		

No.	Uraian Description	Penerapan/Penjelasan Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that corporate operations reflect the application of high standards of ethics, social and environmental responsibility throughout the corporate and ensures that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with the rights of stakeholders.	Diterapkan Applied	Tertuang sesuai dengan Kode Etik PTBA 2023 dan Corporate Governance Policy. Stated in accordance with the PTBA 2023 Code of Ethics and Corporate Governance Policy.
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages the employees to work for the long term interests of the corporate and prioritizes sustainability.	Diterapkan Applied	Tertuang dalam perjanjian kerja bersama Perusahaan. Stated in the Company's joint employment agreement.

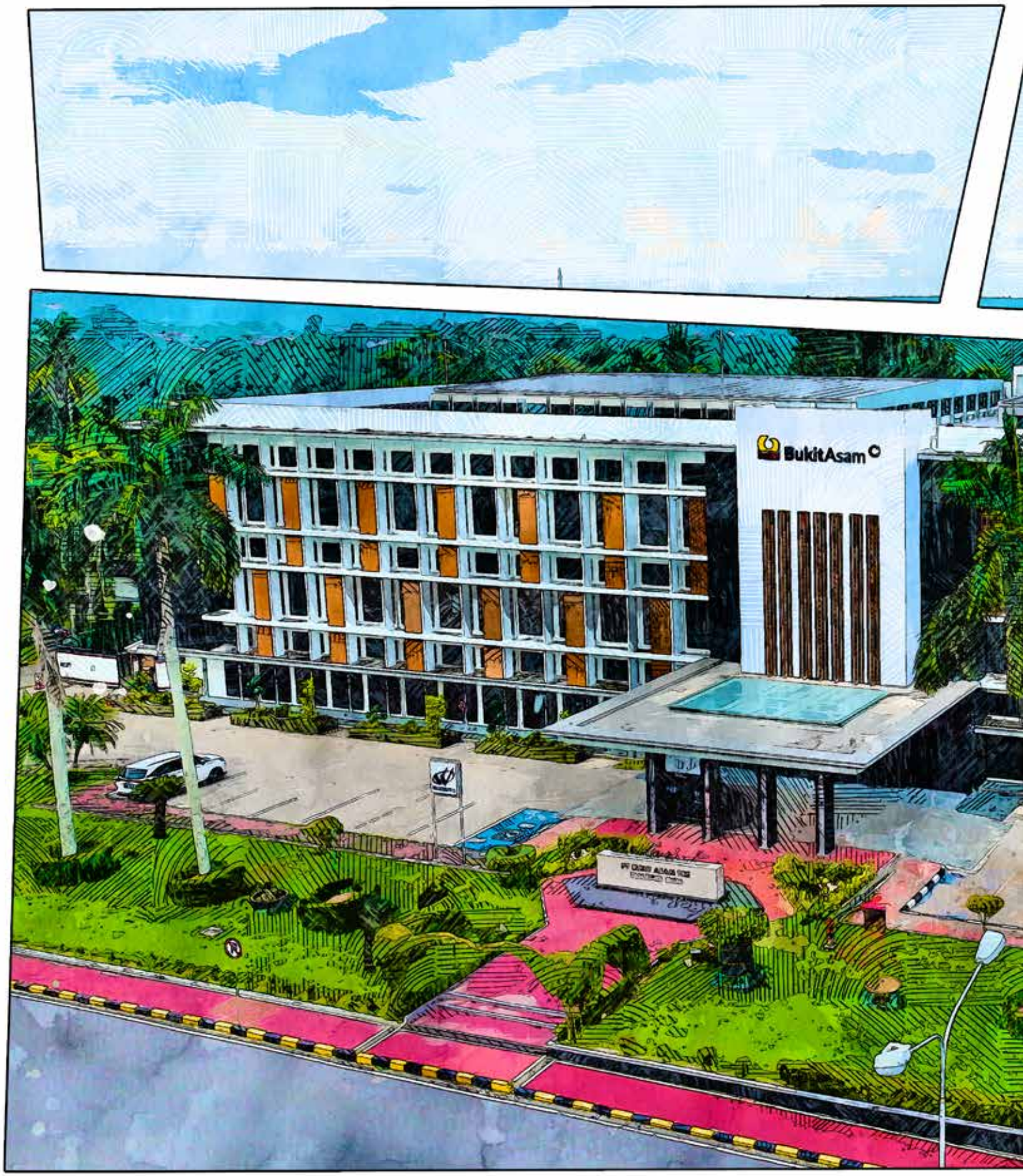
INDEKS ASEAN CORPORATE GOVERNACE SCORECARD (ACGS)

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD INDEX (ACGS)

Penerapan ACGS di PTBA disampaikan lebih detail pada situs web PTBA (https://www.ptba.co.id/tata-kelola).

The implementation ACGS in PTBA can be accessed on PTBA's website (https://www.ptba.co.id/tata-kelola).

BukitAsam





Laporan Keuangan Konsolidasian
Consolidated Financial Statement

Halaman Ini sengaja di kosongkan
This page is intentionally blank

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2024 DAN 2023/
31 DECEMBER 2024 AND 2023

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 DECEMBER 2024 AND 2023

PT BUKIT ASAM Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Atas nama Dewan Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Arsal Ismail
   Alamat kantor : Jalan Parigi No. 1 Tanjung Enim 31716
   Telepon : 0734-451098
   Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Suherman
   Alamat kantor : Jalan Parigi No. 1 Tanjung Enim 31716
   Telepon : 0734-451098
   Jabatan : Direktur Sumber Daya Manusia/ Plt. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bukit Asam Tbk dan entitas anaknya ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:

1. *Name* : *Arsal Ismail*
   Office address : *Jalan Parigi No. 1 Tanjung Enim 31716*
   Telephone : *0734-451098*
   Position : *President Director*
2. *Name* : *Suherman*
   Office address : *Jalan Parigi No. 1 Tanjung Enim 31716*
   Telephone : *0734-451098*
   Position : *Human Resources Director/ Acting Finance and Risk Management Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Bukit Asam Tbk and its subsidiaries (the "Group");*
2. *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information has been disclosed in a complete and truthful manner in the Group's consolidated financial statements;*
   b. *The Group's consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; and*
4. *We are responsible for the Group's internal control systems.*

This statement is confirmed to the best of our knowledge and belief.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi

For and on behalf of the Board of Directors



Arsal Ismail
Direktur Utama
President Director

Suherman
Direktur Sumber Daya Manusia/Plt. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Human Resources Director/Acting of Finance and Risk Management Director

JAKARTA
27 **Maret/*March* 2025**

PT BUKIT ASAM TBK
Kantor Pusat: Jl. Parigi No.1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan 31716, **T** (0734) 451 096, (0734) 452 352, **F** (0734) 451 095, (0734) 452 993
Kantor Jakarta: Menara Kadin Lt.15 Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-5 Kav.2-3, Jakarta 12950, **T** (021) 525 4014, **F** (021) 525 4002
Pelabuhan Tarahan: Jl. Soekarno Hatta Km. 15, Tarahan, Bandar Lampung 35242, **T** (0721) 31 545, (0721) 31 686, **F** (0721) 31 577
Dermaga Kertapati: Jl. Stasiun Kereta Api Palembang, Sumatera Selatan 30142, **T** (0711) 512 617, **F** (0711) 511 388
Pertambangan Ombilin: Jl. Manan Jatin No.1 Saringan Sawahlunto, Sumatera Barat 27421, **T** (0754) 61 021, **F** (0754) 61402

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number* : 00394/2.1030/AU.1/02/1154-1/1/III/2025

Laporan Auditor Independen/
Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Director

PT Bukit Asam Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bukit Asam Tbk dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Bukit Asam Tbk and its Subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2024, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Provisi Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup mencatat provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang sebesar Rp2,1 trilyun, dimana jumlah tersebut mencakup 11,11% dari total liabilitas Grup. Lihat catatan 2v (Informasi kebijakan akuntasi material - Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang), Catatan 4 (Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan - Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang) dan Catatan 19 (Provisi rekiamasi lingkungan dan penutupan tambang) atas laporan keuangan konsolidasian.

Grup memiliki kewajiban hukum dan konstruktif terkait dengan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang yang disebabkan oleh operasi penambangannya. Besarnya provisi tersebut ditentukan oleh estimasi dan berbagai asumsi utama, diantaranya:

- waktu kegiatan, estimasi biaya kegiatan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang di masa depan; dan
- tingkat diskonto dan tingkat inflasi.

Kami menganggap provisi tersebut menjadi hal audit utama karena saldo yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian, melibatkan penggunaan asumsi yang kompleks, dan pertimbangan tingkat tinggi untuk mengestimasi biaya yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban rekiamasi lingkungan dan penutupan tambang.

Prosedur audit kami meliputi sebagai berikut:

- Kami memeroleh pemahaman atas proses dan metodologi yang diadopsi oleh Grup untuk menghitung provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang;
- Kami memeriksa metodologi yang digunakan untuk menentukan asumsi terkait dengan waktu kegiatan dan estimasi biaya kegiatan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang di masa depan konsisten dengan rencana penutupan yang disusun oleh Grup dan disampaikan kepada Pemerintah Indonesia;

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Provision for Enviromental and Mine Closure

On December 31, 2024, the group recorded provision for enviromental and mine closure of Rp2,1 trillion, which represents 11.11% of the Group's total liabilities. Refer to Note 2v (Material accounting policy information - Provision for environmental reclamation and mine closure), Note 4 (Significant accounting judgements, estimates and assumptions - Provision for environmental reclamation and mine closure) and Note 19 (Provision for environmental reclamation and mine closure) to the consolidated financial statements.

The Group has legal and constructive obligations associated with environmental reclamation and mine closure obligations as a result of its mining operations. The provision was determined using estimation and various key assumptions, which included:

- *the timing of the activities, estimated costs of future environmental reclamation and mine closure activities; and*
- *the discount rate and inflation rate.*

We considered the provision as a key audit matter due to the significance of the balance to the consolidated financial statements, the involvement of complex assumptions and the high degree of judgement to estimate the costs required to satisfy environmental reclamation and mine closure obligations.

Our audit procedures include the following:

- *We understood the process and the methodology adopted by the Group to calculate the provision for environmental reclamation and mine closure;*
- *We checked that the methodology used to determine the assumptions related to timing of the activities and estimated costs of future environmental reclamation and mine closure activities were consistent with the closure plans prepared by the Group and submitted to the Indonesian Government;*

- Kami menguji akurasi perhitungan matematis atas provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang;
- Kami menilai kemampuan Grup untuk memperkirakan secara akurat dengan membandingkan asumsi biaya perkiraan historis dengan biaya aktual yang terjadi; dan
- Kami menilai tingkat diskonto dan tingkat inflasi yang digunakan dalam perhitungan provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang, termasuk membandingkan dengan informasi yang tersedia secara publik.

Hal Lain
Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya No. 00223/2.1025/AU.1/02/0243-2/1/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Informasi Lain
Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan tahun 2024 diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan tahun 2024, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

- *We tested the mathematical accuracy of calculation of the environmental reclamation and mine closure provision;*
- *We assessed the Group's ability to accurately forecast by comparing historical forecasted cost assumptions to actual costs incurred; and*
- *We assessed the discount rate and inflation rate adopted to calculate the provision for environmental reclamation and mine closure, including benchmarking to publicly available information.*

Other Matter
The consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2023 and for the year then ended were audited by other independent auditor whose report No. 00223/2.1025/AU.1/02/0243-2/1/II/2024 dated February 29, 2024, expressed an unmodified opinion on those consolidated financial statements.

Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The 2024 annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the 2024 annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations or Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tahun kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current year and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Dewi Novita Sari
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1154/
Public Accountant License Number: AP.1154

Jakarta, 27 Maret 2025/*March 27, 2025*

00394

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/1 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, except par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	5a	4,132,858	4,138,867	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha, neto	6	5,030,071	3,797,292	*Trade receivables, net*
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	7	425,767	875,330	*Financial assets at fair value through other comprehensive income*
Persediaan	8	4,869,337	5,499,614	*Inventories*
Deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun	5b	242,355	541,818	*Time deposits with maturities more than 3 months and less than 1 year*
Aset lancar lainnya	9a	533,126	295,435	*Other current assets*
JUMLAH ASET LANCAR		**15,233,514**	**15,148,356**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang usaha, neto	6	-	188,271	*Trade receivables, net*
Piutang lainnya dari pihak berelasi	31b	29,005	18,683	*Other receivables from related parties*
Investasi pada entitas asosiasi		71,655	-	*Investments in associates*
Investasi pada ventura bersama	10a	8,610,010	7,263,276	*Investments in joint ventures*
Properti penambangan	11	3,412,097	3,271,657	*Mining properties*
Aset tetap	12	8,735,714	8,566,210	*Fixed assets*
Tanaman produktif		65,063	72,820	*Bearer plants*
Pajak dibayar di muka:				*Prepaid taxes:*
- Pajak penghasilan badan	18a	89,786	25,370	*Corporate income tax -*
- Pajak lain-lain	18a	3,318,520	2,528,981	*Other taxes -*
Aset pajak tangguhan	18d	1,258,806	1,208,683	*Deferred tax assets*
Goodwill	13	102,077	102,077	*Goodwill*
Aset tidak lancar lainnya	9b	859,329	370,805	*Other non-current assets*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**26,552,062**	**23,616,833**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
JUMLAH ASET		**41,785,576**	**38,765,189**	***TOTAL ASSETS***

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/2 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, except par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	14	2,920,012	2,082,188	*Trade payables*
Biaya yang masih harus dibayar	15	4,770,233	4,857,830	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	16	665,730	852,007	*Short-term employee benefit liabilities*
Utang pajak:				*Taxes payable:*
- Pajak penghasilan badan	18b	198,365	295,176	*Corporate income tax -*
- Pajak lain-lain	18b	617,820	496,645	*Other taxes -*
Pinjaman bank	21	1,397,680	68,000	*Bank borrowings*
Bagian jangka pendek dari liabilitas jangka panjang:				*Current maturities of long-term liabilities:*
- Liabilitas sewa	22	485,093	490,017	*Lease liabilities -*
- Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	19	384,692	329,190	*Provision for environmental - reclamation and mine closure*
- Liabilitas imbalan pascakerja	20	238,754	228,521	*Post- employment - benefit liabilities*
Utang jangka pendek lainnya	17	296,441	268,527	*Other current liabilities*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		**11,974,820**	**9,968,101**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas sewa	22	368,260	743,665	*Lease liabilities*
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	19	1,741,891	1,787,690	*Provision for environmental reclamation and mine closure*
Liabilitas imbalan pascakerja	20	4,979,567	4,625,311	*Post-employment benefit liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan	18d	77,226	77,226	*Deferred tax liabilities*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		**7,166,944**	**7,233,892**	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS		**19,141,764**	**17,201,993**	***TOTAL LIABILITIES***

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/3 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, except par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				***Equity attributable to owners of the parent entity***
Modal saham				*Share capital*
Modal dasar - 5 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.995 lembar saham Seri B				*Authorised - 5 Series A Dwiwarna shares and 39,999,999,995 Series B shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 11.520.659.245 lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham	23	1,152,066	1,152,066	*Issued and fully paid - 5 Series A Dwiwarna shares and 11,520,659,245 Series B shares with a value of Rp100 per share*
Tambahan modal disetor	23	642,832	594,303	*Additional paid-in capital*
Saham treasuri	24	(12,521)	(43,257)	*Treasury shares*
Penghasilan komprehensif lain:				*Other comprehensive income:*
Cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		3,701	19,194	*Reserve for changes in financial assets at fair value through other comprehensive income*
Selisih penjabaran kurs laporan keuangan entitas anak dan ventura bersama		1,120,325	693,100	*Currency differences from translation of subsidiaries' and joint ventures' financial statements*
Saldo laba				*Retained earnings*
- Dicadangkan	26	13,730,400	13,730,400	*Appropriated -*
- Belum dicadangkan		5,868,485	5,288,732	*Unappropriated -*
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		**22,505,288**	**21,434,538**	***Total equity attributable to owners of the parent entity***
Kepentingan nonpengendali	10b	138,524	128,658	*Non-controlling interests*
JUMLAH EKUITAS		**22,643,812**	**21,563,196**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**41,785,576**	**38,765,189**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 2/1 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba per saham dasar dan dilusian)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, except for basic and diluted earnings per share)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Pendapatan	27	42,764,968	38,488,867	***Revenue***
Beban pokok pendapatan	28a	(34,562,758)	(29,331,562)	***Cost of revenue***
Laba bruto		**8,202,210**	**9,157,305**	***Gross profit***
Beban umum dan administrasi	28b	(2,078,188)	(1,936,635)	*General and administrative expenses*
Beban penjualan dan pemasaran	28c	(789,017)	(656,362)	*Selling and marketing expenses*
Penghasilan lainnya, neto	28d	317,413	638,401	*Other income, net*
Laba usaha		**5,652,418**	**7,202,709**	***Operating profit***
Penghasilan keuangan	29a	250,183	584,339	*Finance income*
Biaya keuangan	29b	(283,690)	(204,038)	*Finance costs*
Bagian atas laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama	10a	640,335	571,303	*Share in net profit of associates and joint ventures*
Laba sebelum pajak penghasilan		**6,259,246**	**8,154,313**	***Profit before income tax***
Beban pajak penghasilan	18c	(1,119,823)	(1,861,792)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan		**5,139,423**	**6,292,521**	***Profit for the year***

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 2/2 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba per saham dasar dan dilusian)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, except for basic and diluted earnings per share)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain tahun berjalan:				***Other comprehensive income (loss)/ for the year:***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja	20	71,059	(1,039,691)	*Remeasurement of post-employment benefit liabilities*
Beban pajak penghasilan terkait	18d	(15,633)	228,732	*Related income tax expenses*
		55,426	(810,959)	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will be reclassified to profit or loss:*
Selisih penjabaran kurs laporan keuangan entitas anak dan ventura bersama		427,225	(11,635)	*Currency differences from translations of subsidiaries' and joint ventures' financial statements*
Perubahan nilai wajar aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	7	(15,493)	13,790	*Changes in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income*
		467,158	**(808,804)**	
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		**5,606,581**	**5,483,717**	***Total comprehensive income for the year***
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Profit for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk		5,103,720	6,105,856	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	10b	35,703	186,665	*Non-controlling interests*
Laba tahun berjalan		**5,139,423**	**6,292,521**	***Profit for the year***
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Total other comprehensive income for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk		5,570,878	5,297,052	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	10b	35,703	186,665	*Non-controlling interests*
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan		**5,606,581**	**5,483,717**	***Total other comprehensive income for the year***
Laba per saham - dasar dan dilusian (nilai penuh)	32	**444**	**532**	***Earnings per share - basic and diluted (full amount)***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 3 *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ *Notes*	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Attributable to the owners of the parent entity*										
		Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Saham treasuri/ *Treasury shares*	Cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Reserve for changes in financial assets at fair value through other comprehensive income*	Selisih penjabaran kurs laporan keuangan entitas anak dan ventura bersama/ *Currency differences from translation of subsidiaries' and joint ventures' financial statements*	Saldo laba telah dicadangkan penggunaannya/ *Appropriated retained earnings*	Saldo laba belum dicadangkan penggunaannya/ *Unappropriated retained earnings*	Jumlah/ *Total*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023		**1,152,066**	**594,303**	**(43,257)**	**5,404**	**704,735**	**13,730,400**	**12,561,417**	**28,705,068**	**210,978**	**28,916,046**	***Balance as at 1 January 2023***
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	6,105,856	6,105,856	186,665	6,292,521	*Profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:												*Other comprehensive income:*
Perubahan dari aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	7	-	-	-	13,790	-	-	-	13,790	-	13,790	*Changes in financial asset at fair value through other comprehensive income*
Selisih penjabaran kurs laporan keuangan entitas anak dan ventura bersama		-	-	-	-	(11,635)	-	-	(11,635)	-	(11,635)	*Currency differences from translation of subsidiaries' and joint ventures' financial statements*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak	20, 18d	-	-	-	-	-	-	(810,959)	(810,959)	-	(810,959)	*Remeasurement of post-employment benefit liabilities, net of tax*
Dividen	10b, 25	-	-	-	-	-	-	(12,567,582)	(12,567,582)	(268,985)	(12,836,567)	*Dividends*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023		**1,152,066**	**594,303**	**(43,257)**	**19,194**	**693,100**	**13,730,400**	**5,288,732**	**21,434,538**	**128,658**	**21,563,196**	***Balance as at 31 Desember 2023***
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	5,103,720	5,103,720	35,703	5,139,423	*Profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:												*Other comprehensive income:*
Perubahan dari aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	7	-	-	-	(15,493)	-	-	-	(15,493)	-	(15,493)	*Changes in financial asset at fair value through other comprehensive income*
Selisih penjabaran kurs laporan keuangan entitas anak dan ventura bersama		-	-	-	-	427,225	-	-	427,225	-	427,225	*Currency differences from translation of subsidiaries' and joint ventures' financial statements*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak	20, 18d	-	-	-	-	-	-	55,426	55,426	-	55,426	*Remeasurement of post-employment benefit liabilities, net of tax*
Dividen	10b, 25	-	-	-	-	-	-	(4,579,393)	(4,579,393)	(25,837)	(4,605,230)	*Dividends*
Penjualan saham treasuri	23, 24	-	48,529	30,736	-	-	-	-	79,265	-	79,265	*Sales of treasury shares*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024		**1,152,066**	**642,832**	**(12,521)**	**3,701**	**1,120,325**	**13,730,400**	**5,868,485**	**22,505,288**	**138,524**	**22,643,812**	***Balance as at 31 Desember 2024***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 4 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED AS AT 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan		41,690,681	38,297,048	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan		(31,511,369)	(28,936,511)	*Cash paid to suppliers and employees*
Pembayaran royalti		(4,144,962)	(4,342,928)	*Payments of royalties*
Penerimaan pengembalian pajak		257,057	134,914	*Cash receipts from tax restitution*
Pembayaran pajak penghasilan		(1,389,802)	(2,521,878)	*Payments for income taxes*
Penerimaan bunga		321,874	590,051	*Receipt of interest income*
Pembayaran bunga		(174,289)	(115,989)	*Payment of interest*
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		**5,049,190**	**3,104,707**	***Net cash flows provided from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penambahan aset tetap dan tanaman produktif		(1,231,886)	(937,246)	*Addition of fixed assets and bearer plants*
Penempatan deposito berjangka		(242,355)	(1,747,459)	*Placement of time deposits*
Pencairan deposito berjangka		541,818	10,134,836	*Withdrawal of time deposits*
Penempatan dana reklamasi dan penutupan tambang		-	(72,311)	*Placement of reclamation and mine closure fund*
Penerimaan dari aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	7	441,250	-	*Cash receipts of financial assets at fair value through other comprehensive income*
Penempatan dari aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	7	-	(80,000)	*Placement of financial assets at fair value through other comprehensive income*
Penempatan pada investasi entitas asosiasi		(71,655)	-	*Placement of investment in associates*
Penerimaan dari pengembalian investasi pada entitas asosiasi		-	198,665	*Cash receipts from refund of investment in associates*
Penerimaan dividen dari entitas ventura bersama	10a	134,646	9,240	*Proceeds of dividends from join venture entities*
Pencairan jaminan reklamasi		(48,274)	-	*Withdrawal of cash guarantee*
Penambahan investasi pada ventura bersama	10a	(467,818)	(247,836)	*Addition of investments in joint ventures*
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas investasi		**(944,274)**	**7,257,889**	***Net cash flows (used in)/provided from investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran dividen kepada pemegang saham induk	25	(4,579,393)	(12,567,582)	*Payments of dividends to non to owners of the parent entity*
Pembayaran dividen kepada kepentingan nonpengendali	10b	(25,837)	(268,985)	*Payments of dividends to non controlling interests*
Penerimaan pinjaman bank		4,597,680	68,000	*Proceeds from bank borrowings*
Penerimaan dari penjualan saham treasuri	23	79,265	-	*Proceeds from sales of treasury shares*
Pembayaran pinjaman bank		(3,268,000)	(2,240)	*Proceeds from bank borrowings*
Penempatan jaminan pinjaman bank		(150,632)	-	*Placement guarantee of bank borrowings*
Pembayaran liabilitas sewa	36b	(792,511)	(473,351)	*Payment of lease liabilities*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		**(4,139,428)**	**(13,244,158)**	***Net cash flows used in financing activities***
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**(34,512)**	**(2,881,562)**	***NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	5	**4,138,867**	**7,030,343**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
EFEK PERUBAHAN KURS PADA KAS DAN SETARA KAS		**28,503**	**(9,914)**	***EFFECT OF CHANGES IN EXCHANGE RATE ON CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	5	**4,132,858**	**4,138,867**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***

Lihat Catatan 36a untuk informasi transaksi non-kas Grup.

Refer to Note 36a for the Group's non-cash information.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

PT Bukit Asam Tbk ("Perusahaan" atau "PTBA") didirikan pada tanggal 2 Maret 1981, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1980 dengan Akta Notaris Mohamad Ali No. 1, yang diubah dengan Akta Notaris No. 5 tanggal 6 Maret 1984 dan No. 51 tanggal 29 Mei 1985 dari notaris yang sama. Akta pendirian dan perubahan tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-7553-HT.01.04.TH.85 tanggal 28 November 1985 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 33, Tambahan No. 550, tanggal 25 April 1986. Pada tahun 2008, Anggaran Dasar Perusahaan disesuaikan terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("PT") dan nama Perusahaan dapat disingkat menjadi PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Perubahan tersebut diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Ketetapan No. AHU-50395.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 76, Tambahan No. 18255 tanggal 19 September 2008.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), meski berubah statusnya, anggota *Holding* tetap diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal-hal yang sifatnya strategis. Negara memiliki pengendalian terhadap anggota *Holding*, baik secara langsung melalui saham Seri A "Dwiwarna", maupun tidak langsung melalui PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (sebelumnya MIND ID).

Perubahan tersebut disahkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui akta inbreng tanggal 28 November 2017 sehingga PT Bukit Asam (Persero) Tbk berubah nama menjadi PT Bukit Asam Tbk.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan terkait dengan, diantaranya, pengaturan tentang saham, pemindahan hak atas saham, dewan komisaris dan direksi, tugas wewenang dan kewajiban direksi dan dewan komisaris, dan rapat umum pemegang saham. Perubahan tersebut sebagaimana dimaksud pada Akta No. 61 Tahun 2023 dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. yang diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.09-0138986 tanggal 12 Juli 2023.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ("RUPS") yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2023, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan Akta No. 62 Tahun 2023 dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. yang diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.09-0130619 tanggal 22 Juni 2023.

1. GENERAL

PT Bukit Asam Tbk (the "Company" or "PTBA") was established on 2 March 1981 under Government Regulation No. 42 of 1980, based on Notarial Deed No. 1 of Mohamad Ali, as amended by the Notarial Deeds No. 5 dated 6 March 1984 and No. 51 dated 29 May 1985 of the same notary. The deed of establishment and its amendments were approved by the Minister of Justice in Decree No. C2-7553-HT.01.04.TH.85 dated 28 November 1985 and published in Supplement No. 550 of the State Gazette No. 33 dated 25 April 1986. In 2008, the Company's Articles of Association were amended to comply with Law No. 40, 2007 on Limited Liability Companies ("PT") and to gain approval for the abbreviation of the Company's name as PT Bukit Asam (Persero) Tbk. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights in his Decree No. AHU-50395.AH.01.02 of 2008 dated 12 August 2008 and was published in Supplement No. 18255 of State Gazette No. 76 dated 19 September 2008.

In accordance with Government Regulation No. 72 of 2016 on State Capital Administration and Administration Procedures at State-Owned Enterprises ("BUMN"), even if the ownership status changes, the Holding members will still be treated the same as state-owned enterprises for strategic matters. The state has control over the holding members either directly through the Series A "Dwiwarna" shares or indirectly through the PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (formerly MIND ID).

Based on the amendment approved by the Minister of State-Owned Enterprises through the deed of inbreng dated 28 November 2017, PT Bukit Asam (Persero) Tbk changed its name to PT Bukit Asam Tbk.

The most recent amendment to the Company's Articles of Association related to share arrangements, the transfer rights of shares, the board of commissioners and directors, roles authorisation and duties of the directors and board of commissioners, and general meetings of shareholders. The amendment was stipulated in Deed No. 61 of 2023 before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. which was received by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-AH.01.09-0138986 dated 12 July 2023.

Based on the Company's General Meeting of Shareholders ("GMS") that was held on 15 June 2023, there is an amendment of the composition of the Board of Commissioners was stipulated in Deed No. 62 of 2023 before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. and received by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-AH.01.09-0130619 dated 22 June 2023.

1. UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 dan 46 Tahun 2022 serta Keputusan Menteri Keuangan No. 516/KMK.06/2022 Tahun 2022 dan Akta Penyertaan Saham dengan Pemasukan dalam Perseroan Terbatas PT Mineral Industri Indonesia (Persero) ("MII") yang sebelumnya disebut sebagai MIND ID No. 137 pada tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn maka terhitung sejak tanggal 21 Maret 2023, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) memiliki 7.490.437.495 lembar saham seri B atau 65,02%. Selanjutnya pada tanggal 6 April 2023, melanjutkan rangkaian transaksi tersebut, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) telah mengalihkan saham yang dimilikinya (saham treasuri yang dibeli pada tahun 2019) sebanyak 105.213.200 lembar saham seri B atau 0,91% kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) namun saham "Dwiwarna" tetap dimiliki oleh Pemerintah.

Perusahaan dan entitas anaknya (keseluruhan dirujuk sebagai "Grup") bergerak dalam bidang industri tambang batubara dan aktivitas terkait, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan perdagangan, pengelolaan fasilitas dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain dan memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan industri pertambangan batubara beserta hasil olahannya, bidang pengembangan perkebunan, dan bidang pelayanan kesehatan.

Perusahaan berdomisili di Indonesia, dengan kantor yang terdaftar di Jl. Parigi No. 1, Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

Pada bulan Desember 2002, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 346.500.000 saham yang terdiri dari 315.000.000 saham divestasi yang sebelumnya dimiliki oleh Pemerintah dan 31.500.000 saham baru dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham dan harga penawaran Rp575 (nilai penuh) per saham. Penawaran Umum Saham Perdana tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Desember 2002.

***1. GENERAL** (continued)*

Based on Government Regulations No. 45 and 46 of 2022 and Minister of Finance Decree No. 516/KMK.06/2022 Year 2022 and Deed of Participation of Shares with Entry into a Limited Liability Company PT Mineral Industri Indonesia (Persero) ("MII") which previously referred to as MIND ID No. 137 on 21 March 2023 before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, as of 21 March 2023, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) has 7,490,437,495 series B shares or 65.02%. Then on 6 April 2023, continuing the series of transactions, PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) transferred its shares (treasury shares purchased in 2019) of 105,213,200 series B shares or 0.91% to PT Mineral Industri Indonesia (Persero) but "Dwiwarna" shares are still owned by the Government .

The scope of activities of the Company and its subsidiaries (collectively referred to as "the Group") covers coal mining and related activities, including general surveying, exploration, exploitation, processing, transportation and trading, management of special coal port facilities for internal and external needs, the operation of steam power plants for internal and external needs and the provision of consulting services related to the coal mining industry as well as its derivative products, plantation development activities and healthcare activities.

The Company is incorporated and domiciled in Indonesia. The address of its registered office is Jl. Parigi No. 1, Tanjung Enim, South Sumatra.

In December 2002, the Company conducted an Initial Public Offering ("IPO") of 346,500,000 shares which consisted of 315,000,000 divestment shares previously owned by the Government as well as 31,500,000 new shares with a par value of Rp500 (full amount) per share and an offering price of Rp575 (full amount) per share. The shares offered in the IPO were listed on the Indonesian Stock Exchange on 23 December 2002.

1. UMUM (lanjutan)

Perusahaan juga menerbitkan 173.250.000 waran Seri I yang diberikan kepada pemegang saham (kecuali kepada Negara Republik Indonesia) dengan harga pelaksanaan waran sebesar Rp675 (nilai penuh). Pada tanggal 31 Desember 2005, seluruh waran telah dikonversi.

Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan *Vice President* Satuan Pengawasan Internal merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

The Company also issued 173,250,000 Series I warrants to the shareholders (except the Government of the Republic of Indonesia) at an exercise price of Rp675 (full amount). As at 31 December 2005, these warrants were fully exercised.

The Board of Commissioners, the Board of Directors, the Company's Corporate Secretary and the Vice President of the Internal Control Department are the key management personnel of the Company.

As at 31 December 2024 and 2023, the composition of the Company's Board of Commissioners and its Board of Directors were as follows:

Komisaris Utama	:	Irwandy Arif	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	Edmar Piterdono Hamzah	:	*Commissioners*
		Carlo Brix Tewu		
Komisaris Independen	:	Andi Pahril Pawi	:	*Independent Commissioner*
		Kurnia Toha		
		Rahmat Hidayat Pulungan		
Direktur Utama	:	Arsal Ismail	:	*President Director*
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Farida Thamrin	:	*Finance and Risk Management Director*
Direktur Operasi dan Produksi	:	Suhedi	:	*Operation and Production Director*
Direktur Pengembangan Usaha	:	Rafli Yandra	:	*Business Development Director*
Direktur Sumber Daya Manusia	:	Suherman	:	*Human Resources Director*

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee as at 31 December 2024 were as follows:

Ketua	:	Andi Pahril Pawi	:	*Chairman*
Wakil Ketua	:	Kurnia Toha	:	*Vice Chairman*
Anggota	:	Fadhila Achmadi Rosyid	:	*Members*
		Wakhid Kurniawan Saputra		

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee as at 31 December 2023 were as follows:

Ketua	:	Andi Pahril Pawi	:	*Chairman*
Wakil Ketua	:	Kurnia Toha	:	*Vice Chairman*
Anggota	:	Dodi Masykur	:	*Members*
		Fadhila Achmadi Rosyid		

Pada 31 Desember 2024, Perusahaan memiliki 1.683 karyawan tetap (31 Desember 2023: 1.561 karyawan tetap) (tidak diaudit).

As at 31 December 2024, the Company had 1,683 permanent employees (31 December 2023: 1,561 permanent employees) (unaudited).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Perusahaan memiliki kepemilikan langsung dan kepemilikan tidak langsung pada entitas anak berikut ini:

***1. GENERAL** (continued)*

The Company has direct and indirect ownership of the following subsidiaries:

	Kegiatan usaha/ *Business activity*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Tahun beroperasi secara komersial/ *Commencement of commercial operations*	Proporsi saham biasa yang dimiliki secara langsung oleh induk Perusahaan/ *Proportion of ordinary shares held by parent*		Proporsi saham biasa yang dimiliki secara langsung oleh Grup/ *Proportion of ordinary shares held by the Group*		Proporsi saham biasa yang dimiliki secara langsung oleh kepentingan nonpengendali/ *Proportion of ordinary shares held by non-controlling interests*		Total aset* (sebelum eliminasi konsolidasi)/ *Total assets* (before consolidation elimination)*	
				31 Des/ *Dec* 2024 %	31 Des/ *Dec* 2023 %	31 Des/ *Dec* 2024 %	31 Des/ *Dec* 2023 %	31 Des/ *Dec* 2024 %	31 Des/ *Dec* 2023 %	31 Des/*Dec* 2024	31 Des/*Dec* 2023
Entitas anak melalui kepemilikan langsung/ *Directly owned subsidiaries*											
PT Batubara Bukit Kendi ("BBK")[a)]	Penambangan batubara/ *Coal mining*	Tanjung Enim, Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	1997	99.39	99.39	99.39	99.39	0.61	0.61	55,010	54,320
PT Bukit Asam Prima ("BAP")	Perdagangan batubara/ *Coal trading*	Jakarta	2007	99.99	99.99	99.99	99.99	0.01	0.01	749,894	778,712
PT Internasional Prima Coal ("IPC")	Penambangan batubara/ *Coal mining*	Palaran, Kalimantan Timur/*East Kalimantan*	2010	51.00	51.00	51.00	51.00	49.00	49.00	698,178	693,981
PT Bukit Asam Metana Ombilin ("BAMO")	Penambangan gas metana batubara/ *Coal methane gas mining*	Jakarta	Belum beroperasi/ *Not yet operating*	99.99	99.99	99.99	99.99	0.01	0.01	34	34
PT Bukit Asam Metana Enim ("BAME")	Penambangan gas metana batubara/ *Coal methane gas Mining*	Jakarta	Belum beroperasi/ *Not yet operating*	99.99	99.99	99.99	99.99	0.01	0.01	73	73
PT Bukit Asam Banko ("BAB")	Pertambangan dan perdagangan/ *Coal mining and trading*	Tanjung Enim, Sumatera Selatan/*South Sumatra*	Belum beroperasi/ *Not yet operating*	99.99	99.99	99.99	99.99	0.01	0.01	313	313
PT Bukit Multi Investama ("BMI")	Melakukan investasi pada perusahaan lain/ *Investments in other companies*	Jakarta	2014	99.91	99.91	99.91	99.91	0.09	0.09	3,884,637	2,956,088
PT Bukit Energi Investama ("BEI")	Melakukan investasi pada perusahaan lain/ *Investments in other companies*	Jakarta	2015	99.60	99.60	99.60	99.60	0.40	0.40	254,991	242,442
Entitas anak melalui kepemilikan tak langsung/*Indirectly owned subsidiaries*											
PT Bumi Sawindo Permai ("BSP")	Perkebunan kelapa sawit dan hasil olahan kelapa sawit/ *Palm plantation and palm processing*	Tanjung Agung, Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	2007	-	-	99.99	99.99	0.01	0.01	812,893	450,927

*) total aset 31 Desember 2023 sudah diaudit dan 31 Desember 2024 tidak diaudit.

**) total assets 31 December 2023 audited and total assets 31 December 2024 unaudited.*

1. UMUM (lanjutan) / ***1. GENERAL** (continued)*

	Kegiatan usaha/ *Business activity*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Tahun beroperasi secara komersial/ *Commencement of commercial operations*	Proporsi saham biasa yang dimiliki secara langsung oleh induk Perusahaan/ *Proportion of ordinary shares held by parent*		Proporsi saham biasa yang dimiliki secara langsung oleh Grup/ *Proportion of ordinary shares held by the Group*		Proporsi saham biasa yang dimiliki secara langsung oleh kepentingan nonpengendali/ *Proportion of ordinary shares held by non-controlling interests*		Total aset* (sebelum eliminasi konsolidasi)/ *Total assets* (before consolidation elimination)*	
				31 Des/ *Dec* 2024 %	31 Des/ *Dec* 2023 %	31 Des/ *Dec* 2024 %	31 Des/ *Dec* 2023 %	31 Des/ *Dec* 2024 %	31 Des/ *Dec* 2023 %	31 Des/*Dec* 2024	31 Des/*Dec* 2023
Entitas anak melalui kepemilikan tak langsung (lanjutan)/ ***Indirectly owned subsidiaries** (continued)*											
PT Bukit Prima Bahari ("BPB")	Pelayaran/ *Sea voyages*	Jakarta	2014	-	-	99.99	99.99	0.01	0.01	461,094	386,888
PT Pelabuhan Bukit Prima ("PBP")	Jasa pelabuhan/ *Port service*	Jakarta	2014	-	-	99.99	99.99	0.01	0.01	143,696	148,891
PT Bukit Asam Medika ("BAM")	Rumah sakit, klinik, poliklinik, poliklinik Spesialis, dan balai pengobatan/ *Hospital, clinic, polyclinic, specialist polyclinic, and medical services*	Tanjung Enim, Sumatera Selatan/*South Sumatra*	2014	-	-	97.50	97.50	2.50	2.50	107,029	67,533
PT Satria Bahana Sarana ("SBS")	Jasa penambangan dan sewa/*Mining service and rental*	Tanjung Enim, Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	2014	-	-	95.00	95.00	5.00	5.00	2,025,547	1,838,306
PT Bukit Energi Servis Terpadu ("BEST")	Perdagangan, jasa, perbengkelan, pembangunan, perindustrian, dan pengangkutan/ *Trading, service, workshop, construction, industry, and transportation*	Jakarta	2015	-	-	99.62	99.62	0.38	0.38	173,853	158,012
PT Penajam Internasional Terminal ("PIT")	Jasa pelabuhan/ *Port services*	Jakarta	2016	-	-	72.00	72.00	28.00	28.00	37,575	25,190
PT Bukit Multi Properti ("BMP")	Real estat dan konstruksi/ *Real estate and Construction*	Jakarta	2019	-	-	99.90	99.90	0.10	0.10	47,389	20,538

*) total aset 31 Desember 2023 sudah diaudit dan 31 Desember 2024 tidak diaudit.

**) total assets 31 December 2023 audited and total assets 31 December 2024 unaudited.*

Catatan:

a) Operasi penambangan dihentikan sementara.

Notes:

a) Mining operations have been temporarily suspended.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. VIII.G.7 mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan konsep harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang diakui berdasarkan nilai wajar, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank, dan deposito dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain. Lihat Catatan 2e untuk informasi mata uang fungsional.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi dan asumsi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks, atau area di mana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 4.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

Presented below are the material accounting policies adopted for the preparation of the consolidated financial statements of the Group. These policies have been consistently applied to all of the years presented, unless otherwise stated.

a. Basis of the preparation of the consolidated financial statements

The Group's consolidated financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards and with the Regulations of the Financial Services Authority ("OJK") No. VIII.G.7 concerning Guidance on Financial Statements Presentation.

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and the historical cost convention, except for financial assets at fair value through other comprehensive income which is recognised at fair value and using the accrual basis except for the consolidated statements of cash flows.

The consolidated statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the consolidated statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with a maturity of three months or less.

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah ("Rp"), unless otherwise specified. Refer to Note 2e for information on the functional currency.

The preparation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 4.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK")

Mulai 1 Januari 2024, penomoran terhadap masing-masing PSAK dan ISAK diubah sebagaimana diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Penerapan amendemen standar yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, yang relevan dengan operasi Grup, namun tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki efek yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas jangka pendek atau liabilitas jangka panjang;
- Amendemen PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitias jangka panjang dengan kovenan;
- Amendemen PSAK 116, "Sewa" tentang transaksi sewa jual dan sewa balik; dan
- Amendemen PSAK 207, "Laporan Arus Kas" dan PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang pengaturan pembiayaan pemasok.

Amendemen atas standar akuntansi tertentu yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan Amendemen pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS")

Starting from 1 January 2024, the numbering of each SFAS and IFAS has been changed as issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI").

The adoption of the amended standards that are effective beginning 1 January 2024 which are relevant to the Group's operation, but did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years are as follows:

- *The amendments to SFAS 201, "Presentation of Financial Statements" regarding classifcation of liabilities as current or non-current;*
- *The amendments to SFAS 201, "Presentation of Financial Statements" regarding noncurrent liabilities with covenants;*
- *The amendments to SFAS 116, "Leases" regarding leases on sale and leaseback transactions; and*
- *The amendments SFAS 207, "Statement of Cash Flows" and SFAS 107, "Financial Instrument: Disclosure" regarding supplier finance arrangements.*

Certain amendments to accounting standard that are effective for periods beginning on or after 1 January 2025, with early adoption permitted, are as follows:

- *The amendments to SFAS 221, 'The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates,' regarding the lack of exchangeability.*

As at the issuance date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards and amendments on the Group's consolidated financial statements.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi

Entitas anak merupakan semua entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), di mana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

c. Principles of consolidation

Subsidiaries include all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to the Group and are de-consolidated from the date on which that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities of the group are eliminated in full.

The Group attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the noncontrolling interests having a deficit balance. The Group presents noncontrolling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:
a. Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
b. Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
c. Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
d. Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
e. Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan
f. Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (i.e. transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to the owners of the parent.

If the Group loses control, the Group:
a. Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;
b. Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);
c. *Recognizes the fair value of the consideration received (if any), from the transaction, event or circumstances that resulted the loss of control;*
d. Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;
e. Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other FAS's, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary; and
f. Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Entitas asosiasi dan ventura bersama

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan). Ventura bersama merupakan pengaturan bersama antara beberapa pihak yang melakukan kesepakatan pengendalian bersama yang memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi atau ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi atau ventura bersama dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi atau ventura bersama akan disesuaikan apabila diperlukan agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

d. Associates and joint ventures

Associates are entities which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies (significant influence). A joint venture is a joint arrangement under which the parties which share joint control have the rights to the net assets of the arrangement. Investments in associate and joint ventures are accounted for using the equity method less impairment losses, if any.

In applying the equity method of accounting, the Group's share of its associate's or joint venture's post-acquisition profit or loss is recognised in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognised in other comprehensive income.

These post-acquisition movements and distributions received from an associate or joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

When the Group's share of the losses of an associate or a joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has obligations to make payments or has made payments on behalf of the associate or joint venture.

Unrealised gains on transactions between the Group and its associates or joint venture are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate or joint venture. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the associate or joint venture will be changed where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika bukti tersebut ada, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dihentikan pengakuannya apabila Grup tidak lagi memiliki pengaruh signifikan. Grup mengukur investasi yang tersisa sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian pada investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama di mana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi dan hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

e. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

d. Associates and joint ventures *(continued)*

At each reporting date, the Group determines whether there is objective evidence that the investment in an associate or joint venture are impaired. If any such evidence exists, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate or joint venture and its carrying value and recognises the amount in profit or loss.

An investment in an associate or joint venture are derecognised when the Group loses significant influence and any retained equity interest in the entity is remeasured at its fair value. The difference between the carrying amount of the retained interest at the date on which significant influence is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

Gains and losses arising from partial the disposal of an investment in an associate and a joint venture in which significant influence is retained are recognised in profit or loss, and only a proportionate share of the amount previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

e. Foreign currency transactions

i. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Rupiah which is the Company's functional currency and the Group's presentation currency.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun diakui dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan berdasarkan *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* ("JISDOR") dan kurs transaksi yang diterbitkan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***e. Foreign currency transactions** (continued)*

ii. Transaction and balance

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the dates of the transactions. As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are adjusted to reflect the prevailing exchange rates on such dates. Foreign exchange gains and losses arising from the settlement of such transactions in foreign currencies, and from the translation at the end of year's exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

The exchange rates used are based on the Jakarta Interbank Spot Dollar Rate ("JISDOR"). The transaction rates published by Bank Indonesia were as follows:

	2024	2023	
1 Dolar Amerika Serikat ("AS$")	16,157	15,439	*United States Dollars ("US$")*
1 Dolar Australia ("AU$")	10,082	10,565	*Australian Dollars ("AU$")*
1 Dolar Singapura ("SG$")	11,919	11,712	*Singapore Dollars ("SG$")*
1 Euro ("€")	16,851	17,139	*Euro ("€")*

iii. Entitas dalam Grup

Hasil usaha operasi dan posisi keuangan dari seluruh entitas anak Grup yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang penyajian Perusahaan, ditranslasikan dalam mata uang penyajian Perusahaan sebagai berikut:

(a) Aset dan liabilitas yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dijabarkan pada kurs penutup tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian tersebut;
(b) Penghasilan dan beban untuk setiap laba rugi dijabarkan menggunakan kurs rata-rata (kecuali jika rata-rata tersebut bukan perkiraan wajar efek kumulatif dari kurs yang berlaku pada tanggal transaksi, maka penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs tanggal transaksi); dan
(c) Seluruh selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

iii. Entities within the Group

The results of the operations and the financial position of all the Group's subsidiaries that have a functional currency different from the Company's presentation currency are translated into the Company's presentation currency as follows:

(a) The assets and liabilities presented in the consolidated statement of financial position are translated at the closing rate on the date of the consolidated statement of financial position;
(b) The income and expenses for each profit or loss are translated at the average exchange rates of the period (unless the average does not provide a reasonable approximation of the cumulative effect of the rates prevailing on the transaction dates, in which case the income and expenses are translated at the rates prevailing on the dates of the transactions); and
(c) All of the resulting exchange differences are recognised in other comprehensive income.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

iii. Entitas dalam Grup (lanjutan)

Perubahan nilai wajar efek moneter yang didenominasikan dalam mata uang asing yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dianalisis antara selisih pejabaran yang timbul dari perubahan biaya perolehan diamortisasi efek dan perubahan nilai tercatat efek lainnya. Selisih penjabaran terkait dengan perubahan biaya perolehan diamortisasi diakui di dalam laba rugi, dan perubahan nilai tercatat lainnya diakui pada laba komprehensif lainnya.

f. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

g. Piutang

Piutang usaha adalah jumlah piutang pelanggan atas penjualan barang atau jasa yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha biasa. Piutang lainnya adalah jumlah piutang pihak ketiga atau pihak berelasi diluar kegiatan usaha biasa. Jika penagihan diperkirakan diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang, piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang lainnya pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***e. Foreign currency transactions** (continued)*

***iii. Entities within the Group** (continued)*

Changes in the fair values of monetary securities denominated in foreign currency classified as financial assets at fair value through other comprehensive income are analysed between based on the translation differences arising from changes in the amortised cost of the security and other changes in the carrying amounts of the securities. Translation differences related to changes in amortised cost are recognised in profit or loss, and other changes in carrying amount are recognised in other comprehensive income.

f. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with original maturity periods of three months or less at original that are not used as collateral or restricted.

g. Receivables

Trade receivables are amounts due from customers for goods sold or services performed in the ordinary course of business. Other receivables are amounts due from third or related parties for transactions outside the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade and others receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any allowance for impairment.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Piutang (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai piutang disajikan sebagai bagian kerugian penurunan nilai bersih dalam laba usaha. Jumlah yang selanjutnya dapat dipulihkan kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap item baris yang sama.

Lihat Catatan 2p untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penentuan jumlah cadangan kerugian piutang Grup.

Piutang non-usaha dari pihak berelasi pada awalnya disajikan sebagai aset tidak lancar kecuali jika ada alasan tertentu untuk disajikan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

h. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Grup telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi tertentu, sesuai dengan PSAK 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Berdasarkan Peraturan OJK No. VIII.G.7, entitas berelasi dengan Pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

i. Persediaan

Persediaan batubara dan produksi perkebunan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dengan nilai realisasi neto. Harga perolehan ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang atas biaya yang terjadi selama tahun berjalan dan terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, serta alokasi biaya *overhead* berdasarkan kapasitas operasi normal yang berkaitan dengan aktivitas penambangan dan perkebunan. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***g. Receivables** (continued)*

Impairment losses on receivables are presented as part of the net impairment losses within operating profit. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the same line item.

See Note 2p for further information regarding the policy on the determination of the amount for the loss allowance on the Group's receivables.

Non-trade receivables from related parties are initially presented as non-current assets unless there are specific reasons for them to be presented as current assets in the consolidated statement of financial position.

h. Transactions with related parties

The Group has entered into transactions with certain related parties, as defined in SFAS 224, "Related Party Disclosures".

Based on OJK Regulation No. VIII.G.7, Government-related entities include any entity that is controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the Government.

i. Inventories

Coal and plantation inventories are valued at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined based on the weighted average cost incurred during the year and comprises materials, labour and overheads based on normal operating capacity related to mining and plantation activities. The net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Persediaan (lanjutan)

Perlengkapan dan suku cadang diakui pada harga perolehan, ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang, setelah dikurangi penyisihan untuk persediaan usang dan bergerak lambat.

Penyisihan untuk perlengkapan dan suku cadang yang usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang. Bahan pendukung kegiatan pemeliharaan dicatat sebagai beban produksi pada tahun yang digunakan.

j. Aset eksplorasi dan evaluasi

Aktivitas eksplorasi dan evaluasi meliputi mencari sumber daya mineral setelah Grup memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu wilayah tertentu, menentukan kelayakan teknis dan menilai komersial atas sumber daya mineral spesifik.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi termasuk biaya yang berhubungan langsung dengan:

- perolehan hak untuk eksplorasi;
- kajian topografi, geologi, geokimia, dan geofisika;
- pengeboran eksplorasi;
- pemaritan dan pengambilan contoh; dan
- aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral.

Biaya eksplorasi dan evaluasi yang berhubungan dengan suatu *area of interest* dibebankan pada saat terjadinya kecuali biaya tersebut dikapitalisasi dan ditangguhkan, berdasarkan *area of interest*, apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini:

(i) terdapat hak untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi suatu area dan biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi di *area of interest* tersebut atau melalui penjualan atas *area of interest* tersebut; atau

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***i. Inventories** (continued)*

Materials and spare parts are valued at cost, determined on a weighted average method, less the provision for obsolete and slow-moving inventory.

The provision for obsolete and slow-moving materials and spare parts is determined on the basis of the estimated future usage of individual inventory items. Supplies and materials are charged to production costs in the year in which they are used.

j. Exploration and evaluation assets

Exploration and evaluation activity involves searching for mineral resources after the Group has obtained the legal right to explore a specific area, determining the technical feasibility and assessing the commercial viability of an identified resource.

Exploration and evaluation expenditure includes costs that are directly attributable to the following:

- *acquisition of rights to explore;*
- *topographical, geological, geochemical and geophysical studies;*
- *exploratory drilling;*
- *trenching and sampling; and*
- *activities involved in evaluating the technical feasibility and commercial viability of extracting mineral resources.*

Exploration and evaluation expenditure related to an area of interest is written off as incurred, unless it is capitalised and carried forward, on an area of interest basis, provided that one of the following conditions is met:

(i) the tenure rights of an area are current and it is considered probable that the costs will be recouped through the successful development and exploitation of the area of interest or, alternatively, through its sale; or

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Aset eksplorasi dan evaluasi (lanjutan)

Biaya eksplorasi dan evaluasi yang berhubungan dengan suatu *area of interest* dibebankan pada saat terjadinya kecuali biaya tersebut dikapitalisasi dan ditangguhkan, berdasarkan *area of interest*, apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini: (lanjutan)

(ii) kegiatan eksplorasi dalam *area of interest* tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan dalam atau berhubungan dengan *area of interest* tersebut masih berlanjut.

Biaya yang dikapitalisasi mencakup biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* yang relevan, tidak termasuk aset berwujud yang dicatat sebagai aset tetap. Biaya umum dan administrasi dialokasikan sebagai aset eksplorasi atau evaluasi hanya jika biaya tersebut berkaitan langsung dengan menemukan sumber daya mineral pada *area of interest* yang relevan.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang dikapitalisasi dihapusbukukan ketika kondisi di atas tidak lagi terpenuhi.

Oleh karena aset eksplorasi dan evaluasi tidak tersedia untuk digunakan, maka aset tersebut tidak disusutkan.

Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya ketika fakta dan kondisi mengindikasikan adanya penurunan nilai. Aset eksplorasi dan evaluasi juga diuji penurunan nilainya ketika terjadi penemuan cadangan komersial, sebelum aset tersebut ditransfer ke "properti penambangan - tambang dalam pengembangan".

Pengeluaran yang terjadi sebelum entitas memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu area spesifik dibiayakan pada saat terjadinya.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***j. Exploration and evaluation assets** (continued)*

Exploration and evaluation expenditure related to an area of interest is written off as incurred, unless it is capitalised and carried forward, on an area of interest basis, provided that one of the following conditions is met: (continued)

(ii) exploration activities in the area of interest have not yet reached a stage which permits a reasonable assessment of the existence or otherwise of economically recoverable reserves and active and significant operations in or in relation to the area of interest are ongoing.

Capitalised costs include costs directly related to exploration and evaluation activities in the relevant area of interest, and exclude physical assets which are recorded in fixed assets. General and administrative costs are allocated to exploration or evaluation assets only to the extent that those costs can be related directly to finding mineral resources in the relevant area of interest.

Capitalised exploration and evaluation expenditure is written off when the above conditions are no longer satisfied.

As the exploration and evaluation assets are not available for use, they are not depreciated.

Exploration and evaluation assets are assessed for impairment if facts and circumstances indicate that impairment may exist. Exploration and evaluation assets are also tested for impairment once commercial reserves are found, before the assets are transferred to "mining properties - mines under development".

Expenditure incurred before the entity has obtained the legal right to explore a specific area is expensed as incurred.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Properti penambangan

Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh atau atas nama Grup diakumulasikan secara terpisah untuk setiap *area of interest* pada saat cadangan terpulihkan yang secara ekonomis dapat diidentifikasi. Biaya tersebut termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada konstruksi tambang dan infrastruktur terkait, tidak termasuk biaya aset berwujud dan hak atas tanah yang dicatat sebagai aset tetap.

Saldo properti penambangan diamortisasi selama umur properti menggunakan metode unit produksi sejak tanggal dimulainya operasi komersial. Amortisasi tersebut menggunakan basis estimasi cadangan. Perubahan dalam estimasi cadangan dilakukan secara prospektif, dimulai dari awal tahun terjadinya perubahan.

Ketika keputusan pengembangan telah diambil, jumlah tercatat aset eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* tertentu dipindahkan sebagai "tambang dalam pengembangan" pada akun properti penambangan dan digabung dengan pengeluaran biaya pengembangan selanjutnya.

"Tambang dalam pengembangan" direklasifikasi ke "tambang yang berproduksi" pada akun properti penambangan pada akhir tahap komisioning, ketika tambang tersebut mampu beroperasi sesuai dengan rencana manajemen.

"Tambang dalam pengembangan" tidak diamortisasi sampai direklasifikasi menjadi "tambang yang berproduksi".

Ketika timbul biaya pengembangan lebih lanjut atas properti penambangan setelah dimulainya produksi, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai bagian dari "tambang yang berproduksi" apabila terdapat kemungkinan besar tambahan manfaat ekonomi masa depan sehubungan dengan biaya tersebut akan mengalir ke Grup. Apabila tidak, biaya tersebut dibebankan sebagai biaya produksi.

"Tambang yang berproduksi" (termasuk biaya eksplorasi, evaluasi dan pengembangan, serta pembayaran untuk memperoleh hak penambangan dan sewa) diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi, dengan perhitungan terpisah yang dibuat untuk setiap *area of interest*. "Tambang yang berproduksi" dideplesi menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti dan cadangan terduga.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

k. Mining properties

Development expenditure incurred by or on behalf of the Group is accumulated separately for each area of interest in which economically recoverable resources have been identified. Such expenditure comprises costs directly attributable to the construction of a mine and the related infrastructure and excludes physical assets and land rights which are recorded as fixed assets.

The balance of mining properties is amortised over the life of the property using the units of production method from the date of the commencement of commercial operations. The amortisation is based on estimated reserves. Changes in estimated reserves are accounted for on a prospective basis from the beginning of the year in which the change occurs.

Once a development decision has been taken, the carrying amount of the exploration and evaluation assets in respect of the area of interest is transferred to "mines under development" within mining properties and aggregated with the subsequent development expenditure.

"Mines under development" are reclassified as "mines in production" within mining properties at the end of the commissioning phase, when the mine is capable of operating in the manner intended by management.

No amortisation is recognised for "mines under development" until they are reclassified to "mines in production".

When further development expenditure is incurred on a mining property after the commencement of production, the expenditure is carried forward as part of "mines in production" when it is probable that additional future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Group. Otherwise, such expenditure is classified as a cost of production.

"Mines in production" (including reclassified exploration, evaluation and development expenditure, and payments to acquire mineral rights and leases) are amortised using the units of production method, with separate calculations being made for each area of interest. "Mines in production" will be depleted using the units of production method on the basis of proven and probable reserves.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Properti penambangan (lanjutan)

Properti penambangan teridentifikasi yang diperoleh melalui suatu kombinasi bisnis pada awalnya diakui sebagai aset sebesar nilai wajarnya. Pengeluaran pengembangan yang terjadi setelah akuisisi properti penambangan dicatat berdasarkan kebijakan akuntansi yang dijelaskan di atas.

"Tambang dalam pengembangan" dan "tambang yang berproduksi" diuji penurunan nilainya dengan mengacu pada kebijakan akuntansi pada Catatan 2n.

l. Aset tetap

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 116, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK 216, "Aset Tetap" yaitu hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diperlukan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Aset tetap, kecuali hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya historis termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada saat akuisisi aset. Apabila terdapat kewajiban untuk membongkar dan memindahkan aset tetap maka beban yang terkait akan ditambahkan ke biaya perolehan aset tetap yang bersangkutan dan kewajiban atas biaya terkait tersebut diakui.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***k. Mining properties** (continued)*

Identifiable mining properties acquired in a business combination are initially recognised as assets at their fair value. Development expenses incurred subsequent to the acquisition of the mining properties are accounted for in accordance with the accounting policy outlined above.

"Mines under development" and "mines in production" are tested for impairment in accordance with the policy described in Note 2n.

l. Fixed assets

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS 116, "Leases". If the land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS 216, "Property, Plant and Equipment" under which land rights are recognised at cost and not depreciated.

Fixed assets are initially recognized as the cost of acquisition which includes their acquisition price and any costs attributable directly to bring the asset to the necessary condition and location in order for the asset to be ready for use as per management's intentions.

Fixed assets, except land rights, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items. In the case of mandatory dismantling and asset removals the related costs are added to the cost of the relevant assets and provisions are recognised to cover the costs.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap disusutkan berdasarkan metode garis lurus hingga mencapai nilai sisa, selama periode yang lebih rendah antara estimasi masa manfaat aset, umur tambang, atau masa Izin Usaha Pertambangan ("IUP"), yang dinyatakan sebagai berikut:

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***I. Fixed assets** (continued)*

Fixed assets are depreciated using the straight-line method to their estimated residual value over the lesser of the estimated useful lives of the assets, the life of the mine or the term of the mining licence ("IUP") as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	5 - 20	*Buildings*
Mesin, peralatan dan kendaraan	4 - 20	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	3 - 4	*Office and hospital equipments*

Biaya-biaya yang terjadi setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan dalam laba rugi dalam tahun keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the assets' carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. Repairs and maintenance expenses are charged to profit or loss during the financial year in which they are incurred.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan, mesin, peralatan dan kendaraan dikapitalisasi sebagai "aset dalam penyelesaian". Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

The accumulated costs of the construction of buildings, machinery, equipment and vehicles are capitalised as "construction in progress". These costs are reclassified to the fixed asset accounts when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

Masa manfaat, nilai sisa, dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, jika diperlukan, setidaknya disesuaikan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

The useful lives, residual values and depreciation methods of fixed assets are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each financial period. The effects of any revisions are recognised in profit or loss, when the changes arise.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan (Catatan 2n).

An assets' carrying value is written down immediately to its recoverable amount if the assets' carrying value is greater than its estimated recoverable amount (Note 2n).

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai selisih antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is credited or charged to current operations in the year the asset is derecognized.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. *Goodwill*

Goodwill timbul dari akuisisi entitas anak dan merupakan selisih imbalan yang ditransfer terhadap kepemilikan dalam nilai wajar neto atas aset, liabilitas, dan liabilitas kontinjensi teridentifikasi dan nilai wajar kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi.

Untuk pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dialokasikan pada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK"), atau kelompok UPK, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi *goodwill* menunjukkan tingkat terendah dalam entitas yang *goodwill*-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal. *Goodwill* dipantau pada level segmen operasi.

n. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas, misalnya *goodwill* atau aset takberwujud yang belum siap digunakan, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Aset yang memiliki umur manfaat terbatas, diamortisasi atau didepresiasi, dan diuji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahaan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset.

Dalam menentukan penurunan nilai, aset pada tingkat yang paling rendah di mana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

m. Goodwill

Goodwill arises from the acquisition of subsidiaries and represents the excess of the consideration transferred over the interest in the net fair value of the net identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the acquiree and the fair value of the non-controlling interest in the acquiree.

For the purposes of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is allocated to each Cash-Generating Unit ("CGU"), or group of CGUs, that is expected to benefit from the synergies of the combination. Each CGU or group of CGUs to which the goodwill is allocated represents the lowest level within the entity at which goodwill is monitored for internal management purposes. Goodwill is monitored at the operating segment level.

n. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life, for example, goodwill or intangible assets not ready to use, are not subject to amortisation but tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. Assets that have a definite useful life are subject to amortisation or depreciation and are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised at the amount by which the assets' carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an assets' fair value less costs of disposal and its value in use.

For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash inflows. Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Pembalikan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

o. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

p. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari suatu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lainnya.

Aset keuangan

(1) Klasifikasi
Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:
- instrumen keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- instrumen keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***n. Impairment of non-financial assets** (continued)*

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill is recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the assets' recoverable amount since the last impairment testing was carried out. The reversal of impairment losses will be recognised immediately in profit or loss. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised at the date on which the impairment was reversed. Impairment losses relating to goodwill are not reversed.

o. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

p. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instruments of another entity.

Financial assets

(1) Classification
The Group classifies its financial assets in the following measurement categories:
- *financial instruments measured at amortised cost; and*
- *financial instruments at fair value through other comprehensive income.*

The classification depens on the entity's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(1) Klasifikasi (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, dan piutang lain-lain. Aset keuangan yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain meliputi investasi pada instrumen utang (Catatan 7).

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah grup telah melakukan pemilihan tak terbatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

(2) Pengukuran

Instrumen keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

p. Financial Instruments *(continued)*

Financial assets *(continued)*

(1) Classification (continued)

As at 31 December 2024 and 2023, the Group had financial assets classified as amortised cost and financial instruments at fair value through other comprehensive income. Financial assets classified as amortised cost consist of cash and cash equivalents, trade receivables, and other receivables. Financial instruments at fair value through other comprehensive income represents investment in debt securites (Note 7).

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

(2) Measurement

Financial instruments measured at amortised cost

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(2) Pengukuran (lanjutan)

Instrumen keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual yang hanya berupa pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau diturunkan nilainya.

Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Instrumen keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

p. Financial instruments *(continued)*

Financial assets *(continued)*

(2) Measurement (continued)

Financial instruments measured at amortised cost (continued)

Debt instrument to be measured at amortised cost are the assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired.

Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.

Financial instruments at fair value through other comprehensive income

The financial assets are measured at fair value, where the gain or losses is recognized initially in other comprehensive income, except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(3) Penghentian pengakuan

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak kontraktual arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir; atau (2) Grup telah mengalihkan hak kontraktual mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima.

(4) Penurunan nilai aset keuangan

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup berdasarkan basis *forward-looking* terutama untuk saldo piutang usaha dan kontrak aset tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Liabilitas keuangan

(1) Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, yang terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, akrual, pinjaman jangka pendek, dan pinjaman bank. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas tidak lancar jika sisa jangka waktunya lebih dari 12 bulan, dan sebagai liabilitas jangka pendek jika sisa jatuh temponya kurang dari 12 bulan. Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

p. Financial instruments *(continued)*

Financial assets *(continued)*

(3) Derecognition

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets) is derecognised when: (1) the contractual rights to the cash flows from the financial assets expire; or (2) the Group has transferred its contractual rights to receive the cash flows of the financial assets or retained the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset, but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients.

(4) Impairment of financial assets

The Group applies the "simplified approach" to measure the Expected Credit Loss ("ECL") which uses a lifetime expected loss allowance on a forwardlooking basis mainly for trade receivables and contract assets without significant financing component.

Financial liabilities

(1) Classification

The Group classifies its financial liabilities in financial liabilities measured at amortised cost.

As at 31 December 2024 and 2023, the Group only had financial liabilities measured at amortised cost, which consist of trade payables, other payables, accruals, short-term borrowings, and bank loans. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months. All financial liabilities are initially recognised at fair value.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

(2) Pengukuran

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi berbasis suku bunga efektif dicatat sebagai bagian dari biaya keuangan dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya dan melalui amortisasi berbasis suku bunga efektif.

(3) Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laba rugi.

Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***p. Financial instruments** (continued)*

***Financial liabilities** (continued)*

(2) Measurement

Financial liabilities measured at amortised cost are subsequently measured using the effective interest rate method. The effective interest rate based amortisation is recorded as part of finance costs in the profit or loss. Gains or losses are recognised in the profit or loss when the liabilities are derecognised as well as through the effective interest rate based amortisation process.

(3) Derecognition

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender with substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, with the difference in the respective carrying amounts being recognised in the profit or loss.

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Sewa

Grup sebagai penyewa

Pada permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup akan menilai apakah:
- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna pada saat di awal, diukur pada biaya perolehan, di mana meliputi:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa;
- biaya langsung awal yang dikeluarkan; dan
- estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa.

Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau non-sewa, Grup tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset pendasar.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

q. Lease

The Group as a lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group will assess whether:
- *the Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the asset throughout the period of use; and*
- *the Group has the right to direct the use of the identified asset.*

At the commencement date of the lease, the Group recognises a right-of-use asset and a lease liability. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the following:
- *the initial amount of the lease liability;*
- *lease payment made at the commencement date, less any lease incentive;*
- *initial direct cost incurred; and*
- *an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease.*

For a contract that contains a lease component and one or more additional lease or non-lease components, the Group does not separate non-lease components from lease components on lease by class of underlying assets.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Liabilitas sewa pada awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:
- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset tetap" di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

q. Lease *(continued)*

The Group as a lessee *(continued)*

Lease liabilities are initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- *fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable under a residual value guarantee;*
- *the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and*
- *penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.*

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group presents right-of-use assets as part of "Fixed assets" in the consolidated statements of financial position.

Short term leases and low-value asset leases

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and low-value leases. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam keadaan seperti ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan di negara di mana perusahaan dan entitas anaknya beroperasi dan menghasilkan penghasilan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Pajak tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika berasal dari (a) pengakuan awal *goodwill* atau (b) pengakuan awal aset dan liabilitas dari transaksi yang timbul bukan dari transaksi kombinasi bisnis, pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi atau laba rugi kena pajak dan pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir tahun pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan mencukupi untuk dikompensasikan dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Atas perbedaan temporer dalam investasi pada entitas anak dan asosiasi, tidak dibentuk pajak penghasilan tangguhan, karena saat pembalikan perbedaan sementara dikendalikan oleh Grup dan sangat mungkin perbedaan temporer tidak akan dibalik di masa mendatang.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

r. Taxation

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax is calculated on the basis of the tax laws enacted at the reporting date in the countries where the Company and its subsidiaries operate and generate taxable income. Management periodically evaluates the positions taken in the annual tax returns ("SPT") with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from (a) the initial recognition of goodwill or (b) the initial recognition of assets and liabilities from transactions that arise other than business combinations, when the transaction does not affect accounting profit or loss or taxable profit or loss and when the transaction does not give rise to taxable temporary differences and the temporary differences are deductible in the same amount. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at the reporting period end and are expected to apply when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax is not provided on temporary differences arising on investment in subsidiaries and associates, because the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by the Group and it is probable that the temporary difference will not be reversed in the foreseeable future.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***r. Taxation** (continued)*

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

s. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali, di akhir periode pelaporan, Grup memiliki hak untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kovenan yang harus dipatuhi oleh Grup, pada atau sebelum akhir periode pelaporan, dipertimbangkan dalam mengklasifikasikan perjanjian pinjaman dengan perjanjian sebagai lancar atau tidak lancar. Kovenan yang harus dipatuhi oleh Grup setelah periode pelaporan tidak memengaruhi klasifikasi pada tanggal pelaporan.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan akuisisi atau konstruksi aset kualifikasian ("qualifying asset"), dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai secara substansial. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada tahun terjadinya.

s. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Subsequently, borrowings are stated at amortised cost using the effective interest method. Borrowings are classified as current liabilities unless, at the end of the reporting period, the Group has an right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

Covenants that the Group is required to comply with, on or before the end of the reporting period, are considered in classifying loan arrangements with covenants as current or noncurrent. Covenants that the Group is required to comply with after the reporting period do not affect the classification at the reporting date.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fees are deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is deferred as a prepayment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowing costs, which are directly attributable to the acquisition or construction of a qualifying asset, are capitalised until the asset is substantially completed. All other borrowing costs are recognised as expenses in the year in which they are incurred.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Liabilitas imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Grup mengakui liabilitas imbalan kerja jangka pendek ketika jasa diberikan oleh karyawan dan imbalan atas jasa tersebut akan dibayarkan dalam waktu 12 bulan setelah jasa tersebut diberikan.

Imbalan pensiun

Grup memiliki berbagai program pensiun sesuai dengan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan kebijakan Grup.

Program pensiun imbalan pasti

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Grup harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Kontrak Kerja Bersama ("KKB"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan atau KKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau KKB adalah program imbalan pasti.

Liabilitas program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang di mana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi pemerintah.

Biaya jasa kini dari program pensiun imbalan pasti diakui pada beban imbalan kerja dalam laba rugi yang mencerminkan peningkatan kewajiban imbalan pasti yang dihasilkan dari jasa karyawan dalam tahun berjalan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

t. Employee benefit liabilities

Short-term employee benefit

The Group recognises short-term employee benefit liabilities when services are rendered and the compensation for such services is to be paid within 12 months after such services have been rendered.

Pension benefits

The Group has various pension schemes in accordance with prevailing Law and Group's policy.

Defined benefit plan

A defined pension benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually depending on one or more factors, such as age, years of service or compensation.

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Manpower Law or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA"), whichever is higher. Since the Manpower Law or the CLA sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Labour Law or the CLA represent defined benefit plans.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position with respect to the defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation as at the consolidated statement of financial position date, less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no deep market for such bonds, the market rates of government bonds are used.

The current service cost of the defined benefit plan is recognised in profit or loss in employee benefit expense, which reflects the increase in the defined obligations resulting from employee service in the current period.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Program pensiun imbalan pasti (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program pensiun pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laba rugi.

Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas di penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya.

Pada tanggal 21 Oktober 2002, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan (No. KEP-245/KM.6/2002) untuk membentuk Lembaga (*Trust*) terpisah yang mengelola dana pensiun dalam bentuk Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP") bernama Dana Pensiun Bukit Asam ("DPBA"), untuk mengelola, atas nama para anggota, semua kekayaan agar dapat memenuhi kewajiban pensiun dari Perusahaan.

Program pensiun iuran pasti

Program pensiun iuran pasti adalah sebuah program pensiun di mana Perusahaan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut apabila dana pensiun tersebut tidak memiliki aset yang memadai untuk membayar seluruh imbalan karyawan yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan program iuran pasti, Perusahaan mengakui iuran terutang sebagai:
a. liabilitas setelah dikurangi dengan iuran yang telah dibayar. Jika iuran yang telah dibayar tersebut melebihi iuran terutang untuk jasa sebelum akhir periode pelaporan, maka Perusahaan mengakui kelebihan tersebut sebagai aset sepanjang kelebihan tersebut akan mengurangi pembayaran iuran masa depan atau pembayaran kembali dalam bentuk kas; dan
b. beban kecuali PSAK lain mensyaratkan iuran tersebut dimasukan dalam biaya perolehan aset.

Ketika iuran pada program iuran pasti tidak diharapkan akan selesai sebelum 12 bulan setelah program pelaporan maka iuran tersebut didiskontokan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***t. Employee benefit liabilities** (continued)*

***Defined benefit plan** (continued)*

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss.

Remeasurement gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

On 21 October 2002, the Company received approval from the Ministry of Finance (No. KEP-245/KM.6/2002) to establish a separate, trustee-administered pension fund as a defined benefit retirement plan ("PPMP"), namely Dana Pensiun Bukit Asam ("DPBA"), to hold, on behalf of plan members, assets held to satisfy the pension obligations of the Company.

Defined contribution plan

A defined pension contribution plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions into a separate entity (a pension fund) and will have no legal nor constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years.

In relation to defined contribution plans, the Company recognizes contributions payable as:
a. liability after deducting contributions already paid. If the contributions already paid exceed the contributions payable for services before the end of the reporting period, the Company recognizes the excess as an asset to the extent that the excess will reduce future contribution payments or repayment in cash; and
b. an expense unless another SFAS requires the contributions to be included in the cost of the asset.

When contributions to a defined contribution plan are not expected to be completed before 12 months after the reporting plan, the contributions are discounted.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti (lanjutan)

Perusahaan memiliki program tabungan pensiun karyawan untuk semua karyawan tetapnya. Program tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"). Para karyawan mengkontribusikan persentase tertentu dari gaji dasar dan sisa kontribusi ditanggung oleh Perusahaan.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya, seperti uang penghargaan, santunan kematian, cuti jangka panjang, penghargaan pengabdian, dan uang pisah.

Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Santunan kematian diberikan bila pegawai dan anggota keluarga tertentu meninggal dunia. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada peraturan Perusahaan. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti, kecuali untuk pengukuran kembali yang diakui di laba rugi.

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika Grup memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal, atau ketika seorang pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal antara: (i) ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 237, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" dan melibatkan pembayaran pesangon. Dalam hal menyediakan pesangon sebagai penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diharapkan menerima penawaran tersebut. Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***t. Employee benefit liabilities** (continued)*

***Defined contribution plan** (continued)*

The Company has a contributory employee savings programme covering all of its qualified permanent employees. The programme is managed by Pension Fund ("DPLK"). The employees contribute a certain percentage of their basic salary and the Company contributes the remaining balance of the required amount.

Other long-term employee benefits

The Company also provides other long-term employee benefits, such as long service rewards, death allowances, long service leave, jubilee rewards, and separation rewards.

The long service reward is paid when the employees reach their retirement age. Death allowance is paid when the employee or the qualifying family members pass away. The reward is based on the Company's regulations. Meanwhile the separation reward benefit is paid to employees in the event of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan except for remeasurements which are recognised in profit or loss.

Termination benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the entity recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS 237, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and involves the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

a. Identifikasi kontrak dengan pelanggan; dan

b. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.

c. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.

d. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.

e. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atas jasa tersebut).

Pendapatan dari penjualan produk batubara diakui ketika pengendalian dialihkan kepada pelanggan. Terdapat kondisi di mana pertimbangan diperlukan berdasarkan lima indikator pengendalian berikut:

1. Pelanggan telah memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset dan memperoleh kemampuan untuk mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari barang.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

u. Revenue and expense recognition

Revenue

Revenue recognition has to fulfil the following five steps of assessment:

a. Identify contract(s) with a customer.

b. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.

c. Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee that will be paid during the contract period.

d. Allocate the transaction price to each obligation on the basis of the relative standalone selling prices of each distinct good or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price is estimated based on expected cost plus margin.

e. Recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring the promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

Revenue from sales of coal and palm oil products is recognised when control transfers to the customer. There may be circumstances when judgement is required based on the following five indicators of control:

1. The customer has the significant risks and rewards of ownership and has the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from, the goods.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

Pendapatan dari penjualan produk batubara diakui ketika pengendalian dialihkan kepada pelanggan. Terdapat kondisi di mana pertimbangan diperlukan berdasarkan lima indikator pengendalian berikut: (lanjutan)

2. Pelanggan memiliki kewajiban kini untuk membayar sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam kontrak penjualan.

3. Pelanggan telah menerima barang. Penjualan barang dapat tergantung pada penyesuaian berdasarkan inspeksi terhadap pengiriman oleh pelanggan. Dalam hal ini, penjualan diakui berdasarkan estimasi terbaik Grup terhadap kualitas dan/atau kuantitas saat pengiriman, dan penyesuaian kemudian dicatat dalam akun pendapatan. Secara historis, perbedaan antara kualitas dan kuantitas, estimasi dan/atau aktual tidak signifikan.

4. Pelanggan telah memiliki hak kepemilikan legal atas barang.

5. Pelanggan telah menerima kepemilikan fisik atas barang.

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

1. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau

2. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***u. Revenue and expense recognition** (continued)*

***Revenue** (continued)*

Revenue from sales of coal and palm oil products is recognised when control transfers to the customer. There may be circumstances when judgement is required based on the following five indicators of control: (continued)

2. The customer has a present obligation to pay in accordance with the terms and conditions of the sales contract.

3. The customer has accepted the goods. Sales revenue may be subject to adjustment based on the inspection of shipments by the customer. In these cases, sales are recognised based on the Group's best estimate of the grade and/or quantity at the time of shipment, and any subsequent adjustments are recorded against revenue. Historically, the differences between estimated and actual quality and/or quantity are not significant.

4. The customer has legal title to the goods.

5. The customer has physical possession of the goods.

A performance obligation may be satisfied at either of the following:

1. Point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or

2. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

Pendapatan berasal dari penjualan batubara Grup dan pendapatan lainnya.

i. Penjualan produk batubara

Pendapatan penjualan diakui pada setiap penjualan individu ketika pengendalian beralih ke pelanggan. Pengendalian beralih ke pelanggan dan pendapatan penjualan diakui ketika produk dimuat ke kapal di mana batubara akan dikirim ke pelabuhan tujuan atau tempat pelanggan.

Grup menjual batubara dengan syarat *Free on Board* ("FOB"), di mana Grup tidak memiliki tanggung jawab untuk pengangkutan atau asuransi setelah kontrol barang telah berlalu di pelabuhan muat. Untuk jangka waktu ini hanya ada satu kewajiban kinerja, yaitu untuk penyediaan produk pada titik di mana kontrol lewat. Selain itu juga, Grup menjual batubara dengan syarat *Cost, Insurance and Freight* ("CIF"), tetapi berdasarkan perjanjian penjualan, kepemilikan dan risiko kerugian atas batubara akan tetap berada pada Grup sampai batubara melewati pelabuhan bongkar. Dalam kondisi ini, Grup menganggap bahwa biaya asuransi dan pengangkutan bukan merupakan kewajiban pelaksanaan terpisah melainkan satu kesatuan dengan kewajiban pelaksanaan dengan penjualan batubara dikarenakan kontrol atas persediaan batubara berpindah ke pembeli pada saat batubara tersebut sudah sampai di lokasi pembeli. Oleh karena itu, Grup tidak memiliki kewajiban pelaksanaan terpisah untuk jasa pengangkutan dan asuransi yang disediakan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

u. Revenue and expense recognition *(continued)*

Revenue *(continued)*

Revenue represents revenue from the sale of the Group's coal and other revenues.

i. Sales of coal products

Sales revenue is recognised on each individual sale when control transfers to the customer. Control passes to the customers and sales revenue is recognised when the product is loaded onto the vessel on which the coal will be shipped to the destination port or the customers' premises.

The Group sells its coal products Free on Board ("FOB"), where the Group has no responsibility for freight or insurance once control of the goods has been passed on at the loading port. For this term there is only one performance obligation, which is for the provision of the product at the point where control passes. In addition, the Group also sells coal on terms of Cost, Insurance and Freight ("CIF"), but under the sales agreement, the title and risk of loss of coal shall remain with the Group until such coal passes at the discharging port. Under this condition, the Group considers that the insurance and freight costs are not separate performance obligations but one performance obligation for the sale of coal due to the control over coal supplies passing to the buyer when the coal has arrived at the buyer's location. Accordingly, the Group does not have any separate performance obligations for the transportation and insurance services provided.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

Pendapatan berasal dari penjualan batubara Grup dan pendapatan lainnya (lanjutan)

ii. Pendapatan lainnya

Pendapatan lainnya Grup diperoleh dari penjualan minyak sawit mentah, inti sawit, dan penjualan obat-obatan.

Pendapatan dari penjualan tersebut diakui pada suatu titik waktu saat pengendalian barang telah dialihkan kepada pelanggan.

Pendapatan diakui sepanjang waktu menggunakan metode *output* berdasarkan pengukuran langsung atas jasa yang dialihkan kepada pelanggan sampai saat ini secara relatif terhadap sisa jasa yang dijanjikan dalam kontrak.

Beban

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 115 dan diakui sebagai aset lancar lainnya. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

Beban-beban lainnya diakui pada saat terjadinya.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***u. Revenue and expense recognition** (continued)*

***Revenue** (continued)*

Revenue represents revenue from the sale of the Group's coal and other revenues (continued)

ii. Other revenue

The Group's other revenue derives from sales of crude palm oil, palm kernels, and medicine.

Revenue from sales above is recognised at the point in time when the control of goods has been transferred to the customer.

Revenue is recognised over time using the output method as the basis of direct measurement of the services transferred to date relative to the remaining services promised under the contract.

Expense

The costs that directly relate to the contract generate resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") or are incremental to obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered. Therefore, these costs are eligible for capitalisation under SFAS 115 and recognised as other current assets. Such cost will be amortised on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

Other expenses are recognised when they are incurred.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang

Grup memiliki kewajiban hukum dan konstruktif terkait dengan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang yang disebabkan oleh operasi penambangannya. Kewajiban ini diakui sebagai liabilitas pada saat timbulnya kewajiban konstruktif yang berkaitan dengan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang area penambangan. Kewajiban reklamasi lingkungan dan penutupan tambang dalam jumlah yang setara dengan jumlah liabilitas dikapitalisasi sebagai bagian dari suatu aset tertentu dan kemudian disusutkan atau dideplesikan selama masa manfaat aset tersebut. Kewajiban ini diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Perubahan dalam pengukuran liabilitas yang timbul selama tahap produksi juga dibebankan sebagai beban pokok pendapatan. Pengaruh nilai waktu berjalan yang timbul dari mendiskontokan kewajiban yang diestimasi tersebut dicatat sebagai biaya keuangan.

Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang merupakan estimasi terbaik dari nilai kini dari pengeluaran masa depan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan reklamasi dan tutup tambang pada tanggal pelaporan, berdasarkan peraturan hukum yang berlaku saat ini.

Untuk itu, estimasi mengenai jumlah kewajiban untuk reklamasi dan penutupan tambang, membutuhkan manajemen untuk mempertimbangkan waktu kegiatan, estimasi biaya kegiatan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang di masa depan, tingkat diskonto, dan tingkat inflasi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

v. Provision for environmental reclamation and mine closure

The Group has legal and constructive obligation associated with environmental reclamation and mine closure obligation as result of its mining operations. These obligations are recognised as liabilities when a constructive obligation with respect to the environmental reclamation and mine closure of the mine area is incurred. The reclamation and mine closure obligations that are equivalent to these liabilities are capitalised as part of the related assets' carrying value and is subsequently depreciated or depleted over the assets' useful life. These obligations are measured at the present value of the expenditure that is expected to be required to settle the obligation using a discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. Changes in the measurement of a liability which arise during production are also charged to the cost of revenue. The unwinding of the effect of discounting the estimated liability is recognised as a finance cost.

The provision for environmental reclamation and mine closure represents the best estimate of the present value of the future expenditure required to undertake the reclamation and mine closure as at the reporting date, based on current legal requirements.

The estimate of the liability for reclamation and mine closure costs, therefore, requires management to make judgements regarding the timing of the activities, estimated costs of future environmental reclamation and mine closure activities, discount rate and inflation rate.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang (lanjutan)

Perubahan dalam pengukuran kewajiban reklamasi lingkungan dan penutupan tambang yang timbul dari perubahan estimasi waktu kegiatan, tingkat inflasi atau jumlah pengeluaran sumber daya ekonomis (contohnya: arus kas) yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau perubahan dalam tingkat diskonto, akan ditambahkan pada atau dikurangkan dari, harga perolehan aset yang bersangkutan pada tahun berjalan. Jumlah yang dikurangkan dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya. Jika penurunan dalam liabilitas melebihi nilai tercatat aset, kelebihan tersebut segera diakui dalam laba rugi. Jika penyesuaian tersebut menghasilkan penambahan pada harga perolehan aset, Grup akan mempertimbangkan apakah hal ini mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset yang baru mungkin tidak bisa dipulihkan secara penuh. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup akan melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tersebut dengan melakukan estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan dan akan memperhitungkan setiap kerugian dari penurunan nilai yang terjadi.

w. Pelaporan segmen

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional utama. Pengambil keputusan operasional utama, yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, serta membuat keputusan strategis adalah Direksi.

x. Modal saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas, dan biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

y. Saham treasuri

Ketika entitas Grup membeli modal saham ekuitas Perusahaan (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas Perusahaan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***v. Provision for environmental reclamation and mine closure** (continued)*

The changes in the measurement of environmental reclamation and mine closure obligations that result from changes in the estimated timing of the activities, inflation rate or amount of the outflow of resources embodying economic benefits (e.g. cash flow) that required settlement of the obligations, or a change in the discount rate, will be added to or deducted from the cost of the related asset in the current period. The amount deducted from the cost of the asset should not exceed its carrying amount. If a decrease in the liability exceeds the carrying amount of the asset, the excess is recognised immediately in profit or loss. If the adjustment results in addition to the cost of an asset, the Group will consider whether this is an indication that the new carrying amount of the asset may not be fully recoverable. If there is any such indication, the Group will test the asset for impairment by estimating its recoverable amount and will account for any impairment losses incurred.

w. Segment reporting

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing the performance of the operating segments and making strategic decisions, is the Board of Directors.

x. Shares capital

Ordinary shares are classified as equity, and incremental costs directly attributable to the issuance of new shares are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

y. Treasury shares

Where any Group company purchases the Company's equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the entities's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the Company's equity holders.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Laba bersih per saham

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemegang saham Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun berjalan.

Laba bersih per saham dilusian dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perusahaan yang telah disesuaikan dengan biaya keuangan dan keuntungan atau kerugian selisih kurs atas utang obligasi konversi, serta pengaruh pajak yang bersangkutan, dengan jumlah tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun yang bersangkutan, berdasarkan asumsi bahwa semua opsi telah dilaksanakan dan seluruh utang obligasi konversi telah dikonversikan.

aa. Dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Grup diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup dalam tahun ketika pembagian dividen telah diumumkan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

z. Earnings per share

Earnings per share are calculated by dividing profit for the period attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share are calculated by dividing the profit for the period attributable to owners of the parent of the Company adjusted for finance costs and foreign exchange gains or losses on convertible bonds and their related tax effects, by the weighted average number of issued and fully paid-up shares during the year, assuming that all options have been exercised and all convertible bonds have been converted.

aa. Dividends

Dividend distributions to the Group's shareholders are recognised as liabilities in the Group's consolidated financial statements in the year in which the dividends are declared.

3. MANAJEMEN RISIKO

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Grup terekspos terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk dampak risiko nilai tukar mata uang asing, risiko harga komoditas, dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Tujuan dari proses manajemen risiko Grup adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko dasar dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Grup.

Manajemen risiko dijalankan oleh Direksi Grup. Direksi bertugas untuk menjamin kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan terhadap risiko-risiko keuangan, yang meliputi identifikasi risiko secara akurat, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko-risiko keuangan. Direksi menentukan prinsip manajemen risiko secara keseluruhan, sekaligus juga menetapkan kebijakan-kebijakan yang mencakup risiko-risiko dalam bidang tertentu.

3. RISK MANAGEMENT

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including the effects of foreign currency exchange rate risk, commodity price risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The objectives of the Group's risk management processes are to identify, measure, monitor and manage key risks in order to safeguard the Group's long-term business continuity and to minimise potential adverse effects on the financial performance of the Group.

Risk management is carried out by the Group's Board of Directors. The Board ensures the sufficiency of all procedures and methodologies of financial risk management, which consists of ensuring the accuracy of risk identification, measurement, monitoring and financial risks control. The Board of Directors provides principles for overall risk management, as well as policies covering specific areas.

3. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Grup menggunakan berbagai metode untuk mengukur risiko yang dihadapinya. Metode ini meliputi analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga, nilai tukar dan risiko harga lainnya, analisis umur piutang untuk risiko kredit dan analisis beta untuk menentukan risiko pasar dari portofolio investasi.

Sementara itu, Komite Manajemen Risiko bertugas membantu Direksi dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

a. Risiko pasar

(i) Risiko mata uang asing

Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

Sebagian pendapatan dan pengeluaran operasional Grup didenominasi dalam mata uang Dolar AS. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari transaksi komersil di masa yang akan datang serta aset dan liabilitas yang diakui.

Manajemen telah membuat kebijakan untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang fungsional Grup. Risiko nilai tukar mata uang asing dapat dikelola oleh Grup dengan melakukan transaksi penjualan dalam mata uang Dolar AS, sehingga Grup dapat menjaga kecukupan kas dan aset lainnya, seperti piutang dalam mata uang Dolar AS yang dapat digunakan untuk melakukan pelunasan liabilitas sewa pembiayaan dalam mata uang Dolar AS.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jika Rupiah melemah/menguat sebesar 10% terhadap Dolar AS dengan variabel lain konstan, laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp255,32 miliar (nilai penuh) (31 Desember 2023: Rp308,76 miliar) (nilai penuh) terutama diakibatkan keuntungan/kerugian dari penjabaran kas dan setara kas, aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, piutang usaha, utang usaha, pinjaman bank dan liabilitas sewa yang didenominasikan dalam mata uang asing.

***3. RISK MANAGEMENT** (continued)*

The Group uses various methods to measure risk to which it is exposed. These methods include sensitivity analysis in the case of interest rate, foreign exchange rate and other price risks, aging analysis for credit risk and beta analysis in respect to investments portfolio to determine market risk.

Meanwhile, the Risk Management Committee has a responsibility to assist the Board of Directors in ensuring that risk management has been implemented in accordance with these principles.

a. Market risk

(i) Foreign exchange risk

Currency risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments due to changes in foreign currency exchange rates.

A portion of the Group's revenue and operational expenditure is denominated in US Dollars. Foreign currency exchange risk arises from future commercial transactions, and assets and liabilities which are recognised in a foreign currency.

Management has set up a policy to require companies within the Group to manage their foreign exchange risk against their functional currency. Foreign exchange risk is managed by the Group by entering sales transactions in US Dollars, in order to keep sufficient amounts of cash and other assets, such as receivables denominated in US Dollars, that will be used to settle lease liabilities denominated in US Dollars.

As at 31 December 2024, if the Rupiah had weakened/strengthened by 10% against the US Dollar with all other variables remaining constant, post-tax profit for the period would have been Rp255.32 billion (full amount) (31 December 2023: Rp308.76 billion) (full amount) higher/lower, mainly as a result of foreign exchange gains/losses on translation of cash and cash equivalents, financial assets at fair value through other comprehensive income, trade receivables, trade payables, bank borrowings and lease liabilities denominated in foreign currency.

3. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko harga

Grup terekspos terhadap risiko pasar terkait dengan fluktuasi harga dari harga komoditas yang diperdagangkan di pasar batubara dunia. Namun, aset dan liabilitas keuangan Grup tidak terekspos terhadap fluktuasi harga dikarenakan penyelesaian aset dan liabilitas keuangan berdasarkan harga yang tercantum dalam kontrak jual beli batubara yang ditentukan pada saat pengiriman.

Grup terekspos risiko harga yang berasal dari investasi dalam aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek utang, Grup melakukan analisis terkait besarnya bunga kupon yang ditawarkan pada obligasi dan tingkat imbal hasil yang secara umum diharapkan oleh pasar. Kinerja investasi tersedia untuk dijual Grup dimonitor secara periodik.

Pada tanggal 31 Desember 2024, apabila harga atas aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain 10% lebih tinggi atau lebih rendah dengan asumsi variabel lainnya tidak mengalami perubahan, maka total ekuitas akan naik atau turun sebesar Rp16,60 miliar (nilai penuh) (31 Desember 2023: Rp16,92 miliar) (nilai penuh).

(iii) Risiko suku bunga

Risiko tingkat suku bunga Grup timbul dari pinjaman bank dan deposito berjangka. Risiko suku bunga Grup terutama timbul dari pinjaman jangka panjang dalam mata uang Rupiah.

Grup menganalisis eksposur dari risiko bunga secara dinamis. Beberapa skenario disimulasikan dengan beberapa pertimbangan seperti pembiayaan kembali, memperbaharui dari kondisi yang ada dan alternatif lain pembiayaan. Berdasarkan skenario tersebut diatas, Grup mengelola risiko arus kas dari suku bunga dengan melakukan pembiayaan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah.

***3. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Market risk** (continued)*

(ii) Price risk

The Group is exposed to market risks related to the price volatility of commodity prices traded on world coal markets. However, the Group's financial assets and liabilities are not exposed to price volatility because the settlement of financial assets and liabilities is based on the prices stipulated in the coal sales and purchase agreements which are determined at the time of delivery.

The Group is exposed to security price risk from investment which comprises financial assets at fair value through other comprehensive income. To manage price risk arising from investments in debt securities, the Group performs an analysis of the coupon rates offered on bonds and the required rate of return which is generally expected by the market. The performance of the Group's available-for-sale investments is monitored periodically.

As at 31 December 2024, if the price of financial assets at fair value through other comprehensive income had been 10% higher or lower with all other variables held constant, total equity would have increased or decreased by Rp16.60 billion (full amount) (31 December 2023: Rp16.92 billion) (full amount).

(iii) Interest rate risk

The Group's interest rate risk arises from bank borrowings and time deposits. The Group's interest rate risk arises from long-term borrowing denominated in Rupiah.

The Group analyses its interest rate exposure on a dynamic basis. Various scenarios are simulated taking into consideration the refinancing of existing positions, and alternative financing. Based on the above scenarios, the Group manages its cash flows interest rate risk by refinancing borrowings at a lower interest rate.

3. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko kredit

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp10,34 triliun (31 Desember 2023: Rp9,97 triliun) (nilai penuh). Risiko kredit terutama berasal dari penjualan dengan memberikan kredit, kas di bank, deposito berjangka, aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jaminan reklamasi dan penutupan tambang, piutang usaha, dan piutang lainnya.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Grup memiliki perjanjian yang jelas dengan pelanggan, perjanjian yang mengikat terutama untuk transaksi penjualan batubara dan secara historis mempunyai tingkat yang rendah untuk piutang usaha yang bermasalah.

Kebijakan umum Grup untuk meminimalisasi risiko kredit yang mungkin muncul adalah sebagai berikut:
- memilih pelanggan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat dan reputasi baik;
- menerima pelanggan baru dan penjualan batubara disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kebijakan delegasi kekuasaan Grup; dan
- meminta pembayaran menggunakan *letter of credit* untuk pelanggan luar negeri dan dalam negeri selain dari transaksi dengan Grup PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN").

Semua kas di bank, deposito berjangka, dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya ditempatkan di bank asing dan lokal yang memiliki reputasi.

Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan memonitor reputasi, peringkat kredit dan menekan risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Manajemen berkeyakinan bahwa manajer investasi yang mengelola aset keuangan tersebut memiliki reputasi yang baik.

Seluruh saldo terutang dari piutang usaha dan piutang lainnya di atas terutama berasal dari pelanggan/pihak ketiga/pihak berelasi yang sudah bertransaksi dengan Grup lebih dari 12 bulan dan tidak memiliki sejarah wanprestasi.

***3. RISK MANAGEMENT** (continued)*

b. Credit risk

As at 31 December 2024, the total maximum exposure from credit risk was Rp10.34 trillion (31 December 2023: Rp9.97 trillion) (full amount). Credit risk arises from sales under credit, cash in banks, time deposits, financial assets at fair value through other comprehensive income, reclamation and mine closure funds, trade receivables, and other receivables.

Management is confident in its ability to maintain minimal exposure to credit risk given that the Group has clear agreements with customers, binding agreements primarily in place for coal sales transactions and historically low levels of bad debt.

The Group's general policies to minimise the potential credit risk which may arise are as follows:
- *selecting customers with a strong financial conditions and good reputations;*
- *acceptance of new customers and sales of coal being approved by authorised personnel according to the Group's delegation of authority policy; and*
- *requesting payments by letter of credit for all customers except for transactions with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") Group.*

All the cash in banks, time deposits and restricted time deposits are placed in reputable foreign and local banks.

The Group manages credit risk exposure from its financial assets at fair value through other comprehensive income by monitoring the reputation and, credit ratings and reducing the aggregate risk of each individual counterparty. Management believes that the investment managers who manage the financial assets have a good reputation.

The entire outstanding balances from trade receivables and other receivables are mostly derived from customers/third parties/related parties which have transacted with the Group for more than 12 months and do not have any history of default.

3. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul dalam situasi di mana posisi arus kas Grup mengindikasikan bahwa arus kas masuk dari pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk memenuhi arus kas keluar untuk pengeluaran jangka pendek. Dalam kebijakan manajemen risiko likuiditas, Grup melakukan monitor dan menjaga level kas dan setara kas yang diperkirakan cukup untuk mendanai kegiatan operasional Grup dan mengurangi pengaruh fluktuasi dalam arus kas. Manajemen Grup juga secara rutin melakukan monitor atas perkiraan arus kas dan arus kas aktual, termasuk profil jatuh tempo pinjaman, dan secara terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk kesempatan memperoleh dana.

Tabel di bawah ini menggambarkan liabilitas keuangan Grup berdasarkan jatuh temponya. Jumlah yang terdapat di tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto:

***3. RISK MANAGEMENT** (continued)*

c. Liquidity risk

Liquidity risk is defined as the risk that arises in situations where the Group's cash flow indicates that the cash inflow from short-term revenue is not enough to cover the cash outflow of short-term expenditure. As part of its liquidity risk management policy, the Group monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Group's operational activities and to mitigate the effect of fluctuations in cash flow. The Group's management also regularly monitors projected and actual cash flows, including their loan maturity profiles, and continuously assesses financial markets for opportunities to raise funds.

The table below describes the Group's financial liabilities based on their maturities. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows:

	Jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan/ *Contractual maturities of financial liabilities*			
	Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	Antara 3 bulan sampai 1 tahun/ *Between 3 months and 1 year*	Antara 1 sampai 5 tahun/ *Between 1 and 5 years*	Jumlah/*Total*
31 Desember/*December* 2024				
Utang usaha/*Trade payables*	2,920,012	-	-	2,920,012
Biaya yang masih harus dibayar/ *Accrued expenses*	4,770,233	-	-	4,770,233
Liabilitas sewa/ *Lease liabilities*	97,313	420,006	380,782	898,101
Pinjaman bank/*Bank borrowings*	1,488,822	-	-	1,488,822
Utang jangka pendek lainnya/ *Other current liabilities*	296,441	-	-	296,441
Jumlah liabilitas/*Total liabilities*	**9,572,821**	**420,006**	**380,782**	**10,373,609**
31 Desember/*December* 2023				
Utang usaha/*Trade payables*	2,082,188	-	-	2,082,188
Biaya yang masih harus dibayar/ *Accrued expenses*	4,857,830	-	-	4,857,830
Liabilitas sewa/ *Lease liabilities*	208,901	372,011	817,396	1,398,308
Pinjaman bank/*Bank borrowings*	68,086	-	-	68,086
Utang jangka pendek lainnya/ *Other current liabilities*	268,527	-	-	268,527
Jumlah liabilitas/*Total liabilities*	**7,485,532**	**372,011**	**817,396**	**8,674,939**

d. Manajemen permodalan

Dalam mengelola permodalannya, Grup senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

d. Capital risk management

In managing its capital, the Group safeguards its ability to continue as a going concern and to maximise benefits to the shareholders and other stakeholders.

3. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Manajemen permodalan (lanjutan)

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Grup juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal. Tidak ada perubahan pada pendekatan Grup dalam mengelola permodalannya selama tahun berjalan.

e. Nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar berdasarkan asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di:

- pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup menganalisis aset keuangan yang dimiliki yang diukur pada nilai wajar. Tabel di halaman berikutnya menganalisis instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan model penilaian. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- tingkat 1 - harga kuotasi (tidak disesuaikan) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- tingkat 2 - teknik-teknik lain atas semua input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang tercatat dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- tingkat 3 - teknik yang menggunakan input yang memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai wajar yang tercatat yang tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

***3. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***d. Capital risk management** (continued)*

The Group actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into consideration the efficiency of capital use based on operating cash flows and capital expenditure and also consideration of future capital needs.

The Group also seeks to maintain a balance between its level of borrowing and equity position in order to ensure the optimal capital structure and return. There were no changes in the Group's approach to capital management during the year.

e. Fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *in the principal market for the asset or liability; or*
- *in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The Group analyses its financial assets which are measured at fair value. The table on the next page analyses financial instruments carried at fair value, by the level of valuation method. The different levels of valuation methods have been defined as follows:

- *level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
- *level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;*
- *level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

3. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

e. Nilai wajar (lanjutan)

Aset dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan nilai wajarnya adalah sebagai berikut:

3. *RISK MANAGEMENT* *(continued)*

e. Fair value *(continued)*

Financial assets and liabilities that are recorded based on fair value were as follows:

	31 Desember/*December* 2024				
	Tingkat/*Level 1*	Tingkat/*Level 2*	Tingkat/*Level 3*	Jumlah/*Total*	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	425,767	-	-	425,767	*Financial assets at fair value through other comprehensive income*

	31 Desember/*December* 2023				
	Tingkat/*Level 1*	Tingkat/*Level 2*	Tingkat/*Level 3*	Jumlah/*Total*	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	875,330	-	-	875,330	*Financial assets at fair value through other comprehensive income*

Selain instrumen keuangan yang dijabarkan di atas, Grup tidak memiliki aset dan/atau kewajiban lain yang dicatat pada nilai wajarnya.

Other than the financial instrument described above, the Group did not have any other assets and/or liabilities that were recorded at their fair values.

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah di mana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi terkini antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, bukan dalam penjualan yang dipaksakan atau penjualan likuidasi.

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current arm's length transaction between knowledgeable willing parties, other than in a forced or liquidation sale.

Nilai wajar aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang diasumsikan sama dengan nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.

The fair values of current financial assets and liabilities with maturities of one year or less are assumed to be approximately the same as their carrying amounts due to their short-term nature.

Jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan lainnya kurang lebih sama dengan nilai wajarnya.

The carrying amount of other financial assets and liabilities approximates their fair value.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi, dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting year. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut di mana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan di mana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

Pertimbangan

Perpajakan

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan beban yang dapat dikurangkan dalam mengestimasi provisi pajak penghasilan Grup. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan Grup melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang pajaknya tidak pasti dalam kegiatan usaha biasa.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun di mana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, di mana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas, dan lain-lain, yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

***4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

The Group has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the consolidated financial results or financial position of the Group reported in future years.

Judgement

Taxation

Judgements and assumptions are required to determine the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income taxes for the Group. Specifically, in calculating income tax expenses, the Group involves the interpretation of applicable tax laws and regulations. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

All judgements and estimates made by management as discussed above may be challenged by the Directorate General of Taxation ("DGT"). As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which depends on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by management's estimates and assumptions regarding the expected production levels, sales volumes, commodity prices and other factors, which are subject to risk and uncertainty. Hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Kepentingan dalam pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Grup memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Grup menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan keputusan keuangan, operasional dan modal dari pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Grup untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Grup mempertimbangkan:

- struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah.
- ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
  a. bentuk legal dari kendaraan terpisah;
  b. persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan
  c. fakta dan kondisi lainnya, jika relevan.

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Grup memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama, PT Bukit Pembangkit Innovative ("BPI"), PT Huadian Bukit Asam Power ("HBAP"), dan PT Bukit Asam Transpacific Railway ("BATR").

Grup memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Grup menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan menyimpulkan bahwa pengaturan tersebut merupakan sebuah ventura bersama.

***4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

***Judgement** (continued)*

Interests in joint arrangements

Judgement is required to determine when the Group has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the financial, operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required in order to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers the following:

- *the structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle.*
- *when the arrangement is structured through a separate vehicle, the Group also considers the rights and obligations arising from:*

  a. the legal form of the separate vehicle;
  b. the terms of the contractual arrangement; and
  c. other relevant facts and circumstances

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion on joint control and whether the arrangement is a joint operation or a joint ventures, may materially impact the consolidated financial statements.

The Group has joint arrangements which are structured through joint ventures, being PT Bukit Pembangkit Innovative ("BPI"), PT Huadian Bukit Asam Power ("HBAP") and PT Bukit Asam Transpacific Railway ("BATR").

These structures and the terms of the contractual arrangements indicate that the Group has rights to the net assets of the arrangement. The Group also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and concluded that the arrangements are joint ventures.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi

Nilai wajar instrumen keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, nilai perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat memengaruhi secara langsung laba atau rugi Grup.

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Manajemen melakukan penilaian dalam menentukan komponen pembayaran sewa, apakah pembayaran tersebut mengandung komponen pebayaran tetap atau variabel. Bila Grup wajib melakukan pembayaran minimum maka Grup perlu melakukan pencatatan atas aset hak guna dan liabilitas sewa.

Sebaliknya, jika tidak terdapat pembayaran minimum maka sewa mengandung komponen pembayaran variabel dan dibukukan sebagai biaya dalam laba rugi. Hal ini memerlukan penilaian dan pertimbangan manajemen yang perlu diperbaharui dari waktu ke waktu.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

***4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

Estimates and assumptions

Fair value of financial instruments

The Group recorded certain assets and financial liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidence, the amount of change in value reasonably may be different when the Group uses different valuation methodologies. Changes in fair value of financial assets and liabilities can indirectly affect profit or loss of the Group.

Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the asset throughout the period of use and the right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

Management perform assessment on determining lease payment component, whether the payments contain fixed or variable payment component. If the Group is required to make a minimum payments, the Group should record right-of-use assets and lease liabilities.

In the other hand, if there is no minimum payments, then the lease contain variable payment component and should be booked as expense at profit or loss. These need management's assessment and consideration which require periodical updates from time to time.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. In determining incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Sewa (lanjutan)

Untuk sewa bangunan, kendaraan, mesin dan peralatan, berikut merupakan faktor-faktor yang pada umumnya paling relevan:
- jika terdapat penalti yang signifikan untuk mengakhiri (atau tidak memperpanjang), Grup biasanya cukup pasti untuk memperpanjang (atau tidak mengakhiri);
- jika prasarana diperkirakan mempunyai nilai sisa yang signifikan, Grup biasanya cukup pasti untuk memperpanjang (atau tidak mengakhiri);
- jika tidak, Grup mempertimbangkan faktor lain termasuk jangka waktu sewa historis dan biaya dan gangguan bisnis yang timbul untuk menggantikan aset sewa tersebut.

Nilai tercatat atas aset hak guna dan liabilitas sewa masing-masing diungkapkan dalam Catatan 12 dan 22.

Estimasi masa manfaat atas aset tetap

Grup mengestimasi masa manfaat dari aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara.

Estimasi masa manfaat dikaji paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Namun, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas. Nilai tercatat atas aset tetap diungkapkan dalam Catatan 12.

Estimasi cadangan batubara

Cadangan batubara adalah estimasi jumlah produk yang dapat secara ekonomis maupun legal diekstraksi dari properti penambangan Grup. Grup menentukan dan melaporkan cadangan batubara berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Australasian Joint Ore Reserves Committee* ("JORC") untuk Pelaporan Hasil Eksplorasi, Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih. Untuk memperkirakan cadangan batubara, perlu ditentukan asumsi mengenai faktor-faktor geologis, teknis dan ekonomis termasuk jumlah produksi, teknik produksi, nisbah kupasan, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas, dan nilai tukar mata uang.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS *(continued)*

Estimates and assumptions *(continued)*

Leases (continued)

For leases of buildings, vehicles, machinery and equipment, the following factors are normally the most relevant:
- *if there are significant penalties to terminate (or not extend), the Group is typically reasonably certain to extend (or not terminate);*
- *if any leasehold improvements are expected to have a significant remaining value, the Group is typically reasonably certain to extend (or not terminate);*
- *otherwise, the Group considers other factors including historical lease durations and the costs and business disruption required to replace the leased asset.*

The carrying amounts of right-of-use assets and lease liabilities are disclosed in Notes 12 and 22, respectively.

Estimated useful lives of fixed assets

The Group estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilisation as anchored on business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behaviour. The estimation of the useful lives of fixed assets is based on the Group's collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

The estimated useful lives are reviewed at least at each financial period end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. However, it is possible that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above. The carrying amounts of fixed assets are disclosed in Note 12.

Coal reserve estimates

Coal reserves are estimates of the amounts of product that can be economically and legally extracted from the Group's mining properties. The Group determines and reports its coal reserves under the principles incorporated in the Australasian Joint Ore Reserves Committee (the "JORC") for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves. In order to estimate coal reserves, assumptions are required about a range of geological, technical and economic factors, including quantities, production techniques, stripping ratio, production costs, transportation costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Estimasi cadangan batubara (lanjutan)

Memperkirakan jumlah dan/atau nilai kalori cadangan batubara membutuhkan ukuran, bentuk dan kedalaman tubuh batubara atau lapangan yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti "uji petik" (sampel) pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan penilaian geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

Asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari waktu ke waktu, dan data geologi tambahan dihasilkan selama operasi. Oleh karena itu, perkiraan cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Grup dalam berbagai cara, diantaranya:

- nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan;
- penyusutan dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laba rugi dan dapat berubah apabila beban-beban tersebut ditentukan berdasarkan unit produksi, atau jika masa manfaat ekonomi umur aset berubah;
- provisi untuk aktivitas purnaoperasi, restorasi lokasi aset, dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini; dan
- nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

Dalam melakukan penilaian estimasi cadangan, Grup juga mempertimbangkan dampak potensial yang timbul dari perubahan iklim. Nilai tercatat atas properti penambangan diungkapkan dalam Catatan 11.

Provisi untuk reklamasi lingkungan dan penutupan tambang

Kebijakan akuntansi Grup atas pengakuan provisi untuk reklamasi lingkungan dan penutupan tambang membutuhkan estimasi dan asumsi yang signifikan seperti persyaratan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang relevan, waktu kegiatan dan estimasi biaya kegiatan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang di masa depan. Dengan demikian, waktu kegiatan dan jumlah arus kas di masa mendatang yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pada setiap tanggal pelaporan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang signifikan. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan rentang berbagai kemungkinan hasil. Perubahan pada waktu kegiatan dan estimasi biaya kegiatan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang di masa depan, tingkat diskonto dan tingkat inflasi dapat mempengaruhi secara material laporan keuangan konsolidasian Grup.

***4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

***Estimates and assumptions** (continued)*

Coal reserve estimates (continued)

Estimating the quantity and/or calorific value of coal reserves requires the size, shape and depth of coal bodies or fields to be determined by analysing geological data such as drilling samples. This process may require complex and difficult geological judgements to interpret the data.

The economic assumptions used to estimate reserves change from period to period and additional geological data is generated during the course of operations. Therefore, estimates of reserves may change from period to period. Changes in reported reserves may affect the Group's financial results and financial position in a number of ways, including the following:

- *assets' carrying values may be affected due to changes in estimated future cash flows;*
- *depreciation and amortisation charged in profit or loss and may change where such charges are determined on a units of production basis, or where the useful economic lives of assets change;*
- *decommissioning, site restoration and environmental provision may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities; and*
- *the carrying value of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the likely recovery of the tax benefits.*

In assessing the reserve estimates, the Grup also considered the potential impact arising from climate change. The carrying amounts of mining properties are disclosed in Note 11.

Provision for environmental reclamation and mine closure

The Group's accounting policy for the recognition of environmental reclamation and mine closure provision requires significant estimates and assumptions such as requirements of the relevant legislative and regulatory requirements, the timing of the activities and estimated costs of the future environmental and mine closure activities. As such, the timing of the activities and amounts of future cash flows required to settle the obligations at each of the reporting dates are subject to significant uncertainty. These uncertainties may result in a wide range of possible measurement outcomes. Changes in timing of the activities and estimated costs of future environmental reclamation and mine closure activities, the discount rate and inflation rate could have a material impact on the Group's consolidated financial statements.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Provisi untuk reklamasi lingkungan dan penutupan tambang (lanjutan)

Jika jumlah pengeluaran pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi pada tahun berjalan sehubungan dengan kegiatan tahun lalu lebih besar daripada jumlah yang telah dibentuk, maka selisihnya dibebankan di laba rugi pada tahun kelebihan tersebut timbul. Provisi yang diakui pada setiap lokasi ditinjau secara berkala dan diperbarui berdasarkan fakta-fakta dan keadaan pada saat itu. Nilai tercatat atas provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang diungkapkan dalam Catatan 19.

Liabilitas imbalan pascakerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuaria dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya/(penghasilan) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, kenaikan gaji di masa depan, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup, periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan, tren biaya kesehatan dan biaya rata-rata kesehatan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun.

Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan. Nilai tercatat atas liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 20.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS *(continued)*

Estimates and assumptions *(continued)*

Provision for environmental reclamation and mine closure (continued)

If the total current year expenditure related to past activity is higher than the existing balance, the differences will be charged to profit or loss of the year where the excess arises. The provision recognised for each site is periodically reviewed and updated based on the facts and circumstances available at the time. The carrying amounts of provision for environmental reclamation and mine closure are disclosed in Note 19.

Post-employment benefits obligation

The present value of the pension obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future salary increase, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy, expected remaining periods of service of employees, medical cost trend and average medical cost. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension obligation.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligation.

In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds (considering there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation. The carrying amounts of post-employment benefits liabilites are disclosed in Note 20.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan

Jumlah nilai yang dapat dipulihkan kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Penentuan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan harga masa lalu, tren harga, dan faktor-faktor terkait), cadangan (lihat 'Estimasi cadangan batubara'), biaya operasi, biaya penutupan tambang dan reklamasi, tingkat diskonto dan belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga terdapat kemungkinan perubahan situasi yang dapat mengubah proyeksi ini, sehingga dapat mempengaruhi nilai aset yang dapat dipulihkan kembali. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai tercatat aset mungkin akan mengalami penurunan nilai lebih lanjut atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai yang dampaknya akan dicatat dalam laba rugi.

***4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

***Estimates and assumptions** (continued)*

Impairment of non-financial assets

The recoverable amount of a cash-generating asset or group of assets is measured at the higher of its fair value less cost of disposal or value in use. The determination of fair value less cost of disposal or value in use requires management to make judgement, estimates and assumptions regarding expected production levels, sales volumes, commodity prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), reserves (see 'Coal reserve estimates'), operating costs, mine closure and reclamation costs, discount rate and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty, and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying values of the assets may be further impaired or the impairment charges may be reduced with the impact being recorded in profit or loss.

5. KAS DAN SETARA KAS DAN DEPOSITO BERJANGKA / *CASH AND CASH EQUIVALENTS AND TIME DEPOSITS*

a. Kas dan setara kas / *Cash and cash equivalents*

Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

The details of cash and cash equivalents are as follows:

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Kas	**587**	**524**	***Cash on hand***
Kas di bank			***Cash in banks***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 31b)	378,172	547,168	*Related parties (Note 31b)*
Pihak ketiga:			*Third parties:*
PT Bank Permata Tbk ("Permata")	87,501	4,607	*PT Bank Permata Tbk ("Permata")*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ("BPD Sumsel Babel")	37,319	1,164	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan and Bangka Belitung ("BPD Sumsel Babel")*
PT Bank UOB Indonesia ("UOB")	1,266	542	*PT Bank UOB Indonesia ("UOB")*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	1,295	1,191	*Others (each below Rp10,000)*
Dolar AS			*US Dollars*
Pihak berelasi (Catatan 31b)	141,640	677,441	*Related parties (Note 31b)*
Pihak ketiga:			*Third parties:*
Permata	1,289	2,004	*Permata*
UOB	-	1,855	*UOB*
Deutsche Bank AG	-	1,146	*Deutsche Bank AG*
Dolar Australia			*Australian Dollars*
Pihak berelasi (Catatan 31b)	-	555	*Related party (Note 31b)*
Euro			*Euro*
Pihak berelasi (Catatan 31b)	-	2,658	*Related party (Note 31b)*
Jumlah kas di bank	**648,482**	**1,240,331**	***Total cash in banks***
Deposito berjangka			***Time deposits***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 31b)	1,257,637	970,523	*Related parties (Note 31b)*
Pihak ketiga:			*Third parties:*
BPD Sumsel Babel	65,000	95,000	*BPD Sumsel Babel*
PT Bank DKI	5,000	-	*PT Bank DKI*
PT Bank Mega Tbk	-	133,297	*PT Bank Mega Tbk*
Dolar AS			*US Dollars*
Pihak berelasi (Catatan 31b)	237,508	181,408	*Related parties (Note 31b)*
Jumlah deposito berjangka	**1,565,145**	**1,380,228**	***Total time deposits***
Deposito berjangka untuk devisa hasil ekspor			***Time deposits for cash proceeds from export sales***
Dolar AS			*US Dollars*
Pihak berelasi (Catatan 31b)	1,918,644	1,517,784	*Related parties (Note 31b)*
Jumlah kas dan setara kas	**4,132,858**	**4,138,867**	***Total cash and cash equivalents***

5. KAS DAN SETARA KAS DAN DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

a. Kas dan setara kas (lanjutan)

Tingkat suku bunga kontraktual dari deposito berjangka adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Rupiah	4.36% - 7.20%	2.25% - 7.05%	*Rupiah*
Dolar AS	1.5% - 2.50%	4.00% - 5.41%	*US Dollars*

Deposito berjangka untuk devisa hasil ekspor merupakan deposito berjangka dengan jatuh tempo tiga bulan yang ditempatkan oleh Grup sebagai salah satu pemenuhan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 (Catatan 30m).

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir tahun pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana yang dijabarkan di atas.

***5. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND TIME DEPOSITS** (continued)*

***a. Cash and cash equivalents** (continued)*

Contractual interest rates on time deposits are as follows:

Time deposites for cash proceeds from export sales represent time deposits with maturity of three months placed by the Group to fulfill one of the obligations as required in Government Regulation No. 36 of 2023 (Note 30m).

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents as mentioned above.

b. Deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun

b. Time deposits with maturities more than 3 months and less than 1 year

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun			***Time deposits with maturities more than 3 months and less than 1 year***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 31b)	**242,355**	**541,818**	*Related parties (Note 31b)*

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Rupiah	4.42%	6.10% - 6.75%	*Rupiah*

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir tahun pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari deposito berjangka sebagaimana yang dijabarkan di atas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of time deposits as mentioned above.

6. PIUTANG USAHA, NETO / *6. TRADE RECEIVABLES, NET*

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut: / *The details of trade receivables are as follows:*

	31 Desember/ *December* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			*Rupiah*
PT Sumber Segara Primadaya	217,204	95,835	*PT Sumber Segara Primadaya*
PT Bukit Batu Mulia	73,799	50,831	*PT Bukit Batu Mulia*
PT Servo Lintas Raya	26,360	-	*PT Servo Lintas Raya*
PT Cemindo Gemilang	20,922	-	*PT Cemindo Gemilang*
PT Indocement Tunggal Perkasa	6,472	22,549	*PT Indocement Tunggal Perkasa*
Lainnya	113,064	122,854	*Others*
Dolar AS			*US Dollars*
Century Commodities Solution Pte.	252,221	272,852	*Century Commodities Solution Pte.*
Rwood Resources DMCC	210,978	-	*Rwood Resources DMCC*
Indopacific Energy Pte. Ltd	207,648	82,383	*Indopacific Energy Pte. Ltd*
Motion Shipping and Trading Pte. Ltd.	192,711	376,354	*Motion Shipping and Trading Pte. Ltd.*
Sunrise Asia Mines and Minerals	189,095	-	*Sunrise Asia Mines and Minerals*
IMR Metallurgical Resources AG	150,338	-	*IMR Metallurgical Resources AG*
Far East Commodities SA	84,970	-	*Far East Commodities SA*
Cosmos Star General Trading LLC	84,260	-	*Cosmos Star General Trading LLC*
Adityaa Energy Resources Pte. Ltd.	82,738	-	*Adityaa Energy Resources Pte. Ltd.*
Adani Global Pte. Ltd.	74,535	-	*Adani Global Pte. Ltd.*
Caravel Carbons Limited	69,433	-	*Caravel Carbons Limited*
Yongtai Energy Pte Ltd	66,656	-	*Yongtai Energy Pte Ltd*
Energy Taiwan Limited	66,124	-	*Energy Taiwan Limited*
Ardours Pte. Ltd.	26,943	-	*Ardours Pte. Ltd.*
Hua Qin International Trading	-	214,826	*Hua Qin International Trading*
Cashin Resource Company Limited	-	136,223	*Cashin Resource Company Limited*
Kowa Asia Pacific Pte. Ltd.	-	92,685	*Kowa Asia Pacific Pte. Ltd.*
Suek AG	-	91,498	*Suek AG*
KNK Energy Pte. Ltd.	-	88,435	*KNK Energy Pte. Ltd.*
Ares Asia Resources Pte. Ltd.	-	77,151	*Ares Asia Resources Pte. Ltd.*
Noble Resources International Pte. Ltd.	-	32,146	*Noble Resources International Pte. Ltd.*
Avra International AG.	-	16,954	*Avra International AG.*
Lainnya	33,718	33,684	*Others*
Dolar Singapura			*Singapore Dollars*
Lainnya	4,922	22,130	*Others*
Jumlah piutang usaha - pihak ketiga	**2,255,111**	**1,829,390**	***Total trade receivables - third parties***
Pihak berelasi (Catatan 31b)			***Related parties*** *(Note 31b)*
Rupiah	2,841,681	2,307,951	*Rupiah*
Dolar AS	82,058	-	*US Dollars*
Jumlah piutang usaha - pihak berelasi	**2,923,739**	**2,307,951**	***Total trade receivables - related parties***
Jumlah piutang usaha	**5,178,850**	**4,137,341**	***Total trade receivables***
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(148,779)	(151,778)	*Provision for impairment*
Jumlah piutang usaha, neto	**5,030,071**	**3,985,563**	***Total trade receivables, net***
Bagian lancar	**(5,030,071)**	**(3,797,292)**	***Current portion***
Bagian tidak lancar	**-**	**188,271**	***Non-current portion***

6. PIUTANG USAHA, NETO (lanjutan)

6. *TRADE RECEIVABLES, NET* *(continued)*

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	31 Desember/ *December 2024*	**31 Desember/ *December* 2023**	
Lancar	3,809,734	3,252,026	*Current*
Jatuh tempo 1-30 hari	670,354	353,581	*Overdue by 1-30 days*
Jatuh tempo 31-90 hari	529,477	132,783	*Overdue by 31-90 days*
Jatuh tempo lebih dari 90 hari	169,285	398,951	*Overdue by more than 90 days*
	5,178,850	4,137,341	
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan atas penurunan nilai	(148,779)	(151,778)	*Allowance for impairment*
	5,030,071	**3,985,563**	

Perubahan cadangan atas penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment of trade receivables are as follows:

	31 Desember/ *December 2024*	**31 Desember/ *December* 2023**	
Saldo awal	151,778	97,638	*Beginning balance*
Penambahan	166	54,685	*Addition*
Pemulihan	(3,165)	(545)	*Recovery*
Saldo akhir	**148,779**	**151,778**	***Ending balance***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan atas penurunan nilai piutang tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha. Lihat Catatan 31b untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Management believes that the allowance for impairment of receivables is adequate to cover loss on uncollectible trade receivables. Refer to Note 31b for information on the details of transactions and balances with related parties.

7. ASET KEUANGAN YANG DINILAI PADA NILAI WAJAR MELALUI PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pada tanggal 31 Desember 2024 aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain terdiri dari investasi pada instrumen utang dalam bentuk di bawah ini:

7. FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME

As at 31 December 2024 financial assets at fair value through other comprehensive income represent investments in debt securities in the form of the following:

Perusahaan penerbit/ *Issuer entity*	**Mata uang/ *Currency***	**Tingkat suku bunga/ *Interest rate***	**Tenor/*Tenure***
Obligasi/*Bonds*			
Pertamina	Dolar AS/*USD*	6.45%	19 tahun/*years*
PLN	Rupiah/*IDR*	8.65%	11 tahun/*years*
KAI	Rupiah/*IDR*	7.10%	3 tahun/*years*
Danareksa	Rupiah/*IDR*	7.50%	1 tahun/*years*
SMI Seri B	Rupiah/*IDR*	6.70%	1 tahun/*years*
Obligasi pemerintah/ *Government bonds*			
Seri FR0090	Rupiah/*IDR*	5.13%	2 tahun/*years*

Di bawah ini adalah mutasi aset keuangan Grup yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:

The movement of the Group's financial assets at fair value through other comprehensive income is shown below:

	31 Desember/ *December 2024*	**31 Desember/ *December 2023***	
Saldo awal	875,330	783,070	*Beginning balance*
Penambahan	-	80,000	*Addition*
Pelepasan	(441,250)	-	*Release*
Efek nilai tukar	7,180	(1,530)	*Exchange rate effect*
Keuntungan yang belum direalisasi dari aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(15,493)	13,790	*Unrealised gain from financial assets at fair value through other comprehensive income*
Saldo akhir	**425,767**	**875,330**	***Ending balance***

Manajemen Grup berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya bukti objektif penurunan nilai wajar aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Oleh karena itu, tidak diperlukan cadangan penurunan nilai atas aset keuangan tersebut.

The Group's management is of the opinion that there are no events or changes of circumstances which indicate a permanent decline in the fair value of the financial assets at fair value through other comprehensive income. Therefore, no provision for impairment in the value of the above financial assets is necessary.

Penghasilan bunga efektif yang diperoleh dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain selama tahun berjalan adalah Rp40.958 (31 Desember 2023: Rp53.178) (lihat Catatan 29a).

Effective interest income earned from financial assets measured at fair value through other comprehensive income during the year amounted to Rp40,958 (31 December 2023: Rp53,178) (see Note 29a).

Nilai wajar aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berdasarkan harga penawaran yang berlaku dalam pasar yang aktif. Lihat Catatan 3e untuk informasi lebih lanjut mengenai metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar.

The fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income is based on the current bid price in active markets. See Note 3e for further information about the methods used and assumptions applied in determining fair value.

Lihat Catatan 31b untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 31b for information on the details of transactions and balances with related parties.

8. PERSEDIAAN / *INVENTORIES*

Persediaan terdiri dari: / *Inventories consisted of the following:*

	31 Desember/ *December 2024*	31 Desember/ *December 2023*	
Persediaan batubara	4,649,707	5,292,138	*Coal inventories*
Perlengkapan dan suku cadang	363,232	336,570	*Materials and spare parts*
Minyak kelapa sawit dan kernel	3,242	5,141	*Crude palm oil and kernels*
	5,016,181	5,633,849	
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan persediaan usang	(146,844)	(134,235)	*Provision for obsolete inventories*
Jumlah persediaan, neto	**4,869,337**	**5,499,614**	***Total inventories, net***

Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut: / *Movements of provision for obsolete inventories were as follows:*

	31 Desember/ *December 2024*	31 Desember/ *December 2023*	
Saldo awal	(134,235)	(124,740)	*Beginning balance*
Penambahan penyisihan persediaan usang	(12,609)	(9,495)	*Addition of provision for obsolete inventories*
Saldo akhir	**(146,844)**	**(134,235)**	***Ending balance***

Grup berpendapat bahwa nilai tercatat persediaannya tidak melebihi nilai realisasi bersihnya pada tanggal 31 Desember 2024.

The Group is of the opinion that the carrying values of its inventories do not exceed their net realisable values as at 31 December 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh persediaan tidak diasuransikan. Manajemen berpendapat bahwa risiko kerugian yang berkaitan dengan persediaan adalah rendah.

As at 31 December 2024 and 2023, all inventories were not insured. Management considers the risks of losses associated with inventories to be low.

9. ASET LANCAR DAN TIDAK LANCAR LAINNYA / *OTHER CURRENT AND NON-CURRENT ASSETS*

a. Aset lancar terdiri dari: / ***a. Other current assets consisted of:***

	31 Desember/ *December 2024*	31 Desember/ *December 2023*	
Jaminan bank	153,492	-	*Bank guarantee*
Royalti	120,548	69,656	*Royalty*
Piutang lainnya - pihak ketiga	118,116	71,223	*Other receivables - third parties*
Uang muka pihak ketiga	46,561	9,592	*Advance third party*
Biaya sewa dibayar dimuka	30,288	2,486	*Prepaid rent expense*
Pendapatan yang masih harus diterima	30,215	60,262	*Accrued revenue*
Lain-lain	33,906	82,216	*Others*
Jumlah	**533,126**	**295,435**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2024, jaminan bank sebesar Rp153.492 berupa kas yang dibatasi penggunaannya yang ditempatkan di BRI untuk menjaminkan pinjaman bank (Catatan 21).

As at 31 December 2024, bank guarantee amounted to Rp153,492 represents restricted cash placed in BRI as collateral for bank loan (Note 21).

b. Aset tidak lancar terdiri dari: / ***b. Other non-current assets consisted of:***

	31 Desember/ *December 2024*	31 Desember/ *December 2023*	
Uang muka *Train Loading Station* ("TLS")	409,365	-	*Cash advance for Train Loading Station ("TLS")*
Jaminan reklamasi dan penutupan tambang	303,645	261,046	*Reclamation and mine closure fund*
Lain-lain	146,319	109,759	*Others*
Jumlah	**859,329**	**370,805**	***Total***

10. INVESTASI / *10. INVESTMENTS*

a. Investasi pada ventura bersama / *a. Investments in joint ventures*

Jumlah yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in the consolidated financial statements are as follows:

	31 Desember/ *December 2024*	31 Desember/ *December 2023*	
Investasi pada ventura bersama			***Investments in joint ventures***
HBAP	5,913,902	4,569,200	*HBAP*
BPI	2,690,683	2,688,651	*BPI*
BATR	5,425	5,425	*BATR*
Jumlah	**8,610,010**	**7,263,276**	***Total***

Mutasi investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut:

The movements of investments in joint ventures are as follows:

	31 Desember/*December* 2024			
	HBAP	**BPI**	**BATR**	
Pada awal tahun	4,569,200	2,688,651	5,425	*At the beginning of the year*
Bagian laba	630,550	9,785	-	*Share of profit*
Penambahan investasi	467,818	-	-	*Addition of investments*
Penerimaan Dividen	-	(134,646)	-	*Proceeds from Dividend*
Efek translasi	246,334	126,893	-	*Translation effect*
Pada akhir tahun	**5,913,902**	**2,690,683**	**5,425**	***At the end of the year***

	31 Desember/*December* 2023			
	HBAP	**BPI**	**BATR**	
Pada awal tahun	3,956,399	2,557,273	5,425	*At the beginning of the year*
Bagian laba	405,855	165,448	-	*Share of profit*
Penambahan investasi	247,836	-	-	*Addition of investments*
Penerimaan Dividen	-	(9,240)	-	*Proceeds from Dividend*
Efek translasi	(40,890)	(24,830)	-	*Translation effect*
Pada akhir tahun	**4,569,200**	**2,688,651**	**5,425**	***At the end of the year***

Investasi pada ventura bersama yang dimiliki Grup adalah sebagai berikut:

Investments in joint ventures owned by the Group are as follows:

Nama entitas/ *Name of entity*	Lokasi usaha/ *Place of business*	% kepemilikan/ *% of ownership*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Metode pengukuran/ *Measurement method*
BATR	Indonesia	10.00%	Catatan/*Note a*	Ekuitas/*Equity*
BPI	Indonesia	59.75%	Catatan/*Note b*	Ekuitas/*Equity*
HBAP	Indonesia	45.00%	Catatan/*Note c*	Ekuitas/*Equity*

Catatan:

a) BATR didirikan untuk prasarana perkeretaapian batubara. Pada tanggal 31 Desember 2024, BATR belum beroperasi.
b) BPI melakukan perjanjian jual beli listrik dengan PLN untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap ("PLTU") Mulut Tambang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.
c) HBAP melakukan perjanjian jual beli listrik dengan PLN untuk PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 8 di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Sejak 7 Oktober 2023, HBAP sudah menjalankan kegiatan operasionalnya.

Notes:

a) BATR was established to operate a coal railway infrastructure. As at 31 December 2024, BATR was not yet in operation.
b) BPI entered into a power purchase agreement with PLN related to Mine Mouth Power Plant at Lahat Regency, South Sumatra.
c) HBAP entered into a power purchase agreement with PLN related to Mine Mouth Power Plant South Sumatra 8 at Muara Enim Regency, South Sumatra. As at 7 October 2023, HBAP has carried out its operational activities.

10. INVESTASI (lanjutan)

***10. INVESTMENTS** (continued)*

a. Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

***a. Investments in joint ventures** (continued)*

Berikut ini merupakan ringkasan informasi keuangan dari BPI, ventura bersama yang signifikan bagi Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

Below is the summarised financial information for BPI, a significant joint venture for the Group as at 31 December 2024 and 2023:

	31 Desember/ *December 2024*	**31 Desember/ *December 2023***	
Ringkasan laporan posisi keuangan			***Summarised statements of financial position***
Aset lancar			***Current assets***
Kas dan setara kas	337,869	209,818	*Cash and cash equivalents*
Aset keuangan	264,815	411,835	*Financial assets*
Aset lancar lainnya	367,838	262,061	*Other current assets*
Jumlah aset lancar	**970,522**	**883,714**	***Total current assets***
Aset tidak lancar			***Non-current assets***
Aset keuangan	4,101,620	4,217,120	*Financial assets*
Aset tidak lancar lainnya	318,167	213,520	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar	**4,419,787**	**4,430,640**	***Total non-current assets***
Jumlah aset	**5,390,309**	**5,314,354**	***Total assets***
Jumlah liabilitas jangka pendek	**(263,550)**	**(223,225)**	***Total current liabilities***
Jumlah liabilitas jangka panjang	**(623,524)**	**(591,295)**	***Total non-current liabilities***
Aset neto	**4,503,235**	**4,499,834**	***Net assets***

	31 Desember/ *December 2024*	**31 Desember/ *December 2023***	
Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			***Summarised statements of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan	944,897	1,068,125	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(681,622)	(791,553)	*Cost of revenue*
Beban umum dan administrasi	(118,513)	(92,586)	*General and administrative expenses*
Penghasilan keuangan	8,702	1,943	*Finance income*
(Beban)/penghasilan lainnya, neto	(59,054)	153,371	*Other (expenses)/ income, net*
Laba sebelum pajak penghasilan	94,410	339,300	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan	(78,034)	(62,385)	*Income tax expenses*
Laba tahun berjalan	**16,376**	**276,915**	***Profit for the year***
Penghasilan/ (kerugian) komprehensif lain	**212,373**	**(41,572)**	***Other comprehensive income/ (loss)***
Jumlah penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan	**228,749**	**235,343**	***Total other comprehensive income for the year***

10. INVESTASI (lanjutan)

***10. INVESTMENTS** (continued)*

a. Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

***a. Investments in joint ventures** (continued)*

Berikut ini merupakan ringkasan informasi keuangan dari HBAP, ventura bersama yang signifikan bagi Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

Below is the summarised financial information for HBAP, a significant joint venture for the Group as at 31 December 2024 and 2023:

	31 Desember/ *December 2024*	**31 Desember/ *December 2023***	
Ringkasan laporan posisi keuangan			***Summarised statements of financial position***
Aset lancar			***Current assets***
Kas dan setara kas	2,387,689	897,199	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	2,104,132	1,131,679	*Other current assets*
Jumlah aset lancar	**4,491,821**	**2,028,878**	***Total current assets***
Aset tidak lancar			***Non-current assets***
Aset keuangan	32,570,571	31,986,035	*Financial assets*
Aset tidak lancar lainnya	33,993	34,670	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar	**32,604,564**	**32,020,705**	***Total non-current assets***
Jumlah liabilitas jangka pendek	**(5,372,512)**	**(6,090,944)**	***Total current liabilities***
Liabilitas jangka panjang			***Non-current liabilities***
Liabilitas keuangan	(17,073,910)	(16,664,642)	*Financial liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya	(1,507,959)	(1,140,218)	*Other non-current liabilities*
Jumlah liabilitas jangka panjang	**(18,581,869)**	**(17,804,860)**	***Total non-current liabilities***
Aset neto	**13,142,004**	**10,153,779**	***Net assets***

	31 Desember/ *December 2024*	**31 Desember/ *December 2023***	
Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			***Summarised statements of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan	5,584,985	4,813,428	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(2,112,136)	(1,941,954)	*Cost of revenue*
Beban umum dan administrasi	(109,164)	(70,211)	*General and administrative expenses*
Biaya keuangan	(2,013,304)	(1,656,909)	*Finance costs*
Penghasilan keuangan	31,170	610	*Finance income*
Penghasilan/ (beban) lainnya, neto	159,016	(62,256)	*Other expenses, net*
Laba sebelum pajak penghasilan	1,540,567	1,082,708	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan	(139,344)	(180,824)	*Income tax expenses*
Laba tahun berjalan	**1,401,223**	**901,884**	***Profit for the year***
Penghasilan/ (kerugian) komprehensif lain	**547,411**	**(90,848)**	***Other comprehensive income/ (loss)***
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	**1,948,634**	**811,036**	***Total other comprehensive income for the year***

10. INVESTASI (lanjutan)

a. Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

Perusahaan telah menjaminkan seluruh saham yang dimilikinya di entitas HBAP baik yang dimiliki pada saat penandatanganan Akta Gadai Saham atau saham tambahan dimasa yang akan datang kepada China Export-Import Bank dalam rangka pemberian pinjaman untuk pendanaan proyek HBAP. Penjaminan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri BUMN pada tanggal 17 Mei 2018.

Pada tahun 2021, PLN telah mengajukan surat permintaan untuk menunda tanggal operasi komersial ("COD") pembangkit listrik milik HBAP. Pada bulan Juli 2022, PLN dan HBAP telah sepakat untuk melakukan beberapa penyesuaian atas *Power Purchase Agreement* ("PPA") yang terdiri dari penyesuaian tanggal operasi komersial pembangkit listrik milik HBAP dan penyesuaian lainnya.

Pada bulan Agustus 2022, HBAP menandatangani *side agreement* dengan PLN untuk menunda COD pembangkit listrik milik HBAP. Sebagai dampak atas penundaan tanggal operasi komersial tersebut, HBAP telah mengestimasi tambahan biaya konstruksi dan biaya operasional lainnya ("tambahan biaya"). Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan telah membukukan dampak dari tambahan biaya pada keuntungan neto entitas asosiasi dan ventura bersama.

Pada tanggal 7 Mei 2023, HBAP menyelesaikan penyaluran tegangan listrik untuk umpan tenaga listrik dari PLN *(backfeeding power)* dari jalur transmisi 275 kV Lumut Balai - Muara Enim ke PLTU HBAP.

PLTU HBAP telah memasuki fase COD sejak tanggal 7 Oktober 2023.

Ringkasan informasi keuangan atas investasi pada BATR tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

***10. INVESTMENTS** (continued)*

***a. Investments in joint ventures** (continued)*

The Company has pledged all of its existing share ownership in HBAP at the signing of the Deed of Shares Pledge and any future shares to the China Export-Import Bank as collateral for the loan obtained for the HBAP project. The guarantee was approved by the Minister of State-Owned Enterprise ("SOE") on 17 May 2018.

In 2021, PLN submitted a letter of request to delay the commercial operation date ("COD") of HBAP's power plant. In July 2022, PLN and HBAP agreed to adjust the Power Purchase Agreement ("PPA"), which consisted of adjusting the operation date of HBAP's power plant and other adjustments.

In August 2022, HBAP signed a side agreement with PLN to delay the commercial operation date of HBAP's power plant. As the impact of the delay of the COD of HBAP's power plants, HBAP has estimated additional construction costs and other operational costs ("additional costs"). As at 31 December 2022, the Company has recorded the impact from additional costs in share in net profit of associates and joint ventures.

On 7 May 2023, HBAP has succesfully carried out the distribution of voltage for electric power feed from PLN (backfeeding power) from the 275 kV transmission line Lumut Balai – Muara Enim to the HBAP's PLTU.

HBAP's PLTU has entered the COD phase since 7 October 2023.

The summary of financial information related to investments in BATR as at 31 December 2024 and 2023:

Tahun/ *Year*	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Rugi/ *Loss*	Penghasilan komprehensif lainnya/ *Other comprehensive income*	Jumlah rugi komprehensif/ *Total comprehensive loss*
2024	112,621	(259,029)	(241)	-	(241)
2023	112,685	(258,748)	(131)	-	(131)

10. INVESTASI (lanjutan) / ***10. INVESTMENTS** (continued)*

b. Kepentingan nonpengendali / ***b. Non-controlling interests***

Informasi kepentingan nonpengendali atas aset neto entitas anak adalah sebagai berikut:

Information on non-controlling interests in the net assets of subsidiaries is as follows:

Kepentingan nonpengendali atas aset neto entitas anak: / ***Non-controlling interests in the net assets of subsidiaries:***

	31 Desember/ *December 2024*	31 Desember/ *December 2023*	
IPC			***IPC***
Persentase kepemilikan 49%			*Percentage of ownership 49%*
Nilai tercatat - awal	149,348	231,811	*Carrying amount - beginning*
Bagian atas laba bersih	35,727	186,522	*Share of net income*
Deklarasi dividen	(25,837)	(268,985)	*Declaration of dividend*
	159,238	149,348	
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)			***Others (each below 5%)***
Nilai tercatat - awal	(20,690)	(20,833)	*Carrying amount - beginning*
Bagian atas (rugi)/ laba bersih	(24)	143	*Share of net (loss)/ income*
	(20,714)	(20,690)	
Jumlah kepentingan nonpengendali	**138,524**	**128,658**	***Total non-controlling interests***

Kepentingan nonpengendali atas laba/(rugi) entitas anak: / ***Non-controlling interests in income/(loss) of subsidiaries:***

	31 Desember/ *December 2024*	31 Desember/ *December 2023*	
IPC	35,727	186,522	*IPC*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp5.000)	(24)	143	*Others (each below Rp5,000)*
Jumlah	**35,703**	**186,665**	***Total***

Seluruh entitas ventura bersama dan asosiasi adalah perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar kuotasian yang tersedia atas saham perusahaan tersebut. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai investasi pada entitas asosiasi cukup untuk menutupi adanya kerugian penurunan nilai investasi pada entitas asosiasi.

All joint venture and associates are unlisted private companies, and there are no quoted market prices available for their shares. Management believes that the allowance for impairment of investments in associates is sufficient to cover any impairment losses on the investments in associates.

11. PROPERTI PENAMBANGAN / *11. MINING PROPERTIES*

	31 Desember/*December 2024*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan/ *Currency differences due to financial statement translations***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Area yang telah menemukan cadangan terbukti						***Areas with proven reserves***
Nilai perolehan						***Acquisition costs***
Tambang yang berproduksi						*Producing mines*
- Perusahaan						*The Company -*
Muara Tiga Besar	472,556	51,223	-	-	523,779	*Muara Tiga Besar*
Banko Barat	621,634	11,104	-	-	632,738	*Banko Barat*
Air Laya	936,599	31,853	-	-	968,452	*Air Laya*
Banko Tengah	1,879,112	156,464	-	-	2,035,576	*Banko Tengah*
- Entitas anak						*Subsidiaries -*
IPC - Palaran	375,807	18,893	-	(7,855)	386,845	*IPC - Palaran*
BBK - Bukit Kendi	9,662	-	-	-	9,662	*BBK - Bukit Kendi*
Subjumlah	**4,295,370**	**269,537**	**-**	**(7,855)**	**4,557,052**	***Subtotal***
Tambang dalam pengembangan						*Mines under development*
- Perusahaan						*The Company -*
Peranap	42,551	-	-	-	42,551	*Peranap*
Jumlah	**4,337,921**	**269,537**	**-**	**(7,855)**	**4,599,603**	***Total***
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortisation***
Tambang yang berproduksi						*Producing mines*
- Perusahaan						*The Company -*
Muara Tiga Besar	(177,710)	(20,935)	-	-	(198,645)	*Muara Tiga Besar*
Banko Barat	(114,558)	(36,593)	-	-	(151,151)	*Banko Barat*
Air Laya	(273,187)	(13,260)	-	-	(286,447)	*Air Laya*
Banko Tengah	(72,197)	(44,312)	-	-	(116,509)	*Banko Tengah*
Subjumlah	**(637,652)**	**(115,100)**	**-**	**-**	**(752,752)**	***Subtotal***
- Entitas anak						*Subsidiaries -*
IPC - Palaran	(325,314)	(13,606)	-	7,464	(331,456)	*IPC - Palaran*
BBK - Bukit Kendi	(9,662)	-	-	-	(9,662)	*BBK - Bukit Kendi*
Jumlah	**(972,628)**	**(128,706)**	**-**	**7,464**	**(1,093,870)**	***Total***
Penyisihan penurunan nilai	**(93,636)**	**-**	**-**	**-**	**(93,636)**	***Provision for impairment***
Nilai buku bersih	**3,271,657**				**3,412,097**	***Net book value***

11. PROPERTI PENAMBANGAN (lanjutan) / ***11. MINING PROPERTIES** (continued)*

	31 Desember/*December* 2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan/ *Currency differences due to financial statement translations***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Area yang telah menemukan cadangan terbukti						***Areas with proven reserves***
Nilai perolehan						***Acquisition costs***
Tambang yang berproduksi						*Producing mines*
- Perusahaan						*The Company -*
Muara Tiga Besar	445,629	26,927	-	-	472,556	*Muara Tiga Besar*
Banko Barat	485,104	136,530	-	-	621,634	*Banko Barat*
Air Laya	807,619	128,980	-	-	936,599	*Air Laya*
Banko Tengah	651,003	208,214	1,019,895	-	1,879,112	*Banko Tengah*
- Entitas anak						*Subsidiaries -*
IPC - Palaran	384,896	-	-	(9,089)	375,807	*IPC - Palaran*
BBK - Bukit Kendi	9,662	-	-	-	9,662	*BBK - Bukit Kendi*
Subjumlah	**2,783,913**	**500,651**	**1,019,895**	**(9,089)**	**4,295,370**	***Subtotal***
Tambang dalam pengembangan						*Mines under development*
- Perusahaan						*The Company -*
Banko Tengah	1,019,895	-	(1,019,895)	-	-	*Banko Tengah*
Peranap	42,551	-	-	-	42,551	*Peranap*
Jumlah	**3,846,359**	**500,651**	**-**	**(9,089)**	**4,337,921**	***Total***
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortisation***
Tambang yang berproduksi						*Producing mines*
- Perusahaan						*The Company -*
Muara Tiga Besar	(161,000)	(16,710)	-	-	(177,710)	*Muara Tiga Besar*
Banko Barat	(101,650)	(12,908)	-	-	(114,558)	*Banko Barat*
Air Laya	(262,467)	(10,720)	-	-	(273,187)	*Air Laya*
Banko Tengah	(16,880)	(55,317)	-	-	(72,197)	*Banko Tengah*
Subjumlah	**(541,997)**	**(95,655)**	**-**	**-**	**(637,652)**	***Subtotal***
- Entitas anak						*Subsidiaries -*
IPC - Palaran	(327,357)	(11,817)	-	13,860	(325,314)	*IPC - Palaran*
BBK - Bukit Kendi	(9,662)	-	-	-	(9,662)	*BBK - Bukit Kendi*
Jumlah	**(879,016)**	**(107,472)**	**-**	**13,860**	**(972,628)**	***Total***
Penyisihan penurunan nilai	**(93,636)**	**-**	**-**	**-**	**(93,636)**	***Provision for impairment***
Nilai buku bersih	**2,873,707**				**3,271,657**	***Net book value***

Seluruh amortisasi properti penambangan dialokasikan ke beban pokok pendapatan.

All of the amortisation of mining properties was allocated to the cost of revenue.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai properti penambangan cukup untuk menutup kerugian penurunan nilai properti penambangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Management is of the opinion that the provision for the impairment of mining properties is adequate for covering any losses from the impairment of mining properties as at 31 December 2024 and 2023.

12. ASET TETAP / *12. FIXED ASSETS*

	31 Desember/*December* 2024						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan/ *Currency differences due to financial statement translations***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan							***Acquisition costs***
Kepemilikan langsung							*Direct ownership*
Tanah	994,243	4,337	-	35,565	7,079	1,041,224	*Land*
Bangunan	2,771,811	8,723	(8,660)	639,012	783	3,411,669	*Buildings*
Mesin, peralatan dan kendaraan	9,968,353	579,768	(188,626)	177,790	1,680	10,538,965	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	202,855	10,742	-	3,961	113	217,671	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**13,937,262**	**603,570**	**(197,286)**	**856,328**	**9,655**	**15,209,529**	***Subtotal***
Aset dalam penyelesaian	980,783	806,259	-	(856,328)	-	930,714	*Construction in progress*
Aset hak guna							*Right-of-use asset*
Bangunan	11,896	-	(1,376)	-	-	10,520	*Buildings*
Mesin, peralatan dan kendaraan	2,133,723	412,182	(167,667)	-	-	2,378,238	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	6,415	-	(3,435)	-	-	2,980	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**2,152,034**	**412,182**	**(172,478)**	**-**	**-**	**2,391,738**	***Subtotal***
Jumlah	**17,070,079**	**1,822,011**	**(369,764)**	**-**	**9,655**	**18,531,981**	***Total***
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung							*Direct ownership*
Bangunan	(1,037,967)	(181,005)	8,660	-	(654)	(1,210,966)	*Buildings*
Mesin, peralatan dan kendaraan	(6,283,022)	(745,158)	162,978	-	(978)	(6,866,180)	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	(171,675)	(17,011)	-	-	(86)	(188,772)	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**(7,492,664)**	**(943,174)**	**171,638**	**-**	**(1,718)**	**(8,265,918)**	***Subtotal***
Aset hak guna							*Right-of-use asset*
Bangunan	(5,004)	(2,771)	1,376	-	-	(6,399)	*Buildings*
Mesin dan peralatan kendaraan	(937,122)	(711,008)	167,667	-	-	(1,480,463)	*Machinery and equipment vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	(7,488)	(3,491)	3,435	-	-	(7,544)	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**(949,614)**	**(717,270)**	**172,478**	**-**	**-**	**(1,494,406)**	***Subtotal***
Jumlah	**(8,442,278)**	**(1,660,444)**	**344,116**	**-**	**(1,718)**	**(9,760,324)**	***Total***
Cadangan penurunan nilai	(61,591)	-	25,648	-	-	(35,943)	*Allowance for impairment*
Nilai buku bersih	**8,566,210**					**8,735,714**	***Net book value***

12. ASET TETAP (lanjutan) / ***12. FIXED ASSETS** (continued)*

	31 Desember/*December* 2023						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan/ *Currency differences due to financial statement translations***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan							***Acquisition costs***
Kepemilikan langsung							*Direct ownership*
Tanah	958,287	1,065	-	36,565	(1,674)	994,243	*Land*
Bangunan	2,678,388	2,906	(12,908)	103,531	(106)	2,771,811	*Buildings*
Mesin, peralatan dan kendaraan	8,917,859	771,072	(20,138)	299,697	(137)	9,968,353	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	190,220	18,976	(6,328)	-	(13)	202,855	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**12,744,754**	**794,019**	**(39,374)**	**439,793**	**(1,930)**	**13,937,262**	***Subtotal***
Aset dalam penyelesaian	555,886	738,717	-	(313,820)	-	980,783	*Construction in progress*
Aset hak guna							*Right-of-use asset*
Bangunan	25,694	932	(14,730)	-	-	11,896	*Buildings*
Mesin, peralatan dan kendaraan	2,272,579	367,419	(380,302)	(125,973)	-	2,133,723	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	18,832	287	(12,704)	-	-	6,415	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**2,317,105**	**368,638**	**(407,736)**	**(125,973)**	**-**	**2,152,034**	***Subtotal***
Jumlah	**15,617,745**	**1,901,374**	**(447,110)**	**-**	**(1,930)**	**17,070,079**	***Total***
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung							*Direct ownership*
Bangunan	(914,182)	(127,401)	3,637	-	(21)	(1,037,967)	*Buildings*
Mesin, peralatan dan kendaraan	(5,155,568)	(1,075,263)	10,060	(62,229)	(22)	(6,283,022)	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	(165,670)	(12,524)	6,522	-	(3)	(171,675)	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**(6,235,420)**	**(1,215,188)**	**20,219**	**(62,229)**	**(46)**	**(7,492,664)**	***Subtotal***
Aset hak guna							*Right-of-use asset*
Bangunan	(19,676)	(58)	14,730	-	-	(5,004)	*Buildings*
Mesin dan peralatan kendaraan	(876,113)	(503,540)	380,302	62,229	-	(937,122)	*Machinery and equipment vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	(14,894)	(5,298)	12,704	-	-	(7,488)	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**(910,683)**	**(508,896)**	**407,736**	**62,229**	**-**	**(949,614)**	***Subtotal***
Jumlah	**(7,146,103)**	**(1,724,084)**	**427,955**	**-**	**(46)**	**(8,442,278)**	***Total***
Cadangan penurunan nilai	(61,591)	-	-	-	-	(61,591)	*Allowance for impairment*
Nilai buku bersih	**8,410,051**					**8,566,210**	***Net book value***

12. ASET TETAP (lanjutan)

Grup menyewa berbagai mesin, peralatan, kendaraan, dan alat berat berdasarkan perjanjian sewa yang tidak dapat dibatalkan. Masa sewa berkisar antara dua sampai lima tahun dan Grup memegang kepemilikan atas aset. Tidak ada dari aset sewa tersebut yang disewakan kembali oleh Grup kepada pihak ketiga.

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dialokasikan sebagai berikut:

***12. FIXED ASSETS** (continued)*

The Group leases machinery, equipment, vehicles and heavy equipment under non-cancellable lease agreements. The lease terms are between two and five years, and ownership of the assets lies within the Group. None of the leased assets were sub-leased by the Group to third parties.

Depreciation expense for year ended on 31 December 2024 and 2023 was allocated as follows:

	31 Desember/ *December* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	
Beban pokok pendapatan (Catatan 28a)	1,361,436	1,412,333	*Cost of revenue (Note 28a)*
Beban di luar beban pokok pendapatan	299,008	311,751	*Expenses other than cost of revenue*
Jumlah	**1,660,444**	**1,724,084**	***Total***

Nilai tercatat bruto aset tetap yang disusutkan penuh tetapi masih digunakan oleh Grup adalah sebesar:

The gross amount of fully depreciated fixed assets which were still being used by the Group amounted to the following:

	31 Desember/ *December* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	
Bangunan	173,171	182,758	*Buildings*
Mesin, peralatan, dan kendaraan	2,080,848	1,517,097	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	142,656	134,868	*Office and hospital equipment*
Jumlah	**2,396,675**	**1,834,723**	***Total***

Sebagian besar tanah yang dimiliki oleh Grup masih dalam proses pengurusan sertifikat.

Most of the land rights owned by the Group are still in the certification process.

Aset tetap tertentu termasuk alat tambang utama yang berada di Area Pertambangan Tanjung Enim, Pelabuhan Kertapati, Pelabuhan Tarahan, Pelabuhan Teluk Bayur, Area Pertambangan Ombilin, Unit Pengusahaan Briket dan beberapa lokasi lain telah diasuransikan pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) untuk semua risiko dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp14,78 triliun (nilai penuh) pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: Rp12,76 triliun (nilai penuh)). Manajemen Grup berpendapat bahwa aset tetap telah diasuransikan secara memadai pada 31 Desember 2024 dan 2023.

Certain fixed assets, including the main mining equipment located in the Tanjung Enim Mine Area, Kertapati Port, Tarahan Port, Teluk Bayur Port, Ombilin Mine Area, Coal Briquette Operating Unit, and several other locations were insured with PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) for all risks with the sum insured amounting to Rp14.78 trillion (full amount) as at 31 December 2024 and (31 December 2023: Rp12.76 trillion (full amount)). The Group's management is of the opinion that the fixed assets were adequately insured at 31 December 2024 and 2023.

12. ASET TETAP (lanjutan)

***12. FIXED ASSETS** (continued)*

Jika aset tetap Perusahaan dicatat sebesar nilai wajar maka jumlahnya adalah sebesar:

If the fixed assets of the Company were stated on a fair value basis, the amounts would be as follows:

	31 Desember/ *December* 2024		31 Desember/ *December* 2023		
	Nilai buku/ *Book value*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai buku/ *Book value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Tanah	502,771	3,729,109	467,206	3,487,710	*Land*
Bangunan	2,165,710	2,858,624	1,690,794	2,243,285	*Buildings*
Mesin dan peralatan	2,976,146	6,643,371	3,520,198	5,891,023	*Machinery and equipment*
Jumlah	**5,644,627**	**13,231,104**	**5,678,198**	**11,622,018**	***Total***

Selain tanah, bangunan, mesin dan peralatan tidak ada perbedaan yang material antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya.

There is no material difference between the fair value and carrying value of fixed assets, other than land, buildings, machinery and equipment.

Penentuan nilai wajar aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan laporan penilai independen dari Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Amin, Nirwan, Alfiantori, dan Rekan tanggal 7 Maret 2025. Metode penilaian ditentukan dengan pendekatan data pasar dan pendekatan biaya. Penilai independen melakukan perbandingan beberapa transaksi jual beli dari aset serupa untuk menentukan nilai wajar aset tersebut dan menghitung biaya untuk membuat aset serupa (hierarki nilai wajar tingkat 1 dan 3). Penentuan nilai wajar aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 adalah setelah mempertimbangkan nilai wajar 31 Desember 2023 dan pergerakan nilai buku sampai dengan Desember 2024.

The determination of the fair value of the property, plant and equipment as at 31 December 2024 was based on an appraisal report from Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Amin, Nirwan, Alfiantori, and Rekan dated 7 March 2025. The valuation method was determined through the market data approach and cost approach. An independent appraiser compares several sale and purchase transactions in the market for similar items to determine the fair value of those assets and measure cost to acquire similar assets (fair value hierarchy level 1 and 3). The determination of the fair value of the property, plant and equipment as at 31 December 2024 was after considering the fair value as at 31 December 2023 and the movement of the book value up to December 2024.

Aset dalam penyelesaian

Construction in progress

Aset dalam penyelesaian merupakan proyek yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

Construction in progress represents projects that have not been completed as at the date of the consolidated statements of financial position with details as follows:

	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	Akumulasi biaya/ *Accumulated costs*	Tahun perkiraan penyelesaian/ *Estimated year of completion*	
31 Desember 2024				*31 December 2024*
TLS VI & VII (TE - KERAMASAN)	7.01%	327,518	Juni/ *June 2025*	*TLS VI & VII (TE - KERAMASAN)*
Pengadaan tanah Tarahan	95.00%	197,090	Desember/ *December* 2025	*Tarahan land procurement*
Kawasan Industri Tanjung Enim – Bukit Asam Coal Based Industrial Estate Tahap 1 – 3 (Industri Batubara) (sebelumnya Kawasan Ekonomi Khusus (Industri Batubara))	2.71%	126,197	Desember/ *December* 2039	*Kawasan Industri Tanjung Enim Bukit Asam Coal Based Industrial Estate Phase 1 - 3 (Coal Industry) (previously Kawasan Ekonomi Khusus (Coal Industry))*
Pembangunan Clubhouse Golf TE	99.00%	36,774	Juni/ *June* 2025	*Construction of Clubhouse Golf TE*
Revitalisasi Kawasan Heritage Ombilin	75.39%	34,165	Juni/ *June* 2025	*Revitalization of the Ombilin Heritage Area*
Revitalisasi GSG & Command Center	67.26%	27,320	Juni/ *June* 2025	*Revitalization of GSG % Command Center*

12. ASET TETAP (lanjutan) / *FIXED ASSETS (continued)*

Aset dalam penyelesaian (lanjutan) / ***Construction in progress** (continued)*

	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	Akumulasi biaya/ *Accumulated costs*	Tahun perkiraan penyelesaian/ *Estimated year of completion*	
31 Desember 2024 (lanjutan)				*31 December 2024 (continued)*
Lainnya	15% sd 85%	181,650	Desember/ *December* 2025	*Others*
Jumlah		**930,714**		***Total***

	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	Akumulasi biaya/ *Accumulated costs*	Tahun perkiraan penyelesaian/ *Estimated year of completion*	
31 Desember 2023				*31 December 2023*
Kawasan Industri Tanjung Enim – Bukit Asam Coal Based Industrial Estate Tahap 1 – 3 (Industri Batubara) (sebelumnya Kawasan Ekonomi Khusus (Industri Batubara))	2.70%	142,812	Desember/ *December 2039*	*Kawasan Industri Tanjung Enim Bukit Asam Coal Based Industrial Estate Phase 1 - 3 (Coal Industry) (previously Kawasan Ekonomi Khusus (Coal Industry))*
Konstruksi kapal	89.82%	140,519	Maret/ *March* 2024	*Ship construction*
Betonisasi jalan tambang	37.00%	126,606	September/ *September 2024*	*Mine road concreting*
Revitalisasi kantor	97.00%	122,977	Juni/ June 2024	*Office revitalisation*
Pengadaan tanah Tarahan	75.00%	88,543	Desember/ *December* 2024	*Tarahan land procurement*
Rumah Dinas Duren Tiga	99.00%	80,579	Maret/ *March* 2024	*Duren Tiga Employee Housing*
Pemindahan *Bucket-wheel Excavator ("BWE")* 204 ke Banko	82.60%	57,967	Juni/ *June* 2024	*Transfer of Bucket-wheel excavator ("BWE")204 to Banko*
Lainnya	7.31% sd 95%	220,780	Desember/*December* 2024 - 2025	*Others*
Jumlah		**980,783**		***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai aset tetap telah dibentuk secara memadai.

As at 31 December 2024 and 2023, management believed that allowance for impairment of the carrying values of fixed assets was adequate.

13. *GOODWILL*

Saldo *Goodwill* sebesar Rp102.077 merupakan saldo yang timbul karena akuisisi kepemilikan atas SBS sebagai akibat dari pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas milik SBS pada tanggal akuisisi.

13. GOODWILL

Goodwill balance amounting to Rp102,077 represents the balance arising from acquisition of ownership in SBS, as a result of fair value measurement of assets and liabilities owned by SBS as at the acquisition date.

13. *GOODWILL* (lanjutan)

Grup menggunakan pendekatan pendapatan untuk menguji penurunan nilai UPK tertentu. Pendekatan pendapatan didasarkan atas nilai arus kas masa depan yang akan dihasilkan oleh suatu bisnis. Metode diskonto arus kas meliputi proyeksi arus kas dan mendiskontokannya menjadi nilai kini. Proses pendiskontoan menggunakan tingkat pengembalian yang sesuai dengan risiko terkait dengan bisnis atau aset dan nilai waktu uang.

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan jumlah terpulihkan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

13. *GOODWILL* (lanjutan)

The Group used an income approach to assess the impairment value of certain CGUs. The income approach is predicated upon the value of the future cash flows that a business will generate going forward. The discounted cash flow method was used which involves projecting cash flows and converting it to a present value equivalent through discounting. The discounting process uses a rate of return that is commensurate with the risk associated with the business or asset and the time value of money.

The key assumptions used for recoverable amount calculations as at 31 December 2024 and 2023 are as follows:

	31 Desember/ *December* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	
Tingkat pertumbuhan jangka panjang	3.00%	3.00%	*Long-term growth rate*
Tingkat diskonto sebelum pajak (untuk perhitungan nilai pakai)	12.27%	12.27%	*Discount rate before tax (for value in use)*

Asumsi utama lainnya termasuk pendapatan dan biaya operasi jangka panjang.

Manajemen menentukan asumsi utama berdasarkan kombinasi pengalaman masa lalu dan sumber eksternal.

Nilai wajar yang ditentukan dalam perhitungan nilai aset yang dapat dipulihkan diklasifikasikan sebagai Tingkat 3 dalam hierarki nilai wajar.

Berdasarkan hasil pengujian penurunan nilai *goodwill* pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak ada rugi penurunan nilai yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Other key assumptions include the long-term operating revenue and expenses.

Management determines key assumptions based on a combination of past experience and external sources.

The fair value determined in the calculation of the recoverable amount of assets is classified as Level 3 in the fair value hierarchy.

Based on the results of the test for impairment of goodwill as at 31 December 2024 and 2023, there is no impairment loss recorded as at 31 December 2024 and 2023.

14. UTANG USAHA / *14. TRADE PAYABLES*

Akun ini merupakan liabilitas usaha kepada pihak ketiga dan berelasi dengan rincian sebagai berikut:

This account represents liabilities to third parties and related parties with the details as follows:

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah	1,886,699	1,056,458	*Rupiah*
Dolar AS	1,842	16	*US Dollars*
Euro	1,735	1,704	*Euro*
	1,890,276	1,058,178	
Pihak berelasi (Catatan 31b)			*Related parties (Note 31b)*
Rupiah	879,166	892,847	*Rupiah*
Dolar AS	150,570	131,163	*US Dollars*
	1,029,736	1,024,010	
Jumlah utang usaha	**2,920,012**	**2,082,188**	***Total trade payable***

Saldo utang usaha terutama berasal dari pembelian bahan bakar, suku cadang, jasa perbaikan dan pemeliharaan, jasa pengangkutan batubara, dan jasa penambangan batubara.

Trade payables balances mainly arose from the purchase of fuel, spare parts, repair and maintenance services, coal transportation services and coal mining services.

15. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *15. ACCRUED EXPENSES*

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Jasa angkutan batubara	1,459,077	786,964	*Coal transportation services*
Jasa penambangan	1,332,017	2,139,376	*Mining services*
Aset dalam penyelesaian	528,635	329,477	*Construction in progress*
Sewa alat berat	356,425	408,524	*Heavy equipments rent*
Jasa pihak ketiga	243,816	331,237	*Third party services*
Bahan bakar minyak	212,493	-	*Fuel*
Suku cadang dan peralatan	167,095	479,852	*Spare parts and equipment*
Angkutan kapal laut	62,475	2,721	*Boat transportation*
Sumbangan	9,483	41,645	*Donations*
Lainnya	398,717	338,034	*Others*
Jumlah	**4,770,233**	**4,857,830**	***Total***

Lihat Catatan 31b untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 31b for information on the details of transactions and balances with related parties.

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK / *16. SHORT-TERM EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES*

Pada tanggal 31 Desember 2024, liabilitas imbalan kerja jangka pendek terdiri dari akrual bonus karyawan dan tantiem sebesar Rp665.730 (31 Desember 2023: Rp852.007).

As at 31 December 2024, short-term employee benefit liabilities consisted of employee bonuses and tantiem accruals amounting to Rp665,730 (31 December 2023: Rp852,007).

17. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA / *17. OTHER CURRENT LIABILITIES*

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Pendapatan diterima di muka	117,906	95,449	*Unearned revenue*
Lainnya	178,535	173,078	*Others*
Jumlah	**296,441**	**268,527**	***Total***

18. PERPAJAKAN / *18. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid taxes*

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Pajak penghasilan badan:			*Corporate income taxes:*
Pasal 28A	89,786	25,370	*Article 28A*
Pajak lainnya:			*Other taxes:*
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	3,318,520	2,528,981	*Value Added Tax ("VAT")*
Jumlah	**3,408,306**	**2,554,351**	***Total***

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Pajak penghasilan badan:			*Corporate income taxes:*
Pasal 25	61,871	8,247	*Article 25*
Pasal 29	136,494	286,929	*Article 29*
Subjumlah	198,365	295,176	*Subtotal*
Pajak lainnya:			*Other taxes:*
PBB	178,488	128,118	*PBB*
PPN	248,099	147,870	*VAT*
Pasal 23/26	136,892	70,267	*Article 23/26*
Pasal 21	49,588	145,083	*Article 21*
Pasal 22	3,439	4,680	*Article 22*
Pasal 15	1,314	627	*Article 15*
Subjumlah	617,820	496,645	*Subtotal*
Jumlah	**816,185**	**791,821**	***Total***

c. Beban pajak penghasilan / *c. Income tax expenses*

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Perusahaan			***The Company***
Kini	1,246,304	1,725,736	*Current*
Penyesuaian tahun lalu	(165,008)	42,578	*Prior year's adjustment*
Tangguhan	(75,527)	(50,298)	*Deferred*
Entitas anak			***Subsidiaries***
Kini	104,283	181,224	*Current*
Tangguhan	9,771	(37,448)	*Deferred*
Konsolidasian			***Consolidated***
Kini	1,350,587	1,906,960	*Current*
Penyesuaian tahun lalu	(165,008)	42,578	*Prior year's adjustment*
Tangguhan	(65,756)	(87,746)	*Deferred*
Jumlah pajak penghasilan	**1,119,823**	**1,861,792**	***Total income tax expenses***

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan dengan taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

***18. TAXATION** (continued)*

***c. Income tax expenses** (continued)*

The reconciliation between the profit before income tax of the Company and the Company's estimated taxable income for the year ended on 31 December 2024 and 2023 is as follows:

	31 Desember/ *December* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	6,259,246	8,154,313	*Consolidated profit before income tax*
Dikurangi:			*Less:*
Laba sebelum pajak penghasilan - entitas anak	(706,776)	(804,255)	*Profit before income tax - subsidiaries*
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	**5,552,470**	**7,350,058**	***Profit before income tax - the Company***
Koreksi pajak:			***Fiscal corrections:***
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	12,602	316,946	*Provision for environmental reclamation and mine closure*
Properti penambangan	(214,452)	(447,635)	*Mining properties*
Liabilitas imbalan pascakerja	414,839	122,559	*Post-employment benefit liabilities*
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	143,331	327,370	*Difference between commercial and tax net book value of fixed assets*
Selisih liabilitas sewa dengan pembayaran liabilitas sewa	(3,445)	5,420	*Difference between lease liabilities and right-of-use assets*
Penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai piutang	11,822	(96,025)	*Provision for obsolete inventories and impairment of receivables*
Sumbangan	65,117	102,346	*Donations*
Bagian atas keuntungan neto entitas asosiasi dan ventura bersama	(640,337)	(571,303)	*Share in net profit of associates and joint ventures*
Penghasilan kena pajak final	(239,228)	(581,149)	*Income subject to final tax*
Penyesuaian penjualan atas penetapan PP 15	299,273	1,133,882	*Sales adjustment upon application of GR 15*
Lainnya	264,911	181,785	*Others*
	114,433	494,196	
Taksiran penghasilan kena pajak - Perusahaan	**5,666,903**	**7,844,254**	***Estimated taxable income - the Company***
Beban pajak penghasilan - kini Perusahaan	**1,246,304**	**1,725,736**	***Current income tax expenses - the Company***

18. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***18. TAXATION** (continued)*

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan) / ***c. Income tax expenses** (continued)*

Rekonsiliasi antara beban pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba akuntansi sebelum manfaat pajak penghasilan dan beban pajak seperti yang dilaporkan dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

The reconciliation between tax expenses computed using the prevailing tax rates on the accounting profit before income tax benefit and the tax expenses as reported in profit or loss is as follows:

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	**6,259,246**	**8,154,313**	***Consolidated profit before income tax***
Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku sebesar 22%	1,377,034	1,793,949	*Tax expense computed using the prevailing tax rate of 22%*
Penghasilan kena pajak final	(143,268)	(218,490)	*Income subject to final tax*
Sumbangan	14,326	22,516	*Donations*
Bagian atas keuntungan neto entitas asosiasi dan ventura bersama	(140,874)	(125,687)	*Share in net profit of associates and joint venture*
Penyesuaian tahun lalu	(165,008)	42,578	*Sales adjustment upon*
Penyesuaian penjualan atas penetapan PP 15	65,840	249,454	*Sales adjustment upon application of GR 15*
Lainnya	111,773	97,472	*Others*
Beban pajak penghasilan konsolidasian	**1,119,823**	**1,861,792**	***Consolidated corporate income tax***

Perhitungan pajak penghasilan kini dilakukan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan saat SPT tahunan disampaikan ke DJP.

Current income tax computations are based on estimated taxable income. The amounts may be adjusted when annual tax returns are submitted to DGT.

d. Pajak tangguhan / ***d. Deferred tax***

Perhitungan beban pajak dan aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The computation of deferred income tax expenses and deferred tax assets is as follows:

	31 Desember/*December* 2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dikreditkan ke laba rugi/ *Credited to profit or loss*	Dibebankan ke pendapatan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Perusahaan					***The Company***
Aset pajak tangguhan, neto					***Deferred tax assets, net***
Liabilitas imbalan pascakerja	1,072,395	91,265	(15,633)	1,148,027	*Post-employment benefit liabilities*
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	445,516	2,773	-	448,289	*Provision for environmental reclamation and mine closure*
Penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai piutang	57,928	2,601	-	60,529	*Provision for obsolete inventories and impairment of receivables*
Penurunan nilai aset tidak lancar	21,991	(4,706)	-	17,285	*Impairment for non-current assets*
Selisih liabilitas sewa dengan nilai buku aset-hak-guna	10,855	(758)	-	10,097	*Difference between lease liabilities and right-of-use assets*
Properti penambangan	(458,075)	(47,179)	-	(505,254)	*Mining properties*
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	22,895	31,531	-	54,426	*Difference between commercial and tax book value of fixed assets*
Manfaat pajak tangguhan		75,527	(15,633)		*Deferred tax benefits*
Jumlah aset pajak tangguhan, neto	1,173,505			1,233,399	*Total deferred tax assets, net*

18. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***18. TAXATION** (continued)*

d. Pajak tangguhan (lanjutan) / ***d. Deferred tax** (continued)*

	31 Desember/*December* 2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dikreditkan ke laba rugi/ *Credited to profit or loss***	**Dibebankan ke pendapatan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Entitas anak					***Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan					***Deferred tax assets***
Penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai piutang	14,036	-	-	14,036	*Provision for obsolete inventories and impairment of receivables*
Rugi pajak yang dapat dibawa ke masa depan	1,003	-	-	1,003	*Tax loss carry-forward*
Lainnya	20,139	(9,771)	-	10,368	*Others*
Total aset pajak tangguhan	35,178	(9,771)	-	25,407	*Total deferred tax assets*
Liabilitas pajak tangguhan					***Deferred tax liabilities***
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	(23,525)	-	-	(23,525)	*Difference between commercial and tax book value of fixed assets*
Pembayaran liabilitas sewa	(53,701)	-	-	(53,701)	*Payment for lease liabilities*
Total liabilitas pajak tangguhan	(77,226)	-	-	(77,226)	*Total deferred tax liabilities*
Beban pajak tangguhan		(9,771)	-		*Deferred tax expenses*
Konsolidasian					***Consolidated***
Aset pajak tangguhan	1,208,683			1,258,806	*Deferred tax assets*
Liabilitas pajak tangguhan	(77,226)			(77,226)	*Deferred tax liabilities*
Manfaat pajak tangguhan		65,756	(15,633)		*Deferred tax benefits*

	31 Desember/*December* 2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dikreditkan ke laba rugi/ *Credited to profit or loss***	**Dikreditkan ke pendapatan komprehensif lain/ *Credited to other comprehensive income***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Perusahaan					***The Company***
Aset pajak tangguhan, neto					***Deferred tax assets, net***
Liabilitas imbalan pascakerja	816,700	26,963	228,732	1,072,395	*Post-employment benefit liabilities*
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	375,788	69,728	-	445,516	*Provision for environmental reclamation and mine closure*
Penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai piutang	79,054	(21,126)	-	57,928	*Provision for obsolete inventories and impairment of receivables*
Penurunan nilai aset tidak lancar	21,991	-	-	21,991	*Impairment for non-current assets*
Selisih liabilitas sewa dengan nilai buku aset-hak-guna	9,663	1,192	-	10,855	*Difference between lease liabilities and right-of-use assets*
Properti penambangan	(359,595)	(98,480)	-	(458,075)	*Mining properties*
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	(49,126)	72,021	-	22,895	*Difference between commercial and tax book value of fixed assets*
Manfaat pajak tangguhan		50,298	228,732		*Deferred tax benefits*
Jumlah aset pajak tangguhan, neto	894,475			1,173,505	*Total deferred tax assets, net*

18. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***18. TAXATION** (continued)*

d. Pajak tangguhan (lanjutan) / ***d. Deferred tax** (continued)*

	31 Desember/*December* 2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dikreditkan ke laba rugi/ *Credited to profit or loss***	**Dikreditkan ke pendapatan komprehensif lain/ *Credited to other comprehensive income***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Entitas anak					***Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan					***Deferred tax assets***
Penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai piutang	14,036	-	-	14,036	*Provision for obsolete inventories and impairment of receivables*
Rugi pajak yang dapat dibawa ke masa depan	1,003	-	-	1,003	*Tax loss carry-forward*
Lainnya	7,809	12,330	-	20,139	*Others*
Total aset pajak tangguhan	22,848	12,330	-	35,178	*Total deferred tax assets*
Liabilitas pajak tangguhan					***Deferred tax liabilities***
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	(23,525)	-	-	(23,525)	*Difference between commercial and tax book value of fixed assets*
Pembayaran liabilitas sewa	(78,819)	25,118	-	(53,701)	*Payment for lease liabilities*
Total liabilitas pajak tangguhan	(102,344)	25,118	-	(77,226)	*Total deferred tax liabilities*
Beban pajak tangguhan		37,448	-		*Deferred tax expenses*
Konsolidasian					***Consolidated***
Aset pajak tangguhan	917,323			1,208,683	*Deferred tax assets*
Liabilitas pajak tangguhan	(102,344)			(77,226)	*Deferred tax liabilities*
Manfaat pajak tangguhan		87,746	228,732		*Deferred tax benefits*

e. Administrasi / ***e. Administration***

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, perusahaan-perusahaan di dalam Grup yang berdomisili di Indonesia menghitung, menetapkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Under the Taxation Laws of Indonesia, the companies within the Group which are domiciled in Indonesia submit their tax returns on the basis of self-assessment. The DGT may assess and amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

f. Sengketa pajak / ***f. Tax disputes***

PBB / ***PBB***

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ("SPPT") atas PBB sebagai berikut:

As at the date of these consolidated financial statements, the Company had received the following Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB") and Notification of Tax Due ("SPPT") on PBB as follows:

Jenis pajak/ *Tax type*	**Tahun pajak/ *Fiscal year***	**KPP penerbit/ *Issuing tax office***	**Surat ketetapan pajak/ *Assessment letter***	**Periode surat ketetapan pajak/ *Period of tax assessment letter***	**Jumlah berdasarkan keputusan terakhir/ *Amount based on the latest decision* (dalam jutaan/ *in millions*)**	**Jumlah (kompensasi)/ pembayaran terakhir/ *Total latest (compensation)/ payment* (dalam jutaan/ *in millions*)**	**Status/ *Status***
PBB	2007	KPP Prabumulih	SKPKB	Desember/ *December* 2013	109	(153,558)[a)]	Peninjauan kembali oleh DJP/ *Judicial review by DGT*
PBB	2011	KPP Prabumulih	SPPT	October/ *October* 2024	48,466 [c)]	48,466	Peninjauan kembali oleh Perusahaan/ *Judicial review by Company*

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

***18. TAXATION** (continued)*

f. Sengketa pajak (lanjutan)

***f. Tax disputes** (continued)*

PBB (lanjutan)

***PBB** (continued)*

Jenis pajak/ *Tax type*	Tahun pajak/ *Fiscal year*	KPP penerbit/ *Issuing tax office*	Surat ketetapan pajak/ *Assessment letter*	Periode surat ketetapan pajak/ *Period of tax assessment letter*	Jumlah berdasarkan keputusan terakhir/ *Amount based on the latest decision* (dalam jutaan/ *in millions*)	Jumlah (kompensasi)/ pembayaran terakhir/ *Total latest (compensation)/ payment* (dalam jutaan/ *in millions*)	Status/ *Status*
PBB	2012	KPP Prabumulih	SPPT	Agustus/ *August* 2012	49,984	49,984	Peninjauan kembali oleh Perusahaan/ *Judicial review by the Company*
PBB	2012	KPP Prabumulih	SPPT	Agustus/ *August* 2012	49,984[c)]	49,984	Peninjauan kembali oleh DJP/ *Judicial review by DGT*
PBB	2012	KPP Lahat	SPPT	Agustus/ *August* 2012	19,655	(354)	Peninjauan kembali oleh Perusahaan/ *Judicial review by the Company*
PBB	2015	KPP Prabumulih	SPPT	September/ *September* 2024	35,833	35,740[b)]	Peninjauan kembali oleh DJP ditolak/ *Judicial review by DGT has been rejected*
PBB	2015	KPP Lahat	SPPT	Agustus/ *August* 2024	3,340	(1,639)[b)]	Peninjauan kembali oleh DJP Ditolak/ *Judicial review by DGT has been rejected*
PBB	2016	KPP Prabumulih	SPPT	April/*April* 2016	68,106	(7,299)[b]	Peninjauan kembali oleh DJP ditolak/ *Judicial review by The DGT Has Been Rejeted*
PBB	2019	KPP Prabumulih	SPPT	Juni/*June* 2020	214,737	121,880	Banding/ *Appeal*
PBB	2019	KPP Lahat	SPPT	Juni/*June* 2020	47,932	25,255	Banding/*Appeal*
PBB	2023	KPP Prabumulih	SKPKB	November/ *November* 2024	187,030	-	Keberatan/ *Objection*
PBB	2023	KPP Lahat	SKPKB	November/ *November* 2024	37,928	-	Keberatan/ *Objection*
PBB	2024	KPP Prabumulih	SPPT	Juni/*June* 2024	334,603	256,931	Keberatan ditolak/ *Objection has been rejected*
PBB	2024	KPP Lahat	SPPT	Juni/*June* 2024	44,504	25,750	Keberatan ditolak/ *Objection has been rejected*

Catatan:
a) Kompensasi berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ("SPMKP") tertanggal 21 Februari 2018 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki lebih bayar PBB sebesar Rp293 miliar (nilai penuh), dari sengketa pajak tahun 2004-2008, 2009-2010 dan 2014. Pada Februari 2018, Perusahaan telah menerima restitusi pajak sebesar Rp176 miliar (nilai penuh). Jumlah sisanya Rp111 miliar (nilai penuh) akan dikompensasikan untuk sengketa PBB tahun 2015, 2016 dan 2017.
b) Kompensasi atas sengketa pajak PBB tahun 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp35 miliar, Rp28 miliar dan Rp47 miliar (nilai penuh).
c) Perusahaan menerima informasi bahwa PBB Tahun 2011 dan 2012 telah dilakukan upaya hukum PK oleh DJP ditahun 2024.

Notes:
a) Compensation based on SPMKP dated 21 February 2018 stated the Company has overpayment on PBB amounting to Rp 293 billion (full amount), from PBB dispute 2004-2008, 2009-2010, and 2014. On February 2018, the Company received payment for a tax refund amounting to Rp176 billion (full amount). The remaining balance amounting to Rp111 billion (full amount) is compensated to PBB dispute year 2015, 2016 and 2017.
b) Compensation for the 2015, 2016 and 2017 PBB disputes, amounted to Rp35 billion, Rp28 billion and Rp47 billion (full amount), respectively.
c) The Company received information that the 2011 and 2012 PBB had been subject to a PK legal action by the Directorate General of Taxes in 2024.

Pajak Penghasilan

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan telah menerima SKPKB atas pajak penghasilan sebagai berikut:

Income Tax

As at the date of these consolidated financial statements, the Company had received the following SKPKB on income tax as follows:

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

18. *TAXATION* *(continued)*

f. Sengketa pajak (lanjutan)

f. Tax disputes *(continued)*

Pajak Penghasilan (lanjutan)

Income Tax *(continued)*

Jenis pajak/ *Tax type*	Tahun pajak/ *Fiscal year*	KPP penerbit/ *Issuing tax office*	Surat ketetapan pajak/ *Assessment letter*	Periode surat ketetapan pajak/ *Period of tax assessment letter*	Jumlah berdasarkan keputusan terakhir/ *Amount based on the latest decision* (dalam jutaan/ *in millions*)	Jumlah (kompensasi)/ pembayaran terakhir/ *Total latest (compensation)/ payment* (dalam jutaan/ *in millions*)	Status/ *Status*
PPh 23	2011	KPP Wajib Pajak Besar 3	SKPKB	Desember/ *December* 2012	38,600	38,600	Peninjauan kembali oleh Perusahaan/ *Judicial review by Company*
PPh badan	2016	KPP Wajib Pajak Besar 3	SKPLB	Mei/ *May* 2024	(102,471)	103,194	Peninjauan kembali oleh DJP ditolak/ *Judicial review by the Company has been rejected*
PPh badan	2017	KPP Wajib Pajak Besar 3	SKPKB	September/ *September* 2022	13,882	13,882	Banding/ *Appeal*
PPh badan	2020	KPP Wajib Pajak Besar 3	SKPKB	Januari/ *January* 2024	33,354	33,354	Keberatan/ *Objection*

19. PROVISI REKLAMASI LINGKUNGAN DAN PENUTUPAN TAMBANG

Penyisihan dilakukan atas reklamasi lingkungan dan penutupan tambang yang berhubungan dengan reklamasi dan bagian provisi penutupan tambang pada saat berakhirnya masa tambang dan kegiatan reklamasi yang berjalan dari tahun ke tahun. Mutasi nilai provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

19. PROVISION FOR ENVIRONMENTAL RECLAMATION AND MINE CLOSURE

The provision for environmental reclamation and mine closure relates to the reclamation and mine closure provision to be incurred at the end of the life of the mine and ongoing reclamation activities from year to year. Movements in the provision for environmental reclamation and mine closure were as follows:

		Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang/ *Provision for environmental reclamation and mine closure*				
Nama/ *Name*	Lokasi/ *Location*	1 Januari/ *January* 2024	Penambahan/ (pengurangan)/ *Additions/ (deductions)*	Akresi/ *Accretion*	Pengeluaran reklamasi lingkungan/ *Reclamation expenditure*	31 Desember/ *December* 2024
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Air Laya	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	438,755	31,853	20,694	(125,186)	366,116
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Muara Tiga Besar	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	323,511	51,223	18,654	(38,746)	354,642
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Banko Barat	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	547,308	11,104	32,073	(62,529)	527,956
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Sawahlunto	Ombilin - Sumatera Barat/ *West Sumatra*	5,409	-	-	-	5,409
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Bukit Kendi	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	55,431	-	-	(3,522)	51,909
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Peranap	Peranap - Riau/ *Riau*	6,875	-	-	-	6,875
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* IPC	Kalimantan Timur/ *East Kalimantan*	36,372	18,893	-	(18,266)	36,999
IUP Operasi Produksi/- *Operation Production* Banko Tengah	Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	703,219	156,464	37,980	(120,986)	776,677
Jumlah/*Total*		**2,116,880**	**269,537**	**109,401**	**(369,235)**	**2,126,583**

19. PROVISI REKLAMASI LINGKUNGAN DAN PENUTUPAN TAMBANG (lanjutan)

19. *PROVISION FOR ENVIRONMENTAL RECLAMATION AND MINE CLOSURE (continued)*

Nama/ *Name*	Lokasi/ *Location*	Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang/ *Provision for environmental reclamation and mine closure* — 1 Januari/ *January* 2023	Penambahan/ (pengurangan)/ *Additions/ (deductions)*	Akresi/ *Accretion*	Pengeluaran reklamasi lingkungan/ *Reclamation expenditure*	31 Desember/ *December* 2023
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Air Laya	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	417,574	128,979	17,533	(125,331)	438,755
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Muara Tiga Besar	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	322,380	26,927	17,719	(43,515)	323,511
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Banko Barat	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	428,963	136,530	24,929	(43,114)	547,308
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Sawahlunto	Ombilin - Sumatera Barat/ *West Sumatra*	5,409	-	-	-	5,409
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Bukit Kendi	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	51,663	3,768	-	-	55,431
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Peranap	Peranap - Riau/ *Riau*	6,875	-	-	-	6,875
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* IPC	Kalimantan Timur/ *East Kalimantan*	33,100	3,272	-	-	36,372
IUP Operasi Produksi/- *Operation Production* Banko Tengah	Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	526,932	208,213	27,893	(59,819)	703,219
Jumlah/*Total*		**1,792,896**	**507,689**	**88,074**	**(271,779)**	**2,116,880**

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Saldo akhir tahun	2,126,583	2,116,880	*Balance at the end of the year*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	**(384,692)**	**(329,190)**	***Current portion***
Bagian jangka panjang	**1,741,891**	**1,787,690**	***Non-current portion***

Estimasi manajemen atas jumlah provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang adalah sebesar Rp2.126.583 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: Rp2.116.880) sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti yang diungkapkan pada Catatan 2v.

Management's estimate of total environmental reclamation and mine closure provisions amounts to Rp2,126,583 for the year ended on 31 December 2024 (31 December 2023: Rp2,116,880) in accordance with the accounting policies disclosed in Note 2v.

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The key assumptions used for the provision of environmental reclamation and mine closure calculations as at 31 December 2024 and 2023 are as follows:

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Tingkat inflasi	2.92%	3.60%	*Inflation rate*
Tingkat diskonto	6.72% - 7.11%	6,36% - 6,88%	*Discount rate*

Manajemen berkeyakinan bahwa pencadangan yang dilakukan telah mencukupi taksiran kewajiban yang akan timbul pada saat realisasi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang.

Management believes that the provision is adequate to cover the liability that will arise at the time of environmental reclamation and mine closure realisation.

20. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA / *20. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES*

Liabilitas imbalan karyawan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaria independen, Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan.

Employee benefit liabilities as at 31 December 2024 and 31 December 2023 were calculated by an independent actuary, Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari penyisihan, beban dan mutasi saldo penyisihan untuk imbalan pensiun, imbalan kesehatan pascakerja dan imbalan kerja lainnya:

The following table summarises the provision, expenses and movements in the obligation for pension benefits, post-employment healthcare benefits and other employment benefits:

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Kewajiban posisi keuangan untuk:			*Financial position obligations for:*
Imbalan pensiun	111,359	204,699	*Pension benefits*
Imbalan kesehatan pascakerja	4,882,067	4,458,003	*Post-employment healthcare benefits*
Imbalan kerja lainnya	224,895	191,130	*Other employment benefits*
Jumlah	**5,218,321**	**4,853,832**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	**(238,754)**	**(228,521)**	***Current portion***
Bagian jangka panjang	**4,979,567**	**4,625,311**	***Non-current portion***

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Dibebankan pada laba rugi konsolidasian:			*Charged to consolidated profit or loss:*
Imbalan pensiun	24,935	34,511	*Pension benefits*
Imbalan kesehatan pascakerja	477,026	319,608	*Post-employment healthcare benefits*
Imbalan kerja lainnya	50,772	56,828	*Other employment benefits*
	552,733	**410,947**	
Pengukuran kembali untuk:			*Remeasurements for:*
Imbalan pensiun	(108,547)	(27,772)	*Pension benefits*
Imbalan kesehatan pascakerja	42,276	1,055,041	*Post-employment healthcare benefits*
Imbalan kerja lainnya	(4,788)	12,422	*Other employment benefits*
	(71,059)	**1,039,691**	

20. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan) / *20. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (continued)*

a. Imbalan pensiun / *a. Pension benefits*

Perusahaan telah menerima persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Kep-245/KM.6/2003 tanggal 21 Oktober 2002 untuk mendirikan dana pensiun terpisah, Dana Pensiun Bukit Asam, di mana pekerja tertentu, setelah memenuhi periode bakti tertentu, berhak atas imbalan pasti saat pensiun, cacat atau kematian, serta imbalan kesehatan pascakerja.

The Company received approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. Kep-245/KM.6/2003 dated 21 October 2002 to establish a separate pension fund, Dana Pensiun Bukit Asam. After serving a qualifying period, certain employees are entitled to defined benefits upon retirement, disability or death, and also post-employment healthcare benefits.

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Nilai kini kewajiban yang didanai	(2,048,426)	(2,126,519)	*Present value of funded obligation*
Nilai wajar aset program	1,937,067	1,921,820	*Fair value of plan assets*
Jumlah liabilitas imbalan pascakerja	(111,359)	(204,699)	*Total post-employment benefit liabilities*

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The movement in the defined benefit obligations for the year ended on 31 December 2024 were as follows:

	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligation*	Nilai wajar aset program/*Fair value of plan assets*	Jumlah/ *Total*	
1 Januari 2024	**2,126,519**	**(1,921,820)**	**204,699**	***1 January 2024***
Biaya jasa kini	9,010	-	9,010	*Current service cost*
Biaya/(penghasilan) bunga	145,825	(129,900)	15,925	*Interest cost/(income)*
Subjumlah yang diakui dalam laba rugi	**154,835**	**(129,900)**	**24,935**	***Subtotal amounts recognised in profit or loss***
Pengukuran kembali diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya:				*Remeasurement recognised as other comprehensive income:*
Laba dari perubahan asumsi keuangan	(61,189)	-	(61,189)	*Laba from changes in financial assumptions*
Laba dari perubahan asumsi demografi	(245)	-	(245)	*Gain from changes in demographic assumptions*
Penyesuaian pengalaman dari nilai kini kewajiban	(75,615)	-	(75,615)	*Experience adjustment on obligation*
Hasil dari aset program	-	28,502	28,502	*Return on plan assets*
Subjumlah biaya diakui dalam penghasilan komprehensif lain	**(137,049)**	**28,502**	**(108,547)**	***Subtotal expenses recognised in other comprehensive income***
Iuran yang dibayar:				*Contributions paid by:*
Grup	-	(9,728)	(9,728)	*The Group*
Pembayaran manfaat oleh:				*Benefits paid by:*
Aset program	(95,879)	95,879	-	*Plan assets*
31 Desember 2024	**2,048,426**	**(1,937,067)**	**111,359**	***31 December 2024***

20. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

20. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

a. Imbalan pensiun (lanjutan)

a. Pension benefits *(continued)*

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

The movements in the defined benefit obligations during the year ended on 31 December 2023 were as follows:

	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligation*	Nilai wajar aset program/*Fair value of plan assets*	Jumlah/ *Total*	
1 Januari 2023	**2,097,578**	**(1,712,286)**	**385,292**	***1 January 2023***
Biaya jasa kini	11,029	-	11,029	*Current service cost*
Biaya/(penghasilan) bunga	155,850	(132,368)	23,482	*Interest cost/(income)*
Subjumlah yang diakui dalam laba rugi	**166,879**	**(132,368)**	**34,511**	***Subtotal amounts recognised in profit or loss***
Pengukuran kembali diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya:				*Remeasurement recognised as other comprehensive income:*
Laba dari perubahan asumsi demografi	(201,137)	-	(201,137)	*Gain from changes in demographic assumptions*
Rugi dari perubahan asumsi keuangan	140,991	-	140,991	*Losses from changes in financial assumptions*
Penyesuaian pengalaman dari nilai kini kewajiban	2,468	-	2,468	*Experience adjustment on obligation*
Hasil dari aset program	-	29,906	29,906	*Return on plan assets*
Subjumlah biaya diakui dalam penghasilan komprehensif lain	**(57,678)**	**29,906**	**(27,772)**	***Subtotal expenses recognised in other comprehensive income***
Iuran yang dibayar:				*Contributions paid by:*
Grup	-	(187,332)	(187,332)	*The Group*
Pembayaran manfaat oleh:				*Benefits paid by:*
Aset program	(80,260)	80,260	-	*Plan assets*
31 Desember 2023	**2,126,519**	**(1,921,820)**	**204,699**	***31 December 2023***

Jumlah yang diakui pada laba rugi adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in profit or loss are as follows:

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Biaya jasa kini	9,010	11,029	*Current service costs*
Iuran karyawan ke dalam aset program	(1,031)	(1,126)	*Employee contributions to plan assets*
Biaya bunga	16,956	24,608	*Interest cost*
Jumlah	**24,935**	**34,511**	***Total***

20. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

a. Imbalan pensiun (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024, dari total beban, Rp12,60 miliar (31 Desember 2023: Rp17,44 miliar) (nilai penuh) dan Rp12,33 miliar (31 Desember 2023: Rp17,07 miliar) (nilai penuh) masing-masing dimasukkan sebagai "Beban pokok pendapatan" dan "Beban umum dan administrasi".

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman di setiap wilayah. Di Indonesia, asumsi mortalitas yang digunakan adalah GAM 1971 *male*.

20. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

a. Pension benefits *(continued)*

As at 31 December 2024, of the total charge, Rp12.60 billion (31 December 2023: Rp17.44 billion) (full amount) and Rp12.33 billion (31 December 2023: Rp17.07 billion) (full amount) were included in "Cost of revenue" and "General and administrative expenses", respectively.

Assumptions regarding future mortality are based on actuarial advice in accordance with published statistics and experience in each territory. In Indonesia, the mortality assumptions used are based on the GAM 1971 male.

	31 Desember/ *December* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	
Tingkat diskonto	7.11%	6.86%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	11.50%	11.50%	*Pension basic income rate*
Tingkat mortalitas yang diterapkan untuk karyawan aktif dan pensiunan	100% GAM 1971	100% GAM 1971	*Mortality rate applied for active employee and pensioners*

Sensitivitas liabilitas pensiun secara keseluruhan terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the overall pension liability to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	**Dampak terhadap liabilitas secara keseluruhan (nilai penuh)/*Impact on overall liability (full amount)***	
31 Desember/ *December* 2024			
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* Rp215 miliar/*billion* naik/*increase by* Rp257 miliar/*billion*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	naik/*increase by* Rp10 miliar/*billion* turun/*decrease by* Rp9 miliar/*billion*	*Increase pension basic income rate*
31 Desember/ *December* 2023			
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* Rp237 miliar/*billion* naik/*increase by* Rp287 miliar/*billion*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	naik/*increase by* Rp12 miliar/*billion* turun/*decrease by* Rp12 miliar/*billion*	*Increase pension basic income rate*

20. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan) / *POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (continued)*

a. Imbalan pensiun (lanjutan) / *Pension benefits (continued)*

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial di mana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir tahun) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption, with all other assumptions remaining constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined benefit obligation calculated by the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statement of financial position.

Komposisi nilai wajar aset program / ***Composition of fair value assets programme***

Surat berharga negara	62.57%	*Government bonds*
Obligasi	16.10%	*Bonds*
Sukuk	6.95%	*Sukuk*
Tanah dan bangunan	5.61%	*Land and buildings*
Saham	5.23%	*Stocks*
Deposito berjangka	2.62%	*Time deposits*
Lainnya	0.92%	*Others*
Jumlah	**100%**	***Total***

b. Imbalan kesehatan pascakerja / *Post-employment healthcare benefits*

Perusahaan memiliki beberapa skema imbalan kesehatan pascakerja. Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dengan skema pensiun imbalan pasti. Seluruh program ini tidak didanai.

The Company operates a number of post-employment healthcare benefits schemes. The method of accounting, assumptions and the frequency of valuations are similar to those used for defined benefit pension schemes. All of these plans are unfunded.

Total liabilitas imbalan kesehatan pascakerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 ditentukan sebagai berikut:

Post-employment healthcare benefit liabilities recognised in the consolidated statements of financial position as at 31 December 2024 and 2023 are computed as follows:

	31 Desember/ *December* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	
Nilai kini kewajiban	4,882,067	4,458,003	*Present value of obligation*

20. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

20. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

b. Imbalan kesehatan pascakerja (lanjutan)

b. Post-employment healthcare benefits *(continued)*

Nilai kini imbalan kesehatan pascakerja adalah sebagai berikut:

Present values of post-employment healthcare benefits are as follows:

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Saldo awal	**4,458,003**	**3,166,609**	***Beginning balance***
Biaya jasa kini	167,057	84,329	*Current service cost*
Biaya bunga	309,969	235,279	*Interest cost*
	477,026	319,608	
Pengukuran kembali diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya:			*Remeasurement recognised as other comprehensive income:*
Rugi dari perubahan asumsi keuangan	1,928,994	1,176,423	*Losses from change in financial assumptions*
Laba dari perubahan asumsi demografi	(2,040,091)	(536,620)	*Gain from change in demographics assumptions*
Penyesuaian pengalaman dari nilai kini kewajiban	153,373	415,238	*Experience adjustment on present value of obligation*
	42,276	1,055,041	
Pembayaran manfaat oleh Grup	(95,238)	(83,255)	*Benefit paid by the Group*
Saldo akhir	**4,882,067**	**4,458,003**	***Ending balance***

Jumlah yang diakui pada laba rugi adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in profit or loss were as follows:

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Biaya jasa kini	167,057	84,329	*Current service cost*
Biaya bunga	309,969	235,279	*Interest cost*
Jumlah tercakup dalam biaya karyawan	477,026	319,608	*Total included in employee costs*

Pada tanggal 31 Desember 2024, dari total beban, Rp241,06 miliar (31 Desember 2023: Rp161,51 miliar) (nilai penuh) dan Rp235,97 miliar (31 Desember 2023: Rp158,10 miliar) (nilai penuh) masing-masing dimasukkan sebagai "Beban pokok pendapatan" dan "Beban umum dan administrasi".

As at 31 December 2024, of the total charges, Rp241.06 billion (31 December 2023: Rp161.51 billion) (full amount) and Rp235.97 billion (31 December 2023: Rp158.10 billion) (full amount) were included in "Cost of revenue" and "General and administrative expenses", respectively.

20. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

20. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

b. Imbalan kesehatan pascakerja (lanjutan)

b. Post-employment healthcare benefits *(continued)*

Berikut asumsi pokok aktuaria yang digunakan:

Below are the principal actuarial assumptions used:

	31 Desember/ *December* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	
Tingkat diskonto untuk jaminan kesehatan	7.12%	6.95%	*Discount rate for healthcare benefits*
Tren biaya kesehatan	11.50%	9.30%	*Medical cost trend*
Tingkat mortalitas yang diterapkan untuk karyawan aktif dan pensiunan	100% GAM 1971	100% GAM 1971	*Mortality rate applied for active employee and pensioners*

Sensitivitas liabilitas imbalan kesehatan pascakerja secara keseluruhan terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the overall post-employment healthcare benefits liability to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	**Dampak terhadap liabilitas secara keseluruhan (nilai penuh)/ *Impact on overall liability (full amount)***	
31 Desember/ *December* 2024			
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1%	turun/*decrease by* Rp821 miliar/*billion*	*Discount rate*
	penurunan/*decrease by* 1%	naik/*increase by* Rp1.114 miliar/*billion*	
Tren biaya kesehatan	kenaikan/*increase by* 1%	naik/*increase by* Rp1.077 miliar/*billion*	*Medical cost trend*
	penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* Rp816 miliar/*billion*	
31 Desember/ *December* 2023			
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1%	turun/*decrease by* Rp682 miliar/*billion*	*Discount rate*
	penurunan/*decrease by* 1%	naik/*increase by* Rp895 miliar/*billion*	
Tren biaya kesehatan	kenaikan/*increase by* 1%	naik/*increase by* Rp887 miliar/*billion*	*Medical cost trend*
	penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* Rp691 miliar/*billion*	

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial di mana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi.

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated.

Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti kesehatan atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti kesehatan dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir tahun) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

When calculating the sensitivity of the defined medical benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined medical benefit obligation is calculated by using the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statement of financial position.

20. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

20. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

c. Imbalan kerja lainnya

Selain imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja, Perusahaan juga memberikan imbalan pascakerja lainnya berupa:

Program lainnya:

- Program untuk pengunduran diri dan cacat; dan
- Imbalan pascakerja lainnya berdasarkan UU dan peraturan perusahaan.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya:

- Imbalan pascakerja untuk penghargaan purnakarya; dan
- Imbalan kerja jangka panjang lainnya berdasarkan peraturan perusahaan.

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

c. Other employment benefits

Other than pension benefits and post-employment healthcare benefits, the Company also provides its employees with several other employee benefits:

Other benefits:

- *Program for resignation and disability; and*
- *Other post-employment benefits based on laws and company's regulations.*

Other long-term employee benefits:

- *Employment benefit for post-service reward; and*
- *Other long-term employee benefits based on company's regulations.*

The amounts recognised in the consolidated statements of financial position are determined as follows:

	31 Desember/ *December* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	
Program lainnya	58,117	55,356	*Other benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	166,778	135,774	*Other long-term employee benefits*
Nilai kini kewajiban imbalan kerja lainnya	224,895	191,130	*Present value of other employment benefits*

20. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

20. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

c. Imbalan kerja lainnya (lanjutan)

c. Other employment benefits *(continued)*

Mutasi kewajiban imbalan pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The movement in the defined benefit obligations for the year ended on 31 December 2024 and 2023 is as follows:

Program lainnya / ***Other programmes***

	Nilai kini kewajiban/*Present value obligation*		
	31 Desember/ *December* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	
Awal tahun	**55,356**	**37,915**	***At the beginning of the year***
Biaya jasa kini	6,012	5,159	*Current service cost*
Biaya bunga	3,792	2,802	*Interest cost*
	9,804	7,961	
Pengukuran kembali diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya:			*Remeasurement recognised as other comprehensive income:*
(Laba)/rugi dari perubahan asumsi keuangan	(1,599)	2,843	*(Gain)/loss from changes in financial assumptions*
Rugi dari perubahan Asumsi demografi	457	13,431	*Loss from changes in demographic assumptions*
Penyesuaian pengalaman dari nilai kini kewajiban	(3,645)	(3,852)	*Experience adjustment on present value of obligation*
	(4,787)	12,422	
Pembayaran manfaat oleh: Grup	(2,256)	(2,942)	*Benefits paid by the plan: The Group*
Akhir tahun	**58,117**	**55,356**	***At the end of the year***

Imbalan jangka panjang lainnya / ***Other long-term employee benefits***

	Nilai kini kewajiban/*Present value obligation*		
	31 Desember/ *December* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	
Awal tahun	**135,774**	**101,766**	***At the beginning of the year***
Biaya jasa kini	17,624	35,849	*Current service costs*
Biaya bunga	9,300	7,521	*Interest cost*
	26,924	43,370	
Pengukuran kembali diakui pada laba rugi:			*Remeasurement recognised in profit or loss:*
(Laba)/rugi dari perubahan asumsi keuangan	(4,875)	7,801	*(Gain)/loss from changes in financial assumptions*
(Laba)/rugi dari perubahan asumsi demografi	(3,866)	1,913	*(Gain)/loss from changes in demographic assumptions*
Penyesuaian pengalaman dari nilai kini kewajiban	22,785	(4,217)	*Experience adjustment on present value of obligation*
	14,044	5,497	
Pembayaran manfaat oleh: Grup	(9,964)	(14,859)	*Benefits paid by the plan: The Group*
Akhir tahun	**166,778**	**135,774**	***At the end of the year***

20. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

20. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

c. Imbalan kerja lainnya (lanjutan)

c. Other employment benefits *(continued)*

Jumlah yang diakui pada laba rugi adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in profit or loss were as follows:

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Biaya jasa kini	23,636	41,008	*Current service costs*
Biaya bunga	13,092	10,323	*Interest expenses*
Pengukuran kembali diakui pada laba rugi:			*Remeasurement recognised in profit or loss:*
(Laba)/rugi dari perubahan asumsi keuangan	(4,875)	7,801	*(Gain)/losses from changes in financial assumptions*
Rugi dari perubahan asumsi demografi	(3,866)	1,913	*Losses from changes in demographic assumptions*
Penyesuaian pengalaman dari nilai kini kewajiban	22,785	(4,217)	*Experience adjustment on present value of obligation*
Jumlah tercakup dalam biaya karyawan	**50,772**	**56,828**	***Total included in employee costs***

Pada tanggal 31 Desember 2024, dari total beban, Rp25,66 miliar (nilai penuh) (31 Desember 2023: Rp28,72 miliar (nilai penuh)) dan Rp25,12 miliar (nilai penuh) (31 Desember 2023: Rp28,11 miliar (nilai penuh)) masing-masing dimasukkan pada "Beban pokok pendapatan" dan "Beban umum dan administrasi".

As at 31 December 2024, of the total charges, Rp25.66 billion (full amount) (31 December 2023: Rp28.72 billion (full amount)) and Rp25.12 billion (full amount) (31 December 2023: Rp28.11 billion (full amount)) were included in "Cost of revenue" and "General and administrative expenses", respectively.

Berikut asumsi pokok aktuaria yang digunakan:

The principal actuarial assumptions used are as follows:

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Tingkat diskonto untuk imbalan kerja lainnya	6.96%	6.85%	*Discount rate for other employment benefits*
Kenaikan gaji masa datang	10.00%	10.00%	*Future salary increases*

20. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

20. *POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES* *(continued)*

c. Imbalan kerja lainnya (lanjutan)

c. *Other employment benefits* *(continued)*

Sensitivitas liabilitas imbalan kerja lainnya terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the overall other employment benefits liability to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	**Dampak terhadap liabilitas secara keseluruhan (nilai penuh)/ *Impact on overall liability (full amount)***	
31 Desember/ *December* 2024			
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* Rp25 miliar/*billion* naik/*increase by* Rp29 miliar/*billion*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by 1*%	naik/*decrease by* Rp30 miliar/*billion* turun/*increase by* Rp26 miliar/*billion*	*Salary growth rate*
31 Desember/ *December* 2023			
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* Rp20 miliar/*billion* naik/*increase by* Rp23 miliar/*billion*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by 1*%	naik/*decrease by* Rp24 miliar/*billion* turun/*increase by* Rp21 miliar/*billion*	*Salary growth rate*

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial di mana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi.

The sensitivity analysis is based on a change in one assumption, while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated.

Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti kesehatan atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti kesehatan dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir tahun) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

When calculating the sensitivity of the defined medical benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined medical benefit obligation calculated by the projected unit credit method at the end of the period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statement of financial position.

d. Program pensiun iuran pasti

d. *Defined contribution pension plan*

Perusahaan juga menyelenggarakan program pensiun iuran pasti ("PPIP") untuk semua karyawan tetapnya. Program tersebut dikelola oleh DPLK BNI, bersama-sama disebut sebagai pengelola PPIP. Kontribusi dihitung secara periodik oleh pengelola PPIP. Para karyawan mengkontribusikan 3% dari gaji dasar dan perusahaan berkontribusi sebesar 20,5%, 21%, dan 22,5% dari gaji dasar karyawan untuk mencapai jumlah yang dibutuhkan. Jumlah kontribusi yang dibayar ke dana pensiun lembaga keuangan dimaksud untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 December 2024 sebesar Rp75.42 miliar (nilai penuh) (2023: Rp71.95 miliar) (nilai penuh).

The Company also has a defined contribution pension programme covering all of its qualified permanent employees. The programme is managed by DPLK BNI, collectively referred to as defined contribution fund manager. Contributions are computed periodically by the fund manager, whereby the employees contribute 3% of their basic salary and the Company contributes 20.5%, 21%, and 22.5% of the employee's basic salary to achieve the required amounts. Total contributions paid to the pension fund for the year ended on 31 December 2024 amounted to Rp75,42 billion (full amount) (2023: Rp71,95 billion) (full amount).

20. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

20. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

e. Manajemen risiko terkait program imbalan kerja

Perusahaan terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti dan program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

Volatilitas aset

Perusahaan hanya memiliki aset program untuk kewajiban manfaat pensiun, yang dikelola oleh DPBA. Untuk manfaat kesehatan pascakerja dan manfaat jangka panjang lainnya, Grup melakukan investasi secara sendiri dan tidak memiliki atau mendirikan aset program.

Kewajiban program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Terkait dengan program manfaat pensiun, investasi didiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada surat utang negara, meskipun DPBA juga berinvestasi pada obligasi, properti, sukuk, deposito berjangka, instrumen saham, reksadana, dan kontrak investasi kolektif. DPBA meyakini bahwa surat utang negara memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

Harapan umur hidup

Manfaat pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program. Sementara itu, imbalan kerja jangka panjang lainnya diberikan pada saat karyawan berhenti bekerja.

e. Risk management related to employee benefit programme

The Company is exposed to a number of risks through its defined benefit pension plans and post-employment healthcare plans. The most significant risks areas are as follows:

Asset volatility

The Company only has plan assets for its pension benefits, which are managed by DPBA. For its post-employment healthcare and other long-term benefits, the Group does not establish plan assets and only manages its liability through investments in the corporate level.

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields. If plan assets underperform this yield, this will create a deficit.

In relation to the pension benefit programme, investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact on the overall level of assets. The largest proportion of assets is invested in government bonds, although DPBA also invests in bonds, property, sukuk, time deposits, equity instruments, mutual funds, and collective investment contract. DPBA believes that government bonds offer the best returns over the long term with an acceptable level of risk.

Life expectancy

Pension benefits and post-employment healthcare benefits are to provide benefits for the life of the member, so increases in life expectancy will result in an increase in the plans' liabilities. Meanwhile, other post-employment benefits are provided to employees while they are retired.

20. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

20. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

e. Manajemen risiko terkait program imbalan kerja (lanjutan)

e. Risk management related to employee benefit programme *(continued)*

Harapan umur hidup (lanjutan)

Rata-rata durasi kewajiban untuk pensiun, imbalan kesehatan pascakerja, dan imbalan kerja lainnya, masing-masing adalah 16,48 tahun, 19,43 tahun dan 19,69 tahun.

Perubahan imbal hasil obligasi

Penurunan imbal hasil obligasi korporasi akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara sebagian dengan kenaikan dari nilai obligasi program yang dimiliki.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pensiun, imbalan kesehatan pascakerja, dan imbalan kerja lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Life expectancy (continued)

The weighted average durations of the pension benefits, post-employment healthcare benefits and other benefits are 16.48 years, 19.43 years and 19.69 years, respectively.

Changes in bond yields

A decrease in corporate bond yields will increase the plan's liabilities, although this will be partially offset by an increase in the value of the plan's bond holdings.

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits, post-employment healthcare benefits and other employment benefits is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year*	1 sampai 5 tahun/ *Between 1-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Jumlah/ *Total*	
Imbalan pensiun	100,971	397,889	1,549,566	2,048,426	*Pension benefits*
Imbalan kesehatan pascakerja	124,855	533,624	4,223,589	4,882,068	*Post-employment healthcare benefits*
Imbalan kerja lainnya	12,928	43,312	168,655	224,895	*Other employment benefits*
Jumlah	**238,754**	**974,825**	**5,941,810**	**7,155,389**	***Total***

21. PINJAMAN BANK

21. BANK BORROWINGS

	Jumlah tercatat/Carrying amount		
	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Pinjaman bank			***Bank borrowings***
BNI	1,250,000	-	*BNI*
BRI	147,680	-	*BRI*
Mandiri	-	68,000	*Mandiri*
Jumlah	**1,397,680**	**68,000**	***Totals***

Pada tanggal 31 Desember 2024, nilai wajar pinjaman bank sama dengan jumlah tercatatnya karena dampak pendiskontoan tidak signifikan mengingat jatuh temponya kurang dari satu tahun.

As at 31 December 2024, the fair value of short-term bank borrowings equals their carrying amount since the impact of discounting is not significant, as the borrowings are due in less than one year.

21. PINJAMAN BANK (lanjutan) / *21. BANK BORROWINGS (continued)*

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait dengan pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Other significant information related to bank borrowings as at 31 December 2024 is as follows:

Kreditur/ *Creditor*	Mata uang/ *Currency*	Jumlah fasilitas/ *Total facility* (dalam jutaan/ *in millions*)	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Periode pembayaran bunga/*Interest payment period*	Tingkat suku bunga per tahun/*Annual interest rate*	Jenis suku bunga/ *Interest rate type*	Jaminan/*Collateral* (dalam jutaan/ *in millions*)
BNI	Rupiah	1,950,000	19 Juli/ *July* 2025	Triwulan/ *Triwulan*	7.25%	Tetap/ *Fixed*	-
BRI	Dollar	100	12 Feb/ *Feb* 2025	Bulanan/ *Monthly*	0.35%	Tetap/ *Fixed*	Dana DHE SDA: USD9,5 (Catatan/*Note* 9)

Dana yang diperoleh dari pinjaman jangka pendek digunakan untuk modal kerja dan pendanaan kegiatan umum. Debitur diwajibkan memenuhi kewajiban tertentu, antara lain batasan rasio keuangan. Grup telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman.

The funds received from short-term borrowings are used for working capital and general corporate funding. The borrowers are requires to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants. The Group has complied with the covenants required in the loan agreements.

22. LIABILITAS SEWA / *22. LEASE LIABILITIES*

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
PT Putra Perkasa Abadi	212,021	299,089	*PT Putra Perkasa Abadi*
PT Rifansi Dwi Putra	148,769	208,670	*PT Rifansi Dwi Putra*
PT Sumi Gita Jaya	100,787	185,025	*PT Sumi Gita Jaya*
PT Kosindo Supratama	64,543	99,794	*PT Kosindo Supratama*
PT Serasi Autoraya	53,183	-	*PT Serasi Autoraya*
PT Lematang	45,344	67,788	*PT Lematang*
PT Adil Utama	40,934	72,369	*PT Adil Utama*
PT Bagong Dekaka Makmur	25,725	-	*PT Bagong Dekaka Makmur*
PT Prima Indojaya Mandiri	25,165	56,530	*PT Prima Indojaya Mandiri*
PT Leo Anugerah Sukses	20,859	40,475	*PT Leo Anugerah Sukses*
PT Cakra Indo Pratama	10,244	26,819	*PT Cakra Indo Pratama*
PT Primatama Energi Nusantara	1,097	34,622	*PT Primatama Energi Nusantara*
PT Mitsubishi UFJ Financial Group (''MUFG'')	-	14,537	*PT Mitsubishi UFJ Financial Group (''MUFG'')*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp20.000)	104,682	127,964	*Others (each below Rp20,000)*
Jumlah	**853,353**	**1,233,682**	***Total***
Dikurang:			*Less:*
Bagian jangka pendek	**(485,093)**	**(490,017)**	***Current portion***
Bagian jangka panjang	**368,260**	**743,665**	***Non-current portion***
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:			*The present value of lease liabilities is as follows:*
Tidak lebih dari 1 tahun	517,319	580,912	*No later than 1 year*
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	380,782	817,396	*Later than 1 year and no later than 5 years*
	898,101	1,398,308	
Dikurang:			*Less:*
Biaya keuangan di masa depan atas sewa	(44,748)	(164,626)	*Future finance costs on leases*
Nilai kini liabilitas sewa	**853,353**	**1,233,682**	***Present value of lease liabilities***

22. LIABILITAS SEWA (lanjutan) / ***22. LEASE LIABILITIES** (continued)*

Laporan laba rugi konsolidasian menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

The consolidated statements of profit or loss show the following amounts related to leases:

	31 Desember/ *December* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	
Beban terkait sewa variabel	11,452,034	9,659,365	*Expenses relating to variable leases*
Beban terkait sewa jangka pendek	45,952	78,751	*Expenses relating to short-term leases*
Beban terkait sewa atas aset bernilai rendah	32,701	25,447	*Expenses relating to leases of low-value assets*
Jumlah	**11,530,687**	**9,763,563**	***Total***

Tidak ada pembatasan signifikan yang ditetapkan oleh pesewa dalam perjanjian sewa pembiayaan dengan Grup terkait dengan penggunaan aset atau pencapaian kinerja keuangan tertentu.

There is no significant restriction imposed by lease arrangements between lessors and the Group on use of the assets or achievement of certain financial performance.

Grup memiliki perjanjian dengan perusahaan penyedia alat berat dan kendaraan untuk sewa dengan jangka waktu 2-5 tahun. Perusahaan dapat memperpanjang periode sewa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

The Group has an agreement with a heavy equipment and vehicle supplier for a period of 2-5 years. The Company can extend the lease period based on the agreement of both parties.

23. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR / *23. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

Kepemilikan saham Perusahaan sebagai berikut:

The share ownership of the Company as follows:

	31 Desember/*December* 2024			
	Jumlah saham ditempatkan dan disetor/*Number of issued and fully paid shares*	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership***	**Jumlah/ *Amount***	
Pemegang saham				***Shareholders***
Saham preferen (Seri A Dwiwarna)				*Preferred stock (A Dwiwarna Share)*
Pemerintah	5	0.00%	-	*Government*
Saham biasa (Seri B)				*Common stock (B Shares)*
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	7,595,650,695	65.93%	759,565	*PT Mineral Industri Indonesia (Persero)*
Arsal Ismail (Direktur Utama)	304,900	0.00%	30	*Arsal Ismail (President Director)*
Suherman (Direktur Sumber Daya Manusia)	100,000	0.00%	10	*Suherman (Human Resources Director)*
Lainnya (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	3,918,301,650	34.01%	391,831	*Others (Each holding below 5%)*
Jumlah saham beredar	11,514,357,250	99.95%	1,151,436	*Total shares outstanding*
Saham treasuri	6,302,000	0.05%	630	*Treasury shares*
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	11,520,659,250	100%	1,152,066	*Number of shares issued and fully paid*

23. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan) / *SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)*

	31 Desember/*December* 2023			
	Jumlah saham ditempatkan dan disetor/*Number of issued and fully paid shares*	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership***	**Jumlah/ *Amount***	
Pemegang saham				***Shareholders***
Saham preferen (Seri A Dwiwarna)				*Preferred stock (A Dwiwarna Share)*
Pemerintah	5	0.00%	-	*Government*
Saham biasa (Seri B)				*Common stock (B Shares)*
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	7,595,650,695	65.93%	759,565	*PT Mineral Industri Indonesia (Persero)*
Arsal Ismail (Direktur Utama)	304,900	0.00%	30	*Arsal Ismail (President Director)*
Suherman (Direktur Sumber Daya Manusia)	100,000	0.00%	10	*Suherman (Human Resources Director)*
Lainnya (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	3,891,153,750	33.78%	389,116	*Others (Each holding below 5%)*
Jumlah saham beredar	11,487,209,350	99.71%	1,148,721	*Total shares outstanding*
Saham treasuri	33,449,900	0.29%	3,345	*Treasury shares*
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	11,520,659,250	100%	1,152,066	*Number of shares issued and fully paid*

Perubahan jumlah saham yang beredar dan nilai nominal selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Changes in the number of outstanding shares and nominal amount during the year ended on 31 December 2024 and 2023 were as follows:

		Nilai nominal/*Nominal amount*			
	Jumlah lembar saham (nilai penuh)/ *Number of shares (full amount)*	**Saham biasa (dalam jutaan Rupiah)/ *Ordinary shares (in millions of Rupiah)***	**Tambahan modal disetor (dalam jutaan Rupiah)/ *Additional paid-in capital (in millions of Rupiah)***	**Saham treasuri (dalam jutaan Rupiah)/ *Treasury shares (in millions of Rupiah)***	
1 Januari 2023	**11,487,209,350**	**1,152,066**	**594,303**	**(43,257)**	***1 January 2023***
Penjualan saham treasuri	-	-	-	-	*Sale of treasury shares*
31 Desember 2023	**11,487,209,350**	**1,152,066**	**594,303**	**(43,257)**	***31 December 2023***
Penjualan saham treasuri	27,147,900	-	48,529	30,736	*Sale of treasury shares*
31 Desember 2024	**11,514,357,250**	**1,152,066**	**642,832**	**(12,521)**	***31 December 2024***

Saham biasa memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh dividen dan hasil dari pembubaran perusahaan sesuai dengan proporsi jumlah dan jumlah yang dibayarkan atas saham yang dimiliki.

Ordinary shares entitle the holder to participate in dividends and proceeds on winding-up of the Company in proportion to the number of shares held and amounts paid.

Tambahan modal disetor adalah selisih antara harga pembelian saham treasuri dengan harga penjualan kembali saham treasuri.

Paid-in capital is the difference between the purchase price of treasury stock and the resale price of the treasury stock.

24. SAHAM TREASURI

Pada tanggal 2 September 2015 sampai dengan 1 Desember 2015, Perusahaan melakukan pembelian kembali saham dalam kondisi pasar berfluktuasi signifikan yang diadasarkan pada Surat Edaran OJK No.22/SEOJK.04/2015. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret sampai dengan 16 Juni 2020, Perusahaan dengan berdasarkan SEOJK No.3/SEOJK.04/2020 melakukan pembelian saham kembali.

Saham hasil pembelian kembali tahun 2015 tersebut masih tersisa sebanyak 27.147.900 lembar sampai dengan 31 Desember 2023. Sedangkan pada saham hasil pembelian kembali tahun 2020 per 31 Desember 2023 tercatat sebanyak 6.302.000 lembar. Dengan demikian, per 31 Desember 2023, total saham treasuri Perseroan sebanyak 33.449.900 lembar.

Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") No.3/SEOJK.04/2020 dan SEOJK No.20/SEOJK.04 /2021 bahwa perusahaan publik diberikan relaksasi dalam menjual dan membeli kembali sahamnya selama kondisi pasar berfluktuatif secara signifikan. Namun, sesuai ketentuan Surat OJK No. S-68/D.04/2023 tanggal 2 Maret 2023, Perusahaan diwajibkan kembali untuk melakukan pelepasan saham treasuri terhitung setelah tanggal 31 Maret 2023 dengan batas waktu yang akan ditentukan kembali oleh OJK. Pada tanggal 4 September 2023, OJK menerbitkan Surat No.S-2222/PM.21/2023 yang memperjelas tata cara perhitungan terkait tenggat waktu pelepasan saham treasuri.

Sebagai tindak lanjut kewajiban tersebut, maka pada tanggal 28 Maret 2024, Perusahaan menjual sebanyak 27.147.900 saham treasuri (saham hasil pembelian kembali tahun 2015) dengan harga penjualan sebesar Rp2.950/lembar saham (nilai penuh). Perusahaan memiliki sebanyak 6.302.000 lembar (saham hasil pembelian kembali tahun 2020), wajib dialihkan paling lambat sebelum tanggal 31 Maret 2029.

Adapun mutasi jumlah lembar saham dan nilai saham treasuri untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

24. TREASURY SHARES

On 2 September 2015 to 1 December 2015, the Company carried out share buybacks in significantly fluctuating market conditions based on OJK Circular Letter No.22/SEOJK.04/2015. Furthermore, from March 15 to June 16 2020, the Company, based on SEOJK No.3/SEOJK.04/2020, purchased shares back.

The remaining shares from 2015 buyback are 27,147,900 as of 31 December 2024. Meanwhile, the shares from the 2020 buyback as of 31 December 2023 were recorded at 6,302,000 shares. Thus, as of 31 December 2023, the Company's total treasury shares are 33,449,900 shares.

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Circular Letter ("SEOJK") No. 3/SEOJK.04/2020 and SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 public companies are granted relaxation in selling and buying back their shares during significant market conditions. However, in accordance with the provisions of OJK Letter No. S-68/D.04/2023 dated 2 March 2023, the Company is required to re-release treasury shares effective after 31 March 2023 with a deadline to be determined again by OJK. On 4 September 2023, OJK issued Letter No. S-2222/PM.21/2023 which clarified the calculation procedures related to the deadline for the release of treasury shares.

As a follow-up to this obligation, on 28 March 2024, the Company sold 27,147,900 treasury shares (shares from the 2015 buyback) at a selling price of Rp2,950/share (full amount). The Company have treasury shares totaling 6,302,000 shares (shares from the 2020 buyback) must be transferred no later than 31 March 2029.

The mutations in the number of shares and the value of treasury shares for the years ended 31 December 2024 and 2023 are as follows:

	Jumlah saham treasuri/ *Total treasury shares*		
	Lembar/ *Number of shares*	**Jumlah/ *Total***	
Saldo 1 Januari 2023	**33,449,900**	**43,257**	***Balance as of 1 January 2023***
Penjualan saham treasuri	-	-	*Sales of treasury shares*
Saldo 31 Desember 2023	**33,449,900**	**43,257**	***Balance as of 31 December 2023***
Penjualan saham treasuri	(27,147,900)	(30,736)	*Sales of treasury shares*
Saldo 31 Desember 2024	**6,302,000**	**12,521**	***Balance as of 31 December 2024***

25. DIVIDEN / *25. DIVIDENDS*

Dividen kas yang telah diumumkan selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Cash Dividends declared during the year ended 31 December 2024 and 2023, were as follows:

	Tanggal dideklarasi/ *Date declared*	Tanggal pembayaran/ *Payment date*	Dividen per lembar saham (nilai penuh)/ *Dividend per share (full amount)*	Jumlah/ *Total*	
Dividen tahun 2023	8 Mei/ *May* 2024	7 Juni/ *June* 2024	398	4,579,393	*Dividend for the year 2023*
Dividen tahun 2022	15 Juni/ *June* 2023	14 Juli/ *July* 2023	1,094	12,567,582	*Dividend for the year 2022*

26. CADANGAN UMUM DAN LAINNYA / *26. GENERAL RESERVE AND OTHERS*

Di dalam akun ini terdapat cadangan yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 1/1995 yang diterbitkan di bulan Maret 1995, dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, yang mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

In this account there are reserve that was created to meet the requirement from Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 1/1995 which was introduced in March 1995, and amended by Law No. 40/2007, issued in August 2007, which requires the establishment of a general reserve from net income amounting to at least 20% of a company's issued and paid-up capital.

27. PENDAPATAN / *27. REVENUE*

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Pendapatan batubara			***Sales of coal***
Pihak ketiga	22,832,290	19,767,438	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 31b)	19,251,718	18,204,595	*Related parties (Note 31b)*
Total pendapatan dari penjualan batubara	42,084,008	37,972,033	*Total revenue from sales of coal*
Pendapatan dari aktivitas lainnya			***Revenue from other activities***
Pihak ketiga	641,301	476,034	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 31b)	39,659	40,800	*Related parties (Note 31b)*
Total pendapatan dari aktivitas lainnya	680,960	516,834	*Total revenue from other activities*
Jumlah pendapatan	**42,764,968**	**38,488,867**	***Total revenue***

Pendapatan dari aktivitas lainnya merupakan penjualan listrik, briket, minyak sawit mentah dan inti sawit, jasa kesehatan rumah sakit dan jasa sewa.

Revenue from other activities represents sales of power, briquettes, crude palm oil and kernels, healthcare services and rental services.

27. PENDAPATAN (lanjutan) / *REVENUE (continued)*

Rincian pelanggan yang memiliki transaksi pendapatan lebih dari 10% total pendapatan adalah sebagai berikut:

Details of customers with revenue transactions that represent more than 10% of the total revenue are as follows:

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Pihak berelasi:			*Related parties:*
PLN Grup	13,022,609	12,383,348	*PLN Group*
MIND ID Trading Pte. Ltd	3,636,639	3,823,768	*MIND ID Trading Pte. Ltd*
Jumlah	**16,659,248**	**16,207,116**	***Total***

Lihat Catatan 31b untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 31b for information on the details of transactions and balances with related parties.

28. BEBAN ATAU PENGHASILAN BERDASARKAN SIFAT / *EXPENSES OR INCOME BY NATURE*

a. Beban pokok pendapatan / *Cost of revenue*

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

The components of cost of revenue are as follows:

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Biaya produksi:			***Production costs:***
Jasa penambangan	11,713,402	11,105,871	*Mining services*
Jasa angkutan batubara	10,002,228	7,953,583	*Coal transportation services*
Bahan bakar dan pelumas	2,065,932	1,495,025	*Fuel and lubricants*
Penyusutan (Catatan 12)	1,361,436	1,412,333	*Depreciation (Note 12)*
Gaji, upah, dan imbalan karyawan	982,572	1,025,230	*Salaries, wages, and employee benefits*
Perlengkapan dan suku cadang	928,216	805,184	*Spare parts and materials*
Jasa pihak ketiga	713,109	492,674	*Third party services*
Sewa alat berat, kendaraan, dan peralatan	706,678	754,720	*Rental of heavy equipment, vehicles, and equipment*
Pajak bumi dan bangunan	292,764	461,063	*Land and building taxes*
Amortisasi	136,588	105,224	*Amortisation*
Listrik	33,613	87,301	*Electricity*
Lainnya	723,341	574,826	*Others*
Subjumlah	29,659,879	26,273,034	*Subtotal*
Royalti ke Pemerintah	4,077,822	4,449,820	*Royalties to the Government*
Pembelian batubara	180,727	260,087	*Coal purchasing*
Persediaan batubara dan minyak kelapa sawit:			*Coal and palm oil inventories:*
Awal tahun (Catatan 8)	5,297,279	3,645,900	*Beginning of the year (Note 8)*
Akhir tahun (Catatan 8)	(4,652,949)	(5,297,279)	*End of the year (Note 8)*
Jumlah	**34,562,758**	**29,331,562**	***Total***

28. BEBAN ATAU PENGHASILAN BERDASARKAN SIFAT (lanjutan)

28. *EXPENSES OR INCOME BY NATURE* *(continued)*

a. Beban pokok pendapatan (lanjutan)

a. *Cost of revenue* *(continued)*

Rincian jasa pihak ketiga dan jasa lainnya dengan transaksi melebihi 10% total beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

Details of third party services and other services with transactions that amount to more than 10% of the total cost of revenue are as follows:

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Pihak berelasi			*Related party*
PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PT KAI")	8,756,695	7,953,583	*PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PT KAI")*
Pihak ketiga			*Third party*
PT Pamapersada Nusantara ("PAMA")	8,104,900	8,202,491	*PT Pamapersada Nusantara ("PAMA")*
Jumlah	**16,861,595**	**16,156,074**	***Total***

b. Beban umum dan administrasi

b. *General and administrative expenses*

Beban umum dan administrasi terdiri dari:

General and administrative expenses consist of the following:

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Gaji, upah, dan imbalan karyawan	743,910	836,734	*Salaries, wages and employee benefits*
Jasa pihak ketiga	398,285	321,153	*Third party services*
Sumbangan	172,919	191,093	*Donation*
Beban kantor	134,887	87,756	*Office expense*
Perjalanan dinas	105,779	102,595	*Business travel*
Penyusutan (Catatan 12)	103,971	119,753	*Depreciation (Note 12)*
Sewa kendaraan dan peralatan	54,940	39,805	*Rental of vehicles and equipment*
Pelatihan	33,254	20,298	*Training*
Retribusi	32,380	26,200	*Retribution*
Perlengkapan dan suku cadang	29,096	21,115	*Spare parts and materials*
Lainnya	268,767	170,133	*Others*
Jumlah	**2,078,188**	**1,936,635**	***Total***

c. Beban penjualan dan pemasaran

c. *Selling and marketing expenses*

Beban penjualan dan pemasaran terdiri dari:

Selling and marketing expenses consist of the following:

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Gaji, upah, dan imbalan karyawan	224,031	231,731	*Salaries, wages and employee benefits*
Penyusutan (Catatan 12)	195,037	191,998	*Depreciation (Note 12)*
Jasa pihak ketiga	118,188	106,996	*Third party services*
Perlengkapan dan suku cadang	87,220	68,390	*Spare parts and materials*
Bahan bakar dan pelumas	30,196	36,059	*Fuel and lubricants*
Jasa angkutan	25,895	66,581	*Transportation*
Listrik	19,733	18,755	*Electricity*
(Pemulihan) *Domestic Market Obligation ("DMO")*	-	(135,769)	*Domestic Market Obligation ("DMO") (reversal)*
Lainnya	88,717	71,621	*Others*
Jumlah	**789,017**	**656,362**	***Total***

Lihat Catatan 31b untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 31b for information on the details of transactions and balances with related parties.

28. BEBAN ATAU PENGHASILAN BERDASARKAN SIFAT (lanjutan) / *28. EXPENSES OR INCOME BY NATURE (continued)*

d. Penghasilan lainnya, neto / *d. Other income, net*

Penghasilan lainnya, neto terdiri dari: / *Other income, net consists of the following:*

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Pendapatan kompensasi royalti	145,000	162,013	*Gain on royalty compensation*
Laba/(rugi) dari nilai tukar mata uang asing	121,488	(63,206)	*Gain/(loss) on foreign currency exchange*
Pendapatan denda	50,967	105,605	*Penalty income*
Pemulihan provisi piutang lainnya	-	161,001	*Recovery of other receivables provisions*
Restitusi pajak lainnya	-	94,124	*Other tax restitution*
Despatch	29,491	48,317	*Despatch*
Lainnya	(29,533)	130,547	*Others*
Jumlah	**317,413**	**638,401**	***Total***

29. PENGHASILAN DAN BIAYA KEUANGAN / *29. FINANCE INCOME AND COST*

a. Penghasilan keuangan / *a. Finance income*

Penghasilan keuangan terdiri dari: / *Finance income consists of the following:*

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Penghasilan bunga dari penempatan kas di bank dan deposito berjangka	209,225	531,161	*Interest income from placement of cash in banks and time deposits*
Penghasilan bunga dari penempatan obligasi	40,958	53,178	*Interest income from placement of bonds*
Jumlah	**250,183**	**584,339**	***Total***

b. Biaya keuangan / *b. Finance cost*

Biaya keuangan terdiri dari : / *Finance cost consists of the following:*

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Beban akresi dari provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	109,401	88,074	*Accretion from provision for environmental reclamation and mine closure*
Beban bunga dari liabilitas sewa	89,861	115,938	*Interest expense from lease liabilites*
Beban bunga dari pinjaman bank	84,428	26	*Interest expense from bank borrowings*
Jumlah	**283,690**	**204,038**	***Total***

Lihat Catatan 31b untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi. / *Refer to Note 31b for information on the details of transactions and balances with related parties.*

30. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

a. Perjanjian jual beli batubara / *Coal sales and purchase agreements*

Pelanggan/ *Customer*	Harga jual/ *Sales price*	Penjualan (dalam Rp miliar) (nilai penuh) /*Sales in billion IDR (full amount)* 31 Des/*Dec* 2024	31 Des/*Dec* 2023	Piutang usaha (dalam Rp miliar) (nilai penuh)/ *Account receivables (in billion IDR (full amount)* 30 Des/ *Dec* 2024	31 Des/ *Dec* 2023	Masa akhir kontrak/ *Contract period end*
PLTU Banjarsari (BPI)	AS$/*US$*39.39	340	423	80	55	Juni/*June* 2044
PLTU Sumsel 8 (HBAP)	AS$/*US$*31.40	1,495	185	628	480	Oktober/ *October* 2048
PLTU Suralaya (PLN Indonesia Power)[a]	Rp820,671 - Rp893,809 (berdasarkan nilai kalori/ *based on calorific value)*	3,041	2,873	452	10	Desember/ *December* 2025
PLTU Bukit Asam (PLN Nusantara Power)[b]	Rp605,348	391	567	26	47	Desember/ *December* 2026
PLTU Tarahan (PLN Nusantara Power)[b]	Rp841,416	613	669	86	92	Desember/ *December* 2031
PLTU 10,000 MW Tahap I	Rp811,721 – Rp841,416 (berdasarkan nilai kalori/ *based on calorific value)*	8,967	8,262	1,428	1,079	Desember/ *December* 2032

a) PLN Indonesia Power merupakan subholding PT PLN (Persero) yang dibentuk pada tahun 2023
b) PLN Nusantara Power merupakan subholding PT PLN (Persero) yang dibentuk pada tahun 2023

a) PLN Indonesia Power is PT PLN (Persero) subholding established in 2023
b) PLN Nusantara Power is PT PLN (Persero) subholding established in 2023

Adapun rincian PLTU 10.000 MW Tahap I adalah sebagai berikut:

Details of these PLTU 10,000 MW Phase 1 are as follows:

PLN Grup/*PLN Group*

- PLTU Pelabuhan Ratu
- PLTU Lontar
- PLTU Labuan
- PLTU Pangkalan Susu
- PLTU Labuhan Angin
- PLTU Teluk Sirih
- PLTU Adipala
- PLTU Suralaya Baru
- PLTU Ombilin
- PLTU Barru
- PLTU Indramayu
- PLTU Pacitan
- PLTU Nagan Raya
- PLTU Paiton Baru
- PLTU Tanjung Awar-Awar
- PLTU Rembang
- PLTU Tenayan
- PLTU Sebalang
- PLTU Jawa 9-10

30. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

***30. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

b. Perjanjian jasa pengangkutan batubara

b. Coal delivery agreements

Pemasok/ *Supplier*	Rute/ *Route*	Jumlah biaya (dalam Rp miliar) (nilai penuh)/ *Total cost (in billion IDR) (full amount)*		Utang usaha (dalam Rp miliar) (nilai penuh)/ *Account payables (in billion IDR) (full amount)*		Masa akhir kontrak/ *Contract period end*
		31 Des/ *Dec* 2024	31 Des/ *Dec* 2023	31 Des/ *Dec* 2024	31 Des/ *Dec* 2023	
KAI	Tanjung Enim - Tarahan	7,607	6,952	631	571	Desember/ *December* 2027
	Tanjung Enim - Kertapati	1,150	1,002	118	90	Desember/ *December* 2027
PT Servo Lintas Raya	Tanjung Enim - Banyuasin	1,246	-	320	-	November/ *November 2024**

*) Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini perpanjangan kontrak masih dalam proses

Pada 20 September 2024 telah ditandatangani dengan PT Kereta Api Logistik perjanjian jangka panjang untuk jasa bongkar muat Batubara di *Coal Terminal* Kramasan Sumatera Selatan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang berlaku selama 25 tahun sejak tanggal 1 Juli 2025 atau sejak tanggal efektif yang dituangkan dalam berita acara kesiapan operasi.

**) Until the issuance date of these consolidated financial statements, the contract extension is still in process*

On September 20, 2024, a long-term agreement was signed with PT Kereta Api Logistik for coal loading and unloading services at the Kramasan Coal Terminal, South Sumatra, with implementation period of 25 years from July 1, 2025 or from the effective date stated in the operational readiness report.

c. Perjanjian jasa penambangan batubara

c. Mining service agreements

Pemasok/ Supplier	Sifat/ Nature	Jumlah biaya (dalam Rp miliar) (nilai penuh)/ *Total cost (in billion IDR) (full amount)*		Utang usaha (dalam Rp miliar) (nilai penuh)/ *Account payables (in billion IDR) (full amount)*		Masa akhir kontrak/ *Contract period end*
		31 Des/ *Dec* 2024	31 Des/ *Dec* 2023	31 Des/ *Dec* 2024	31 Des/ *Dec* 2023	
PT Pamapersada Nusantara	Jasa penambangan/ Mining service	8,105	8,202	564	85	Februari/ *February* 2031
PT Putra Perkasa Abadi	Jasa pengupasan dan transportasi material/*Stripping and transportation services*	1,640	1,387	288	359	Februari/ *February* 2027

d. Pembayaran sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah

Perusahaan menandatangani kesepakatan dengan beberapa Pemerintah Daerah selama 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

d. Payment of third party donations to the Regional Government

The Company signed agreements with several Regional Governments during 31 December 2024 and 2023 as follows:

Pemerintah daerah/ *Local government*	Jenis bantuan dana/ *Type of donations*	Periode pemberian dana/ *Period of donation*
Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	Perbaikan *venue-venue* yang mengalami kerusakan akibat Bencana Angin Puting Beliung di Jakabaring Sport City/*Repair of venues damaged by the Whirlwind Disaster in Jakabaring Sport City;*	2018 - 2023
	Pembangunan gedung olahraga di wilayah Provinsi Sumatera Selatan/*Construction of a sports hall in the South Sumatra Province;*	

30. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

***30. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

d. Pembayaran sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah (lanjutan)

***d. Payment of third party donations to the Regional Government** (continued)*

Pemerintah daerah/ *Local government*	Jenis bantuan dana/ *Type of donations*	Periode pemberian dana/ *Period of donation*
Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	Pembangunan fasilitas umum serta kendaraan pendukung tugas dan fungsi Pemprov/ *Constructing of public facilities and vehicles supporting the tasks and functions of the South Sumatra Province,*	2018 - 2023
Muara Enim	Bantuan dana peran serta untuk pembangunan di Kabupaten Muara Enim/*Participation funding assistance for development in Muara Enim*	2021 - 2025
Lahat	Bantuan dana peran serta untuk pembangunan di Kabupaten Lahat/*Participation funding assistance for development in Lahat*	2021 - 2023
Lampung	Bantuan dana peran serta untuk pembangunan di Kabupaten Lampung/*Participation funding assistance for development in Lampung*	2023
Sawahlunto	Bantuan dana peran serta untuk pembangunan di Kota Sawahlunto/*Participation funding assistance for development in Sawahlunto*	2023

e. Reklamasi tambang dan penutupan tambang

Grup terikat dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kewajiban reklamasi dan penutupan tambang. Kewajiban tersebut antara lain, harus menyiapkan (1) rencana reklamasi lima tahunan; (2) rencana pascatambang; (3) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi (bila diizinkan); dan (4) menyediakan jaminan pascatambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

Perusahaan telah menyampaikan kewajiban rencana penutupan tambang ("RPT") dan rencana reklamasi ("RR") ke Kementerian ESDM dari waktu ke waktu. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah menempatkan deposito berjangka untuk jaminan reklamasi IUP - Operasi Produksi di area TAL, MTB, Banko Barat, Banko Tengah, OP, dan Ombilin masing-masing dengan nilai penuh sebesar Rp114,03 miliar, Rp86,36 miliar, Rp32,01 miliar, Rp59,01 miliar, Rp3,05 miliar, dan Rp9,18 miliar.

Pada 3 Februari 2023, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("MESDM") telah menyetujui rencana reklamasi dan penutupan tambang BBK. Berdasarkan rencana reklamasi dan penutupan tambang terakhir, BBK telah menempatkan jaminan reklamasi dan penutupan tambang sebesar Rp40 miliar (nilai penuh) pada tanggal 7 Juni 2023.

e. Mine reclamation and mine closure

The Group is bound by various regulations in relation with reclamation and mine closure obligations. These obligations include to (1) prepare a five-year reclamation plan; (2) prepare post-mining plans; (3) provide reclamation guarantees that can be in the form of joint accounts or time deposits placed at state banks, bank guarantees, or accounting reserves (if allowed); and (4) provide post-mining guarantees in the form of time deposits placed at government banks.

The Company has submitted mandatory mine closure plans ("MCP") and reclamation plans ("RP") to the Ministry of Energy and Mineral Resources from time to time. As at 31 December 2024, the Company had placed a time deposit for reclamation guarantees for IUP-Production Operation at TAL, MTB, Banko Barat, Banko Timur, OP, and Ombilin with full amount amounting to Rp114.03 billion, Rp86.36 billion, Rp32.01 billion, Rp59.01 billion, Rp3.05 billion, and Rp9.18 billion.

On 3 February 2023, Ministry of Energy and Mineral Resources ("MoEMR") has approved reclamation and mine closure plan of BBK. Based on latest reclamation and mine closure plan, BBK has placed reclamation and mine closure guarantee amounting to Rp40 billion (full amount) on 7 June 2023.

30. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023

Pada 21 November 2022, Menteri ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM No.267.K/MB.01/MEM.B/2022 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri ("Kepmen ESDM 267/2022"), yang sekarang akan menjadi dasar baru terkait pemenuhan *Domestic Market Obligation* ("DMO") untuk batubara. Keputusan Menteri ESDM ini diubah dengan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri ("Kepmen ESDM 399/2023") yang mulai berlaku efektif sejak 17 November 2023.

a. Pemenuhan DMO

Dengan terbitnya Kepmen ESDM 399/2023 Persentase DMO ditetapkan sebesar 25% ditetapkan dari realisasi produksi batubara tahun berjalan bagi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan/atau kepentingan sendiri dan bahan baku/bahan bakar industri.

b. Penerapan Denda dan Kompensasi

Terhadap pelaku usaha pertambangan batubara yang tidak memenuhi persentase pemenuhan DMO dapat dikenai kewajiban pembayaran dana kompensasi, denda, denda dan dana kompensasi atau pelarangan penjualan batubara ke luar negeri. Ketidakpatuhan pada denda dan/atau kompensasi, dapat dikenai sanksi administratif secara berjenjang.

30. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

f. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 399.K/MB.01/MEM.B/ 2023

On 21 November 2022, the Minister of Energy and Mineral Resources issued Minister of Energy and Mineral Resources Decree No.267.K/MB.01/MEM.B/2022 Year 2022 concerning Fulfillment of Domestic Coal Needs ("Kepmen ESDM 267/2022"), which now become the new basis related to the fulfillment of the Domestic Market Obligation ("DMO") for coal. This decision of the Minister of Energy and Mineral Resources was amended by the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 399.K/MB.01/MEM.B/2023 concerning Amendments to the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 267.K/MB.01/MEM.B/2023 concerning Fulfillment of Coal Needs Domestic Affairs ("Kepmen ESDM 399/2023") which has been effective since 17 November 2023.

a. DMO compliance

With the issuance of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 399/2023, the Domestic Market Obligation (DMO) percentage is set at 25% based on the current period's coal production realization for the provision of electricity for public and/or self-interest, as well as industrial raw materials/fuels.

b. Application of Fines and Compensation

For coal mining business actors who do not fulfil the DMO fulfillment, are subject to obligation to pay compensation fund, fine, fines and compensation funds or prohibition of coal sales abroad. Non-compliance with fines and/or compensation fund, may be subject to administrative sanctions in stages.

30. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 (lanjutan)

c. Penentuan harga jual

- Harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebesar AS$70 per metrik ton *FOB Vessel*, yang didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori 6.322 kcal/kg GAR, *total moisture* 8%, *total sulphur* 0,8%, dan *ash* 15%.

- Dalam hal harga batubara acuan ("HBA") lebih dari atau sama dengan dan kurang dari AS$70 per metrik ton *FOB Vessel*, maka harga jual batubara dihitung menggunakan formula harga batubara sebagaimana ketentuan dalam Lampiran III Kepmen ESDM 267/2022.

d. Perhitungan HBA dalam penentuan harga jual

- HBA yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum untuk penjualan batubara secara *spot* adalah HBA pada saat transaksi sesuai dengan ketentuan keputusan menteri ini.

- HBA yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum untuk penjualan batubara secara jangka tertentu (*term*).

e. Pemenuhan Kewajiban Iuran Produksi/Royalti

- Regulasi ini mengatur formula penghitungan pemenuhan kewajiban iuran produksi/royalti oleh Pelaku Usaha Pertambangan Batubara atas penjualan batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum khusus untuk HBA yang lebih dari atau sama dengan AS$70 per metrik ton *FOB Vessel*, dan ketentuan formula penghitungan pemenuhan kewajiban iuran produksi/royalti oleh Pelaku Usaha Pertambangan Batubara atas penjualan batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum khusus untuk HBA yang Kurang Dari AS$70 Per Metrik Ton FOB Vessel.

30. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

f. Minister of Energy and Mineral Resources Number 399.K/MB.01/MEM.B/2023 *(continued)*

c. Selling price determination

- *The selling price of coal for the supply of electricity for the public interest is US$70 per metric ton FOB Vessel, which is based on reference specifications on calorific 6,322 kcal/kg GAR, total moisture 8%, total sulphur 0.8%, and ash 15%.*

- *In the event that the reference coal price ("HBA") is more than or equal to and less than US$70 per metric ton FOB vessel, the selling price of coal is calculated using the coal price formula as stipulated in Appendix III to the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources 267/2022.*

d. HBA calculation in determining the selling price

- *The HBA used as a reference in determining the selling price of coal for the supply of electricity for public purposes for spot sales of coal is the HBA at the time of the transaction in accordance with the provisions of this Ministerial Decree.*

- *The HBA used as a reference in determining the selling price of coal for the supply of electric power for the public interest for coal sales for a certain period (term).*

e. Fulfillment of Production/Royalty Contribution Obligations

- *The regulation determines formula for calculating fulfillment of production contribution/ royalty obligations by Coal Mining Business Companies for the sale of coal for the Provision of Electricity for Public Interests specifically for HBAs more than or equal to US$70 per metric ton FOB Vessel, and calculate formula of fulfillment of production contribution/royalty obligations by Coal Mining Business Companies for the sale of coal for the Provision of Electricity for Public Interests specifically for HBAs Less Than USD70 Per Metric Ton FOB Vessel.*

30. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

g. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/ MBU/03/2023 Tahun 2023

Sebagai upaya mewujudkan Peraturan Menteri yang sinkron dan harmonis guna mendukung Pengelolaan BUMN yang terencana, terpadu dan berkelanjutan, maka pada 3 Maret 2023, Menteri BUMN menetapkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/02/2023 ("PERMEN BUMN 2/2023) Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dimana dalam PERMEN 2/2023 mengatur lebih lanjut terkait dengan Prinsip Tata Kelola BUMN, Penerapan Manajemen Risiko BUMN, Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, Perencanaan Strategis, Pedoman Kegiatan Korporasi Signifikan, Penyelenggaraan TI, dan Pelaporan.

h. Keputusan Menteri ESDM No.227.K/MB.01/MEM.B/2023

Pada Tanggal 11 Agustus 2023 Menteri ESDM telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 227.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Batubara. Regulasi ini mencabut Keputusan Menteri ESDM No. 41.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Batubara untuk meningkatkan efektivitas penggunaan harga patokan dalam penjualan komoditas batubara.

Keputusan tersebut merupakan ketentuan pelaksana Pasal 159 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, yang mengatur bahwa Pemegang IUP dan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral dan Batubara yang menjual Mineral dan Batubara yang diproduksi wajib mengacu pada harga patokan, dan harga patokan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri berdasarkan:

a. Mekanisme pasar; atau
b. Sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.

***30. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

g. Minister of SOE No. PER-2/MBU/03/2023 of 2023

As an effort to realise a synchronous and harmonious SOE Ministerial Regulation to support the planned, integrated and sustainable management of SOEs, on 3 March 2023, the Minister of SOEs stipulated a SOE Ministerial Regulation No. PER-2/ MBU/02/2023 ("SOE Ministerial Regulation 2/2023") Concerning Guidelines for Governance and Corporate Activities Significant State Enterprises, where SOE Ministerial Regulation No.2/2023 further regulates in relation to SOE Governance Principles, Implementation of SOE Risk Management, Assessment of SOE Soundness Level, Strategic Planning, Guidelines for Significant Corporate Activities, Implementation of IT, and Reporting.

h. Decree of MoEMR No. 227.K/MB.01/MEM.B/ 2023

On August 11 2023, the Minister of Energy and Mineral Resources issued Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 227.K/MB.01/MEM.B/2023 concerning Guidelines for Determining Benchmark Prices for Sales of Coal Commodities. This regulation revokes Minister of Energy and Mineral Resources Decree no. 41.K/MB.01/MEM.B/2023 concerning Guidelines for Determining Benchmark Prices for Sales of Coal Commodities to increase the effectiveness of using benchmark prices in selling coal commodities.

This decree is an implementing provision of Article 159 paragraph (2) of Government Regulation No. 96 of 2021, which stipulates that IUP and IUP holders at the Mineral and Coal Production Operation activity stage who sell the Mineral and Coal produced must refer to the benchmark price, and the price the benchmark referred to is determined by the Minister based on:

a. The market mechanism; or
b. In accordance with generally accepted prices in international markets.

30. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

i. Keputusan Menteri ESDM No.227.K/MB.01/MEM.B/2023 (lanjutan)

Dalam regulasi ini juga mengatur bahwa Harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik dan kepentingan umum serta pemenuhan bahan baku industry dalam negeri selain industry pengolahan dan pemurnian logam mengacu pada spesifikasi acuan dan perhitungan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang mentapkan harga jual batubara untuk kepentingan dimaksud.

***30. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

***i. Decree of MoEMR No. 227.K/MB.01/MEM.B/2023** (continued)*

This regulation also stipulates that the selling price of coal for the supply of electricity and public purposes as well as the fulfillment of raw materials for domestic industries other than the metal processing and refining industry refers to the reference specifications and calculations stipulated in the Ministerial Decree which determines the selling price of coal for the purposes in question.

j. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2023

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan ("PP 25 / 2023") yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 5 Mei 2023. Dengan berlakunya PP 25/2023 maka Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Menteri dapat memberikan penugasan Penyelidikan dan Penelitian pada WUP kepada Lembaga riset negara/daerah, BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta untuk:

a. Penyiapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara; atau

b. Penyiapan WIUP Batubara untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.

Terdapat jaminan pemanfaatan ruang, kawasan, zonasi, serta WIUP yang ditetapkan, dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan.

Dalam PP 25/2023 ini juga mengatur ketentuan baru yang mewajibkan Gubernur dan Bupati/wali kota untuk membentuk dan/atau menandai sebuah objek atau wilayah tertentu pada peta atas WUP yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah sesuai kewenangannya.

j. Government Regulation No. 25 of 2023

President of the Republic of Indonesia has stipulated Government Regulation No. 25 of 2023 concerning Mining Areas which will become effective from 5 May 2023. With the enactment of this Regulation, Government Regulation No. 22 of 2010 concerning Mining Areas is declared repealed and no longer valid.

The Minister may assign Investigations and Research assignments to Mining Business Area (MBA) to state/regional research institutions, BUMN, BUMD, and private business entities to:

a. The preparation of a metal mineral Mining Business Area ("MBPA") and Coal MBPA; or
b. The preparation of Coal MBPA for the development and/or utilisation of coal.

There is a guarantee for the use of space, area, zoning, and designated MBPAs, from the Central Government and Regional Government, that there is no change in the use of space and area.

On Government Regulation No. 25 of 2023 also stipulates a new provision which obliges Governors and Regents/Mayors to form and/or mark certain objects or areas on the map of WUPs that have been designated as Mining Areas in the Spatial Plans according to their authority.

k. Perjanjian *Notional Pooling* BRI

Perusahaan bersama-sama dengan anggota holding MIND ID lainnya, menandatangani perjanjian dengan BRI di mana BRI akan memberikan layanan jasa Notional Pooling yang merupakan jasa *cash management* untuk mengkonsolidasikan kebutuhan dana grup MIND ID dalam rangka optimalisasi likuiditas.

k. BRI Notional Pooling agreements

The Company together with other members of MIND ID holding, signed an agreement with BRI under which BRI will provide Notional Pooling services, which are essentially cash management services to consolidate the funding needs of MIND ID group with the aim of liquidity optimisation.

30. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

k. Perjanjian *Notional Pooling* BRI (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian ini, peserta pooling dapat melakukan penarikan dari rekening BRI NP dalam batasan limit defisit yang ditentukan dalam perjanjian. Saldo defisit dari penarikan dana rekening BRI NP dapat ditutupi dengan fasilitas Kredit Jangka Pendek ("KJP") yang diberikan oleh BRI kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero), yang dapat digunakan oleh peserta pooling untuk melakukan penihilan saldo defisit pada akhir bulan.

l. Perjanjian *Notional Pooling* Mandiri

Perusahaan bersama-sama dengan anggota holding MIND ID lainnya, menandatangani perjanjian dengan Mandiri di mana Mandiri akan memberikan layanan jasa Mandiri Notional Pooling (“MNP”) yang merupakan jasa cash management untuk mengkonsolidasikan kebutuhan dana grup MIND ID dalam rangka optimalisasi likuiditas. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan dapat melakukan penarikan dari rekening MNP dalam batasan limit defisit yang ditentukan dalam perjanjian. Saldo defisit Perusahaan dari penarikan dana rekening MNP dapat ditutupi dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Global Line yang diberikan oleh Mandiri kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero), yang dapat digunakan oleh Perusahaan selaku peserta pooling untuk melakukan penihilan saldo defisit pada akhir bulan.

m. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023

Pada tanggal 12 Juli 2023, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 yang mengatur tentang devisa hasil ekspor, valuta asing dan pembayaran impor untuk bisnis di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, 30% dari devisa hasil ekspor, dengan nilai ekspor paling sedikit AS$250.000 atau ekuivalennya, wajib ditempatkan ke dalam rekening khusus dengan jangka waktu paling singkat tiga bulan. Peraturan ini berlaku efektif sejak 1 Agustus 2023. Grup telah melaksanakan kewajiban untuk menempatkan DHE SDA ke dalam rekening khusus dan deposito berjangka dan disajikan sebagai bagian dari “Kas dan setara kas” dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

30. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

k. BRI Notional Pooling agreements *(continued)*

Based on this agreement, the Company can drawdown cash from the BRI NP account within the deficit limit set out in the agreement. The Company’s deficit balance from the drawdown of the BRI NP account can be settled using the Short-term credit facility (“KJP”) provided by BRI to PT Mineral Industri Indonesia (Persero), which can be used by the Company as a pooling participant to settle the Company’s deficit balance at the end of month.

l. Mandiri Notional Pooling agreements

The Company together with other members of MIND ID holding, signed an agreement with Mandiri under which Mandiri will provide Mandiri Notional Pooling (“MNP”) services, which are essentially cash management services to consolidate the funding needs of MIND ID group with the aim of liquidity optimisation. Based on this agreement, the Company can drawdown cash from the MNP account within the deficit limit set out in the agreement. The Company’s deficit balance from the drawdown of the MNP account can be settled using the Global Line working capital loan facility provided by Mandiri to PT Mineral Industri Indonesia (Persero), which can be used by the Company as a pooling participant to settle the Company’s deficit balance at the end of month.

m. Government Regulation No. 36 of 2023

On 12 July 2023, Government issued Government regulation No. 36 of 2023 which regulates the cash proceeds from export sales, foreign exchange and import payments for business in mining, plantation, forestry and fishery sectors.

Based on this Government Regulation, 30% of the cash proceeds from export sales that have export values of at least US$250,000 or its equivalent stated in an export customs declaration must be placed in the special account for a holding period of at least three months. This regulation became effective on 1 August 2023. The Group has carried out the obligation to place DHE SDA into the special accounts and time deposits and are presented as part of “Cash and cash equivalents” in the consolidated statements of financial position.

30. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

n. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025

Pada tanggal 17 Februari 2025, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025, menggantikan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023, yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Maret 2025. Peraturan tersebut mewajibkan perusahaan-perusahaan tertentu di Indonesia, termasuk Grup, untuk menyimpan 100% dari hasil kas dari penjualan ekspor dan transaksi valuta asing serta menempatkannya dalam sistem keuangan Indonesia selama minimal dua belas bulan.

Manajemen sedang mengevaluasi dampak dari peraturan tersebut terhadap operasi Grup.

o. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024

Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 25/2024") yang mulai berlaku efektif sejak 30 Mei 2024.

Dalam regulasi ini terdapat perubahan nomenklatur dari "RKAB Tahunan 'menjadi "RKAB", maka PTBA perlu menyesuaikan wording "RKAB Tahunan" menjadi "RKAB" saja sebagaimana diatur dalam PP 25/2024.

Selain itu, saat ini PTBA selaku Anak Perusahaan BUMN mendapatkan kepastian hukum dalam hal akan melakukan perpanjangan IUP selama 10 tahun setiap kali perpanjangan agar PTBA dapat melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan berkelanjutan. Lebih lanjut terkait kegiatan pengembangan dan/pemanfataan PTBA dapat melibatkan badan usaha lain sepanjang kepemilikan saham PTBA selaku pemegang IUP paling sedikit 30% dan tidak dapat terdilusi agar dapat memperoleh Izin Operasi Produksi berkelanjutan.

30. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

n. Government Regulation No. 8 of 2025

On February 17, 2025, the government issued Government Regulation No. 8 of 2025, replacing the Government Regulation No. 36 of 2023, which will become effective on March 1, 2025. The regulation requires certain companies in Indonesia, including the Group, to hold 100% of the cash proceeds from export sales and foreign exchange transactions and place them in the Indonesian financial system for at least a twelve-month period.

Management is evaluating the impact of the regulation on the Group's operations.

o. Government Regulation No. 25 of 2024

The Government of the Republic of Indonesia through Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 25 of 2024 concerning Amendments to Government Regulation Number 96 of 2021 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities ("PP 25/2024") which will come into effect on 30 May 2024.

In this regulation there is a change in nomenclature from "Annual RKAB" to "RKAB", so PTBA needs to adjust the wording of "Annual RKAB" to just "RKAB" as regulated in PP 25/2024.

Apart from that, currently PTBA as a BUMN subsidiary has legal certainty in terms of extending its IUP for 10 years each time so that PTBA can carry out sustainable mining production operations. Furthermore, regarding PTBA's development and/utilization activities, it can involve other business entities as long as PTBA's share ownership as the IUP holder is at least 30% and cannot be diluted in order to obtain a sustainable Production Operation Permit.

31. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

31. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

a. Sifat hubungan dengan pihak berelasi

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. The nature of the relationships

The nature of transactions and relationships with related parties is as follows:

Pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan dengan pihak yang berelasi/ *Relationship with the related parties*	Transaksi/*Transaction*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) ("BRI") Tbk	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Penempatan dana dan pinjaman bank/*Funds placement and bank borrowings*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) ("BNI") Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) ("Mandiri") Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) ("BTN") Tbk, Bank Tabungan Negara - Unit Usaha Syariah ("BTN - UUS"), PT Bank Syariah Indonesia ("BSI") Tbk, PT Bank Raya Indonesia ("Bank Raya") Tbk	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Penempatan dana/ *Funds placement*
PT Mandiri Tunas Finance ("MTF")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Sewa pembiayaan/ *Finance lease*
PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pengangkutan batubara dan penempatan obligasi/ *Coal transportation and bonds placement*
PT PLN (Persero), PT PLN Nusantara Power, PT PLN Indonesia Power Bersama – sama disebut PLN Grup	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Penjualan batubara, pemakaian listrik, penempatan obligasi, dan piutang lainnya/ *Coal sales, electricity usage, bond placement and other receivables*
Dana Pensiun Bukit Asam ("DPBA")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pengelolaan dana pensiun/ *Pension fund management*
PT TIMAH Tbk ("TIMAH")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Penjualan batubara dan penempatan MTN/*Coal sales and MTN placement*
PT Aneka Tambang Tbk ("ANTAM"), PT Indonesia Chemical Alumina, MIND ID Trading Pte.Ltd, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("Pusri"), PT Semen Tonasa, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Artha Daya Coalindo	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Penjualan batubara/ *Coal sales*
PT Solusi Bangun Indonesia ("SBI") PT Angkasa Pura II PT Jasamarga Bali Tol	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Jasa perawatan PLTU/ *Power Plant maintenance services*
PT Dahana (Persero)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pembelian bahan peledak/ *Explosive material purchases*
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia DPLK BNI ("DPLK BNI")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	PPIP/*Defined contribution pension programme*

31. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

31. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Sifat hubungan dengan pihak berelasi (lanjutan)

a. The nature of the relationships *(continued)*

Pihak berelasi/ ***Related parties***	**Sifat hubungan dengan pihak yang berelasi/** ***Relationship with the related parties***	**Transaksi/*Transaction***
PT Danareksa (Persero) ("Danareksa"), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Penempatan Obligasi/ *Bonds placement*
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pembelian bahan bakar dan penempatan obligasi/ *Fuel purchase and bonds placement*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Premi asuransi/ *Insurance premiums*
PT Tanjung Alam Jaya	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pembelian batubara/ *Coal purchases*
PT Dok dan Perkapalan Air Kantung ("DAK")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pembelian Aset/ *Asset purchases*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Krakatau Engineering, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Konstruksi proyek/ *Project construction*
PT Huadian Bukit Asam Power ("HBAP"), PT Bukit Pembangkit Innovative ("BPI")	Entitas ventura bersama/ *Joint ventures entity*	Penjualan batubara dan piutang lainnya/ *Coal sales and other receivables*
PT Bukit Asam Transpacific Railway ("BATR")	Entitas ventura bersama/ *Joint ventures entity*	Piutang lainnya/ *Other receivables*
PT Sinergi Mitra Lestari Indonesia ("SINERGI ID")	Entitas asosiasi/ *Associates entity*	Piutang lainnya/ *Other receivables*

Kebijakan Grup terkait penetapan harga untuk transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- Penjualan batubara ke pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan, yang pada umumnya menggunakan indeks internasional yang setara sebagai perbandingan dan disesuaikan dengan spesifikasi dari batubara dan lokasi pengiriman.

- Pengapalan dan pengangkutan batubara oleh pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak pengangkutan yang disepakati bersama berdasarkan hasil negosiasi dengan memperhatikan unsur-unsur biaya yang ada ditambah dengan margin tertentu.

The Group's pricing policies related to the transactions with related parties are as follows:

- *Sales of coal to related parties are set based on sales contracts, which generally use international indices as benchmarks adjusted for coal specifications and location of deliveries.*

- *Coal shipping and transportation by related parties are determined based on contracts agreed upon by each party after considering the cost components plus a certain margin.*

31. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***31. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

b. Rincian transaksi dan saldo kepada pihak berelasi

Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

b. Details of transactions and balances with related parties

Transactions and balances with related parties were as follows:

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Penjualan batubara dan pendapatan dari aktivitas lainnya			***Sale of coal and revenue from other activities***
PLN Grup	13,022,609	12,383,348	*PLN Group*
MIND ID Trading Pte. Ltd	3,636,639	3,823,768	*MIND ID Trading Pte. Ltd*
HBAP	1,495,034	532,493	*HBAP*
Pusri	517,651	547,707	*Pusri*
BPI	340,496	422,865	*BPI*
PT Indonesia Chemical Alumina	125,915	131,059	*PT Indonesia Chemical Alumina*
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	91,553	107,807	*PT Semen Baturaja (Persero) Tbk*
SBI	26,966	28,271	*SBI*
TIMAH	24,293	28,913	*TIMAH*
PT Artha Daya Coalindo	8,953	-	*PT Artha Daya Coalindo*
PT Jasamarga Bali Tol	655	-	*PT Jasamarga Bali Tol*
PT Angkasa Pura II	371	-	*PT Angkasa Pura II*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	242	183,906	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Semen Tonasa	-	55,258	*PT Semen Tonasa*
Jumlah	**19,291,377**	**18,245,395**	***Total***
Persentase terhadap jumlah pendapatan konsolidasian	45%	47%	*As a percentage of total consolidated revenue*
Pembelian barang/jasa			***Purchases of goods/services***
KAI	8,756,695	7,953,583	*KAI*
Pertamina	2,080,669	1,495,025	*Pertamina*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	342,000	107,757	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	219,991	123,663	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Tanjung Alam Jaya	180,727	260,087	*PT Tanjung Alam Jaya*
PT Dahana (Persero)	106,074	148,971	*PT Dahana (Persero)*
PLN Grup	72,686	93,113	*PLN Group*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	23,044	16,675	*PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)*
PT Surveyor Indonesia	-	1,294	*PT Surveyor Indonesia*
Jumlah	**11,781,886**	**10,200,168**	***Total***
Persentase terhadap jumlah beban pokok pendapatan dan beban usaha konsolidasian	31%	35%	*As a percentage of total consolidated cost of revenue and operating expenses*
Penghasilan keuangan			***Finance income***
Mandiri, BTN, BRI, BNI, BSI, Bank Raya dan BTN - UUS	153,256	374,277	*Mandiri, BTN, BRI, BNI, BSI Bank Raya and BTN - UUS*
TIMAH	16,550	19,015	*TIMAH*
Pertamina	5,241	9,976	*Pertamina*
KAI	2,556	3,834	*KAI*
PLN Grup	1,946	5,839	*PLN Group*
SMI	603	1,931	*SMI*
Danareksa	338	337	*Danareksa*
Jumlah	**180,490**	**415,209**	***Total***
Persentase terhadap jumlah penghasilan keuangan konsolidasian	72%	71%	*As a percentage to total consolidated finance income*

31. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***31. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

b. Rincian transaksi dan saldo kepada pihak berelasi (lanjutan)

***b. Details of transactions and balances with related parties** (continued)*

	31 Desember/ *December* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	
Pembayaran iuran dana pensiun			***Pension fund contribution payment***
DPLK BNI	75,420	71,945	*DPLK BNI*
DPBA	9,727	188,459	*DPBA*
Jumlah	**85,147**	**260,404**	***Total***
Persentase terhadap jumlah beban gaji konsolidasian	4%	12%	*As a percentage to total consolidated salary expense*
Biaya keuangan			***Finance costs***
BNI	60,637	-	*BNI*
BRI	23,762	-	*BRI*
Mandiri	30	26	*Mandiri*
Jumlah	**84,429**	**26**	***Total***
Persentase terhadap jumlah biaya keuangan konsolidasian	29.76%	0.01%	*As a percentage of total consolidated finance cost*

	31 Desember/ *December* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	
Aset			***Assets***
Kas di bank			***Cash in banks***
Rupiah			*Rupiah*
Mandiri	204,401	224,330	*Mandiri*
BNI	121,983	224,442	*BNI*
BRI	30,477	91,990	*BRI*
BSI	17,573	2,959	*BSI*
BTN - UUS	1,969	1,499	*BTN - UUS*
BTN	1,660	1,415	*BTN*
Bank Raya	109	533	*Bank Raya*
Subjumlah	**378,172**	**547,168**	***Subtotal***
Dolar AS			*US Dollars*
Mandiri	91,565	309,852	*Mandiri*
BRI	47,047	297,845	*BRI*
BNI	3,028	69,744	*BNI*
Subjumlah	**141,640**	**677,441**	***Subtotal***
Dolar Australia			*Australian Dollars*
Mandiri	-	555	*Mandiri*
Euro			*Euro*
Mandiri	-	2,658	*Mandiri*
Jumlah	**519,812**	**1,227,822**	***Total***

31. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***31. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

b. Rincian transaksi dan saldo kepada pihak berelasi (lanjutan)

***b. Details of transactions and balances with related parties** (continued)*

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Aset (lanjutan)			***Assets** (continued)*
Deposito berjangka			***Time deposits***
Rupiah			*Rupiah*
BSI	618,700	-	*BSI*
BTN - UUS	227,157	50,000	*BTN - UUS*
BRI	217,000	248,000	*BRI*
BTN	100,780	516,573	*BTN*
BNI	94,000	61,500	*BNI*
Mandiri	-	94,450	*Mandiri*
Subjumlah	**1,257,637**	**970,523**	***Subtotal***
Dolar AS			*US Dollars*
BNI	129,256	181,408	*BNI*
Mandiri	59,781	-	*Mandiri*
BRI	48,471	-	*BRI*
Subjumlah	**237,508**	**181,408**	***Subtotal***
Deposito berjangka untuk devisa hasil ekspor			***Time deposits for cash proceeds from export sales***
Dolar AS			*US Dollars*
BNI	1,001,734	724,282	*BNI*
Mandiri	512,985	527,180	*Mandiri*
BRI	403,925	266,322	*BRI*
Subjumlah	**1,918,644**	**1,517,784**	***Subtotal***
Jumlah	**3,413,789**	**2,669,715**	***Total***
Piutang usaha			***Trade receivables***
Rupiah			*Rupiah*
PLN Grup	1,992,819	1,641,085	*PLN Group*
HBAP	628,137	480,340	*HBAP*
Pusri	87,471	76,009	*Pusri*
BPI	79,901	54,937	*BPI*
PT Indonesia Chemical Alumina	20,852	13,681	*PT Indonesia Chemical Alumina*
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	16,968	20,526	*PT Semen Baturaja (Persero) Tbk*
SBI	10,590	2,252	*SBI*
PT Pelayaran Bahtera Adiguna	2,550	-	*PT Pelayaran Bahtera Adiguna*
PT Indonesia Asahan Aluminium	2,305	-	*PT Indonesia Asahan Aluminium*
PT Angkasa Pura II	88	-	*PT Angkasa Pura II*
BPJS kesehatan	-	4,520	*BPJS Kesehatan*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	-	14,601	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
Dolar AS			*US Dollars*
MIND ID Trading Pte. Ltd	82,058	-	*MIND ID Trading Pte. Ltd*
Subjumlah	**2,923,739**	**2,307,951**	***Subtotal***
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai HBAP	(51,899)	(51,899)	*Provision for impairment HBAP*
Jumlah	**2,871,840**	**2,256,052**	***Total***
Bagian lancar	**(2,871,840)**	**(2,067,781)**	***Current portion***
Bagian tidak lancar	**-**	**188,271**	***Non-current portion***

31. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***31. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

b. Rincian transaksi dan saldo kepada pihak berelasi (lanjutan)

***b. Details of transactions and balances with related parties** (continued)*

	31 Desember/ *December 2023*	31 Desember/ *December 2023*	
Aset (lanjutan)			***Assets** (continued)*
Piutang lainnya			***Other receivables***
Rupiah			*Rupiah*
PLN Grup	17,640	5,972	*PLN Group*
BPI	6,627	6,130	*BPI*
SINERGI ID	1,893	1,893	*SINERGI ID*
HBAP	1,760	3,603	*HBAP*
BATR	1,085	1,085	*BATR*
Jumlah	**29,005**	**18,683**	***Total***
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			***Financial assets at fair value through other comprehensive income***
Rupiah			*Rupiah*
PLN Grup	102,146	105,605	*PLN Group*
KAI	79,689	81,022	*KAI*
SMI	19,879	69,950	*SMI*
Danareksa	9,998	9,956	*Danareksa*
TIMAH	-	391,250	*TIMAH*
Dolar AS			*US Dollars*
Pertamina	165,973	169,225	*Pertamina*
Jumlah	**377,685**	**827,008**	***Total***
Deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun			***Time deposits with maturities more than 3 months and less than 1 year***
Rupiah			*Rupiah*
BRI	242,355	212,106	*BRI*
BSI	-	269,712	*BSI*
BRI Agro	-	30,000	*BRI Agro*
BTN - UUS	-	30,000	*BTN - UUS*
Jumlah	**242,355**	**541,818**	***Total***

31. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***31. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

b. Rincian transaksi dan saldo kepada pihak berelasi (lanjutan)

***b. Details of transactions and balances with related parties** (continued)*

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Aset (lanjutan)			***Assets** (continued)*
Aset tidak lancar lainnya			***Other non-current assets***
Jaminan reklamasi dan penutupan tambang			*Reclamation and mine closure*
Rupiah			*Rupiah*
Mandiri	263,998	222,168	*Mandiri*
Jumlah aset yang terkait dengan pihak berelasi	**7,718,484**	**7,763,266**	***Total assets associated with related parties***
Persentase terhadap jumlah aset konsolidasian	18%	20%	*As a percentage of total consolidated assets*

	31 Desember/ *December 2024*	31 Desember/ *December* 2023	
Liabilitas			***Liabilities***
Utang usaha			***Trade payables***
Rupiah			*Rupiah*
KAI	598,282	529,597	*KAI*
Pertamina	225,048	252,255	*Pertamina*
PT Antam Tbk	13,404	4,637	*PT Antam Tbk*
PT Dahana (Persero) Tbk	12,540	31,282	*PT Dahana (Persero) Tbk*
PT Waskita Beton	9,799	-	*PT Waskita Beton*
PT Sucofindo	9,341	7,280	*PT Sucofindo*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2,675	42,322	*PT Waskita Karya*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	20	21,005	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
Lainnya (masing-masing dibawah Rp5.000)	8,057	4,469	*Others (each below Rp5,000)*
Dolar AS			*US Dollars*
KAI	150,570	131,163	*KAI*
Jumlah	**1,029,736**	**1,024,010**	***Total***
Biaya yang masih harus dibayar			***Accrued expenses***
Rupiah			*Rupiah*
KAI	1,242,963	703,315	*KAI*
Pertamina	212,493	-	*Pertamina*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	23,250	27,894	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	18,000	26,182	*PT Adhi Karya (Persero)* Tbk
DAK	-	140,519	*DAK*
Lainnya (masing-masing dibawah Rp5.000)	-	41	*Others (each below Rp5,000)*
Dolar AS			*US Dollars*
KAI	81,578	83,649	*KAI*
Jumlah	**1,578,284**	**981,600**	***Total***
Pinjaman bank			***Bank borrowings***
Rupiah			*Rupiah*
BNI	1,250,000	-	*BNI*
BRI	147,680	-	*BRI*
Mandiri	-	68,000	*Mandiri*
Jumlah	**1,397,680**	**68,000**	***Total***
Jumlah liabilitas yang terkait dengan pihak berelasi	**4,005,700**	**2,073,610**	***Total liabilities associated with related parties***
Persentase terhadap jumlah liabilitas konsolidasian	21%	12%	*As a percentage of total consolidated liabilities*

31. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***31. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

c. Kompensasi manajemen kunci

Personil manajemen kunci adalah Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan kunci Perusahaan. Kompensasi yang dibayar pada manajemen kunci dan persentase terhadap total beban kepegawaian adalah sebagai berikut:

c. Key management compensation

Key management personnel are the Board of Commissioners, Board of Directors and key employees of the Company. The compensation paid to key management and the percentage of total employee expenses is shown below:

	31 Desember/*December* 2024						
	Direksi/ *Board of Directors*		Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*		Personil manajemen kunci lainnya/ *Other key management personnel*		
	%	Rp	%	Rp	%	Rp	
Gaji, imbalan kerja, dan tunjangan lainnya	3.57	69,684	1.87	36,527	0.27	5,209	*Salaries, employee benefit and other allowances*
Jumlah	**3.57**	**69,684**	**1.87**	**36,527**	**0.27**	**5,209**	***Total***

	31 Desember/*December* 2023						
	Direksi/ *Board of Directors*		Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*		Personil manajemen kunci Dewan lainnya/ *Other key management personnel*		
	%	Rp	%	Rp	%	Rp	
Gaji, imbalan kerja, dan tunjangan lainnya	3.26	68,168	1.78	37,284	0.44	9,183	*Salaries, employee benefit and other allowances*
Jumlah	**3.26**	**68,168**	**1.78**	**37,284**	**0.44**	**9,183**	***Total***

32. LABA BERSIH PER SAHAM

Laba tahun berjalan per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan termasuk pelepasan saham treasuri Perusahaan yang dilakukan selama tahun berjalan (Catatan 23).

32. EARNINGS PER SHARE

Profit for the period per share is calculated by dividing the net income attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year, including the release of the Company's treasury shares made during the year (Note 23).

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	5,103,720	6,105,856	*Profit for the period attributable to owners of the parent entity*
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (lembar)	11,507,459,013	11,487,209,350	*Weighted average number of ordinary shares outstanding (number of shares)*
Laba bersih per saham dasar dan dilusian (nilai penuh)	444	532	*Basic and diluted earnings per share (full amount)*

Grup tidak memiliki efek yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The Group does not have any dilutive ordinary shares as at 31 December 2024 and 2023.

33. INFORMASI SEGMEN / *33. SEGMENT INFORMATION*

a. Aktivitas / *a. Activities*

Segmen utama dari bisnis Grup adalah bidang industri tambang batubara, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan, pemeliharaan fasilitas dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain.

Grup juga memiliki segmen bisnis lainnya, yaitu jasa kontraktor, pengolahan briket, perkebunan sawit, pengolahan sawit dan jasa kesehatan.

The main segment of the Group's business is coal mining activities, which includes general surveying, exploration, exploitation, processing, refining, transportation and trading, maintenance of special coal port facilities for internal and external needs, and operation of steam power plants for internal and external needs.

The Group also has other business segments, which are mining services, briquette processing, palm plantation and palm processing and health services.

b. Informasi segmen / *b. Segment information*

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya, manajemen menetapkan segmen Grup berdasarkan produk. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

Informasi menurut segmen yang merupakan segmen primer adalah sebagai berikut:

Based on the financial information used by the chief operating decision-maker in evaluating the performance of segments and in the allocation of resources, management considers the Group's segments based on the type of products. All transactions between segments have been eliminated.

Information concerning the segments that are considered the primary segments is as follows:

	31 Desember/*December* 2024					
	Batubara/ *Coal*	**Lainnya/ *Others***	**Jumlah sebelum eliminasi/ *Total before elimination***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Jumlah/ *Total***	
Pendapatan	42,090,520	4,474,936	46,565,456	(3,800,488)	42,764,968	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(34,141,848)	(3,849,224)	(37,991,072)	3,428,314	(34,562,758)	*Cost of revenue*
Laba bruto	**7,948,672**	**625,712**	**8,574,384**	**(372,174)**	**8,202,210**	***Gross profit***
Beban usaha	(3,254,591)	(310,193)	(3,564,784)	697,579	(2,867,205)	*Operating expenses*
Penghasilan/ (beban) lainnya, neto	298,378	5,598	303,976	13,437	317,413	*Other income/ (expenses), net*
Laba usaha	**4,992,459**	**321,117**	**5,313,576**	**338,842**	**5,652,418**	***Operating profit***
Penghasilan keuangan	226,436	23,747	250,183	-	250,183	*Finance income*
Biaya keuangan	(249,061)	(34,629)	(283,690)	-	(283,690)	*Finance costs*
Bagian atas keuntungan neto asosiasi dan ventura bersama	-	640,335	640,335	-	640,335	*Share in net profit profit of associates and joint ventures*
Laba sebelum pajak penghasilan	**4,969,834**	**950,570**	**5,920,404**	**338,842**	**6,259,246**	***Profit before income tax***
Beban pajak penghasilan	(1,357,459)	237,636	(1,119,823)	-	(1,119,823)	*Income tax expenses*
Laba tahun berjalan	**3,612,375**	**1,188,206**	**4,800,581**	**338,842**	**5,139,423**	***Profit for the year***
Aset segmen	42,517,501	2,709,648	45,227,149	(3,441,573)	41,785,576	***Segment assets***
Liabilitas segmen	18,840,097	2,496,125	21,336,222	(2,194,457)	19,141,764	***Segment liabilities***
Beban penyusutan dan amortisasi	1,338,346	458,686	1,797,032	-	1,797,032	*Depreciation and amortisation*
Penambahan aset tetap dan properti penambangan/ beban pengembangan tangguhan	1,485,384	606,164	2,091,548	-	2,091,548	*Additions to fixed assets and mining properties/ deferred development expenditure*

33. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

b. Informasi segmen (lanjutan)

Informasi menurut segmen yang merupakan segmen primer adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***33. SEGMENT INFORMATION** (continued)*

***b. Segment information** (continued)*

Information concerning the segments that are considered the primary segments is as follows: (continued)

	31 Desember/*December* 2023					
	Batubara/ *Coal*	**Lainnya/ *Others***	**Jumlah sebelum eliminasi/ *Total before elimination***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Jumlah/ *Total***	
Pendapatan	37,972,033	3,804,375	41,776,408	(3,287,541)	38,488,867	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(28,917,974)	(3,305,168)	(32,223,142)	2,891,580	(29,331,562)	*Cost of revenue*
Laba bruto	**9,054,059**	**499,207**	**9,553,266**	**(395,961)**	**9,157,305**	***Gross profit***
Beban usaha	(2,938,485)	(187,769)	(3,126,254)	533,257	(2,592,997)	*Operating expenses*
Penghasilan/ (beban) lainnya, neto	717,142	58,555	775,697	(137,296)	638,401	*Other income/ (expenses), net*
Laba usaha	**6,832,716**	**369,993**	**7,202,709**	**-**	**7,202,709**	***Operating profit***
Penghasilan keuangan	571,154	53,760	624,914	(40,575)	584,339	*Finance income*
Biaya keuangan	(161,868)	(82,745)	(244,613)	40,575	(204,038)	*Finance costs*
Bagian atas keuntungan neto asosiasi dan ventura bersama	-	571,303	571,303	-	571,303	*Share in net profit profit of associates and joint ventures*
Laba sebelum pajak penghasilan	**7,242,002**	**912,311**	**8,154,313**	**-**	**8,154,313**	***Profit before income tax***
Beban pajak penghasilan	(1,829,598)	(32,194)	(1,861,792)	-	(1,861,792)	*Income tax expenses*
Laba tahun berjalan	**5,412,404**	**880,117**	**6,292,521**	**-**	**6,292,521**	***Profit for the year***
Aset segmen	40,385,913	1,523,232	41,909,145	(3,143,956)	38,765,189	*Segment assets*
Liabilitas segmen	17,071,885	2,491,569	19,563,454	(2,361,461)	17,201,993	*Segment liabilities*
Beban penyusutan dan amortisasi	1,384,815	418,788	1,803,603	-	1,803,603	*Depreciation and amortisation*
Penambahan aset tetap dan properti penambangan/ beban pengembangan tangguhan	1,410,549	490,825	1,901,374	-	1,901,374	*Additions to fixed assets and mining properties/ deferred development expenditure*

	31 Desember/ *December 2024*	**31 Desember/ *December* 2023**	
Informasi penjualan menurut lokasi geografis:			***Sales information by geographic location:***
Indonesia	18,763,801	17,539,114	*Indonesia*
India	7,457,099	6,192,250	*India*
Vietnam	3,498,991	1,185,323	Vietnam
Korea	3,180,170	4,334,176	*Korea*
Bangladesh	1,898,423	1,102,000	*Bangladesh*
Thailand	1,773,389	765,090	*Thailand*
Tiongkok	1,651,128	3,041,885	*China*
Taiwan	1,177,254	720,488	*Taiwan*
Kamboja	1,131,744	1,416,057	*Cambodia*
Malaysia	1,052,135	390,699	*Malaysia*
Filipina	645,677	757,218	*Philippines*
Jepang	503,549	957,480	*Jepang*
Lainnya (masing-masing dibawah Rp250.000)	31,608	87,087	*Others (each below Rp250,000)*
Jumlah	**42,764,968**	**38,488,867**	***Total***

33. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

b. Informasi segmen (lanjutan)

Seluruh aset tidak lancar selain instrumen keuangan berada di Indonesia. Perusahaan tidak memiliki aset dan hak imbalan kerja yang muncul dari kontrak asuransi.

***33. SEGMENT INFORMATION** (continued)*

***b. Segment information** (continued)*

All non-current assets other than financial instruments are domiciled in Indonesia. The Company has no employment benefit assets and rights arising from insurance contracts.

34. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Berikut ini adalah kategori aset dan liabilitas keuangan dari Grup:

34. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The information given below relates to the Group's financial assets and liabilities by category:

	31 Desember/*December* 2024			
	Jumlah/ *Total*	**Biaya amortisasi/ *Amortised cost***	**Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya/ *Fair value through other comprehensive income***	
Aset keuangan				***Financial assets***
Kas dan setara kas	4,132,271	4,132,271	-	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha, neto	5,030,071	5,030,071	-	*Trade receivables, net*
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	425,767	-	425,767	*Financial assets at fair value through other comprehensive income*
Piutang lainnya dari pihak berelasi	29,005	29,005	-	*Other receivables related parties*
Deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun	242,355	242,355	-	*Time deposits with maturities more than 3 months and less than 1 year*
Aset lancar lainnya	348,384	348,384	-	*Other current asset*
Aset tidak lancar lainnya	303,645	303,645	-	*Other non current asset*
Jumlah aset keuangan	**10,511,498**	**10,085,731**	**425,767**	***Total financial assets***
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Utang usaha	(2,920,012)	(2,920,012)	-	*Trade payables*
Biaya yang masih harus dibayar	(4,770,233)	(4,770,233)	-	*Accrued expenses*
Pinjaman bank	(1,397,680)	(1,397,680)	-	*Bank borrowings*
Liabilitas sewa	(853,353)	(853,353)	-	*Lease liabilities*
Utang jangka pendek lainnya	(296,441)	(296,441)	-	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**(10,237,719)**	**(10,237,719)**	**-**	***Total financial liabilities***

34. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES *(continued)*

Berikut ini adalah kategori aset dan liabilitas keuangan dari Grup: (lanjutan)

The information given below relates to the Group's financial assets and liabilities by category: (continued)

	31 Desember/*December* 2023			
	Jumlah/ *Total*	**Biaya amortisasi/ *Amortised cost***	**Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya/ *Fair value through other comprehensive income***	
Aset keuangan				***Financial assets***
Kas dan setara kas	4,138,868	4,138,868	-	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha, neto	3,985,563	3,985,563	-	*Trade receivables, net*
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	875,330	-	875,330	*Financial assets at fair value through other comprehensive income*
Piutang lainnya dari pihak berelasi	18,683	18,683	-	*Other receivables related parties*
Deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun	541,818	541,818	-	*Time deposits with maturities more than 3 months and less than 1 year*
Aset lancar lainnya	295,435	295,435	-	*Other current asset*
Aset tidak lancar lainnya	370,805	370,805	-	*Other non current asset*
Jumlah aset keuangan	**10,226,502**	**9,351,172**	**875,330**	***Total financial assets***
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Utang usaha	(2,082,188)	(2,082,188)	-	*Trade payables*
Biaya yang masih harus dibayar	(4,857,830)	(4,857,830)	-	*Accrued expenses*
Pinjaman bank	(68,000)	(68,000)	-	*Bank borrowings*
Liabilitas sewa	(1,233,682)	(1,233,682)	-	*Lease liabilities*
Utang jangka pendek lainnya	(268,527)	(268,527)	-	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**(8,510,227)**	**(8,510,227)**	**-**	***Total financial liabilities***

35. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Grup memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut (dalam satuan penuh, kecuali jumlah setara Rupiah):

35. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

The Group has the following monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies (in full amounts, except Rupiah equivalent):

	31 Desember/*December* 2024					
	Dolar AS/ *US Dollars*	Dolar Singapura/ *Singapore Dollars*	Dolar Australia/ *Australian Dollars*	Euro/ *Euro*	Jumlah setara Rupiah/ *Rupiah equivalent*	
Aset						***Assets***
Kas di bank						*Cash in banks*
Pihak ketiga	79,783	-	-	-	1,289	*Third parties*
Pihak berelasi	8,766,464	-	-		141,640	*Related parties*
Deposito berjangka						*Time deposits*
Pihak berelasi	133,450,015	-	-	-	2,156,152	*Related parties*
Piutang usaha						*Trade receivables*
Pihak ketiga	110,934,485	412,954	-	-	1,797,290	*Third parties*
Pihak berelasi	5,078,789	-	-	-	82,058	*Related parties*
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	10,272,500	-	-	-	165,973	*Financial assets at fair value through other comprehensive income*
	268,582,036	**412,954**	**-**	**-**	**4,344,402**	
Liabilitas						***Liabilities***
Utang usaha						*Trade payables*
Pihak ketiga	(114,003)	-	-	(102,961)	(3,577)	*Third parties*
Pihak berelasi	(9,319,150)	-	-	-	(150,570)	*Related parties*
	(9,433,153)	-	-	(102,961)	(154,147)	
Aset neto	**259,148,883**	**412,954**	**-**	**(102,961)**	**4,190,255**	***Net assets***

35. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

35. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

Grup memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut (dalam satuan penuh, kecuali jumlah setara Rupiah): (lanjutan)

The Group has the following monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies (in full amounts, except Rupiah equivalent): (continued)

	31 Desember/*December* 2023					
	Dolar AS/ *US Dollars*	**Dolar Singapura/ *Singapore Dollars***	**Dolar Australia/ *Australian Dollars***	**Euro/ *Euro***	**Jumlah setara Rupiah/ *Rupiah equivalent***	
Aset						***Assets***
Kas di bank						*Cash in banks*
Pihak ketiga	324,173	-	-	-	5,005	*Third parties*
Pihak berelasi	43,878,554	-	52,574	155,055	680,654	*Related parties*
Deposito berjangka						*Time deposits*
Pihak ketiga	-	-	-	-	-	*Third parties*
Pihak berelasi	110,058,488	-	-	-	1,699,192	*Related parties*
Piutang usaha						*Trade receivables*
Pihak ketiga	98,140,424	1,889,573	-	-	1,537,321	*Third parties*
Pihak berelasi	-	-	-	-	-	*Related parties*
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	10,960,878	-	-	-	169,225	*Financial assets at fair value through other comprehensive income*
	263,362,517	**1,889,573**	**52,574**	**155,055**	**4,091,397**	
Liabilitas						***Liabilities***
Utang usaha						*Trade payables*
Pihak ketiga	(1,135)	-	-	(99,419)	(1,720)	*Third parties*
Pihak berelasi	(8,495,548)	-	-	-	(131,163)	*Related parties*
	(8,496,683)	-	-	(99,419)	(132,883)	
Aset neto	**254,865,834**	**1,889,573**	**52,574**	**55,636**	**3,958,514**	***Net assets***

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dijabarkan dengan menggunakan JISDOR dan kurs tengah mata uang asing pada tanggal di mana laporan keuangan konsolidasian diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan, maka aset neto dalam mata uang asing akan naik sekitar Rp111.787.

If the Group's assets and liabilities in foreign currencies as at 31 December 2024 had been translated using JISDOR and middle rates as at the date the consolidated financial statements were authorised for issue by the Board of Directors, the total net foreign currency assets of the Group would have increase by approximately Rp111,787.

36. INFORMASI ARUS KAS / *36. CASH FLOW INFORMATION*

a. Transaksi non-kas / *a. Non-cash transactions*

Tabel di bawah ini menunjukkan transaksi non-kas Grup selama tahun berjalan sebagai berikut:

The table below shows the Group's non-cash transactions during the year:

	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2023	
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas			***Non-cash activities***
Pembelian aset tetap melalui utang dan akrual	177,943	632,346	*Purchase of fixed assets through payables and accruals*
Penambahan properti pertambangan melalui penambahan provisi reklamasi dan penutupan tambang	269,537	500,651	*Addition of mining property through addition provision for environmental reclamation and mine closure*
Penambahan aset tetap melalui liabilitas sewa	412,182	368,638	*Addition of fixed assets through lease liabilities*

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan / *b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities*

	31 Desember/*December* 2024				
	1 Januari/ *January*	Penambahan/ *Addition*	Pembayaran/ *Payments*	31 Desember/ *December*	
Pinjaman bank	68,000	4,597,680	(3,268,000)	1,397,680	*Bank borrowings*
Liabilitas sewa	1,233,682	412,182	(792,511)	853,353	*Lease liabilities*
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	**1,301,682**	**5,009,862**	**(4,060,511)**	**2,251,033**	***Total liabilities from financing activities***

	31 Desember/*December* 2023				
	1 Januari/ *January*	Penambahan/ *Addition*	Pembayaran/ *Payments*	31 Desember/ *December*	
Pinjaman bank	2,240	68,000	(2,240)	68,000	*Bank borrowings*
Liabilitas sewa	1,359,962	347,071	(473,351)	1,233,682	*Lease liabilities*
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	**1,362,202**	**415,071**	**(475,591)**	**1,301,682**	***Total liabilities from financing activities***

37. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) ("BBRI") Tahun Buku 2024 tanggal 24 Maret 2025, mengangkat Farida Thamrin sebagai Direktur *Treasury and International Banking* BBRI. Dimana sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa anggota Direksi Perusahaan dilarang untuk merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMN lain, maka terhitung sejak penutupan RUPST BBRI Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2025, Farida Thamrin tidak menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perusahaan. Hal tersebut juga dipertegas dalam Surat yang disampaikan oleh Farida Thamrin kepada Perseroan Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Bukit Asam Tbk.

Selanjutnya, untuk efektivitas pelaksanaan pengurusan Perusahaan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan telah menetapkan Keputusan Dewan Komisaris No. 02/SK/PTBA-DEKOM/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 yang menunjuk Suherman (Direktur Sumber Daya Manusia) Perusahaan sebagai Pelaksana Tugas sementara Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko sampai ditetapkan lebih lanjut pejabat definitif dalam RUPS Perusahaan.

37. SIGNIFICANT EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BBRI") dated March 24, 2025, which appointed Farida Thamrin as Director of Treasury and International Banking of BBRI. Whereby pursuant to the provision of the Company's Articles of Association and Minister of SOE's Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on State-Owned Enterprise Organisation and Human Resources states that a member of Board of Directors of the Company is prohibited to have the concurrent position, therefore as of the closing of AGMS of BBRI for Financial Year of 2024 that convened on 24 March 2025, Farida Thamrin has not served as Director of Finance and Risk Management of the Company. It also states on a Letter that was submitted by Farida Thamrin to the Company concerning the Notification on Expiry of Term of Office as Director of Finance and Risk Management PT Bukit Asam Tbk.

Furthermore, for the effectiveness of the implementation of the Company's management, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, the Company's Board of Commissioners has enacted the Board of Commissioners Decree No. 02/SK/PTBA-DEKOM/III/2025 dated March 25, 2025, which appointed Suherman (Director of Human Resources) of the Company as the Acting Director of Finance and Risk Management until further determination of the definitive official in the Company's GMS.

38. OTORISASI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi untuk diterbitkan sesuai dengan resolusi Direksi Perusahaan tanggal 27 Maret 2025.

38. AUTHORISATION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

These consolidated financial statements were authorised for issuance in accordance with a resolution of the Board of Directors of the Company on 27 March 2025.

Halaman Ini sengaja di kosongkan
This page is intentionally blank

PT Bukit Asam Tbk

Jl. Parigi No. 1, Tanjung Enim
Muara Enim, Sumatera Selatan
Indonesia 31716

T +62-734-451 096, 452 352
F +62-734-451 095, 452 993
E corsec@bukitasam.co.id

www.ptba.co.id